SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II
PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2026, adalah sebagai berikut:
   a. bab I berisi Pendahuluan;
   b. bab II berisi Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
   c. bab III berisi Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
   d. bab IV berisi Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
   e. bab V berisi Penutup.

(2) Rincian sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagai berikut:
   a. lampiran I berisi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2026;
   b. lampiran II berisi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026;
   c. lampiran III berisi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2026;
   d. lampiran IV berisi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026;
   e. lampiran V berisi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026;
   f. lampiran VI berisi Renja Dinas Sosial Tahun 2026;
   g. lampiran VII berisi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026;
   h. lampiran VIII berisi Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026;
   i. lampiran IX berisi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026;
   j. lampiran X berisi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
   k. lampiran XI berisi Renja Dinas Pemberdayaan

l. lampiran XII berisi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026;
m. lampiran XIII berisi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;
n. lampiran XIV berisi Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026;
o. lampiran XV berisi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026;
p. lampiran XVI berisi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
q. lampiran XVII berisi Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;
r. lampiran XVIII berisi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2026;
s. lampiran XIX berisi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026;
t. lampiran XX berisi Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026;
u. lampiran XXI berisi Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2026;
v. lampiran XXII berisi Renja Badan Keuangan Daerah Tahun 2026;
w. lampiran XXIII berisi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026;
x. lampiran XXIV berisi Renja Inspektorat Daerah Tahun 2026;
y. lampiran XXV berisi Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026;
z. lampiran XXVI berisi Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026;
aa. lampiran XXVII berisi Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026;
bb. lampiran XXVIII berisi Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026;
cc. lampiran XXIX berisi Renja Kecamatan Matesih Tahun 2026;
dd. lampiran XXX berisi Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026;
ee. lampiran XXXI berisi Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026;
ff. lampiran XXXII berisi Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026;
gg. lampiran XXXIII berisi Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026;
hh. lampiran XXXIV berisi Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026;
ii. lampiran XXXV berisi Renja Kecamatan Jaten Tahun 2026;
jj. lampiran XXXVI berisi Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2026;
kk. lampiran XXXVII berisi Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026;
ll. lampiran XXXVIII berisi Renja Kecamatan Mojogedang

nn. lampiran XL berisi Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2026;
oo. lampiran XLI berisi Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026; dan
pp. lampiran XLII berisi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026.

(2) Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesusai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 19760417 199903 2 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Karanganyar Tahun 2026. Rencana Kerja ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, September 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NUGROHO, S.Sos., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 196807051990011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-2
1.4. Sistematika I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISDIKBUD TAHUN 2025 TRIWULAN II (SEMESTERI) II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun 2025Triwulan II (Semester I)..... II-1
2.2. Analisis Kinerja DISDIKBUD II-32
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISDIKBUD II-71
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran..... III-5
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah III-10
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD..... III-10
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
4.1. Perumusan Program dan Kegiatan serta Target Kinerja IV-1
4.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan IV-1
BAB V PENUTUP..... V-1
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja V-1
5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025	II-2
Tabel 2.2	Realisasi APBD di DISDIKBUD Tahun 2024 dan 2025 (TW II).....	II-14
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-27
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-28
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024.....	II-28
Tabel 2.6	Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024.....	II-29
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023	II-30
Tabel 2.8	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)	II-31
Tabel 2.9	Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2026 (Akhir)	II-31
Tabel 2.10	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar.....	II-33
Tabel 2.11	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar	II-75
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-8
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD	III-11
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III-12
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar	IV-9
Tabel 4.2	Target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci DISDIKBUD	IV-145
Tabel 4.3	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan DISDIKBUD yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar.....	IV-145

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat memberikan kontribusi nyata di Kabupaten Karanganyar tahun 2026.

Renja Organisasi Perangkat Daerah adalah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dibidang pendidikan. Penyusunan rancangan Renja OPD perlu disusun secara paralel dengan menyusun rancangan awal RKPD, dengan mengevaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Renstra OPD mempunyai kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi dan memperhatikan pada capaian sasaran pelaksanaan dan capaian kinerja agar melebihi sasaran Renstra pada tingkat provinsi. Dengan upaya meningkatkan capaian sasaran dan capaian kinerja di Bidang Pendidikan khususnya maka akan terwujud Renja 2026 yang terkontrol dan terencana dengan baik sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

Dokumen Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah: Menyusun rencana, langkah, tindakan, dan strategi yang akan ditempuh dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu satu Tahun Anggaran.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan anggaran pembangunan bidang pendidikan yang akan dicapai dalah kurun waktu satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Disparpora, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunanRenja.

1.4. Sistematika Penulisan
Memuat penjelasan tentang pokok bahasan dalam Renja dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2024 yang dilengkapi dengan visual hasilnya

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam dan hasil reses / aspirasi DPRD)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah
Memuat tantangan dan peluang yang ada di dalam perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan
Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 serta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan penutup berupa catatan penting yan gperlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sistem perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; Tahap 2: Merumuskan keadaan sekarang/saat ini, Tahap 3: Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, Tahap 4: Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimilik serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISDIKBUD Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Baperlitbang Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk diljadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 DISDIKBUD telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	638.572.538.995,00	638.572.538.995,00	100,00	627.759.000.907	642.599.151.647	102,36
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.294.804.200	1.294.804.200	100,00	953.625.000	820.798.740	86,07
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	816.500.450	816.500.450	100,00	587.504.450	628.742.540	107,02
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	97.135.400	97.135.400	100,00	59.271.250	20.282.600	34,22
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	37.133.000	37.133.000	100,00	32.491.050	10.000.300	30,78
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	218.620.550	218.620.550	100,00	168.139.000	105.554.050	62,78
5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.414.800	125.414.800	100,00	106.219.250	56.219.250	52,93
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	631.222.640.660,00	631.222.640.660,00	100,00	621.707.910.907	636.239.042.907	102,34
6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	630.483.383.660	630.483.383.660	100,00	621.057.910.907	635.589.042.907	102,34
7)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.047.000,00	323.047.000,00	100,00	257.669.000	257.669.000	100,00
8)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	75.299.000	75.299.000	100,00
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	62.000.000	62.000.000	100,00
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.660.000,00	66.660.000,00	100,00	19.410.000	19.410.000	100,00

11)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.460.000,00	25.460.000,00	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00
12)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	179.090.000,00	179.090.000,00	100,00	180.622.000	180.622.000	100,00
13)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	391.240.000,00	391.240.000,00	100,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
14)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	205.220.000,00	205.220.000,00	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
15)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	135.520.000,00	135.520.000,00	100,00	135.000.000	156.454.000	115,89
16)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	125.000.000	103.546.000	82,84
17)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.524.191.000,00	1.524.191.000,00	100,00	1.497.959.000,00	1.728.299.000,00	115,38
18)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.464.096.000	1.464.096.000	100,00	1.441.964.000	1.672.304.000	115,97
19)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.095.000	60.095.000	100,00	55.995.000	55.995.000	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.974.942.300,00	1.974.942.300,00	100,00	1.492.885.250,00	1.489.116.250,00	99,75
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.079.300,00	68.079.300,00	100,00	69.402.450	69.402.450	100,00
21)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.924.000,00	118.924.000,00	100,00	112.704.000	112.689.000	99,99
22)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	441.220.000,00	441.220.000,00	100,00	357.420.000	335.270.000	93,80
23)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.681.500,00	104.681.500,00	100,00	99.957.650	98.353.650	98,40
24)	Penyediaan Bahan/Material	321.220.000,00	321.220.000,00	100,00	312.483.650	312.483.650	100,00
25)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.750.000,00	40.750.000,00	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00
26)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584.725.000	584.725.000	100,00	406.690.000	406.690.000	100,00

27)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	106.142.000	106.142.000	100,00	5.027.500	5.027.500	100,00
28)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	189.200.500	189.200.500	100,00	119.200.000	139.200.000	116,78
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.800.000,00	329.800.000,00	100,00	16.000.000,00	9.000.000,00	56,25
29)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.200.000	235.200.000	100,00	7.000.000	-	0,00
30)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.600.000	94.600.000	100,00	9.000.000	9.000.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.700.000,00	888.700.000,00	100,00	661.959.200,00	830.559.200,00	125,47
31)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.459.200	7.459.200	100,00
32)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	631.500.000	631.500.000	100,00	654.500.000	673.100.000	102,84
33)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000	250.000.000	100,00	-	150.000.000	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.220.835,00	946.220.835,00	100,00	1.128.661.550,00	1.182.335.550,00	104,76
34)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.098.000	349.098.000	100,00	294.423.300	319.811.300	108,62
35)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.725.000	106.725.000	100,00	96.238.250	107.524.250	111,73
36)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				-	20.000.000	-
37)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.397.835	490.397.835	100,00	738.000.000	735.000.000	99,59
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	218.137.778.365	218.227.778.365	100,04	173.635.930.347	165.497.409.607	95,31
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	218.072.178.365	218.162.178.365	100,04	173.601.130.347	165.459.689.607	95,31
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	116.902.641.412,00	117.002.641.412,00	100,09	95.429.386.212,00	83.094.239.000,00	87,07

38)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			-	1.250.000.000		0,00
39)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.231.420.000	2.231.420.000	100,00	1.541.900.000		0,00
40)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	808.260.000	808.260.000	100,00	1.100.000.000		0,00
41)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.736.198.650	1.736.198.650	100,00	800.000.000	445.000.000	55,63
42)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	633.434.000	633.434.000	100,00	1.100.000.000		0,00
43)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	242.004.000,00	242.004.000,00	100,00	250.000.000		0,00
44)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	709.757.000,00	709.757.000,00	100,00	300.000.000		0,00
45)	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			-	15.078.027.000		0,00
46)	Pengadaan Mebel Sekolah	2.941.500.000,00	2.941.500.000,00	100,00	250.000.000		0,00
47)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	300.000.000		0,00
48)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	22.953.500,00	22.953.500,00	100,00	45.000.000	45.000.000	100,00
49)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	100,00	900.000.000	2.132.000.000	236,89
50)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	523.212.000	523.212.000	100,00	619.000.000	557.060.000	89,99
51)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.201.500.000	10.201.500.000	100,00	10.430.002.400	18.730.002.400	179,58
52)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	383.272.300,00	383.272.300,00	100,00	368.177.100	306.834.600	83,34
53)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.381.080.350	1.381.080.350	100,00	139.089.150	466.528.000	335,42
54)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.690.400.312,00	56.690.400.312,00	100,00	56.690.400.312	55.526.150.000	97,95
55)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	164.600.200,00	164.600.200,00	100,00			-

56)	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4.974.960.000,00	4.974.960.000,00	100,00	500.000.000		0,00
57)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	268.288.000,00	268.288.000,00	100,00	700.000.000		0,00
58)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar			-		61.342.500	-
59)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.759.000,00	15.759.000,00	100,00	40.764.000	40.764.000	100,00
60)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.443.842.500	1.443.842.500	100,00		21.015.500	-
61)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.440.000	44.440.000	100,00	135.000.000	81.594.500	60,44
62)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	140.110.000	140.110.000	100,00	40.026.750	38.826.750	97,00
63)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.395.000	100.395.000	100,00	36.999.500	31.723.150	85,74
64)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.189.600	15.189.600	100,00		36.999.500	-
65)	Penyediaan infrastruktur TIK	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00			-
66)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00		25.450.100	-
67)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00		200.000.000	-
68)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.245.610.000,00	2.345.610.000,00	104,45	900.000.000	505.000.000	56,11
69)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.397.507.000,00	1.397.507.000,00	100,00	600.000.000	150.000.000	25,00
70)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	74.280.000,00	74.280.000,00	100,00		19.698.000	-
71)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	77.740.000	77.740.000	100,00	115.000.000	123.250.000	107,17

72)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	23.700.428.000,00	23.700.428.000,00	100,00	1.200.000.000	3.550.000.000	295,83
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66.807.302.000,00	66.797.302.000,00	99,99	47.532.256.160,00	50.609.399.830,00	106,47
73)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	185.000.000,00	185.000.000,00	100,00	185.000.000		0,00
74)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	-	300.000.000		0,00
75)	Pembangunan Laboratorium	1.257.500.000,00	1.257.500.000,00	100,00	1.257.500.000		0,00
76)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	495.000.000,00	495.000.000,00	100,00	295.000.000	790.000.000	267,80
77)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.338.880.000,00	14.338.880.000,00	100,00	1.828.880.000		0,00
78)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			-	100.000.000		0,00
79)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			-	150.000.000		0,00
90)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	216.020.000,00	216.020.000,00	100,00	216.020.000		0,00
91)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	892.392.000,00	882.392.000,00	98,88	600.000.000	1.445.000.000	240,83
92)	Pengadaan Mebel Sekolah	230.000.000,00	230.000.000,00	100,00			-
93)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	54.132.000,00	54.132.000,00	100,00	54.132.000	54.132.000	100,00
94)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.638.475.000	5.638.475.000	100,00	500.000.000	468.000.000	93,60
95)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	384.100.000	384.100.000	100,00	467.000.000	467.000.000	100,00
96)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.281.760.000	4.281.760.000	100,00	3.074.661.760	9.235.207.830	300,37
97)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	673.765.000	673.765.000	100,00	490.000.000	385.868.000	78,75

98)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.971.000	454.971.000	100,00	59.695.400	68.224.000	114,29
99)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.611.268.000,00	36.611.268.000,00	100,00	36.611.268.000	36.662.968.000	100,14
100)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.305.000,00	75.305.000,00	100,00	75.305.000	75.305.000	100,00
101)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	72.660.000	72.660.000	100,00	75.000.000	75.000.000	100,00
102)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	46.910.000	46.910.000	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
103)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.000.000	36.000.000	100,00	36.000.000	36.000.000	100,00
104)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.520.000	37.520.000	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00
105)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.710.000	45.710.000	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
106)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	424.965.000	424.965.000	100,00	361.695.000	361.695.000	100,00
107)	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-	300.000.000		0,00
108)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	144.870.000	144.870.000	100,00	150.000.000	150.000.000	100,00
109)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			-		200.000.000	-
110)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.099.000,00	210.099.000,00	100,00	210.099.000		0,00
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.106.638.953	22.106.638.953	100,00	19.660.112.900	20.574.450.777	104,65
111)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.382.611.000	2.382.611.000	100,00	963.736.000	595.000.000	61,74
112)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	120.000.000	120.000.000	100,00			-
113)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	31.764.200	31.764.200	100,00	28.398.200	33.584.997	118,26

114)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	814.529.000	814.529.000	100,00	374.864.000	1.442.911.000	384,92
115)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	342.493.100	342.493.100	100,00	114.137.800	95.657.800	83,81
116)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	209.738.400	209.738.400	100,00		181.600.000	-
117)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.605.610.303	1.605.610.303	100,00	1.500.000.000	1.705.128.000	113,68
118)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	37.405.000	37.405.000	100,00	207.081.600	61.723.680	29,81
119)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.120.200.000	16.120.200.000	100,00	16.120.200.000	15.745.200.000	97,67
120)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			-	29.021.000	22.281.000	76,78
121)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			-		60.000.000	-
122)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000	10.000.000	100,00	21.224.000	20.824.000	98,12
123)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.497.650	25.497.650	100,00	28.590.700	28.590.700	100,00
124)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	127.130.000	127.130.000	100,00	85.251.000	15.000.000	17,60
125)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	48.000.000	48.000.000	100,00	24.000.000	42.600.000	177,50
126)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	22.453.000	22.453.000	100,00	45.000.000	82.866.000	184,15
127)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.873.600	31.873.600	100,00	49.599.000	79.599.000	160,49
128)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	99.160.700	99.160.700	100,00	30.873.600	37.123.600	120,24
129)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	37.313.000	37.313.000	100,00			-
130)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	40.860.000	40.860.000	100,00	38.136.000	324.761.000	851,59
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.255.596.000	12.255.596.000	100,00	10.979.375.075	11.181.600.000	101,84
131)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	980.951.000	980.951.000	100,00			-

132)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	100.000.000	100.000.000	100,00	302.275.075		0,00
133)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	75.000.000	100,00	90.000.000	90.000.000	100,00
134)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.985.000.000	2.985.000.000	100,00	2.900.000.000	2.840.000.000	97,93
135)	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.247.100.000	7.247.100.000	100,00	7.247.100.000	7.567.000.000	104,41
136)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.000.000	35.000.000	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00
137)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	47.545.000	47.545.000	100,00			-
138)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.000.000	40.000.000	100,00	40.000.000	40.000.000	100,00
139)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30.000.000	30.000.000	100,00	35.000.000	35.000.000	100,00
140)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			-	27.500.000	27.500.000	100,00
141)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	65.000.000	65.000.000	100,00	75.000.000	75.000.000	100,00
142)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000	25.000.000	100,00	10.000.000	10.000.000	100,00
143)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000	15.000.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00
144)	Penyediaan infrastruktur TIK			-	14.400.000	14.400.000	100,00
145)	Penataan Ruang/Sudut Baca			-	12.500.000	11.500.000	92,00
146)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	90.000.000	90.000.000	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
147)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200.000.000	200.000.000	100,00			-
148)	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-		100.000.000	-
149)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000	100.000.000	100,00			-

150)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.000.000	65.000.000	100,00	70.000.000	115.600.000	165,14
151)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	90.000.000	90.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
152)	Pengadaan Mebel Sekolah			-	35.600.000	35.600.000	100,00
153)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.000.000	15.000.000	100,00		100.000.000	-
154)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	50.000.000	50.000.000	100,00			-
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	50.000.000	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
155)	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.600.000	15.600.000	100,00	9.800.000	12.720.000	129,80
14	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.600.000	15.600.000	100,00	9.800.000	12.720.000	129,80
156)	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.600.000	15.600.000	100,00	9.800.000	12.720.000	129,80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.839.568.000	4.664.568.000	96,38	1.978.000.000	3.708.000.000	187,46
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.886.568.000	2.711.568.000	93,94	373.000.000	2.418.000.000	648,26
15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	156.568.000	156.568.000	100,00	365.000.000	680.000.000	186,30
157)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				365.000.000	680.000.000	186,30

158)	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	156.568.000	156.568.000	100,00			-
16	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.685.000.000	2.510.000.000	93,48	8.000.000	1.738.000.000	21725,00
159)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.685.000.000	2.510.000.000	93,48	8.000.000	1.738.000.000	21725,00
17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	45.000.000	100,00	-	-	-
160)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	45.000.000	45.000.000	100,00	-	-	-
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.832.000.000	1.829.800.000	99,88	1.415.000.000	1.090.000.000	77,03
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.832.000.000	1.829.800.000	99,88	1.415.000.000	1.090.000.000	77,03
161)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.832.000.000	1.829.800.000	99,88	1.415.000.000	1.090.000.000	77,03
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	121.000.000	123.200.000	101,82	190.000.000	200.000.000	105,26
19	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	121.000.000	123.200.000	101,82	190.000.000	200.000.000	105,26
162)	Pengembangan Cagar Budaya	121.000.000	123.200.000	101,82	190.000.000	200.000.000	105,26
		861.549.885.360	861.464.885.360	99,99	803.372.931.254	811.804.561.254	101,05

Sumber : DISDIKBUD, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di DISDIKBUD untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 99,99%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 101,05%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi APBD di DISDIKBUD Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	638.572.538.995,00	619.258.346.860,00	96,98	641.852.650.107	286.487.930.829	44,63
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.294.804.200	1.210.063.200	93,46	587.139.260	103.278.450	17,59
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	816.500.450	748.383.450	91,66	486.868.410	58.200.700	11,95
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	97.135.400	92.699.400	95,43	3.044.250	-	0,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	37.133.000	37.133.000	100,00	8.156.450	2.500.000	30,65
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	218.620.550	206.432.550	94,43	59.470.950	42.577.750	71,59
5)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.414.800	125.414.800	100,00	29.599.200	-	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	631.222.640.660,00	612.136.840.022,00	96,98	636.012.596.297	284.130.455.384	44,67
6)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	630.483.383.660	611.438.321.772	96,98	635.589.042.907	284.008.563.270	44,68
7)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	323.047.000,00	305.088.250,00	94,44	165.957.500	42.966.500	25,89
8)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.000.000,00	69.410.000,00	92,55	48.563.450	19.908.800	41,00
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50.000.000,00	48.528.000,00	97,06	42.816.250	-	0,00
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	66.660.000,00	63.410.000,00	95,12	14.725.000	1.000.000	6,79

11)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	25.460.000,00	24.810.000,00	97,45	28.431.250	-	0,00
12)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	179.090.000,00	167.312.000,00	93,42	106.555.140	58.016.814	54,45
13)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	19.960.000,00	99,80	16.504.800	-	0,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	391.240.000,00	366.451.000,00	93,66	182.634.700,00	18.249.900,00	9,99
14)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	205.220.000,00	196.624.000,00	95,81	10.260.550	-	0,00
15)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	135.520.000,00	119.992.000,00	88,54	89.879.300	-	0,00
16)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.500.000,00	30.425.000,00	99,75	64.807.750	5.750.000	8,87
17)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	19.410.000,00	97,05	17.687.100	12.499.900	70,67
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.524.191.000,00	1.516.523.485,00	99,50	1.621.636.000,00	1.082.186.000,00	66,73
18)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.464.096.000	1.458.348.485	99,61	1.621.304.000	1.082.186.000	66,75
19)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60.095.000	58.175.000	96,81	332.000	-	0,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.974.942.300,00	1.937.675.130,00	98,11	1.151.749.100,00	725.624.420,00	63,00
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.079.300,00	64.881.800,00	95,30	69.402.450	66.029.200	95,14
21)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	118.924.000,00	115.149.200,00	96,83	112.689.000	73.108.000	64,88
22)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	441.220.000,00	437.675.000,00	99,20	268.170.000	181.030.000	67,51
23)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	104.681.500,00	100.579.900,00	96,08	78.681.300	33.517.100	42,60
24)	Penyediaan Bahan/Material	321.220.000,00	312.305.550,00	97,22	312.483.650	285.267.800	91,29
25)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.750.000,00	40.750.000,00	100,00	8.000.000	1.000.000	12,50
26)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584.725.000	581.525.300	99,45	203.045.000	56.345.800	27,75

27)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	106.142.000	99.652.000	93,89	77.700	-	0,00
28)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	189.200.500	185.156.380	97,86	99.200.000	29.326.520	29,56
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.800.000,00	322.125.000,00	97,67	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
29)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.200.000	228.525.000	97,16	-	-	-
30)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.600.000	93.600.000	98,94	9.000.000	9.000.000	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	888.700.000,00	835.559.423,00	94,02	1.180.559.200,00	208.523.275,00	17,66
31)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.459.200	3.000.000	40,22
32)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	631.500.000	580.859.423	91,98	673.100.000	205.523.275	30,53
33)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.000.000	247.500.000	99,00	500.000.000	-	-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.220.835,00	933.109.600,00	98,61	1.107.335.550,00	210.613.400,00	19,02
34)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	349.098.000	347.380.500	99,51	319.811.300	124.028.000	38,78
35)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.725.000	104.993.000	98,38	107.524.250	39.644.000	36,87
36)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				20.000.000	-	-
37)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.397.835	480.736.100	98,03	660.000.000	46.941.400	7,11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	218.535.737.165	216.454.108.849	99,05	164.027.174.147	65.104.395.489	39,69
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	218.470.137.165	216.393.434.849	99,05	164.006.527.347	65.102.495.489	39,70
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	117.310.600.212,00	116.145.831.020,00	99,01	82.765.415.410,00	33.813.860.770,00	40,86

39)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	2.231.420.000	2.199.404.000	98,57			-
40)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	808.260.000	790.966.400	97,86			-
41)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.736.198.650	1.715.712.000	98,82	445.000.000	-	0,00
42)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	633.434.000	614.175.000	96,96			-
43)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	242.004.000,00	237.939.444,00	98,32			-
44)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	709.757.000,00	696.177.000,00	98,09			-
46)	Pengadaan Mebel Sekolah	2.941.500.000,00	2.812.448.400,00	95,61			-
47)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	49.957.000,00	99,91			-
48)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	22.953.500,00	18.122.500,00	78,95	43.197.300	3.703.900	8,57
49)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.250.000.000,00	3.124.000.000,00	96,12	2.132.000.000	394.050.000	18,48
50)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	523.212.000	507.011.000	96,90	464.952.600	-	0,00
51)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.201.500.000	10.189.793.640	99,89	18.697.961.210	9.142.248.880	48,89
52)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	383.272.300,00	373.239.650,00	97,38	182.453.600	-	0,00
53)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.381.080.350	1.207.331.600	87,42	403.627.900	3.427.350	0,85
54)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	56.690.400.312,00	56.690.189.193,00	100,00	55.526.150.000	24.048.170.040	43,31
55)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	164.600.200,00	163.168.200,00	99,13			-
56)	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4.974.960.000,00	4.899.918.900,00	98,49			-
57)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	268.288.000,00	258.506.000,00	96,35			-

58)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar			-	24.600.000	-	-
59)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	15.759.000,00	15.759.000,00	100,00	20.484.000	-	0,00
60)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1.751.801.300	1.671.707.716	95,43	3.163.400	3.163.400	-
61)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.440.000	39.475.000	88,83	45.925.600	-	0,00
62)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	140.110.000	138.887.000	99,13	37.253.400	-	0,00
63)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.395.000	89.538.000	89,19	58.654.900	-	0,00
64)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	15.189.600	13.734.100	90,42	22.927.500	-	-
65)	Penyediaan infrastruktur TIK	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00			-
66)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	17.322.100	-	-
67)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	400.000.000,00	392.758.000,00	98,19	200.000.000	197.257.000	98,63
68)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.345.610.000,00	2.278.072.000,00	97,12	505.000.000	-	0,00
69)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.397.507.000,00	1.364.719.981,00	97,65	150.000.000	-	0,00
70)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	74.280.000,00	70.160.000,00	94,45	15.948.000	-	-
71)	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	77.740.000	75.403.000	96,99	78.793.900	21.840.200	27,72
72)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	23.700.428.000,00	23.413.057.296,00	98,79	3.690.000.000	-	0,00
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66.797.302.000,00	66.315.894.796,00	99,28	50.155.966.980,00	19.942.432.466,00	39,76

73)	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	185.000.000,00	178.927.000,00	96,72			-
74)	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	-			-
75)	Pembangunan Laboratorium	1.257.500.000,00	1.203.748.000,00	95,73			-
76)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	495.000.000,00	485.888.000,00	98,16	790.000.000	-	0,00
77)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	14.338.880.000,00	14.245.429.000,00	99,35			-
90)	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	216.020.000,00	200.509.000,00	92,82			-
91)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	882.392.000,00	861.080.000,00	97,58	1.445.000.000	-	0,00
92)	Pengadaan Mebel Sekolah	230.000.000,00	215.125.000,00	93,53			-
93)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	54.132.000,00	52.019.500,00	96,10	28.694.600	-	0,00
94)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.638.475.000	5.528.680.000	98,05	468.000.000	197.136.000	42,12
95)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	384.100.000	368.704.400	95,99	272.707.000	11.795.900	4,33
96)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.281.760.000	4.265.065.096	99,61	9.232.933.980	4.055.691.840	43,93
97)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	673.765.000	642.328.300	95,33	300.924.750	137.350.000	45,64
98)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	454.971.000	435.147.000	95,64	63.263.050	-	0,00
99)	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	36.611.268.000,00	36.565.400.000,00	99,87	36.655.230.900	15.235.178.626	41,56
100)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75.305.000,00	74.305.000,00	98,67	75.305.000	74.005.000	98,27
101)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	72.660.000	70.120.000	96,50	50.612.500	-	0,00

102)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	46.910.000	45.565.000	97,13	42.557.200	-	0,00
103)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.000.000	35.992.500	99,98	36.000.000	-	0,00
104)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	37.520.000	35.980.000	95,90	29.854.650	-	0,00
105)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45.710.000	45.575.000	99,70	32.974.000	-	0,00
106)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	424.965.000	416.216.000	97,94	347.244.950	35.067.100	10,10
107)	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-			-
108)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	144.870.000	140.498.000	96,98	84.664.400	-	0,00
109)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			-	200.000.000	196.208.000	98,10
110)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	210.099.000,00	203.593.000,00	96,90			-
11	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.106.638.953	21.888.115.516	99,01	20.141.240.357	6.893.879.785	34,23
111)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.382.611.000	2.373.027.000	99,60	595.000.000	-	0,00
112)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	120.000.000	115.328.000	96,11			-
113)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	31.764.200	21.770.000	68,54	20.634.997	5.473.450	26,53
114)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	814.529.000	790.648.550	97,07	1.442.911.000	-	0,00
115)	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	342.493.100	307.276.950	89,72	57.491.230	1.820.000	3,17
116)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	209.738.400	201.751.900	96,19	110.405.000	-	0,00
117)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.605.610.303	1.589.133.940	98,97	1.598.030.080	-	0,00
118)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	37.405.000	35.940.000	96,08	29.801.540	-	0,00
119)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.120.200.000	16.048.287.676	99,55	15.745.200.000	6.863.611.335	43,59

120)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			-	9.417.800	-	0,00
121)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			-	60.000.000	-	-
122)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10.000.000	8.900.000	89,00	11.883.050	-	0,00
123)	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	25.497.650	24.337.200	95,45	18.710.000	1.575.000	8,42
124)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	127.130.000	112.776.000	88,71	7.065.450	-	0,00
125)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	48.000.000	47.300.000	98,54	42.600.000	20.470.000	48,05
126)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	22.453.000	22.313.000	99,38	65.406.250	-	0,00
127)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	31.873.600	31.723.600	99,53	70.472.630	930.000	1,32
128)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	99.160.700	84.418.700	85,13	30.314.600	-	0,00
129)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	37.313.000	32.323.000	86,63			-
130)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	40.860.000	40.860.000	100,00	225.896.730	-	0,00
12	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.255.596.000	12.043.593.517	98,27	10.943.904.600	4.452.322.468	40,68
131)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	980.951.000	957.379.000	97,60			-
132)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	100.000.000	94.022.000	94,02			-
133)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.000.000	70.340.000	93,79	49.152.960	46.148.700	93,89
134)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.985.000.000	2.950.346.000	98,84	2.819.009.940	2.688.500.000	95,37
135)	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.247.100.000	7.179.889.517	99,07	7.567.000.000	1.701.998.768	22,49

136)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	35.000.000	29.406.000	84,02	22.417.050	4.950.000	22,08
137)	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	47.545.000	47.075.000	99,01			-
138)	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	40.000.000	34.024.000	85,06	24.712.350	4.880.000	19,75
139)	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30.000.000	25.170.000	83,90	19.692.450	-	0,00
140)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			-	20.586.000	-	0,00
141)	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	65.000.000	60.130.000	92,51	41.500.350	3.425.000	8,25
142)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25.000.000	23.720.000	94,88	7.225.200	-	0,00
143)	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000	13.908.000	92,72	9.544.800	-	0,00
144)	Penyediaan infrastruktur TIK			-	14.323.000	-	0,00
145)	Penataan Ruang/Sudut Baca			-	6.805.000	-	0,00
146)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	90.000.000	89.950.000	99,94	15.693.400	-	0,00
147)	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200.000.000	196.902.000	98,45			-
148)	Pembangunan Ruang Kelas Baru			-	100.000.000	-	-
149)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000	100.000.000	100,00			-
150)	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	65.000.000	61.190.000	94,14	60.300.000	-	0,00
151)	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	90.000.000	45.142.000	50,16	30.342.100	2.420.000	7,98
152)	Pengadaan Mebel Sekolah				35.600.000	-	0,00
153)	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.000.000	15.000.000	100,00	100.000.000	-	-
154)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	50.000.000	50.000.000	100,00			-
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	45.274.000	90,55	14.286.800	-	0,00

13	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	45.274.000	90,55	14.286.800	-	0,00
155)	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	45.274.000	90,55	14.286.800	-	0,00
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.600.000	15.400.000	98,72	6.360.000	1.900.000	29,87
14	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.600.000	15.400.000	98,72	6.360.000	1.900.000	29,87
156)	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	15.600.000	15.400.000	98,72	6.360.000	1.900.000	29,87
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.664.568.000	4.618.161.200	99,01	3.239.488.000	723.899.200	22,35
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.711.568.000	2.709.500.000	99,92	2.083.731.600	231.294.100	11,10
15	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	156.568.000	154.560.000	98,72	348.249.200	169.160.600	48,57
157)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				348.249.200	169.160.600	48,57
158)	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	156.568.000	154.560.000	98,72			-
16	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.510.000.000	2.510.000.000	100,00	1.735.482.400	62.133.500	3,58
159)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.510.000.000	2.510.000.000	100,00	1.735.482.400	62.133.500	3,58

17	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	44.940.000	99,87	-	-	-
160)	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	45.000.000	44.940.000	99,87	-	-	-
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.829.800.000	1.785.828.200	97,60	968.251.100	393.618.100	40,65
18	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.829.800.000	1.785.828.200	97,60	968.251.100	393.618.100	40,65
161)	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.829.800.000	1.785.828.200	97,60	968.251.100	393.618.100	40,65
7	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	123.200.000	122.833.000	99,70	187.505.300	98.987.000	52,79
19	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	123.200.000	122.833.000	99,70	187.505.300	98.987.000	52,79
162)	Pengembangan Cagar Budaya	123.200.000	122.833.000	99,70	187.505.300	98.987.000	52,79
		861.772.844.160	840.330.616.909	97,51	809.119.312.254	352.316.225.518	43,54

Sumber : DISDIKBUD, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 861.772.844.160 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 840.330.616.909 atau 97,51 %. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 352.316.225.518 atau 43,54% dari pagu anggaran Rp. 809.119.312.254.

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	604.552.728.994	590.707.908.762	97,71	638.572.538.995	619.258.346.860	96,98
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	198.150.634.824	193.532.736.822	97,67	218.470.137.165	216.393.434.849	99,05
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0	0	-	50.000.000	45.274.000	90,55

4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000	10.000.000	100,00	15.600.000	15.400.000	98,72
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.817.359.800	1.814.155.800	99,82	2.711.568.000	2.709.500.000	99,92
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.554.380.000	2.541.895.000	99,51	1.829.800.000	1.785.828.200	97,60
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	40.000.000	39.627.500	99,07	-	-	-
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	32.000.000	28.210.000	88,16	123.200.000	122.833.000	99,70
		807.157.103.618	788.674.533.884	97,71	861.772.844.160	840.330.616.909	97,51

Sumber : DISDIKBUD, 2025 diolah

Berdasarkan serapan anggaran tahun sebelumnya, belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut BAPERLITBANG perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja Baperlitbang dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Capaian	Kinerja
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
1		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,5	13,73	101,70
2		Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	8,45	9,26	109,59
	Pertumbuhan Ekonomi					
1		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	72	72	100

		Terlestarikannya Cagar Budaya	%			
	Indek Reformasi Birokrasi					
1		Nilai SAKIP OPD	Nilai	78	75,50	96,79

Indikator kinerja kunci yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2024 terealisasi sebagai berikut:

a. Angka Harapan lama Sekolah target 13,5 terealisasi sebesar 13,73.
b. Angka Rata-rata lama Sekolah target 8,45 terealisasi sebesar 9,26.
c. Indeks Pembangunan Kebudayaan target 72 terealisasi sebesar 72.
d. Nilai SAKIP target 78 terealisasi sebesar 75,5.

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja kunci (IKK) DISDIKBUD di Tahun 2024, sebagai berikut:

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja
			2024	2024	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	98,95	98,95
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100,00
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100,00
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100,00

Sedangkan untuk capaian program di DISDIKBUD tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	638.572.538.995	619.258.346.860	96,98
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	218.470.137.165	216.393.434.849	99,05

3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.000.000	45.274.000	90,55
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.600.000	15.400.000	98,72
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.711.568.000	2.709.500.000	99,92
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.829.800.000	1.785.828.200	97,60
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	123.200.000	122.833.000	99,70
		861.772.844.160	840.330.616.909	97,51

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh DISDIKBUD dengan persentase mencapai 97,51% dari target yang ditetapkan masuk kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja DISDIKBUD lebih baik (naik) atau lebih jelek (turun). Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana tahun berikutnya. Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2023	Kinerja 2024	Ket
1	2	3	6	7	8
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah	Tahun	99,28%	101,70%	naik
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	102,50%	109,59%	naik
Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	111,11%	100,00%	naik
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	97,53%	96,79%	naik
Kinerja DISDIKBUD			102,61%	102,02%	

Berdasarkan Tabel 2.7 tersebut kinerja DISDIKBUD Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah Sangat Tinggi dimana capain target indikator rata-rata mencapai 102,61% di tahun 2023 dan 102,02% di tahun 2024.

c. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan target tahun terkahir (tahun 2026) Renstra DISDIKBUD atau RPD tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra sehingga hasil Evaluasi tahun 2024 juga merupakan pijakan awal tercapai tidaknya hasil akhir Renstra. Gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.8.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2026	Status
1	2	3	7		8
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,70	Tercapai
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	9,26	8,55	Tercapai
Meningkatknya pelestarian dan pengelolaan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	72,00	74,00	Tercapai
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,50	78,20	Belum Tercapai

Tabel 2.9
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2026 (Akhir)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Realisasi 2024	Target 2026	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP PD	75,5	75,8	Belum Tercapai
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS PAUD	89,93	89,96	Belum Tercapai
		APS SD	99,39	99,43	Belum Tercapai
		APS SMP	98,34	98,8	Belum Tercapai
		APS KESETARAAN	61,82	63,5	Belum Tercapai

3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	81,2	81,8	Belum Tercapai
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Rekomendasi izin pendirian sekolah swasta yang disetujui	90	90,5	Belum Tercapai
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan lokal yang dikembangkan	100	100	Tercapai
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	78	85	Belum Tercapai
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang teregistrasi/tercatat	37	45	Belum Tercapai
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi/ tercatat	45	55	Belum Tercapai

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DISDIKBUD

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Serta memiliki fungsi sebagai :

1. Perumusan kebijakan pada bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan pada bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
4. Pelaksana administrasi Disdikbud; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.10.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	77	92,00%	77	71,2	92,47	80	30 %	37,5 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian jumlah anggaran, program dan pelaporan yang memenuhi target	80 %	100%	80 %	80 %	100%	80	30 %	37,5 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat OPD yang disusun	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	1 Dok	0 %	0 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	178 keg	100%	178 keg	178 keg	100%	1 Dok	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	178 keg	100%	178 keg	178 keg	100%	1 Dok	0 %	0 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	178 keg	100%	178 keg	178 keg	100%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	178 keg	100%	178 keg	178 keg	100%	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	8 lap	100%	8 lap	8 lap	100%	2 Lap	0 %	0 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang di evaluasi	178 keg	100%	178 keg	178 keg	100%	1 Lap	0 %	0 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan penganggaran dan laporan keuangan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel	90 %	100%	90 %	90 %	100%	90 %	33,33 %	37,03 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN	1 th	100%	1 th	1 th	100%	5684 Orang/ bulan	24,08 %	24,08 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang dikelola	100 %	100%	100 %	100 %	100%	1 dok	65 %	65 %
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rata-rata Penatausahaan hasil verifikasi yang dilaksanakan	90 %	100%	90 %	90 %	100%	90%	0 %	0 %
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah /Jenis Dokumen Akuntansi yang disusun	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	16 %	16 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis/Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	1 dok	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Jenis/Dokumen yang diminta	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%	1 dok	0 %	0 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%	12 lap	0 %	0 %
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Jenis/Dokumen Laporan Realisasi Anggaran	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	1 dok	0 %	0 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel	80 %	100%	80 %	80 %	100%	80 %	25 %	31,25 %
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Aset yang disusun	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	90 %	90 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis/Dokumen perencanaan, Laporan BMN/Aset yang disusun	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	0 %	0 %
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Aset Yang disusun	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	20,72 %	20,72 %
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis/Dokumen Perencanaan Laporan BMN/Aset yang disusun	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%	1 lap	6,30 %	6,30 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	75 %	100%	75 %	75 %	100%	75 %	20 %	20 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	100 %	100%	100 %	100 %	100%	1 Unit	27 %	27 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 sosialisasi	100%	1 sosialisasi	1 sosialisasi	100%	100 orang	0 %	0 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	80 %	100%	80 %	80 %	100%	80 %	26 %	32,5 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	85 %	100%	85 %	85 %	100%	1 paket	95 %	95 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80 %	100%	80 %	80 %	100%	1 paket	66,60 %	66,60 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 paket	22,36 %	22,36 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 %	100%	80 %	80 %	100%	1 paket	12,78 %	15,97 %
Penyediaan Bahan/Material	Bahan/material yang disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	90,51 %	90,51 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu terlayani	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%	1 lap	21,47 %	21,47 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 %	100%	85 %	85 %	100%	1 lap	22,60 %	22,60 %
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penataan Arsip yang sesuai dengan peraturan	80 %	100%	80 %	80 %	100%	1 dok	0 %	0 %
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	85 %	100%	85 %	85 %	100%	1 dok	2,45 %	2,45 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	80 %	100%	80 %	80 %	100%	80 %	0 %	0 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 %	100%	80 %	80 %	100%	80 %	0 %	0 %
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%	5 unit	0 %	0 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	75 %	100%	75 %	75 %	100%	75 %	26 %	26 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%	1 lap	25 %	25 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%	3 lap	23,85 %	23,85 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 lap	0 %	0 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	75 %	100%	75 %	75 %	100%	75 %	33 %	33 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 %	100%	100 %	100 %	100%	3 unit	20,92 %	20,92 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 %	100%	80 %	80 %	100%	3 unit	23,36 %	23,36 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 %	100%	80 %	80 %	100%	3 unit	27,35 %	27,35 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	98,51 %	100 %	98,82 %	98,82 %	100 %	Na	Na

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Na	Na
	Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	Na	Na
	Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100.00 %	90,38 %	100.00 %	90,81 %	90,81 %	100.00 %	na	na
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kualifikasi Guru D-IV/S-1						85 %	na	na

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka Kelulusan SD						98 %	na	na
	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SD kondisi baik						80 %	na	na
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	40 ruang	100.00 %	40 ruang	40 ruang	100.00 %	37 ruang	0 %	0 %
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	15 ruang	100.00 %	15 ruang	15 ruang	100.00 %	24 ruang	0 %	0 %
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	99 unit	100.00 %	99 unit	99 unit	100.00 %	96 Unit	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	3 ruang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 ruang	100.00 %	6 ruang	6 ruang	100.00 %	1 ruang	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	3 ruang	0 %	0 %
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	2 paket	0 %	0 %
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-	-	-	-	-	5 unit	0 %	0 %
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 %	100.00 %	100 %	100 %	100.00 %	60331 peserta didik	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 paket	100.00 %	4 paket	4 paket	100.00 %	61 paket	0 %	0 %
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	45 kejuaraan	100.00 %	45 kejuaraan	45 kejuaraan	100.00 %	62065 peserta didik	0 %	0 %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	6945 orang	32,89 %	32,89 %
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	80 %	100.00 %	80 %	80 %	100.00 %	4110 orang	32,08 %	32,08 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	500 satuan pendidikan	100.00 %	500 satuan pendidikan	500 satuan pendidikan	100.00 %	500 satuan pendidikan	4,83 %	4,83 %
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	100 %	100.00 %	100 %	100 %	100.00 %	500 satuan pendidikan	26,74 %	26,74 %
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	500 orang	73,42 %	73,42 %
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	3 ruang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	4 ruang	0 %	0 %
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	-	-	25 orang	0 %	0 %
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	-	-	-	-	2 konten digital	0 %	0 %
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	100 orang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	1 dok	45,47 %	45,47 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 dok	0 %	0 %
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	1 komunitas	0 %	0 %
Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	-	-	-	-	2 paket	0 %	0 %
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,	-	-	-	-	-	2 keg	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
kekerasan, dan intoleransi	kekerasan, dan intoleransi								
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	-	-	-	-	500 buku	0 %	0 %
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	-	-	-	-	13 ruang	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 unit	100.00 %	9 unit	9 unit	100.00 %	6 unit	0 %	0 %
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	50 orang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	85 %	100.00 %	85 %	85 %	100.00 %	500 satuan pendidikan	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 ruang	100.00 %	11 ruang	11 ruang	100.00 %	50 ruang	0 %	0 %
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kualifikasi Guru D-IV/S-1						85 %	Na	Na
	Angka Kelulusan Smp						98 %	Na	Na
	Persentase sarana dan prasarana pendidikan SMP kondisi baik						81 %	Na	Na
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	3 ruang	0 %	0 %
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	3 ruang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 unit	100.00 %	7 unit	7 unit	100.00 %	5 Unit	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	20 ruang	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ruang	100.00 %	1 ruang	1 ruang	100.00 %	1 ruang	0 %	0 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	100.00 %	3 unit	3 unit	100.00 %	3 unit	0 %	0 %
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	2 paket	0 %	0 %
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 %	100.00 %	100 %	100 %	100.00 %	32514 peserta didik	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	6 paket	100.00 %	6 paket	6 paket	100.00 %	7 paket	0 %	0 %
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 peserta didik	100.00 %	20 peserta didik	20 peserta didik	100.00 %	100 peserta didik	0 %	0 %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	250 orang	46,29 %	46,29 %
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	86 %	100.00 %	86 %	86 %	100.00 %	462 orang	41,08 %	41,08 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	-	-	-	-	84 satuan pendidikan	0 %	0 %
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	90 %	100.00 %	90 %	90 %	100.00 %	84 satuan pendidikan	0 %	0 %
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	-	-	100 orang	25,12 %	25,12 %
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	-	-	100 orang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	100 orang	0 %	0 %
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	1 dok	0 %	0 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	2 dok	0 %	0 %
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	2 komunitas	0 %	0 %
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	85 %	100.00 %	85 %	85 %	100.00 %	31989 peserta didik	3,12 %	3,12 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	50 orang	93,67 %	93,67 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	2 ruang	0 %	0 %
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B						40 %	0 %	0 %
	Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1						56 %		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	7 unit	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	27 unit	100.00 %	27 unit	27 unit	100.00 %	1 unit	0 %	0 %
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	-	-	-	-	26417 peserta didik	0 %	0 %
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 paket	100.00 %	3 paket	3 paket	100.00 %	1 paket	0 %	0 %
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	75 %	100.00 %	75 %	75 %	100.00 %	30887 peserta didik	18,52 %	18,52 %
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	-	-	-	-	-	100 orang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 %	100.00 %	60 %	60 %	100.00 %	1000 orang	0 %	0 %
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	17 kecamatan	100.00 %	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00 %	944 satuan pendidikan	0 %	0 %
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	17 kecamatan	100.00 %	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00 %	944 satuan pendidikan	8,38 %	8,38 %
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	-	-	100 orang	84,59 %	84,59 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	100 orang	8,52 %	8,52 %
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	-	1 dok	53,75 %	53,75 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	1 dok	99,38 %	99,38 %
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	10 komunitas	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	25 orang	0 %	0 %
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1						56 %	Na	Na
	Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif						68 %	Na	Na
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	-	-	-	2 unit	0 %	0 %
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 paket	100.00 %	1 paket	1 paket	100.00 %	1 paket	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-	-	-	-	-	50 orang	93,79 %	93,79 %
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 satuan pendidikan	100.00 %	2 satuan pendidikan	2 satuan pendidikan	100.00 %	30 satuan pendidikan	87,69 %	87,69 %
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	100 %	100.00 %	100 %	100 %	100.00 %	30 satuan pendidikan	6,82 %	6,82 %
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah	-	-	-	-	-	50 orang	50,81 %	50,81 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nonformal/Kesetaraan								
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-	-	-	-	50 orang	0 %	0 %
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	50 orang	0 %	0 %
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	2 dok	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	20 komunitas	0 %	0 %
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-	-	-	-	2 keg	0 %	0 %
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	-	-	-	-	-	100 peserta didik	0 %	0 %
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	2 paket	0 %	0 %
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau	-	-	-	-	-	50 orang	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan								
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	90 %	100.00 %	90 %	90 %	100.00 %	5236 peserta didik	0 %	0 %
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	-	-	-	-	-	82 %	na	na
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	70 %	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	1 lap	0 %	0 %
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	80%	100 %	80%	80 %	100 %	100 %	na	na
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan PAUD dan NonFormal yang diselenggarakan	25 %	100 %	25 %	25 %	100 %	25 %	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 dok	100.00 %	25 dok	25 dok	100.00 %	1 dok	0 %	0 %
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan)	81 %	100 %	81 %	81 %	100 %	81 %	0 %	0 %
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	85 %	100%	85 %	85 %	100%	87 %	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	80 Orang	100%	80 Orang	80 Orang	100%	30 orang	0 %	0 %
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	80 %	100%	80 %	80 %	100%	80 %	0 %	0 %
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	19	100%	19	19	100%	26 obyek	0 %	0 %
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	85 %	100%	85 %	85 %	100%	85 %	0 %	0 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	19	100%	19	19	100%	26 obyek	8,33 %	8,33 %
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosesntase pengembangan kesenian tradisional	87 %	100%	87 %	87 %	100%	87 %	0 %	0 %
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	85 %	100%	85 %	85 %	100%	26 obyek	0 %	0 %
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	30 orang	7,86 %	7,86 %

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan sejarah yang dilaksanakan	25,2 %	100%	25,2 %	25,2 %	100%	58 %	0 %	0 %
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal yang dikembangkan	65 %	100%	65 %	65 %	100%	70 %	0 %	0 %
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal yang dikembangkan	2	100%	2	2	100%	-	0 %	0 %
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	60,3 %	100%	60,3 %	60,3 %	100%	90.00	0 %	0 %
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	60,5 %	60,5 %	60,5 %	60,5 %	60,5 %	-	-	-

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
				Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penetapan Cagar Budaya	Cagar budaya yang ditetapkan	75 %	100%	75 %	75 %	100%	-	-	-
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	-	-	-	-	-	80 %	0 %	0 %
Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-	-	-	-	-	5 obyek	0 %	0 %

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

A. Bidang PAUD dan Dikmas
   1. Belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini;
   2. Belum semua PAUD terakreditasi;
   3. Kualifikasi guru PAUD belum sesuai SNP;
   4. Masih belum semua PKBM terakreditasi;
   5. Belum semua masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan PKBM untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah; dan
   6. Masih kurangnya PAUD negeri.

B. Bidang SD
   1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang rusak sedang dan rusak berat;
   2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
   3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
   4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
   5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
   6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

C. Bidang SMP
   1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang rusak sedang dan rusak berat;
   2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
   3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
   4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
   5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
   6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

D. Bidang Kebudayaan
   1. Belum tersedianya museum;
   2. Belum dimilikinya tenaga ahli cagar budaya; dan
   3. Masih kurangnya pembinaan kelompok kebudayaan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

A. Bidang PAUD dan Dikmas
   1. Belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini;
   2. Belum semua PAUD terakreditasi;
   3. Kualifikasi guru PAUD belum sesuai SNP;
   4. Masih belum semua PKBM terakreditasi;
   5. Belum semua masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan PKBM untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah; dan
   6. Masih kurangnya PAUD negeri.

B. Bidang SD
   1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang rusak sedang dan rusak berat;
   2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
   3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
   4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
   5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
   6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

C. Bidang SMP
   1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang rusak sedang dan rusak berat;
   2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
   3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi

standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

D. Bidang Kebudayaan
1. Belum tersedianya museum;
2. Belum dimilikinya tenaga ahli cagar budaya; dan
3. Masih kurangnya pembinaan kelompok kebudayaan.

2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan, serta ketatalaksanaan, merupakan faktor kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, optimalisasi sumber daya menjadi kebutuhan utama agar setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar selama lima tahun terakhir, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi. Permasalahan tersebut menjadi fokus penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan organisasi ke depan, yaitu :

A. Bidang PAUD dan Dikmas
1. Belum semua anak usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan anak usia dini;
2. Belum semua PAUD terakreditasi;
3. Kualifikasi guru PAUD belum sesuai SNP;
4. Masih belum semua PKBM terakreditasi;
5. Belum semua masyarakat mengetahui pentingnya keberadaan PKBM untuk menyelesaikan masalah anak tidak sekolah dan anak putus sekolah; dan
6. Masih kurangnya PAUD negeri.

B. Bidang SD
1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang rusak sedang dan rusak berat;
2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

C. Bidang SMP
1. Masih ditemukannya ruang kelas dan sekolah yang rusak sedang dan rusak berat;
2. Masih banyak sekolah yang belum berbasis teknologi;
3. Masih kurangnya kompetensi guru yang memenuhi standard;
4. Belum meratanya distribusi sekolah terkait dengan

kebijakan zonasi;
5. Belum variasinya ekstrakulikuler di sekolah; dan
6. Belum terepenuhinya sarpras penunjang.

D. Bidang Kebudayaan
1. Belum tersedianya museum;
2. Belum dimilikinya tenaga ahli cagar budaya; dan
3. Masih kurangnya pembinaan kelompok kebudayaan.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

No	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan	
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)
1	3	4	8	9	3	4	8	9
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			811.914.561.254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			811.914.561.254
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			808.196.561.254	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			808.196.561.254
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			808.196.561.254	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			808.196.561.254
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	80 %	642.599.151.647	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	80 %	642.599.151.647
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian perencanaan anggaran, program dan pelaporan yang memenuhi target	100 %	1.170.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian perencanaan anggaran, program dan pelaporan yang memenuhi target	100 %	1.170.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	375.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	375.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	265.000.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	265.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	150.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	90%	630.579.151.647	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	90%	630.579.151.647
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5724 Orang/bulan	629.739.151.647		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5724 Orang/bulan	629.739.151.647
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	40.000.000		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	40.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	150.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	150.000.000		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	150.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	150.000.000		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	150.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	80 %	575.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	80 %	575.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1 Laporan	150.000.000		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1 Laporan	150.000.000

		Barang Milik Daerah SKPD				Barang Milik Daerah SKPD		
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	80 %	3.270.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	80 %	3.270.000.000

	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.640.000.000		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1.640.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	350.000.000		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	350.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun				Pemulangan Pegawai yang Pensiun			
		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 Orang	50.000.000		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	10 Orang	50.000.000

	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			
		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	50.000.000		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	50.000.000
	Pemindahan Tugas ASN				Pemindahan Tugas ASN			
		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	9 Orang	70.000.000		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	9 Orang	70.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	550.000.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	550.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	100.000.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	100.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	140.000.000		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	140.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	80 %	1.895.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	80 %	1.895.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.000.000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	250.000.000		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	250.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	200.000.000		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	200.000.000
	Penyediaan Bahan/Material				Penyediaan Bahan/Material			
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	250.000.000		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	250.000.000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	350.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	40.000.000		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	40.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	80 %	2.300.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	80 %	2.300.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	1.500.000.000		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	1.500.000.000
	Pengadaan Mebel				Pengadaan Mebel			

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	200.000.000		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	300.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	150.000.000		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	80 %	810.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	80 %	810.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	450.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Laporan	450.000.000

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	80 %	2.000.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	80 %	2.000.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	186 Unit	300.000.000		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	186 Unit	300.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.000.000		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	50.000.000		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	50.000.000
	Pemeliharaan Mebel				Pemeliharaan Mebel			
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	150.000.000		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	150.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	100.000.000		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	350.000.000		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	350.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			

		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	350.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	350.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	350.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	350.000.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang	92 % 98 % 100 % 87 %	165.559.689.607	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	92 % 98 % 100 % 87 %	165.559.689.607

		perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan						
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	88 % 99 % 87 %	81.081.889.607	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	88 % 99 % 87 %	81.081.889.607
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	200.000.000		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	200.000.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	200.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			

		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	250.000.000		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	250.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	240.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	240.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	240.000.000		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	240.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah				Pengadaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	250.000.000		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	250.000.000
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	200.000.000

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	62265 Peserta Didik	250.000.000		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	62265 Peserta Didik	250.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	70 Orang	14.000.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	70 Orang	14.000.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4110 Orang	250.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4110 Orang	250.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	500 Satuan Pendidikan	250.000.000		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	500 Satuan Pendidikan	250.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	57.951.889.607		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	57.951.889.607

	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	600 Orang	300.000.000		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	600 Orang	300.000.000
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			
		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar			
		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000
	Pemeliharaan Mebel Sekolah				Pemeliharaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20 Unit	200.000.000		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20 Unit	200.000.000
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar			
		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang	200.000.000		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang	200.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	45 Orang	250.000.000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	45 Orang	250.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	250.000.000		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	250.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	250.000.000		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	250.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	150.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			

		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	300.000.000		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	300.000.000
	Penyediaan infrastruktur TIK				Penyediaan infrastruktur TIK			
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	250.000.000		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	250.000.000
	Penataan Ruang/Sudut Baca				Penataan Ruang/Sudut Baca			
		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5 Ruang	200.000.000
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku	300.000.000		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku	300.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	300.000.000		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	300.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru			
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	300.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	300.000.000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	250.000.000		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	250.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Satuan Pendidikan	500.000.000		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	500 Satuan Pendidikan	500.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	350.000.000		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	350.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	62265 Peserta Didik	250.000.000		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	62265 Peserta Didik	250.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	200.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	200.000.000

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	81,3 % 98,3 % 85,5 %	46.930.800.000	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	81,3 % 98,3 % 85,5 %	46.930.800.000
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	200.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Laboratorium				Pembangunan Laboratorium			
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	8 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	4 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Fasilitas Parkir				Pembangunan Fasilitas Parkir			
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit	200.000.000		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	3 Unit	200.000.000
	Pembangunan Kantin Sekolah				Pembangunan Kantin Sekolah			
		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	200.000.000		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	200.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	200.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			
		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	200.000.000		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			

		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	200.000.000		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir				Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			
		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	200.000.000		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			
		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	200.000.000		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	200.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah				Pengadaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			

		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	200.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32196 Peserta Didik	530.000.000		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	32196 Peserta Didik	530.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	392.000.000		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	392.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	270 Orang	4.590.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	270 Orang	4.590.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	482 Orang	157.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	482 Orang	157.000.000

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	84 Satuan Pendidikan	200.000.000		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	84 Satuan Pendidikan	200.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	84 Satuan Pendidikan	32.411.800.000		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	84 Satuan Pendidikan	32.411.800.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	500.000.000		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200 Orang	500.000.000
	Pemeliharaan Mebel Sekolah				Pemeliharaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	200.000.000		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	200.000.000
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama			
		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang	200.000.000		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang	200.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			

		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200.000.000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	200 Orang	200.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	200.000.000		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	200.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200.000.000		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	200 Orang	200.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	200.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	200.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	200.000.000
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			

		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	200.000.000		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	200.000.000
	Penataan Ruang/Sudut Baca				Penataan Ruang/Sudut Baca			
		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4 Ruang	200.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	31989 Satuan Pendidikan	200.000.000		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	31989 Satuan Pendidikan	200.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru			
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	200.000.000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	200.000.000		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	200.000.000
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150 Buku	200.000.000		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150 Buku	200.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			

		Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3 Unit	200.000.000		Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	3 Unit	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	700.000.000		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	700.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	250.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	250.000.000
	Penyediaan infrastruktur TIK				Penyediaan infrastruktur TIK			
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	200.000.000		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	200.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	40,5 % 58 %	23.185.000.000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	40,5 % 58 %	23.185.000.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	200.000.000
	Pengadaan Mebel PAUD				Pengadaan Mebel PAUD			
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			

		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	150.000.000		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	2 Paket	150.000.000
	Pengadaan Perlengkapan PAUD				Pengadaan Perlengkapan PAUD			
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	150.000.000		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	150.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31039 Peserta Didik	250.000.000		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	31039 Peserta Didik	250.000.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 Orang	180.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	120 Orang	180.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110 Orang	1.515.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110 Orang	1.515.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	944 Satuan Pendidikan	200.000.000		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	944 Satuan Pendidikan	200.000.000
	Pengelolaan Dana BOP PAUD				Pengelolaan Dana BOP PAUD			

		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1000 Satuan Pendidikan	16.500.000.000		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1000 Satuan Pendidikan	16.500.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	250.000.000		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	100 Orang	250.000.000
	Pemeliharaan Mebel Sekolah				Pemeliharaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000		Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	5 Unit	50.000.000
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	120 Orang	120.000.000		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	120 Orang	120.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	120 Orang	120.000.000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	120 Orang	120.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			

		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	120.000.000		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	120.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	100.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	200.000.000
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	120 Komunitas	120.000.000		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	120 Komunitas	120.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru			
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	200.000.000
	Penyediaan infrastruktur TIK				Penyediaan infrastruktur TIK			

		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	100.000.000		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	100.000.000
	Penataan Ruang/Sudut Baca				Penataan Ruang/Sudut Baca			
		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4 Ruang	100.000.000		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	4 Ruang	100.000.000
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	100.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	100.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120 Peserta didik	120.000.000		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120 Peserta didik	120.000.000
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100.000.000		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	100 Buku	100.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	100.000.000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			
		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	100.000.000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	35 Orang	140.000.000		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	35 Orang	140.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	250.000.000		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	250.000.000
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	250.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	250.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	150.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	150.000.000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	200.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	200.000.000

	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	944 Satuan Pendidikan	250.000.000		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	944 Satuan Pendidikan	250.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.000.000		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	150.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1 Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif	58 % 70 %	14.362.000.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1 Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif	58 % 70 %	14.362.000.000
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5436 Peserta Didik	103.800.000		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5436 Peserta Didik	103.800.000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54 Orang	108.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54 Orang	108.000.000
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			

		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	54 Orang	200.000.000		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	54 Orang	200.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	3.650.000.000		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	30 Satuan Pendidikan	3.650.000.000
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	6.102.000.000		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	6.102.000.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54 Orang	162.000.000		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54 Orang	162.000.000
	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	100.000.000		Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	100.000.000

	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	20 Orang	100.000.000		Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	20 Orang	100.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	52 Orang	104.000.000		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	52 Orang	104.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				Pengembangan konten digital untuk pendidikan			
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	100.000.000
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			
		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	52 Orang	104.000.000		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	52 Orang	104.000.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	100.000.000

	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100.000.000		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	100.000.000
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	100.000.000		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	100.000.000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	100.000.000
	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	27 Orang	54.200.000		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	27 Orang	54.200.000
	Penyediaan infrastruktur TIK				Penyediaan infrastruktur TIK			
		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	50.000.000		Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket	50.000.000
	Penataan Ruang/Sudut Baca				Penataan Ruang/Sudut Baca			
		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	50.000.000		Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang	50.000.000

	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik			
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	200.000.000		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	200.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			
		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	150.000.000		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	150.000.000
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			
		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	120 Buku	170.000.000		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	120 Buku	170.000.000
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	200.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru				Pembangunan Ruang Kelas Baru			
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	350.000.000		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	350.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah				Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 Paket	200.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	200.000.000
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			

		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	52 Orang	104.000.000		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	52 Orang	104.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	200.000.000
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5336 Peserta Didik	350.000.000		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	5336 Peserta Didik	350.000.000
	Pembangunan Ruang Laboratorium				Pembangunan Ruang Laboratorium			
		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	100.000.000
	Pengadaan Mebel Sekolah				Pengadaan Mebel Sekolah			
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	100.000.000
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	200.000.000		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	200.000.000

	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	150.000.000		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	150.000.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	200.000.000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum yang diterapkan	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum yang diterapkan	-	-
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	-	-
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	-		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	-	-
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-	-		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	-	-
	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar				Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar			

		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	-	-		Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	-	-
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar			
		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	-	-		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	-	-
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	-		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	-	-
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	-	-	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	-	-
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	-		Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	-
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			

		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-	-		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	-	-
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	-	-		Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	-	-
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	-		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	-	-
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart	71,50%	25.000.000	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart	71,50%	25.000.000
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71,50%	25.000.000	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71,50%	25.000.000

	Nonformal/Keset araan				dan Pendidikan Nonformal/Kese taraan			
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	20.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	20.000.000
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	5.000.000		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	5.000.000
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	80,1 %	12.720.000	PROGRAM PENGENDALIA N PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	80,1 %	12.720.000

	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	2 sekolah	2.720.000	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	2 sekolah	2.720.000
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	2.720.000		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	2.720.000
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	26%	10.000.000	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	26%	10.000.000
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	10.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.718.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.718.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.718.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.718.000.000

6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyk pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	81 %	2.418.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah obyk pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	81 %	2.418.000.000
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	88%	523.000.000	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	88%	523.000.000
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	26 Objek	250.000.000		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	26 Objek	250.000.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	273.000.000		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang	273.000.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	85%	1.250.000.000	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	85%	1.250.000.000
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			

		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	26 Objek	800.000.000		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	26 Objek	800.000.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	250.000.000		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	250.000.000
	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	200.000.000		Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	200.000.000
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7 Lembaga	645.000.000	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	7 Lembaga	645.000.000
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			

		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	26 Objek	115.000.000		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	26 Objek	115.000.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			
		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	115.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	115.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	415.000.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	415.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian tradisional yang dikembangkan	100 %	1.090.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian tradisional yang dikembangkan	100 %	1.090.000.000
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dikembangkan	26 Obyek	1.090.000.000	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian tradisional yang dikembangkan	26 Obyek	1.090.000.000
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			

		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	870.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang	870.000.000
	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat	60.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat	60.000.000
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	160.000.000		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	160.000.000
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	58 %	10.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	58 %	10.000.000
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal yang dikembangkan	72%	10.000.000	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal yang dikembangkan	72%	10.000.000
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	5.000.000		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang	5.000.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah			

		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	2.500.000		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	2.500.000
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dikelola dan dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	90 %	200.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dikelola dan dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	90 %	200.000.000
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	82%	12.080.000	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	82%	12.080.000
	Penetapan Cagar Budaya				Penetapan Cagar Budaya			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	12.080.000		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	12.080.000
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	81%	177.220.000	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	81%	177.220.000
	Pengembangan Cagar Budaya				Pengembangan Cagar Budaya			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	177.220.000		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	177.220.000

	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin membawa cagar budaya	81%	10.700.000	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin membawa cagar budaya	81%	10.700.000
	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	5.350.000		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	5.350.000
	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	5.350.000		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	5.350.000
				811.914.561.254				**811.914.561.254**

2.6. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program, kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh SKPD Kabupaten Karanganyar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan organisasi perangkat daerah yang menagani urusan pendidikan dan kebudayaan, akan menampung usulan dari Perangkat Daerah dan masyarakat yang akan kita sesuaikan dan tindaklanjuti dalam sub kegiatan yang ada dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.

Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan yang masuk melalui musrenbang sejumlah 3.525.000.000. Jumlah kegiatan yang berasal dari 17 kecamatan sejumlah 45 kegiatan. Usulan terbanyak dari bidang pendidikan sejumlah 31 kegiatan. Usulan lainnya sebanyak 14 kegiatan dari kegiatan kebudayaan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DISDIKBUD Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pi jakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema *"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."* Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah *"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"* didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan

pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam 16 prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;

3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;

14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja DISDIKBUD Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra DISDIKBUD Tahun 2025-2029, adalah Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Dan Pelestarian Budaya. Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai. Sasaran DISDIKBUD Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan;
2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Seni dan Budaya;
3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Tujuan PD	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Target Capaian Tahun 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Dan Pelestarian Budaya			Indeks Pendidikan	Indeks	0,745
				% Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	30,5
		Meningkatnya Partisipasi		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,25

		Masyarakat Dalam Pendidikan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,71
			Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	92
				Presentase Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98
				Presentase Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100
				Presentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	87
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standart	%	71,5
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	80,1
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Seni Dan Budaya		Terlestarikannya Cagar Budaya	%	91,5
			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah obyk pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	81
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Kesenian tradisional yang dikembangkan	%	100
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dikelola dan dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	%	90

		Meningkatnya kepuasan pelayanan Publik		Nilai IKM	Nilai	86,5
			Program Penunjang Urusan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	80

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara DISDIKBUD mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran DISDIKBUD dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan DISDIKBUD.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka DISDIKBUD masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	Tujuan 3: Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, Dan Pelestarian Budaya		Indeks Pendidikan
					% Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
					Harapan Lama Sekolah
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Seni Dan Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya
				Meningkatnya kepuasan pelayanan Publik	Nilai IKM

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

No	Sasaran OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2) Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU 3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah 5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 10) Pengadaan Mebel Sekolah 11) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

				15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 18) Pemeliharaan Mebel Sekolah 19) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 20) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 21) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 22) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 23) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 24) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25) Penyediaan infrastruktur TIK 26) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 27) Penataan Ruang/Sudut Baca 28) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 29) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 30) Pembangunan Ruang Kelas Baru 31) Rehabilitasi

				Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 32) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 33) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 34) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 35) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 36) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 37) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 38) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta DidikPenyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

				1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah5) Pembangunan Laboratorium6) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula7) Pembangunan Fasilitas Parkir8) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah9) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah11) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah12) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula14) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir15) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah16) Pengadaan Mebel Sekolah17) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah18) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa19) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan
			b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	

				Sekolah Menengah Pertama20) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama21) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah22) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama23) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama24) Pemeliharaan Mebel Sekolah25) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan26) Pengembangan konten digital untuk pendidikan27) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan28) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 29) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan30) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan31) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi32) Penataan Ruang/Sudut Baca33) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi

				Peserta Didik34) Pembangunan Ruang Kelas Baru35) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan36) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik37) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik38) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU39) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus40) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus41) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik42) Penyediaan infrastruktur TIK

			c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD2) Pengadaan Mebel PAUD3) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD4) Pengadaan Perlengkapan PAUD5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD7) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD8) Pengelolaan Dana BOP PAUD9) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD10) Pemeliharaan Mebel Sekolah11) Pengembangan konten digital untuk pendidikan12) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan13) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 14) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan15) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU16) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan17) Pembangunan Ruang Kelas Baru18) Penataan Ruang/Sudut Baca19) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik20) Perlengkapan Dasar

				Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik21) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula23) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)24) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah25) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD26) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD27) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD28) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah29) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU30) Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas Sekolah

			d. Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan4) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan6) Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan7) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan8) Pengembangan konten digital untuk pendidikan9) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan10) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 11) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan12) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan13) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi14) Penyediaan

				infrastruktur TIK15) Penataan Ruang/Sudut Baca16) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik17) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik18) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU19) Pembangunan Ruang Kelas Baru20) Pengadaan Perlengkapan Sekolah21) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium23) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah24) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik25) Pengadaan Mebel Sekolah26) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah27) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal28) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan29) Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat30) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU31) Rehabilitasi

				Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
		2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	e. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan 2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan 3) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

		3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	f. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
			g. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat3) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Seni Dan Budaya	4. Program Pengembangan Kebudayaan	h. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2) Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
		5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	i. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 3) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam

				Pemajuan Kebudayaan
			j. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
			k. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 2) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 3) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
		6. Program Pembinaan Sejarah	l. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah 3) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

		7. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya2) Penetapan Cagar Budaya3) Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
			n. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1) Pelindungan Cagar Budaya 2) Pengembangan Cagar Budaya 3) Pemanfaatan Cagar Budaya 4) Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
			o. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota 2) Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program dan Kegiatan serta Target Kinerja dan Pendanaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

A. Non Urusan Pemerintahan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
      6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administratif keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
      8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
      2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
      4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
      5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
      6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
      7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
      2) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8) Pemindahan Tugas ASN
9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7) Penyediaan Bahan/Material
8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pengadaan Mebel
3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah
1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4) Pemeliharaan Mebel
5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Urusan Pendidikan
1. Program Pengelolaan Pendidikan
a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2) Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU
3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
6) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
10) Pengadaan Mebel Sekolah
11) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
12) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
17) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
18) Pemeliharaan Mebel Sekolah
19) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
20) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
21) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
22) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
23) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
24) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
25) Penyediaan infrastruktur TIK
26) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
27) Penataan Ruang/Sudut Baca
28) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
29) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
30) Pembangunan Ruang Kelas Baru
31) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

32) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
33) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
34) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
35) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
36) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
37) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
38) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta DidikPenyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5) Pembangunan Laboratorium
6) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
7) Pembangunan Fasilitas Parkir
8) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
9) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
11) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
12) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
14) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
15) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
16) Pengadaan Mebel Sekolah
17) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
18) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
19) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
20) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
21) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
22) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
23) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
24) Pemeliharaan Mebel Sekolah
25) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
26) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
27) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
28) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
29) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
30) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
31) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
32) Penataan Ruang/Sudut Baca

33) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
34) Pembangunan Ruang Kelas Baru
35) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
36) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
37) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
38) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
39) Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
40) Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
41) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
42) Penyediaan infrastruktur TIK

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
2) Pengadaan Mebel PAUD
3) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
4) Pengadaan Perlengkapan PAUD
5) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
6) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
7) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
8) Pengelolaan Dana BOP PAUD
9) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
10) Pemeliharaan Mebel Sekolah
11) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
12) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
13) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
14) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
15) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
16) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17) Pembangunan Ruang Kelas Baru
18) Penataan Ruang/Sudut Baca
19) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
20) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
21) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
23) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
24) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
26) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
27) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
28) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
29) Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

30) Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas Sekolah

d. Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
   1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   2) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
   4) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
   5) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
   6) Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
   7) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
   8) Pengembangan konten digital untuk pendidikan
   9) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
   10) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
   11) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
   12) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   13) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
   14) Penyediaan infrastruktur TIK
   15) Penataan Ruang/Sudut Baca
   16) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik
   17) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
   18) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
   19) Pembangunan Ruang Kelas Baru
   20) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
   21) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   22) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
   23) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
   24) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
   25) Pengadaan Mebel Sekolah
   26) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   27) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
   28) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
   29) Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat
   30) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
   31) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
   a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan

1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan
3) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
   a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
   b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non-Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      1) Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
      3) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

C. Urusan Kebudayaan
   1. Program Pengembangan Kebudayaan
      a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
         1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
         2) Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
      b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
         1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
         2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
         3) Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
      c. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
         1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
         2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
         3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
   2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
    2) Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
    3) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

3. Program Pembinaan Sejarah
    a. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
        1) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
        2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
        3) Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
    a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
        1) Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
        2) Penetapan Cagar Budaya
        3) Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda
    b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
        1) Pelindungan Cagar Budaya
        2) Pengembangan Cagar Budaya
        3) Pemanfaatan Cagar Budaya
        4) Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan
    c. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
        1) Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota
        2) Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota

Tabel 4. 1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						747.513.554.013,00							822.308.668.500,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						745.873.554.013,00							820.270.417.500,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						745.873.554.013,00							820.270.417.500,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			80.3 %	606.964.224.613,00						-	597.260.000.000,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	461.429.731,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran	-	1.205.000.000,00	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	71.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.081,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.980.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													

							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	8.401.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	361.547.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perencanaan dan Penganggaran		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang disediakan	-			90 %	603.934.656.857,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan	-	585.020.000.000,00	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5724 Orang /bulan	603.852.979.357,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		584.145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	44.777.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	14.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.628.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	3.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Keuangan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Barang Milik Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik (terdaftar, kondisi baik, jelas lokasinya)	-			80 %	50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang	-	610.000.000,00	
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													

							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													

							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD													
							Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Barang		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	-			80 %	918.390.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian	-	3.325.000.000,00	
	1	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	918.390.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		1.645.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun														

							Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				14 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas													
							Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				2 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN													

							Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				9 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Kepegawaian		145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum OPD yang baik	-			80 %	781.844.325,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum	-	1.950.000.000,00	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	49.968.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	85.190.275,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	190.168.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	174.917.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	191.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	41.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Administrasi Umum		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	-			80 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah	-	2.275.000.000,00	
	1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		1.505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													

							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			80 %	485.995.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	830.000.000,00	
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	479.695.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disediakan	-			80 %	331.908.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah	-	2.045.000.000,00	
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				186 Unit	160.110.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													

							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	62.798.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	109.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Barang Milik Daerah		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	-			100 %	138.909.329.400,00						-	222.666.455.000,00	
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Sarana dan Prasrana SD dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	-			82 % 99 % 87 %	70.819.663.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar	-	123.443.655.000,00	

	1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)													
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.880.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.546.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													

							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													

							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													

							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		245.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		245.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah													

							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah													
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													

							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													

							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				62265 Peserta Didik	48.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.166.705.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				70 Orang	16.418.871.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				4910 Orang	136.695.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		41.805.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				500 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				500 Satuan Pendidikan	54.056.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		58.187.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				600 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		485.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													

							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
							Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah														

							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				20 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar													
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		380.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				45 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													

							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK														

							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca													

							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				500 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		757.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													

							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		555.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		905.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan												
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				150 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik												

							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				500 Satuan Pendidikan	138.818.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		1.205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													

							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				62265 Peserta Didik	20.000.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		905.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik													
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Dasar		905.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Sarana dan Prasrana SMP dalam kondisi baik 2. Angka Kelulusan 3. Kualifikasi Guru D-IV/S-1	-			81,3 % 98,3 % 85,5 %	43.451.534.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama	-	60.223.300.000,00	
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				6 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		905.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													

							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		755.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium													
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				8 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		1.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula													

							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				4 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir													
							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		545.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah													

							Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		655.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													

							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		605.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
							Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														

							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		755.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah													
							Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir													

							Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		1.255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah														
							Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		755.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah													
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah													

							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		705.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				32196 Peserta Didik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		535.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		397.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				270 Orang	7.254.234.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		4.595.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				482 Orang	232.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		162.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				84 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													

							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				84 Satuan Pendidikan	35.917.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		32.416.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		792.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah													

							Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama													
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				200 Orang	42.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		1.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													

							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				200 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		1.005.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													

							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca														

							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				4 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				31989 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													

							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				150 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		530.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah													

							Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU												
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik												

							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK													
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekolah Menengah Pertama		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Lembaga PAUD terakreditasi nilai minimal B 2. Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	-			40,5 % 58 %	17.010.031.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	24.251.500.000,00	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				3 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD													

							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD													
							Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													

							Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				31039 Peserta Didik	14.845.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		267.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				120 Orang	24.481.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				110 Orang	1.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.520.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD													

							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				944 Satuan Pendidikan	8.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1000 Satuan Pendidikan	15.341.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		16.505.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD													

							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				100 Orang	24.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah													
							Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)													

							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				120 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				120 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan													

							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	25.265.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan													
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	16.745.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	40.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	24.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													

							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				120 Komunitas	9.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		405.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK													
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca													

							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				4 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik													

							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				120 Peserta didik	19.855.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				100 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													

							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula													

							Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				35 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													

							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		255.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD													
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD													

							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				31039 Satuan Pendidikan	9.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		429.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													

							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Presentase Peserta Kesetaraan yang aktif 2. Presentase Kualifikasi Guru D-IV/S-1	-			70 % 58 %	7.628.100.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	14.748.000.000,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan													

							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5436 Peserta Didik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		108.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				54 Orang	225.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		113.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													

							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				54 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		221.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				30 Satuan Pendidikan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		3.655.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				30 Satuan Pendidikan	7.270.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		6.107.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				54 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		167.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													

							Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
							Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				20 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				52 Orang	42.685.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				52 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													

							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	41.630.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan													
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				20 Komunitas	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													

							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
							Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi				27 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		59.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK													

							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca													
							Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik													

							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik													
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik													

							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				120 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru													

							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan													
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				52 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		109.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium													

							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
							Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				5336 Peserta Didik	48.085.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		355.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium													
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah													

							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan													

							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				1 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidikan Nonformal /Kesetaraan		205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase kurikulum muatan lokal yang diterapkan	-			65,5 %	0,00						-	197.175.000,00	

	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase kurikulum yang diterapkan	-			65,5 %	0,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	-	125.675.000,00	
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				500 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		55.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar													

							Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah				50 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar														
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		25.135.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Presentase Kurikulum muatan lokal yang ditetapkan	-			81.5 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Muatan Lokal	-	71.500.000,00	
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Muatan Lokal		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														

							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				22 Buku	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Muatan Lokal		26.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Muatan Lokal		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal													

							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Muatan Lokal		15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standart	-			84 %	0,00						-	120.250.000,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-			71.5 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	120.250.000,00	
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		29.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pendidik dan Tenaga Kependidikan		90.625.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga pendidikan yang memiliki izin	-			81 %	0,00						-	26.537.500,00	

	1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah penerbitan ijin pendidikan dasar yang diselenggarakan	-			2 Sekolah	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Izin Pendidiran Pendidikan Dasar	-	10.643.750,00	
	1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Izin Pendidiran Pendidikan Dasar		10.643.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penerbitan ijin pendidikan Paud dan NonFormal yang diselenggarakan	-			26 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Penerbitan Izin	-	15.893.750,00	
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Penerbitan Izin		15.893.750,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.640.000.000,00							2.038.251.000,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.640.000.000,00							2.038.251.000,00	

6	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	-			82.5 %	285.000.000,00						-	1.615.000.000,00	
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-			88 %	275.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pengelolaan kebudayaan	-	395.000.000,00	
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				26 Objek	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pengelolaan kebudayaan		170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														

							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pengelolaan kebudayaan		225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata penyelenggaraan festival seni budaya daerah yang difasilitasi	-			85 %	10.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pelestarian Kesenian Tradisional	-	560.000.000,00	
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													

							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				26 Objek	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pelestarian Kesenian Tradisional		320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional													
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pelestarian Kesenian Tradisional		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													

							Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				10 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pelestarian Kesenian Tradisional		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	rata-rata karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	-			7 lembaga	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Lembaga Adat	-	660.000.000,00	
	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													

							Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				26 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Lembaga Adat		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat													
							Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Lembaga Adat		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													

							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Lembaga Adat		420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	-			100 %	1.160.000.000,00						-	308.871.000,00	
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah yang dikembangkan	-			26 Obyek	1.160.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kesenian Tradisional	-	308.871.000,00	
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				30 Orang	1.160.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kesenian Tradisional		78.871.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				20 Sertifikat	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kesenian Tradisional		65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													

							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kesenian Tradisional		165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah yang dilaksanakan	-			60 %	0,00							-	59.100.000,00	
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sejarah Lokal yang dikembangkan	-			72 %	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sejarah Lokal	-	59.100.000,00	
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota															

							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				30 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sejarah Lokal		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				5 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sejarah Lokal		17.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														

							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sejarah Lokal		25.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya dilestarikan dan dikelola dilestarikan (kondisi baik dan terawat)	-			92 %	195.000.000,00						-	55.280.000,00	
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	presentase penetapan cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-			82 %	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya	-	17.080.000,00	
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya														

							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya		17.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase pengelolaan cagar budaya	-			81 %	195.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya	-	17.500.000,00	
	2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya													

							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	195.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya		17.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin mambawa cagar budaya yang dikelola	-			81 %	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya	-	20.700.000,00	
	2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				2 Objek	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya		10.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Cagar Budaya		10.350.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	JUMLAH											747.513.554.013,00							822.308.668.500,00	

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Utama DISDIKBUD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			2026
1	Indeks Pendidikan	Indeks	0,745
2	% Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	30,5
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,25
4	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,71
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	91,5
6	Nilai IKM	Nilai	86,5

Tabel 4.3.
Target Indikator Kinerja Kunci DISDIKBUD

No	Indikator	Satuan	Target
			2026
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100

Tabel 4.4.
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan DISDIKBUD yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026	PROGRAM / KEGIATAN DISDIKBUD TAHUN 2026 YANG MENDUKUNG	PAGU
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih		606.964.224.613

	dan akuntabel, mencegah korupsi		
		a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		b. Administratif keuangan Perangkat Daerah	
		c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	
3	KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran	Program Pengelolaan Pendidikan	138.909.329.400
		a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
		b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
		c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
		d. Pengelolaan Pendidikan Non-Formal/Kesetaraan	
4	Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade	Program Pengembangan Kebudayaan	285.000.000
		a. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		b. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.160.000.000
		a. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	195.000.000
		a. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam target dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran- sasaran pendidikan dan urusan kebudayaan. Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2026 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di DISDIKBUD, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi DISDIKBUD.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Renja DISDIKBUD Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026;
3. Renja DISDIKBUD Tahun 2026, digunakan untuk mengukur / menilai kinerja perangkat daerah dan pegawai DISDIKBUD, berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan;
4. Renja DISDIKBUD Tahun 2026 digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan selama 1 tahun dan pelaporannya;
5. Rencana Kerja DISDIKBUD Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten;

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan melaksanakannya di masyarakat.

Demikian Renja Disdikbud ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terencana.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 20256 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dimaklumi bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya. Selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Karanganyar, September 2025

Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos,. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199203 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum..... I-2
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-3
1.4. Sistematika..... I-3

BAB II GAMBARAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan perkraan Kinerja Tahun 2026. II-1
2.1.1. Evaluasi Anggaran..... II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.... II-46
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-51
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-52
2.5. Permasalahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-78

BAB III TUJUAN, DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... III-1
3.2. Tujaun dan Sasaran..... III-4
3.3. Tantangan dan Peluang PD..... III-6
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD..... III-9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... IV-1
4.1. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan..... IV-71
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... IV-71
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... IV-71

BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Dinas Kesehatan	II-3
Tabel 2.2.	Sumber Perbandingan Realisasi APBD Tahun 2024 dan 2025 (TW I)	II-12
Tabel 2.3.	Persandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	II-21
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD s/d Tahun	II-23
Tabel 2.5.	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 dan 2025	II-46
Tabel 2.6.	Capaian Kinerja Kunci Dinas Kesehatan	II-47
Tabel 2.7.	Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan	II-49
Tabel 2.8.	Capaian Indikator Tujuan dan Sasran Program Tahun 2024-2025	II-50 II-23
Tabel 2.9.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-53
Tabel 2.10.	Usulan Program dan Kgiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-78
Tabel 3.1.	Dukunga Kegiatan Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota	III-3
Tabel 3.2.	Tujuan, Sasran dan Program Tahun 2026	III-7
Tabel 3.3.	Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Ssaran dan Indikator OPD	III-10
Tabel 4.1.	Program Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026	IV-I
Tabel 4.2.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkraan Maju Tahun 2027	IV-7
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	IV-72
Tabel 4.4.	Daftar Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	IV-32

BAB.I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerahyang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematik dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun dan harus sejalan dengan dokumen Renstra. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2026, serta prakiraan maju anggaran tahun 2027. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan KabupatenKaranganyar Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahu 2025-2029, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RPJMD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPJMD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se- Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja 2026 adalah untuk menyusun pedoman perencanaan kerja, pelaksanaan program dan kegiatan dalam 1 (satu) Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dan menjadi bagian penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar

Tujuan Penyusunan Renja 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang sejalan dengan resntra 2025-2029 yang konsisten antara program dan kegiatan dengan visi misi
2. Tersedianya dokumen acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang memudahkan Dinas Kesehatan dalam pencapaian tujuan secara terpadu, terarah, dan terukur
3. Sebagai acuan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

1.4. Sistematika

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, fungsi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, keterkaitan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar denganRKPD dan dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

2.1. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struk tur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

3.1. Maksud dan Tujuan
Memuat maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 2025.

4.1. Sistematika Penulisan
Memuat sistematika penyajian dan pokok bahasan dalam laporanpenyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2025) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD

tahunberjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatanpelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerahtahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanandan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditingkatkan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap Rancangan RKPD berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan program dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadapprogram/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dalam satu tahun kedepan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Propinsi, Daerah
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusanisu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerahyang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.
Tantangan dan peluang yang ada di Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang uraian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, disertai dengan catatan penting yang perlumendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Renja Dinas Kesehatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda selama tahun 2024-2025. Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2024-2025 yang merupakan tahun pertama dan kedua dari rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, sehingga hasil evaluasi target kinerja pada tahun tersebut dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Permendagri Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ada 5 Program dengan 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (9 kegiatan) (23 sub kegiatan).
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (4 kegiatan) (40 sub kegiatan).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (2 kegiatan) (3 sub kegiatan).
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (5 kegiatan) (5 sub kegiatan).
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (3 kegiatan) (3 sub kegiatan).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Pada Evaluasi RKPD 2024 memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024 dan perkiraan pencapaian tahun 2025.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Dinas Kesehatan telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi Anggaran sebagaimana table 2.1 berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**291.262.956.168**	**318.814.683.808**	**109**	**308.000.383.994**	**309.205.383.994**	**100**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**312.958.000**	**416.433.000**	**133**	**348.238.000**	**526.538.000**	**151**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	217.000.000	386.143.000	178	251.952.450	280.952.450	112
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	13.000.000	100	33.000.000	190.000.000	576
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.958.000	7.290.000	10	53.285.550	45.585.550	86
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**122.478.402.468**	**119.160.279.173**	**97**	**127.469.220.931**	**128.352.860.931**	**101**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.771.123.303	80.451.625.008	96	84.231.697.841	128.124.184.931	152
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38472663165	38.472.663.165	100	43.008.847.090	-	#VALUE!
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	56.936.000	58.311.000	102	137.896.500	137.896.500	100
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	143.073.000	143.073.000	100	66.759.000	66.759.000	100
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34.607.000	34.607.000	100	24.020.500	24.020.500	100
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97.032.000**	**97.032.000**	**100**	**83.772.000**	**83.772.000**	**100**
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97.032.000	97.032.000	100	83.772.000	83.772.000	100
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**75.520.000**	**110.520.000**	**146**	**83.540.000**	**62.120.000**	**74**
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	35.000.000	#DIV/0!	15.000.000	15.000.000	100
14	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	45.580.000	45.580.000	100	48.580.000	27.160.000	56
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	29.940.000	29.940.000	100	19.960.000	19.960.000	100
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**443.750.000**	**445.200.000**	**100**	**501.495.575**	**501.850.575**	**100**
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**272.662.000**	274.112.000	101	272.059.575	272.414.575	100
17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.168.000	13.168.000	100	12.980.000	12.980.000	100
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	7.920.000	7.920.000	100	1.000.000	1.000.000	100
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	150.000.000	100	215.456.000	215.456.000	100
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.293.300.000**	**2.293.300.000**	**100**	**150.000.000**	**150.000.000**	**100**
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**2.060.000.000**	2.060.000.000	100	-	-	#VALUE!
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.300.000	233.300.000	100	150.000.000	150.000.000	100
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**688.638.000**	**666.238.000**	**97**	**698.638.000**	**698.638.000**	**100**
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.038.000	27.038.000	100	27.038.000	27.038.000	100
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	661.600.000	639.200.000	97	671.600.000	671.600.000	100
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**315.625.000**	**370.175.000**	**117**	**343.015.400**	**332.140.400**	**97**
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.975.000	198.400.000	103	206.868.000	206.868.000	100
26	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000	110.000.000	157	69.977.400	59.102.400	84

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
27	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**53.650.000**	61.775.000	115	66.170.000	66.170.000	100
IX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**164.557.730.700**	**195.255.506.635**	**119**	**178.322.464.088**	**178.497.464.088**	**100**
28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	120.000.000.000	141.385.793.518	118	129.000.000.000	129.000.000.000	100
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.965.100.000	2.143.811.193	109	2.151.000.000	2.151.000.000	100
30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.081.064.000	2.660.414.423	128	2.531.064.000	2.531.064.000	100
31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.388.972.136	2.675.000.440	112	2.491.823.899	2.491.823.899	100
32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.630.498.000	3.552.361.030	135	2.954.265.842	2.954.265.842	100
33	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.900.712.000	3.913.393.359	135	3.129.390.211	3.129.390.211	100
34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.068.824.000	2.665.621.464	129	2.481.755.059	2.481.755.059	100
35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.358.057.564	2.724.950.126	116	2.503.202.599	2.503.202.599	100
36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.644.701.000	3.386.231.539	128	3.100.522.948	3.100.522.948	100
37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.639.075.600	3.003.238.402	114	2.793.655.737	2.793.655.737	100
38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.120.710.000	2.371.566.445	112	2.141.620.553	2.141.620.553	100
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.758.000.000	1.901.476.687	108	1.872.401.930	1.872.401.930	100
40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.277.160.000	1.423.797.862	111	1.325.309.170	1.325.309.170	100
41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.404.241.000	1.700.000.000	121	1.666.832.084	1.666.832.084	100
42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.421.267.400	1.878.945.999	132	1.627.598.414	1.627.598.414	100
43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.780.552.000	3.283.757.617	118	3.190.356.000	3.190.356.000	100
44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.406.165.000	2.601.706.493	108	2.570.150.031	2.570.150.031	100
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.368.147.000	1.669.394.851	122	1.563.918.883	1.563.918.883	100
46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.733.508.000	2.738.320.923	100	2.403.350.000	2.403.350.000	100
47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.442.000.000	1.936.304.364	134	1.688.748.055	1.688.748.055	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.362.308.000	2.948.866.033	125	2.786.301.842	2.786.301.842	100
49	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.806.668.000	2.690.553.867	149	2.349.196.831	2.524.196.831	107
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**70.568.921.525**	**97.861.092.775**	**139**	**82.349.995.050**	**96.781.915.950**	**118**
X	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.579.497.700**	**10.749.116.550**	**85**	**23.231.463.300**	**17.727.562.700**	**76**
50	Pembangunan Puskesmas	-		#DIV/0!	12.935.138.250	-	#VALUE!
51	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.520.500.000	2.535.500.000	101	2.500.000.000	2.482.005.000	99
52	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		-	#DIV/0!	-	30.000.000	#VALUE!
53	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	75.000.000		0	203.356.750	41.015.300	20
54	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			#DIV/0!	638.595.300	0	0
55	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.255.459.400	1.034.854.000	82	1.869.009.000	0	0
56	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1.869.009.000	87.544.000	5	64.914.000	-	#VALUE!
57	Pengembangan Rumah Sakit	64.914.000		0	-		#VALUE!
58	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.794.615.300	7.091.218.550	104	5.020.450.000	15.174.542.400	302
XI	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**57.081.130.950**	**86.203.683.350**	**151**	**58.641.995.750**	**78.371.813.250**	**134**
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	249.937.000	249.682.000	100	66.000.000	66.000.000	100
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	278.932.000	278.932.000	100	58.530.000	224.752.000	384
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	467.950.000	467.950.000	100	56.000.000	416.120.000	743
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	100.000.000	100	64.000.000	64.000.000	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000	100.000.000	100	25.000.000	25.000.000	100
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	173.389.300	173.389.300	100	89.827.900	74.779.900	83
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	120.310.000	120.310.000	100	30.000.000	36.300.000	121
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	136.831.750	136.831.750	100	31.349.400	37.965.400	121
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.825.100	40.825.100	100	70.195.400	102.770.400	146
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	116.197.850	116.197.850	100	30.577.300	49.154.300	161
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	108.059.000	260.907.000	241	50.000.000	400.179.200	800
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	89.548.000	89.548.000	100	50.000.000	50.000.000	100
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	209.837.000	5.273.757.000	2513	71.152.800	1.047.832.800	1473
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	94.752.800	94.752.800	100	84.752.800	137.702.800	162
74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	210.000.000	210.000.000	100	90.247.200	265.247.200	294
75	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	386.847.000	390.847.000	101	50.000.000	486.687.000	973
76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	28.500.000	28.500.000	100	25.000.000	25.000.000	100
77	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	189.750.000	189.750.000	100	98.453.000	161.593.000	164
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
79	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
80	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	333.464.000	333.464.000	100	195.360.000	342.403.000	175
81	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.958.681.600	58.860.721.000	168	38.683.836.000	57.163.732.800	148
82	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			#DIV/0!	-	-	#VALUE!
83	Operasional Pelayanan Puskesmas	842.100.900	842.100.900	100	842.100.900	719.315.000	85

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
84	Operasional Pelayanan Puskesmas	819.706.000	819.706.000	100	819.706.000	839.791.000	102
85	Operasional Pelayanan Puskesmas	983.291.000	983.291.000	100	983.291.000	812.064.000	83
86	Operasional Pelayanan Puskesmas	959.538.000	959.538.000	100	959.538.000	730.656.000	76
87	Operasional Pelayanan Puskesmas	831.761.000	831.761.000	100	831.761.000	672.093.000	81
88	Operasional Pelayanan Puskesmas	881.268.000	881.268.000	100	881.268.000	768.913.000	87
89	Operasional Pelayanan Puskesmas	805.240.000	805.240.000	100	805.240.000	760.579.000	94
90	Operasional Pelayanan Puskesmas	940.251.000	940.251.000	100	940.251.000	728.413.000	77
91	Operasional Pelayanan Puskesmas	932.675.400	932.675.400	100	932.675.400	861.097.000	92
92	Operasional Pelayanan Puskesmas	910.642.800	910.642.800	100	910.642.800	726.997.500	80
93	Operasional Pelayanan Puskesmas	771.110.000	771.110.000	100	771.110.000	714.050.500	93
94	Operasional Pelayanan Puskesmas	680.534.500	680.534.500	100	680.534.500	690.956.000	102
95	Operasional Pelayanan Puskesmas	714.806.400	714.806.400	100	714.806.400	784.194.000	110
96	Operasional Pelayanan Puskesmas	688.026.300	688.026.300	100	688.026.300	776.763.000	113
97	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.007.818.700	1.007.818.700	100	1.007.818.700	804.255.000	80
98	Operasional Pelayanan Puskesmas	668.353.000	668.353.000	100	668.353.000	705.179.000	106
99	Operasional Pelayanan Puskesmas	679.872.000	679.872.000	100	679.872.000	662.898.000	98
100	Operasional Pelayanan Puskesmas	795.596.000	795.596.000	100	795.596.000	684.242.000	86
101	Operasional Pelayanan Puskesmas	682.284.000	682.284.000	100	682.284.000	653.045.000	96
102	Operasional Pelayanan Puskesmas	863.102.000	863.102.000	100	863.102.000	814.386.000	94
103	Operasional Pelayanan Puskesmas	776.310.000	776.310.000	100	776.310.000	754.592.000	97
104	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yankes)	400.200.000	400.200.000	100	370.200.000	370.200.000	100
105	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	294.800.000	294.800.000	100	281.680.000	304.567.500	108
106	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	403.500.550	403.500.550	100	552.435.950	552.435.950	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
107	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100.184.000	100.184.000	100	150.164.000	150.164.000	100
108	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	254.347.000	254.347.000	100	132.947.000	152.747.000	115
109	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (RSUD)	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
110	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
111	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
112	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	-		#DIV/0!	-	-	#VALUE!
XII	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**185.000.000**	**185.000.000**	**100**	**120.000.000**	**156.560.000**	**130**
114	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	185.000.000	185.000.000	100	120.000.000	156.560.000	130
XIII	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**723.292.875**	**723.292.875**	**100**	**356.536.000**	**525.980.000**	**148**
115	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	100
116	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	603.238.875	603.238.875	100	212.200.000	322.519.000	152
117	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	45.054.000	45.054.000	100	74.336.000	133.461.000	180
118	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000	50.000.000	100	45.000.000	45.000.000	100
C	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**4.252.321.000**	**4.229.501.000**	**99**	**2.226.990.000**	**3.264.776.000**	**147**
XIX	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**3.529.277.000**	**3.529.277.000**	**100**	**2.103.590.000**	**2.135.530.000**	**102**
119	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.242.440.000	2.242.440.000	100	2.018.880.000	2.018.880.000	100

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
120	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.286.837.000	1.286.837.000	100	84.710.000	116.650.000	138
XX	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**723.044.000**	**700.224.000**	**97**	**123.400.000**	**1.129.246.000**	**915**
121	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	723.044.000	700.224.000	**97**	123.400.000	1.129.246.000	915
D	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**623.536.300**	**678.536.300**	**109**	**186.334.700**	**547.836.700**	**294**
XXI	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**160.929.600**	**215.929.600**	**134**	**123.694.400**	**106.313.150**	**86**
122	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	160.929.600	215.929.600	134	123.694.400	106.313.150	86
XXII	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**291.950.350**	**291.950.350**	**100**	**34.572.950**	**343.859.950**	**995**
123	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	291.950.350	291.950.350	100	34.572.950	343.859.950	995
XXIII	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100**
124	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20.000.000	20.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100
XXIV	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**
125	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.000.000	15.000.000	100	10.000.000	10.000.000	100
XXV	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada**	**135.656.350**	**135.656.35**	**100**	**3.067.350**	**72.663.600**	**2369**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		**0**				
126	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	135.656.350	135.656.350	100	3.067.350	72.663.600	2369
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**688.690.550**	**636.922.550**	**92**	**250.000.000**	**588.096.000**	**235**
XXVI	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**491.095.550**	**439.327.550**	**89**	**150.000.000**	**380.000.000**	**253**
127	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	491.095.550	439.327.550	89	150.000.000	380.000.000	253
XXVII	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100**
128	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100
XXVIII	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**147.595.000**	**147.595.000**	**100**	**50.000.000**	**158.096.000**	**316**
129	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	147.595.000	147.595.000	100	50.000.000	158.096.000	316

Pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, alokasi anggaran sebesar Rp. 427.752.382.405,- (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan anggaran penetapan tahun 2025 sebesar Rp. 410.388.008.744,- (Empat Ratus Sepuluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**318.814.683.808**	**292.928.113.869**	**92**	**308.735.845.454**	**14.552.538.718**	**37**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.433.000**	**397.419.000**	**95**	**236.285.300**	**41.834.950**	**18**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	386.143.000	367.129.000	95	201.030.300	31.905.350	16
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	4.066.000	3.380.000	83
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	4.066.000	3.380.000	83
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	13.000.000	100	17.533.000	3.169.600	18
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.290.000	7.290.000	100	9.590.000	-	-
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**119.160.279.173**	**118.269.648.981**	**99**	**128.309.274.531**	**71.297.118.676**	**56**
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	80.451.625.008	79.640.961.562	99	128.124.184.931	71.232.537.926	56
7	Penyediaan Gaji	38.472.663.165	38.395.363.169	100			-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Tunjangan ASN				-		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	58.311.000	57.514.250	99	109.629.300	31.507.500	29
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	143.073.000	141.698.000	99	55.419.200	25.240.000	46
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	34.607.000	34.112.000	99	20.041.100	7.833.250	39
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**97.032.000**	**97.032.000**	**100**	**72.177.600**	**20.303.000**	**28**
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	97.032.000	97.032.000	100	72.177.600	20.303.000	28
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**110.520.000**	**108.490.000**	**98**	**90.722.000**	**-**	-
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000	34.650.000	99	65.000.000	-	-
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	45.580.000	43.900.000	96	15.742.000	-	-
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.940.000	29.940.000	100	9.980.000	-	-
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**445.200.000**	**406.721.587**	**91**	**328.249.900**	**105.057.475**	**32**
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	274.112.000	272.437.700	99	251.865.900	105.057.475	42
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.168.000	13.167.000	100	10.384.000	-	-
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.920.000	7.920.000	100	1.000.000	-	-
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	113.196.887	75	65.000.000	-	-
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.293.300.000**	**2.268.300.000**	**99**	**176.550.000**	**38.500.000**	**22**
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.060.000.000	2.045.000.000	99	-	-	-
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	26.550.000	-	-
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.300.000	223.300.000	96	150.000.000	38.500.000	26
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**666.238.000**	**474.458.642**	**71**	**692.981.635**	**208.105.290**	**30**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintahan Daerah						
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.038.000	27.037.400	100	21.381.635	5.651.000	26
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	639.200.000	447.421.242	70	671.600.000	202.454.290	30
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**370.175.000**	**368.361.250**	**100**	**332.140.400**	**95.801.275**	**29**
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.400.000	196.610.750	99	206.868.000	26.060.000	13
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	109.975.500	100	59.102.400	34.116.275	58
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.775.000	61.775.000	100	66.170.000	35.625.000	54
IX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**195.255.506.635**	**170.537.682.409**	**87**	**178.497.464.088**	**42.745.818.052**	**24**
27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	141.385.793.518	122.223.650.461	86	129.000.000.000	28.106.635.652	22
28	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.143.811.193	1.941.484.114	91	2.151.000.000	836.843.249	39
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.660.414.423	2.269.372.725	85	2.531.064.000	614.967.467	24
30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.675.000.440	2.422.049.777	91	2.491.823.899	703.848.549	28
31	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.552.361.030	3.110.008.619	88	2.954.265.842	743.769.961	25
32	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.913.393.359	3.411.329.534	87	3.129.390.211	876.443.769	28
33	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.665.621.464	2.484.602.712	93	2.481.755.059	842.646.697	34
34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.724.950.126	2.652.439.279	97	2.503.202.599	831.029.384	33
35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.386.231.539	3.219.505.123	95	3.100.522.948	818.329.672	26
36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.003.238.402	2.765.534.454	92	2.793.655.737	829.152.764	30
37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.371.566.445	2.063.019.101	87	2.141.620.553	502.980.653	23
38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.901.476.687	1.735.007.995	91	1.872.401.930	716.540.984	38
39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.423.797.862	1.271.863.665	89	1.325.309.170	399.878.492	30
40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.700.000.000	1.621.701.092	95	1.666.832.084	474.012.778	28
41	Pelayanan dan Penunjang	1.878.945.999	1.696.987.592	90	1.627.598.414	544.001.082	33

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan BLUD						
42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.283.757.617	3.069.795.504	93	3.190.356.000	807.386.653	25
43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.601.706.493	2.207.613.493	85	2.570.150.031	598.347.223	23
44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.669.394.851	1.436.707.711	86	1.563.918.883	391.880.939	25
45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.738.320.923	2.293.318.130	84	2.403.350.000	649.308.330	27
46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.936.304.364	1.809.930.004	93	1.688.748.055	561.309.392	33
47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.948.866.033	2.638.160.698	89	2.786.301.842	996.175.120	36
48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.690.553.867	2.193.600.626	82	2.524.196.831	900.329.242	36
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**99.730.101.775**	**92.841.365.362**	**93**	**96.425.581.622**	**31.297.428.755**	**32**
X	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.618.125.550**	**12.480.082.016**	**99**	**17.957.494.882**	**626.739.200**	**3**
49	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.535.500.000	2.455.217.530	97	2.482.005.000		0
50	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-			30.000.000		0
51	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.034.854.000	1.024.449.570	99	22.958.800	6.340.000	28
52	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	1.869.009.000	1.864.709.000	100	-		
53	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	87.544.000	85.927.000	98	-		
54	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.091.218.550	7.049.778.916	99	15.422.531.082	620.399.200	4
XI	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**86.203.683.350**	**79.469.746.262**	**92**	**77.959.685.450**	**30.490.657.455**	**39**
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	249.682.000	244.297.000	98	45.935.000	10.460.000	23
56	Pengelolaan Pelayanan	278.932.000	272.426.540	98	220.567.000	40.090.000	18

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesehatan Ibu Bersalin						
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	467.950.000	417.613.500	89	409.590.000	73.654.500	18
58	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000	97.529.300	98	39.981.600	2.120.000	5
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100.000.000	97.280.000	97	20.419.600	3.150.000	15
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	173.389.300	170.474.300	98	36.079.700	10.090.000	28
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	120.310.000	117.450.000	98	34.824.250	15.930.000	46
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	136.831.750	135.064.750	99	20.275.400	10.075.400	50
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40.825.100	40.650.100	100	98.912.000	6.400.000	6
64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	116.197.850	114.808.850	99	33.891.300	15.960.000	47
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	260.907.000	233.930.000	90	47.407.400	7.108.000	15
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	89.548.000	88.738.000	99	10.170.000	4.770.000	47
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.273.757.000	5.235.270.000	99	1.017.383.800	930.500.640	91
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	94.752.800	92.707.800	98	113.486.800	44.683.900	39
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	210.000.000	207.235.000	99	210.882.250	14.828.400	7
71	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	390.847.000	386.472.000	99	484.030.200	26.110.000	5
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	28.500.000	27.010.000	95	5.705.200	-	0
73	Pengelolaan	189.750.000	183.532.000	97	117.942.700	32.406.200	27

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Surveilans Kesehatan						
74	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	333.464.000	332.558.550	100	274.717.300	46.982.800	17
75	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	58.860.721.000	53.283.771.167	91	57.759.119.000	25.208.238.456	44
76	Operasional Pelayanan Puskesmas	842.100.900	741.821.144	88	719.315.000	171.411.650	24
77	Operasional Pelayanan Puskesmas	819.706.000	816.444.304	100	839.791.000	161.089.740	19
78	Operasional Pelayanan Puskesmas	983.291.000	911.795.177	93	812.064.000	198.375.257	24
79	Operasional Pelayanan Puskesmas	959.538.000	877.538.807	91	730.656.000	216.889.327	30
80	Operasional Pelayanan Puskesmas	831.761.000	778.636.097	94	672.093.000	177.582.599	26
81	Operasional Pelayanan Puskesmas	881.268.000	864.291.276	98	768.913.000	227.880.687	30
82	Operasional Pelayanan Puskesmas	805.240.000	756.941.236	94	760.579.000	222.705.064	29
83	Operasional Pelayanan Puskesmas	940.251.000	921.803.060	98	728.413.000	170.408.046	23
84	Operasional Pelayanan Puskesmas	932.675.400	907.851.333	97	861.097.000	178.435.995	21
85	Operasional Pelayanan Puskesmas	910.642.800	841.960.890	92	726.997.500	186.097.498	26
86	Operasional Pelayanan Puskesmas	771.110.000	755.804.523	98	714.050.500	169.266.689	24
87	Operasional Pelayanan Puskesmas	680.534.500	664.293.663	98	690.956.000	105.178.717	15
88	Operasional Pelayanan Puskesmas	714.806.400	714.202.000	100	784.194.000	217.130.760	28
89	Operasional Pelayanan Puskesmas	688.026.300	675.268.567	98	776.763.000	187.427.079	24
90	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.007.818.700	980.401.174	97	804.255.000	197.060.503	25
91	Operasional Pelayanan Puskesmas	668.353.000	632.255.963	95	705.179.000	193.764.300	27
92	Operasional Pelayanan Puskesmas	679.872.000	649.227.113	95	662.898.000	147.943.234	22
93	Operasional Pelayanan Puskesmas	795.596.000	761.154.362	96	684.242.000	124.019.213	18
94	Operasional Pelayanan Puskesmas	682.284.000	583.982.371	86	653.045.000	148.954.651	23
95	Operasional Pelayanan Puskesmas	863.102.000	831.655.947	96	814.386.000	228.726.199	28
96	Operasional Pelayanan Puskesmas	776.310.000	620.393.909	80	754.592.000	128.843.000	17
97	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Yankes)	400.200.000	1.051.187.489	263	364.597.700	134.918.221	37
98	Operasional	294.800.000		0	541.834.750	37.389.919	7

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)						
99	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	403.500.550		0	268.448.700	20.307.711	8
100	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100.184.000	99.384.000	99	43.727.800	21.232.900	49
101	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	254.347.000	252.633.000	99	75.277.000	14.060.200	19
XII	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**185.000.000**	**184.344.000**	**100**	**112.129.750**	**51.940.000**	**46**
102	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	185.000.000	184.344.000	100	112.129.750	51.940.000	46
XIII	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**723.292.875**	**707.193.084**	**98**	**396.271.540**	**128.092.100**	**32**
103	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	25.000.000	24.925.000	100	10.558.140	1.500.000	14
104	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Dinkes)	603.238.875	632.268.084	105	230.016.400	86.880.000	38
105	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	45.054.000		0	133.461.000	30.958.000	23
106	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	50.000.000	50.000.000	100	22.236.000	8.754.100	39
C	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**4.229.501.000**	**3.968.632.000**	**94**	**3.143.807.300**	**915.029.300**	**29**
XIX	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**3.529.277.000**	**3.278.933.000**	**93**	**2.047.340.000**	**667.620.000**	**33**
107	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.242.440.000	2.044.600.000	91	2.018.880.000	650.130.000	32
108	Pembinaan dan Pengawasan	1.286.837.000	1.234.333.000	96	28.460.000	17.490.000	61

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sumber Daya Manusia Kesehatan						
XX	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**700.224.000**	**689.699.000**	**98**	**1.096.467.300**	**247.409.300**	**23**
109	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.224.000	689.699.000	98	1.096.467.300	247.409.300	23
D	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**678.536.300**	**673.281.300**	**99**	**485.425.970**	**82.978.250**	**17**
XXI	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**215.929.600**	**212.354.600**	**98**	**76.760.880**	**22.360.000**	**29**
110	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	215.929.600	212.354.600	98	76.760.880	22.360.000	29
XXII	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**291.950.350**	**291.304.350**	**100**	**316.182.860**	**44.347.750**	**14**
111	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	291.950.350	291.304.350	100	316.182.860	44.347.750	14
XXIII	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)**	**20.000.000**	**20.000.000**	**100**	**13.200.000**	**10.125.000**	**77**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
112	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	20.000.000	20.000.000	**100**	13.200.000	10.125.000	77
XXIV	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100**	**7.943.000**	**-**	**0**
113	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	15.000.000	15.000.000	100	7.943.000	-	0
XXV	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**135.656.350**	**134.622.350**	**99**	**71.339.230**	**6.145.500**	**9**
114	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	135.656.350	134.622.350	99	71.339.230	6.145.500	9
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**636.922.550**	**633.873.550**	**100**	**527.696.000**	**106.600.000**	**20**
XXVI	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**439.327.550**	**436.747.550**	**99**	**367.405.000**	**88.200.000**	**24**
115	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	439.327.550	436.747.550	99	367.405.000	88.200.000	24
XXVII	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**50.000.000**	**49.906.000**	**100**	**31.960.000**	**6.010.000**	**19**
116	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	50.000.000	49.906.000	100	31.960.000	6.010.000	19

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bersih dan Sehat						
XXVIII	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**147.595.000**	**147.220.000**	**100**	**128.331.000**	**12.390.000**	**10**
117	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	147.595.000	147.220.000	100	128.331.000	12.390.000	10

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 424.089.745.433,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 391.045.266.081,00 atau 92,21**%,** lebih rendah dibanding tahun 2023 sebesar 92,22%. Sedangkan capaian sampai dengan Tribulan II Tahun 2025 adalah Rp.146.954.575.023,00 atau 35,90% dari pagu anggaran Rp. 308.735.845.454,00 dihitung berdasarkan pagu efisiensi.

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	2023			2024		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	331.841.369.237	312.208.783.476	94	318.814.683.808	292.928.113.869	92
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	97.036.709.600	83.261.272.864	86	99.730.101.775	92.841.365.362	93
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.462.852.000	4.094.089.608	92	4.229.501.000	3.968.632.000	94
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	514.555.100	487.085.282	95	678.536.300	673.281.300	99
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	919.377.000	904.236.000	98	636.922.550	633.873.550	100

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Dinas Kesehatan perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2024-2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 pada halaman berikutnya.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%**	**90%**	**81%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**Belum ada data**	**90%**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen selama 1 tahun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen selama 1 tahun	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen selama 1 tahun	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan selama 1 tahun	6 dokumen	6 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 laporan	1 laporan	6 laporan
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan selama 1 tahun	2 dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 laporan	Belum ada data	2 laporan
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD dalam 1 tahun di kali 100%**	**90%**	**82%**	**90%**	**90%**	**100%**	**90%**	**Belum ada data**	**90%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang selama 1 tahun	900 orang/bulan	14 Bulan	900 orang/bulan	900 orang/bulan	100%	1500 orang/ bulan	1500 orang/bulan	1500 orang/ bulan
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang selama 1 tahun	250 orang/bulan	14 Bulan	250 orang/bulan	250 orang/bulan	100%	250 orang/ bulan	250 orang/ bulan	250 orang/ bulan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan selama 1 tahun	5 laporan	5 dokumen	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	1 laporan	5 laporan
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan selama 1 tahun	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	4 laporan
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen selama 1 tahun	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	Belum ada data	2 dokumen
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD sesuai standar dalam 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan selama 1 tahun	2 laporan	3 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	1 laporan	2 laporan
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai selama 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banyaknya orang yang mendapatkan pakaian dinas dalam jangka waktu 1 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai dalam 1 tahun	-	-	-	-	-	20 oarang	Belum ada data	20 oarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai dalam 1 tahun	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	150 orang	Belum ada data	150 orang
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai dalam 1 tahun	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	Belum ada data	100 orang
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor selama 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya barang untuk memenuhi kebutuhan kantor dalam waktu 1 tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	Belum ada data	1 paket
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banyaknya barang untuk memenuhi kebutuhan kantor dalam waktu 1 tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	Belum ada data	1 paket
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen selama 1 tahun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan selama 1 tahun	200 laporan	200 laporan	200 laporan	200 laporan	100%	200 laporan	25 laporan	200 laporan
1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD selama 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibeli dalam 1 tahun	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat dan mesin yang dibeli dalam 1 tahun	-	3 unit	-	-	-	4 unit	Belum ada data	4 unit
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	Belum ada data	4 unit
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Persentase pemenuhan kebutuhan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemerintahan Daerah	**operasional kantor selama 1 tahun di kali 100%**								
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen selama 1 tahun	150 laporan	150 laporan	150 laporan	150 laporan	100%	150 laporan	45 laporan	150 laporan
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan yang dapat disediakan dalam 1 tahun	12 laporan	3 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	12 laporan
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah selama 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dipelihara maupun dibayarkan pajaknya dalam 1 tahun	29 unit	17 unit	29 unit	29 unit	100%	29 unit	5 unit	29 unit
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dalam 1 tahun	4 unit	3 unit	4 unit	4 unit	100%	4 unit	1 unit	4 unit
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dalam 1 tahun	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	1 unit	3 unit
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Nilai IKM selama 1 tahun di kali 100%**	**82%**	**80**	**82%**	**82%**	**100%**	**82&**	**Belum ada data**	**82&**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Jatipuro	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Jatiyoso	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Jumapolo	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
	BLUD Pusk. Jumantono	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Matesih	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Tawangmangu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Ngargoyoso	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Karangpandan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Karanganyar	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Tasikmadu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Jaten I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Jaten II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Colomadu I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Colomadu II	Jumlah BLUD yang Menyediakan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan								
	BLUD Pusk. Gondangrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Kebakkramat I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Kebakkramat II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Mojogedang I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Mojogedang II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Kerjo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
	BLUD Pusk. Jenawi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
01.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah fasyankes primer yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes primer yang terakreditasi dikali 100%**	**25%**	**100%**	**25%**	**25%**	**100%**	**25%**	**Belum ada data**	**25%**
		Jumlah fasyankes rujukan yang terakreditasi minimal utama dibagi jumlah seluruh fasyankes primer dikali 100%	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**50%**	**Belum ada data**	**50%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah desa STBM dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	**45%**	**<0,2%**	**45%**	**45%**	**100%**	**48%**	**Belum ada data**	**48%**
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100%.	**100%**	**41%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan dibagi jumlah fasyankes yang ada dikali 100%.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**55%**	**Belum ada data**	**55%**
		Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%	**100%**	**40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* Jumlah ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* Jumlah bayi baru lahir di wilyah	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.								
		Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* Jumlah balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran *dibagi* Jumlah anak usia pendidikan dasar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran *dikali* 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* jumlah penduduk usia 15 - 59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.								
		Jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* jumlah pernderita hioertensi usia 15 tahu keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun keatas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* Jumlah ODGJ berat di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* jumlah orang terduga TBC di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV **sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dibagi* jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun *dikali* 100%.**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilita Pelayanan Kesehatan yang dibina dalam 1 tahun**	**2 unit**	**100%**	**2 unit**	**2 unit**	**100%**	**2 unit**	**Belum ada data**	**2 unit**
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun dalam 1 tahun	-	1 unit	-	-	-	2 unit	-	2 unit
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun dalam 1 tahun	5 unit	1 Unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	Belum ada data	5 unit
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana RS yang dapat ditingkatkan selama 1 tahun	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana faskes lainnya yang dapat ditingkatkan selama 1 tahun yang sesuai standar	1 unit	2 Unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	1 unit
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah	Jumlah sarpras dan alkes yang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sakit	dilakukan rehabiltasi oleh RS selama 1 tahun								
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	3 Unit	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan selama 1 tahun	5 unit	1 paket	5 unit	5 unit	100%	1paket	Belum ada data	1paket
1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center selama 1 tahun	24 unit	15 unit	24 unit	24 unit	100%	24 unit	Belum ada data	24 unit
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Rumah Sakit selama 1	-	1 paket	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan selama 1 tahun	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	Belum ada data	1 paket
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam 1 (satu) tahun**	**29 unit**	**100%**	**29 unit**	**29 unit**	**100%**	**29 unit**	**Belum ada data**	**29 unit**
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	11.944 orang	13.532 orang	11.944 orang	11.944 orang	100%	11.944 orang	Belum ada data	11.944 orang
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	11.401 orang	11.557 orang	11.401 orang	11.401 orang	100%	11.401 orang	Belum ada data	11.401 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	10.858 orang	13.543 orang	10.858 orang	10.858 orang	100%	10.858 orang	Belum ada data	10.858 orang
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	53.248 orang	13.430 Orang	53.248 orang	53.248 orang	100%	53.248 orang	Belum ada data	53.248 orang
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	24.705 orang	63.418 Orang	24.705 orang	24.705 orang	100%	24.705 orang	Belum ada data	24.705 orang
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	514.000 orang	30.085 Orang	514.000 orang	514.000 orang	100%	51.400 orang	Belum ada data	51.400 orang
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	122.535 orang	590.258 Orang	122.535 orang	122.535 orang	100%	12.253 orang	Belum ada data	12.253 orang
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	164.000orang	110.649 Orang	164.000orang	164.000orang	100%	16.400 orang	Belum ada data	16.400 orang
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar selama 1 tahun	17.550 orang	72.165 Orang	17.550 orang	17.550 orang	100%	17.550 orang	Belum ada data	17.550 orang
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar selama 1 tahun	2.150 orang	11.841 Orang	2.150 orang	2.150 orang	100%	2.150 orang	Belum ada data	2.150 orang
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	6.500 orang	1.192 Orang	6.500 orang	6.500 orang	100%	6.500 orang	Belum ada data	6.500 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pelayanan Sesuai Standar selama 1 tahun								
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar selama 1 -tahun -	13.500 orang	245 Orang	13.500 orang	13.500 orang	100%	13.500 orang	Belum ada data	13.500 orang
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah- Dokumen Hasil Pengelo-laan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar selama 1 tahun	12 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	2 dokumen	12 dokumen
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat selama 1 tahun	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen	1 dokumen	5 dokumen
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga selama 1 tahun	5 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	1 dokumen	5 dokumen
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan selama 1 tahun	8 dokumen	1 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	1 dokumen	8 dokumen
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan selama 1 tahun	3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	3 dokumen
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya selama 1 tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
1.02.02.2.02.002	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 dokumen	1 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	2 dokumen	12 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
0		Surveilans Kesehatan selama 1 tahun								
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapat pelayanan kesehatan selama 1 tahun	0,3 orang	-	0,3 orang	0,3 orang	100%	0,4 orang	-	0,4 orang
1.02.02.2.02.0022	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan selama 1 tahun	10 orang	-	10 orang	10 orang	100%	10 orang	-	10 orang
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular selama 1 tahun	4 dokumen	1 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	Belum ada data	4 dokumen
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat selama 1 tahun	36 dokumen	1 Dokumen	36 dokumen	36 dokumen	100%	36 dokumen	5 dokumen	36 dokumen
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah selama 1 tahun	21 orang	-	21 orang	21 orang	100%	-	-	-
1.02.02.2.02.0033	**Operasional Pelayanan Puskesmas**	**Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas**	**1 dokumen**	**1 Dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100%**	**1 dokumen**	**Belum ada data**	**1 dokumen**
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jatipuro	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jatiyoso	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jumapolo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jumantono	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Matesih	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Tawangmangu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Ngargoyoso	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Karangpandan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Karanganyar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Tasikmadu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jaten I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jaten II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Colomadu I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Colomadu II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.003	BOK Pusk. Gondangrejo	Jumlah Dokumen Operasional	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3		Pelayanan Puskesmas								
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Kebakkramat I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Kebakkramat II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Mojogedang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Mojogedang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Kerjo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0033	BOK Pusk. Jenawi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya (Yankes)	Operasional Pelayanan UPT Instalasi Perbekalan Farmasi sesuai standar selama 1 tahun	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya selama 1 tahun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT IPF)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya selama 1 tahun	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	**Belum ada data**	1 dokumen
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota selama 1 tahun	27 unit	2 dokumen	27 unit	27 unit	100%	27 unit	Belum ada data	27 unit
1.02.02.2.02.003	Investigasi Awal Kejadian Tidak	Jumlah Laporan Hasil Investigasi	12 laporan	5 unit	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	2 laporan	12 laporan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
6	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) selama 1 tahun								
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah selama 1 tahun	62 dokumen	1 laporan	62 dokumen	62 dokumen	100%	52 dokumen	-	52 dokumen
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah selama 1 tahun	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1.204 orang	-	1.204 orang
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						134 orang	-	134 orang
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria						50 orang	-	50 orang
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah sistem informasi terintegrasi dibagi jumlah seluruh sistem informasi dalam 1 tahun dikali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan selama 1 tahun	90 dokumen	3 dokumen	90 dokumen	90 dokumen	100%	90 dokumen	20 dokumen	90 dokumen
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan selama 1 (satu) tahun**	**5 unit**	**100%**	**5 unit**	**5 unit**	**100%**	**5 unit**	**Belum ada data**	**5 unit**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya selama 1 tahun	40 unit	8 unit	40 unit	40 unit	100%	45 unit	10 unit	45 unit
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan selama 1 tahun	67 unit	27 unit	67 unit	67 unit	100%	67 unit	15 unit	67 unit
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Yang Memenuhi Standart Pelayanan selama 1 tahun	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	Belum ada data	1 unit
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Selama 1 tahun	1 dokumen	8 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	Belum ada data	1 dokumen
01.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Jumlah tenaga medis yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah tenaga medis yang ada dikali 100%.**	**45%**	**40%**	**45%**	**45%**	**100%**	**47%**	**Belum ada data**	**47%**
		Jumlah tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah tenaga kesehatan yang ada dikali 100%.	**45%**	**40%**	**45%**	**45%**	**100%**	**47%**	**Belum ada data**	**47%**
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah perencanaan dan pendayagunaan dalam 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.03.2.02.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya Manusia	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	150 orang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	Manusia Kesehatan sesuai Standar	Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) selama 1 tahun								
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan selama 1 tahun	5 dokumen	4 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	1 dokumen	5 dokumen
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya dibagi Jumlah seluruh SDM Tenaga Kesehatan dalam 1 tahun dikali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya selama 1 tahun	150 orang	500 orang	150 orang	150 orang	100%	150%	Belum ada data	150%
01.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian dibagi sarana kesehatan yang ada dikali 100%.**	**45%**	**40%**	**45%**	**45%**	**100%**	**47%**	**Belum ada data**	**47%**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah fasyankes penunjang yang berijin dibagi jumlah fasyankes penunjang yang ada dalam 1 tahun di kali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	Belum ada data	1 dokumen

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		selama 1 tahun)								
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah PIRT yang berijin dibagi jumlah PIRT yang ada dalam 1 tahun dikali 100%**	**50%**	**100%**	**50%**	**50%**	**100%**	**55%**	**Belum ada data**	**55%**
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga selama 1 tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	Belum ada data	1 dokumen
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Jumah TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi dibagu jumlah TPM yang ada dalam 1 tahun dikali 100%**	**100%**	**45%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) selama 1 tahun)	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	6 dokumen	1 dokumen	6 dokumen
1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada**	**Jumlah TPM yang dibina dibagi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	**Jumlah TPM yang dalam 1 Tahun dibagi 100%**								
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan selama 1 tahun	2 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	Belum ada data	2 dokumen
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah PIRT berijin yang dievaluasi dibagi Jumlah PIRT berijin dikali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan selama 1 tahun	100 unit	50 unit	100 unit	100 unit	100%	110 unit	25 unit	110 unit
01.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Jumlah desa siaga aktif mandiri dalam 1 tahun**	**29 desa**	**100%**	**29 desa**	**29 desa**	**100%**	31 Desa	**Belum ada data**	31 Desa
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah advokasi, pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor terealisasi dibagi jumlah advokasi, pemberdayaan kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor dikali 100%**	**30%**	**100%**	**30%**	**30%**	**100%**	**30%**	**Belum ada data**	**30%**
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 1 tahun	3 dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	Belum ada data	3 dokumen
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka**	**Jumlah gerakan preventif dan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/sub kegiatan versi Permendagri 90	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**promotif yang dibina dibagi jumlah gerakan preventif dan promotif dikali 100%**								
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat selama 1 tahun	2 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	3 dokumen	Belum ada data	3 dokumen
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah UKBM yang aktif dibagi jumlah UKBM yang ada dalam 1 tahun dikali 100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**Belum ada data**	**100%**
1.02.05.2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) selama 1 tahun	2 dokumen	1 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	Belum ada data	2 dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Dinas Kesehatan melaksanakan urusan wajib untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagai fungsi pelayanan dasar bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mempunyai 12 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator SPM	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi s/d tribulan III	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.569	10.569	100	10.060	7.882	78,34
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.379	10.379	100	9.324	6.992	74,99
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10.298	10.298	100	9.310	6.980	74,97
4	Pelayanan Kesehatan Balita						
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	52.108	52.108	100	44.552	35.487	79,65
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	26.703	26.703	100	25.788	23.446	90,91
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	520.205	520.205	100	523.745	441.380	84,27
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	186.832	186.832	100	174.944	144.877	82,81
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	175.961	175.961	100	178.439	149.918	84,02
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)						
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18.867	18.867	100	19.221	16.829	87,56
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)						

No	Indikator SPM	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	realisasi	%	Target	Realisasi s/d tribulan III	%
	Berat						
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.264	2.264	100	2.306	1.666	72,25
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.283	7.283	100	5.500	5.349	97,25
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)						
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	13.210	13.210	100	12.247	9.703	79,23

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
(Permendagri 18 Tahun 2020)

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW 3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cakupan rumah sakit terakreditasi minimal strata utama di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	-	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	100	100	100	25
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	78,34
3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	74,99
4	Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	74,97

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun						
5	Cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	79,65
6	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	90,91
7	Cakupan orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayahkerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase anak usia pcndidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	84,27
8	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standa	100	100	100	82,81
9	Cakupan penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa	100	100	100	84,02
10	Cakupan penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendap	100	100	100	87,56

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW 3
1	2	3	4	5	6	7	8
	kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun						
11	Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	103	72,25
12	Cakupan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	97,25
13	Cakupan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahu	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	79,23

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Tahun 2024 Dinas Kesehatan

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/ Sasaran**	**Sasaran Kinerja Tahun 2024**			**Komdisi Akhir RPD (tahun 2026)**		
			Target	**Realisasi**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**%**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		UHH (th)	77,67	77,91	100,31	77,73	77,91	100,31
	Menurunnya angka kematian di sasaran prioritas	AKI/ 100.000 Kelahiran Hidup	74	48,27	153,30	70	48,27	93,43
		AKB/ 1000 kelahiran	9,5	9,74	97,54	9,1	9,74	93.43
		Persentase Balita Gizi	0,05	0,01	500,00	0,05	0,01	500,00

		Buruk						
	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi	Nilai SAKIP	81	77,60	95,80	81	77,60	95,80

Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memperoleh nilai sebesar 77,60 atau BB dengan kategori sangat baik yaitu Akuntabilitas kinerjanya Baik, akuntabel, memiliki sistem kerja yang handal.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Program
Tahun 2024-2025 (Tribulan I)

No	Program	Indikator Keluaran	Target	2024		2025	
				Realisasi	%	Target	Realisasi (Tribulan I)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	90%			90	belum ada data
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasyankes Primer terakreditasi minimal utama	25%	25	100	25%	belum ada data
		Persentase fasyankes Rujukan (RS) terakreditsasi minimal utama	50%	50	100	50%	belum ada data
		Persentase Desa STBM	45%	45	100	48%	belum ada data
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase fasyankes yang memenuhi standar sumber daya kesehatan	50%	50	100	55%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	100%	100	100	100%	belum ada data

No	Program	Indikator Keluaran	Target	2024		2025	
				Realisasi	%	Target	Realisasi (Tribulan I)
		Melitus					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	100	100	100%	belum ada data
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga medis sesuai kompetensi	45%	45	100	47%	belum ada data
		Persentase tenaga kesehatan sesuai standar kompetensi	45%	45	100	47%	belum ada data
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kefarmasian	45%	45	100	47%	belum ada data
		Persentase sarana kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	100%	100	100	100%	belum ada data
		Persentase TPM yang memenuhi syarat	45%	45	100	47%	belum ada data
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Desa siaga Aktif Mandiri	29 desa	29	100	31 desa	belum ada data
		Persentase rumah tangga sehat	90%	90	100	90	belum ada data

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan Kesehatan di Kabupaten Karanganyar, mencakup Kesehatan secara fisik, mental, sosial, dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif , dan rehabilitatif. Bukan hanya AKI dan AKB, namun penyakit tidak menular dan penyakit menular cenderung meningkat. Di sisi lain, stunting masih menjadi masalah. Penurunan prevalensi stunting salah satunya dipengaruhi oleh gizi buruk selain weight faltering, underweight, dan gizi kurang. Selain itu penderita obesitas (gizi lebih) meningkat dan mengancam kesehatan masyarakat (The double burden of Malnutrition).

Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan, baik dari segi ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun fasilitas pendukung.
2. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, seperti TBC, DBD, hipertensi, diabetes melitus, serta penyakit akibat gaya hidup.

3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk kepatuhan dalam mengikuti imunisasi, skrining kesehatan, dan pola makan bergizi seimbang.
4. Masih tingginya angka stunting dan permasalahan gizi lainnya, yang memerlukan intervensi lintas sektor dan penguatan program gizi dari hulu ke hilir.
5. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun kompetensi, terutama untuk pelayanan rujukan dan kegawatdaruratan.
6. Kurangnya optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaporan yang akurat dan real time.
7. Masih perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemangku kepentingan, baik dalam aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Berdasarkan Analisa terhadap permasalahan daerah serta telaah isu strategis tingkat nasional dan provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan isu strategis daerah terkait bidang Kesehatan sesuai yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 adalah masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan transformasi pelayanan Kesehatan guna meningkatkan derajat Kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 76,58 dan usia harapan hidup sebesar 77,64 tahun.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan, berikut ini dirumuskan isu-isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk periode perencanaan tahun 2025–2029:

1. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Belum Merata
   Masih terdapat disparitas atau kesenjangan dalam ketersediaan, kualitas layanan dan kualitas fasilitas kesehatan primer dan rujukan terutama di wilayah terpencil, serta mendorong integrasi layanan primer. Hal ini mencakup keterbatasan sarana prasarana, layanan gawat darurat, serta kesenjangan pelayanan antar wilayah seperti puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan layanan kesehatan disetiap desa.
2. Peningkatan Beban Penyakit dan Rendahnya Kesadaran Masyarakat
   Terjadi beban ganda penyakit menular dan tidak menular yang terus meningkat, seperti TBC, DBD, hipertensi, dan diabetes. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta dalam mengikuti upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit.
3. Belum optimalnya kualitas SDM Kesehatan dan Sistem Informasi
   Terdapat ketimpangan distribusi dan kapasitas tenaga kesehatan antar wilayah, baik jumlah maupun kompetensinya. Selain itu, sistem informasi kesehatan belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026. Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD seperti pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**368.257.634.243**				**383.517.934.540**	
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**78**	**298.996.272.243**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**78**	**303.490.253.340**	
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**212.680.100**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	**195.000.000**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	180.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	150.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	5.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	13.412.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	15.000.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	11.267.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	20.000.000	
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD**	**90**	**128.103.411.926**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase capaian anggaran OPD**	**90**	**131.433.253.340**	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1500	127.955.709.426	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1500	131.263.253.340	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	82.759.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	54.271.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	50.000.000	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	10.672.500	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	20.000.000	
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD yang disusun sesuai standar**	**100**	**97.297.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen BMD yang disusun sesuai standar**	**100**	**75.000.000**	
10	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	97.297.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	75.000.000	
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen kebutuhan pegawai yang disusun**	**100**	**22.265.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen kebutuhan pegawai yang disusun**	**100**	**55.000.000**	
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-	
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	5.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	20.000.000	
13	Sosialisasi Peraturan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan	35	7.285.000	Sosialisasi Peraturan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan	35	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perundang-undangan	Perundang-Undangan			Perundang-undangan	Perundang-Undangan			
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	9.980.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	15.000.000	
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**	**100**	**330.253.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan kantor**	**100**	**316.000.000**	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	190.253.100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1	225.000.000	
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1	10.000.000	
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2	1.000.000	
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	80.000.000	
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD**	**100**	**142.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana OPD**	**100**	**176.000.000**	
19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	26.000.000	
20	Pengadaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan Mesin	4	7.000.000	Pengadaan Peralatan dan	Tersedianya Peralatan dan Mesin	4	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mesin Lainnya	Lainnya			Mesin Lainnya	Lainnya			
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersediannya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	135.000.000					
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**	**100**	**615.452.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor**	**100**	**690.000.000**	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	11.640.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	20.000.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	603.812.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	670.000.000	
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**	**100**	**278.762.500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah**	**100**	**350.000.000**	
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30	172.897.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	75.000.000	
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	45.865.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	75.000.000	
IX	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**IKM RSUD**	**82**	**169.194.150.117**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**IKM RSUD**	**82**	**##############**	
		IKM Puskesmas Jatipuro	**84**			**IKM Puskesmas Jatipuro**	**84**		
		IKM Puskesmas Jatiyoso	**83,25**			**IKM Puskesmas Jatiyoso**	**83,25**		
		IKM Puskesmas Jumapolo	**82**			**IKM Puskesmas Jumapolo**	**82**		
		IKM Puskesmas Jumantono	**86,1**			**IKM Puskesmas Jumantono**	**86,1**		
		IKM Puskesmas Matesih	**84**			**IKM Puskesmas Matesih**	**84**		
		IKM Puskesmas Tawangmangu	**86**			**IKM Puskesmas Tawangmangu**	**86**		
		IKM Puskesmas Ngargoyoso	**82**			**IKM Puskesmas Ngargoyoso**	**82**		
		IKM Puskesmas Karangpandan	**85**			**IKM Puskesmas Karangpandan**	**85**		
		IKM Puskesmas Karanganyar	**85**			**IKM Puskesmas Karanganyar**	**85**		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKM Puskesmas Tasikmadu	**84**			**IKM Puskesmas Tasikmadu**	**84**		
		IKM Puskesmas Jaten I	**90**			**IKM Puskesmas Jaten I**	**90**		
		IKM Puskesmas Jaten II	**86**			**IKM Puskesmas Jaten II**	**86**		
		IKM Puskesmas Colomadu I	**82,5**			**IKM Puskesmas Colomadu I**	**82,5**		
		IKM Puskesmas Colomadu II	**85,88**			**IKM Puskesmas Colomadu II**	**85,88**		
		IKM Puskesmas Gondangrejo	**87,5**			**IKM Puskesmas Gondangrejo**	**87,5**		
		IKM Puskesmas Kebakkramat I	**88**			**IKM Puskesmas Kebakkramat I**	**88**		
		IKM Puskesmas Kebakkramat II	**83**			**IKM Puskesmas Kebakkramat II**	**83**		
		IKM Puskesmas Mojogedang I	**82**			**IKM Puskesmas Mojogedang I**	**82**		
		IKM Puskesmas Mojogedang II	**90**			**IKM Puskesmas Mojogedang II**	**90**		
		IKM Puskesmas Kerjo	**82**			**IKM Puskesmas Kerjo**	**82**		
		IKM Puskesmas Jenawi	**88**			**IKM Puskesmas Jenawi**	**88**		
		IKM Labkesda	**85**			**IKM Labkesda**	**85**		
27	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	118.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	120.000.000.000	
28	Pelayanan dan Penunjang	Tersedianya BLUD yang Menyediakan	21	51.194.150.117	Pelayanan dan Penunjang	Tersedianya BLUD yang Menyediakan	21	50.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
29	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	200.000.000	
B	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase desa/kelurahan STBM**	**80**	**65.848.975.300**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase desa/kelurahan STBM**	**80**	**76.626.972.500**	
		Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	**1**			**Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk**	**1**		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	**71**			**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna**	**71**		
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	**5**			**Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun**	**5**		
		Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	**46**			**Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis**	**46**		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	**97**			**Cakupan imunisasi bayi lengkap**	**97**		
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	**80,1**			**Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional**	**80,1**		
		Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	**87**			**Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB**	**87**		
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	**85**			**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar**	**85**		
		Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	**66,1**			**Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup**	**66,1**		
X	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar (RS dan Puskesmas)**	**30**	**7.955.126.300**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar (RS dan Puskesmas)**	**30**	**7.105.000.000**	
30	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunnya rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	0	0	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terbangunnya rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	0	1.000.000.000	
31	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	0	0	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	0	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	0	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	0	250.000.000	
33	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	0	0	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	0	150.000.000	
34	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	28.158.100	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	10.000.000	
35	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	25.000.000	
36	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1	106.591.200	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	1	10.000.000	
37	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1	0	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka	1	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
38	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	7.740.218.950	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	5.000.000.000	
39	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Obat, Bahan Medis Habis Pakai, dan Vaksin ke Fasilitas Kesehatan	12	80.158.050	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Obat, Bahan Medis Habis Pakai, dan Vaksin ke Fasilitas Kesehatan	12	150.000.000	
XI	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)**	**29**	**57.103.293.500**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)**	**29**	**69.071.972.500**	
		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan primer terakreditasi paripurna	**85**			**Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan primer terakreditasi paripurna**	**85**		
		Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi paripurna	**75**			**Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terakreditasi paripurna**	**75**		
		Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	**100**			**Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**	**100**		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sesuai Standar				**Sesuai Standar**			
		Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**100**			**Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**100**		
		Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**100**			**Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**100**		
		Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**100**			**Persentase Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**100**		
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**100**			**Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**100**		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	**100**			**Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**100**		
		Persentase depresi pada usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan	**3,5**			**Persentase depresi pada usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan layanan**	**3,5**		
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	**23,4**			**Prevalensi Obesitas > 18 tahun**	**23,4**		
		Persentase Lanjut Usia yang mandiri	**82**			**Persentase Lanjut Usia yang mandiri**	**82**		
		Cakupan penemuan kasus TB	**82**			**Cakupan penemuan kasus TB**	**82**		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Case Fatality Rate (CFR) DBD	**0,4**			**Case Fatality Rate (CFR) DBD**	**0,4**		
		Incidence Rate (IR) HIV	**9**			**Incidence Rate (IR) HIV**	**9**		
		Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana	**95**			**Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan tatalaksana**	**95**		
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	**9,8**			**Persentase merokok penduduk 10-21 tahun**	**9,8**		
		Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pencapaian STBM 5 (lima) pilar	**80**			**Persentase Desa/Kelurahan yang dibina dalam pencapaian STBM 5 (lima) pilar**	**80**		
		Persentase fasyankes yang memanfaatkan media KIE	**100**			**Persentase fasyankes yang memanfaatkan media KIE**	**100**		
40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	10.622	125.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	10.622	40.000.000	
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	10.431	85.118.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	10.431	75.000.000	
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	10.349	1.046.192.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	10.349	80.000.000	
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	44.641	133.051.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	44.641	30.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	25.788	41.525.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	25.788	20.000.000	
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	516.000	701.024.250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	516.000	30.000.000	
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	124.985	17.460.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	124.985	30.000.000	
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	47.800	49.585.100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	47.800	20.000.000	
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	18.648	169.510.900	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	18.648	50.000.000	
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.216	26.409.750	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2.216	25.000.000	
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	5.480	43.505.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	5.480	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang dengan risiko terinfeksi HIV Sesuai Standar	12.500	19.430.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang dengan risiko terinfeksi HIV Sesuai Standar	12.500	15.000.000	
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	10.000.000	
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	80.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	100.000.000	
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	80.500.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5	100.000.000	
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	105.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8	75.000.000	
56	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	112.460.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	50.000.000	
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	19.853.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	188.092.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	75.000.000	
59	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	93.500	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	93.500	50.000.000	
60	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.400	0	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.400	40.000.000	
61	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	415.673.900	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	250.000.000	
62	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36	35.958.345.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36	55.000.000.000	
63	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100	0	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100	150.000.000	
64	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	21	16.373.899.000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	21	11.991.972.500	
65	Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (Yankes)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	339.017.100	Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (Yankes)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	200.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (UPT Instalasi Perbekalan Farmasi)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	150.000.000	Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (UPT Instalasi Perbekalan Farmasi)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	150.000.000	
67	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	381.980.000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	200.000.000	
68	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	29	236.645.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	29	30.000.000	
69	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	133.160.000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	75.000.000	
70	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52	0	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52	7.500.000	
71	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	986	29.250.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	986	7.500.000	
72	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	90	27.140.000	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	90	10.000.000	
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6	13.567.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	6	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	50	230.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	50	100.000.000	
74	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45	230.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	45	100.000.000	
XIII	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	5	560.555.500	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan	5	350.000.000	
75	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	30	15.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	30	75.000.000	
76	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes)	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	67	407.535.500	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes)	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	67	75.000.000	
77	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah)	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	1	118.020.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah)	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	1	125.000.000	
78	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	20.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	75.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rujukan				Rujukan				
C	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan teregister**	**100**	**2.576.515.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan teregister**	**100**	**2.264.776.000**	
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	**2,62**			**Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi**	**2,62**		
XIV	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**	**100**	**1.427.965.000**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan**	**100**	**2.114.776.000**	
		Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	**76,2**			**Persentase Puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar**	**76,2**		
		Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	**100**			**Persentase RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar**	**100**		
79	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	900	1.387.200.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	900	2.014.776.000	
80	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	40.765.000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	100.000.000	
XV	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan**	**Jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan mutu**	**12**	**1.148.550.000**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan**	**Jenis Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan mutu**	**12**	**150.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**dan kompetensinya**			**Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**dan kompetensinya**			
81	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20	1.148.550.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20	150.000.000	
D	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.**	**58**	**528.003.700**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat.**	**58**	**547.836.700**	
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	**84**			**Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah**	**84**		
		Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	**100**			**Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS**	**100**		
XVI	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan**	**100**	**104.957.500**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase Apotek dan Toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan**	**100**	**87.836.700**	
82	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1	104.957.500	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	1	87.836.700	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
XVII	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar**	**22,4**	**297.346.700**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar**	**22,4**	**350.000.000**	
83	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tanggayang memenuhi ketentuan	1	297.346.700	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tanggayang memenuhi ketentuan	1	350.000.000	
XVIII	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara**	**Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi**	**100**	**35.000.000**	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara**	**Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi**	**100**	**20.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				**lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**				
84	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	6	35.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	6	20.000.000	
XIX	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat**	**22**	**10.000.000**	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat**	**22**	**15.000.000**	
85	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2	10.000.000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2	15.000.000	
XX	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri**	**Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu**	**76**	**80.699.500**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri**	**Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu**	**76**	**75.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rumah Tangga				**Rumah Tangga**				
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	**58**			**Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan**	**58**		
86	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	50	80.699.500	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	50	75.000.000	
E	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**34**	**307.868.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)**	**34**	**588.096.000**	
XXI	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**	**30**	**180.000.000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor**	**30**	**363.096.000**	
87	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	180.000.000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3	363.096.000	
XXII	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**	**100**	**50.000.000**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina**	**100**	**75.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	50.000.000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3	75.000.000	
XXIII	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**	**80**	**77.868.000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase UKBM yang aktif**	**80**	**150.000.000**	
89	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	77.868.000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2	150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi yang menangani urusan kesehatan sebelum menyusun anggaran untuk tahun yang akan datang, akan menampung usulan dari Perangkat Daerah dan masyarakat yang akan kita sesuaikan dan tindaklanjuti dalam sub kegiatan yang ada dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.

Sedangkan untuk perbaikan pelayanan secara menyeluruh kita menggunakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan responden untuk Puskesmas adalah masyarakat sebagai pelanggan dan untuk Dinas Kesehatan adalah UPT Puskesmas, UPT Labkesda, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Karanganyar. Dinas Kesehatan juga membuka pengaduan melalui SAPA MAS Kabupaten Karanganyar SP4 Lapor (website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Dari hasil survei dan pengaduan bisa di analisa pelayanan apa yang kurang masih dan perlu segera diperbaiki dan ditindaklanjuti.

Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini ada yang masuk yang melalui musrenbang, proposal maupun melalui aplikasi SIPD Kementrian Dalam Negeri. Berikut penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Karaganyar

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Besaran	Lokasi	Catatan
				Kinerja	Volume		
1	2	3	4	5	6		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewanangan Daerah Kab/Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Terlaksananya Kesehatan Pemberian PMT bagi Bayi, Balita, Remaja, Lansia serta penanganan stunting dan insentif kader Posyandu	1 paket	Kecamatan Karanganyar	Sudah tercover di kegiatan program
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Terpenuhinya Ambulance Desa Suruh Kalang	1 unit	Kecamatan Jaten	Bukan usulan prioritas
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewanangan Daerah Kab/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Banjarharjo	1 paket	Kecamatan Kebakkramat	Bukan usulan prioritas

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tentang arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2021 merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program pembangunan dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026 : “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional. Melalui pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026 diharapkan akan mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan, menurunkan Tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan angka penyakit tidak menular dan menular, stunting dan gizi buruk, keterbatasan akses dan mutu layanan kesehatan, serta kebutuhan penguatan promosi dan preventif dalam sistem kesehatan.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyusun RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Kabupaten Karanganyar, serta kebijakan nasional di bidang kesehatan. Renja Dinas Kesehatan2026 merupakan penjabaran dari rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi bagian dari renstra Dinas Kesehatan 2025-2026.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***“Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi

Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

Dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar pada 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten Kota antara lain:

Tabel 3.1.
Dukungan Kegiatan Dinas Kesehatan Terhadap 35 Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
1	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan primer dan rujukan, mendorong Integrasi layanan primer	Kesehatan

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
2	Cek Kesehatan Gratis	Program Kesehatan Gratis dengan peningkatan anggaran kesehatan untuk keaktifan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, pelayanan kesehatan gratis dengan menggunakan KTP	Kesehatan
3	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pengembangan & optimalisasi Puskesmas Rawat Inap di tiap-tiap Puskesmas dengan standar tenaga kesehatan sesuai dengan peraturan Menteri kesehatan termasuk dokter dan bidan	Kesehatan
4	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Peningkatan kualitas UMKM dengan memberikan akses pada PIRT, sertifikat halal secara gratis dengan menggunakan KTP	Koperasi UMKM, Kesehatan
5	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan kualitas hidup lansia	Kesehatan

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;

8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah/Dinas Kesehatan

Arah kebijakan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing SDM dalam Mendukung Pangan Nasional. Salah satu prioritas pada Tahun 2026 adalah Meningkatkan Integritas Kualitas SDM dengan salah satu fokus di Bidang Kesehatan adalah peningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik primer, maupun lanjutan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, pengendalian penyakit menular terutama TB dan HIV), pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular terutama pada Hipertensi, Diabetis Mellitus, dan Cancer serta gangguan jiwa,

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 juga diselaraskan dengan dokumen perencanaan strategis lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kebijakan nasional di bidang kesehatan. Dengan demikian, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025– 2029 diharapkan menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 sebagai berikut:

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pasangan Kepala Daerah terpilih telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 20 Februari 2025. Masa jabatan mereka akan berlangsung selama periode 2025 hingga 2030. Visi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR : Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang Berintegritas, Berdaya Saing, dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih :

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada

"Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender". Sedangkan Tujuan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tadalah Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui indikator:

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Jumlah Kematian Balita
3. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular
4. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular
5. Prevalensi Stunting
6. Persentase Failitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
7. *Net Death Rate* (NDR) RSUD

Tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah Tahun 2026 dapat dijabarkan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/Program	Satuan	Tahun 2026
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup	Tahun	78,56
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat		Jumlah Kematian Ibu	Orang	5
			Jumlah kematian balita	Orang	105
			Angka populasi bebas Penyakit Menular	%	65
			Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	%	20
			Prevalensi Stunting	%	17,5
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	29,11
			Net Death Rate (NDR) RSUD Karanganyar	Per 1000 Pasien Keluar	28
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase desa/kelurahan STBM	%	80 %
			Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	%	1
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	71 %
			Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	%	5 %
			Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	%	46 %
			Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97 %

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Tujuan / Sasaran/Program	Satuan	Tahun 2026
			Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	%	80,1 %
			Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	%	87 %
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	85 %
			Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	%	66,1 %
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan teregister	%	100
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,62
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	%	58
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	84
			Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	%	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	34
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	84,20
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	78

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memperluas cakupan dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan, mengendalikan penyakit menular dan tidak menular, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar menetapkan strategi-strategi utama yang adaptif terhadap perubahan epidemiologi, tanggap terhadap kondisi sosial dan lingkungan, serta inklusif terhadap kelompok rentan dan seluruh siklus kehidupan masyarakat. Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029, tahun 2026 Dinas Kesehatan fokus pada Penguatan Tata Kelola Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, revitalisasi Puskesmas dan Posyandu, serta konsolidasi program promotif dan preventif. Penguatan sistem

manajemen mutu layanan, SOP klinis, serta koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penyakit dan gizi.

3.3.Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar antara lain:

1. Masih terbatasnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan, baik dari segi ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana, maupun fasilitas pendukung.
2. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular yang masih tinggi, seperti TBC, DBD, hipertensi, diabetes melitus, serta penyakit akibat gaya hidup.
3. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), termasuk kepatuhan dalam mengikuti imunisasi, skrining kesehatan, dan pola makan bergizi seimbang.
4. Masih tingginya angka stunting dan permasalahan gizi lainnya, yang memerlukan intervensi lintas sektor dan penguatan program gizi dari hulu ke hilir.
5. Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, baik dari segi jumlah, distribusi, maupun kompetensi, terutama untuk pelayanan rujukan dan kegawatdaruratan.
6. Kurangnya optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaporan yang akurat dan real time.
7. Masih perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan pemangku kepentingan, baik dalam aspek promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Adapun peluang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karanganyar antara lain:

1. Adanya regulasi bidang kesehatan baik terkait pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, pelaksanaan program prioritas bidang kesehatan maupun kebijakan terkait Jaminan Kesehatan Nasional
2. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan menjadi instrumen pengendali (kontrol) terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan kesehatan
3. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Karanganyar dari fasilitas kesehatan dasar sampai fasilitas kesehatan rujukan termasuk sarana dan prasarana yang cukup memadai dan sudah memenuhi standar mutu pelayanan termasuk 16 puskesmas PONED yang mendukung program prioritas
4. Tersedianya sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang tersebar di fasilitas kesehatan pada 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar dengan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan
5. Lulusan tenaga medis dan tenaga kesehatan semakin meningkat sejalan dengan tuntutan pemenuhan tenaga Kesehatan yang berkompeten baik dalam jumlah dan mutu.
6. Tersedianya media informasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari keterbukaann informasi publik
7. Adanya alokasi dana desa yang dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan sebagai bentuk sinergi program kegiatan lintas sektor misalnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Desa.

8. Dukungan kader kesehatan di setiap desa dalam pelaksanaan posyandu integrasi layanan primer (ILP)
9. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta keinginan masyarakat untuk menggunakan fasilitas JKN, serta adanya kebijakan terkait ke pesertaan JKN PBI APBD di Puskesmas sebagai PPK I.
10. Adanya peran serta masyarakat dan dukungan dari lintas sektor serta stakeholder dalam pembangunan Kesehatan, berkembangnya organisasi masyarakat di bidang Kesehatan serta adanya dukungan fasilitas di antaranya dukungan dana dari berbagai pihak seperti NGO, masyarakat, CSR, BLN, dll.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Dinas Kesehatan mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Dinas Kesehatan masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar . Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran
Misi 1: Meningkatnya kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender. **Tj.3 :** Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Karanganyar **S.4 :** Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu
			Jumlah kematian balita
			Angka populasi bebas Penyakit Menular
			Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular
			Prevalensi Stunting
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar
			Net Death Rate (NDR) RSUD Karanganyar
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Meningkatnya pelayanan kesehatan pada masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
			Pembangunan Puskesmas
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
			Pengembangan Rumah Sakit
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

			Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
			Operasional Pelayanan Puskesmas
			Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (Yankes)
			Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (UPT Instalasi Perbekalan Farmasi)
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes)
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah)
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

		Kabupaten/Kota	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang dan tertuang pada dokumen perencanaan Renstra 2025-2029 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar yang kemudian dijabarkan tahunan pada dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. Renja Tahun 2026. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah urusan wajib Pelayanan Dasar, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar mendukung program pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan khususnya pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dan capaian SDGs (*Sustainable Development Goals)*. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal serta memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan, agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utama program ini adalah pada penguatan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
c. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
d. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Peningkatan Pelayanan BLUD
a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD)
b. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas)
c. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Laboratorium Kesehatan)

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diprioritaskan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dalam SPM Kesehatan, peningkatan gizi masyarakat terutama pada balita stunting dan wasting, peningkatan kualitas lingkungan sehat, peningkatan kesehatan lansia dan usia produktif, peningkatan pemeriksaan kesehatan di semua usia penduduk, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular diprioritaskan pada TBC, HIV, Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa, DBD, Cancer, dan Malaria. Peningkatan penanganan kegawatdaruratan, peningkatan keaktifan pemilik jaminan pemeliharaan kesehatan, Pada program ini difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan.

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
b. Pembangunan Puskesmas
c. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
d. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)
f. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD)
g. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
h. Pengembangan Rumah Sakit
i. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
j. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
q. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
s. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
t. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
u. Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
v. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
w. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
x. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
y. Operasional Pelayanan Puskesmas
z. Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (Yankes)
aa. Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (UPT Instalasi Perbekalan Farmasi)
bb. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)
cc. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
dd. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
ee. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
ff. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
gg. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
hh. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
d. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes)
e. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah)

f. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diprioritaskan pada peningkatan kompetensi sumberdaya, perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dan distribusi pemerataan tenaga kesehatan.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini difokuskan pada peningkatan penyediaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas laik sehat pada tempat-tempat umum, serta pemilikan IPRT pada pengolahan makanan.

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

a. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diprioritaskan pada peningkatan kualitas usaha kesehatan berbasis masyarakat, pelaksanaan advokasi dan KIE serta peningkatan rumah tangga berperilaku hidup sehat dan bersih.

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Tabel 4.1.
Program Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

No	Program Kegiatan	Indikator Keluaran	Target	Pagu Anggaran Tahun 2026
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	78	303.490.253.340
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan STBM	80 %	76.626.972.500
		Rasio daya tampung fasilitas kesehatan Rujukan terhadap Jumlah Penduduk	1	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	71 %	
		Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun	5 %	
		Cakupan penerima pemeriksaan cek kesehatan gratis	46 %	
		Cakupan imunisasi bayi lengkap	97 %	
		Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	80,1 %	
		Cakupan Angka keberhasilan pengobatan TB	87 %	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	85 %	
		Persentase puskesmas yang sudah melakukan kebijakan aktivitas fisik cukup	66,1 %	
3.	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase tenaga kesehatan	100 %	2.264.776.000

No	Program Kegiatan	Indikator Keluaran	Target	Pagu Anggaran Tahun 2026
	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	teregister		
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2,62	
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi syarat	58 %	547.836.700
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	84 %	
		Persentase tempat pengelolaan pangan yang memiliki SLHS	100 %	
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	34 %	588.096.000

Berikut adalah Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		DINAS KESEHATAN			**451.627.750.000**							**452.906.500.000**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**451.627.750.000**							**452.906.500.000**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**451.627.750.000**							**452.906.500.000**	
1,	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**289.365.000.000**						**-**	**289.065.000.000**	
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100 %**	**620.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**620.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4 Dokumen	300.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		10.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar*	6 Laporan	150.000.000	Kab. Karanganyar, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t pembangu nan sumber daya	Penguatan Landasan Pembentuk an	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten		150.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*			Kecamatan , Semua Kel/Desa	(DAU)	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Karanganyar			
	1.02.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2 Laporan	150.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase capaian anggaran OPD***	**100 %**	**110.955.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**110.955.000.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	900 Orang/ bulan	75.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		75.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	250 Orang/ bulan	35.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	RSUD Kartini Karanganyar		35.000.000.000	RSUD KARTINI KARANGANYAR
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	5 Laporan	375.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		375.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pen yandang disabilitas.					
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD*	4 Laporan	300.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*	2 Dokumen	280.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		280.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Persentase dokumen BMD sesuai standar***	**100 %**	**300.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**300.000.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**saing dan berbudaya.**				
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	2 Laporan	300.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai***	**100 %**	**310.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**310.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	2 Paket	60.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		60.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	20 Orang	120.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		120.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	200 Orang	100.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-*	100 Orang	30.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		30.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Undangan					kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase pemenuhan kebutuhan kantor***	**100 %**	**800.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**800.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	450.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		450.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan*	1 Paket	100.000.000	Kab. Karanganyar, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t pembangu nan sumber daya	Penguatan Landasan Pembentuk an	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten		100.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			yang Disediakan			Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Karanganyar			
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	4 Dokumen	75.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		75.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	200 Laporan	175.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		175.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0	**Pengadaan Barang**	***Persentase***	**100 %**	**500.000.000**			**Memperkua t**	**Penguatan**	**SKPD Dinas**	**-**	**500.000.000**	**DINAS**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.07	**Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***pemenuhan sarana dan prasarana OPD***					**pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Kesehatan Kabupaten Karanganyar**			**KESEHATAN**
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	1 Unit	300.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	200.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHAT	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		200.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							AN DASAR	pen yandang disabilitas.					
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor***	**100 %**	**740.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**740.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	150 Laporan	40.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		40.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	700.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		700.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dan berbudaya.				
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase terpeliharanya sarana prasarana barang milik daerah***	**100 %**	**725.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**725.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	29 Unit	200.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		200.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	375.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		375.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	150.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar		150.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	***Nilai IKM***	**82 undefined**	**174.415.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**		**-**	**174.415.000.000**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	125.449.026.575	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia	RSUD Kartini Karanganyar		125.449.026.575	RSUD KARTINI KARANGANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kel/Desa		pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.151.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Tasikmadu		2.151.000.000	PUSKESMAS TASIKMADU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.327.484.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Jaten I		2.327.484.000	PUSKESMAS JATEN I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan*	1 Unit Kerja	2.403.350.000	Kab. Karangany ar, Semua	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya	Penguatan Landasan Pembentuk an	Puskesmas Jaten II		2.403.350.000	PUSKESMAS JATEN II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penunjang Pelayanan			Kecamatan, Semua Kel/Desa		manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.879.670.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Kebakkramat I		2.879.670.000	PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.778.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Kebakkramat II		1.778.000.000	PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II
	1.02.0	Pelayanan dan	*Jumlah BLUD yang*	1 Unit	2.552.700.000	Kab.	PENDAPAT	Memperkua t	Penguatan	Puskesmas		2.552.700.000	PUSKESMAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.2.10.0001	Penunjang Pelayanan BLUD	*Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	Kerja		Karangan ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	AN DARI BLUD	pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Mojogedang I			MOJOGEDANG I
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.699.957.425	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Mojogedang II		1.699.957.425	PUSKESMAS MOJOGEDANG II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.800.552.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Karangpanda n		2.800.552.000	PUSKESMAS KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.617.839.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Matesih		1.617.839.000	PUSKESMAS MATESIH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.295.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Tawangmangu		1.295.000.000	PUSKESMAS TAWANGMANGU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.563.743.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Ngargoyoso		1.563.743.000	PUSKESMAS NGARGOYOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.904.100.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Jenawi		2.904.100.000	PUSKESMAS JENAWI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.120.710.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Kerjo		2.120.710.000	PUSKESMAS KERJO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1.847.800.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing	Puskesmas Colomadu I		1.847.800.000	PUSKESMAS COLOMADU I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dan berbudaya.				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.989.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Colomadu II		2.989.000.000	PUSKESMAS COLOMADU II
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.599.791.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	-		2.599.791.000	PUSKESMAS GONDANGREJO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.483.200.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan	Puskesmas Jumapolo		2.483.200.000	PUSKESMAS JUMAPOLO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	3.198.035.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		3.198.035.000	PUSKESMAS JATIPURO
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.931.159.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Puskesmas Jatiyoso		2.931.159.000	PUSKESMAS JATIYOSO
	1.02.0 1.2.10. 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.408.972.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN DARI BLUD	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	Puskesmas Jumantono		2.408.972.000	PUSKESMAS JUMANTONO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	2.413.911.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	-		2.413.911.000	PUSKESMAS KARANGANYAR
2,	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**158.370.250.000**						**-**	**160.250.000.000**	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibina***	**2 unit**	**72.391.250.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya**	**Faskes Kabupaten Karanganyar**	**-**	**72.391.250.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**saing dan berbudaya.**				
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*	2 Unit	15.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		15.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	5 Unit	2.500.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		2.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	1 Unit	500.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan	Faskes Kabupaten Karanganyar		500.000.000	RSUD KARTINI KARANGANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	1 Unit	235.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		235.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	3 Unit	1.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	8 Unit	25.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	Faskes Kabupaten Karanganyar		25.000.000.000	RSUD KARTINI KARANGANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	*Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/ Regional Maintainance Center*	24 Unit	156.250.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		156.250.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah*	0 Unit	16.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		16.000.000.000	RSUD KARTINI KARANGANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				KESEHATAN RUJUKAN	generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	12.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		12.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar (Puskesmas dan RS)***	**29 Faskes**	**85.579.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Faskes Kabupaten Karanganyar**	**-**	**85.808.750.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	12.183 Orang	700.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Faskes Kabupaten Karanganyar		700.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	11.629 Orang	400.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	11.076 Orang	700.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		700.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0	Pengelolaan	*Jumlah Balita yang*	54.313	700.000.000	Kab.	DANA	Memperkua t	Penguatan	Faskes		700.000.000	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.02.0004	Pelayanan Kesehatan Balita	*Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	Orang		Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Kabupaten Karanganyar			KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	25.199 Orang	700.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		700.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	51.600 Orang	800.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		800.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	12.498 Orang	600.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	16.500 Orang	550.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		550.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	17.700 Orang	500.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		500.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	1.02.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	2.200 Orang	350.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		350.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	6.750 Orang	400.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		400.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	13.550 Orang	450.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan	Faskes Kabupaten Karanganyar		450.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							BOK KAB UPATEN/KOTA	serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	12 Dokumen	423.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		423.500.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	5 Dokumen	1.000.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		1.000.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	5 Dokumen	200.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Faskes Kabupaten Karanganyar		200.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	8 Dokumen	550.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		550.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	4 Dokumen	600.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		600.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan*	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU),	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya	Faskes Kabupaten Karanganyar		200.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*			, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	12	520.300.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		520.300.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	0.5 Orang	300.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0	Pengelolaan	*Jumlah*	15 Orang	280.000.000	Kab.	DANA	Memperkua t	Penguatan	Faskes		280.000.000	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.02.0022	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	*Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*			Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Kabupaten Karanganyar			KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	4 Dokumen	500.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	36 Dokumen	43.765.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		43.765.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							BOK KAB UPATEN/K OTA, PENDAPAT AN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	pen yandang disabilitas.					
	1.02.0 2.2.02. 0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	*Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah*	21 Orang	300.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/K OTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0 2.2.02. 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.365.045.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.365.045.000	PUSKESMAS TASIKMADU
	1.02.0 2.2.02. 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.206.969.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.206.969.000	PUSKESMAS JATEN I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.583.760.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.583.760.000	PUSKESMAS JATEN II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.265.473.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.265.473.000	PUSKESMAS KEBAKKRAMAT I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.198.144.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.198.144.000	PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						, Semua Kel/Desa	PUSKESMAS	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.295.702.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.295.702.000	PUSKESMAS MOJOGEDANG I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.313.968.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.313.968.500	PUSKESMAS MOJOGEDANG II
	1.02.02.2.02.	Operasional Pelayanan	*Jumlah Dokumen Operasional*	1 Dokumen	1.681.204.000	Kab. Karangany	DAK NON FISIK-	Memperkua t pembangu nan	Penguatan Landasan	Masyarakat Kabupaten		1.681.204.000	PUSKESMAS KARANGPAND

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0033	Puskesmas	*Pelayanan Puskesmas*			ar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BOK-BOK PUSKESMAS	sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Karanganyar			AN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.155.193.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.155.193.000	PUSKESMAS MATESIH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.040.784.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.040.784.000	PUSKESMAS TAWANGMANGU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.292.635.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.292.635.000	PUSKESMAS NGARGOYOSO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.324.846.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.324.846.500	PUSKESMAS JENAWI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.262.061.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.262.061.000	PUSKESMAS KERJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pen yandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.225.168.500	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.225.168.500	PUSKESMAS COLOMADU I
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.156.834.500	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.156.834.500	PUSKESMAS COLOMADU II
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.351.361.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESM AS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.351.361.000	PUSKESMAS GONDANGREJ O

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.191.221.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.191.221.000	PUSKESMAS JUMAPOLO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.226.782.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.226.782.000	PUSKESMAS JATIPURO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.180.533.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.180.533.000	PUSKESMAS JATIYOSO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.258.029.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		1.258.029.000	PUSKESMAS JUMANTONO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1.587.816.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	-		1.587.816.000	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	420.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan	Faskes Kabupaten Karanganyar		420.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	444.170.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	-		673.920.000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	4 Dokumen	250.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	-		250.000.000	UPT INSTALASI PERBEKALAN FARMASI
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota*	28 Unit	600.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Faskes Kabupaten Karanganyar		600.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	*Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	12 Laporan	484.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		484.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		5.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah*	52 Dokumen	423.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya	Faskes Kabupaten Karanganyar		423.500.000	RSUD KARTINI KARANGANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						, Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	1204 Orang	100.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	*Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	134 Orang	100.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		100.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0	Pengelolaan	*Jumlah orang yang*	50 Orang	100.000.000	Kab.	DANA	Memperkua t	Penguatan	Faskes		100.000.000	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.02.0042	pelayanan kesehatan Malaria	*mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*			Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Kabupaten Karanganyar			KESEHATAN
	1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	***Persentase terealisasinya sistem informasi kesehatan secara Terintegrasi***	**100 %**	**400.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Faskes Kabupaten Karanganyar**	**-**	**400.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	90 Dokumen	400.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		400.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pen yandang disabilitas.					
	1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah RS dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi perijinan***	**5 Faskes**	**1.650.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Faskes Kabupaten Karanganyar**	**-**	**1.650.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	50 Unit	50.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	67 Unit	950.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing	Faskes Kabupaten Karanganyar		950.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	dan berbudaya.				
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	1 Unit	300.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	-		300.000.000	UPT LABORATORIUM KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	350.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		350.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3,	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**2.400.000.000**						**-**	**2.400.000.000**	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	***Persentase perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan***	**100 %**	**2.125.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Tenaga Medis dan Kesehatan**	**-**	**2.125.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	150 Orang	1.500.000.000	Kab. Karangany ar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Tenaga Medis dan Kesehatan		1.500.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.0	Pembinaan dan	*Jumlah Dokumen*	5	625.000.000	Kab.	DANA	Memperkua t	Penguatan	Tenaga Medis		625.000.000	DINAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.2.02.0003	Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	Dokumen		Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	dan Kesehatan			KESEHATAN
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase SDM Tenaga Kesehatan yang memenuhi kompetensinya***	**100 %**	**275.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Tenaga Kesehatan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**275.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	150 Orang	275.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Tenaga Kesehatan Kabupaten Karanganyar		275.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pen yandang disabilitas.					
4,	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**631.000.000**						**-**	**330.000.000**	
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	***Persentase fasyankes penunjang yang berijin***	**100 Faskes**	**331.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Faskes Kabupaten Karanganyar**	**-**	**30.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	45 Dokumen	331.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Faskes Kabupaten Karanganyar		30.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							DASAR, DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	disabilitas.					
	1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	***Persentase PIRT yang berijin***	**65 sarana**	**90.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**90.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	1 Dokumen	90.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar		90.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan**	***Persentase TPM yang mengikuti sertifikasi laik higiene sanitasi***	**100 Sarana**	**80.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM),**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya**	**Produk Makanan Rumahan Kabupaten**	**-**	**80.000.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						**sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Karanganyar**			
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	6 Dokumen	80.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar		80.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	***Persentase TPM yang dibina***	**100 sarana**	**55.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**55.000.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*	2 Dokumen	55.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar		55.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	***Persentase PIRT berijin yang dievaluasi***	**100 Sarana**	**75.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Produk Makanan Rumahan Kabupaten Karanganyar**	**-**	**75.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman*	120 Unit	75.000.000	Kab. Karanganyar, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t pembangu nan sumber daya	Penguatan Landasan Pembentuk an	Produk Makanan Rumahan		75.000.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*			Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Kabupaten Karanganyar			
5,	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**861.500.000**						**-**	**861.500.000**	
	1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Realiasi advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor***	**30**	**300.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat**	**Masyarakat Kabupaten Karanganyar**	**-**	**300.000.000**	**DINAS KESEHATAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	**yang berdaya saing dan berbudaya.**				
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	4 Dokumen	300.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		300.000.000	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase gerakan preventif dan promotif bidang kesehatan yang dibina***	**100 %**	**311.500.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Masyarakat Kabupaten Karanganyar**	**-**	**311.500.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan*	3 Dokumen	311.500.000	Kab. Karanganyar, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t pembangu nan sumber daya	Penguatan Landasan Pembentuk an	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		311.500.000	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
								NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Bersih dan Sehat	*Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*			Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.				
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase UKBM yang aktif***	**100 %**	**250.000.000**			**Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.**	**Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.**	**Masyarakat Kabupaten Karanganyar**	**-**	**250.000.000**	**DINAS KESEHATAN**
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	2 Dokumen	250.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Pemanta pan keseja hteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya.	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		250.000.000	DINAS KESEHATAN

4.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur strategis yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran utama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pembangunan daerah. IKU mencerminkan capaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program prioritas yang berkontribusi langsung terhadap visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan IKU dilakukan secara terintegrasi dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD dan Rencana Pembangunan Nasional. IKU disusun dengan prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Berikut adalah indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar'

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Dinas Kesehatan

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	78,56
2	Jumlah Kematian Ibu	Orang	5
3	Jumlah kematian balita	Orang	105
4	Angka populasi bebas Penyakit Menular	%	65
5	Angka populasi bebas Penyakit Tidak Menular	%	20
6	Prevalensi Stunting	%	17,5
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	29,11
8	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Karanganyar	Per 1000 Pasien Keluar	28
9	Nilai IKM	Nilai	84,2

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar selama periode perencanaan. IKK disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar. Berikut adalah indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Tahun 2026
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100
6	Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.4.
Daftar Program/Kegiatan Subkegiatan Dinkes dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan /Subkegiatan Dinkes	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik • KTP hebat untuk akses sandang,	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** • **PeProgramnyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** a. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya b. Pembangunan Puskesmas c. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya d. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan /Subkegiatan Dinkes	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran	f. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD) g. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi h. Pengembangan Rumah Sakit i. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan j. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan • **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat o. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga p. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan q. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan r. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya s. Pengelolaan Surveilans Kesehatan t. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) u. Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA v. v. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular w. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat x. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah y. Operasional Pelayanan Puskesmas z. Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (Yankes) aa. Operasional Pelayanan Fasyankes Lainnya (UPT Instalasi Perbekalan Farmasi) bb. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPT Labkesda)	

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan /Subkegiatan Dinkes	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
	cc. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dd. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) ee. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah ff. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis gg. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) hh. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria • **Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi** a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota c. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya d. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Yankes) e. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Laboratorium Kesehatan Daerah) f. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** • **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar b. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan • **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman** • **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) • **Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak	

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan /Subkegiatan Dinkes	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
	Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga • **Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) • **Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** a. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan • **Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga** a. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** • **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat • **Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat • **Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

BAB V
PENUTUP

Penyusunan rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi Renja 2 tahun sebelumnya. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan angka penyakit tidak menular dan menular, stunting dan gizi buruk, keterbatasan akses dan mutu layanan kesehatan, serta kebutuhan penguatan promosi dan preventif dalam sistem kesehatan.

Penyusunan Renja Tahun 2026 berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri 900.1.15.15-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Renja Tahun 2026 memuat pencapaian sasaran dan tujuan melalui pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan 4 program bidang kesehatan dengan total pagu sebesar Rp 451.627.750.000,-. Catatan penting yang patut menjadi perhatian adalah pengurangan anggaran transfer daerah karena adanya efisiensi di tingkat Pemerintah Pusat menyebabkan Pemerintah Daerah harus benar-benar melaksanakan program dan kegiatan secara berdayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien dengan anggaran yang tersedia. Kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat wajib untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan pada Renja melaksanakan program serta kegiatan kesehatan sesuai urusan kewenangannya secara optimal, profesional, dan akuntabel.
2. Seluruh Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Kesehatan wajib mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja dan melaksanakan program serta kegiatan kesehatan sesuai urusan kewenangannya secara optimal, profesional, dan akuntabel.
3. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan dilakukan secara berkala untuk mengukur capaian kinerja, efektivitas kebijakan, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan pelaksanaan Renstra guna memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan maupun penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya Bidang Kesehatan pada Tahun Anggaran 2026.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2025-2029. Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar, dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Kami sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Karanganyar, 26 September 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar

ASIHNO PURWADI, S.T.
Pembina tingkat I
NIP. 19720828 199803 1 016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
1.1	LatarBelakang	I.1
1.2	Landasan Hukum.....	I.1
1.3	Maksud dan Tujuan	I.2
1.4	Sistematika Penulisan	I.3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU	II.1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II.1
2.2	Evaluasi Anggaran.....	II.1
2.2.1	Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD.....	II.1
2.2.2	Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran.....	II.7
2.3	Evaluasi kinerja (Indikator).....	II.9
2.4	Evaluasi kinerja pelayanan OPD	II.15
2.5	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD	II.16
2.6	Reviuw terhadap rancangan awal RKPD.....	II.18
2.7	Penelaahan usulan program dan kegiatan masayarakat.....	II.40
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III.1
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III.1
3.2	Telaah terhadap Kebijakan Provinsi.....	III.1
3.3	Tujuan dan Sasaran Daerah.....	III.3
3.4	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	III.5 III.5
3.5	Program kegiatan.....	III.9
3.6	Tantangan Perangkat Daerah.....	III.9
3.7	Peluang Perangkat Daerah.....	III.9
3.8	Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	III.10
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV.1
BAB V	PENUTUP	V.1
5.1	Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	V.1
5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V.1
5.3	Rencana Tindak Lanjut.....	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025	II.2
Tabel 2.2.	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025.....	II.7
Tabel 2.3.	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....	II.8
Tabel 2.4.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II.9
Tabel 2.5.	Capaian Indikator Kinerja Utama /Indikator Sasaran Tahun 2024 dan perbandingan kinerja sasaran strategis dengan target akhir 2026 (RPD 2024-2026).....	II.10
Tabel 2.6.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024.....	II.11
Tabel 2.7.	Permasalahan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025.....	II.13
Tabel 2.8.	Analis kinerja pelayanan wajib dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	II.15
Tabel 2.9.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	II.20
Tabel 3.1.	Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026.....	III.8
Tabel 3.2.	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III.10
Tabel 4.1.	Program dan Perkiraan Pendanaan Tahun 2026	IV.2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2026).

Proses penyusunan Renja 2026 dimulai dengan mengumpulkan data dan informasi, menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja tahun lalu. Penyusunan Renja berdasarkan Renstra DPUPR 2025-2029 dan penelaahan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD 2026) yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas dan juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja, adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) DPUPR 2025-2029 dan mengacu pada rancangan awal RKPD 2026;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
c. Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen Renja merupakan penjabaran dari Renstra dan memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya baik RPJMD maupun RKPD.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2021

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 110);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 104);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20252045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah : 5-134/2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Lampiran III (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dimaksudkan untuk merencanakan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025-2029.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah ;

1. Sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah;
2. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026;
3. Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026; dan
4. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten / Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD Tahun berjalan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapain target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Evaluasi Anggaran

2.2.1. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Tujuan membandingkan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan teknis dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar terakomodasi dalam dokumen anggaran daerah.

2.2.2. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Tujuan utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran adalah untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, di mana perbandingan ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengukur seberapa efektif dan efisien program serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan.

2.3. Evalusi kinerja (Indikator)

Membandingan target dengan realisasi tahun 2024 sebagai dasar evaluasi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan klasifikasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berisi kajian terhadap capaian kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing.

2.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Menguraikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan;

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan peran

2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai :

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten / kota.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Berisi tentang penjabaran tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah “Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional” didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan.

3.3. Tujuan dan Sasaran Daerah

Berisi tentang kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

3.4. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.5. Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

3.6. Tantangan Perangkat Daerah

3.7. Peluang Perangkat Daerah

3.8. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat program beserta indikator keberhasilan serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcame yang diinginkan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.
4) Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah biasanya dirumuskan untuk:

1. Menilai ketercapaian target
2. Mengukur sejauh mana pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu sesuai dengan indikator, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.
3. Mengidentifikasi keberhasilan dan permasalahan
4. Menemukan faktor pendukung, hambatan, dan penyebab deviasi antara rencana dengan realisasi, baik dari sisi program, kegiatan, anggaran, maupun capaian *output* dan *outcome.*
5. Mengukur kontribusi terhadap Renstra
6. Menilai sejauh mana kinerja tahun lalu berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
7. Menyediakan dasar untuk perencanaan tahun berikutnya
8. Menjadi bahan masukan untuk perbaikan perencanaan Renja tahun berjalan/berikutnya, sehingga lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
9. Memastikan akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban.

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dilakukan dengan melihat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sudah ditentukan dalam Renstra periode tahun sebelumnya yakni Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Penentuan IKK mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah

2.2. Evaluasi Anggaran

2.2.1. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Tujuan membandingkan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD bertujuan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan teknis dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar terakomodasi dalam dokumen anggaran daerah. Proses ini penting untuk menilai efisiensi penggunaan dana, menguji apakah prioritas pembangunan yang tertuang dalam Renja mendapat dukungan anggaran yang memadai, serta menjadi dasar pengendalian dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi

Tabel 2.1

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	**295.870.216.492,00**	**299.045.270.607,00**	**101%**	**223.826.401.994,00**	**192.713.958.994,00**	**86%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**22.298.616.920,00**	**22.358.999.720,00**	**100%**	**23.246.799.444,00**	**23.907.399.444,00**	**103%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**361.905.939,00**	**203.900.143,00**	**56%**	**751.264.461,00**	**249.264.461,00**	**33%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	181.214.600,00	21.214.600,00	12%	567.573.122,00	107.774.000,00	19%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.946.950,00	13.946.950,00	100%	13.946.950,00	13.946.950,00	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.061.591,00	10.061.591,00	100%	10.061.591,00	10.061.591,00	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.098.828,00	10.098.828,00	100%	10.098.828,00	10.098.828,00	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.078.139,00	10.078.139,00	100%	10.078.139,00	10.078.139,00	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.006.439,00	17.000.643,00	170%	10.006.439,00	10.006.439,00	100%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.499.392,00	121.499.392,00	96%	129.499.392,00	87.298.514,00	67%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**18.200.806.184,00**	**18.204.436.184,00**	**100%**	**18.554.997.686,00**	**19.817.397.686,00**	**107%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.149.739.230,00	18.153.369.230,00	100%	18.503.930.732,00	19.766.330.732,00	107%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.064.754,00	10.064.754,00	100%	10.064.754,00	10.064.754,00	100%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.970.400,00	10.970.400,00	100%	10.970.400,00	10.970.400,00	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.010.600,00	10.010.600,00	100%	10.010.600,00	10.010.600,00	100%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.010.600,00	10.010.600,00	100%	10.010.600,00	10.010.600,00	100%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.010.600,00	10.010.600,00	100%	10.010.600,00	10.010.600,00	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**105.994.200,00**	**124.404.200,00**	**117%**	**109.194.200,00**	**68.694.200,00**	**63%**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	105.994.200,00	124.404.200,00	117%	109.194.200,00	68.694.200,00	63%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**29.841.000,00**	**29.841.000,00**	**100%**	**29.841.000,00**	**29.841.000,00**	**100%**
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.976.400,00	14.976.400,00	100%	14.976.400,00	14.976.400,00	100%
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.864.600,00	14.864.600,00	100%	14.864.600,00	14.864.600,00	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**726.948.535,00**	**700.188.535,00**	**96%**	**825.787.535,00**	**1.003.837.535,00**	**122%**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.987.800,00	49.987.800,00	100%	49.987.800,00	49.987.800,00	100%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.753.735,00	35.753.735,00	100%	35.753.735,00	35.753.735,00	100%
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.770.000,00	76.770.000,00	100%	76.770.000,00	76.770.000,00	100%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.437.000,00	537.677.000,00	95%	663.276.000,00	841.326.000,00	127%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.078.162.500,00**	**1.140.365.000,00**	**106%**	**1.125.395.000,00**	**946.095.000,00**	**84%**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000,00	650.000.000,00	100%	650.000.000,00	0,00	0%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	428.162.500,00	490.365.000,00	115%	475.395.000,00	946.095.000,00	199%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**861.593.862,00**	**892.943.862,00**	**104%**	**869.693.862,00**	**861.693.862,00**	**99%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.523.150,00	10.523.150,00	100%	10.523.150,00	10.523.150,00	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.900.000,00	316.250.000,00	111%	274.200.000,00	274.200.000,00	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	566.170.712,00	566.170.712,00	100%	584.970.712,00	576.970.712,00	99%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**933.364.700,00**	**949.273.000,00**	**102%**	**980.625.700,00**	**930.575.700,00**	**95%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.729.000,00	280.279.300,00	92%	348.930.000,00	348.930.000,00	100%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	373.200.200,00	373.200.200,00	100%	375.440.200,00	375.440.200,00	100%
2	Pemeliharaan Mebel	9.975.000,00	9.975.000,00	100%	9.975.000,00	9.975.000,00	100%
3	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	39.358.000,00	39.358.000,00	100%	39.178.000,00	39.178.000,00	100%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	207.102.500,00	39.358.000,00	19%	207.102.500,00	157.052.500,00	76%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.358.000,00	207.102.500,00	526%			
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**17.051.966.662,00**	**9.651.966.662,00**	**57%**	**6.348.110.000,00**	**11.450.641.000,00**	**180%**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**100%**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**100%**
1	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	100%	500.000.000,00	500.000.000,00	100%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**16.851.966.662,00**	**9.451.966.662,00**	**56%**	**5.848.110.000,00**	**10.950.641.000,00**	**187%**
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	10.831.000.000,00	3.431.000.000,00	32%	0,00	1.400.000.000,00	#DIV /0!
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.533.800.000,00	4.533.800.000,00	100%	4.533.800.000,00	7.836.331.000,00	173%
3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.487.166.662,00	1.487.166.662,00	100%	1.314.310.000,00	1.714.310.000,00	130%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**14.182.454.000,00**	**14.123.469.000,00**	**100%**	**12.111.254.000,00**	**2.634.800.000,00**	**22%**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**14.330.432.000,00**	**14.123.469.000,00**	**99%**	**12.111.254.000,00**	**2.634.800.000,00**	**22%**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	836.000.000,00	777.015.000,00	93%	874.800.000,00	874.800.000,00	100%
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.110.000.000,00	2.110.000.000,00	100%	0,00	1.760.000.000,00	#DIV /0!
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	11.236.454.000,00	11.236.454.000,00	100%	11.236.454.000,00	0,00	0%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**6.315.034.000,00**	**6.299.066.500,00**	**100%**	**4.697.464.000,00**	**796.600.000,00**	**17%**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**6.315.034.000,00**	**6.299.066.500,00**	**100%**	**4.697.464.000,00**	**796.600.000,00**	**17%**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	560.770.000,00	531.102.500,00	95%			
2	Pembangunan/Penyedia an Sub Sistem Pengolahan Setempat				3.901.764.000,00	0,00	0%
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	184.000.000,00	197.700.000,00	107%	310.406.213,00	311.306.213,00	100%
4	Pembangunan/Penyedia an Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.901.764.000,00	3.901.764.000,00	100%			
5	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	180.500.000,00	180.500.000,00	100%	135.293.787,00	135.293.787,00	100%
6	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00	100%			
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**3.424.770.000,00**	**3.624.770.000,00**	**106%**	**300.000.000,00**	**400.000.000,00**	133%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**3.424.770.000,00**	**3.624.770.000,00**	**106%**	**300.000.000,00**	**400.000.000,00**	133%
1	Penyusunan Rencana Kebijakan Strategis dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	202.270.000,00	202.270.000,00	100%			
2	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				0,00	100.000.000,00	#DIV /0!
3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	500.000.000,00	500.000.000,00	100%	300.000.000,00	300.000.000,00	100%
4	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	2.722.500.000,00	2.922.500.000,00	107%			
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**3.846.960.000,00**	**4.205.960.000,00**	**109%**	**187.000.000,00**	**2.518.680.000,00**	**1347 %**
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**3.550.000.000,00**	**4.205.960.000,00**	**118%**	**187.000.000,00**	**2.518.680.000,00**	**1347 %**
1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	450.000.000,00	500.000.000,00	111%	187.000.000,00	187.000.000,00	100%
2	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.396.960.000,00	3.705.960.000,00	109%	0,00	2.331.680.000,00	#DIV /0!
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**224.800.524.510,00**	**234.555.126.325,00**	**104%**	**171.636.454.550,00**	**145.540.218.550,00**	**85%**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**224.800.524.510,00**	**234.555.126.325,00**	**104%**	**171.636.454.550,00**	**145.540.218.550,00**	**85%**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.187.745.060,00	1.437.935.085,00	121%	1.122.768.500,00	1.122.768.500,00	100%
2	Pengelolaan Leger Jalan	90.000.000,00	90.000.000,00	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100%
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	240.000.000,00		0%	250.000.000,00	250.000.000,00	100%
4	Pembangunan Jalan	4.075.000.000,00	5.176.798.500,00	127%	5.000.000.000,00	830.000.000,00	17%
5	Pelebaran Jalan Menuju Standar	19.400.000.000,00	26.894.613.290,00	139%			
6	Rekonstruksi Jalan	240.000.000,00	240.000.000,00	100%			
7	Rehabilitasi Jalan	30.290.000.000,00	30.290.000.000,00	100%	0,00	10.000.000.000,00	#DIV /0!
8	Pemeliharaan Berkala Jalan	156.979.936.000,00	156.979.936.000,00	100%	156.979.936.000,00	124.319.100.000,00	79%
9	Pemeliharaan Rutin Jalan	12.537.843.450,00	13.445.843.450,00	107%	8.183.750.050,00	8.918.350.050,00	109%
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**250.255.400,00**	**250.255.400,00**	**100%**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100%**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**250.255.400,00**	**250.255.400,00**	**100%**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100%**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	50.255.400,00	50.255.400,00	100%			
2	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	200.000.000,00	200.000.000,00	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100%
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.264.695.000,00**	**1.561.384.000,00**	**123%**	**1.949.000.000,00**	**2.024.000.000,00**	**104%**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**1.041.295.000,00**	**1.337.984.000,00**	**128%**	**1.350.000.000,00**	**1.350.000.000,00**	**100%**
1	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1.041.295.000,00	1.337.984.000,00	128%	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	100%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**223.400.000,00**	**223.400.000,00**	**100%**	**599.000.000,00**	**674.000.000,00**	**113%**
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	223.400.000,00	223.400.000,00	100%	599.000.000,00	674.000.000,00	113%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**1.950.075.000,00**	**1.940.075.000,00**	**99%**	**2.500.320.000,00**	**2.800.320.000,00**	**112%**
10	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**100%**	**355.000.000,00**	**355.000.000,00**	**100%**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100%**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**100%**
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				20.000.000,00	20.000.000,00	100%
2	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	100%
3	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				25.000.000,00	25.000.000,00	100%
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100%**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**	**100%**
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	60.000.000,00	60.000.000,00	100%	200.000.000,00	200.000.000,00	100%
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				70.000.000,00	70.000.000,00	100%
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100%**			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30.000.000,00	30.000.000,00	100%			
11	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**534.250.000,00**	**534.250.000,00**	**100%**	**450.000.000,00**	**750.000.000,00**	**167%**
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				**450.000.000,00**	**750.000.000,00**	167%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	**534.250.000,00**	**534.250.000,00**	**100%**	**450.000.000,00**	**750.000.000,00**	**167%**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	440.000.000,00	440.000.000,00	100%	200.000.000,00	500.000.000,00	250%
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	94.250.000,00	94.250.000,00	100%	150.000.000,00	150.000.000,00	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	100%
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				20.000.000,00	20.000.000,00	100%
12	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	**80%**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100%**
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.000,00**	**40.000.000,00**	**80%**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100%**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	50.000.000,00	40.000.000,00	80%	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
13	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**1.255.825.000,00**	**1.255.825.000,00**	**100%**	**1.595.320.000,00**	**1.595.320.000,00**	**100%**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**1.255.825.000,00**	**1.255.825.000,00**	**100%**	**1.595.320.000,00**	**1.595.320.000,00**	**100%**
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	20.000.000,00	20.000.000,00	100%			
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.215.825.000,00	1.215.825.000,00	100%	1.545.320.000,00	1.545.320.000,00	100%
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	20.000.000,00	20.000.000,00	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	100%
4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.215.825.000,00	1.215.825.000,00	100%			
14	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI,KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100%**
	Sertifikasi dan Registrasibagi Orang atau BadanHukum yang MelaksanakanPerancangan danPerencanaan Rumah sertaPerencanaan Prasarana,Sarana dan Utilitas UmumPSU Tingkat KemampuanKecil				**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100%**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				50.000.000,00	50.000.000,00	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**484.865.000,00**	**474.198.000,00**	**98%**			
15	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**				**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	100%
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum				**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
	dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.				50.000.000,00	50.000.000,00	100%
16	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**484.865.000,00**	**474.198.000,00**	**98%**	**625.000.000,00**	**416.300.000,00**	**67%**
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	484.865.000,00	474.198.000,00	98%	625.000.000,00	416.300.000,00	67%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	484.865.000,00	474.198.000,00	98%	625.000.000,00	416.300.000,00	67%
TOTAL ANGGARAN		**295.870.216.492,00**	**299.045.270.607,00**	**101%**	**223.826.401.994,00**	**192.713.958.994,00**	**86%**

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami penurunan signifikan sebesar 35,69% dari penetapan APBD 2024 (Rp 299,04 Miliar) menjadi penetapan APBD 2025 (Rp 192,71 Miliar), mencerminkan pergeseran prioritas dari pembangunan infrastruktur besar ke pemeliharaan dan program rutin.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%. Sehingga anggaran DPUPR yang awal 2025 (Rp 192,71 Miliar) menjadi (Rp 93,7 M).

2.2.2. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Tujuan utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran adalah untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik, di mana perbandingan ini berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengukur seberapa efektif dan efisien program serta kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan, sekaligus menjadi mekanisme pengendalian untuk mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan pengeluaran agar tetap sesuai dengan batas yang ditetapkan, dan pada akhirnya menyediakan data historis yang realistis dan transparan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan anggaran pada periode selanjutnya

Tabel 2.2

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2025

No	PROGRAM	2024			2025 TW II		
		APBD (PERUBAHAN)	REALISASI	%	APBD (PERGESERAN)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.358.999.720	21.961.236.680	98%	23.353.966.554	12.463.942.659	53%

No	PROGRAM	2024			2025 TW II		
		APBD (PERUBAHAN)	REALISASI	%	APBD (PERGESERAN)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.651.966.662	8.921.017.955	92%	6.082.947.375	1.364.352.900	22%
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.123.469.000	13.560.398.309	96%	2.737.079.200	616.369.450	23%
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.299.066.500	6.269.711.000	100%	756.884.720	246.500.707	33%
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN DRAINASE	3.624.770.000,00	3.430.087.607,00	95%	1.487.413.200	396.957.700	27%
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.205.960.000	3.889.708.700	92%	2.831.340.260	1.959.161.500	69%
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	234.555.126.325	203.994.271.695	87%	51.554.513.250	12.582.172.050	24%
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	250.255.400	245.697.900	98%	93.714.800	0	0%
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.561.384.000	1.555.719.933	100%	1.885.967.400	721.535.910	38%
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	110.000.000	109.453.850	100%	340.344.910	42.005.150	12%
11	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	534.250.000	532.102.000	100%	698.348.375	44.635.150	6%
12	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	40.000.000	40.000.000	100%	35.083.700	17.534.750	50%
13	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.255.825.000	1.232.069.750	98%	1.522.603.340	559.740.775	37%
14	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	34.585.750	19.333.800	56%
15	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	75.000.000	0	0%
16	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	-		-	28.750.000	0	0%
17	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	474.198.000	471.075.500	99%	230.437.160	103.886.100	45%
JUMLAH ANGGARAN		**299.045.270.607**	**266.212.550.879**	**83,78%**	**93.748.979.994**	**31.138.128.601**	**33%**

Berdasarkan perbandingan alokasi APBD dan realisasi, dapat dianalisis bahwa kinerja anggaran tahun 2024 (APBD Perubahan) menunjukkan keberhasilan tinggi dengan serapan mencapai 83,78% secara keseluruhan, didukung oleh banyak program (seperti Air Limbah dan Penataan Ruang) yang terealisasi sempurna atau hampir sempurna, mengindikasikan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan yang baik. Namun, kinerja anggaran 2025 Triwulan II (APBD Pergeseran) menunjukkan perlambatan signifikan dengan realisasi kumulatif baru mencapai 33%, yang meskipun masih dalam batas wajar untuk pertengahan tahun, memerlukan perhatian serius karena beberapa program penting, termasuk Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan SDA, dan Jasa Konstruksi, menunjukkan serapan yang sangat rendah atau bahkan 0%, menandakan adanya penundaan pelaksanaan lelang atau hambatan administratif yang perlu segera diatasi untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun

Tabel 2.3

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke		Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.254.782.530	22.358.999.720	22.379.265.553	21.961.236.680	96,24	98,22
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	9.418.927.811	9.651.966.662	7.689.446.899	8.921.017.955	81,64	92,43

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke		Persentase Realisasi Anggaran (%)	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	15.197.144.000	14.123.469.000	14.124.440.576	13.560.398.309	92,94	96,01
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.226.124.067	6.299.066.500	6.177.710.811	6.269.711.000	99,22	99,53
5	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	95.000.000	0	91.006.300	0	95,8	0
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.203.675.000	4.205.960.000	8.098.414.429	3.889.708.700	98,72	92,48
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	75.417.283.628	227.155.126.325	66.099.507.753	203.994.271.695	87,65	86,97
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.840.000	250.255.400	97.977.500	245.697.900	97,16	98,18
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	940.960.000	1.561.384.000	732.626.733	1.555.719.933	77,86	99,64
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	145.000.000	110.000.000	143.514.900	109.453.850	98,98	99,5
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	800.000.000	3.624.770.000	782.596.000	3.430.087.607	97,82	94,63
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	95.000.000	534.250.000	91.006.300	532.102.000	95,8	99,6
13	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0	40.000.000	0	40.000.000	0	100
14	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.790.080.000	1.255.825.000	1.774.103.820	1.232.069.750	99,11	98,11
15	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	304.139.000	474.198.000	157.554.000	471.075.500	51,8	99,34
JUMLAH ANGGARAN		**141.988.956.036**	**291.645.270.607**	**128.439.171.574**	**266.212.550.879**		
RATA - RATA PRESENTASE						**90,46%**	**91,28%**

Berdasarkan tabel diatas realisasi anngaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang solid untuk program-program infrastruktur pada tahun 2023 dan 2024, dengan rata-rata realisasi mencapai lebih dari 90% di kedua tahun tersebut. Fokus utama pembangunan bergeser signifikan ke sektor jalan. Total anggaran melonjak dari Rp 142 miliar menjadi Rp 291 miliar, didorong oleh peningkatan drastis alokasi untuk Program Penyelenggaraan Jalan, yang menyerap porsi terbesar dari dana tersebut. Secara umum, mayoritas program berhasil mengeksekusi anggarannya secara efisien, dengan banyak yang mencapai realisasi di atas 98% pada tahun 2024. Program Penatagunaan Tanah yang sempat rendah penyerapan pada 2023, berhasil memperbaiki kinerjanya secara substansial pada 2024, mencapai 99,34%. Hal ini mengindikasikan manajemen keuangan daerah yang efektif dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

2.3. Evalusi kinerja (Indikator)

Membandingan target dengan realisasi tahun 2024 untuk dasar evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan klasifikasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, interval skala nilai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi

2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja DPUPR Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Capaian Indikator Kinerja Utama /Indikator Sasaran Tahun 2024 dan perbandingan kinerja sasaran strategis dengan target akhir 2026 (RPD 2024-2026)

No	Sasaran	Indikator Sasaran/Iku	2024		2025		Target Akhir Renstra	Capain Terhadap Target Akhir Renstra 2024-2026	Status
			Target	Realisasi	Target	Realisasi (Tw Ii)			
1	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantab	82%	85,30%	83%	83,00%	84,00%	101,55%	Tercapai
2	Meningkatnya infrastruktur irigasi	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	75,50 %	75,50%	76,00%	76,00%	77,00%	98,05%	Belum tercapai
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	73%	73%	74%	74,00%	75,00%	97,33%	Belum tercapai
3	Meningkatnya pengembangan sistem air minum	Cakupan layanan air bersih (Layak)	99,90 %	99,90%	100,00 %	99,9%	100,00 %	99,90%	Belum tercapai
4	Meningkatnya pelayanan sanitasi	Cakupan layanan sanitasi	97,50 %	99,38%	98,00%	98,00%	98,5%	100,89%	Tercapai
5	Meningkatnya kualitas perencanaa, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang	Presentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	85%	85,30%	85%	85,00%	85,00%	100,35%	Tercapai
6	Menurunya kawasan kumuh diderah	Persentase kawasan kumuh	28,16 %	23,33%	20,61%	23,33%	13,07%	178,50%	Tercapai
7	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	73,3	71	73,6	71	74	95,95%	tidak tercapai

Tabel kinerja diatas menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi hampir di seluruh sasaran utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Semester I tahun 2025, yang tercermin dari capaian

Rencana Strategis (Renstra) yang rata-rata melebihi 95% dan mayoritas indikator berada di status "**Sangat Tinggi**". Secara spesifik, indikator peningkatan jalan, infrastruktur irigasi, cakupan layanan sanitasi dan air bersih, serta penggunaan lahan, semuanya telah melebihi target tahunan di Semester I 2025, bahkan ada yang mencapai target akhir Renstra lebih awal (seperti persentase jalan yang mencapai 101,55%).

Tabel 2.6
Hasil Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2024

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi awal tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Akhir RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD
					Target	Realisasi	Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*15*	*16*
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	72	75,5	75,5	100%	77	98,05%
2	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	%	98,8	99,9	99,4	99%	100	99,40%
3	Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	%	99,38	97,5	99,38	102%	98,5	100,89%
4	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	Persentase saluran dalam kondisi baik	%	72	72	72	100%	74	97,30%
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	%	55	56	56	100%	58	96,55%
6	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	52	52	52,3	101%	49	106,73%
7	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik	%	83	84	85	101%	86	98,84%
8	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	83	85	85,3	100%	85	100,35%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
9	Program pengembangan perumahan	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	KK	10	10	3	30%	15	20,00%
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh yang di tangani di bawah 10 ha	%	62	71,8	76,67	107%	86,93	88,20%
11	Program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh	Persentase penanganan RTLH	%	Na	5,71	5,71	100%	6,74	84,72%
12	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan	Perumahan	375	376	402	107%	426	94,37%
13	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	Pengembang	35	35	66	189%	35	188,57%
Urusan Pertanahan									
14	Program penatagunaan tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	%	80	80	45	56,25%	90	50,00%
Rata-rata capaian kinerja program pada DPUPR									**94,57%**

Laporan kinerja program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menunjukkan rata-rata capaian kinerja program yang

cukup baik, yaitu 94,57% terhadap Target Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sebagian besar program di bawah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) mencapai target RPD, bahkan melebihi 100% seperti pada Program Penyelenggaraan Jalan (106,73%) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (100,89%). Namun, terdapat dua program yang memiliki capaian yang sangat rendah terhadap Target Akhir RPD: Program Pengembangan Perumahan (Urusan Perumahan Rakyat), dengan capaian hanya 20,00% (indikator: Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni), dan Program Penatagunaan Tanah (Urusan Pertanahan), dengan capaian 50,00% (indikator: Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat), yang mana keduanya memerlukan perhatian dan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan performa di periode mendatang. Sebagai dasar evaluasi maka dapat dijabarkan pada tabel 2.7 dibawah ini :

TABEL 2.7

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi awal tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			Target Akhir RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2024-2026
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*15*	*16*
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	72	75.5	75.5	100%	76	76	100%	77	98.70%
2	Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum	Persentase penduduk yg terlayani jaringan air minum layak	%	98.8	99.9	99.4	99%	100	100	100%	100	100.00%
3	Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah	Persentase penduduk yang terlayani jaringan IPAL	%	99.38	97.5	99.38	102%	98	98	100%	98.5	99.49%
4	Program pengelolaan dan pengembangan system drainase	Persentase saluran dalam kondisi baik	%	72	72	72	100%	73	73	100%	74	98.65%
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung yg memenuhi peraturan	%	55	56	56	100%	57	57	100%	58	98.28%
6	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	52	52	52.3	101%	53	53	100%	49	108.16%
7	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi yg baik	%	83	84	85	101%	85	85	100%	86	98.84%

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program	Satuan	Kondisi awal tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			Target Akhir RPD	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPD 2024-2026
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*15*	*16*
8	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai peruntukan	%	83	85	85.3	100%	85	85	100%	85	100.00%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
9	Program pengembangan perumahan	Jumlah Warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	KK	10	10	3	30%	10	12	120%	15	66.67%
10	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh yang di tangani di bawah 10 ha	%	62	71.8	76.67	107%	79.61	79.61	100%	86.93	91.58%
11	Program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh	Persentase penanganan RTLH	%	Na	5.71	5.71	100%	6.22	6.22	100%	6.74	92.28%
12	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Jumlah perumahan yang memiliki PSU sesuai peraturan	Perumahan	375	376	402	107%	401	401	100%	426	94.13%
13	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Regristasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	Pengembang	35	35	66	189%	37	37	100%	35	105.71%
Urusan Pertanahan												
14	Program penatagunaan tanah	Persentase tanah milik pemerintah yang telah bersertifikat	%	80	80	45	56.25%	85	85	100%	90	94.44%

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar selaku pengampu Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini menjadi salah satu proritas layanan yang terkait pelayanan wajib dasar. Adapun pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang berkaitan dengan dengan pelayanan wajib dasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8

Analis kinerja pelayanan wajib dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (n-2)	tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100	100	100	0	0	100	100	

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merefleksikan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dengan menargetkan cakupan layanan absolut 100% untuk air minum, air limbah domestik, dan rehabilitasi rumah korban bencana secara konsisten dari tahun 2024 hingga 2027. Meskipun target ini menunjukkan aspirasi kebijakan yang kuat untuk melayani seluruh warga negara, terdapat diskontinuitas signifikan pada indikator fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi (No. 4), di mana realisasi pada tahun 2024 dan 2025 tercatat 0%, sementara

proyeksi tahun 2026 dan 2027 melonjak menjadi 100%; hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program relokasi tersebut bersifat spesifik waktu dan sangat bergantung pada eksekusi proyek strategis yang akan datang, memerlukan manajemen sumber daya dan alokasi anggaran yang cermat untuk mencapai target yang lebih

2.5. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berkaitan dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Kawasan Permukiman, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penyelengaraan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah;
b. Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi yang aman;
c. Belum optimalnya penyelenggaraan tertib administrasi pertanahan;
d. Masih terdapat rumah tidak layak huni, backlog rumah dan kawasan kumuh

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat
    a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
    b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
    c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan aset;
    d. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana.
2. Permasalahan Bidang Bina Marga
    a. Banyak ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak akibat curah hujan yang cukup tinggi;
    b. Meningkatnya beban volume lalulintas dengan muatan lebih menyebabkan jalan cepat rusak;
    c. Adanya pemanfaatan jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan peruntukan seperti membuat bangunan diatas bahu jalan, parkir, pasar tumpah dan lain-lain;
    d. Belum optimalnya penyediaan bangunan pengaman jalan, terutama pada wilayah pegunungan;
    e. Kebutuhan penanganan pemeliharaan jalan yang berlubang di wilayah dengan cepat;
    f. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak dan butuh rehabilitasi serta penggantian.
3. Bidang Sumberdaya Air
    a. Masih terdapat saluran irigasi yang rusak dan kurang terpelihara;
    b. Masih terdapat sarana dan prasarana irigasi (bendung, saluran irigasi, pintu air) dalam kondisi rusak/ kritis yang belum tertangani.
    c. Tingginya kerusakan daerah aliran sungai menyebabkan tingkat erosi dan abrasi semakin tinggi sehingga menyebabkan banjir.
    d. Belum optimalnya pemanfaatan seluruh potensi infrastruktur SDA.
    e. Belum memadainya kondisi infrastruktur SDA;
    f. Adanya persoalan sosial politik di dalam masyarakat terhadap pembangunan di bidang sumber daya air.
    g. Masih ditemukannya bangunan disepanjang garis sepadan sungai/saluran.
4. Bidang Cipta Karya

a. Masih terdapat bangunan gedung yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung;
b. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan perkotaan/ strategis lainnya;
c. Belum optimalnya penyediaan database layanan air minum dan pengelolaan air limbah domestik;
d. Masih terdapat rumah tangga yang belum memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik;
e. Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase kabupaten;
f. Belum terdapat database jaringan drainase perkotaan;
g. Masih terdapat drainase yang rusak dan kurang terpelihara;
h. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap jasa konstruksi.

5. Bidang Tata Ruang
   a. Belum terdapat peraturan tentang RDTR yang menjadi pedoman pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai yang diamanatkan dalam Perda tentang RTRW;
   b. Belum tersedianya data, informasi dan peta detail dan peta turunannya dalam penataan ruang;
   c. Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukkannya, salah satunya disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap ketentuan pemanfaatan ruang;
   d. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang;
   e. Belum seluruh aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar bersertifikat
6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Banyak masyarakat tidak mampu yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetapi belum masuk dalam daftar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial sehingga tidak dapat diusulkan dana bantuan dari APBD Provinsi;
   b. Masih terdapat wilayah yang termasuk ke dalam kawasan kumuh;
   c. Belum tersedianya database backlog perumahan dan data rumah tidak layak huni;
   d. Belum terdapat DED perencanan penanganan kumuh dan produk hukum yang mengatur permasalahan permukiman dan kawasan kumuh.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tantangan
   a. Tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan yang nyata;
   b. Kondisi geografis topografis dan geologis sebagian Kabupaten Karanganyar yang terletak di daerah rawan bencana;
   c. Cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi;
   d. Banyak permintaan diluar rencana Pemerintahan Daerah yang harus dilayani;
   e. Masih terdapat rekanan yang kurang profesional dalam pelaksanaan pekerjaan;
   f. Kebijakan efisiensi anggaran.
2. Peluang
   a. Kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Karanganyar yang cukup kondusif;
   b. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

serta dukungan Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di daerah;

c. Adanya "musrenbang" dengan segala tahapannya untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
d. Terbukanya koordinasi dengan instansi lain.
e. Kesadaran dan motivasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Karanganyar difokuskan pada empat bidang utama:

1. Program Terkait 7 Program Bupati Tahun 2025-2030 program ini mencakup 2 program yang selaras dengan 7 program unggulan Bupati Karanganyar periode 2025-2030
2. Pemenuhan Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) mencakup 3 program yang terkait dengan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat.
3. Penanganan Kawasan Kumuh dan RTLH (02) dengan program berfokus pada penanganan kawasan kumuh dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Karanganyar.
4. Kegiatan Terkait Penataan ruang fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan penataan ruang melalui program penataan ruang.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal Renja dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan 15 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Penataan Bangunan Gedung.
7. Program Penyelenggaraan Jalan.
8. Program pengembangan Jasa konstruksi.
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
10. Program Pengembangan Perumahan.
11. Program Kawasan Permukiman.
12. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
14. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kalsifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
15. Program Penatagunaan Tanah.

Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2026 Dinas PUPR Kabupaten Karanganyar disajikan dalam Tabel 2.8. di bawah ini.

TABEL 2.9

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah**	**Nilai SAKIP OPD**	**Nilai**	**71**	**71,5**	Kab. Karanganyar	**72**	**19.451.192.099,00**	Kab. Karanganyar	**72**	**23.907.399.444**	**Sekretariat**
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**133.414.200**	
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	Kab. Karanganyar	4	0,00	Kab. Karanganyar	4	18.439.200	
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	13.755.000	
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	10.100.000	
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	10.100.000	
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	14.100.000	
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	2	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	16.100.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	50.820.000	
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Laporan Keuangan**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**18.684.236.829,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**20.661.703.244**	
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	181	181	Kab. Karanganyar	181	18.684.236.829,00	Kab. Karanganyar	181	20.588.135.244	
X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	12.100.000	
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	12.100.000	
X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	13.068.000	
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	12.100.000	
X.XX.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	12.100.000	
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	16	Kab. Karanganyar	16	0,00	Kab. Karanganyar	16	12.100.000	
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada	**Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**121.102.000**	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Perangkat Daerah	**Perangkat Daerah**	**Perangkat Daerah tersusun**										
X.XX.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	4	Kab. Karanganyar	4	0,00	Kab. Karanganyar	4	9.100.000	
X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	10.120.000	
X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	101.882.000	
X.XX.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Tesusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusun**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**20.600.000**	
X.XX.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	4	4	Kab. Karanganyar	4	0,00	Kab. Karanganyar	4	8.600.000	
X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	12.000.000	
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**36.300.000**	
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	182	182	Kab. Karanganyar	182	0,00	Kab. Karanganyar	182	18.150.000	
X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	182	182	Kab. Karanganyar	182	0,00	Kab. Karanganyar	182	18.150.000	
X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	Kab. Karanganyar	20	0,00	Kab. Karanganyar	20	-	
X.XX.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang	35	35	Kab. Karanganyar	35	0,00	Kab. Karanganyar	35	-	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Undangan										
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**673.860.000**	
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	60.500.000	
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	Kab. Karanganyar	6	0,00	Kab. Karanganyar	6	120.000.000	
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	6	Kab. Karanganyar	6	0,00	Kab. Karanganyar	6	20.000.000	
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	60.800.000	
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	386	386	Kab. Karanganyar	386	0,00	Kab. Karanganyar	386	400.000.000	
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	12.560.000	
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**710.500.000**	
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	10	Kab. Karanganyar	10	0,00	Kab. Karanganyar	10	20.000.000	
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	Kab. Karanganyar	4	0,00	Kab. Karanganyar	4	690.500.000	
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**583.675.270,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**788.920.000**	
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	12.100.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	Kab. Karanganyar	36	336.315.270,00	Kab. Karanganyar	36	216.590.000	
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Kab. Karanganyar	12	247.360.000,00	Kab. Karanganyar	12	560.230.000	
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**183.280.000,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**761.000.000**	
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	128	128	Kab. Karanganyar	128	0,00	Kab. Karanganyar	128	300.000.000	
X.XX.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	4	4	Kab. Karanganyar	4	183.280.000,00	Kab. Karanganyar	4	300.000.000	
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	10	Kab. Karanganyar	10	0,00	Kab. Karanganyar	10	11.000.000	
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	Kab. Karanganyar	-	0,00	Kab. Karanganyar	-	-	
X.XX.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	Kab. Karanganyar	20	0,00	Kab. Karanganyar	20	30.000.000	
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	120.000.000	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya air**	**Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik**	**%**	**75,5**	**76,5**	Kab. Karanganyar	**77**	**254.080.000,00**	Kab. Karanganyar	**77**	**15.143.661.000**	**Bid. SDA**

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya ketersediaan dan keberlanjutan layanan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian pada daerah irigasi di bawah 1.000 Ha.**	**Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**%**	**73**	**76,5**	Kab. Karanganyar	**75**	**254.080.000,00**	Kab. Karanganyar	**75**	**15.143.661.000**	
1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,1	0,1	Kab. Karanganyar	0,1	0,00	Kab. Karanganyar	0,1	1.000.000.000	
1.03.02.2.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM	0,8	0,8	Kab. Karanganyar	0,8	0,00	Kab. Karanganyar	0,8	800.000.000	
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	24,64	11	Kab. Karanganyar	11	0,00	Kab. Karanganyar	11	11.000.000.000	
1.03.02.2.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM	0,3	0,4	Kab. Karanganyar	0,4	0,00	Kab. Karanganyar	0,4	400.000.000	
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1,69	5	Kab. Karanganyar	5	0,00	Kab. Karanganyar	5	1.283.661.000	
1.03.02.2.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	4	5	Kab. Karanganyar	5	0,00	Kab. Karanganyar	5	100.000.000	
1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	28	28	Kab. Karanganyar	28	0,00	Kab. Karanganyar	28	10.000.000	
1.03.02.2.02.0044 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	28	28	Kab. Karanganyar	28	254.080.000,00	Kab. Karanganyar	28	35.000.000	
1.03.02.2.02.0047 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Rekomendasi	-	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	15.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.02.2.02.0048 Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	UNIT	-	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	500.000.000	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum yang layak**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	%	**99,4**	**99,46**	Kab. Karang anyar	**99,5**	**251.200.000,00**	Kab. Karanganyar	**99,5**	**2.634.800.000**	**Bid.CK**
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan**	**Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan**	**SR**	**245.641, 00**	**245.741, 00**	Kab. Karang anyar	**245.741, 00**	**251.200.000,00**	Kab. Karanganyar	**245.741, 00**	**2.634.800.000**	
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	1	Kab. Karang anyar	1	251.200.000,00	Kab. Karanganyar	1	684.800.000	
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	4,5	7,5	Kab. Karang anyar	7,5	0,00	Kab. Karanganyar	7,5	750.000.000	
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	2,5	3	Kab. Karang anyar	3	0,00	Kab. Karanganyar	3	1.000.000.000	
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	-	100	Kab. Karang anyar	100	0,00	Kab. Karanganyar	100	200.000.000	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan pengelolaan air limbah**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	%	**99,38**	**99.38.00**	Kab. Karang anyar	**99,4**	**56.000.000,00**	Kab. Karanganyar	**99,4**	**796.600.000**	**Bid.CK**
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman melalui pengelolaan air limbah domestik yang**	**Jumlah rumah tangga yang terlayani layanan pengolahan air limbah domestik**	**RT**	**245.408, 00**	**245.413, 00**	Kab. Karang anyar	**245.413, 00**	**56.000.000,00**	Kab. Karanganyar	**245.413, 00**	**796.600.000**	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**layak dan berkelanjutan**											
1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M^3/Hari	20	20	Kab. Karanganyar	20	0,00	Kab. Karanganyar	20	365.000.000	
1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	450	200	Kab. Karanganyar	200	56.000.000,00	Kab. Karanganyar	200	100.000.000	PALD
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00		1	175.000.000	PALD
1.03.05.2.01.0042 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sambungan Rumah (SR)	10	10	Kab. Karanganyar	10	0,00	Kab. Karanganyar	10	50.000.000	
1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	5	5	Kab. Karanganyar	5	0,00	Kab. Karanganyar	5	60.000.000	
1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	46.600.000	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Menurunnya genangan dan risiko banjir di kawasan permukiman**	**Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun**	**%**	**34,81**	**35,07**	Kab. Karanganyar	**35,35**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**35,35**	**400.000.000**	**Bid.CK**

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya efektivitas pengendalian banjir dan genangan melalui sistem drainase yang terkelola dengan baik.**	**Jaringan drainase dalam kondisi baik**	**meter**	**-**	**6.415,00**	Kab. Karanganyar	**6.415,00**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**6.415,00**	**400.000.000**	
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	200.000.000	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**Terwujudnya bangunan gedung yang tertib, aman, dan fungsional**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**%**	**23,62**	**23,7**	Kab. Karanganyar	**23,81**	**1.448.907.000,00**	Kab. Karanganyar	**23,81**	**2.518.680.000**	**Bid.CK**
		Persentase Tingkat Pelayanan Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunanng pemerintah dalam kondisi baik	**%**	**NA**	**57**	Kab. Karanganyar	**65**		Kab. Karanganyar	**65**		
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan fungsi**	**Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Izin PBG**	**Rekomendasi**	**300**	**340**	Kab. Karanganyar	**340**	**1.448.907.000,00**	Kab. Karanganyar	**340**	**2.518.680.000**	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	2	2	Kab. Karanganyar	2	1.448.907.000,00	Kab. Karanganyar	2	2.118.680.000	
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	40	40	Kab. Karanganyar	40	0,00	Kab. Karanganyar	40	400.000.000	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Meningkatnya konektivitas dan kelayakan infrastruktur jalan**	**Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara**	**%**	**30,88**	**30,54**	Kab. Karanganyar	**26,41**	**85.011.147.300,00**	Kab. Karanganyar	**26,41**	**105.200.000.000**	**Bid.BM**
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Meningkatnya kualitas dan keterhubungan infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah**	**Jumlah Panjang Jalan yang diperlihara dan ditingkatkan**	**Km**	**26,14**	**32,28**	Kab. Karanganyar	**32,28**	**85.011.147.300,00**	Kab. Karanganyar	**32,28**	**105.200.000.000**	
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	3	3	Kab. Karanganyar	3	196.320.000,00	Kab. Karanganyar	3	1.500.000.000	
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	871,33	871,33	Kab. Karanganyar	871,33	0,00	Kab. Karanganyar	871,33	300.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.10.2.01.0049 Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	dll	30	Kab. Karanganyar	30	0,00	Kab. Karanganyar	30	1.050.000.000	
1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	100	100	Kab. Karanganyar	100	5.566.080.000,00	Kab. Karanganyar	100	16.000.000.000	
1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	175	175	Kab. Karanganyar	175	0,00	Kab. Karanganyar	175	100.000.000	
1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	1	2,08	Kab. Karanganyar	2,08	20.000.000.000,00	Kab. Karanganyar	2,08	2.500.000.000	
1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	7	8	Kab. Karanganyar	8	0,00	Kab. Karanganyar	8	20.000.000.000	
1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	3	4,6	Kab. Karanganyar	4,6	48.846.000.000,00	Kab. Karanganyar	4,6	7.000.000.000	
1.03.10.2.01.0057 Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	20	20	Kab. Karanganyar	20	0,00	Kab. Karanganyar	20	3.500.000.000	
1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	24	24	Kab. Karanganyar	24	0,00	Kab. Karanganyar	24	2.000.000.000	
1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	7,7	7,7	Kab. Karanganyar	7,7	10.402.747.300,00	Kab. Karanganyar	7,7	27.000.000.000	
1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM	15	15	Kab. Karanganyar	15	0,00	Kab. Karanganyar	15	800.000.000	
1.03.10.2.01.0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	-	28,75	Kab. Karanganyar	28,75		Kab. Karanganyar	28,75	2.300.000.000	
1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	-	41,67	Kab. Karanganyar	41,67	0,00	Kab. Karanganyar	41,67	500.000.000	
1.03.10.2.01.0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	8,2	9,9	Kab. Karanganyar	9,9	0,00	Kab. Karanganyar	9,9	20.550.000.000	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN	**Meningkatnya kapasitas dan daya saing penyedia**	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karang	**100**	**0,00**	Kab. Karanga	**100**	**50.000.000**	**Bid.CK**

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JASA KONSTRUKSI	**jasa konstruksi**	**pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**				anyar			nyar			
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Meningkatnya kompetensi dan ketersediaan tenaga terampil konstruksi di daerah.**	**Persentase peserta yang lulus pelatihan tenaga terampil konstruksii**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karang anyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanga nyar	**100**	**50.000.000**	
1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	10	10	Kab. Karang anyar	10	0,00	Kab. Karanga nyar	10	40.000.000	
1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	10.000.000	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	**Terkendalinya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berdaya saing**	**Presentase Kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**%**	**85,3**	**85,3**	Kab. Karang anyar	**85,3**	**136.800.000,00**	Kab. Karanga nyar	**85,3**	**2.724.000.000**	**Bid.Taru**
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Meningkatnya kepastian hukum dan keterpaduan pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan**	**Jumlah Dokumen Perda/Perkada**	**Dokumen**	**1**	**1**	Kab. Karang anyar	**1**	**136.800.000,00**	Kab. Karanga nyar	**1**	**700.000.000**	
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	136.800.000,00	Kab. Karanga nyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	100.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	-	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Dokumen	-	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	**Meningkatnya keselarasan dan konsistensi perencanaan tata ruang di daerah.**	**Jumlah Dokumen Teknis dan Substansi RDTR/RTRW Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	**1**	**1**	Kab. Karang anyar	**1**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**1**	**1.274.000.000**	
1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	274.000.000	
1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	24	24	Kab. Karang anyar	24	0,00	Kab. Karanganyar	24	250.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ruang												
1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	600.000.000	
1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya keterpaduan dan efektivitas pemanfaatan ruang di daerah.**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	Kab. Karang anyar	**1**	**0,00**	Kab. Karanga nyar	**1**	**250.000.000**	
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	75.000.000	
1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	12	12	Kab. Karang anyar	12	0,00	Kab. Karanga nyar	12	130.000.000	
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	20.000.000	
1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	25.000.000	
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Meningkatnya keselarasan dan keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah**	**Dokumen**	**1**	**1**	Kab. Karang anyar	**1**	**0,00**	Kab. Karanga nyar	**1**	**500.000.000**	
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	1	1	Kab. Karang anyar	1	0,00	Kab. Karanga nyar	1	50.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	150.000.000	
1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	50.000.000	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Meningkatnya ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar Kab. Karanganyar	**100**	**420.000.000**	**Bid.PKP**
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	**%**	**NA**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	0,00	Kab. Karanganyar	**100**		
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Meningkatnya ketersediaan data yang akurat sebagai dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi**	**Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata**	**Unit rumah**	**3**	**14**	Kab. Karanganyar	**14**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**14**	**80.000.000**	
1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	20.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	30.000.000	
1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	30.000.000	
1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi**	**Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**1**	**1**	Kab. Karanganyar	**1**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**1**	**30.000.000**	
1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	23	25	Kab. Karanganyar	25	0,00	Kab. Karanganyar	25	30.000.000	
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau program relokasi**	**Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang dibangun dan direhab**	**Unit Rumah**		**14**	Kab. Karanganyar	**14**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**14**	**310.000.000**	
1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	6	12	Kab. Karanganyar	12	0,00	Kab. Karanganyar	12	240.000.000	
1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	-	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	70.000.000	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Terciptanya kawasan permukiman yang layak huni**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**	**%**	**39,91**	**49,79**	Kab. Karanganyar	**59,67**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**59,67**	**750.000.000**	**Bid.PKP**

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Meningkatnya penataan lingkungan dan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.**	**Jumlah dokumen untuk pencegahan dan pengaturan penanganan kumuh di kab/kota**	**Dokumen**	**3**	**3**	Kab. Karanganyar	**3**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**3**	**300.000.000**	
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	-	2	Kab. Karanganyar	2	0,00	Kab. Karanganyar	2	200.000.000	
1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Meningkatnya kualitas lingkungan dan kelayakan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha.**	**Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan penanganan**	**Ha**	**6**	**6**	Kab. Karanganyar	**6**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**6**	**450.000.000**	
1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	22	10	Kab. Karanganyar	10	0,00	Kab. Karanganyar	10	200.000.000	
1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	30.000.000	
1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	6	6	Kab. Karanganyar	6	0,00	Kab. Karanganyar	6	20.000.000	
1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	6	6	Kab. Karanganyar	6	0,00	Kab. Karanganyar	6	200.000.000	
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh secara signifikan**	**Persentase penanganan RTLH**	**%**	**96,12**	**96,48**	Kab. Karanganyar	**96,96**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**96,96**	**1.000.000.000**	**Bid.PKP**

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Menurunnya potensi munculnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah.**	**Jumlah RTLH yang ditangani**	**Unit Rumah**	**22**	**45**	Kab. Karanganyar	**45**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**45**	**1.000.000.000**	
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	22	45	Kab. Karanganyar	45	0,00	Kab. Karanganyar	45	900.000.000	
1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	100.000.000	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**%**	**65,5**	**65,55**	Kab. Karanganyar	**65,6**	**429.280.000,00**	Kab. Karanganyar	**65,6**	**1.595.320.000**	
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan yang layak dan berkelanjutan di daerah.**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Dokumen**	**15**	**15**	Kab. Karanganyar	**15**	**429.280.000,00**	Kab. Karanganyar	**15**	**1.595.320.000**	
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	33	30	Kab. Karanganyar	30	0,00	Kab. Karanganyar	30	30.000.000	
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	15	10	Kab. Karanganyar	10	0,00	Kab. Karanganyar	10	25.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	364	409	Kab. Karanganyar	409	429.280.000,00	Kab. Karanganyar	409	1.540.320.000	
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**Meningkatnya tertib administrasi dan mutu pelaku pembangunan perumahan dan permukiman**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**%**	**7**	**14**	Kab. Karanganyar	**21**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**21**	**50.000.000**	
1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	**Meningkatnya kualitas dan legalitas perencana perumahan dan PSU tingkat kemampuan kecil.**	**Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi**	**Pengembang**	**36**	**37**	Kab. Karanganyar	**37**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**37**	**50.000.000**	
1.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	36	37	Kab. Karanganyar	37	0,00	Kab. Karanganyar	37	50.000.000	
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	**Meningkatnya pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat melalui redistribusi tanah secara adil dan berkelanjutan**	**Jumlah bidang tanah yang diredistribusi**	**Bidang**	**-**	**1**	Kab. Karanganyar	**1**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**1**	**75.000.000**	
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	**Terjaminnya keadilan dalam penguasaan tanah melalui redistribusi dan pengaturan tanah absentee.**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan redistribusi tanah yang dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**75.000.000**	

Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Satuan	Baseline		Rancangan Awal RKPD 2026			Hasil analisa kebutuahan tahun 2026			Ket
				Tahun 2024	Tahun 2025	Lokasi	Target	Pagu	Lokasi	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
2.10.06.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen			Kab. Karanganyar		0,00	Kab. Karanganyar			
2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Kab. Karanganyar	1	0,00	Kab. Karanganyar	1	75.000.000	
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terwujudnya tertib administrasi, tertib penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah secara optimal, berkeadilan, serta berkelanjutan sesuai peruntukan ruang	Persentase tanah Pemda yang meimiliki sertifikat	%	45	47	Kab. Karanganyar	50	0,00	Kab. Karanganyar	50	416.300.000	
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Terwujudnya pemanfaatan tanah yang tertib dan berkelanjutan sesuai rencana tata ruang wilayah.**	**Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan konsolidasi tanah**	**%**	**100**	**100**	Kab. Karanganyar	**100**	**0,00**	Kab. Karanganyar	**100**	**416.300.000**	
2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	200	200	Kab. Karanganyar	200	0,00	Kab. Karanganyar	200	416.300.000	
JUMLAH TOTAL								**107.038.606.399,00**			**157.215.460.444,00**	

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat RPJMD Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Pada Tahun 2026 ini terdapat beberapa usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD. Menindaklanjuti berbagai usulan kegiatan tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar telah melakukan verifikasi terhadap kelompok pembuat usulan dan meninjau lokasi kegiatan yang diusulkan. Hasil verifikasi tersebut kemudian menjadi dasar memberikan rekomendasi untuk penentuan dapat atau tidaknya usulan tersebut dimasukkan ke dalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, sesuai kriteria yang telah ditentukan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan. Dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;

11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;

9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62

3.3. Tujuan dan Sasaran Daerah

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah;
3. Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar; dan
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   b. Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 : Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;
   a. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
   b. Meningkatnya riset dan inovasi
   c. Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja

d. Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan

4. Tujuan 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata, dengan sasaran sebagai berikut:
   a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 yang sesuai dengan tupoksi Dinas PUPR yang termuat dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi, dengan fokus mengembangkan hilirisasi pertanian, mengembangkan peran pemuda milineal dalam pertanian, pemenuhan sarana pertanian modern menuju ketahanan pangan dengan Peningkatan kualitas irigasi pertanian.;
2. Mengembangkan kualitas infrastruktur, melalui peningkatan kualitas permukaan jalan, Pemenuhan layanan air minum layak, meningkatkan sambungan perpipaan pada perkotaan dan merintis air minum aman, pemenuhan sanitasi layak, peningkatan kualitas IPLT menuju sanitasi aman dan peningkatan penanganan perumahan dan Kawasan permukiman

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan dan sasaran tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karangayar selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya kualitas infrastruktur, perumahan, permukiman, sistem air minum dan sanitasi, penataan ruang, serta pengelolaan dan penyelesaian pertanahan secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi.
2. Meningkatnya kualitas jalan.
3. Meningkatnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang optimal.
4. Meningkatnya pengelolaan air limbah yang terpadu dan berkelanjutan.
5. Meningkatnya efektivitas dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang berwawasan lingkungan.
6. Terwujudnya hunian layak serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata.
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

3.5. Program dan Kegiatan

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
    c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah
    d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
    e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
    f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
   a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
   a. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
   a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota
   b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten / Kota
   c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
   d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota
10. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
    a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program/Kabupaten/Kota
    b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
    c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
    a. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha
12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
    a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
    a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
14. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

a. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

15. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
    a. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
16. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
    a. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.1.

Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026
Meningkatnya kualitas infrastruktur, perumahan, permukiman, sistem air minum dan sanitasi, penataan ruang, serta pengelolaan dan penyelesaian pertanahan secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat		**Indeks Infrastruktur**	**Angka**	**97,72**	**98,04**
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	**%**	**92,78**	**93,14**
	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	74,00	75,00
	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	83,40	83,50
	Meningkatnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang optimal	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	39,66	42,68
	Meningkatnya pengelolaan air limbah yang terpadu dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,14	6,17
	Meningkatnya efektivitas dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	Persentase kesesuaian penggunaan lahan	%	85,50	85,60
	Terwujudnya hunian layak serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata	Persentase kawasan kumuh	%	50,21	40,33
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	3,52	3,04
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.	Nilai IKM	Nilai	81,50	82,45

3.6. Tantangan Perangkat Daerah

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut

1. **Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana :** Pengelolaan aset belum sistematis dan pemeliharaan belum rutin, disertai fasilitas kerja yang terbatas sehingga menghambat efektivitas tugas.
2. **Kerusakan Jalan dan Jembatan :** Curah hujan tinggi, *overload* kendaraan, pemanfaatan yang tidak sesuai, serta kurangnya bangunan pengaman mempercepat kerusakan dan mengancam keselamatan jalan dan jembatan.
3. **Pemeliharaan Jalan dan Jembatan :** Penanganan jalan berlubang dan jembatan rusak yang terlambat membahayakan pengguna dan menghambat kelancaran transportasi.
4. **Kerusakan dan Perawatan Infrastruktur Irigasi dan SDA :** Saluran irigasi dan sarana pendukung yang rusak serta kurang perawatan menghambat distribusi air, memperbesar erosi, abrasi, dan risiko banjir.
5. **Pemanfaatan dan Kondisi Infrastruktur SDA :** Potensi dan kondisi infrastruktur SDA belum optimal, dibarengi persoalan sosial politik dan bangunan ilegal yang memperburuk risiko banjir dan pengelolaan air.
6. **Penataan Bangunan dan Lingkungan :** Bangunan tanpa izin, penataan kawasan yang belum optimal, dan kurangnya database layanan air minum serta pengelolaan air limbah menghambat pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan.
7. **Pengelolaan Drainase :** Sistem drainase yang belum optimal, database drainase yang belum ada, dan kondisi drainase yang rusak menyebabkan rawan banjir dan degradasi lingkungan.
8. **Kapasitas Jasa Konstruksi :** Kapasitas jasa konstruksi yang belum optimal menurunkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
9. **Penataan Ruang dan Aset Tanah :** Ketiadaan peraturan RDTR, data dan peta yang kurang lengkap, pemanfaatan ruang yang tidak sesuai, serta aset tanah yang belum bersertifikat menghambat pengendalian dan kepastian hukum tata ruang.
10. **Perumahan dan Kesejahteraan Sosial :** Banyak masyarakat tidak mampu dengan RTLH yang belum tercatat dalam DTKS, keberadaan kawasan kumuh, dan ketiadaan database *backlog* perumahan menyulitkan penanganan dan bantuan tepat sasaran

3.7. Peluang Perangkat Daerah

Adapun peluang yang menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut

1. Program-program unggulan bupati yang menjadi prioritas yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga menjadi alasan bertambahnya dukungan anggaran.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.

3.8. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai urusan yang ditangani maka Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk dalam 2 urusan pelayanan wajib dasar dan urusan pertanahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Meningkatnya kualitas infrastruktur, perumahan, permukiman, sistem air minum dan sanitasi, penataan ruang, serta pengelolaan dan penyelesaian pertanahan secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Sasaran 8: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan			Meningkatnya kualitas jalan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya pengelolaan sistem penyediaan air minum yang optimal	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya pengelolaan air limbah yang terpadu dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya efektivitas dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang berwawasan lingkungan.	Persentase kesesuaian penggunaan lahan	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 3. Program Penatagunaan Tanah
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Terwujudnya hunian layak serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata	Presentase kawasan kumuh	1.Program pengembangan perumahan 2. Program kawasan permukiman 3. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 4. Program peningkatan prasarana, sarana dan
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	

Sasaran Daerah	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah (PD)
					utilitas umum (PSU) 5. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar mengajukan usulan sebanyak 16 program, 31 kegiatan dan 110 sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 107.038.606.399,00. Alokasi anggaran tersebut untuk pendanaan proyek strategis yang berkaitan dengan 7 program unggalan. Rincian proyek strategis tersebut terdiri dari rehabilitasi jalan, rekonstruksi jalan, perbaikan berkala jalan, perbaikan jaringan irigasi . Selain itu proritas kedua terkait rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah untuk pemenuhan layanan SPM urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat serta dalam upaya penanganan kawasan kumuh dan RTLH.

Dari keseluruhan anggaran tersebut 79% dialokasikan untuk pemenuhan program prioritas yaitu jalan bebas jeglongan. Sedang sisanya untuk kebutuhan belanja pegawai ASN maupun belanja tenaga administrasi. Pada tahun 2026 berdasarkan rencana awal RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mendapatkan alokasi anggaran operasional biaya umum. Alokasi anggaran terkait layanan SPM, perizinan dan penataan ruang juga belum mendapatkan alokasi. Hal tersebut akan menjadi catatan di anggaran perubahan agar bisa diusulkan untuk kelancaran kegiatan pada tahun 2026.

Tabel 4.1
Program dan Perkiraan Pendanaan Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						107.038.606.399,00							347.166.416.244,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						107.038.606.399,00							347.166.416.244,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						106.609.326.399,00							344.626.096.244,00	
1	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**	**-**			**72 Persen**	**19.451.192.099,00**						**-**	**26.658.955.244,00**	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	-			100 %	18.684.236.829,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	20.688.135.244,00	
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				181 Orang/bulan	18.684.236.829,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		20.588.135.244,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.278.000.000,00	
	1	03	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		278.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusun	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	536.000.000,00	
	1	03	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				4 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				182 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				182 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.280.000.000,00	
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				386 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.800.000.000,00	
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	583.675.270,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	776.820.000,00	
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	336.315.270,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		216.590.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	247.360.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		560.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			100 %	183.280.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	300.000.000,00	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				128 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				4 Unit	183.280.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				4 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik**	**-**			**77 Persen**	**254.080.000,00**						**-**	**1.243.661.000,00**	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			75 %	254.080.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.243.661.000,00	
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	254.080.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.243.661.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota**	**-**			**99,50 %**	**251.200.000,00**						**-**	**4.384.800.000,00**	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	-			245,741 SR	251.200.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	**4.384.800.000,00**	
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	251.200.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		684.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				7.5 Liter/Detik	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				3.00 Liter/Detik	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**-**			**99.40 %**	**56.000.000,00**						**-**	**1.900.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang terlayani layanan pengolahan air limbah domestik	-			245.413 Rumah Tangga	56.000.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.900.000.000,00	
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				200 Rumah Tangga	56.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	0,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	2.01	0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat				10 Sambungan Rumah (SR)	0,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				5 Rumah Tangga	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
5	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Jaringan Drainase Perkotaan Terbangun**	**-**			**35.35 Persen**	**0,00**						**-**	**1.750.000.000,00**	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jaringan drainase dalam kondisi baik	-			6.415 Meter	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.750.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
6	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik**	**-**			**23.81 Persen**	**1.448.907.000,00**						**-**	**2.918.680.000,00**	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Izin PBG	-			340 Rekomendasi	1.448.907.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	2.918.680.000,00	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				2 Bangunan Gedung	1.448.907.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		2.118.680.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				40 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
7	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase panjang jalan yang perlu ditingkatkan dan dipelihara**	**-**			**26.41 %**	**85.011.147.300,00**						**-**	**205.430.000.000,00**	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang diperlihara dan ditingkatkan	-			32.28 KM	85.011.147.300,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	205.430.000.000,00	
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				3 Dokumen	196.320.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				871.33 KM	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0049	Pelebaran Jembatan														
							Panjang jembatan yang dilebarkan				30 Meter	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				100 KM	5.566.080.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				175 KM	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan														
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				2.08 KM	20.000.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				8 KM	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				4.60 KM	48.846.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan														
							Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				20 Meter	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan														
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				24 Meter	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7.70 KM	10.402.747.300,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa														
							Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi				15 KM	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan														
							Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala				28.75 Meter	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				41.67 Jembatan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				9.90 KM	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		38.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan														
							Panjang jembatan yang dibangun				0 Meter	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
8	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi**	**-**			**100 Persen**	**0,00**						**-**	**90.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase peserta yang lulus pelatihan tenaga terampil konstruksii	-			100 Persen	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	90.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				10 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase Kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**	**-**			**85.30 Persen**	**136.800.000,00**						**-**	**100.250.000.000,00**	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perda/Perkada	-			1 Dokumen	136.800.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	42.250.000.000,00	
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	136.800.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														
							Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota														
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota														
							dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Teknis dan Substansi RDTR/RTRW Kabupaten/Kota	-			1 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	13.200.000.000,00	
	1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar														
							Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang														
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				24 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang														
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	-			1 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	20.200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang														
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				12 Layanan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	-			1 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	24.600.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang														
							Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK														
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR														
							Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														
							Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						429.280.000,00							2.540.320.000,00	
10	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**	**-**			**100 Persen**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	-			14 Unit Rumah	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			1 Kegiatan	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
							Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				25 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota yang dibangun dan direhab	-			14 Unit Rumah	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				12 Unit Rumah	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
							Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit Rumah	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
11	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani**	**-**			**59.67 %**	**0,00**						**-**	**1.000.000.000,00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen untuk pencegahan dan pengaturan penanganan kumuh di kab/kota	-			3 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.000.000.000,00	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan penanganan	-			6 Ha	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				10 Unit Rumah	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				6 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				6 Ha	0,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
12	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan RTLH	-			96.96 Persen	0,00						-	0,00	
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang ditangani	-			37 Unit Rumah	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				45 Unit Rumah	0,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
13	**1**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**-**			**65.60 Unit**	**429.280.000,00**						**-**	**1.540.320.000,00**	
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan	-			15 Dokumen	429.280.000,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	1.540.320.000,00	
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				409 Lokasi	429.280.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.540.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
14	**1**	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**-**			**21 %**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah pengembang yang sudah sertifikasi dan teregistrasi	-			37 Pengembang	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				38 Laporan	0,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							0,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						0,00							0,00	
15	**2**	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Jumlah bidang tanah yang diredistribusi**	**-**			**1 Bidang**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan redistribusi tanah yang dilaksanakan	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	0,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
16	**2**	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tanah Pemda yang meimiliki sertifikat**	**-**			**50 %**	**0,00**						**-**	**0,00**	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan konsolidasi tanah	-			100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	JUMLAH											**107.038.606.399,00**							**347.166.416.244,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perancangan penganggaran bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar baik melalui peran serta lembaga swadaya masyarakat maupun kalangan swasta. Rencana kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Rencana program tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar merupakan integritas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat dan bidang pertanahan, yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya *(cascading)* dan juga dapat mempengaruhi *(cross cutting)* capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dann Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;

2) Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan (direncanakan) disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran Tahun 2026;

3) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;
2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan urusan pekerjaan umum,perumahan rakyat,dan Pertanahan perlu:
    a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat,dan pertanahan ;
    b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan urusan pekerjaan umum, perumahan rakyat,dan pertanahan ;
    c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja OPD;
    d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Selanjutnya RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini menjadi acuan kerjasama bagi sub bagian dan bidang-bidang teknis pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan sub bagian dan bidang-bidang melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

Dengan dilaksanakannya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas taufik hidayah dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini akhirnya dapat diselesaikan.

Perangkat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sekarang ini dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai kompleksitas permasalahan baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Telah disusun dan diterbitkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 guna pengelolaan kegiatan perencanaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar karena seperti yang diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat signifikan bagi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuannya.

Sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta usaha untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten serta pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih efisien dan efektif maka diperlukan adanya Penyusunan atas Renja Tahun 2026 ini.

Akhir kata, diharapkan semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai acuan/ pedoman dalam penyusunan Perencanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, pastisipatif, dan akuntabel.

Karanganyar, September 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR

BAKDO HARSONO, S.STP., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780403 199703 1 003

DAFTAR ISI

COVER..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar Belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum..... I-2
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-3
1.4. Sistematika Penulisan..... I-3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 Serta Capaian Renstra Tahun 2025-2029..... II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP II-18
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran..... III-3
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... III-5
3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah..... III-7
3.5. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD..... III-8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
4.1. Program dan Kegiatan IV-1

BAB V PENUTUP V-1
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja V-1
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 TW II.....	II-1
Tabel 2.2.	Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024 dan Tahun 2025 TW II.....	II-3
Tabel 2.3.	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....	II-5
Tabel 2.4.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan).....	II-6
Tabel 2.5.	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 pada Renstra 2024-2026.....	II-14
Tabel 2.6.	Capaian Indikator Program PD Tahun 2024 dan 2025 TW II.....	II-15
Tabel 2.7.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	II-16
Tabel 2.8.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. .	II-20
Tabel 2.9.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	II-31
Tabel 3.1.	Tujuan-Sasaran-Indikator dan Target Tahun 2026.....	III-7
Tabel 3.2.	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD	III-8
Tabel 3.3.	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	III-9
Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027	IV-3
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	IV-28
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.....	IV-28
Tabel 4.4.	Program/ Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026...	IV-28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta ditambah lagi dengan sub urusan pemadam kebakaran, perencanaan strategis kinerja

merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Nomor 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganayr Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bidang Urusan Trantibum Linmas yang memuat program dan kegiatan Pembangunan daerah untuk mendukung Rencana Pembangan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan Pembangunan daerah bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026. Renja Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya ketentuan peraturan tentang perencanaan;
2. Tersedianya dokumen acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam merencanakan dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya, dengan pembiayaan yang bersumber baik dari APBD Kabupaten Karanganyar;
3. Terjabarnya gambaran umum, program-program dan kegiatan-kegiatan SATPOL PP dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Terlaksananya seluruh jajaran aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan;

5. Tersedianya alat pengukuran kinerja aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan program dan kegiatan;
6. Tersedianya masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Daerah dan kebijakan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Terciptanya sinergi program-program dan kegiatan-kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan program-program dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya Pemerintah Daerah mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, baik antar OPD, Instansi/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat;
8. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran dalam rangka program penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 Tahun Ketiga (2026)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
2.5 Penelaahan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Tahun 2026 Serta Capaian Renstra Tahun 2025-2029

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.

Demikian juga rencana kerja perangkat Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan. Pada evaluasi RKPD Tahun 2025 ini memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan sesuai hasil evaluasi Program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025 dan perkiraan pencapaian tahun 2026.

2.1.1 Evaluasi Anggaran Perangkat Daerah

a. Perbandingan usulan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Berikut ini akan disajikan persandingan antara anggaran Kecamatan Jaten pada Rencana Kerja dan APBD Penetapan dan Perubahan untuk tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 12.626.397.609,00** yang terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai	Rp.	6.193.129.709,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	6.433.267.900,00
c.	Belanja Modal :		
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	339.220.300,00
	TOTAL	**Rp.**	**12.626.397.609,00**

Tabel 2.1.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.479.724.907	6.479.724.907	100	6.255.367.809	7.322.417.809	117,58
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.124.300	13.124.300	100	5.212.000	5.212.000	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.067.200	5.067.200	100	2.606.000	2.606.000	100
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.057.100	8.057.100	100	2.606.000	2.606.000	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.697.207	5.217.697.207	100	5.730.329.709	6.723.129.709	117,32
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.217.697.207	5.217.697.207	100	5.730.329.709	6.723.129.709	117,32
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.931.922	205.931.922	100	95.123.800	116.606.100	122,58
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/	6.308.400	6.308.400	100		1.028.100	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	penerangan bangunan kantor						
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.825.000	32.825.000	100			
6)	Penyediaan bahan logistrik kantor	47.744.422	47.744.422	100	32.623.800	32.623.800	100
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.612.500	13.612.500	100	12.500.000	12.500.000	100
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.865.000	5.865.000	100			
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.576.600	99.576.600	100	50.000.000	70.454.200	140,90
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	400.000.000	100			
10)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	400.000.000	0			
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.043.478	247.043.478	100	200.400.000	201.000.000	100,29
11)	Penyediaan jasa surat menyurat	17.763.578	17.763.578	100			
12)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	167.400.000	167.400.000	100	150.000.000	150.000.000	100
13)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.879.900	61.879.900	100	50.400.000	51.000.000	101,19
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.928.000	395.928.000	100	224.302.300	276.470.000	123,25
14)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.864.000	360.864.000	100	224.302.300	276.470.000	123,25
15)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.444.000	14.444.000	100			
16)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.620.000	20.620.000	100			
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.758.172.482	7.521.673.648	100	4.145.440.000	5.075.695.100	122,44
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.678.000.800	6.496.911.448	100	3.535.040.000	3.540.040.000	100,14
17)	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	5.676.804.500	5.676.804.500	100	3.390.040.000	3.390.040.000	100
18)	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	30.000.000	100			
19)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	194.473.000	194.473.000	100	145.000.000	100.000.000	68,96
20)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	354.511.300	354.511.300	100			
21)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	422.212.000	422.212.000	100		50.000.000	0
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.075.171.682	1.075.171.682	100	610.400.000	1.535.655.100	251,58
22)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	330.500.000	330.500.000	100			
23)	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	744.671.682	744.671.682	100	610.400.000	1.535.655.100	251,58
9.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	5.000.000	5.000.000	100			
24)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.000.000	5.000.000	100			
III. .	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.129.898.200	1.129.898.200	100	832.400.000	933.150.000	112,10
10.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.093.065.200	1.093.065.200	100	832.400.000	933.150.000	112,10
25)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.031.247.000	1.031.247.000	100	832.400.000	933.150.000	112,10
26)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	45.073.200	45.073.200	100			

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						
27)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	16.745.000	16.745.000	100			
11.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10.000.000	10.000.000	100			
28)	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000	10.000.000	100			
12.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100			
29)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100			

Sumber : Satpol PP, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Satuan Polisi Pamong Praja untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 118,67%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Baperlitbang yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 13.331.262.909,00 atau 118,67% harus berkurang sebesar Rp. 231.290.000,00 sehingga pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah Rp. 13.099.972.909,00 atau 116,61% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, akan disajikan dalam tabel 2.2, berikut ini.

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan SATPOL PP
Tahun 2024 dan Tahun 2025 TW II

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD (EFISIENSI)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.479.724.907	6.218.976.308	95,97	7.294.153.009	2.643.330.704	36,23
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.124.300	12.928.300	98,5	3.936.000	1.750.000	44,46
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.067.200	4.881.200	96,33	2.606.000	1.330.000	51,04
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.057.100	8.047.100	99,88	1.330.000	420.000	31,58
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.697.207	5.016.970.010	96,15	6.723.129.709	2.402.136.432	35,73
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.217.697.207	5.016.970.010	96,15	6.723.129.709	2.402.136.432	35,73
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.931.922	196.281.565	95,31	89.617.300	40.575.840	45,27
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.308.400	6.243.400	98,97	1.028.100	-	-
5)	Penyediaan Peralatan dan	32.825.000	32.400.000	98,71	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD (EFISIENSI)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perlengkapan Kantor						
6)	Penyediaan bahan logistrik kantor	47.744.422	47.744.422	100	30.054.000	17.223.110	57,31
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.612.500	13.612.500	100	11.550.000	4.960.000	42,94
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.865.000	5.055.000	86,19	-	-	-
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.576.600	91.226.243	91,61	46.985.200	18.392.730	39,15
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	400.000.000	397.590.500	99,40	-	-	-
10)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	397.590.500	99,40	-	-	-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.043.478	231.453.213	93,68	201.000.000	85.501.382	42,53
11)	Penyediaan jasa surat menyurat	17.763.578	17.763.578	100	-	-	-
12)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	167.400.000	151.809.735	90,69	150.000.000	60.301.382	40,20
13)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.879.900	61.879.900	100	51.000.000	25.200.000	49,41
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	395.928.000	363.752.720	91,87	276.470.000	113.367.050	41,01
14)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.864.000	329.382.720	91,28	276.470.000	113.367.050	41,01
15)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.444.000	14.065.000	97,38	-	-	-
16)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.620.000	20.305.000	98,47	-	-	-
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.758.172.482	7.521.673.648	96,95	4.906.083.350	2.218.569.350	45,22
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	6.678.000.800	6.496.911.448	97,28	3.409.025.000	1.650.704.000	48,42
17)	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	194.473.000	173.950.000	89,45	36.665.000	-	-
18)	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	354.511.300	337.170.148	95,11	-	-	-
19)	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	422.212.000	417.407.600	98,86	50.000.000	26.400.000	52,80
20)	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Patroli	5.676.804.500	5.538.476.500	97,56	3.322.360.000	1.624.304.000	48,89
21)	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	30.000.000	29.907.200	99,69	-	-	-
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	1.075.171.682	1.024.762.200	95,31	1.497.058.350	567.865.350	37,93
22)	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	330.500.000	320.563.200	96,99	-	-	-
23)	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	744.671.682	704.199.000	94,57	1.497.058.350	567.865.350	37,93
9.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	5.000.000	-	0	-	-	-
24)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5.000.000	-	0	-	-	-
III. .	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.129.898.200	1.114.533.500	98,64	899.736.550	417.090.800	46,36
10.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.093.065.200	1.077.830.500	98,6	899.736.550	417.090.800	46,36
25)	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.031.247.000	1.017.141.500	98,63	899.736.550	417.090.800	46,36
26)	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	16.745.000	16.745.000	100	-	-	-

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD (EFISIENSI)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
27)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	45.073.200	43.944.000	97,49	-	-	-
11.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10.000.000	9.870.000	98,70	-	-	-
28)	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000	9.870.000	98,70	-	-	-
12.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100	-	-	-
29)	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	26.833.000	26.833.000	100	-	-	-
	1 Urusan, 3 Program, 12 Kegiatan, 29 Subkegiatan	**15.367.795.589**	**14.855.183.456**	**96,66**	**13.099.972.909**	**5.278.990.854**	**40,29**

Sumber : SATPOL PP, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 15.367.795.589,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 14.855.183.456,00 atau **96,66 %,** lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 93,74%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 5.278.990.854,00 atau 40,29% dari pagu anggaran Rp. 13.099.972.909,00 setelah adanya efisiensi.

Tabel.2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	**Program**	**2023**			**2024**		
		Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.149.282.544	5.801.183.393	94,33	6.479.724.907	6.218.976.308	95,97
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.794.988.200	5.329.537.900	91,96	7.758.172.482	7.521.673.648	96,95
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.088.914.000	1.087.482.300	99,86	1.129.898.200	1.114.533.500	98,64
	Persentase realisasi	**13.033.184.744**	**12.218.203.593**	**93,74**	**15.367.795.589**	**14.855.183.456**	**96,66**
	Rata-rata realisasi 3 program			**95,38**			**97,18**

Sumber : SATPOL PP, 2025 diolah

Serapan anggaran selama 2 tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut SATPOL PP perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Pelayanan administrasi Perkantoran**								
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**		**99,06%**						
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Satpol PP		98,12%	2 Dokumen	2 Dokumen	96,33%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Bulan Tersedianya Laporan Keuangan		100%	2 Dokumen	2 Dokumen	99,88%	2 Dokumen	1 Dokumen	31,58%
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah**		**94,44%**	**100%**					
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	94,44%	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	96,15%	52 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	51,07%

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah tersedia**	**-**	**87,99%**	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	-	87,99%	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**		**90,57%**	**100%**	**100%**				
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bnagunan Kantor yang Disediakan		71,43%	1 Paket	1 Paket	98,97%	1 Paket	1 Paket	100%
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		99,47%	1 Paket	1 Paket	98,71%	-	-	-
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		100%	38 Item	38 Item	100%	1 Paket	1 Paket	79,91%
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		99,95%	9 Item	8 Item	100%	1 Paket	1 Paket	73,12%
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		73,66%	3 Item	3 Item	86,19%	-	-	-
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		98,93%	12 Bulan	12 Bulan	91,61%	12 Laporan	9 Laporan	65,93%

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		-	**100%**	**100%**	**99,40%**	-	-	-
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		-	2 Unit	2 Unit	99,40%	-	-	-
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**94,87%**	**100%**					
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		97,43%	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		87,26%	12 Bulan	12 Bulan	90,69%	12 Bulan	9 Bulan	59,34%
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		99,94%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	9 Bulan	68,63%
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**94,18%**	**100%**					
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak&Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	30 Unit	95,25%	-	-	-	-	-	-

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	-	30 Unit	30 Unit	91,28%	30 Unit	30 Unit	75,21%
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		95,51%	10 Unit	10 Unit	97,38%	10 Unit	-	-
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	88,78%	-	-	-	-	-	-
1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		97,20%	10 Unit	10 Unit	98,47%	1 Unit	-	-
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**			**100%**		-	-	-	-
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum**		**94,32%**	**100%**		**100%**	-	-	-
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota		86,06%	2 Dokumen	2 Dokumen	89,45%	1 Dokumen	-	-

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		92,96%	6 Dokumen	2 Dokumen	95,11%	1 Dokumen	-	-
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		96,44%	180 Orang	180 Orang	98,86%	-	-	-
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan		96,14%	4 Laporan	12 Laporan	97,56%	12 Laporan	-	-
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		100%	120 Laporan	1 Laporan	99,69%	1 Laporan	-	-
1.05.02.2.01.0018	Pengadaaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	-	-	-	-	-	5 Unit		

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-	-	-	-	-	200 Orang	-	-
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Meningkatnya Penegakan Perda**		**78,46%**	**100%**					
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		77,19%	12 Laporan	12 Laporan	96,99%	-	-	-
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP		79,74%	12 Laporan	12 Laporan	94,57%	-	-	-
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya Kualitas anggota PPNS**		**31,18%**	**100%**					
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS		31,18%	12 Laporan	-	-	-	-	-
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATA NON KEBAKARAN**	**Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**			**100%**					

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Presentase tertanganinya kasus pemadaman kebakaran**		**99,29%**	**100%**					
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya		99,98%	-	-	-	-	-	-
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota		-	6 Laporan	12 Laporan	98,63%	12 Bulan	3 Bulan	23,95 %
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		-	60 Orang	60 Orang	100%	-	-	-
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		98,60%	25 Unit	-	97,49%	1 Unit	4 Unit	97,49 %

-	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW III	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW III (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Presentase dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**97,90%**	**100%**					
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		97,90%	4 Dokumen	1 Dokumen	98,70%	3 Dokumen	1 Dokumen	98,70%
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup system ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya**		**-**	**5 Kecamatan**					
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/ Kelurahan	-	5 Desa/ Kelurahan	5 Desa/ Kelurahan	100%	3 Desa/ Kelurahan	Na	Na

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 TW I
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	88	70,75*	80,39		
	Meningkatkan kondusifitas wilayah	Presentase peraturan daerah yang ditegakkan	%	37,5	38	101,3		
		Respontime Penanganan Kebakaran	%	48,8	69,4	142,2		
Terwujudnya penegakan perda dan perkada, kualitas penanganan kebakaran	Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100	100	100	100	-
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	100	81,15		82	

Sumber : Renstra SATPOL PP 2025-2029

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Program PD Tahun 2024 dan 2025 TW II

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi
				2024		2025	2025 TW II
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100		
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100	100		
3.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100		
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai		74,2	74,25	-
5.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100	100	100	
		Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
		Presentase Linmas yang dibina	%	100	100	100	
6.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (respontime) penanganan kebakaran	Menit	15	11,2	15	

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 adalah **sebagian besar sudah tercapai** meskipun tidak dapat dijadikan pedoman capaian akhir tahun 2026, karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya atau tidak akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW 3	
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Presentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/ Kota (TRANTIBUM)	%	100%	100%	100%		
2	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100%	100%	100%		
3	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	47	726	47	726	
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	dokumen	16	16	16	16	
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/ PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan Satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Orang	3	1	3	1	
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan dalam bentuk dokumen yang sah dan ilegal	dokumen	4	1	4	1	
7	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	2	4	2	4	
8	Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran	unit	64	119	64	119	
9	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	orang	66	59	66	59	
10	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	Layanan	15 Menit	50	15 menit	40	
11	Pemenuhan pelayanan	Orang	-	136	-	190	

	pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran						
12	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak korban kebakaran	Orang	-	380	-		

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satpol PP

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SATPOL PP Kabupaten Karanganyar, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;
   Secara umum program dimaksud tidak ada masalah semua berjalan sesuai dengan program. Tetapi ada beberapa kendala diantaranya :
   a. Belum tersedianya mesin pembangkit listrik portable (genset) sehingga apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN maka aktivitas pelayanan yang membutuhkan daya listrik akan terhenti;
   b. Masih kurangnya peralatan kantor guna mendukung kegiatan pelayanan kepegawaian seperti PC, laptop, printer, dsb;
   c. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana mobilitas karena banyaknya kendaraan yang sudah mulai rusak;
   d. Masih minimnya kesempatan dan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia;
   e. Kebutuhan peralatan, sarana dan prasarana, serta personil yang belum dapat tercapai secara ideal;
   f. Belum dimilikinya dokumen rencana teknis pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   g. Upaya pembinaan ketenteraman dan ketertiban masih disikapi dengan cara responsif dan situasional;
   h. Minimnya media koordinasi dan komunikasi antar SATPOL PP Kabupaten/Kota lain maupun OPD terkait, serta upaya sosialisasi peraturan-peraturan kepada OPD maupun kepada segenap lapisan masyarakat.
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   a. Kualitas disiplin aparatur yang masih perlu untuk ditingkatkan;
   b. Masih kurangnya kendaraan sebagai sarana pelayanan operasional dan lapangan yang memadai;
   c. Belum maksimalnya koordinasi dan kepedulian dari Organisasi Perangkat Daerah yang terkait terhadap tupoksi masing-masing sehingga pelanggaran perda dapat teratasi secara tuntas;
   d. Keberadaan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan belum dioptimalkan dalam membantu tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, termasuk dalam hal bantuan sarana, prasarana, dan dukungan personel SATPOL PP di wilayah;
   e. Belum terdapat peraturan yang mengatur garis koordinasi dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban di Kecamatan;
   f. *Overlapping* tugas pokok yang mungkin terjadi dengan Instansi penegak hukum;
   g. Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa yang dikomandani oleh Kepala Desa/Lurah, belum dioptimalkan dalam membantu tugas pokok dan fungsi SATPOL PP, termasuk dalam hal bantuan sarana, prasarana, dan dukungan teknis, atau peningkatan sumber daya;
   h. Kondisi perekonomian yang tidak stabil memicu meningkatnya PKL, PGOT sehingga diperlukan penanganan/penertiban yang melibat berbagai pihak terkait secara menyeluruh;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
   a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas aparatur pemadam kebakaran yang memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait;
c. Perlunya sosialisasi mengenai kebakaran untuk mengantisipasi kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar;
d. Perlunya pembentukan relawan kebakaran yang memadai;
e. Perlunya pengembangan UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan), sehingga dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat teratasi dengan cepat;
f. Pembuatan *hydrant* disetiap wilayah yang jangkauannya lumayan jauh, agar mempermudah untuk mendapatkan sumber air.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung Misi kelima dari Kepala Daerah yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah raga, diharapkan dengan teratasinya permasalahan yang ada bisa menghasilkan hasil yang maksimal sehingga bisa mendukung RPJMN.

Sedangkan isu penting yang harus ditindaklanjuti saat ini dalam program program di Satuan Polisi Pamong Praja adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.8.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

OPD : SATPOL PP

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SATPOL PP				**13.331.262.909**					**19.843.080.809**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah		**Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	**5.212.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**		**Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**	**20.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.606.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.606.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Satpol PP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Capaian Realisasi**	**100%**	**6.723.129.709**	**Administrasi Keuangan**		**Capaian Realisasi**	**100%**	**6.723.129.709**	

			Anggaran OPD			**Perangkat Daerah**		**Anggaran OPD**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	6.723.129.709	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	6.723.129.709	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Presentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**170.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	257 Stel	170.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	**116.606.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**	**200.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasin Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.028.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Komponen Instalasin Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	32.623.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	12 Laporan	70.454.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	100.000.000	

	Konsultasi SKPD		n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			dan Konsultasi SKPD		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**-**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**2.680.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2.480.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**184.500.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**190.000.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	34.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**292.970.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Presentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**552.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	286.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	400.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	125.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	6.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	25.000.000	

	Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		**Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**100%**	**4.199.071.100**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**100%**	**7.579.471.100**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	175.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	200.000.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 Dokumen	300.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	2 Dokumen	3.880.400.000	

	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 Laporan	3.399.071.100	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 Laporan	3.399.071.100	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganna Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	163 Kasus	50.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganna Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	163 Kasus	30.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25 Unit	200.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25 Unit	-	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Jumlah Aparatut Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	40 Orang	75.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	Jumlah Aparatut Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	40 Orang	70.000.000	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan		**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	**746.624.000**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan**		**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**	**696.240.000**	

	Bupati/Walikota					**Bupati/Walikota**					
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	91 Laporan	100.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	91 Laporan	50.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	84 Laporan	646.624.000	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	84 Laporan	646.240.000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**Meningkatnya Kualitas anggota PPNS**	**100%**	**-**	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**Meningkatnya Kualitas anggota PPNS**	**100%**	**25.000.000**	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	-	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	-	25.000.000	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			**100%**	**905.000.000**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan**			**100%**	**3.121.250.000**	

	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					**Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	865.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	764.240.000	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	30.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Keebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Keebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	80.000.000	
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**Jumlah Bulan Terpenuhinya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**100%**	**10.000.000**	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**Jumlah Bulan Terpenuhinya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**100%**	**10.000.000**	
	Pendataan Sarana	Kab.	Jumlah	1	10.000.000	Pendataan Sarana	Kab.	Jumlah Dokumen	1	10.000.000	

	Prasarana Proteksi Kebakaran	Karanganyar	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		Prasarana Proteksi Kebakaran	Karanganyar	yang Memuat Data Bangunan/ Gedung Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**100%**	**18.150.000**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**100%**	**58.000.000**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiao Tahunnya	-		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiao Tahunnya	100 Orang	40.000.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/ Kelurahan	18.150.000	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Karanganyar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/ Kelurahan	18.000.000	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**Presentase Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi**	**100%**	**130.000.000**	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**Presentase Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan**	**100%**	**65.000.000**	

			Membahayakan Manusia					**Manusia**				
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	-	
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencairan dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	12 Dokumen	15.000.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencairan dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	12 Dokumen	-	
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	50.000.000	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	4 Unit	40.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	4 Unit	65.000.000	

	Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi		untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini dapat kami uraikan mengenai usulan program, kegiatan dari pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-Asosiasi, perguruan tinggi maupun seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mana terdapat beberapa usulan terkait peningkatan gangguan keamanan dan trantibum serta perlindungan masyarakat. Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

OPD: Satpol PP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Target kinerja SATPOL PP Tahun 2026 secara umum adalah : TERWUJUDNYA PARTISIPASI DAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA AGAR SINERGI DENGAN UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana Program dan Kegiatan, selaras dengan isu-isu yang berkembang berkait dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Perhatian terhadap upaya penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama di sektor ekonomi, pendidikan dan kesadaran hukum kepada Masyarakat;
2. Satuan Polisi Pamong Praja mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akan mengakibatkan tumbuhnya pembangunan, seyogyanya diimbangi dengan upaya-upaya ketaatan pada hukum, pemberdayaan masyarakat dan kesadaran mental masyarakat untuk berpartisipasi aktif mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungannya masing-masing;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman atas kegiatan ekonominya, dan pihak swasta atas kegiatan industrinya, ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat dan dunia usaha untuk aktif terlibat dalam upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Masih lemahnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar OPD/ Instansi terkait, dalam penyelenggaraan pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat;
5. Keterbatasan sumberdaya, baik manusia, sarana dan prasana, serta biaya sehingga membuat tugas operasional kurang lancar.

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45

6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;

21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah "SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.***

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;

9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Tujuan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatnya Tata Pemerintah yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya Daerah dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran bersifat

spesifik, dapat dinilai, diukur, “menantang” namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar memiliki sasaran sesuai dengan Renstra Satpol PP:

1. Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Capaian
					2026
Terwujudnya penegakan perda dan perkada, kualitas penanganan kebakaran			Presentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	%	1
	Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran		Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100
		1) Program Penunjang Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	100
			Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
			Presentase Linmas yang dibina	%	0,11
		2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (respontime) penanganan kebakaran	Menit	15
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	82,1
		3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74,3

3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
2. Masyarakat kurang memahami keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja terkait peran, tugas pokok, dan fungsinya;
3. Bertambahnya jumlah penduduk yang berarti menjadi bertambahnya kebutuhan terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;

4. Minimnya alokasi dana untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan juga menjadi kendala bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kebebasan dalam berpendapat yang sering di salah artikan serta gaya hidup yang individualisme yang dapat memicu gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
6. Pergeseran ke zaman era globalisasi yang disalah gunakan

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Karanganyar meliputi :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap politik;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Daerah;
3. Melakukan pendekatan dengan Masyarakat dengan cara sosialisasi peran tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Menambah sumber daya manusia dalam peningkatan kebutuhan terhadap ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
5. Peningkatan Kerjasama antar instansi baik pemerintah dan non pemerintah.

3.5. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Pengukuran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk menilai sejauh mana tugas dan fungsi dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta penegakan Peraturan Daerah telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Proses pengukuran ini menggunakan berbagai indikator, seperti kecepatan respons terhadap aduan masyarakat, tingkat penyelesaian penanganan pelanggaran, kualitas koordinasi lintas sektor, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, Satpol PP dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta optimalisasi kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.5.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 3 : Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi	Terwujudnya penegakan perda dan perkada, kualitas penanganan kebakaran	1. Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran	1. Indeks Pencapaian SPM Trantibumlinmas 2. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber **:** *SATPOL PP, 2025*

3.5.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya kualitas penanganan penegakan perda dan perkada, penanganan kebakaran	1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
			Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
	2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Kota	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia
			Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber **:** *SATPOL PP, 2025*

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar, pada kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karanganyar.

Sejalan dengan misi Kabupaten Karanganyar, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan, dengan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yaitu Rp. 12.727.660.936,-. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
   1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota;
   2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   3) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
   4) Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
   5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;
   6) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
   1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota;
   2) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota;
   1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
   2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri;
b. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran;
   1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran;
   1) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
d. Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia;
   1) Penyelenggaran Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia;
   2) Standarisasi sarana dan prasana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
   3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelematan dan evakuasi;
   4) Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 untuk pendanaannya seperti pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF 2026 (Rp)	PRAKIRAAN MAJU 2027 (Rp)
										CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
										TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	**05**					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**8.793.823.799**	**24.657.000.000**
1	**05**	**02**				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**	**100%**						
1	**05**	**02**	**2.01**			**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**								**Presentase tertanganinya kasus gangguan ketentraman dan**	**100%**		

														ketertiban umum			
1	5	02	2.01	0003		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Kantor Satpol PP	Tersediaya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen			57.304.000	450.000.000
1	05	02	2.01	0004		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kantor Satpol PP	Tersediaya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen			10.000.000	350.000.000
1	05	02	2.01	0006		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kab. Karanganyar	Terlaksanaya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraa	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	-			-	75.000.000

										n dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Kejahatan					
1	05	02	2.01	0008		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			Kantor Satpol PP	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	-	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	-			-	15.000.000
1	05	02	2.01	0015		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Sini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Kab. Karangan yar	Terlaksanya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 Laporan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 Laporan			2.379.100.000	7.000.000.000
1	05	02	2.01	0016		Penindakan atas Gangguan Ketentraman			Kab Karangan	Terlaksanya	163 Laporan	Jumlah Laporan	163 Laporan			-	125.000.000

						dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			yar	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					
1	05	02	2.01	0018		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kantor Satpol PP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	25 Unit			200.000.000	50.000.000
1	05	02	2.01	0025		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			Kantor Satpol PP		40 Orang	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	40 Orang			25.000.000	350.000.000
1	**05**	**02**	**2.02**			**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**								**Meningkatnya Penegakan Perda**	**100%**		
1	05	02	2.02	0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota			Kantor Satpol PP	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan	91 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/ Perkada kepada	91 Laporan			25.000.000	225.000.000

										Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota		Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha					
1	05	02	2.02	0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota			Kab. Karanganyar	Terlaksanaanya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Sesuai SOP	85 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	85 Laporan			409.680.000	500.000.000
1	05	02	2.02	0012		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Kab. Karanganyar	Terlaksanaanya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	-			-	50.000.000
1	**05**	**02**	**2.03**			**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**								**Presentase Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**	**100%**		
1	05	02	2.03	0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Kantor Satpol PP	Terlaksanaanya Pengembangan dan Peningkatan	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam	-			-	20.000.000

										Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada					
1	**05**	**04**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**						
1	**05**	**04**	**2.01**			**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**								**Presentase Tertanganinya Kasus Pemadaman Kebakaran**	**100%**		
1	05	04	2.01	0001		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan	-	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap	-			-	180.000.000

										Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya		Tahunnya					
1	05	04	2.01	0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Kab. Karanganyar	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan			575.680.000	1.220.000.000
1	05	04	2.01	0003		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	-			-	75.000.000
1	05	04	2.01	0004		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kab/			Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Hasil	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	-			-	75.000.000

						Kota				Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
1	05	04	2.01	0005		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	-			-	25.000.000

1	05	04	2.01	0007		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-			-	190.000.000
1	05	04	2.01	0008		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			Kab. Karanganyar	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunny	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/ Kelurahan Setiap Tahunnya	-			-	25.000.000

										a							
1	05	04	2.01	0017		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Keebakaran dan Alat Pelindung Diri			Kantor Satpol PP	Tersediaya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	Jumlah kebutuhan akan alat yang mendukung sarana operasional peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	2 Unit			40.000.000	1.800.000.000
1	05	04	2.01	0018		Penyelenggaraan Kerjasama dan Informasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Kantor Satpol PP	Tersediaya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-			-	35.000.000

1	05	04	2.01	0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-			-	35.000.000
1	**05**	**04**	**2.02**			**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**								**Presentase Kecamatan yang dilakukan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**100%**		
1	05	04	2.02	0001		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersediannya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen			10.000.000	60.000.000
1	05	04	2.02	0002		Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersediannya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenu	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-			-	65.000.000

										hi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran							
1	**05**	**04**	**2.03**			**Investigasi Kejadian Kebakaran**								**Presentase kejadian kebakaran yang di investigasi**	**100%**		
1	05	04	2.03	0001		Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersediannya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	-			-	25.000.000
1	**05**	**04**	**2.04**			**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**								**Presentase Meningkatnya Pencegahan Bahaya Kebakaran**	**100%**		
-	05	04	2.04	0001		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			Kab. Karanganyar	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan	-	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	-			-	100.000.000

										Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya		Setiap Tahunnya					
1	05	04	2.04	0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	1 Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa/ Kelurahan			18.150.000	70.000.000
1	05	04	2.04	0003		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Damkar melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana			Kab. Karanganyar	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	-	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	-			-	50.000.000
1	**05**	**04**	**2.05**			**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**								**Presentase Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap**	**100%**		

														Kondisi Membahaya kan Manusia			
1	05	04	2.05	0001		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/ atau Mengancam Keselamatan Manusia			Kab. Karangan yar	Tersedian ya Laporan Hasil Penyelen ggaraan Operasi Pencaria n dan Pertolong an Pada Peristiwa yang Menimpa , Membaha yakan, dan/ atau Menganc am Keselama tan Manusia	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraa n Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan			15.000.000	15.000.000
1	05	04	2.05	0002		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			Kantor Satpol PP	Tersedian ya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuha n Jenis Sarana dan Prasaran a untuk Pencaria n dan Pertolong an Terhadap Kondisi Membaha yakan Manusia/ Penyelam atan dan Evakuasi	12 Dokume n	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	12 Dokumen			15.000.000	15.000.000

										yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal							
1	05	04	2.05	0004		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				Terlaksanya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan			50.000.000	50.000.000
1	05	04	2.05	0005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	4 Unit			50.000.000	50.000.000

1	**05**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan tata Kelola keuangan daerah berbasis digital.**	**Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi**		**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**						
1	**05**	**01**	**2.01**			**Perencanaan, Penganggaran dan Evalusi Kinerja Perangkat Daerah**								**Presentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**100%**		

1	05	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kantor Satpol PP	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			-	50.000.000
1	05	01	2.02	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kantor Satpol PP	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			-	65.000.000
1	**05**	**01**	**2.02**			**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**Capaian Realisasi Anggaran OPD**	**100%**		
1	05	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kantor Satpol PP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan			4.983.129.599	7.000.000.000
1	**05**	**01**	**2.05**			**Administrasi**								**Presentase**	**100%**		

						Kepegawaian Perangkat Daerah								**Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah**			
1	05	01	2.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kantor Satpol PP	Tersediannya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			-	200.000.000
1	05	01	2.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kantor Satpol PP	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			-	200.000.000
1	**05**	**01**	**2.06**			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor**	**100%**		
1	05	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Satpol PP	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	1 Paket			-	20.000.000

										Penerangan Bangunan Kantor		Kantor yang Disediakan					
1	05	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Satpol PP	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-			-	40.000.000
1	05	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kantor Satpol PP	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket			10.348.800	45.000.000
1	05	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kantor Satpol PP	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket			5.063.900	30.000.000
1	05	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Kantor Satpol PP	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-			-	12.000.000

1	05	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kantor Satpol PP	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			9.530.000	280.000.000
1	**05**	**01**	**2.07**			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											
1	05	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kantor Satpol PP	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-			-	2.000.000.000
1	05	01	2.07	0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			-	150.000.000
1	**05**	**01**	**2.08**			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**								**Presentase Tersedianya**	**100%**		

						Pemerintah Daerah								**Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
1	05	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kantor Satpol PP	Terlaksanaanya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			-	25.000.000
1	05	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kantor Satpol PP	Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			117.000.00	250.000.000
1	05	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kantor Satpol PP	Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			25.200.000	85.000.000
1	**05**	**01**	**2.09**			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**Presentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**100%**		

														Daerah			
1	05	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kantor Satpol PP	Tersediaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-			-	150.000.000
1	05	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kantor Satpol PP	Tersediaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			149.787.500	400.000.000
1	05	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksanaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			-	50.000.000
1	05	01	2.09	0009		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksanaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	1 Unit			-	125.000.000

										Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Direhabilitasi					
1	05	01	2.09	0010		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit			-	50.000.000
1	05	01	2.09	0011		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kantor Satpol PP	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			12.000.000	60.000.000

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian
			2026
1	Persentase Penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat	%	1,0
2	Indeks pencapaian SPM Trantibumlinmas	Indeks	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,1

Sumber : Renstra SATPOL PP 2025-2029

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian
			2026
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
6	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100
7	Waktu tanggap bencana *(respontime)* penanganan kebakaran	Menit	15

Sumber : Renstra SATPOL PP 2025-2029

Tabel 4.4.
Program /Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	PROGRAM, KEGIATAN YANG MENDUKUNG	PAGU ANGGARAN
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
	1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.983.129.599
	2) Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.942.700
	3) Penyediaan Jasa	142.200.000

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	4) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.787.500
2) Intensif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta	2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	5) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.000.000

Sumber : SATPOL PP, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2. Rencan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya;
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2026

RENCANA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh,
salam Tangguh dan salam kemanusiaan,

Alhamdulillah, Puji syukur ke Hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami keluarga besar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024 dengan baik, dan dapat melaporkan hasilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami.

Memasuki tahun 2025, pelaksanaan program kegiatan saat ini sedang berjalan dan besar harapan kami hasilnya akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak bisa lepas dari aspek perencanaan kerja yang baik, pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai aturan hingga pelaporan yang akuntabel dan transparan.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 yang disusun pada tahun 2025 adalah landasan untuk melanjutkan tahapan perencanaan selanjutnya di tahun 2026. Dengan harapan, pada tahun 2026, apa yang menjadi visi, misi, sasaran dan tujuan BPBD dapat tercapai serta terukur dengan indikator yang ada secara maksimal.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini juga digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dicapai di tahun-tahun sebelumnya dan dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dan peningkatan tugas-tugas kami ke depan, serta perencanaan program tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya, serta memberikan kekuatan kepada kami dalam melanjutkan tugas-tugas kemanusiaan saat ini dan di masa yang akan datang. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Karanganyar, 26 September 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar

HENDRO PRAYITNO, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19760531 199503 1 001

DAFTAR ISIh

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I-1
I.1. Latar Belakang I-1
I.2. Landasan Hukum I-2
I.3. Maksud dan Tujuan I-3
I.4. Sistematika Penulisan I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU II-1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Perkiraan 2025 ..... II-1
II.1.1 Evaluasi Anggaran II-1
II.2.1 Evaluasi Kinerja (Indikator) II-8
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasar Indikator yang ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) II-24
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD II-26
II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-26
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional III-1
III.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi III-1
III.3. Tujuan dan Sasaran Daerah III-3
III.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah III-4
III.5. Tantangan dan Peluang III-7
III.6. Pengukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
IV.1. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 ..... IV-1
BAB V PENUTUP V-1
V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja V-1
V.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan V-1
V.3. Rencana Tindak Lanjut V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di BPBD..... II-1
Tabel 2. 2 Realisasi APBD di BPBD Tahun 2024 dan 2025 (TW II) II-5
Tabel 2. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... II-8
Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 ..... II-8
Tabel 2. 5 Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024..... II-9
Tabel 2. 6 Tabel Realisasi IKU PD Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II)..... II-10
Tabel 2. 7 Realisasi IKK PD 2024 dan 2025 Triwulan II II-10
Tabel 2. 8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 (tahun berjalan) II-11
Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar II-24
Tabel 2. 10 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD II-27
Tabel 2. 11 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar..... II-45
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 .....III-6
Tabel 3. 2 Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD III-8
Tabel 3. 3 Keselarasan Sasaran OPD dengan Proram dan Kegiatan III-8
Tabel 4. 1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026 .....IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran dari perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD). Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah.

Proses Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang sudah disusun di awal tahun 2025.

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar mengacu pada beberapa peraturan daerah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebencanaan.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah : 5-134/2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Lampiran V (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   1) Memenuhi amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah;
   2) Mengumpulkan data, informasi, evaluasi dan analisis untuk menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah;
   3) Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Tujuan
   a. Tujuan Internal
      1) Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD dalam merencanakan dan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar.
      2) Menjabarkan tentang gambaran umum, program-program dan kegiatan-kegiatan BPBD dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPBD.
      3) Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan BPBD dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
      4) Sebagai alat pengukuran kinerja aparatur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya.

   b. Tujuan Eksternal
      1) Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan daerah yang berorientasi untuk pembangunan yang mengurangi kerentanan dan pengurangan risiko bencana.
      2) Memberikan arah kebijakan atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
      3) Memberikan gambaran bagi masyarakat dan dunia usaha bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki *concern* yang besar terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.
      4) Mensinergikan program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya- upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman risiko bencana (ketangguhan), baik antar SKPD lain, instansi/lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat.
      5) Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran dalam rangka program penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

I.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) BPBD Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Memuat tentang proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra BPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BPBD.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPBD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Perkiraan 2025

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2024 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2025.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama dan Kunci, sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD yang berisi Perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

II.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dari Masyarakat, hasil Forum Perangkat Daerah (FPD)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaah terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

III.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 Perumusan Program Dan Kegiatan Disertai Target Kinerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 diperlukan informasi kondisi sebelumnya dan peluang serta tantangan di tahun berikutnya. Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Perkiraan 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja BBPD Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk dijadikan bahan/acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

II.1.1 Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan Usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada tahun 2024 dan 2025 BPBD telah merencanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di BPBD

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		Renja	APBD	%	Renja	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**5.659.591.652**	**6.059.591.652**	**107,07**	**5.037.674.149**	**5.345.674.149**	**106,114**
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**3.073.839.652**	**3.318.839.652**	**107,97**	**2.788.570.149**	**2.908.570.149**	**104,303**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.500.000**	**3.500.000**	**100**	**32.000.000**	**30.000.000**	**93,75**
1).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0	30.000.000	28.000.000	**93,3333**
2).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3.500.000	3.500.000	100	2.000.000	2.000.000	**100**
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.251.881.652**	**2.251.881.652**	**100**	**2.269.330.149**	**2.339.330.149**	**103,085**
1).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.248.581.652	2.248.581.652	100	2.267.330.149	2.337.330.149	**103,087**
2).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.300.000	3.300.000	100	2.000.000	2.000.000	**100**

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		Renja	APBD	%	Renja	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**0**	**42.250.000**	**42.250.000**	**100**
1).	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0	42.250.000	42.250.000	**100**
2).	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	-	-	0	-	-	**0**
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**240.760.000**	**340.495.000**	**141,43**	**101.000.000**	**103.000.000**	**101,98**
1).	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.000.000	11.000.000	100	4.000.000	4.000.000	**100**
2).	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000	15.000.000	100	5.000.000	5.000.000	**100**
3).	Penyediaan peralatan rumah tangga	11.500.000	11.500.000	100	5.000.000	10.000.000	**200**
4).	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	100	5.000.000	5.000.000	**100**
5).	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100	-	-	**0**
6).	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	**100**
7).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.500.000	280.235.000	155,255	75.000.000	72.000.000	**96**
8).	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100	2.000.000	2.000.000	**100**
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**64.450.000**	**64.450.000**	**100**	**-**	**-**	**0**
1).	Pengadaan Mebel	28.100.000	28.100.000	**100**	-	-	**0**
2).	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	36.350.000	36.350.000	**100**	-	-	**0**
3).	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	**0**	-	-	**0**
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76.800.000**	**76.800.000**	**100**	**77.600.000**	**77.600.000**	**100**
1).	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	**0**	2.000.000	2.000.000	**100**
2).	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.800.000	76.800.000	**100**	75.600.000	75.600.000	**100**
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**436.448.000**	**581.713.000**	**133,28**	**266.390.000**	**316.390.000**	**118,769**
1).	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	352.948.150	465.558.150	**131,91**	221.390.000	271.390.000	**122,585**
2).	Pemeliharaan mebel	-	-	**0**	-	-	**0**
3).	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	61.500.000	94.155.000	**153,1**	30.000.000	30.000.000	**100**
4).	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	21.999.850	21.999.850	**100**	15.000.000	15.000.000	**100**
II.	**Program Penanggulangan Bencana**	**2.585.752.000**	**2.740.752.000**	**105,99**	**2.249.104.000**	**2.437.104.000**	**108,359**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**115.000.000**	**115.000.000**	**100**	**80.000.000**	**80.000.000**	**100**

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		Renja	APBD	%	Renja	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1).	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	115.000.000	115.000.000	100	75.000.000	75.000.000	100
2).	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**320.000.000**	**470.000.000**	**146,88**	**211.000.000**	**236.000.000**	**111,848**
1).	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
2).	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	30.500.000	30.500.000	100	15.000.000	15.000.000	100
3).	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	50.000.000	100	30.000.000	30.000.000	100
4).	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25.000.000	25.000.000	100	20.000.000	20.000.000	100
5).	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.000.000	200.000.000	400	30.000.000	30.000.000	100
6).	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	16.500.000	16.500.000	100	16.000.000	16.000.000	100
7).	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
8).	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
9).	Pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
10).	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
11).	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	148.000.000	148.000.000	100	75.000.000	100.000.000	133,3333
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.859.582.000**	**1.859.582.000**	**100**	**1.801.604.000**	**1.851.604.000**	**102,775**
1).	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	-	**0**	5.000.000	5.000.000	100
2).	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	1.663.930.000	1.663.930.000	**100**	1.698.604.000	1.698.604.000	100
3).	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
4).	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	-	-	0	15.000.000	15.000.000	100
5).	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	194.812.000	194.812.000	100	75.000.000	125.000.000	166,6667
6).	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	840.000	840.000	100	3.000.000	3.000.000	100
4.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**291.170.000**	**296.170.000**	**101,72**	**156.500.000**	**269.500.000**	**172,204**
1).	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67.670.000	67.670.000	100	5.000.000	5.000.000	100
2).	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	97.500.000	97.500.000	100	5.000.000	125.000.000	2500

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		Renja	APBD	%	Renja	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3).	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000	5.000.000	100	10.000.000	5.000.000	50
4).	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	36.000.000	36.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100
5).	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penenaggulanga Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	35.000.000	35.000.000	100
6).	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	100	40.000.000	40.000.000	100
7).	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.000.000	40.000.000	114,286	25.000.000	25.000.000	100
8).	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-	0	3.500.000	3.500.000	100
9).	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	-	-	0	3.000.000	3.000.000	100
10).	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100
11).	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kot	-	-	0	5.000.000	3.000.000	60
12).	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	5.000.000	5.000.000	100

Sumber : BPBD, 2025 diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan anggaran BPBD pada tahun 2024 dan 2025 adalah diatas 100% jika dibandingkan dengan usulan anggaran pada Renja.

Namun pada awal tahun 2025, telah terbit Instruksi Presiden (Inpres) Nomor I tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian Pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan pengurangan APBD sebagai akibat dari adanya pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas sebesar 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak dan lain-lain sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran BPBD yang semula terpenuhi sejumlah Rp.5.345.674.149,- atau 106,11% harus berkurang sebesar Rp.139.428.500,- sehingga pagu anggaran BPBD tahun 2025 menjadi Rp. 5.206.245.649,- atau 103,37% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah didasarkan pada pergeseran APBD 2025 yang merupakan hasil efisiensi anggaran sebagai dampak regulasi keuangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Realisasi APBD di BPBD Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024			2025 TW 2		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD Pergeseran)	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**6.059.591.652**	**5.791.344.724**	**95,57**	**5.206.245.649**	**2.444.630.774**	**46,96**
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**3.318.839.652**	**3.110.310.524**	**93,72**	**2.865.211.049**	**1.495.905.175**	**52,21**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.500.000**	**3.500.000**	**100,00**	**24.477.000**	**3.672.000**	**15,00**
1).	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	**0,00**	23.852.000	3.672.000	**15,39**
2).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	3.500.000	3.500.000	**100,00**	625.000	-	**0,00**
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.251.881.652**	**2.048.125.060**	**90,95**	**2.337.977.149**	**1.153.253.258**	**49,33**
1).	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.248.581.652	2.044.825.060	**90,94**	2.337.330.149	1.153.253.258	**49,34**
2).	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.300.000	3.300.000	**100,00**	647.000	-	**0,00**
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**0,00**	**42.250.000**	**42.171.675**	**99,81**
1).	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00	42.250.000	42.171.675	**99,81**
2).	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	-	-	0,00	-	-	**0,00**
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**340.495.000**	**340.365.743**	**99,96**	**63.627.000**	**57.501.100**	**90,37**
1).	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.000.000	11.000.000	**100,00**	4.000.000	4.000.000	**100,00**
2).	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000	14.996.100	**99,97**	4.383.500	4.373.100	**99,76**
3).	Penyediaan peralatan rumah tangga	11.500.000	11.500.000	**100,00**	10.000.000	6.725.000	**67,25**
4).	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	10.000.000	**100,00**	4.000.000	2.925.000	**73,13**
5).	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.700.000	**97,83**	-	-	**0,00**
6).	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	5.000.000	**100,00**	4.000.000	3.980.000	**99,50**
7).	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.235.000	280.169.643	**99,98**	35.643.500	33.898.000	**95,10**
8).	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5.000.000	**100,00**	1.600.000	1.600.000	**100,00**
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**64.450.000**	**64.450.000**	**100,00**	**-**	**-**	**0,00**
1).	Pengadaan Mebel	28.100.000	28.100.000	**100,00**	-	-	**0,00**
2).	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	36.350.000	36.350.000	**100,00**	-	-	**0,00**

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024			2025 TW 2		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD Pergeseran)	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3).	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76.800.000**	**73.519.352**	**95,73**	**77.600.000**	**33.859.580**	**43,63**
1).	Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	**0,00**	2.000.000	700.000	**35,00**
2).	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.800.000	73.519.352	**95,73**	75.600.000	33.159.580	**43,86**
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**581.713.000**	**580.350.369**	**99,77**	**319.279.900**	**205.447.562**	**64,35**
1).	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	465.558.150	464.242.369	**99,72**	271.390.000	178.739.562	**65,86**
2).	Pemeliharaan mebel	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
3).	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	94.155.000	94.155.000	**100,00**	32.889.900	11.708.000	**35,60**
4).	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	21.999.850	21.953.000	**99,79**	15.000.000	15.000.000	**100,00**
II.	**Program Penanggulangan Bencana**	**2.740.752.000**	**2.681.034.200**	**97,82**	**2.341.034.600**	**945.725.599**	**40,40**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**115.000.000**	**114.330.000**	**99,42**	**62.600.600**	**6.000.000**	**9,58**
1).	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	115.000.000	114.330.000	**99,42**	59.950.600	6.000.000	**10,01**
2).	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	**0,00**	2.650.000	-	**0,00**
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**470.000.000**	**468.807.500**	**99,75**	**223.329.750**	**183.037.500**	**81,96**
1).	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	5.075.000	-	**0,00**
2).	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	30.500.000	30.140.000	98,82	15.000.000	15.000.000	**100,00**
3).	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	50.000.000	100,00	30.136.500	29.891.500	**99,19**
4).	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25.000.000	25.000.000	100,00	20.000.000	20.000.000	**100,00**
5).	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	200.000.000	199.542.500	99,77	30.000.000	20.000.000	**66,67**
6).	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	16.500.000	16.125.000	97,73	14.141.400	-	**0,00**
7).	Penyusunan Rencana Kontijensi	-	-	0,00	5.000.000	-	**0,00**
8).	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-	-	0,00	2.500.000	-	**0,00**
9).	Pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	3.280.850	3.200.000	**97,54**
10).	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	2.500.000	-	**0,00**
11).	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	148.000.000	148.000.000	100,00	95.696.000	94.946.000	**99,22**
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**1.859.582.000**	**1.813.876.700**	**97,54**	**1.817.947.700**	**704.571.000**	**38,76**
1).	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	4.015.150	4.000.000	**99,62**

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	2024			2025 TW 2		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD Pergeseran)	REALISASI	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2).	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	1.663.930.000	1.629.794.600	97,95	1.672.554.000	573.699.000	**34,30**
3).	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	3.000.000	-	**0,00**
4).	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	-	-	0,00	11.112.950	-	**0,00**
5).	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	194.812.000	183.242.100	94,06	125.000.000	125.000.000	**100,00**
6).	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	840.000	840.000	100,00	2.265.600	1.872.000	**82,63**
4.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**296.170.000**	**284.020.000**	**95,90**	**237.156.550**	**52.117.099**	**21,98**
1).	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	67.670.000	67.050.000	99,08	1.418.850	-	**0,00**
2).	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	97.500.000	87.500.000	89,74	121.785.000	-	**0,00**
3).	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	5.000.000	4.195.000	83,90	5.000.000	2.917.099	**58,34**
4).	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	36.000.000	35.650.000	99,03	15.011.000	-	**0,00**
5).	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penenaggulanga Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	35.000.000	35.000.000	**100,00**
6).	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	49.625.000	99,25	30.811.000	-	**0,00**
7).	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	100,00	17.633.700	10.700.000	**60,68**
8).	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	3.500.000	3.500.000	**100,00**
9).	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	-	-	0,00	1.400.000	-	**0,00**
10).	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	1.975.000	-	**0,00**
11).	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	-	-	0,00	3.000.000	-	**0,00**
12).	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0,00	622.000	-	**0,00**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 6.059.591.652, telah terealisasi sebesar Rp. 5.791.344.724 atau 95,57%. Sedangkan realisasi anggaran untuk tahun 2025 sampai dengan triwulan II adalah Rp. 2.444.630.774 atau 46,96% dari pagu anggaran yang telah diefisiensi sebesar Rp.5.206.245.649.

II.2.1 Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja BPBD dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 tahun 2027, hal 495

Evaluasi capaian kinerja Tahun 2024 BPBD kami sajikan dalam dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Meningkatkan Wilayah yang tangguh bencana berbasis lingkungan		Indeks Risiko Bencana	Indeks	82	87,71	93,49
2		Meningkatkan wilayah yang Tangguh Bencana	% Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	%	22,03	24,86	112,85
3		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	Nilai	72,2	72,4	100,28
	Rata-Rata						102,2

Sumber : BPBD tahun 2025 diolah

Berdasarkan tabel 2.4 kinerja BPBD untuk tahun 2024 dari 3 Indikator Tujuan dan Sasaran masuk kriteria sangat tinggi karena rata-ratanya melebihi 100 % yaitu 102,2.

Sedangkan untuk capaian program BPBD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Penanggulangan Bencana	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
		2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
		3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	85	75	88,23
	Rata-Rata					97,06

Sumber : BPBD tahun 2025 diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata kinerja program BPBD adalah 97,06 dan masuk kriteria sangat tinggi.

Capaian IKU dan IKK untuk tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II) disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 6 Tabel Realisasi IKU PD Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II)

No	Indikator	Satuan	Target		Realisasi capaian		Kinerja (%)		Catatan Analisa
			2024	2025 Smt.I	2024	2025 Smt.I	2024	2025 smt 1	
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	82	87,42	87,71	Na	93,49	-	Capaian indeks 2025 belum keluar
2	% Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	%	22,03	25,98	24,86	26,55	112,85	102,19	Capaian sampai dengan semester 1
3	NILAI SAKIP	Nilai	72,2	72,5	72,4	Na	100,28	-	Capaian 2025 belum keluar

Sumber : BPBD tahun 2025 diolah

Tabel 2. 7 Realisasi IKK PD 2024 dan 2025 Triwulan II

No	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Kinerja (%)		Catatan Analisa
			2024	2025 Smt.I	2024	2025 Smt.I	2024	2025 Smt.I	
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	50	100	50	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	50	100	50	
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	50	100	50	

Sumber : BPBD tahun 2025 diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian IKU dan IKK BPBD tahun 2024 sudah cukup baik. Untuk IKU ada 1 indikator yang belum tercapai, yaitu Indeks Risiko bencana, hal ini disebabkan oleh capaian IKD yang merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IRB belum mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini berkaitan dengan data dukung Indeks ketahanan daerah yang belum terpenuhi. Capaian indikator lain pada IKU dan IKK sudah sesuai target. Untuk capaian tahun 2025 sebagian besar belum dapat dinilai karena masih menunggu nilai dari pihak penilai di awal tahun berikutnya.

b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2025 (Tahun berjalan)

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD tahun 2024 dan Pencapaian Renstra BPBD sampai dengan tahun 2025 kami sajikan dalam bentuk tabel dibawah ini. Dalam tabel tersebut menunjukkan capaian tahun pertama Renstra 2024-2026 dan prediksi tahun kedua Renstra (2025). Untuk saat ini telah berlaku renstra baru periode tahun 2025-2029 yang memuat visi misi Bupati wakil bupti terpilih.

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2025 (tahun berjalan)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1 05 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**87**	**0**	**85**	**75**	88	**86,00**	**81**	**92,5**
1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**100**	**0**	**100**	**100**	100	**100**	**100**	**100**
1 05 01 2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	-	-	-	-	1	**1**	**100,0**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 01 2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	-	3	3	100	3	**6**	**66,7**
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**
1.05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57	0	19	19	100	19	**38**	**66,7**
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	0	1	1	100	1	**2**	**66,7**
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD**	**100**	**0**	**100**	**0**	**0**	**100**	**50**	**50**
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	195	0	-	0	0	65	**65**	**33,3**
1 05 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	65	0	-	0	0	0	**0**	**0,0**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum BPBD**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1 05 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	30	0	15	15	100	8	**23**	**76,7**
1 05 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	150	0	48	48	100	16	**64**	**42,7**
1 05 01 2.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	60	0	36	36	100	22	**58**	**96,7**
1 05 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	33	0	10	10	100	6	**16**	**48,5**
1 05 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	0	2	2	100	0	**2**	**33,3**
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65	0	10	10	100	8	**18**	**27,7**
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	750	0	400	400	100	50	**450**	**60,0**
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300	0	100	100	100	60	**160**	**53,3**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	15	0	8	8	100	0	**8**	**53,3**
1 05 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15	0	9	9	100	0	**9**	**60,0**
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3	0	0	0	0	0	**0**	**0,0**
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**
1 05 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	30	0	-	0	0	10	**10**	**33,3**
1 05 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108	0	36	36	100	36	**72**	**66,7**
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**0**	**100**	**100,0**	**100**	**100**	**100**	**100,0**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 01 2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	63	0	21	21	100	21	**42**	**66,7**
1 05 01 2.09 05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	0	0	0	-	0	**0**	**0,0**
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	450	0	161	161	100	54	215	47,8
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3	0	1	1	100	1	**2**	**66,7**
1 05 03	**Program Penanggulangan Bencana**	**1. Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**
		2. Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**
		3. Persentase warga negara yang memperleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Karanganyar**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,0**
1 05 03 2.01 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	3300	0	200	200	100	2000	2200	66,7
1 05 03 2.01 0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	1	0	-	0	0	1	1	100,0
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**	**100,0**
1 05 03 2.02 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis anacaman	0	0	0	0	0,00	1	1	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
		bencana proritas) Kabupaten/Kota yang tertangani								
1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	30	0	12	12	100,00	10	22	73,3
1 05 03 2.02 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1500	0	220	220	100,00	250	470	31,3
1 05 03 2.02 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80	0	25	25	100,00	45	70	87,5
1 05 03 2.02 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	11	0	10	10	100,00	6	16	145,5
1 05 03 2.02 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	150	0	30	30	100,00	20	50	33,3
1 05 03 2.02 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen rencana kontijensi Kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	0	0	0.	0,00	1	1	100,0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
		paling lama dalam 1 (satu) tahun								
1 05 03 2.02 0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	1	0	0	0	0,00	1	1	100,0
1 05 03 2.02 0026	Pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendaluan operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	3	0	0	0	0,00	1	1	33,3
1 05 03 2.02 0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggukangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	0	0	0,00	1	1	100,0
1 05 03 2.02 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	20	0	5	5	100,00	3	8	40,0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100**	**0**	**100**	**100**	100	100	100	100
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3	0	0	0	0	1	1	33,3
1 05 03 2.03 0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1500	0	500	3695	739	600	4295	286,3
1 05 03 2.03 0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	0	-	0	0	1	1	0,0
1 05 03 2.03 0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0	-	0	0	20	20	0,0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500	0	650	650	100,00	400	1050	70,0
1 05 03 2.03 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3	0	1	1	100,00	1	2	66,7
1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**100**	**0**	**100**	**95**	95,00	100	98	97,5
1 05 03 2.04 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	**3**	**0**	**1**	**1**	100,00	1	2	66,7
1 05 03 2.04 0003	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	**3**	**0**	**1**	**1**	100,00	1	2	66,7
1 05 03 2.04 0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	**3**	**0**	**1**	**1**	100,00	1	2	66,7
1 05 03 2.04 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	**4**	**0**	**2**	**2**	100,00	1	3	75,0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 03 2.04 0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penenaggulanga Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0	0	0	0,00	62	62	0,0
1 05 03 2.04 0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	300	0	100	100	100,00	75	175	58,3
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3	0	1	1	100,00	1	2	66,7

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 03 2.04 0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	0	0	0	0,00	10	10	0,0
1 05 03 2.04 0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0	0	0	0,00	1	1	0,0
1 05 03 2.04 0014	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3	0	0	0	0,00	1	1	33,3

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	TargetKinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan sub kegiatan tahun lalu (n-2)/2024			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Darah s/d tahun berjalan (2025)	
					Target Renja PD tahun (n-2)/2024	Realisasi Renja Perangat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan s.d tahun berjalan/ 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11
1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kot	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0,00	1	1	0,0
1 05 03 2.04 0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0	-	0	0,00	1	1	0,0

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasar Indikator yang ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD berpedoman pada SPM sub urusan bencana. Jenis Pelayanan yang harus dilaksanakan oleh BPBD sesuai SPM sub urusan bencana adalah : Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Capaian Indikator sesuai SPM BPBD kami sajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (n-2)	tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (n-2)	tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
	kesiapsiagaan terhadap bencana	terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana									
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	

Secara keseluruhan capaian indikator SPM pada BPBD menunjukkan hasil yang baik dan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

a. Di tahun 2026 seperti halnya tahun 2025 isu penting tentang perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri. Dampak perubahan iklim berupa musim kemarau yang lebih panjang dan juga cuaca ekstrem memerlukan antisipasi dan kesiapsiagaan. Kekeringan dan kebakaran hutan menjadi masalah baru yang harus dihadapi. Peningkatan kerjasama dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait menjadi hal yang sangat penting dan perlu terus ditingkatkan sehingga tugas-tugas kemanusiaan dapat terselesaikan dengan baik.
b. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meski dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
c. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, pengelolaan data masih belum optimal, terkait ketelitian dan suplay data serta akses data yang masih terbatas.
d. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029, sedangkan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 mengacu pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Namun rancangan awal ini mengalami beberapa penyesuaian akibat adanya kebijakan-kebijakan di tingkat pusat termasuk penyesuaian pagu anggaran sehingga terdapat beberapa perbedaan dalam Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan besarnya anggaran. Besaran pagu yang diperolah di tahun 2026 lebih kecil dari Pagu Rancangan awal RKPD sehingga beberapa sub kegiatan ada yang tidak memperoleh alokasi anggaran atau berkurang pagu anggarannya. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 yang lengkap dari Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target indikator dan alokasi anggarana kami sajikan dalam bentuk Tabel di bawah ini .

Tabel 2. 10 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**6.858.613**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					**4.066.130**	
1 05 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**NILAI SAKIP**	**Nilai**	**73**	**3.633.800**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**NILAI SAKIP**	**Nilai**	**73**	**2.379.194**	
1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**%**	**100**	**35.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD**	**%**	**100**	**1.000**	**Menyesuaikan kemampuan anggaran**
1 05 01 2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	1	30.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	0	-	Renstra sudah tersusun ditahun 2025

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 01 2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	5.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1.000	Menyesuaikan kemampuan anggaran
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD**	**%**	**100**	**2.088.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD**	**%**	**100**	**2.165.326**	**Menyesuaikan kemampuan anggran**
1.05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	19	2.083.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	23	2.165.326	
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	3	5.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	0	-	
1 05 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD**	**%**	**100**	**150.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD**	**%**	**100**	**2.000**	
1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	65	50.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	-	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	0	-	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	1	2.000	
1 05 01 2.05 0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Karanganyar	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	65	100.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab. Karanganyar	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	0	-	
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Umum BPBD**	**%**	**100**	**202.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terlaksananya Administrasi Umum BPBD**	**%**	**100**	**28.650**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	paket	10	10.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	paket	8	2.000	
1 05 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	50	15.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	18	2.005	
1 05 01 2.06 03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Karanganyar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	20	11.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Karanganyar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	10	1.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	0	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5	995	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karanganyar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	11	13.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Karanganyar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	6	2.000	
1 05 01 2.06 06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	2	3.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dok	0	-	
1 05 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	25	5.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	10	2.000	
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	250	140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	20	16.650	
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok	100	5.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dok	50	2.000	
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD**	**%**	**100**	**730.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD**	**%**	**100**	**-**	
1 05 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	-	Jumlah paket Mebel yang disediakan	unit	5	10.000	Pengadaan Mebel	-	Jumlah paket Mebel yang disediakan	unit	0	-	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 01 2.07 06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	5	20.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	0	-	
1 05 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1	700.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	0	-	
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD**	**%**	**100**	**103.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BPBD**	**%**	**100**	**60.850**	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	10	3.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	3	1.000	
1 05 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	36	100.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	27	59.850	
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**325.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**121.368**	
1 05 01 2.09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	21	250.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas	Kab. Karanganyar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	13	106.380	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
							operasional atau lapangan						
1 05 01 2.09 05	Pemeliharaan mebel	Kab. Karanganyar	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	10	5.000	Pemeliharaan mebel	Kab. Karanganyar	Jumlah mebel yang dipelihara	unit	0	-	
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	150	60.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	24	10.000	
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	10.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1	4.988	
1 05 03	**Program Penanggulangan Bencana**		**1. Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**%**	**100**	**3.224.813**	**Program Penanggulangan Bencana**		**1.Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	**%**	**100**	**1.686.936**	**Menyesuaikan kemampuan anggaran**
			2.Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiap siagaan	**%**	**100**				**2.Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan**	**%**	**100**		
			3.Persentase warga negara yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**%**	**100**				**3.Persentase warga negara yang memperleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**100**		

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**		**Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Karanganyar**	**%**	**100**	**170.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**		**Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana di Kabupaten Karanganyar**	**%**	**100**	**6.000**	**Menyesuaikan kemampuan anggaran**
1 05 03 2.01 0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Karanganyar	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/ kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	orang	1100	165.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Karanganyar	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya	orang	700	5.000	
1 05 03 2.01 0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	dok	1	5.000	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	dok	1	1.000	
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**%**	**100**	**790.000**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**%**	**100**	**43.993**	**Menyesuaikan kemampuan anggaran**

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.02 0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis anacaman bencana proritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	kegiatan	0	-	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis anacaman bencana proritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	kegiatan	1	1.000	
1 05 03 2.02 0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit	10	25.000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit	95	2.993	
1 05 03 2.02 0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	500	120.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	orang	235	10.000	
1 05 03 2.02 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Karanganyar	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	30	50.000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Karanganyar	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	25	5.000	
1 05 03 2.02 0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	5	250.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	2	10.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.02 0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	50	50.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	orang	10	1.000	
1 05 03 2.02 0022	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen rencana kontijensi Kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	1	5.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen rencana kontijensi Kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	1	1.000	
1 05 03 2.02 0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	dokumen	1	5.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	dokumen	1	1.000	
1 05 03 2.02 0026	Pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan layanan pusat pengendaluan operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	dokumen	1	5.000	Pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan layanan pusat pengendaluan operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	dokumen	1	1.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.02 0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen Rencana Penanggukangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	1	5.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen Rencana Penanggukangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	1	1.000	
1 05 03 2.02 0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kawasan	8	275.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kawasan	1	10.000	
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**100**	**2.039.813**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**	**100**	**1.614.610**	**Meneysuaikan kemampuan anggrana**
1 05 03 2.03 0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	**laporan**	**1**	**5.000**	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.03 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	1	5.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	1	1.000	
1 05 03 2.03 0003	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	500	1.799.813	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/ kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	600	1.589.110	
1 05 03 2.03 0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	dok	0	-	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	dok	1	1.000	
1 05 03 2.03 0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang	0	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	orang	10	1.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.03 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	500	220.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	60	21.500	-
1 05 03 2.03 0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyaki	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen	1	5.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyaki	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	dokumen	-	-	-
1 05 03 2.03 0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan	1	5.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan	1	1.000	
1 05 03 2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**	**100**	**225.000**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**%**	**100**	**22.334**	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.04 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dok	**1**	**5.000**	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	dok	1	960	
1 05 03 2.04 0003	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dok	**1**	**25.000**	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	dok	1	1.000	
1 05 03 2.04 0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	dok	**1**	**10.000**	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	dok	1	3.350	
1 05 03 2.04 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan	**2**	**30.000**	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	laporan	1	1.000	
1 05 03 2.04 0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penenaggulanga Bencana Kabupaten /Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	orang	**0**	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penenaggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	orang	65	1.040	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.04 0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	orang	**100**	**50.000**	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	orang	20	5.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.04 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	kegiatan	**1**	**100.000**	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	kegiatan	1	5.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.04 0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	lembaga	**0**	-	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	lembaga	10	1.000	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.04 0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	data	**0**	-	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	data	**1**	**992**	
1 05 03 2.04 0014	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/ Kota	Kab.Karanganyar	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	**1**	**5.000**	Penguatan Kelembagaan bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	**1**	**992**	

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Keterangan
	Program/ Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
					K	(Rp.000)					K	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12
1 05 03 2.04 0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kot	Kab. Karanganyar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	**0**	-	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kot	Kab. Karanganyar	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	**1**	**1.000**	
1 05 03 2.04 0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	**0**	-	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dok	**1**	**1.000**	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Renja BPBD tahun 2026 ini tidak memuat usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat karena berdasarkan hasil musrenbang tidak ada usulan program kegiatan yang sesuai dengan tusi BPBD.

Tabel 2. 11 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N I H I L				

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja BPBD tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra BPBD tahun 2025-2029 dan selaras dengan Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029.

Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkan sinkronisasi ini perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan.

III.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

III.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;

5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;

3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:
1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

III.3. Tujuan dan Sasaran Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar adalah **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR"** Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera". Sedangkan dalam rangka mencapai visi di atas, Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih mempunyai misi :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian.
3. Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.
5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah;
3. Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar; dan
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   2) Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;
   1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
   2) Meningkatnya riset dan inovasi
   3) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
   4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan
4. Tujuan 4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Tema Pembangunan tahun 2026 adalah ***Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional***. Prioritas dan Fokus yang sesuai dengan Tupoksi BPBD adalah Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan melakukan koordinasi dengan desa.

Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD yaitu Pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas relawan bencana, penguatan manajemen krisis terpadu serta sistem logistik, untuk operasi tanggap darurat dan penanganan pasca bencana.

III.4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendukung pencapaian 1 (satu) tujuan daerah dan 1 (satu) sasaran daerah yaitu :

Tujuan 2 : *Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilaya*h, dengan sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (sasaran 2), dengan **Strategi** yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD adalah **Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana, pembentukan desa tangguh bencana**.

Adapun Tujuan BPBD sesuai Renstra BPBD Tahun 2025-2029 adalah ***Menurunnya tingkat risiko bencana daerah***. Tujuan tersebut menggambarkan upaya sistematis untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, melalui berbagai upaya antara lain penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan sistem peringatan dini serta penataan kelembagaan sehingga terwujud ketangguhan daerah dalam meminimalkan dampak bencana yang mungkin terjadi. Indikator Kinerja tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah ***Indeks Risiko Bencana***.

Untuk mencapai tujuan strategis BPBD maka ditetapkan sasaran yang harus dicapai. Sasaran BPBD sesuai Renstra BPBD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana;
   Sasaran ini menggambarkan kondisi yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kemampuan seluruh komponen daerah baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan Lembaga lainnya untuk merespon potensi bencana secara cepat, tepat dan efektif sehungga mampu mengurangi kerentanan,meningkatkan respon darurat serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Indikator sasaran ini adalah ***Indeks Ketahanan Daerah.***
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
   Sasaran ini berhubungan dengan Tingkat kepuasan Masyarakat penerima layanan BPBD. Indikator sasaran ini adalah ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat***.

Tujuan dan Sasaran BPBD dengan indikator serta targetnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target		Ket.
								2025	2026	
I.	Menurunnya tingkat risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana			Hasil perhitungan BNPB	Anglka	87,71	87,42	86,55	
			1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil perhitungan BNPB	Angka	0,80	0,81	0,82	
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Masyarakat	Nilai	86,02	86,2	86,4	

III.5. Tantangan dan Peluang

Target kinerja yang nantinya berwujud rencana program dan kegiatan, selaras dengan isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

Tantangan :

1) Belum optimalnya penguatan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana, hal ini dapat dilihat dari jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang masih sedikit.
2) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi isu Perubahan Iklim yang menyebabkan kekeringan, kebakaran dan cuaca ekstrem.
3) Masih kurangnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana.
4) Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
5) Belum optimalnya ketersediaan data bencana.
6) Akses Data kebencanaan masih terbatas.

Peluang :

1) Tersedianya landasan hukum penyelenggaaan penanggulangan bencana;
2) Semakin sinerginya penanganan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun non pemerintah;
3) Adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
4) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat mengurangi resiko bencana;
5) Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6) Adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

III.6. Pengukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

a. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah

BPBD adalah Perangkat Daerah yang menangani Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 2 Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya tingkat risiko bencana daerah	1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber : BPBD, 2025

b. Cascading Kinerja Perangkat Daerah
Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat diuraikan cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 3 Keselarasan Sasaran OPD dengan Proram dan Kegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran OPD	Program	Kegiatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan akan dijabarkan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 menggunakan nomenklatur baru sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD pada tahun 2026 direncanakan untuk mencapai Target Indikator yang telah ditetapkan pada Renstra 2025-2029 dan juga target SPM Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan kerja BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

Pada Rencana Kerja tahun 2026 terdapat 2 (dua) program, yaitu 1 (satu) program rutin dan 1 (satu) program tupoksi. Program rutin terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, sedangkan program tupoksi terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Berikut ini uraian program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang disajikan dalam bentuk tabel lengkap, berisi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target dan rencana pendanaannya.

Tabel 4. 1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.066.129.699**							**7.070.000.000**	**BPBD**
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**4.066.129.699**			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	3.Peningkatan Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			**7.070.000.000**	**BPBD**
I.	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**NILAI SAKIP**	**73**	**2.379.193.699**	**Kab. Karanganyar**	**APBD**	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk	3. Peningkatan Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		**73,2**	**3.645.000.000**	**BPBD**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
												Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
a.	***1***	**05**	**01**	***2.01***		***Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**Persentase Laporan/ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100**	***1.000.000***	***Kab. Karanganyar***				**OPD**	**100**	***45 .000.000***	**BPBD**
	1	05	01	2.01	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	Kab. karanganyar	APBD			OPD	1	5.000.000	**BPBD**
	1	05	01	2.01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			OPD	3	5.000.000	**BPBD**
	1	05	01	2.01	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Kab. Karanganyar	APBD			OPD	1	35.000.000	**BPBD**
b.	***1***	**05**	**01**	***2.02***		***Administrasi Keuangan perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Keuangan BPBD***	**100**	**2.165.325.699**	***Kab. Karanganyar***	***APBD***				**100**	***2.405.000.000***	***BPBD***

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	5	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 orang/ bulan	2.267.330.149	Kab. Karanganyar	APBD				23 orang/ bulan	***2.400.000.000***	BPBD
	1	5	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	Kab. Karanganyar	APBD				1 lap.	5.000.000	***BPBD***
c.	***1***	**05**	**01**	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Kepegawaian BPBD***	100	***2.000.000***	***Kab. Karanganyar***					100	***220.000.000***	BPBD
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0 paket	0	***Kab. Karanganyar***					65 paket	70..000.000	BPBD
	1	05	01	2.05	0002	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dok	2.000.000	Kab. Karanganyar					1 dok	30.000.000	***BPBD***
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	Kab. Karanganyar	APBD				65 orang	120.000.000	***BPBD***
d.	***1***	**05**	**01**	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Terlaksananya Administrasi Umum BPBD***	100	***28.650.000***	***Kab. Karanganyar***					100	***221.000.000***	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	2.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				15 paket	12.000.000	***BPBD***
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 paket	2.005.000	Kab. Karanganyar	APBD				50 paket	15.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 paket	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				20 paket	11.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	995.000	Kab. Karanganyar	APBD				5 paket	5.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	2.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				11 paket	13.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 dokumen	0	Kab. Karanganyar	APBD				2 dok	3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 laporan	2.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				15 lap	5.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	16.650.000	Kab. Karanganyar	APBD				250 lap	150.000.000	BPBD
	1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 dokumen	2.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				100 dok	7.000.000	BPBD
e.	***1***	**05**	**01**	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100%**	***0***	***Kab. Karanganyar***					**100%**	***730.000.000***	**BPBD**
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0	Kab. Karanganyar	APBD				5 unit	10.000.000	BPBD
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	Kab. Karanganyar	APBD				5 unit	25.000.000	BPBD
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	Kab. Karanganyar	APBD				1 unit	200.000.000	BPBD
f.	***1***	**05**	**01**	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang BPBD***	**100%**	***60.850.000***	***Kab. Karanganyar***					**100%**	***123.000.000***	***BPBD***

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				10 lap.	3.000.000	BPBD
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	27 laporan	59.850.000	Kab. Karanganyar	APBD				36 lap.	120.000.000	BPBD
g.	***1***	**05**	**01**	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPBD***	**100%**	**121.368.000**	***Kab. Karanganyar***					**100%**	***396.000.000***	***BPBD***
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	106.380.000	Kab. Karanganyar	APBD				23 unit	300.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	0	0	Kab. Karanganyar	APBD				5 unit	6.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	10.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				80 unit	70.000.000	BPBD
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	4.988.000	Kab. Karanganyar	APBD				1 unit	20.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
II.	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1. Persentase warga negara yang memperolah layanan informasi rawan bencana**	**100%**	**1.686.936.000**	**Kab. Karanganyar**	**APBD**	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	3.Peningkatan Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 6.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		**100%**	**3.425.000.000**	**BPBD**
							2. Persentase warga negara yang memperolah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam	100%		**Kab. Karanganyar**					100%		**BPBD**
							3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%		**Kab. Karanganyar**					100%		**BPBD**
a.	**1**	**05**	**03**	***2.01***		***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota***	***Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan bencana***	100%	**6.000.000**	***Kab. Karanganyar***					100%	***180.000.000***	*BPBD*

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	700 orang	5.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Masyarakat	1100 orang	170.000.000	BPBD
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				1 dok	*10.000.000*	*BPBD*
b.	**1**	**05**	**03**	***2.02***		***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Terlaksnanya Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana***	100%	**43.992.500**	***Kab. Karanganyar***					100%	***800.000.000***	*BPBD*

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 kegiatan	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				1 kegiatan	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	95 unit	2.992.500	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	10 unit	25.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	235 orang	10.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Relawan	800 orang	125.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencama Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 keluarga	5.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	50 keluarga	50.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 kawasan	10.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	15 kawasan	250.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	10 orang	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			TRC	50 orang	50.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			OPD	1 dok	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)yang Dilegalisasi	1dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Masyarakat di daerah rawan bencana	1	5.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Masyarakat di daerah rawan bencana	1 dokumen	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Masyarakat di daerah rawan bencana	1 dok	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 kawasan	10.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	8 kawasan	275.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
c.	***1***	***05***	***03***	***2.03***		***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana***	**100%**	**1.614.609.500**	***Kab. Karanganyar***	***APBD***				**100%**	**2.145.000.000**	***BPBD***
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0	-	-				1	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				1 dok	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	600 orang	1.589.109.500	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	1000 orang	1.850.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	1 dok	5.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/ Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	10 orang	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	20	20.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	55 orang	21.500.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	500 orang	250.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0	-	-	-	-	-	1	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan Pelaksanaan Aktivasi Komando Penanganan Darurat Bencana	1 laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Masyarakat terdampak bencana	1 laporan	1.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
d.	***1***	***05***	***03***	***2.04***		***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penaggulangan Bencana***	100	**22.334.000**	***Kab. Karanganyar***	APBD				100	***300.000.000***	***BPBD***
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kaupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah	1 dok	960.000	Kab. Karanganyar	APBD			Masyarakat di daerah rawan bencana	1	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			Organisasi kelompok relawan	1	10.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 dok	3.350.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	1	10.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	2	30.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Binwas Penyelengaaraan Penanggulangan Bencana	65 orang	1.040.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	65 orang	50.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan teknis pasca bencana	Jumlah aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstrukei Pascabencana (R3P)	20 orang	5.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	100 orang	50.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan pasca bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RP3) kabupaten/kota yang dilegalkan	1 kegiatan	5.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	1 kegiatan	100.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana	10 lembaga	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	10 lembaga	5.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
							Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal									
	1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencan	1 laporan	992.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	1 laporan	5.000.000	BPBD
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	992.000	Kab. Karanganyar	APBD			masyarakat	1 dok	5.000.000	BPBD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				1 dok	5.000.000	
	1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 dok	1.000.000	Kab. Karanganyar	APBD				1 dok	5.000.000	
	Jumlah								**4.066.129.699**							**7.070.000.000**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

V.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Proses penyusunan Rencana Kerja harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Penanggulangan bencana sepert yang tertuang dalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Selanjutnya Rencana Kerja ini digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

V.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja BPBD Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026, pencapaian target indikator yang telah ditetapkan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran tahun 2026;
3) Rencana Kerja BPBD Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;

V.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja BPBD tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;
2) Untuk meningkatkan kualitas Penanggulangan Bencana perlu:
   a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana ;
   b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerja dan penyelarasan penyelesaian permasalahan;
   c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja PD;

d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan disusunnya Rencana Kerja BPBD tahun 2026 diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tercapai tujuan dan sasaran sesuai target yang telah ditetapkan, Kabupaten Karanganyar menjadi wilayah yang Tangguh bencana dan juga semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karanganyar terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan PD Dinas Sosial untuk periode satu tahun. Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman bagi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Seksi didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepala seksi. Selanjutnya Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

KARANGANYAR, September 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN.....I-1
1.1 Latar Belakang.....I-1
1.2 Landasan Hukum.....I-1
1.3 Maksud dan Tujuan.....I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah… II-19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD.....II-19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....II-34
2.5.1 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Pemangku Kepentingan. II-34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN.....III-1
3.1 Telaah Kebijakan Nasional.....III-1
3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....III-1
3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi.....III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran.....III-2
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Daerah.....III-2
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial.....III-4
3.3 Peluang dan Tantangan Perangkat daerah.....III-5
3.3.1 Tantangan.....III-5
3.3.2 Peluang.....III-5
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD.....III-6
3.4.1 Casecading Kinerja Daerah.....III-6
3.4.2 Casecading Kinrja OPD.....III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....IV-1
4.1 Program dan Kegiatan.....IV-1
4.2 Dana Indikatif.....IV-1
4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan.....IV-2
BAB V PENUTUP.....V-1
5.1 Kesimpulan.....V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....V-1
5.3 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.....V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja dengan APBD 2025 di Dinas Sosial.....II.1
Tabel 2.2 Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025.....II.5
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023-2024 .....II.8
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....II.9
Tabel 2.5 Capaian Indikator Tujuan-Sasaran dan Progeam Tahun 2024 dan Tahun 2025 TW-I.....II-20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.....II-21
Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar.....II-23
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....II-36
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2026.....III-5
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD.....III-7
Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran OPD dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan.....III-8
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar IV-3
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Dinas Sosial Kab. Karanganya.....IV-11
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 Dinas Sosial Kab. Karanganyar.....IV-11
Tabel 4.4 Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kab. Karanganyar Tahun 2026.....IV-11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang sosial yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Penyusunan RENJA Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial 2025–2029, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ini diarahkan untuk memperkuat capaian indikator kinerja tahun sebelumnya dan mempercepat pencapaian sasaran strategis bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Dinamika sosial, ekonomi, dan bencana sosial yang terjadi memerlukan respons yang cepat dan terencana agar penanganan permasalahan sosial dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen RENJA ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. RENJA menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dalam menetapkan prioritas kegiatan dan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA.

Dengan demikian, RENJA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama tahun anggaran 2026, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial pada tahun yang bersangkutan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);

14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan di bidang sosial sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026, sehingga seluruh pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penyusunan RENJA Tahun 2026 juga bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang sosial dengan kebijakan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional, serta memastikan tersedianya instrumen perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial selama tahun anggaran 2026.

Secara lebih rinci, maksud dan tujuan penyusunan RENJA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

a. Maksud:

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2026), yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

b. Tujuan:

1. Untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Sebagai acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, fungsi Renja Dinas Sosial

Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, keterkaitan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan dokumen RKPD dan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PERINGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Uraian mengenai realisasi capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

4.2 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja tahun 2025 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang meliputi :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Capaian kinerja program dan kegiatan

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar melaksanakan 6 Program dengan 13 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7 kegiatan, 20 sub kegiatan)
2. Program Pemberdayaan Sosial (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 kegiatan, 3 sub kegiatan)
4. Program Penanganan Bencana (1 kegiatan, 5 sub kegiatan)
5. Program Rehabilitasi Sosial (2 kegiatan, 13 sub kegiatan)
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)

Indikator kinerja tahun 2024 yang ada pada Renstra Dinas Sosial yaitu Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari target 71% realisasi sebesar 71,28%.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut:

2.1.1 Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Dinas Sosial telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Dinas Sosial

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	**13.674.209.095**	**14.183.935.007**	**103,73 %**	**12.047.750.000**	**11.509.833.026**	**95,54 %**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.346.587.109**	**4.346.587.109**	**100,00 %**	**4.677.500.000**	**4.976.874.526**	**106,40 %**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	**35.284.900**	**35.246.900**	**99,89 %**	**47.000.000**	**88.094.800**	**187,44 %**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Perangkat Daerah						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.087.900	9.087.900	100,00 %	10.000.000	59.470.900	594,71 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.197.000	26.159.000	99,85%	27.000.000	18.088.900	67,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	10.000.000	10.535.000	105,35 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.816.331.259**	**2.816.331.259**	**100,00 %**	**3.180.000.000**	**3.306.723.826**	**103,99 %**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.816.331.259	2.816.331.259	100,00 %	3.180.000.000	3.306.723.826	103,99 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**970.200**	**970.200**	**100,00 %**	**30.000.000**	**6.440.000**	**21,47 %**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	970.200	970.200	100,00 %	30.000.000	6.440.000	21,47%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**319.420.270**	**327.280.270**	**102,46 %**	**507.000.000**	**367.137.300**	**72,41 %**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.531.550	10.531.550	100,00 %	10.000.000	8.164.825	81,65%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.604.520	26.604.520	100,00 %	40.000.000	16.734.275	41,84%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.643.200	9.643.200	100,00 %	20.000.000	14.708.700	73,54%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.560.000	1.560.000	100,00 %	30.000.000	1.640.000	5,47%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.000.000	34.000.000	100,00 %	50.000.000	26.250.000	52,50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.724.500	242.584.500	103,35 %	350.000.000	297.506.000	85,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.356.500	2.356.500	100,00 %	7.000.000	2.133.500	30,48%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**199.037.500**	**219.607.500**	**110,33 %**	**68.500.000**	**38.735.000**	**56,55 %**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.037.500	219.607.500	110,33 %	30.000.000	38.735.000	129,12 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-		-	38.500.000	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**593.513.480**	**593.513.480**	**100,00 %**	**545.000.000**	**953.230.100**	**174,90 %**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	863.300	863.300	100,00 %	20.000.000	881.700	4,41%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.800.000	152.800.000	100,00 %	150.000.000	155.400.000	103,60 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.939.200	33.939.200	100,00 %	25.000.000	37.569.200	150,28 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.910.980	405.910.980	100,00 %	350.000.000	759.379.200	216,97 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**382.029.500**	**353.637.500**	**92,57 %**	**300.000.000**	**216.513.500**	**72,17 %**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.916.000	184.524.000	86,67%	200.000.000	190.095.000	95,05%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.113.500	169.113.500	100,00 %	100.000.000	26.418.500	26,42%
Program Pemberdayaan Sosial	**680.235.400**	**680.235.400**	**100,00 %**	**73.500.000**	**52.758.600**	**71,78 %**
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**680.235.400**	**680.235.400**	**100,00 %**	**73.500.000**	**52.758.600**	**71,78 %**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680.235.400	680.235.400	100,00 %	73.500.000	52.758.600	71,78%
Program Rehabilitasi Sosial	**1.305.967.050**	**1.342.028.050**	**102,76 %**	**1.550.000.000**	**530.000.000**	**34,19 %**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**1.145.700.550**	**1.205.700.550**	**105,24 %**	**950.000.000**	**332.670.000**	**35,02 %**
Penyediaan Permakanan	-	0	-	125.000.000	89.320.000	71,46%
Penyediaan Sandang	-	0	-	125.000.000	50.000.000	40,00%
Penyediaan Alat Bantu	55.775.000	55.775.000	100,00 %	150.000.000	30.000.000	20,00%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	0	-	75.000.000	27.470.000	36,63%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	203.916.200	203.916.200	100,00 %	75.000.000	2.025.000	2,70%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	886.009.350	946.009.350	106,77 %	100.000.000	3.000.000	3,00%
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Katru Identitas Anak	-	0	-	10.000.000	2.025.000	20,25%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	0	-	110.000.000	42.000.000	38,18%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	-	0	-	30.000.000	10.025.000	33,42%
Pemberian Layanan Kedaruratan	-	0	-	20.000.000	10.025.000	50,13%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	0	-	100.000.000	28.784.000	28,78%
Pemberian Layanan Rujukan	-	0	-	30.000.000	37.996.000	126,65 %

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**160.266.500**	**136.327.500**	**85,06 %**	**600.000.000**	**197.330.000**	**32,89 %**
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	160.266.500	136.327.500	85,06%	600.000.000	197.330.000	32,89%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**7.152.898.836**	**7.626.563.748**	**106,62 %**	**5.500.000.000**	**5.810.918.500**	**105,65 %**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.152.898.836**	**7.626.563.748**	**106,62 %**	**5.500.000.000**	**5.810.918.500**	**105,65 %**
Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.291.000.000	1.291.000.000	100,00 %	1.260.000.000	604.950.000	48,01%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.825.898.836	6.299.563.748	108,13 %	4.200.000.000	5.172.718.500	123,16 %
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	36.000.000	36.000.000	100,00 %	40.000.000	33.250.000	83,13%
Program Penanganan Bencana	**150.559.000**	**150.559.000**	**100,00 %**	**210.000.000**	**107.640.000**	**51,26 %**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**150.559.000**	**150.559.000**	**100,00 %**	**210.000.000**	**107.640.000**	**51,26 %**
Penyediaan Manakan	-	0	-	75.000.000	40.000.000	53,33%
Penyediaan Sandang	-	0	-	75.000.000	30.000.000	40,00%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	0	-	10.000.000	13.640.000	136,40 %
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.559.000	150.559.000	100,00 %	30.000.000	9.000.000	30,00%
Pelayanan Dukungan Psikososial	-	0	-	20.000.000	15.000.000	75,00%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**37.961.700**	**37.961.700**	**100,00 %**	**36.750.000**	**31.641.400**	**86,10 %**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**37.961.700**	**37.961.700**	**100,00 %**	**36.750.000**	**31.641.400**	**86,10 %**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.961.700	37.961.700	100,00 %	36.750.000	31.641.400	86,10%

b. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025 TW II		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintah Bidang Sosial	**14.183.935.007**	**13.709.448.787**	**96,65%**	**11.509.833.026**	**2.959.942.288**	**25,72 %**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.346.587.109**	**4.020.505.211**	**92,50%**	**4.976.874.526**	**54.867.658**	**1,10%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**35.246.900**	**35.243.600**	**99,99%**	**88.094.800**	**0**	**0,00%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.087.900	9.085.900	99,98%	59.470.900	0	0,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.159.000	26.157.700	100,00%	18.088.900	0	0,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	10.535.000	0	0,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.816.331.259**	**2.525.623.188**	**89,68%**	**3.306.723.826**	**0**	**0,00%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.816.331.259	2.525.623.188	89,68%	3.306.723.826	0	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**970.200**	**924.000**	**95,24%**	**6.440.000**	**0**	**0,00%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	970.200	924.000	95,24%	6.440.000	0	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**327.280.270**	**323.529.310**	**98,85%**	**367.137.300**	**5.965.800**	**1,62%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.531.550	10.531.550	100,00%	8.164.825	0	0,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.604.520	26.299.790	98,85%	16.734.275	0	0,00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.643.200	9.643.200	100,00%	14.708.700	0	0,00%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.560.000	1.560.000	100,00%	1.640.000	1.311.000	79,94 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.000.000	34.000.000	100,00%	26.250.000	2.950.000	11,24 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.584.500	239.138.270	98,58%	297.506.000	0	0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.356.500	2.356.500	100,00%	2.133.500	1.704.800	79,91 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**219.607.500**	**216.470.000**	**98,57%**	**38.735.000**	**28.735.000**	**74,18 %**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219.607.500	216.470.000	98,57%	38.735.000	28.735.000	74,18 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-		-

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025 TW II		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**593.513.480**	**579.694.149**	**97,67%**	**953.230.100**	**10.398.358**	**1,09%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	863.300	863.300	100,00%	881.700	705.750	80,04 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.800.000	143.234.669	93,74%	155.400.000	8.682.608	5,59%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.939.200	31.305.200	92,24%	37.569.200	1.010.000	2,69%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.910.980	404.290.980	99,60%	759.379.200	0	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**353.637.500**	**339.020.964**	**95,87%**	**216.513.500**	**9.768.500**	**4,51%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	184.524.000	170.971.400	92,66%	190.095.000	9.768.500	5,14%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169.113.500	168.049.564	99,37%	26.418.500	0	0,00%
Program Pemberdayaan Sosial	**680.235.400**	**672.802.450**	**98,91%**	**52.758.600**	**0**	**0,00%**
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**680.235.400**	**672.802.450**	**98,91%**	**52.758.600**	**0**	**0,00%**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	680.235.400	672.802.450	98,91%	52.758.600	0	0,00%
Program Rehabilitasi Sosial	**1.342.028.050**	**1.300.950.440**	**96,94%**	**530.000.000**	**84.665.330**	**15,97 %**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**1.205.700.550**	**1.169.986.750**	**97,04%**	**332.670.000**	**28.631.100**	**8,61%**
Penyediaan Permakanan	0	0	-	89.320.000	750.000	0,84%
Penyediaan Sandang	0	0	-	50.000.000	8.297.000	16,59 %
Penyediaan Alat Bantu	55.775.000	55.775.000	100,00%	30.000.000	15.000.000	50,00 %
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	-	27.470.000	800.000	2,91%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	203.916.200	193.694.200	94,99%	2.025.000	0	0,00%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	946.009.350	920.517.550	97,31%	3.000.000	477.500	15,92 %

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025 TW II		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Katru Identitas Anak	0		-	2.025.000	162.500	8,02%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	0	0	-	42.000.000	0	0,00%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0		-	10.025.000	3.144.100	31,36 %
Pemberian Layanan Kedaruratan	0	0	-	10.025.000	4.838.000	48,26 %
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	0	0	-	28.784.000	2.687.200	9,34%
Pemberian Layanan Rujukan	0	0	-	37.996.000	13.259.600	34,90 %
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**136.327.500**	**130.963.690**	**96,07%**	**197.330.000**	**35.249.430**	**17,86 %**
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	136.327.500	130.963.690	96,07%	197.330.000	35.249.430	17,86 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**7.626.563.748**	**7.527.036.736**	**98,69%**	**5.810.918.500**	**2.806.986.850**	**48,31 %**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**7.626.563.748**	**7.527.036.736**	**98,69%**	**5.810.918.500**	**2.806.986.850**	**48,31 %**
Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.291.000.000	0	0,00%	604.950.000	201.836.600	33,36 %
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.299.563.748	1.266.921.100	20,11%	5.172.718.500	2.602.263.650	50,31 %
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	36.000.000	6.227.039.736	17297,33 %	33.250.000	2.886.600	8,68%
Program Penanganan Bencana	**150.559.000**	**150.192.250**	**99,76%**	**107.640.000**	**4.328.400**	**4,02%**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**150.559.000**	**150.192.250**	**99,76%**	**107.640.000**	**4.328.400**	**4,02%**
Penyediaan Manakan	0	0	-	40.000.000	1.502.000	3,76%
Penyediaan Sandang	0	0	-	30.000.000	0	0,00%
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	-	13.640.000	0	0,00%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	150.559.000	150.192.250	99,76%	9.000.000	2.826.400	31,40 %
Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	-	15.000.000		0,00%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**37.961.700**	**37.961.700**	**100,00%**	**31.641.400**	**9.094.050**	**28,74 %**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**37.961.700**	**37.961.700**	**100,00%**	**31.641.400**	**9.094.050**	**28,74 %**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025 TW II		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	37.961.700	37.961.700	100,00%	31.641.400	9.094.050	28,74 %

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

PROGRAM	Tahun 2023			Tahun 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3			4	5
	14.224.701.916	**12.738.235.897**	**89,55**	**14.183.935.007**	**13.709.448.787**	**96,65**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.146.632.516	4.370.893.713	84,93	4.346.587.109	4.020.505.211	92,50
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	590.371.700	568.339.700	96,27	680.235.400	672.802.450	98,91
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.187.287.000	896.430.353	75,50	1.342.028.050	1.300.950.440	96,94
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.093.147.700	6.714.642.881	94,66	7.626.563.748	7.527.036.736	96,94
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	161.565.000	158.431.250	98,06	150.559.000	150.192.250	99,76
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	45.698.000	29.498.000	64,55	37.961.700	37.961.700	100,00

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut.

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**71**	**70,25**	**71**	**71,2**	**100,28%**	**72**	-	-
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	0	-	0	0	**0**	4 Laporan	3 Laporan	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	100%	23 Orang	23 Orang	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tunjangan ASN								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	1 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	-
Penatausahaan Arsip	Jumlah dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinamis pada SKPD	penatausahaan arsip dinamis pada SKPD								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Terwujudnya Pemeliharaan barang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerintahan Daerah	**milik daerah**								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 Unit	74 Unit	73 Unit	73 Unit	100%	73 Unit	57 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100%**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PPKS yang berkembang**	-		-	-	**100%**	**199 Orang**	-	-
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	-	-	-	-	100%	199 Orang	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**-**	**-**
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jujmlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	-
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	-	200 Orang	153 Orang	-
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	200 Orang	153 Orang	-
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga	50 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota								
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	42 Orang	34 Orang	-
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	115 Orang	120 Orang	120 Orang	100%	200 Orang	153 Orang	-
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	134 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	153 Orang	-
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	29 Orang	4 Orang	-
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	-	180 Orang	180 Orang	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	20 Orang	12 Orang	-
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	42 Orang	40 Orang	-
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	30 Orang	47 Orang	156%
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	**-**
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		-				200 Orang	202 Orang	101%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota								
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		-				8 Orang	8 Orang	100%
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		-				-	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-	-
	% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	-	-	-	-	-	**3,98%**	-	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	-
	Jumlah Laporan	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pemberian bantuan sosial								
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	500 Orang	-	500 Orang	500 Orang	100%	400.000 Orang	300.000 Orang	-
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2100 Keluarga	445 Orang	2100 Keluarga	2100 Keluarga	100%	5.000 Orang	3.750 Orang	-
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	240 Orang	480%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	-
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**3 Laporan**	-
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat	-	-	-	-	-	200 Orang	90 Orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota								
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	200 Orang	90 Orang	-
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	8 Unit	4 Unit	-
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 KK	131 KK	150 KK	150 KK	100%	30 Orang	8 Orang	-
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	50 Orang	0 Orang	-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana dan prasarana TMPN yang diperbaiki/dipelihara**	**100%**	**1 Unit**	**100%**	**100%**	**100%**	**1 Unit**	**1 Unit**	**100%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	1 Makam	1 Makam	100%	1 Makam	1 Makam	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 secara umum telah berjalan cukup baik, dengan sebagian besar program dan kegiatan mampu terlaksana sesuai rencana meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan keterbatasan sumber daya. Kinerja pelayanan Dinas Sosial menunjukkan peningkatan pada aspek jangkauan penerima manfaat dan efektivitas program, terutama dalam bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial masyarakat.

Beberapa program prioritas telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, meskipun belum seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara optimal. Faktor keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun perencanaan berikutnya.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial pada Tahun 2025 dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2026 melalui identifikasi capaian kinerja, permasalahan, serta peluang perbaikan yang ada.

Gambaran mengenai capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Capaian Indikator Tujuan-Sasaran dan Program Tahun 2024 dan Tahun 2025 TW-I

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
Menigkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penangnanan PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	71,28	11%
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100%	45%
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100%	13%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100%	50%
			% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	100%	48%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	%	100%	38%

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
			kabupaten/kota			
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100%	50%
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kualitas tata laksana pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	71,2	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100%	-

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Satuan	Target		Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 TW 1	
1	2	3	4	6	7	9	10	11
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	%	100%	100%	100%	0%	
2	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	%	100%	100%	100%	0%	
3	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	%	100%	100%	100%	0%	
4	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	%	100%	100%	100%	0%	
5	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	%	100%	100%	100%	13,33%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Sosial sebagai koordinator bidang Pelayanan Sosial telah mampu mengkoordinasikan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terjamin.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi

perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidak optimalan penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
2. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.
3. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Karanganyar.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar seperti pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karangayar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR				**11.509.833.026**					**11.552.193.026**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72,5**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72,5**		
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100%**	**4.976.874.526**			**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**4.976.874.526**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**100%**	**50.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**	**100%**	**50.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINSOS	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINSOS	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dokumen	30.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS	Jumlah evaluasi kinerja perangkat	4 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DINSOS	Jumlah evaluasi kinerja perangkat	4 Laporan	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		daerah					daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.417.874.526**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**3.417.874.526**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINSOS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	3.417.874.526	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINSOS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	3.417.874.526	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**30.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**30.000.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DINSOS	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DINSOS	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	30.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**544.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**544.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINSOS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINSOS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	60.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	60.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINSOS	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	35.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DINSOS	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	35.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINSOS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DINSOS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.000.000	
Fasilitasi Kunjungan	DINSOS	Jumlah laporan	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan	DINSOS	Jumlah laporan	12 Laporan	50.000.	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Tamu		fasilitasi kunjungan tamu			Tamu		fasilitasi kunjungan tamu		000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINSOS	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINSOS	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	350.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DINSOS	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 Dokumen	9.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DINSOS	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 Dokumen	9.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	**100%**	**70.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**	**100%**	**70.000.000**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINSOS	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINSOS	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	20.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DINSOS	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DINSOS	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**565.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**565.000.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	25.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	160.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	160.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	12 Laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	12 Laporan	30.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		kantor yang disediakan					kantor yang disediakan			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	350.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	350.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**300.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**300.000.000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINSOS	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 Unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINSOS	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 Unit	200.000.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINSOS	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINSOS	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
Program Pemberdayaan Sosial		**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100%**	**52.758.600**	**Program Pemberdayaan Sosial**		**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**100%**	**52.758.600**	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah PPKS yang berkembang**	**199 Orang**	**52.758.600**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah PPKS yang berkembang**	**199 Orang**	**52.758.600**	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Kab. Karangan yar	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	199 Orang	52.758.600	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Kab. Karangan yar	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	199 Orang	52.758.600	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		**% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100%**	**530.000.000**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**	**100%**	**530.000.000**	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		**Jujmlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**4 Laporan**	**430.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jujmlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**4 Laporan**	**272.000.000**	
Penyediaan Permakanan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	75.000.000	Penyediaan Permakanan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	40.000.000	
Penyediaan Sandang	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	75.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	30.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Kab. Karangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat	11 Orang	75.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Karangan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat	10 Orang	40.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
	yar	Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				yar	Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	228 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	30.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Karangan yar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	30.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Karangan yar	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	27.470.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Karangan yar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	30.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Karangan yar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	2.025.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	258 Orang	30.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	2.025.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan	250 Orang	20.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan	180 Orang	31.646.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang	15.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.025.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Orang	10.025.000	
Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	20.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	28.784.000	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	20.000.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi**	**4 Laporan**	**100.000.000**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi**	**4 Laporan**	**258.000.000**	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Kab. Karangan yar	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	200 Orang	100.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	Kab. Karangan yar	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga	200 Orang	60.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	3.000.000	
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Karangan yar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Karangan yar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	37 Dokumen	195.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial**	**100%**	**5.810.918.500**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial**	**100%**	**5.810.918.500**	
		% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	**3,98%**				**% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)**	**3,98%**		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**5.810.918.500**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**1.475.000.000**	
		Jumlah Laporan pemberian bantuan sosial	**4 Laporan**				**Jumlah Laporan pemberian bantuan sosial**	**4 Laporan**	**4.335.918.500**	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangan yar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	400.000 Orang	1.425.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karangan yar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	400.000 Orang	1.425.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karangan yar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000 Orang	4.335.918.500	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karangan yar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.197 Orang	4.335.918.500	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	240 Orang	50.000.000	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		**% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana**	**100%**	**107.640.000**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana**	**100%**	**150.000.000**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		kabupaten/kota					**kabupaten/kota**			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**107.640.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**150.000.000**	
Penyediaan Makanan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	40.000.000	Penyediaan Makanan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	40.000.000	
Penyediaan Sandang	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	40.000.000	Penyediaan Sandang	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	30.000.000	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Karangan yar	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Unit	7.640.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Karangan yar	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Unit	40.000.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Karangan yar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	25.000.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Karangan yar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan	50 Orang	10.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Karangan yar	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan	50 Orang	15.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Induktif**	**Program/kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**31.641.400**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**	**100%**	**31.641.400**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		**Jumlah sarana dan prasarana TMPN yang diperbaiki/dipelihara**	**1 Unit**	**31.641.400**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Jumlah sarana dan prasarana TMPN yang diperbaiki/dipelihara**	**1 Unit**	**31.641.400**	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Karangan yar	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	31.641.400	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Karangan yar	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	31.641.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 menjadi dasar penting dalam perumusan Rencana Kerja Tahun 2026. Secara umum, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial telah menunjukkan capaian positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan pelayanan, efisiensi pelaksanaan program, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor.

Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang sosial berperan penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, terutama dalam penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial. Pelaksanaan kinerja bidang urusan tersebut didukung oleh berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RENSTRA 2025–2029, dengan tujuan utama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial menunjukkan bahwa sebagian besar target indikator kinerja telah tercapai dengan baik, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar dan penanganan masalah kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan koordinasi, inovasi pelayanan, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan urusan sosial dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja bidang urusan sosial tersebut menjadi landasan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 agar lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap masyarakat.

2.5.1 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Pemangku Kepentingan

Sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar melakukan penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang berasal dari pemangku kepentingan, baik melalui hasil *Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)* maupun *Pokok-Pokok Pikiran (Pokir)* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penelaahan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara usulan tersebut dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Sosial, serta dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA 2025–2029.

Hasil penelaahan ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2026, khususnya dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan memastikan keterpaduan antara perencanaan teknokratis dan aspiratif.
Usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatn Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		**Jujmlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		**Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi**		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Karanganyar	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	BIDANG PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial**		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karanganyar	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL

No	Program/Kegiatn Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN SOSIAL

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelenggaraan urusan sosial pada Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Berbagai kebijakan nasional tersebut memberikan arahan strategis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan sosial yang komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara umum, kebijakan nasional di bidang sosial menekankan pada:

1. **Percepatan penurunan kemiskinan ekstrem** melalui peningkatan efektivitas perlindungan sosial, penyempurnaan data kemiskinan, dan penguatan intervensi berbasis keluarga.
2. **Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN)** yang adaptif terhadap bencana, guncangan sosial, dan dinamika ekonomi.
3. **Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial** bagi penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya.
4. **Pemberdayaan sosial berbasis komunitas** sebagai strategi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan sosial.
5. **Transformasi layanan sosial secara digital** melalui pemanfaatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).
6. **Peningkatan ketahanan keluarga dan pembangunan karakter**, terutama melalui penguatan lembaga kesejahteraan sosial di masyarakat (LKS).

Arah kebijakan nasional tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, terutama dalam memastikan keselarasan antara target pembangunan nasional dengan prioritas daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026 harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional di bidang perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.

3.1.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Selain kebijakan nasional, penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 juga memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2029 serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Kebijakan provinsi di bidang sosial diarahkan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat melalui:

1. **Penanggulangan kemiskinan berbasis kolaboratif** antara provinsi–kabupaten/kota dengan fokus pada wilayah kantong kemiskinan dan kelompok rentan.
2. **Peningkatan akses dan kualitas layanan rehabilitasi sosial**, termasuk layanan untuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
3. **Peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan sosial**, termasuk UPTD dan lembaga kesejahteraan sosial masyarakat (LKS).
4. **Penguatan pemberdayaan sosial masyarakat** melalui pendampingan sosial, program pemberdayaan kelompok rentan, dan dukungan usaha ekonomi produktif.
5. **Pengembangan layanan sosial berbasis teknologi informasi** untuk meningkatkan efektivitas penanganan data kemiskinan dan PMKS.
6. **Peningkatan mitigasi dan respons cepat terhadap bencana sosial maupun non-alam**, melalui koordinasi terpadu antara provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga terkait.

Sinkronisasi kebijakan provinsi dengan perencanaan daerah sangat penting untuk menjamin keselarasan intervensi pembangunan, terutama pada program prioritas yang bersifat lintas kabupaten/kota seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan sosial. Dengan demikian, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun agar dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada bidang kesejahteraan sosial.

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah "SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

6. Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
7. Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
8. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
9. Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
10. Meningkatnya riset dan inovasi;
11. Meningkatnya kondusivitas wilayah;
12. Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
13. Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
14. Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
15. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
16. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;

13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade. *(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial tahun 2026. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sesuai engan Rencana Strategis 2025-2029 adalah **“Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.**

Sasaran Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasarang yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan PPKS dengan indikator Indeks SPM Sosial dan Persentase PPKS Non SPM yang terlayani.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator nilai IKM.

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2026

Tujuan	Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tahun 2026
Menigkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	72,5
	Sasaran 1 : Meningkatnya penangnanan PPKS	Indeks SPM Sosial	Indeks	100
		Persentase PPKS non SPM yang terlayani	%	72,28
	1. Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	100
	2. Program Rehabilitasi Sosial	% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100
	3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial	%	100
		% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)	%	100
	4. Program Penanganan Bencana	% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100
	5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	%	100
	Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,7
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100

3.3 Peluang dan Tantangan Perangkat daerah

3.3.1 Tantangan

1. Tingkat Kemiskinan dan Kerentanan Sosial yang Masih Tinggi Meskipun tren kemiskinan menurun, kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin masih membutuhkan intervensi perlindungan sosial yang komprehensif.
2. Data Kesejahteraan Sosial yang Belum Sepenuhnya Akurat dan Terintegrasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menghadapi kendala karena perubahan kondisi sosial yang cepat, keterbatasan operator desa/kelurahan, serta kendala teknis sistem.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial SDM pada unit pelayanan, pendamping sosial, dan tenaga teknis masih membutuhkan peningkatan

kompetensi, terutama dalam layanan rehabilitasi sosial dan penanganan PMKS yang semakin beragam.

4. Kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Semakin Kompleks Masalah sosial seperti penyandang disabilitas, anak membutuhkan perlindungan khusus, lansia terlantar, gelandangan–pengemis, hingga penyintas kekerasan memerlukan layanan yang lebih spesifik dan intensif.
5. Keterbatasan Anggaran Penanganan Bidang Sosial Tingginya kebutuhan intervensi sosial belum sepenuhnya dapat diimbangi dengan kapasitas anggaran, sehingga penentuan prioritas penanganan menjadi tantangan utama.
6. Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Belum Merata Banyak LKS telah berperan aktif, namun masih terdapat kesenjangan kapasitas organisasi, kualitas layanan, serta kemampuan manajerial yang mempengaruhi efektivitas pelayanan sosial.
7. Risiko Bencana Alam dan Bencana Sosial yang Tinggi Intensitas bencana di wilayah Karanganyar berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan kedaruratan sosial dan dukungan logistik bagi penyintas bencana.

3.3.2 Peluang

1. Kebijakan Nasional yang Mendukung Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Program nasional seperti percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, transformasi perlindungan sosial, dan penguatan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) memberi peluang dukungan sosial tambahan bagi daerah.
2. Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan PMKS Prioritas provinsi di bidang pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial memberikan ruang kolaborasi serta bantuan teknis kepada kabupaten/kota.
3. Arah RPJMD Kabupaten Karanganyar yang Berfokus pada Kesejahteraan Sosial Pemerintah daerah memberi prioritas pada pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penurunan kemiskinan, sehingga Dinas Sosial mendapatkan dukungan kebijakan yang kuat.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pelayanan Sosial Peningkatan penggunaan SIKS-NG dan digitalisasi administrasi membuka peluang peningkatan akurasi data, percepatan layanan, dan efisiensi koordinasi.
5. Meningkatnya Kolaborasi Lintas Sektor Kerja sama antara pemerintah daerah, LKS, dunia usaha (CSR), relawan, dan komunitas sosial semakin berkembang dan dapat memperkuat pelaksanaan program sosial.
6. Peran Aktif LKS dan Komunitas Peduli Sosial Banyak lembaga sosial mulai berkembang dan dapat menjadi mitra strategis dalam rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan respons kedaruratan.
7. Potensi Sosial dan Budaya Lokal yang Dapat Dioptimalkan Kekuatan komunitas, nilai gotong royong, serta partisipasi masyarakat merupakan modal sosial penting untuk memperkuat pelayanan sosial berbasis masyarakat.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Sosial. Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

3.4.1 Casecading Kinerja Daerah

Sesuai urusan yang ditangani maka Dinas Sosial masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Misi 3 : Membangun dari desa, membangun insfrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi **Tujuan 4:** Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata **Sasaran 8 :** Meningkatnya pendapatan masuarakat dalam mengurani ketimpangan pendapatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya penanganan PPKS	Indeks SPM Sosial
			Persentase PPKS Non SPM yang trlayani
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM

3.4.2 Casecading Kinrja OPD

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan/ Subkegiatan
Meningkatnya penanganan PPKS	Program Pemberdayaan Sosial	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Rehabilitasi Sosial	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**
		Penyediaan Permakanan
		Penyediaan Sandang

Sasaran	Program	Kegiatan/ Subkegiatan
		Penyediaan Alat Bantu
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
		Pemberian Layanan Kedaruratan
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
		Pemberian Layanan Rujukan
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
	Program Penanganan Bencana	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**
		Penyediaan Makanan
		Penyediaan Sandang
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
		Pelayanan Dukungan Psikososial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran	Program	Kegiatan/ Subkegiatan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2026 sebagai tahun ke dua periode RENSTRA 2025-2029, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai daya dukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7 Kegiatan, 20 Sub Kegiatan)
2. Program Pemberdayaan Sosial (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
3. Program Rehabilitasi Sosial (2 kegiatan , 15 Sub Kegiatan)
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
5. Program Penanganan Bencana (1 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)

Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran bidang sosial sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Program dan kegiatan sebagaimana disajikan di atas merupakan hasil penjabaran dari sasaran strategis yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. Rencana tersebut sekaligus menjadi instrumen operasional dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kinerja pelayanan sosial, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta meningkatkan efektivitas penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Setiap program dirancang agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang sosial.

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk mengoptimalkan sinergi lintas sektor melalui peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah lain, pemerintah provinsi, dan kementerian/lembaga terkait. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan keselarasan kebijakan, efisiensi pendanaan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, rencana program dan kegiatan Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai daftar kegiatan rutin tahunan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat Karanganyar yang lebih sejahtera, berdaya, dan terlindungi secara sosial.

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya. masih bisa berubah). dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana. yang dapat berasal dari APBD Kabupaten maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR				**6.707.839.679**				**11.552.193.026**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**72,5**				**72,5**	
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		**100%**	**3.913.159.679**			**100%**	**4.976.874.526**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan**		**100%**	**23.737.200**			**100%**	**50.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DINSOS	6 Dokumen	4.563.900	APBD		6 Dokumen	10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DINSOS	3 Dokumen	14.066.800	APBD		3 Dokumen	30.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	DINSOS	4 Laporan	5.106.500	APBD		4 Laporan	10.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**2.581.684.479**			**100%**	**3.417.874.526**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DINSOS	23 Orang	2.581.684.479	APBD		23 Orang	3.417.874.526
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**100%**	**-**			**100%**	**30.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah paket pakaian dinas	DINSOS	-	-	APBD		2 Paket	30.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
beserta Atribut Kelengkapannya	beserta atribut kelengkapannya							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**193.623.800**			**100%**	**544.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DINSOS	1 Paket	6.999.200	APBD		1 Paket	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DINSOS	1 Paket	11.796.750	APBD		1 Paket	60.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	DINSOS	1 Paket	17.011.350	APBD		1 Paket	35.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DINSOS	1 Paket	772.000	APBD		1 Paket	30.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DINSOS	12 Laporan	14.400.000	APBD		12 Laporan	50.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DINSOS	12 Laporan	141.392.000	APBD		12 Laporan	350.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	DINSOS	5 Dokumen	1.252.500	APBD		5 Dokumen	9.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor**		**100%**	**47.000.000**			**100%**	**70.000.000**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	DINSOS	2 Unit	47.000.000	APBD		2 Unit	20.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	DINSOS	-	-	APBD		3 Unit	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**100%**	**899.492.200**			**100%**	**565.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DINSOS	12 Laporan	1.152.200	APBD		12 Laporan	25.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DINSOS	12 Laporan	134.400.000	APBD		12 Laporan	160.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DINSOS	12 Laporan	37.460.000	APBD		12 Laporan	30.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	DINSOS	12 Laporan	726.480.000	APBD		12 Laporan	350.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah**		**100%**	**167.622.000**			**100%**	**300.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DINSOS	73 Unit	157.622.000	APBD		73 Unit	200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DINSOS	1 Unit	10.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
Program Pemberdayaan Sosial	**Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**		**100%**	**1.838.559.550**			**100%**	**52.758.600**
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah PPKS yang berkembang**		**199 Orang**	**1.838.559.550**			**199 Orang**	**52.758.600**
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	Kab. Karanganyar	199 Orang	1.838.559.550	APBD		199 Orang	52.758.600
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**% warga negara penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar**		**100%**	**394.425.000**			**100%**	**530.000.000**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti							
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jujmlah laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**4 Laporan**	**297.815.000**			**4 Laporan**	**272.000.000**
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	101.595.000	APBD		200 Orang	40.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	39.505.150	APBD		200 Orang	30.000.000
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	10 Orang	42.000.000	APBD		10 Orang	40.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	42 Orang	10.957.000	APBD		42 Orang	30.000.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	3.275.000	APBD		200 Orang	27.470.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	4.251.000	APBD		200 Orang	2.025.000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	29 Orang	42.200.000	APBD		29 Orang	2.025.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	180 Orang	8.951.850	APBD		180 Orang	31.646.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	20 Orang	11.782.000	APBD		20 Orang	10.025.000
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	42 Orang	15.455.000	APBD		42 Orang	10.025.000
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	30 Orang	11.743.000	APBD		30 Orang	28.784.000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	6.100.000	APBD		200 Orang	20.000.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Jumlah Laporan PPKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti sosial yang mendapat layanan rehabilitasi**		**4 Laporan**	**96.610.000**			**4 Laporan**	**258.000.000**
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada	Kab. Karanganyar	200 Orang	94.425.000	APBD		200 Orang	60.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota							
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	11 Orang	2.185.000	APBD		11 Orang	3.000.000
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	-	-	APBD		37 Dokumen	195.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial**		**100%**	**436.870.000**			**100%**	**5.810.918.500**
	% PPKS yang mendapat bansos (BLT, Sembako)		**3,98%**				**3,98%**	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**4 Laporan**	**436.870.000**			**4 Laporan**	**1.475.000.000**
	Jumlah Laporan pemberian bantuan sosial		**4 Laporan**				**4 Laporan**	**4.335.918.500**
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Karanganyar	400.000 Orang	124.400.000	APBD		400.000 Orang	1.425.000.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	237 Orang	264.270.000	APBD		5.197 Orang	4.335.918.500
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi	Kab. Karanganyar	240 Orang	48.200.000	APBD		240 Orang	50.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masyarakat	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**% warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota**		**100%**	**101.935.000**			**100%**	**150.000.000**
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**4 Laporan**	**101.935.000**			**4 Laporan**	**150.000.000**
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	40.000.000	APBD		200 Orang	40.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	200 Orang	30.000.000	APBD		200 Orang	30.000.000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	8 Unit	5.585.000	APBD		8 Unit	40.000.000
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	30 Orang	14.850.000	APBD		30 Orang	25.000.000
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	50 Orang	11.500.000	APBD		50 Orang	15.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan**		**100%**	**22.890.450**			**100%**	**31.641.400**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2026)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2027)	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Jumlah sarana dan prasarana TMPN yang diperbaiki/dipelihara**		**1 Unit**	**22.890.450**			**1 Unit**	**31.641.400**
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	1 Makam	22.890.450	APBD		1 Makam	31.641.400

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1	Persentase PPKS yang terlayani	%	72,5
2	Indeks SPM Sosial	Indeks	100
3	Persentase PPKS non SPM yang terlayani	%	72,28
4	Nilai IKM	Nilai	92,7

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100
2	Tingkat persentase penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100

Tabel 4.4.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanagnyar Tahun 2026	Dukungan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Dinsos	Pagu Anggaran 2026
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**4.976.874.526**
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.417.874.526**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.417.874.526
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**30.000.000**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**544.000.000**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000

Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanagnyar Tahun 2026	Dukungan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Dinsos	Pagu Anggaran 2026
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**70.000.000**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**565.000.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**300.000.000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar	**Program Pemberdayaan Sosial**	**52.758.600**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**52.758.600**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	52.758.600
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**530.000.000**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**272.000.000**
	Penyediaan Permakanan	40.000.000
	Penyediaan Sandang	30.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	40.000.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	27.470.000
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.025.000
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.025.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	31.646.000
	Pemberian Layanan Kedaruratan	10.025.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.025.000
	Pemberian Layanan Rujukan	28.784.000
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	20.000.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**258.000.000**
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60.000.000
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk	3.000.000

Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanagnyar Tahun 2026	Dukungan Program/ Kegiatan/Subkegiatan Dinsos	Pagu Anggaran 2026
	Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	195.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**5.810.918.500**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**5.810.918.500**
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.425.000.000
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.335.918.500
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50.000.000
Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**150.000.000**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**150.000.000**
	Penyediaan Makanan	40.000.000
	Penyediaan Sandang	30.000.000
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	40.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000
Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**31.641.400**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**31.641.400**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.641.400

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2025–2029 dan selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

Penyusunan RENJA ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025, analisis kinerja penyelenggaraan urusan sosial, isu-isu strategis yang berkembang, serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi acuan dalam perumusan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan, diharapkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mampu meningkatkan kualitas pelayanan sosial, memperluas jangkauan penerima manfaat, dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan terlindungi secara sosial.

RENJA ini juga menjadi instrumen penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, seluruh jajaran Dinas Sosial diharapkan dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian target kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya dokumen RENJA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara berkelanjutan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RENJA Tahun 2026 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), dan prinsip akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Beberapa kaidah pelaksanaan tersebut meliputi:

1. Kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan urusan sosial, pengelolaan keuangan daerah, dan ketentuan teknis pelaksanaan program.
2. Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
3. Koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program sosial, terutama melalui kolaborasi dengan lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, dan komunitas lainnya.

5. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun penguatan tata kelola internal perangkat daerah.

5.3 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, mencapai target kinerja, serta memberikan dampak yang terukur. Kaidah pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Monitoring berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui laporan triwulan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan kinerja perangkat daerah.
2. Evaluasi kinerja program dan kegiatan, baik dari aspek capaian output, realisasi anggaran, maupun dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan urusan sosial.
4. Penilaian risiko terhadap potensi hambatan pelaksanaan program serta penentuan strategi mitigasi untuk menjamin keberlanjutan pelayanan sosial.
5. Pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan tahun berikutnya, termasuk penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 dan penyesuaian RENSTRA apabila diperlukan.
6. Pelaporan secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ketentuan pengelolaan kinerja lainnya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PELINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya, Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam strategi Pembangunan Daerah, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan.

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar selama satu tahun yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran, dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, September 2025

Plt. Kepala DP3APPKB
Kabupaten Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DP3APPKB

Drs. TITIS SRI JAWOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19660923 198603 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....		i
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR ISI.....		iii
DAFTAR TABEL.....		iv
BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. Latar Belakang.....	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I-4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-22
	2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	II-23
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD....	II-25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-42
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran.....	III-3
	3.3. Peluang dan Tantangan Perangkat Daerah.	III-7
	3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD.....	III-8
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
	4.1. Program dan Kegiatan.....	IV-1
	4.2. Dana Indikatif.....	IV-3
	4.3. Sumber Dana yang Dibutuhkan.....	IV-3
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di DP3APPKB..... II-3
Tabel 2.2. Realisasi Anggaran di DP3APPKB Tahun 2024 dan 2025 (SMT I) II-8
Tabel 2.3. Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024..... II-13
Tabel 2.4. Skala Nilai Peringkat Kinerja..... II-13
Tabel 2.5. Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2025..... II-14
Tabel 2.6. Capaian Sasaran dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan 2025..... II-15
Tabel 2.7. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar..... II-16
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar..... II-27
Tabel 2.9. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar..... II-30
Tabel 2.10. Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026..... II-47
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran-Program (Target Tahun 2026)..... III-6
Tabel 3.2. Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD..... III-8
Tabel 3.3. Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan..... III-8
Tabel4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar IV-4

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar..... IV-12
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar..... IV-12
Tabel4.4. Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026..... IV-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan manusia seutuhnya, sudah seharusnya memiliki atau berada pada suatu kondisi tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu menempatkan manusia sebagai yang utama dalam pembangunan (subyek), dengan implikasi bahwa pemerintah (birokrasi) lebih berperan sebagai fasilitator terhadap adanya peluang dalam membangkitkan kreatifitas manusia dan masyarakat guna mewujudkan Self Sustaining Capacity, yaitu dengan menerapkan model perencanaan partisipatif.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati. Guna mengimplementasikan tugas tugas tersebut, maka perlu disusun rencana kerja, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kebupaten Karanganyar Tahun 2026, telah memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta program dan kegiatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun melalui penggalangan usulan dari masyarakat melalui media Musrenbang.

Setiap usulan yang berasal dari masyarakat, dijadikan sebagai dasar kajian dan diposisikan sebagai prioritas kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak serta pembangunan Bangga Kencana di Kabupaten Karanganyar. Hal ini disadari, bahwa muatan lokal yang muncul merupakan aktualisasi permasalahan yang didasarkan pada kondisi sumber daya wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, didasarkan pada : (1) Visi pembangunan Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2030 yaitu “Sesarengan Mbangun Karanganyar; (2) indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029; (3) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029; (4) RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dengan prakiraan target tahun 2025 yang diestimasikan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupeten Karanganyar Tahun 2026, merupakan dasar/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026, sekaligus sebagai bagian dari tahapan penyusunan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada lampiran tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pembangunan Bangga

Kencana merupakan urusan pelayanan dasar konkuren. Artinya bahwa penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan Bangga Kencana harus dilaksanakan secara bersama sama, menjadi tanggungjawab pemerintah, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraannya.

Implementasi program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai andil dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui pembangunan keluarga kecil berkualitas, dengan harapan bahwa setiap keluarga mampu merencanakan kehidupannya agar menjadi lebih berkualitas dan sejahtera. Sedangkan, pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai andil dalam pembangunan sumber daya manusia, yang diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan an perlindungan anak dengan harapan tercapainya kabupaten Karanganyar yang terbebas dari kekerasan.

Beberapa permasalahan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yaitu masih rendahnya kualitas ber-KB, masih rendahnya pemanfaatan Metode Kontrasepsi Efektif Jangka Panjang (MKJP), masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB dan masih rendahnya dikhawatirkan akan berdampak pada menurunya kuantitas dan kualitas pembinaan program KKB di masyarakat. Selain itu permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan masih rendahnya partisipasi perempuan dibidang politik dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya kualitas perempuan dan anak.

Guna menjawab berbagai hambatan dan tantangan tersebut di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, berupaya memanfaatkan kondisi eksisting secara optimal, dengan menerapkan prinsip efektif, efisien dan berkelanjutan (*sustainable*), yang diikuti dengan peningkatankemudahan akses program, peningkatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.

Namun perlu disadari, bahwa jejaring operasional lini lapangan belum mampu mengakomodir dan mengatasi berbagai permasalahan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara menyeluruh. Menyikapi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penguatan jejaringan pelayanan KB, dengan melibatkan unsur eksekutif, legislatif, LSOM, TNI, POLRI, PKK, profesi dan komponen masyarakat sebagai wujud pendekatan pembangunan Bangga Kencana di berbagai segmen sasaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi amanat undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan/ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memberikan arah dan pedoman, sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai tugas fungsi dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Menentukan program kerja dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam tahun berjalan;
4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data dan Informasi perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang lebih realistik dan akurat;
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja perangkat daerah yang sesuai dengan prioritas daerah, kebutuhan dan kemampuan anggaran serta sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan segala urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Karanganyar;
4. Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan umum dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja DP3APPKB Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Subbab ini menjelaskan alasan atau urgensi disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Subbab ini memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan normatif yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renja.

1.3. Maksud dan Tujuan
Subbab ini menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Subbab ini menggambarkan struktur atau susunan isi dari dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar;

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;

Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Peluang dan Tantangan Perangkat Daerah

Memuat Peluang dan Tantangan Perangkat Daerah yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya memuat penjelasan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2025 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yang meliputi:

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Capaian kinerja program dan kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar melalui APBD dan APBN melaksanakan 10 Program dengan 25 Kegiatan dan 62 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (7kegiatan, 17 sub Kegiatan)
2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (1 Kegiatan, 2 sub kegiatan)
3. Program Perlindungan Perempuan (2 Kegiatan, 3 sub kegiatan)
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga (1 Kegiatan, 1 sub kegiatan)
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender (1Kegiatan,1sub kegiatan)
6. Program Pemenuhan Hak Anak (2 Kegiatan, 2 sub kegiatan)
7. Program Perlindungan Khusus Anak (3 Kegiatan, 3 sub kegiatan)
8. Program Pengendalian Penduduk (2 Kegiatan, 6 sub kegiatan)
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) (4 Kegiatan, 17 sub kegiatan)
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Keluarga (2 Kegiatan, 10 sub kegiatan)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 2 tujuan dan 4 sasaran strategis dimana capaian kinerja tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
    1) Capaian Sasaran 1: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak
        a. Capaian sasaran 1 diukur dengan indikator persentase Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender, Persentase kasus kekerasan perempuan, dan Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani secara komprehensif, Persentase OPD yang memiliki Data Gender, Jumlah desa layak anak, Prosentase kasus kekerasan anak
        b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program

Pemenuhan Hak Anak, dan Program Perlindungan Khusus Anak.

c. Target Capaian indikator sasaran Tahun 2024 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 73,48, Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender 42 lembaga, Persentase kasus kekerasan perempuan 0,0042%, Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani secara komprehensif 100%, Persentase OPD yang memiliki Data Gender 10%, Jumlah desa layak anak 4 Desa, Prosentase kasus kekerasan anak 0,0076%. Dengan realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71,65, Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender 42 lembaga, Persentase kasus kekerasan perempuan 0,0042%, Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani secara komprehensif 100%, Persentase OPD yang memiliki Data Gender 40, 48%, Jumlah desa layak anak 4 Desa, Prosentase kasus kekerasan anak 0,0073% . Capaian kinerja ini tercapai melebihi 100% yaitu dengan rata-rata persentase realisasi terhadap target mencapai 143,75 %.

2) Capaian Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB

a. Capaian sasaran 2 diukur dengan 4 (empat) indikator TFR, ASFR, Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR, Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB.

b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yaitu: Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).

c. Target Capaian indikator sasaran tahun 2024 untuk indikator 4 (empat) indikator TFR 2,16, ASFR 4, Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR 71,7%, Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB 38,98%. Dengan realisasi TFR 1,94, ASFR 4,42, Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR 70,22 %, Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB 100%. Capaian kinerja ini tercapai melebihi 100% yaitu dengan rata-rata persentase realisasi terhadap target mencapai 138,54%.

3) Capaian Sasaran 3: Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting

a. Capaian sasaran 3 diukur dengan 2 (dua) indikator Prosentase Keluarga Beresiko Stunting dan Prosentase tribina aktif

b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu: Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

c. Target Capaian indikator sasaran tahun 2024 untuk 2 (dua) indikator Prosentase Keluarga Beresiko Stunting 22,5% dan Prosentase tribina aktif 95,34%. Dengan realisasi Prosentase Keluarga Beresiko Stunting 10,54% dan Prosentase tribina aktif 94,22%. Capaian kinerja ini tercapai 125,99%

2. Tujuan 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Capaian Sasaran 4: Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan

a. Capaian sasaran 4 diukur dengan 2 (dua) indikator Nilai SAKIP dan Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya

b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
c. Target Capaian indikator sasaran tahun 2024 untuk 2 (dua) indikator yaitu Nilai SAKIP 73 dan Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 80%. Dengan realisasi Nilai SAKIP 72,65 dan Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya 64,29%. Capaian kinerja ini tercapai 89,94%

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 DP3APPKB telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di DP3APPKB

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
DP3APPKB	**22.196.091.285**	**20.914.531.026**	**94.23%**	**19.585.016.178**	**16.312.947.178**	**83,29%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.023.996.285**	**5.212.936.026**	**86.54%**	**4.341.027.178**	**4.983.667.178**	**114,80%**
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**30.000.000**	**30.000.000**	**100.00%**	**60.000.000**	**55.000.000**	**91,67%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan				45.000.000	40.000.000	88,89%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.869.000	99.56%	15.000.000	15.000.000	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.827.833.785**	**3.446.594.818**	**90.04%**	**3.779.758.283**	**3.944.758.283**	**104,37%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.833.785	3.416.815.218	89.97%	3.769.758.283	3.934.758.283	104,38%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	30.000.000	29.779.600	99.27%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**15.000.000**	**10.755.350**	**71.70%**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	10.755.350	71.70%	5.000.000	5.000.000	100,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				**-**	**30.501.000**	**#DIV/0!**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	30.501.000	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**988.385.000**	**606.791.563**	**61.39%**	**93.000.000**	**280.037.895**	**301,12%**
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	40.000.000	19.944.275	49.86%	5.000.000	5.000.000	100,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	29.414.200	84.04%	15.000.000	17.000.000	113,33%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	39.919.600	79.84%	8.000.000	8.000.000	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	29.379.750	97.93%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833.385.000	488.133.738	58.57%	55.000.000	240.037.895	436,43%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**205.577.500**	**58.440.000**	**28.43%**	**-**	**16.550.000**	**#DIV/0!**
Pengadaan Mebel	7.000.000	6.940.000	99.14%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.577.500	51.500.000	25.93%	0	16.550.000	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**542.200.000**	**472.812.769**	**87.20%**	**302.982.500**	**369.820.000**	**122,06%**
Penyediaan jasa surat menyurat	67.000.000	52.734.900	78.71%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	163.800.000	125.810.969	76.81%	81.820.000	81.820.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.400.000	294.266.900	94.50%	211.162.500	278.000.000	131,65%

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**415.000.000**	**308.765.500**	**74.40%**	**100.286.395**	**282.000.000**	**281,19%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000	209.555.000	69.85%	90.286.395	152.000.000	168,35%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	34.568.000	69.14%	5.000.000	15.000.000	300,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	64.642.500	99.45%	5.000.000	115.000.000	2300,00%
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**55.000.000**	**21.457.816**	**39.01%**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100,00%**
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**55.000.000**	**21.457.816**	**39.01%**	**15.000.000**	**15.000.000**	**100,00%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.000.000	8.905.800	89.06%	5.000.000	5.000.000	100,00%
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45.000.000	12.552.016	27.89%	10.000.000	10.000.000	100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**30.000.000**	**27.643.300**	**92.14%**	**30.000.000**	**230.330.400**	**767,77%**
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**20.000.000**	**18.328.300**	**91.64%**	**20.000.000**	**70.750.000**	**353,75%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan PencegahanKekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.867.550	97.35%	5.000.000	55.750.000	1115,00%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.460.750	89.74%	15.000.000	15.000.000	100,00%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**9.315.000**	**93.15%**	**10.000.000**	**125.070.000**	**1250,70 %**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.315.000	93.15%	10.000.000	125.070.000	1250,70%
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**0**	**34.510.400**	**#DIV/0!**
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					34.510.400	#DIV/0!
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**50.000.000**	**100.000.000**	**200.00%**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00%**
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**50.000.000**	**100.000.000**	**200.00%**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00%**
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	100.000.000	200.00%	50.000.000	50.000.000	100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**10.000.000**	**9.999.500**	**100.00%**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**10.000.000**	**9.999.500**	**100.00%**	**5.000.000**	**5.000.000**	**100,00%**
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.999.500	100.00%	5.000.000	5.000.000	100,00%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**195.000.000**	**180.935.250**	**92.79%**	**50.000.000**	**140.000.000**	**280,00%**
Pelembagaan PHA pada Lembaga	**45.000.000**	**38.339.950**	**85.20%**	**45.000.000**	**45.000.000**	**100,00%**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	38.339.950	85.20%	45.000.000	45.000.000	100,00%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**150.000.000**	**142.595.300**	**95.06%**	**5.000.000**	**95.000.000**	**1900,00 %**
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	142.595.300	95.06%	5.000.000	95.000.000	1900,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**115.000.000**	**25.444.000**	**22.13%**	**15.000.000**	**215.329.600**	**1435,53 %**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**95.000.000**	**8.350.000**	**8.79%**	**5.000.000**	**55.750.000**	**1115,00 %**
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak. kecamatan layak Anak. desa/kelurahan layak Anak. dan DRPPA	95.000.000	8.350.000	8.79%	5.000.000	5.000.000	100,00%
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				-	50.750.000	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**8.350.000**	**83.50%**	**5.000.000**	**120.070.000**	**2401,40 %**
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	10.000.000	8.350.000	83.50%	5.000.000	120.070.000	2401,40%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**8.744.000**	**87.44%**	**5.000.000**	**39.509.600**	**790,19%**
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	10.000.000	8.744.000	87.44%	5.000.000	39.509.600	790,19%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**710.200.000**	**500.995.355**	**70.54%**	**449.400.000**	**383.148.000**	**85,26%**
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**135.000.000**	**10.000.000**	**7.41%**	**10.000.000**	**20.000.000**	**200,00%**
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	100.000.000	0	0.00%			
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	35.000.000	10.000.000	28.57%	10.000.000	20.000.000	200,00%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**575.200.000**	**490.995.355**	**85.36%**	**439.400.000**	**363.148.000**	**82,65%**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	65.800.000	61.439.925	93.37%	70.000.000	30.948.000	44,21%
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	40.000.000	14.989.150	37.47%	5.000.000	5.000.000	100,00%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	229.400.000	179.400.000	78.20%	179.400.000	138.600.000	77,26%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	190.000.000	185.311.050	97.53%	185.000.000	188.600.000	101,95%
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	50.000.000	49.855.230	99.71%			

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**9.823.495.000**	**9.387.439.096**	**95.56%**	**9.681.189.000**	**5.361.672.000**	**55,38%**
Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1.539.000.000**	**1.542.218.710**	**100.21%**	**1.806.200.000**	**1.050.632.000**	**58,17%**
Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	245.290.800	306.61%	80.000.000	-	0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	744.000.000	9.992.250	1.34%	1.111.200.000	680.000.000	61,20%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	255.000.000	188.979.905	74.11%	255.000.000	255.000.000	100,00%
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	190.000.000	255.000.000	134.21%	100.000.000	30.632.000	30,63%
Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	10.000.000	763.805.755	7638.06%	5.000.000	5.000.000	100,00%
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	260.000.000	79.150.000	30.44%	255.000.000	80.000.000	31,37%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**3.921.606.000**	**3.770.456.576**	**96.15%**	**3.839.557.000**	**1.910.500.000**	**49,76%**
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.323.049.000	1.322.224.000	99.94%	1.291.000.000	1.910.500.000	147,99%
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.598.557.000	2.448.232.576	94.22%	2.548.557.000	-	0,00%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**3.367.139.000**	**3.079.200.310**	**91.45%**	**3.049.682.000**	**2.262.290.000**	**74,18%**
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.900.000	49.840.000	90.78%	54.900.000	56.700.000	103,28%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.471.789.000	2.274.416.410	92.01%	2.430.332.000	1.868.190.000	76,87%
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	-	#VALUE!	5.000.000	5.000.000	100,00%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	703.000.000	690.242.000	98.19%	503.000.000	-	0,00%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.450.000	45.997.900	99.03%	41.450.000	37.400.000	90,23%
Peningkatan Kesertaan KB Pria	36.000.000	8.704.000	24.18%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	50.000.000	10.000.000	20.00%	5.000.000	285.000.000	5700,00%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**995.750.000**	**995.563.500**	**99.98%**	**985.750.000**	**138.250.000**	**14,02%**
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	18.750.000	18.563.500	99.01%	8.750.000	5.000.000	57,14%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	977.000.000	977.000.000	100.00%	977.000.000	133.250.000	13,64%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**5.183.400.000**	**4.993.126.700**	**96.33%**	**4.948.400.000**	**4.928.800.000**	**99,60%**
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	**365.000.000**	**338.417.700**	**92.72%**	**350.050.000**	**111.050.000**	**31,72%**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
Kesejahteraan Keluarga						
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK6R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10.000.000	288.610.000	2886.10%	311.050.000	76.050.000	24,45%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10.000.000	12.551.000	125.51%	15.000.000	15.000.000	100,00%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	310.000.000	17.461.700	83,33%	4.000.000	-	0,00%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15.000.000	9.876.000	65.84%	15.000.000	15.000.000	100,00%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	20.000.000	9.919.000	49.60%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**4.818.400.000**	**4.654.709.000**	**96.60%**	**4.598.350.000**	**4.817.750.000**	**104,77%**
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	10.000.000	100,00%	4.250.000	8.250.000	194,12%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	275.000.000	111.500.000	40.55%	60.700.000	60.700.000	100,00%
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.000.000	9.809.000	98.09%	10.000.000	10.000.000	100,00%
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	2.369.400.000	2.369.400.000	100,00%!	2.369.400.000	2.154.000.000	90,91%
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	2.154.000.000	2.154.000.000	100,00%	2.154.000.000	2.584.800.000	120,00%

b. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Dari sisi anggaran, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari BKKBN sebesar Rp. 20.914.531.026,- (Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tiga

Puluh Satu Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 7.207.742.026,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) dan belanja langsung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 13.706.789.000,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 20.181.070.017,- (Dua Puluh Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 96,49%, dengan sisa anggaran Rp. 733.461.009,-,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Rupiah) atau sebesar 3,51%. Realisasi Anggaran di DP3APPKB Tahun 2024 dan Tahun 2025 (SMT I) dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi Anggaran di DP3APPKB Tahun 2024 dan 2025 (SMT I)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
	APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT 1	%
1	2	3	4	5	6	7
DP3APPKB	**20.914.531.026**	**20.181.070.017**	**96,49%**	**16.312.947.178**	**5.901.128.419**	**36.17%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.212.936.026**	**4.934.029.000**	**94.65**	**4.983.667.178**	**1.943.565.469**	**39.00%**
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**30.000.000**	**29.869.000**	**99.56**	**55.000.000**	**9.533.100**	**17.33%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan				40.000.000	5.092.700	12.73%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.869.000	99.56	15.000.000	4.440.400	29.60%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.639.273.526**	**3.446.594.818**	**94.71**	**3.944.758.283**	**1.515.747.154**	**38.42%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.609.273.526	3.416.815.218	94.67	3.934.758.283	1.510.634.004	38.39%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	30.000.000	29.779.600	99.27	10.000.000	5.113.150	51.13%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**15.000.000**	**10.755.350**	**71.70**	**5.000.000**	**-**	**0.00**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	10.755.350	71.70	5.000.000	-	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**638.285.000**	**606.791.563**	**95.07**	**280.037.895**	**48.374.950**	**17.27%**
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	19.944.275	99.72	5.000.000	4.826.000	96.52%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.414.200	98.05	17.000.000	6.950.000	40.88%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	39.919.600	99.80	8.000.000	2.385.000	29.81%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	29.379.750	97.93	10.000.000	2.278.000	22.78%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.285.000	488.133.738	94.18	240.037.895	31.935.950	13.30%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**58.577.500**	**58.440.000**	**99.77**	**16.550.000**	**16.450.000**	**99.40%**
Pengadaan Mebel	7.000.000	6.940.000	99.14			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.577.500	51.500.000	99.85	16.550.000	16.450.000	99.40%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**511.300.000**	**472.812.769**	**92.47**	**369.820.000**	**167.799.265**	**45.37%**
Penyediaan jasa surat menyurat	53.000.000	52.734.900	99.50	10.000.000	4.980.450	49.80%
Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	158.900.000	125.810.969	79.18	81.820.000	47.767.015	58.38%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299.400.000	294.266.900	98.29	278.000.000	115.051.800	41.39%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**320.500.000**	**308.765.500**	**96.34**	**282.000.000**	**185.661.000**	**65.84%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.000.000	209.555.000	95.25	152.000.000	64.716.000	42.58%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
	APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT 1	%
1	2	3	4	5	6	7
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.500.000	34.568.000	97.37	15.000.000	7.160.000	47.73%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000	64.642.500	99.45	115.000.000	113.785.000	98.94%
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**25.000.000**	**21.457.816**	**85.83**	**15.000.000**	**9.627.750**	**64.19%**
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**25.000.000**	**21.457.816**	**85.83**	**15.000.000**	**9.627.750**	**64.19%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.000.000	8.905.800	89.06	5.000.000	-	#VALUE!
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.000.000	12.552.016	83.68	10.000.000	9.627.750	96.28%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**30.000.000**	**27.643.300**	**92.14**	**230.330.400**	**23.060.850**	**10.01%**
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**20.000.000**	**18.328.300**	**91.64**	**70.750.000**	**16.025.250**	**22.65%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan PencegahanKekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.867.550	97.35	55.750.000	4.250.000	7.62%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	13.460.750	89.74	15.000.000	11.775.250	78.50%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**9.315.000**	**93.15**	**125.070.000**	**7.035.600**	**5.63%**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.315.000	93.15	125.070.000	7.035.600	5.63%
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**34.510.400**	**0**	**0**
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				34.510.400	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.00**	**50.000.000**	**0**	**0**
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.00**	**50.000.000**	**0**	**0**
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100.00	50.000.000	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**10.000.000**	**9.999.500**	**100.00**	**5.000.000**	**0**	**0**
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**10.000.000**	**9.999.500**	**100.00**	**5.000.000**	**0**	**0**
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.999.500	100.00	5.000.000	0	0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**195.000.000**	**180.935.250**	**92.79**	**140.000.000**	**0**	**0**
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**45.000.000**	**38.339.950**	**85.20**	**45.000.000**	**0**	**0**
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak	45.000.000	38.339.950	85.20	45.000.000	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
	APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT 1	%
1	2	3	4	5	6	7
Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**150.000.000**	**142.595.300**	**95.06**	**95.000.000**	**0**	**0**
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	142.595.300	95.06	95.000.000	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**30.000.000**	**25.444.000**	**84.81**	**215.329.600**	**25.657.500**	**11.92%**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**8.350.000**	**83.50**	**55.750.000**	**4.250.000**	**7.62%**
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak. kecamatan layak Anak. desa/kelurahan layak Anak. dan DRPPA	10.000.000	8.350.000	83.50	5.000.000	0	0
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				50.750.000	4.250.000	8.37%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**8.350.000**	**83.50**	**120.070.000**	**21.407.500**	**17.83%**
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	10.000.000	8.350.000	83.50	120.070.000	21.407.500	17.83%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**10.000.000**	**8.744.000**	**87.44**	**39.509.600**	**-**	**0**
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	10.000.000	8.744.000	87.44	39.509.600	-	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**510.200.000**	**500.995.355**	**98.20**	**383.148.000**	**210.694.400**	**54.99%**
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**10.000.000**	**10.000.000**	**100.00**	**20.000.000**	**17.243.500**	**86.22%**
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	10.000.000	10.000.000	100.00	20.000.000	17.243.500	86.22%
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**500.200.000**	**490.995.355**	**98.16**	**363.148.000**	**193.450.900**	**53.27%**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	65.800.000	61.439.925	93.37	30.948.000	21.576.750	69.72%
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	15.000.000	14.989.150	99.93	5.000.000	2.940.250	58.81%
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	179.400.000	179.400.000	100.00	138.600.000	108.490.750	78.28%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	190.000.000	185.311.050	97.53	188.600.000	60.443.150	32.05%
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	50.000.000	49.855.230	99.71			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**9.782.995.000**	**9.387.439.096**	**95.96**	**5.361.672.000**	**1.999.927.450**	**37.30%**
Pelaksanaan Advokasi.	**1.564.500.000**	**1.542.218.710**	**98.58**	**1.050.632.000**	**399.696.700**	**38.04%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
	APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT 1	%
1	2	3	4	5	6	7
Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						
Pengendalian Program KKBPK	260.000.000	245.290.800	94.34	-		
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	10.000.000	9.992.250	99.92	680.000.000	267.471.900	39.33%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	190.000.000	188.979.905	99.46	255.000.000	93.500.000	36.67%
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	255.000.000	255.000.000	100.00	30.632.000	30.632.000	100.00%
Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	769.500.000	763.805.755	99.26	5.000.000	4.342.800	86.86%
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	80.000.000	79.150.000	98.94	80.000.000	3.750.000	4.69%
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**3.921.606.000**	**3.770.456.576**	**96.15**	**1.910.500.000**	**665.853.000**	**34.85%**
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.323.049.000	1.322.224.000	99.94	1.910.500.000	665.853.000	34.85%
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2.598.557.000	2.448.232.576	94.22			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**3.301.139.000**	**3.079.200.310**	**93.28**	**2.262.290.000**	**912.440.000**	**40.33%**
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	54.900.000	49.840.000	90.78	56.700.000	17.110.000	30.18%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.471.789.000	2.274.416.410	92.01	1.868.190.000	668.919.000	35.81%
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5.000.000	-	-	5.000.000	-	0
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	703.000.000	690.242.000	98.19	-		
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.450.000	45.997.900	99.03	37.400.000	32.600.000	87.17%
Peningkatan Kesertaan KB Pria	10.000.000	8.704.000	87.04	10.000.000	-	0
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	10.000.000	10.000.000	100.00	285.000.000	193.811.000	68.00%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**995.750.000**	**995.563.500**	**99.98**	**138.250.000**	**21.937.750**	**15.87%**
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	18.750.000	18.563.500	99.01	5.000.000	0	0.00%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	977.000.000	977.000.000	100.00	133.250.000	21.937.750	16.46%
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**5.018.400.000**	**4.993.126.700**	**99.50**	**4.928.800.000**	**1.688.595.000**	**34.26%**
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	**355.000.000**	**338.417.700**	**95.33**	**111.050.000**	**0**	**0**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2024			Anggaran Tahun 2025		
	APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT 1	%
1	2	3	4	5	6	7
Keluarga						
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK6R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000	288.610.000	96.20	76.050.000	0	0
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	15.000.000	12.551.000	83.67	15.000.000	0	0
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	20.000.000	17.461.700	87.31	0	0	0
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	9.876.000	98.76	15.000.000	0	0
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	10.000.000	9.919.000	99.19	10.000.000	0	0
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**4.663.400.000**	**4.654.709.000**	**99.81**	**4.817.750.000**	**0**	**0**
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.000.000	10.000.000	100	8.250.000	4.300.000	52.12%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	120.000.000	111.500.000	92.92	60.700.000	0	0
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	10.000.000	9.809.000	98.09	10.000.000	0	0
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	2.369.400.000	2.369.400.000	100	2.154.000.000	861.600.000	40.00%
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	2.154.000.000	2.154.000.000	100	2.584.800.000	822.695.000	31.83%

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	Tahun 2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.196.506.980	5.352.708.503	86.38	5.212.936.026	4.934.029.000	94.65
2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	70.000.000	63.539.800	90.77	25.000.000	21.457.816	85.83
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	35.000.000	31.625.000	90.36	30.000.000	27.643.300	92.14
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100.000.000	100.000.000	100.00	100.000.000	100.000.000	100.00
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				10.000.000	9.999.500	100.00
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	105.000.000	70.845.800	67.47	195.000.000	180.935.250	92.79
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	35.000.000	27.990.000	79.97	30.000.000	25.444.000	84.81
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	375.640.000	367.375.721	97.80	510.200.000	500.995.355	98.20
9	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.796.183.300	7.252.536.239	93.03	9.782.995.000	9.387.439.096	95.96
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.058.400.000	5.023.796.000	99.32	5.018.400.000	4.993.126.700	99.50

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

Pengukuran kinerja DP3APPKB dengan menggunakan klasifikasi dalam PermendagriNo. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017. hal 494

Capaian Sasaran Tahun 2024-2025 dapat dilihat dalam Tabel 2.3. Sedangkan Capaian Sasaran dan Program Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 1 tersaji pada Tabel 2.4. Sedangkan Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5.

Capaian Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025 SMT I		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan	Sasaran 1 : Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.48	71.65	97.51	73.53	NA	NA
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	*Total Fertility Rate* (TFR)	2.16	1.94	128.24	2.13	NA	NA
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Persentase keluarga berisiko stunting	22.5	10.54	153.16	20	NA	NA
Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Sasaran 4 : Meningkatkan tata kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	72.65	99.52	73.25	NA	NA

*NA: *Capaian dihitung di awal tahun(N+1)*

Tabel 2.6.

Capaian Sasaran dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan 2025

Sasaran / Program	Indikator Sasaran / Program	2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi SMT I
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotongroyongan					
Sasaran 1: Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.48	71.65	73.53	NA
1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Lembaga Pemerintah yang Responsif Gender	42	42	42	42
2. Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan	0.0042	0.0042	0.0041	0.0008
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani secara komprehensif	100	100	100	100
4. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki Data Gender	10	40.48	12	NA
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Jumlah desa layak anak	4	4	6	6
6. Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase kasus kekerasan anak	0.0076	0.0073	0.0065	0.0018
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB	TFR	2.16	1.94	2.13	NA
7. Program Pengendalian Penduduk	ASFR	4	4.42	3.7	NA
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR	71.7	70.22	71.9	70.44
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB	38.98	100%	41.8	100
Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas penanganan keluarga berisiko Stunting	Prosentase Keluarga berisiko stunting	22.5	10.54	10.54	NA
9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Tribina Aktif	95.34	91.76	95.38	94.22
Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi					
Sasaran 4: Meningkatkan tata kulitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	73	72,65	73.25	NA
10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase indikator OPD (IKU dan (IKK) yang Tercapai targetnya	80	64.29	83	NA

Tabel 2.7.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**80**	**NA**	**80**	**64,29**	**80,36**	**83**	**NA**	**NA**
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 dokumen**	**12 bulan**	**10 dokumen**	**10 dokumen**	**100%**	**10 dokumen**	**6 dokumen**	**30**
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4 dokumen	4 dokumen	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	10 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Dokumen Keuangan**	**4 Laporan**	**12 bulan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**100%**	**4 Laporan**	**2 laporan**	**50**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/ bulan	35 orang/bulan	27 Orang/ bulan	27 Orang/bulan	100%	28 Orang/bulan	28 orang/bulan	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	16 laporan	4 Laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	1 laporan	25
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Dokumen Barang Milik Daerah**	**2 Laporan**	**-**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**100%**	**2 Laporan**	**1 laporan**	**50**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	**100%**	2 Laporan	1 laporan	50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksana Administrasi Umum Urusan Pemerintahan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**100**
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 paket	2 paket/bulan	22 paket	22 paket	100%	25 paket	25 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 paket/bulan	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 paket	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	200 paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	4 paket	50
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	4 laporan	80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	40 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	40 laporan	20 laporan	50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kinerja**	**2 unit**	**1 tahun**	**2 unit**	**2 unit**	**100%**	**1 unit**	**1 unit**	**100**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%			
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	17 unit	6 unit	5 unit	83%	3 unit	3 unit	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksana Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**3 Kegiatan**	**12 bulan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**100%**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**100**
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan/ bulan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50
Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan/bulan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan/bulan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang MilikDaerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah yang Dipelihara**	**41 unit**	**12 bulan**	**41 unit**	**41 unit**	**100%**	**42 unit**	**19 unit**	**30**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit	54 unit	14 unit	14 unit	100%	14 unit	6 unit	40
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	15 unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	6 unit	60
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lairnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	2 unit	17 Unit	17 Unit	100%	2 Unit	2 unit	100
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN	**Lembaga Pemerintah yang Responsif**	**42 Lembaga**	**42 Lembaga**	**42 Lembaga**	**42 Lembaga**	**100%**	**42 Lembaga**	**0 Lembaga**	**0**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**Gender**								
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah OPD yang telah melaksanakan PUG**	**17 Perangkat Daerah**	**12 bulan**	**17 Perangkat Daerah**	**17 Perangkat Daerah**	**100%**	**21 Perangkat Daerah**	**0 Perangkat Daerah**	**0**
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota	42 dokumen GAP	40 Dokumen GAP	42 dokumen GAP	42 dokumen GAP	100%	42 dokumen GAP	42 dokumen GAP	100
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG] Kewenangan Kabupaten /Kota	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	100%	30 orang	30 orang	100
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase kasus kekerasan perempuan**	**0.0042%**	**0.0042%**	**0.0042%**	**0.0042%**	**100%**	**0.0041%**	**0.0006%**	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan selama 1 tahun**	**4 Kegiatan**	**12 bulan**	**4 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**100%**	**4 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**25**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan PencegahanKekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	40 Perangkat Daerah	100%	40 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	10
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan rujukan bagi korban kekerasan**	**1 Layanan**	**12 bulan**	**1 Layanan**	**1 Layanan**	**100%**	**1 Layanan**	**1 Layanan**	**100**
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut	1 Layanan	10 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100%	1 Layanan	1 Layanan	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota								
Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK						1 kegiatan	0	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK						1 kegiatan	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Dilayani secara Komprehensif**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak**	**1 Layanan**	**12 bulan**	**1 Layanan**	**1 Layanan**	**100%**	**1 Layanan**	**0 layanan**	**0**
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 layanan	1 Layanan	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	0 layanan	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Persentase OPD yang memiliki Data Gender**	**10%**	**56%**	**10%**	**40.48%**	**404.8%**	**12%**	**NA**	
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah kegiatan pengumpulan/pengolahan analisis peyajian data gender dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**-**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**0**
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Jumlah desa layak anak**	**4 Desa**	**2 Desa**	**4 Desa**	**4 Desa**	100%	**6 Desa**	**4 Desa**	**67**
Pelembagaan PHA pada Lembaga	**Jumlah Kegiatan dalam kelembagaan**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**PHA pada pemerintah. non pemerintah. dan dunia usaha**								
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media danDunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	4 organisasi	5 Organisasi	4 organisasi	4 organisasi	100%	6 organisasi	6 organisasi	100
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga peduli anak yang difasilitasi (Forum Anak. Sekolah Ramah Anak)**	**1 Lembaga**	**12 bulan**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**100%**	**1 Lembaga**	**1 Lembaga**	**100**
Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	16 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Prosentase kasus kekerasan anak**	**0.0076%**	**0.0073%**	**0.0076%**	**0.0073%**	**96.05%**	**0.0065%**	**0.0018%**	**27%**
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan pada anak selama 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak. kecamatan layak Anak. desa/kelurahan layak Anak. dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	2 Kegiatan	1 tahun	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dalam 1 tahun**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan layanan	20 orang	1 tahun	20 orang	20 orang	100%	20 orang	20 orang	100
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang	**Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembagan penyediaan**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**0 Kegiatan**	**0**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**layanan bagi anak**								
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2 orang	1 tahun	2 orang	2 orang	100%	40 orang	0 orang	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**ASFR**	**4**	**-**	**4**	**7.4**	**90.5%**	**3.7**		
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah kegiatan sinkronisasi kebijakan pemerintahprovinsi dan pemerintah daerah dalam pengendalian kualitas penduduk**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	2 Kegiatan	5 Dokumen	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pemetaan perkiraan**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**200**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	17 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	3 Laporan	75
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga Yang Tersedianya	2 Dokumen	17 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	17 Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	17 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	10 Dokumen	83
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%			
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR**	**71.70%**	**73.22%**	**71.70%**		**96.34%**	**71.90%**	**70.12**	**97%**
	Prosentase Desa/kelurahan memiliki kampung KB	**38.98%**	**-**	**38.98%**		**100%**	**41.80%**	**100%**	**100%**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Jumlah kegiatan advokasi. KIE pengendalian penduduk dan KB**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**200**
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100%	17 Laporan	12 Laporan	70.58
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	17 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1Laporan	50
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 dokumen	17 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100
Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi.Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 dokumen	17 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 organisasi	30 organisasi/orang	30 organisasi	30 organisasi	100%	30 organisasi	30 organisasi	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah tenaga penyuluh KB yang difasilitasi**	**40 orang**	**12 bulan**	**40 orang**	**40 orang**	**100%**	**40 orang**	**40 orang**	**100**
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3 Organisasi	177 Desa	3 Organisasi	3 Organisasi	100%	0 Organisasi	0 Organisasi	NA
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.827 orang	1.827 orang	1.827 orang	1.827 orang	100%	1.827 orang	1.827 orang	100
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan HasiPenguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/PenyuluhLapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%			
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	0
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.125 orang	4400 PUS	4.125 orang	5.154 orang	100%	4.135 orang	2235 orang	60
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	6 Laporan	10 laporan	6 Laporan	0 Laporan akseptor	0%	3 Laporan	1 Laporan	30

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penggunaan MKJP								
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 unit	51 paket	10 unit	2 unit	20%			
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	0
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	75 orang	30 orang	75 orang	75 orang	100%	30 orang	0 orang	0
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	300 orang	1000 orang	300 orang	300 orang	100%	40 orang	40 orang	100
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**25**
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 dokumen	2 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	0	0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	64 Kampung	64 Kampung	64 Kampung	64 Kampung	100%	49 Kampung	49 Kampung	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Prosentase tribina aktif**	**95.34%**	**96.09%**	**95.34%**	**91.76%**	**105.59 %**	**95.38%**	**90.69%**	**95**
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanandan kesejahteraan**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	keluarga								
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan HasilPromosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat. Generasi Berencana. Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan HasiPromosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	0 Laporan	0
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK6R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	31 Unit	25 paket BKB Kit	31 Unit	31 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	NA
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	68 Orang	170 orang	68 Orang	68 Orang	100%	68 Orang	68 Orang	100
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	68 Orang	40972 orang	68 Orang	68 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	NA
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	**Jumlah kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan**	**1 Kegiatan**	**12 bulan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra SMT I (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**keluarga melalui pembinaan ketahananan dan kesejahteraan keluarga**								
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 organisasi	2 Laporan	2 organisasi	2 organisasi	100%	2 organisasi	1 organisasi	50
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	1 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	0
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pascasalin/kelahiran. Baduta/Balita)	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	0
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelayanan kepada masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya.

Tabel 2.8.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024 (thnn-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77.20	77.40	75.02	NA	
1	**Urusan PPPA**						
	IKU: INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	Indeks	97,40	97,45	97,16	NA	
	Indikator Sasaran 1 : Indeks Pemberdayaan Gender(IDG)	Indeks	73.48	73.53	71.65	NA	
	IKK : Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	6.5	8.80	8.7	NA	
	IKK: Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	%	100	100	100	100	
	IKK : Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 pdd perempuan	4.2	4.2	4.19	1.24	
2	**Urusan Dalduk dan KB**						
	Indikator Sasaran 2, IKU, IKK : TFR	%	2.16	2.13	1.94	NA	
	IKK : Persentase Jumlah Peserta KB/mCPR	%	71.7	71.9	70.22	66.57	
	IKK: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10	9	6.90	5.44	
	Indikator Sasaran 3: Prosentase keluarga berisiko stunting	%	22.5	NA	10.54	NA	
3	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**						
	Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	NA	NA	NA	
	Indikator Sasaran 4: Nilai SAKIP OPD	%	73	73.25	72,65	NA	

**NA: Capaian dihitung di awal tahun(N+1)*

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan karakteristik wilayah. sebagian besar wilayah merupakan kawasan perdesaan. dengan budaya masyarakat tradisional dan paternalistik. Berdasarkan kondisi demografi. Kabupaten Karanganyar merupakan wilayah berpenduduk besar. kenyataan tersebut berimplikasi kompleknya permasalahan pembangunan di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan luas wilayah. jumlah penduduk dan pola kehidupan masyarakat Kabupaten Karanganyar. maka pengelolaan program pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan KKB harus dilakukan berdasarkan segmentasi sasaran. hal ini bertujuan agar pengelolaan program lebih selaras dan tepat sasaran. Upaya tersebut pasti bisa dilaksanakan jika terbangun komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. yang diimbangi dengan SDM pengelola program yang responsif dan handal.

Isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah belum optimalnya perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dan anak serta belum optimalnya pengendalian penduduk. pelayanan KB serta peningkatan ketahanan keluarga dalam keluarga resiko stunting. Serta pencapaian program nasional yang tertuang dalam SDGs. yaitu :

1. Kualitas data basis keluarga masih rendah.
   Perlu adanya upaya pembinaan tertib administrasi pencatatan pelaporan secara berkesinambungan. sekaligus diikuti monitoring dan evaluasi pencatatan pelaporan data basis keluarga secara periodik.
2. Tingginya angka Drop Out akibat masih rendahnya peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   Guna mendorong peningkatan kepesertaan KB MKJP. maka perlu pembinaan rutin dan berkesinambungan terhadap peserta KB Non MKJP. Hal ini disebabkan bahwa metode KB Non MKJP sangat rawan terjadinya kegagalan (kehamilan). yang berakibat meningkatnya angka Drop Out (putus menjadi peserta KB). Peserta KB Non MKJP terdiri dari KB hormonal (pil dan suntik) dan KB kondom.
3. Masih tingginya perkawinan usia muda (umur wanita < 20 tahun)
   Perkawinan usia muda berpengaruh yang besar terhadap pembangunan Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. hal ini disebabkan masa subur usia < 20 tahun lebih panjang. sehingga peluang mempunyai anak menjadi lebih besar.
4. Kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) masih rendah
   Peningkatan kualitas IMP mutlak diperlukan. sebab IMP merupakan wahana komunikasi. informasi dan edukasi (KIE) yang langsung berhadapan dengan masyarakat. pada sisi lain untuk menyikapi keterbatasan tenaga PKB/PLKB di lapangan.
5. Kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB. BKR. dan BKL) dan UPPKA masih rendah
   Peningkatan kualitas ketahanan keluarga. merupakan bagian dari upaya peningkatan sumberdaya manusia berkualitas. yang diwujudkan melalui media kelompok bina keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.Namun pada kenyataannya.

bahwa kualitas beberapa kelompok bina keluarga dan UPPKA masih belum sesuai harapan.

6. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga kabupaten layak anak belum tercapai.

Beberapa permasalahan tersebut di atas perlu segera diatasi. dengan memfokuskan program dan kegiatan pada upaya-upaya pemecahan masalah terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pembangunan Bangga Kencana. sekaligus sebagai upaya dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Renstra Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) merupakan upaya pokok dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga. sekaligus sebagai bagian integral pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJPD Kabupaten Karanganyar tentang Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk melalui Program Keluarga Berencana. sekaligus juga sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. menjelaskan bahwa BKKBN yang awalnya hanya menangani program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Nasional saja. saat ini lebih dipertegas fungsinya dalam menjalankan kebijakan kependudukan. baik dari segi kuantitas. kualitas dan mobilitas. Sejalan dengan hal tersebut. juga telah diterbitkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.Penanganan permasalahan kependudukan tidak mungkin mampu diselesaikan secara spasial. namun diperlukan keterlibatan berbagai sektor terkait. dengan meningkatkan sinergi dan integrasi antar program. Menyikapi kondisi tersebut. maka sangat diperlukan komitmen *stakeholders* agar pelaksanaan pembangunan Bangga Kencana dapat tercapai sesuai dengan sasaran.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar akan terus berusaha melakukan optimasi dan memanfaatkan kondisi eksisting sumberdaya yang dimiliki. berlandaskan pembangunan berpusat pada kepentingan dan kebutuhan. hajat hidup masyarakat (*People Centered Development*) yang dikelola secara partisipatif bersama pemerintah. masyarakat dan swasta (NGO) melalui prinsip-prinsip efektif. efisien. akuntabel dan berkelanjutan (*Sustainable*). Beberapa pola seperti inilah yang relevan untuk diterapkan dan mampu mengakomodir berbagai permasalahan di masyarakart (khususnya Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). apalagi kondisi SDM lini lapangan yang semakin berkurang. Sebagai sasaran jangka panjang diharapkan masyarakatlah sebagai ujung tombak penggerakan Program KKB.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 seperti pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD					**Hasil Analisis Kebutuhan**					**Catatan Penting**
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
DP3APPKB				**16.512.947.178**	**DP3APPKB**				**17.790.727.178**	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				**16.512.947.178**	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**				**17.790.727.178**	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				**6.839.327.178**	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**				**6.489.327.178**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	**4.983.667.178**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kabupaten Karanganyar	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	**4.983.667.178**	
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**17.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	**100%**	**17.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun**	**100%**	**3.949.758.283**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun**	**100%**	3.949.758.283	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	3.934.758.283	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bulan	3.934.758.283	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	15.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan**	**100%**	**7.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan**	**100%**	**7.000.000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**15.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**100 %**	**15.000.000**	
2.08.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	2.08.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	
2.08.01.2.05.0005 Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Dokumen	10.000.000	2.08.01.2.05.0005 Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Dokumen	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	**255.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kabupaten Karanganyar	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	**255.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	22 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	22 paket	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		Disediakan					Disediakan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	10.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	15.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	200.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Karanganyar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	**25.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kabupaten Karanganyar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	**25.000.000**	
Pengadaan Mebel	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	10.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	15.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karanganyar	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**415.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Karanganyar	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	**415.000.000**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	120.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	285.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	285.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Karanganyar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	**100%**	**299.908.895**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kabupaten Karanganyar	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	**100%**	**299.908.895**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	179.908.895	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	179.908.895	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Karanganyar	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	8.90 %	**15.000.000**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Kabupaten Karanganyar	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	8.90 %	**15.000.000**	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Persentase lembaga/PD yang mengimplementasikan anggaran responsif gender	59.52 %	**15.000.000**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Kabupaten Karanganyar	Persentase lembaga/PD yang mengimplementasikan anggaran responsif gender	59.52 %	**15.000.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	5.000.000	
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	42 lembaga	10.000.000	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	42 lembaga	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabuaten yang difasilitasi**	**0 organisasi**	**0**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan**	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabuaten yang difasilitasi**	**0 organisasi**	**0**	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota	0	0	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten /Kota	0	0	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Kabupaten Karanganyar**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**4.18**	**1.230.330.400**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Kabupaten Karanganyar**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**	**4.18**	**530.330.400**	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase perempuan rentan kekerasan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi KTP dan TPPO**	**0.03%**	**200.000.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase perempuan rentan kekerasan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi KTP dan TPPO**	**0.03%**	**200.000.000**	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat	17 lembaga	200.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat	17 lembaga	200.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
		provinsi. masyarakat. serta Kab/Kota					provinsi. masyarakat. serta Kab/Kota			
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karaanyar**	**Persentase layanan rujukan lanjutan yang disediakan pada korban kekerasan**	**100%**	**800.330.400**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase layanan rujukan lanjutan yang disediakan pada korban kekerasan**	**100%**	**300.330.400**	
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	100.000.000	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	100.000.000	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	100.000.000	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	200.330.400	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	50.330.400	
Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	300.000.000	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	100.000.000	

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mwujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**11**	**230.000.000**	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mwujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**11**	**230.000.000**	
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	**200.000.000**	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	**200.000.000**	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	5 orang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	5 orang	30.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**3.30**	**150.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya**	**3.30**	**150.000.000**	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang tersedia**	**1 lembaga**	**150.000.000**	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang tersedia**	**1 lembaga**	**150.000.000**	
Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	150.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	150.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak**	**45.23 %**	**105.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak**	**45.23 %**	**105.000.000**	
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	**Persentase PD yang melakukan pengumpulan dan penyajian data gender dan anak**	**59.52 %**	**105.000.000**	**Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data**	Kabupaten Karanganyar	**Persentase PD yang melakukan pengumpulan dan penyajian data gender dan anak**	**59.52 %**	**105.000.000**	

Kabupaten/Kota					**di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	1 Dokumen	105.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	1 Dokumen	105.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif**	**100%**	**140.000.000**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif**	**100%**	**140.000.000**	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase lembaga masyarakat pemerintah dunia usaha yang telibat di dalam pemenuhan hak anak**	**100%**	**70.000.000**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase lembaga masyarakat pemerintah dunia usaha yang telibat di dalam pemenuhan hak anak**	**100%**	**70.000.000**	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	70.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	8 lembaga	70.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) di daerah**	**100**	**70.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) di daerah**	**100**	**70.000.000**	
Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	30 lembaga	70.000.000	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	30 lembaga	70.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Kabupaten Karanganyar**	**Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)**	**7.28**	**215.329.600**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Kabupaten Karanganyar**	**Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)**	**7.28**	**365.329.600**	

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase kader perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**25%**	**50.000.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase kader perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**25%**	**50.000.000**	
koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Karanganyar	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	50.000.000	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Karanganyar	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	50.000.000	
Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0	0	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0	0	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus**	**100%**	**150.329.600**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus**	**100%**	**300.329.600**	
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	50.000.000	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	50.000.000	
layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	10.000.000	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	20.000.000	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	100.000.000	
layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	20.000.000	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	50.000.000	

Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	50.329.600	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 orang	50.329.600	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**15.000.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak**	**1 Kegiatan**	**15.000.000**	
Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimte	2 orang	15.000.000	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimte	2 orang	15.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kabupaten Karanganyar			**9.673.620.000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	Kabupaten Karanganyar			**10.966.020.000**	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kabupaten Karanganyar	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	4.30	**1.383.148.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Kabupaten Karanganyar	Age Specific Fertility Rate (ASFR)	4.30	**1.383.148.000**	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kabupaten Karanganyar	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	100%	**250.000.000**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Kabupaten Karanganyar	Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan	100%	**250.000.000**	
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dokumen	50.000.000	
Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan	25 Perangkat Daerah	50.000.000	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks	Kabupaten Karanganyar	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan	25 Perangkat Daerah	50.000.000	

Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah		Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah			Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah		Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah			
Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/ MTS. Jalur Non Formal dan Informal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTB. Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	100.000.000	Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/ MTS. Jalur Non Formal dan Informal	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTB. Jalur Non Formal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	100.000.000	
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	50.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	50.000.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah dokumen profil kependudukan**	**1 dokumen**	**1.133.148.000**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Jumlah dokumen profil kependudukan**	**1 dokumen**	**1.133.148.000**	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	100.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	2 Dokumen	20.000.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	430.800.00	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	430.800.00	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	12 Dokumen	203.600.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan	12 Dokumen	203.600.000	

		dan Pelayanan KB					dan Pelayanan KB			
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	2 Laporan	100.000.000	
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	10 Unit	200.000.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kabupaten Karanganyar	•Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	• 10 Unit	200.000.000	
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	78.748.000	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	78.748.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Kabupaten Karanganyar**	**•Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB •Persentase Jumlah Peserta KB / mCPR •Demand Satisfied •Kelahiran Tidak Diinginkan**	**• 30 % • 70.50 % • 89.30 % 9.60 %**	**4.361.672.000**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Kabupaten Karanganyar**	**•Persentase desa/kelurahan yang memiliki kampung KB •Persentase Jumlah Peserta KB / mCPR •Demand Satisfied •Kelahiran Tidak Diinginkan**	**• 30 % • 70.50 % • 89.30 % • 9.60 %**	**4.697.052.000**	
Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kabupaten Karanganyar	Persentase KIE yang menggunakan kearifan budaya lokal	25 %	904.482.000	**Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Kabupaten Karanganyar	Persentase KIE yang menggunakan kearifan budaya lokal	25 %	904.482.000	
Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	15.000.000	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	15.000.000	
Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga	2 Dokumen	15.000.000	Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga	2 Dokumen	15.000.000	

Budaya Lokal		Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			Kearifan Budaya Lokal		Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	61.282.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	61.282.000	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	225.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rapat Koordinasi Desa (Rakordes). dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	225.000.000	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	588.200.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	17 Laporan	588.200.000	
Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	30.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	30.000.000	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase penyuluh KB yang memiliki kompetensi**	**100**	**1.348.550.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase penyuluh KB yang memiliki kompetensi**	**100**	**1.348.550.000**	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.827 orang	1.348.550.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.827 orang	1.348.550.000	

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase faskes yang memiliki alat dan obat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan**	**100%**	**1.943.190.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase faskes yang memiliki alat dan obat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan**	**100%**	**2.278.570.000**	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	30.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	70.000.000	

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.145 orang	1.868.190.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.145 orang	2.163.570.000	
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	5.000.000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	50.000.000	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	0	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	0	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	35 Orang	70.000.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	35 Orang	70.000.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	20.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	20.000.000	
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	5 Orang	25.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	5 Orang	25.000.000	
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	25.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	25.000.000	
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	40 orang	10.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	40 orang	10.000.000	
Peningkatan Kesertaan KB	Kabupaten	Jumlah Akseptor yang	30 orang	10.000.000	Peningkatan Kesertaan	Kabupaten	Jumlah Akseptor yang	30 orang	10.000.000	

Pria	Karanganyar	Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			KB Pria	Karanganyar	Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Kampung KB aktif**	**40%**	**165.450.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Kampung KB aktif**	**40%**	**165.450.000**	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Karanganyar	• Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	15.000.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Karanganyar	• Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB •	1 Dokumen	15.000.000	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	177 Kampung	150.450.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	177 Kampung	150.450.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	**Kabupaten Karanganyar**	• **Indeks Lansia Berdaya** • **Indeks Pengasuhan Remaja** • **Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	• **56.50 %** • **90.90 %** • **93.50 %**	**3.928.800.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Kabupaten Karanganyar**	• **Indeks Lansia Berdaya** • **Indeks Pengasuhan Remaja** **Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif**	• **56.50 %** • **90.90 %** • **93.50 %**	**5.221.200.000**	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga**	**91 %**	**428.400.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase Desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga**	**91 %**	**428.400.000**	
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4 Laporan	10.000.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	4 Laporan	10.000.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB.	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	20 unit	200.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	20 unit	200.000.000	

BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kabupaten Karanganyar	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2 kegiatan	10.000.000	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kabupaten Karanganyar	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2 kegiatan	10.000.000	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS.PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	68 Laporan	10.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS.PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	68 Laporan	10.000.000	
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor/UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68 orang	10.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor/UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68 orang	10.000.000	
Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 laporan	10.000.000	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	1 laporan	10.000.000	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	177 Kelompok	158.400.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	177 Kelompok	158.400.000	

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	10.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	10.000.000	
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	10.000.000	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	10.000.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase keluarga berisiko stunting yang dibina**	**100%**	**3.500.400.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Kabupaten Karanganyar**	**Persentase keluarga berisiko stunting yang dibina**	**100%**	**4.792.800.000**	
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS. ibu hamil. pasca salin/kelahiran. baduta/balita)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan	2.369.400.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS. ibu hamil. pasca salin/kelahiran. baduta/balita)	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan	2.369.400.000	
Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS. ibu hamil. pasca salin/kelahiran. baduta/balita)	Kabupaten Karanganyar	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	2 Laporan	1.077.000.000	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS. ibu hamil. pasca salin/kelahiran. baduta/balita)	Kabupaten Karanganyar	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	2 Laporan	2.369.400.000	

Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	44.000.000	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	44.000.000	
Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	10.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	10.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kesatu pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik. partisipatif. politis atas-bawah dan bawah-atas. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini membahas rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan untuk menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait bidang pemberdayaan perempuan. perlindungan anak. pengendalian penduduk dan keluarga berencana tentunya Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan teknis yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. hal ini menyebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari masyarakat untuk Tahun 2026.

Tabel 2.10.

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tugas pokok BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. yang didasarkan pada filosofi penggerakan peran serta masyarakat dalam Keluarga Berencana. melalui strategi: (1) *Re-Establishment* yaitu dengan membangun kembali sendi-sendi Program KB Nasional sampai ke tingkat lini lapangan pasca penyerahan kewenangan; (2) *Sustainability* yaitu dengan memantapkan komitmen program yang kesinambungan dengan didukung oleh segenap stakeholders. mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun tujuan nasional yang ingin dicapai. adalah: (1) Keluarga dengan jumlah anak ideal; (2) Keluarga sehat; (3) Keluarga berpendidikan; (4) Keluarga Sejahtera; (5) Keluarga Berketahanan; (6) Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya; (7) Penduduk tumbuh seimbang.

Terdapat 7 agenda pembangunan nasional dari Kemen PPPA yaitu: (1) ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (2) pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; (3) sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) lingkungan hidup. ketahanan bencana. dan perubahan iklim; dan (7) stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak. perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu: (1) Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif; (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); (3) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif; (4) Indeks Perlindungan Anak (IPA); (5) Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);

9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;

8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskal Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;

6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya.*** Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;

18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;
6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;
12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran DP3APPKB

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempaun Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah :

“Terwujudnya masyarakat yang setara. berkeadilan. dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB. peningkatan kualitas pembangunan keluarga”

Sasarannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Tahapan Strategis di Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar adalah ”Penguatan Tata Kelola Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana” meliputi fokus utama pada konsolidasi internal, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program PPPA, pengendalian penduduk, dan KB. Termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan PUG, revitalisasi Forum Anak, pelatihan penyuluh KB, serta penataan sistem perencanaan dan pelaporan yang responsif gender dan ramah anak.

Tabel 3.1.

Tujuan- Sasaran- dan Program (Target Tahun 2026)

No	Tujuan	Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Kinerja Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Terwujudnya masyarakat yang setara. berkeadilan. dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak. penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB. peningkatan kualitas pembangunan keluarga**		**Indikator Tujuan: Indeks Ketimpangan Gender (IKG)**	nilai	0.260
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Indeks	97.45
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	622. 46
		1.1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja operasional APBD	%	8.90
		1.2. Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4.18
		1.3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak	%	45.23
		1.4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif	%	100
		1.5. Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 anak)	per 100.000 anak	7.28
			Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.68
			Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	66.68
		Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR	Indeks	1.98
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	66.5
		2.1. Program Pengendalian Penduduk	ASFR	Indeks	4.30
		2.2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	•Persentase Kampung KB mandiri •Persentase Jumlah Peserta KB / mCPR •Demand Satisfied •Kelahiran Tidak Diinginkan	%	• 30 % • 70,50 % • 89,30 % • 9,60 %
		2.3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	•Indeks Lansia Berdaya •Indeks Pengasuhan Remaja •Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif	Indeks % 	• 56,50 • 90,90 • 93,50%
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	%	82.28
		3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72,75

3.3 Tantangan dan Peluang DP3APPKB

3.3.1. Tantangan

1. Tingginya *Unmet Need*. disebabkan oleh tingginya perkawinan usia muda (< 20 tahun bagi wanita). rendahnya kesertaan berKB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). dan tingginya PUS Resiko Tinggi (Risti) belum ber KB;
2. Semakin deras dan terbukanya arus informasi negatif terhadap masyarakat yang menghambat keberhasilan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
3. Masih tingginya jumlah Keluarga Pria Sejahtera;
4. Rendahnya kualitas IMP akibat sering terjadi pergantian PPKBD dan Sub PPKBD;
5. Rendahnya kualitas dari TPK akibat sering terjadi pergantian personil;
6. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

3.3.2. Peluang

1. Adanya Sumber Daya Manusia eksternal pengelola Program KKB (PPKBD. Sub PPKBD. TPK. Pramusaji. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat) yang memadai;
2. Tersedianya tenaga dan tempat pelayanan KB yang memadai di setiap kecamatan dan desa/kelurahan;
3. Terbentuknya Kampung KB di seluruh Desa/Kelurahan yang mendukung terbentuknya Rumah Data Kependudukan untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data pada masyarakat desa/ kelurahan;
4. Semakin meningkatnya komitmen stakeholder. baik dari pemerintah dan swasta.

   Beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sebagai berikut :

   1. Kualitas data basis keluarga masih rendah. disebabkan :
      - Rendahnya kualitas SDM pengelola pencatatan pelaporan. menurunnya frekuensi pembinaan. monitoring dan evaluasi.
   2. Masih rendahnya peserta KB MKJP. disebabkan :
      - Terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan KB Non MKJP dengan berbagai alasan baik bersifat medis dan non medis. berkurangnya KIE dan konseling KB MKJP.
   3. Perkawinan usia muda tinggi. disebabkan :
      - Masih adanya pandangan tradisional di masyarakat untuk kawin muda. derasnya arus informasi negatif melalui berbagai media (khususnya melalui media internet). masih kurangnya pemahaman remaja terhadap kesehatan reproduksi.
   4. Kualitas IMP (PPKBD & Sub PPKBD) masih rendah. disebabkan :
      - Munculnya pandangan bahwa program KKB merupakan urusan perempuan. sering terjadinya pergantian anggota IMP. rendahnya kualitas SDM IMP karena banyak yang berusia lanjut. menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan akibat berkurangnya tenaga PKB/PLKB
   5. Kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB. BKR. BKL dan UPPKS) rendah. disebabkan :
      - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas pengelola kegiatan Bina Keluarga dan menurunnya kuantitas dan kualitas pembinaan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan DP3APPKB. Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah

Sesuai urusan yang ditangani maka DP3APPKB masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender **Tujuan 3:** Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar **Sasaran 4 :** Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil	Terwujudnya masyarakat yang setara, berkeadilan, dan berkualitas melalui peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan anak, penguatan pengendalian penduduk dan pelayanan KB, peningkatan kualitas pembangunan keluarga.	1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan gender (IPG)
			Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
		2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)
			IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)
		3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM

3.4.2. Cascading Kinerja OPD

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan
1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota** a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Perempuan	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** a. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi

Sasaran OPD	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Khusus Anak	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** a. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota b. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota c. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga dan pengendalian penduduk	Program Pengendalian Penduduk	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal **Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal** a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal **Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) **Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya **Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah**

Sasaran OPD	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** a. Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) **Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** a. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) b. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) c. Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga d. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **Administrasi Umum Perangkat Daerah** a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan d. Fasilitasi Kunjungan Tamu e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

I. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
c. Administrasi Barang Miliki Daerah pada Perangkat Daerah
   1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
   3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   a. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota
   b. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   c. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

1. Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PemenSuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   a. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   b. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
   c. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

II. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
   a. Advokasi. Sosialisasi. dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
   b. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
   c. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
   a. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
    a. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
    b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
    c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
    d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
    a. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

C. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    a. Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL
    b. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
    c. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
    a. Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga
    b. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)
    c. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya. masih bisa berubah). dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana. yang dapat berasal dari APBD Kabupaten maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk. dan Keluarga Berencana Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**3.770.798.933**				**3.770.798.933**
2	**08**	**001**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP OPD**		**72,75**	**3.700.798.933**				**3.700.798.933**
2	**08**	**001**	2.01		**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**		**100%**	**5.000.000**			**100%**	**5.000.000**
2	08	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Karanganyar	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan		6 Laporan	5.000.000
2	**08**	**001**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun**		**100%**	**3.024.114.713**			**100%**	**3.024.114.713**
2	08	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Karanganyar	28 Orang/bulan	3.019.114.713	28 Orang/ bulan		29 Orang/bulan	3.019.114.713
2	08	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Karanganyar	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan		4 Laporan	5.000.000
2	08	001	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan**		**100%**	**2.500.000**	**100%**		**2 Laporan**	**2.500.000**
2	08	001	2.03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	2.500.000	2 Laporan		2 Laporan	2.500.000
2	**08**	**001**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**		**100%**	**71.284.220**			**100%**	**71.284.220**
2	08	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karanganyar	22 Paket	5.000.000	22 Paket		22 Paket	5.000.000
2	08	001	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Kabupaten	4 Paket	5.000.000	4 Paket		4 Paket	5.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
						Disediakan	Karanganyar						
2	08	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Karanganyar	8 Paket	5.000.000	8 Paket		8 Paket	5.000.000
2	08	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Karanganyar	5 Laporan	5.000.000	5 Laporan		5 Laporan	5.000.000
2	08	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Karanganyar	40 Laporan	51.284.220	40 Laporan		40 Laporan	51.284.220
2	**08**	**001**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**		**100%**	**5.000.000**			**100%**	**5.000.000**
2	08	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Karanganyar	1 Unit	5.000.000	1 Unit		1 Unit	5.000.000
2	**08**	**001**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**490.400.000**			**100%**	**490.400.000**
2	08	001	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	6.400.000	2 Laporan		2 Laporan	6.400.000
2	08	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Karanganyar	3 Laporan	124.000.000	3 Laporan		3 Laporan	124.000.000
2	08	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Karanganyar	4 Laporan	360.000.000	4 Laporan		4 Laporan	360.000.000
2	**08**	**001**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**		**100%**	**102.500.000**			**100%**	**102.500.000**
2	08	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Karanganyar	14 Unit	82.500.000	14 Unit		14 Unit	82.500.000
2	08	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Karanganyar	10 Unit	10.000.000	10 Unit		10 Unit	10.000.000
2	08	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Karanganyar	2 Unit	10.000.000	2 Unit		18 Unit	10.000.000
2	**08**	**002**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja operasional APBD**		**8,90**	**5.000.000**				**5.000.000**
2	**08**	**002**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga**	**Persentase lembaga/PD yang mengimplementasikan anggaran responsif gender**		**59.52 %**	**5.000.000**			**59.52 %**	**5.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
					Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	002	2.01	007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		1 laporan	5.000.000	1 laporan		1 laporan	5.000.000
2	**08**	**003**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**		**4,18**	**25.000.000**				**25.000.000**
2	**08**	**003**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan rentan kekerasan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi KTP dan TPPO**		**0.03%**	**5.000.000**			**0.03%**	**5.000.000**
2	08	003	2.01	006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi. masyarakat. serta Kab/Kota	Kabupaten Karanganyar	17 lembaga	5.000.000	APBD		17 lembaga	5.000.000
2	**08**	**003**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan rujukan lanjutan yang disediakan pada korban kekerasan**		**100%**	**20.000.000**			**100%**	**20.000.000**
2	08	003	2.02	007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	5 orang	5.000.000	APBD		5 orang	5.000.000
2	08	003	2.02	008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	5 orang	5.000.000	APBD		5 orang	5.000.000
2	08	003	2.02	009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	10 orang	10.000.000	APBD		10 orang	10.000.000
2	**08**	**005**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan data pilah gender dan anak**		**45,23**	**5.000.000**				**5.000.000**
2	**08**	**005**	2.01		**Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di**	**Persentase PD yang melakukan pengumpulan dan penyajian data gender dan anak**		**59.52 %**	**5.000.000**			**59.52 %**	**5.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2	08	005	2.01	003	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kabupaten Karanganyar	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.000.000
2	**08**	**006**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase kasus kekerasan anak yang dilayani secara komprehensif**		**100%**	**10.000.000**				**10.000.000**
2	**08**	**006**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga masyarakat pemerintah dunia usaha yang telibat di dalam pemenuhan hak anak**		**100%**	**10.000.000**			**100%**	**10.000.000**
2	08	006	2.01	003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha	Kabupaten Karanganyar	10 lembaga	10.000.000	APBD		10 lembaga	10.000.000
2	**08**	**007**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 anak**		**7,28**	**25.000.000**				**25.000.000**
2	**08**	**007**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kader perlindungan perempuan dan anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas**		**25%**	**5.000.000**			**25%**	**5.000.000**
2	08	007	2.01	006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Karanganyar	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	5.000.000
2	**08**	**007**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan khusus**		**100%**	**20.000.000**			**100%**	**20.000.000**
2	08	007	2.02	008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	5 Orang	5.000.000	APBD		5 Orang	5.000.000
2	08	007	2.02	010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Karanganyar	5 Orang	5.000.000	APBD		5 Orang	5.000.000
2	08	007	2.02	013	Layanan pendampingan korban bagi	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang	Kabupaten	10 Orang	10.000.000	APBD		10 Orang	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
					Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Karanganyar						
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**8.206.380.000**				**8.206.380.000**
2	**14**	**002**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)**		**4,30**	**136.200.000**				**136.200.000**
2	**14**	**002**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang diimplementasikan**		**100%**	**10.000.000**				**10.000.000**
2	14	002	2.01	027	Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	Kabupaten Karanganyar	4 Satuan Pendidikan	10.000.000	APBD		4 Satuan Pendidikan	10.000.000
2	**14**	**002**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen profil kependudukan**		**1 dokumen**	**126.200.000**			**1 dokumen**	**126.200.000**
2	14	002	2.02	011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kabupaten Karanganyar	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	14	002	2.02	012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	106.200.000	DAK -BOKB		2 Laporan	106.200.000
2	14	002	2.02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kabupaten Karanganyar	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	**14**	**003**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**•Persentase Jumlah Peserta KB/Mcpr •Persentase Kampung KB Mandiri •Kelahiran Tidak Diinginkan •Demand Satisfied**		• **70,50** • **30,00** • **9,60** • **89,30**	**2.961.380.000**				**2.961.380.000**
2	**14**	**003**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase KIE yang menggunakan kearifan budaya lokal**		**25 %**	**10.000.000**			**25 %**	**10.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
2	14	003	2.01	013	Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kabupaten Karanganyar	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	**14**	**003**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase penyuluh KB yang memiliki kompetensi**		**100 %**	**613.710.000**			**100 %**	**613.710.000**
2	14	003	2.02	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kabupaten Karanganyar	1.827 orang	613.710.000	DAK -BOKB		1.827 orang	613.710.000
2	**14**	**003**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase faskes yang memiliki alat dan obat kontrasepsi yang sesuai kebutuhan**		**100%**	**2.327.670.000**			**100%**	**2.327.670.000**
2	14	003	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Karanganyar	4 Laporan	63.900.000	DAK -BOKB		4 Laporan	63.900.000
2	14	003	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kabupaten Karanganyar	4.145 orang	2.163.570.000	APBD DAK -BOKB		4.145 orang	2.163.570.000
2	14	003	2.03	004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kabupaten Karanganyar	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.000.000
2	14	003	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kabupaten Karanganyar	4 laporan	95.200.000	APBD DAK -BOKB		4 laporan	95.200.000
2	**14**	**003**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan**	**Persentase Kampung KB aktif**		**40%**	**10.000.000**			**40%**	**10.000.000**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
					Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
2	14	003	2.04	007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kabupaten Karanganyar	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	10.000.000
2	**14**	**004**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**•Persentase kelembagaan ketahanan keluarga aktif •Indeks Lansia Berdaya •Indeks Pengasuhan Remaja**		**•93,50 •56,50 •90,90**	**5.108.800.000**				**5.108.800.000**
2	**14**	**004**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga**		**91 %**	**275.000.000**			**91 %**	**275.000.000**
2	14	004	2.01	015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kabupaten Karanganyar	1 kegiatan	10.000.000	APBD		1 kegiatan	10.000.000
2	14	004	2.01	017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	10.000.00	APBD		2 Laporan	10.000.00
2	14	004	2.01	019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kabupaten Karanganyar	68 orang	255.000.000	DAK -BOKB		68 orang	255.000.000
2	**14**	**004**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase keluarga berisiko stunting yang dibina**		**100%**	**4.833.800.000**			**100%**	**4.833.800.000**
2	14	004	2.02	005	Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	2.369.400.000	DAK -BOKB		2 Laporan	2.369.400.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					DP3APPKB				**11.977.178.933**				**11.977.178.933**
					(Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS. ibu hamil. pasca salin/kelahiran. baduta/balita)	remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)							
2	14	004	2.02	006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS. ibu hamil. pasca salin/kelahiran. baduta/balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	2.409.400.000	DAK -BOKB		2 Laporan	2.409.400.000
2	14	004	2.02	007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	40.000.000	APBD		2 Laporan	40.000.000
2	14	004	2.02	008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Kabupaten Karanganyar	2 Laporan	15.000.000	APBD		2 Laporan	15.000.000

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,260
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	97,45
3	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	622,46
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,68
5	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	66,68
6	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,98
7	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Angka	66,50
8	Nilai IKM	Nilai	82,28

Tabel 4.3.
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026 DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1,98
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern *Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	%	70,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	8,10
4	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,90
5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100
6	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	/100.000 penduduk	4,18

Tabel 4.4.

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
(1)	(2)	(3)
• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik; • Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.700.798.933**
	Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**5.000.000**
	a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.024.114.713**
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.019.114.713
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**2.500.000**
	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**71.284.220**
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000
	c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000
	d. Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.284.220
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**5.000.000**
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**490.400.000**
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	124.000.000
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**102.500.000**
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.500.000
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000
• Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; • Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**5.000.000**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**5.000.000**
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**25.000.000**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**5.000.000**
	a. Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**20.000.000**
	a. layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	b. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	c. Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**5.000.000**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**5.000.000**
	a. Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	5.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**10.000.000**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**10.000.000**
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**25.000.000**
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang	

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
(1)	(2)	(3)
	Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**5.000.000**
	a. koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	5.000.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**20.000.000**
	a. Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	b. layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000
	c. Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengedalian Penduduk. dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengedalian Penduduk. dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu. sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait. sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Rencana Kerja ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, 26 September 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS,

E. WIHARTOMO, S.Pt., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710909 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GRAFIK vi

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Landasan Hukum I-2

1.3. Maksud dan Tujuan I-5

1.4. Sistematika Penulisan I-5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1

2.1. Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2023 yang dilengkapi dengan visual hasilnya II-1

2.2. Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci II-22

2.3. Prestasi yang dicapai Tahun 2021-2024 ..... II-26

2.4. Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi II-27

2.5. Review terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan II-31

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

3.1. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah III-1

3.1. Tujuan dan Sasaran III-14

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan III-18

3.4. Program dan Kegiatan III-22

BAB IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
	4.1. Perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan	IV-1
	4.2. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam dan hasil reses/aspirasi DPRD)	IV-10
BAB V.	PENUTUP	V-1
	5.1. Catatan Penting	V-1
	5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-2
	5.3 Rencana Tindak Lanjut	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Tujuan Utama Tahun 2024	II-4
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024	II-5
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2024	II-6
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2024	II-8
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2024	II-10
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2024	II-11
Tabel 2.7	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Semester I Provinsi/ Kabupaten/Kota	II-13
Tabel 2.8	Capaian Realisasi Kegiatan Tahun 2024	II-22
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar	II-26
Tabel 2.10	Prestasi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024	II-27
Tabel 2.11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-28
Table 2.12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dispertan PP	II-30
Tabel 2.13	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar	II-32
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Telaah Remstra Kementerian Pertanian	III-3
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-5
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Telaah Resntra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	III-8
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Telaah Resntra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah..	III-9
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	III-11

Tabel 3.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan berdasarkan Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	III-12
Tabel 3.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terhadap TElaah RTRW Kabupaten Karanganyar	III-14
Tabel 3.8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	III-16
Tabel 3.9	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026	III-18
Tabel 3.10	Tahapan Rencana Strategis	III-20
Tabel 3.11	Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD	III-21
Tabel 3.12	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	III-23
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-9
Tabel 4.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar	IV-42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Target dengan Capaian Realisasi IKU Tahun 2024	II-5
Grafik 2.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2024	II-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD yang menjadi acuan untuk pembangunan selama periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan memuat Program Kegiatan yang menjadi rencana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026 yang penyusunannya tidak terlepas dari Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa daerah harus memiliki dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode waktu 1 satu tahun. Sedangkan pada tahun 2025, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan periode waktu 5 tahun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Penyusunan dokumen ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dokumen ini tidak terlepas dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disingkat RKPD. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya keselarasan antara Renja perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dengan memperhatikan dokumen Renstra dan dokumen Renja tahun berjalan, kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 175);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181);

29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman bagi evaluasi program kegiatan tahun 2026 serta perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan target dan sasaran pembangunan dan turut mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU

2.1. Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian output kegiatan pada Tahun 2024 yang dilengkapi dengan visual hasilnya

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja tahun 2025 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah.

Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 adalah:

I. Program Umum/Rutin

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi kegiatan :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
   d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
   e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
   f) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah; dan
   b) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Pengadaan Mebel; dan
   b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang meliputi sub kegiatan:
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

a. **Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang meliputi kegiatan :
   a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitai Pasokan dan Harga Pangan yang meliputi sub kegiatan:
      (1) Penyediaan Informasi Harga Panen Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota.
   b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan:
      (1) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
   c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi yang meliputi sub kegiatan:
      (1) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan, yang meliputi kegiatan :
   a) Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan:
      (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.
3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, yang meliputi kegiatan:
   a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sub kegiatan:
      (1) Penyediaan sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; dan

(2) Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

b. **Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Perikanan**
   1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, yang meliputi kegiatan :
      a) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
      b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
   2) Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:
      a) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Liannya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.
   3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang meliputi kegiatan :
      a) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

c. **Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**
   1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, yang meliputi kegiatan :
      a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; dan
      b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
   2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, yang meliputi kegiatan :
      a) Pengembangan Prasarana Pertanian; dan
      b) Pembangunan Prasarana Pertanian.
   3) Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, yang meliputi kegiatan :
      a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Manular dalam Daerah Kabupaten/Kota;
      b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
      c) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
   4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, yang meliputi kegiatan :
      a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
   5) Program Penyuluhan Pertanian, yang meliputi kegiatan :
      a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 mendapat alokasi anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Karanganyar (sumber dana meliputi DAU, DAK-Fisik, Dak-Non Fisik, dan DBHCHT) sebesar Rp.51.049.841.814,- (lima puluh satu milyard empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus empat belas rupiah) dengan rincian semuanya belanja langsung. Realisasi kegiatan dari sumber dana APBD Kabupaten: realisasi keuangan sebesar Rp.48.544.605.269,- (empat puluh delapan milyard lima ratus empat puluh empat juta enam ratus lima ribu dua ratus enam puluh

sembilan rupiah) atau mencapai 95,09% dari total pagu anggaran dan sisa anggarannya Rp.2.505.236.545,- (dua milyard lima ratus lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 4,91% dari total anggaran dan realisasi fisik sebesar 99,75%.

Untuk mendukung tujuan utama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi dapat diukur capaian kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU Perangkat Daerah. Dari hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama diperoleh data sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat dalam Pemenuhan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90,00	97,41	108,23
2.	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Utama Khusunya Padi	Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,22	100,00
3.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Produktivitas Perikanan	Kg/m2	6,80	6,80	100,00
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,73	72,65	94,68
Rata-Rata						100,73

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan total realisasi di tahun 2024 sebesar 97,41 atau mencapai 108,23% dari target yang sudah ditentukan di tahun 2024 sebesar 90,00, berarti sudah melebihi target (sangat baik).

Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi) dengan total realisasi di tahun 2024 sebesar 6,22 ton/ha atau mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan di tahun 2024 sebesar 6,22 ton/ha, berarti sudah memenuhi target (sangat baik).

Produktivitas Perikanan dengan total realisasi di tahun 2024 sebesar 6,80 kg/m2 atau mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan di tahun 2024 sebesar 6,80 kg/m2, berarti sudah sesuai/ memenuhi target (sangat baik).

Nilai SAKIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan pada tahun 2024 sebesar 72,65 atau mencapai 94,68% dari target yang sudah ditentukan di tahun 2024 yaitu sebesar 76,73, berarti tidak memenuhi target/dibawah target (tapi masih kategori baik).

Perbandingan antara target dengan realisasi capaian IKU Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik 2.1 sebagai berikut:

Grafik 2.1
Perbandingan Target dengan Capaian Realisasi IKU Tahun 2024

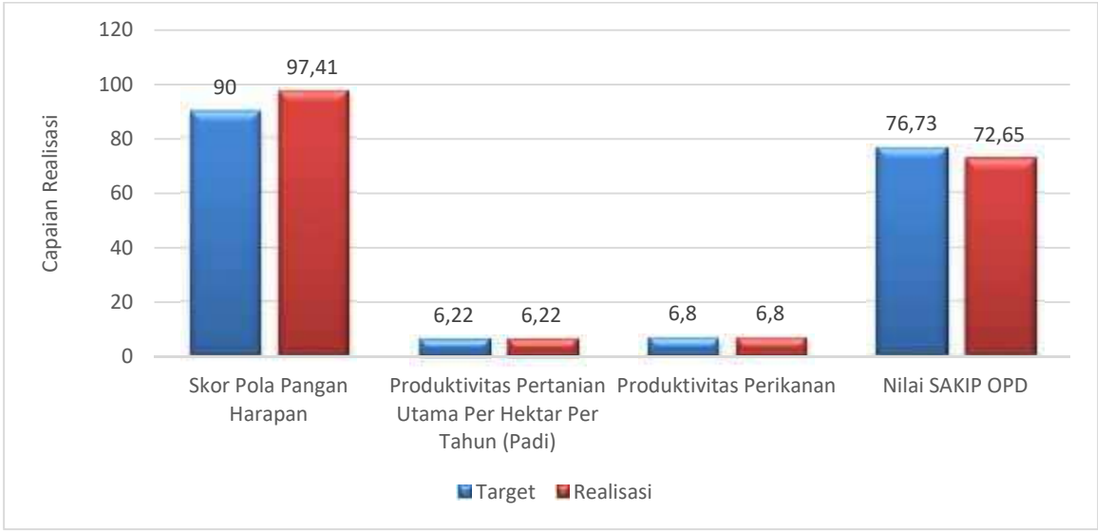

Sedangkan Perbandingan antara realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun ini (tahun 2024) dengan tahun lalu (tahun 2023) dan beberapa tahun terakhir (tahun 2022) dapat dilihat seperti pada tabel 2.2 dan grafik 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Capaian
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Konsumsi Masyarakat dalam Pemenuhan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,20	88,70	97,41
2.	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Utama Khusunya Padi	Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,22	6,22
3.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan	Produktivitas Perikanan	Kg/m2	6,60	6,65	6,80
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70,70	71,70	72,65

Grafik 2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022-2024

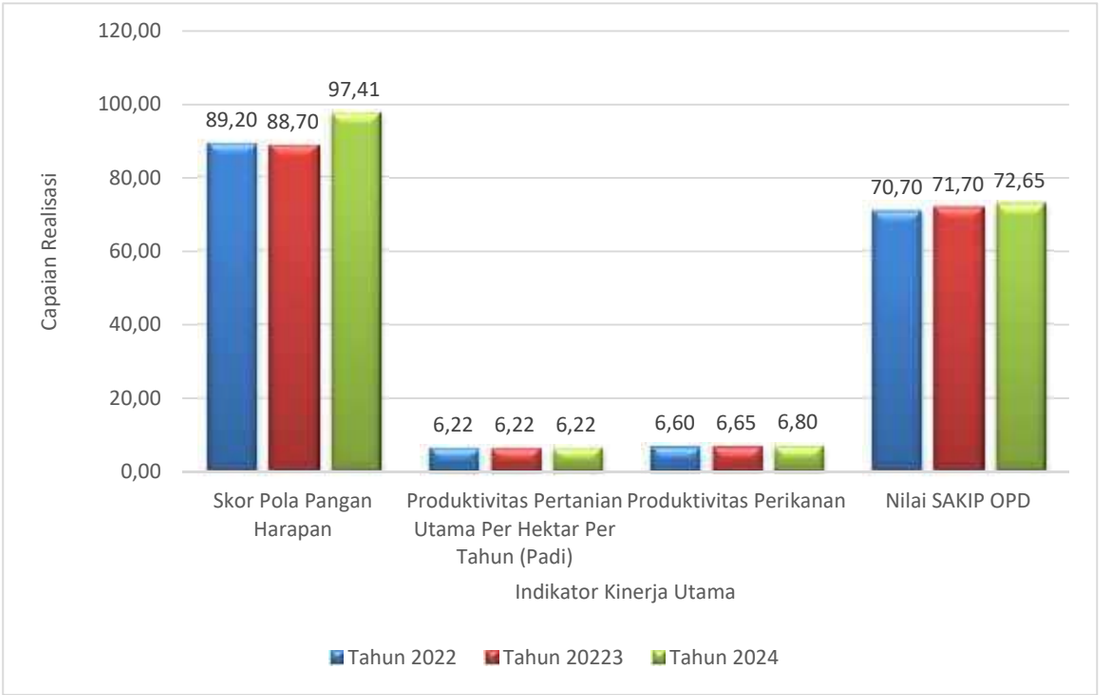

Untuk mencapai sasaran strategis 1 meningkatnya konsumsi masyarakat dalam pemenuhan pangan, telah ditetapkan indikator yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 1 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7	(8)	(9)
1	Skor Pola Pangan Harapan	89,20	88,70	90,00	97,41	108,23%	91,00	107,04%
Persentase Capaian Sasaran Strategis 1.						**108,23%**		**107,04%**

Sumber Data: Statistik Bidang Ketahanan Pangan dan BPS

Pada Tahun 2024 sebagai tahun pertama/kesatu Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026. Kenaikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 cukup signifikan, salah satunya disebabkan oleh keberhasilan pencanangan "Gerakan Kenyang Tidak Harus Nasi". Gerakan tersebut didukung dengan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 500/3.405.1.4 Tahun 2024 tentang Gerakan Kenyang Tidak Harus Nasi, dimana salah satu pointnya diserukan agar dalam suguhan rapat-rapat di hari Rabu diwajibkan menggunakan menu non beras. Gerakan tersebut terus disosialisasikan oleh seluruh stakeholder, khususnya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan baik melalui berbagai penyuluhan atau promosi aneka olahan pangan lokal pengganti nasi dan masyarakat terus di dorong untuk melakukan penganekaragaman pangan tidak tergantung pada nasi tapi diganti dengan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan aneka umbi lainnya yang ada di sekitar masyarakat.

Selain itu produksi ubi kayu dan ubi jalar di Kabupaten Karanganyar sangat mendukung bagi gerakan kenyang tidak harus nasi tersebut.

Kabupaten Karanganyar memiliki produk ubi kayu/singkong spesifik yang hanya dapat tumbuh optimal di Karanganyar yaitu varietas Jaraktawa, singkong yang terkenal pulen dan gurih.

Kabupaten karanganyar juga merupakan sentra dan barometer terhadap produksi ubi jalar, semuanya itu ditambah dengan sudah banyaknya UMKM yang mengolah pangan lokal menjadi berbagai olahan yang punya cita rasa yang mantap.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 adalah :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
   b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota; dan
   c. Pelaksanaan Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp.143.350.000,- atau 0,28% dari total pagu belanja langsung sebesar Rp.51.049.841.814,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah Rp.142.753.000,- atau sebesar 99,58% dari pagu anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 sehingga terdapat selisih Rp.597.000,- (0,42%). Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 ini menyumbang 0,29% dari seluruh realisasi anggaran yang sebesar Rp.48.544.605.269,-.

Untuk mencapai sasaran strategis 2 meningkatnya produktivitas pertanian utama khususnya padi, telah ditetapkan indikator yaitu Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi).

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 2 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.
Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	6,22 ton/ha	6,22 ton/ha	6,22 ton/ha	6,22 ton/ha	100%	6,24 ton/ha	99,68%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 2.						**100%**		**99,68%**

Sumber Data : Statistik Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Produktivitas Pertanian Utama (Padi) pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan mencapai target (100%). Produktivitas Padi dapat dihitung dari hail produksi pada tahun berjalan dibagi dengan luas panen. Hasil produksi padi di tahun 2024 sebesar 343.996 ton. dan luas panen sebesar 55.261 Hektar sehingga didapat produktivitasnya 6,22 ton/ha.

Upaya yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian antara lain didukung oleh kegiatan bantuan/hibah kepada masyarakat dalam bentuk alat mesin pertanian/perkebunan dan sarana produksi pertanian berupa pompa air, handsprayer, cultivator, kendaraan roda 3, perajang tembakau, benih, bibit, pupuk, dan lain-lain serta prasarana pertanian berupa irigasi air tanah dalam (IATD), DAM Parit, jalan usaha tani (JUT) dan lain-lain.

Dengan berbagai dukungan tersebut diupayakan dapat meningkatkan indeks pertanaman. Indeks pertanaman merupakan frekuensi tanaman yang dapat ditanam selama satu tahun. Dengan meningkatnya indeks pertanaman maka akan meningkatkan luas tanam sehingga produksi pun meningkat. Misalnya lahan padi yang biasanya hanya tanam padi dua kali setahun, diharapkan bisa meningkat menjadi tiga kali dalam setahun. Dengan demikian produksi pun meningkat.

Peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Karanganyar didukung oleh berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian produktivitas pertanian khususnya padi adalah sebagai berikut:

- Iklim di tahun 2024 yang kurang dapat diprediksi sehingga mempengaruhi curah hujan;
- Pentingnya pertanian organik, belum menjangkau seluruh petani;
- Aktivitas Kelompok tani belum menjangkau seluruh petani.

Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah sebagai berikut:

- Selalu mempertimbangkan aspek perubahan iklim dalam proses perencanaan program dan kegiatan;
- Perluasan jangkauan pengembangan kawasan pertanian organic;
- Peningkatan profesionalisme pengelolaan kelembagaan pelaku pertanian.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 adalah :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan yang terdiri dari :
   a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; dan
   b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan yang terdiri dari :
   a. Pembangunan Prasarana Pertanian; dan
   b. Pengembangan Prasarana Pertanian.
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner, dengan kegiatan yang terdiri dari :
   a. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota;
   b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan
   c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan yang terdiri dari :
   a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
5. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan yang terdiri dari :
   a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar Rp.30.316.079.850,- atau sebesar 59,38% dari total anggaran belanja langsung Rp.51.049.841.814,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah Rp.28.300.243.643,- atau sebesar 97,49% dari pagu anggaran yang digunakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran startegis 2. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.2.015.836.207,- (6,65%).

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 ini menyumbang 58,30% dari seluruh realisasi anggaran yang sebesar Rp.48.544.605.269,-.

Untuk mencapai sasaran strategis 3 meningkatnya produktivitas perikanan, telah ditetapkan indikator yaitu : produktivitas perikanan. Produktivitas perikanan merupakan penghitungan dari hasil produksi perikanan (produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya) dibagi luas lahan panen.

Hasil produksi perikanan sebesar 1.940.692 kg dan luas lahan panen sebesar 285.769 m2, sehingga didapatkan hasil produktivitas perikanan sebesar 6,80 kg/m2.

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 3 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7	(8)	(9)
1	Produktivitas Perikanan	6,60 kg/m2	6,70 kg/m2	6,80 kg/m2	6,80 kg/m2	100%	8,00 kg/m2	85%
Persentase Capaian Sasaran Strategis 3.						**100 %**		**85%**

Sumber Data: Statistik Bidang Perikanan

Keberhasilan pencapaian target pada sasaran 3, merupakan upaya bersama pada Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan budidaya perikanan dengan terus menggali potensi yang ada dan menerapkan teknologi sehingga produksi meningkat. Serta upaya promosi hasil perikanan guna meningkatkan gemar makan ikan di Kabupaten Karanganyar.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 3, pada indikator produktivitas perikanan budidaya, budaya kerja pembudidaya yang masih hanya sebagai kerja sambilan, membudidaya ikan perlu ketelatenan tersendiri yang masih belum menarik minat bagi masyarakat.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala: mendorong masyarakat untuk bisa meningkatkan minat berbudidaya ikan melalui percontohan-percontohan pada kelompok yang sudah ada, dengan penerapan teknologi yang up to date. Keberhasilan kelompok yang sudah ada bisa menarik yang lain untuk berbudidaya ikan.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil; dan
   b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
2. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Liannya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah sebesar Rp.713.000.000,- atau 1,40 % dari total pagu belanja langsung sebesar Rp.51.049.841.814,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 adalah Rp.709.212.550,- atau sebesar 99,46% dari anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3, Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.3.787.450,- (0,54%).

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3 ini menyumbang 1,46% dari seluruh realisasi anggaran yang sebesar Rp.48.544.605.269,-.

Untuk mencapai Sasaran Strategis 4 yaitu meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah telah ditetapkan indikator yaitu: Nilai SAKIP OPD. Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 4 tercantum pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4
Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2022	Kondisi Awal Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap target akhir Renstra 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP	70,70	71,70	76,73	72,65	94,68%	77,23	94,07%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis 3.						**94,68%**		**94,07%**

Sumber Data : Hasil LHE dari Inspektorat nilai SAKIP tahun 2024

Pada Tahun 2024 capaian kinerja indikator nilai SAKIP (nilai SAKIP tahun 2023) lebih tinggi dibanding nilai SAKIP tahun 2022 tetapi masih lebih rendah daripada nilai SAKIP tahun 2021, hal ini dikarenakan sejak tahun 2022 untuk penilaian SAKIP dari hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang dikeluarkan dari Inspektorat, indikator penilaiannya berubah.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan sebagai berikut :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Administrasi Pendapatan Daerah Keuangan Perangkat Daerah;
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah sebesar Rp.19.877.411.964,- atau 38.94% dari total pagu belanja langsung sebesar Rp.51.049.841.814,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 adalah Rp.19.392.396.076 atau sebesar 97,56% dari anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4, Sehingga terdapat selisih sebesar Rp.485.015.888,- (2,44%).

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 4 ini menyumbang 39,95% dari seluruh realisasi anggaran yang sebesar Rp.48.544.605.269,-.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
2				**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**									
2	**09**			**Urusan Bidang Pangan**									
2	**09**	**003**		**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Angka konsumsi Energi (AKE)**	**1945 kalori/kapita/ tahun**	**1873 kalori/kapita/ tahun**	**1940 kalori/kapita/ tahun**	**2201.43 kalori/kapital/t ahun**	**113,47%**	**1945 kalori/kapita/ tahun**	**2201.43 kalori/kapital/t ahun (tahun 2024)**	**113,18%**
					Angka Konsumsi Protein (AKP)	56 gram/kapita/ta hun	52,5 gram/kapita/ tahun	55,5 gram/kapita/ tahun	63.93 gram/kapital/tah un	115,19%	56 gram/kapita/ tahun	63.93 gram/kapital/tah un (tahun 2024)	114,16%
					Indeks ketahan pangan (IKP)	88,5	88,48	88	89.67	101,90%	88,5	89.67 (2024)	101,32%
2	09	003	2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Laporan stok dan pasokan pangan	12 bulan	12 komoditas	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
	09	003	2.02	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan kabupaten yang disediakan	19,2 ton	19,2 ton -	19,2 ton	20,5 ton -	106,77%	19,2 ton	23.6 ton	122,91%-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
2	09	003	2.04	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	2 kegiatan	1 kegiatan	33,33%
2	**09**	**004**		**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**Persentase desa rentan pangan**	**13,56%**	**9,60%**	**14,12 %**	**2,82%**	**500,71%**	**13.56%**	**2,26%**	**600%**
2	09	004	2.02	Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	-	4 desa	-	-	-	-	-	-
					Jumlah koordinasi penanganan kerawanan pangan	1 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
2	**09**	**005**		**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**Jumlah pangan segar yang diuji**	**-**	**4 komoditas dan 2 pasar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Persentase Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat	**45,28%**	**-**	**37.74%**	**42,1%**	**111,55%**	**45.28%**	**42.1% (tahun 2024)**	**92,98%**
2	09	005	2.01	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangn segar daerah kabupaten/kota	Jumlah pangan segar yang diuji	-	4 komoditas dan 2 pasar	-	-	-	-	-	-
					Jumlah pangan segar yang diawasi	24 komoditas	-	24 komoditas	24 komoditas	100%	24 komoditas	12 komoditas	50%
3				**Urusan pemerintahan Pilihan**									
3	**25**			**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**									
3	**25**	**003**		**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**Produksi perikanan tangkap**	**-**	**527.151 kg**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3	25	003	2.01	Pengelolaan penangkapan ikan di	Produksi perikanan	-	527.151 kg	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
				wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	tangkap								
3	**25**	**004**		**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi perikanan budidaya**	**1.945.102 kg**	**1.925.865 kg**	**1.935.425 kg**	**1.940.692 kg**	**100,27%**	**1.945.102 kg**	**980041 kg**	**50.39%**
3	25	004	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudi daya ikan kecil yang memperoleh pemberdayaan	15 kelompok	-	10 Kelompok	10 kelompok	100%	15 kelompok	1 kelompok	6,66%
3	25	004	2.04	Pengelolaan pembudidayaan ikan	Produksi perikanan budidaya	-	1.925.865 kg	-	-	-	-	-	-
					Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang terkelola	2 unit	-	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
3	**25**	**05**		**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**	**Persetanse perairan umum daratan yang diawasi**	**30%**	**-**	**25%**	**25%**	**100%**	**30%**	**17.65%**	**58.83%**
3	25	05	2.01	Pengawasan sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah PUD yang diawasi	5 lokasi	-	5 Lokasi	5 lokasi	100%	5 lokasi	2 lokasi	40%
3	**25**	**006**		**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**Prosentase produk perikanan yang dipromosikan**	**65%**	**58,62%**	**60%**	**60%**	**100%**	**65%**	**17.65%**	**27.15%**
3	25	006	2.02	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala	Prosentase produk perikanan yang dipromosikan	-	58,62%	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
				mikro dan kecil									
					Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina	5 unit	-	5 unit	5 unit	100%	5 unit	2 unit	40%
3	**27**			**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**									
3	**27**	**001**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP**	**-**	**71,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**86%**	**-**	**85%**	**80%**	**94,12%**	**86%**	**-**	**-**
3	27	001	2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	-	10 Dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	6 dokumen	60%
3	27	001	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Jumlah laporan dokumen keuangan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
3	27	001	2.04	Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
					Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
3	27	001	2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	27	001	2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%%	50%%
3	27	001	2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	3 unit	-	3 unit	3 unit	100%	7 unit	4 unit	57,14%
3	27	001	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	-	100%	100%	100%	100%	50%%	50%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
3	27	001	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	-	71,70	-	-	-	-	-	-
					Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	31 unit	-	252 unit	252 unit	-	31 unit	20 unit	64,51%
3	**27**	**002**		**Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian**	**Persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik**	**-**	**67%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Produksi Tanaman Pangan Utama:								
					- Padi	**342.110 ton**	**-**	**342.090 ton**	**343.996 ton**	**100,55%**	**342.110 ton**	**165690 ton**	**48.43%**
					- jagung	**20.920 ton**	**-**	**20.885 ton**	**27.264 ton**	**130,54%**	**20.920 ton**	**17810 ton**	**85.13%**
					Produksi Hortikultura Uanggulan :								
					- Jahe	**4.390 ton**	**-**	**4.365 ton**	**5.739 ton**	**131,48%**	**4.390 ton**	**2550 ton**	**58.09%**
					- Buah durian	**13.500 ton**	**-**	**13.470 ton**	**11.716 ton**	**86,98%**	**13.500 ton**	**4446 ton**	**32.93%**
					Produksi Perkebunan Unggulan :								
					- Kopi	**27,50 ton**	**-**	**27 ton**	**27 ton**	**100%**	**27.5 ton**	**-**	**-**
					- Tembakau	**62,20 ton**	**-**	**61 ton**	**61 ton**	**100%**	**62.2 ton**	**-**	**-**
					Jumlah populasi :								
					- Sapi	**68.909 ekor**	**67.910 ekor**	**68.566 ekor**	**55.183 ekor**	**80,48%**	**68.909 ekor**	**55098 ekor**	**79.96%**
					- Kambing/domba	**154.929 ekor**	**152.123 ekor**	**153.396 ekor**	**153.569 ekor**	**100,11%**	**154.929 ekor**	**153569 ekor**	**99.12%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
					- Ayam	**11.690.960 ekor**	**8.014.617 ekor**	**11.575.208 ekor**	**12.520.658 ekor**	**108,16%**	**11.690.960 ekor**	**6406404 ekor**	**54.80%**
					- kelinci	**13.505 ekor**	**13.316 ekor**	**13.438 ekor**	**6.556 ekor**	**48,79%**	**13.505 ekor**	**6299 ekor**	**46.64%**
3	27	002	2.01	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Kecamatan yang Diawasi	17 kecamatan	17 kecamatan	17 kecamatan	17 kecamatan	100%	17 kecamatan	1 kecamatan	5.88%
3	27	002	2.02	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	Terkelolanya sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah SDG yang dikelola	4 SDG	-	4 SDG	4 SDG	100%	4 SDG	2 SDG	50%
	27	**003**		**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana dalam kondisi baik**	**-**	**80%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	**31,34%**	**-**	**31.01%**	**30,48**	**98,29%**	**31,34%**	**-**	**-**
3	27	003	2.01	Pengembangan Prasarana pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	-	-
3	27	003	2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik	-	80%	-	-	-	-	-	-
					Jumlah prasarana pertanian yang	19 unit	-	19 unit	19 unit	100%	25 unit	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
					dibangun								
3	**27**	**004**		**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Angka kesakitan ternak besar (%)**	**7,7%**	**8%**	**7,9%**	**7,9%**	**100%**	**7,7%**	**-**	**-**
					Angka kesakitan ternak kecil (%)	**16,10%**	**16,4%**	**16,2%**	**16,2%**	**100%**	**16,1%**	**-**	**-**
					Angka kesakitan unggas (%)	**14,70%**	**15%**	**14,8%**	**14,8%**	**100%**	**14,7%**	**-**	**-**
3	27	004	2.01	Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
					Jumlah jenis kasus zoonosis	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	1 jenis	33,33%
3	27	004	2.03	Pengelolaan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium/ jasa medik veteriner	4 jenis	-	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
3	27	004	2.04	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Terlaksananya kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		**Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025 Semester I**	**Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) tahun berjalan 2025 Semester I**
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
					Jumlah produk peternakan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal)	2 jenis	-	4 jenis	4 jenis	100%	2 jenis	1 jenis	50%
3	**27**	**006**		**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**Prosentase bencana pertanian yang tertangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	006	2.01	Pengendalian dan penanggulanganbencana pertanian kabupaten/kota	Prosentase bencana pertanian yang tertangani	-	100%	-	-	-	-	-	-
					Jumlah wilayah bencana pertanian yang dikendalikan/ ditanggulangi	17 kecamatan	-	17 kecamatan	17 kecamatan	100%	17 kecamatan	10 kecamatan	58,82%
3	**27**	**007**		**Program Penyuluhan Pertanian**	**Capaian kelompok tani yang aktif**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
3	27	007	2.01	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	Capaian kelompok tani yang aktif	-	100%	-	-	-	-	-	-
					Jumlah kelompok tani yang dibina	758 kelompok	-	749 kelompok	749 kelompok	100%	758 kelompok	398 kelompok	52,51%

2.2. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Indikator yang Ditentukan dalam SPM maupun Indikator Kinerja Kunci

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dalam pelayanan kepada masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk mengembangkan sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan dan sektor pangan di Kabupaten Karanganyar melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun capaian kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Capaian Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	Capaian (%)
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**100,00**
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	100,00
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100,00
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesui dengan Angka Kecukupan Gizi	100,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**100,00**
4	Penanganan Kerawanan pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**100,00**
5	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**100,00**
6	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	100,00
7	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100,00
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**100,00**
8	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Liannya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	100,00
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**100,00**
9	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**100,00**
10	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00

NO	KEGIATAN	Capaian (%)
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00
12	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100,00
13	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00
14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00
15	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**99,25**
18	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100,00
19	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	98,50
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**99,17**
20	Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00
21	Pembangunan Prasarana Pertanian	98,33
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**100,00**
22	Penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00
23	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00
24	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**97,50**
25	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	97,50
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**100,00**
26	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00
	Jumlah/Rata-Rata	**99,66**

2.2.1. Kesulitan/kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya

Kesulitan/kendala yang dihadapi OPD adalah :

a. Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun
   Ketersediaan pangan (*food availability*) merupakan faktor yang penting dalam ketahanan pangan. Ketersediaan pangan merupakan kondisi terpenuhinya rata-rata pasokan pangan yang cukup tersedia setiap saat.
b. Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata
   Keterjangkauan pangan merupakan kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk memperoleh pangan. Hal ini terkait dengan kemampuan berproduksi atau kemampuan

membeli pangan. Harga pangan harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.

c. Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

   Setiap individu memerlukan pangan yang berkualitas agar dapat hidup sehat dan produktif. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan pola pangan yang memenuhi prinsip B2SA, yaitu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.

   Beragam artinya pangan yang dikonsumsi berbagai macam, baik hewani maupun nabati, baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Setiap jenis/kelompok pangan mempunyai kelebihan atau kekurangan nutrisi/gizi tertentu, sehingga dengan mengkonsumsi pangan yang beragam maka nutrisi/gizi dari berbagai pangan saling menutupi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita.

   Bergizi artinya pangan yang dikonsumsi harus mengandung gizi. Berimbang artinya pangan yang dikonsumsi harus seimbang dari berbagia jenis/kelompok pangan serta sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral

   Aman Artinya Pangan yang dikonsumsi bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat menganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan

   Namun pada kenyataannya di Kabupaten Karanganyar, pola pangan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi pola B2SA.

d. Masih ada bahan pangan segar tidak sehat beredar di masyarakat

   Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa semua pangan segar dan olahan harus aman dikonsumsi. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dari agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam kenyataannya di masyarakat masih ditemukan produk pangan segar yang masih berbahaya.

e. Iklim yang tidak dapat diprediksi dengan pasti mengakibatkan datangnya musim penghujan yang juga tidak bisa diprediksi, sekaligus memicu serangan hama.

f. Kemampuan dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil masih perlu ditingkatkan.

g. Kelembagaan petani yang sepenuhnya belum berperan aktif dalam membantu permasalahan anggota.

h. Terbatasnya intensitas penyelenggaraan pelatihan perikanan baik bagi petugas/penyuluh maupun pelaku utama/usaha perikanan, sehingga wawasan dan pengetahuan kurang berkembang.

i. Tingginya mobilitas ternak antar daerah yang meningkatkan resiko penyebaran penyakit hewan menular.

Adapun cara mengatasinya adalah :

a. Ketersediaan pangan bila dilihat dari jumlah panen komoditas pangan memang tidak merata, hal ini terkait dengan musim tanam, dimana dalam satu tahun trdapat 3 (tiga) kali musim tanam.
   Di setiap awal musim tanam, jumlah ketersediaan pangan yang berasal dari panenan otomatis rendah karena di lapangan, hampir sebagian besar petani baru saja menanam dan belum ada panen.
   Solusinya adalah petani/ kelompok tani didorong untuk memanfaatkan lumbung-lumbung pangan yang ada di masyarakat dengan mengisi lumbng saat panen dan dapat dimanfaatkan sampai dengan masa panen berikutnya.
b. Solusi agar harga pangan terjangkau adalah dengan mengembangkan Toko Tani Indonesia (TTI) dimana TTI menerima beras dari poktan/ gapoktan-gapoktan yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan menjualnya di bawah harga pasar, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli beras dapat dilayani di TTI.
c. Nilai PPH Kabupaten Karanganyar tinggi bahkan Peringkat 3 Tingkat Nasional dan Peringkat 2 Tingkat Provinsi Jawa Tengah tetapi masih ada kendala kurang beragamnya masyarakat dalam konsumsi pangannya.
   Solusinya adalah bekerja sama dengan TP PKK khususnya Pokja III dengan mengadakan sosialisasi/ penyuluhan tentang pentingnya penerapan B_2SA dalam penyusunan menu B_2SA. Melaksaakan lomba cipta menu B_2SA berbahan baku lokal setiap tahunnya untuk mendorong penerapan B_2SA di masyarakat.
d. Solusi permasalahan ada bahan pangan segar tidak sehat beredar di masyarakat adalah dengan malaksanakan sosialisasi/ penyuluhan tentang pengingnya keamanan pangan segar kepada para produsen pangan segar asal tumbuhan. Mendampingi dan membimbing para produsen pangan segar untuk mendapatkan Sertifikat Pangan Segar Asal Tanaman.
e. Iklim yang tidak bisa diprediksi dapat menganggu masa tanam karena ketersediaan air yang tidak dapat diprediksi pula. Permasalahan ini di atasi dengan pembangunan infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan air irigasi, antara lain pembangunan irigasi air tanah dalam, pembangunan embung, dan dam parit.
   Iklim yang tidak dapat diprediksi juga memicu serangan hama, hal ini diatasi dengan rutinitas monitoring serangan dan penyediaan stok pestisida.
f. Kemampuan dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil diatasi dengan penyelenggaraan pelatihan dan bantuan alat pasca panen dan pengolahan hasil,
g. Upaya mengaktifkan kelembagaan petani adalah dengan menyelenggarakan pertemuan rutin kelompok tani dan mendorong keaktifan anggota melalui penyuluh pertanian.
h. Penyelenggaraan pelatihan perikanan sebaiknya diadakan untuk petugas/penyuluh maupun pelaku utama/usaha perikanan, sehingga petugas/penyuluh maupun pelaku

utama/usaha perikanan mendapatkan wawasan dan pengetahuan lebih mengenai bidang perikanan.

i. Untuk mengantisipasi terjadinya resiko penyebaran penyakit hewan menular karena mobilitas ternak antar daerah yang tinggi adalah dengan melakukan pemeriksan terhadap semua ternak sebelum dilakukan pengiriman ke antar daerah. Saat ternak dikirimkan sudah dipastikan bahwa ternak tersebut sudah dilakukan pemeriksaan yang menunjukkan bahwa ternak tersebut dalam keadaan sehat.

2.2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dispertan PP adalah unsur pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian, pangan dan perikanan. Kepala Dispertan sebagaimana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi pencapaian pertanian, pangan dan perikanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)/ Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024
Indikator Kinerja Utama (IKU)				
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,00	97,41	108,23%
Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,22	100%
Produktivitas Perikanan	Kg/m2	6,8	6,8	100%
Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,73	72,65	94,68%
Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,00	97,41	108,23%
Produktivitas Pertanian Utama Per Hektar Per Tahun (Padi)	Ton/Ha	6,22	6,22	100%
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	10	236,84	2.368,4%
Produksi Peternakan Utama (daging sapi, daging ayam, dan telur ayam)	Kg	21.934.778	31.156.635	142,04%
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	(x1.000 ton)	2,37	2,47	104,22%
Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapital/Tahun	23	23,61	102,65%

Berdasarkan Tabel 2.9 pencapaian kinerja untuk indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular terlalu signifikan karena pada tahun 2024 terjadi peningkatan penyakit menular di banding tahun sebelumnya (2023). Tahun 2024 ada 64 kejadian/kasus dan tahun 2023 terdapat 19 kejadian/kasus penyakit hewan menular, ada peningkatan sebanyak 45 kejadian/kasus. hal ini terjadi karena pada tahun 2023 vaksinasi dilaksanakan selama 12 bulan dalam 1 tahun (vaksin droping dari Pusat) sedangkan tahun 2024 pelaksanaan vaksinasi hanya di awal tahun (Januari-Maret) dengan menghabiskan stok vaksin tahun 2023, dengan berjalannya waktu, kasus penyakit menular meningkat dan baru dilaksanakan vaksinasi pada bulan September–Oktober tahun 2024 (vaksin droping dari Pusat), sehingga menyebabkan kasus penyakit hewan menular lebih tinggi tahun 2024.

Untuk saat ini vaksin PMK, kami masih mengandalkan droping dari Pusat, karena keterbatasan anggaran di OPD, untuk 1 (satu) dosis vaksin Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila dikalikan dengan jumlah ternak jumlahnya sangat tinggi.

2.3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024

Prestasi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terdapat dalam tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2.10
Prestasi yang dicapai oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	2024	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik dan di atas Skor PPH Nasional Tahun 2024 (Peringkat 2 Tingkat Provinsi Tengah dan Peringkat 3 Tingkat Nasional)	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia
2.	2023	NIHIL	
3.	2022	NIHIL	
4.	2021	Kabupaten dengan Ketahanan Pangan Terbaik Periode 2018-2020, Jakarta, 2 April 2021	Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Jakarta 7 April 2021

2.4. Isu-isu Penting/Strategis dalam Penyelenggaraan Tupoksi

2.4.1. Kelompok Sasaran Layanan

Dispertan PP Kabupaten Karanganyar memiliki beragam program dan layanan yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran dalam pertanian, perikanan dan ketahanan pangan. Berikut adalah tiga kelompok sasaran utama yang menjadi fokus layanan:

a. Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani
Pertanian disi dalam arti luas, sehingga meliputi petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan juga termasuk peternak.

b. Kelompok pembudidaya ikan
Kelompok pembudidaya ikan meliputi usaha pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan air tawar.

c. Pelaku usaha agribisnis
Dalam hal ini meliputi pengusaha dibidang pertanian meliputi distributor pupuk dan benih. Selain itu UMKM pengolah hasil pertanian dan pelaku usaha pangan lokal

2.4.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perlu adanya identifikasi permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dan berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu :

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura:
   a. berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi non pertanian;
   b. terbatas dan tidak meratanya ketersediaan benih yang berkualitas;
   c. belum optimalnya penanganan organisme penggangu tumbuhan;
   d. belum optimalnya produktivitas pertanian; dan
   e. perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.
2. Bidang Perkebunan:
   a. tidak adanya kepastian harga hasil perkebunan;
   b. kurangnya akses pasar dan informasi harga; dan
   c. terbatasnya pengolahan pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan.
3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan:
   a. belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi;
   b. belum memadainya jalan usaha tani;
   c. belum meratanya pemberian Alsintan pada kelompok tani;
   d. belum optimalnya penyerapan pupuk bersubsidi;
   e. terbatasnya jumlah penyuluh pertanian; dan
   f. belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
   a. belum optimalnya penanganan penyakit ternak;
   b. terbatasnya sarana dan prasarana peternakan;
   c. belum optimalnya produksi peternakan;
   d. keterbatasan tenaga medis hewan; dan
   e. belum tersedianya laboratorium kesehatan hewan.
5. Bidang Ketahanan Pangan:
   a. belum optimalnya penanganan daerah rentan pangan;
   b. belum meratanya distribusi pangan;
   c. belum optimalnya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
   d. belum optimalnya sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang; dan
   e. belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.
6. Bidang Perikanan:
   a. belum optimalnya hasil perikanan;
   b. hasil olahan perikanan belum sesuai standar yang ada; dan
   c. perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.

Berikut pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum Optimalnya kontribusi pertanian dan perikanan dalam perekonomian dan ketahanan pangan	Rendahnya produktivitas dan keberlanjutan produksi tanaman pangan dan hortikultura	a. Bertambahnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan pertanian b. Terbatas dan tidak meratanya ketersediaan benih unggul c. Belum optimalnya penanganan organisme perusak tanaman

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			d. Produktivitas lahan yang menurun
2		Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan	a. Tidak adanya kepastian harga hasil perkebunan b. Kurangnya akses pasar dan informasi harga c. Terbatasnya pengolahan pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan
3		Belum memadainya dukungan sarana prasarana untuk peningkatan produksi pertanian	a. Belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi b. Belum memadainya jalan usaha tani c. Belum meratanya pemberian Alsintan pada kelompok tani d.
4		Rendahnya produktivitas dan kesehatan populasi ternak	a. Belum optimalnya penanganan penyakit ternak b. Terbatasnya sarana dan prasarana kandang dan pakan ternak c. Masih rendahnya populasi ternak d. Keterbatasan tenaga medis hewan dan laboratorium uji kesehatan hewan.
5		Belum terjaminnya stabilitas dan akses pangan yang berkualitas bagi masyarakat	a. Belum optimalnya penanganan daerah rentan pangan b. Belum meratanya distribusi pangan c. Belum optimalnya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi pangan yang sehat dan beragam
6		Rendahnya produktivitas dan kualitas hasil perikanan	a. Belum optimalnya hasil perikanan b. Hasil olahan perikanan belum sesuai standar yang ada

2.4.3. Isu Strategis

Penyusunan isu strategis harus melihat kesenjangan antara kondisi nyata dan capaian ideal. Hal ini mencakup permasalahan mendasar yang jika tidak ditangani akan menghambat potensi daerah secara signifikan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Perumusan isu strategis Dispertan PP memperhatikan permasalahan yang ada di Dispertan PP, Isu KLHS, Isu Nasional dan Isu Regional, berikut tabel kerja perumusan isu strategis Dispertan PP.

Tabel 2.12
Teknik menyimpulkan Isu Strategis Dispertan PP

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Hasil pertanian yang beragam dan menjadi salah satu komoditas utama.	Belum optimalnya pengelolaan pertanian dan perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan daeah	Penurunan Ketahanan Pangan	Produksi dan konsumsi berkelanjutan	Ketahanan Sosial, Budaya dan ekologi: Isu Agama, Isu Budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, Pangan, energi, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Belum Optimalnya kontribusi pertanian dan perikanan dalam perekonomian dan ketahanan pangan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJMD, isu strategis Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Belum Optimalnya kontribusi pertanian dan perikanan dalam perekonomian dan ketahanan pangan".

Sebagai salah satu penyumbang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Karanganyar Pertanian dan Perikanan belum optimal, bahkan cenderung mengalami penurunan. Selain tu dalam upaya mendukung ketahanan pangan daerah peran pertanian dan perikanan juga belum optimal, hal ini karena hasil pertanian dan perikanan lebih banyak dikirim keluar daerah.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 seperti pada tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat. Pnting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN				**23.878.816.400**					**18.064.860.990**	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**70.000**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		**Skor Pola Pangan Harapan**	**91**	**106,480**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**		**Skor Pola Pangan Harapan**	**91**	**70.000**	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase lumbung pangan yang difasilitasi**	**100%**	**0**	
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah infrastruktur kemandirian dan cadangan pangan**	**27 Unit**	**0**	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	**0 laporan**	**0**	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	**90**		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	**90**	**55.000**	

		Angka Konsumsi Protein (AKP)	**56.5 gram/kapita /tahun**				**Angka Konsumsi Protein (AKP)**	**64.2 gram/kapita /tahun**		
		Angka Konsumsi Energi (AKE);	**1950 kalori/kapita/tahun**				**Angka Konsumsi Energi (AKE);**	**2201.8 kalori/kapita/tahun**		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Laporan stok dan pasokan pangan**	**12 Laporan**	**13,310**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan persediaan dan stabilitas harga pangan**	**12 Laporan**	**5,000**	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	12 laporan	13,310	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	12 laporan	5.000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah cadangan pangan kabupaten yang disediakan/dikelola**	**19,2 ton**	**6.655**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah cadangan pangan kabupaten yang disediakan/dikelola**	**23,65 ton**	**20.000**	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang terpelihara	5 ton	6.655	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	2.1 Ton	20,000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi**	**3 kegiatan**	**53,240**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**1 Laporan**	**30.000**	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam	3 laporan	53,240	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman	1 laporan	30.000	

Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	semua kelurahan	penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal			Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	semua kelurahan	konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Prosentase desa rawan pangan**	**12.99%**	**13.310**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**2.78%**	**5.000**	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah koordinasi penanganan kerawanan pangan**	**1 kali**	**13.310**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota**	**1 Laporan**	**5.000**	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganankerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	1 laporan	**13.310**	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	1 laporan	5.000	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase Pelaku Usaha PSAT-PDUK yang memiliki sertifikat**	**52,83%**	**19,965**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah sertifikat izin edar PSAT yang diterbitkan**	**176 Sertifikat**	**10.000**	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah pangan segar yang diawasi**	**24 komoditas**	**19,965**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah Pengawasan Keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota**	**2 Laporan**	**10.000**	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	6,655	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	5.000	
Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan	12 dokumen	13,310	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	5.000	

	semua kelurahan	mutu pangan segar asal tumbuhan				semua kelurahan				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**17.994.860.990**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		**Produktivitas Perikanan**	**8 kg/m2**	**146,825**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**		**Produktivitas Perikanan**	**7 kg/m2**	**95.000**	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Produksi perikanan budidaya**	**1.954.828 kg**	**47.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah Produksi perikanan budidaya**	**1.948.990 kg**	**55.000**	
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah pembudidaya ikan kecil yang memperoleh pemberdayaan**	**20 kelompok**	**3,500**	**Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**5 kelompok**	**3.000**	
Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah kelompok pembudi daya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	20 kelompok	3.500	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 kelompok	3.000	
					Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	0	0	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang terkelola**	**2 unit**	**43.500**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang difasilitasi/dikelola**	**2 unit**	**52.000**	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 unit	43.500	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 unit	52.000	

	semua kelurahan					semua kelurahan				
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase Perairan Umum Daratan yang diawasi**	**35%**	**66.550**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan**	**35.29%**	**15.000**	
Pengawasan sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumalh PUD yang diawasi**	**5 lokasi**	**66.550**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota**	**2 Laporan**	**15.000**	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	66.550	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	15.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Prosentase Produk Perikanan yang Dipromosikan**	**75%**	**33,275**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Cakupan bina pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan**	**30%**	**25.000**	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Dibina**	**5 unit**	**33.275**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	**2 Laporan**	**25.000**	

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Pesyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 unit usaha	33,275	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 unit usaha	25.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		**Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)**	**6,24 ton/ha**	**23,625,511,400**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		**Produktivitas Pertanian Utama Per hektar Per tahun (Padi)**	**6,23 ton/ha**	**17.899.860.990**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**87%**	**16,357,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Nilai SAKIP OPD**	**73.65 Nilai**	**17.509.860.990**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9 dokumen**	**66.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**8 dokumen**	**16.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	45.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	4.000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	3.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen DKA-SKPD tersusun	1 dokumen	3.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	5.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen DKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DKA-SKPD	1 dokumen	2.000						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	3.000						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	10.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	4.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan**	**Jumlah laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**14,054,935**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan**	**Jumlah laporan dokumen keuangan**	**1 dokumen**	**15.866.249.060**	

	semua kelurahan					**semua kelurahan**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150 orang /bulan	14,039,935	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 orang /bulan	15.860.249.060	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	15.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	6.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah**	**1 dokumen**	**10.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**1 Laporan**	**4,000**	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1 Laporan**	**4,000**	
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan/dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah**	**1 dokumen**	**4,000**	
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen analisa serta pengembangan retribusi daerah dan kebijakan retribusi daerah	1 dokumen	5.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan	4.000	

Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	1 dokumen	5.000						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**19,965**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan**	**100%**	**2,240**	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1 dokumen	19,965	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.240	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi**	**100%**	**337.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah dukungan administratif perangkat daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**118.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	35.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan	Jumlah paket peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	6.000	

	semua kelurahan					semua kelurahan				
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.000						
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5.000						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	240.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	90.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	5.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlh dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan bebasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	5.000						

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**7 unit**	**50.000**						
Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah paket mebel yang disediakan	3 unit	10.000						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	40.000						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**1.682.100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100%**	**1.406.740**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	600						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	181,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	121.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	12 laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	1.285.740	

	kecamatan semua kelurahan	kantor yang disediakan				kecamatan semua kelurahan	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara (diservis)**	**31 unit**	**137.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**20 unit**	**92.631.930**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	81.096.930	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	15.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 unit	8.940	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	22.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2.595	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Produksi Tanaman Pangan Uatama : - Padi - Jagung**	**342.130 ton 21.080 ton**	**700.000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Produksi Tanaman Pangan : - Padi - Jagung -Kacang Tanah -Ubi Kayu -Ubi Jalar**	**487997 ton**	**292.557.600**	

		Produksi Pertanian hortikultura unggulan : -Jahe -Buah durian	**4.409 ton 13.560 ton**				**Produksi Pertanian hortikultura: -Cabai Besar -Cabai Rawit -Bawang Merah -Bawang Putih -Alpukat -Duku -Durian -Jambu Biji -Pisang -Tanaman Biofarmaka Jahe**	**509787 kuintal**		
		Produksi perkebunan Unggulan ; -Kopi -Tembakau	**28.1 ton 63.5 ton**				**Produksi perkebunan : -Kopi -Tembakau -Teh -Cengkeh -Kelapa -Kakao**	**1017.2 ton**		
		Jumlah populasi Sapi	**69.254 ekor**				**Populasi Ternak : -Ternak Besar -Ternak Kecil -Unggas**	**12849785 ekor**		
		Jumlah populasi Kambing/domba	**156.478 ekor**							
		Jumlah populasi Ayam	**12.041.689 ekor**							
		Jumlah populasi Kelinci	**13.573 ekor**							
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah kecamatan yang diawasi**	**17 kecamatan**	**286,650**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah benih bersertifikat yang disalurkan kepada petani Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura Jumlah petani yang mendapat pendampingan**	**0 batang 1 laporan 67255 petani**	**107.557.600**	

							penggunaan sarana pendukung pertanian			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi [Pertanian]	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	4 laporan	275,625	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 laporan	25.000	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian [Perkebunan]	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 laporan	11,025	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	2 laporan	72.000	
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 Laporan	10.557.600	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah SDG yang dikelola (peternakan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)**	**4 kegiatan**	**413,350**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat**	**10 kelompok 10 Kelompok**	**65.000**	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pelaksanaan kualitas SDG hewan/tanaman	2 dokumen	74,550	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karanganyar , Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pelaksanaan kualitas SDG hewan/tanaman	1 dokumen	55,000	
Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman [Peternakan]	Kab. Karanganyar , Semua	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	3 dokumen	326,700	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Kab. Karanganyar , Semua	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	1 dokumen	10.000	

	kecamatan semua kelurahan					kecamatan semua kelurahan				
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah SDG hewan/tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	12,100						
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah laporan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota lain	1 Laporan	120.000	
					Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5000 dosis	120.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan dalam kondisi baik**	**31.68%%**	**5,940,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik**	**28.58%%**	**23,000**	
Pengembangan Prasarana Pertanian	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah prasarana pertanian yang dikembangkan**	**1 unit**	**1.100.000**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian**	**1 laporan**	**10,000**	
Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	4 laporan	1.100.000	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	0	0	

					Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 dokumen	10,000	
Pembangunan Prasarana Pertanian	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah prasarana pertanian yang dibangun**	**19 unit**	**4,840,000**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah pembangunan prasarana pertanian**	**0 unit**	**13.000**	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	10 unit	2,500,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 unit	0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	340,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	0 unit	13,000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	8 unit	2,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	0 unit	0	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Angka kesakitan ternak besar (%)**	**7,6%**	**57,736,800**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**2.04%**	**40,000**	
		Angka kesakitan ternak kecil (%)	**16%**							
		Angka kesakitan unggas (%)	**14,5%**							

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah jenis kasus zoonisis**	**3 jenis**	**11,000**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota**	**1 laporan**	**10.000**	
Pelaksanaan Suvelians Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah wilayah yang dilakukan survelians dan zoonosis pada hewan	1 wilayah	11,000	Pelaksanaan Suvelians Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah wilayah yang dilakukan survelians dan zoonosis pada hewan	1 wilayah	10,000	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah pelayanan jasa laboratorium/jasa medik veteriner**	**4 jenis**	**26,736,800**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota**	**1 laporan**	**10,000**	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	12 laporan	26,736,800	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	1 laporan	10,000	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah produk peternakan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal)**	**2 jenis**	**20,000**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner**	**1 laporan**	**20.000**	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	1 laporan	20,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	2 laporan	20.000	

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase bencana pertanian yang tertangani**	**100%**	**52,272**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase bencana tanaman pangan dan hortikultura yang tertangani** **Persentase bencana perkebunan yang tertangani**	**100%** **100%**	**24.442.400**	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah wilayah bencana pertanian yang dikendalikan/ditanggulangi**	**17 kecamatan**	**52,272**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan** **Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura**	**1 laporan** **1 laporan**	**24.442.400**	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	50 ha	28,600	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan	300 ha	15.000	
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Pertanian)	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	300 ha	23,672	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah luasan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10 ha	9.442.400	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Cakupan kelompok tani yang aktif**	**100%**	**518,502,600**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Persentase peningkatan kelas kelompok tani**	**16.50%**	**10.000**	

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah kelompok tani yang dibina**	**766 kelompok**	**518,502,600**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian**	**1 laporan**	**10.000**	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	17 unit	443,502,600	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	17 unit	10.000	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	25 unit	50.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0 dokumen	0	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1 unit	25.000						
TOTAL				**23.878.816.400**	**TOTAL**				**18.064.860.990**	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah

3.1.1. Telaah terhadap Visi-Misi Kementerian

A. Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Untuk mendukung Visi tersebut, maka Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pertanian Tahun 2020-2024, yakni:

"**Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.**"

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani.

Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. mewujudkan ketahanan pangan;
2. meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana kementerian Pertanian.

Makna dari Misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. meningkatknya Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian; dan
3. terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai Kementerian Pertanian dalam periode Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri
   Indikator kinerja : peningkatan ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri
2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional
   Indikator kinerja :
   - pertumbuhan volume ekspor untuk produk pertanian nasional,
   - persentase komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan.
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional
   Indikator kinerja :
   - persentase keamanan dan mutu pangan strategis nasional,
   - persentase kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan
4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian
   Indikator kinerja :
   - persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
   - teknologi yang diterapkan oleh pertanian
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan
   Indikator kinerja :
   - indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukkan
   - indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukkan
6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan
   Indikator kinerja :
   - persentase serangan OPT dan DPI yang ditangani,
   - persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis,
   - persentase tindakan karantina terhadap temuan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
7. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
   Indikator kinerja :
   - persentase SDM pertanian dan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya,
   - persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian

8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
   Indikator kinerja : nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas
   Indikator kinerja : nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Berdasarkan Telaah Renstra Kementerian Pertanian

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional Terselenggaranya birokrasi Kementerian	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Karanganyar 2. Masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pertanian 3. Rendahnya kesejahteraan dan kualitas SDM dari sektor pertanian 4. Masih lemahnya kelembagaan petani 5. Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat. 6. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Serangan OPT - Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas - Keterbatasan dukungan dana - Kurang terbukanya akses / jaringan pemasaran - Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian serta peternakan - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani dan Kelompok Ternak belum optimal	- Keragaman hayati dan agroekosistem - Lahan pertanian yang luas - Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Menjalin kemitraan dalam rangka mempromosikan produk pertanian dan peternakan - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (LSM / HKTI / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / Kelompok Ternak / P3A / GP3A)

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima			
9.	Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas			

B. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dokumen Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong."

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
3. mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melaluli Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
4. pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. peningkatan daya saing, pengembangan Inovasi dan Riset KP, yakni:
   a) Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat; dan
   b) Inovasi dan Riset KP menguat.

2. peningkatan kontribusi sektor KP terhadap Perekonomian Nasional, yakni :
   a) Pengelolaan Sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
   b) Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
   c) Pengawasan pengelolaan SDKP;
   d) Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat; dan
   e) Pengelolaan ruang laut optimal.
3. peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP, yakni : Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal.
4. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, yakni : Kinerja Reformasi Birokrasi KKP meningkat.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra KKP RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Belum adanya data yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat KP	BPS selaku instansi resmi yang mengeluarkan data tidak bersedia melakukan kerjasama	-
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan penduduk Kabupaten Karanganyar	Kesadaran masyarakat akan manfaat ikan masih rendah	Produksi perikanan meningkat Produksi perikanan menjadi salah satu indikator kunci pembangunan daerah
3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Tidak memiliki kewenangan di wilayah pesisir dan laut	-	-
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Data serapan lulusan pendidikan dan pelatihan tidak tersedia	Keterbatasan SDM	-
5	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan	Keterbatasan SDM	Keterbatasan SDM	-
6	Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	Keterbatasan SDM	Keterbatasan SDM	-
7	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Dana tersalurkan untuk usaha perikanan dan kelautan belum terdata dengan baik	Keterbatasan SDM	Pendataan produksi perikanan selalu dilaksanakan setiap tahun Adanya petugas pendampingan penyaluran dana

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP RI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				yang berasal dari KKP
8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif	) Keterbatasan SDM	) Keterbatasan SDM	)
9	Tata kelola pemerintahan yang baik	) Tidak ada masalah	) -	) Pelaporan dan evaluasi rutin dilaksanakan

C. Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yaitu ”Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Badan Pangan Nasional dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional pada tanggal 29 Juli 2021.

Sesuai semangat visi Indonesia Emas 2045, dan juga selaras dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, maka Badan Pangan Nasional yaitu:

”Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Makna visi Badan Ketahanan Pangan adalah :

1. Andal merujuk pada aspek kepercayaan karena kemampuan, kesanggupan, dan kekuatan yang dimiliki dalam menjamin terselenggaranya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
2. Tata Kelola adalah sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di bidang pangan yang dikelola melalui interaksi pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, sektor swasta dan pelibatan media.
3. Sistem Pangan Nasional merupakan satu rangkaian yang meliputi seluruh aspek dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap individu mulai dari menanam, memanen, menyimpan, mengemas, mengolah, mengangkut, memasarkan, dan mengonsumsi pangan termasuk mencakup interaksi menusia dengan alam serta pengaruhnya terhadap manusia Indonesia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.
4. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia emas 2045 merupakan visi bangsa Indonesia dengan mengajak putra putri terbaik bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama

membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya dengan tujuan yang jelas, yaitu negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

Dalam mencapai visi Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Badan Pangan Nasional menetapkan misi untuk Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan;
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan;
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan;
6. Menyelenggarakan bantuan pangan;
7. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
8. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar; dan
9. Mengelola Badan Pangan nasional yang andal.

Tujuan yang dittetapkan Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi dan Misi Badan Pangan Nasional adalah memperkuat tata kelola pemenuhan kebutuhan pangan uang diindikasikan dengan:

1. Rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produksi domestik;
2. Persentase penurunan rumah tangga dengan tingkat pengeluaran pangan > 65% (lebih dari enam puluh lima persen).

3.1.2. Telaah terhadap Renstra Dinas Provinsi

A. Telaah Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2024 – 2026 adalah :

1. memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi ketahanan pangan yang berkelanjutan di Jawa Tengah;
2. meningkatkan kesejahteraan petani; dan
3. meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi di perangkat daerah.

Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2024 – 2026 adalah :

1. terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan;
2. terwujudnya peningkatan produksi tanaman hortikultura;
3. terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan;
4. terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Pangan;
5. terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Hortikultura;
6. terwujudnya peningkatan NTP Tanaman Perkebunan;
7. terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah; dan
8. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Telaah Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah			
1. 2. 3.	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman pangan Terwujudnya peningkatan produksi tanaman hortikultura Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	- Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian - Infrastruktur dan sarana prasarana pertanian masih terbatas - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	- Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian - Serangan OPT - Belum tercukupinya kebutuhan bibit maupun benih yang berkualitas - Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana pendukung pertanian - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Tani belum optimal	- Keragaman hayati dan agroekosistem - Lahan pertanian yang luas - Teknologi pertanian yang berkembang dengan pesat - Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (LSM / HKTI / KTNA/ Asosiasi / Koperasi Tani / Gapoktan/ Kelompok Tani / P3A / GP3A)

B. Telaah Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026, tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ketahanan pangan Jawa Tengah, dengan indikator tujuan Skor Indeks Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut IKP. IKP merupakan instrumen untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan.

Dipilihnya indikator Skor IKP, karena dalam penyusunan Skor IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP yaitu :

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi benih;
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran;
4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik;

5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun;
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih;
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk;
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*); dan
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

Semakin tinggi Skor IKP, maka semakin membaik kondisi ketahanan pangan pada wilayah tersebut.

Tujuan non urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan yaitu meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (PD).

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah:

1. meningkatkan keterjangkauan/akses pangan, yang ditunjukan dengan indikator prosentase penanganan kecamatan rawan pangan (%);
2. meningkatkan pemanfaatan pangan dengan indikator Skor PPH Provinsi;
3. meningkatkan keterjangkauan/akses pangan dengan indikator rata-rata deviasi harga pangan strategis (beras); dan
4. meningkatkan ketersediaan pangan dengan indikator terpenuhinya kebutuhan pangan.

Sasaran yang berkaitan dengan kesekretariatan, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dan meningktanya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah yang ditunjukan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Manajemen Risiko.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Telaah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah			
1.	Meningkatkan pemanfaatan pangan dengan indikator Skor PPH Provinsi; 2. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan indikator terpenuhinya kebutuhan pangan.	- Ketersediaan pangan daerah belum sesuai yang ditargetkan Pemerintah Pusat - Masih kurangnya keanekaragaman pangan menuju gizi seimbang	- Keterbatasan dukungan dana - Masih kurangnya diversifikasi pangan di tingkat masyarakat	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan cadangan pangan daerah - Komitmen pimpinan beserta jajarannya dalam upaya diversifikasi pangan

C. Telaah Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan pelayanan : "Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan" dengan indikator persentase pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%);
2. "meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan" dengan indikator nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan (angka);
3. "meningkatkan kualitas ekosistem kelautan dan perikanan" dengan indikator persentase luasan mangrove yang direhabilitasi (persen); dan
4. Berkaitan dengan kesekretariatan : "meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi perangkat daerah" dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (angka).

Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan, indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun);
2. Meningkatnya produksi garam, indikator sasaran: produksi garam (ton/tahun);
3. Meningkatnya angka konsumsi ikan, indikator sasaran: angka konsumsi ikan (angka);
4. Meningkatnya nilai tukar nelayan, indikator sasaran: nilai tukar nelayan (angka);
5. Meningkatnya nilai tukar pembudidaya ikan, indikator sasaran: nilai tukar pembudidaya ikan (angka);
6. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan partisipasif, indikator sasaran: persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan IUU *fishing* dan kegiatan yang merusak SDKP (%);
7. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, indikator sasaran: Indeks kepuasan Masyarakat; dan
8. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah, indikator sasaran: Indeks manajemen risiko.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya produksi perikanan	Belum optimalnya tingkat produksi perikanan	) Masih rendahnya produksi dan produktiiviitas perikanan budidaya) Kurangnya bibit ikan yang berkualiitas) Rendahnya kualitas SDM perikanan) Ketergantungan terhadap bahan baku pakan pabrikan	) Potensi pakan alternatif perikanan.) Adanya kelompok pembudidaya ikan
2.	Meningkatnya angka konsumsi ikan	Belum optimalnya cakupan pembinaan kelompok dibidang perikanan		

D. Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sub sektor peternakan, dengan indikator laju pertumbuhan PDRB ADHK sub sektor peternakan; dan
2. meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan.

Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor peternakan (%) mencerminkan kinerja sub sektor peternakan terhadap perekonomian jawa Tengah karena menunjukan tren produksi peternakan dari tahun ke tahun tanpa dipengaruhi faktor harga. Rumus laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor peternakan:

$$(\%) = \frac{(x - y)}{y} \times 100\%$$

X : PDRB atas dasar harga konstan sub sektor peternakan (yahun n)

Y : PDRB atas dasar harga konstan sub sektor peternakan (tahun n-1)

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan adalah menghitung tingkat kesejahteraan peternak, dengan rumus NTP peternakan:

$$(\%) = \frac{lt}{lb} \times 100\%$$

lt : Indeks Harga yang diterima oleh Peternak (lt)

Y : Indeks Harga yang dibayar oleh Peternak (lb)

Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. tersedianya produksi daging, dengan indikator produksi daging;
2. tersedianya produksi susu, dengan indikator produksi susu;
3. tersedianya produksi telur, dengan indikator produksi telur; dan
4. meningkatnya nilai tambah produk hasil peternakan. Dengan indikator persentase nilai tambah produk hasil ternak.

Tabel 3.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Berdasarkan Telaah Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah PD Provinsi Jateng	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah			
1. 2. 3.	tersedianya produksi daging tersedianya produksi susu tersedianya produksi telur	- Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas peternakan - Infrastruktur dan sarana prasarana peternakan masih terbatas - Keterbatasan SDM petani dan petugas - Belum optimalnya fungsi kelembagaan yang ada	- Kurangnya bibit ternak yang berkualitas - Kurangnya pakan ternak yang baik - Kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana pendukung peternakan - Keterbatasan SDM baik kuantitatif maupun kualitatif - Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Ternak belum optimal	- Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah - Majunya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat - Dukungan organisasi / kelembagaan non pemerintah (Kelompok Ternak)

E. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, kawasan peruntukan pertanian terdiri atas : kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri atas kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 22.477 Ha dan kawasan pertanian lahan kering seluas 12.927 Ha. Pawasan perkebunan seluas kurang lebih 6.351 Ha,

Strategi pemantapan kawasan pertanian terpadu meliputi :

a. mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan status irigasi;
b. menjaga intensitas tanam dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian;
c. mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk penggunaan bukan pertanian;
d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian;
e. menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;
f. mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui sistem agrobisnis; dan
g. mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:

a. Sungai, seluruh perairan badan sungai di wilayah kabupaten; dan
b. Bendungan/danau/embung yang terdapat di seluruh kecamatan.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:

a. Kolam, terletak di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, Kerjo dan Jenawi; dan
b. Sungai dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar yang terdapat di seluruh kecamatan; dan
c. Bendungan/embung yang terdapat di seluruh kecamatan.

Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagaimana pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Terhadap Telaah RTRW Kabupaten Karanganyar

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Kawasan Pertanian	a. Implementasi pruntukan wilayah untuk pertanian belum maksimal	a. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat b. Kebutuhan lahan untuk perumahan semakin meningkat c. Kurangnya penagakan perda RTRW	a. Kebutuhan penuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat b. Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan pengembangan pertanian berbasis kawasan c. Perda LP2B sedang dalam proses penyusunan
	Kawasan peruntukan perikanan tangkap Kawasan peruntukan perikanan budidaya	Kurangnya alokasi lahan bagi Kawasan Peruntukan Perikanan apabila dibandingkan dengan besarnya potensi SDA dan SDM perikanan	Adanya regulasi yang membatasi pemanfaatan lahan bagi kegiatan perikanan (Perda RTRW)	Adanya kebijakan daerah yang mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan

F. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tahun 2025-2029 tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPJMD

Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karaganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah "**SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera**.

Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.

Tujuan jangka menengah Dispertan PP Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut **"Meningkatnya kontribusi pertanian dalam perekonomian dan ketahanan pangan".**

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keanekaragaman Pangan Masyarakat;
2. Meningkatnya Produksi Perikanan yang Berkelanjutan;
3. Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah;
4. Meningkatnya Produksi Peternakan; dan
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.8 dan Tabel 3.9 sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Awal 2025	Target Tahun 2026
				Tahun 2024		
Meningkatnya Kontribusi Pertanian dalam Perekonomian dan Ketahanan Pangan	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	**1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan distenace to scale (0-100) 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP**	**Angka**	**89,67**	**89,70**	**89,72**
	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	**Angka Konsumsi Ikan Per Kapita Per Tahun (Kg/Kapita/Tahun) dihitung melalui data Susenas yang dilakukan oleh BPS dan bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi jawa tengah (Data T-1)**	**Kg/ Kapita/ Tahun**	**23,61**	**24,03**	**24,25**
Meningkatnya keanekaragaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) tingkat konsumsi dikalikan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan (9 kelompok pangan: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah-buahan lainnya)	skor	97,41	97,42	97,43
Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (tangkapan nelayan di perairan umum darat meliputi sungai, rawa, dan genangan air lainnya) ditambah Produksi Perikanan Budidaya (produksi ikan konsumsi yang	Ton	2.467,98	2.488,7	2.509,62

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Awal 2025	Target Tahun 2026
				Tahun 2024		
		diusahakan melalui pembudidayaan yang berasal dari kolam, keramba, mina padi dan tambak)				
Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan Per Hektar per Tahun dibagi Luas panen (Padi, Jagung dan Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar)				
	- Padi	Jumlah Produksi padi per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/ Tahun	6,223	6,224	6,225
	- Jagung	Jumlah Produksi jagung per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/ Tahun	7,1	7,11	7,12
	- Kacang tanah	Jumlah Produksi kacang tanah per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/ Tahun	2,03	2,04	2,05
	- Ubi Kayu	Jumlah Produksi ubi kayu per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/ Tahun	37,84	37,88	37,9
	- Ubi Jalar	Jumlah Produksi ubi jalar per hektar per tahun dibagi Luas Panen	Ton/Ha/ Tahun	44,82	44,83	44,85
Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging	Jumlah Produksi Daging (Sapi, Kambing, Domba, Ayam Buras, Ayam Pedaging, Ayam Ras Petelur, Itik)	Kg	9.310.243	9.333.519	9.356.794
	Produksi Telur (Ayam Petelur, Ayam Buras, Bebek, Puyuh)	Jumlah Produksi Telur (Ayam Petelur, Ayam Buras, Bebek, Puyuh)	Kg	23.704.750	23.764.012	23.823.274
	Produksi Susu (Sapi dan Kambing)	Jumlah Produksi Susu (Sapi dan Kambing)	Liter	193.970	194.455	194.940
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei	Indeks	80,33	80,80	81,30

Tabel 3.9
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
	Urusan Pangan		
1	Persentase Cadangan Pangan	%	20,18
	Urusan Kelautan dan Perikanan		
2	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Kg	2.509,63
	Urusan Pertanian		
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton/Ha	7,71
4	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-4,08

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi

Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Strategi dan kebijakan Dispertan PP menggambarkan cara pencapaian tujuan, sasaran jangka menengah, serta target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas RPJMD Kabupaten Karanganyar yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dispertan PP. Rumusan strategi dan arah kebijakan ini mencerminkan rencana menyeluruh Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk meraih tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pendekatan strategis yang menyeluruh ini juga berperan sebagai alat untuk mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatnya Keanekaragaman Pangan Masyarakat

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

a. Meningkatkan cadangan pangan daerah dengan penguatan lumbung pangan daerah dan desa
b. Diversifikasi pangan sesuai dengan potensi daerah

Sasaran 2. Meningkatnya Produksi Perikanan yang Berkelanjutan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

a. Melakukan adopsi teknologi perikanan dengan moderinisasi alat tangkap dan budidaya perikanan
b. Melakukan regenerasi pembudidaya ikan dengan pelatihan pada pembudidaya muda.

Sasaran 3. Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

a. Melakukan adopsi teknologi pertanian dengan moderinisasi alsintan.
b. Pengembangan varietas dan bibit unggul lokal
c. Melakukan regenerasi SDM pertanian dengan pelatihan petani muda, revitalisasi kelembagaan tani serta sertifikasi penyuluh pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Meningkatkan efisiensi distribusi sarana produksi pertanian.
e. Peningkatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier dan optimalisasi embung.

Sasaran 4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

a. Penguatan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Berbasis Kinerja melalui penyusunan program berdasarkan data dan hasil evaluasi sebelumnya, serta memastikan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kegiatan (IKK) secara terukur dan konsisten.
b. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Tata Kelola Program dan Layanan melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta pelayanan publik sesuai dengan SP dan SOP.

Tabel 3.10
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Ketahanan Pangan didukung dengan Produksi Pertanian, Perikanan	**Penguatan Sumber Daya Manusia Pertanian, Perikanan dan Pangan**	**Penguatan Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Pangan**	**Perwujudan Ketahanan Pangan yang Mandiri dengan mengutamakan potensi lokal pertanian dan perikanan**	**Perwujudan Harmoni dalam Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan**
1. Identifikasi potensi Pertanian, Perikanan dan di Kabupaten Karanganyar. 2. Identifikasi daerah rentan pangan 3. Identifikasi permasalahan di bidang pertanian, perikanan dan pangan. 4. Penyempurnaan SP dan SOP pelayanan publik	1. Pelatihan dan pendampingan kelompok tani, perkebunan, peternakan, perikanan dan pelaku usaha pangan. 2. Regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan pertanian. 3. Penguatan Peran dan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	1. Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, jalan usaha tani 2. Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya 3. Modernisasi Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan 4. Penguatan Sarana Pascapanen, Penyimpanan, dan Pengolahan	1. Perwujudan sarpras pertanian dan perikanan yang berkualitas 2. Peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan 3. Penguatan kelembagaan petani, pembudidaya ikan dan pelaku usaha pangan lokal	1. Perwujudan integrasi sistem pangan daerah dari hulu ke hilir 2. Perwujudan prinsip ekologi dan berkelanjutan di bidang pertanian dan perikanan 3. produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan untuk mendukung kemandirian pangan daerah

3.2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai :

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian dengan pengembangan varietas unggul lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas penyuluhan dan pendampingan petani berbasis digital, optimalisasi lahan sawah, ladang, dan tegalan secara intensif dan berkelanjutan
2. Regenerasi Petani dan Pengembangan SDM Pertanian dengan program pertanian milenial dan pemuda tani, revitalisasi kelembagaan petani: kelompok tani (poktan), gapoktan, dan BUMDes pertanian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluh pertanian.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, pembangunan jalan usaha tani dan akses ke lahan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok, optimalisasi pemanfaatan embung dan dam parit untuk pengairan
4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) melalui perda dan tata ruang, sdukasi praktik pertanian ramah lingkungan (organik, pengendalian hayati, dll.), pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia secara bijak, pengembangan pertanian berkelanjutan di dataran tinggi (konservasi tanah dan air)
5. Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan desa, diversifikasi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, sagu, hortikultura), penguatan sistem distribusi dan logistik pangan antar kecamatan/desa, monitoring dan penanggulangan daerah rentan pangan
6. Penguatan produksi perikanan budidaya air tawar dengan pengembangan teknologi budidaya intensif dan ramah lingkungan (bioflok, kolam terpal, dan sistem resirkulasi), peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis, penyediaan induk unggul dan benih berkualitas (ikan lele, nila, patin, gurame, dll).

Tabel 3.11
Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	Peningkatan kualitas produksi pertanian yang dititik beratkan pada peningkatan produktivitas hasil pertanian secara berkelanjutan, modernisasi dan hilirisasi pertanian dan pengembangan agro industri serta peningkatan kualitas petani millennial, pembangunan perikanan difokuskan pada Peningkatan kualitas perikanan budidaya;	1. Peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas pertanian dengan pengembangan varietas unggul lokal dan adaptif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan teknologi pertanian modern, peningkatan kualitas penyuluhan dan pendampingan petani berbasis digital, optimalisasi lahan sawah, ladang, dan tegalan secara intensif dan berkelanjutan 2. Regenerasi Petani dan Pengembangan SDM Pertanian	

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		dengan program pertanian milenial dan pemuda tani, revitalisasi kelembagaan petani: kelompok tani (poktan), gapoktan, dan BUMDes pertanian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluh pertanian. 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pertanian dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan kuarter, pembangunan jalan usaha tani dan akses ke lahan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berbasis kelompok, optimalisasi pemanfaatan embung dan dam parit untuk pengairan 4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) melalui perda dan tata ruang, sdukasi praktik pertanian ramah lingkungan (organik, pengendalian hayati, dll.), pengendalian penggunaan pestisida dan bahan kimia secara bijak, pengembangan pertanian berkelanjutan di dataran tinggi (konservasi tanah dan air) 5. Penguatan produksi perikanan budidaya air tawar dengan pengembangan teknologi budidaya intensif dan ramah lingkungan (bioflok, kolam terpal, dan sistem resirkulasi), peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui pelatihan teknis, penyediaan induk unggul dan benih berkualitas (ikan lele, nila, patin, gurame, dll).	
2	Peningkatan cadangan pangan masyarakat dengan peningkatan lumbung pangan, distribusi pangan, pemanfaatan lahan dan keamanan pangan;	Penguatan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan pengembangan sistem cadangan pangan masyarakat dan desa, diversifikasi pangan lokal non-beras (umbi, jagung, hortikultura), penguatan sistem distribusi dan logistik pangan antar kecamatan/desa, monitoring dan penanggulangan daerah rentan pangan	

3.4. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Dispertan PP Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yaitu terdiri dari 12 Program, 27 Kegiatan dan 47 Sub Kegiatan yang dirumuskan dalam Tabel 3.12 sebagai berikut:

Tabel 3.12
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
TJ 3) Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar Sasaran 7: Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan	Meningkatnya Kontribusi Pertanian dalam Perekonomian dan Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)				
			Angka Konsumsi Ikan (AKI)				
		Meningkatnya keanekaragaman pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				
		Meningkatnya Produksi Perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)				
		Meningkatnya Produktivitas Pertanian Unggulan Daerah	Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun				
			- Padi				
			- Jagung				
			- Kacang tanah				
			- Ubi Kayu				
			- Ubi Jalar				
		Meningkatnya Produksi Peternakan	Produksi Daging				
			Produksi Telur				
			Produksi Susu				
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM				
URUSAN PANGAN							
			Meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) serta ketahanan pangan rumah tangga		Konsumsi energi per kapita per hari	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Konsumsi protein perkapita per hari		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terjaganya persediaan dan stabilitas harga pangan	**Jumlah Laporan persediaan dan stabilitas harga pangan**	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	
				Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang tersedia**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Jumlah Laporan Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Menurunnya wilayah dan jumlah penduduk rawan pangan secara berkelanjutan		**Persentase daerah rentan rawan pangan**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	
				Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya keamanan pangan dari hulu ke hilir demi perlindungan kesehatan masyarakat		**Jumlah sertifikat ijin edar PSAT yang diterbitkan**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	
				Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		**Jumlah produksi perikanan budidaya**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	
				Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Terlaksananya Pengelolaan pembudidayaan ikan	**Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang difasilitasi/dikelola**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan sumberdaya perikanan darat		**Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		**Cakupan Bina Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	
				Terlaksanaya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
URUSAN PERTANIAN							
			Meningkatnya Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)		**Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	
					1. Padi		
					2. Jagung		
					3. Kacang Tanah		
					4. Ubi Kayu		
					5. Ubi Jalar		
			Meningkatnya Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji. pisang, tanaman hias, tanaman biofarmaka)		**Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)**		
					1. Cabai besar		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Cabai rawit		
					3. Bawang Merah		
					4. Bawang Putih		
					5. Alpukat		
					6. Duku		
					7. Durian		
					8. Jambu Biji		
					9. Pisang		
					10. Tanaman Hias (Krisan)		
					11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)		
			Meningkatnya produksi unggulan komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Cengkeh, Kelapa, Kakao, Tebu) dalam tahun n		Angka produksi komoditas perkebunan komoditas (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao) dalam tahun n		
					1. Tembakau		
					2. Kopi		
					3. Teh		
					4. Cengkeh		
					5. Kelapa		
					6. Kakao		
			Meningkatnya Populasi Ternak (Ternak Besar Sapi, Ternak Kecil Kambing dan Domba serta unggas)		Jumlah Populasi Ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas)		
					1. Ternak Besar (Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau)		
					2. Ternak Kecil (Kambing dan Domba)		
					3. Ternak Unggas (Ayam Buras, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Itik)		
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah benih bersertifikat yang disalurkan petani		
					jumlah petani yang mendapat pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
				Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	
					Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat		
					Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura		
				Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
				Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Jumlah Laporan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	
				Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Meningkatnya cakupan dan kualitas prasarana pertanian untuk mendukung usaha tani		**Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	
				Berkembangnya Prasarana Pertanian	**Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	
				Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terbangunnya Prasarana Pertanian	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	
				Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
			Menurunnya kasus penyakit hewan dan zoonosis melalui sistem kesehatan hewan yang terpadu		**Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	
				Terjaminnnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	
				Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	
				Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Meningkatnya penanganan bencana terhadap sektor pertanian melalui upaya mitigasi dan adaptasi		**Persentase Bencana Tanaman pangan dan hortikultura Pertanian yang Tertangani**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	
					Persentase Bencana perkebunan yang Tertangani		
				Terkendalinya dan tertanggulanginya Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani melalui penyuluhan yang efektif		**Persentase peningkatan kelas kelompok tani**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	
				Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Penyuluhan pertanian di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan penyuluhan pertanian di ringkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan pertanian di Tingkat kabupaten/kota	
				Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		**Nilai SAKIP OPD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan	**Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
				Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	
				Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	
				Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Jumlah Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	**Jumlah Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Perumusan Program dan Kegiatan disertai Target Kinerja dan Pendanaan

Pada tahun anggaran 2026 sebagai tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2030, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagai daya dukung dalam meningkatkan keberhasilan kemajuan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 13 Program, 29 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.

Program ini difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang meliputi Kegiatan:

1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut
   a) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Program ini diarahkan untuk pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) yang meliputi Kegiatan:

1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut: :
   a) Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
   b) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota.

3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rentan pangan yang meliputi Kegiatan:

1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pengawasan dan keamanan pangan, pengujian keamanan mutu pangan yang meliputi Kegiatan:

1) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; dan
   b) Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan.

B. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN SUB BIDANG PERIKANAN

a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada peningkatan produksi perikanan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain pembinaan kelompok pembudidaya ikan melalui peningkatan kapasitas, adopsi teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan sarana dan prasarana budidaya. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan bina kelompok pembudidaya ikan, sehingga dapat memperkuat ketahanan usaha perikanan skala kecil maupun menengah yang meliputi Kegiatan:

1) Pemberdayaan Pembudi daya Ikan Kecil, dilaksanakan dengan Sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
b) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha; dan
c) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan pengawasan, penyuluhan secara terkoordinasi. Fokus utama adalah memperluas cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan agar pemanfaatan sumber daya dilakukan secara tertib, adil, dan berkelanjutan, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem perairan yang meliputi Kegiatan:

1) Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan,

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan melalui pengolahan hasil yang higienis dan memenuhi standar mutu, serta memperkuat akses pasar. Dengan demikian, diharapkan peningkatan cakupan bina pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang meliputi Kegiatan :

1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko.

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini difokuskan pada penyediaan dan peningkatan kualitas sarana produksi pertanian dan peternakan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Kegiatan yang dilakukan meliputi penyediaan benih, pupuk, dan alat mesin pertanian, serta penyediaan sarana produksi peternakan seperti bibit ternak unggul, pakan, obat hewan, dan vaksin. Selain itu, program ini juga mendukung peningkatan produksi daging, telur, dan susu, serta peningkatan populasi ternak ruminansia dan non-ruminansia guna memenuhi kebutuhan konsumsi dan

mendukung kemandirian pangan hewani yang meliputi Kegiatan :

1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
   b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
   c) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;
   d) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan;
   e) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura;
   f) Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang;
   g) Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
   h) Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman; dan
   b) Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman;
3) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana pendukung pertanian dan peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran usaha tani dan ternak. Kegiatan utama meliputi pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang hasil pertanian. Di bidang peternakan, program ini mencakup fasilitasi penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi unit usaha produk hewan, serta peningkatan kualitas dan jumlah Rumah Potong Hewan (RPH) agar sesuai standar kesehatan masyarakat veteriner dan mendukung jaminan mutu produk peternakan yang meliputi Kegiatan :

1) Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi Sub Kegiatan, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota;

b) Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

2) Pembangunan Prasarana Pertanian, meliputi Sub Kegiatan:
   a) Pembangunan, Rehalitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
   b) Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani; dan
   c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pertanian Lainnya.

c. Program Pengendalian dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini difokuskan pada pencegahan dan pengendalian penyakit hewan serta jaminan keamanan produk asal hewan bagi kesehatan masyarakat yang meliputi Kegiatan :

1) Penjaminan Kesehatan Hewan, penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pelaksanaan Surveliana Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan; dan
   b) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner
3) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini difokuskan pada mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanggulangan terhadap gangguan usaha tani akibat bencana alam, serangan organisme pengganggu tanaman, atau perubahan iklim yang meliputi Kegiatan :

1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortukultura, dan Perkebunan; dan
   b) Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani melalui pendampingan dan diseminasi teknologi pertanian yang tepat guna yang meliputi Kegiatan :

1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, meliputi Sub Kegiatan:
   a) Pengembangan Kapasitas kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
   b) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota; dan
   c) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah. Program ini bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui dukungan administrasi, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem informasi, dan perbaikan infrastruktur untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas.

Program ini difokuskan untuk memberikan dukungan atas Kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
   d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
   e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
   2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;
   b) Pengolahan Data Retribusi Daerah.
5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian; dan
   b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
   c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   g) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   i) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan
   j) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dilaksanakan meliputi Sub Kegiatan :
   a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b) Pengadaan Mebel; dan
   c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan Sub Kegiatan :
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan;
   b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
   c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten karanganyar tahun 2026 tersebar di hampir seluruh Daerah di Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan peningkatan urusan di bidang pangan, urusan bidang pertanian, dan urusan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan.

Dalam Rancangan Awal di Renstra Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 menganggarkan sebesar Rp.44.418.638.295,-, tahun 2027 sebesar Rp.44.418.638.295,-, tahun 2028 sebesar Rp.51.708.638.295,-, tahun 2029 sebesar Rp.51.708-638.295,- dan tahun 2030 sebesar

Rp.51.708.638.295,- sedangkan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.27.227.419.295,- dan ada kenaikan alokasi anggaran (Penetapan DPA) menjadi Rp.42.553.554.295,- karena disesuaikan dengan analisa kebutuhan.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 terdapat dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

(Terlampir)

4.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yaitu Hasil Kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan Para Pemangku Kepentingan (Termasuk Hasil Musrenbangcam dan hasil Reses/Aspirasi DPRD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kesatu pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis atas-bawah dan bawah-atas.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar disusun dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini membahas rancangan Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan untuk menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait urusan bidang pangan, urusan bidang pertanian, dan urusan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan tentunya Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan teknis yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, hal ini menyebabkan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan dari masyarakat untuk Tahun 2026.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 terdapat dalam tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**1.948.990 Kg**	**Bidang Perikanan**
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**10 Kelompok**	**Bidang Perikanan**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	20 Kelompok	Bidang Perikanan
2.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Produksi 5 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar)**		**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**
			1. Padi	**344.032 Ton**	
			2. Jagung	**27.320 Ton**	
			3. Kacang Tanah	**3.215 Ton**	
			4. Ubi Kayu	**74.570 Ton**	
			5. Ubi Jalar	**38.860 Ton**	
			Jumlah Produksi 11 Komoditas Hortikultura (Cabai besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, alpukat, duku, durian, jambu biji, pisang, Tanaman hias dan tanaman biofarmaka)		**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**
			1. Cabai besar	**28.450 Kuintal**	
			2. Cabai rawit	**8.255 Kuintal**	
			3. Bawang Merah	**50.572 Kuintal**	
			4. Bawang Putih	**24.475 Kuintal**	
			5. Alpukat	**96.496 Kuintal**	
			6. Duku	**4.104 Kuintal**	
			7. Durian	**117.180 Kuintal**	
			8. Jambu Biji	**4.230 Kuintal**	
			9. Pisang	**170.280 Kuintal**	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			10. Tanaman Hias (Krisan)	**1.247.460 Tangkai**	
			11. Tanaman Biofarmaka (Jahe)	**5.745 Kuintal**	
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	**Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**7 Laporan**	**Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**
			Jumlah benih bersertifikat yang disalurkan petani	**27.000 Batang**	
			jumlah petani yang mendapat pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	**67.255 Petani**	
	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Bidang TPH
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**2 Laporan**	**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**
			Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat	**400 Kelompok**	
	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah pemanfaatan SDG hewan/tanaman	4 dokumen	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Presentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik**	**28,58%%**	**Bidang PSP**
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan**	**Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian**	**22 unit**	**Bidang PSP**
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 nit	Bidang PSP
	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6 Unit	Bidang PSP
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua kecamatan semua kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit	Bidang PSP

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Berdasarkan gambaran pelayanan kinerja, tantangan dan peluang Dispertan PP Kabupaten Karanganyar, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yaitu:

1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura:
   a. berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi non pertanian;
   b. terbatas dan tidak meratanya ketersediaan benih yang berkualitas;
   c. belum optimalnya penanganan organisme penggangu tumbuhan;
   d. belum optimalnya produktivitas pertanian; dan
   e. perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.
2. Bidang Perkebunan:
   a. tidak adanya kepastian harga hasil perkebunan;
   b. kurangnya akses pasar dan informasi harga; dan
   c. terbatasnya pengolahan pascapanen dan nilai tambah produk perkebunan.
3. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan:
   a. belum optimalnya pemeliharaan jaringan irigasi;
   b. belum memadainya jalan usaha tani;
   c. belum meratanya pemberian Alsintan pada kelompok tani;
   d. belum optimalnya penyerapan pupuk bersubsidi;
   e. terbatasnya jumlah penyuluh pertanian; dan
   f. belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
   a. belum optimalnya penanganan penyakit ternak;
   b. terbatasnya sarana dan prasarana peternakan;
   c. belum optimalnya produksi peternakan;
   d. keterbatasan tenaga medis hewan; dan
   e. belum tersedianya laboratorium kesehatan hewan.
5. Bidang Ketahanan Pangan:
   a. belum optimalnya penanganan daerah rentan pangan;
   b. belum meratanya distribusi pangan;
   c. belum optimalnya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
   d. belum optimalnya sosialisasi pangan beragam bergizi seimbang; dan
   e. belum optimalnya pengawasan keamanan pangan.
6. Bidang Perikanan:
   a. belum optimalnya hasil perikanan;
   b. hasil olahan perikanan belum sesuai standar yang ada; dan
   c. perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dispertan PP Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dispertan PP Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 wajib berpedoman pada Renstra Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan dan perubahan anggaran, maka dapat dilakukan perubahan Renja Dispertan PP Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. perlunya menjaga keterkaitan RPJMD, Renstra, Renja dan Anggaran dan Kegiatan yang ditetapkan dalam APBD agar indikator tujuan, sasaran dan program dapat tercapai sesuai target; dan
b. perlunya pengelolaan anggaran pada dinas agar alokasi anggaran tepat sasaran sehingga tujuan kegiatan tercapai dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dilingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2026.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pertanian, urusan pangan, dan urusan perikanan dan kelautan yang di dalamnya menyangkut bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang ketahanan pangan, dan bidang perikanan, yang diemban oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan

daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan						18.064.860.990,00							44.035.070.295,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.000.000,00							195.000.000,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						70.000.000,00							195.000.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang difasilitasi	-			100 %	0,00						-	30.000.000,00
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur kemandirian dan cadangan pangan	-			27 Unit	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	30.000.000,00
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik													
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														dan ekonomi biru				
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi per kapita per hari Konsumsi protein per kapita per hari	-			2201.8 kkal/kapita/hari 64.2 gram/kapita/hari	55.000.000,00						-	95.000.000,00
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan persediaan dan stabilitas harga pangan	-			12 laporan	5.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	20.000.000,00
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													
						Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		20.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten yang tersedia	-			23.65 ton	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	30.000.000,00
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				2.1 Ton	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		30.000.000,00
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah laporan konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	-			1 laporan	30.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	45.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		45.000.000,00
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	-			2.78 %	5.000.000,00						-	15.000.000,00
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	-			1 laporan	5.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	15.000.000,00
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		15.000.000,00
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah sertifikat izin edar PSAT yang diterbitkan	-			176 sertifikat	10.000.000,00						-	55.000.000,00
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	-			2 laporan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	55.000.000,00
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		35.000.000,00
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		20.000.000,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.994.860.990,00							43.840.070.295,00
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						95.000.000,00							295.000.000,00
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	-			1948990 kg	55.000.000,00						-	240.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	-			5 kelompok	3.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	140.000.000,00
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		40.000.000,00
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha													
						Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya				0 Kelompok	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		100.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														dan ekonomi biru				
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang difasilitasi/dikelola	-			2 unit	52.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	100.000.000,00
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	52.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		100.000.000,00
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah pengawasan sumber daya ikan di perairan daratan	-			35.29 %	15.000.000,00						-	25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota	-			2 laporan	15.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	25.000.000,00
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota													
						Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				10 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		25.000.000,00
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan	-			30 %	25.000.000,00						-	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah laporan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	-			2 laporan	25.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	30.000.000,00
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko													
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				5 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		30.000.000,00
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						17.899.860.990,00							43.545.070.295,00
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			73.65 nilai	17.509.860.990,00						-	19.788.638.295,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			8 dokumen	16.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	35.000.000,00
3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		15.000.000,00
3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		4.000.000,00
3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		6.000.000,00
3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		10.000.000,00
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	-			1 dokumen	15.866.249.060,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	17.719.638.295,00
3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/bulan	15.860.249.060,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		17.699.638.295,00
3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		20.000.000,00
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			1 laporan	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	10.000.000,00
3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		10.000.000,00
3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	-			1 dokumen	4.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	10.000.000,00
3	27	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah													
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	-			100 %	2.240.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	10.000.000,00
3	27	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	2.240.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		10.000.000,00
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dukungan administratif perangkat daerah yang dilaksanakan	-			100 %	118.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	334.000.000,00
3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		4.000.000,00
3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		30.000.000,00
3	27	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		20.000.000,00
3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		20.000.000,00
3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		250.000.000,00
3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	1.406.740.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	1.460.000.000,00
3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	121.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		160.000.000,00
3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.285.740.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		1.300.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	-			20 unit	92.631.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	-	210.000.000,00
3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	81.096.930,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		160.000.000,00
3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	8.940.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		25.000.000,00
3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2.595.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		25.000.000,00
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Tembakau, Kopi, Teh, Cengkeh, Kelapa, Kakao) Populasi ternak (Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas) Produksi komoditas tanaman pangan (Padi, Jagung, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Ubi Jalar) Produksi komoditas hortikultura (Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang Merah, Bawang Putih, Alpukat, Duku, Durian, Jambu Biji, Pisang, Tanaman Biofarmaka Jahe)	-			1017.2 ton 12849785 ekor 487997 ton 509787 kuintal	292.557.600,00						-	16.909.210.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah benih bersertifikat yang disalurkan kepada petani Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura Jumlah petani yang mendapat pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	-			0 batang 1 laporan 67255 petani	107.557.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	1.255.000.000,00
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		1.205.000.000,00
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	72.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														dan ekonomi biru				
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan													
						Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				1 Laporan	10.557.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		25.000.000,00
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitas tentang tanaman pangan dan hortikultura Jumlah kelompok ternak yang mendapatkan manfaat	-			10 kelompok 10 kelompok	65.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	15.534.210.000,00
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		60.000.000,00
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													
						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		15.474.210.000,00
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah laporan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kabupaten/kota lain	-			1 laporan	120.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	120.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
						Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				5000 Dosis	120.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		120.000.000,00
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan usaha tani) dalam keadaan baik	-			28.58 %	23.000.000,00						-	6.520.000.000,00
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan pengembangan prasarana pertanian	-			1 laporan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	520.000.000,00
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		500.000.000,00
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian													
						Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		20.000.000,00
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan prasarana pertanian	-			0 unit	13.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	6.000.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
						Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		800.000.000,00
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				0 Unit	13.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		200.000.000,00
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		5.000.000.000,00
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-			2.04 %	40.000.000,00						-	60.000.000,00
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	-			1 laporan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	15.000.000,00
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				1 Wilayah	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		15.000.000,00
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota	-			1 laporan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	10.000.000,00
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	-			1 laporan	20.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	35.000.000,00
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
						Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		35.000.000,00
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana tanaman pangan dan hortikultura yang tertangani Persentase bencana perkebunan yang tertangani	-			100 % 100 %	24.442.400,00						-	30.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana tanaman pangan dan hortikultura	-			1 laporan 1 laporan	24.442.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	30.000.000,00
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				300 Ha	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		18.000.000,00
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
						Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				10 Ha	9.442.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau,	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		12.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
														Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														dan ekonomi biru				
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	-			16.50 %	10.000.000,00						-	237.222.000,00
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian	-			1 laporan	10.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	-	237.222.000,00
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota													
						Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya				17 Unit	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		10.000.000,00
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
						Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-		227.222.000,00
						J U M L A H	**18.064.860.990,00**							**44.035.070.295,00**

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good goverment) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026.

Disadari sepenuhnya dalam penyusunan RENJA tahun 2026 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan pada segenap pihak yang telah bekerjasama dan membantu atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini. Akhir kata semoga rencana kerja ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Karanganyar, 26 September 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNARNO, S.H., M.H., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721227 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iv
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-1
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	II-1
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025 ..	II-1
	2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	II-22
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	II-23
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-47
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III-1
	3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah..	III-4
	3.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	III-5
	3.4. Tantangan dan Peluang	III-7
	3.5. Program dan Kegiatan	III-9
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	IV-1
	4.1. Program Kegiatan dan Subkegiatan OPD	IV-1
	4.2. Dana Indikatif	IV-1
	4.3. Sumber Dana yang Dibutuhkan	IV-1
BAB V	PENUTUP	V-1
	5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	V-1
	5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	V-1
	5.3. Rencana Tindak Lanjut	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Dinas Lingkungan Hidup	II-1
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Keuangan DLH Tahun 2024	II-5
Tabel 2.3	Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025 (TW II)	II-6
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-9
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024	II-9
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-10
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	II-10
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	II-12
Tabel 2.9	Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024	II-12
Tabel 2.10	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup	II-14
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	II-23
Tabel 2.12	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar	II-26
Tabel 2.13	Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-47
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	III-6
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026	IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta sebagai salah pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat dengan RENJA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. RENJA Tahun 2026 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan dokumen RENJA tahun berjalan, kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak–hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan RENJA dilakukan melalui tahapan : (1) Persiapan penyusunan RENJA; (2) Penyusunan Awal Rancangan RENJA; (3) Penyusunan Rancangan RENJA; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir RENJA; dan Penetapan RENJA.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20252045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
22. Peraturan Bupati Karanganyar No 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Lampiran IX (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35)
24. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan RENJA ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Tujuan penyusunan RENJA adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung suksesnya pencapian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang alasan, proses penyusunan, keterkaitan antara dokumen RKPD, Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

Pada Bab ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, disusun dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2025
Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 di tahun kedua (2026).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama dan Kunci, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Berisikan uraian mengenai:
1) Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup; dan
3) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5 Penelaahan usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Masyarakat, hasil Forum Perangakat Daerah (FPD).

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran renja Tahun 2026 yang diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator dan target tahun 2026. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimilik serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dan hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2024 dan perkiran kinerja Tahun 2025. Pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja
   Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*) keluaran (*output*), hasil (*outcome*) manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
b. Capaian Analisis Kinerja
   Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.1.1 Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Dinas Lingkungan Hidup telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.198.882.572	10,033,610,156	122,38	8.927.030.556	10.026.705.556	112,32
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.547.200	27.099.200	94,93	89.000.000	95.951.000	107,81
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan	13.539.200	6.294.200	46,49	15.000.000	20.604.800	137,37
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.500.000	2.500.000	166,67	3.500.000	2.546.200	72,75
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	1.500.000	50,00	2.500.000	2.849.000	113,96
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000	2.740.000	182,67	3.500.000	3.100.000	88,57
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.008.000	6.751.000	168,44	8.000.000	8.034.000	100,43

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.814.000	116,28	54.000.000	56.317.000	104,29
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.537.390.972	7.607.818.556	100,91	7.933.719.556	8.793.594.556	110,84
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.364.110.972	7.401.088.556	100,50	7.724.000.556	8.601.875.556	111,37
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	158.280.000	151.140.000	95,49	153.100.000	135.100.000	88,24
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	5.259.600	5.259.600	100,00
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	48.590.000	485,90	51.359.400	51.359.400	100,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00	2.561.000	2.561.000	100,00
12)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	2.561.000	2.561.000	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	20.000.000	200,00	28.000.000	28.000.000	100,00
13)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	20.000.000	200,00	28.000.000	28.000.000	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.744.000	334.409.500	194,71	334.708.000	366.757.000	109,58
14)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	100,00	4.000.000	4.000.000	100,00
15)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	103.025.500	171,71	75.000.000	78.636.400	104,85
16)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.100.000	22.269.000	220,49	20.208.000	20.571.600	101,80
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.030.000	7.930.000	261,72	3.500.000	3.500.000	100,00
18)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.900.000	3.900.000	100,00	15.000.000	15.000.000	100,00
19)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.214.000	184.785.000	211,88	200.000.000	230.000.000	115,00
20)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	5.000.000	5.000.000	100,00
21)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.000.000	9.000.000	225,00	12.000.000	10.049.000	83,74
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	1.260.000.000	100,00	0	0	0
22)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1.185.000.000	100,00	0	0	0
23)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	75.000.000	100,00	0	0	0
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.547.500	297.117.500	101,65	284.192.000	466.992.000	164,32
24)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.692.000	1.692.000	100,00	1.692.000	1.692.000	100,00
27)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.000.000	261.000.000	100,00	250.000.000	416.000.000	166,40
28)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.635.000	30.205.000	121,26	25.000.000	25.000.000	100,00
29)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.220.500	4.220.500	100,00	7.500.000	24.300.000	324,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.652.900	487.165.400	212,79	254.850.000	272.850.000	107,06
30)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.050.000	160.562.500	100,00	145.050.000	163.050.000	112,41
31)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	40.000.000	100,00	49.800.000	49.800.000	100,00
32)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.602.900	286.602.900	783,01	60.000.000	60.000.000	100,00
II.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	130.000.000	275.000.000	150,00	245.000.000	270.000.000	110,20
9.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000	*20.000.000*	100,00	0	0	0
33)	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100,00	0	0	0
10.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	110.000.000	*255.000.000*	159,09	245.000.000	270.000.000	110,20

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
34)	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0	20.000.000	100,00	0	0	0
35)	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	110.000.000	235.000.000	140,91	150.000.000	150.000.000	100,00
36)	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		0	-	95.000.000	170.000.000	178,95
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	725.950.000	1.707.003.000	193,16	1.240.000.000	633.197.000	51,06
11.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	615.950.000	*1.267.003.000*	204,93	1.130.000.000	520.697.000	46,08
37)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	70.000.000	80.000.000	100,00	70.000.000	70.000.000	100,00
38)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	140.000.000	140.000.000	100,00	140.000.000	140.000.000	100,00
39)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	405.950.000	1.047.003.000	259,21	920.000.000	310.697.000	33,77
12.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	45.000.000	*195.000.000*	100,00	30.000.000	42.500.000	141,67
40)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	45.000.000	195.000.000	100,00	30.000.000	42.500.000	141,67
13.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	65.000.000	*245.000.000*	146,15	80.000.000	70.000.000	87,50
41)	Pelaksanaan Rehabilitasi	65.000.000	245.000.000	146,15	80.000.000	70.000.000	87,50
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	60.000.000	160.000.000	266,67	75.000.000	97.300.000	129,73
14.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	60.000.000	*160.000.000*	266,67	75.000.000	97.300.000	129,73
42)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	60.000.000	160.000.000	266,67	75.000.000	97.300.000	129,73
V.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	130.000.000	130.000.000	100,00	75.000.000	12.800.000	17,07
15.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	130.000.000	*130.000.000*	100,00	50.000.000	12.800.000	25,60
43)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	130.000.000	130.000.000	100,00	50.000.000	12.800.000	25,60
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	118.000.000	118.000.000	100,00	110.000.000	110.000.000	100,00
16.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	118.000.000	*118.000.000*	100,00	110.000.000	110.000.000	100,00
44)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000	60.000.000	100,00
45)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.000.000	58.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	168.500.000	93.500.000	46,59	78.500.000	70.500.000	89,81
17.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	168.500.000	*93.500.000*	46,59	78.500.000	70.500.000	89,81
46)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000	57.000.000	100,00	16.500.000	16.500.000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
47)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	42.000.000	20.000.000	100,00	42.000.000	24.000.000	57,14
48)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	110.000.000	16.500.000	18,18	20.000.000	30.000.000	150,00
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	18.000.000	18.000.000	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
18.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	*18.000.000*	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
49)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.000.000	18.000.000	100,00	20.000.000	20.000.000	100,00
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	40.000.000	20.000.000	75,00	50.000.000	50.000.000	100,00
19.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	40.000.000	*20.000.000*	75,00	50.000.000	50.000.000	100,00
50)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	40,000,000	20.000.000	75,00	50.000.000	50.000.000	100,00
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.412.000.000	7.383.500.000	136,19	7.165.994.600	16.102.594.600	224,71
20.	Pengelolaan Sampah	4.412.000.000	*7.383.500.000*	136,19	7.165.994.600	16.102.594.600	224,71
51)	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	60.000.000	42.500.000	70,83	40.000.000	209.600.000	524,00
52)	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	4.352.000.000	7.285.800.000	135,82	3.575.994.600	13.619.994.600	380,87
53)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	0	55.200.000	100,00	2.400.000.000	2.273.000.000	94,71
XI	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0	30.000.000	100,00	30.000.000	30.000.000	100,00
21.	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	0	30.000.000	100,00	30.000.000	30.000.000	100,00
54)	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	0	30.000.000	100,00	30.000.000	30.000.000	100,00
	JUMLAH	14.001.332.572	19.968.613.156	142,62	17.991.525.156	27.423.097.156	152,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2025 diolah

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%. Hal ini berdampak pada alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 27.423.097.156,- atau 152,42% harus berkurang sebesar Rp. 325.040.000,-.

Pada bulan April, Kabupaten Karanganyar mendapatkan Sanksi Administrasif terkait penghentian open dumping, yang termuat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembungan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sukosari Jumantono Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sehingga Dinas Lingkungan Hidup mendapat tambahan anggaran

untuk pembenahan pengelolaan sampah di TPA Sukosari sebesar Rp. 12.024.467.000,- yang terdiri dari Rp. 10.420.000.000,- sumber dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rp. 104.467.000,- berasal dari Belanja Tak Terduga, serta Rp. 1.500.000.000,- sumber dana dari DAU, sehingga pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup menjadi Rp. 39.122.524.156,00 atau 94,88% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Anggaran Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 19.968.613.156,- yang terdiri dari dana APBD murni (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut digunakan untuk membiayai urusan wajib bidang lingkungan hidup meliputi 11 (sebelas) program yang terbagi atas 20 (dua puluh) kegiatan dan 51 (lima puluh satu) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut, anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 19.396.579.143,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian kegiatan keuangan tahun anggaran 2024 sebesar 97,14%, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Keuangan DLH Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	**16.342.875.406**	**15.794.655.116**	**96,65**
Belanja Pegawai	7.401.088.556	7.075.075.768	95,60
Belanja Barang	8.941.786.850	8.719.579.348	97,51
BELANJA MODAL	**3.625.737.750**	**3.601.924.027**	**99,34**
Belanja Peralatan dan Mesin	2.761.037.750	2.750.614.107	99,62
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	859.800.000	846.409.920	98,44
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.900.000	4.900.000	100,00
BELANJA DAERAH	**19.968.613.156**	**19.396.579.143**	**97,14**

Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2024 sebesar Rp. 7.401.088.556,- dan yang terealisasi adalah sebesar Rp. 7.075.075.768,- sehingga selisih pagu anggaran sebesar Rp. 326.012.788,-. Dengan demikian capaian realisasi keuangan belanja pegawai mencapai 97,51%.

Belanja barang dan jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 8.941.786.850,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.719.579.348,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 222.207.502,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja barang dan jasa mencapai 97,51%.

Belanja modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2024 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 3.625.737.750,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 3.601.924.027,- sehingga terdapat sisa anggaran yaitu sebesar Rp. 23.813.723,-. Dengan demikian untuk capaian realisasi keuangan belanja modal 99,34%.

Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024.

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah didasarkan pada Pergeseran APBD 2025 yang merupakan hasil efisiensi anggaran sebagai dampak regulasi keuangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Realisasi APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.033.610.156	9.633.224.412	96,01	9.888.453.206	4.704.063.163	47,57
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.099.200	26.493.346	97,76	32.739.400	9.653.062	29,48
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan	6.294.200	5.841.100	92,80	15.811.300	2.737.400	17,31
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	2.500.000	2.485.462	99,42
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000	2.494.500	99,78	1.863.500	-	0,00
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	2.849.000	2.849.000	100
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.740.000	2.740.000	100,00	1.818.000	-	0,00
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.751.000	6.706.150	99,34	6.356.000	1.581.200	24,88
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.814.000	5.711.596	98,24	1.541.600	-	0,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.607.818.556	7.277.955.768	93,34	8.790.081.306	4.241.595.884	48,25
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.401.088.556	7.075.075.768	93,17	8.601.875.556	4.129.132.764	48,00
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151.140.000	151.140.000	99,99	135.038.800	68.004.650	50,36
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	3.948.450	1.751.250	44,35
11)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48.590.000	46.740.000	100,00	49.218.500	42.707.220	86,77
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00	2.311.000	1.184.200	51,24
12)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100,00	2.311.000	1.184.200	51,24
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000	11.137.264	55,69	28.000.000	11.645.000	41,59
13)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	11.137.264	55,69	28.000.000	11.645.000	41,59
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.409.500	329.581.461	98,56	295.479.500	153.010.775	51,78
14)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.749.000	87,45	4.000.000	-	0,00
15)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.025.500	99.032.400	96,12	97.320.900	34.392.496	35,34
16)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.269.000	22.269.000	100,00	20.571.600	11.931.875	58,00
17)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.930.000	7.930.000	100,00	3.500.000	1.740.000	49,71
18)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.900.000	3.900.000	100,00	12.000.000	11.500.000	95,83
19)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.785.000	184.775.061	99,99	146.875.000	89.504.426	60,94
20)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.237.500	82,50	2.997.000	452.883	15,11
21)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.000.000	8.688.500	96,54	8.215.000	3.489.095	42,47
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.260.000.000	1.253.698.877	99,51	0	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
22)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.185.000.000	1.179.154.607	99,51	0	0	0
23)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	74.544.270	99,39	0	0	0
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.117.500	264.438.831	89,00	466.992.000	157.323.571	33,69
24)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.692.000	1.692.000	100,00	1.692.000	800.000	47,28
27)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.000.000	228.321.331	87,48	416.000.000	133.035.751	31,98
28)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.205.000	30.205.000	100,00	25.000.000	12.010.000	48,04
29)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.220.500	4.220.500	100,00	24.300.000	11.477.820	47,23
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.165.400	467.918.865	96,05	272.850.000	129.650.671	47,52
30)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.562.500	159.412.825	99,28	163.050.000	73.479.171	45,07
31)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	28.108.500	70,27	49.800.000	7.171.500	14,40
32)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	286.602.900	280.397.540	97,83	60.000.000	49.000.000	81,67
II.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	275.000.000	273.286.975	99,38	254.250.400	98.792.364	38,86
9.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000	19.999.875	100,00	0	0	0
33)	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	20.000.000	19.998.500	99,99	0	0	0
10.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	255.000.000	253.287.100	99,33	254.250.400	98.792.364	38,86
34)	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	20.000.000	19.998.500	99,99	0	0	0
35)	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	235.000.000	233.288.600	99,27	111.199.800	96.855.864	67,71
36)	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	0	0	0	143.050.600	1.936.500	1,74
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.707.003.000	1.687.008.474	98,83	652.778.350	320.711.134	49,13
11.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.267.003.000	1.254.738.724	99,03	569.022.050	251.070.834	44,12
37)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	80.000.000	76.648.160	95,81	139.785.050	32.442.960	23,21
38)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	140.000.000	137.907.800	98,51	139.343.000	61.370.514	44,04
39)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.047.003.000	1.040.182.764	99,35	289.894.000	157.257.360	54,25
12.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	195.000.000	190.855.750	97,87	14.233.700	2.127.800	14,95
40)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	195.000.000	190.855.750	97,87	14.233.700	2.127.800	14,95
13.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	245.000.000	241.414.000	98,54	69.522.600	67.512.500	97,11
41)	Pelaksanaan Rehabilitasi	245.000.000	241.414.000	98,54	69.522.600	67.512.500	97,11
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	160.000.000	155.418.600	97,14	96.109.200	30.748.800	31,99
14.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	160.000.000	155.418.600	97,14	96.109.200	30.748.800	31,99
42)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	160.000.000	155.418.600	97,14	96.109.200	30.748.800	31,99
V.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	130.000.000	128.962.750	99,20	7.883.400	6.222.200	78,93

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN						
15.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	130.000.000	128.962.750	99,20	7.883.400	6.222.200	78,93
43)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	130.000.000	128.962.750	99,20	7.883.400	6.222.200	78,93
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	118.000.000	117.645.100	99,70	176.284.200	50.982.800	28,92
16.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	118.000.000	117.645.100	99,70	176.284.200	50.982.800	28,92
44)	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	60.000.000	59.946.750	99,91	140.470.000	30.368.800	21,62
45)	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.000.000	57.698.350	99,48	35.814.200	20.614.000	57,56
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	93.500.000	93.200.150	99,68	59.305.900	34.710.701	58,53
17.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	93.500.000	93.200.150	99,68	59.305.900	34.710.701	58,53
46)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	57.000.000	56.829.500	99,70	18.483.700	3.354.000	18,15
47)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	20.000.000	19.883.650	99,42	29.936.800	29.375.051	98,12
48)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	16.500.000	16.487.000	99,92	10.885.400	1.981.650	18,20
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	18.000.000	17.319.000	96,22	15.723.000	-	0,00
18.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000	17.319.000	96,22	15.723.000	-	0,00
49)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.000.000	17.319.000	96,22	15.723.000	-	0,00
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000	19.997.600	99,99	38.186.000	11.781.000	30,85
19.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	20.000.000	19.997.600	99,99	38.186.000	11.781.000	30,85
50)	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	20.000.000	19.997.600	99,99	38.186.000	11.781.000	30,85
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.383.500.000	7.270.516.082	98,47	27.912.458.300	9.143.449.700	32,76
20.	Pengelolaan Sampah	7.383.500.000	7.270.516.082	98,47	27.912.458.300	9.143.449.700	32,76
51)	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	42.500.000	42.042.250	98,92	204.561.600	66.252.000	32,39
52)	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	7.285.800.000	7.151.335.507	98,15	14.890.972.500	6.900.877.500	46,34
53)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	55.200.000	48.518.800	87,90	12.816.924.200	2.176.320.200	16,98
XI	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	30.000.000	28.619.525	95,40	21.092.200	19.524.900	92,57
21.	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	30.000.000	28.619.525	95,40	21.092.200	19.524.900	92,57

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
54)	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	30.000.000	28.619.525	95,40	21.092.200	19.524.900	92,57
	JUMLAH	19.968.613.156	19.396.579.143	97,14	39.122.524.156	14.420.986.762	36,86

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 19.968.613.156,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.396.579.143,- atau 97,14 %. Sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 14.420.986.762,- atau 36,86% dari pagu efisiensi anggaran Rp. 39.122.524.156,-.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	**Sasaran**	**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,93	70,12	106,36
2.	Meningkatnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52,85	65,68	124,28
3	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP (Daerah)	Nilai	71	75,5	106,34
	Rata-rata					112,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel 2.5 kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 masuk kriteria sangat tinggi (112,33%) di mana ketiga indikator sasaran mencapai lebih dari 100%.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sama dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis sama dengan pencapaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup. Capaian target IKU Dinas Lingkungan Hidup yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,93	65,93	70,12	106,36	72,57	96,62
2	Indeks Kualitas Lahan	52,85	52,85	65,68	124,28	41,04	160,04
3	Nilai SAKIP OPD	71,35	71	75,5	106,34	70,80	106,64
	Capaian Kinerja Rata-rata				112,33	Melebihi Target	

Berdasarkan pengukuran kinerja pada tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata Dinas Lingkungan Hidup sebesar 112,33% atau melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini merupakan capaian tahun pertama Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Pencapaian kinerja sasaran terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Kriteria Sasaran	Jumlah Indikator
1	Melebihi/melampaui target	3
2	Sesuai target	0
3	Di bawah target	0
	Jumlah	3

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup di atas 100%, antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 106,36, Indeks Kualitas Lahan sebesar 124,28, dan Nilai SAKIP OPD sebesar 106,34, melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024. Tetapi jika disandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026, ada indikator yang belum mencapai target, masih di bawah 100% yaitu indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 tercapai dari hasil akumulasi perhitungan 0,376 Indeks Kualitas Air (IKA) ditambah 0,405 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) ditambah 0,219 Indeks Kualitas Lahan (IKL). Rumusan perhitungan tersebut berdasarkan dari ketentuan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor S.274/SETPPKL/PEHKT/DTN.0.2/B/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2024. Realisasi tahun 2024 untuk Indeks Kualitas Air sebesar 50, Indeks Kualitas Udara sebesar 91,21, Indeks Kualitas Lahan sebesar 65,68, sehingga dengan formulasi hitungan 0,376 Indeks Kualitas Air + 0,405 Indeks Kualitas Udara + 0,219 Indeks Kualitas Lahan, diperoleh angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,12.

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sangat dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Jika salah satu mengalami penurunan, dapat mempengaruhi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Secara keseluruhan dan berdasarkan perhitungan dari rumusan hitung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai IKLH tahun 2024 sebesar 70,12. Angka ini melebihi target yang telah ditentukan, baik target dalam Perjanjian Kinerja (65,93) maupun dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 (65,93).

Indeks Kualitas Lahan didasarkan pada elaborasi beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Data perhitungan Indeks Kualitas Lahan tidak hanya dibatasi pada luasan hutan, namun juga meliputi :

1. Tutupan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder (bekas tebangan), hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman;
2. Tutupan belukar dan belukar rawa pada hutan;
3. Tutupan belukar dan belukar rawa pada fungsi lindung (wilayah dengan kelerengan >25%, sempadan sungai, danau dan sempadan pantai);
4. Tutupan berupa ruang terbuka hijau (hutan kota, taman kota, jalur hijau, dll) kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Semakin banyak luasan tutupan lahan, maka semakin besar pula Indeks Kualitas Lahan. Realisasi Indeks Kualitas Lahan sebesar 65,68, melebihi target dalam Perjanjian Kinerja (52,85) maupun dalam RENSTRA Tahun 2024-2026 (37,58).

Capaian indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 yang merupakan tahun pertama RPD Tahun 2024-2026 rata-rata memenuhi keseluruhan target yang sudah ditetapkan, bahkan persentase capaian melebihi target yang ditentukan. Adanya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) melebihi target, artinya kualitas lingkungan hidup di Karanganyar masih dalam kriteria sedang, artinya masih terjaga kualitasnya.

Adapun untuk nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan, dimana di tahun 2023 sebesar 71,35 (BB), dan di tahun 2024 menjadi 75,5 (BB). Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (71) maupun dalam Renstra (70). Hal ini berarti bahwa pelaporan kinerja lebih baik dari tahun 2023, sekalipun masih ada yang harus diperbaiki.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kunci merupakan alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan keberhasilan suatu visi dan misi dalam penyelesaian isu strategis yang ada selama kurun waktu 3 tahun. Indikator

Kunci Perangkat Daerah terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM), dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Realisasi 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)		(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,93	65,93	70,12	106,36	72,57	96,62
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	76,60%	81%	76,90%	94,94	83%	92,65
3	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	39%	80%	40%	50	86%	46,51

Sedangkan untuk capaian program Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9.
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	85	76,47*	89,96
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun	%	100	100	100
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu	%	76	76	100
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase jumlah pengelolaan kehati	%	80	100	125
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3	%	75	100	133,33
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	81	76,90	94,94

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)					
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH	**%**	80	84,52	105,65
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional	%	75	75	100
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup	%	100	100	100
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkelola	%	80	40	50
11.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase luas lahan yang dilindungi	%	70	70	100
	Rata-Rata Kinerja Program					**99,90**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, diolah

Keterangan :

*) Realisasi dari 17 indikator (3 indikator sasaran/IKU, 11 indikator program, dan 3 indikator kinerja kunci) dimana terdapat 4 indikator yang tidak tercapai yaitu :

1. Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
2. Persentase jumlah sampah yang terkelola;
3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota;
4. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.9 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan persentase mencapai 99,90% dari target yang ditetapkan masuk kriteria Sangat Baik. Ada catatan nilai Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tidak tercapai targetnya, tidak dapat tercapai adalah karena yang dicantumkan dalam indikator kinerja kunci adalah ketaatan penanggung jawab usaha terhadap peraturan perundang-undangan maupun terhadap izin usaha memang perlu peningkatan dalam pengawasan maupun pembinaan. Terkait dengan pengelolaan sampah yang masih rendah, Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk melakukan pembenahan, baik itu di hulu melalui sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah kepada masyarakat, maupun di hilir melalui pembenahan pengelolaan sampah di TPA.

Tabel berikut menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2025 :

Tabel 2.10.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**87**	85	85	76,47	89,96	86	82,49	94,82
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**16 dokumen**	16	16	16	100	16	16	100
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan lingkungan hidup Kab. Karanganyar yang tersusun	4 dokumen	4	3	3	100	4	3,67	91,75
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2	2	2	100	2	2	100
2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	2	2	2	100	2	2	100
2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2	2	2	100	2	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2	2	2	100	2	2	100
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3	3	3	100	3	3	100
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1	1	1	100	1	1	100
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase kelancaran pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	100	85	100	117,65	100	100	100
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang/ bulan	82	82	82	100	79	81	98,78
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	108 dokumen	108	108	108	100	108	108	100
2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	4	4	4	100	4	4	100
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	12	12	12	100	12	12	100
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi barang yang tertangani**	**70%**	70	70	70	100	70	70	100
2	**11**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12	12	12	100	12	12	100
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**75 %**	70	70	70	100	70	70	100
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	7	6	6	100	15	9,33	46,65

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup**	**85%**	85	85	85	100	85	85	100
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	7	7	7	100	10	8	57,14
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	60	60	60	100	70	63,33	79,16
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6	6	6	100	6	6	100
2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	24	24	24	100	24	24	100
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 laporan	11	11	11	100	12	11,33	87,15
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 bulan	12	10	10	100	12	11,33	80,93
2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000 dokumen	21.000	21.000	21.000	100	21.000	21.000	100
2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0 %**	100	100	100	100	100	100	100
2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	1	2	2	100	7	7	100
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase kelancaran pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah**	**85%**	85	85	85	100	85	85	100
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	6	6	6	100	6	6	100
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12	12	12	100	12	12	100
2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8	8	8	100	8	8	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8	8	8	100	8	8	100
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**85%**	85	85	85	100	85	85	100
2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	10	10	10	100	10	10	100
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	33	33	33	100	33	33	100
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2	2	2	100	2	2	100
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun**	**100 %**	100	100	100	100	100	100	100
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah dokumen KLHS yang tersusun**	**100 %**	100	100	100	100	100	100	100
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0	1	1	1	100	0	0	0
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang Disusun	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	2	2	2	100	2	2	100
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	76	76	76	100	77	76,33	97,86
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan air, udara, tanah yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	76	76	76	100	77	76,33	97,86

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	3	3	3	100	3	3	100
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	101 dokumen	81	81	81	100	91	84,33	83,5
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlahkegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan**	**80%**	80	80	80	100	80	80	100
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	1	2	2	100	2	1,67	83,5
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang dilaksanakan**	**80%**	80	80	80	100	80	80	100
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 ha	1	1	1	100	1	1	100
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)**	**85 %**	85	85	85	100	85	85	100
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengelolaan kegiatan RTH**	**1 kegiatan**	1	1	1	100	1	1	100
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dilaksanakan	0,75 ha	0,25	0,25	0,25	100	0,5	0,33	44,44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan**	**100 %**	75	75	75	100	85	78.33	78.33
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Persentase cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan**	**100 %**	75	75	75	100	85	78.33	78.33
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1	1	1	100	1	1	100
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**	**83 %**	76,60	81	76,90	94,94	82	78,5	94,58
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan**	**80 %**	76,60	81	76,90	94,94	82	78,5	94,58
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 dokumen	10	10	10	100	15	11,67	58,33
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65 usaha	45	48	48	100	50	47,67	73,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**85 %**	80	80	84,52	105,65	82	82,17	96,67
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pembinaan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan yang dilaksanakan**	**20 kali**	20	20	20	100	20	20	100
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	35 dokumen	28	28	28	100	32	29,33	83,81
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 orang	50	50	50	100	50	50	100
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 lembaga	3	3	3	100	3	3	60
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**79 %**	70	75	75	100	77	74	93,67
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan yang mengikuti penghargaan tingkat nasional**	**79 %**	75	75	75	100	77	75,67	95,78
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	2	2	2	100	3	2,3	58,33
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup**	**100 %**	100	100	100	100	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	100 %	100	100	100	100	100	100	100
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 pengaduan	1	1	1	100	1	1	100
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**86%**	39	80	40	50	82	53,67	62,40
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**80%**	39	80	40	50	82	53,67	62,40
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 unit	0	1	1	100	6	2,3	38,89
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melalui pendauran ulang	3 laporan	1	1	1	100	2	1,33	44,44
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	34.074 ton	30.074	30.074	30.074	100	32.074	30.740	90,22
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**									
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70%**	70	70	70	100	70	70	100
3	**28**	**04**	2.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah desa yang diberdayakan**	**50%**	50	50	50	100	50	50	100
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	1	1	1	100	1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mengukur kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan sasaran, antara lain :

1. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi

Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut di atas menjadi tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Meningkatnya kualitas lahan, dengan indikator Indeks Kualitas Lahan;
2. Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, dengan sasaran Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan, yang indikatornya nilai SAKIP OPD.

Tabel 2.11 di bawah ini menyajikan target yang termuat dalam dokumen Renstra dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.11.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (thn-2)	2024 (thn-1)	2025 (thn-n)	2026 (thn+1)	2024 (thn-2)	2025 (thn-1)	2026 (thn-0)	2027 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	Menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,24	65,93	72,40	72,57	70,12	72,40	72,57	72,58	
2	Indeks Kualitas Lahan	-	Nilai yang menggambarkan kondisi kualitas lahan berdasarkan jenis dan luas tutupan lahan di suatu wilayah, dihitung dari proporsi tutupan lahan alami dibandingkan dengan lahan terbangun, menggunakan data citra satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG)	35,85	37,58	39,31	41,04	65,68	65,68	65,69	65,70	
3	Nilai SAKIP OPD	-	Mengukur tingkat akuntabilitas kinerja efektivitas dan efisiensi, sejauh mana suatu instansi mampu menjalankan perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara akuntabel untuk menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat	62,25	70,00	70,40	70,80	75,5	75,5	75,7	75,8	
4	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	Membandingkan pelaku usaha yang taat terhadap izin lingkungan dibandingkan dengan pelaku usaha yang diawasi	80%	81%	82%	83%	76,90%	80%	83%	83%	
5	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	-	Mengukur jumlah sampah terkelola dibandingkan jumlah timbulan sampah di wilayah Kab/Kota	75%	80%	82%	86%	40%	60%	86%	86%	

Sumber : DLH, 2025 diolah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Isu internal
   1. Tugas pokok dan fungsi selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi di dalam perkembangan dan keinginan masyarakat sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.
   2. Sumber daya manusia aparatur
      - Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses hasil kegiatan;
      - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
      - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
   3. Sarana dan prasarana
      - Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
      - Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
      - Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan.
   4. Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah daerah
      Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonomi harus mampu membiayai kebutuhan daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarannya. Sehingga diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran untuk dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu eksternal
   1. Globalisasi
      Seiring kemajuan jaman pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (*virtual*).
   2. Peraturan perundang-undangan
      Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good government* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparasi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaran *good government* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Penyusunan Renja dan RKPD Tahun 2026, pada tahapan Rancangan awal masih menggunakan RPD dan Renstra Tahun 2024-2026, tetapi pada tahapan berikutnya akan disesuai dengan Rancangan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029.

Dilihat dari kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan antara renja dengan Rancangan Awal RKPD 2026 maka, diketahui Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 sudah sinkron / konsisten.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.12.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				**25.177.143.800**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**11.751.416.781**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**87**	**17.215.843.800**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**87%**	**9.330.487.881**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**84%**	**114.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD**	**84 %**	**29.579.400**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan lingkungan hidup Kab. Karanganyar yang tersusun	3 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen rencana kerja pengelolaan lingkungan hidup Kab. Karanganyar yang tersusun	3 dokumen	8.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	2 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Karanganyar, Semua	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	2 dokumen	2.666.200

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
		Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2.998.200
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	3.220.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	6.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	60.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	4.195.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase kelancaran pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**8.525.343.800**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase kelancaran pengelolaan keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	7.877.015.681
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 orang/ bulan	8.311.358.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang/ bulan	7.658.469.581
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	108 dokumen	164.485.100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5500 dokumen	95.117.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	12.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	8.194.300

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	115.234.800
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset**	**12 bulan**	**5.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset**	**12 bulan**	**5.285.400**
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	5.285.400

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**75 %**	**100.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**75 %**	**20.000.000**
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup**	**88%**	**355.500.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup**	**88%**	**282.125.400**
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	4.000.000
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	125.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 paket	25.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	20.000.000
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	3.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.500.000
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	8.400.000
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	155.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	206.951.000
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000 dokumen	7.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000 dokumen	5.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
21	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	9.274.400
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**84%**	**7.556.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**84%**	**0**
22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 unit	0
	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	0
23	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	7.506.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	0

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase kelancaran pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah**	**88%**	**307.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase kelancaran pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah**	**88%**	**684.082.000**
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan	1.692.000
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	260.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	623.600.000
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	35.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	26.990.000
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	9.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	31.800.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**88%**	**253.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase pemeliharaan barang milik daerah**	**88%**	**432.400.000**
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	230.000.000
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	33.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	82.400.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	70.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	120.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun**	**100 %**	**220.000.000**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase jumlah dokumen pengelolaan LH yang tersusun**	**100 %**	**25.000.000**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun**	**100 %**	**100.000.000**	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun**	**100 %**	**0**

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
30	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	1 dokumen	50.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 dokumen	0
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah dokumen KLHS yang tersusun**	**100 %**	**120.000.000**	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah dokumen KLHS yang tersusun**	**100 %**	**25.000.000**
31	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	0	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	0 dokumen	0
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	25.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
32	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	2 dokumen	95.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	12.500.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	**1.350.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	**270.212.300**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan air, udara, tanah yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	**850.000.000**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan air, udara, tanah yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	**234.400.000**
33	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	20.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	200.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	40.000.000
35	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	101 dokumen	450.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 dokumen	174.400.000
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**Persentase jumlahkegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan**	**84%**	**250.000.000**	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan**	**84 %**	**18.000.000**
36	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan	250.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 laporan	18.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang dilaksanakan**	**84%**	**250.000.000**	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang dilaksanakan**	**84%**	**17.812.300**
37	Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 ha	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0,25 ha	17.812.300
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		**Persentase jumlah pengelolaan kehati**	**85 %**	**275.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase jumlah pengelolaan kehati**	**85 %**	**34.800.000**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah pengelolaan kehati**	**85 %**	**275.000.000**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**Jumlah pengelolaan kegiatan RTH**	**1 kegiatan**	**160.000.000**
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	125.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0
38	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	150.000.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	34.800.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN		**Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan**	**100 %**	**170.000.000**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**Cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan**	**100 %**	**0**
	Penyimpanan Sementara Limbah B3		**Persentase cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan**	**100 %**	**170.000.000**	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**		**Persentase cakupan pelaku usaha yang telah melakukan integrasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan**	**100 %**	**0**
39	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	130.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 dokumen	0
	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan	50 Usaha	40.000.000	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan	0 usaha	0

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	penyimpanan sementara limbah B3	Semua Kelurahan	rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan			teknis penyimpanan sementara limbah B3	Semua Kelurahan	rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		**Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**	**83 %**	**162.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**	**83 %**	**84.800.000**
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan**	**83 %**	**162.000.000**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan**	**83 %**	**84.800.000**
40	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 dokumen	41.800.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
41	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	65 usaha	82.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 usaha	43.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**85 %**	**134.300.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**85 %**	**0**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah		**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**85 %**	**134.300.000**	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**85 %**	**0**
42	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan	5 lembaga	29.300.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan	0 lembaga	0

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
			kompetensinya terkait PPLH					kompetensinya terkait PPLH		
43	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	35 dokumen	80.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 dokumen	0
44	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 orang	25.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 orang	0
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**79 %**	**40.000.000**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LH**	**79 %**	**0**
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia**	**79 %**	**40.000.000**	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup**		**Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia**	**79 %**	**0**

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
			usaha/dunia pendidikan yang mengikuti penghargaan tingkat nasional			**Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**usaha/dunia pendidikan yang mengikuti penghargaan tingkat nasional**		
45	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas	40.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 entitas	0
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		**Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup**	**100 %**	**50.000.000**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup**	**100 %**	**25.000.000**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		**Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti**	**100 %**	**50.000.000**	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**		Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti	100 %	**25.000.000**
46	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	1 pengaduan	45,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	30 pengaduan	25.000.000

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Sanksi	5.000.000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Sanksi	0
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**86%**	**5.560.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**86%**	**1.981.116.600**
	Pengelolaan Sampah		**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**86%**	**5.560.000.000**	**Pengelolaan Sampah**		**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**86%**	**1.981.116.600**
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	100.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah	1 dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah	0 dokumen	0

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
			Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada					Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		
49	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	6 unit	150.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 unit	0
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 dokumen	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 dokumen	0

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026			
		Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)		Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Volume satuan	Pagu Indikatif (Rp.)
48	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	34074 Ton	5.150.000.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	10000 ton	1.907.916.600
47	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sampah yang terdaur ulang	3 ton	60.000.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah sampah yang terdaur ulang	10 Ton	73.200.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70%**	**50.000.000**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**		**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70%**	**0**
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70%**	**50.000.000**	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70%**	**0**
47	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 Desa	50.000.000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	0 Desa	0
					25.227.143.800					**11.751.416.781**

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar akan menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar 2026, telah memperhatikan berbagai usulan masyarakat dari seluruh kecamatan. Namun berdasar pencermatandari usulan hasil Musrenbang, tidak ada usulan yang masuk dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup melalui SIPD.

Tabel 2.13.
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) Tahun 2025-2029

Mengacu kepada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dan mempertimbangkan isu, sasaran dan target pembangunan Indonesia baik di tingkat global dan nasional, Visi Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 adalah ““Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai Visi Kementerian LH/BPLH 2025-2029, dirumuskan 4 (empat) misi sebagai gambaran umum atas upaya yang akan dilaksanakan. Keempat misi ini akan menjabarkan RPJMN 2025-2029 Bidang Lingkungan Hidup, menjembatani penjabaran visi dalam menetapkan tujuan, serta sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana termuat dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup, dan Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Misi Kementerian LH/BPLH Tahun 2025-2029 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kapasitas Lingkungan Hidup yang Tangguh dan Terjaga;
2. Mewujudkan Ekonomi Hijau melalui Pengendalian Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Partisipatif;
3. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang Kuat dan Adil;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang Baik.

Tujuan Kementerian LH/BPLH merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian LH/BPLH yang berperan penting dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian LH/BPLH. Berikut tujuan Kementerian LH/BPLH :

1. Meningkatnya kapasitas lingkungan hidup yang tangguh dan terjaga (Indikator Tujuan: Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup);

2. Meningkatnya ekonomi hijau dari pengendalian lingkungan hidup yang inklusif dan partisipatif (Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup);
3. Meningkatnya ketaatan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Indikator Tujuan: Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup);
4. Tata kelola pemerintahan bidang LH yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public (Indikator Tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi).

Sasaran strategis Kementerian LH/BPLH terdiri dari 5 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan indikator : Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup);
2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim, dengan Indikator :
   a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS);
   c. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Nasional;
   d. Persentase penurunan emisi GRK dari 5 sektor NDC yang selaras dengan pembangunan rendah karbon;
3. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Indikator Kinerja :
   a. Pertumbuhan nilai ekonomi dari pengelolaan lingkungan hidup;
   b. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLH/BPLH;
4. Menguatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Lintas Sektor dengan indikator kinerja Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, Kolaboratif, Profesional, dan Berdampak dengan indikator Kinerja :
   a. Indeks Reformasi Birokrasi
   b. Opini Terhadap Laporan Keuangan KLH/BPLH

3.1.2. Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2025-202. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah Jawa Tengah sebagai provinsi Maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi pembangunan daerah.

Berdasarkan visi misi pembangunan daerah dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang kemudian akan dirumuskan lebih lanjut dalam strategi dan arah kebijakan. Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah Mewujudkan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan dinamis
   Sasaran ini diwujudkan melalui meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif, meningkatkan kondusifitas wilayah dan demokrasi substansial, serta memperkuat otonomi fiskal daerah.
2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berbasis lingkungan
   Sasaran ini diwujudkan dengan memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sub sektor unggulan Jawa Tengah, meningkatkan kemandirian desa, meningkatkan upaya pengendalian inflasi, meningkatkan ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta pengurangan resiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap.
3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter
   Sasaran ini diwujudkan melalui meningkatkan akses layanan Pendidikan berkualitas, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga, meningkatkan budaya literasi dan kegemaran membaca melalui penguatan tata kelola literasi, meningkatkan daya saing pemuda, memperkuat jati diri dan meningkatkan pemajuan kebudayaan, meningkatkan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial, meningkatkan Pembangunan berbasis gender melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, dan penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pembangunan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang kedua dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub-sektor kehutanan.”

Berikut adalah tujuh sasaran utama yang menjadi tolok ukur pencapaian tujuan DLHK Provinsi Jawa Tengah periode 2025–2029:

1. Menurunnya Pencemaran Udara
   Mewujudkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat melalui penguatan pengawasan emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, serta inovasi pengendalian polusi di daerah perkotaan dan kawasan industri.
2. Menurunnya Pencemaran Air Permukaan
   Mengendalikan pencemaran air permukaan, memperkuat system pengawasan izin lingkungan, serta memperluas pemantauan kualitas air untuk menjamin keberlanjutan sumber air permukaan.
3. Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan
   Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, reboisasi, serta pengendalian alih fungsi lahan, DLHK berkomitmen memperluas cakupan kawasan hijau guna memperkuat daya dukung lingkungan.
4. Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
   Meningkatkan konservasi flora dan fauna, baik melalui penguatan kawasan konservasi maupun pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan.
5. Meningkatnya Kapasitas Produksi Hasil Hutan
   Mendorong produktivitas sub-sektor kehutanan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha kehutanan, pengembangan hasil hutan bukan kayu, dan diversifikasi produk ramah lingkungan.
6. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah
   Memastikan setiap kegiatan organisasi didesain dengan pendekatan manajemen risiko yang baik, sebagai bentuk akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
   Mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, melalui inovasi pelayanan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas SDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah "**SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera"**. Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi diatas berikut ini misi RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan misi kepala daerah Kabupaten Karanganyar yang terpilih:

1. Misi 1 Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Misi 2 Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian
3. Misi 3 Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan perlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Misi 4 Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Misi 5 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah serta pelestarian budaya daerah
3. Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah, dengan sasaran sebagai berikut;
   1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik
2. Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut;
   1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   2) Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;

1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
2) Meningkatnya riset dan inovasi
3) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan

4. Tujuan 4 Meningkatnya pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan

Tema Pembangunan tahun 2026 adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup yang termuat dalam dokumen RPJMD 2025-2029 yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan fokus peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan dengan meningkatkan pelayanan penanganan kasus pencemaran, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup mendukung ekonomi hijau.
Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, difokuskan pada Percepatan penurunan emisi gas rumah kaca, Peningkatan pemantauan kualitas air dan udara dari zat pencemar yang dihasilkan oleh usaha industri;
2. Peningkatan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir melalui optimalisasi pemanfaatan TPST;
3. Peningkatan konservasi hutan dengan fokus melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar taman hutan rakyat dalam menjaga kelestarian hutan.

3.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran daerah di atas, Dinas Lingkungan Hidup mengintervensi tujuan daerah kedua dengan sasaran daerah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sehingga tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan, dan Pengelolaan Sampah. Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu;
2. Meningkatnya kualitas udara;
3. Meningkatnya kualitas lahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup, diperoleh penjabaran seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar

No	Sasaran Daerah (RPJMD)	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian	
							2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan, dan Pengelolaan Sampah	Indeks Kualitas Air			Angka	50	69,32	69,42
				Meningkatnya kualitas air memenuhi baku mutu	Persentase kualitas air yang sesuai baku mutu	%	13,04	13,22	14,33
			Indeks Kualitas Udara			Angka	91,21	84,61	84,62
				Meningkatnya kualitas udara	Persentase kualitas udara yang terpantau	%	8,11	8,27	8,73
			Indeks Kualitas Lahan			Angka	65,68	55,12	55,14
				Meningkatnya kualitas lahan	Luasan tutupan lahan	ha	55.155,34	55.255	55.455
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah			Angka	36	37	37,5
				Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	0,07	1,5	2,5
				Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Angka	87	87,2	87,3

Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan.

Strategi yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu
    1. Melaksanakan pengendalian pencemaran industri, rumah tangga, peternakan dan pertanian
    2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan laboratorium lingkungan
    3. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup
    4. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan
    5. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air
b. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas udara
    1. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim
    2. Meningkatnya penanaman pohon di daerah kritis
c. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas lahan
    1. Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui peningkatan ruang terbuka hijau
    2. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi
    3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
d. Sasaran 4 Meningkatnya pengelolaan sampah
    1. Melakukan penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber
    2. Memperkuat peran bank sampah, TPS/TPS3R/PDU sebagai fasilitas pengelolaan sampah dengan prinsip 3R untuk sarana edukasi pemilahan, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular
    3. Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan di daerah masing-masing
    4. Mendorong pelaksanaan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur di dalam PermenLHK Nomor 75 Tahun 2019 khususnya bidang usaha jasa makanan dan minuman yang meliputi hotel, restoran, rumah makan, kafe, dan jasa boga; dan ritel yang meliputi pusat perbelanjaan, toko, modern, dan pasar rakyat
    5. Melakukan penanganan sampah di hilir meliputi perbaikan sistem pengangkutan sampah dari sumber ke TPA dengan penerapan sistem terpilah dan terjadwal, penataan pengolahan sampah di TPA dengan pembangunan RDF Plant dan memperbaiki sistem operasional TPA dari open dumping menjadi LUR dimana hanya residu yang tidak dapat diolah yang dibuang ke TPA
e. Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
    1. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi
    2. Meningkatkan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
    3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap data dan informasi lingkungan hidup.

3.4 Tantangan dan Peluang

3.4.1 Tantangan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan lingkungan hidup seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan yang kemungkinan dihadapi yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya
   a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan tenaga laboratorium masih terbatas;
   b. Keterbatasan anggaran menghambat optimalisasi program prioritas seperti pengendalian pencemaran, pemulihan lingkungan, dan peningkatan fasilitas persampahan;
2. Kompleksitas Permasalahan Lingkungan
   a. Peningkatan volume sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi;
   b. Pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah yang membutuhkan teknologi, peralatan memadai, serta frekuensi pengawasan yang intensif;
   c. Kerusakan ekosistem akibat alih fungsi lahan, banjir, erosi, dan kurangnya ruang terbuka hijau;
3. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Belum Optimal
   a. Tidak seluruh pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan yang sesuai ketentuan;
   b. Masih terdapat usaha yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan secara konsisten;
   c. Pelaporan berkala pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha belum sepenuhnya dilakukan secara rutin;
4. Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat
   a. Minimnya pemilahan sampah dari sumber dan masih banyak ditemukan pembuangan sampah sembarangan;
   b. Partisipasi masyarakat terhadap program lingkungan seperti bank sampah dan pengurangan plastik masih perlu ditingkatkan;
5. Koordinasi Lintas Sektor yang Belum Optimal
   a. Pengelolaan lingkungan hidup melibatkan banyak instansi sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor yang baik;
   b. Ketidaksinkronan program dan kebijakan antarperangkat daerah kadang menghambat efektivitas pengawasan dan pengendalian;
   c. Sistem data kualitas lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital;
   d. Peralatan laboratorium dan sarana pemantauan lingkungan masih terbatas dan membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan.

3.4.2 Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Nasional
   a. Pemerintah pusat menyediakan instrumen regulasi dan sistem digital seperti AMDALNET, SIMPEL, dan sistem pelaporan lainnya untuk memperkuat pengawasan lingkungan;
   b. Kebijakan pengurangan sampah dan pengendalian pencemaran memberikan kerangka yang jelas bagi daerah untuk bertindak lebih tegas;
2. Meningkatnya Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat
   a. Meningkatnya kesadaran lingkungan, khususnya pada generasi muda dan komunitas peduli lingkungan;
   b. Dukungan kelompok masyarakat membuka ruang partisipasi dalam kebersihan, konservasi, dan edukasi lingkungan;

3. Peluang Kerja Sama dan Kemitraan
   a. Pembentukan kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR dalam pengelolaan sampah, rehabilitasi lingkungan, dan ruang terbuka hijau;
   b. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM untuk pengembangan riset, sosialisasi, serta penguatan kapasitas SDM;
4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi
   a. Inovasi dalam pengolahan sampah melalui komposting modern, RDF, dan teknologi waste to energy;
   b. Pengembangan aplikasi pengaduan dan monitoring lingkungan berbasis masyarakat;
5. Potensi Ekonomi Sirkular dan Lingkungan
   a. Pengelolaan sampah dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui daur ulang, kompos, dan pengembangan bank sampah;
   b. Pengembangan ekowisata dan ruang terbuka hijau berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah;
6. Akses terhadap Program Nasional dan Bantuan Hibah
   a. Adanya program pemerintah seperti Kampung Iklim (ProKlim), kota hijau, dan pengendalian pencemaran yang dapat didukung pendanaan pusat;
   b. Peluang memperoleh bantuan peralatan laboratorium, fasilitas persampahan, atau pendampingan teknis dari kementerian/lembaga maupun mitra internasional.

3.5 Program dan Kegiatan

Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mendukung tercapainya misi Kepala Daerah Terpilih yang kelima yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan daerah kedua dengan sasaran daerah meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sehingga tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Lahan, dan Pengelolaan Sampah. Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas air yang memenuhi baku mutu;
2. Meningkatnya kualitas udara;
3. Meningkatnya kualitas lahan;
4. Meningkatnya pengelolaan sampah;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Guna mencapai tujuan dan sasaran tingkat daerah telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui program sebagai berikut :

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
      a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
      b. Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
      c. Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH
   2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
      a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
      b. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
      c. Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
   b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a. Pelaksanaan Rehabilitasi

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
   1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
      a. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
      b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
   1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
      a. Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
   1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
      b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
      b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
      c. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
   1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
   a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
   b. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

9. Program Pengelolaan Persampahan
   1) Pengelolaan Sampah
      a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
      b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
      c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
      d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
      e. Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
      f. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

B. URUSAN KEHUTANAN

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
   1) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
      a. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Kabupaten/Kota

Selain program utama tersebut, didukung pula oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pengadaan Mebel
   c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan akan dijabarkan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan OPD

Beberapa program kegiatan dan subkegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program, kegiatan dan subkegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program kegiatan dan subkegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah sebagaimana tabal 4.1.

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1.

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 didanai dari APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pendanaan untuk Renja Tahun 2026 ini mengalami penurunan yang signifikan, dikarenakan Transfer ke Daerah dari Pusat mengalami penurunan juga, sehingga terdapat banyak sub kegiatan yang tidak mendapatkan alokasi pendanaan. Hal ini akan berpengaruh pada target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			**11.751.416.781**							**28.798.917.000**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**11.751.416.781**							**28.748.917.000**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**11.751.416.781**							**28.748.917.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**87%**	**9.330.487.881**			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang BerdayaSaing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritasdalam tata kelola pemerintahan		**-**	**18.073.017.000**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD*	84 %	29.579.400			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	163.317.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	8.000.000	Kab. Karanganyar. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		20.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		4.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.666.200	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		6.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.998.200	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	3.220.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		6.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		16.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.195.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		106.317.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah*	100 %	7.877.015.681			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	8.722.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/ bulan	7.658.469.581	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		8.500.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	5500 Dokumen	95.117.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		165.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	8.194.300	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		15.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		2.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	115.234.800	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		40.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*jumlah kegiatan pemeriksaan dan pendataan aset*	12 bulan	5.285.400			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	5.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.285.400	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		5.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Prosentase kelancaran pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah*	75 %	20.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	105.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	20.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		105.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran bidang lingkungan hidup*	88 %	282.125.400			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	543.700.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		12.500.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	25.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		130.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	20.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		22.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		3.700.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu										
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		22.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	206.951.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		330.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	21.000 Dokumen	5.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		8.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	9.274.400	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		15.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Prosentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	84 %	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	7.556.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		0
Pengadaan Mebel										
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		50.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		7.506.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase kelancaran pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*	88 %	684.082.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	723.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	1.692.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		3.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	623.600.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		670.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	26.990.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		40.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	31.800.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		10.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan barang milik daerah*	88 %	432.400.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	255.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	230.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		152.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	82.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		33.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	120.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		70.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase jumlah dokumen pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersusun**	**100%**	**25.000.000**						**-**	**245.000.000**
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Prosentase jumlah dokumen RPPLH yang tersusun*	100 %	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar	-	120.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		60.000.000
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota										
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar		60.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah dokumen KLHS yang tersusun*	100 %	25.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	125.000.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD										
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		0

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang										
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	12.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		25.000.000
Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup										
	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	12.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		100.000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu**	**78 %**	**270.212.300**						**-**	**1.475.000.000**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah) yang memenuhi baku mutu*	78 %	234.400.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	905.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut										
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	20.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	40.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		225.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota										
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	10 Dokumen	174.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		480.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dilaksanakan*	84 %	18.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	270.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	18.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		270.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah kegiatan pemulihan pencemaran yang terlaksana*	84 %	17.812.300			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	300.000.000
Pelaksanaan rehabilitasi										
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0.25 Ha	17.812.300	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		300.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase jumlah pengelolaan kehati**	**85 %**	**34.800.000**						**-**	**325.000.000**
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah pengelolaan kehati*	85 %	34.800.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	325.000.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati										
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		150.000.000
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit	34.800.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		175.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Cakupan pelaku usaha yang telah dilakukan sosialisasi dan pembinaan dalam pengelolaan limbah B3**	**100 %**	**0**						**-**	**180.000.000**
Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase sosialisasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan terhadap pelaku usaha penghasil limbah B3*	100 %	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	180.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		130.000.000
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3										
	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		50.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase kegiatan atau usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan**	**83 %**	**84.800.000**						**-**	**175.000.000**
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki perizinan lingkungan*	83 %	84.800.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	175.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen	41.800.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		85.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan Usaha	43.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		90.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup**	**85 %**	**0**						**-**	**144.300.000**
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup*	85 %	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	144.300.000
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		90.000.000
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup										
	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		25.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0 Lembaga	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		29.300.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional**	**79 %**	**0**						**-**	**45.000.000**
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti Penghargaan Tingkat Nasional*	79 %	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	45.000.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		45.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase tindak lanjut aduan lingkungan hidup**	**100 %**	**25.000.000**						**-**	**53.000.000**

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti*	100 %	25.000.000			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	53.000.000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota										
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	30 Pengaduan	25.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		48.000.000
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Sanksi	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase jumlah sampah yang terkelola**	**86 %**	**1.981.116.600**						**-**	**8.033.600.000**
Pengelolaan Sampah	*Persentase jumlah sampah yang terkelola*	86 %	1.981.116.600			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	8.033.600.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan										
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		100.000.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota										
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		2.273.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota										
	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		0
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	10000 Ton	1.907.916.600	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.350.000.000
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah										
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	10 Ton	73.200.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		210.600.000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**0**							**50.000.000**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			**0**							**50.000.000**
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	**Persentase luas lahan yang dilindungi**	**70 %**	**0**						**-**	**50.000.000**
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	*Persentase luas lahan yang dilindungi*	70 %	0			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	50.000.000
Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota										

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
		TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
						NASIONAL	DAERAH			
3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	0 Desa	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar		50.000.000
			11.751.416.781							**28.798.917.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perancangan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar baik melalui peran serta lembaga swadaya masyarakat maupun kalangan swasta. Rencana kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas. Rencana program tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup, yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya *(cascading)* dan juga dapat mempengaruhi *(cross cutting)* capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan (direncanakan) disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran Tahun 2026;
3) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;
2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan urusan lingkungan hidup perlu:
   a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan urusan lingkungan hidup;
   b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup;
   c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja OPD;
   d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Selanjutnya RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini menjadi acuan kerjasama bagi sub bagian dan bidang-bidang teknis pelaksana di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu diharapkan sub bagian dan bidang-bidang melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target.

Dengan dilaksanakannya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alllah SWT dan atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya, Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar selama satu tahun yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengaju pada Renstra.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

Karanganyar, September 2025
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar

JUNAIDI PURWANTO,S.H,M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680607 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1. Latar Belakang.....I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil II-28
2.3. Evaluasi Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....II-29
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-42

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....III-1

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan.....III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran III-3
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....III-5

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....
.....IV-1

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di DISDUKCAPIL II-2
Tabel 2.2 Persandingan Realisasi APBD 2024 dan Triwulan 2 Tahun 2025 .....II-3
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024 .....II-6
Tabel 2.4 Capaian Indikator Tujuan-Sasaran dan Program tahun 2024 dan Tahun 2025 Smt 1 .....II-6
Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar II-8
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....II-28
Tabel 2.7 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 .....II-30
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....II-42
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 .....III-4
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD III-6
Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan III-6
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027 .....IV-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah. Rencana Kerja 2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kera ngka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyususan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra PD.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar disusun berdasarkan hasil koordiasi yang melibatkan seluruh unsur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renja yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2026 serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dan untuk mewadahi hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang disalurkan lewat Musrenbang serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah menetapkan program/kegiatan yang dianggarkan melalui APBD tahun berjalan, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju yang akan dilaksanakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing – masing yang diemban seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar pada umumnya dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada khusunya untuk mewujudkan tertib kepemilikan dokumen kependudukan bagi warga karanganyar.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, yang sedang ihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tahun lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat mengenai Telaah terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, serta Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana kerja dan pendanaan yang akan realisasiakan Dinas Kependuduakan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan serta kaidah-kaidah dengan pelaksanaan Renja ini

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2024) dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (2025), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi menitik beratkan pada aspek konsistensi program dan pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam sistem perencanaan dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.15.5-1317 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah penyesuaian dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada Indikator Sub Kegiatan dan jumlah target pada dokumen RENSTRA 2025-2029 untuk selanjutnya dokumen Rencana Kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar menyesuaikan sesuai RENSTRA 2025-2029.

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Dari keempat program tersebut terdiri dari 11 (sebelas) indikator kinerja program dengan status capaian kinerja program di tahun 2025 adalah sangat tinggi untuk semua indikator tersebut.

Terkait dengan hal tersebut renja Disdukcapil Karanganyar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran. dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Karanganyar tahun 2023 dan target tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di DISDUKCAPIL

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
					RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1				2	3	4	5	7	8	9
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	12			Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	6.960.924.626	6.960.654.626	100,00%	6.512.662.214	7.225.662.214	110,95%
2	12	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6.358.114.626	6.437.251.126	101,24%	5.082.954.714	5.802.794.714	114,16%
2	12	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	100,00%	16.600.000	12.500.000	75,30%
2	12	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.660.924.626	3.665.924.626	100,14%	3.633.984.014	3.866.894.964	106,41%
2	12	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	0	0	0,00%			
2	12	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	399.189.000	399.189.000	100,00%	124.957.000	155.169.000	124,18%
2	12	1	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.449.981.000	1.449.981.000	100,00%	358.311.790	344.806.698	96,23%
2	12	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00%	72.645.410	566.418.302	779,70%
2	12	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.440.000	626.440.000	100,00%	644.920.000	644.920.000	100,00%
2	12	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.580.000	230.986.500	147,52%	231.536.500	222.085.750	95,92%
2	12	2		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	192.162.500	192.162.500	100,00%	1.090.589.500	1.083.749.500	99,37%
2	12	2	2,01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	53.628.000	53.628.000	100,00%	43.616.000	32.551.000	74,63%
2	12	2	2,02	Penataan Pendaftaran Penduduk	0	0				
2	12	2	2,03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	128.934.500	128.934.500	100,00%	1.046.973.500	1.051.198.500	100,40%
2	12	2	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	9.600.000	9.600.000	100,00%			
2	12	3		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	172.758.000	172.758.000	100,00%	151.638.300	151.638.300	100,00%
2	12	3	2,01	Pelayanan Pencatatan Sipil	137.508.000	128.038.000	93,11%	116.127.300	116.127.300	100,00%
2	12	3	2,02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	35.250.000	44.720.000	126,87%	35.511.000	35.511.000	100,00%
2	12	3	2,03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	0				
2	12	4		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	134.633.400	134.633.000	100,00%	163.079.700	163.079.700	100,00%

2	12	4	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	27.650.000	27.650.000	100,00%	43.253.200	43.253.200	100,00%
2	12	4	2,03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	93.539.000	93.539.000	100,00%	119.826.500	119.826.500	100,00%
2	12	4	2,04	Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.444.400	13.444.000	100,00%			
2	12	5		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	23.850.000	23.850.000	100,00%	24.400.000	24.400.000	100,00%
2	12	5	2,01	Penyusunan Profil Kependudukan	23.850.000	23.850.000	100,00%	24.000.000	24.000.000	100,00%

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Tabel 2.2
Persandingan Realisasi APBD 2024 dan Triwulan 2 Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**6.960.924.626**	**6.525.569.753**	**93,75**	**6.715.053.214**	**3.300.336.281**	**49,15**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.437.521.126**	**5.984.575.714**	**93**	**5.657.723.152**	**2.419.330.481**	**42,76**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.000.000**	**14.917.000**	**99,5**	**10.105.000**	**1.715.000**	**16,97**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.947.000	98,9	5.310.000	1.715.000	32,30
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	9.970.000	99,7	4.795.000	0	0,00
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.665.924.626**	**3.314.507.492**	**90,4**	**3.865.929.964**	**1.768.007.037**	**45,73**
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.660.924.626	3.309.507.492	90,4	3.861.894.964	1.767.007.037	45,75
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100	4.035.000	1.000.000	24,78
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**399.189.000**	**397.030.000**	**99,5**	**142.809.000**	**114.685.000**	**80,31**
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	23.750.000	22.325.000	94	26.780.000	15.600.000	58,25
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	330.360.000	329.636.000	99,8	96.000.000	94.800.000	98,75
7	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.079.000	45.069.000	100	20.029.000	4.285.000	21,39
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.449.981.000**	**1.401.589.000**	**96,7**	**275.443.986**	**143.768.547**	**52,20**
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.855.300	16.855.300	100	11.843.040	3.924.700	33,14
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.707.000	57.997.000	98,8	65.590.000	24.785.000	37,79
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.678.750	27.631.750	99,8	24.648.450	6.782.325	27,52
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	16.800.000	98,8	16.550.000	6.632.500	40,08
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.701.450	17.701.450	100	12.721.796	2.975.200	23,39

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6	7	8	9
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.500.000	83,3	1.800.000	900.000	50,00
14	Penyediaan Bahan/Material	1.157.774.500	1.112.038.050	96,1	57.657.350	44.087.800	76,47
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.600.000	4.595.000	82,1	3.710.000	660.000	17,79
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.864.000	130.670.450	99,9	64.923.150	49.021.022	75,51
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.800.000	4.800.000	100	9.000.200	4.000.000	44,44
18	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100	7.000.000	-	0,00
E	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**50.000.000**	**49.561.500**	**99,1**	**509.418.302**	**51.545.000**	**10,12**
19	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.561.500	99,1			
20	Pengadaan Mebel				2.500.000	2.500.000	100,00
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin				456.840.000	-	0,00
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.078.302	49.045.000	97,94
F	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**626.440.000**	**617.893.519**	**98,6**	**644.920.000**	**266.647.147**	**41,35**
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	328.000	16,4	1.000.000	43.500	4,35
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	227.000.000	223.205.519	98,3	230.400.000	94.303.647	40,93
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	397.440.000	394.360.000	99,2	413.520.000	172.300.000	41,67
G	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**230.986.500**	**212.526.203**	**92**	**209.096.900**	**72.962.750**	**34,89**
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.580.000	140.112.203	89,5	135.540.400	59.885.000	44,18
27	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	-	0,00
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.500.000	35.035.000	98,7	39.150.000	1.970.000	5,03
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.886.500	8.930.000	90,3	9.886.500	6.032.750	61,02
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.020.000	23.449.000	97,6	19.520.000	5.075.000	26,00
II	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**192.162.500**	**190.185.050**		**928.153.337**	**862.085.800**	**92,88**
H	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**53.628.000**	**52.604.000**	**98,1**	**6.622.000**	**-**	**0,00**
31	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	53.628.000	52.604.000	98,1			
32	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				6.622.000	-	0,00
I	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**128.934.500**	**127.981.050**	**99,3**	**921.531.337**	**862.085.800**	**93,55**
33	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	128.934.500	127.981.050	99,3	891.550.537	838.047.500	94,00
34	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting				29.980.800	24.038.300	80,18

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024			2025		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	4	5	6	7	8	9
J	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**9.600.000**	**9.600.000**	**100**	**-**	**-**	
35	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	9.600.000	9.600.000	100			
III	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**172.758.000**	**169.191.470**		**33.357.500**	**5.994.000**	**17,97**
K	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**128.038.000**	**124.475.270**	**97,2**	**23.352.000**	**-**	**0,00**
36	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	64.110.000	62.807.270	98			
37	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	63.928.000	61.668.000	96,5	23.352.000	-	0,00
L	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**44.720.000**	**44.716.200**	**100**	**10.005.500**	**5.994.000**	**59,91**
38	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	44.720.000	44.716.200	100	10.005.500	5.994.000	59,91
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**134.633.000**	**134.418.519**	**99,84**	**83.954.225**	**12.176.000**	**14,50**
M	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**27.650.000**	**27.493.700**	**99,4**	**13.122.875**	**1.947.000**	**14,84**
39	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	27.650.000	27.493.700	99,4	2.503.975	1.947.000	77,76
40	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan				10.618.900	-	0,00
N	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**93.539.000**	**93.481.819**	**99,9**	**70.831.350**	**10.229.000**	**14,44**
41	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	78.899.000	78.870.519	100	70.831.350	10.229.000	14,44
42	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	14.640.000	14.611.300	99,8			
O	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**13.444.000**	**13.443.000**	**100**	**-**	**-**	
43	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13.444.000	13.443.000	100			
V	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**23.850.000**	**23.750.000**	**99,6**	**11.865.000**	**750.000**	**6,32**
P	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**23.850.000**	**23.750.000**	**99,6**	**11.865.000**	**750.000**	**6,32**
44	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	18.530.000	18.530.000	100	9.115.000	-	0,00
45	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	5.320.000	5.220.000	98,1	2.750.000	750.000	27,27

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.503.323.854	10.170.205.121	88,41%	6.437.521.126	5.984.575.714	92,96%
2	Program Pendaftaran Penduduk	1.411.060.000	1.356.034.266	96,10%	192.162.500	190.185.050	98,97%
3	Program Pencatatan Sipil	200.156.000	197.695.400	98,77%	172.758.000	169.191.470	97,94%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	123.858.000	119.517.838	96,50%	134.633.000	134.418.519	99,84%
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	35.112.000	28.810.000	82,05%	23.850.000	23.750.000	99,58%

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Tujuan-Sasaran dan Program tahun 2024 dan Tahun 2025 Smt 1

Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Sasaran/Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025 Sem 1		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		Indeks Reformasi Birokrasi	%	72	70,91	98,12	73	NA	Data Belum Keluar
Sasaran : 1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata-rata Capaian Kepemilikan KK, KTP, KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian)	%	94,7	93,59	99%	96,8	93,64	96,73

Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Sasaran/Tujuan	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025 Sem 1		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian %	Target	Realisasi	Tingkat Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	85	75,18	88,45%	86	47,6	55,34
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP, KIA)	%	91,3	93,75	102,68 %	91,9	89,61	97,5
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	%	93,85	99,84	106,38 %	94,7	99,84	105,4
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder	Kerja sama	42	27	64,29%	45	26	57,77
		Inovasi pelayanan adminduk	Inovasi	2	1	50,00%	2	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku profil data kependudukan	Buku	1	1	100,00 %	1	1	100
		Tersusunnya buku data kependudukan	Buku	2	2	100,00 %	2	1	50
Sasaran : 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil		Nilai SAKIP	Nilai	75	70,8	94,40%	75,5	NA	Data Belum Keluar

Tabel 2.5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
2	12	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-	-	-	-	-	86,00%		96,16%
							Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran,	100%	100%	100%	100%	100%	-		-
2	12	1	2.01			**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	-	-	100%	100%	14,06%
							Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-		-
2	12	1	2.01	1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	-	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, PK, RKA, DPA,RKPA,DPPA)	12 Bulan/2 Dokumen	12 Bulan/2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	-		-
2	12	1	2.01	6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	-	-	-	-	-	17 Laporan	14 Laporan	41,18%
							Jumlah Laporan Kinerja (LKJiP, Evaluasi Kinerja, LPT, SPIP, SAKIP)	12 Bulan/ 16 Dokumen	12 Bulan/ 16 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	100%	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	1	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%		100%
							Prosentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	-	-	-	-		-
2	12	1	2.02	1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	32 Orang/bulan	29 Orang/ Bulan	90,63%
							Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-			-
							Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	42 Orang/bulan	27 Orang/Bulan	64,29%	-		-
2	12	1	2.02	3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	--	-	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	1 Dokumen -		0%
							Tersedianya fasilitasi asistensi penyusunan Anggarn DAK	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2.02	5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	12 Laporan	12 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	1 Laporan	13 Laporan	93%
2	12	1	2.05			**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%		42,88%
							Terlaksananya Kapasitas Aparatur Pelayanan Aparatur Publik	100%	100%	-	-	-	-	-	-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	1	2.05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	180 Paket	154 Paket	85,56%
							Tersedianya dana untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya	60 Orang	60 Orang	-	-	-	-		-
							Tersedianya Kaos olahraga 2 macam	-	-	124 Buah, 62 Seragam	124 Buah, 62 Seragam	100%	-		-
							Tersedianya Pakaian dinas/seragam pegawai								
2	12	1	2.05	9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	-	-	-	-	110 Orang	103 Orang	94%
							Meningkatnya Kualitas SDM Pelayanan Publik	60 Orang / 1 Tahun	60 Orang / 1 Tahun	-	-	-			-
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	90 Orang, 1 Kegiatan	90 Orang, 1 Kegiatan	100%	-		-
							Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan tugas dan fungsi								
2	12	1	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	62 Orang, 2 Kegiatan	62 Orang, 2 Kegiatan	100%	200 Orang	197 Orang	98,50%
							Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
2	12	1	2.06			**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	100%	100%	100%	100%		100%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	-	-	-	-		-
2	12	1	2.06	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Paket	9 Paket	75%
							Tersedianya komponen instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	-	-	-	--	-		-
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	20 Item, 12 Bulan	20 Item, 12 Bulan	100%	-		-
							Terpeliharanya jaringan listrik								
2	12	1	2.06	2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Komputer	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	--	12 Paket	9 Paket	75%
							Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer untuk memperlancar kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Tersedianya bahan untuk penerbitan dokumen kependudukan	-	-	8 Jenis, 8 Jenis	8 Jenis, 8 Jenis	100%	-		-
							Tersedianya komponen peralatan dan perlengkapan computer/laptop								
2	12	1	2.06	3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	-	-	36 Paket	27 Paket	75%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan komputer untuk memperlancar kegiatan administrasi dan pelayanan masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	--	-	-	-		-
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	12 Jenis, 12 Bulan, 4 Jenis, 8 Kegiatan	12 Jenis, 12 Bulan, 4 Jenis, 8 Kegiatan	100%	-		-
							Tersedianya alat kebersihan kantor								
							Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan								
							Tersedianya Bahan/Makanan Extra pudding untuk daya tahan tubuh								
2	12	1	2.06	4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Paket	9 Paket	75%
							Tercukupinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	12 Bulan, 24 Tabung, 4 Jenis	12 Bulan, 24 Tabung, 4 Jenis	100%	-		-
							Tercukupinya kebutuhan logistic kantor								
							Tersedianya Bahan Gas Isi Ulang								
							Tersedianya bahan makan dan minum								
2	12	1	2.06	5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	13 Paket	9 Paket	69,23%
							Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	100%, 13 Jenis	100%, 13 Jenis	100%	-		-
							Tercukupinya bahan logistic kantor								
							Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan								
2	12	1	2.06	6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Dokumen	9 Dokumen	75,00%
							Tersedianya sumber informasi bagi DISDUKCAPIL	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	-		-
							Tersedianya bahan bacaan/koran								
2	12	1	2.06	7		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	-	-	-	13 Paket	9 Paket	69%
							Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Terpenuhinya kebutuhan bahan/material kantor	-	-	100%, 60 Buah, 30 Jenis	100%, 60 Buah, 30 Jenis	100%	-		-
							Tersedianya alat tulis kantor								
							Tersedianya bahan cetak-kwitansi								
							Tersedianya bahan kegiatan kantor, amplop, kertas dan cover								

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	1	2.06	8		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	12 Laporan	3 Laporan	25%
							Tercukupinya kegiatan pelayanan rapat-rapat di DISDUKCAPIL, Jamuan Tamu	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tercukupinya kegiatan pelayanan tamu dan rapat Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu	-	-	100%, 700 Orang	100%, 700 Orang	100%	-		-
2	12	1	2.06	9		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	-	-	-	-	-	200 Laporan	130 Laporan	65%
							Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dan perjalanan dinas OPD	-	-	17 Kecamatan, 3 Daerah	17 Kecamatan, 3 Daerah	100%	-		-
2	12	1	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	-	.-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
							Tertatanya arsip dinamis PD	1 Tahun	-	-	-	--	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Alat/bahan penataan arsip dinamis							
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD, Terlaksananya kegiatan pelatihan penataan arsip dinamis	-	-	3 Jenis, 3 Kegiatan	3 Jenis, 3 Kegiatan	100%	-		-
2	12	1	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	-	-	-	-		16 Dokumen	1 Dokumen	6,20%
							Tersedianya Lisensi dan Paket data internet untuk pelayanan Online	2 Jenis	2 Jenis	-	-	-	--		-
2	12	1	2.07			**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tercukupinya kebutuhan Barang Milik daerah untuk menunjang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	1	2.07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-		-
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, Tersedianya Alat Rekam, Tersedianya Laptop	-	-	4 Set, 5 Unit	4 Set, 5 Unit	100%	-		-
							Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
2	12	1	2.07	10		Pengadaan Sarana Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	4 Unit	1 Unit	25%
							Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	5 Jenis	5 Jenis	100%	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							yang disediakan, tersedianya alat sarana dan prasarana gedung kantor								
							Tersedianya alat sarana dan prasarana gedung kantor								
2	12	1	2.08			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Jasa Penunjang Urusan	100%	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%	100%		-
							Pemerintahan Daerah Yang diselesaikan								
2	12	1	2.08	1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12 Laporan	1 Laporan	8%
							Terselenggaranya pengiriman dokumen surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Terlaksananya Pengiriman Dokumen Surat menyurat	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	-		-
2	12	1	2.08	2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	9 Laporan	75%
							Terselenggaranya kegiatan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jasa telephone/Komunikasi/Internet, air dan listrik yang terbayarkan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	-		-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	1	2.08	4		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	9 Laporan	75%
							Terwujudnya Peningkatan Kinerja/ Optimalisasi pengelolaan administrasi keuangan	22 Orang, 12 Bulan	22 Orang, 12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	20 Orang, 12 Bulan	20 Orang, 12 Bulan	100%	-		-
							Jumlah pegawai/jasa tenaga harian lepas/ administrasi								
							Tersedianya jasa pelayanan kantor								
2	12	1	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	12 Unit	12 Unit	100%	16 Unit	9 Unit	56,25%
							Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional (Mobil dan Sepeda Motor)	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		
2	12	1	2.09	5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	-	-	12 Unit	12 Unit	100,00%
							Terpenuhinya pemeliharaan rutin/ berkala Mebel kantor	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Mebel yang dipelihara	-	-	30 Unit, 12 Bulan	30 Unit, 12 Bulan	100%	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya							
2	12	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	-	-	-	15 Unit	102 Unit	-
							Tersedianya anggaran pemeliharaan komputer, alat cetak lainnya serta peralatan kantor lainnya	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	45 Unit, 12 Bulan	45 Unit, 12 Bulan	100%	-		-
							Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya								
2	12	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
							Terwujudnya gedung kantor yang representatif	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	-	-	2 Unit, 12 Bulan	2 Unit, 12 Bulan	100%	-		-
							Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor								
2	12	1	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	-	21 Unit	21 Unit	100%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor, Pemeliharaan AC, Genset, Instalansi listrik, air, jaringan internet, sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	15 Unit, 12 Bulan	15 Unit, 12 Bulan	100%	-		-
							Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor								
2	12	2				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP,KIA, Biodata Penduduk Rentan, Cakupan Penerbitan SKPWNI)	-	-	-	-	-	91,9		-
							Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KK, KTP,KIA)	72,58	86,84%	73,12%	88,09%	120,47 %	-		-
2	12	2	2.01			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	2	2.01	1		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	80 Dokumen	60 Dokumen	75%
							Cakupan Pelaksanaan pendataan penduduk non permanen dan rentan	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	-	-	100 Dokumen , 12	100 Dokumen,	100%	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Terlaksananya perekaman penduduk rentan			Kecamatan	12 Kecamatan				
2	12	2	2.01	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	10000 Dokumen	8805 Dokumen	88,05%
							Tersedianya bahan material untuk penerbitan dokumen kependudukan	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		
							Formulir pindah/datang penduduk	-	-	10.500 Lembar, 3 Jenis, 12.000 Dokumen	10.500 Lembar, 3 Jenis, 12.000 Dokumen	100%	-		-
							Jenis bahan penerbitan dokumen kependudukan								
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk								
2	12	2	2.01	3		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	50 Orang		-
							Terlaksananya permasalahan yang diselesaikan	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-
							Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	-	-	60 Orang, 4 Kegiatan	60 Orang, 4 Kegiatan	100%	-		-
							Terlaksananya Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan pendaftaran penduduk								
2	12	2	2.01	4		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	2 Laporan	1 Laporan	50%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Terwujudnya Peningkatan Pelayanan kependudukan melalui ketersediaan peralatan di dinas dan kecamatan yang terpelihara dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya perekaman jemput bola di sekolah-sekolah Terpeliharanya peralatan dan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan	-	-	12 Laporan, 1.700 Orang, 17 Kecamatan	12 Laporan, 1.700 Orang, 17 Kecamatan	100%	--		-
2	12	2	2.03			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase cakupan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	12 Laporan		-
2	12	2	2.03	2		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	10.000 Dokumen		-
							Terlaksananya pelayanan secara aktif jemput bola pendaftaran penduduk melalui pelayanan terpadu GISA	12 Bulan	12 Bulan	--		-	-		-
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Pelayanan terpadu administrasi kependudukan melalui GISA Terlaksananya pelayanan kependudukan di kecamatan	-	-	40 Desa, 17 Kecamatan	177 Desa, 17 Kecamatan	442,50 %	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	2	2.03	3		Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-	-	-	-	-	2 Laporan	1 Laporan	50%
							Tersedianya Blangko KIA	12 Bulan	12 Bulan						
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas OPD Tersedianya blangko KIA	-	-	3 Laporan, 60 Kegiatan, 50.000 Keping	3 Laporan, 60 Kegiatan, 50.000 Keping	100%	-		-
2	12	2	2.03	5		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	2 Laporan		-
							Cakupan Terlaksananya Pendaftaran Penduduk	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	-		-
2	12	2	2.04			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaftaran Penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	12	2	2.04	3		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	-	-	-	-	-	1 Laporan		-
							Terlaksananya Workshop peningkatan Kualitas aparatur pelayanan pendaftaran penduduk	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk Peserta bimtek pendaftaran penduduk Terlaksananya bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	-	-	4 Laporan, 80 Orang, 4 Kegiatan	4 Laporan, 80 Orang, 4 Kegiatan	100%	-		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	3				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian))	98,03%	99,13%	98,05%	99,73%	101,71 %	95,90%		-
2	12	3	2.01			Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	3	2.01	1		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	-	-	-	24.250 Dokumen	10805 Dokumen	44,55%
							Terselenggaranya pencatatan dan penerbitan dokumen peristiwa penting penjilidan register, digitalisasi arsib, cetak form permohonan, pencatatan sipil	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan persitiwa penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	13.000 Lembar, 1.000 Dokumen	13.000 Lembar, 1.000 Dokumen	100%	-		--
2	12	3	2.01	2		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	-	-		-	24 Layanan	24 Layanan	100%

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil melalui kegiatan sosialisasi , workshop, Bintak dll	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	-	-	5 Layanan, 45 Orang	5 Layanan, 45 Orang	100%	-		-
							Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas OPD								
2	12	3	2.02			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
2	12	3	2.02	8		Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	-	-	--		1 Laporan	1 Laporan	100%
2	12	4				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder	42 Kerja sama	-	--		-	42 Kerja sama	35 Kerjasama	83,34%
							Inovasi Pelayanan Adminduk	2 Inovasi	-	-	--		2 Inovasi	1 Inovasi	50%
							Prosentase ketersediaan database kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	-		-
2	12	4	2.01			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	4	2.01	1		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	-	-	-	-	-	12 Dokumen	9 Dokumen	75%
2	12	4	2.01	2		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan, Validasi data kependudukan	-	-	50 Dokumen , 50 Desa	50 Dokumen, 50 Desa	100%		2 Dokumen	-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	4	2.03			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	4	2.03	3		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	12 Laporan	9 Laporan	75,00%
							Terselenggaranya pengelolaan Informasi Adminduk melalui pemeliharaan jaringan, validasi data kependudukan	2 Paket / 1 Tahun, 1 Server	2 Paket / 1 Tahun, 1 Server	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	17 Laporan, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 12 Bulan	17 Laporan, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 12 Bulan	100%	-		-
							Pemeliharaan Aplikasi pelayanan online, Pemeliharaan jaringan, pemeliharaan server								
							Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
2	12	4	2.03	4		Penyelengaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	-		-
							Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan instansi/lembaga lain	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-		-
2	12	4	2.03	5		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	1 Laporan		-
2	12	4	2.04			Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	4	2.04	1		Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	--	2 Laporan		-

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
							Cakupan terlaksananya pembinaan operator SIAK , Kegiatan Validasi data kependudukan	2 Kegiatan, 12 Bulan	2 Kegiatan, 12 Bulan	-	-	-	-		-
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	2 Laporan, 2 Kegiatan	2 Laporan, 2 Kegiatan	100%	-		-
							Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan								
2	12	5				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya buku profil data kependudukan	1 Buku	-	-	-	-	-		-
							Tersusunnya buku data kependudukan	2 Buku	-	-	-	-	-		-
							Prosentase data dan Informasi kependudukan tervalidasi	100%	100%						
2	12	5	2.01			Penyusunan Profil Kependudukan	Prosentase profil kependudukan yang disajikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		-
2	12	5	2.01	1		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
							Tersusunnya buku data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen						
							Buku data kependudukan desa	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-		-
							Buku data kependudukan Kabupaten								
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota								

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun akhir Renstra 2024 n-2	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)
2	12	5	2.01	2		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	-	-	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	3 buku	1 Dokumen	33%
							Tersusunnya Profil Data Perkembangan Pendudul	1 Tahun	1 Tahun	-	-	-	-		-

* Data yang digunakan adalah perolehan di Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pencapaian Indikator tujuan dan sasaran OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) OPD Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Indikator Sasaran OPD	Satuan	Tahun 2024			
			Target	Capaian	%	Status
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
IKU (Indeks Kinerja Utama)						
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	%	72	70,91	98,50%	Belum Tercapai
2	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, terdiri atas :	%	94,7	93,59	98,80%	Belum Tercapai
	a. Cakupan Penerbitan KTP El	%	97,25	100	102,80%	Sudah Tercapai
	b. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Penduduk Usia Anak	%	99,25	99,5	100,30%	Sudah Tercapai
	c. Cakupan Penerbitan Akte kematian	%	78,5	69,23	88,20%	Belum Tercapai
	d. Cakupan Penerbitan KIA	%	100	99,21	99,20%	Belum Tercapai
3	Nilai SAKIP Disdukcapil	Nilai	75	70,8	94,40%	Belum Tercapai
IKK (Indeks Kinerja Kunci)						
1	Perekaman KTP elektronik	%	-	99,5	NA	NA
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	-	69,23	NA	NA

Pada tabel 2.3 terlihat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sebagian besar sudah tercapai dan melebihi target atau rencana yang telah ditentukan. Target Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan : Kartu Keluarga, Akte Kelahiran Penduduk Usia Anak, Akte Kematian, dan Kartu Identitas Anak sudah mencapai atau melebihi target yang telah ditentukan.

2.3. Evaluasi Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yaitu :

"Belum semua penduduk memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan baik (Akta Kelahiran, KK, KTP, Akte Lematian)".

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
					4	5							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				7.225.662.214				8.095.612.892
2	12				**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		Nilai	85,58	7.225.662.214			85,58	8.095.612.892
2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,25	5.802.794.714	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,25	6.672.745.392
2	12	1	2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100	10.105.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	10.105.000
2	12	1	2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5.310.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	5.310.000
2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PD	Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	Dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- PD	Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	0	0
2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD	Dokumen	0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD	0	0
2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	17	4.795.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	17	4.795.000

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	1	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
2	12	1	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Perangkat Daerah	Dokumen	100	3.865.929.964	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Perangkat Daerah	100	4.177.235.000
2	12	1	2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	28	3.861.894.964	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	4.173.200.000
2	12	1	2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	Dokumen	1	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	1	0
2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Laporan	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1	0
2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	Laporan	18	4.035.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran PD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	18	4.035.000
2	12	1	2		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	100	2.500.000	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	100	2.500.000
2	12	1	2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Laporan	16	2.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PD	16	2.500.000
2	12	1	2,1		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaran Peningkatan Kompetensi Pegawai	Laporan	100	160.924.562	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaran Peningkatan Kompetensi Pegawai	100	332.291.000

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	1	2,1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	180	26.995.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180	26.995.000
2	12	1	2,1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	98.633.562	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110	270.000.000
2	12	1	2,1		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	200	35.296.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200	35.296.000
2	12	1	2,1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0
2	12	1	2,1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	100	326.268.986	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	713.548.190
2	12	1	2,1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	11.843.040	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	11.843.040
2	12	1	2,1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	65.590.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	65.590.000
2	12	1	2,1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	36	24.681.950	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	24.681.950

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	1	2,1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	16.550.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	16.550.000
2	12	1	2,1		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	12.720.796	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	400.000.000
2	12	1	2,1		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1.800.000
2	12	1	2,1		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	13	57.657.350	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	13	57.657.350
2	12	1	2,1		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3.710.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	3.710.000
2	12	1	2,1		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Laporan	200	115.715.650	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	200	115.715.650
2	12	1	2,1		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	Dokumen	1	9.000.200	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada PD	1	9.000.200
2	12	1	2,1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Dokumen	24	7.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	24	7.000.000
2	12	1	2,1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Perangkat Daerah	Dokumen	100	541.553.302	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Perangkat Daerah	100	541.553.302

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	1	2,1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0
2	12	1	2,1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	12.500.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	12.500.000
2	12	1	2,1		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	393.225.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	393.225.000
2	12	1	2,1		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	
2	12	1	2,1		Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	135.828.302	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	135.828.302
2	12	1	2,1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Laporan	100	655.720.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	100	655.720.000
2	12	1	2,1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.000.000
2	12	1	2,1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	241.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	241.200.000
2	12	1	2,1		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	413.520.000	Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	413.520.000
2	12	1	2,1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Miik Daerah yang Dipelihara	Unit	100	239.792.900	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Miik Daerah yang Dipelihara	100	239.792.900

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	1	2,1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	151.236.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	151.236.400
2	12	1	2,1		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	12	5.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12	5.000.000
2	12	1	2,1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	39.150.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	39.150.000
2	12	1	2,1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	24.886.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	24.886.500
2	12	1	2,1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	19.520.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	19.520.000
							Nilai	85,57				85,57	
2	12	2			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Perekaman KTP Elektronik	%	99,57	1.083.749.500	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Perekaman KTP Elektronik	99,57	1.083.749.500
						Presentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	69,4			Presentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	69,4	
						Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%	100			Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100	
2	12	2	2		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penatausahaan, Penerbitan dan Evaluasi terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	100	32.551.000	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penatausahaan, Penerbitan dan Evaluasi terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	32.551.000

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	2	2		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0	0	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	0	0
2	12	2	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	10.000	20.621.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	10.000	20.621.000
2	12	2	2		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	0	0	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	0	0
2	12	2	2		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	11.930.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2	11.930.000
2	12	2	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	0	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0
2	12	2	2		Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	0	0	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0
2	12	2	2		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	0	0	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0	0
2	12	2	2		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen terkait pelaksanaan pendaftaran penduduk	Dokumen	100	0	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen terkait pelaksanaan pendaftaran penduduk	100	0

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	2	2		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	0	0	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	0	0
2	12	2	2		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	0	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0
2	12	2	2		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah dokumen Koordinasi,Penataausahaan, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	100	1.051.198.500	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah dokumen Koordinasi,Penataausahaan, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100	1.051.198.500
2	12	2	2		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0	0	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	0	0
2	12	2	2		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	10.000	0	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	10.000	0
2	12	2	2		Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2	1.051.198.500	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2	1.051.198.500
2	12	2	2		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	0	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	2	0

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	2	2		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	0	0	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	0	0
2	12	2	2		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	100	0	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	100	0
2	12	2	2		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	0	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	0
2	12	3			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,25	151.638.300	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	99,25	151.638.300
						Presentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100			Presentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	
2	12	3	2		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penatausahaan, Penerbitan dan Evaluasi terkait Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	100	116.127.300	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penatausahaan, Penerbitan dan Evaluasi terkait Pelayanan Pencatatan Sipil	100	116.127.300
2	12	3	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	24.250	52.199.300	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24.250	52.199.300
2	12	3	2		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2	63.928.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	2	63.928.000
2	12	3	2		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	0	0	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	0	0

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	3	2		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	0	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	0	0
2	12	3	2		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah dokumen Koordinasi,Penataausahaan, Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	100	35.511.000	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah dokumen Koordinasi,Penataausahaan, Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	100	35.511.000
2	12	3	2		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	10	0	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	10	0
2	12	3	2		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	0	0
2	12	3	2		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	0	0
2	12	3	2		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	Laporan	1	35.511.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	1	35.511.000
2	12	3	2		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait	Laporan	0	0	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait	0	0
2	12	3	2		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	1	0	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1	0

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	3	2		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	0	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	0
2	12	4			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Presentase tertib pelaksanaan adminduk di esa/kelurahan seKabupaten Karanganyar	%	40	163.079.700	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Presentase tertib pelaksanaan adminduk di esa/kelurahan seKabupaten Karanganyar	40	163.079.700
2	12	4	2		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan Data Kependudukan	Laporan	100	43.253.200	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan Data Kependudukan	100	43.253.200
2	12	4	2		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	12	28.620.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	28.620.000
2	12	4	2		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	4	14.633.200	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	4	14.633.200
2	12	4	2		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	2	0	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	0
2	12	4	2		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sosialisasi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	100	119.826.500	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sosialisasi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	100	119.826.500
2	12	4	2		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
2	12	4	2		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	119.826.500	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	119.826.500

KODE					RANCANGAN RKPD AWAL 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN TAHUN 2026			
					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN TAHUN 2026	
								TARGET	RUPIAH			TARGET	RUPIAH
2	12	4	2		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	0	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	0
2	12	4	2		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Laporan	100	0	**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	100	0
2	12	4	2		Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	0	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	0
2	12	4	2		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	0	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	0
2	12	5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Dokumen Penyajian data kependudukan	Buku	2	24.400.000	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Dokumen Penyajian data kependudukan	2	24.400.000
2	12	5	2		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Dihasilkan	Laporan	100	24.400.000	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Dihasilkan	100	24.400.000
2	12	5	2	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	21.650.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	21.650.000
2	12	5	2	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	2.750.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	2.750.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Usulan program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD. Dari hasil musrenbang yang dilaksanakan, tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Tahun 2026 memiliki peran strategis sebagai titik awal dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, maka perencanaan di kedua level tersebut harus disusun secara sinergis, selaras, dan konsisten.

3.1.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional

Dengan merujuk pada RPJMN 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan nasional, merespons dinamika global, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. RKP 2026 menetapkan lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Merah Putih di tingkat desa/kelurahan, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Kelima program tersebut berlandaskan pada konsep Trisula Pembangunan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 6,3 persen, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2 Telaah terhadap kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem

rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;

2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2025-2029 adalah **"Sesarengan Mbangun Karanganyar".** Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi;
4. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil;
5. Meningkatnya riset dan inovasi;
6. Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
7. Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
8. Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

3.2.2 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam Rencana Pembangunan Daerah 2026 adalah **Meningkatkan Pelayanan Adminduk yang Prima.**

3.2.3 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukut, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun ke-depan. Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka sasaran ditetapkan juga sasaran yang ingin dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar maka dapat ditetapkan bahwa sasaran yang hendak dicapai tahun 2026 sesuai dengan rencana kerja perangkat daerah yaitu "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk yang Prima**", untuk mencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Tujuan, sasaran serta target Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian 2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Adminduk yang Prima			Persentase penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil (Akta Kelahiran, KK, KTP, KIA)	Presentase	92,05
	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk yang Prima		Nilai IKM	Nilai	85,57
		1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Nilai	71,50
		2) Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP El	%	99,15
			Presentase anak usia 0-17 kurang 1 hari memiliki KIA	%	69,35
			Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	100
		3) Program Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,24

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian 2026
			Presentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100
		4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase tertib pelaksanaan adminduk di esa/kelurah an se-Kabupaten Karanganya	%	37,50
		5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dokumen Penyajian data kependudukan	Buku	2

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Pelayanan prima administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan prima Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia karena adanya pegawai yang mutasi, promosi maupun purna tugas sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Disdukcapil Kabupaten Karanganyar;
2. Perkembagan Teknologi Informasi menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat, akan tetapi tingkat pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga masih adanya aduan tentang biaya pengurusan dokumen yang sebenarnya gratis;
4. Akses Pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu terus meningkatkan kerjasama dengan stakeholder pemanfaatan data.

Peluang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam mengembangkan pelayanan adalah :

1. Apresiasi yang tinggi oleh pimpinan daerah, DPRD, dan Masyarakat Kabupaten Karanganyar tentang upaya maksimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Semakin meningkatnya animo masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Adanya dukungan dan komitmen alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ bintek kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan;
4. Sarana dan prasarana berupa gedung kantor baru dan peralatan pendukung pelayanan semakin lengkap.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar

Permasalahan berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta bagaimana mengukur tingkat keberhasilannya. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, serta keberhasilan kinerja pelayanan, akan terlihat melalui sejumlah indikator yang telah dirumuskan, dan akan dijabarkan lebih rinci dalam indikator program, kegiatan, dan subkegiatan. Keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kinerja pelayanan perangkat daerah perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan pelayanan dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja beserta kelompok sasarannya akan mencerminkan tingkat pencapaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Untuk memperjelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah serta keterkaitannya satu sama lain, dapat digambarkan secara sederhana dalam bentuk pohon kinerja:

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk dalam unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, khususnya dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran pembangunan daerah yang memiliki keterkaitan langsung maupun dampak signifikan terhadap pelaksanaan tugas Disdukcapil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Adminduk yang Prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk yang prima	Nilai SKM

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan adminduk yang prima	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
	Program Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Fasiltasi Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
			Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
			Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, maka dilaksanakan rencana program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan program OPD sesuai dengan urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga didukung program dan kegiatan setiap OPD yang dilaksanakan untuk peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja OPD. Selanjutnya rincian program dan kegiatan, prioritas daerah, sasaran daerah, indikator kinerja dan pendanaan indikatif tahun 2025 sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKAB. KARANGANYAR

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prioritas		Kel. Sasaran	Prakiran Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Nilai	85,65			85,57	5.570.364.028						85,58	7.993.662.224	
1	2	12	1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	70,80		71,5	4.472.901.028						71,25	6.574.494.724	
	2	12	1	2		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100			100	7.616.000						100	13.700.000	
	2	12	1	2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20			4	3.800.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				4	4.700.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0			0	0						0	1.000.000	
	2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0			0	0						0	1.000.000	
	2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	85			17	3.816.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				17	4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0			0	0						0	3.000.000	
	2	12	1	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan Perangkat Daerah	Dokumen	100			100	3.411.514.579						100	3.870.494.714	
	2	12	1	2		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	140			28	3.407.706.579	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				28	3.862.494.714	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5			1	0						1	1.500.000	
	2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5			1	0						1	1.500.000	
	2	12	1	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	90			18	3.808.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				18	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

													Kel/Desa							
	2	12	1	2		**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	100			100	0						100	1.500.000	
	2	12	1	2		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	80			16	0						16	1.500.000	
	2	12	1	2,1		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyelenggaran Peningkatan Kompetensi Pegawai	Laporan	100			100	32.024.000						100	35.000.010	
	2	12	1	2,1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	900			180	0						180	10.000.000	
	2	12	1	2,1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	500			100	0						100	10	
	2	12	1	2,1		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Orang	1.000			200	32.024.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				200	25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0			0	0						0	0	
	2	12	1	2,1		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	100			100	143.881.577						100	424.800.000	
	2	12	1	2,1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	60			12	6.004.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	1	2,1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	60			12	30.447.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	180			36	13.640.250	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				36	15.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60			12	6.650.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	65			13	5.150.627	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				13	168.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	60			12	0						12	1.800.000	
	2	12	1	2,1		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	65			13	40.009.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				13	95.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60			12	1.980.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	1	2,1		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1.000			200	34.999.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				200	45.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5			1	5.000.200	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	1	2,1		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	120			24	0						24	25.000.000	
	2	12	1	2,1		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Perangkat Daerah	Dokumen	100			100	0						100	1.350.000.000	
	2	12	1	2,1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0			0	0						0	750.000.000	
	2	12	1	2,1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10			2	0						2	10.000.000	
	2	12	1	2,1		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30			6	0						6	300.000.000	
	2	12	1	2,1		Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0			0	0						0	250.000.000	
	2	12	1	2,1		Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20			4	0						4	40.000.000	
	2	12	1	2,1		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Laporan	100			100	643.920.000						100	646.500.000	

	2	1 2	1	2, 1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60			12	0						12	1.500.000	
	2	1 2	1	2, 1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60			12	230.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	230.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	1	2, 1		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60			12	413.520.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	415.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	1	2, 1		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Miik Daerah yang Dipelihara	Unit	100			100	233.944.872						100	232.500.000	
	2	1 2	1	2, 1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	80			16	151.206.640	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				16	175.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	1	2, 1		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	60			12	0						12	7.500.000	
	2	1 2	1	2, 1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	75			15	59.820.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				15	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	1	2, 1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5			1	3.638.232	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1	17.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	1	2,1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	105			21	19.280.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				21	16.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
								Nilai		85,525		85,56							85,57		
2	2	12	2			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Perekaman KTP Elektronik	%	92,5	99,5		99,15	1.007.463.000						99,57	1.083.749.500	
							Presentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%		69,35		69,35							69,4		
							Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	%		100		100							100		
	2	12	2	2		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penatausahaan, Penerbitan dan Evaluasi terkait Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	100			100	0						100	32.551.000	
	2	12	2	2		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	50.000			10.000	0						10.000	20.621.000	
	2	12	2	2		Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	10			2	0						2	11.930.000	
	2	12	2	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	0			0	0						0	0	

	2	12	2	2		Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen terkait pelaksanaan pendaftaran penduduk	Dokumen	100			100	0						100	0	
	2	12	2	2		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah dokumen Koordinasi,Penataausahaan, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	100			100	1.007.463.000						100	1.051.198.500	
	2	12	2	2		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	50.000			10.000	0						10.000	0	
	2	12	2	2		Fasiltasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	10			2	1.007.463.000	Kab. Karanganyar,	DANA TRANSFER UMUM-				2	1.051.198.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

													Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM						PENCATATAN SIPIL
	2	12	2	2		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	10			2	0						2	0	
	2	12	2	2		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	0			0	0						0	0	
	2	12	2	2		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	100			100	0						100	0	
	2	12	2	2		Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	5			1	0						1	0	
3	2	12	3			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran	%	99,28			99,24	50.000.000						99,25	147.938.300	
							Presentase cakupan kepemilikan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%				100							100		
	2	12	3	2		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penatausahaan, Penerbitan dan Evaluasi terkait Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	100			100	20.900.000						100	71.138.300	
	2	12	3	2		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	121.250			24.250	20.900.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				24.250	25.138.300	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2	12	3	2		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	2			2	0						2	34.000.000	
	2	12	3	2		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	0			0	0						0	8.500.000	
	2	12	3	2		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	0			0	0						0	3.500.000	
	2	12	3	2		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah dokumen Koordinasi,Penataausahaan, Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	100			100	29.100.000						100	41.800.000	
	2	12	3	2		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/ Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	50			10	0						10	9.500.000	
	2	12	3	2		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	0			0	0						0	6.800.000	
	2	12	3	2		Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0			0	6.937.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				0	13.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

													Kel/Desa						
	2	12	3	2		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi	Laporan	5			1	22.162.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				1	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	3	2		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terkait	Laporan	0			0	0						0	35.000.000	
	2	12	3	2		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	5			1	0						1	5.000.000	
	2	12	3	2		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	5			1	0						1	30.000.000	
4	2	12	4			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Presentase tertib pelaksanaan adminduk di esa/kelurahan seKabupaten Karanganyar	%	47,5			37,5	31.940.000						40	163.079.700	
	2	12	4	2		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan Data Kependudukan	Laporan	100			100	12.740.000						100	32.579.700	
	2	12	4	2		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	60			12	5.200.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	14.579.700	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	20			4	7.540.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				4	10.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

												Kel/Desa							
	2	12	4	2		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	10			2	0						2	8.000.000	
	2	12	4	2		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sosialisasi, dan Penyelenggaraan Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	100			100	19.200.000						100	78.000.000	
	2	12	4	2		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0			0	0						0	30.000.000	
	2	12	4	2		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	60			12	19.200.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				12	18.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	4	2		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	5			1	0						1	30.000.000	
	2	12	4	2		**Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	Laporan	100			100	0						100	52.500.000	
	2	12	4	2		Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	10			2	0						2	17.500.000	
	2	12	4	2		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Laporan	5			1	0						1	35.000.000	

						Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan													
5	2	12	5			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Dokumen Penyajian data kependudukan	Buku		2		2	8.060.000						2	24.400.000	
	2	12	5	2		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang Dihasilkan	Laporan	100			100	8.060.000							100	24.400.000	
	2	12	5	2	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	10			2	4.090.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					2	21.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	5	2	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	5			1	3.970.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM					1	2.750.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang meliputi konsep pembangunan yang berkelanjutan maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029.

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan.

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini,maka :

1. Rancangan Akhir Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, yang pendanaannya bersumber dari DAU APBD Kabupaten Karanganyar;
2. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
3. Semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan urusan administrasi kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
4. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Tahun 2026;
5. Renja ini sebagai sarana pendukung pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;

Rencana anggaran program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja ini diharapkan dapat terrealisasi sesuai dengan kebutuhan mengingat jumlahnya masih mengacu pada jumlah pagu indikatif. Namun demikian jumlah tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil untuk tahun 2026, sehingga diharapkan adanya penambahan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Karanganyar khususnya terkait peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas. Harapan kami, semoga dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab dan bermanfaat dalam memberikan konstribusi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur ke-hadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan rencana program kerja tugas dan kegiatan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2026 ini. Sebagai wujud pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan antara lain dengan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kami merasa bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangannya. namun kami telah berusaha baik dalam perencanaan, penganggaran dan indikator kinerja telah kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar , September 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19720620 199203 1 002

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN..... I-1
1.1. Latar belakang..... I-1
1.2. Landasan Hukum..... I-4
1.3. Maksud dan Tujuan..... I-6
1.4. Sistematika Penulisan..... I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... II-1
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... II-15
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD..... II-15
2.5. Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Peluang II-20
BAB III TUJUAN DAN SASARAN III-1
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional..... III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran III-1
3.3. Tantangan dan peluang..... III-8
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN IV-1
4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IV-1
BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 Capaian Kinerja Program Tahun 2024.....	II-1
Tabel 2.2	Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 Tribulan II.....	II-3
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 dan 2025.....	II-6
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2025.	II-7
Tabel 2.5	Capaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-12
Tabel 2.6	Pemetaan Permasalahan.....	II-15
Tabel 2.7	Review terhadap Rencana Awal RKPD 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-16
Tabel 2.8	Penelaahan Usulan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	II-20
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.....	III-6
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD	III-8
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar.....	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci....	IV-11
Tabel 4.3	Program/Kegiatan Dispermasdes yang mendukung program Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun secara kelembagaan, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (*community based development*), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2024 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Renja OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan OPD, serta rencana pembangunan OPD untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja OPD juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan penjabaran RPD. Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh OPD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja OPD disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di OPD berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DISPERMADES) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dispermades Kabupaten Karanganyar disusun dengan tahapan dan serangkaian kegiatan penyusunan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
   Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dispermades, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dispermades, yang menyangkut aspek:
   a. Kondisi pelayanan Dispermades;
   b. Organisasi dan Tugas Fungsi Dispermades;
   c. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya;
   d. Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dispermades;
   e. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades;
   f. Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dispermades;
   g. Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
   h. Rancangan awal RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2026;
   i. Informasi lain terkait pelayanan Dispermades.
2. Analisis gambaran pelayanan Dispermades;
   Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dispermades adalah:
   a. Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dispermades sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.
   b. Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;
   c. Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dispermades untuk kondisi tahun lalu, tahun berjalan, tahun rencana, dan prakiraan maju tahun berikutnya;
   d. Menghitung realisasi capaian target kinerja untuk kondisi tahun lalu, dan perkiraan realisasi tahun berjalan berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun berjalan;
   e. Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan Dispermades;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun lalu berdasarkan Renstra Dispermades;
   Review hasil evaluasi mencakup:
   a. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
   b. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
   c. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
   d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan tersebut;
   e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dispermades dan kinerja pelayanan Dispermades;
   f. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Dispermades dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
b. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dispermades tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dispermades;
c. Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dispermades dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
d. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dispermades sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades;
   Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispermades tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dispermades.
   Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :
   a. Sejauh mana tingkat kinerja Dispermades terhadap pelayanan Masyarakat.
   b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dispermades.
   c. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs
   d. Tantangan, hambatan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dispermades.
   e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
   Telaahan terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tolok ukur, target sasaran program kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan untuk Dispermades.
   Tahapan kegiatan telahaan yang dilakukan, adalah:
   a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
   b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
   c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
   Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispermades.
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   Untuk melaksanakan kegiatan Dispermades mengacu pada Renstra Dispermades tahun 2025- 2026. Selain itu juga memperhatikan hasil

musrenbang secara berjenjang yang dilaksanakan secara rutin mulai dari dusun, desa dan kecamatan diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun semua program kegiatan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang tertuang dalam RKP Desa termasuk sumber pembiayaannya baik didanai dari swadaya masyarakat maupun dari sumber dana dari pemerintah (desa/kelurahan, Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat).

8. Perumusan kegiatan prioritas;
   Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, serta berdasarkan usulan masyarakat berupa pengajuan proposal yang telah masuk ke Dispermades untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispermades dalam pembangunan daerah melalui fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dispermades;
   Penyusunan dokumen rancangan Renja Dispermades merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen. Rancangan Renja Dispermades tersebut merupakan bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan yang dibahas dalam forum OPD kabupaten.
10. Telaahan Kebijakan Nasional;
    Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa.
11. Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades;
    Penyempurnaan rancangan Renja Dispermades perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari usulan masyarakat melalui musrenbang RKPD Kabupaten.
12. Pembahasan forum OPD;
    Pembahasan dalam forum OPD kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dispermades dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di Kecamatan.
13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dispermades dengan hasil pembahasan forum OPD.
    Dokumen rancangan Renja Dispermades yang telah didiskusikan dalam forum OPD, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dispermades adalah sebagai pedoman bagi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam rangka merumuskan program dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dispermades untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dispermades.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dispermades Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2026;
2. Memaparkan tujuan sasaran dan indikator hasil (Outcome) dari program dan kegiatan termasuk jumlah anggaran untuk pelaksanaan selama tahun anggaran 2026;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan pastisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya pengunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dispermades Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Kajian Capaian Kinerja Pelayanan
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Dispermades
- 3.3. Tantangan dan Peluang Dispermades

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- 4.1. Program, Kegitan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuraan kinerja sasaran dari hasil yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar melaksanakan 4 program, 4 kegiatan dan 21 sub kegiatan sesuai Nomenklatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan jumlah 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan dengan total anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.22.702.581.246,- adapun realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.22.210.283.701,- atau terserap 97,83 persen. Jika dilihat dari capaian kinerja program pada tahun 2024 dari 4 program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semuanya tercapai 100 persen, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

NO	**PROGRAM** / *Kegiatan* / Sub Kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	20	50.000.000	50.000.000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	1.000.000	20	1.000.000	1.000.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	1.000.000	20	1.000.000	1.000.000	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	1.000.000	20	1.000.000	1.000.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000	1.000.000	20	1.000.000	1.000.000	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	68.221.000	682	102.560.000	102.560.000	100
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.308.000.000	4.678.103.472	142	4.914.833.478	5.213.333.478	106
3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*						
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	123.149.000	410	10.000.000	10.000.000	100
4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*						
1	Penyediaan Komponen Instalasi	5.000.000	4.000.000	80	4.000.000	4.000.000	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	100.010.483	142	122.397.033	146.703.433	100
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	14.175.000	94	15.000.000	15.000.000	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan	4.000.000	3,320.000	83	3.440.000	3.440.000	100

	Peraturan Perundang-undangan						
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.000.000	159.794.000	140	100.000.000	100.000.000	100
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	2.000.000	40	1.000.000	1.735.000	170
5	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*						
1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0		5.000.000.000	0	
2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0		25.000.000	0	
6	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	6.000.000	85,7	5.000.000	6.000.000	120
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000	64.800.000	144	64.800.000	64.800.000	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000	100.000.000	100
7	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000	182.727.757	101	203.722.075	204.415.675	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	28.766.500	89,9	21.264.000	21.264.000	100
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000	39.100.000	111	29.100.000	29.100.000	100
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**						
1	*Penyelenggaraan Penataan Desa*						
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	75.000.000	25.000.000	33,3	35.000.000	35.000.000	100
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	125.000.000	190.000.000	152	160.000.000	160.000.000	100
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						
1	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*						
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	100	40.000.000	25.000.000	62,5
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	50.000.000	0		25.000.000	0	
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	75.000.000	50.000.000	66,6	30.000.000	30.000.000	100
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						
1	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*						
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	341.000.000	147.545.000	43,1	100.000.000	100.000.000	100
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	50.000.000	46.555.000	93	150.000.000	150.000.000	100
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	150.000.000	110.000.000	73,3	100.000.000	100.000.000	100
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.250.000.000	2.912.574.400	89,5	3.210.000.000	3.260.000.000	101
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	500.000.000	0		25.000.000	25.000.000	100
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	250.000.000	0		25.000.000	25.000.000	100
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	100.000.000.	0		25.000.000	25.000.000	100
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	385.000.000	166.790.000	43,1	100.000.000	100.000.000	100
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	25.000.000		200.000.000	200.000.000	100
10	Fasilitasi Pengangkatan dan	200.000.000	29.605.400	9,9	50.000.000	50.000.000	100

	Pemberhentian Perangkat Desa						
11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	50.000.000	19.100.000	38,2	25.000.000	25.000.000	100
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	174.000.000	75.000.000	43,1	70.000.000	70.000.000	100
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	500.000.000	96.760.000	19,3	50.000.000	50.000.000	100
14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	50.000.000	7.945.000	15,9	10.000.000	10.000.000	100
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						
1	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*						
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	249.000.000	186.340.000	74,7	90.000.000	90.000.000	100
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.511.000.000	5.509.400.000	100	5.437.600.000	5.437.600.000	100
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	80.000.000	40.000.000	50	25.000.000	25.000.000	100
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	70.000.000	52.100.000	74,3	40.000.000	40.000.000	100
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.050.000	1.542.860.000	146,8	2.175.000.000	2.175.000.000	100
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	0	100.000.000		0	0	
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.020.000.000	550.000.000	53,9	1.000.000.000	1.000.000.000	100
	JUMLAH	18.380.000.000	17.535.742.012	94,4	24.274.451.586	19.322.951.586	79,6

Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2024 dan 2025 Tribulan II menunjukkan tercapainya realisasi seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 Tribulan II

NO	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	2024			2025 TRIBULAN II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*						

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	50.000.000	0	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	0	0
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.221.000	66.976.100	98,18	102.561.000	46.455.100	45
2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.678.103.472	4.560.589.193	97,49	5.213.333.478	2.526.138.250	48
3	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*						
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	123.149.000	113.592.000	92,24	10.000.000	9.937.000	99
4	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*						
1	Penyediaan Komponen Instalasi	4.000.000	3.995.500	99,89	4.000.000	1.935.000	48
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.010.483	99.827.400	99,82	146.703.433	118.369.298	81
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.175.000	14.175.000	100	15.000.000	6.575.000	53
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,320.000	3.240.000	97,59	3.440.000	2.240.000	65
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.794.000	159.794.000	100	100.000.000	39.735.680	40
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.000.000	2.000.000	100	1.735.000	912.000	53
5	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.995.400	99,92	5.000.000	2.419.950	48
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000	63.759.265	98,39	64.800.000	12.260.137	19
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000	99.998.800	99,99	100.000.000	44.263.400	44
6	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.727.757	181.673.608	99,42	204.415.675	85.111.385	42
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.766.500	28.712.000	99,81	21.264.000	5.085.000	24
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.100.000	39.071.250	99,93	29.100.000	6.000.000	21
2	**PROGRAM PENATAAN DESA**						
1	*Penyelenggaraan Penataan Desa*						
1	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	25.000.000	23.582.600	94,33	35.000.000	298.000	1
2	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	190.000.000	189.896.500	99,95	160.000.000	29.252.378	18
3	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						
1	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*						
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	75.000.000	. 74.534.950	99,38	40.000.000	10.494.500	26
2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	0	0	0	25.000.000	2.484.600	10
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000	. 49.789.339	99,58	30.000.000	883.200	3
4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						
1	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi*						

	Pemerintahan Desa						
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	147.545.000	141.142.500	95,66	100.000.000	13.120.450	13
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	46.555.000	45.839.700	98,46	150.000.000	0	0
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	110.000.000	109.744.789	99,77	100.000.000	64.670.200	65
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.912.574.400	2.868.284.745	98,48	3.260.000.000	1.364.390.406	42
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	N.A			25.000.000	0	0
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	N.A			25.000.000	1.671.450	7
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	N.A			25.000.000	0	0
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	166.790.000	163.481.200	98,02	100.000.000	18.995.207	19
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	25.000.000	22.983.400	91,93	200.000.000	3.281.000	2
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	29.605.400	28.548.900	96,43	50.000.000	8.237.800	16
11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19.100.000	18.279.000	95,70	25.000.000	20.672.000	83
12	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	75.000.000	. 67.881.500	90,51	70.000.000	25.626.600	26
13	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	96.760.000	94.127.300	97,28	50.000.000	1.431.500	3
14	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.945.000	7.638.165	96,14	10.000.000	2.777.000	28
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						
1	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*						
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	186.340.000	186.180.000	99,91	90.000.000	15.900.000	18
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.509.400.000	5.506.369.200	99,94	5.437.600.000	1.803.011.000	33
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40.000.000	39.750.000	99,38	25.000.000	5.142.400	21
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	52.100.000	52.031.000	99,87	40.000.000	1.997.500	5
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.542.860.000	1.542.568.950	99,98	2.175.000.000	699.596.700	32
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	100.000.000	100.000.000	100	0	0	0
7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	550.000.000	549.705.692	99,95	1.000.000.000	160.660.631	16
	JUMLAH	17.535.742.012	17.329.758.946	98,83	19.322.951.586	7.164.031.722	

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 17.535.742.012,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp.17.329.758.946,00 atau 98,83 %, sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp.7.164.031.722,00 atau 37,71% dari pagu anggaran Rp.19.322.951.586,00 namun jika dihitung berdasarkan pagu efisiensi yang sebesar Rp.18.634.514.186,00 maka persentase realisasi adalah 38,52%.

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 dan 2025

Program	Indikator Program	Satuan	Sasaran dan realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025 Tribulan II
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	%	100	100	100	100	N/A
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	%	95	995	100	96	N/A
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	%	100	100	100	N/A	N/A
	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	%	84	84	100	85	N/A
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	%	100	100	100	N/A	N/A
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	%	80	80	100	82	N/A
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%	100	100	100	100	N/A

Secara keseluruhan target indikator baik program, kegiatan maupun sub kegiatan tahun 2024 hampir tercapai, meskipun ada beberapa indikator yang belum tercapai, salah satunya pembentukan kawasan perdesaan yang masih menjadi perhatian dalam pencapaian target.

Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, Sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Cpaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berjalan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	
				Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Berjalan 2025	Tingkat capaian Target Renstra Tahun Berjalan 2025 (TW II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**Meningkatkan kualitas pembangunan desa**	0,7108	N.A	0,7088	0,7378	103%	0,7108	N.A	N.A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8 Laporan*	*8 Laporan*	*8 Laporan*	*8 Laporan*	*100%*	*8 Laporan*	*6 Laporan*	66%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	N.A	N.A
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	N.A	N.A
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	N.A
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan dokumen keuangan*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	*100%*	*1 Dokumen*	*1 Dokumen*	50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	100%	40 Orang/ bulan	40 Orang/ bulan	50%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	*100 Persen*	100%	*100 Persen*	*100 Persen*	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	100%

Berdasarkan Tugas dan Fungsi	dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	100%	*100 %*	50%	50%
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	82%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	6 Paket	53%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	100%	24 dokumen	12 dokumen	65%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	N.A	50%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	*100 %*	100%	*100 %*	50%	50%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	50%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	50%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	*43 unit*	*43 unit*	*43 unit*	*43 unit*	100%	*43 unit*	*43 unit*	50%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit	18 Unit	50%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	25 unit	25 unit	25 unit	100%	25 unit	25 unit	50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	50%
PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	100%	**100 %**	**19 %**	**19%**
Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	100%	*162 Desa 1500 titik lokasi*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	N.A
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Dea	162 Dea	162 Dea	162 Dea	100%	162 Dea	0 Dea	1%
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	1500 titik lokasi	100%	1500 titik lokasi	300 titik lokasi	18%
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**95 %**	**95 %**	**95 %**	**95 %**	100%	**97 %**	**27 %**	**27%**
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	*3 dokumen*	100%	*3 dokumen*	*0 dokumen*	26%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	26%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	10%

dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota								
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	3%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan** **Persentase desa tertib administrasi pemerintahan**	**100 Persen** **84 Persen**	**100 Persen** **84 Persen**	**100 %** **84 %**	**100 %** **84 %**	**100%** **100%**	**100 %** **86 %**	**100 %** **84 %**	**100 %** **84 %**
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah desa tertib pengelolaan aset* *Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa* *Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*100%* *100%* *100%*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *0 Desa*	*50%* *50%* *50%*
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	13%
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	0 dokumen	0%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	50%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	162 orang	162 orang	162 orang	100%	162 orang	0 orang	0%
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	0 laporan	7%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0 dokumen	0%
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	19%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	2%
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	16%
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	83%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	37%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	162 orang	162 orang	162 orang	100%	162 orang	0 orang	3%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	177 dokumen	177 dokumen	177 dokumen	100%	177 dokumen	0 dokumen	28%
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	100 % 80 %	100 % 80 %	100 % 80 %	100 % 80 %	100 % 80 %	100 % 80 %	45 % 80 %	45 % 80 %

	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu)*	*3 laporan*	*3 laporan*	*3 laporan*	*3 laporan*	*3 laporan*	*3 laporan*	*1 laporan*	*1 laporan*
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	18%
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	1 lembaga	0 lembaga	33%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0 dokumen	21%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	0 laporan	5%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	1 laporan	32%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	16%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan tahun 2024 dapat dilihat tabel 2.3. pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan target indikator baik indikator tujuan, sasaran maupun program tercapai, ada salah satu indikator yang belum tercapai target semisal nilai SAKIP. Realisasi nilai SAKIP hal tersebut salah satunya dikarenakan variabel penilaian nilai SAKIP ada beberapa perubahan sehingga nilai SAKIP Dispermades maupun beberapa OPD lain di Kabupaten Karanganyar sebagian besar masih kriteria B, pada tahun 2025 dilakukan koreksi target nilai SAKIP sesuai dengan Renstra 2025-2026.

Berdasarkan Renstra 2025-2026 Indikator Tujuan, Sasaran, Maupun Program ada Sebagian besar mengalami perubahan. Hal tersebut disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Tujuan	Satuan	SPM standar Nasional	IKK	Target Kinerja Tahun Ke-		Realisasi	
					2024	2025	2024	2025 Tw 1I
A.	**Indikator Tujuan (Renstra 2021-2024)**							
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks			-		-	N/A
2.	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks			N/A		N/A	N/A
3.	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks			N/A		N/A	N/A
4.	Indeks Ketahanan Lingkungan	Indeks			N/A		N/A	N/A
	Indikator Tujuan (Renstra 2024-2026)							
1.	**Angka Kemiskinan**	Persen			8,52		9,79	N/A
2.	**Indeks reformasi Birokrasi**	Indeks			72		70,91	N/A
	Indikator Sasaran (Renstra 2021-2024)							
1.	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	%		IKK	4,3	N/A	4,94	N/A
2.	Persentase desa tertib administrasi	%		IKK	83	N/A	83,3	N/A

3.	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	Persen		IKK	17,1	N/A	17,54	N/A
4.	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15 %	Persen		IKK	18	N/A	17,15	N/A
5.	Nilai SAKIP	Nilal		IKK	79	N/A	69,35	N/A
	Indikator Sasaran (Renstra 2024-2026)							
1.	Indeks Desa Membangun	Indeks		IKU	0,7088	0,7108	0,7378	N/A
2.	Nilai SAKIP	Nilai		IKK	73	74	71,40	N/A
	Indikator Program				**2024**	**2025**	**2024**	**2025 Tw.2**
1.	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	Persen			N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	Persen			95	96	95	N/A
3.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	Persen			100	100	100	N/A

	Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	Persen			84	85	84	N/A
4.	% Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	Persen			80	82	80	N/A
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	Persen			100	100	100	N/A
5.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen			100	100	100	N/A
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya				100	100	100	N/A

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			2024	2025 Smt I	2024	2025 Smt I	
1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7088	0,7108	0,7378	N/A	
2	Nilai SAKIP	Nilai	73	74	71,40	N/A	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berbagai isu-isu strategis dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa terkait dengan pelaksanaan program-program utama, yaitu :
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pemerataan pembangunan desa	1. Aparat desa yang tidak menguasai materi pembangunan desa 2. Aparat desa belum optimal dalam implementasi pembangunan desa	1. Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas aparat desa 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar terkait dengan sasaran pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2026 yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan social dengan indikator angka kemiskinan. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pencapaian tugas dan fungsi diantaranya

1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa.
3. Terbatasnya partispasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Program CSR.

Faktor pendorong yang mendukung tugas fungsi antara lain:

1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT.
2. Terjalinnya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa.
3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu angaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dapat dijelaskan pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kedbutuhan					Catatan Penting
Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Capaian Program		Pagu Indikatif 2026	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Capaian Program		Kebutuhan Dana	
		Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**19.237.484.674**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**19.237.484.674**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**19.237.484.674**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**19.237.484.674**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dispermades	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.075.351.586**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dispermades	***Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya***	***100%***	**6.075.351.586**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dispermades*	*Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8 Laporan*	*106.560.000*	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Dispermades*	*Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	*8 Laporan*	*106.560.000*	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	102.560.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	102.560.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dispermades*	*Jumlah Laporan dokumen keuangan*	*1 Dokumen*	*5.213.333.478*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Dispermades*	*Jumlah Laporan dokumen keuangan*	*1 Dokumen*	*5.213.333.478*	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispermades	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	5.213.333.478	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispermades	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	5.213.333.478	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dispermades*	*Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah*	*100 Persen*	*10.000.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Dispermades*	*Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah*	*100 Persen*	*10.000.000*	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispermades	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispermades	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Dispermades*	*Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi*	*100 %*	*320.878.433*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Dispermades*	*Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi*	*100 %*	*320.878.433*	
Penyediaan Komponen Instalasi	Dispermades	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Dispermades	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispermades	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	146.703.433	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispermades	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	146.703.433	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispermades	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispermades	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dispermades	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24 dokumen	4.620.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dispermades	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	24 dokumen	4.620.000	

undangan		Disediakan			undangan		Disediakan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	148.820.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispermades	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	148.820.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dispermades	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.735.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dispermades*	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana*	*100 %*	*169.800.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Dispermades*	*Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana*	*100 %*	*169.800.000*	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	64.800.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispermades	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	100.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Dispermades*	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	*43 unit*	*254.779.675*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Dispermades*	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	*43 unit*	*254.779.675*	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispermades	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	204.415.675	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dispermades	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	204.415.675	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispermades	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispermades	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 unit	21.264.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispermades	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispermades	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	29.100.000	
PROGRAM PENATAAN DESA	**Dispermades**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 %**	**195.000.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Dispermades**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**	**100 %**	**195.000.000**	
Penyelenggaraan Penataan Desa	*Dispermades*	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	*195.000.000*	*Penyelenggaraan Penataan Desa*	*Dispermades*	*Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya*	*162 Desa 1500 titik lokasi*	*195.000.000*	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dispermades	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Dea	35.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Dispermades	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	162 Dea	35.000.000	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dispermades	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1500 titik lokasi	160.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Dispermades	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1500 titik lokasi	160.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	**Dispermades**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**97 %**	**95.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Dispermades**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**	**97 %**	**95.000.000**	
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Dispermades*	*Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi*	*3 dokumen*	*95.000.000*	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*	*Dispermades*	*Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi*	*3 dokumen*	*95.000.000*	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	40.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dispermades	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	25.000.000	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 dokumen	30.000.000	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Dispermades**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan** **Persentase desa tertib administrasi pemerintahan**	**100 %** **86 %**	**4.190.000.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Dispermades**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan** **Persentase desa tertib administrasi pemerintahan**	**100 %** **86 %**	**4.190.000.000**	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Dispermades*	*Jumlah desa tertib pengelolaan aset* *Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa* *Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*4.190.000.000*	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	*Dispermades*	*Jumlah desa tertib pengelolaan aset* *Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa* *Meningkatnya jumlah desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung Produk Unggulan Desa*	*162 Desa* *162 Desa* *1 Desa*	*4.190.000.000*	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Dispermades	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	Dispermades	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 dokumen	100.000.000	

Desa					Desa					
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 dokumen	150.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 dokumen	100.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 dokumen	3.260.000.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dispermades	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dispermades	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	25.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 laporan	25.000.000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 dokumen	25.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2 dokumen	25.000.000	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 dokumen	100.000.000	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	200.000.000	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dispermades	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	50.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 dokumen	70.000.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dispermades	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Dispermades	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	162 orang	50.000.000	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	177 dokumen	10.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Dispermades**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina** **Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD**	**100 %** **100%**	**8.682.133.088**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Dispermades**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina** **Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD**	**100 %** **100%**	**8.682.133.088**	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Dispermades*	*Jumlah laporan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu)*	*3 laporan*	*8.682.133.088*	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Dispermades*	*Jumlah laporan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu)*	*3 laporan*	*8.682.133.088*	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	100.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Dispermades	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	1 lembaga	5.500.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Dispermades	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	1 lembaga	5.500.000.000	

Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 dokumen	80.000.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	70.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	70.000.000	
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	1.932.133.088	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Dispermades	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 laporan	1.932.133.088	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dispermades	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	1.000.000.000	

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat yang bersifat pemberdayaan diakomodir oleh Bapperlibang melalui Musrenbangcam, kemudian Dispermades menampung usulan yang telah masuk untuk dipelajari, ditelaah dan diusulkan sebagai kegiatan yang akan dianggarkan dalam program di tahun berikutnya.
Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (termasuk hasil Musrenbangcam) terdapat beberapa Usulan yang ditujukan ke Dispermades Kabupaten Karanganyar, namun mendasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Nomenklatur Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sekarang hanya ada 4 Program yang terdiri dari :

1. Program Penataan Desa (1 kegiatan, 7 sub Kegiatan)
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)
3. Program Admnistrasi Pemerintahan Desa (1 kegiatan, 12 sub kegiatan)
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (1 kegiatan, 6 sub kegiatan)

Sementara usulan yang masuk ke Dispermades terdapat 67 usulan, Adapun perincian data usulan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Penelaahan Usulan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/ Permasalahan	Besaran/ volume	Catatan
1	2	3	4	5	5
1	Pembinaan Kemasyarakatan	Desa Nangsri	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	35.000.000	Sesuai urusan
2	Pelatihan komputer untuk Perangkat Desa (lab komputer)	Desa Ngasem	optimalisasi kinerja Perangkat Desa		Sesuai urusan
3	Pemeliharaan Jalan	Desa Pandeyan	Memperlancar Transportasi	700.000.000	
4	Peningkatan kapasitas Kades, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa	Desa Malangjiwan	Peningkatan kualitas SDM		Sesuai urusan
5	Bimtek dan Pelatihan Kepal Desa dan Perangkat Desa dan BPD	Desa Malangjiwan	Peningkatan kualitas SDM		Sesuai urusan
6	Talud Jalan Tembus Ngangkruk - Siwal	Dusun Ngangkruk - Mundu	Memperlancar transportasi	860.625.000	
7	Pengembangan Pasar Desa	Desa Selokaton	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	500.000.000	
8	Perbaikan Kantor Desa	Desa Selokaton	Peningkatan Pelayanan	400.000.000	
9	Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan solo	Bodo, Karangwuni, Ngabeyan, Geretan	Penanggulangan Banjir	500.000.000	
10	Pengembangan Kios Desa	Desa Jatikuwung	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	500.000.000	

11	Penyertaan Modal BUMDesa NGUDI REJEKI	Desa Kragan	Menciptakan Desa Mandiri	500.000.000	Sesuai urusan
12	Pembentukan BUMDESMA	Kecamatan	Menciptakan Desa Mandiri	5.000.000	Sesuai urusan
13	Pembangunan Kios Pasar Desa	Ngabeyan RT. 001/005	Peningkatan Pendapatan Desa	500.000.000	
14	Pembangunan Wisata Desa SEBALONG	Serenan RT. 004/003	Peningkatan Pendapatan Desa	5.000.000.000	
15	Pengelolaan Sampah Pembuangan Sampah Desa Selokaton	Desa Dayu	Pengelolaan Sampah yang Memadai	500.000.000	
16	Perbaikan Kantor Desa	Desa Dayu	Peningkatan Pelayanan	400.000.000	
17	Pembangunan Kolam Renang Agrowisata Desa	Serenan RT. 004/003	Peningkatan Pendapatan Desa	1.000.000.000	
18	Betonisasi dan Talud Jalan	Jatikuwung	Memperlancar Transportasi	320.000.000	
19	Betonisasi Jalan	Dusun Jatikuwung - Terek - Dusun Winong	Memperlancar Transportasi	200.000.000	
20	Rabat Beton Jalan Desa Mundu - Rejosari (V:797x8x0,12)	Dusun Mundu ke Desa Rejosari	Memperlancar transportasi	765.120.000	
21					
22	Rabat beton Jalan Lingkar Dusun (V; 432x3x0,12)	Dusun Mundu	Memperlancar transportasi	155.520.000	
23	Penyertaan Modal BUMDES	Desa Tuban	Manambah PAD	500.000.000	Sesuai urusan
24	Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa		Peningkatan SDM	50.000.000	Sesuai urusan
25	Bantuan Sarana Prasarana	Desa Malangjiwan	Peningkatan Untuk Desa Wisata yang ada di Kecamatan tawangmangu Yang meliputi Desa Nglebak dan Desa Tengklik	200.000.000	
26	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Mojoroto	Pembangunan/ Rehabilitasi Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	250.000.000	
27	Perbaikan Kantor Desa	Desa Selokaton	Meningkatkan Pelayanan	300.000.000	
28	Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan solo	Bodo, Karangwuni, Ngabeyan, Geretan	Penanggulangan Banjir	105.000.000	
29	Rehabilitas Balai Desa	Kragan RT 001/002	Kualitas Pelayanan Masyarakat Desa	500.000.000	
30	Gamelan	Kantor Kepala Desa Kragan	Pelestarian Budaya	200.000.000	
31	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Kantor Desa Mojogedang Kec.Mojogedang	Pembangunan kantor pelayanan Desa	600.000.000	

32	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Komplek kantor desa Gentungan, Kab. Karanganyar	rehab kantor desa	300.000.000	
33	Mesin Setemper Kuda		Peningkatan Ekonomi	375.000.000	
34	Mesin Sunduk Sate		Peningkatan Ekonomi	120.000.000	
35	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Munggur	Rehabilitasi Gedung PKD	150.000.000	
36	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Ngadirejo	Pembangunan Gedung Kantor Desa	500.000.000	
37	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Balai Desa Kedungjeruk	pembangunan mushola di kantor desa	250.000.000	
38	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Dusun Bendo , Pojok	Pembangunan Pagar Kantor Desa	300.000.000	
39	Pengadaan prasarana kantor Desa		Desa Puntukrejo	400.000.000	
40	Rehab Kantor Pemerintah Desa		Desa Berjo	500.000.000	
41	Rehab Kantor Pemerintah Desa		Desa Segorogunung	1.000.000.000	
42	Rehab Kantor Pemerintah Desa		Desa Dukuh	1.350.000.000	
43	Pengadaan PVC Kantor Desa		Desa Ngargoyoso	200.000.000	
44	Program perekonomian dan pembangunan	Dusun Kopenan, Desa Kebak	Talud Tiris RT 001 RW 004	100.000.000	
45	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Desa Tugu	25.000.000	
46	Pembangunan kantor dan aula Desa Segorogunung		desa segorogunung	500.000.000	
47	Pengadaan Komputer dan server		Desa Puntukrejo	30.000.000	
48	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Bendosari RT 02 RW 09 ,Pendem, Kab. Karanganyar	Pembangunan/Rehab Kantor Desa	1.000.000.000	
49	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Desa Pereng, Kab. Karanganyar	Pembangunan/Rehab Kantor Desa	500.000.000	
50	Fisik Sarana Prasarana Pemerintahan	Dusun Sarirejo Desa Pereng, Kab. Karanganyar	Pagar Keliling Pekarangan Kantor Desa Pereng.	500.000.000	
51	Peningkatan Perekonomian di Desa	Desa Munggur	Pembangunan kios dan pengembangan kawasan ekonomi Timur SMP N 1	500.000.000	
52	Peningkatan Pelestarian	Desa Mojoroto	Pengembangan	200.000.	

	Budaya Lokal		Wisata Sendang Bejen	000	
53	Pengembangan Acara Adat Desa	Desa Kaliboto	Sosialisasi Kegiatan Budaya adat	100.000.000	
54	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Kaliboto	Pelatihan Seni	100.000.000	
55	Perencanaan Kampung Olahraga	Desa Kaliboto	Desa menjadi sport Center	200.000.000	
56	Peningkatan Fisik Sarana Prasarana	Desa Ngadirejo	Pembangunan GedungBolo Pecah Nglebak	150.000.000	
57	Peningkatan Fisik Sarana Prasarana	Desa Sewurejo	Pembangunan Gedung Kemasyrakatan Timur Nglebak RT 06	150.000.000	
58	Peningkatan Fisik Sarana Prasarana	Desa Sewurejo	Penyempurnaan Gedung Pertemuan Sidorejo	150.000.000	
59	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Sewurejo	Pembelian seperangkat Gamelan / Alat musik Tradisional	Rp. 400.000.000,-	
60	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Mojogedang	Pembangunan Lapangan Olahraga Desa	500.000.000	
61	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Gentungan	pengadaan merak reog	100.000.000	
62	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Gentungan	Lapangan Karanggayam	500.000.000	
63	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Kedungjeruk	pelatihan seni karawitan bagi masyarakat umum	500.000.000	
64	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Gebyok	pembangunan lapangan bola voly desa gebyog	300.000.000	
65	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Gebyok	pembangunan lapangan sepakbola desa Gebyog	500.000.000	
66	Peningkatan Pelestarian Budaya Lokal	Desa Pojok	Pengadaan Alat kesenian di Desa Pojok	300.000.000	
67	Peningkatan sarpras olahraga	Desa Pendem	pembangunan dan perbaikan lapangan desa	1.000.000.000	
			TOTAL	28.996.265.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, dan Provinsi

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan Pembangunan Nasional agar kesenjangan pendapatan menjadi kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dispermades mempunyai peran yang penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;

16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam 16 prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran

pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 p

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan

yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;

6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;
12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Dispermades

Dispermasdes Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menetapkan rencana Kerja (RENJA) mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar baik Tujuan maupun Sasaran Daerah.

Adapun tujuan serta sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dijelaskan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Program dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Formulasi	Satuan	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya kualitas pembangunan desa dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa			Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	Indeks	0,7415	0,7445
	Meningkatnya capaian Desa Mandiri		Persentase Desa Mandiri	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	Persen	19,14	20,99
		Penataan Desa	*Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan*		Persen	85	91,40
			Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana		Persen	100	100
		Peningkatan Kerjasama Desa	*Persentase Desa yang melakukan kerjasama*		Persen	89,30	89,50
		Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan* *Persentase desa tertib administrasi pemerintahan* *Persentase desa memiliki BUMDes*		Persen Persen Persen	100 100 98,77	100 100 98,77
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina*		Persen	100	100

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Formulasi	Satuan	Target 2025	Target 2026
		, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat					
			Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD		Persen	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,325	81,625
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP		Nilai	72,0	72,0

3.3. Tantangan dan Peluang

Tantangan :

a) Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
b) Mewujudkan kemandirian desa dengan memanfaatkan berbagai potensi sosial, ekonomi dalam Pembangunan.

Peluang :

a) Implementasi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu.
b) Partisipasi masyarakat dalam berswadaya maupun gotong royong dalam pembangunan di desa.
c) Dispermasdes melakukan fasilitasi terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

3.4.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai urusan yang ditangani maka DISPERMASDES masuk dalam urusan wajib bukan pelayanan dasar, untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pembangunan desa dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun / Indeks Desa	Meningkatnya capaian Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran PD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	**Program**	**Kegiatan**	**Subkegiatan**
Meningkatnya capaian Desa Mandiri	Penataan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	1.Penyelenggaraan Penataan Desa 2.Fasilitasi Tata Wilayah Desa 3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	Peningkatan kerjasama desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1.Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan

			Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 3.Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Administrasi pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 9. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 12. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 14. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4.Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 6.Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar maka Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang direncanakan untuk dilaksananakan pada tahun 2026, mendasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang sudah terdapat beberapa pertimbangan diantaranya mempedomani RKPD Kabupaten Karanganyar tahun 2026 serta Renstra 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				**16,113,566,462**				**13.714.347.074**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**16,113,566,462**				**13.714.347.074**
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**16,113,566,462**				**13.714.347.074**
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya***		**100%**	**5.010,966,462**			**100%**	**6.056.213.986**
3	**26**	**001**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			**100%**	**77,940,000**			**100%**	**106.560.000**
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Kab. Karanganyar		0	APBD		-	0
2	13	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD	*Jumlah Dokumen RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-OPD*	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000
2	13	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubaha RKA-OPD*	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000
2	13	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	*Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD*	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- OPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-OPD*	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jml Laporan	Kab. Karanganyar	4 laporan	73.940,000	APBD		4 laporan	102,560,000
2	**13**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**100%**	**4,460,855,622**			**100%**	**5.213.333.478**
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Karanganyar	39 orang	4.460.855.622	APBD		39 orang	5.213.333.478
2	13	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**100%**	**10,000,000**			**100%**	**10,000,000**
2	13	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Kab. Karanganyar	10 Orang	10,000,000	APBD		10 Orang	10,000,000
2	**13**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**100%**	**140,235,000**			**100%**	**320.878.433**
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	Kab. Karanganyar	10 paket	4,000,000	APBD		10 paket	4,000,000
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml perlengkapan kantor yg tersedia tersedianya alat tulis kantor cukup setiap bln Tersedianya peralatan kantor yang baik	Kab. Karanganyar	3 paket	15.000.000	APBD		3 paket	146.703.433

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	Kab. Karanganyar	12 paket	15,000,000	APBD		12 paket	15,000,000
2	13	01	2.06	000006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Karanganyar	24 dokumen	4.500,000	APBD		24 dokumen	4.620,000
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar.dalam daerah Tersedianya makan dan minum kantor	Kab. Karanganyar	12 laporan	100,000,000	APBD		12 laporan	148,820,000
2	13	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,735,000	APBD		1 dokumen	1,735,000
2	**13**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**145,000,000**			**100%**	**169,800,000**
2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	1 laporan	4,600,000	APBD		1 laporan	5,000,000
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Karanganyar	3 laporan	50,400,000	APBD		3 laporan	64,800,000
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Karanganyar	3 laporan	90,000,000	APBD		3 laporan	100,000,000
2	**13**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**100%**	**176,935,840**			**100%**	**235.642.075**
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Karanganyar	15 unit	143,671.840	APBD		15 unit	204.415.675
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Karanganyar	27 unit	21,264,000	APBD		27 unit	2,126,400

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Karanganyar	1 unit	12,000,000	APBD		1 unit	29,100,000
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan**		**91,40%**	**80,000,000**			**93,80%**	**365,000,000**
						Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana		**100%**				**100%**	
2	**13**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**			**100%**	**80.000. 000**			**100%**	**365,000,000**
								100%				**100%**	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Karanganyar	162 desa	10,000,000	APBD		162 desa	150,000,000
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Karanganyar	1.000 unit	70,000,000	APBD		1.000 unit	215,000,000
2	13	03			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan kerjasama**		**89,50**	**65.000. 000**			**92,5%**	**95,000,000**
2	13	03	2.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**			**145 desa**	**65.000. 000**			**150 desa**	**95,000,000**
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	40,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Karanganyar	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	30,000,000
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan Persentase desa tertib administrasi pemerintahan**		**100% 100% 98,77%**	**4.190.000. 000**			**100% 100% 98,77%**	**4.567.500. 000**
2	**13**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**			**162 desa**	**3,350,000,000**			**162 desa**	**4.567.500. 000**
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	50,000,000	APBD	131,000,000	1 dokumen	440,000,000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Karanganyar	2 dokumen	40,000,000	APBD	150,000,000	4 dokumen	87.500,000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	50,000,000	APBD	100,000,000	1 dokumen	100,000,000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Karanganyar	2 Dokumen	2,800,000,000	APBD	3,260,000,000	2 Dokumen	3,260,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Karanganyar	60 orang	25,000,000	APBD		60 orang	25,000,000
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Karanganyar	2 laporan	25,000,000	APBD		2 laporan	25,000,000
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	75,000,000	APBD		1 dokumen	200,000,000
2	13	04	2.01	08	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Karanganyar	1 laporan	75,000,000	APBD		1 laporan	200.000.000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Karanganyar	10 laporan	50,000,000	APBD		10 laporan	50,000,000
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Karanganyar	1 dokumen	50,000,000	APBD		1 dokumen	70,000,000
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Karanganyar	162 orang	50,000,000	APBD		162 orang	50,000,000
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Karanganyar	177 dokumen	10,000,000	APBD		177 dokumen	10,000,000
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibina**		**100%**	**8.682.133.088**	**APBD**		**85%**	**2,630.633.088**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Persentase desa dengan infrastruktur baik melalui TMMD		**100%**				**100%**	
2	**13**	**05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**			**3 laporan 4 desa**	**7,607,600.000**	APBD		**1 kegiatan**	**2.630.633.088**
2	13	05	2.01	0.2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Karanganyar	1 dokumen	25,000,000	APBD		3 dokumen	100,000,000
2	13	05	2.01	0.3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Karanganyar	1 lembaga	5,437,600,000	APBD		1 lembaga	6,000,000
2	13	05	2.01	0.5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil FasilitasiPengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Karanganyar	2 dokumen	25,000,000	APBD		2 dokumen	25,000,000
2	13	05	2.01	0.6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Karanganyar	1 laporan	20,000,000	APBD		2 laporan	72,500,000
2	13	05	2.01	0.7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Karanganyar	5 laporan	1,100,000,000	APBD		5 laporan	1.427.133.088

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	13	05	2.01	0.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karanganyar	1 dokumen	1,000,000,000	APBD		1 dokumen	1,000,000,000

4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) & Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025 Semester I	Target 2026
1	Indikator Kinerja Utama : Nilai Indeks Desa	Indeks	N.A	0,7445
2	Indikator Kinerja Kunci : Persentase Desa Mandiri	Persen	N.A	20,99

Tabel 4.3
Program/Kegiatan Dispermasdes yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**Program:** *Administrasi Pemerintahan Desa* **Kegiatan:** Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.800.000.000,-
2	Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, *kader posyandu*, dan Guru swasta;	**Program:** *Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat* **Kegiatan:** Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.437.600.000,-

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen - dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

2. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Dispermades yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2026 dengan mengacu kepada Perubahan Renstra 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Ditingkat PD, pelaksanaan program kegiatan didasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) yang berpedoman pada RPJMD. Dan rencana kerja (renja) adalah bagian dari perencanaan tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Penyusunan rencana kerja ini tentu saja memperhitungkan waktu pelaksanaan, sumber daya yang dimiliki, mempertimbangkan skala prioritas sehingga efisiensi dan efektivitas kegiatan nantinya dapat terwujud. Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan bisa menjadi pedoman atau standar pelaksanaan, sebagai acuan fungsi pengawasan, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terdeteksi dan mendapatkan solusi.

Kami sadari bahwa materi yang kami sajikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat masa-masa yang akan datang perubahan-perubahan akan selalu terus terjadi, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih diperlukan berbagai perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan serta saran agar tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar disampaikan terima kasih.

Karanganyar, ...
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI SUBOKO,S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196902151990011002

DAFTAR ISI

Cover
Kata Pengantar ---------- ii
Daftar Isi ---------- iii
Daftar Tabel ---------- iv
Daftar Grafik ---------- v
Daftar Gambar ---------- vi
BAB 1 P E N D A H U L U A N ---------- I-1
1.1 Latar Belakang ---------- I-1
1.2 Landasan Hukum ---------- I-1
1.3 Maksud, Tujuan ---------- I-2
1.4 Sistematika Penulisan ---------- I-2
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA TAHUN LALU -- II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISHUB Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja 2025 ---------- II-1
2.1.1 Evaluasi Anggaran ---------- II-1
2.1.2 Evaluasi Kinerja (Indikator) ---------- II-9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ---------- II-10
2.2.1 Sumber Daya Manusia ---------- II-22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ---------- II-26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 ---------- II-27
BAB3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ---------- III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ------ III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran ---------- III-3
3.3. Tantangan dan Peluang ---------- III- 7
BAB4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB 5 PENUTUP ---------- V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perhubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 Dishub --II-1
Tabel 2.2 Realisasi APBD di Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan 2025 (TW II) ---------- II-4
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024 ---------- II-8
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan-- II-9
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan---------- II-9
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan ---------- II-9
Tabel 2.7 Capaian Nilai SAKIP---------- II-10
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan ---------- II-10
Tabel 2.9 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar ------ II-12
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar---------- I1-21
Tabel 2.11 Daftar Sarana dan Prasarana ---------- II-23
Tabel. 2.12 Review Terhadaap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Perhubungan ---------- II-28
Tabel 2.13 Usulan Progam dan Kegiatan Dari Masyarakat/Desa/Kelurahan/ Kecamatan Tahun 2026 ---------- II- 45
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ---------- III-6
Tabel 3.2 Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ---------- III-9
Tabel 4.1 Rumusan Program Kegiatan Sub Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perhubungan ---------- IV-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1
Capaian Kinerja Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Perhubungan ----- ---------- II-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbaikan Infrastruktur Perhubungan ----- ----------II-6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2026. Selanjutnya Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 memuat program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2026, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2027.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Satuan perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2026 memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan tahun 2025 semester 1.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Perhubungan khususnya tim penyusun Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2026 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
k. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
l. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168)
m. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
n. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Lampiran XXI (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahu 2025 Nomor 35);
o. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yaitu meliputi (1) Sekretariat, (2) bidang Sarana dan Keselamatan dan (3) bidang Lalu Lintas dan Angkutan untuk tahun rencana 2026.

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembuatan dokumen rancangan awal RKPD tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dokumen rancangan awal RKPD 2026 disusun sebagai pedoman untuk perencanaan tahunan yang selaras dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA TAHUN LALU

Sistem Perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; Tahap 2: Merumuskan keadaan sekarang/saat ini; Tahap 3: Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi; Tahap 4: Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja DISHUB Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya/saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISHUB Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun 2024 dan tahun berjalan (2005) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasaalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk dijadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dal pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1.Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi Anggaran dalam APBD

Pada tahun 2024 dan 2025 Dinas Perhubungan telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana table berikut :

Tabel 2.1

Persandinga Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Dishub

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**9.828.045.896**	**9.828.045.896**	**100**	**10.150.000.000**	**7.724.719.334**	**76,11**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.436.500	13.436.500	100	100.000.000	60.000.000	60,00
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.007.500	3.007.500	100	70.000.000	50.000.000	71,43
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.217.750	2.217.750	100	5.000.000	2.500.000	50,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.753.750	2.753.750	100	5.000.000	2.500.000	50,00
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.728.750	2.728.750	100	5.000.000	2.500.000	50,00
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.728.750	2.728.750	100	5.000.000	2.500.000	50,00

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	5.000.000	0	0,00
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	5.000.000	0	0,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.028.759.506	6.028.759.506	100	6.095.000.000	6.796.624.834	111,51
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.882.516.406	5.882.516.406	100	5.900.000.000	6.655.824.834	112,81
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verivikasi Keuangan SKPD	146.243.100	146.243.100	100	180.000.000	140.800.000	78,22
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	5.000.000	0	0,00
11)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0	5.000.000	0	0,00
12)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0	5.000.000	0	0,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100	10.000.000	5.000.000	50,00
13)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100,00
14)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	5.000.000	0	0,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.746.000	148.746.000	100	650.000.000	5.000.000	0,77
15)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	200.000.000	0	0,00
16)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	5.000.000	50,00
17)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	5.000.000	0	0,00
18)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.746.000	138.746.000	100	360.000.000	0	0,00
19)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	75.000.000	0	0,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.680.890	199.680.890	100	287.500.000	167.737.407	58,34
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000	4.664.000	100	5.000.000	4.998.700	99,97
21)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0		5.000.000	30.000.000	600,00
22)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.678.640	21.678.640	100	50.000.000	25.000.000	50,00
23)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.562.800	6.562.800	100	20.000.000	7.000.000	35,00
24)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100	7.500.000	2.760.000	36,80
25)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.295.000	34.295.000	100	50.000.000	14.770.000	29,54
26)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.810.000	119.810.000	100	130.000.000	64.083.257	49,29
27)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	10.000.000	10.000.000	100,00
28)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.910.450	9.910.450	100	10.000.000	9.125.450	91,25
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.882.497.500	2.882.497.500	100	2.187.500.000	183.017.100	8,37
29)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0	2.000.000.000	0	0,00
30)	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0	17.500.000	0	0,00
31)	Pengadaan Mebel	11.500.000	11.500.000	100	70.000.000	34.000.000	48,57
32)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.767.500	91.767.500	100	100.000.000	149.017.100	149,02
33)	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.779.230.000	2.779.230.000	100	0	0	0,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.176.500	303.176.500	100	330.000.000	293.308.500	88,88
34)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.626.500	71.626.500	100	65.000.000	73.160.000	112,55
35)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.000.000	171.000.000	100	190.000.000	165.600.000	87,16
36)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.650.000	19.650.000	100	25.000.000	15.000.000	60,00
37)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.900.000	40.900.000	100	50.000.000	39.548.500	79,10

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.749.000	246.749.000	100	490.000.000	214.031.493	43,68
38)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.919.000	134.919.000	100	190.000.000	139.631.493	73,49
39)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.971.000	10.971.000	100	15.000.000	6.000.000	40,00
40)	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	10.000.000	0	0,00
41)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	100	25.000.000	15.000.000	60,00
42)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.859.000	35.859.000	100	200.000.000	0	0,00
43)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	53.400.000	106,80
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**3.293.892.810**	**3.293.892.810**	**100**	**4.870.000.000**	**3.366.715.000**	**69,13**
9.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	250.000.000	0	0,00
44)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	100.000.000	0	0,00
45)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	50.000.000	0	0,00
46)	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0	100.000.000	0	0,00
10.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	679.901.550	679.901.550	100	1.150.000.000	719.320.000	62,55
47)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	173.400.000	173.400.000	100	500.000.000	49.992.000	10,00
48)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	417.218.050	417.218.050	100	550.000.000	563.808.000	102,51
49)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	89.283.500	89.283.500	100	100.000.000	105.520.000	105,52
11.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	731.080.000	731.080.000	100	870.000.000	734.160.000	84,39
50)	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	731.080.000	731.080.000	100	770.000.000	670.160.000	87,03
51)	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0	50.000.000	0	0,00
52)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0	0	0	50.000.000	64.000.000	128,00
12.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	321.920.000	321.920.000	100	360.000.000	367.480.000	102,08
53)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	60.000.000	0	0,00
54)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	321.920.000	321.920.000	100	300.000.000	367.480.000	122,49
13.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	492.287.260	492.287.260	100	900.000.000	552.075.000	61,34
55)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	167.266.860	167.266.860	100	380.000.000	252.075.000	66,34
56)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0	20.000.000	0	0,00
57)	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	100	200.000.000	100.000.000	50,00
58)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	225.020.400	225.020.400	100	300.000.000	200.000.000	66,67
14.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	528.322.100	528.322.100	100	700.000.000	474.960.000	67,85
59)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	0	200.000.000	0	0,00

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
60)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	528.322.100	528.322.100	100	500.000.000	474.960.000	94,99
15.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	9.138.500	9.138.500	100	10.000.000	5.000.000	50,00
61)	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	9.138.500	9.138.500	100	10.000.000	5.000.000	50,00
16.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	192.520.000	192.520.000	100	250.000.000	187.000.000	74,80
62)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	0	0	50.000.000	0	0,00
63)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	192.520.000	192.520.000	100	200.000.000	187.000.000	93,50
17.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	338.723.400	338.723.400	100	380.000.000	326.720.000	85,98
64)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	86.583.400	86.583.400	100	80.000.000	74.720.000	93,40
65)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	252.140.000	252.140.000	100	300.000.000	252.000.000	84,00
	1 Urusn 2 Program, 17 kegiatan, 65 sub kegiatan	**13.121.938.706**	**13.121.938.706**	**100**	**15.020.000.000**	**11.091.434.334**	**73,84**

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025 Diolah

Besar Kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Dinas Perhubungan tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar 73,84.

Pada awal tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaa APBN dan APBD tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaisan pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD Karena pengurangan DAU dan pembatalan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, Penyediaan ATK, Makan Minum, Barang cetak, dll sebesar 20%

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Dishub yang semula Rp. 11.091.434.334,00 harus berkurang sebesar Rp. 221.736.000,00 sehingga pagu anggaran Dishub tahun 2025 adalah Rp. 10.869.698.000,00 dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah didasarkan pada pergeseran APBD 2025 yang merupakan hasil efisiensi anggaran sebagai dampak regulasi dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi APBD di Dinas Perhubungan Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**9.828.045.896**	**7.185.159.516**	**73,11**	**7.694.880.884**	**3.519.777.170**	**45,74**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.436.500	10.429.000	77,62	55.282.650	5.000.000	9,04

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.007.500	0	0,00	49.000.000	0	0,00
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.217.750	2.217.750	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.753.750	2.753.750	100,00	641.325	0	0,00
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.728.750	2.728.750	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.728.750	2.728.750	100,00	641.325	0	0,00
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0,00	0	0	0,00
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00	0	0	0,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.028.759.506	5.170.605.987	85,77	6.792.892.884	3.025.536.452	44,54
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.882.516.406	5.046.162.887	85,78	6.655.824.834	2.965.800.452	44,56
9)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verivikasi Keuangan SKPD	146.243.100	124.443.100	85,09	137.068.050	59.736.000	43,58
10)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0,00	0	0	0,00
11)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0,00	0	0	0,00
12)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00	4.559.900	3.546.300	77,77
13)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	4.559.900	3.546.300	77,77
14)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00	0	0	0,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	148.746.000	9.892.800	6,65	2.736.550	1.383.300	50,55
15)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00	0	0	0,00
16)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	9.892.800	98,93	2.736.550	1.383.300	50,55
17)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0,00	0	0	0,00
18)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	138.746.000	0	0,00	0	0	0,00
19)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	0	0	0,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.680.890	147.709.793	73,97	149.051.807	95.390.225	64,00
20)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000	4.664.000	100,00	4.998.700	4.998.700	100,00
21)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0		30.000.000	30.000.000	100,00
22)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.678.640	21.458.350	98,98	25.000.000	12.987.675	51,95
23)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.562.800	5.931.600	90,38	7.000.000	6.245.000	89,21

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
24)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760.000	2.300.000	83,33	2.760.000	690.000	25,00
25)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.295.000	14.000.000	40,82	14.770.000	10.510.000	71,16
26)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.810.000	89.445.393	74,66	45.471.007	13.525.000	29,74
27)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0,00	9.926.650	7.308.400	73,62
28)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	9.910.450	9.910.450	100,00	9.125.450	9.125.450	100,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.882.497.500	1.403.081.151	48,68	183.017.100	144.997.780	79,23
29)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00	0	0	0,00
30)	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0	0,00	0	0	0,00
31)	Pengadaan Mebel	11.500.000	11.500.000	100,00	34.000.000	34.000.000	100,00
32)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.767.500	75.762.500	82,56	149.017.100	110.997.780	74,49
33)	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.779.230.000	1.315.818.651	47,34	0	0	0,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.176.500	246.516.135	81,31	293.308.500	145.488.613	49,60
34)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	71.626.500	59.405.300	82,94	73.160.000	32.148.000	43,94
35)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.000.000	143.765.335	84,07	165.600.000	84.302.113	50,91
36)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.650.000	9.608.000	48,90	15.000.000	9.690.000	64,60
37)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.900.000	33.737.500	82,49	39.548.500	19.348.500	48,92
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.749.000	191.924.650	77,78	214.031.493	98.434.500	45,99
38)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.919.000	94.178.150	69,80	139.631.493	75.544.500	54,10
39)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.971.000	6.242.500	56,90	6.000.000	0	0,00
40)	Pemeliharaan Mebel	0	0	0,00	0	0	0,00
41)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	12.065.000	80,43	15.000.000	6.890.000	45,93
42)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.859.000	35.859.000	100,00	0	0	0,00
43)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	43.580.000	87,16	53.400.000	16.000.000	29,96
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**3.293.892.810**	**2.524.924.953**	**76,65**	**3.174.817.450**	**1.324.178.470**	**41,71**
9.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0	0,00

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
44)	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0	0,00
45)	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0	0,00
46)	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	0	0,00	0	0	0,00
10.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	679.901.550	418.225.150	61,51	642.789.500	260.996.700	40,60
47)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	173.400.000	0	0,00	49.992.000	0	0,00
48)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	417.218.050	340.461.650	81,60	487.761.700	224.247.500	45,97
49)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	89.283.500	77.763.500	87,10	105.035.800	36.749.200	34,99
11.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	731.080.000	588.143.050	80,45	727.785.000	297.852.400	40,93
50)	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	731.080.000	588.143.050	80,45	663.785.000	297.852.400	44,87
51)	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	0	0	0,00	0	0	0,00
52)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0	0	0,00	64.000.000	0	0,00
12.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	321.920.000	246.715.300	76,64	326.895.200	127.166.800	38,90
53)	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0,00	0	0	0,00
54)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	321.920.000	246.715.300	76,64	326.895.200	127.166.800	38,90
13.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	492.287.260	396.253.760	80,49	517.541.600	99.095.350	19,15
55)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	167.266.860	133.647.860	79,90	250.512.200	46.467.100	18,55
56)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	0	0,00	0	0	0,00
57)	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	100,00	70.000.000	0	0,00
58)	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	225.020.400	162.605.900	72,26	197.029.400	52.628.250	26,71
14.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	528.322.100	407.392.050	77,11	474.124.200	216.055.000	45,57
59)	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	0	0	0,00	0	0	0,00

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Pergeseran)	Realisasi	%
1	2	3	4	5,00	6	7	8
60)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	528.322.100	407.392.050	77,11	474.124.200	216.055.000	45,57
15.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	9.138.500	8.988.500	98,36	2.248.300	0	0,00
61)	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	9.138.500	8.988.500	98,36	2.248.300	0	0,00
16.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	192.520.000	152.809.750	79,37	168.750.000	53.517.500	31,71
62)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	0	0,00	0	0	0,00
63)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	192.520.000	152.809.750	79,37	168.750.000	53.517.500	31,71
17.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	338.723.400	306.397.393	90,46	314.683.650	269.494.720	85,64
64)	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	86.583.400	65.894.900	76,11	73.513.800	31.196.700	42,44
65)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	252.140.000	240.502.493	95,38	241.169.850	238.298.020	98,81
	1 Urusn 2 Program, 17 kegiatan, 65 sub kegiatan	13.121.938.706	9.710.084.469	74,00	10.869.698.334	4.843.955.640	44,56

Sumber : Dishub, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 Sebesar Rp. 13.221.938.706,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 9.710.084.469,00 atau 74,00%. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 Rp. 4.843.995.640,00 atau 44,56% dari pagu efisiensi anggaran Rp. 10.869.698.334,00.

Tabel 2.3.

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	PROGRAM	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.426.349.248	9.339.968.244	89,58	9.828.045.896	7.185.159.516	73,11
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.458.743.500	4.349.022.326	97,54	3.293.892.810	2.524.924.983	77%
	Presentase Realisasi	**14.885.092.748**	**13.688.990.570**	**91,96**	**13.121.938.706**	**9.710.084.499**	**74,00**
	Rata rata Realisasi 2 Program			**93,56**			**36,94**

Sumber: Dishub, 2025 diolah

Serapan anggaran selama ini belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan Memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut DISHUB perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2.Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pengukuran capaian target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.4.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024		Capaian
		Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Kinerja lalu Lintas Kabupaten	0,76 %	0,87 %	85,5 %
2.	Nilai Sakip	71	72,15	101,6 %

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2025

b. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

Indikator tujuan Dinas Perhubungan secara eksplisit tercantum pada dokumen RENSTRA tetapi merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dibandingkan terhadap target akhir periode RENSTRA seperti pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan

No.	Indikator kinerja Utama	Capaian 2024		Capaian
		Target	Realisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,76%	0,87	85,5%

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2025

Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target
Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2023 (%)	Target Akhir Renstra(%)	Capaian Tahun 2023 (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kinerja lalu Lintas kabupaten	0,87 %	0,66 %	75,8%

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2025

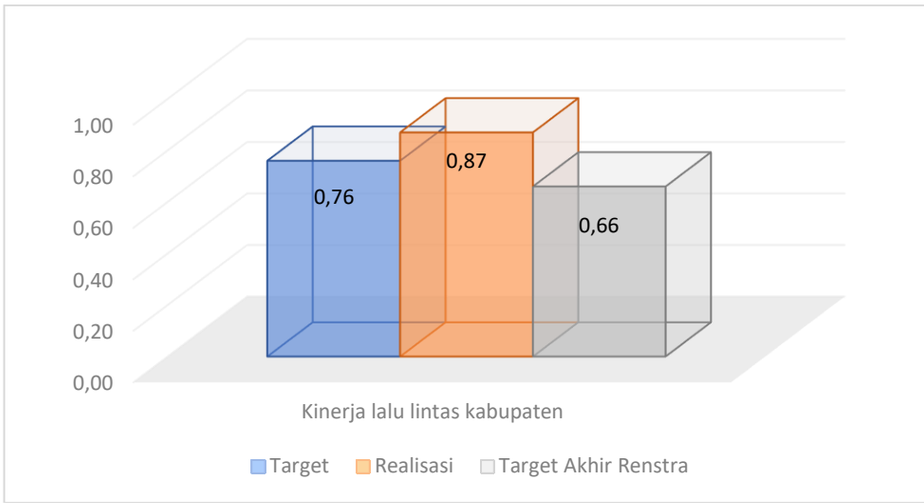

Grafik 2.1 Capaian Kinerja Cakupan Tingkat Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Capaian kinerja Sasaran Dinas Perhubungan untuk tahun 2024 diatas sebesar **85,5 %** dikategorikan **sangat tinggi**. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran cakupan tingkat pembangunan infrastruktur perhubungan.

Tabel 2.7.
Capaian Nilai SAKIP

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% capaian
1	Nilai SAKIP	%	71%	72,1 %	101,1 %
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					101,1%

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2025

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan Terhadap Target Akhir Periode Renstra Dinas Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2024 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2024 (%)	Kategori
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	
1	Nilai Sakip	72,1 %	73 %	98,67%	Di bawah target

Sumber : Dishub Kabupaten Karanganyar, 2025

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM.81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar terdapat 4 jenis pelayanan dasar bidang perhubungan meliputi : (1) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan, (2) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Sungai dan Danau, (3) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Penyeberangan, dan (4) Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Laut. Dari keempat jenis pelayanan dasar tersebut, Dinas

Perhubungan Kabupaten Karanganyar baru dapat melaksanakan Jenis Pelayanan Dasar Angkutan Jalan.

Tabel 2.9

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Tahun 2025
Kabupaten Karanganyar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	15				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG PAERHUBUNGAN**									
2	15	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	92%					91%		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Pengangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%		0%
2	15	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	0	0%
2	15	01	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	15	01	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	0	0%
2	15	01	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	15	01	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	0	0%
2	15	01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0	0%
2	15	01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	0	0%
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%		
2	15	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan		61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	100%	61 orang/bulan	52 orang/bulan	44%
2	15	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	3 dokumen	43%
2	15	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 laporan	0	0%
2	15	01	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	0	0%
2	15	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100%	5 laporan	0	0%
2	**15**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	15	01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	77%
2	15	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 laporan	0	0%
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%		
2	15	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	0	0%
2	15	01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%
2	15	01	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	0	0%
2	15	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	168 Orang		168 Orang	168 Orang	100%	168 orang	0	0%
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 orang	30 orang	100%	30 orang	0	0%
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%	100%		
2	15	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	15	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	52%
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	89%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	25%
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	68%
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	29%
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	73%
2	15	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
2	**15**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%		
2	15	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	0	0%
2	15	1	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	5 Unit		0 unit	0 unit	100%	5 unit	0	0
2	15	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		25 unit	25 unit	100%	25 unit	25 unit	100%
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		25 unit	25 unit	100%	25 unit	25 unit	74%
2	15	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 unit	1 unit	100%	0	0	0%
2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%	0	
2	15	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	43%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	50%
2	15	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	64%
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	48%
2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%		100%	100%	100%	100%	0	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	100%	12 unit	12 Unit	54%
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit		20 Unit	20 Unit	100%	12 unit	0	0%
2	15	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yg dipelihara	20 unit		20 Unit	20 Unit	100%	20 unit	0	0%
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit		15 Unit	15 Unit	100%	17 unit	15 Unit	45%
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit		2 unit	2 unit	100%	2 unit	0	0%
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit		5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	30%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik**	70%					50%		
						Persentase terminal kondisi baik	50%					65%		
						Persentase kendaraan yang lulus uji KIR	96%					95%		
2	**15**	**2**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%
2	15	2	2.01	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%
2	15	2	2.01	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0	0%
2	15	2	2.01	7	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0	0%
2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik**	280 buah		250 unit	250 unit	100%	260 buah	250 unit	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 unit		10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	0%
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 unit		100 unit	100 unit	100%	150 unit	100 unit	46%
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 unit		100 unit	100 unit	100%	100 unit	100 unit	35%
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola**	10 buah		10 buah	10 buah	100%	10 buah	10 buah	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	15	2	2.03	6	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan;	1 unit							
						2. Terpenuhinya pembayaran sewa dan kompenasi tanah oleh Pemkab	1 Lokasi							
						Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	44%
2	15	2	2.03	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Lokasi		1 unit	1 unit	100%	1 unit	0	0%
2	15	2	2.03	10	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	57 Orang		57 Orang	57 Orang	100%	57 Orang	0	0%
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah titik parkir yang dikelola**	271 titik		269 Titik	269 Titik	100%	270 titik		
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi PemenuhanPersyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 dokumen		12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	0	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	12 laporan	38%
2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah uji kir angkutan umum**	495 unit		475 unit	475 unit	100%	485 unit		
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	18%
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang		5 orang	5 orang	100%	2 orang	0	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8000 unit		8000 dokumen	8000 dokumen	100%	8000 dokumen	0	0%
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara;	5 unit		5 unit	5 unit	100%	15 unit	15 unit	26%
						2. Jumlah alat uji yang terpelihara	10 unit							
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas**	150 kegiatan		150 Kegiatan	150 Kegiatan	100%	150 kegiatan		
2	15	2	2.06	17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	150 Laporan		150 laporan	150 laporan	100%	150 kegiatan	150 kegiatan	45%
						2. Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car free day selama 4 jam	47 Kegiatan							
						3. Kinerja lalu lintas kabupaten	1 Laporan							
2	15	2	2.06	16	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	50 unit		50 Dokumen	50 Dokumen	100%	12 dokumen	0	0
						2. Jumlah pengadaan marka jalan	2 titk							
2	**15**	**2**	**2.07**		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan**	10 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100%	10 dokumen		
2	15	2	2.07	6	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	10 dokumen		7 dokumen	7 dokumen	100%	10 laporan	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025	
							(Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
2	**15**	**2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan**	12 Kegiatan		12 kegiatan	12 kegiatan	100%	12 kegiatan		
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan		0%
2	15	2	2.08	7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	31%
2	**15**	**2**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia**	11 unit		11 unit	11 unit	100%	11 unit		
2	15	2	2.09	3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	11 unit		11 unit	11 unit	100%	11 unit	11 unit	98%
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	42%

Sumber : Dishub, 2025 diolah

Tabel 2.10

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (n-2)	tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C		Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	
	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0,44	0,87	0,66	0,66	0,87	0,65	0,66	0,66	

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS dan Tenaga Harian Lepas, yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Menurut Golongan :

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	3	0	3
2	Golongan III	10	13	23
3	Golongan II	16	3	19
4	Golongan I	3	0	3
5	Golongan IX	1	1	2
6	Golongan V	1	0	1
7	Golongan VII	1	2	3
5	Non Golongan	87	24	111
	Jumlah	**122**	**43**	**165**

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2/ Magister	4	2	0	0	6
2	S1/ Sarjana	8	10	28	12	58
3	Diploma IV	0	0	1	0	1
4	Diploma III	2	7	6	7	22
5	Diploma II	2	0	0	0	2
6	Diploma 1	0	0	1	0	1
7	SMA/ Sederajat	19	0	47	5	71
8	SMP/ Sederajat	0	0	4	0	4
9	SD	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	**35**	**19**	**87**	**24**	**165**

2.2.1.1 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel 2.9 berikut ini :

Tabel 2.11.
Daftar Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
A	**Barang Tak Bergerak**				
1	Tanah/Bangunan Terminal/kantor/lapangan	Bidang	19	0	19
2	Gedung Kantor Permanen	Unit	18	0	18
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Unit	6	0	6
4	Tempat Ibadah Permanen	Unit	3	0	3
5	Ged.Pertokoan/Kop/Ps	Unit	4	0	4
6	Bangunan Ged. Pertokoan Lainnya	Unit	1	0	1
7	Ged. Pos Jaga	Unit	3	0	3
8	Ged Grs/Pool Sp	Unit	3	0	3
9	Halte Bus	Unit	2	0	2
10	Ged.Terminal	Unit	10	0	10
11	Bang.Ged.Terminal	Unit	21	0	21
12	Bang.Pengujian Kelaikan Lain	Unit	1	0	1
13	Ged.tmp.kerja lainnya	Unit	2	0	2
14	Sarana dan Prasarana LLAJ				
	• Traffic light	Unit	14	2	16
	• Lampu flashing	Unit	12	35	47
	• Rambu	Unit	10	0	10
	• Traffic Cone	Unit	45	0	45
	• RPPJ	Unit	34	0	34
	• Water Barrier	Unit	125	0	125
	• Road Barrier	Unit	49	0	49
B	**Barang Bergerak**				
1	Alat-alat Angkutan				
	• Station wagon / pick up/ lainnya	Unit	6	0	6
	• Sepeda Motor	Unit	14	0	14
2	Alat angkut non motor			0	
	• Gerobag Dorong	Unit	17	0	17
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
	• Mesin Tik Man (11-13)	Unit	7	0	7
	• Mesin Tik Man Long (18)	Unit	3	0	3
	• Almari Besi/Metal	Buah	12	0	12
	• Rak kayu	Buah	2	0	2
	• Filing Besi /Metal	Buah	14	0	14
	• Buffet	Buah	2	0	2
	• Papan pengumuman	Buah	12	0	12
	• Papan tulis/white board	Buah	2	0	2
	• Peta	Buah	1	0	1
	• Display	Buah	1	0	1
	• Lemari Kayu	Buah	5	0	5
	• Rak kayu	Buah	3	0	3

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Meja Kayu/Rotan	Buah	20	0	20
	• Kursi Besi /metal	Buah	31	0	31
	• Meja tulis	Buah	27	0	27
	• Meja Panjang	Buah	5	0	5
	• Meja Bundar	Buah	1	0	1
	• Kursi Tamu	Buah	7	0	7
	• Kursi Putar	Buah	4	0	4
	• Kursi biasa	Buah	50	0	50
	• Bangku tunggu	Buah	1	0	1
	• Kursi lipat	Buah	50	0	50
	• Meja Komputer	Buah	13	0	13
	• Meja ½ Biro	Buah	50	0	50
	• Sofa	Unit	1	0	1
	• Mebelair lainnya	Unit	4	0	4
	• Lampu Lalu lintas	Unit	1	0	1
	• Alat pembersih lainnya	Buah	1	0	1
	• Lemari Es	Buah	2	0	2
	• AC Unit	Buah	12	0	12
	• Kipas Angin	Buah	23	0	23
	• Televisi	Buah	4	0	4
	• Cassete Recorder	Buah	1	0	1
	• Amplifier	Buah	3	0	3
	• Loudspeaker	Buah	2	0	2
	• Wireless	Buah	1	0	1
	• Megaphone	Buah	2	0	2
	• Microphone	Buah	12	0	12
	• Unit Power Supply	Unit	20	0	20
	• Camera Film	Buah	6	0	6
	• Handy cam	Buah	4	0	4
	• Komputer unit/jaringan lainnya	Unit	4	0	4
	• PC	Unit	27	0	27
	• Laptop	Buah	12	0	12
	• Notebook	Buah	7	0	7
	• Harddisk	Buah	5	0	5
	• Printer	Buah	20	0	20
	• CPU	Buah	1	0	1
	• Monitor	Buah	3	0	3
	• Meja Kerja Pejabat Eselon III + II	Buah	10	0	10
	• Mobile File	Buah	4	0	4
	• Pesawat telepon PABX	Unit	1	0	1
	• Faximile	Unit	1	0	1
	• Generating set portable	Unit	3	0	3
	• Pompa Air	Unit	3	0	3
	• Alat Pengukur kegelapan kaca	Unit	2	0	2

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Alat Ukur Universal (GPS)	Unit	6	0	6
	• Alat pengukur garis tengah	Unit	1	0	1
	• Alat ukur ban	Unit	2	0	2
	• Alat ukur lainya	Unit	1	0	1
	• Alat penghancur kertas	Unit	1	0	1
	• Over head Proyektor	Unit	2	0	2
	• Pengukur dimensi	Unit	1	0	1
	• Alat pengukur angka dan kotak segel	Unit	1	0	1
	• Alat penunjuk arah	Unit	2	0	2
	• Meja Panjang	Buah	5	0	5
	• Meja Pelayanan Perijinan	Buah	1	0	1
	• Kursi Rapat	Buah	120	0	120
	• Chain Saw	Unit	2	0	2
	• Mesin Penghisap Debu	Unit	1	0	1
	• Mesin pemotong rumput	Unit	11	0	11
	• Dipenser	Unit	3	0	3
	• Handycam	Unit	3	0	3
	• Alat pemadam Portable	Buah	12	0	12
	• Suku cadang perangkat computer	Unit	1	0	1
	• Personal komputer lainya	Unit	5	0	5
	• Tablet	Unit	3	0	3
	• Scanner	Unit	1	0	1
	• Managable swich	Unit	1	0	1
	• Camera attachment	Unit	6	0	6
	• Amplifier horn	Unit	1	0	1
	• Power amplifier	Unit	2	0	2
	• Talkshow desk	Unit	1	0	1
	• Build up prosesor	Unit	1	0	1
	• Mixer	Unit	1	0	1
	• Peredam ruangan	Unit	1	0	1
	• Off air monitor	Unit	2	0	2
	• Video monitor cctv	Unit	1	0	1
	• Power suplly	Unit	1	0	1
	• Tripot camera	Unit	2	0	2
	• Lensa camera	Unit	2	0	2
	• Sound system	Unit	2	0	2
	• Tape recorder	Unit	2	0	2
	• Handy Talky	Unit	15	0	15
	• Intercome	Unit	1	0	1
	• Unit Pemancar VHf/FM	Unit	3	0	3
	• Switches/menara antena/Spanner	Unit	2	0	2
	• Memory camera foto	Unit	2	0	2
	• Memory video	Unit	1	0	1
	• Batery handycam	Buah	1	0	1

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Ac Floor Standing	Unit	1	0	1
	Jumlah		**941**	0	**941**

Sumber : DISHUB Kab. Karanganyar TA. 2021

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Disamping berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, dalam rangka penyusunan rencana kerja tahun 2026, juga memperhatikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi pada tahun berjalan (2025). Dari dua hal tersebut diharapkan penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, menjadi lebih tepat sasaran, lebih realistic sesuai kondisi perkembangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat

2. Permasalahan Penyelenggaraan Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a) Permasalahan Sekretariat

1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
3) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
5) Belum optimalnya data/ informasi dibidang sekretariat.

b) Permasalahan Bidang Prasarana dan Keselamatan

1) Belum optimalnya dalam penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan;
2) Belum optimalnya pengelolaan dibidang perparkiran (parkir tepi jalan umum dan parkir diluar tepi jalan umum);
3) Belum optimalnya data/ informasi dibidang prasarana dan keselamatan;
4) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan keselamatan berkendara:
5) Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2020 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 1.048 kasus).

c) Permasalahan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan

1) Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan yang seharusnya ada;
2) Kurangnya kesadaran kendaraan wajib uji yang tidak melakukan uji berkala kendaraan;
3) Belum semua wilayah ada layanan angkutan umum;
4) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan;
5) Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2020 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 1.048 kasus);
6) Masih rendahnya kualitas layanan angkutan umum;
7) Belum optimalnya data/ informasi dibidang lalu lintas dan angkutan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Rancangan awal RKPD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana terlampir. Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program kegiatan dan sub kegiatan OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam RENJA Dinas Perhubungan Tahun 2026 terdapat 2 Program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Berikut tabel review rancangan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2026 :

Tabel 2.12.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Perhubungan

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**100**	**39.344.124.291**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**100**	**43.391.434.334**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Nilai SAKIP***	**72,15**	**5.916.156.891**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		***Nilai SAKIP***	**72,15**	**9.224.719.334**
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100%**	**4.000.000**	**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	100%	**80.000.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	0	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.000.000	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1.000.000	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1.000.000	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1.000.000	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 Laporan	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	3 Laporan	5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***100%***	**5.473.976.891**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***100 Laporan***	**6.534.719.334**

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*61 orang/ Bulan*	*5.383.976.891*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*58 Orang / Bulan*	*6.378.919.334*
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verivikasi keuangan SKPD*	*5 Dokumen*	*90.000.000*	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verivikasi keuangan SKPD*	*5 dokumen*	*140.800.000*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*2 Laporan*	*0*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*5 Laporan*	*5.000.000*
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	*2 Dokumen*	*0*	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	*2 Dokumen*	*5.000.000*
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*5 Laporan*	*0*	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*5 Laporan*	*5.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**2.000.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**10.000.000**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*2 Dokumen*	*2.000.000*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*2 Dokumen*	*5.000.000*
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*2 Laporan*	*0*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*2 Laporan*	*5.000.000*
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***100***	**2.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***100%***	**315.000.000**
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya*	*1 Paket*	*0*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya*	*1 Paket*	*100.000.000*
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian*	*12 Dokumen*	*2.000.000*	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian*	*12 Dokumen*	*10.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa*	*12 Dokumen*	*0*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawa*	*12 Dokumen*	*5.000.000*
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*168 Orang*	*0*	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	*177 Orang*	*150.000.000*
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan*	*30 Orang*	*0*	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan*	*30 Orang*	*50.000.000*
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***100***	**68.027.300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***100***	**220.000.000**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*	*1 Paket*	*4.998.700*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan*	*12*	*5.000.000*
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*0*	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*14.997.000*	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	*1 Paket*	*25.000.000*
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*5.000.000*	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*1 Paket*	*10.000.000*
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan*	*2 Dokumen*	*2.760.000*	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan*	*2 Dokumen*	*5.000.000*
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*11.000.000*	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	*12 Laporan*	*50.000.000*
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*23.274.600*	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*12 Laporan*	*100.000.000*
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*2 Dokumen*	*2.997.000*	*Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	*2 Dokumen*	*10.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*12 Dokumen*	*3.000.000*	*Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	*12 Dokumen*	*10.000.000*
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**15.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**1.560.000.000**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	0	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	*1 Unit*	1.500.000.000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*1 Unit*	0	*Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan*	*2 Unit*	10.000.000
Pengadaan Mebel	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*25 Unit*	0	*Pengadaan Mebel*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	*25 Unit*	25.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*3 unit*	*15.000.000*	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	*25 unit*	*25.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*0 Unit*	*0*	*Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*0 Unit*	*0*
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**229.790.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**305.000.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*69.160.000*	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*12 Laporan*	*75.000.000*
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*136.000.000*	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	*12 Laporan*	*180.000.000*
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*4.830.000*	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*25.000.000*
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*19.800.000*	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	*12 Laporan*	*25.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100***	**121.362.700**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***100%***	**200.000.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*12 Unit*	*57.962.700*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*12 unit*	*100.000.000*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny*	*20 Unit*	*6.000.000*	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny*	*12 unit*	*10.000.000*
Pemeliharaan Mebel	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*20 Unit*	*0*	*Pemeliharaan Mebel*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	*20 unit*	*10.000.000*
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*17 Unit*	*10.000.000*	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	*17 unit*	*20.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*1 unit*	*0*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*2 unit*	*0*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 unit*	*47.400.000*	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	*5 unit*	*60.000.000*
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		**Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik**	**50%**	**33.427.967.400**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota**	**51,57%**	**34.166.715.000**
		Persentase Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik	**70%**				**Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik**	**75,30%**	
							Persentase terminal kondisi baik	**48,30%**	
		Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji KIR	**96%**				**Persentase kendaraan yang lulus uji KIR**	**85%**	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**1 dokumen**	**0**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Persentase Rinduk Jaringan LLAJ yang tersusun**	**30%**	**100.000.000**

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	0	*Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	50.000.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*0*	*Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*1 Dokumen*	*50.000.000*
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*1 Laporan*	*0*	*Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	*1 Laporan*	*0*
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik**	***280 buah***	**31.328.600.000**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	**Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik**	***260 buah***	**31.195.000.000**
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*3 unit*	*30.800.000.000*	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*5 buah*	*30.895.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*150 unit*	*444.000.000*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*150 unit*	*200.000.000*
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*100 unit*	*84.600.000*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	*100 unit*	*100.000.000*
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola**	***10 buah***	**550.000.000**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	**Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola**	***10***	**750.000.000**
Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi*	*1 Dokumen*	*550.000.000*	*Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi*	*1 Dokumen*	*650.000.000*
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.*	*57 Orang*	*0*	*Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.*	*57 Orang*	*50.000.000*
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	*1 Unit*	*0*	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	*1 Unit*	*50.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah titik parkir yang dikelola**	***271***	**280.000.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah titik parkir yang dikelola**	***257***	**321.715.000**
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*12 Dokumen*	*0*	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	*1 dokumen*	*21.715.000*
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan*	*12 Laporan*	*280.000.000*	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan*	*12 bulan*	*300.000.000*
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Jumlah uji kir angkutan umum**	***495 unit***	**336.019.100**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	**Jumlah uji kir angkutan umum**	***485 unit***	**550.000.000**

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*	*1 Unit*	*166.019.100*	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia*	*1 unit*	*200.000.000*
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*2 Orang*	*0*	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	*2 Orang*	*50.000.000*
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto*	*4000 Dokumen*	*30.000.000*	*Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto*	*4000 unit*	*100.000.000*
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	*10 unit*	*140.000.000*	*Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	*10 unit*	*200.000.000*
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa**	**Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas**	***150 Kegiatan***	**414.600.000**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	**Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas**	***150***	**630.000.000**

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan*	*1 Dokumen*	0	*Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	*1 Dokumen*	150.000.000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	*150 Laporan*	*414.600.000*	*Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	*12 bulan*	*480.000.000*
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	***Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan***	***10 Dokumen***	**2.248.300**	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan**	***7 dokumen***	**10.000.000**
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi*	*7 Laporan*	*2.248.300*	*Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi*	*7 laporan*	*10.000.000*
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan**	***12 Kegiatan***	**138.400.000**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan**	***12 kegiatan***	**230.000.000**

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF TA. 2026 (Rp)**
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	*12 Laporan*	0	*Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	*12 Laporan*	50.000.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	*12 Laporan*	*138.400.000*	*Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	*12 Laporan*	*180.000.000*
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia**	***11 Unit***	**378.100.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa***	**Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia**	***11 unit***	**380.000.000**
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*12 Laporan*	*58.100.000*	*Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	*12 Laporan*	*80.000.000*

					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Program/Kegiatan/sub kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF** **TA. 2026** **(Rp)**	**Program/Kegiatan/sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan**	**Target 2026**	**PAGU INDIKATIF** **TA. 2026** **(Rp)**
Penyhediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*11 unit*	320.000.000	*Penyhediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/ kota*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel / Desa*	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	*11 unit*	300.000.000

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat / desa / kelurahan / kecamatan melalui Dinas Musrenbang atau proposal yang masuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13

Usulan Program dan Kegiatan Dari
Masyarakat/Desa/Kelurahan/Kecamatan
Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DISHUB Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;

2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah;
3. Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar; dan
4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   2) Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;
   1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
   2) Meningkatnya riset dan inovasi
   3) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
   4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan
4. Tujuan 4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Proses Pembangunan daerah tahun 2026 yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 yaitu Mengembangkan kualitas Insfrastuktur, dengan mengembangkan fokus :

1. Pemenuhan Konektivitas antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
2. Meningkatkan Kualitas Sarana prasarana keselamatan jalan dan layanan dan angkutan;
3. Meningkatkan keselamatan angkutan umum dalam rangka mengurangi angka kecelakaan;
4. Mengembangkan rintisan angkutan massal yang nyaman dan aman.

Arah Kebijakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu peningkatan konektivitas melalui peningkatan kemantapan sarana prasarana keselamatan jalan dan kualitas angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah.

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Visi Bupati Karanganyar yang terpilih periode 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera”, didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi ketiga, yaitu Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan

dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025-2029).

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah yaitu "Meningkatnya konektivitas antar wilayah" dengan tujuan tersebut menggunakan sasaran Meningkatnya kelancaran lalu lintas kendaraan. Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		Rasio Konektivitas	Indeks	0,67	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
		Meningkatnya kelancaran lalu lintas kendaraan	VC Rasio	Rasio	0,66	0,44	0,87	0,70	0,66	0,66	0,67	0,69	0,70

3.3. Tantangan Dan Peluang

Target kinerja yang nantinya berwujud rencana program dan kegiatan, selaras dengan isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar:

3.3.1. Tantangan

1. **Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.**
   Peningkatan kendaraan pribadi setiap tahun menyebabkan tekanan terhadap jaringan jalan, terutama pada kawasan perkotaan, pusat kegiatan ekonomi, sekolah, dan wilayah wisata.
2. **Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan prasarana transportasi.**
   Kebutuhan belanja modal yang tinggi untuk penyediaan fasilitas transportasi (rambu, marka, traffic light, ATCS, CCTV, perparkiran, terminal, dan fasilitas keselamatan) tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah.
3. **Manajemen lalu lintas pada kawasan wisata yang kompleks.**
   Destinasi wisata unggulan seperti Tawangmangu, Ngargoyoso, Sukuh, dan Cetho menimbulkan lonjakan arus kendaraan pada akhir pekan dan hari libur, sehingga memerlukan penanganan lalu lintas yang intensif.
4. **Kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas masih rendah.**
   Masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang berdampak pada meningkatnya risiko kecelakaan, sehingga dibutuhkan edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor.
5. **Belum optimalnya pelayanan transportasi umum.**
   Kondisi armada yang menua, jumlah penumpang yang rendah, dan belum terintegrasinya trayek menyebabkan minat masyarakat terhadap angkutan umum relatif kecil.
6. **Terbatasnya kapasitas SDM dan peralatan dalam penegakan ketertiban transportasi.**
   Keterbatasan jumlah personel pengawasan serta minimnya peralatan operasional membatasi efektivitas pengendalian dan ketertiban lalu lintas.
7. **Permasalahan perparkiran yang belum tertata dengan baik.**
   Masih terjadi parkir tidak pada tempatnya, praktik parkir liar, serta belum optimalnya pengelolaan retribusi parkir karena sebagian masih dilakukan secara manual.
8. **Kesiapan terhadap transformasi digital pelayanan publik.**
   Implementasi sistem transportasi cerdas, digitalisasi layanan, dan penggunaan perangkat berbasis teknologi membutuhkan investasi, peningkatan kompetensi SDM, dan kesiapan infrastruktur.

3.3.2. Peluang

1. **Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.**
   Program nasional seperti Smart City, peningkatan keselamatan jalan, integrasi transportasi publik, ETLE, dan Dana Alokasi Khusus sektor transportasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan.
2. **Potensi sektor pariwisata sebagai penggerak peningkatan layanan transportasi.**
   Banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar membuka peluang peningkatan pengelolaan transportasi, termasuk penyediaan layanan angkutan wisata, manajemen parkir wisata, serta peningkatan PAD dari sektor transportasi.
3. **Pengembangan dan penerapan teknologi sistem transportasi cerdas (ITS).**
   Pemanfaatan ATCS, CCTV, aplikasi informasi lalu lintas, dan sistem e-parking dapat meningkatkan efektivitas pengaturan lalu lintas serta memperluas cakupan pelayanan publik.
4. **Peluang kerja sama dengan pihak swasta.**
   Skema kemitraan seperti PPP/CSR dapat digunakan dalam penyediaan sarana transportasi, pembangunan fasilitas pendukung, dan pengembangan layanan berbasis teknologi.
5. **Kolaborasi lintas sektor dan antarwilayah.**
   Penguatan sinergi dengan kepolisian, perangkat daerah lain, pemerintah provinsi, dan pelaku usaha dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan transportasi di titik-titik strategis.
6. **Pemanfaatan data transportasi untuk perencanaan yang lebih akurat.**
   Teknologi pemantauan lalu lintas, sistem pengaduan masyarakat, dan data operasional dapat menjadi dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
7. **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan.**
   Tren perubahan perilaku masyarakat membuka peluang untuk memperkuat kampanye keselamatan, peningkatan layanan transportasi umum, serta program pengendalian lalu lintas.
8. **Pengembangan kawasan strategis baru.**
   Munculnya kawasan permukiman, jalur ekonomi, dan infrastruktur baru memberikan kesempatan untuk merancang sistem transportasi yang lebih terencana dan terintegrasi sejak awal.

Tabel 3.2.

Cascading Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	Meningkatnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Nilai IKM	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
										Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD
										Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD
										Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD
										Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Perubahan DPA-SKPD		
										Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
										Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Tersusunnya Laporan Keuangan	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
										Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian\ Verifikasi SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
										Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
										Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
							Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
										Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD
							Tesusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusun	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
										Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
										Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
										Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
							Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
										Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan rumah Tangga

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
										Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
										Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan
										Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
										Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
										Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
							Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
										Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
										Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
										Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
										Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
										Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diplihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
										Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
										Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Meningkatnya kelancaran lalu lintas kendaraan	VC Rasio	Meningkatnya penyediaan kelengkapan jalan, fasilitas penunjang yang baik, terminal dalam kondisi baik dan kendaraan dalam kondisi yang baik.	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dam Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Penyusunan Rinduk Jaringan LLAJ	Persentase Rinduk Jaringan LLAJ yang tersusun	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
										Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
					Persentase fasilitas penunjang keselamatan jalan dalam kondisi baik		Meningkatnya Penyediaan Perlangkapan Jalan yang layak	Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
										Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
					Persentase terminal kondisi baik		Meningkatnya Pengelolaan Terminal Penumpang yang terkelola dengan baik	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
										Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
										Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C
					Persentase Kendaraan yang lulus uji KIR		Meningkatnya penerbitan izin terhadap fasilitas parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
										Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik	Secara Elektronik
										Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
							Meningkatnya kendaraan bermotor yang lolos uji	Jumlah uji kir angkutan umum	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
										Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
							Meningkatnya kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
										Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
							Meningkatnya dokumen andalalin yang disetujui	Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
							Meningkatnya kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
										Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Outcome	Indikator Program	Program	Output	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Output	Indikator Sub Kegiatan	Sub Kegiatan
							Meningkatnya total Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan barang	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
										Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mendatang yaitu pada tahun 2026 sejalan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar 2025-2029. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 menggunakan nomenklatur baru sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 dan Pemutakhirannya.Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraiakan sebagai berikut :.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perancanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota
   2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
   4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan jalan Kabupaten/Kota
   7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
   8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
   9. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Rumuasan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Rumusan Program Kegiatan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Dinas Perhubungan			39.344.124.291,00					17.368.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			39.344.124.291,00					17.368.500.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			39.344.124.291,00					17.368.500.000,00	
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	92 %	5.916.156.891,00				-	11.934.500.000,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	4.000.000,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	147.000.000,00	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	5.473.976.891,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	7.018.000.000,00	
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	5.383.976.891,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	2.000.000,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	12.000.000,00	
	2	15	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	2.000.000,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	690.500.000,00	
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	168 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		370.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	68.027.300,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	389.500.000,00	
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.998.700,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.997.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.760.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	23.274.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2.997.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	15.000.000,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	2.733.000.000,00	
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		2.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor									
							Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		20.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		92.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	229.790.000,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	400.500.000,00	
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	69.160.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		65.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.830.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.800.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	121.362.700,00			Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan	-	544.000.000,00	
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	57.962.700,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		15.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		25.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	47.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas Dinas Perhubungan		52.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik Persentase Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik Persentase Kendaraan Yang Lulus Uji KIR	50 Persen 70 Persen 96 persen	33.427.967.400,00				-	5.434.000.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	340.000.000,00	
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									
							Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan Dalam Kondisi Baik	280 buah	31.328.600.000,00			Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar	-	940.000.000,00	
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	30.800.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan									
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	150 Unit	444.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar		570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	84.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah dan antar wilayah dan antar daerah sekitar		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dikelola	10 buah	550.000.000,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	922.000.000,00	
	2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C									
							Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	57 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		52.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang dikelola	271 titik	280.000.000,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	420.000.000,00	
	2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		70.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	280.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah uji kir angkutan umum	495 Unit	336.019.100,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	1.230.000.000,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	166.019.100,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 Unit	140.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengaturan, pengamanan dan pengendalian lalu lintas	150 kegiatan	414.600.000,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	790.000.000,00	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas									
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	150 Laporan	414.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Andalalin yang mendapat persetujuan	10 Dokumen	2.248.300,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	12.000.000,00	
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin									
							Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	7 Laporan	2.248.300,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	12 kegiatan	138.400.000,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	310.000.000,00	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal									
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum									
							Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	138.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	11 unit	378.100.000,00			Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar	-	470.000.000,00	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	58.100.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		110.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	11 Unit	320.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Konektivitas antar Wilayah dan antar Daerah Sekitar		360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**39.344.124.291,00**					**17.368.500.000,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis DISHUB Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Menjadi bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan, yang tertuang dalam Rencana Kerja DISHUB Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DISHUB harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya *(cascading)* dan juga dapat mempengaruhi *(cross cutting)* capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya. Untuk itulah penyusunan renja harus memperhatikan tugas dan fungsi DISHUB.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DISHUB Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja DISHUB Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Pelaksanaan Rencana Kerja DISHUB Tahun 2026, dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan (direncanakan) disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran Tahun 2026;
3) Rencana Kerja DISHUB Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja DISHUB Tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;
2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu:
   a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan ;

b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan;
c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja OPD;
d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan dilaksanakankannya Rencana Kerja DISHUB Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi DISHUB secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 telah selesai disusun. Renja Diskominfo Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen ini secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi Bupati Karanganyar yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Keterkaitan dengan Visi dan Misi dimaksud dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo dan Renja dimaksud mengacu pada Renstra, secara tidak langsung, Renja juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Renja Diskominfo berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, kinerja OPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing- masing OPD.

Karanganyar, 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR

ISNAN NUR AZIZ, S.Kom.
NIP.197802102005011016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan tahapan penting dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Renja disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang menjabarkan program, kegiatan serta sub kegiatan DISKOMINFO yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta Visi dan Misi pembangunan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan dan berbasis teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah bertransformasi secara cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan informasi. Tantangan seperti kebutuhan integrasi sistem informasi peningkatan keamanan siber, penguatan Satu Data Daerah serta peningkatan kualitas layanan komunikasi publik menjadikan DISKOMINFO memiliki peran strategis sebagai penggerak utama digitalisasi pemerintahan. Pada tahun 2026 tuntutan terhadap layanan yang lebih adaktif, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat diperkirakan semakin meningkat seiring dengan percepatan transformasi digital nasional. Selain itu dinamika lingkungan strategis seperti implementasi kebijakan pemerintah pusat mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan transformasi digital sektor publik, peningkatan keterbukaan informasi serta kebutuhan tata kelola data yang lebih baik, menjadi dasar penting dalam penyusuna Renja DISKOMINFO. Renja Tahun 2026 juga harus mampu mengakomodasi isu-isu aktual seperti literasi digital masyarakat, pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, optimalisasi layanan kehumasan pemerintahan serta penguatan perlindungan data pribadi.

Penyusunan Renja dilakukan dengan pendekatan partisipatif, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, analisis capaian kinerja serta identifikasi kebutuhan masyarakat dan perangkat daerah. Proses ini juga mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, baik anggaran maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara realistis, efektif dan memberikan dampak nyata. Dengan demikian Renja 2026 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang responsif, terukur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Melalui penyusunan Renja DISKOMINFO tahun 2026 diharapkan seluruh upaya penguatan infrastruktur TIK, pengelolaan informasi publik, keamanan informasi serta transformasi digital layanan pemerintah dapat berjalan lebih terarah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi DISKOMINFO dalam mencapai target kinerja tahunan sekaligus wujud komitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas, akuntabel dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 antara lain :

1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
17 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
18 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
19 Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah : 5-134/2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);

20 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar.
21 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28)
22 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029, Lampiran XIII (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja DSIKOMINFO Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
2. Mengumpulkan data dan informasi, evaluasi dan analisis untuk menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan pembangunan.

Tujuan :

1. Sebagai pedoman perencanaan tahunan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 agar selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah ke dalam rencana kerja tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan;
3. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antara perangkat daerah dengan RKPD Tahun 2026, RPJMD, serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
4. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, sehingga penganggaran program dan kegiatan dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah melalui perencanaan program dan kegiatan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta capaian indikator kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja DISKOMINFO Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja DISKOMINFO agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang.
Mengemukakan pengertian ringkas tentang alasan, proses penyusunan, keterkaitan antara dokumen RKPD, Renstra dan Renja DISKOMINFO.

1.2. Landasan Hukum.
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja DISKOMINFO.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DISKOMINFO.

1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DISKOMINFO serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DISKOMINFO TAHUN 2024.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun Anggaran 2024 dan prakiraan kinerja Renja Tahun 2025
2.1.1 Evaluasi Anggaran
2.1.2 Evaluasi Kinerja (Indikator)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.3. Prestasi yang dicapai pada tahun 2024
2.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DISKOMINFO.
2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2026
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja DISKOMINFO Tahun 2026 yang diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra DISKOMINFO 2025-2029, Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator dan target tahun 2026, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DISKOMINFO.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN D DISKOMINFO.

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

a. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

BAB V. PENUTUP.

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Sistem perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan;
2. Merumuskan keadaan sekarang/saat ini,
3. Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi,
4. Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja DISKOMINFO Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja DISKOMINFO Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk dijadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara *offline*, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

A. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 DISKOMINFO telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di DISKOMINFO

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
			RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**							
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	6.925.700	57.193.900	825,8	57.119.950	14.820.700	25,95
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.800.000	38.899.250	156,8
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja	11.911.700	11.911.700	100	6.167.500	17.117.500	277,5

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
			RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
		SKPD						
	- Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.398.022.934	4.962.485.244	112,8	5.179.386.695	5.897.887.080	113,8
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.220.000	151.760.000	107	3.082.150	65.322.650	2119,3
		- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		40.718.650			88.039.300	
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyedian Kompnn Instalasi Listrik/Penerangan	12.000.000	6.806.000	56,72	6.007.000	6.144.000	102,28
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	108.296.050		41.000.000	231.475.000	564,57
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.785.642	35.131.942	122,05	17.382.842	18.106.957	104,17
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	40.831.200	102,08	40.000.000	65.366.800	163,42
		- Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Per UU	24.860.000	24.970.000	100,44	25.990.000	25.990.000	100
		- Penyelenggaran Rakor dan Konsultasi SKPD	166.000.000	172.420.000	103,87	244.963.800	201.045.400	82,07
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Perintahan Derah	- Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan lainya -	-	-		-	-	
	- Persedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000	100	5.160.100	5.160.100	100
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	25.000.000	24.400.000	97,60	16.000.000	17.050.000	106,56
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.000.000	177.992.500	112,65	245.415.600	245.514.600	100,04
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							
	- Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Monitoring kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	95.000.000	79.042.800	83,20	60.000.000	55.000.000	
		- Relasi Media				126.500.000	458.805.000	362,69
		- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	209.000.000	593.544.000	283,99	129.100.000	446.155.000	345,59
		- Pelayanan Informasi Publik	80.000.000	87.756.000	109,70	90.000.000	85.000.000	94,44
		- Layanan Hubungan Media	260.000.000	697.149.000	268,13	-	-	
		- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	30.000.000	30.000.000	100	-	-	
		- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	186.800.000	320.300.000	171,47	-	-	
		- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana	250.000.000	200.000.000	80	-	-	
		- Monitoring informasi dan penetapan Pelayanan Informasi Publik	80.000.000	87.756.000	109,70	90.000.000	85.000.000	94,44
		- Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah		197.556.000				
		- Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		242.092.000				
		- Kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				146.800.000	249.450.000	83,20
		- Desimininasi Informasi				307.600.000	307.600.000	83,20
		- Penyusunan Konten				88.712.800	151.602.800	170,89
		- Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia Komunikasi Publik				5.000.000	5.000.000	100
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							
	- Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Koordinasi dan	10.900.000	34.350.000	315,1	-	-	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
			RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
		Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			4			
		- Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000	69.450.000	69,45	-	-	
		- Fasilitasi penyelenggaraan SPBEdi lingkungan pemda				-	26.517.800	
		- Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE					22.989.600	
		- Pengembangan dan Pengelola Ekosistem Kab/ Kota Cerdas	-	17.930.000		-	-	
		- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	31.250.000	58.350.000	186,72	-	-	
		- Koordinasi pemanfaatan Pusat data Nasional	-	-		260.000.000	95.000.000	36,54
		- Koordinasi Pengolahan Data dan Informasi	-	-		60.000.000		
		- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	-		60.000.000	120.000.000	200
		- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kab atau Kota cerdas	-	-		36.000.000	267.070.000	741,86
		- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	1.368.825.000	1.826.125.000	133,4	1.594.600.000	1.471.800.000	92,30
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah	125.200.000	108.186.000	86,41	60.724.000	49.477.000	81,48
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							
	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	15.000.000	19.620.000	130,8	143.827.600	190.000.000	132,1
	JUMLAH TOTAL		***8.541.065.676***	***10.526.527.986***	***123,2***	***9.158.657.537***	***11.613.343.087***	***132.1***

Sumber : Diskominfo, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap sub kegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap sub kegiatan. Pemenuhan alokasi dana di DISKOMINFO untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 123,2% sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 132,1%. Selama 2 tahun ini alokasi anggaran rencana kerja DISKOMINFO terpenuhi lebih dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di DISKOMINFO yang :
Semula sejumlah : Rp.11.613.343.087 atau 132,1% harus berkurang sebesar : Rp. 2.454.685.550 sehingga pagu anggaran DISKOMINFO tahun 2025 adalah : Rp. 9.158.657.537 atau 94,25% dari rencana kerja tahun 2025.

B. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah didasarkan pada Pergeseran APBD 2025 yang merupakan hasil efisiensi anggaran sebagai dampak regulasi keuangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi APBD di DISKOMINFO Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
			APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Penggeseran)	Realisasi	%
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**							
	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	57.193.900	56.480.650	98,75	39.429.000	1.980.000	5,02
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD	11.911.700	11.908.700	99,97	4.024.700	-	
	- Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.962.485.244	4.677.730.902	94,26	5.497.887.080	2.487.891.487	45,25
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	151.760.000	150.566.000	99,21	48.354.200	-	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	40.718.650	36.824.700	90,44	73.337.900	35.402.400	48,27
	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.806.000	6.806.000	100	6.427.559		
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.296.050	107.546.050	99,31	1.220.503.250	3.586.500	0,29
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.131.942	35.062.942	99,8	18.106.957	8.074.605	44,59
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.831.200	40.796.300	99,91	21.981.200	12.548.000	57,09
		- Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Per UU	24.970.000	24.960.000	99,96	25.990.000	9.925.000	38,19
		- Penyelenggaran Rakor dan Konsultasi SKPD	172.420.000	171.480.099	99,45	119.438.800	29.268.176	24,50
	- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan lainya	125.000.000	98.750.000	79.00		-	
	- Persedian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.000.000	83,33	5.160.100	1.560.000	30,23
		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.400.000	24.342.500	99,76	53.370.000	4.360.000	8,17
	- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan danPajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.992.500	173.970.337	97,74	205.794.600	85.452.799	41,52
			5.944.717.186	**5.621.225.180**	**94,55**			
2.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KUMINKASI PUBLIK**							
	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	79.042.800	79.369.200	99,96	55.000.000	.....	
		- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	197.556.000	191.596.347	96,98	-	.....	
		- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	242.092.000	239.191.000	98,8	-	.....	
		- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	593.544.000	588.844.765	99,21	446.155.000	.....	
		- Pelayanan Informasi Publik	87.756.000	87.454.480	99,66	-	19.135.000	
		- Layanan Hubungan Media	697.149.000	696.940.600	99,97	85.000.000	.....	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
			APBD (Perubahan)	Realisasi	%	APBD (Penggeseran)	Realisasi	%
		- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	30.000.000	29.473.750	98,25	249.450.000	.....	
		- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	320.300.000	319.599.500	99,78	-	.....	
		- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100	-	.....	
			2.447.439.800	**2.432.469.642**	**99,38**			
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							
	- Pengelolaan Nama Domain yang telah ditttpkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkungan Pemda Kab/Kota	- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.826.125.000	1.825.375.000	99,96	1.471.800.000	696.300.000	47,31
	- Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34.350.000	34.309.076	99,88	-	696.300.000	
		- Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	69.450.000	67.825.000	97,66	-	.....	
		- Pengembangan dan Pengelola Ekosistem Kab/Kota Cerdas	17.930.000	16.030.000	89,4	2.167.070.000	.....	
		- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	58.350.000	56.963.547	97,62	-	.....	
			2.006.205.000	**2.000.502.623**	**99,71**			
4.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota	- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah	**108.186.000**	**108.016.390**	**99,84**	49.774.000	12.750.000	25,62
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							
	- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	**19.620.000**	**19.398.000**	**98,87**	190.000.000	32.750.000	65,80
	JUMLAH TOTAL		***20.924.529.972***	***20.235.809.280***	**96,72**	***12.054.054.346***	**4.137.283.967**	**34,32**

Sumber : Diskominfo, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar : Rp. 20.924.529.972

Realisasi capaian sebesar : Rp. 20.235.809.280 atau 96,72 %.

Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II

Tahun 2025 adalah : Rp. 12.054.054.346 atau 34,32 %

dari pagu efisiensi anggaran : Rp. 4.137.283.967

Tabel 2.3.

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	2023			2024		
		Anggaran	REALISASI	%	Anggaran	REALISASI	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	6.124.246.264	6.071.247.908	99,13	5.944.717.186	5.621.225.180	94,56
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.479.433.500	3.445.100.205	99,01	2.447.799.800	2.432.469.642	99,37
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	975.384.700	953.284.406	97,73	2.006.205.000	2.000.502.623	99,72
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	137.200.000	137.200.000	100	108.186.000	108.016.390	99,84
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	142.951.000	136.395.781	95,41	19.620.000	19.398.000	98,87
		10.859.215.464	***10.743.228.300***	***99***	***10.526.527.986***	***10.181.611.835***	***96.72***

Sumber : Diskominfo, 2025 diolah

Serapan anggaran selama ini belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut DISKOMINFO perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

A. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja DISKOMINFO dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
	Meningkatnya pemerintahann yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	3,55	3,90	109,8
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	72,5	70,95	98
3	Meningkatkan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	100	100	100
4	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	3	2	67
					Rata-rata	**93,7**

Sumber : Diskominfo Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utuma DISKOMINFO tahun 2024 masuk kriteria Baik (93,7 %) dari 4 (empat) indikator sasaran terdapat 2 yang tidak tercapai 100% yaitu:

1. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP) : 70,95 dengan kinerja 98 % dikarenakan :
   - Kualitas Perencanaan Kinerja belum memadai. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, penetapan target belum cukup menantang namun realistis, serta keterpaduan *cascading* kinerja antar level jabatan belum tergambar utuh dalam dokumen perencanaan.
   - Sistem Pengukuran dan Pemantauan Kinerja belum terstandar. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum terdokumentasi secara jelas dan seragam; pemantauan berjenjang atas capaian unit di bawahnya belum konsisten; pemahaman pegawai atas hasil pengukuran masih terbatas; serta hasil pengukuran belum secara memadai menjadi dasar penyesuaian alokasi anggaran.
   - Siklus Akuntabilitas belum optimal (Pelaporan dan Evaluasi Internal). Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis perbandingan (*benchmarking*) yang memadai dan belum efektif mendorong penguatan

budaya kinerja; evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan hasilnya belum dimanfaatkan secara sistematis untuk perbaikan kinerja.

2. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
   Tahun 2024 dengan target 3 sedangkan realisasi hanya 2 artinya target belum tercapai, ini karena disebabkan antara lain :

a. Tata Kelola dan Kebijakan Belum Kuat
   - Kebijakan keamanan informasi (misalnya berbasis ISO/IEC 27001 atau SPBE) belum lengkap atau belum diterapkan konsisten
   - belum ada penetapan risk owner dan asset owner yang jelas

b. Keterbatasan SDM Keamanan Informasi
   - Jumlah SDM TIK terbatas dan merangkap banyak tugas dan kompetensi keamanan siber belum memadai (minim pelatihan/sertifikasi)
   - Serta ketergantungan pada pihak ketiga/vendor tanpa pengawasan memadai

c. Rendahnya Kesadaran Keamanan (Security Awareness)
   - Pegawai belum memahami risiko phishing, malware, kebocoran data
   - Penggunaan password lemah dan berbagi akun masih terjadi

d. Infrastruktur dan Sistem Belum Memadai
   - Sistem/aplikasi belum dilengkapi pengamanan standar (enkripsi, firewall, IDS/IPS)
   - Server dan aplikasi tidak rutin diperbarui (patching) serta backup data tidak terjadwal atau tidak diuji pemulihannya

e. Manajemen Risiko Belum Optimal
   - Belum dilakukan penilaian risiko keamanan informasi secara berkala
   - Tidak ada rencana mitigasi risiko yang jelas
   - Insiden keamanan tidak dicatat dan dievaluasi sebagai pembelajaran

f. Kurangnya Koordinasi dan Pengawasan Lemah
   - Koordinasi antar-OPD belum terintegrasi dan tidak ada audit keamanan internal yang rutin
   - Rekomendasi hasil evaluasi SPBE atau audit BSSN belum ditindaklanjuti

g. Serta Peningkatan Ancaman Siber
   - Serangan siber semakin canggih dan masif
   - Data pemerintah bernilai tinggi dan menjadi target utama
   - Kesiapan respons insiden belum memadai

Sedangkan untuk capaian program di DISKOMINFO tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

NO	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Indeks	72,5	70,95	97
2	Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	%	100	100	100

NO	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	%	39	52,63	134,9
4	Pernylenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	100	100	100
5	Penyelenggaraan Persandian	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah program	%	63	62,5	99,20
					Rata – rata kinerja	**106,22**

Sumber : Diskominfo Tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh DISKOMINFO dengan persentase mencapai 106,22 % dari target yang ditetapkan masuk kriteria Sangat Baik. Ada catatan nilai Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tidak tercapai targetnya, tidak dapat tercapai adalah karena yang dicantumkan dalam indikator sasaran adalah nilai SAKIP Daerah, yang pencapaiannya sangat tergantung dari dokumen yang dikerjakan semua OPD. Penyebab kedua adalah adanya nilai IPKD tahun 2024 yang aplikasi penilaiannya seringkali mengalami gangguan (inputing hilang / ter*reset* / salah input data tahun yang diminta).

B. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja DISKOMINFO lebih baik (naik) atau lebih jelek (turun). Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana tahun berikutnya. Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Meningkatnya pemerintahann yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	99,1	109,8
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	97,70	98
3	Meningkatkan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	%	100	100

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja 2023	Kinerja 2024
4	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Nilai	62,3	67
			Rata-rata	**89,77**	**93,7**

Sumber Diskominfo, 2025

Berdsaarakan Tabel 2.7 tersebut kinerja DISKOMINFO Tahun 2024 adalah Baik dimana capaian target indikator rata-rata mencapai 93,7 % (Lebih tinggi) jika dibanding dengan tahun 2023 yang mencapai 89,77 % mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 1,04 %.

C. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan target tahun terkahir (tahun 2026) Renstra DISKOMINFO atau RPD tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra sehingga hasil Evaluasi tahun 2024 juga merupakan pijakan awal tercapai tidaknya hasil akhir Renstra. Gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.8
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Sasaran	Indikator	Kinerja 2024	Target 2026	Status
	Meningkatnya pemerintahann yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Baik	Baik	Tercapai
		Indeks SPBE	Baik	Baik	Tercapai
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Belum	Belum	Belum Tercapai
3	Meningkatkan informasi publik, ketersediaan data statistik dan pemanfaatan persandian	Persentase website resmi perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	Baik	Baik	Tercapai
		Jumlah KIM Aktif	Baik	Baik	Belum Tercapai
		Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	Baik	Baik	Tercapai

		Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	Baik	Baik	Belum Tercapai
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	Baik	Baik	Tercapai

Sumber : Diskominfo, 2025

Tabel 2.9
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

NO	Program	Indikator	Realisasi 2024	Target 2026	Status
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	70,95	70	Tercapai
2	Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik	Persentase website perangkat daerah yang terupdate (DIP) melalui website	100	100	Tercapai
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi pemerintah untuk mendukung layanan publik	52,63	41	Tercapai
4	Pernylenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral daerah	100	100	Tercapai
5	Penyelenggaraan Persandian	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah program	62,5	65	Belum Tercapai

Sumber : Diskominfo, 2025

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 2.8 dan 2.9, diketahui bahwa kinerja DISKOMINFO Tahun 2024 adalah sebagian besar sudah tercapai meskinpun tidak dapat dijadikan pedoman capaian akhir tahun 2026, karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya atau tidak akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

Tabel 2.10

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Diskominfo s/d 2025 Kabupaten Karanganyar

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Realisasi Target Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatamn s/d Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1 = 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	5 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	40 Dokumen	40 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	40 Dokumen	40 Dokumen	100%
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	1 Laporan	100%
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	38 Orang	38 Orang	38 Orang	100%	38 Orang	38 Orang	100%

2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	140 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100 Paket	100 Paket	100%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100 Paket	100 Paket	100%
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**									
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	12 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	12 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	60 Layanan	12 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	100%			
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Komunitas	12 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	0	3 Orang						

2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%			
2.16.02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%			
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah Relasi Media Yang memenuhi Kriteria						4 Media	4 Media	100%
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi Yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo						4 Media	4 Media	100%
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen Informasi Publik Yang Dislelsaikan Sesuai Peraturan perundangan						600 Permohonan	600 Permohonan	100%
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah						7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100%
2.16.02.2.01.0020	Desiminasi Informasi	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik						80 Persen	80 Persen	100%
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Jiknis						4 Media	4 Media	100%
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik						100 Konten	100 Konten	100%
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas sumber daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik Yang Difasilitasi Mengikuti Bintek/Pelatihan						5 Orang	5 Orang	100%

2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**									
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 Unit	49 Unit	49 Unit	49 Unit	100%			
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen						
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0	1 Paket						
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	12 Perangda	42 Perangda	42 Perangda	42 Perangda	100%			
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%			
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0	3 Layanan						

2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen						
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Pplikasi SPBE Pemerintah Daerah Yang Sudah Di Tempatkan Di Pusat Data Nasional						280 Aplikasi	280 Aplikasi	100%
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemda	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemda						12 Laporan	12 Laporan	100%
2.16.03.2.02.0019	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE						12 Laporan	12 Laporan	100%
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Yang Terhubung Layanan Pemerintah daerah						100 Aplikasi	100 Aplikasi	100%
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Sosialisasi Program Kabupaten atau Kota Cerdas						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perangkat daerah Kab/Kota Yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah daerah Kab/Kota						1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**									

2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota**									
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	100 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kaopasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Pegawai Yang Mendapatkan Pelatihan Di Bidang Statistik						100 Orang	100 Orang	100%
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**									
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**									
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	65 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo

1. Gambaran Umum Pelayanan

   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik sektoral, serta diseminasi informasi publik. Pelayanan Diskominfo diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

2. Capaian Kinerja Pelayanan

   Secara umum, kinerja pelayanan Diskominfo menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari:

   - Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
   - Tersedianya layanan informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi, baik konvensional maupun digital.
   - Meningkatnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan data dan informasi.
   - Mulainya penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara bertahap.

     Namun demikian, capaian kinerja tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala.

3. Permasalahan dan Tantangan Kinerja Pelayanan

   Beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi kinerja pelayanan Diskominfo antara lain:

   - Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
     Jumlah dan kompetensi SDM di bidang teknologi informasi, keamanan informasi, statistik sektoral, dan komunikasi publik belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi.
   - Infrastruktur TIK yang belum merata dan optimal
     Ketersediaan jaringan, perangkat keras, dan sistem aplikasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh unit kerja dan wilayah pelayanan.
   - Belum optimalnya integrasi sistem dan data
     Masih terdapat aplikasi dan data yang berjalan secara parsial di masing-masing perangkat daerah sehingga menghambat efektivitas pelayanan berbasis digital.
   - Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat
     Kondisi ini berdampak pada pemanfaatan layanan informasi dan komunikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
   - Keterbatasan anggaran pelayanan
     Alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

4. Analisis Kesenjangan Kinerja

   Berdasarkan perbandingan antara target kinerja dan realisasi pelayanan, masih terdapat kesenjangan yang disebabkan oleh:

   - Perubahan kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat.
   - Tingginya ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengelolaan sistem informasi.
   - Kurangnya standar pelayanan dan indikator kinerja yang terukur pada beberapa jenis layanan.

5. Upaya Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan

   Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, Diskominfo perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

   - Penguatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.

- Peningkatan dan pemerataan infrastruktur TIK.
- Pengembangan dan integrasi sistem informasi lintas perangkat daerah.
- Peningkatan kualitas komunikasi publik dan diseminasi informasi yang lebih masif dan tepat sasaran.
- Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

6. Kesimpulan

   Kinerja pelayanan Diskominfo secara umum telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun masih memerlukan peningkatan kualitas dan efektivitas. Dengan dukungan kebijakan, SDM, infrastruktur, serta sinergi lintas sektor, Diskominfo diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (n-2)	tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
1.	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika			100	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			93,19	92,91	92	92	92	92	92	92	
Urusan Statistik												
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	68	70	72	75	70	72	75	78	

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	Tahun 2024 (n-2)	tahun 2025 (tahun n-1)	Tahun 2026 (tahun n)	Tahun 2027 (tahun n+1)	
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	-	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	68	70	72	75	70	72	75	78	
Urusan Persandian												
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-		100	63	65	66	67	68	70-	70	-

2.3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024

Pencapaian prestasi yang bersifat perlombaan yang diikuti oleh DISKOMINFO pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Capaian prestasi Tahun 2024

NO	PENGHARGAAN
1.	Penghargaan Kabupaten Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik dan Penhargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan
2.	Penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam pembinaan pembangunan ketangguhan masyarakat di bidang pengurangan resiko bencana, krisis kesehatan dan pembangunan ketangguhan iklim.
3.	Kabupaten dengan Tim Percepatan Akses Terbaik Tahun 2024
4.	Penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Pengelolaan dan Penanggulangan Inflasi di daerah
5.	Penhargaan kategori pratama dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
6.	Penganugerahan Penghargaan Karanganyar Innovation Award 2024
7.	Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rembug Integritas Nasional (RIN) atas Pemerintah Daerah dengan jumlah penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) terbanyak tahun 2023 di provinsi jawa tengah
8.	Penghargaan Peringkat II Nasional Berkinerja Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 kategori Pemerintah Kabupaten (Pemerintah kab karanganyar)
9.	Keberhasilan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTC) ke-10 atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023
10.	Penghargaan Peringkat 2 di Jawa Tengah sebagai Desa Mandiri Energi (Desa Pendem Kecamatan Mojogedang)
11.	Penghargaan Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat terbaik 2024
12.	Penghargaan Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024
13.	Penghargaan Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berikut isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang umum digunakan dalam dokumen perencanaan (Renstra/Renja), khususnya relevan untuk konteks pemerintah daerah:

1. Tata Kelola SPBE dan Transformasi Digital
   - Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi antar-OPD.
   - Keterbatasan arsitektur dan peta rencana SPBE daerah.
2. Infrastruktur TIK dan Jaringan
   - Keterbatasan dan ketimpangan akses jaringan internet dan intranet pemerintah, terutama di wilayah terpencil.
   - Kualitas dan keandalan jaringan yang belum merata.
   - Kebutuhan peningkatan kapasitas *data center* dan *cloud* pemerintah.
3. Keamanan Informasi dan Perlindungan Data

- Meningkatnya risiko serangan siber, kebocoran data, dan gangguan sistem.
- Belum optimalnya penerapan manajemen keamanan informasi dan standar keamanan data.
- Rendahnya kesadaran keamanan informasi di lingkungan OPD.

4. Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral
   - Belum terwujudnya Satu Data Daerah secara optimal.
   - Kualitas data sektoral yang belum seragam (akurasi, keterkinian, dan konsistensi).
5. Diseminasi Informasi Publik dan Kehumasan
   - Tantangan dalam penyampaian informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan.
   - Tingginya penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian di ruang digital.
6. Literasi Digital Masyarakat dan ASN
   - Rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat dan aparatur.
   - Perlunya peningkatan kapasitas SDM TIK secara berkelanjutan.
7. Kelembagaan dan SDM Diskominfo
   - Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM TIK yang tersertifikasi.
   - Beban tugas Diskominfo yang semakin luas seiring perkembangan teknologi.
8. Efektivitas Layanan Informasi dan Pengaduan Publik
   - Belum optimalnya integrasi layanan pengaduan masyarakat.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DISKOMINFO dan tingkat kinerja yang dicapai oleh DISKOMINFO dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Penyusunan Renja dan RKPD Tahun 2026, pada tahapan Rancangan awal masih menggunakan RPD dan Renstra Tahun 2024-2026, tetapi pada tahapan berikutnya akan disesuai dengan Rancangan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029.

Dilihat dari kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan antara renja dengan Rancangan Awal RKPD 2026 maka, diketahui Renja DISKOMINFO Tahun 2026 sudah sinkron / konsisten.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan DISKOMINFO disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.13

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dalam DISKOMINFO Kabupaten Karanganya3

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						KETERANGAN
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA		
					TARGET	Rp					TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6								
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**14,314,757,537.00**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**14,314,757,537.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**14,074,983,537.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**6,927,993,337.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase*	100 %	509,022,700.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Persentase*	100 %		
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	40 Dokumen	51,500,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Dokumen*	40 Dokumen	1.220.000,00	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	40 Laporan	33,000,700.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Laporan*	40 Laporan	1.563.200,00	
2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	*Dokumen*	12 Dokumen	424,522,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	*Dokumen*	12 Dokumen	0,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		*Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentaes*	100 %	3,986,637,171.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika		100%	4.947.721.430,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	12 Orang/bulan	3,711,483,757.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*Orang/bulan*	12 Orang/bulan	4.862.721.430,00	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Dokumen*	12 Dokumen	122,430,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Dokumen*	12 Dokumen	1.000.000,00	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						

		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	*Laporan*	140 Laporan	152,723,414.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	*Laporan*	140 Laporan	84.000.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentase*	100 %	632,845,640.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		*Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentase*	100 %	149.307.000,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Penyediaan Komponen Instalasi						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	12 Paket	27,007,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	12 *Paket*	6.000.000,00	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	7 Paket	58,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Paket*	7 Paket	9.000.000,00	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	12 Paket	76,182,840.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	*Paket*	12 Paket	11.969.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	12 Paket	67,500,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	*Paket*	12 Paket	15.000.000,00	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	12 Dokumen	56,400,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*Dokumen*	12 Dokumen	4.945.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	12 Laporan	347,755,800.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Laporan*	12 Laporan	102.393.000,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentase*	100 %	751,500,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentase*	100 %	0,00	
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	12 Unit	176,500,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	12 Unit	0,00	
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	1 Unit	575,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	*Unit*	1 Unit	0,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika*		100 %	68,500,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika*		100 %	13.922.000,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	12 Laporan	11,500,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Laporan*	12 Laporan	4.002.000,00	
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	12 Laporan	57,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	*Laporan*	12 Laporan	9.920.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentase*	100 %	373,806,824.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika*	*Persentase*	100 %	161.386.000,00	

2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	12 Unit	373,806,824.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	*Unit*	12 Unit	161.386.000,00	
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi		-		-	605,681,002.00	Penataan Organisasi					995.000,00	
2.16.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	*Dokumen*	1 Dokumen	605,681,002.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	*Dokumen*	1 Dokumen	995.000,00	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**1,758,612,800.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**					**591.612.300,00**	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-		-	1,758,612,800.00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					591.612.300,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						Relasi Media						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	*Laporan*	60 Laporan	300,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	*Laporan*	60 Laporan	200.000,00	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	*Komunitas*	1 Komunitas	200,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	*Komunitas*	1 Komunitas	19.860.500,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik						Pelayanan Informasi Publik						
		Kab. Karanganyar, Semua	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	*Permohonan*	1 Permohonan	108,612,800.00		Kab. Karanganyar, Semua	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	*Permohonan*	1 Permohonan	4.552.800,00	
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik						Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	*Rekomendasi*	1 Rekomendasi	450,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	*Rekomendasi*	1 Rekomendasi	240.689.550,00	
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						Pengelolaan Media Komunikasi Publik						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	*Media*	1 Media	400,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	*Media*	1 Media	36.946.100,00	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten						Penyusunan Konten						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Konten Informasi Publik*	*Konten*	1 Konten	250,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Konten Informasi Publik*	*Konten*	1 Konten	88.155.550,00	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	*Orang/bulan*	2 Orang	50,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	*Orang/bulan*	2 Orang	1.407.800,00	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**					**5,388,377,400.00**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Terwujudnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten/Kota*	*Persentase*	100 %	5,388,377,400.00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Terwujudnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten/Kota*	*Persentase*	100 %	1.687.542.000,00	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional						Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional						

		Kab. Karanganyar	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	*Aplikasi*	280 Aplikasi	1,088,377,400.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	*Aplikasi*	280 Aplikasi	60.000.000,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*Perangkat Daerah*	100 Perangkat Daerah	2,800,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	*Perangkat Daerah*	100 Perangkat Daerah	1.453.790.000,00	
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE						Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*	*Aplikasi*	3 Aplikasi	450,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*	*Aplikasi*	3 Aplikasi	8.850.000,00	
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	*Aplikasi*	- Aplikasi	450,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	*Aplikasi*	- Aplikasi	120.000.000,00	
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*	*Dokumen*	1 Dokumen	600,000,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*	*Dokumen*	1 Dokumen	44.902.000,00	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**49,774,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**8.001.200,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**49,774,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**					**8.001.200,00**	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Untuk memenuhi kebutuhan tentang Data Statistik*	*Persentase*	100 %	49,774,000.00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		*Untuk memenuhi kebutuhan tentang Data Statistik*	*Persentase*	100 %	8.001.200,00	
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	*Laporan*	100 Laporan	49,774,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	*Laporan*	100 Laporan	8.001.200,00	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**					**190,000,000.00**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**					**111.500.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**190,000,000.00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**					**111.500.000,00**	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota*	*Persentaes*	65 %	190,000,000.00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		*Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota*	*Persentaes*	65 %	**111.500.000,00**	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Laporan*	65 Laporan	114,800,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	*Laporan*	65 Laporan	71.000.000,000	
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						
		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan*	*Laporan*	1 Laporan	75,200,000.00		Kab. Karanganyar	*Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan*	*Laporan*	1 Laporan	40.500.000,00	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

DISKOMINFO sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menjadi *leading sector* atau koordinator pada urusan Komunikasi.

Usulan program dalam Renja DISKOMINFO dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

TABEL 2.1.4

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DISKOMINFO Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-

2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Dalam rangka mencapai visi di atas, Kepala Daerah Kabupaten

Karanganyar yang terpilih mempunyai misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian.
3. Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.
5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama.

Rumusan Tujuan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik;

Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah;

Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar; dan

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mencapai Visi Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah
2. Tujuan 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta kondusivitas wilayah, dengan sasaran sebagai berikut :
   1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   2) Meningkatnya kondusivitas wilayah kerukunan antar umat beragama dan demokratisasi
3. Tujuan 3 Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar, dengan sasaran sebagai berikut;
   1) Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang inklusif, berkarakter dan adil
   2) Meningkatnya riset dan inovasi
   3) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja
   4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan
4. Tujuan 4 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata, dengan sasaran sebagai berikut:
   1) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Tema Pembangunan tahun 2026 adalah ***Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional***. Prioritas dan Fokus yang sesuai dengan Tupoksi BPBD adalah Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, menambah desa tangguh bencana dengan melakukan koordinasi dengan desa.

Prioritas pembangunan tahun 2026 yang sesuai dengan tupoksi Diskominfo yaitu Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan, dengan fokus Peningkatan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan

pembangunan sebagai implementasi SPBE.

Arah kebijakan dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Diskominfo yaitu

- Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan pemerintahan difokuskan pada peningkatan tata kelola arsitektur SPBE mendorong kualitas Smart City, dan kualitas layanan aduan masyarakat;
- Peningkatan kualitas satu data difokuskan pada peran produsen data dan penyediaan data sektoral;
- Peningkatan keamanan informasi daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat.

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja DISKOMINFO Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra DISKOMINFO Tahun 2025-2029, adalah ***Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi***

Penjelasan rumusan tujuan DISKOMINFO tersebut di atas adalah dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan sistem komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang falid bagi daerah agar mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, melalui :

1) Peningkatan efektifitas pelayanan publik
2) Transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi
3) Efisiensi operasional pemerintahan
4) Akses informasi yang lebih mudah dan cepat
5) Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran DISKOMINFO Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Penjelasan rumusan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
2. Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi

DISKOMINFO berupaya untuk menyusun dokumen perencanaan pemerintah daerah, yang selaras (sinkron dan konsisten) antara rencana pemerintah pusat dan provinsi serta kebutuhan daerah, dengan melibatkan partisipasi dari semua pihak (masyarakat, swasta, perguruan tinggi, ormas dll). Dokumen perencanaan daerah harus menjadi dasar dan rujukan dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah (Renja). Untuk itu dokumen perencanaan harus realistis dan dapat dilaksanakan, jelas dan terukur.

1) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan DISKOMINFO dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, perangkat daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

a. Meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan publik.
b. Meningkatkan aksesbilitas informasi publik.

c. Meningkatkan trasnparansi dan akuntabilitas pelayan publik
d. Serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, DISKOMINFO dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah.

2) Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi

Meningkatnya pelayanan berbasis teknologi informasi merupakan indikator keberhasilan DISKOMINFO dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi, DISKOMINFO dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayan publik, sehingga meningkatkan kualitas hidup.

Peningkatan pelayanan pelayanan berbasis teknologi informasi dapat dilihat dari dari beberapa aspek, antara lain :

1. Meningkatkan penggunaan aplikasi e-government untuk pelayanan publik
2. Meningkatkan aksesbilitas informasi publik melalui website dan media sosial
3. Meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan publik
4. Meningkatkan trasnparansi dan akuntabilitas pelayan publik

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian	
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		leks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,5	3,90	3,90	4,00
			leks Pemerintah Digital Indonesia	Indeks	NA	N/A	N/A	1,92
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	70,95	84,88	85	85,50
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Indeks Domain Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Indeks	NA	4,31	4	4,10
			Indeks Domain Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Indeks	NA	3,90	3,38	3,48

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian	
					2023	2024	2025	2026
			Indeks Domain Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Indeks	NA	4,30	4,35	4,37
			Indeks Domain Keamanan Siber	Indeks	NA	2,45	2,05	2,15

Sumber : Renstra Diskominfo 2025-2029

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

DISKOMINFO sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada Komunikasi dan Informasi dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang di bidang Informatika, maka DISKOMINF wajib dan harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

1) **Infrastruktur yang belum merata**

   Pembangunan infrastruktur yang belum merata menjadi tantangan di banyak daerah, di kota-kota besar jalan raya, listrik, dan layanan digital berkembang dengan cepat, sementara wilayah terpencil sering tertinggal tanpa fasilitas dasar yang memadai. Ketimpangan ini bukan hanya menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga memperlebar jarak kesejahteraan antar wilayah. Masyarakat di daerah terpencil harus berjuang lebih keras mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan peluang kerja. Tanpa upaya pemeratan yang berkelanjutan pembangunan nasional sulit mencapai tujuan utama yaitu menghadirkan kemajuan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

2) **Sumber daya manusia bidang IT terbatas**

   Sumber daya manusia bidang IT semakin memegang peran penting dalam era digital saat ini, mereka tidak hanya dituntut menguasai keterampilan teknis seperti pemrograman, jaringan dan keamanan siber tetapi juga kemampuan berfikir kritis secara adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat. Permintaan tenaga ahli IT masih sangat dibutuhkan di bidang industri, perbankan hingga layanan publik. Namun tantangan muncul ketika kebutuhan pasar tumbuh lebih cepat dibanding dengan ketersediaan tenaga terampil, oleh karena itu peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi menjadi kunci untuk menciptakan SDM yang unggul, inovatif dan mampu bersaing ditingkat global.

3) **Keamanan Siber dan kerentanan sistem**

   Dalam era digital yang semakin terhubung, tantangan keamanan siber menjadi isu krusial bagi berbagai sektor, serangan seperti phishing, ransomware dan pencurian data terus berkembang dengan teknik yang semakin canggih membuat banyak sistem rentan ditembus. Kerentanan ini sering muncul akibat kurangnya pembaharuan perangkat lunak, konfigurasi keamanan yang lemah atau rendahnya kesdaran pengguna dalam menjaga keaman data.

4) **Kurangnya integrasi antar OPD**

   Kurangnya integrasi antar OPD masih menjadi salah satu hambatan

utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Banyak OPD bekerja dalam sekat masing-masing, menggunakan sistem dan data yang tidak saling terhubung akibatnya koordinasi menjadi terlambat, informasi tidak tersampaikan secara utuh dan proses pengambilan keputusan sering terhambat. Kondisi ini tidak hanya mengurangi efisiensi kerja tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik, tanpa kolaborasi yang kuat dan terintegrasi data yang baik, program pembangunan sulit berjalan secara selaras.

5) Rendahnya literasi digital masyarakat

Rendahnya literasi digital meruapakn tantangan besar ditengah pesatnya transformasi teknologi. Banyak orang belum memahami cara menggunakan perangkat digital secara aman dan efektif, mulai dari mengakses layan online hingga membedakan informasi benar dan hoaks. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat masyarakat rentan terhadap penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi dan keterbatasan dalam memanfaatkan peluang ekonomi berbasis teknologi, tanpa peningkatan literasi digital yang merata, kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi akan semakin melebar.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan DISKOMINFO juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Transformasi digital yang semakin dibutuhkan

DISKOMINFO memiliki peluang strategis dalam mendorong percepatan transformasi digital yang kini menjadi kebutuhan mendesak di berbagai sektor pemerintahan. Dengan perannya sebagai pengelola informasi, teknologi dan komunikasi, DISKOMINFO dapat menjadi motor utama dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, transparan dan efisien. Pemanfaatan infrastruktur digital integrasi sistem antar perangkat daerah serta penguatan keamanan siber membuka ruang bagi DISKOMINFO untuk menciptakan ekosistem pemerintahan yang modern dan adaptip, selain itu peningkatan literasi digital masyarakat dan aparatur menjadi peluang bagi DISKOMINFO untuk memperluas dampak transformasi digital hingga ke tingakt paling dasar. Dengan mengoptimalkan kewenangan da inovasi, DISKOMINFO dapat menjadi penggerak penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis yang berbasis data, inklusif dan siap menghadapi tantangan di era digital.

2. Perkembangan teknologi yang cepat

Perkembangan teknologi yang cepat membuka peluang besar bagi DISKOMINFO untuk memperkuat perannya sebagai penggerak inovasi di daerah, dengan kemampuan memantau tren teknologi dan mengintegrasikannya ke dalam layanan pemerintah, DISKOMINFO dapat menghadirkan solusi digital yang lebih efisien, responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan dan sistem berbasis data memberi ruang bagi DISKOMINFO untuk meningkatkan kualitas layan publik, mempercepat pengolahan informasi serta memperkuat keamanan sistem pemerintahan.

3. Program smart city / smart regency

Program smart city memberikan peluang besar bagi DISKOMINFO untuk berperan sebagai pusat inovasi dan integrator layanan digital daerah. Dengan mandat dalam pengelolaan teknologi Informasi dan Komunikasi, DISKOMINFO dapat memimpin pengembangan sistem berbasis data yang meningkatkan efisiensi layanan publik. Mulai dari transportasi, keamanan, hingga pemanfaatan aplikasi terpadu serta dasboard pemantauan memberi kesempatan bagi DISKOMINFO untuk menghadirkan kota yang lebih cerda,

responsif, dan ramah masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan. DISKOMINFO dapat memastikan bahwa implemntasi Smart City berjalan terarah, berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi warga.

4. **Potensi pembinaan literasi digital**

   Merupakan peluang besar bagi DISKOMINFO untuk menjadi garda terdepan dalam membangun literasi digital masyarakat. Dengan kewenangannya dalam pengelolan informasi dan teknologi, DSIKOMINFO dapat menyusun program pembinaan yang menyasar diberbagai kelompok masyarakat mulai dari pelajar, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum melalui pelatihan, kampanye edukasi dan kolaborasi dengan komunitas digital, DISKOMINFO dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi yang aman, produktif, dan bertanggung jawab. Peluang ini semakin penting di tengah maraknya hoaks, penipuan digital dan rendahnya pemanfaatan layanan digital. Dengan m,emaksimalkan potensi pembinaan literasi digital DISKOMINFO dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih cakap teknologi, kritis, serta mampu menikuti perkembangan era digital secara baik.

5. **Penguatan peran Diskominfo sebagai Digital leader daerah**

   Peluang DISKOMINFO dalam hal ini mempunyai peran strategis untuk mendukung pengukuran kinerja pelayanan OPD melalui pemanfaatan teknologi ninformasi dan sistem terintegrasi. Dengan membangun dashboard kinerja, sistem monitoring dan analisis data berbasis digital DISKOMINFO dapat membantu menilai efektifitas layanan, transparansi yang lebih tepat sasaran. Dengan memanfaatkan peluang ini DISKOMINFO dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, responsif dan berorientasi pada hasil.

6. **Meningkatkan kesadaran keamanan siber**

   Dalam meningkatkan kesadaran keamanan siber DISKOMINFO memiliki peluang penting untuk meningkatkan kesadaran keamanan siber di masyarakat dan aparatur pemerintahan. Melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye digital, DISKOMINFO dapat menanamkan praktik penggunaan teknologi yang aman, mulai dari perlindungan data pribadi hingga deteksi serangan siber. Pemanfaatan media digital dan pelatihan terstrukutur memungkinkan pesan keamanan siber mejangkau lebih luas dan efektif, dengan inisiatif ini DISKOMINFO tidak hanya membantu mencegah ancaman siber tetapi juga membangun budaya digital yang lebih aman, cerdas dan tangguh di seluruh lapisan masyarakat.

7. **Optimalisasi media sosial dan kanal komunikasi publik**

   Dalam upaya memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat melalui optimalisasi media sosial dan kanal komunikasi publik DISKOMINFO bisa memanfaatkan platform digital secara strategis, DISKOMINFO dapat menyebarkan informasi layanan, program,dan kebijakan secara cepat, akurat, dan interakti. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi publik serta membangun transparansi dan kepercayaan. Optimalisasi kanal komunikasi juga memberi kesempatan untuk menampung aspirasi warga secara tepat waktu sehingga kebijakan dan layanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara DISKOMINFO mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran DISKOMINFO dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator

diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan DISKOMINFO.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka DISKOMINFO masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Komunikasi dan Informasi. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi		1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			2. Indeks Pemerintah Digital Indonesia
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	- Nilai IKM
		Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	1. Indeks Domain Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
			2. Indeks Domain Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
			3. Indeks Domain Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi
			4. Indeks Domain Keamanan Siber

Sumber : Diskominfo, 2025

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

NO	SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi informasi			
2.	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Relasi Media 2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 3. Pelayanan Informasi Publik 4. Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik 5. Diseminasi Informasi 6. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 7. Penyusunan Konten 8. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1. Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggar aan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa 1. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 2. Koordinasi penyusunan proses bisnis 3. Fasilitasi penyelenggar aan SPBE di lingkungan Pemda 4. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 5. Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi 6. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 7. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 8. Pembangunan dan/atau engembangan Aplikasi

				Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta 9. Penyelenggar aan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
		Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	Penyelenggraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	Penyelenggar aan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Daerah Kabupaten / Kota	1. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen perangkat daerah 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA 3. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SPPD
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan peralatan rumah tangga 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
			4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	1. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

			Urusan Pemerintah Daerah	
			5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Sumber : Diskominfo, 2025

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan OPD

Beberapa program kegiatan dan subkegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program, kegiatan dan subkegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program kegiatan dan subkegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan DISKOMINFO Tahun 2026 adalah sebagaimana tabal 4.1.

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1.

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2026

KODE REK	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 2026				KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dinas Komunikasi dan Informatika							**7.674.770.140,00**					**293.246.500.000,00**
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.674.770.130,00**					**293.246.500.000,00**
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**7.555.268.930,00**					**292.836.500.000,00**
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**							**5.276.114.630,00**					**6.526.500.000,00**
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dadapt disusun dalam 1 tahun*	%	100	100	100	100 %	2.783.200,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	499.500.000,00
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	40	30	35	40 Dokumen	1.220.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	40	52.500.000,00
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Laporan	40	30	35	40 Laporan	1.563.200,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	40	21.000.000,00

2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	Dokumen	1	1	1	12 Dokumen	0,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	426.000.000,00
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika*	%	100	100	100	100 %	4.947.721.430,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	4.035.000.000,00
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Bulan	12	12	12	12 bulan	4.862.721.430,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	3.800.000.000,00
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	Bulan	12	12	12	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	124.000.000,00
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD*	Laporan	12	12	12	140 Laporan	84.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	111.000.000,00
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika*	%	100	100	100	100 %	149.307.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	380.000.000,00
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	12	12	12	12 Paket	6.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	20.500.000,00

2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	7	5	6	7 Paket	9.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	7	41.000.000,00
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	12	12	12	12 Paket	11.969.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	41.000.000,00
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	12	12	12	12 Paket	15.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	40.500.000,00
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Dokumen	12	12	12	12 Dokumen	4.945.000,00	Kab. Karanganyar Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	31.000.000,00
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12	12	12	12 Laporan	102.393.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	206.000.000,00
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika*	%	100	100	100	100 %	0,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	753.500.000,00
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Unit	12	12	12	12 Unit	0,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	177.500.000,00

2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	Unit	1	-	1	1 Unit	0,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	576.000.000,00
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika*	%	100	100	100	100 %	13.922.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	37.500.000,00
2.16.01.2.08.0001	Penyediann Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Laporan	12	12	12	12 Laporan	4.002.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	6.500.000,00
2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	12	12	12 Laporan	9.920.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	31.000.000,00
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika*	%	100	100	100	100 %	161.386.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	214.000.000,00
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	Unit	12	12	12	12 Unit	161.386.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	12	214.000.000,00
2.16.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-			-	995.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	-	607.000.000,00

2.16.01.2.13.0004	Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	Dokumen	1	1	1	1 Dokumen	995.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	607.000.000,00
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**							**591.612.300,00**				**-**	**3.192.000.000,00**
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	%	100	100	100	100%	**591.612.300,00**	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	3.192.000.000,00
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media*	Laporan	60	60	60	60 Laporan	200.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	60	531.000.000,00
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	*Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo*	Komunitas	1	1	1	1 Komunitas	19.860.500,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	566.000.000,00
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	*Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan*	Permohonan	1	1	1	1 Permohonan	4.552.800,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	536.000.000,00

2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	*Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah*	Rekomendasi	1	1	1	1 Rekomendasi	240.689.550,00	Kab. Karanganya Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	386.000.000,00
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	Media	1	1	1	1 Media	36.946.100,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	476.000.000,00
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	*Jumlah Konten Informasi Publik*	Konten	1	1	1	1 Konten	88.155.550,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	576.000.000,00
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	*Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan*	Orang	2	2	2	2 Orang	1.407.800,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	3	121.000.000,00
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**							**1.687.542.000,00**					**283.118.000.000,00**
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terwujudnya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Kabupaten/Kota*	%	100	100	100	100 %	1.687.542.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	283.118.000.000,00

2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	*Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional*	Aplikasi	4	4	4	280 Aplikasi	60.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	4	281.000.000.000,00
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	Perangkat Daerah	42	42	42	42 Perangkat Daerah	1.453.790.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	42	1.846.000.000,00
2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	*Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE*	Aplikasi	3	3	3	3 Aplikasi	8.850.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	3	196.000.000,00
2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	*Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah*	Aplikasi	1	1	1	1 Aplikasi	120.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	0,00
2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	*Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas*	Dokumen	1	1	1	1 Dokumen	44.902.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	76.000.000,00
2.20	**URURSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**8.001.200,00**					**161.000.000,00**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**							**8.001.200,00**				**-**	**161.000.000,00**

2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Untuk memenuhi kebutuhan tentang Data Statistik*	%	100	100	100	100 %	8.001.200,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	161.000.000,00
2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	*Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah*	Laporan	100	100	100	100 Laporan	8.001.200,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	161.000.000,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**111.500.000,00**					**249.000.000,00**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**							**111.500.000,00**				**-**	**249.000.000,00**
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota*	%	100	100	100	65 %	111.500.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	100	249.000.000,00
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	Laporan	65	65	65	65 Laporan	71.000.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	65	172.000.000,00
2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	*Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan*	Laporan	1	1	1	1 Laporan	40.500.000,00	Kab. KaranganyarSemua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	DISKOMINFO	1	77.000.000,00

Sumber : Diskominfo, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Menjadi bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Perencanaan, bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang tertuang dalam Rencana Kerja DISKOMINFO Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DISKOMINFO harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya *(cascading)* dan juga dapat mempengaruhi *(cross cutting)* capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya. Untuk itulah penyusunan renja harus memperhatikan tugas dan fungsi DISKOMINFO sebagai penyedia data dan informasi dalam penyusunan dokumen Perencanaan komunikasi dan informasi di Kabupaten Karanganyar.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja DISKOMINFO Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja DISKOMINFO Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Pelaksanaan Rencana Kerja DISKOMINFO Tahun 2026, dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan (direncanakan) disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran Tahun 2026;
3) Rencana Kerja DISKOMINFO Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja DISKOMINFO Tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;

2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu:
   a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan komunikasi dan informasi;
   b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan komunikasi dan informasi;
   c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja OPD;
   d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan dilaksanakankannya Rencana Kerja DISKOMINFO Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi DISKOMINFO secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan mampu memberikan arahan bagi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pada semua urusan bidang sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

Semoga Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Karanganyar, 26 September 2025
Plt. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Tenaga Kerja
Kabupaten Karanganyar

Heru Joko Sulistyono, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang I.1
2.1 Landasan Hukum I.1
1.3 Maksud dan Tujuan I.4
1.4 Sistematika Penulisan I.5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II.1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II.12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II.14
2.3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis II.16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 ..... II.16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II.32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN III.1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III.1
3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2025-2029 ..... III.1
3.1.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024 ..... III.2
3.1.3 Telaah Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2020 – 2024 ..... III.2
3.1.4 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 ..... III.4
3.1.5 Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 ..... III.4
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III.4
3.2.1 Tujuan III.4
3.2.1 Sasaran III.5
3.3 Program dan Kegiatan III.6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. IV.1
BAB V PENUTUP V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 ..... II.2
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2024.... II.12
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 – 2024... II.12
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024.... II.13
Tabel 2.5 Review Rancangan Awal RKPD 2026 ..... II.17
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 – 2029 ..... III.5
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD).... IV.2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan disusunnya dokumen perencanaan yang terintegrasi mulai dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat.

RKPD ini adalah rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Renja menafsirkan Rentra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target dapat tercapai. Penyusunan Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

2.1 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
13. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang;
17. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
18. PP Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
19. PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
30. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 181);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 Berita Acara 35 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025; dan
33. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
34. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan maksud :

1. Menyediakan dokumen perencanaan pada perangkat daerah, yang sesuai dan selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Memberi gambaran umum tentang kondisi perangkat daerah, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta perencanaan pendanaan.
3. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur DISDAGPERINAKER di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.
5. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di dalam urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja tahun 2026.
6. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan tujuan :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan KUA & PPAS yang akan disepakati Kepala Daerah bersama DPR.
3. Menyediakan data dan informasi perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan DISDAGPERINAKER yang akurat dan terkini (*up to date*).
4. Mewujudkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berkualitas, konsisten dan sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
6. Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Rencana Kinerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan keselarasan antara APBD dengan Rencana Kerja. Hasil evaluasi ini dapat memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029.

Berikut ini tabel hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-2 yaitu tahun 2024) dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun n-1 yaitu tahun 2025) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA KAB. KARANGANYAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA									
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
	2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	**2**	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**71.5 skore**	**71.25**	**70**	**71.25**	**71.25**	**70**	**50**	**50**
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib	0 Unit	100	28	28	100	28	14	50
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	1	0	0	1	0	0
2	**2**	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun** **Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**	**0 dokumen** **1 dokumen**	**1**	**1**	**1**	100	**1**	**0**	**0**
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	1	1	1	100	1	0	0
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	1	1	1	100	1	0	0
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	15 Perusahaan	0	0	0	0	0	0	0
3	**2**	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil Dan Terlatih**	**33%**	**30**	**70**	**30**	43	**70**	**35**	**50**
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Ketrampilan Kerjanya	200 Orang	0	170	70	41	50	25	50
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	0	170	28	16	50	25	50
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	0	5	5	100	0	0	0
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	0	0	1	0	0	0	0
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50 Lembaga	12	0	1	0	0	0	0
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	12	0	57	0	0	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPKS Secara terintegrasi	25 Orang	12	100	0	0	0	0	0
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	25 Orang	7	4	70	1750	50	25	50
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2 Perusahaan	12	100	50	50	50	25	50
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	2 Perusahaan	1	2	50	2500	50	25	50
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	1 Dokumen	12	100	0	0	0	0	0
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	1	2	0	0	0	0	0
4	**2**	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**81%**	**74.52**	**50**	**74.52**	**75**	**50**	**25**	**0**
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	25 Orang	12	100	12	12	100	50	0
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	0 Orang	16	15	16	107	15	15	100
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25 Orang	12	50	12	24	50	0	0
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	100	100	100	100	100	50	50
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	100	20	100	500	20	10	50
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	10	25	10	40	25	0	0
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	24 Laporan	12	100	12	12	100	50	0
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	24 Laporan	12	12	12	100	12	12	100
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	24 Laporan	12	4500	12	0	4500	2200	49
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	0	1500	0	0	1500	1500	100

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	25 Orang	12	100	12	12	100	0	0
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	60	40	60	150	40	0	0
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	0	15	0	0	15	5	33
5	**2**	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**100 %**	**0**	**100**	**0**	0	**100**	**0**	0
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	12	100	12	12	100	0	0
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	0	50	0	0	50	20	40
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	0	30	0	0	30	0	0
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	0	1	0	0	1	1	100
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Perkara	12	100	12	12	100	0	0
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	32	60	32	53	60	0	0
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara	63	30	63	210	30	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0	100	0	0	100	0	0
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1	1	1	100	1	1	100
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5 Orang/Perusahaan	20	25	20	80	25	10	40
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
	3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
6	**3**	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip**	**71.5 score**	**71.25**	**70**	**71.25**	**71.25**	**70**	**50**	**50**
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	100	8	100	100	8	8	100
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2	3	2	100	3	2	33.33
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100	1	0	0
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100	1	1	100
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100	1	0	0
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2	2	2	100	2	1	50
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan akuntabel	100%	92.88	4	92.88	92.88	4	2	50
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	134	107	134	100	107	89	83.18

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	1	1	0	1	0	0
	3	30	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	3	1	0	3	0	0
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12	12	12	100	12	6	50
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	100%	100	3	100	100	3	0	0
	3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	2	0	0	2	2	100
	3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1	1	1	100	1	0	0
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan dengan tertib	100%	0	14	50	50	14	7	50
	3	30	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0	1	0	0	1	1	100
	3	30	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Laporan	0	1	0	0	1	0	0
	3	30	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12	12	12	0	12	3	25
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi dan kepegawaian sosialisasi perundang undangan	100%	100	1	100	100	1	0	0
	3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	1	1	0	1	3	300
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	32	50	0	100	50	0	0
	3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100	50	100	100	50	200	400
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	100%	100	7	100	100	7	3	42.86
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	0	0	0	0	0	0
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	100	1	0	0
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1	1	1	100	1	0	0
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0	1	0	0	1	0	0
	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	26	1	26	100	1	0	0
	3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Paket	0	1	0	0	1	0	0
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah dengan tertib	100%	100	28	100	100	28	14	50
	3	30	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	21	0	21	100	0	0	0
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	20	0	0	20	1	5
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	14	5	14	100	5	2	40
	3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	0	1	0	0
	3	30	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	0	1	0	100	1	1	100
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100	3	100	100	3	1	33.33
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	12	1	12	100	1	0	0
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1	1	1	100	1	0	0
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	1	12	100	1	0	0
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100	78	100	100	78	37	47.44
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Paket	9	50	9	100	50	25	50
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Paket	1	25	1	100	25	14	48
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	4	1	4	100	1	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	1	0	0	1	0	0
	3	30	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket	2	1	2	100	1	0	0
7	**3**	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pemenuhan komitmen perusahaan yang berizin**	**76%**	**30**	**86**	**30**	**30**	**86**	**0**	**0**
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen	12 Dokumen	12	12	12	100	12	0	0
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	7	15	7	100	15	0	0
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda daftar Gudang	17 Dokumen	0	0	7	50	0	0	0
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	17 Dokumen	7	15	7	100	15	0	0
8	**3**	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pemenuhan standardisasi SNI secara bertahap**	**17 unit**	**55.55**	**22**	**55.55**	**55.55**	**22**	**64**	**64**
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit	12	17	12	100	17	6	35.29
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	17	17	2	0	17	7	35.29
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	18	17	18	100	17	9	35.29
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan	undefined undefined	12	17	12	100	17	6	35.29
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17 Dokumen	18	17	18	100	17	9	35.29
9	**3**	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase akses informasi harga**	**100%**	**27.78**	**75**	**27.78**	**27.78**	**75**	**0**	**0**
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terpantaunya Informasi harga bahan pokok dan stok	17 pasar	70	0	50	0	0	0	0
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17 Laporan	28	0	50	0	0	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	12 lokasi	1	0	0	0	0	0	0
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17 Laporan	17	17	17	340	17	0	0
10	**3**	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk ekspor**	**17 Pelaku Usaha**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**0**	**0**
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan pelaku ekspor	17 Pelaku Usaha	12	17	12	100	17	0	0
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	0	17	0	0	17	0	0
11	**3**	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**	**77%**	**30**	**65**	**30**	**30**	**65**	**46**	**46**
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya tera dan tera ulang	2000 UTTP	12	70	12	100	70	50	50
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0 Unit	1975	2000	1975	103.95	2000	1000	50
12	**3**	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah produk dalam negeri yang difasilitasi**	**50 UMKM**	**15**	**100**	**15**	**15**	**100**	**0**	**0**
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pameran	50 UMKM	70	0	50	0	0	0	0
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM	28	0	50	0	0	0	0
	3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
13	**3**	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Jumlah sentra industri yang dibina**	**3%**	**3.2**	**33**	**3.2**	**3.2**	**33**	**0**	**0**
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah sentra industri yang dibina	3%	30	70	30	100	70	50	50
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	0	2	0	0	2	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	240	3	240	100	3	0	0
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0
14	**3**	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Jumlah hasil pemantauan, pengawasan dan verifikasi teknis perizinan berusaha industri kecil menengah**	**100%**	**0**	**11**	**0**	**0**	**11**	**0**	**0**
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terdiri dari 1 bendel SK dan BAP dari sejumlah industri yang telah dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sektor industri resiko menengah tinggi jumlah dokumen yang terdiri dari BAP Pengawasan IKM terhadap pemenuhan komitmen perizinan berusaha	100%	0	70	1	0	70	50	50
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	0	28	0	0	28	14	50
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**3**	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya infomasi industri secara lengkap dan terkini pada SIINas**	**9.59%**	**135**	**1**	**135**	**135**	**1**	**0**	**0**
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas Jumlah dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri kecil menengah pada SIINas Jumlah dokumen terkait pemantauan dan evaluasi data industri kecil menengah pada SIINas	9.59%	1	1	1	100	1	0	0
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1	1	1	100	1	0	0
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	0	1	0	0	1	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Urusan Perdagangan pada tahun 2020 - 2024 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	87.66	89.41	89.43	100.00	100.00
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	95.87	96.70	97.10	97.10	97.20
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	87.25	87.52	87.85	87.92	88.03

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2024.
Keterangan : NA = Non Avaiable (Data tidak tersedia)

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 – 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	76.50	28.85	61.54	33.26	34.68
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	60.00	60.00	70.00	70.00	92.73
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	%	100.00	73.00	100.00	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait						
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100.00	100.00	100.00	100.00	72.48

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2024.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 – 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 - 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75	75	75	75	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	95.48	95.40	95.48	95.48	98.80
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	53,885,199.51	55,492,047.53	60,026,191.35	59,454,974.16	58,345,121.39
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	84.10	84.38	84.43	84.54	8.30
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten /kota	%	91.79	91.15	91.20	91.77	79.74

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2024.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan daerah dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Karanganyar merupakan pilihan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas IKM dan penataan kawasan industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, di dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih terdapat permasalahan dalam perangkat daerah sebagai berikut :

1. Perdagangan

a. Masih ditemukannya pasar yang tidak memenuhi standar kelayakan fungsi, seperti sanitasi, keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya.
b. Kemampuan daya beli konsumen tidak stabil.
c. Kompetisi produk sejenis dari negara lain yang semakin tinggi.
d. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani perdagangan.
e. Ruang penyimpanan alat tera tidak sesuai standar peraturan.
f. Belum tersedia ruang layanan tera ulang yang representatif.
g. Masih terdapat kekurangan alat standar pengukuran tera.
h. Banyak produk yang secara mutu bisa masuk pasar ekspor tapi tidak bisa memenuhi permintaan perbulannya karena kendala mutu bahan baku dan SDM.
i. Persyaratan dokumen yang tidak sederhana untuk pemula.
j. Masih terdapat kasus penipuan buyer luar negeri sehingga pelaku ekspor pemula menjadi enggan untuk memulai.

2. Perindustrian

a. Pendataan yang dilakukan belum mencakup keseluruhan IKM di Kabupaten Karanganyar.
b. Rendahnya kesadaran dan antusiasme IKM dalam melakukan pelaporan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
c. Database IKM yang akan digunakan dalam pembentukan sentra industri masih dalam validasi untuk pembuatan SK Sentra IKM Bupati Karanganyar.
d. Pelaku IKM melakukan industri bukan pada zonanya.

3. Tenaga Kerja

a. Belum optimalnya tingkat partisipasi angkatan kerja.
b. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar.
c. Belum selarasnya pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
d. Penggunaan mesin berteknologi tinggi yang minim tenaga kerja.
e. Kurangnya ketrampilan calon pencari kerja dan kompetensinya rendah.
f. Sinkronisasi data dan kolaborasi dengan stakeholder terkait ketenagakerjaan.
g. Tingkat produktivitas tenaga kerja belum optimal.
h. Terbatasnya fasilitas peralatan praktik di BLK, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan industri terkini.
i. Kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan.
j. Lemahnya jaringan kemitraan dengan perusahaan untuk penyaluran tenaga kerja.
k. Kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk memperbarui data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).
l. Banyak LPK yg belum ter-akreditasi, karena faktor dari kuota yg terbatas dari pemerintah/Lembaga Akreditasi Nasional dan minat yang kurang dari pimpinan LPK
m. Banyak instruktur yang belum memiliki sertifikat kompetensi

n. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah pusat terkait pengembangan kelembagaan LPK, semenjak pasca Covid-19, seperti : Bantuan sarana dan prasarana, bantuan program, dll.

2.3.1 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis ini mencakup tiga dimensi utama:

Dimensi Perdagangan: Mencakup kebutuhan pengembangan infrastruktur pasar, sistem teknologi informasi, perlindungan konsumen, distribusi barang kebutuhan pokok, dan kepatuhan pelaku usaha.

Dimensi Perindustrian: Meliputi penguatan sentra industri kecil menengah, pembangunan sarana prasarana pendukung, pengembangan kekuatan kolektif industri, penguasaan teknologi, dan standardisasi produk.

Dimensi Ketenagakerjaan: Fokus pada peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja dan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasar pada Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Perdagangan, Perindutrian dan Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Review Rancangan Awal RKPD 2026

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA				**Rp 21,567,716,872**	**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA**				**Rp22,486,247,222**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**Rp 1,835,398,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**Rp3,193,000,000**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**Rp 1,835,398,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**Rp3,193,000,000**
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**	**1 dokumen**	**Rp 50,000,000**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun**	**1 dokumen**	**Rp50,000,000**
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100 persen	Rp 50,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Dokumen Rencana Tenaga Kerja	100 persen	Rp50,000,000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Rp 15,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	Rp15,000,000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	Rp 35,000,000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	Rp35,000,000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		**Persentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil dan Terlatih**	**73 Persen**	**Rp 1,643,398,000**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**Persentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil dan Terlatih**	**73 Persen**	**Rp2,580,000,000**
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Keterampilan kerjanya	100 persen	Rp 1,378,398,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Keterampilan kerjanya	100 persen	Rp2,315,000,000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	Rp 1,263,398,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	200 Orang	Rp1,800,000,000
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	Rp 15,000,000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	1 Lembaga	Rp415,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Paket	Rp	100,000,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 Paket	Rp100,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen	Rp	150,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen	Rp150,000,000
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	Rp	150,000,000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	50 Lembaga	Rp150,000,000
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi	100 Persen	Rp	50,000,000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi	100 Persen	Rp50,000,000
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	Rp	50,000,000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	Rp50,000,000
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100 Persen	Rp	15,000,000	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100 Persen	Rp15,000,000
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	2 Perusahaan	Rp	15,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	2 Perusahaan	Rp15,000,000
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 Persen	Rp	50,000,000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100 Persen	Rp50,000,000
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Rp	50,000,000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	Rp50,000,000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**0.55**	**Rp**	**440,000,000**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan**	**0.55**	**Rp310,000,000**
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	100 persen	Rp	255,000,000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	100 persen	Rp255,000,000
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	37 Orang	Rp	50,000,000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	37 Orang	Rp50,000,000
Pelayanan antar Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25 Orang	Rp	30,000,000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	25 Orang	Rp30,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	Rp 75,000,000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	Rp75,000,000
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	Rp 50,000,000	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	100 Orang	Rp50,000,000
Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	Rp 50,000,000	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	50 Orang	Rp50,000,000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang memanfaatkan Aplikasi Pasar Kerja Online	100 Persen	Rp 130,000,000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang memanfaatkan Aplikasi Pasar Kerja Online	100 Persen	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0 Dokumen	Rp -	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0 Dokumen	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	Rp 30,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1500 Orang	Rp30,000,000
Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	Rp 100,000,000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	Rp100,000,000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMII)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100 Persen	Rp 55,000,000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMII)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100 Persen	Rp55,000,000
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	Rp 30,000,000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	Rp30,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	Rp -	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	Rp 25,000,000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	10 Orang	Rp25,000,000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**1**	**Rp 253,000,000**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan**	**1**	**Rp253,000,000**
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Persen	Rp 100,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Persen	Rp100,000,000
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	Rp 25,000,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	Rp25,000,000
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	Rp 25,000,000	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	10 Perusahaan	Rp25,000,000
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Rp 50,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	1 Laporan	Rp50,000,000
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	Rp 153,000,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	100 Persen	Rp153,000,000
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Rp 13,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Rp13,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara	Rp 10,000,000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	30 Perkara	Rp10,000,000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Rp 5,000,000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Rp5,000,000
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Rp 100,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Rp100,000,000
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25 Orang	Rp 25,000,000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	25 Orang	Rp25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**Rp 19,732,318,872**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**Rp18,621,265,822**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				**Rp 19,130,337,472**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**Rp18,621,265,822**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**0.731**	**Rp 18,450,136,572**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**0.731**	**Rp16,921,265,822**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp 45,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Rp3,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	3,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan Akuntabel	100 Persen	Rp 10,936,784,522	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan Akuntabel	100 Persen	Rp9,936,784,522
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	Rp 10,922,284,522	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	Rp9,922,284,522
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp2,500,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp 2,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Rp2,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp 10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Rp10,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	100 Persen	Rp 18,830,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	100 Persen	Rp13,830,000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp 8,830,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp8,830,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp 10,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Rp5,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan dengan Tertib	100 Persen	Rp 31,000,000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan dengan Tertib	100 Persen	Rp35,000,000
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Rp -	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	Rp0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp 6,000,000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Rp10,000,000
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Rp 25,000,000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	Rp25,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Rp 490,327,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Rp135,687,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp 354,640,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Rp0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 Orang	Rp -	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 Orang	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang	Rp 135,687,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	800 Orang	Rp135,687,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum undefined	100 Persen 7 Paket undefined undefined	Rp 797,930,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum undefined	100 Persen 7 Paket undefined undefined	Rp895,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 75,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp75,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp	63,982,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp60,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp	355,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp355,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp	73,500,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp175,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp	215,448,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp215,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp	5,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp5,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp	10,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Rp10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	100 Persen	Rp	1,250,298,800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	100 Persen	Rp1,212,798,800
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Rp	116,798,800	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	Rp116,798,800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp	97,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Rp60,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp	1,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp1,000,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp	36,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp36,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Rp	4,299,016,250	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Rp4,113,223,500

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp 350,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp390,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp 3,949,016,250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp3,723,223,500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Rp 580,950,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	Rp575,942,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0 0	Rp 325,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	0 0	Rp245,942,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Rp 30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Rp30,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 225,950,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp300,000,000
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan)**	**0.9**	**Rp 12,509,250**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan)**	**0.9**	**Rp10,000,000**
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12 Dokumen	Rp 5,000,000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi	12 Dokumen	Rp5,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Rp 5,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	12 Dokumen	Rp5,000,000
Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah dokumen tanda daftar gudang	12 Dokumen	Rp 5,000,000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah dokumen tanda daftar gudang	12 Dokumen	Rp5,000,000
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	17 Dokumen	Rp 5,000,000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	17 Dokumen	Rp5,000,000
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		-	-	Rp 2,509,250	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		-	-	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Rp 2,509,250	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	12 Dokumen	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		**Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat**	**0.27**	**Rp 396,202,250**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat**	**0.27**	**Rp1,397,500,000**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah ketersediaan sarana distribusi perdagangan	17 Pasar 17 Unit	Rp 391,454,500	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah ketersediaan sarana distribusi perdagangan	17 Pasar 17 Unit	Rp1,395,000,000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	Rp 128,099,950	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	Rp920,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	Rp 263,354,550	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 Unit	Rp475,000,000
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	17 Dokumen	Rp 4,747,750	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	17 Dokumen	Rp2,500,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17 Dokumen	Rp 4,747,750	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17 Dokumen	Rp2,500,000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase akses informasi harga Persentase Publikasi Harga Barang Pokok Penting Harian**	**41 % 85 %**	**Rp 39,830,600**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase akses informasi harga Persentase Publikasi Harga Barang Pokok Penting Harian**	**41 % 85 %**	**Rp37,500,000**
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat undefined	17 Laporan undefined	Rp 8,222,300	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat undefined	17 Laporan undefined	Rp5,000,000
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	17 Laporan	Rp 8,222,300	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	17 Laporan	Rp5,000,000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	17 Dokumen	Rp 17,293,100	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	17 Dokumen	Rp17,500,000
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	17 Laporan	Rp 17,293,100	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	17 Laporan	Rp17,500,000
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan raelisasi 90 %	17 Dokumen	Rp 14,315,200	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan raelisasi 90 %	17 Dokumen	Rp15,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17 Laporan	Rp 14,315,200	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	17 Laporan	Rp15,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		**Jumlah produk ekspor**	**55 produk**	**Rp 6,658,800**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**Jumlah produk ekspor**	**55 produk**	**Rp5,000,000**
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	40 pelaku usaha	Rp 6,658,800	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	40 pelaku usaha	Rp5,000,000
Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	17 Pelaku Usaha	Rp 4,658,800	Pameran Dagang Lokal		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	17 Pelaku Usaha	Rp5,000,000
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	17 Pelaku Usaha	Rp 1,000,000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	17 Pelaku Usaha	
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	Rp 1,000,000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	20 Produk	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**	**0.75**	**Rp 25,000,000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal**	**0.75**	**Rp50,000,000**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	17 lokasi	Rp 25,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	17 lokasi	Rp50,000,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 Unit	Rp 25,000,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2000 Unit	Rp50,000,000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		**Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan**	**120 produk**	**Rp 200,000,000**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**		**Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan**	**120 produk**	**Rp200,000,000**
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	1 kegiatan	Rp 200,000,000	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	1 kegiatan	Rp200,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	Rp 200,000,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	Rp200,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**Rp 601,981,400**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**Rp671,981,400**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		**-**	**-**	**Rp 521,706,000**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**-**	**-**	**Rp560,706,000**
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-	-	Rp 521,706,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		-	-	Rp560,706,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Rp 90,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Rp90,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Rp 15,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Rp15,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Rp 11,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Rp50,000,000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Rp 405,706,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Rp405,706,000
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		**-**	**-**	**Rp 38,275,400**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**		**-**	**-**	**Rp68,275,400**
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	Rp 38,275,400	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	Rp68,275,400

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Rp 33,275,400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Rp33,275,400
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Rp 5,000,000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 Dokumen	Rp35,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	-	Rp 42,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		-	-	Rp43,000,000
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	Rp 42,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	Rp43,000,000

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN	
			TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Rp 35,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Rp35,000,000
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Rp 1,000,000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Rp2,000,000
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Rp 6,000,000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Rp6,000,000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan hal penting. Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk usulan yang disampaikan pada forum perencanaan mulai tingkat Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, hingga Musrenbang Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar 2026, telah memperhatikan berbagai usulan masyarakat dari seluruh kecamatan. Namun berdasar pencermatan dari usulan hasil Musrenbang, tidak ada usulan yang masuk dalam kewenangan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupaten Karanganyar.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Setiap Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan. Sedangkan, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapaianya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan provinsi.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi Kementerian Perdagangan, terdapat 3 (tiga) tujuan yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan periode 2025-2029:

1. Dalam rangka menjalankan Misi 1. “Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029”, tujuan yang dicapai adalah:
   Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri
2. Dalam rangka menjalankan Misi 2. “Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029”, tujuan yang dicapai adalah:
   Tujuan 2. Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
3. Dalam rangka menjalankan Misi 3. “Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029”, tujuan yang dicapai adalah:
   Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029. Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Kementerian Perdagangan memiliki lima sasaran strategis (SS) yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang penunjang.

Untuk mendukung Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:

1.1 Meningkatnya nilai perdagangan domestik (SS1); dan
1.2 Meningkatnya perlindungan konsumen (SS2).

Untuk mendukung Tujuan 2. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai:

2.1 Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa (SS3).

Untuk mendukung Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:

3.1 Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif (SS4); dan
3.2 Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan (SS5).

3.1.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 – 2024

Visi Kementerian Perindustrian yaitu: *"Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan"*. Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Perindustrian, yaitu:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;
3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Untuk mewujudkan visi misi, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing. Ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan dijelaskan pada bagian Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri;
4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dibidang industri;
7. Menguatnya struktur industri.

3.1.3 Telaah Renstra Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Peraturan Tenaga Kerja No 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2020 – 2024, tujuan, sasaran, strategi dan prioritas kebijakan dalam rangka mendukung visi, misi, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

a. Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Dilaksanakan dengan strategi :
    1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja.
    2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.
b. Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
c. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
d. Penciptaan hubungan industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
    1. Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
    2. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI).
    3. Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah.
    4. Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.
e. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :

1. Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;
2. Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan
3. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.

f. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit BPK.
g. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian.
h. Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan ketenagakerjaan oleh pengguna.

3.1.4 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Tujuan yang ingin dicapai untuk mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2025–2029, dan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan sektor industri dan perdagangan agar mampu mewujudkan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perdagangan dalam kurun waktu tahun 2025– 2029 adalah meningkatnya PDRB sektor perdagangan dan meningkatnya sistem logistik daerah. Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Industri adalah meningkatnya PDRB sektor perindustrian dan meningkatnya jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki.

Tujuan Dinas Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri Pengolahan.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis

Sasaran Dinas Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya PDRB sektor perdagangan
2. Meningkatnya sistem logistik daerah
3. Meningkatnya PDRB sektor Perindustrian
4. Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki
5. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan resiko Perangkat Daerah

3.1.5 Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2024-2026

Tujuan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 adalah meningkatnya pengurangan pengangguran. Adapun sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.
2. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
3. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
4. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Norma Ketenagakerjaan (Norma Kerja, Norma K3) dan Lingkungan Kerja.
6. Meningkatnya penempatan transmigran pada daerah tujuan transmigrasi.
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Kepala Daerah terpilih telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025. Bupati dan Wakil Bupati memiliki periode masa jabatan 2025-2030. Visi Bupati dan Wakil Bupati adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi

Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, perdagangan dan tenaga kerja yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera.
Tujuan jangka menengah DISDAGPERINAKER Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut "Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja".

3.2.1 Sasaran

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran DISDAGPERINAKER Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2. Meningkatkan stabilitas harga
3. Meningkatnya pertumbuhan IKM
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,6	74,7	74,8	74,9	75	75,1
		Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	5.50	5.55	5.60	5.65	5.70	5.75
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	58.500.000	59.000.000	59.500.000	60.000.000	60.500.000	61.000.000
		Persentase Perusahaan yang Memiliki PP/PKB	61	62	63	64	65	66
	Meningkatny Stabilitas Harga	Disparitas Harga	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	34,8	35	35,2	35,4	35,6	35,8
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM	83,7	83,9	84,01	84,03	84,05	84,07

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2025

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana strategis memuat rencana program perangkat daerah Kabupaten Karanganyar untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Kebutuhan pendanaan dituangkan dalam bentuk pagu indikatif, berupa jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahun dari tahun 2025-2029. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah).

Perangkat Daerah mempunyai program prioritas sebagai bentuk kebijakan atas satu atau beberapa sub kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program prioritas ini merupakan pedoman untuk menyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Pagu indikatif tiap sub kegiatan merupakan besaran anggaran belanja yang kemudian dicantumkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Pagu indikatif menjadi pedoman perangkat daerah dalam penjabaran dalam lima tahun perencanaan.

Rencana Strategis DIGDAGPERINAKER memuat urusan wajib urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi :

A. Bidang Perdagangan
   1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan :
      a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan sub kegiatan :
         1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik
   2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan :
      a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub kegiatan :
         1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
         2) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      b) Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan :

1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
   a) Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
      2) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
4. Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :
   a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan :
   a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan sub kegiatan :
      1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
      2) Pengawasan/Penyuluh Metrologi Legal
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan :
   a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri, dengan sub kegiatan :
      1) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

B. Bidang Perindustrian
   1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :
      a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
         1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota
         2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
         3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
         4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
         5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
         6) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
   2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten Kota, dengan kegiatan:
      a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izizn Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
         1) Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam Sistem Informasi

Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan :
   a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
      1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
      2) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas
      3) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan perusahaan indusri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaen/kota dalam penyampaian data ke SIINas

C. Bidang Tenaga Kerja
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
   a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatan:
      1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
   b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan:
      1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   c) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
   a) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Pelayanan Antar Kerja
      2) Penyuluhan dan Bibingan Jabatan Bagi Pencari Kerja
      3) Perluasan Kesempatan Kerja
   b) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan sub kegiatan :
      1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
   c) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
   d) Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   e) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan sub kegiatan :
      1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
   f) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan :
   a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam (satu) daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan
   b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
      1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di (satu) Daerah Kabupaten/Kota
      2) Pelaksanaan Operasional Lembaga kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
      3) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

D. Sekretariat
   1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
      a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
         1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
         2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
         3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
         4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
         5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
         6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
         7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
         1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
         2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
         3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
         4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
         5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
         6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
         7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
         8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
      c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
         1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
         2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
         3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
         4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
         5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
         6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
         7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

d) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
   2) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
   3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
   4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
   5) Pengolahan Data Retribusi Daerah
   6) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
   7) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
e) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
   1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
   2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
   5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
   6) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
   7) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
   8) Pemindahan Tugas ASN
   9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   10) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   11) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
f) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Penyediaan Bahan/Material
   8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pengadaan Alat Besar
   4) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   5) Pengadaan Mebel
   6) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   7) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   8) Pengadaan Aset Tak Berwujud
   9) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

i) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
   4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
   5) Pemeliharaan Mebel
   6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   7) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
   8) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
   9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
   10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   12) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 memuat nama program, kegiatan, sub kegiatan, keluaran, pagu indikatif dan sumber dana. Adapun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJAKAB. KARANGANYAR

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja						13.261.603.909,00							16.255.418.161,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						0,00							2.365.537.800,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						0,00							2.365.537.800,00	
1	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja yang tersusun	-			1 dokumen	0,00						-	54.000.000,00	
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	-			100 persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan	-	54.000.000,00	
	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		16.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				30 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		38.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Ketersediaan Tenaga Kerja Terampil dan Terlatih	-			73 Persen	0,00						-	2.048.037.800,00	
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Peserta Pelatihan yang Meningkat Keterampilan kerjanya	-			100 persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Masyarakat	-	1.810.537.800,00	
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				200 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Bangsri	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Masyarakat		1.673.537.800,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
							Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				5 Lembaga	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Masyarakat		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				10 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Bangsri	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	140.000.000,00	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				50 Lembaga	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Lembaga Pelatihan Kerja	-	57.500.000,00	
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				5 Perizinan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Lembaga Pelatihan Kerja		57.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan	-	17.000.000,00	
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				2 Perusahaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan	-	23.000.000,00	
	2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		23.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	-			55 %	0,00						-	118.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	-			100 persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja	-	35.000.000,00	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				25 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				300 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				15 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		14.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang memanfaatkan Aplikasi Pasar Kerja Online	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja	-	75.000.000,00	
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1500 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pencari Kerja		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMII)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia	-	8.000.000,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				25 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia		8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia		0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	-			100 %	0,00						-	145.500.000,00	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan	-	54.000.000,00	
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 Perusahaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				10 Perusahaan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan		18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	-	91.500.000,00	
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perkara	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		12.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				5 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Perusahaan, Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh		7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						13.261.603.909,00							13.889.880.361,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						13.261.603.909,00							13.227.700.821,00	
5	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			73,1 %	12.899.148.509,00						-	12.496.600.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	59.000.000,00	
	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		5.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		7.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Keuangan Akuntabel	-			100 Persen	9.335.696.409,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	7.173.500.000,00	
	3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	9.335.696.409,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		7.150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		3.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	-			100 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	19.000.000,00	
	3	30	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Pendapatan dengan Tertib	-			100 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	18.000.000,00	
	3	30	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	196.500.000,00	
	3	30	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		4.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				230 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				800 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		82.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum Terlaksanaya Kegiatan Administrasi Umum undefined	-			100 Persen 7 Paket undefined undefined	385.574.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	724.000.000,00	
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	335.574.100,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		325.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		95.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		6.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah dengan Tertib	-			100 Persen	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	328.100.000,00	
	3	30	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		1.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	3.164.678.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	3.373.500.000,00	
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		3.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	390.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		370.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.774.678.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		3.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 Persen	13.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah	-	605.000.000,00	
	3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							0				0 0	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	13.200.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
6	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan)	-			90 %	0,00						-	13.760.175,00	
	3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-			12 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	5.500.000,00	
	3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	-			12 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	5.500.000,00	
	3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
							Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				17 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	2.760.175,00	
	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C														
							Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		2.760.175,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
7	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan persyaratan SNI pasar rakyat	-			27 %	362.455.400,00						-	435.822.475,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Jumlah ketersediaan sarana distribusi perdagangan	-			17 Pasar 17 Unit	362.455.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	430.599.950,00	
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				17 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		140.909.945,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				17 Unit	362.455.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		289.690.005,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	-			17 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	5.222.525,00	
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				17 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		5.222.525,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
8	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase akses informasi harga Persentase Publikasi Harga Barang Pokok Penting Harian	-			41 % 85 %	0,00						-	26.693.491,00	
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat undefined	-			17 Laporan undefined undefined	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum	-	9.044.530,00	
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				17 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum		9.044.530,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) kabupaten/kota	-			17 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum	-	1.902.241,00	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				17 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Pengelola Pasar, Pedagang Pasar dan Masyarakat Umum		1.902.241,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan raelisasi 90 %	-			17 Dokumen	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	15.746.720,00	
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				17 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		15.746.720,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
9	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk ekspor	-			55 produk	0,00						-	7.324.680,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal	-			40 pelaku usaha	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	7.324.680,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				17 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		5.124.680,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				17 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		1.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
							Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				20 Produk	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		1.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
10	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase kepatuhan produk pada aspek metrologi legal	-			75 %	0,00						-	27.500.000,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	-			17 lokasi	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	27.500.000,00	
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2000 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		27.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
11	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang dipromosikan	-			120 produk	0,00						-	220.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	-			1 kegiatan	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	220.000.000,00	
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		220.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						0,00							662.179.540,00	
12	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-			-	0,00						-	573.876.600,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	573.876.600,00	
	3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		99.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		16.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		12.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		446.276.600,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
13	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-			-	0,00						-	42.102.940,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	42.102.940,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		36.602.940,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		5.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
14	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-			-	0,00						-	46.200.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	46.200.000,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)															
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		38.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		1.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
	3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas															
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		6.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA KERJA
											J U M L A H	**13.261.603.909,00**							**16.255.418.161,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Ekonomi Baperlitbang	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Litbang PP Baperlitbang	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dinas.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk pada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran secara aktif dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan penyelenggara pemerintahan terutama segenap aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja. Selain itu, diperlukan pula rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan kegiatan yang terkait dengan isu-isu strategis.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karen itu adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan dengan optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai situasi dan kondisi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar ini disusun sebagai dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun 2026 dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam mewujudkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman, nyaman, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Ditingkat OPD, pelaksanaan program kegiatan didasarkan pada Renstra (Rencana Strategis) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (renja) adalah bagian dari perencanaan tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Dinas Koperasi usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Penyusunan rencana kerja ini tentu saja memperhitungkan waktu pelaksanaan, sumber daya yang dimiliki, mempertimbangkan skala prioritas sehingga efisiensi dan efektivitas kegiatan nantinya dapat terwujud. Dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan bisa menjadi pedoman atau standar pelaksanaan, sebagai acuan fungsi pengawasan, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terdeteksi dan mendapatkan solusi.

Kami sadari bahwa materi yang kami sajikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat masa-masa yang akan datang perubahan-perubahan akan selalu terus terjadi, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah ini masih diperlukan berbagai perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rancangan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan serta saran agar tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar disampaikan terima kasih.

Karanganyar,
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL TRANSMIGRASI
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KARANGANYAR

ARIS MARTOPO, S.P, M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 197004291996031003

DAFTAR ISI

Cover
Kata Pengantar ---------- ii
Daftar Isi ---------- iii
Daftar Tabel ---------- iv
BAB I PENDAHULUAN ---------- I-1
1.1 Latar Belakang ---------- I-1
1.2 Landasan Hukum ---------- I-1
1.3 Maksud dan Tujuan ---------- I-2
1.4 Sistematika Penulisan ---------- I-2
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ---------- II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ---------- II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD ---------- II-7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ---------- II-10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ---------- II-13
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat -- II-22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ---------- III-1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ---------- III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ---------- III-1
3.3 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja ---------- III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V PENUTUP ---------- V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan ---------- V-1
5.2. Rencana Tindak Lanjut ---------- V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024---------- ---------- II-5
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024 - II-7
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ---------- II-8
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar ---------- II-13
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat/Desa/Kelurahan/Kecamatan Tahun 2026 ------- II-22
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral ---------- III-2
Tabel 3.2 Program Tahun 2026 yang Mendukung Visi Misi Kepala Daerah, SDGs dan Pertumbuhan Ekonomi ---------- III-3
Tabel 4.1 Rumusan Program Kegiatan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral - IV-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana kerja ini menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah dalam merancang program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 memberikan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi, pelayanan publik, sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, rancangan awal rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 dirancang untuk mengakomodasi target-target strategis yang selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tersebut.

Penyusunan dokumen ini mempertimbangkan berbagai dinamika pembangunan dan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, serta mengantisipasi tantangan dan peluang yang ada di tahun 2026. Diharapkan, melalui implementasi rencana kerja yang sistematis dan terukur, perangkat daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral khususnya tim penyusun Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada tahun rencana 2025 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
k. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Ka bupaten Karanganyar yaitu meliputi (1) Sekretariat, (2) bidang Koperasi dan (3) bidang Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun rencana 2025.

Tujuan dari penyusunan Renja ini adalah untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembuatan dokumen rancangan awal RKPD tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen rancangan awal RKPD 2026 disusun sebagai pedoman untuk perencanaan tahunan yang selaras dengan RPJMD dan Renstra perangkat daerah. adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2026 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Perencanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 disusun pada tahun 2025. Pada bab II ini akan disajikan tentang hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun 2024. Berikut hasil evaluasi perangkat daerah pada tahun 2024 :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar adalah penjabaran rencana tahunan dari Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Renja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tercapai tidaknya suatu pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2024

2.1.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

N I H I L

2.1.1.2 Urusan Wajib Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1.	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	54%	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----------x 100% Jumlah seluruh koperasi	64,77%
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang,cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	100%			
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	98%			
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatan nyauntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	43%			
	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihanuntuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	94%			
	6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	14,00%			
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	10%			

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
	kabupaten/ kota				
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	89%			
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	54%			
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	88%			
	11. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	1%			
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	95%			
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	76%			
2	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	83,65%	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha Mikro yang menjadi wirausaha ----------x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	70,01% Ket. :
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	4,50%			
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,76%			

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	14,22%			
	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,74%			
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,91%			
	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	14,22%			

2.1.1.3 Urusan Pilihan

1. Energi dan Sumberdaya Mineral

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/ kota	0,00	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/ kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ---------- x100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0,00 0

2. Transmigrasi

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1.	Jumlah Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0,00			0,00
2.	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0,00			
3.	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0,00			

2.1.2 Evaluasi Hasil Capaian Renstra OPD Tahun 2024

2.1.2.1 Capaian indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pengukuran capaian target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator kinerja utama ini dibawah ini merupakan capaian IKU Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dapat disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan usaha mikro	Persentase Koperasi Sehat	%	35	34	97	Dibawah Target
		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	40	24	60	Dibawah Target
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	%	50	83	167	Melampaui Target
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah Kawasan Energi Baru Terbarukan	Kawasan	2	2	100	Sesuai Target
4.	Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72	71,05	98,68	Dibawah Target

Sumber : LKjIP Diskuktransesdm Kabupaten Karanganyar, 2024

Capaian realisasi kinerja pada indikator persentase koperasi sehat 97% atau kategori "Dibawah Target". Dari target 35% mencapai realisasi 34%. Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2024 sebanyak 315 unit. Jumlah koperasi aktif tersebut yang merupakan koperasi yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota sebanyak 267 unit. Sedangkan sisanya sejumlah 48 unit merupakan koperasi yang berada dalam wilayah kerja dibawah pengawasan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Tercatat sebanyak 87 unit koperasi yang bergerak pada sektor simpan pinjam dari total 267 koperasi yang beroperasi dan aktif. Pelaksanaan penilaian kesehatan lebih berfokus terhadap koperasi yang bergerak pada sektor simpan pinjam tersebut adalah sejumlah 87 unit saja. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penilaian kesehatan terhadap koperasi bergerak pada sektor simpan pinjam yang merupakan koperasi aktif sebanyak 30 unit koperasi. Sehingga persentase realisasi koperasi sehat adalah 34%. Capaian realisasi kinerja pada indikator persentase koperasi sehat masuk dalam kategori "Dibawah Target", hal ini disebabkan target yang terdapat pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan sesuai dengan Keputusan Bupati No. 000.8/482 Tahun 2024 tentang Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pada Perangkat Daerah Tahun 2024. Pada awalnya target yang ditetapkan sesuai Renstra dan RKPD adalah sebesar 25%, kemudian mengalami perubahan menjadi sebesar 35%. Sedangkan penilaian kesehatan koperasi hanya dilakukan pada koperasi koperasi bergerak pada sektor simpan pinjam yang berada dalam wilayah kerja Kabupaten/Kota.

Capaian realisasi kinerja pada indikator persentase pertumbuhan Usaha Mikro sebesar 60%. atau kategori "Dibawah Target". Dari target 40% mencapai 24% dimana pada tahun 2024 tercatat jumlah usaha mikro baru sejumlah 9.795 dari total 40.876 usaha mikro. Perkembangan ini disebabkan karena ada kerja sama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bidang Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan

Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) dalam melaksanakan fasilitasi jemput bola kepada para pelaku usaha mikro sehingga perkembangan usaha ini menjadi lebih cepat. Selain itu juga ada program fasilitasi halal gratis dari kementerian agama sehingga banyak pelaku usaha mikro yang mengajukan sertifikat halal secara otomatis akan mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan syarat untuk masuk di aplikasi SIHALAL. Pada tahun 2024 ada beberapa program kegiatan dibidang Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Program tersebut adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan sosialisasi kemudahan perijinan usaha dan pemberdayaan kemitraan usaha mikro selain itu juga dilaksanakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha mikro diantaranya pelatihan manajemen pemasaran dan pelatihan manajemen bisnis. Pada Program Pengembangan UMKM diberikan bantuan modal pengembangan usaha bagi kelompok usaha mikro.

Capaian realisasi kinerja pada indikator Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan sebesar 167% atau kategori “Melebihi Target”. Dari target 50% mencapai realisasi sebesar 83% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan tingginya peminat transmigrasi yang mendaftarkan diri untuk mengikuti program transmigrasi dari pemerintah. Pada tahun 2024, Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar melalui Bidang Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sebanyak 60 orang jumlah peminat transmigrasi yang mendaftarkan diri untuk mengikuti transmigrasi. Kemudian sebagai tindak lanjut Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar melalui Bidang Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan penyuluhan kepada para pendaftar transmigrasi tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada para calon transmigran tersebut yang hadir sebanyak 50 Kepala Keluarga. Berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 475/743 Tanggal 5 Maret 2024 tentang alokasi Perpindahan dan Penempatan Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Berdasarkan Surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 745/629 Tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Pembatalan Status Transmigran, Kabupaten Karanganyar tidak mendapatkan kuota penempatan Transmigrasi Tahun 2024.

Capaian realisasi kinerja pada indikator Jumlah Kawasan Energi Baru Terbarukan sebesar 100% atau kategori “Sesuai Target”. Dari target 2 kawasan mencapai realisasi sebesar 100% pada tahun 2024. Kewenangan dalam penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi di daerah kabupaten/kota di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi yang menekankan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2014 dimana undang-undang ini mengatur tentang pemanfaatan panas bumi dan mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan izin pemanfaatan tidak langsung. Kewenangan ini kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, yang bertugas menerbitkan Izin Panas Bumi (IPB) untuk pemanfaatan tidak langsung. Pemerintah Pusat dalam hal ini memiliki kewenangan utama dalam penyelenggaraan pemanfaatan langsung panas bumi dipegang oleh pemerintah pusat, yang meliputi : Pembuatan kebijakan nasional, Pengaturan dan pengawasan pengelolaan data serta potensi geologi panas bumi, Pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi kepada badan usaha berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja. Meskipun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan tidak langsung, mereka tetap

memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam secara umum dan dapat terlibat dalam proses perizinan untuk kegiatan yang bersifat lokal atau mendukung kebijakan nasional. Secara keseluruhan, meskipun ada potensi bagi daerah untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya panas bumi, kewenangan utama tetap berada pada pemerintah pusat, terutama dalam hal perizinan dan pengaturan kebijakan terkait pemanfaatan langsung panas bumi.

2.1.2.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator tujuan yang disajikan pada laporan ini hanya indikator yang berkaitan dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral saja. Capaian kinerja tujuan tercantum seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	6%	5,54%	92,34%	Dibawah Target

Sumber : Karanganyar Dalam Angka 2025, data diolah, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 tercatat stabil di kisaran 5,54%. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah tumbuh dengan baik dan lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Stabilnya pertumbuhan ini menunjukkan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi setelah tekanan pandemi, didukung oleh sektor-sektor utama seperti industri, perdagangan, dan pertanian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Karanganyar tahun 2024 diperkirakan sekitar Rp 53,36 juta, yang mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ekonomi ini didukung oleh ketersediaan tenaga kerja produktif dan infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi. Perekonomian Karanganyar menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan baik yang diharapkan dapat terus berlanjut ke depan dengan kebijakan yang mendukung iklim usaha dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Gambaran kinerja pelayanan dinas berdasarkan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan professional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

Berdasarkan data kepegawaian tahun 2024 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar memiliki data personil yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Menurut Golongan :

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	4	3	7
2	Golongan III	5	3	8
3	Golongan II	1	0	1
4	PPPK	1	1	2
5	Non Golongan (Non ASN)	19	14	33
	Jumlah	30	21	51

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

No	**Tingkat Pendidikan**	**ASN/PPPK**		**Non ASN**		**Jumlah**
		L	**P**	**L**	**P**	
1	S2/ Magister	5	5	0	0	10
2	S1/ Sarjana	3	2	7	8	20
3	Diploma3	1	0	2	1	4
4	SMA/ Sederajat	2	0	10	5	17
	Jumlah Total	11	7	19	14	51

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

2.2.2.1 Aset Tanah, Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sarana kerja yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain:

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Aset		Satuan	Kondisi			Jumlah	Ket
Kode	Nama		Baik	Sedang	Rusak		
A. BARANG TIDAK BERGERAK							
1.3.1.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	bidang	1	0	0	1	Luas 3.758 m^2
1.3.3.01.001.014.002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	unit	1	0	0	1	Luas 48 m^2
1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0	0	1	Luas 3.758 m^2
1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	unit	1	0	0	1	Luas 60 m^2
1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	unit	1	0	0	1	Luas 48 m^2

Aset		Satuan	Kondisi			Jumlah	Ket
Kode	Nama		Baik	Sedang	Rusak		
1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0	0	1	Luas 45 m^2
	JUMLAH BARANG TIDAK BERGERAK		6			6	Luas 3.758 m^2
B. BARANG BERGERAK							
1.3.2.02.001.001.001	Sedan	unit	1	0	0	1	
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	unit	3	0	0	3	
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	unit	0	5	0	5	
1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	buah	19	0	0	19	
1.3.2.05.001.004.007	Brankas	buah	0	1	0	1	
1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	buah	23	0	0	23	
1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	buah	8	0	0	8	
1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	buah	20	0	0	20	
1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	buah	18	0	0	18	
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.002.001.048	Sofa	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	buah	5	0	0	5	
1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	buah	8	0	0	8	
1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.005.009	Tabung Gas	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.002	Televisi	buah	4	0	0	4	
1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.008	Sound System	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.032	Tiang Bendera	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.039	Mimbar/Podium	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	6	0	0	6	

Aset		Satuan	Kondisi			Jumlah	Ket
Kode	Nama		Baik	Sedang	Rusak		
1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.003.002	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota	buah	4	0	0	4	
1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.003.006.013	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	buah	1	0	0	1	
1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	buah	1	0	0	1	
1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	buah	1	0	0	1	
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	buah	12	0	0	12	
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	buah	7	0	0	7	
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	buah	2	0	0	2	
1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	buah	2	0	0	2	
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	buah	14	0	0	14	
1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	buah	2	0	0	2	
1.3.2.19.001.002.001	Alat Tenis Meja	buah	1	0	0	1	
	JUMLAH BARANG BERGERAK		232	6	0	238	

Sumber : Diskuktransesdm,2025

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar

Isu strategis pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter

   Kabupaten Karanganyar saat ini berada pada fase penting dalam pembangunan daerah, di mana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat, menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

2) Pertumbuhan Ekonomi

   Petumbuhan perkonomian daerah semakin didorong optimalnya peran unggulan daerah, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta jasa-jasa modern. Perhubungan dan jaringan jalan dapat membuka pelayanan konektivitas antar wilayah dan kabupaten/kota sekitar serta bandara.

3) Tingkat Pengangguran

   Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kabupaten

Karanganyar. Pengangguran tidak hanya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memicu permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga meningkatnya beban sosial bagi pemerintah daerah.

4) Kemiskinan

Kemiskinan di Karanganyar harus dipandang sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengedepankan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

5) Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar perlu menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai isu strategis. Fokus utamanya meliputi percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Kabupaten Karanganyar perlu menjadikan isu kualitas lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan sebagai prioritas strategis yang terintegrasi dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan. Langkah-langkah penting meliputi penguatan kebijakan pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem manajemen bencana yang berbasis masyarakat.

7) Kondusivitas Wilayah;

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu membangun sinergi yang kuat antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen warga dalam menciptakan suasana yang harmonis dan inklusif. Penguatan forum-forum komunikasi masyarakat, peningkatan peran intelijen kewilayahan, serta edukasi publik mengenai pentingnya toleransi, kebhinekaan, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi langkah penting yang harus terus dikembangkan.

2.3.2 Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah

Berkaitan dengan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang koperasi usaha kecil transmigrasi energi dan sumber daya mineral isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan dapat didefinisikan adalah sebagai berikut :

a) Belum berkembangnya produktivitas koperasi.
b) Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
c) Belum adanya regulasi aturan yang mengatur tentang energi baru terbarukan.
d) Belum optimalnya antara demand and supply transmigrasi karena dibatasi dengan kuota yang ditentukan oleh dinas terkait dengan urusan tersebut.
e) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran yang dimiliki.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Karanganyar adalah sebagaimana terlampir. Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program kegiatan dan sub kegiatan OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam RENJA Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 terdapat 10 Program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
3. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
5. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
6. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
8. Program Pengembangan UMKM;
9. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Berikut tabel review rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026:

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral			**3.260.171.452**			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral**			**12.213.272.451**		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**3.251.671.452**			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.197.072.451**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**3.251.671.452**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**12.197.072.451**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Sakip OPD**	***70,5***	**2.990.730.652**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip OPD**	***70,5***	**4.076.272.451**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***96%***	***1.500.000***			***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***96%***	***18.590.000***		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	16.590.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***96%***	***2.416.028.252***			***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***96%***	***3.104.250.016***		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	2.415.028.252	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ bulan	3.080.840.016	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	DAU	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	12 Laporan	23.410.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	DAU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Semua Kel/Desa		Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Semua Kel/Desa	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***96%***	***500.000***			***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***96%***	**3.000.000**		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***96%***	***500.000***			***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***96%***	**3.000.000**		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	3.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***96%***	***46.202.400***			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***96%***	***165.640.000***		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.700.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	5.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.502.400	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	115.240.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***96%***	***40.000.000***			***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***96%***	***129.000.000***		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	34.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	-	Kab. Karanganyar,	DAU	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	50.000.000	Kab. Karanganyar,	DAU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***96%***	***400.500.000***			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***96%***	***509.760.000***		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	422.760.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***96%***	***85.500.000***			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***96%***	***143.032.435***		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	123.032.435	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**9%**	**7.940.800**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**9%**	**10.000.000**		
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha***	***25 unit***	***7.940.800***			***Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha***	***25 unit***	***10.000.000***		
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 unit usaha	7.940.800	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 unit usaha	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**26%**	**30.000.000**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**26%**	**118.400.000**		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	***Jumlah koperasi yang diawasi***	***50 unit***	***30.000.000***			***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang diawasi***	***50 unit***	***118.400.000***		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 unit	30.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 unit	118.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**	**28,73%**	**25.000.000**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota**	**28,73%**	**35.000.000**		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah KSP/USP yang dinilai yang telah dilakukan penilaian kesehatan***	***20 unit usaha***	***25.000.000***			***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah KSP/USP yang dinilai yang telah dilakukan penilaian kesehatan***	***20 unit usaha***	***35.000.000***		
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 unit usaha	25.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 unit usaha	35.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi**	**30%**	**50.000.000**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi**	**30%**	**1.220.000.000**		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi***	***95 orang***	***50.000.000***			***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi***	***95 orang***	***1.220.000.000***		
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	95 orang	50.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	DAU	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	95 orang	1.220.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan,	DAU DAK Non-Fisik

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Kompetensi SDM Koperasi				Semua Kel/Desa		Kompetensi SDM Koperasi				Semua Kel/Desa	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	**64,77%**	**40.000.000**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	**64,77%**	**1.505.000.000**		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset***	***50 unit***	***40.000.000***			***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset***	***50 unit***	***1.505.000.000***		
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 unit	40.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 unit	1.505.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**26,85%**	**84.000.000**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**26,85%**	**121.400.000**		
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	***Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha***	***100 unit***	***84.000.000***			***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	***Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha***	***100 unit***	***121.400.000***		
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 unit usha	11.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 unit usha	20.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 unit usaha	11.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 unit usaha	15.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15 orang	8.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15 orang	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan	35 orang	54.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan	35 orang	76.400.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU DAK Non-Fisik
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Usaha Mikro yang dibina**	**11,64%**	**24.000.000**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang dibina**	**11,64%**	**5.111.000.000**		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	***Jumlah usaha mikro yang dibina***	**66 unit usaha**	***24.000.000***			***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil***	***Jumlah usaha mikro yang dibina***	**66 unit usaha**	**5.111.000.000**		
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	66 unit usaha	24.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	66 unit usaha	5.111.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**8.500.000**			**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**16.200.000**		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			**4.000.000**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**8.700.000**		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**2 Kawasan**	**4.000.000**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**2 Kawasan**	**8.700.000**		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah potensi panas bumi yang diawasi***	***2 buah***	***4.000.000***			***Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah potensi panas bumi yang diawasi***	***2 buah***	***8.700.000***		
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.700.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			**4.500.000**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**7.500.000**		
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Jumlah calon transmigran yang terdaftar**	**2 KK**	**4.500.000**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah calon transmigran yang terdaftar**	**2 KK**	**7.500.000**		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan***	***2KK***	***4.500.000***			***Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan***	***2KK***	***7.500.000***		
Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Kepala Keluarga	4.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Kepala Keluarga	7.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU
		Jumlah	**3.260.171.452**					**Jumlah**	**12.213.272.451**		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat/desa/kelurahan/ kecamatan melalui Musrenbang atau proposal yang masuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat/Desa/Kelurahan/Kecamatan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang Berkualitas	64,87%	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	50 unit	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 unit	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase Usaha Mikro yang dibina	11,64%	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecill		Jumlah usaha mikro yang dibina	66 unit usaha	
	Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	66 unit usaha	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dijabarkan pentingnya peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian. Dalam Visi Presiden Republik Indonesia dijabarkan pada Astacita 3 (tiga) yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Astacita ini merupakan program prioritas pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional 3 ini menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya. Dalam hal ini koperasi berperan pada Prioritas Nasional 3 pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu dengan Pengembangan Koperasi Sektor Produksi.

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, maka disusun arah kebijakan yang berkaitan dengan koperasi adalah pada sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Lapangan Kerja Yang Berkualitas. Isu-isu yang ada pada sasaran 3 (tiga) tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik;
2) Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian;
3) Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha, dan UMKM;
4) Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri;

Belum optimalnya ekosistem usaha, teemasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha dan UMKM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja tahunan yang berupa penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan koperasi serta usaha kecil mikro di wilayah kabupaten/kota guna menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan program transmigrasi sebagai upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat..
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi dan mineral secara berkelanjutan di daerah.
4. Mewujudkan tata kelola dinas yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
5. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD dan Rencana Strategis Dinas.

Rencana Kerja ini merupakan Rencana Kerja tahunan yang berupa penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang memiliki sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas koperasi serta UMKM yang berkembang dan berdaya saing.

2. Tercapainya target kuota dan kualitas peserta transmigrasi sesuai dengan program yang direncanakan.
3. Terbentuknya sistem pengelolaan data yang valid dan akurat untuk koperasi, UMKM, transmigrasi, serta energi dan sumber daya mineral sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Terlaksananya koordinasi dan sinergi program lintas sektor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang koperasi, UMKM, transmigrasi, dan energi.

Sasaran dalam rencana kerja ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan program pembangunan untuk satu tahun yang telah ditentukan, yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah Indikator kinerja relevan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2026	KET
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	7%	
		Rasio Kewirausahaan Daerah	3,97%	
		Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi	38.505 Ha	
		Persentase Pemenuhan Kuota Calon Transmigran dari Kabupaten Karanganyar	100%	
	Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	4,67%	
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM	25%	
	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	2 kawasan	
	Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Persentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	52%	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	84	

3.3. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat 10 Program, 17 Kegiatan dan 33 sub kegiatan. Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan tersebut hampir mencakup seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar berupa Kegiatan Pemberian Bantuan Hibah kepada UMKM dan IKM, Pelatihan Perkoperasian, Pelatihan UMKM, Sosialisasi kepada calon transmigran dan kegiatan lainnya.
Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan tersebut adalah untuk menunjang visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 3.2 Program Tahun 2026 yang Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM	KET.
Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi koperasi simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola koperasi yang sehat dan transparan	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja keuangan dan manajemen	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan dan kewirausahaan	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya kemandirian koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya daya saing dan kemandirian UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Terlaksananya penguatan ekosistem usaha bagi UMKM melalui akses pasar, pembiayaan, dan teknologi	Persentase Usaha Mikro yang dibina	Program Pengembangan UMKM	Mendukung Visi Misi Kepala Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam mendukung ketahanan energi daerah	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	
Berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis potensi wilayah	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mendatang yaitu pada tahun 2026 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025--2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut :.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
      b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
      c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
      d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
      e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
      f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
   6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Pengadaan Mebel;
      b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
      c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
      b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
      b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
      c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
   1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

C. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
    a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

D. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

F. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

G. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
    a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro;
    b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
    c. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro;
    d. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan.

H. Program Pengembangan UMKM
1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
    1) Pengembangan Usaha Mikro.

I. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
a. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
    1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.

J. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    1) Penyuluhan Transmigrasi.

Rumuasan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 dan prakiraan maju Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Rumusan Program Kegiatan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral			***3.260.171.452***					***12.223.272.451***	
	2					***URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR***			***3.251.671.452***					***12.207.072.451***	
	2	***17***				***URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH***			***3.251.671.452***					***12.207.072.451***	
1	***2***	***17***	***01***			***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Nilai Sakip OPD***	***71 Nilai***	***2.990.730.652***				***71,50 Nilai***	***4.076.272.451***	
	2	***17***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***96 %***	***1.500.000***			***Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***96 %***	***18.590.000***	
	2	*17*	*01*	*2.01*	*00 01*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*10 Dokumen*	*1.000.000*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*10 Dokumen*	*16.590.000*	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*
	2	*17*	*01*	*2.01*	*00 07*	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Laporan*	*500.000*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*5 Laporan*	*2.000.000*	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*
	2	***17***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***96 %***	***2.416.028.252***			***Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***96 %***	***3.104.250.016***	
	2	*17*	*01*	*2.02*	*00 01*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*12 Orang/ bulan*	*2.415.028.252*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*12 Orang/ bulan*	*3.080.840.016*	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*
	2	*17*	*01*	*2.02*	*00 07*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan*	*12 Laporan*	*1.000.000*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*12 Laporan*	*23.410.000*	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	2	**17**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**96 %**	**500.000**			**Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**96 %**	**3.000.000**	
	2	17	01	2.03	00 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**96 %**	**500.000**			**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**96 %**	**3.000.000**	
	2	17	01	2.05	00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96 %**	**46.202.400**			**Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96 %**	**165.640.000**	
	2	17	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	5.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.700.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.06	00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa					ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.502.400	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	115.240.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.400.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**96 %**	**40.000.000**			**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**96 %**	**129.000.000**	
	2	17	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	34.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	45.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.07	00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	50.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96 %**	**400.500.000**			**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96 %**	**509.760.000**	
	2	17	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	500.000	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)				TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	72.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	422.760.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96 %**	**85.500.000**			**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**96 %**	**143.032.435**	
	2	17	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Unit	123.032.435	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Unit	10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2	**2**	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**13 persen**	**7.940.800**				**15 persen**	**10.000.000**	
	2	**17**	**02**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha**	**25 Unit**	**7.940.800**			**Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**40 Unit**	**10.000.000**	
	2	17	02	2.01	00 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor	20 Unit Usaha	7.940.800	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	20 Unit Usaha	10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*			*Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*UMUM (DAU)*	*Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*			*TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*
3	***2***	***17***	***03***			***PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI***	***Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota***	***32 persen***	***30.000.000***				***35 persen***	***128.400.000***	
	2	***17***	***03***	***2.01***		***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***Jumlah koperasi yang diawasi***	***50 unit***	***30.000.000***			***Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota***	***60 unit***	***128.400.000***	
	2	*17*	*03*	*2.01*	*00 04*	*Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	*50 Unit Usaha*	*30.000.000*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	*60 Unit Usaha*	*128.400.000*	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*
4	***2***	***17***	***04***			***PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI***	***Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota***	***28,80 persen***	***25.000.000***				***28,85 persen***	***35.000.000***	
	2	***17***	***04***	***2.01***		***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah KSP/USP yang dinilai yang telah dilakukan penilaian kesehatan***	***20 Unit***	***25.000.000***			***Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***	***20 Unit***	***35.000.000***	
	2	*17*	*04*	*2.01*	*00 01*	*Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*	*20 Unit Usaha*	*25.000.000*	*Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa*	*DANA ALOKASI UMUM (DAU)*	*Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya*	*20 Unit Usaha*	*35.000.000*	*DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL*

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
5	**2**	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi**	**37 persen**	**50.000.000**				**40 persen**	**1.220.000.000**	
	2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi**	**95 Orang**	**50.000.000**			**Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi**	**95 Orang**	**1.220.000.000**	
	2	17	05	2.01	00 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	95 Orang	50.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi	95 Orang	1.220.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6	**2**	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi yang Berkualitas**	**64,87 persen**	**40.000.000**				**64,90 persen**	**1.505.000.000**	
	2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset**	**50 Unit**	**40.000.000**			**Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**50 Unit**	**1.505.000.000**	
	2	17	06	2.01	00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	50 Unit Usaha	40.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha	1.505.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7	**2**	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha**	**25 persen**	**84.000.000**				**26,88 persen**	**121.400.000**	
	2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha**	**100 Unit**	**84.000.000**			**Pelaku Usaha Mikro Kecil**	**100 Unit**	**121.400.000**	
	2	17	07	2.01	00 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha	11.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha Mikro Kecil	40 Unit Usaha	20.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
	2	17	07	2.01	00 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	11.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha Mikro Kecil	30 Unit Usaha	15.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	07	2.01	00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	15 Orang	8.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha Mikro Kecil	15 Orang	10.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	2	17	07	2.01	00 15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	35 Orang	54.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha Mikro Kecil	35 Orang	76.400.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
8	**2**	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang dibina**	**10,5 persen**	**24.000.000**				**11,67 persen**	**5.111.000.000**	
	2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah usaha mikro yang dibina**	**66 Unit**	**24.000.000**			**Pelaku Usaha Mikro Kecil**	**66 Unit**	**5.111.000.000**	
	2	17	08	2.01	00 02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	66 Unit Usaha	24.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Pelaku Usaha Mikro Kecil	66 Unit Usaha	5.111.000.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**8.500.000**					**16.200.000**	
	3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**4.000.000**					**8.700.000**	
9	**3**	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**2 kawasan**	**4.000.000**				**2 kawasan**	**8.700.000**	
	3	**29**	**05**	**2.01**		**Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah potensi panas bumi yang diawasi**	**2 buah**	**4.000.000**			**Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2 buah**	**8.700.000**	
	3	29	05	2.01	00 03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	4.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.700.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**4.500.000**					**7.500.000**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
10	**3**	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**2 KK**	**4.500.000**				**2 KK**	**7.500.000**	
	3	**32**	**03**	**2.01**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah transmigran yang diberangkatkan**	**2 KK**	**4.500.000**			**Peminat Transmigrasi/ Calon Transmigran**	**2 KK**	**7.500.000**	
	3	32	03	2.01	00 05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	15 Kepala Keluarga	4.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peminat Transmigrasi/ Calon Transmigran	15 Kepala Keluarga	7.500.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	J U M L A H								**3.260.171.452**					**12.223.272.451**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, merupakan Komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam pelaksanaan telah ditetapkan Program pembangunan terhadap pencapaian sasaran anggaran kegiatan dalam periode tahunan. Dalam pencapaian sasaran tersebut diperlukan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan sektor Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penyusunan dokumen Renja ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renja menekankan pentingnya konsistensi antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan dengan Renstra Dinas dan RPJMD. Data dan informasi yang valid serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya menjadi dasar untuk menyusun Renja agar tercipta perencanaan yang realistis, terukur, dan tepat sasaran.

Renja Tahun 2026 dirancang secara partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan keterpaduan rancangan kegiatan, pembiayaan, dan indikator kinerja. Penyusunan Renja juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam perencanaan penggunaan sumber daya.

Sistematika penyusunan Renja meliputi pendahuluan, evaluasi tahun sebelumnya, penetapan tujuan dan sasaran, pemaparan program dan kegiatan prioritas, serta perencanaan pendanaan dan indikator kinerja. Penyusunan ini dilakukan secara terintegrasi dengan RKPD dan dokumen rencana lain, untuk menjamin sinergi pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah demi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memastikan rencana kerjanya mendukung optimalisasi fungsi serta misi yang diemban dalam memberdayakan koperasi, UMKM, transmigrasi, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi beberapa langkah penting yang harus dilaksanakan untuk memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan efektif dan sesuai target, yaitu antara lain :

1. Memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan koperasi, melalui pelatihan dan uji kompetensi bagi pengurus koperasi;
2. Peningkatan jiwa kewirausahaan, mengembangkan kualitas UMK, mendorong pengembangan sentra/klister industi dan pelaku usaha menuju ekonomi yang maju, mengembangkan koperasi sebagaimana prioritas nasional.

3. Melaksanakan sosialisasi kepada calon transmigran untuk mempersiapkan calon transmigran agar lebih memahami tentang transmigrasi.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, merupakan Komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam pelaksanaan telah ditetapkan Program pembangunan terhadap pencapaian sasaran anggaran kegiatan dalam periode tahunan. Dalam pencapaian sasaran tersebut diperlukan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan sektor Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5.3. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penyusunan dokumen Renja ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renja menekankan pentingnya konsistensi antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan dengan Renstra Dinas dan RPJMD. Data dan informasi yang valid serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya menjadi dasar untuk menyusun Renja agar tercipta perencanaan yang realistis, terukur, dan tepat sasaran.

Renja Tahun 2026 dirancang secara partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan keterpaduan rancangan kegiatan, pembiayaan, dan indikator kinerja. Penyusunan Renja juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam perencanaan penggunaan sumber daya.

Sistematika penyusunan Renja meliputi pendahuluan, evaluasi tahun sebelumnya, penetapan tujuan dan sasaran, pemaparan program dan kegiatan prioritas, serta perencanaan pendanaan dan indikator kinerja. Penyusunan ini dilakukan secara terintegrasi dengan RKPD dan dokumen rencana lain, untuk menjamin sinergi pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah demi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memastikan rencana kerjanya mendukung optimalisasi fungsi serta misi yang diemban dalam memberdayakan koperasi, UMKM, transmigrasi, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan

5.4. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi beberapa langkah penting yang harus dilaksanakan untuk memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan efektif dan sesuai target, yaitu antara lain :

4. Memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan koperasi, melalui pelatihan dan uji kompetensi bagi pengurus koperasi;
5. Peningkatan jiwa kewirausahaan, mengembangkan kualitas UMK, mendorong pengembangan sentra/klister industi dan pelaku usaha menuju ekonomi yang maju, mengembangkan koperasi sebagaimana prioritas nasional.

6. Melaksanakan sosialisasi kepada calon transmigran untuk mempersiapkan calon transmigran agar lebih memahami tentang transmigrasi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, merupakan Komitmen perencanaan yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolok ukur dalam pelaksanaan telah ditetapkan Program pembangunan terhadap pencapaian sasaran anggaran kegiatan dalam periode tahunan. Dalam pencapaian sasaran tersebut diperlukan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan sektor Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

5.5. Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Penyusunan dokumen Renja ini merupakan bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas.

Kaidah pelaksanaan penyusunan Renja menekankan pentingnya konsistensi antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan dengan Renstra Dinas dan RPJMD. Data dan informasi yang valid serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya menjadi dasar untuk menyusun Renja agar tercipta perencanaan yang realistis, terukur, dan tepat sasaran.

Renja Tahun 2026 dirancang secara partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan keterpaduan rancangan kegiatan, pembiayaan, dan indikator kinerja. Penyusunan Renja juga mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam perencanaan penggunaan sumber daya.

Sistematika penyusunan Renja meliputi pendahuluan, evaluasi tahun sebelumnya, penetapan tujuan dan sasaran, pemaparan program dan kegiatan prioritas, serta perencanaan pendanaan dan indikator kinerja. Penyusunan ini dilakukan secara terintegrasi dengan RKPD dan dokumen rencana lain, untuk menjamin sinergi pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah demi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan mengikuti kaidah pelaksanaan ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat memastikan rencana kerjanya mendukung optimalisasi fungsi serta misi yang diemban dalam memberdayakan koperasi, UMKM, transmigrasi, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan

5.6. Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi beberapa langkah penting yang harus dilaksanakan untuk memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan efektif dan sesuai target, yaitu antara lain :

7. Memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan koperasi, melalui pelatihan dan uji kompetensi bagi pengurus koperasi;
8. Peningkatan jiwa kewirausahaan, mengembangkan kualitas UMK, mendorong pengembangan sentra/klister industi dan pelaku usaha menuju ekonomi yang maju, mengembangkan koperasi sebagaimana prioritas nasional.

9. Melaksanakan sosialisasi kepada calon transmigran untuk mempersiapkan calon transmigran agar lebih memahami tentang transmigrasi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) ini berisi tentang Program dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik kami terima dengan tangan terbuka guna sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT membalas amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara. Amin

Karanganyar, September 2025
Kepala DPMPTSP

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800314 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.4. Sistematika Penulisan I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... II-13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-14

BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **III-1**
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaaran Renja Perangkat Daerah III-2
3.2.1. Tujuan III-2
3.2.2. Sasaran III-2
3.3. Program dan Kegiatan III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **IV-1**
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... IV-1
4.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat IV-10

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar s.d. Tahun 2024	II-2
Tabel 2. 2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II-13
Tabel 2. 3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II-15
Tabel 3. 1.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif	III-4
Tabel 4. 1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2026	IV-3
Tabel 4. 2.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu. Rencana Kerja merupakan suatu proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang teroganisir dan sistemais.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Agar pemberian pelayanan di DPMPTSP berjalan dengan baik, cepat dan efisien secara berkelanjutan maka perlu disusun suatu Rencana Kerja DPMPTSP.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan rencana kerja perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; (4) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, dokumen Renja Tahun 2026 merupakan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di DPMPTSP dalam merencanakan dan melaksanakan Program dan Kegiatan, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Selain itu dokumen Renja ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 113;
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2026, disamping itu maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 beserta rencana Anggaran Tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ Anggaran Daerah yang tersedia guna mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Adapun tujuan penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur DPMPTSP Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyusun program dan kegiatan tahunan termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP.
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karanganyar tahun 2026 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Tahun Lalu**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisi Hambatan yang dihadapi DPMPTSP

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Bab III **Tujuan, Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan DPMPTSP

Bab IV **Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Penelaahan Usulan

Bab V **Penutup**

Berisi catatan penting dan tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya realisasi program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar dapat tercapai.
2. Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar awal tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp. 6.669.656.644,- menjadi Rp. 6.819.656.644,- atau bertambah sebesar Rp. 150.000.000,-.

Dengan melihat hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan Program dan Kegiatan dari tahun 2024 tingkat capaian kinerja anggaran kegiatan sebesar 95,20 % atau Rp. 6.492.535.644,-. Sehingga capaian kinerja anggaran tahun 2024 sangat tinggi.

Berdasarkan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masih ada satu target indikator sasaran strategis yang belum tercapai dari 3 (tiga) indikator sasaran strategis yaitu : prosentase pertumbuhan nilai investasi, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kinerja di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Langkah dan solusi yang diterapkan dalam rangka perbaikan pencapaian pertumbuhan investasi, diantaranya :

1. Fasilitasi dan Pendampingan Investasi
2. Percepatan Proses Perizinan Berusaha
3. Perbaikan Iklim Investasi Daerah
4. Penguatan Promosi dan Pemasaran Investasi
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala terhadap Realisasi Investasi.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2024 disajikan dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar s.d. Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah** **Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	78		78	NA	NA	80		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokummen	12 dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	12 dolumen	12 dolumen	12 dolumen	12 dolumen	100%	12 dolumen	24 dolumen	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	100%	25 orang	25 orang	100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tuga ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 laporan	19 laporan	19 laporan	19 laporan	100%	19 Laporan	38 Laporan	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12 laporan**		**12 laporan**	**12 laporan**	**100%**	**12 laporan**	**24 laporan**	**100%**
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	75 dokumen		75 dokumen			80 dokumen		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 paket	49 paket	48 paket	47 paket	98%	60 paket	60 paket	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Penatausahaan Arsip Dinasmis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
Dukungan Pelaksaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	100%
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 unit	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana	124 unit		95 unit	95 unit	100%	124 unit	248 unit	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Lporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan**	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nn b b	2 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	60 unit	60 unit	100%
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan**	3 buah	1 buah	3 buah	-	-	3 buah	3 buah	100%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	**Jumlah pelaku Fasilitas/Insentif Penanaman Modal**	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan	100%	1 perusahaan	1 perusahaan	1 perusahaan
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**100%**	**3 kegiatan**	**3 kegiatan**	**100%**
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan**	50 kali	-	50 kali	-	-	70 kali	-	-
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan**	1165 perizinan		1165 perizinan			1.165 perizinan	1.165 perizinan	100%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusahaa Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha	720 pelaku usaha		720 pelaku usaha	720 pelaku usaha	100%	750 pelaku usaha	1470 pelaku usaha	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal*								
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	30 kegiatan usaha		30 kegiatan usaha	30 kegiatan usaha	100%	40 kegiatan usaha	70 kegiatan usaha	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha								
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Presentase Jumlah Pelaku Usaha yang Dapat Diawasi**	30%	5,5%	30%	30%	100%	30 %	30 %	100%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)**	869	160	869	869	100%	1303	2172	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	-	3 bulan	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan								
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	-	-	50 kegiatan usaha	50 kegiatan usaha	100%			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dn pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	12 pelaku usaha	-	12 pelaku usaha	12 pelaku usaha	100%	12 pelaku usaha	24 pelaku usaha	100%
Pengawasan Penamanan Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta	3 kegiatan usaha	-	3 kegiatan usaha	3 kegiatan usaha	100%	3 kegiatan usaha	6 kegiatan usaha	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha								
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi**	750	700	750	750	100%	800	1550	100%
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola**	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	4 dokumen	100%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing- masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thnn-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thnn+1	Tahun 2024 (thnn-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (tnn n)	Tahun 2027 (thnn+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Porsentase Pertumbuhan nilai Investasi			0,25	0,25	0,25	0,25	0,06	0,25	0,25	0,25	

Pertumbuhan investasi tahun 2024 mengalami penurunan capaian yang signifikan dibanding tahun 2023. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan nilai investasi yang merupakan efek transisi dari pandemi covid ke endemi, pada tahun 2023 banyak pelaku usaha khususnya mikro, kecil dan menengah besar melakukan penambahan kegiatan usaha baru atau melaksanakan kembali usaha yang sebelumnya non aktif karena pandemi covid.

Pada tahun 2024 pertumbuhan nilai investasi turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang juga turun dikarenakan penurunan ekspor, penurunan harga komoditas, pelemahan daya beli dan ketidakpastian ekonomi global.

Identifikasi faktor penyebab kegagalan capaian pertumbuhan nilai investasi sebagai berikut :

a. Penanaman Modal atau Investasi Di Kabupaten Karanganyar sebagian Besar Masih Terfokus Pada Sektor Pariwisata Dan Industri.

b. Persaingan dengan kabupaten lain dan posisi sebagai daerah penyangga Kota Surakarta
c. Ketidakpastian ekonomi global
d. Permasalahan perizinan berusaha.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi DPMPTSP dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Investasi yang masuk belum sesuai dengan potensi SDA dan SDM yang ada.
3. Peluang investasi yang ada belum bisa dikonversi menjadi investasi sektor riil.
4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan promosi penanaman modal.
5. Terbatasnya event-event promosi penanaman modal di tingkat nasional/internasional yang diikuti oleh Pemerintah Daerah.
6. Regulasi terkait Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha masih sering mengalami perubahan.
7. Belum meratanya kualitas kapasitas SDM yang menangani pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha.
8. Masih rendahnya kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sesuai ketentuan.
9. Masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
10. Belum maksimalnya sumber data yang bisa dijadikan informasi penanaman modal
11. Belum optimalnya rekonsiliasi data penanaman modal dengan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peninjauan terhadap visi-misi kepala daerah, sasaran RPJMD, maka isu strategis urusan penanaman modal di Kabupaten Karanganyar adalah **'Belum Optimalnya Realisasi Investasi'.** Pelaksanaan upaya peningkatan realisasi investasi mencakup semua upaya promosi penanaman modal, pemberian fasilitas, pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal, pemberdayaan Usaha Mikro dan koperasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Renja tahun 2026 didasarkan pada review renja tahun 2026 dengan rancangan awal RKPD. Analisa tersebut tertuang dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar					**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai SAKIP**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Nilai SAKIP**			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	8.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karanganyar,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000	

	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bln	4.009.314.957	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 orang/bln	5.236.381.226	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	75.000.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	150.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Laporan	10.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**					
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	90 dokumen	20.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	1 dokumen	3.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**					
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 paket	45.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 paket	12.000.000	

	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bangunan Kantor yang di sediakan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bangunan Kantor yang di sediakan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	70.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	183.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.336.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.660.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	125.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	229.520.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 unit	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 uniit	0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	124 unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	268.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	75.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	211.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 unit	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	20.000.000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	60.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit	44.220.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**					
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**					
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dok	49.400.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 dokumen	25.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota					**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**					
Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investas	-	-	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investas			
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	10.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**					
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	66.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	46.600.000	

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 dokumen	55.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	18.400.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**					
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	11.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	254.100.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 pelaku usaha	45.500.000	
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	92.757.500	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 pelaku usaha	25.000.000	
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	157.300.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 kegiatan usaha	30.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**					

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	12 Pelaku Usaha	301.376.150	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 pelaku usha	0	
Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3 Kegiatan Usaha	48.623.850	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3 kegiatan usaha	35.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**					
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	100.000.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karanganyar, semua kec, semua kelurahan/ desa	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 dokumen	5.000.000	
JUMLAH				**6.515.872.457**	**JUMLAH**				**7.065.417.626**	

BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*, yaitu : 1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; 2. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; 3. Pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Ekonomi biru dan ekonomi hijau; 5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 6. Transformasi digital; 7. Investasi :FDI berorientasi ekspor dan investasi non-APBN; dan 8. Belanja negara untuk produktivitas : Makan Bergizi Gratis Pembangunan 3 juta rumah, dll.

Dalam delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan RPJMN Tahun 2025–2029 tersebut, investasi sebagai penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun asing.

Kebijakan investasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencakup prinsip-prinsip dasar sektor terbuka untuk investasi, dan peran pemerintah dalam mendukung investasi domestik.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisassi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi Tahun 2025 – 2029 belum dapat kami sajikan karena masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Karanganyar adalah **"Meningkatnya nilai investasi daerah".**

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Berikut sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan legalitas perizinan berusaha.

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 kami sajikan sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   f Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

IV PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

V PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengawasan Penanaman Modal

VI PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.772.754.833,00					6.039.742.734,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.772.754.833,00					6.039.742.734,00
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.772.754.833,00					6.039.742.734,00
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	73 Nilai	5.532.254.833,00				-	5.829.742.734,00
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	23.000.000,00				-	50.000.000,00
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.103.718.433,00				-	4.218.107.834,00
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.943.718.433,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.068.107.834,00
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			135.000.000,00
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	3.000.000,00				-	10.000.000,00
	2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Orang	45.000.000,00				-	50.000.000,00
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	662.516.400,00				-	744.984.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	183.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		183.000.000,00
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.336.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			19.464.900,00
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.660.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			238.680.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	229.520.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			281.840.000,00
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	50.000.000,00				-	109.450.000,00
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			109.450.000,00
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	480.800.000,00				-	480.800.000,00
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.800.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			268.800.000,00
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	211.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			211.000.000,00
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	12 Laporan	164.220.000,00				-	166.400.000,00
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	100.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			22.000.000,00
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	44.220.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		44.400.000,00
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	3 buah	35.000.000,00				-	25.000.000,00
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	3 buah	25.000.000,00				-	15.000.000,00
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00				-	10.000.000,00
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan	3 kegiatan	65.000.000,00				-	25.000.000,00
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan	80 kali	65.000.000,00				-	25.000.000,00
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	46.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	18.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	100 %	100.500.000,00				-	80.000.000,00
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	1165 perizinan	100.500.000,00				-	80.000.000,00
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	45.500.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	29 %	35.000.000,00				-	75.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1390 perusahaan	35.000.000,00				-	75.000.000,00
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3 Kegiatan Usaha	35.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	850 unit	5.000.000,00				-	5.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	4 Dokumen	5.000.000,00				-	5.000.000,00
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
								JUMLAH	**5.772.754.833,00**					**6.039.742.734,00**

BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu *"Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"*. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita, yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan secara khusus pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Penekanan pada ketiga strategi merupakan kunci

keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*, yaitu : 1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; 2. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; 3. Pariwisata dan ekonomi kreatif; 4. Ekonomi biru dan ekonomi hijau; 5. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; 6. Transformasi digital; 7. Investasi :FDI berorientasi ekspor dan investasi non-APBN; dan 8. Belanja negara untuk produktivitas : Makan Bergizi Gratis Pembangunan 3 juta rumah, dll.

Dalam delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan RPJMN Tahun 2025–2029 tersebut, investasi sebagai penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi baik dari dalam negeri maupun asing.

Kebijakan investasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mencakup prinsip-prinsip dasar sektor terbuka untuk investasi, dan peran pemerintah dalam mendukung investasi domestik.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan suburusan pemerintahan hilirisassi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi Tahun 2025 – 2029 belum dapat kami sajikan karena masih dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Karanganyar adalah **"Meningkatnya nilai investasi daerah".**

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Berikut sasaran dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan legalitas perizinan berusaha.

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan DPMPTSP.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada DPMPTSP Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 kami sajikan sebagai berikut :

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1 Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   f Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

IV PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
b. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

V PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengawasan Penanaman Modal

VI PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			5.772.754.833,00					6.039.742.734,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.772.754.833,00					6.039.742.734,00
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.772.754.833,00					6.039.742.734,00
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	73 Nilai	5.532.254.833,00				-	5.829.742.734,00
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	7 Dokumen	23.000.000,00				-	50.000.000,00
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.103.718.433,00				-	4.218.107.834,00
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.943.718.433,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4.068.107.834,00
	2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			135.000.000,00
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	3.000.000,00				-	10.000.000,00
	2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah								
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60 Orang	45.000.000,00				-	50.000.000,00
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			50.000.000,00
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	662.516.400,00				-	744.984.900,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			12.000.000,00
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	183.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		183.000.000,00
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.336.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			19.464.900,00
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.660.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			238.680.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	229.520.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			281.840.000,00
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Unit	50.000.000,00				-	109.450.000,00
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			109.450.000,00
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	480.800.000,00				-	480.800.000,00
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1.000.000,00
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.800.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			268.800.000,00
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	211.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			211.000.000,00
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerinthan Daerah	12 Laporan	164.220.000,00				-	166.400.000,00
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	100.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			100.000.000,00
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			22.000.000,00
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	44.220.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		44.400.000,00
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	3 buah	35.000.000,00				-	25.000.000,00
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	3 buah	25.000.000,00				-	15.000.000,00
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal								
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10.000.000,00				-	10.000.000,00
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	0 Daerah	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan	3 kegiatan	65.000.000,00				-	25.000.000,00
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan	80 kali	65.000.000,00				-	25.000.000,00
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota								
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	46.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	18.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			25.000.000,00
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	100 %	100.500.000,00				-	80.000.000,00
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	1165 perizinan	100.500.000,00				-	80.000.000,00
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah								
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	45.500.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55.000.000,00
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1500 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			15.000.000,00
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko								
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			10.000.000,00
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	29 %	35.000.000,00				-	75.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1390 perusahaan	35.000.000,00				-	75.000.000,00
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha								
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			0,00
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal								
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	3 Kegiatan Usaha	35.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			75.000.000,00
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	850 unit	5.000.000,00				-	5.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun Anggaran 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	4 Dokumen	5.000.000,00				-	5.000.000,00
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik								
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			5.000.000,00
								J U M L A H	**5.772.754.833,00**					**6.039.742.734,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
   Program ini difokuskan untuk penetapan kebijakan penanaman modal serta mengidentifikasi potensi investasi yang ada didaerah. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penetapan PemberianFasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
      1) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2. **Program Promosi Penanaman Modal**
   Program ini difokuskan untuk melakukan promosi penanaman modal di kabupaten. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
      2) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**
   Program ini difokuskan untuk pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang mudah cepat dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
      1) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
      2) Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
      3) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
   Program ini difokusnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam melakukan investasi. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      1) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
      2) Pengawasan Penanaman Modal
5. **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
   Program ini di fokuskan untuk pengolahan data perizinan sehingga dapat diketahui kondisi realtimenya. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini di fokuskan untuk menyelesaikan mendukung pencapaian program lainya. Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : Hal ini dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) oordinasi dan Konsultasi SKPD
   5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Tabel 4.1.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						5.772.754.833,00								6.039.742.734,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.772.754.833,00								6.039.742.734,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						5.772.754.833,00								6.039.742.734,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	-			73 Nilai	5.532.254.833,00						-	5.829.742.734,00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	23.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	50.000.000,00	
	2	18	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	4.103.718.433,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	4.218.107.834,00	
	2	18	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3.943.718.433,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		4.068.107.834,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		135.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															

							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				19 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	3.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	10.000.000,00	
	2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			60 Orang	45.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	50.000.000,00	
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Laporan	662.516.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	744.984.900,00	
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	183.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		183.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	20.336.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		19.464.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	207.660.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		238.680.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	229.520.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		281.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Unit	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	109.450.000,00	
	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		109.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	480.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	480.800.000,00	
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	268.800.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		268.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	211.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		211.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Laporan	164.220.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	166.400.000,00	
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	100.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		22.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				60 Unit	44.220.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		44.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	-			3 buah	35.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Penanaman Modal yang Diterbitkan	-			3 buah	25.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	15.000.000,00	
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal															
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-			2 Dokumen	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	10.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)															

							Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				0 Daerah	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah promosi yang dilaksanakan	-			3 kegiatan	65.000.000,00						-	25.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi PM yang Diselenggarakan	-			80 kali	65.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	25.000.000,00	
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				0 Dokumen	46.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	18.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah pelayanan perizinan yang dikeluarkan tiap tahunnya	-			100 %	100.500.000,00						-	80.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kewenangan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu yang Dilaksanakan	-			1165 perizinan	100.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	80.000.000,00	
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah															
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik															
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	45.500.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko															

							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	000 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				40 Kegiatan Usaha	30.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	Prosentase jumlah pelaku usaha yang dapat diawasi	-			29 %	35.000.000,00						-	75.000.000,00	

	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	-			1390 perusahaan	35.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	75.000.000,00	
	2	18	05	2.01	000 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	000 6	Pengawasan Penanaman Modal														
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				3 Kegiatan Usaha	35.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		75.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah calon investor yang mengakses sistem informasi	-			850 unit	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	-			4 Dokumen	5.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-	-	5.000.000,00	
	2	18	06	2.01	000 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
											J U M L A H	**5.772.754.833,00**							**6.039.742.734,00**	

4.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil kajian terhadap usulan kelompok masyarakat melalui musrenbang Kabupaten dan hasil reses aspirasi DPRD tidak ada usulan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tabel 4.2.
Usulan Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dilingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025 - 2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanaman modal yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja DPMPTSP digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPMPTSP setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja DPMPTSP masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlunya menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan.
2. Perlunya koordinasi dan kerja sama baik internal maupun dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerja.
3. Perlunya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan urusan/bidang urusan DPMPTSP.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi dalam implementsi Rencana Kerja DPMTSP yang telah diusulkan dan ditetapkan.
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP.

Sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanan untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dan bersifat indikatif.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Lokasi Kegiatan, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.

Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

26 September 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA
DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

HARI PURNOMO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670525 198802 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1 Latar Belakang I.1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.3

1.3 Maksud dan Tujuan I.4

1.4 Sistematika Penulisan I.5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II.1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II.1

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II.22

2.3 Isu-isu Penting Pelnyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II.23

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD II.23

BAB III TUJUAN. SASARAN. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III.1

3.1 Telaah Kebijakan Nasional III.1

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III.2

3.3 Program dan Kegiatan III.3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV.1

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah IV.1

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan IV.16

BAB V PENUTUP V.1

5.1 Kesimpulan V.1

5.2 Kaidah Pelaksanaan V.1

5.3 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Rencana V.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran dan Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar..... II.3
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar II.5
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar..... II.22
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar II.24
Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 ..... IV.5
Tabel 4. 2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ..... IV.17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk mendukung ketercapaian program dan kegiatan yang direncanakan.

Menindaklanjuti pasal 65 dan 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka memastikan kesinambungan Pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kualitas kepada Masyarakat.

Adanya Pemilu serentak tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia maka berakibat pada adanya perubahan penyesuaian visi dan misi Bupati terpilih untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan tusi Disparpora. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan dokumen perencanaan turunan dari RPJMD selanjutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Hal ini dikarenakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2026 yang memuat diantaranya yaitu tujuan, sasaran dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026. Rencana kerja Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari RPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu ***"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR"***. Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang ber-integritas, berdaya saing, dan sejahtera. Begitu pula dengan misi Bupati dan Wakil Bupati nomor 1, 2 dan 5 yaitu "Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dalam olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda,

dan penyandang disabilitas" yang bersinggungan sesuai dengan tusi bidang pemuda dan olahraga. "Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian"' selaras dengan tusi bidang pariwisata. "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik" bersinggungan sesuai dengan tusi Sekretariat.

A. Pengertian

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangnayar untuk periode 1 (satu) tahun yang berisi program dan kegiatan yang disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Dalam prosesnya penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dikerjakan secara simultan/ parallel dengan penyusunan awal RPJMD

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 berdasarkan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan yaitu:

(1). Persiapan Penyusunan;
(2). Penyusunan Rancangan Awal;
(3). Penyusunan Rancangan;
(4). Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
(5). Perumusan Rancangan Akhir; dan
(6). Penetapan.

Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, maka Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, pada Pasal 4 menyebutkan Dinas membantu pelaksanaan tugas pemerintahan urusan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai pasal 5 pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memiliki fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;

4. Pelaksanaan Administrasi bidang pariwisata, pemuda dan olahraga;
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2026 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun lalu, dan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan. Yang dimaksud dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah adalah dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan adalah bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan /atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil Forum Gabungan Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah, dan disampaikan ke Baperlitbang untuk diverifikasi dan memastikan kesesuaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan rancangan RKPD Tahun 2026, serta mengacu dan selaras dengan RKPD Tahun 2026. Rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota dalam penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2026 berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Keolahragaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
12. Peraturan Bupati Karanganyar No 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Bupati Karanganyar No 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangayar Tahun 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam merancang program dan kegiatan tahun 2026 dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 serta memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang harus diselesaikan tahun 2026, selain itu menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026;
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga Tahun 2026;
3. Menjaga Konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan perangkat daerah;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Penjabaran ringkas tentang pengertian Renja, proses penyusunan Renja Disparpora, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan
Memuat penjelasan tentang pokok bahasan dalam Renja dan susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review Terhadap Rencangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

4.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB V PENUTUP

Memuat penjelasan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja tahun 2025 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang meliputi:

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Capaian kinerja program dan kegiatan

Pada tahun 2025 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar melalui APBD melaksanakan 8 Program dengan 17 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (6 kegiatan, 21 Sub Kegiatan)
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (4 Kegiatan, 7 Sub Kegiatan)
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (2 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
6. Program Pemasaran Pariwisata (1 Kegiatan, 4 sub kegiatan)
7. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (1 Kegiatan, 2 sub kegiatan)
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 Kegiatan, 1 sub kegiatan)

Dari sisi anggaran, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total anggaran sebesar Rp. 20.684.505.377,- (dua puluh milyar enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sampai dengan triwulan ke III terealisasi sebesar Rp. 9.975.011.010,(Sembilan milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta sepuluh ribu sebelas rupiah) atau sebesar 48.22%, dengan sisa anggaran Rp. 10.709.494.367,- (sepuluh milyar tujuh ratus Sembilan jita empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) atau sebesar 51,77% (Perubahan)

Sebagai tahun Kedua pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 2024-2026, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga memiliki tujuan strategis yaitu “Meningkatnya daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal, Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan, Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas

dengan semangat reformasi birokrasi" dengan didukung 3 sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. **Capaian Sasaran 1: Meningkatnya Daya Saing Perekonomian dengan Bersumber Potensi Ekonomi Lokal**
   a. Capaian sasaran 1 diukur dengan indikator pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yaitu:
      - Program Pemasaran Pariwisata;
      - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
      - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta;
      - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
   c. Target Capaian indikator sasaran pada tahun 2025 6,15% sedangkan capain indikator sasaran sampai dengan triwulan ke III mencapai 125% yakni sebesar 1.688.930.175.- Capaian ini sudah mencapai target kinerja sasaran.
2. **Capaian Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan Berkeadilan Dengan Semangat Kegotongroyongan**
   a. Capaian sasaran 2 diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:
      - Jumlah Prestasi Olahraga di regional/ nasional/ internasional,
      - Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
   b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yaitu:
      - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
      - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
      - Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
   c. Target capaian indikator Sasaran 2 tahun 2024 adalah 20 medali, sementara realisasi capaian perolehan medali seabanyak 83 medali.
3. **Capaian Sasaran 3: Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi**
   a. Capaian Sasaran Kinerja 3 diukur melalui indikator Nilai SAKIP OPD.
   b. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   c. Target Capaian Indikator Sasaran 3 pada tahun 2024 adalah 75 sementara capaian Nilai SAKIP OPD pada Tahun 2024 sebesar 74,40 dimana terjadi beberapa perubahan system penilaian pada dokumen SAKIP oleh Kemenpan-Rb. Di harapkan pada Tahun 2025 target SAKIP dapat mencapai target yang sudah di tetapkan.

Capaian Kinerja Sasaran dan Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Sedangkan Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2024-2026 tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 1 Capaian Sasaran dan Program Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

Sasaran / Program	Indikator Sasaran / Program	2022	2023		2024			2025		2026
		Real	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%Capaian	Target	Realisasi	Target
Sasaran 1: Berkembangnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase PAD Sektor Pariwisata	0.36%	0.40%	0.34%	-	-	-	-	-	
Sasaran 1: Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	-	-	-	1,2 Milyar	1,7 Milyar	113%	1,35 Milyar		1,5 Milyar
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan wisata nusantara dan mancanegara	20%	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya destinasi pariwisata yang dikembangkan	35%	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya daya tarik wisata yang dipromosikan	30%	40%	40%	100%	100%	-	100%	-	100%
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	35%	40%	40%	6%	6%	-	6%		6%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase perserta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	55%	60%	60%	20%	20%	-	25%	-	30%
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual	Persentase jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	42%	40%	40%	11%	11%	-	17%	-	17%
Sasaran 2: Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan	persentase peningkatan atlet berprestasi	30%	35%	40%	-	-	-	-	-	-
Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Jumlah total prestasi olahraga di regional/ nasional/ internasional	-	-	-	20 Medali	83 Medali	-	25 Medali	-	30 Medali
	Persentase meningkatnya	18%	30%	32%	-	-	-	-	-	-

	partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan									
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.0060%	0,0063%	0.0064%	0.58%	0,60%	-	0.60%	-	0,62%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	40%	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang terbina	34%	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana prasarana olahraga yang memadai	35%	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya partisipasi pemuda	40%	60%	60%	5%	5%	-	5%	-	5%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase meningkatnya prestasi olahraga	150%	35%	35%	100%	100%	-	100%	-	100%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase lembaga kepramukaan (kwarcab, gugus) yang aktif	40%	60%	60%	100%	100%	-	100%	-	100%
Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	68,45	78,07	-	75	74,40	-	78	-	80
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase indikator OPD (IKU) dan (IKK) yang tercapai targetnya	-	-	-	80%	-	-	85%		90%

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		80	-	-	-	-	-	-
	Presetase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	90	-	80	74,40		85	-	100&
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terwujudnya perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja SKPD**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen	-	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Disparpora		6 dokumen			100%	-	-	-
	jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi penyelenggaraan kegiatan Disparpora		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah	2 Laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianya pelayanan administrasi keuangan perkantoran**	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan dokumen keuangan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan pegawai	-	12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	-	33 orang	33 orang	100%	33 orang	33 Orang	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Vetifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan Pengujian/vetrifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terwujudnya Administrasi kepegawaian kantor**		100%				-	-	-
	Jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	33 orang	-	33 orang	33 orang	100%	33 orang	33 Orang	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas bagi pegawai		-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	-	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur		65 orang				-	-	-
	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan Perundang – undangan	50 orang	-	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi		4 orang	-	-	-	-	-	-
	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	-	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		9 jenis	-	-	-	-	-	-
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	-	1 paket	1 Paket	100%	1 paket	1 paket	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor		41 jenis	41 jenis	41 jenis	100%	-	-	-
	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor		27 jenis	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		-	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan Tersedianya jasa penggandaan Tersedianya jasa penjilidan		15 jenis	-	-	-	-	-	-
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Undang-Undang yang disediakan		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1210 Dokumen	-	-1210	1210	100%	1210 Dokumen	1210 Dokumen	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasiTerpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya arsip dinas yang rapi		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengembangan aplikasi pesona karanganyar Jumlah fasilitasi pembuatan konten digital		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tersedianya prasarana perkantoran**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	97 Unit	-	77 unit	77 unit	100%	77 Unit	77 Unit	-
Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	-	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	-
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	70 unit	-	50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	-
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		10 jenis	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Unit peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	15 Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	10 unit	-	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya pengadaan benda pos Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket		12 Bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet		12 Bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet yang terbayar	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan kantor		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang terbayar	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terwujudnya Pemeliharaan barang perkantoran**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)	28 Unit	-	28 Unit	28 Unit	100%	28 Unit	28 Unit	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan operasional		8 mobil, 10 sepeda motor	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	-	16 Unit	16 Unit	100%	16 Unit	16 Unit	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, jaringan listrik dan sanitair	2 Unit	-	2 unit	2 unit	100%	2 Unit	2 Unit	-
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar**	6%	40%	6%	6%	100%	6%	6%	100%
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Berkembangnya Destinasi Pariwisata**	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar	92 DTW	-	88 DTW	88 DTW	100%	90 DTW	90 DTW	-
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	-	1 Lokasi	1 Lokasi	100%	1 Lokasi	1 Lokasi	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terpeliharanya daya tarik wisata		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	5 unit	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	-
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan pengelolaan destinasi wisata		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi kelembagaan usaha pariwisata Jumlah peserta sosialisasi pengembangan desa wisata Jumlah peserta sosialisasi pengembangan kawasan destinasi wisata		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	-
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Usaha Pariwisata Yang terdaftar**	20 Unit	-	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	20 Unit	-
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen layanan fasilitasi pendaftaran usaha pariwisata Kabupaten/Kota	40 Dokumen	-	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	-
Penerbitan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	40 Dokumen	-	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	6 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumenn	100%	3 Dokumen	3 Dokumenn	-
Program Pemasaran Pariwisata	**Persentase daya tarik wisata yang dipromosikan**	100%	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Terwujudnya Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata	5 Jenis	-	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah baliho wisata yang terpasang Jumlah materi promosi wisata yang tersedia	-	1 paket	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan Luar Negri	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	-
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Wisata terpilih	-	10 pasang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan luar negeri	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	-
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah materi promosi pariwisata yang disediakan		1 Paket	-	-	-	-	-	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerjasama promosi pariwisata Soloraya Jumlah peserta travel dialog Jumlah peserta famtrip		12 bulan 20 orang 30 orang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	-	4 Dokumen	4 Dokumen	-
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	-
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	**Persentase Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan**	-	11%	-	-	-	-	-	-
	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	23%	-	11%	11%	100%	17%	17%	100%
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Terwujudnya sarana bagian insan kreatif**	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi	23%	-	11%	11%	100%	17%	17%	-
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	-
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas Hak Cipta dan hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta	4 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif								
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ekosistem ekonomi kreatif	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	-
	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	-
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Persentase peserta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**		100%	-	-	-	-	-	-
	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan	30%	-	20%	20%	100%	25%	25%	100%
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar**		100%	-	-	-	**-**	**-**	-
	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	5 Kegiatan	**-**	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah peserta pelatihan digitalisasi Jumlah peserta pelatihan pemandu wisata budaya	-	100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	80 orang	-	80 orang	80 orang	100%	80 orang	80 orang	-
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	80 orang	-	80 orang	80 orang	100%	80 orang	80 orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pariwisata								
Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti fasilitasi sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	15 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	-
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Data Pelaku ekonomi kreatif yang up to date Jumlah fasilitasi ekonomi kreatif Jumlah peserta festival film pendek Jumlah peserta sosialisasi pengembangan ekonomi kreatuf	-	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	-
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi kreatif yang mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	-	30 Orang	30 Orang	100%	40 Orang	40 Orang	-
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	-
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	**Persentase meningkatnya partisipasi pemuda**	-	60%	-	-	-	-	-	-
	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	5%	-	5%	5%	100%	5%	5%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota	**Meningkatnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan**	-	100%	_	_	_	-	-	-
	Jumlah pemuda yang dibina	300 orang	-	300 orang	300 orang	100%	300 orang	300 orang	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda pelopor Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan daya saingnya	10 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan daya saingnya	15 Orang	-	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	15 Orang	-
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah fasilitasi pemuda berprestasi Jumlah pendataan potensi pemuda Jumlah peserta pelatihan kompetensi pemuda Jumlah peserta sosialisasi pengembangan kepemudaan		12 Bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya melalui perlindungan Pemuda, advokasi, akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	30 orang	-	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda dan Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah pemuda yang berjasa dan/ atau Berprestasi Penerima Penghargaan	4 Orang	-	4 orang	4 orang	100%	4 orang	4 orang	-
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan Dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	200 Orang	-	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	-
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	77 Orang	-	77 Orang	77 Orang	100%	77 Orang	77 Orang	-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	**Persentase meningkatnya prestasi olahraga**	-	35%	-	-	-	-	-	-
	Persentase cabang olahraga yang dibina	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terselenggaranya kejuaraan olahraga tingkat daerah**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah kejuaraan olahraga tingkat Daerah	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-
Penyelengaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	30 Orang	-	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	-
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah atlet berprestasi**	40 Orang	-	40 Orang	40 Orang	100%-	40 Orang	40 Orang	-

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan	2 Kegiatan	-	2 Kegiataan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiataan	2 Kegiatan	-
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota yang dilakukan pembinaan dan Pengembangan	70 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	50 orang	50 orang	-
Pemberian dan Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	30 Orang	-	20 orang	20 orang	100%	25 Orang	25 Orang	-
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Terbinanya organisasi olahraga tingkat daerah**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	3 Organisasi	-	3 Organisasi	3 Organisasi	100%	3 Organisasi	3 Organisasi	-
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	**Terlaksananya Pengembangan organisasi olahraga**		12 Bulan						-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Terbinanya olahraga rekreasi**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah olahraga rekreasi yang dibina	1 Organisasi	-	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	-
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah peserta festival Lawu sport tourism Jumlah peserta penyelenggaraan kejuaraan paralayang Jumlah peserta penyelenggaraan		12 bulan	=	=	=	=	=	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lomba lari De Tjolomadoe 10K Jumlah peserta penyelenggaraan lomba Sikso Rogo								
	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan Festival Dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah fasilitasi kegiatan keolahragaan masyarakat dan pegawai		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan Festival Dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%-
Penyediaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana Olahraga (GOR RM Said, Lapangan RM Said, Stadion 45)		12 bulan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petulangan	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	**Persentase lembaga kepramukaan (Kwarcab, gugus) yang dibina**		60%					100%	-
	Persentase pramuka tingkat Kabupaten yang dibina	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Terwujudnya organisasi kepramukaan yang dikembangkan**		100%	-	-	-	-	-	-
	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	-	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	-
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah pengembangan organisasi kepramukaan		12 bulan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	1 Organisasi	-	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	-

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pelayanan kepada masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu fokus perencanaan serta pendampingan dalam hal pengembangan sektor kepariwisataan pun menjadi prioritas utama. Beragam daya tarik wisata (DTW) ada di Kabupaten Karanganyar dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Karena keindahan alam dan budaya yang luar biasa ini maka Kabupaten Karanganyar masih diminati wisatawan. Pencapaian Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.2 di atas.

Setelah periode COVID 19 yang terjadi beberapa tahun yang lalu sehingga sempat melumpuhkan sektor perekonomian di selurih dunia, perlahan kebangkitan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2025 dapat kita lihat dari capaian indikator pertumbuhan PAD sektor Pariwisata. Tahun 2025 dari target 1,35 Milyar Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan kedua capaian sebesar Rp. 1.131.110.391,- dan kemungkinan besar pada akhir tahun dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja perolehan prestasi olahraga sampai dengan triwulan kedua terealisasi sebanyak 27 medali dan sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n-2)	Tahun 2025 (thn n-1)	Tahun 2026 (thn n)	Tahun 2027 (thn n+1)	
Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata			1,2 M	1,35M	1,5 M	-	1,2M	1,13M	1,5 M	-	
Jumlah prestasi olahraga di regional/ nasional/ internasional			20	25	30	-	20	27	30	-	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			0,58%	0,60%	0,62%	-	0,58%	-	0,62%	-	
Nilai SAKIP OPD			75	78	80	-	75	-	80	-	

2.3 Isu-isu Penting Pelnyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting untuk urusan pariwisata yaitu sebagai berikut :

1) Minimnya data dan basis informasi serta sistem monitoring yang berkualitas.
2) Kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata.
3) Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas daya saing DTW sesuai standar
4) Kurangnya kolaborasi dengan masyarakat lokal, serta sinergitas lintas sektor
5) Semakin berkembanganya tantangan transformasi digital
6) Kurangnya SDM Profesional Bidang Pariwisata

Sedangkan Isu penting untuk urusan pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut :

1) Rendahnya daya saing dan partisipasi aktif pemuda, sehingga capaian prestasi pemuda belum optimal. Hal ini mengakibatkan masih terjadinya kesenjangan potensi dan hasil.
2) Masih minimnya wadah pengembangan kreativitas dan kewirausahaan pemuda berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif
3) Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kontribusi terhadap pembangunan daerah
4) Perlunya memperkuat pelaksanaan prinsip kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Disparpora
5) Kurangnya Daya saing olahraga sehingga capaian prestasi olahraga belum optimal
6) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang
7) Minimnya data dan basis informasi serta sistem monitoring yang berkualitas

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RPJMD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RPJMD dengan kebutuhan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 seperti pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				**11,103,731.8**					**12,214,105.0**	
Urusan Pemerintahan Pilihan				**5,518,731.6**	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**6,070,585.2**	
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				**5,518,731,6**	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**				**6,070,585.2**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Nilai SAKIP OPD**	**76**	**5.047.865.8**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Nilai SAKIP OPD**	**76**	**5,552,652.4**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 Dokumen**	**14.460.0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**7 Dokumen**	15,906.0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	11,000.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	12,100.0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2,500.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2,750.0	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	960.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1,056.0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**12 dokumen**	**3,484,652.3**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	**12 dokumen**	**3,833,117.6**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	3,482,652.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/Bulan	3,833,117.6	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,000.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1,100.0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1,000.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1,100.0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**33 Orang/bulan**	**0.0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**33 Orang/bulan**	**0.0**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0.0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0.0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0.0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0.0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0.0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 orang	0.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**	**12 Dokumen**	**189,122.5**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**	**12 Dokumen**	**208,034.7**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3,479.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	3,826.9	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	9,660.5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	10,626.5	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	5,987.0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	6,585.7	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	2,500.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	2,750.0	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	8,500.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Karanganyar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	9,350.0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1210 Dokumen	21,380.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1210 Dokumen	23,518.0	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1,500.0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1,650.0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ka Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	125,116.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	137,627.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2,000.0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2,200.0	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9,000.0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9,900.0	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**97 Unit**	**0.0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**	**97 Unit**	**0.0**	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0.0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	0 unit	0.0	
Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar	jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0.0	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar	jumlah paket mebel yang disediakan	0 unit	0.0	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	0.0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 Unit	0.0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 Unit	0.0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Unit	0.0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**1,189,185.0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**	**12 Bulan**	**1,308,103.5**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2 Laporan	1,080.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	12 Laporan	1,188.0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	255,200.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet yang terbayar	12 Laporan	280,720.0	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	14,935.0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	16,428.5	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	917,970.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang terbayar	12 Laporan	1,009,767.0	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**28 Unit**	**170,446.0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**	**28 Unit**	**187,490.6**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	152,446.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	167,690.6	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	0.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	0.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18,000.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara, jaringan listrik dan sanitair	2 Unit	19,800.0	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		**Jumlah tamu wisatawan**	**5.850.000 0rang**	**350,866.0**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Karanganyar**	**5.850.000 0rang**	**385,952.6**	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota		**Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar**	**92 DTW**	**316,866.0**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota**		**Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar**	**92 DTW**	**348,552.6**	
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0.0	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	0 Dokumen	0.0	
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	10 Lokasi	0.0	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	10 Lokasi	0.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	10 Unit	103,093.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	10 Unit	113,402.7	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Laporan	8,000.0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Laporan	8,800.0	
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Lokasi	0.0	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar		10 Lokasi	0.0	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	5 Laporan	205,772.6	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	5 Laporan	226,294.8	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**	**20 Unit**	**34,000.0**	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**	**20 Unit**	**37,400.0**	
Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang tersertifikasi CHSE (berdasarakan Permenpar NO 13 tahun 2020 dan SNI 9042-2021) dalam melaksanakan standar CHSE di Kab/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan di awasi	0 Usaha Pariwisata	34,000.0	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang tersertifikasi CHSE (berdasarakan Permenpar NO 13 tahun 2020 dan SNI 9042-2021) dalam melaksanakan standar CHSE di Kab/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan di awasi	0 Usaha Pariwisata	37,400.04	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kab Karanganyar	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	20 Usaha	0.0	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Kab Karanganyar	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	20 Usaha	0.0	
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	0 Dokumen	0.0	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	0 Dokumen	0.0	
Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kab Karanganyar	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	0 Usaha	0.0	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Kab Karanganyar	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	0 Usaha	0.0	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**Tingkat hunian akomodasi**	**31,58%**	**105,000.0**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Tingkat hunian akomodasi**	**31,58%**	**115,500.0**	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata**	**5 Jenis**	**105,000.0**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata**	**5 Jenis**	**115,500.0**	
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	20,000.0	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	22,000.0	
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	85,000.0	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen	93,500.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	0.0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	2 Dokumen	0.0	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	0.0	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	0.0	
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	3 promosi	0.0	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	0.0	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI	77 Usaha Pariwisata	**0.0**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI	77 Usaha Pariwisata	**0.0**	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi**	**23%**	**0.0**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi**	**23%**	**0.0**	
Penyediaan Infrastruktur	Kab Karanganyar	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang tersedia	1 Unit	0.0	Penyediaan Infrastruktur	Kab Karanganyar	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang tersedia	1 Unit	0.0	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	2 Laporan	0.0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	3 Produk	0.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kab Karanganyar	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	4 produk	0.0	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Kab Karanganyar	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	4 produk	0.0	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**	**6,34%**	**15,000.0**	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**		**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**	**6,34%**	**16,500.0**	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		**Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**	**5 Kegiatan**	**15,000.0**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**	**5 Kegiatan**	**16,500.0**	
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 laporan	15,000.0	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	4 laporan	16,500.0	
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	0.0	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	0.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab Karanganyar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	160 Orang	0.0	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Kab Karanganyar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	160 Orang	0.0	
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidnag Pariwisata	Kab Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	15 orang	0.0	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidnag Pariwisata	Kab Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	15 orang	0.0	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0.0	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 Laporan	0.0	
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga				**5,585,000.0**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga**				**6,143,500.0**	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		**Tingkat partisipasi pemuda dalam Kegiatan ekonomi mandiri**	**0,65%**	**38,000.0**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**		**Persentase partisipasi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**5%**	**41,800.0**	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota		**Jumlah organisasi Pemuda yang dibina**	**300 Orang**	**38,000.0**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/kota**		**Jumlah Pemuda yang dibina**	**300 Orang**	41,800.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	0.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	20 Orang	0.0	
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kab Karanganyar	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	6 Orang	0.0	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Kab Karanganyar	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	6 Orang	0.0	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	11 Kegiatan	0.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	11 Kegiatan	0.0	
Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	120 Orang	38,000.0	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	120 Orang	41,800.0	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	10 Orang	0.0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	10 Orang	0.0	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan		**Persentase Cabang Olahraga yang dibina**	**100%**	**4,797,000.0**	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**		**Persentase Cabang Olahraga yang dibina**	**100%**	**5,276,700.0**	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah**	**1 Kegiatan**	**0.0**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah**	**1 Kegiatan**	**0.0**	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	**0.0**	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	**0.0**	
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kab. Karanganyar	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	30 Orang	0.0	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Kab. Karanganyar	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	30 Orang	0.0	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		**Jumlah Atlet Berprestasi**	**40 orang**	**0.0**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah Atlet Berprestasi**	**40 orang**	**0.0**	
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kab Karanganyar	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	0.0	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Kab Karanganyar	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	0.0	
Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab Karanganyar	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	0.0	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab Karanganyar	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	2 Pelatda	0.0	
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab Karanganyar	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	70 orang	0.0	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab Karanganyar	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	70 orang	0.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	0.0	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kab Karanganyar	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	1 Dokumen	0.0	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		**Jumlah organisasi olahraga yang dibina**	**3 Organisasi**	**4,400,000.0**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**		**Jumlah organisasi olahraga yang dibina**	**3 Organisasi**	**4,840,000.0**	
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4,400,000.0	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	4,840,000.0	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				**397,000.0**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				436,700,0	
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	342,000.0	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	2 Laporan	376,200.0	
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 laporan	0.0	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab Karanganyar	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	3 laporan	0.0	
Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kab Karanganyar	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	55,000.0	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kab Karanganyar	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	60,500.0	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasiona	Kab Karanganyar	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	0.0	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasiona	Kab Karanganyar	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Lembaga	0.0	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		**presentase organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan**	**100%**	**750,000.0**	**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**		**presentase organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan**	**100%**	**825,000.0**	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**750,000.0**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**825,000.0**	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	750 ,000.0	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	825,000.0	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui peningkatan partisipasi, pembinaan karakter, pembudayaan olahraga, serta pengembangan industri olahraga.

Sementara itu, kebijakan nasional di bidang pariwisata menekankan pada pengembangan destinasi dan produk wisata yang berkelanjutan, inklusif, serta berbasis masyarakat dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan ini menuntut daerah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, inovasi promosi, dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan kepariwisataan.

Dengan demikian, RENJA Disparpora Tahun 2026 disusun untuk menjamin sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, melalui penetapan sasaran strategis di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga yang mendukung pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan generasi muda dalam pembangunan daerah.

Visi dan Misi terkait pariwisata dan ekonomi kreatif termuat dalam Renstra Perubahan Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Visi Kemenparekraf/Baparekraf adalah “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yaitu :

1) Peningkatan kualitas manusia;
2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6) Penegakkan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
8) Sinergi pemerintah daerah dalam negara kesatuan.

Berdasarkan visi misi Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024, berikut ini adalah tujuan Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu “Meningkatnya kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional”.

Kemudian, Visi yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia periode 2020-2024 mengacu pada visi dan misi dari Presiden yaitu “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, professional, inovatif dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional;
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Rumusan tujuan Kementrian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila.
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
3. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, RENJA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diarahkan untuk:

a. Memprioritaskan pembinaan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing, melalui program-program kepemudaan yang mendukung kreativitas, kemandirian dan kepeloporan.
b. Mengembangkan budaya olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat dan meningkatkan prestasi lokal menuju level provinsi/nasional dengan fasilitas dan peluang yang lebih baik.
c. Mengoptimalkan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah dengan mengedepankan karakteristik lokal Kabupaten Karanganyar, menguatkan daya saing destinasi, pelaku ekonomi kreatif dan pemberdayaan komunitas lokal.
d. Mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, masyarakat dan budaya, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat.
e. Menjamin tata kelola yang bersih, profesional dan efektif di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, serta memastikan program dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga tahun 2026. Tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Rencana Strategis 2025-2029

adalah **“Meningkatnya kualitas daya saing Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”.**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Berkembangnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi pemuda serta olahraga.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2026 sebagai tahun peralihan kepemimpinan pemerintah daerah yang akan digunakan oleh Bupati Kepala Daerah terpilih sebagai arah, panduan, serta pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sebagai daya dukung dalam meningkatkan keberhasilan kemajuan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari 8 Program, 18 Kegiatan dan 71 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (7 Kegiatan, 30 Sub Kegiatan)
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (2 Kegiatan, 10 Sub Kegiatan)
3. Program Pemasaran Pariwisata (1 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (1 Kegiatan, 5 Sub Kegiatan)
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (4 Kegiatan, 11 Sub Kegiatan)
8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan)

Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan bidang pariwisata pemuda dan olahraga sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar.

Pada tahun 2026, terjadi beberapa perubahan Kegiatan dan sub kegiatan di beberapa Program. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pada perubahan nomenklatur sesuai dengan Kepmendagri nomor 900.1-2850 Tahun 2025 .

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2026 tersebar di hampir seluruh Daerah di Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan peningkatan destinasi pariwisata sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar tahun 2026-2045. Dan memperhatikan pengembangan kompetensi dan kepemimpinan pemuda dan fasilitasi olahraga untuk masyarakat serta peningkatan prestasi pemuda dan olahraga di tingkat regional / nasional / internasional.

Dalam Rancangan RKPD Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.103.731.891,- (sebelas milyar seratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah). Dengan rincian Bidang Pemuda dan Olahraga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan Hibah kepada organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan sebesar Rp 5.450.000.000 (lima milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) program dan kegiatan untuk mendukung arah dan kebijakan daerah serta prioritas daerah di tahun kedua (2026) yaitu:

- sebagai perwujudan kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan peran wirausaha muda mandiri dalam menumbuhkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan;
- peningkatan capaian prestasi olahraga prestasi dan olahraga rekreasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

Sedangkan alokasi anggaran untuk bidang Pariwisata sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah). Program dan Kegiatan difokuskan pada perencanaan pengelolaan pengembangan industri pariwisata dan penguatan SDM pariwisata dalam rangka percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan destinasi pariwisata yang mendukung arah dan kebijakan daerah *Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing SDM dalam Mendukung Pangan Nasional* (periode tahun 1 RPJMD Tahun 2025-2029) yaitu :

- Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi, yang di fokuskan pada :
  - meningkatkan pariwisata yang berintegritas, destinasi wisata yang menarik dan kolaborasi event dalam mendorong kunjungan.
- Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1).

I. URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
   3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan
   2) Pengadaan Mebel
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten Kota
   1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota
   2) Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
   3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota
   4) Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/ Kota
   5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi pemuda pelopor Tingkat Kabupaten/ Kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota
   2) Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
   1) Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga
   2) Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi keolahragaan (Sport Science)
   3) Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota
   4) Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota

c. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
   1) Peningkatan kerja sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait

d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
   1) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
   2) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan, dan Petualangan

2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahrag rekreasi Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengembangan dan Pengawasan
3) Pemassalan Olahraga dan Penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang Berjenjang dan Berkelanjutan pada Tingkat daerah, nasional, dan Internasional

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
   1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
   2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

a. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
   2) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   3) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   5) Penerapan Destinasi Pariwisita Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
   6) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
b. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota
   1) Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab/Kota
   2) Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota
   3) Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota
   4) Sertifikasi Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (tanpa verifikasi)

2. Program Pemasaran Pariwisata

a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
   1) Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negri
   2) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
   3) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   4) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
   5) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
   1) Penyediaan Infrastruktur
   2) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
   3) Fasilitasi Kekayaan Intelektual

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
   1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
   2) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
   3) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
   4) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
   5) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Gambaran pendanaan dan pagu indikatif Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang menjadi acuan perencanaan anggaran tercantum dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2026

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				**11,103,731,891**				**19,437,015.,877**
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**5,518,731,891**				9,689,095,877
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**5,518,731,891**				9,689,095,877
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP OPD**		**76 Nilai**	**5,047,865,891**			**76 Nilai**	5,276,655,877
3	**26**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**7 Dokumen**	**14,460,000**			**7 Dokumen**	**40,000,000**
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Karanganyar	6 dokumen	11,000,000	APBD		6 dokumen	20,000,000
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	4 Laporan	2,500,000	APBD		4 Laporan	5,000,000
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	2 Laporan	960,000	APBD		2 Laporan	15,000,000
3	**26**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan dokumen keuangan**	Kab. Karanganyar	**12 dokumen**	**3,484,652,391**			**12 dokumen**	**3,859,275,877**
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	27 Orang/Bulan	3,484,652,391	APBD		27 Orang/Bulan	3,850,275,877

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	12 Dokumen	1,000,000	APBD		12 Dokumen	4,000,000
3	26	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Karanganyar	4 Laporan	1,000,000	APBD		4 Laporan	5,000,000
3	**26**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**jumlah pegawai yang tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**33 Orang/bulan**	**0.0**			**33 Orang/bulan**	**15,000,000**
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Karanganyar	0 Paket	0.0	APBD		0 Paket	0.0
3	26	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar, Jawa, Bali	0 orang	0.0	APBD		0 orang	0.0
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	0 orang	0.0	APBD		0 orang	15,000,000
3	**26**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan administrasi Umum OPD yang dipenuhi**		**12 Dokumen**	**189,122,500**			**12 Dokumen**	**446,380,000**
3	26	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Karanganyar	1 Paket	3,479,000	APBD		1 Paket	6,000,000
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Karanganyar	1 Paket	9,660,500	APBD		1 Paket	15,000,000
3	26	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Karanganyar	1 Paket	5,987,000	APBD		1 Paket	15,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Karanganyar	1 Paket	2,500,000	APBD		1 Paket	12,000,000
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Karanganyar	1 Paket	8,500,000	APBD		1 Paket	25,000,000
3	26	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Karanganyar	1210 Dokumen	21,380,000	APBD		1210 Dokumen	52,380,000
3	26	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	2 Laporan	1,500,000	APBD		2 Laporan	10,000,000
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Karanganyar, Soloraya, Jateng/DIY, Jatim, Jabar, Luar Jawa	12 Laporan	125,116,000	APBD		12 Laporan	310,000,000
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	2 Dokumen	2,000,000	APBD		2 Dokumen	6,000,000
3	26	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	2 Dokumen	9,000,000	APBD		2 Dokumen	15,000,000
3	**26**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja**		**97 Unit**	**0**			**97 Unit**	**45,000,000**
3	26	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Karanganyar	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
3	26	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Karanganyar	0 unit	0	APBD		0 unit	0
3	26	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab. Karanganyar	15 Unit	0	APBD		15 Unit	45,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Karanganyar	0 Unit	0	APBD		0 Unit	0
3	**26**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan**		**12 Bulan**	**1,189,185,000**			**12 Bulan**	**596,000,000**
3	26	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar	2 Laporan	1,080,000	APBD		2 Laporan	6,000,000
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Karanganyar	12 Laporan	255,200,000	APBD		12 Laporan	265,000,000
3	26	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Karanganyar	2 Laporan	14,935,000	APBD		2 Laporan	30,000,000
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	Kab. Karanganyar	12 Laporan	917,970,000	APBD		12 Laporan	295,000,000
3	**26**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara (diservis)**		**28 Unit**	**170,446,000**			**28 Unit**	**255,000,000**
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Karanganyar	16 Unit	152,446,000	APBD		16 Unit	225,000,000
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Karanganyar	10 Unit	0	APBD		10 Unit	5,000,000
3	26	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Karanganyar	2 Unit	10,000,000	APBD		2 Unit	25,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah tamu wisatawan**		**5.850.000 orang**	**350,866,000**			**6.850.000 orang**	**1,354,640,000**
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota**	**Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Karanganyar**		**92 DTW**	**316,866,000**			**92 DTW**	**1,304,640,000**
3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab Karanganyar	0 Dokumen	0	APBD		0 Dokumen	0
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Kab Karanganyar	10 Lokasi	0	APBD		10 Lokasi	71,300,000
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana/ prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang tersedia dan terpelihara	Kab Karanganyar	10 Unit	103,093,400	APBD		10 Unit	150,000,000
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Karanganyar, Soloraya, Jateng/DIY, DKI/Jabar/Jatim	2 Laporan	8,000,000	APBD		2 Laporan	100,000,000
3	26	2	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	10 Lokasi	0	APBD		10 Lokasi	40,000,000
3	26	2	2.03	10	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi Pariwisata, Kabupaten/ Kota	Kab Karanganyar	5 Laporan	205,722,600	APBD		5 Laporan	943,340,000
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha Pariwisata yang terdaftar**		**20 Unit**	**34,000,000**			**20 Unit**	**50,000,000**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	2	2.04	6	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawas	Kab Karanganyar	0 Usaha Pariwisata	34,000,000	APBD		0 Usaha Pariwisata	0
3	26	2	2.04	8	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Kab Karanganyar	20 Usaha	0	APBD		20 Usaha	50,000,000
3	26	2	2.04	9	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Kab Karanganyar	0 dokumen	0	APBD		0 dokumen	0
3	26	2	2.04	10	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Kab Karanganyar	0 Usaha	0	APBD		0 Usaha	0
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Tingkat hunian akomodasi**		**31,58%**	**105,000,000**			**31,58%**	**772,800,000**
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana prasarana promosi destinasi wisata**		**5 Jenis**	**105,000,000**			**5 Jenis**	**772,800,000**
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar	3 Dokumen	20,000,000	APBD		3 Dokumen	137,500,000
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen kerjasama dan kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Karanganyar, Soloraya, Jateng/DIY, DKI/Jabar/Jatim	4 Dokumen	85,000,000	APBD		4 Dokumen	187,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	26	3	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Kab Karanganyar	2 Dokumen	0	APBD		2 Dokumen	25,000,000
3	26	3	2.01	6	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri	Kab Karanganyar	4 Kegiatan	0	APBD		4 Kegiatan	278,300,000
3	26	3	2.01	7	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik Dalam dan Luar Negeri	Jateng/DIY	3 Promosi	0	APBD		3 Promosi	145,000,000
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**jumlah usaha ekonomi kreatif yang terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HK**		**77 Usaha Pariwisata**	**0**			**77 Usaha Pariwisata**	**890,000,000**
3	**26**	**4**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase subsektor ekonomi kreatif yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**		**23%**	**0**			**23%**	**890,000,000**
3	26	4	2.02	4	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur ekonomi kreatif yang tersedia	Kab Karanganyar	1 Unit	0	APBD		1 Unit	450,000,000
3	26	4	2.02	20	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kab Karanganyar	2 laporan	0	APBD		2 laporan	110,000,000
3	26	4	2.02	22	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku	Kab Karanganyar	4 produk	0	APBD		4 produk	330,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						Ekonomi Kreatif							
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan**		**6,34%**	**15,000,000**			**6,34%**	**1,395,000,000**
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif**		**5 Kegiatan**	**15,000,000**			**5 Kegiatan**	**1,395,000,000**
3	**26**	**5**	**2.01**	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	4 laporan	15,000,000	APBD		4 laporan	220,000,000
3	**26**	**5**	**2.01**	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreati	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab Karanganyar	50 0rang	0	APBD		50 0rang	250,000,000
3	**26**	**5**	**2.01**	8	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKN	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kab Karanganyar	160 Orang	0	APBD		160 Orang	550,000,000
3	**26**	**5**	**2.01**	10	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kab Karanganyar	15 Orang	0	APBD		15 Orang	275,000,000
3	**26**	**5**	**2.01**	11	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatiff	Kab Karanganyar	2 laporan	0	APBD		2 laporan	100,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5,585,000,000**				9,747,920,000
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**5,585,000,000**				9,747,920,000
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**		**0,66%**	**38,000,000**			**0,66%**	**815,000,000**
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah organisasi Pemuda yang dibina**		**300 Orang**	**38,000,000**			**300 Orang**	**815,000,000**
2	19	2	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kab Karanganyar	20 Orang	0	APBD		20 Orang	180,000,000
2	19	2	2.01	12	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Kab Karanganyar	6 Orang	0	APBD		6 Orang	85,000,000
2	19	2	2.01	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kab Karanganyar	11 Kegiatan	0	APBD		11 Kegiatan	120,000,000
2	19	2	2.01	14	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Kab Karanganyar	120 Orang	38,000,000	APBD		120 Orang	350,000,000
2	19	2	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kab Karanganyar	10 Orang	0	APBD		10 Orang	80,000,000

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Cabang Olahraga yang dibina**		**100%**	**4,797,000,000**			**100%**	**7,932,920,000**
2	**19**	**3**	**2.02**		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah		1 Kegiatan	0			**1 Kegiatan**	**765,000,000**
2	19	3	2.02	4	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	3 Kegiatan	0	APBD		3 Kegiatan	600,000,000
2	19	3	2.02	6	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kab Karanganyar, Jateng/DIY	30 Orang	0	APBD		30 Orang	165,000,000
2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah Atlet Berprestasi**		**40 orang**	**0**			**40 orang**	**690,000,000**
2	19	3	2.03	7	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Kab Karanganyar	30 Orang	0	APBD		30 Orang	220,000,000
2	19	3	2.03	8	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Kab Karanganyar	2 Pelatda	0	APBD		2 Pelatda	200,000,000
2	19	3	2.03	9	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Kab Karanganyar	70 orang	0	APBD		70 orang	220,000,000
2	19	3	2.03	10	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Kab Karanganyar	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	50,000,000
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**jumlah organisasi olahraga yang dibina**		**3 Organisasi**	**4,400,000,000**			**3 Organisasi**	**4,000,000,000**

KODE					Urusan/ bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2027 (Rp)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	19	3	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab Karanganyar	3 Dokumen	4,400,000,000	APBD		3 Dokumen	4,000,000,000
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**			**-**	**397,000,000**			**-**	**2,477,920,000**
2	19	3	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	2 Laporan	342,000,000	APBD		2 Laporan	750,000,000
2	19	3	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab Karanganyar	3 laporan	0	APBD		3 laporan	250,000,000
2	19	3	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kab Karanganyar	3 unit	55,000,000	APBD		3 unit	1,150,000,000
2	19	3	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab Karanganyar	2 lembaga	0	APBD		2 lembaga	327,920,000
2	**19**	**4**			**Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**presentase organisasi pramuka yang terlibat dalam pembangunan**		**100%**	**750,000,000**			**100%**	**1,000,000,000**
2	**19**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina**		**1 Organisasi**	**750,000,000**			**1 Organisasi**	**1,000,000,000**
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Kab Karanganyar, Jateng/DIY	1 Organisasi	750,000,000	APBD		1 Organisasi	1,000,000,000

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Bagian Kesatu pasal 7 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis atas-bawah dan bawah-atas. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum ini membahas rancangan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan untuk menajamkan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas serta menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pembahasan yang dilakukan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, menajamkan indikator dan target kinerja indikator program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar disusun dalam pembahasan Forum Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak – pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait bidang pariwisata, pemuda dan olahraga tentunya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan teknis yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, hal ini menyebabkan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan bidang pariwisata pemuda dan olahraga dari masyarakat untuk Tahun 2026.

4.2.1 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Pemangku Kepentingan

Berdasarkan hasil reses para pemangku kepentingan, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebanyak 36 usulan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, dan ada 1 usulan yang bukan tugas dan fungsi dari Disparpora. Sehingga jumlah usulan yang

bisa terakomodir oleh Disparpora adalah 35 usulan. Usulan Program dan Kegiatan tersebut sebagaimana pada tabel 4.2:

Tabel 4. 2 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		
	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/ kota yang haknya terpenuhi	11 Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		Cakupan Pembinaan Olahraga		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kab. Karanganyar	Jumlah organisasi olahraga yang di bina	5 Kegiatan	Bidang Pemuda dan Olahraga
3	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		jumlah tamu wisatawan		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Persentase Destinasi Pariwisata Dalam Kondisi Baik	14 Kegiatan	Destinasi Wisata
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibina/ dilatih keterampilan		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Karanganyar	Jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi	3 Kegiatan	Pemasaran Pariwisata
5	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		Tingkat Hunian Akomodasi		
	Pemasaran PariwisataDalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana Prasarana Promosi Destinasi Wisata	2 Kegiatan	Pemasaran Pariwisata

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dilingkup Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam RPD tahun 2024 – 2026 dan sebagai penjabaran dari RKPD Tahun 2026.

Penyusunan RENJA ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta menjadi acuan dalam pengalokasian sumber daya yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan pelaksanaan RENJA Tahun 2026 diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas kepariwisataan daerah, pengembangan potensi kepemudaan, serta peningkatan prestasi dan partisipasi masyarakat dalam bidang olahraga. RENJA ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, sekaligus menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja tahunan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan yang diemban oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja. Semoga Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RENJA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, partisipatif, serta berorientasi hasil. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 5 (lima) tahunan dan RKPD 1(satu) tahunan.

Dalam pelaksanaannya, seluruh bidang dan unit pelaksana teknis di lingkungan Disparpora wajib menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan memperhatikan sinergitas lintas bidang serta (sektoral maupun lintas sektoral) keterlibatan para pemangku kepentingan.

5.3 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Disparpora Tahun 2026 dilaksanakan secara berkala untuk menjamin tercapainya sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam perjanjian kinerja. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar melalui:

a. Pengendalian Rencana dilakukan melalui mekanisme monitoring dan pelaporan secara triwulan oleh masing-masing bidang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dengan menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan;
b. Evaluasi Rencana dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKjIP) serta perencanaan tahun berikutnya;
c. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan kebijakan, perbaikan perencanaan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada periode penyusunan rancangan dan pelaksanaan anggaran selanjutnya.
d. Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, diharapkan pelaksanaan RENJA Tahun 2026 dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

5.3 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Disparpora Tahun 2026 dilaksanakan secara berkala untuk menjamin tercapainya sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam perjanjian kinerja. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar melalui:

e. Pengendalian Rencana dilakukan melalui mekanisme monitoring dan pelaporan secara triwulan oleh masing-masing bidang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dengan menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan;
f. Evaluasi Rencana dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKjIP) serta perencanaan tahun berikutnya;
g. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan kebijakan, perbaikan perencanaan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada periode penyusunan rancangan dan pelaksanaan anggaran selanjutnya.
h. Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, diharapkan pelaksanaan RENJA Tahun 2026 dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

5.3 Kaidah Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENJA Disparpora Tahun 2026 dilaksanakan secara berkala untuk menjamin tercapainya sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam perjanjian kinerja. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar melalui:

i. Pengendalian Rencana dilakukan melalui mekanisme monitoring dan pelaporan secara triwulan oleh masing-masing bidang terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, dengan menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan;
j. Evaluasi Rencana dilakukan dengan mengukur capaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan (LKjIP) serta perencanaan tahun berikutnya;
k. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan umpan balik (feedback) untuk penyempurnaan kebijakan, perbaikan perencanaan, dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pada periode penyusunan rancangan dan pelaksanaan anggaran selanjutnya.
l. Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, diharapkan pelaksanaan RENJA Tahun 2026 dapat berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

BAB I PENDAHULUAN I-1
A. LATAR BELAKANG I-1
B. LANDASAN HUKUM I-1
C. MAKSUD DAN TUJUAN I-3
D. SISTEMATIKA PENULISAN I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 ..... II-1
A. EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN TAHUN 2026 SERTA CAPAIAN TAHUN 2025-2029 ..... II-1
a. Evaluasi Anggaran II-1
b. Evaliasi Kinerja II-6
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISARPUS II-15
C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISARPUS II-17
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD II-17
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT..... II-26

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
A. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH IV-1
B. DANA INDIKATIF IV-2
C. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN IV-2
D. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH IV-56

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja dengan APBD Penetapan 2025.....	II-1
Tabel 2.2	Realisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar	II-3
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....	II-5
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelakasanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan.....	II-6
Tabel 2.5	Hasil Capaian IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 dan 2025.....	II-15
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 dan tahun 2025.....	II-16
Tabel 2.7	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.....	II-18
Tabel 2.8	Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	II-26
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	III-6
Tabel 3.2	Tantangan dan Peluang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.....	III-7
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tahun 2026.....	III-9
Tabel 3.4	Keselarasan Sasaran dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	III-10
Tabel 4.1	Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-1
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.....	IV-3
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupten Karanganyar.....	IV-56
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupten Karanganyar.....	IV-56
Tabel 4.5	Program, Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Tahun 2026.....	IV-57

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang telah disusun untuk masa 5 (*lima*) tahun tersebut, Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2026. Kami berharap Rencana Kerja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Rencana Kerja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, September 2025
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NURHAYATI, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731001 199311 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen Rencana Kerja (Renja) tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan untuk perencanaan pembangunan.

Setiap Perangkat Daerah akan berupaya untuk menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah tingkat keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki kewajiban untuk menyusun Renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyelenggaraan urusan dan perpustakaan dan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar menggambarkan bagaimana setiap pekerjaan akan direncanakan, sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap pekerjaan yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program dan kegiatan. Renja juga merupakan komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar terhadap kebutuhan nyata

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar telah melakukan penyusunan Renja Tahun 2026 yang berisi kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD tahun 2026, yang bersumber dari APBD Kabupaten Karanganyar

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah :
   1. Memenuhi Amanat Undang – undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
   2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang perpustakaan dan kearsipan;
   3. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan di bidang perpustakaan dan kearsipan di Tahun 2026;
   4. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

b. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 2026 untuk:
   1. Menyediakan Data dan Informasi di bidang perpustakaan dan kearsipan yang akurat;
   2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
   3. Meningkatkan perencanaan pembangunan secara holistik dan integratif.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 2026 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029 Tahun Pertama (2025)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN dan SASARAN DISARPUS

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dalam satu tahun kedepan Disarpus Kabupaten Karanganyar.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di Disarpus Kabupaten Karanganyar.

BAB V. PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Disarpus Kabupaten Karanganyar.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.

Demikian juga rencana kerja perangkat Daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan. Pada evaluasi RKPD Tahun 2025 ini memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan sesuai hasil evaluasi Program kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2025 dan perkiraan pencapaian tahun 2025.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2025 mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 6.287.995.852,00** yang terdiri dari:

a.	Belanja Pegawai	Rp.	3.730.045.342,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	2.354.693.010,00
c.	Belanja Modal :		
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	92.417.500,00
	2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	110.800.000,00
	TOTAL	**Rp.**	**6.287.995.852,00**

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Pada Tahun 2024 dan 2025 DISARPUS telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
PERSANDINGAN ALOKASI DANA RENJA PERUBAHAN DENGAN APBD PERUBAHAN 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	4.860.176.819	4.890.176.819	100,52	4.496.984.352	4.710.296.352	105%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.076.000	8.076.000	100	5.380.000	7.880.000	146%
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.996.000	2.996.000	100	2.900.000	2.900.000	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.480.000	2.480.000	100	2.480.000	2.480.000	100%
3)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000	100	2.500.000	2.500.000	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.525.948.304	3.525.948.304	100	3.622.495.342	3.734.995.342	103%
4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.520.498.304	3.520.498.304	100	3.620.045.342	3.730.045.342	122%
5)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	100	2.450.000	2.450.000	100%
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuang an Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	100	2.500.000	2.500.000	100%
3.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	243.262.515	243.262.515	100	108.243.010	109.067.010	101%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	13.026.500	13.026.500	100	13.011.750	11.791.750	91%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.749.750	10.749.750	100	5.194.050	5.196.050	100%
9)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.185.765	4.185.765	-	3.881.810	3.881.810	100%
10)	Penyediaan bahan logistrik kantor	2.455.000	2.455.000	100	2.375.000	2.375.000	100%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.900.000	6.900.000	100	5.605.400	5.647.400	101%
12)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.500.000	13.500.000	100	12.900.000	12.900.000	100%
13)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000	3.750.000	100	2.000.000	2.000.000	100%
14)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	185.258.000	185.258.000	100	63.275.000	63.275.000	100%
15)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.437.500	3.437.500	100	2.000.000	2.000.000	100%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	200.000.000	100	-	-	-
16)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	100	-	-	-
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	640.240.000	640.240.000	100	678.636.000	684.876.000	101%
17)	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	600.000	50%	996.000	996.000	100%
18)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	187.000.000	187.000.000	100	225.000.000	225.000.000	100%
19)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	452.640.000	452.640.000	100	452.640.000	458.880.000	101%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242.650.000	242.650.000	100	82.230.000	173.478.0000	2110%
20)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.354.000	35.354.000	100	30.580.000	30.580.000	100%
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.496.000	85.496.000	100	90.452.000	120.488.000	133%
22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.000.000	99.000.000	100	48.000.000	12.900.000	27%
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000	7.100.000	100	3.650.000	3.650.000	100%
24)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.700.000	15.700.000	100	5.860.000	5.860.000	100%
II.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	376.719.500	376.719.500	100	376.719.500	1.311.738.850	348%
7.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.431.500	155.431.500	100	129.217.500	469.590.350	363%
25)	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	-	-	-	-	85.000.000	-
26)	Pengembangan Bahan Pustaka	95.200.000	95.200.000	100	-	-	-
27)	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	49.431.500	49.431.500	100	118.417.500	131.656.600	111%
28)	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	232.143.750	-
29)	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.800.000	10.800.000	100	10.800.000	20.790.000	193%
8.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	221.288.000	221.288.000	100	247.502.000	842.148.500	340%
30)	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	48.080.000	55.533.000	115,50	102.255.100	107.255.100	105%
31)	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	39.982.800	-
32)	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	-	-	-	264.795.000	-
33)	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	173.208.000	173.208.000	100	144.746.900	430.115.600	297%
III.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	-	-	-	64.980.650	-
9.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	64.980.650	-
34)	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpangan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	-	-	-	64.980.650	-
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	260.598.100	260.598.100	100	157.278.500	157.278.500	100%
10.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	224.952.400	224.952.400	100	139.857.650	139.857.650	100%
35)	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	127.434.900	127.434.900	100	63.999.600	63.999.600	100%
36)	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	26.436.200	26.436.200	100	37.017.550	37.017.550	100%
37)	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	71.081.300	71.081.300	100	38.840.500	38.840.500	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	26.725.700	26.725.700	100	13.656.500	13.656.500	100%
38)	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	26.725.700	26.725.700	100	13.656.500	13.656.500	100%
12.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	8.920.000	8.920.000	100	3.864.350	3.764.350	97%
39)	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	8.920.000	8.920.000	100	3.864.350	3.764.350	97%
V.	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP	5.387.500	5.387.500	100	2.975.000	2.975.000	100%
13.	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5.387.500	5.387.500	100	2.975.000	2.975.000	100%
40)	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	5.387.500	5.387.500	100	2.975.000	2.975.000	100%
	1 urusan 5 Program, 13 Kegiatan, 40 Subkegiatan	5.502.881.919	5.532.881.919	100,55	5.137.269.352	6.247.269.352	122%

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , 2025

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah menggunakan anggaran yang dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
REALISASI ANGGARAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (TW 2)	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.890.176.819**	**4.673.084.574**	**95,56**	**4.724.294.502**	**2.999.535.071**	**63,49%**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.076.000**	**7.970.000**	**98,69**	**7.880.000**	**4.240.000**	**53,81%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.996.000	2.960.000	98,80	2.900.000	1.760.000	60,69%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.480.000	2.410.000	97,18	2.480.000	2.480.000	100,00%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000	2.600.000	100	2.500.000	2.500.000	100,00%
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.555.948.304**	**3.348.039.491**	**94,15**	**3.734.995.342**	**2.411.858.971**	**64,57%**
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.550.498.304	3.342.589.491	94,14	3.730.045.342	2.410.108.971	64,61%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.450.000	2.450.000	100	2.450.000	-	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	3.000.000	100	2.500.000	1.750.000	70,00%
III	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**243.262.515**	**241.829.473**	**99,41**	**95.665.160**	**68.045.650**	**71,13%**
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.026.000	12.939.875	99,34	11.791.750	11.791.750	100,00%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.749.750	10.749.750	100	8.361.350	4.381.050	52,40%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.185.765	4.185.765	100	4.594.810	2.981.810	64,90%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.455.000	2.455.000	100	3.875.000	2.375.000	61,29%
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.900.000	6.899.250	99,99	2.847.250	2.830.000	99,39%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	12.155.000	90,04	12.900.000	7.880.000	61,09%
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.750.000	3.750.000	100	2.000.000	1.200.000	60,00%

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (TW 2)	%
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.258.000	185.257.333	100	47.295.000	36.987.090	78,21%
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.437.500	3.437.500	100	2.000.000	2.000.000	100,00%
IV	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**200.000.000**	**198.000.000**	**99**	**17000000**	**-**	
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	198.000.000	99	17000000	-	
V	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**640.240.000**	**639.199.510**	**99,84**	**658.676.000**	**423.207.450**	**64,25%**
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	100	996.000	990.000	99,40 %
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.000.000	185.959.510	99,44	198.800.000	117.287.450	59,00%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.640.000	452.640.000	100	458.880.000	305.920.000	66,67%
VI	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**242.650.000**	**238.046.100**	**98,10**	**210.078.000**	**96.423.000**	**45,90%**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.354.000	33.832.500	95,70	30.580.000	19.145.000	62,61%
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.496.000	82.505.000	96,50	121.988.000	60.898.000	49,92%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.000.000	98.908.600	99,91	48.000.000	12.900.000	26,88%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000	7.100.000	100	3.650.000	2.190.000	60,00%
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.700.000	15.700.000	100	5.860.000	1.290.000	22,01%
B	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**376.719.500**	**375.389.100**	**99,65**	**1.387.425.300**	**694.357.916**	**50,05%**
VII	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**155.431.500**	**154.672.500**	**99,51**	**551.728.650**	**302.122.050**	**54,76%**
25	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	-	-	-	85.000.000	37.800.000	44,47%
26	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	49.431.500	49.417.500	99,95	213.794.900	98.480.800	46,06%
27	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	232.143.750	145.051.250	62,48%
28	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	10.800.000	10.800.000	100	20.790.000	20.790.000	100,00%
29	Pengembangan Bahan Pustaka	95.000.000	94.455.000	99,22	-	-	
VIII	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**221.228.000**	**220.716.600**	**99,74**	**835.696.650**	**392.235.866**	**46,94%**
30	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	48.080.000	48.046.100	99,93	57.816.200	38.495.200	66,58%
31	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat - tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	39.982.800	25.985.000	64,99%
32	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	-	-	-	264.795.000	41.206.350	15,56%
33	Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	173.208.000	172.670.500	99,69	473.102.650	286.549.316	60,57%
C	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**	**-**	**-**	**64.980.650**	**-**	
IX	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	64.980.650	-	
34	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran	-	-	-	64.980.650	-	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI 2025 (TW 2)	%
	Naskah Kuno						
D	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**260.598.100**	**260.086.065**	**99,80**	**111.255.400**	**77.633.050**	**69,78%**
X	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**224.952.400**	**224.717.875**	**99,90**	**99.505.800**	**77.633.050**	**78,02%**
35	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	127.434.900	127.394.750	99,97	47938850	34.118.100	71,17%
36	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	26.436.200	26.411.200	99,91	36.196.450	35.696.450	98,62%
37	Pengawasan Arsip Dinamis Kewemnagan Kabupaten/Kota	71.081.300	70.911.925	99,76	153.700.500	7.818.500	5,09%
XI	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**26.725.700**	**26.509.250**	**99,19**	**10.986.250**	**-**	
38	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	26.725.700	26.509.250	99,19	10.986.250	-	
XII	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**8.920.000**	**8.858.940**	**99,32**	**763.350**	**763.350**	**100,00%**
39	Penyediaan Imformasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	8.920.000	8.858.940	99,32	763.350	763.350	100,00%
E	**PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP**	**5.387.500**	**5.323.500**	**98,81**	**0**	-	
XIII	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**5.387.500**			0	-	
40	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	5.387.500	5.323.500	98,81	0	-	
	JUMLAH	**5.532.881.919**	**5.313.883.239**	**96,04**	**6.287.955.852**	**3.771.526.037**	**59,98 %**

Sumber : Laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Desember 2024 dan September 2025, diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 5.532.881.919,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 5.313.883.239,00 atau **96,04 %**. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 3.771.526.037,00 atau **59,98%** dari pagu anggaran Rp. 6.287.955.852,00.

Tabel 2.3.
PERSANDINGAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2023 DAN 2024

NO	PROGRAM	2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.619.472.842	5.346.870.141	95,15	4.890.176.819	4.664.514.574	96,06
2	Program Pembinaan Perpustakaan	332.151.200	330.271.445	99,43	376.719.500	375.389.100	99,65
3	Program Pengelolaan Arsip	225.038.400	218.256.000	96,99	260.598.100	1.619.197.520	99,80
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	6.416.000	6.416.000	100	5.387.500	5.323.500	92,43
	Persentase realisasi	**6.183.078.442**	**5.901.813.586**	**95,45**	**5.532.881.919**	**5.313.883.239**	**96,04**
	Rata-rata realisasi 4 program			**91,14**			**96,98**

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan , 2025

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

Tabel 2.4
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKASANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR S/D TAHUN 2025 (TAHUN BERJALAN)

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DINAS KEARISPAN DAN PERPSUTAKAAN									
	PERPUSTAKAAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**NILAI SAKIP**	**NA**	**69,45**	**NA**	**NA**	**95,56**	**75**	**NA**	**NA**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98,69**	**100 %**	**85,53 %**	**85,53 %**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	98,80	4 dokumen	3 dokumen	75 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Telaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian	2 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	97,18	2 laporan	2 laporan	100 %

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi perangkat daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**94,15**	**100 %**	**64,57 %**	**64,57 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN DISARPUS	29 orang	12 bulan	29 orang	29 orang	94,14	29 orang	29 orang	64,61 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya kooridnasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	3 laporan	12 bulan	3 laporan	3 laporan	100	3 laporan	2 Laporan	70 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**99,41**	**100 %**	**71,13%**	**71,13%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 set instalasi	1 paket	1 paket	99,34	1 paket	1 paket	100,00%

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		52,40%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya perlatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket		64,90%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	61,29%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	12 bulan	1 paket	1 paket	99,99	1 paket	1 paket	99,39%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Peraturan Perundang-Undangan	5 dokumen	12 bulan	5 dokumen	5 dokumen	90,04	5 dokumen	5 dokumen	61,09%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Tamu	1 laporan	1 tahun	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	60,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah	1 laporan	1 tahun	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	78,21%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penataushaan arsip dinamis pada DISARPUS	1 dokumen	1 paket	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**	**100 %**	**-**	**100 %**	**99**	**-**	**-**	**-**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Penunjang urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	1 paket	-	1 unit	99	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**99,84**	**100 %**	**100 %**	**100 %**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	99,40 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99,44	1 Laporan		59,06 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan		66,67 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98,10**	**100 %**	**45,90%**	**45,90%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	95,70	1 unit	1 unit	62,61%

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	8 unit	8 unit	7 unit	7 unit	96,50	10 unit	5 unit	49,92%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	99,91	2 gedung	2 gedung	26,88%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	20 unit	1 paket	1 paket	1 paket	100	5 unit	3 unit	60,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	10 unit	1 paket	1 paket	1 paket	100	10 unit	3 unit	22,01%
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM)**	**79**	**92,20**	**79**	**75,43**	**99,65**	**79,5**	**NA**	**NA**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**99,51**	**100 %**	**54,76%**	**54,76%**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		-	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	44,47%
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	1.100 eksemplar	1 paket	1.100 eksemplar	1.100 eksemplar	99,97	1000 eksemplar	1000 eksemplar	46,06%
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		-	-	-	-	-	375 orang	225 orang	62,48%
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	1 layanan	1 paket	1 layanan	1 layanan	100	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100,00%
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka tercetak yang dicetak dan diadakan	1.100 eksemplar	1.100 eksemplar	1.100 eksemplar	1.100 eksemplar	99,22	-		
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**99,74**	**100 %**	**46,94%**	**46,94%**
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	5 Perpustakaan	4 Perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	99,93	2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	66,58%
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64,99%

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		kewenangan daerah kabupaten/kota								
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		-	-	-	-	-	600 Orang	600 orang	15,56%
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	17 lokus	17 lokus	17 lokus	17 lokus	99,69	50 lokus	40 lokus	60,57%
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	**Teridentifikasinya Naskah Kuno di Kabupaten Karanganyar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 Naskah**	**NA**	**NA**
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100%**		
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	-	-	-	-	-	2 Orang		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	**Persentase Pengelolaan Arsip**	**65**	**75,69**	**65**	**80,5**	**99,80**	**57**	**NA**	**NA**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**99,90**	**100 %**	**80,87 %**	**80,87 %**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terlaksananya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	1000 Berkas	10 OPD	1000 Berkas	1000 Berkas	99,97	400 Berkas	300 Berkas	76,79 %
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	1000 Berkas	20 OPD	1000 Berkas	1000 Berkas	99,91	300 Berkas	300 Berkas	98,62 %
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	43 laporan	43 laporan	43 laporan	43 laporan	99,76	25 laporan	13 laporan	50,87 %
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**99,19**	**100 %**		
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis	800 Arsip	10 OPD	800 Arsip	800 Arsip	99,19	100 Arsip		
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	**Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**99,32**	**100 %**		
	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota melalui JIKN	Tersediannya informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kebupaten/kota melalui JIKN	100 pengguna	-	100 pengguna	100 pengguna	99,32	10 pengguna		

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGAIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA) TAHUN 2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD) TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN BERJALAN 2025	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2024	REALISASI RENJA PD TAHUN 2024	RINGKASAN REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (2025) TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA 2025 TW 2 (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP	**Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**65**	**75,69**	**65**	**80,5**	**98,81**	**13**	**NA**	**NA**
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	**Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**98,81**	**100 %**		
	Pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota	Terkelolanya pendataan, penyusunan daftar dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	3 daftar	-	3 daftar	3 daftar	98,81	0 daftar		

Sumber: Renstra DISARPUS 2024 – 2026, Laporan POK Desember 2024 dan September 2025, diolah

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISARPUS

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dutugaskan kepada daerah.
Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah pemberian informasi yang meliputi :

1. Memberikan pelayanan di bidang Perustakaan.
2. Memberikan pelayanan di bidang Kearsipan antara lain memberikan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan pengelolaan kearsipan.

Upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Terselenggaranya forum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan gabungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
3. Meningkatnya konsistensi pelayanan perpustakaan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perpustakaan dan kearsipan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perpustakaan dan kearsipan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024 dan tahun 2025

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
HASIL CAPAIAN IKU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024 DAN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET		REALISASI	
					2024	2025	2024	2025 (TW 2)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Meningkatkan budaya literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	79	75,43	95,48	-
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	74	72,05	97,36	-
3			Indeks Arsip	Indeks	65	80,5	123,84	-

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dari 3 indikator sasaran terdapat 2 yang tidak tercapai 100% yaitu:

(1) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP): 72,05 dengan kinerja 97,36 dikarenakan :
- Kurangnya kesesuaian antara anggaran dan target kinerja pada indikatornya;
- Dalam dokumen perencanaan kinerja belum memuat definisi operasional dari indikator kinerja sasaran;
- Belum sepenuhnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan rencana aksi untuk memastikan target kinerja tahun berjalan tercapai.

(2) Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), tidak tercapai nilai Baik dikarenakan Perpustakaan Nasional RI menggunakan metode yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu sistem penilainnya dari menggunakan metodologi sampling menjadi sensus yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Perpusnas RI. Dengan nilai terendah pada capaian keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan.

Sedangkan untuk capaian program di Disarpus tahun 2024 dan tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	Program	Indikator Program	TARGET		REALISASI	
					2024	2025	2024	2025 (TW 2)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Meningkatkan budaya literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	79	75,43	95,48	-
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Nilai SAKIP OPD	74	72,05	97,36	-
3			Program Pengelolaan Arsip	Indeks Arsip	65	80,5	123,84	-

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan dan kearsipan;
2. Peningkatan budaya literasi berbasis inklusi sosial;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
4. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Penelusuran naskah kuno sebagai warisan budaya (memory of nation) serta pengumpulan dokumen arsip yang memiliki nilai sangat berharga

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar juga harus menghadapi tantangan dari luar tersebut adalah semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap pelayanan di bidang perpustakaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD adalah acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dengan visi dan misi RPJMD 2025 - 2029 serta urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Guna menunjang kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Karanganyar serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat juga berusaha mensukseskan Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yaitu **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR"**

Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi Intanpari yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera". Visi Sesarengan Mbangun Karanganyar memiliki arti bersama sama membangun Karanganyar untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang memiliki potensi perindustrian, pertanian dan pariwisata yang berintegritas, berdaya saing dengan masyarakat yang sejahtera didukung oleh lima misi yang telah dirumuskan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada **misi 1 yaitu "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga Dan Pemuda Serta Kesetaraan Gender"** dan **Misi 4: "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik"**.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dilakukan sinkronisasi dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk di ajukan menjadi Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Untuk besaran anggaran di masing masing sub kegiatan juga terjadi perbedaan dengan rancangan awal, hal ini di sebabkan adanya perbedaan di standart harga yang tiap tahun berubah sementara semua sub kegiatan harus bisa terdanai dan juga berubahnya kebijakan tentang kepegawaian.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.6. sebagai berikut.

Tabel 2.7
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				**6.247.269.352**					**7.382.076.000**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		**Nilai SAKIP**	**72,15**	**4.710.296.352**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**		**Nilai SAKIP**	**72,15**	**6.145.103.000**
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DISARPUS	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	2.900.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	DISARPUS	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	4.000.000
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iksthisar realisasi kinerja SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2.480.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iksthisar realisasi kinerja SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	3.000.000
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISARPUS	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD yang tersusun	1 laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISARPUS	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja OPD yang tersusun	1 laporan	3.000.000
4.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DISARPUS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	3.730.045.342	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DISARPUS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang	3.800.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	2.500.000
6.	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	1 laporan	2.500.000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan	1 laporan	2.500.000
7.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DISARPUS	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	11.791.750	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	DISARPUS	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISARPUS	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.196.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISARPUS	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10.000.000
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISARPUS	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.881.810	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISARPUS	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10.000.000
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISARPUS	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	2.375.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISARPUS	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000
11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISARPUS	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 paket	5.647.400	Penyediaan Barang Cetakan dan	DISARPUS	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2 paket	7.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
			Disediakan			Penggandaan		Disediakan		
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISARPUS	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.900.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	DISARPUS	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12.900.000
13.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISARPUS	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	2.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISARPUS	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	3.000.000
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	64.275.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISARPUS	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	100.000.000
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISARPUS	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISARPUS	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2.500.000
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional	DISARPUS	Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang disediakan	-	-	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	Jumlah kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang disediakan	1 Unit	639.680.000
17.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISARPUS	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISARPUS	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	30.000.000
18.	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket Pembangunan Pagar Belakang Depo Arsip	150.000.000
19.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISARPUS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	996.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISARPUS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.500.000
20.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISARPUS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan	198.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	DISARPUS	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan	300.000.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
			Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Daya Air dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
21.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISARPUS	Jumlah orang yang menerima Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	458.880.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISARPUS	Jumlah orang yang menerima Honorarium Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	465.840.000
22.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dinas atau kendaraan dinas jabatan	1 Unit	30.580.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DISARPUS	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	65.748.000
23.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISARPUS	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	120.488.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISARPUS	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	226.525.000
24.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	12.900.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	215.900.000
25.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit	3.650.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	10.750.000
26.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Paket	5.860.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISARPUS	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	2 Paket	53.760.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
								Direhabilitasi		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		**Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)**	**75,3**	**1.311.738.850**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPISTAKAAN**		**Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM)**	**75,3**	**841.738.850**
27.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DISARPUS	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Perpustakaan	200.000.000	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	DISARPUS	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Perpustakaan	21.600.000
28.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	DISARPUS	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1100 eksemplar	284.980.650	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	DISARPUS	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 eksemplar	140.000.000
29.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pasa Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DISARPUS	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	150 Lokus	500.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pasa Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	DISARPUS	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	17 lokus, 1 Paket Pameran	500.000.000
30.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DISARPUS	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	228.855.350	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	DISARPUS	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	5 perpustakaan	326.758.200
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI		**Teridentifikasinya naskah kuno di**	**6**	**64.980.650**					**64.980.650**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
	NASIONAL DAN NASKAH KUNO		**Kabupaten Karanganyar**							
31.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	DISARPUS	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2 Orang	64.980.650	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	DISARPUS	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2 Orang	64.980.650
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		**Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**	**100**	**157.278.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Persentase Pengelolaan Arsip**	**57**	**327.278.500**
32.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DISARPUS	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 berkas	63.999.600	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	DISARPUS	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	500 berkas	40.000.000
33.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DISARPUS	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 berkas	37.017.550	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	DISARPUS	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	500 berkas	30.000.000
34.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DISARPUS	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Laporan	38.840.500	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	DISARPUS	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	42 laporan	40.000.000
35.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DISARPUS	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	400 arsip	13.656.500	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	DISARPUS	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	700 arsip	30.000.000
36.	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui	DISARPUS	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara	1 Dokumen	-	Pengembangan Khazanah Arsip Statis	DISARPUS	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui	1 Dokumen	7.278.500

NO	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**
	Wawancara Sejarah Lisan		Sejarah Lisan			Melalui Wawancara Sejarah Lisan		Wawancara Sejarah Lisan		
37.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	DISARPUS	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 pengguna	3.764.350	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	DISARPUS	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	100 pengguna	10.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		**Persentase arsip yang di kelola dan dilestarikan**	**100**	**2.975.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Persentase arsip yang di kelola dan dilestarikan**	**100**	**2.975.000**
38.	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DISARPUS	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 daftar	2.975.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	DISARPUS	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-
39.						Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	DISARPUS			2.975.000

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

DISARPUS sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menjadi *leading sector* atau koordinator pada urusan kearsipan dan perpustakaan.

Usulan program dalam Renja DISARPUS dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.9.
USULAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan berperan dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;

10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian

10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Pembangunan Badan Kepegawaian Negara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Meningkatnya kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan *human capital management*.

Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis utama :

1. Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi. Ini berarti mendorong setiap instansi pemerintah untuk mampu mengelola ASN mereka secara lebih baik, berdasarkan sistem merit yang objektif dan adil.
2. Meningkatnya kapabilitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Fokus ini adalah untuk memperkuat BKN sebagai lembaga yang modern dan efisien, agar dapat memberikan layanan manajemen ASN yang optimal.

Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.
2. *Customer Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
3. *Internal Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas, Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI–ASN), Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima.
4. *Learning & Growth Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel.

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan

10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. TUJUAN DAN SASARAN DISARPUS

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sesuai dengan rumusan rancangan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar adalah:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Dan Pengelolaan Kearsipan,

dengan sasaran:

1. Meningkatnya Literasi Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat dalam tabel 3.1 yang terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 3. 1
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN
						2026
Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat Dan Pengelolaan Kearsipan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase	8,27
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks	75,3

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Angka	80,3
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di Lingkup Pemerintahan Daerah			Program Pengelolaan Arsip	Nilai	65,3
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kearsipan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	Program Pengelolaan Arsip	Persentase	76

Sumber: Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar 2025 - 2029

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

DISARPUS sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan Kearsipan dan Perpustakaan seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

Tabel 3.2.
TANTANGAN DAN PELUANG
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR

TUJUAN	SASARAN	TANTANGAN	PELUANG
Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat dan Pengelolaan Kearsipan	Meningkatnya Literasi Masyarakat	a. proses digitalisasi arsip yang belum maksimal; b. tingkat literasi dan pemanfaatan layanan perpustakaan juga belum sepenuhnya optimal; c. meningkatnya penggunaan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, menghambat kemajuan perpustakaan sebagai sumber ilmu; d. pembinaan Arsip Terjaga yang perlu mendapatkan perhatian serius; e. keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga arsiparis dan pustakawan menyebabkan kinerja belum dapat maksimal.	a. dorongan transformasi digital melalui kebijakan SPBE; b. pengembangan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat; c. kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas, inovasi layanan berbasis teknologi; d. pemanfaatan arsip untuk memperkuat identitas daerah semakin membuka ruang untuk pengembangan layanan yang lebih modern dan berdampak luas
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan Daerah		

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

3.4. Pengukuran Kinerja Layanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Persoalan utama selanjutnya adalah bagaimana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta bagaimana mengukur efektivitas pencapaiannya. Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran, serta tercapainya kinerja layanan,

akan dicerminkan oleh serangkaian indikator yang lebih rinci, terutama dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilaksanakan.

Keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran dinas sangat bergantung pada hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar. Kinerja layanan dinas harus dievaluasi secara berkala untuk memahami bagaimana seluruh kegiatan layanan telah dilaksanakan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Indikator kinerja berfungsi sebagai instrumen ukur untuk menilai keberhasilan program kerja secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dan target sasaran yang ditetapkan akan menjadi cerminan dari pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar dapat di gambarkan sebagai berikut:

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menjadi leading sector atau koordinator pada urusan kearsipan dan perpustakaan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
KESELARASAN SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berkarakter dan Adil	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat dan pengelolaan kearsipan	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Sasaran 1: Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
KESELARASAN SASARAN DENGAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkaan Kantor c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan g. Fasilitasi Kunjungan Tamu h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota a. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka b. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota a. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial b. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 1.
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno 1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	Program Pengelolaan Arsip 1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota a. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
		3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota a. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 1. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan a. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategi Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Tabel 4. 1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
I	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
II	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
III	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
IV	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
B	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**
V	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
16	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
17	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
18	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN
VI	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**
19	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
20	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
21	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
C	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**
VII	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**
22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
D	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**
VIII	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**
23	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
24	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
IX	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**
25	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
X	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**
26	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
E	**PROGRAM PERLINDUNGAN dan PENYELAMATAN ARSIP**
XI	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**
27	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
28	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**4.869.575.283**		**6.753.000.000**						
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.869.575.283**							**6.753.000.000**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**4.798.575.283**							**6.473.000.000**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai Sakip**				**70,5**	**4.063.875.283**							**5.233.000.000**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		15.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025					penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil				0 Laporan	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM				
	2.23.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	0 Laporan	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		3.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025										
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	3.190.879.673	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		3.810.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ bulan	3.190.879.673	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		3.800.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025					kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	kualitas SDM				
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	38.131.610	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		314.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				0 Paket	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		7.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Disediakan								sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM				
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.042.800	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		10.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025										
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.737.810	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		9.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.500.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		6.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.966.000,	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		6.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.900.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		15.000.000	DINAS KEARSIPAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	atkan integritas kualitas SDM				
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		6.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan				1 Laporan	12.985.000	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	Memperkuat pembangu	Penguatan Landasan	Dinas Kearsipan dan		250.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Perpustakaan Kabupaten Karanganyar			PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
NO	2.23.01.2.07 **KODE**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen Yandang Disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		100.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025					pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM			
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	655.570.000,	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		724.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa				1 Laporan	550.000	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	Memperkuat pembangu	Penguatan Landasan	Dinas Kearsipan dan		3.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Perpustakaan Kabupaten Karanganyar			PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	228.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		250.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	427.020.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		471.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	179.294.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		270.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	41.030.000,	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	101.264.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		125.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025					pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM				
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	18.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025										
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		20.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		25.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
2. **NO**	**2.23.02** **KODE**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	**74,5**	**701.522.000**	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar		**1.175.000.000**	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.0 1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	229.297.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		425.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	50.798.100	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				350 Eksemplar	57.000.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		225.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.02.2.01.0019	2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				200 Eksemplar	121.499.400	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		200.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						**KELOMPOK SASARAN**	**PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027**		**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
											milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
NO	2.23.02.2.02 **KODE**	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota **URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	Persentase budaya gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota **INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**	100 %	472.224.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		750.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang di Kembangkan				1 Perpustakaan	17.700.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar	5 Perpusta kaan	300.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 orang	304.595.900	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				100 Lokus	149.928.600,	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		450.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Teridentifikasinya naskah kuno di Kabupaten Karanganyar**				**74,5 Indeks**	**33.178.000**							**65.0000.000**	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno yang Dilestarikan				100 %	33.178.000			Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		65.0000.000	
	2.23.03.2.01. 0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran				2 orang	33.178.000		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		65.0000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM				
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**71.000.000**							**280.000.000**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Indeks Arsip**				**65 Indeks**	**67.226.000**							**230.000.000**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	49.441.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		150.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				200 Berkas	23.517.100	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		65.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				600 Berkas	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,	Penguatan Landasan Pembentuk an Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningk atkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		35.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota				25 Laporan	25.923.900	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Mengelola arsip sesuai dengan ketentuan dan meningkatnya kwalitas pengelola				100 %	13.753.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan	OPD di Kabupaten Karanganyar	100 %	60.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM				
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				100 Arsip	13.753.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		50.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	2.24.02.2.02.0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	1 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		10.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah				100 %	4.032.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar	-	20.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											(generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				25 Pengguna	4.032.000,	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		20.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Indeks Arsip**				**67**	**3.774.000**						**-**	**50.000.000**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Pengolahan arsip secara digital, tersedianya informasi dalam bentuk digital, bertambahnya kazanah arsip statis				100 %	3.774.000	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	OPD di Kabupaten Karanganyar	-	30.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Meningkatkan integritas kualitas SDM				
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				50 Berkas	632.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		20.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				100 Arsip	3.141.500	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		10.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
NO	**KODE**	**URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**	**TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD**	**REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024**	**PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025**										
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terselamatkannya Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		15.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											generasi Z), dan pen yandang disabilitas.					
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Daftar	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	OPD di Kabupaten Karanganyar		15.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang					-	0				Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	-	5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														

							CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	20 Arsip	0	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		J U M L A H						**4.869.575.283**							**6.753.000.000**	

Sumber : SIPD-RI Dinas Kearispan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar

4.4 Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar merupakan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.

Tabel 4.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPTEN KARANGANYAR

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN
			2026
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	75,3
2	Nilai IKM	Nilai	80,3
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat Pengelolaan Arsip Minimal B	%	76

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2025-2029

Tabel 4.4.
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPTEN KARANGANYAR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN
			2026
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,5
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	75,3
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	71

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar 2025-2029

Tabel 4.5.
PROGRAM, KEGIATAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	PROGRAM, KEGIATAN YANG MENDUKUNG	PAGU ANGGARAN
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 701.522.000,-
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 229.297.500,-
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 472.224.500,-
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp. 33.178.000,-
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 33.178.000,-
	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 67.226.000,-
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 49.441.000,-
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.753.000,-
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 4.032.000,-
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp. 3.774.000,-
	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungkan dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Rp. 3.774.000,-

Sumber : Dinas Kearispan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029, dengan mengacu pada target dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025–2029.

1.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu terus ditingkatkan agar hasil yang dicapai dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Oleh karena itu, sinergi dan keterpaduan antara program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan rencana kerja ini.

1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2026 berpedoman pada kaidah-kaidah berikut:

1. Sinkronisasi dan keselarasan antara dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah, serta memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi.
2. Rencana Kerja Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
3. Setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kearsipan dan perpustakaan.
2. Mendorong sinergi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan antarbidang guna mendukung capaian kinerja yang optimal.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kearsipan dan perpustakaan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mampu menjadi pedoman dalam penyelesaian berbagai tantangan dan kebutuhan pelayanan di bidang kearsipan dan perpustakaan secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan terwujud peningkatan kualitas layanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja yang semakin inovatif.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Setda Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Setda berpedoman pada Peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Maksud dan Tujuan penyusunan dokumen ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Semoga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan di Sekretariat Daerah.

September 2025
Sekretaris Daerah

Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB 1 PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud Dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capian Renstra Sekretariat Daerah..... II-1
2.1.1 Evaluasi Anggaran II-1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah..... II-22
2.3 Isu-Isu Penring Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah II-29
2.4 Review Terhadap Rangcangan Akhir RKPD II-31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah III-1
3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran III-3
3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah III-3
3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah III-5
3.3 Tantangan dan Peluangan Perangkat Daerah III-6
3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah III-6
3.3.2. Peluangan Perangkat Daerah III-6
3.4 Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah III-7
3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah III-7
3.4.2. Cascading Perangkat Daerah III-8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... IV-1
4.1 Program danKegiatan Sekretariat Daerah IV-1
4.2 Indikator Pelayanan Sekretariat Daerah IV-2
4.3 Dana Indikatif Sekretariat Daerah IV-2
4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Sekretariat Daerah IV-2
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Renja 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025.....	II-2
Tabel 2.2	Persandingan Realisasi APBD (program, kegiatan dan subkegiatan) Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II.....	II-6
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....	II-11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perengkat Daerah Dan Pencapian Renstra Perangkat Daerah S/D Tribuwal II 2025 Kabupaten Karanganyar.....	II-13
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Tujuan, sasaran dan program	II-28
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.....	II-29
Tabel 2.7	Isu startegis Sekretariat Daerah.....	II-30
Tabel 2.8	Review rancangan akhir RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.....	II-32
Tabel 2.9	Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-44
Tabel 3.1	Tujuan Sasaran dan Program Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	III-5
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD	III- 8
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Perangkat Daerah	III-8
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Opd) Sekretariat Daerah Tahun 2026	IV-3
Tabel 4.2	Target IKU Sekretariat Daerah Tahun 2026	IV-43
Tabel 4.3	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV-43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Rencana Kerja (Renja) PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Perangkat daerah (RKPD) Tahun 2026 yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada bagian-bagian di lingkungan Sekretariat daerah selama 1 (satu) tahun ke depan.

Sebagai dokumen Rencana Tahunan OPD, Renja Sekretariat Daerah Kabupten Karanganyar mempunyai arti yng stategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah, mengingat:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai arahan operasional dalam RKPD.
2. Renja merupakan acuan Parangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUS, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satuu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaran program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus menikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksana Rencana Pembangunan Daerah.

Kaidah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 antara lain:

1. Disusun Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebulumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Tujuan Pembangunan Daerah pada tahun berkenaan.
3. program dan kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kegiatan dalam forum musrembang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (Outcame), indicator kinerja keluaran (Output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan perkiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dengan melaksanakan sasaran dan kebijakan stratgis tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Kerja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya Renja Sekretraiat Daerah Tahun 2026 adalah :

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan/ ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan :

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, urusan penelitian dan pengembangan;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan mengenai pengertian Renja, fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Pada Bab II diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dearah Tahun 2025, analis kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab III diuraikan mengenai telahan terhadap kebijakan nasional. Diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Karanagnyar.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV diuraikan mengenai Rencana Kerja Dan Program Dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V diuraikan mengenai kaidah pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis sesuai yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Karanganyar.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Sekretariat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2025-2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah (PD), serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sekretariat Daerah Tahun 2025 melaksanakan 3 program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terdiri dari 12 Kegiatan
   Indikator/Capaian Program : Nilai SAKIP, dengan target 85 realiasinya 51,19%
   Anggaran : Rp 33.658.181.070,-
   Realiasi anggaran : Rp 17.229.693.523,-
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Terdiri dari 4 kegiatan
   Indikator/Capaian Program :
   - EKPPD target sangat tinggi, realisasi sangat tinggi
   - Cakupan Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Fasilitasi Permasalahan Hukum, target 100 % , realisasi 100 %
   - Cakupan Perumusan, Kebijakan, Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Rakyat, dengan target 100 %, realisasi 26,85%

   Anggaran : Rp 10.408.448.400,-
   Realiasi anggaran : Rp 2.794.250.000,-
3. Program Perekonomian dan Pembangunan
   Terdiri dari 4 kegiatan.
   Indikator/Capaian Program :
   - Cakupan Koordinasi Perekonomian Daerah, target 100 % realisasi 100 %
   - Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, target 100 % , realisasi 100 %
   - Cakupan Fasilitasi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan target 100 %, realisasi 43,06%

   Anggaran : Rp. 1.535.424.200,-
   Realiasi anggaran : Rp. 6.61.088.560,-
   Rata-rata realisasi seluruh kegiatan 45,36%

2.1.1 Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja Perubahan 2024 dengan alokasi anggaran APBD Pada tahun 2024 dan 2025 Sekretariat Daerah telah merencana program, kegiatan dan subkegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagai table berikut;

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Renja 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	APBD	Renja	%	APBD	Renja	%
SEKRETARIAT DAERAH	**45.421.960.190**	**51.700.105.040**	**113,82%**	**47.188.465.920**	**51.425.861.920**	**108,98%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**30.144.060.190**	**34.555.735.040**	**114,64%**	**33.996.265.920**	**39.140.181.020**	**115,13%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**430.228.000**	**394.818.000**	**91,77%**	**319.840.000**	**145.627.600**	**45,53%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	219.390.000	212.190.000	96,72%	25.420.000	12.120.000	47,68%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	210.838.000	182.628.000	86,62%	294.420.000	133.507.600	45,35%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**16.701.530.190**	**18.010.285.040**	**107,84%**	**19.921.018.920**	**18.845.834.232**	**94,60%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.701.530.190	18.010.285.040	107,84%	19.921.018.920	18.845.834.232	94,60%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**146.230.000**	**146.230.000**	**100,00%**	**150.000.000**	**113.780.000**	**75,85%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	146.230.000	146.230.000	100,00%	150.000.000	113.780.000	75,85%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**799.421.000**	**1.337.721.000**	**167,34%**	**1.150.000.000**	**1.167.720.900**	**101,54%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	250.000.000	246.000.000	98,40%	250.000.000	311.937.500	124,78%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	549.421.000	1.091.721.000	198,70%	900.000.000	855.783.400	95,09%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**2.684.574.00**	**3.274.861.000**	**121,99%**	**2.571.467.000**	**2.886.379.388**	**112,25%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.922.000	279.059.000	119,30%	280.455.000	296.695.788	105,79%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	234.500.000	155.000.000	66,10%	250.000.000	254.000.000	101,60%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	90.595.000	120.595.000	133,11%	109.025.000	92.726.400	85,05%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	944.175.000	1.394.175.000	147,66%	1.000.000.000	1.152.048.000	115,20%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.000.000.000	1.138.500.000	113,85%	903.555.000	1.066.602.000	118,05%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	APBD	Renja	%	APBD	Renja	%
SKPD						
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	181.382.000	187.532.000	103,39%	28.432.000	24.307.200	85,49%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.738.000**	**1.953.808.000**	**112417, 03%**	**2.392.293.000**	**3.789.931.550**	**158,42%**
Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	1.520.000.000	1.520.000.000	100,00%	1.844.830.000	2.567.830.000	139,19%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.738.000	348.588.000	20056,85 %	226.850.000	884.625.050	389,96%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.850.000	85.220.000	357,32%	320.613.000	337.476.500	105,26%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.772.017.000**	**3.407.827.000**	**90,34%**	**2.734.499.000**	**3.218.912.550**	**117,71%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	135.682.000	164.982.000	121,59%	163.582.000	181.134.800	110,73%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.000.000	1.094.000.000	100,00%	1.094.000.000	1.094.000.000	100,00%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.542.335.000	2.148.845.000	84,52%	1.476.917.000	1.943.777.750	131,61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.707.633.000**	**2.833.648.000**	**104,65%**	**2.256.113.000**	**3.640.980.000**	**161,38%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.248.040.000	1.162.060.000	93,11%	1.249.660.000	1.596.780.000	127,78%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.148.000	191.393.000	95,63%	184.758.000	216.130.000	116,98%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.175.000.000	1.387.000.000	118,04%	729.000.000	1.741.000.000	238,82%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.445.000	93.195.000	110,36%	92.695.000	87.070.000	93,93%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**981.147.000**	**1.100.604.000**	**112,18%**	**1.833.595.000**	**2.286.407.000**	**124,70%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	360.000.000	360.000.000	100,00%	981.515.000	981.515.000	100,00%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	APBD	Renja	%	APBD	Renja	%
dan Wakil Kepala Daerah						
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21.104.000	21.104.000	100,00%	40.525.000	40.525.000	100,00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	20.000.000	40,00%	50.000.000	50.000.000	100,00%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	550.043.000	699.500.000	127,17%	761.555.000	1.214.367.000	159,46%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**1.048.512.000**	**969.733.000**	**92,49%**	**1.325.540.000**	**1.382.890.000**	**104,33%**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	770.994.000	745.444.000	96,69%	754.100.000	741.450.000	98,32%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	177.159.000	123.930.000	69,95%	473.040.000	543.040.000	114,80%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100.359.000	100.359.000	100,00%	98.400.000	98.400.000	100,00%
Penataan Organisasi	**631.800.000**	**681.800.000**	**107,91%**	**1.250.000.000**	**1.032.718.600**	**82,62%**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	211.650.000	228.150.000	107,80%	384.880.000	276.430.200	71,82%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	179.900.000	196.900.000	109,45%	410.240.000	372.515.400	90,80%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	240.250.000	256.750.000	106,87%	454.880.000	383.773.000	84,37%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**239.230.000**	**444.400.000**	**185,76%**	**404.000.000**	**628.999.200**	**155,69%**
Fasilitasi Keprotokolan	178.208.200	267.970.000	150,37%	284.242.000	300.354.850	105,67%
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	61.021.800	176.430.000	289,13%	119.758.000	328.644.350	274,42%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**13.745.500.000**	**15.517.820.000**	**112,89%**	**11.342.200.000**	**10.763.953.350**	**94,90%**
Administrasi Tata Pemerintahan	**2.206.200.000**	**2.345.470.000**	**106,31%**	**2.447.303.000**	**1.879.074.450**	**76,78%**
Penataan Administrasi Pemerintahan	642.000.000	687.270.000	107,05%	210.000.000	163.732.750	77,97%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	97.000.000	97.000.000	100,00%	234.519.000	214.348.250	91,40%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.467.200.000	1.561.200.000	106,41%	2.002.784.000	1.500.993.450	74,95%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	APBD	Renja	%	APBD	Renja	%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**10.208.000.000**	**11.665.050.000**	**114,27%**	**7.425.000.000**	**7.621.714.600**	**102,65%**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.255.000.000	3.552.000.000	109,12%	1.820.000.000	1.995.330.200	109,63%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	6.665.000.000	7.745.050.000	116,20%	5.295.000.000	5.181.664.400	97,86%
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	288.000.000	368.000.000	127,78%	310.000.000	444.720.000	143,46%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**1.090.000.000**	**1.230.000.000**	**112,84%**	**1.130.000.000**	**1.023.790.350**	**90,60%**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	525.000.000	545.000.000	103,81%	475.000.000	384.399.250	80,93%
Fasilitasi Bantuan Hukum	305.000.000	335.000.000	109,84%	315.000.000	319.431.800	101,41%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	260.000.000	350.000.000	134,62%	340.000.000	319.959.300	94,11%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**241.300.000**	**277.300.000**	**114,92%**	**339.897.000**	**239.373.950**	**70,43%**
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	241.300.000	277.300.000	114,92%	339.897.000	239.373.950	70,43%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**1.532.400.000**	**1.626.550.000**	**106,14%**	**1.850.000.000**	**1.521.727.550**	**82,26%**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**467.400.000**	**517.400.000**	**110,70%**	**530.000.000**	**514.367.400**	**97,05%**
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	120.000.000	165.000.000	137,50%	170.000.000	96.240.250	56,61%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	247.400.000	227.400.000	91,92%	135.000.000	253.915.150	188,09%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100.000.000	125.000.000	125,00%	225.000.000	164.212.000	72,98%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**260.000.000**	**279.150.000**	**107,37%**	**450.000.000**	**351.351.000**	**78,08%**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	103.000.000	128.000.000	124,27%	123.492.700	30.483.800	24,68%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	102.000.000	102.000.000	100,00%	104.687.300	76.531.800	73,11%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	55.000.000	49.150.000	89,36%	221.820.000	244.335.400	110,15%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	APBD	Renja	%	APBD	Renja	%
Pembangunan						
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**400.000.000**	**425.000.000**	**106,25%**	**550.000.000**	**353.303.350**	**64,24%**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	152.000.000	177.000.000	116,45%	198.500.000	117.411.950	59,15%
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120.000.000	120.000.000	100	100.000.000	59.140.500	59,14%
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	128.000.000	128.000.000	100	251.500.000	176.750.900	70,28%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**405.000.000**	**405.000.000**	**100**	**320.000.000**	**302.705.800**	**94,60%**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	355.000.000	355.000.000	100	250.000.000	250.000.000	100,00%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	18.218.900	72,88%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	25.000.000	25.000.000	100	45.000.000	34.486.900	76,64%

Sumber: Sekretariat Daerah 2025

Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II menunjukan tercapainya realisasi seperti dalam table berikut ini;

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut;

Tabel 2.2
Persandingan Realisasi APBD (program, kegiatan dan subkegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi Trib II	%
SEKRETARIAT DAERAH	**51.700.105.040**	**51.489.266.361**	**99,59%**	**45.602.053.670**	**20.188.007.783**	**44,27%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**34.555.735.040**	**34.555.735.040**	**100,00%**	**33.658.181.070**	**17.229.693.523**	**51,19%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**394.818.000**	**394.818.000**	**100,00%**	**112.037.600**	**30.409.950**	**27,14%**

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi Trib II	%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.190.000	210.045.000	98,99%	22.720.000	5.635.000	24,80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	182.628.000	179.226.500	98,14%	89.317.600	24.774.950	27,74%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**18.010.285.040**	**18.010.285.040**	**100,00%**	**19.921.018.920**	**9.430.119.838**	**47,34%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.010.285.040	18.010.285.040	100,00%	19.921.018.920	9.430.119.838	47,34%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**146.230.000**	**135.704.000**	**92,80%**	**113.780.000**	**46.200.000**	**40,60%**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	146.230.000	135.704.000	92,80%	113.780.000	46.200.000	40,60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**1.337.721.000**	**1.314.615.900**	**98,27%**	**1.105.783.400**	**866.214.000**	**78,33%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	246.000.000	242.525.000	98,59%	250.000.000	60.525.000	24,21%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.091.721.000	1.072.090.900	98,20%	855.783.400	805.689.000	94,15%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**3.274.861.000**	**3.274.861.000**	**100,00%**	**1.932.605.600**	**1.065.628.362**	**55,14%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279.059.000	273.668.778	98,07%	272.599.000	162.971.728	59,78%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.000.000	155.000.000	100,00%	250.000.000	78.250.000	31,30%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.595.000	120.595.000	100,00%	83.190.400	83.131.400	99,93%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.394.175.000	1.352.127.000	96,98%	1.014.748.000	478.675.000	47,17%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.138.500.000	1.110.439.550	97,54%	287.761.000	246.723.534	85,74%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	187.532.000	185.167.300	98,74%	24.307.200	15.876.700	65,32%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.953.808.000**	**1.953.808.000**	**100,00%**	**2.392.293.000**	**1.821.903.000**	**76,16%**
Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	1.520.000.000	1.431.950.000	94,21%	1.844.830.000	1.550.000.000	84,02%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi Trib II	%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	348.588.000	334.798.000	96,04%	226.850.000	220.210.000	97,07%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.220.000	83.620.000	98,12%	320.613.000	51.693.000	16,12%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.407.827.000**	**3.407.827.000**	**100,00%**	**2.391.512.550**	**1.100.373.543**	**46,01%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	164.982.000	164.734.700	99,85%	152.786.300	94.805.000	62,05%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.094.000.000	991.874.140	90,66%	873.000.000	471.218.543	53,98%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.148.845.000	2.063.477.000	96,03%	1.365.726.250	534.350.000	39,13%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.833.648.000**	**2.833.648.000**	**100,00%**	**2.508.233.000**	**1.713.084.250**	**68,30%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.162.060.000	1.146.925.000	98,70%	1.204.780.000	841.441.750	69,84%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	191.393.000	164.184.600	85,78%	184.758.000	79.883.000	43,24%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.387.000.000	1.365.952.586	98,48%	1.071.500.000	768.839.500	71,75%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.195.000	87.195.000	93,56%	47.195.000	22.920.000	48,56%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**1.100.604.000**	**1.100.604.000**	**100,00%**	**1.905.777.000**	**697.500.580**	**36,60%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	360.000.000	360.000.000	100,00%	981.515.000	259.721.296	26,46%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21.104.000	21.104.000	100,00%	40.525.000	40.525.000	100,00%
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20.000.000	6.308.781	31,54%	50.000.000	6.692.676	13,39%
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil	699.500.000	690.802.385	98,76%	833.737.000	390.561.608	46,84%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi Trib II	%
Kepala Daerah						
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**969.733.000**	**969.733.000**	**100,00%**	**1.275.140.000**	**458.260.000**	**35,94%**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	745.444.000	729.751.983	97,89%	703.700.000	280.130.000	39,81%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	123.930.000	122.249.650	98,64%	473.040.000	137.480.000	29,06%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100.359.000	99.309.000	98,95%	98.400.000	40.650.000	41,31%
Penataan Organisasi	**681.800.000**	**681.800.000**	**100,00%**	**932.683.600**	**560.161.200**	**60,06%**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	228.150.000	228.150.000	100,00%	237.679.200	142.855.550	60,10%
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	196.900.000	196.900.000	100,00%	329.965.400	185.200.900	56,13%
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	256.750.000	256.750.000	100,00%	365.039.000	232.104.750	63,58%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**444.400.000**	**441.572.478**	**99,36%**	**404.000.000**	**224.944.804**	**55,68%**
Fasilitasi Keprotokolan	267.970.000	267.832.689	99,95%	284.242.000	127.832.689	**44,97%**
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	176.430.000	173.739.789	98,48%	119.758.000	97.112.115	**81,09%**
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**15.517.820.000**	**15.357.156.144**	**98,96%**	**10.408.448.400**	**2.137.225.700**	**20,53%**
Administrasi Tata Pemerintahan	**2.345.470.000**	**2.261.746.170**	**96,43%**	**1.626.983.450**	**1.749.570.950**	**107,53%**
Penataan Administrasi Pemerintahan	687.270.000	652.927.750	95,00%	163.732.750	652.927.750	398,78%
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	97.000.000	97.000.000	100,00%	190.358.250	97.000.000	50,96%
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.561.200.000	1.511.818.420	96,84%	1.272.892.450	999.643.200	78,53%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**11.665.050.000**	**11.599.628.900**	**99,44%**	**7.425.000.000**	**1.140.559.350**	**15,36%**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.552.000.000	3.504.570.850	98,66%	1.820.000.000	871.882.350	**47,91%**
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	7.745.050.000	7.742.662.350	99,97%	5.295.000.000	177.639.000	**3,35%**
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian	368.000.000	352.395.700	95,76%	310.000.000	91.038.000	**29,37%**

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi Trib II	%
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**1.230.000.000**	**1.218.481.074**	**99,06%**	**1.130.000.000**	**387.654.750**	**34,31%**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	545.000.000	542.793.724	99,60%	475.000.000	181.839.600	38,28%
Fasilitasi Bantuan Hukum	335.000.000	325.687.350	97,22%	315.000.000	112.246.750	35,63%
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	350.000.000	350.000.000	100,00%	340.000.000	93.568.400	27,52%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**277.300.000**	**277.300.000**	**100,00%**	**226.464.950**	**116.464.950**	**51,43%**
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	277.300.000	277.300.000	100,00%	226.464.950	116.464.950	**51,43%**
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**1.626.550.000**	**1.576.375.177**	**96,92%**	**1.535.424.200**	**821.088.560**	**53,48%**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**517.400.000**	**517.400.000**	**100,00%**	**371.367.400**	**127.474.070**	**34,33%**
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	165.000.000	165.000.000	100,00%	96.240.250	26.047.980	27,07%
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	227.400.000	227.400.000	100,00%	130.915.150	42.630.790	32,56%
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	125.000.000	125.000.000	100,00%	144.212.000	58.795.300	40,77%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**279.150.000**	**271.245.150**	**97,17%**	**311.351.000**	**209.300.800**	**67,22%**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	128.000.000	127.514.650	99,62%	28.904.300	2.429.300	8,40%
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	102.000.000	99.417.500	97,47%	77.311.300	40.005.500	51,75%
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	49.150.000	44.313.000	90,16%	205.135.400	166.866.000	81,34%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**425.000.000**	**422.009.452**	**99,30%**	**550.000.000**	**262.009.452**	**47,64%**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	177.000.000	175.894.500	99,38%	198.500.000	75.894.500	**38,23%**
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	120.000.000	119.089.500	99,24%	100.000.000	19.089.500	**19,09%**
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan	128.000.000	127.025.452	99,24%	251.500.000	167.025.452	**66,41%**

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Perubahan 2024			Penetapan 2025		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi Trib II	%
Jasa						
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**405.000.000**	**365.720.575**	**90,30%**	**302.705.800**	**62.304.238**	**20,58%**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	355.000.000	319.196.775	89,91%	250.000.000	46.821.938	18,73%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25.000.000	21.613.800	86,46%	18.218.900	10.575.400	58,05%

Sumber: Sekretariat Daerah 2025

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 51.700.105.040,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 51.489.266.361,00 atau 99,59 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar **96,23%.** Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 20.685.032.083,00 atau 45,36% dari pagu anggaran Rp. 45.602.053.670,00

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2023			2024		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
SEKRETARIAT DAERAH	54.802.010.522	52.819.458.787	96,38%	51.700.105.040	51.489.266.361	99,59%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.024.942.722	31.578.807.205	95,62%	34.555.735.040	34.555.735.040	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.150.000	317.653.000	146,96%	394.818.000	394.818.000	100,00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.076.269.722	16.200.417.151	94,87%	18.010.285.040	18.010.285.040	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	259.010.000	239.331.400	92,40%	146.230.000	135.704.000	92,80%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	861.609.000	817.289.092	94,86%	1.337.721.000	1.314.615.900	98,27%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.735.417.000	3.621.219.389	96,94%	3.274.861.000	3.274.861.000	100,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.984.847.000	1.856.926.322	93,56%	1.953.808.000	1.953.808.000	100,00%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.958.866.000	2.871.591.664	97,05%	3.407.827.000	3.407.827.000	100,00%

PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2023			2024		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.679.530.000	2.643.423.559	98,65%	2.833.648.000	2.833.648.000	100,00%
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.862.351.000	1.688.008.585	90,64%	1.100.604.000	1.100.604.000	100,00%
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.390.893.000	1.322.947.043	95,11%	969.733.000	969.733.000	100,00%
Penataan Organisasi	1.082.000.000	1.053.759.974	97,39%	681.800.000	681.800.000	100,00%
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	317.900.000	313.000.450	98,46%	444.400.000	441.572.478	99,36%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.347.960.450	18.968.044.767	98,04%	15.517.820.000	15.357.156.144	98,96%
Administrasi Tata Pemerintahan	2.495.000.000	2.344.664.869	93,97%	2.345.470.000	2.261.746.170	96,43%
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	14.934.135.450	14.745.341.500	98,74%	11.665.050.000	11.599.628.900	99,44%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.387.825.000	1.347.316.876	97,08%	1.230.000.000	1.218.481.074	99,06%
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	531.000.000	530.721.522	99,95%	277.300.000	277.300.000	100,00%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.429.107.350	2.272.606.815	93,56%	1.626.550.000	1.576.375.177	96,92%
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.194.900.000	1.108.027.575	92,73%	517.400.000	517.400.000	100,00%
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	261.000.000	257.094.600	98,50%	279.150.000	271.245.150	97,17%
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	643.000.000	620.451.800	96,49%	425.000.000	422.009.452	99,30%
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	330.207.350	287.032.840	86,93%	405.000.000	365.720.575	90,30%

Sumber: Sekretariat Daerah 2025

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Pencapaian Renstra Sekretariat s/d tahun 2025 sebagaimana dalam;

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perengkat Daerah Dan Pencapian Renstra Perangkat Daerah S/D Tribuwal II 2025
Kabupaten Karanganyar

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai Sakip**	**85**	**81,15**	**75**	**77**	**81,15**	**80**	44,27	44,27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD**								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	24,80	24,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	100	100	100	100	100	27,74	27,74
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda**								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100	47,34	47,34

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah**								
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	100	100	100	100	100	40,60	40,60
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**								
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	100	100	100	100	100	24,21	24,21
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	94,15	94,15
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.**								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	59,78	59,78
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	31,30	31,30
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	99,93	99,93
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	100	100	100	100	100	47,17	47,17
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100	100	100	100	100	85,74	85,74

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	100	100	100	100	100	65,32	65,32
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**								
Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	84,02	84,02
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	97,07	97,07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	16,12	16,12
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100	100	100	100	100	62,05	62,05
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	53,98	53,98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	39,13	39,13
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	100	100	100	100	100	69,84	69,84

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	100	100	100	100	100	43,24	43,24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	100	100	100	100	71,75	71,75
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	100	100	100	100	100	48,56	48,56
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	26,46	26,46
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
elaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	13,39	13,39
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	46,84	46,84
Fasilitasi Kerumahtanggaan	**Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala**								

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Sekretariat Daerah	**daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.**								
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	39,81	39,81
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	29,06	29,06
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	100	100	100	100	100	100	41,31	41,31
Penataan Organisasi	**Indeks kematangan organisasi daerah**								
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100	100	100	100	100	100	60,10	60,10
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	100	100	100	100	100	56,13	56,13
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	100	100	100	100	100	63,58	63,58
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah**								
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100	100	100	100	100	100	44,97	44,97
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100	100	100	100	100	100	81,09	81,09
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Nilai LPPD**								

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
	Indeks Reformasi Hukum								
	Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan								
Administrasi Tata Pemerintahan	**Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan**								
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	32,33	32,33
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	50,96	50,96
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100	100	100	100	100	100	78,53	78,53
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial**								
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100	100	100	100	100	100	47,91	47,91
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	100	100	100	100	100	100	3,35	3,35
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,	100	100	100	100	100	100	29,37	29,37

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Masyarakat	Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum**								
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	100	100	100	100	100	100	38,28	38,28
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	100	100	100	100	100	100	35,63	35,63
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	100	100	100	100	100	100	27,52	27,52
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah**								
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	100	100	100	100	100	100	51,43	51,43
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**ROA BUMD**								
	Persentase penyerapan APBD								
	Tingkat kematangan UKPBJ								
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD**								

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100	100	100	100	100	100	27,07	27,07
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100	100	100	100	100	100	32,56	32,56
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100	100	100	100	100	100	40,77	40,77
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan**								
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100	100	8,40	8,40
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100	100	100	100	100	100	51,75	51,75
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	81,34	81,34
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa**								
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	38,23	38,23
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	100	100	100	100	19,09	19,09

Urusan/pogram/kegiatan	Indicator kinerja program/kegiatan	Target kinerja capian program (renstra perangkat daerah) tahun 2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun lalu			Target pogram dan kegiatan renja tahun 2025	Perkiraan realisasi capian target renstra s/d tahun berjalan	
				Target renja 2024	Realisasi renja tahun 2024	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian pogram dan kegiatan s/d Tribulan II 2025	Tingkat capaian realisasi target renstra 2025 (%)
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	66,41	66,41
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,21nergy dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.**								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	100	100	100	100	100	100	18,73	18,73
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	100	100	100	100	100	100	58,05	58,05
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	100	100	100	100	100	100	14,23	14,23

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, terdiri atas :

A. Sekretaris Daerah
B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;
   a. Bagian Pemerintahan
   b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   c. Bagian Hukum
C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari;
   a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
   b. Bagian Administrasi Pembangunan
   c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
D. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari;
   a. Bagian Organisasi
   b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
   c. Bagian Umum

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut;

Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
d. pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan hukum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud, terdiri dari :

a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
a. Bagian Hukum

Bagian sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian Pemerintahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian hukum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Asisten, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa;
c. penyusunan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi

pembangunan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
b. Bagian Administrasi Pembangunan;
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.melakukan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan barang dan jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah bidang organisasi, hubungan masyarakat dan kesekretariatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Asisten Adminstrasi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
b. penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, pengawasan, keuangan, komunikasi dan informatika;

c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi, pengawasan, keuangan, komunikasi dan informatika;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi Daerah; dan
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Bagian Organisasi;
b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
c. Bagian Umum

Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Tujuan, sasaran dan program
Tahun 2024-2025 (Smt1)

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	71,05	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	81,50	Na
		1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP SETDA	%	75	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	51,19
		2) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	Nilai	3,59	3,59
			Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	34,31
		3) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ROA BUMD	%	1,21	1,82
			Persentase penyerapan APBD	%	98,90	100
			Tingkat kematangan UKPBJ	%	88,90	90,00

Sumber : Sekretariat Daerah 2025

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Karanganyar

Indikator	Satuan	Target Capian		Realisasi Capaian	
		2024	2025 Smstr I	2024	2025
Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	81	NA	69,31	NA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,50	84,88	85,42	84,88
Indeks reformasi birokarsi	Indeks	72	86	85,74	86
Indeks kematangan organisasi daerah	Indeks	38,21	38,2	38,21	38,2
Nilai Sakip Setda	Nilai	73,95	74	69,31	74
Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	76	76	76	76
Indeks Reformasi Hukum	Angka	99,50	99,50	99,50	99,50
Persentase penyerapan APBD	%	93,90	100	93,90	100
Tingkat kematangan UKPBJ	%	88,89	90	88,89	90
ROA (Return Of Aset) BUMD	%	1.21	1,82	1.21	1,82
Nilai LPPD	Nilai	3,59	3,59	3,59	3,59
ROA (Return Of Aset) BUMD	%	1,21	1,21	1,21	1,21
Indeks tatalaksana pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	60	NA	68,76	NA

Sumber : Sekretariat Daerah 2025

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai fasilitator dan koordinator dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, berupaya melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai visi dan misi Sekretariat Daerah dalam rangka membantu Kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas dan Lembaga terkait.

Isu-isu strategis merupakan isu yang muncul dari unit kerja sendiri yang mempengaruhi kinerja unit kerja tersebut.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dapat disimpulkan isu-isu strategis yang merupakan kekuatan dan kelemahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang belum optimal antar Perangkat Daerah dan berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;
3. Hubungan kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan lembaga dan dengan pihak swasta yang belum optimal;

4. Penyesuaian produk hukum daerah dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum yang masih perlu ditingkatkan;
5. Data informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
6. Pemberdayaan BUMD dan UMKM yang masih perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global;
7. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi administrasi pembangunan yang masih perlu ditingkatkan;
8. Prose Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan;
9. Manajemen ASN belum optimal dalam meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif, sehingga hal ini berdampak pada proses terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Tabel 2.7
Isu startegis Sekretariat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENAGNA PD	PERMASALAHAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARANGANYAR
		GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL JAWA TENGAH	
1. Tata kelola Pemerintahan	**1. Koordinasi yang belum optimal antar Perangkat Daerah dan berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;** **2. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;** **3. Hubungan kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan lembaga dan dengan pihak swasta yang belum optimal;** **4. Penyesuaian produk hukum daerah dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum yang masih perlu ditingkatkan;** **5. Data informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi**	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu tata kelola pemerintah: pemrintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	1. Optimalisasi pengawasan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyaraka t) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. 2. Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorienntasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Belum optimalnya Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik,

	daerah masih belum optimal; **6. Pemberdayaan BUMD dan UMKM yang masih perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global;** **7. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi administrasi pembangunan yang masih perlu ditingkatkan;Prose Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan;**				pemberdayaan BUMD dan UMKM, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap rancangan akhir RKPD, disajikan dalam tabel review rancangan akhir RKPD tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Tabel 2.3

Tabel 2.8
Review rancangan akhir RKPD Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
SEKRETARIAT DAERAH			**44.031.047.622**	**SEKRETARIAT DAERAH**			**44.031.047.622**
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**25.180.966.122**	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**25.180.966.122**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Nilai Sakip Setda**		**25.180.966.122**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai Sakip Setda**		**25.180.966.122**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD**		**175.200.500**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD**		**175.200.500**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag Umum Setda	14.720.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bag Umum Setda	14.720.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bag Umum Setda	160.480.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bag Umum Setda	160.480.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda**		**15.251.774.122**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tercukupinyagaji dan tunjangan ASN Seda**		**15.251.774.122**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bag Umum Setda	15.251.774.122	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bag Umum Setda	15.251.774.122

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah**		**4.480.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah**		**4.480.000**
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bag Umum Setda	4.480.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bag Umum Setda	4.480.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**131.009.700**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**131.009.700**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bag Umum Setda	115.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bag Umum Setda	115.500.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bag Umum Setda	15.509.700	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Bag Umum Setda	15.509.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.**		**1.239.635.800**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.**		**1.239.635.800**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bag Umum Setda	208.438.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bag Umum Setda	208.438.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bag Umum Setda	121.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bag Umum Setda	121.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bag Umum Setda	52.003.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bag Umum Setda	52.003.200
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Bag Umum Setda	468.750.000	Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi	Bag Umum Setda	468.750.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
	Tamu			Tamu	Kunjungan Tamu		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag Umum Setda	365.130.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bag Umum Setda	365.130.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bag Umum Setda	24.314.600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bag Umum Setda	24.314.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**		**28.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya pengadaan barang milik daerah**		**28.000.000**
Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bag Umum Setda	-	Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Bag Umum Setda	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bag Umum Setda	28.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bag Umum Setda	28.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bag Umum Setda	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Bag Umum Setda	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**3.522.688.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**		**3.522.688.000**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag Umum Setda	112.939.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bag Umum Setda	112.939.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bag Umum Setda	1.128.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bag Umum Setda	1.128.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bag Umum Setda	2.281.749.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bag Umum Setda	2.281.749.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**		**1.484.101.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah**		**1.484.101.000**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bag Umum Setda	834.956.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bag Umum Setda	834.956.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bag Umum Setda	135.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bag Umum Setda	135.200.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bag Umum Setda	430.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bag Umum Setda	430.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bag Umum Setda	83.945.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bag Umum Setda	83.945.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**		**1.494.439.000**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah**		**1.494.439.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag Umum Setda	981.514.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag Umum Setda	981.514.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	40.525.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	40.525.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag Umum Setda	50.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag Umum Setda	50.000.000
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag Umum Setda	422.400.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bag Umum Setda	422.400.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.**		**1.235.050.000**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan kepala daerah , wakil kepala daerah dan sekretaris daerah.**		**1.235.050.000**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	660.250.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	660.250.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	476.400.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	476.400.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	98.400.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Bag Umum Setda	98.400.000
Penataan Organisasi	**Indeks kematangan organisasi daerah**		**377.428.000**	**Penataan Organisasi**	**Indeks kematangan organisasi daerah**		**377.428.000**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bag Organisasi setda	149.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bag Organisasi setda	149.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bag Organisasi setda	114.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bag Organisasi setda	114.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bag Organisasi setda	114.428.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bag Organisasi setda	114.428.000
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah**		**237.160.000**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah**		**237.160.000**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bag protocol dan komunikasi pimpinan	173.423.000	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Bag protocol dan komunikasi pimpinan	173.423.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bag protocol dan komunikasi	63.737.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bag protocol dan komunikasi pimpinan	63.737.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
		pimpinan					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Nilai LPPD**		**8.107.737.000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD**		**8.107.737.000**
	Indeks Reformasi Hukum				**Indeks Reformasi Hukum**		
	Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan				**Persentase kebijakan kesra yang diterbitkan**		
Administrasi Tata Pemerintahan	**Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan**		**457.554.000**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Terwujudnya Administrasi Tata Pemerintahan**		**457.554.000**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag Pemerintahan setda	93.800.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Bag Pemerintahan setda	93.800.000
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag Pemerintahan setda	20.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bag Pemerintahan setda	20.000.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag Pemerintahan setda	343.754.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bag Pemerintahan setda	343.754.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial**		**170.392.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi terkait kesejahteraan sosial**		**170.392.000**
Fasilitasi Pengelolaan Bina	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Bag Kesra Setda	170.392.000	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Bag Kesra Setda	170.392.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Mental Spiritual	Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Bina Mental Spiritual	Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Bag Kesra Setda	170.392.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Bag Kesra Setda	170.392.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Bag Kesra Setda	170.392.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Bag Kesra Setda	170.392.000
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum**		**503.591.000**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya fasiltasi dan koodinasi hukum**		**503.591.000**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bag Hukum Setda	155.591.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Bag Hukum Setda	155.591.000
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag Hukum Setda	168.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Bag Hukum Setda	168.000.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bag Hukum Setda	180.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Bag Hukum Setda	180.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	**Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah**		**130.000.000**	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Cakupan perumusan , kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian bidang kerjasama daerah**		**130.000.000**
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag Pemerintahan Setda	130.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bag Pemerintahan Setda	130.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**ROA BUMD**		**10.742.344.500**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**ROA BUMD**		**10.742.344.500**
	Persentase penyerapan APBD				**Persentase penyerapan APBD**		
	Tingkat kematangan UKPBJ				**Tingkat kematangan UKPBJ**		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD**		**265.010.000**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD**		**265.010.000**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bag Perekonomian dan SDA Setda	69.600.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bag Perekonomian dan SDA Setda	69.600.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bag Perekonomian dan SDA Setda	63.410.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bag Perekonomian dan SDA Setda	63.410.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bag Perekonomian dan SDA Setda	132.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Bag Perekonomian dan SDA Setda	132.000.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan**		**136.270.000**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan**		**136.270.000**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bag Adm Pembangunan setda	46.270.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Bag Adm Pembangunan setda	46.270.000
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag Adm Pembangunan setda	45.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bag Adm Pembangunan setda	45.000.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag Adm Pembangunan setda	45.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Bag Adm Pembangunan setda	45.000.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		**179.362.000**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa**		**179.362.000**

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	84.760.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	84.760.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	40.000.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	54.602.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bag Pengadaan Barang dan Jasa	54.602.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,42nergy dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.**		**10.161.702.500**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,42nergy dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.**		**10.161.702.500**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bag Perekonomian Dan SDA	10.142.652.500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Bag Perekonomian Dan SDA	10.142.652.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Bag Perekonomian Dan SDA	5.350.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Bag Perekonomian Dan SDA	5.350.000

Rancangan Akhir RKPD				Hasil Analisi Kebutuhan			
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Pagu Indikator (Rp)**	**Sub Kegiatan**	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Lokasi Output kegiiatan**	**Kebutuhan Dana (Rp)**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Bag Perekonomian Dan SDA	13.700.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Bag Perekonomian Dan SDA	13.700.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dalam Renja Sekretariat Daerah dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.9
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Besar / Volume	Pagu	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan keimanan kepada tuhan yang maha esa	-Kel. Bolong -Desa Jatipuro	- 10 keg - 5 Paket	Rp.100.000.000 Rp.90.000.000	Bagian Kesra Setda
2	Pengadaan alat mesin	-desa jati	1 paket	Rp.500.000.000	Bagian Kesra Setda
3	Pengadaan alat rebana	-desa dagen -desa jetis -desa jaten	- 1 paket - 1 paket - 1 paket	Rp.250.000.000 Rp.250.000.000 Rp.100.000.000	Bagian Kesra Setda
4	Pengadaan alat pertunjukan wayang	-desa brujul	- 1 paket	Rp.250.000.000	Bagian Kesra Setda

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

3.1.2. Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;

16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang agritech, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong sport tourism sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam 16 prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
2. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
3. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
4. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
5. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
6. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
7. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
8. Petani milenial gajian
9. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
10. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi;
11. Revitalisasi embung;
12. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan;
13. Subsidi Pangan Murah;
14. Penyediaan benih yang berkualitas;
15. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian.

16. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.

Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran 2026 adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim;

9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10-30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;

18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;

19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;
6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;
12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan, kualitas kebijakan, pelayanan publik dan kematangan Organisasi.

Tabel 3.1
Tujuan Sasaran dan Program Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

NSPK RPJMD /Misi dan Tujuan / Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan, Sasaran	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Target
Misi 4 : Mengembangkan birokasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, professional dan birokasi pelayanan publik **Tujuan 1:** Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KemenPANRB	Indeks	86,0
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan, kualitas kebijakan, pelayanan publik dan Kematangan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai Kematangan Perangkat Daerah tahun n-1	Indeks	38,3
			IKM	perhitungan rata rata IKM seluruh	nilai	85,8

Sasaran 1 : Meningkatnya transparasi, akuntabilitas dan perhatianya masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah			Kabupaten	perangkat daerah tahunn		
			Indeks Kualitas Kebijakan	Hasil Penilaian dari LAN	Angka	76
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor ITKP pada Dashboard Sistem Aplikasi SIRUP	Skor	72
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat Daerah	Nilai IKM perengkat daerah	Nilai rata-rata IKM Sekretariat Daerah Tahun N	Nilai	85

Sumber : Sekretariat Daerah

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1 Tantangan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan Perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga perencanaan yang dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu

a. Koordinasi yang belum optimal antar Perangkat Daerah dan berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel;
c. Hubungan kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan lembaga dan dengan pihak swasta yang belum optimal;
d. Penyesuaian produk hukum daerah dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum yang masih perlu ditingkatkan;
e. Data informasi yang berhubungan dengan perekonomian dan pembinaan potensi daerah masih belum optimal;
f. Pemberdayaan BUMD dan UMKM yang masih perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan global;
g. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi administrasi pembangunan yang masih perlu ditingkatkan;
h. Prose Pengadaan Barang dan Jasa masih perlu ditingkatkan;
i. Manajemen ASN belum optimal dalam meningkatkan kualitas kinerja dan menciptakan budaya kerja positif, sehingga hal ini berdampak pada proses terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

3.3.2 Peluangan Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Sekretariat Daerah juga memiliki peluang antara lain adalah;

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, menjadi kesempatan yang baik untuk memulai perencanaan yang konsisten, sinkron dan berkelanjutan.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.

3. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong muncul dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.
6. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.
7. Selain itu, Sekretariat Daerah dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Sekretariat Daerah mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat Daerah.

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra PD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut:

3.4.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai urusan yang ditangani maka Sekretariat Daerah masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut;

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD

Tujuan / Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah	Arah kebijakan Perang Daerah
Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik **Sasaran 1 :** Meningkatnya transparasi, akuntabilitas dan perhatianya masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan, Kualitas Kebijakan, Pelayanan Publik Dan Kematangan Organisasi	1. Meningkatkan kompetensi dan komitmen para ASN di lingkup Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonimian dan Pembangunan) untuk mematuhi perjanjian kinerja yang telah disepakati.	1. Mengusulkan kegiatan peningkatan kompetensi ASN dan memberikan reward and punishment bagi ASN Lingkup Sekretariat daerah (Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
			2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategi dalam pencapaian sasaran dalam Menggunakan data dan informasi yang tepat sasaran.	2. Peningkatan kualitas kebijakan dan pelaporan daerah difokuskan pada peningkatan kemantapan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasas teknologi.
		1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatnya Pelayanan Publik Strategi dalam pencapaian sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas SDM.	1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program daerah berjalan sinergis dan efektif.
			2. Peningkatan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dalam rangka menjawab tuntutan atas peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorienntasi pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	2. Meningkatka peran bagian-bagian di Sekretariat Daerah sebagai koordinator Perangkat Daerah.

Sumber : Sekretariat Daerah 2025

3.4.2 Cascading Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Perangkat Daerah

Sasaran	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya	Program	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

transparasi, akuntabilitas dan perhatianya masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
		c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;	a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
		e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;	a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. d) Fasilitasi Kunjungan Tamu. e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. f) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
		f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;	a) Pengadaan kendaraan Dinas Opersional atau lapangan. b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
		g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
		h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
		i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. c) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. d) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		j. Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah;	a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah. b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah. c) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah.
		k. Penataan Organisasi	a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan. b) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana. c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
		l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	a) Fasilitasi Keprotokolan. b) Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
	Kegiatan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Administrasi Tata Pemerintahan;	a) Penataan Administrasi Pemerintahan. b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan. c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
		b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;	a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial. c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat.
		c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;	a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah. b) Fasilitasi Bantuan Hukum. c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
		d. Fasilitasi Kerja Sama Daerah;	a) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.

	Kegiatan dalam Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;	a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
		b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan. b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan. c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
		c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;	a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. b) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
		d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup. c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Sumber : Sekretariat Daerah 2025

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, Renstra PD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Sekretariat Daerah di Tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar disajikan dalam tabel berikut sebagaimana Tabel 4.1.

1. **Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rutin Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   j. Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah;
   k. Penataan Organisasi;
   l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
2. **Kegiatan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, difokuskan pada koordinasi pelaporan dan fasilitasi implementasi SPM, serta koordinasi kesejahteraan rakyat, fasilitasi kerja sama daerah, dan fasilitasi pembentukan peraturan daerah;
   a. Administrasi Tata Pemerintahan;
   b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
   c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
   d. Fasilitasi Kerja Sama Daerah;
3. **Kegiatan dalam Program Perekonomian dan Pembangunan**, difokuskan pada pelaporan pelaksanaan pembangunan, Peningkatan Tata Kelola Pengadaan, fasilitasi BUMN, BLUD dan penguatan TPID;
   a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
   b. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
   c. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam;

4.2 Indikator Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra PD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah, merupakan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah,. (lebih lengkap lihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Sekretariat Daerah

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Sekretariat Daerah

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan Pusat.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						**44.031.047.622,00**							**32.656.113.420,20**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**44.031.047.622,00**							**32.656.113.420,20**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**44.031.047.622,00**							**32.656.113.420,20**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip Setda***	**-**			**74 Nilai**	**25.180.966.122,00**						**-**	**22.491.155.292,90**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja SKPD*	-			100 %	175.200.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	14.720.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	160.480.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tercukupinya gaji dan tunjangan ASN Setda*	-			100%	15.251.774.122,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	8.962.373.803,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/bulan	15.251.774.122,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		8.962.373.803,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang untuk daerah pada perangkat daerah*	-			100 %	4.480.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.480.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tercukupinya administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			100 %	131.009.700,00			Memperkuat penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	115.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	15.509.700,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sekretariat Daerah		160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.*	-			100 %	1.239.635.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	2.320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	208.438.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	121.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	52.003.200,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	468.750.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	365.130.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	24.314.600,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah*	-			100 %	28.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	1.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		130.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	28.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		420.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpenuninya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	3.522.688.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	2.489.701.559,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	112.939.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.128.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		1.172.409.314,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.281.749.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		1.162.292.245,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah*	-			100 %	1.484.101.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	1.976.248.024,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	834.956.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		1.314.048.280,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	135.200.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		181.990.173,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	430.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		424.682.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	83.945.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		55.526.811,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Tercukupinya administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah*	-			100 %	1.494.439.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatn Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	1.953.234.292,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	981.514.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		841.761.530,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	40.525.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		70.702.414,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		60.585.345,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	422.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		980.185.003,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah*	-			100 %	1.235.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	1.536.389.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		60.585.345,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	422.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		980.185.003,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Tercukupinya kebutuhan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah*	-			100 %	1.235.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	1.536.389.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	660.250.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		859.365.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	476.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		555.853.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	98.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		121.170.690,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Indeks kematangan organisasi daerah*	-			40 nilai	377.428.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar	-	1.066.207.954,90	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	149.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar		333.863.277,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	114.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar		320.579.969,60	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	114.428.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar		411.764.708,30	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Cakupan pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah*	-			100 %	237.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah	-	302.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				288 Laporan	173.423.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		231.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	63.737.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Sekretariat Daerah		71.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Nilai LPPD Indeks Reformasi Hukum***	**-**			**3,52 Nilai 66,55 Angka**	**8.107.737.000,00**						**-**	**7.816.643.422,30**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	-			4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	457.554.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3.Meningkatkanintegritas dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum	-	1.758.974.618,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	93.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3.Meningkatkanintegritas dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		490.876.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	20.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3.Meningkatkanintegritas dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		245.440.115,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	343.754.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		1.022.658.448,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah dokumen Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Jumlah dokumen Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual*	-			100 % 100 % 100 %	7.016.592.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Menin gkatka nya kualita s pemer intaha n, keseja hteraa n dan reform asi huku m	-	3.830.971.411,30	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	5.040.000.000,00	Kab. Karan ganyar , Semua Kecam atan, Semu a Kel/De sa	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Menin gkatka nya kualita s pemer intaha n, keseja hteraa n dan reform asi huku m		1.843.729.737,30	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1.806.200.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Meningkatkanya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		1.110.224.285,50	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	170.392.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Meningkatkanya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		877.017.388,50	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	-			100 %	503.591.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar	-	1.694.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				250 Dokumen	155.591.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	168.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar		797.288.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				250 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Perangkat Daerah di Lingkungan Kab.Karanganyar		697.627.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	-			1 dokumen	130.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum	-	531.782.393,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	130.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		531.782.393,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Penyerapan APBD*** ***ROA (Return of aset) BUMD***	**-**			**100 % 1,82 %**	**10.742.344.500,00**						**-**	**2.348.314.705,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah koordinasi di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, serta pengelolaan BUMD*	-			100 %	265.010.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum	-	720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	69.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	63.410.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	132.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	Meningkatnya kualitas pemerintahan, kesejahteraan dan reformasi hukum		250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* *Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan berlaku dan ketersediaan data realisasi kegiatan* *Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa*	-			12 Laporan 8 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan 8 Dokumen 12 Dokumen	136.270.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Penge lolaan Evalu asi dan Pelap oran Pelaks anaan Pemb angun an	-	358.731.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	46.270.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yangberkualitas, mendorong kewirausah aan, mengembangkan industri kreatif sertamengemba ngkanagromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Penge lolaan Evalu asi dan Pelap oran Pelaks anaan Pemb angun an		126.611.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkanagromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruktur	Penge lolaan Evalu asi dan Pelap oran Pelaks anaan Pemb angun an		116.060.175,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengemb angkan kualitas infrastruktur	Penge lolaan Evalu asi dan Pelap oran Pelaks anaan Pemb angun an		116.060.175,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Tersedianya fasilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa*	-			100 %	179.362.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengemb angkan kualitas infrastruktur	-	-	949.583.255,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				40 Dokumen	84.760.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		369.282.375,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				42 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		263.773.125,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				7 Orang	54.602.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		316.527.755,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah koordinasi dibidang pertanian, kehutanan,kelautan, perikanan,energi dan air serta pertambangan dan lingkungan hidup.*	-			100 %	10.161.702.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 2. Meningk atkan integritas p embanguna n ekonomi	-	-	320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,Perdaganga n, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				4 Dokumen	10.142.652.500,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 2. Meningk atkan integritas p embanguna n ekonomi	-		210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				6 Dokumen	5.350.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 2. Meningk atkan integritas p embanguna n ekonomi	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	13.700.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas p embanguna n ekonomi	-		55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	J U M L A H							**44.031.047.622,00**							**32.656.113.420,20**	

Tabel. 4.2
Target IKU Sekretariat Daerah Tahun 2026

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1.	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM) Sekretariat Daerah	Nilai	84,88

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian	**Program** Kegiatan dalam Program Perekonomian dan Pembangunan **Kegiatan** Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; **SubKegiatan** a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD. b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian. c) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp. 265.010.000,00
2	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	**Program** Kegiatan dalam Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. **Kegiatan** Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; **SubKegiatan** - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual. - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial. - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 7.016.592.000,00

BAB V
PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dokumen ini disusun dengan maksud agar Sekeratriat Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra sesuai arahan operasional dalam RKPD. Renja merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Renja merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah.

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pada dasa Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Tahun 2026.

5.3 Rencana Tidak Lanjut

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2026 yang berpedoman pada Renstra 2025 - 2029 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar agar mendukung dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan dan hasil kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar secara berkala

4. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan
5. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
6. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
7. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja oleh Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan		
Pejabat		Paraf
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2.	Kepala Baperlitbang	
3.	Sekretaris Baperlitbang	
4.	Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....i
Daftar Tabel.....ii
KATA PENGANTAR.....iii
BAB I PENDAHULUAN.....I-1
1.1. Latar Belakang.....I-1
1.2. Landasan Hukum.....I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....I-3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024.....II-5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....II-5
2.1.1. Evaluasi Program Tahun 2024.....II-6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....II-23
2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....II-25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-30
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....II-40
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....III-1
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....III-3
3.2.1. Tujuan.....III-3
3.2.2. Sasaran.....III-4
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....III-5
3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah.....III-5
3.3.2. Peluang Perangkat Daerah.....III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....IV-1
BAB V PENUTUP.....V-1

Daftar Tabel

Tabel 2.1.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (TW II).....II-7

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025.....II-12

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.....II-24

Tabel 2.4
Tabel Permasalahan dan Akar Masalah Sekretariat DPRD.....II-26

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.....II-29

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.....II-31

Tabel 2.7.
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar.....II-40

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026….III-4

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD.....III-7

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....III-7

Tabel 4.2.
Target IKU Sekretariat DPRD Tahun 2026.....IV-23

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....IV-23

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja PD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2026. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 – 2029.

Adapun penyusunan Rencana Kerja PD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Harapan Kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karanganyar, September 2025
PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR

SRI ENDAH YUNIASTUTI,S.H,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196806041995032003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap PD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja PD merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Rencana Kerja PD merupakan salah satu instrument tuntuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2026.Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

a. pelaksanaan pelayanan Perangkat daerah;
b. pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
c. penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, Sebagai berikut:

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, Sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB V Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD, dengan indikator capaian yaitu nilai IKM.

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin dicapai adalah : Mengoptimalkan pelayanan DPRD yang berkualitas, efektif dan efisien dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan,diantaranya:

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
2. Lemahnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi aparatur;
3. Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
4. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja PD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas danfungsi Sekretariat DPRD.
3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
5. Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan penyedia, terkait dengan perencanaan pengadaan dan penganggarannya;
2. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun perangkat daerah terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tinggi nya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

4. mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Sekretariat DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**68.096.217.189**	**74.445.682.974**		**63.696.648.507**	**65.497.588.507**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**38.724.774.648**	**40.704.695.833**		**40.660.227.870**	**42.582.781.823**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**487.652.275**	**507.271.275**		**442.577.400**	**568.347.900**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	330.783.025	358.862.025		290.694.150	392.146.650	
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.114.500	4.114.500		4.114.500	4.114.500	
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.114.500	4.114.500		4.114.500	4.114.500	
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.913.500	4.913.500		4.913.500	4.913.500	
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.913.500	4.913.500		5.173.500	5.173.500	
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	134.623.000	125.163.000		128.531.500	151.021.500	
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.190.250	5.190.250		5.035.750	6.863.750	
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.793.764.494**	**3.897.787.124**		**3.996.067.483**	**4.166.467.483**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.712.784.644	3.816.807.274		3.915.857.933	4.085.857.933	
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	80.979.850	80.979.850		80.209.550	80.609.550	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**792.055.250**	**1.064.639.250**		**812.135.500**	**812.135.500**	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	233.887.500	497.857.500		233.784.250	233.784.250	
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	189.308.500	116.248.500		189.479.500	189.479.500	
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	368.859.250	450.533.250		388.871.750	388.871.750	
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.974.418.399**	**2.374.162.199**		**1.980.424.825**	**1.837.651.775**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	314.355.420	314.355.420		313.238.820	169.238.820	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.423.679	112.423.679		112.310.405	102.109.655	

4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	302.833.300	311.629.600		296.883.300	324.733.300	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.900.000	116.850.000		75.000.000	99.000.000	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	238.191.000	261.573.500		243.511.000	198.511.000	
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000		7.091.300	7.169.000	
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	275.250.000	345.000.000		275.250.000	279.750.000	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	353.563.000	353.563.000		353.563.000	353.563.000	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.902.000	553.767.000		303.577.000	303.577.000	
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.758.890.000**	**2.607.207.500**		**435.500.000**	**2.314.770.500**	
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.405.940.000	1.982.330.000		0	1.581.883.000	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.100.000	233.627.500		103.900.000	270.687.500	
4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-		0	124.800.000	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.600.000	231.600.000		123.000.000	118.000.000	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122.250.000	159.650.000		208.600.000	219.400.000	
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.326.528.450**	**1.436.962.250**		**1.467.531.700**	**1.485.582.400**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	352.243.450	377.244.250		368.445.700	284.602.400	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	676.825.000	645.050.000		810.825.000	816.000.000	
4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.880.000	191.880.000		82.200.000	100.400.000	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.580.000	222.788.000		206.061.000	284.580.000	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.259.566.700**	**2.520.294.415**		**2.036.355.400**	**2.013.108.550**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	792.760.000	692.625.000		680.072.800	698.072.800	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	548.940.000	548.940.000		584.872.000	584.872.000	
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	60.250.000	60.250.000		48.200.000	48.200.000	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.750.000	97.750.000		106.100.000	106.100.000	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	306.993.700	392.656.415		312.495.100	276.495.100	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.200.000	580.400.000		157.000.000	151.753.150	
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.673.000	147.673.000		147.615.500	147.615.500	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**25.202.141.150**	**25.186.663.890**		**28.473.872.232**	**28.542.511.135**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.651.342.900	24.407.115.640		27.923.046.982	27.991.685.885	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	477.529.900	706.279.900		477.556.900	477.556.900	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	73.268.350	73.268.350		73.268.350	73.268.350	
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.129.757.930**	**1.109.707.930**		**1.015.763.330**	**842.206.580**	
4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan	5.607.650	5.607.650		5.607.650	5.607.650	

	DPRD						
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	12.500.100	12.500.100		12.497.100	12.497.100	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.111.650.180	1.091.600.180		997.658.580	824.101.830	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**29.371.442.541**	**33.740.987.141**		**23.036.420.637**	**22.914.806.684**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.420.493.650**	**2.176.442.350**		**2.406.721.450**	**2.162.107.550**	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	403.802.150	245.696.850		409.400.550	356.380.850	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	916.426.400	928.516.400		971.122.900	747.144.650	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	792.826.700	765.170.700		784.744.600	828.976.550	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	213.289.400	133.409.400		147.039.400	139.048.500	
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	94.149.000	103.649.000		94.414.000	90.557.000	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**2.164.223.162**	**1.781.408.212**		**2.162.020.062**	**2.002.969.360**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	420.775.802	420.775.802		426.615.102	398.198.452	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	420.924.302	420.924.302		431.312.002	388.198.452	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	420.790.702	420.790.702		417.870.002	398.198.452	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	420.816.954	38.002.004		420.956.254	398.198.452	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	480.915.402	480.915.402		465.266.702	420.175.552	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2.336.743.055**	**2.381.653.055**		**2.323.998.005**	**2.663.594.892**	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	211.317.215	148.317.215		207.977.215	143.139.715	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	248.386.215	172.386.215		247.206.215	153.695.715	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	230.125.415	160.625.415		228.945.415	143.139.715	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	267.024.215	191.024.215		265.844.215	143.139.715	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	46.542.050	46.542.050		46.621.250	416.854.050	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	852.965.930	1.182.375.930		851.490.930	1.243.450.430	
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	480.382.015	480.382.015		475.912.765	420.175.552	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**4.357.402.365**	**5.490.649.665**		**3.956.684.615**	**3.985.374.615**	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	444.082.500	444.082.500		-	-	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.021.025.000	2.382.105.000		2.021.167.400	2.021.167.400	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	205.426.000	285.338.000		205.435.450	205.435.450	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.530.000	216.530.000		242.554.750	242.554.750	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	438.185.800	383.458.500		436.447.100	457.247.100	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	95.361.315	80.810.315		98.854.815	64.504.815	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	936.791.750	1.698.325.350		952.225.100	994.465.100	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**2.069.694.102**	**3.631.428.652**		**3.696.908.652**	**3.421.227.752**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	56.950.250	56.945.250		56.737.750	277.843.500	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	451.004.302	451.004.302		445.021.802	417.305.152	
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	1.561.739.550	3.123.479.100		3.195.149.100	2.726.079.100	
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik**	**108.137.500**	**108.137.500**		**107.783.500**	**141.064.500**	

	DPRD						
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	90.877.500	90.877.500		90.671.000	89.297.000	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	17.260.000	17.260.000		17.112.500	51.767.500	
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**24.056.250**	**24.056.250**		**23.656.250**	**42.006.250**	
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	9.691.750	9.691.750		9.691.750	8.041.750	
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	14.364.500	14.364.500		13.964.500	33.964.500	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**15.890.692.457**	**18.147.211.457**		**8.358.648.103**	**8.496.461.765**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.105.794.625	14.872.187.625		6.953.165.638	7.098.437.300	
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	115.933.880	104.609.880		112.497.250	72.947.750	
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.222.539	2.222.539		1.848.450	34.788.450	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.666.741.413	3.168.191.413		1.291.136.765	1.290.288.265	

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebesar Rp. 65.497.588.507,- (termasuk Perubahan) dengan 2 Program 17 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 58.396.312.801,- atau 95% .

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

1	2	3	4	5	6	7	8
NO	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**2024**			**2025**		
		TARGET	**REALISASI**	**%**	**TARGET**	**REALISASI**	**%**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**40.704.695.833**	**38.123.818.606**	**94%**	**42.582.781.823**	**17.717.471.835**	**42%**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**507.271.275**	**473.529.675**	**93%**	**568.347.900**	**91.919.000**	**16%**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	358.862.025	328.830.025	92%	392.146.650	52.724.200	13%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	4.114.500	3.652.500	89%	4.114.500	-	0%
3)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	4.114.500	3.996.500	97%	4.114.500	2.592.800	63%
4)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	4.913.500	4.838.300	98%	4.913.500	2.913.500	59%
5)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PD	4.913.500	4.913.500	100%	5.173.500	-	0%
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	125.163.000	122.205.400	98%	151.021.500	30.813.500	20%
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.190.250	5.093.450	98%	6.863.750	2.875.000	42%
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.897.787.124**	**3.644.194.563**	**93%**	**4.166.467.483**	**1.785.067.697**	**43%**
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.816.807.274	3.564.536.963	93%	4.085.857.933	1.781.954.147	44%
9)	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	80.979.850	79.657.600	98%	80.609.550	3.113.550	4%
3.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.064.639.250**	**922.298.000**	**87%**	**812.135.500**	**457.467.200**	**56%**
10)	Pendididkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	497.857.500	445.456.800	89%	233.784.250	163.676.200	70%
11)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	116.248.500	81.472.000	70%	189.479.500	-	0%
12)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	450.533.250	395.369.200	88%	388.871.750	293.791.000	76%
4.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.374.162.199**	**2.271.447.164**	**96%**	**1.837.651.775**	**811.174.400**	**44%**
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	314.355.420	307.991.500	98%	169.238.820	85.125.500	50%
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.423.679	112.363.150	100%	102.109.655	58.647.500	57%
15)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	311.629.600	295.735.050	95%	324.733.300	139.749.500	43%

16)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.850.000	99.700.000	85%	99.000.000	40.100.000	41%
17)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	261.573.500	258.643.500	99%	198.511.000	84.463.000	43%
18)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.571.000	91%	7.169.000	450.000	6%
19)	Penyediaan Bahan /Material	345.000.000	343.850.000	100%	279.750.000	169.550.000	61%
20)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	353.563.000	343.500.000	97%	353.563.000	99.350.000	28%
21)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi PD	553.767.000	505.092.964	91%	303.577.000	133.738.900	44%
5.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.607.207.500**	**2.511.276.000**	**96%**	**2.314.770.500**	**966.800.000**	**42%**
22)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.982.330.000	1.902.476.000	96%	1.581.883.000	628.000.000	40%
23)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.627.500	228.050.000	98%	270.687.500	123.700.000	46%
24)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				124.800.000	-	0%
25)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	231.600.000	226.100.000	98%	118.000.000	-	0%
26)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	159.650.000	154.650.000	97%	219.400.000	215.100.000	98%
6.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.436.962.250**	**1.291.388.613**	**90%**	**1.485.582.400**	**537.396.624**	**36%**
27)	Penyediaan Jasa surat menyurat	377.244.250	333.194.250	88%	284.602.400	141.924.225	50%
28)	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	645.050.000	573.012.894	89%	816.000.000	265.061.399	32%
29)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.880.000	165.100.000	86%	100.400.000	53.400.000	53%
30)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.788.000	220.081.469	99%	284.580.000	77.011.000	27%
7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.520.294.415**	**2.259.083.006**	**90%**	**2.013.108.550**	**736.823.778**	**37%**
31)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	692.625.000	597.846.000	86%	698.072.800	226.941.000	33%
32)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	548.940.000	425.800.500	78%	584.872.000	156.798.878	27%
33)	Pemeliharaan Mebel	60.250.000	60.250.000	100%	48.200.000	48.000.000	####
34)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.750.000	97.645.000	100%	106.100.000	41.200.000	39%

35)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.656.415	365.360.800	93%	276.495.100	223.698.300	81%
36)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	580.400.000	571.429.000	98%	151.753.150	-	0%
37)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	147.673.000	140.751.706	95%	147.615.500	40.185.600	27%
8.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**25.186.663.890**	**23.931.531.425**	**95%**	**28.542.511.135**	**12.109.941.982**	**42%**
38)	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	24.407.115.640	23.311.253.075	96%	27.991.685.885	12.103.947.982	43%
39)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	706.279.900	562.734.000	80%	477.556.900	5.994.000	1%
40)	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	73.268.350	57.544.350	79%	73.268.350	-	0%
9.	**Layanan Administrasi DPRD**	**1.109.707.930**	**819.070.160**	**74%**	**842.206.580**	**220.881.154**	**26%**
41)	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5.607.650	5.607.650	100%	5.607.650	5.607.650	####
42)	Fasilitasi Fraksi DPRD	12.500.100	12.500.100	100%	12.497.100	12.497.100	####
43)	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.091.600.180	800.962.410	73%	824.101.830	202.776.404	25%
II.	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**33.740.987.141**	**29.385.570.843**	**87%**	**22.914.806.684**	**9.438.727.733**	**41%**
10.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**2.176.442.350**	**1.411.728.650**	**65%**	**2.162.107.550**	**413.937.300**	**19%**
44)	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	245.696.850	213.390.350	87%	356.380.850	9.000.000	3%
45)	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	928.516.400	308.954.800	33%	747.144.650	26.283.000	4%
46)	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	765.170.700	689.694.800	90%	828.976.550	363.280.700	44%
47)	fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	133.409.400	126.877.200	95%	139.048.500	15.373.600	11%
48)	Penyusunan Tata Tertib DPRD	103.649.000	72.811.500	70%	90.557.000	-	0%
11.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**1.781.408.212**	**1.425.045.408**	**80%**	**2.002.969.360**	**364.613.000**	**18%**
49)	Pembahasan KUA dan PPAS	420.775.802	345.918.552	82%	398.198.452	-	0%
50)	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	420.924.302	356.309.002	85%	388.198.452	-	0%
51)	Pembahasan APBD	420.790.702	372.414.102	89%	398.198.452	364.613.000	92%
52)	Pembahasan APBD Perubahan	38.002.004	3.965.000	10%	398.198.452	-	0%
53)	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	480.915.402	346.438.752	72%	420.175.552	-	0%
12	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2.381.653.055**	**1.791.391.055**	**75%**	**2.663.594.892**	**-**	**0%**

.							
54)	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	148.317.215	84.712.215	57%	143.139.715	12.912.806	9%
55)	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	172.386.215	90.773.915	53%	153.695.715	29.228.480	19%
56)	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	160.625.415	87.076.615	54%	143.139.715	4.500.000	3%
57)	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	191.024.215	106.437.615	56%	143.139.715	27.511.020	19%
58)	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	46.542.050	20.917.500	45%	416.854.050	372.387.250	89%
59)	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.182.375.930	1.036.228.280	88%	1.243.450.430	1.083.231.720	87%
60)	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	480.382.015	365.244.915	76%	420.175.552	380.465.426	91%
13.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**5.490.649.665**	**4.890.043.155**	**89%**	**3.985.374.615**	**2.025.961.800**	**51%**
61)	Orientasi DPRD	444.082.500	399.753.200	90%			
62)	Pendalaman Tugas DPRD	2.382.105.000	1.906.338.790	80%	2.021.167.400	1.144.121.650	57%
63)	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	285.338.000	272.915.500	96%	205.435.450	36.000.000	18%
64)	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	216.530.000	210.000.000	97%	242.554.750	108.000.000	45%
65)	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	383.458.500	364.779.500	95%	457.247.100	129.266.700	28%
66)	Penyusunan Program Kerja DPRD	80.810.315	39.820.815	49%	64.504.815	-	0%
67)	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.698.325.350	1.696.435.350	100%	994.465.100	608.573.450	61%
14.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**3.631.428.652**	**3.447.763.852**	**95%**	**3.421.227.752**	**1.750.922.802**	**51%**
68)	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	56.945.250	18.566.750	33%	277.843.500	47.563.500	17%
69)	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	451.004.302	375.828.002	83%	417.305.152	365.068.752	87%
70)	Pelaksanaan Reses	3.123.479.100	3.053.369.100	98%	2.726.079.100	1.338.290.550	49%
15.	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**108.137.500**	**16.463.200**	**15%**	**141.064.500**	**17.860.600**	**13%**
71)	Penyusunan Kode Etik DPRD	90.877.500	16.463.200	18%	89.297.000	16.360.600	18%
72)	Pengawasan Kode Etik DPRD	17.260.000	-	0%	51.767.500	1.500.000	3%
16.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**24.056.250**	**14.264.500**	**59%**	**42.006.250**	**-**	**0%**
73)	Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama daerah	9.691.750	-	0%	8.041.750	-	0%
74)	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	14.364.500	14.264.500	99%	33.964.500	-	0%

17.	**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**	**18.147.211.457**	**16.388.871.023**	**90%**	**8.496.461.765**	**4.865.432.231**	**57%**
75)	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.872.187.625	14.014.357.497	94%	7.098.437.300	4.117.694.170	58%
76)	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	104.609.880	86.429.520	83%	72.947.750	-	0%
77)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.222.539	2.222.539	100%	34.788.450	14.945.050	43%
78)	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.168.191.413	2.285.861.467	72%	1.290.288.265	732.793.011	57%
	2 Program 17 Kegiatan 77 Subkegiatan	**74.445.682.974**	**67.509.389.449**	**91%**	**65.497.588.507**	**27.156.199.568**	**41%**

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.571.998.897	34.594.603.113	92,08	40.704.695.833	38.123.818.606	94
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.876.920.300	20.680.019.552	94,53	33.740.987.141	29.385.570.843	87

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 104 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2021 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan evaluasi indikator kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2021–2024, sebagian besar capaian indikator menunjukkan tren yang baik. Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan signifikan hingga melampaui target pada 2024 (119%), yang mencerminkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola, efisiensi proses kerja, serta penguatan kapasitas birokrasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Indeks Kepuasan Anggota DPRD juga meningkat stabil, bahkan mencapai 106% dari target pada 2024, menunjukkan bahwa pelayanan administratif, fasilitasi rapat, dan dukungan teknis terhadap anggota DPRD semakin responsif dan sesuai kebutuhan. Selain itu, indikator terkait persentase pencapaian IKU SKPD dan dukungan pelaksanaan tugas DPRD mampu mencapai 100% setiap tahun, yang menandakan konsistensi kelembagaan dalam memastikan seluruh target kinerja organisasi dapat diwujudkan.

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian, khususnya pada capaian nilai SAKIP OPD yang justru mengalami penurunan dari 76 pada 2021 menjadi 69,40 sejak 2023 namun mengalami perbaikan yaitu 71,46 pada tahun 2024. Rendahnya capaian SAKIP mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam hal perencanaan kinerja, pelaporan, dan keterkaitan antara program dengan hasil yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal, kurang optimalnya monitoring dan evaluasi, atau keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun dokumen akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, meskipun secara umum pelayanan Sekretariat DPRD telah berjalan optimal, peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perlu menjadi fokus utama agar capaian indikator dapat seimbang antara kepuasan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Analisis tentang pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar disajikan dalam Tabel berikut :

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Capaian program dan kegiatan s.d. Tahun 2025/tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra 2025 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**		80		37.379.332.838	34.594.603.113	92,08%	42.582.781.823	17.717.471.835	42%
4			2.01		**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		12 bulan	12 bulan	201.489.025	158.855.400	85,59%	568.347.900	91.919.000	16%
4				01	Penysunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	93.761.025	76.312.800	100%	392.146.650	52.724.200	13%
4				02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA PD	Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	1 dokumen	1 dokumen	4.114.500	442.400	8,85%	4.114.500	-	0%
4				03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA PD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	1 dokumen	1 dokumen	4.114.500	2.492.400	49,87%	4.114.500	2.592.800	63%
4				04	Koordinasi dan penyusunan DPA-PD	Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	1 dokumen	4.913.500	6.642.400	94,86%	4.913.500	2.913.500	59%

						Dokumen DPA-PD								
4				05	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-PD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD	1 dokumen	1 dokumen	4.913.500	4.532.400	90,70%	5.173.500	-	0%
4				06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	1 laporan	1 laporan	86.060.500	68.433.000	81,96%	151.021.500	30.813.500	20%
4				07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	3.611.500	0	0	6.863.750	2.875.000	42%
4			2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				3.478.724.095	3.694.778.484	88,96%	4.166.467.483	1.785.067.697	43%
4				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ bulan	31 orang/ bulan	3.448.819.245	3.671.861.084	88,97%	4.085.857.933	1.781.954.147	44%
				05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	3 dokumen	3 dokumen	29.904.850	22.917.400	87,23%	80.609.550	3.113.550	4%
			2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				649.356.500	1.486.873.532	88,97%	812.135.500	457.467.200	56%
				09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkanTugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 orang	58 orang	233.887.500	746.601.000	83,76%	233.784.250	163.676.200	70%
				10	Sosialisasi peraturan perundang-	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	32 orang	32 orang	90.934.750	288.932.500	95,54%	189.479.500	-	0%

					undangan	Undangan							
				11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	40 orang	40 orang	324.534.250	451.340.032	94,55%	388.871.750	293.791.000	76%
4			2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				1408.351.419	1.669.812.040	95,73%	1.837.651.775	811.174.400	44%
4				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	60 paket	156.069.920	224.434.630	98,21%	169.238.820	85.125.500	50%
4				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 paket	50 paket	112.423.679	111.866.980	99,44%	102.109.655	58.647.500	57%
4				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	53 paket	53 paket	203.849.820	293.814.990	99,88%	324.733.300	139.749.500	43%
4				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2000 paket	2000 paket	100.000.000	42.190.000	95,50%	99.000.000	40.100.000	41%
4				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	10 paket	173.441.000	152.701.000	100%	198.511.000	84.463.000	43%
4				06	Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen	35 Dokumen	5.000.000	10.127.970	36,83%	7.169.000	450.000	6%
				07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket Bahan Atau Material yang disediakan	180 paket	180 paket	249.000.000	135.250.000	99,63%	279.750.000	169.550.000	61%

				08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	12 Laporan	265.000.000	509.300.000	99,98%	353.563.000	99.350.000	28%
4				09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD	15 laporan	15 laporan	143.567.000	189.225.470	78,42%	303.577.000	133.738.900	44%
4			2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					1.795.654.729	92,57%	2.314.770.500	966.800.000	42%
				01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 unit	5 unit	0	427.500.000	96,18%	1.581.883.000	628.000.000	40%
4				06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 unit	6 unit	229.687.500	303.352.000	79,01%	270.687.500	123.700.000	46%
							1 Unit	1 Unit	-	-	-	124.800.000	-	0%
				10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	5 unit	118.937.500	473.846.400	93,50%	118.000.000	-	0%
				11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	94.500.000	5890.956.329	97,76%	219.400.000	215.100.000	98%
			2.08		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**				1.071.938.204	805.767.640	90,10%	1.485.582.400	537.396.624	36%
				01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 laporan	3000 laporan	271.113.204	186.484.960	85,25%	284.602.400	141.924.225	50%
				02	Penyediaan jasa komunikasi sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 laporan	4 laporan	686.825.000	511.636.680	90,10%	816.000.000	265.061.399	32%

					daya air dan listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
				03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	37.200.000	32.400.000	100%	100.400.000	53.400.000	53%
				04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	76.800.000	74.880.000	100%	284.580.000	77.011.000	27%
4			2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				1.907.057.315	1.524.663.850	84,04%	2.013.108.550	736.823.778	37%
4				01	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	8 Unit	8 Unit	843.420.000	591.741.000	86,52%	698.072.800	226.941.000	33%
4				02	Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 Unit	16 Unit	548.940.000	394.753.350	73,17%	584.872.000	156.798.878	27%
				05	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	435 unit	435 unit	48.200.000	65.300.000	99,44%	48.200.000	48.000.000	100%
				06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 unit	110 unit	84.700.000	80.475.000	87,44%	106.100.000	41.200.000	39%
4				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	6 unit	6 unit	216.363.500	276.612.000	88,91%	276.495.100	223.698.300	81%

					Bangunan Lainnya	dipelihara/direhabilitasi								
4				10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	53.958.815	11.789.000		151.753.150	-	0%
				11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	7 unit	111.475.000	103.993.500	93,06%	147.615.500	40.185.600	27%
4			2.15		**Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**				27.853.441.150	22.757.864.638	78,75%	28.542.511.135	12.109.941.982	42%
4				01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 orang/bulan	45 orang/bulan	27.376.342.900	22.328.101.806	58,27%	27.991.685.885	12.103.947.982	43%
				02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 paket	3 paket	403.829.900	377.248.500	67,46%	477.556.900	5.994.000	1%
				03	Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	45 orang	73.268.350	52.514.332	66,99%	73.268.350	-	0%
			2.16		**Layanan Administrsi DPRD**				365.850.130	700.332.800	78%	842.206.580	220.881.154	26%
				01	Penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	45 dokumen	45 dokumen	5.607.650	1.445.800	15,44%	5.607.650	5.607.650	100%
				02	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 laporan	6 laporan	10.731.900	9.849.400	93,23%	12.497.100	12.497.100	100%

				03	Fasilitasi rapat kordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 laporan	12 laporan	339.510.580	689.037.600	79,26%	824.101.830	202.776.404	25%
		02			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				12.712.186.352			22.914.806.684	19.438.727.733	41%
			2.01		**Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**				1.465.413.050	1.277.878.700	77,62%	2.162.107.550	413.937.300	19%
				01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	207/105.050	123.930.500	94,88%	356.380.850	9.000.000	3%
				02	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 dokumen	2 dokumen	614.300.650	396.10.500	67,46%	747.144.650	26.283.000	4%
				03	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen	354.811.700	606.048.700	58,27%	828.976.550	363.280.700	44%
				04	Fasilitasi penyusunan penjelasan /dana tau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 dokumen	2 dokumen	209.214.400	151.739.000	78,85%	139.048.500	15.373.600	11%
							1 dokumen		-	-	-	90.557.000	-	0%
			2.02		**Pembahasan kebijakan anggaran**				1.679.944.162	1.504.839.700	95,91%	2.002.969.360	364.613.000	18%
				01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	1 dokumen	335.567.802	300.178.800	95,85%	398.198.452	-	0%
				02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	336.764.802	302.751.000	96,67%	388.198.452	-	0%

						KUA dan Perubahan PPAS								
				03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	335.417.702	295.483.500	94,84%	398.198.452	364.613.000	92%
				04	Pembehasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen	335.596.954	303.731.400	95,53%	398.198.452	-	0%
				06	Pembahasan pertanggung jawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	336.596.902	302.695.000	96,65%	420.175.552	-	0%
			2.03		**Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**				727.739.414	1.682.079.150	91,49%	2.663.594.892	1.910.236.702	72%
				01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	1.469.715	230.484.800	95,91%	143.139.715	12.912.806	9%
				02	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	1.469.715	307.383.200	91,16%	153.695.715	29.228.480	19%
				03	Pengewasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	1.449.415	234.558.650	95,78%	143.139.715	4.500.000	3%
				04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	1.479.715	308..501.500	84,64%	143.139.715	27.511.020	19%
				06	Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keunagan oleh BPK	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	1 Laporan	41.842.050	715.000	96,05%	416.854.050	372.387.250	89%

				07	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	339.944.402	301.021.000	1,79%	1.243.450.430	1.083.231.720	87%
				08	Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 laporan	1 laporan	340.084.402	299.415.000	96,12%	420.175.552	380.465.426	91%
			2.04		**Peningkatan kapasitas DPRD**				3.422.692.565	4.118.406.190	95,38%	3.985.374.615	2.025.961.800	51%
				02	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	6 dokumen	1.538.670.000	1.918.312.790	98,49%	2.021.167.400	1.144.121.650	57%
				03	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60 dokumen	60 dokumen	907.664.600	1.352.348.100	98,67%	994.465.100	608.573.450	61%
				04	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 orang	7 orang	150.624.550	258.000.000	93,24%	205.435.450	36.000.000	18%
				05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	6 orang	216.530.000	216.588.000	100%	242.554.750	108.000.000	45%
				06	Penyelenggaraan hubungan masyarakat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	229.478.600	335.723.200	78,27%	457.247.100	129.266.700	28%
				07	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 dokumen	1 dokumen	36.167.315	37.434.100	48,25%	64.504.815	-	0%
			2.05		**Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**				3.032.238.352	4.384.025.700	96,36%	3.421.227.752	1.750.922.802	51%
				01	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	45 laporan	45 laporan	62.434.350	7.230.000	34,11%	277.843.500	47.563.500	17%
				02	Penyusunan pokok pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran	1 dokumen	1 dokumen	338.596.302	298.121.500	95,19%	417.305.152	365.068.752	87%

						DPRD yang Disusun								
				03	Pelaksanaan reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	2.631.207.700	4.078.674.200	96,76%	2.726.079.100	1.338.290.550	49%
			2.06		**Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**				71.367.750	10.110.100	30,67%	141.064.500	17.860.600	13%
				01	Penyusunan kode etik DPRD	Jumlah kode etik dan tata beracara DPRD	1 dokumen	1 dokumen	56.577.750	10.110.100	57,81%	89.297.000	16.360.600	18%
				02	Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	1 laporan	1 laporan	14.790.000	0	0%	51.767.500	1.500.000	3%
			2.07		**Pembahasan kerjasama daerah**				22.406.250	21.954.000	28,34%	42.006.250	-	0%
				01	Fasilitasi, verifikasi, dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah	Jumlah dokumen rekomendasi hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	1 dokumen	8.041.750	0	0%	8.041.750	-	0%
				02	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan publikasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	14.364.500	21.954.000	34,17%	33.964.500	-	0%
			2.08		**Fasilitasi tugas DPRD**				2.290.384.809			8.496.461.765	4.865.432.231	57%
				01	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	21 dokumen	21 okumen	2.131.693.853	6.258.241.393	99,80	7.098.437.300	4.117.694.170	58%
				02	Penyusunan laporan kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 dokumen	12 dokumen	56.088.380	35.869.700	63,68	72.947.750	-	0%
				03	Fasiliatsi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	12 dokumen	12 okumen	264.863	294.313.500	92,77%	34.788.450	14.945.050	43%

						Musyawarah								
				04	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	25 dokumen	25 dokumen	102.337.713	1092.301.419	91%	1.290.288.265	732.793.011	57%

Tabel 2.5
Capaian Kinerja (Tujuan, Sasaran, dan Program
(Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)
Sekretariat DPRD

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD			Nilai IKM	Nilai	82,00	NA
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Survey kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	87,85	NA
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase IKU PD yang tercapai targetnya	%	100	42
		2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100	41

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SATUAN	Target		Realisasi		Catatan Analisis
			Th 2024	Th 2025	Th 2024	Th 2025	
1	Hasil Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80,75	82,81	72,00	0	
2	Presentase fasilitasi perda sesuai dengan kebutuhanpelayanan	%	100,00	100,00	81,09	18,28	
3	Presentase fasilitasi pelaksanaan reses pimpinan dan anggota DPRD	%	100,00	100,00	98,60	70	
4	Presentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD yang terpenuhi	%	100,00	100,00	92,68	83	
5	Presentase fasilitasi pengawasan yang diselesaikan	%	100,00	100,00	86,26	65	
6	Jumlah rencana kerja tahunan DPRD	dokumen	1	1	1	1	
7	Jumlah Rencana Kerja Bulanan	dokumen	12	12	12	6	

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dari target/sasaran sebesar 100% rata- rata selama 1 (satu) tahun anggaran.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2024 sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.
4. Proses pengadaan dengan melalui metode Pengadaan Langsung memerlukan waktu yang lebih lama.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar antara lain:

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal
2. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
3. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
4. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
5. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
6. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tabel Permasalahan dan Akar Masalah Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya pelayanan dalam meningkatkan kinerja DPRD	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana	Kurangnya koordinasi antar pihak serta dinamika kegiatan DPRD yang cepat berubah
	Belum optimalnya kualitas SDM	Keterlambatan penyusunan atau pengajuan naskah akademik dan dokumen pendukung dari OPD terkait
		Proses penyusunan di eksekutif membutuhkan waktu lama; belum ada sinkronisasi jadwal dengan DPRD
	Laporan reses anggota DPRD mengalami keterlambatan	Keterlambatan pengumpulan dan penyusunan laporan dari anggota dan tim reses
	Belum dipahami sistem perencanaan dan penganggaran POKIR dalam SIPD	Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terkait implementasi SIPD
	Kualitas ASN belum optimal dibanding kuantitasnya	Belum adanya redistribusi tugas dan peningkatan kapasitas pegawai secara merata
	Kinerja tenaga ahli DPRD belum optimal	Belum ada sistem evaluasi kinerja dan monitoring peran tenaga ahli secara berkala
	Pemahaman DPRD dan Setwan terhadap regulasi masih kurang	Kurangnya pelatihan dan diskusi hukum berkala untuk mendalami peraturan
	Kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal	Masih lemahnya integrasi data, perencanaan tidak berbasis analisis kebutuhan yang memadai

2.3.1 Isu Strategis

Isu strategis adalah situasi yang memiliki potensi menjadi tantangan atau peluang bagi suatu daerah di masa mendatang. Dalam konteks Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, isu-isu strategis berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya, terutama dalam memberikan pelayanann. Isu-isu ini mencerminkan aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian khusus untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar serta mendukung pembangunan daerah yang lebih baik. Isu strategis tidak hanya mendasarkan pada hasil analisis data yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga dengan memperhatikan potensi, isu KLHS, global, nasional, regional dan daerah. Berikut merupakan rumusan isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar **:**

“Belum optimalnya pelayanan dalam meningkatkan kinerja DPRD” dikarenakan :

1. Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan oleh DPRD. Namun, dinamika politik, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pergeseran agenda menyebabkan jadwal persidangan sering berubah dan materi sidang terlambat disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem

dukungan kelembagaan yang lebih tanggap dan terintegrasi, baik dalam perencanaan agenda, penyusunan bahan, maupun fasilitasi teknis, agar persidangan dapat berjalan tepat waktu dan substansial sesuai kebutuhan legislatif.

2. Optimalisasi dukungan fasilitasi anggaran dan pengawasan legislatif berbasis SIPD. Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi anggaran dan pengawasan sangat penting, terutama dalam penyusunan KUA-PPAS, penyerapan pokok-pokok pikiran (POKIR), serta pengolahan hasil reses anggota DPRD. Namun, masih terbatasnya waktu penyampaian dokumen, keterlambatan laporan, dan rendahnya pemahaman sistem SIPD menjadi kendala. Isu strategis ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis Setwan dan anggota DPRD dalam penggunaan SIPD, penyesuaian waktu kerja dengan siklus perencanaan daerah, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah agar fungsi anggaran dan pengawasan DPRD berjalan efektif dan akuntabel.
3. Penguatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD dan fungsi kelembagaan secara sistematis. Tantangan utama dalam mendukung kinerja DPRD adalah belum optimalnya kualitas ASN, kinerja tenaga ahli yang kurang maksimal, serta lemahnya pemahaman regulasi baik di kalangan ASN Setwan maupun DPRD sendiri. Kondisi ini menghambat efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis legislatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi melalui pelatihan rutin, redistribusi beban kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang konsisten. Penguatan kelembagaan Setwan juga harus diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung DPRD sebagai representasi rakyat daerah.
4. Peningkatan sistem dukungan kelembagaan dan jadwal persidangan yang adaptif dan akurat. Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan oleh DPRD. Namun, dinamika politik, koordinasi lintas perangkat daerah, dan pergeseran agenda menyebabkan jadwal persidangan sering berubah dan materi sidang terlambat disampaikan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dukungan kelembagaan yang lebih tanggap dan terintegrasi, baik dalam perencanaan agenda, penyusunan bahan, maupun fasilitasi teknis, agar persidangan dapat berjalan tepat waktu dan substansial sesuai kebutuhan legislatif.
5. Optimalisasi dukungan fasilitasi anggaran dan pengawasan legislatif berbasis SIPD. Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi anggaran dan pengawasan sangat penting, terutama dalam penyusunan KUA-PPAS, penyerapan pokok-pokok pikiran (POKIR), serta pengolahan hasil reses anggota DPRD. Namun, masih terbatasnya waktu penyampaian dokumen, keterlambatan laporan, dan rendahnya pemahaman sistem SIPD menjadi kendala. Isu strategis ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas teknis Setwan dan anggota DPRD dalam penggunaan SIPD, penyesuaian waktu kerja dengan siklus perencanaan daerah, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah agar fungsi anggaran dan pengawasan DPRD berjalan efektif dan akuntabel.
6. Penguatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD dan fungsi kelembagaan secara sistematis. Tantangan utama dalam mendukung kinerja DPRD adalah belum optimalnya kualitas ASN, kinerja tenaga ahli yang kurang maksimal, serta lemahnya pemahaman regulasi baik di kalangan ASN Setwan maupun DPRD sendiri. Kondisi ini menghambat efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan strategis legislatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi melalui pelatihan rutin, redistribusi beban kerja, serta sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang konsisten. Penguatan kelembagaan Setwan juga harus diarahkan untuk

menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung DPRD sebagai representasi rakyat daerah.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Kelembagaan DPRD dan dukungan kerja Sekretariat • Peran DPRD dalam penganggaran dan pengawasan • Kapasitas SDM dan kelembagaan Sekretariat	• Belum optimalnya kualitas sarana dan prsarana • Belum optimalnya kualitas SDM • Laporan reses anggota DPRD mengalami keterlambatan • Belum dipahami sistem perencanaan dan penganggaran POKIR dalam SIPD • Kualitas ASN belum optimal dibanding kuantitasnya • Kinerja tenaga ahli DPRD belum optimal • Pemahaman DPRD dan Setwan terhadap regulasi masih kurang • Kualitas perencanaan dan penganggaran belum optimal	-	Geopolitik dan Geoekonomi • Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru negara Asia-Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.	• Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral.	• Tata Kelola Pemerintahan	• Belum optimalnya pelayanan dalam meningkatkan kinerja DPRD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang te lah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Sekretariat DPRD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Sekretariat DPRD dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Sekretariat DPRD.

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Sekretariat DPRD berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Sekretariat DPRD.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Cpaian**	**Pagu Indikatif**
	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD			Rp48.610.808.483	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD			Rp62,610,808,483
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD		100%	Rp41.515.123.143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD		100%	Rp42.344.499.628
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD		13 Dokumen	Rp169.000.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD		13 Dokumen	Rp246.017.175
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	37.172.650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	110.435.925
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	4.114.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PD	1 Dokumen	4.394.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	4.114.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dokumen	4.834.500
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	4.913.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PD	1 Dokumen	6.727.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	5.173.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dokumen	6.113.500

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	2 Laporan	106.648.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	2 Laporan	106.648.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.863.750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.863.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 Prosentase	Rp3.342.803.313				100 Prosentase	Rp3.399.011.663
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.302.840.363	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.302.840.363
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Laporan	39.962.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun PD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Laporan	96.171.300
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			185 Orang	Rp428.798.400	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			185 Orang	Rp812.085.500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	118.808.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Orang	233.774.100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	59.997.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	189.443.200
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	65 Orang	249.993.300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	65 Orang	388.868.200

			Undangan					Undangan		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Prosentase	Rp1.221.604.480	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 Prosentase	Rp1.228.304.480
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	58 Paket	Rp74.995.330	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	58 Paket	Rp74.995.330
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Rp96.971.150	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Rp96.971.150
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	Rp250.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 Paket	Rp250.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	Rp70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1100 Paket	Rp80.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Rp79.153.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Rp75.853.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Rp0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-
	Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	367 Paket	Rp250.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	367 Paket	Rp250.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp149.986.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Rp149.986.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	15 Laporan	Rp249.999.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Rp249.999.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28 Unit	Rp139.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			28 Unit	Rp149.600.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan	3 Unit	Rp0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Kendaraan	-	-

	Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Kendaraan Dinas Jabatan		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Rp74.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Rp84.200.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp65.400.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Rp65.400.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45 Laporan	Rp1.334.602.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			45 Laporan	Rp1.346.152.400
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp284.602.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp284.602.400
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp700.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp700.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Rp100.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Rp111.950.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp249.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp249.600.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			506 Unit	Rp1.446.955.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			506 Unit	Rp1.401.772.260

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Rp448.123.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Rp420.977.160
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Rp640.610.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Rp622.573.000
	Pemeliharaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	Rp24.943.500	Pemeliharaan Mebel	Sekretariat DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	Rp24.943.500
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp80.090.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	Rp80.090.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	Rp178.188.600	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	Rp178.188.600
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp75.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp75.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	Rp0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100 Prosentase	Rp32.971.354.250	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			100 Prosentase	Rp33.130.551.750
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	Rp32.577.730.900	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	Rp32.577.730.900
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	5 Paket	Rp318.355.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan	5 Paket	Rp477.552.500

	DPRD		Atribut DPRD yang Disediakan			DPRD		Atribut DPRD yang Disediakan		
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Rp75.268.350	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	Rp75.268.350
	Layanan Administrasi DPRD			100 Prosentase	Rp460.604.400	Layanan Administrasi DPRD			100 Prosentase	Rp631.004.400
	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Rp5.607.650	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Rp5.607.650
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	Rp39.998.100	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	Rp39.998.100
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Rp414.998.650	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	Rp585.398.650
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100%	Rp7.095.685.340	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			100%	Rp20.266.308.855
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			7 Dokumen	Rp570.820.700	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			7 Dokumen	Rp2.133.577.380
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp62.241.550	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Rp219.531.450
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Rp338.461.450	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Rp630.788.350
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	Rp40.117.700	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	Rp1.086.001.580
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Rp125.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	Rp129.256.000
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	Rp5.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD	1 Dokumen	Rp68.000.000

			yang Disusun					yang Disusun		
	Pembahasan Kebijakan Anggaran			100 Prosentase	Rp129.970.720	Pembahasan Kebijakan Anggaran			100 Prosentase	Rp1.920.995.000
	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Rp19.999.600	Pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Rp384.199.000
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Rp19.999.600	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Rp384.199.000
	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Rp29.990.340	Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Rp384.199.000
	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Rp29.990.340	Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Rp384.199.000
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Rp29.990.840	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Rp384.199.000
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			51 Laporan	Rp422.248.180	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			51 Laporan	Rp1.226.774.550
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Rp81.436.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Rp99.158.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Rp87.936.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	Rp106.958.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Rp81.436.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Rp99.158.000
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	12 Laporan	Rp81.436.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	12 Laporan	Rp99.158.000

			Perekonomian					Perekonomian		
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Rp29.998.500	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Rp39.544.000
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Rp40.001.940	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Rp397.800.500
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp20.003.740	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	Rp384.998.050
	Peningkatan Kapasitas DPRD			100 Prosentase	Rp2.766.544.465	Peningkatan Kapasitas DPRD			100 Prosentase	Rp3.836.805.870
	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Rp1.498.993.400	Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Rp2.021.150.220
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	Rp100.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	7 Orang	Rp184.999.000
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Rp252.552.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sekretariat DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang	Rp252.552.000
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	Rp100.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	Rp414.811.200
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	Rp14.999.065	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD	1 Dokumen	Rp19.999.900
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	Rp800.000.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	24 Dokumen	Rp943.293.550
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100 Prosentase	Rp1.788.333.110	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			100 Prosentase	Rp3.071.263.810
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Rp99.999.060	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Rp99.999.060
	Penyusunan Pokok-	Sekretariat	Jumlah Dokumen	1	Rp19.996.250	Penyusunan Pokok-	Sekretariat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Rp25.006.050

	Pokok Pikiran DPRD	DPRD	Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		Pokok Pikiran DPRD	DPRD	Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Rp1.668.337.800	Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Rp2.946.258.700
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			2 Dokumen	Rp15.015.500	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			2 Dokumen	Rp13.055.500
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Rp4.760.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Rp2.800.000
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Rp10.255.500	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Rp10.255.500
	Pembahasan Kerja Sama Daerah			2 Dokumen	Rp12.000.000	Pembahasan Kerja Sama Daerah			2 Dokumen	Rp16.349.600
	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Rp2.000.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	Rp4.200.000
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Rp10.000.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	Rp12.149.600
	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD		72 Dokumen	Rp1.390.752.665	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD		72 Dokumen	Rp8.047.487.145
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	Rp1.050.754.350	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28 Dokumen	Rp6.807.480.350
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	Rp15.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 Laporan	Rp15.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Rp25.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	Rp25.000.000
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	Rp299.998.315	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	20 Dokumen	Rp1.200.006.795

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka PD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah- olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk mengharmonisasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama- sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapperlitbang). Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Tabel 2.7.
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Karanganyar

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
N I H I L					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,

1. Mempercepat dan Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Interkoneksi Infrastruktur dengan Kawasan: industry Kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Persawahan Perkebunan dan Perikanan
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM); Menjamin Kesehatan Ibu hamil dan anak Sekolah, Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Manajemen Talenta
3. Undang Investasi Seluas-luasnya untuk Buka Lapangan Pekerjaan Memangkas hambatan Investasi .
4. Kecepatan Melayani dan Memberi Izin, Menghapus Pola Pikir Linier, Monoton dan terjebak di Zona nyaman, Adaktif, ProduktifInovasi, Kompetitif
5. APBN dipastikan harus memiliki manfaat Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan rakyat

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2024 maka sesuai dengan instruksi Mendagri yang mengamanatkan agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 - 2029 untuk kemudian ditindak lanjuti dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan atau bersamaan.

Dokumen RPD Renstra Perangkat Daerah yang di jadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja PD, kualitas dari dokumen perencanaan tersebut menjadi penentu keberhasilan dari pencapaian program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam penganggarannya Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2029. Selanjutnya Dokumen RPD akan dijabarkan Renstra di tingkat PD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya Renstra dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional.

Seiring tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar 2025-2029 yang terkait : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi. Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut

diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkualitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;

20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2.Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah "SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya.*** Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan

pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:
1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;
6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;

12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan Sekretariat DPRD termasuk sebagai PD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkannya. Dalam menunjang terwujudkan visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Rencana Kerja Tahun 2026 menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut "meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD" . Dengan indikator tujuan adalah Nilai IKM.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah "Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD", dengan indikator "Survey kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD", sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Tujuan Dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian
					2026
Meningkatny kualitas pelayanan Sekretariat DPRD			Nilai IKM	Angka	82,20
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Survey kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	82,91
		1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator IKU PD yang tercapai targetnya	%	100
		2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam 1 tahun	%	100

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

a. Tantangan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik dari aspek administratif, keuangan, maupun fasilitasi kegiatan kedewanan, juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan perannya. Dinamika politik, tata kelola pemerintahan, dan perkembangan teknologi menuntut Sekretariat DPRD untuk semakin adaptif dan responsif terhadap perubahan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1. Kompleksitas isu dan dinamika politik daerah. Sekretariat DPRD harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika politik yang terus berubah. Hal ini menuntut peningkatan profesionalisme aparatur dalam memberikan dukungan administratif dan teknis agar proses pembahasan kebijakan dan pengawasan dapat berjalan efektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Dengan kemajuan teknologi, Sekretariat DPRD dituntut untuk mengintegrasikan sistem informasi dalam pengelolaan administrasi, surat-menyurat, penyusunan risalah rapat, dokumentasi produk hukum daerah, serta penyebarluasan informasi kegiatan DPRD agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintahan. Pergantian kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah yang bersifat dinamis dapat memengaruhi tata kelola dan mekanisme kerja Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi agar pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD tetap konsisten serta berkesinambungan.
4. Kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur. Tuntutan terhadap kualitas pelayanan sekretariat semakin tinggi. Aparatur Sekretariat DPRD perlu terus meningkatkan kompetensi dalam bidang administrasi, hukum, keuangan, komunikasi publik, dan teknologi informasi agar mampu memberikan dukungan optimal kepada DPRD.
5. Keterbatasan anggaran dan efisiensi pengelolaan keuangan. Dalam menjalankan fungsi dukungan, Sekretariat DPRD sering dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang menuntut efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance menjadi keharusan.
6. Ekspektasi publik terhadap kinerja DPRD. Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja DPRD secara tidak

langsung menjadi tantangan bagi Sekretariat DPRD untuk memastikan seluruh kegiatan kedewanan dapat terselenggara dengan baik, terbuka, dan informatif bagi publik.

b. Peluang Perangkat Daerah

Selain menghadapi berbagai tantangan, Sekretariat DPRD juga memiliki sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Peluang-peluang tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan periode perencanaan dan penganggaran yang baru. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan tahunan. Hal ini menjadi momentum bagi Sekretariat DPRD untuk memperkuat konsistensi, sinkronisasi, dan keberlanjutan program dukungan terhadap kegiatan DPRD, terutama dalam penyusunan kebijakan strategis dan pelayanan administrasi kedewanan.
2. Dukungan dan stimulus pemerintah terhadap penguatan kelembagaan daerah. Pemerintah pusat maupun daerah memberikan berbagai insentif, fasilitasi, serta dukungan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan daerah, termasuk DPRD. Hal ini menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD untuk memperkuat perannya sebagai penyedia dukungan teknis, administratif, dan keuangan bagi DPRD secara profesional dan akuntabel.
3. Peluang kerja sama dan kolaborasi lintas pihak. Sekretariat DPRD memiliki potensi untuk menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, serta media dalam hal peningkatan kapasitas aparatur, transparansi informasi publik, dan penguatan peran DPRD dalam proses legislasi, pengawasan, serta anggaran.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi Sekretariat DPRD untuk melakukan transformasi digital, terutama dalam pengelolaan arsip, dokumentasi risalah sidang, sistem informasi rapat, serta publikasi kegiatan DPRD yang lebih terbuka dan mudah diakses masyarakat.
5. Perubahan kebijakan pemerintah yang mendukung reformasi birokrasi. Berbagai regulasi baru dalam bidang kepegawaian, keuangan daerah, dan keterbukaan informasi publik menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD untuk berinovasi dalam tata kelola kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.
6. Meningkatnya partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap representasi politik daerah. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap proses demokrasi memberikan peluang bagi Sekretariat DPRD untuk memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan fungsi representasi DPRD melalui kegiatan sosialisasi, reses, serta pengelolaan aspirasi masyarakat secara lebih sistematis.
7. Peningkatan kapasitas dan inovasi kelembagaan. Sekretariat DPRD memiliki peluang untuk mengembangkan inovasi pelayanan dukungan kedewanan melalui pelatihan, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih adaptif, serta penerapan prinsip good governance. Pengembangan sistem kerja yang berbasis kinerja dan pelayanan publik menjadi arah strategis dalam mendukung profesionalitas kelembagaan DPRD.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Sekretariat DPRD mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Sekretariat DPRD masuk dalam Unsur Pendukung. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDKATOR
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalm mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Survey kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD dalm mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Fasilitasi Kunjungan

	Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Mebel
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
	Fasilitasi Fraksi DPRD

			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
			Penyusunan Tata Tertib DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Pembahasan APBD
			Pembahasan APBD Perubahan
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
			Pengawasan Penggunaan Anggaran
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
			Penyusunan Program Kerja DPRD
			Publikasi dan Dokumentasi DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan Kerja dalam Daerah
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

			Pelaksanaan Reses
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD
			Pengawasan Kode Etik DPRD
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar di tuangkan pada Renja Tahunan yang dirapatkan oleh Anggota Badan Musyawarah dan disetujui oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar, yang akan dituangkan pada Renja Bulanan tentang kegiatan yang dilaksanakan selama 1(satu) bulan dengan mengacu pada Renja Tahunan.

Berdasarkan Rencana Kerja tersebut tentu dalam melaksanakan suatu program yang tertuang pada suatu kegiatan memerlukan suatu Anggaran, Anggaran ini diperoleh dari APBD Kabupaten Karanganyar. Selama ini Pendanaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar tidak ada dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena pada dasarnya Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar memiliki tugas melayani Anggota DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang dijabarkan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Sekretariat DPRD						48.610.808.483,00							66.929.047.152,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						48.610.808.483,00							66.929.047.152,00	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						48.610.808.483,00							66.929.047.152,00	
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			100 %	41.515.123.143,00						-	40.097.047.152,00	
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam 1 tahun	-			13 dokumen	169.000.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	565.473.250,00	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	37.172.650,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		400.850.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.114.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

															penyeludupan.					

	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.114.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.913.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.173.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	106.648.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		139.623.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	6.863.750,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam 1 tahun	-			100%	3.342.803.313,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	3.596.217.212,00	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.302.840.363,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		3.560.751.612,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	39.962.950,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		35.465.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dalam 1 tahun	-			185 Orang	428.798.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	913.395.000,00	

															penyeludupan.					
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	118.808.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		297.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	59.997.100,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		184.145.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	249.993.300,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		432.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun	-			100 persen	1.221.604.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	1.228.603.300,00	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				58 Paket	74.995.330,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		119.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				50 Paket	96.971.150,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	250.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		152.038.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1100 Paket	70.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	79.153.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		55.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen				6 Dokumen	0,00	Kab.	DANA	Memperkuat	Penguatan	Pemerintah		5.000.000,00	SEKRETARIAT

							Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kabupaten Karanganyar			DPRD
	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				367 Paket	250.500.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		142.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	149.986.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		360.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	249.999.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		224.465.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan dalam 1 tahun	-			28 unit	139.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	1.746.027.300,00	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		1.581.883.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	74.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		79.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	65.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		72.815.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		11.409.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun	-			45 laporan	1.334.602.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	1.134.867.980,00	

															narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	284.602.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		258.682.980,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		686.825.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Laporan	100.400.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		33.480.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	249.600.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		155.880.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara dalam 1 tahun	-			506 unit	1.446.955.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	2.179.713.000,00	

						Daerah									pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	448.123.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		849.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	640.610.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		556.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				200 Unit	24.943.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		34.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	80.090.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		109.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor				18 Unit	178.188.600,00	Kab.	DANA	Memperkuat	Penguatan	Pemerintah		329.343.000,00	SEKRETARIAT

							dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kabupaten Karanganyar			DPRD
	4	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	75.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				150 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dicapai dalam 1 tahun	-			100 prosentase	32.971.354.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar	-	27.737.318.210,00	
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	32.577.730.900,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		27.223.276.810,00	SEKRETARIAT DPRD

														penyeludupan.					
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	318.355.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		440.710.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	75.268.350,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		73.331.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun	-			100 Prosentase	460.604.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar	-	995.431.900,00	
	4	02	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	5.607.650,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		4.931.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	39.998.100,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		10.500.400,00	SEKRETARIAT DPRD

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kualitas infrastruktur				
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	414.998.650,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		980.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Pelaksanaan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 tahun	-			100 %	7.095.685.340,00						-	26.832.000.000,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Rata-rata Perda Dan Peraturan DPRD yang ditetapkan dalam 1 tahun	-			7 dokumen	570.820.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	2.096.302.000,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	62.241.550,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		217.604.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2 Dokumen	338.461.450,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		633.812.000,00	SEKRETARIAT DPRD

															dan penyeludupan.					
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	40.117.700,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		1.020.781.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		218.105.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase rapat pembahasan Kebijakan Anggaran	-			100 prosentase	129.970.720,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	1.682.537.900,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	19.999.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		336.501.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														

							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	19.999.600,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		336.501.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	29.990.340,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		336.532.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	29.990.340,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		336.501.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	29.990.840,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		336.501.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan penyelenggaraan	-			51 laporan	422.248.180,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	1.857.273.000,00	
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	81.436.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		254.911.900,00	SEKRETARIAT DPRD

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kualitas infrastruktur				
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	87.936.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		289.957.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	81.436.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		281.009.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	81.436.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		294.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	29.998.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		60.041.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	40.001.940,00	Kab. Karanganyar, Semua	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum	Penguatan Landasan Tata Kelola	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		338.551.300,00	SEKRETARIAT DPRD

													Kecamatan, Semua Kel/Desa	(DAU)	dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	20.003.740,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		338.551.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD Yang Terlayani dalam 1 tahun	-			100 prosentase	2.766.544.465,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	5.338.089.000,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	1.498.993.400,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		2.668.994.500,00	SEKRETARIAT DPRD

															milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli													
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 Orang	100.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		151.620.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi													
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	252.552.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		216.588.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		492.753.500,00	SEKRETARIAT DPRD

															perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	14.999.065,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		72.767.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				24 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		1.735.364.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosesentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang terlaksana dalam 1 tahun	-			100 prosentase	1.788.333.110,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Karanganyar	-	3.325.151.100,00	
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil				1 Laporan	99.999.060,00	Kab.	DANA	Membangun	Penguatan	Masyarakat		312.894.200,00	SEKRETARIAT

							Kunjungan Kerja DPRD						Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kabupaten Karanganyar			DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	19.996.250,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		338.500.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1.668.337.800,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat Kabupaten Karanganyar		2.673.756.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dalam 1 tahun	-			2 Dokumen	15.015.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar	-	70.376.500,00	
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	4.760.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		55.586.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	10.255.500,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		14.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD

															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen pembahasan kerja sama daerah dalam 1 tahun	-			2 Dokumen	12.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	-	21.645.000,00	
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		7.991.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
							Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Pemerintah Kabupaten Karanganyar		13.654.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tugas DPRD yang diselenggarakan dalam 1 tahun	-			72 Dokumen	1.390.752.665,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar	-	12.440.625.500,00	

															pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				28 Dokumen	1.050.754.350,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		10.486.005.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		60.936.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		318.136.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				20 Dokumen	299.998.315,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar		1.575.547.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H											**48.610.808.483,00**							**66.929.047.152,00**	

4.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Indikator Kerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Target IKU Sekretariat DPRD
Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025	Target Tahun 2026
1	Nilai IKM	Nilai	82.00	82.90	82.20
2	Survey Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	82.81	82.91	82.91

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD	Pagu
1	2	4	5
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	**Program :** Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD **Kegiatan:** Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD **Sub Kegiatan:** 1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	747.144.650

BAB V
PENUTUP

Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahuan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2026, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKA/DPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Rencana Kerja tahun 2026 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar 2025 penganggaran tahun sebelumnya, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026.

Akhir kata, semoga Rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai dengan kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat selesai disusun. Rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar selama satu tahun. Dengan harapan agar program dan kegiatan BAPPERIDA Kabupaten karanganyar lebih terarah dan terukur.

Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih belum sempurna. Menyadari keterbatasan yang ada, maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan lebih lanjut. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah dan upaya kita dalam bekerja dan mengabdi kepada negara serta masyarakat.

Karanganyar, September 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan dan Riset Daerah
Kabupaten Karanganyar

DWI CAHYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730614 199303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
Kata Pengantar i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-6
1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU ... II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Tahun 2025..... II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA II-9
2.3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024 ..... II-18
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPERIDA II-18
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 .. II-18

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT III-1
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi..... III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran III-3
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah III-7
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-8

BAB IV RECANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... IV-1
4.1. Program dan Kegiatan OPD..... IV-1
4.2. Dana Indikatif IV-1
4.3. Sumber Dana yang Dibutuhkan IV-1

BAB V PENUTUP V-1
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja.. V-1
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Baperlitbang	II-1
Tabel 2.2	Realisasi APBD di Bapelritbang Tahun 2024 dan 2025 (TW II)	II-4
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-6
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-6
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024.....	II-6
Tabel 2.6	Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024	II-7
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023	II-8
Tabel 2.8	Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD).....	II-9
Tabel 2.9	Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)	II-9
Tabel 2.10	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Baperlitbang s/d tahun 2025 Kabupaten Karanganyar ...	II-11
Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar ...	II-17
Tabel 2.12	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dalam BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar ..	II-20
Tabel 2.13	Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-26
Tabel 3.1	Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026	III-6
Tabel 3.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan OPD	III-9
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan dan Sasaran OPD	III-9
Tabel 3.4	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III-9
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2026	IV-2
Tabel 4.3	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA tahun 2026	IV-9
Tabel 4.4	Program/Kegiatan BAPPERIDA yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pohon Kinerja Sasaran Daerah : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi	III-12
Gambar 3.2	Pohon Kinerja Baperlitbang	III-13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan kepeutusan selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan merupakan proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan bahkan disahkan dan rencana harus diimplementasikan.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. BAPPERIDA sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan rencana pembangunan yang menyeluruh (komprehensif) baik secara materi (isi) maupun keterkaitan wilayah (Pusat-Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental. Renja adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi / unit / organisasi terendah dan terkecil dari pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat atasnya. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas pelayanan Perangkat Daerah kepada masyarakat penggunanya. Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Perangkat Daerah dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat keefektifan, pertanggungjawaban dan dampak/manfaat dari pelaksanaan kegiatan, serta terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, sebagai berikut:

Maksud :

1) Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
2) Mengumpulkan data dan informasi yang evaluasi dan analisis untuk menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah;
3) Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur BAPERLITBANG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan;

Tujuan :

1) Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
2) Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja perangkat daerah dan pelaporan;
3) Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4) Terwujudnya SDM perencana yang berkualitas.
5) Terwujudnya peningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja BAPPERIDA Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPERIDA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang alasan, proses penyusunan, keterkaitan antara dokumen RKPD, Renstra dan Renja BAPPERIDA

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja BAPPERIDA.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPPERIDA.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BAPPERIDA, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPERLITBANG TAHUN LALU

Pada Bab ini dijelaskan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, disusun dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2025

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029 di tahun kedua (2026).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPERLITBANG berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra, maupun terhadap Indikator Kinerja Utama dan Kunci, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPERLITBANG, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Berisikan uraian mengenai:

1) Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPERLITBANG;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPERLITBANG; dan
3) Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5 Penelaahan usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Masyarakat, hasil Forum Perangakat Daerah (FPD).

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran renja Tahun 2026 yang diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator dan target tahun 2026. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPERIDA.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Sistem perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; Tahap 2: Merumuskan keadaan sekarang/saat ini, Tahap 3: Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, Tahap 4: Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimilik serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPERLITBANG Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Baperlitbang Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk diljadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 BAPPERIDA yang dulunya BAPERLITBANG telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Baperlitbang

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.494.071.583	5.494.071.583	100	6.041.661.912	6.377.661.912	105,56
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.632.300	89.632.300	100	98.500.000	92.450.000	93,86
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	70.632.300	70.632.300	100	79.000.000	72.450.000	91,71
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.500.000	100	5.000.000	5.000.000	100,00
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.500.000	100	6.000.000	6.000.000	100,00
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	8.500.000	9.000.000	105,88
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.549.198.223	4.549.198.223	100	5.000.458.162	5.173.885.962	103,47
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.989.723	4.510.989.723	100	4.965.358.162	5.141.035.962	103,54
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	32.558.500	32.558.500	100	30.500.000	28.250.000	92,62

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuang an Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.000	5.650.000	100	4.600.000	4.600.000	100,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.050.000	3.050.000	100	3.600.000	3.600.000	100,00
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.050.000	3.050.000	100	3.600.000	3.600.000	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.762.500	238.762.500	100	13.000.000	13.000.000	100,00
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.991.500	2.991.500	100	3.000.000	3.000.000	100,00
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.997.000	5.997.000	100	6.000.000	6.000.000	100,00
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	225.774.000	225.774.000	100	0	0	0,00
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	4.000.000	100	4.000.000	4.000.000	100,00
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	229.632.560	229.632.560	100	207.397.500	208.656.450	100,61 %
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	8.000.000	100	9.500.000	9.240.000	97,26
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.315.200	11.315.200	100	10.037.500	12.970.250	129,22
15)	Penyediaan bahan logistrik kantor	22.200.000	22.200.000	100	25.000.000	25.000.000	100,00
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.700.000	1.700.000	100	10.000.000	1.670.000	16,70
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100	3.000.000	3.000.000	100,00
18)	Penyediaan Bahan/Material	12.590.860	12.590.860	100	14.000.000	20.916.200	149,40
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.974.000	18.974.000	100	13.000.000	13.000.000	100,00
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135.020.000	135.020.000	100	105.060.000	105.060.000	100,00
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.572.500	6.572.500	100	8.000.000	8.000.000	100,00
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.500.000	10.500.000	100	9.800.000	9.800.000	100,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.275.000	13.275.000	100	326.730.250	421.629.500	129,05
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	250.000.000	310.732.000	124,29
24)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.275.000	13.275.000	100	45.480.250	70.247.500	154,46
25)	Pengadaan mebel	0	0	0	31.250.000	40.650.000	130,08
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.821.000	158.821.000	100	165.600.000	165.900.000	100,18
26)	Penyediaan jasa surat menyurat	20.301.000	20.301.000	100	21.000.000	21.000.000	100,00
27)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	89.200.000	89.200.000	100	93.600.000	93.600.000	100,00
28)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.320.000	49.320.000	100	51.000.000	51.300.000	100,59
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.700.000	211.700.000	100	226.376.000	298.540.000	131,88
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.030.000	152.030.000	100	128.076.000	134.400.000	104,94
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.170.000	29.170.000	100	28.300.000	32.140.000	113,57
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	30.500.000	100	70.000.000	132.000.000	188,57
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDA LIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.145.987.500	1.145.987.500	100	860.319.000	1.010.319.000	117,44
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.025.000.000	1.025.000.000	100	740.000.000	890.000.000	120,27
32)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	1.025.000.000	1.025.000.000	100	740.000.000	890.000.000	120,27
10.	Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	25.000.000	100	25.319.000	25.319.000	100,00
33)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	25.000.000	100	25.319.000	25.319.000	100,00
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.987.500	95.987.500	100	95.000.000	95.000.000	100,00
34)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	100	20.000.000	20.000.000	100,00
35)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.987.500	75.987.500	100	75.000.000	75.000.000	100,00
III. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.635.200.000	1.635.200.000	100	1.395.000.000	1.395.000.000	100,00
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	625.000.000	625.000.000	100	525.000.000	525.000.000	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	141.025.000	141.025.000	100	163.177.000	185.937.000	113,95
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	124.200.000	124.200.000	100	138.000.000	129.000.000	93,48
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	142.647.000	142.647.000	100	60.000.000	46.240.000	77,07
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	217.128.000	217.128.000	100	163.823.000	163.823.000	100,00
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	560.200.000	560.200.000	100	420.000.000	420.000.000	100,00
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	77.500.000	77.500.000	100	130.000.000	130.000.000	100,00
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.500.000	59.500.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	423.200.000	423.200.000	100	240.000.000	240.000.000	100,00
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000.000	450.000.000	100	450.000.000	450.000.000	100,00
43)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	205.000.000	205.000.000	100	180.000.000	180.000.000	100,00
44)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	40.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
45)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	205.000.000	205.000.000	100	220.000.000	220.000.000	100,00
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	650.000.000	650.000.000	100	650.000.000	650.000.000	100,00
15.	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
46)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	50.000.000	100	50.000.000	50.000.000	100,00
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	600.000.000	600.000.000	100	600.000.000	600.000.000	100,00
47)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	600.000.000	600.000.000	100	600.000.000	600.000.000	100,00
	2 urusan 4 Program, 16 Kegiatan, 47 Subkegiatan	8.925.259.083	8.925.259.083	100	8.946.980.912	9.432.980.912	105,43

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 105,43%. Selama 2 tahun ini alokasi anggaran rencana kerja Baperlitbang terpenuhi lebih dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Baperlitbang yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 9.432.980.912,00 atau 105,43% harus berkurang sebesar Rp. 943.721.000,00 sehingga pagu anggaran Baperlitbang tahun 2025 adalah Rp. 8.489.259.912,00 atau 94,88% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) sudah didasarkan pada Pergeseran APBD 2025 yang merupakan hasil efisiensi anggaran sebagai dampak regulasi keuangan dari pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi APBD di Baperlitbang Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD (Pergeseran)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.494.071.583	5.277.850.501	96,06%	6.303.297.662	3.249..086.912	51,55
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.632.300	73.349.900	81,83%	78.610.000	30.649.350	38,99
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	70.632.300	54.653.900	77,38%	62.381.000	22.683.950	36,36
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.500.000	3.425.000	97,86%	4.000.000	1.324.250	33,11
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.346.000	97,20%	4.750.000	1.000.000	21,05
4)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.925.000	99,25%	7.479.000	5.641.150	75,43
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.549.198.223	4.372.772.285	96,12%	5.172.003.462	2.458.560.925	47,54
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.510.989.723	4.334.666.285	96,09%	5.141.035.962	2.448.560.925	47,63
6)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD	32.558.500	32.556.000	99,99%	26.367.500	8.000.000	30,34
7)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuang an Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.650.000	5.550.000	98,23%	4.600.000	2.000.000	43,48
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.050.000	2.950.000	96,72%	2.850.000	1.100.000	38,6
8)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.050.000	2.950.000	96,72%	2.850.000	1.100.000	38,6
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	238.762.500	235.771.000	98,75%	11.021.000	2.250.000	20,42
9)	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2.991.500	2.941.500	98,33%	2.989.000	0	0,00
10)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.997.000	4.997.000	83,32%	4.800.000	0	0,00
11)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	225.774.000	224.069.000	99,24%	0	0	47,4
12)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.763.500	94,09%	3.232.000	2.250.000	69,62
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	229.632.560	214.907.312	93,59%	140.779.700	66.726.195	47,40
13)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.000.000	7.981.250	99,77%	7.017.000	3.322.750	47,35
14)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.315.200	11.115.980	98,24%	9.500.250	78.625.000	82,76
15)	Penyediaan bahan logistrik kantor	22.200.000	21.966.000	98,95%	23.100.000	3.485.000	6,97
16)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.700.000	1.683.200	99,01%	1.001.250	0	0,00
17)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.760.000	2.760.000	100,00%	3.000.000	750.000	25,00
18)	Penyediaan Bahan/Material	12.590.860	12.573.160	99,86%	20.384.700	4.375.000	21,46
19)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.974.000	18.755.000	98,85%	10.400.000	350.000	3,37
20)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	135.020.000	121.347.772	89,87%	51.676.500	40.630.945	78,63
21)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.572.500	6.465.000	98,36%	6.300.000	3.700.000	58,73
22)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.500.000	10.259.950	97,71%	8.400.000	2.250.000	26,79
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.275.000	12.950.000	97,55%	421.629.500	405.745.000	96,23
23)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	310.732.000	295600000	95,13
24)	Pengadaan Mebel	0	0	0	40.650.000	40.245.000	99,00
25)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.275.000	12.950.000	97,55%	70.247.500	69.900.000	99,51
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.821.000	154.254.854	97,12%	165.900.000	75.652.442	45,6
26)	Penyediaan jasa surat menyurat	20.301.000	20.299.500	99,99%	21.000.000	9.600.000	45,71
27)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	89.200.000	84.635.354	94,88%	93.600.000	45.052.442	48,13
28)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	49.320.000	49.320.000	100,00%	51.300.000	21.000.000	40,94
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.700.000	210.895.150	99,62%	310.504.000	208.403.000	67,12

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD (Perubahan)	REALISASI	%	APBD (Pergeseran)	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
29)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.030.000	151.830.150	99,87%	146.364.000	68.202.000	46,6
30)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.170.000	28.965.000	99,30%	32.140.000	9.795.000	30,48
31)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.500.000	30.100.000	98,69%	132.000.000	130.406.000	98,79
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDA LIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.145.987.500	1.111.416.650	96,98%	656.701.600	262.221.839	39,93
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.025.000.000	996.194.580	97,19%	549.532.600	2.493.996.399	43,39
32)	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	1.025.000.000	996.194.580	97,19%	549.532.600	249.399.639	43,39
10.	Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	21.140.700	84,56%	25.319.000	5.984.100	23,63
33)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	21.140.700	84,56%	25.319.000	5.984.100	23,63
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.987.500	94.081.370	98,01%	81.850.000	6.838.100	8,35
34)	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	20.000.000	19.969.630	99,85%	20.000.000	293.400	1,47
35)	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75.987.500	74.111.740	97,53%	61.850.000	6.544.700	10,58
III. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.635.200.000	1.619.197.520	99,02%	989.037.700	278166825	28,12
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	625.000.000	617.467.610	98,79%	389.621.400	109.546.350	28,12
36)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	141.025.000	138.856.260	98,46%	177.086.300	20.056.700	11,33
37)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perenca naan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	124.200.000	122.762.900	98,84%	78.379.900	68.214.650	87,03
38)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	142.647.000	141.998.100	99,55%	22.849.950	4.303.300	18,83
39)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	217.128.000	213.850.350	98,49%	111.305.250	16.971.700	15,25
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekono mian dan SDA (Sumber Daya Alam)	560.200.000	556.507.597	99,34%	276.597.000	75.833.300	27,42
40)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	77.500.000	76.824.090	99,13%	117.890.200	67.723.700	57,45
41)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyu sunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.500.000	59.338.649	99,73%	23.860.200	1.782.500	7,47
42)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	423.200.000	420.344.858	99,33%	134.846.600	6.327.100	4,69
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	450.000.000	445.222.313	98,94%	322.819.300	92.787.175	28,74
43)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	205.000.000	203.628.440	99,33%	114.765.000	79.803.550	69,54
44)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pe nyusunan Dokumen Perencanaan Pemba ngunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	38.863.700	97,16%	25.753.300	1.517.800	5,89
45)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dab Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	205.000.000	202.730.173	98,89%	182.301.000	11.465.825	6,29
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	650.000.000	600.793.098	92,43%	540.222.950	231.849.650	42,92
15.	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	50.000.000	41.584.900	83,17%	18.446.750	0	0,00
46)	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.000.000	41.584.900	83,17%	18.446.750	0	0,00
16.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	600.000.000	559.208.198	93,20%	521.776.200	231.849.650	44,43
47)	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	600.000.000	559.208.198	93,20%	521.776.200	231.849.650	44,43
	2 urusan 4 Program, 16 Kegiatan, 47 Subkegiatan	**8.925.259.083**	**8.609.257.769**	**96,46%**	**8.489.259.912**	**4.021.325.226**	**47,37**

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 8.925.259.083,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 8.609.257.769,00 atau 96,46 %. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 4.021.325.226,00 atau 47,37% dari pagu efisiensi anggaran Rp. 8.489.259.912,00.

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.449.566.698	5.147.657.923	94,46	5.494.071.583	5.277.850.501	96,06
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.108.000.000	1.091.174.751	98,48	1.145.987.500	1.111.416.650	96,98
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.545.000.000	1.534.175.876	99,30	1.635.200.000	1.619.197.520	99,02
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	625.849.000	619.605.656	99,00	650.000.000	600.793.098	92,43
	Persentase realisasi	**8.728.415.698**	**8.392.614.206**	**96,15**	**8.925.259.083**	**8.609.257.769**	**96,46**
	Rata-rata realisasi 4 program			**97,81**			**96,12**

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

Serapan anggaran selama ini belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut BAPERLITBANG perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja Baperlitbang dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP (Daerah)	Nilai	72	71,90	96,29%
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indek	Baik	Baik	100%
3	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indek	Inovatif	Inovatif	100%
	Rata-rata					98,76

Sumber : Baperlitbang Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel 2.5 kinerja Baperlitbang tahun 2024 masuk kriteria sangat tinggi (98,76%) dari 3 indikator sasaran terdapat 1 yang tidak tercapai 100% yaitu:

(1) Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP): 79,90 dengan kinerja 96,29 dikarenakan :
- Kualitas Perencanaan Kinerja belum memadai.
  Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, penetapan target belum cukup menantang namun realistis, serta keterpaduan *cascading* kinerja antar level jabatan belum tergambar utuh dalam dokumen perencanaan.
- Sistem Pengukuran dan Pemantauan Kinerja belum terstandar.
  Mekanisme pengumpulan data kinerja belum terdokumentasi secara jelas dan seragam; pemantauan berjenjang atas capaian unit di bawahnya belum konsisten; pemahaman pegawai atas hasil pengukuran masih terbatas; serta hasil pengukuran belum secara memadai menjadi dasar penyesuaian alokasi anggaran.
- Siklus Akuntabilitas belum optimal (Pelaporan dan Evaluasi Internal).
  Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis perbandingan (*benchmarking*) yang memadai dan belum efektif mendorong penguatan budaya kinerja; evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara berjenjang dan hasilnya belum dimanfaatkan secara sistematis untuk perbaikan kinerja.

Sedangkan untuk capaian program di Baperlitbang tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6.
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	75*)	75
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALU ASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	%	100	100	100
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	%	93	98,97	106,42
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah	%	52	57	109,6
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	%	50	53	106
	Rata-rata kinerja program					**99,40**

Sumber : Baperlitbang Tahun 2025, diolah

Keterangan :

*) Realisasi dari 8 indikator (2 indikator sasaran dan 5 indikator program) Dimana terdapat 2 indikator yang tidak tercapai yaitu :
1. Nilai SAKIP Daerah dan Nilai SAKIP Baperlitbang;
2. Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh Baperlitbang dengan persentase mencapai 99,40% dari target yang ditetapkan masuk kriteria Sangat Baik. Ada catatan nilai Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tidak tercapai targetnya, tidak dapat tercapai adalah karena yang dicantumkan dalam indikator sasaran adalah nilai SAKIP Daerah, yang pencapaiannya sangat tergantung dari dokumen yang dikerjakan semua OPD. Penyebab

kedua adalah adanya nilai IPKD tahun 2024 yang aplikasi penilaiannya seringkali mengalami gangguan (inputing hilang / terreset / salah input data tahun yang diminta).

b. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja BAPERLITBANG lebih baik (naik) atau lebih jelek (turun). Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana tahun berikutnya. Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja 2023	Kinerja 2024	Ket
1	2	3	6	7	8
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	78,93%	96,29%	naik
1.1. Terwujudnya dokumen perencanaan daerah yang selaras, partisipatif dan implementatif	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	%	100,00%		Berbeda (tdk dapat dibandingkan)
	Persentase kesela rasan program renja PD dengan program RKPD	%	100,00%		
Meningkatnya kualitas perenca naan daerah dan penganggaran	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai		100%	
1.2. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian kinerja perenca naan pembangunan	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	%	108,08%		
	Persentase realisasi capaian RPJMD	%	103,64%		
1.3. Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Persentase hasil kajian yang diimple mentasi kan menjadi kebijakan daerah	%	114,00%		
	Persentase inovasi yang diimplementasi kan	%	150,00%		
Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	NIlai		100%	
Kinerja Baperlitbang			**107,81**	**98,76**	Berbeda (tdk dapat dibandingkan)

Sumber Baperlitbang, 2025, diolah

Berdsaarakan Tabel 2.7 tersebut kinerja BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah Sangat tinggi dimana capain target indikator rata-rata mencapai 98,76%, jikga dibanding dengan tahun 2023 yang 107,81% (Sangat tinggi) mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 9,05%. Namun hal ini tidak dapat dibandingkan karena indikator yang digunakan berbeda antara tahun 2024 dengan 2023. Perbedaan ini disebabkan karena dasar penyusunan Renstra dan Renja berbeda, tahun 2023 menggunakan dasar RPJMD Tahun 2018-2023, sedangkan tahun 2024 menggunakan RPD Tahun 2024-2026.

c. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan target tahun terkahir (tahun 2026) Renstra BAPERLITBANG atau RPD tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra sehingga hasil Evaluasi tahun 2024 juga merupakan pijakan awal tercapai tidaknya hasil akhir Renstra. Gambaran

mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.8.
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2024	Target 2026	Status
1.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	71,90	75	Belum tercapai
2.	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan inovasi daerah	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	Tercapai
3.	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2025

Tabel 2.9.
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Program	Indikator	Realisasi 2024	Target 2026	Status
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	75	100	Tidak Tercapai
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100	100	Tercapai
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program, kegiatan, sub kegiatan antara RKPD dan APBD	98,97	95	Tercapai
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang diimple mentasi kan menjadi kebijakan daerah	57	56	Tercapai
		Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	53	52	Tercapai

Sumber : Baperlitbang, 2025

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 2.8 dan 2.9, diketahui bahwa kinerja Organisasi BAPERLITBANG Tahun 2024 adalah sebagian besar sudah tercapai meskinpun tidak dapat dijadikan pedoman capaian akhir tahun 2026, karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya atau tidak akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPERLITBANG

Baperlitbang Kabupaten Karanganyar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Provinsi maupun Pusat. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Baperlitbang adalah pemberian fasilitasi, pendampingan OPD berbasis perencanaan dan penelitian dan pengembangan yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA);
3. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (MUSRENBANG, Forum OPD /FORGAB OPD);
4. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan

secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun horizontal yakni antar Pemkab (Musrenbangwil, Musrenbangprov, Musrenbangnas, Musrenbangkab tetangga dll).

5. Menyiapkan / menfasilitasi / mengkoordinasikan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi dan transparan;
6. Memberikan / menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan dan hasil evaluasinya.
7. Layanan perijinan KKN, PKL / Magang Mahasiswa/Pelajar;
8. Melakukan riset, kajian dan kegiatan penelitian lainnya.
9. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan kreativitas dan inovasi daerah.

Upaya Baperlitbang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan 8 jenis pelayanan diatas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum BAPERLITBANG dan Forum Gabungan (forgab) Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh Baperlitbang dan OPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Baperlitbang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *Focussed Group Discussion (FGD);*
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Baperlitbang s/d tahun 2025
Kabupaten Karanganyar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
1					**URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
1	01				**BIDANG URUSAN PERENCANAAN**									
01					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	100%	100%	75,00%	75,00	100%	100%	100%
01	2	01			Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, enganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	01		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	3 Dokumen	3 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
01	2	01		04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
01	2	01		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
01	2	01		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	02			Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	02		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	33 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
01	2	02		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
01	2	02		07		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	03		06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	05			Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	05		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
01	2	05		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
01	2	05		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengi kuti Pendidikan dan Pelatihan	33 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	05		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 orang	31 orang	31 orang	31 orang	100%	31 orang	31 orang	100%
01	2	06			Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	06		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baca an dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
01	2	06		07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
01	2	06		08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	06		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	1 laporan	12 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	06		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi			100%	100%	50%	100%	100%	100%
01	2	07		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	2 unit	-	0%	2 unit	1 unit	50%
01	2	07		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	7 unit	8 unit	4 unit	100%	8 unit	29 unit	362%
01	2	07		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	-	-	-	-	-
01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	08		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	08		02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	08		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
01	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01	2	09		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	unit	22 unit	22 unit	100%	22 unit	22 unit	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
01	2	09		06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 unit	50 unit	100%
01	2	09		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
02					**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	01		07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
02	2	02			Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembagunan Daerah	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan Pembangunan yang dapat disusun dalam 1tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	2	02		01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	43 masukan	43 masukan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
02	2	03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
02	2	03		01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
02	2	03		03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
03					**PROGRAM KOOORDINASI dan SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	100%	100%	93%	98,97%	106,4 %	94%	94%	100%
03	2	01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	01		03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
03	2	01		05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD	1 ldokumen	1 ldokumen	7 ldokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
03	2	01		07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 OPD	13 OPD	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
03	2	01		08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
03	2	02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	2	02		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
03	2	02		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 laporan	2 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
03	2	02		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
03	2	03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang fisik dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
03	2	03		01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	1 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
03	2	03		03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Fisik dan Prasarana	5 OPD	5 OPD	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
03	2	03		04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perenca naan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%
2					**BIDANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
02	01				**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	54%	54%	52%	57%	109,6 %	54%	54%	100%
						Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	76%	76%	50%	53%	106%	51%	51%	100%
02	2	01			Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	54%	54%	57%	71%	124,6 %	60%	60%	100%
02	2	01		12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun akhir Renstra (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/9)
02	2	04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	76%	76%	78%	80%	102,6 %	79%	79%	100%
02	2	04		01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, pengem bangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovas	8 dokumen	8 dokumen	57 dokumen	75 dokumen	131,6 %	59 dokumen	59 dokumen	100%

Tabel 2.11.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				2023 (thn-2)	2024 (thn-1)	2025 (thn-n)	2026 (thn+1)	2024 (thn-2)	2025 (thn-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	14
1.	Persentase Kesesuaian Prioritas Nasional dan RKPD	-	Membandingkan program dalam RKPD apakah sudah sesuai dengan prioritas nasional	100,00	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD	-	Membandingkan program renja PD apakah sudah selaras dengan RKPD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3.	Persentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	-	Membandingkan jumlah usulan kegiatan dalam musrenbang dengan kegiatan yang dapat ditampung dalam RKPD	90,00	-	-	-	-	-	-
4.	Persentase realisasi capaian RPJMD	-	Membandingkan realisasi capaian RPJMD per OPD dengan target capaian dalam RPJMD	88,00	-	-	-	-	-	-
5.	Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah	-	Membandingkan jumlah hasil kajian yang ada dengan kajian yang diimplementsikan menjadi kebijakan daerah	50,00	52,00	54,00	56,00	57,00		
6.	Persentase inovasi yang diimplementasikan	-	Membandingkan jumlah inovasi yang ada dengan inovasi yang diimplementasikan	47,00	50,00	51,00	52,00	53,00		
7	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-	Membandingkan jumlah OPD yang tercapai indikator IKU dan IKK dengan jumlah total OPD		100,00	100,00	100,00	75,00		
8	Komponen Perencanaan dalam SAKIP	-	Hasil Review SAKIP oleh Inspektorat		74,00	75,00	76,00	71,90		
9	Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD	-	Membandingkan program, kegiatan, subkegiatan antara APBD PD apakah sudah selaras dengan RKPD		93,00	94,00	95,00	98,97		
10	Indeks inovasi daerah	-			inovatif	inovatif	inovatif	inovatif		

Sumber : Baperlitbang, 2025 diolah

2.3. Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024

Pencapaian prestasi yang bersifat perlombaan yang diikuti oleh BAPERLITBANG baik sebagai peserta ataupun sebagai fasilitator peserta, pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Juara II Krenova Kategori Pelajar se SUBOSUKAWONOSRATEN
   Lomba kreativitas dan inovasi kategori Pelajar se SUBOSUKAWONOSRATEN yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Surakarta, dimana Wakil dari Kabupaten Karanganyar yang difasilitasi oleh BAPERLITBANG dengan inovasi berupa : KARANGANYAR AMBEC (al amaanah best electrical controller);
2) Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPERLITBANG

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Baperlitbang selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1) Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan : terkait penyusunan RPJMD 2025-2029; Penyusunan RKPD dan Perubahannya; Efisiensi anggaran; Sinergitas Pusat dan Daerah dll
2) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan secara sistematis dan akurat : Penyediaan dan pemanfaatan satu data dalam SIPD;
3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah : pembuatan dan penempatan indikator yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena kurang atau tidak ada bukti dukungnya;

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas BAPERLITBANG juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1) Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2) Adanya anggapan buruk terhadap proses perencanaan pembangunan, (Musrenbang) hanya kegiatan formalitas saja
3) Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Baperlitbang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Baperlitbang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Penyusunan Renja dan RKPD Tahun 2026, pada tahapan Rancangan awal masih menggunakan RPD dan Renstra Tahun 2024-2026, tetapi pada tahapan berikutnya akan disesuai dengan Rancangan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029.

Dilihat dari kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan antara renja dengan Rancangan Awal RKPD 2026 maka, diketahui Renja BAPPERIDA Tahun 2026 sudah sinkron / konsisten.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BAPPERIDA disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.12.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dalam BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**9.432.980.912**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.811.933.412**	
	PERENCANAAN				**8.782.980.912**	**PERENCANAAN**				**9.161.933.412**	
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.377.661.912**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**6.426.614.412**	
1.	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	100%	**92.450.000**	**Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang dapat di susun dalam satu tahun**	100%	**92.450.000**	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	72.450.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	2 dokumen	72.450.000	
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	5.000.000	
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	6.000.000	
1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	9.000.000	
2.	**Administratif keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	100%	**5.173.885.962**	**Administratif keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun**	100%	**5.173.885.962**	
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ bulan	5.141.035.962	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ bulan	5.141.035.962	
2.2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.250.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	28.250.000	
2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semes teran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah**	**100%**	**3.600.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah**	**100%**	**3.600.000**	
3.1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	
4.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	100%	**13.000.000**	**Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)**	100%	**167.000.000**	
4.1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	3.000.000	
4.2.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	
4.3.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jateng DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jateng DIY	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang	150.000.000	
4.4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	4.000.000	
5.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**208.656.450**	**Administratif Umum Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang di penuhi**	**100%**	**214.856.450**	
5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumleah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	1 Paket	9.240.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumleah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor	1 Paket	9.240.000	
5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perleng kapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.970.250	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.970.250	
5.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
5.4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1.670.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	1.670.000	
5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Karanganyar	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Dokumen	3.000.000	
5.6.	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.916.200	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.916.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000	
5.8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.060.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.060.000	
5.9.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	8.000.000	
5.10.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	9.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	15.000.000	
6.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	Kab. Karanganyar	**Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi**	**100%**	**421.629.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	Kab. Karanganyar	**Persentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan yang terpenuhi**	**100%**	**441.382.000**	
6.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	310.732.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit	310.732.000	
6.2.	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar	Jumlah Mebel yang Disediakan	15 unit	40.650.000	Pengadaan Mebel	Kab. Karanganyar	Jumlah Mebel yang Disediakan	15 unit	40.650.000	
6.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	70.247.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	90.000.000	
7.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**165.900.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**165.900.000**	
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	21.000.000	
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	93.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	93.600.000	
7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	51.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	51.300.000	
8.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**298.540.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun**	**100%**	**216.540.000**	
8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	134.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliha raan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	134.400.000	
8.2.	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	32.140.000	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	32.140.000	
8.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	132.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II.	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**1.010.319.000**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN,DAN EVALU ASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**100%**	**1.010.319.000**	
9.	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kab. Karanganyar	**Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**890.000.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Kab. Karanganyar	**Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**890.000.000**	
9.1.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	890.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	3 dokumen	890.000.000	
10.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perenanaan Pembagunan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan Pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**25.319.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perenanaan Pembagunan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan Pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**25.319.000**	
10.1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	25.319.000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 dokumen	25.319.000	
11.	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**95.000.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun**	**100%**	**95.000.000**	
11.1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	20.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	20.000.000	
11.2.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	75.000.000	
III.	**PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD**	**94%**	**1.395.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PEREN CANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD**	**94%**	**1.395.000.000**	
12.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Karanganyar	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**525.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Kab. Karanganyar	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**565.000.000**	
12.1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	185.937.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan	185.937.000	
12.2.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	129.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	129.000.000	
12.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	46.240.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	86.240.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	163.823.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	163.823.000	
13.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Kab. Karanganyar	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**420.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Kab. Karanganyar	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA**	**100%**	**480.000.000**	
13.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	130.000.000	Koordinasi Penyusunan Doku men Perencanaan Pembangun an Daerah Bidang Perekono mian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	130.000.000	
13.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pereko nomian (Badan Perencanaan, Penelitian dan engembangan)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	4 Laporan	50.000.000	
13.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	240.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	300.000.000	
14.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kab. Karanganyar	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**450.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Kab. Karanganyar	**Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100%**	**510.000.000**	
14.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	180.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen perencanaan pembangun daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	180.000.000	
14.2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	4 Laporan	50.000.000	
14.3.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	220.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	300.000.000	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Kab. Karanganyar			**650.000.000**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	Kab. Karanganyar			**650.000.000**	
IV.	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah**	**56%**	**650.000.000**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Persentase hasil kajian yang diimplementasi kan menjadi kebijakan daerah**	**56%**	**650.000.000**	
			Persentase hasil krenova yang diimplementasikan	**52%**				**Persentase hasil krenova yang diimplementasikan**	**52%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerin tahan dan Pengkajian Peraturan**	Kab. Karanganyar	**Persentase hasil krenova yang diimplementasikan**	**62%**	**50.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kab. Karanganyar	**Persentase hasil krenova yang diimplementasikan**	**62%**	**50.000.000**	
15.1.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	50.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	50.000.000	
16.	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kab. Karanganyar	**Capaian pengembangan inovasi dan teknologi**	**80%**	**600.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Kab. Karanganyar	**Capaian pengembangan inovasi dan teknologi**	**80%**	**600.000.000**	
16.1.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	60 dokumen	600.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	60 dokumen	600.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPERLITBANG sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menjadi *leading sector* atau coordinator pada urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan

Usulan program dalam Renja BAPERLITBANG dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.13.

Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas,

berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :
1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :
1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;

9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja BAPPERIDA Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029, adalah ***Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah***.

Penjelasan rumusan tujuan BAPPERIDA tersebut diatas adalah dengan adanya peningkatan kualitas perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang melayani, melalui:

1) Meningkatnya dokumen perencanaan yang sinergi antara tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan antara Daerah dan Perangkat Daerah (antara RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja);
2) Meningkatnya kesesuaian antara prioritas pusat, provinsi dan daerah;
3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendorong perencanaan yang baik;
4) Meningkatnya riset dan inovasi daerah, serta pemanfaatannya;

5) Meningkatnya akuntabilitas dan pencapaian sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi pelayanan Masyarakat;
6) Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat / umum yang bermutu baik (berkualitas) sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran BAPPERIDA Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah;
2) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah;
3) Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah;

Penjelasan rumusan sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah — Bapperida menyusun rencana pembangunan yang rapi dan sejalan antar dinas, agar langkah semua pihak satu arah. Keberhasilan terlihat dari rencana selesai tepat waktu, isinya nyambung, dan program prioritas bisa jalan tanpa hambatan. Strategi meliputi pendampingan ke OPD, forum sinkronisasi yang rutin, serta penggunaan data yang jelas saat mengambil keputusan. Pengendalian dilakukan lewat pemantauan berkala dan pengecekan dokumen, lengkap dengan notulen dan daftar cek.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah — Bapperida memberi layanan pendampingan perencanaan dan data yang mudah diakses, responsif, dan ramah pengguna. Capaian diukur dari kepuasan penerima layanan, kecepatan penyelesaian, dan kerapian administrasi yang terjaga. Strategi mencakup penyederhanaan alur, layanan daring yang praktis, dan peningkatan keterampilan pegawai. Pengendalian dilakukan dengan survei singkat, dashboard pemantauan, dan tindak lanjut perbaikan yang konsisten.
3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah — Bapperida fokus pada riset yang bisa langsung dipakai dalam kebijakan dan pada inovasi yang manfaatnya terasa bagi warga. Keberhasilan terlihat dari saran riset yang dipakai, data yang rapi dan mudah diakses, serta makin banyak ide baru yang diterapkan. Strategi meliputi memilih topik paling penting, kerja sama dengan kampus, pelaku usaha, dan komunitas, serta pendampingan agar ide siap diuji coba. Tata kelola dilakukan dengan seleksi yang jelas, jadwal tindak lanjut yang dipantau, dan rilis singkat yang menjelaskan hasil dan manfaatnya

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2026
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi			IPP: Indek perencanaan pembangunan	Indeks	85,11
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,25
	1. Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah		Nilai Komponen Perencanaan dalam SAKIP	Indeks	24,25
		1) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	90,75
			Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD	%	100
		2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	%	40
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target -	%	40

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	2026
			Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA		
			Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	%	40
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,2
		3) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,00
	3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah		Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset	Buah	4
			Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri	Buah	45
		4) Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi	Prosen	34

Sumber : Renstra BAPPERIDA 2025-2029

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

BAPPERIDA sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pad urusan Perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga perencanaan seperti BAPPERIDA harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

1) Semakin kompleksnya isu pembangunan, BAPPERIDA memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif dan inovatif.
2) Tantangan kemajuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, BAPPERIDA dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
3) Adanya perubahan kebijakan yang konstan dan dinamis dapat memengaruhi kontinuitas dari rencana pembangunan nasional dan daerah. BAPPERIDA harus tetap siap menghadapi perubahan politik untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah direncanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bappenas dan Bappeda menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.
4) Perubahan Iklim seringkali mempengaruhi pelaksanaan suatu rencana, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Misalnya untuk urusan pertanian : Perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam di daerah ini, yang dapat berdampak pada keberlangsungan Pembangunan;
5) Persaingan dengan daerah lain: Terdapat persaingan dengan daerah lain dalam hal investasi, sumber daya manusia, atau penarikan wisatawan, atau penarikan investor, perbedaan dalam penataaa ruang dll.
6) Perubahan Kebijakan Pemerintah yang sering berganti-ganti atau berubah-ubah, kurang mendukung konistensi rencana pembangunan: Pemerintah dapat mengubah kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di daerah ini, seperti pembatasan investasi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi sektor tertentu.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan BAPPERIDA juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, menjadi kesempatan yang baik untuk memulai perencanaan yang konsisten, sinkron dan berkelanjutan.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
3. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong muncul dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.
6. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.
7. Selain itu, BAPPERIDA dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara BAPPERIDA mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran BAPPERIDA dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan BAPPERIDA.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka BAPPERIDA masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan OPD

Tujuan RPJMD	Indikator	Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi birokrasi	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Daerah; 2. Maturitas SPIP; 3. Indeks pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan
Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya riset dan inovasi	4. Kapabilitas Inovasi		Indeks Inovasi Daerah

Sumber **:** *BAPPERIDA, 2025*

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan dan Sasaran OPD

Sasaran RPJMD	Indikator	Tujuan OPD	Indikator	Sasaran OPD	Indikator
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Daerah; 2. Maturitas SPIP; 3. Indek pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP
				2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya riset dan inovasi	4. Kapabilitas Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	1. Jumlah Kebijakan Daerah yang Berbasis Riset
					2. Jumlah Inovasi Daerah yang Terverifikasi Kemendagri

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.4.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah Berbasis Riset Dan Inovasi	1) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
		Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perenca naan dan Pelaksanaan Pemba ngunan Daerah di Kabupaten/ Kota
			Monitoring, Evaluasi dan Penyu sunan Laporan Berkala Pelaksana an Pembangunan Daerah
	2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Koordinasi Peren canaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
		Koordinasi Peren canaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administratif keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administratif Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Fasilitas Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliha raan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Meningkatnya Pengelolaan Riset dan Inovasi Daerah	4) Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
		Invensi dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi

Sumber **:** *BAPPERIDA, 2025*

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program Kegiatan dan Subkegiatan OPD

Beberapa program kegiatan dan subkegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program, kegiatan dan subkegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program kegiatan dan subkegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program, kegiatan dan sub kegiatan BAPPERIDA Tahun 2026 adalah sebagaimana tabal 4.1

4.2 Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1.

Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif Tahun 2026

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN							**5.448.765.175**					**10.632.550.000**
5.01	**PERENCANAAN**							**5.148.765.175**					**9.832.550.000**
5.01.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP OPD**	**%**	**75**	**71,90**	**73**	**73**	**4.571.765.175**	**Kab. Karanganyar**	**APBD**	**OPD**	**100**	**6.119.300.000**
5.01.01.201	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	29.100.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	134.000.000
5.01.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan & penganggaran OPD	Dokumen	2	2	2	4	12.520.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	110.000.000
5.01.01.201.04	Koordinasi dan penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	4							
5.01.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	3	3	1	8.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	12.000.000
5.01.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	8.580.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	12.000.000
5.01.01.202	Administratif keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran OPD dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	4.046.215.295	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	4.509.300.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	31	31	31	37	3.981.215.295	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	37	4.500.000.000
5.01.01.202.03	Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1							
5.01.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4	4	65.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	9.300.000
5.01.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi (penatausahaan) barang milik daerah	%	100	100	100							
5.01.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Daerah Penatausahaan Barang Milik pada SKPD	Laporan	1	1	1							
5.01.01.205	Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian (ASN dan Non ASN)	%	100	100	100	100	5.049.880	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	169.500.000
5.01.01.205.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	1							
5.01.01.205.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	5.049.880	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	14.500.000
5.01.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	31	31	31	0	0	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	37	155.000.000
5.01.01.205.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	31	31	31							
5.01.01.206	Administratif Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	%	100	100	100	100	144.900.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	239.500.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1							
5.01.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	22.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	18.500.000
5.01.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Pengadaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	17.300.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	19.000.000
5.01.01.206.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Laporan	1	1	1							
5.01.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	2							
5.01.01.206.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Laporan Pengadaan Bahan/Material yang disediakan	Laporan	1	1	1							
5.01.01.206.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	1	1	15.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	23.500.000
5.01.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	75.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	135.000.000
5.01.01.206.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	10.500.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	13.500.000
5.01.01.206.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	5.100.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	30.000.000
5.01.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah	Persentase kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang terpenuhi	%	100	100	100	100	15.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	520.000.000
5.01.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	2	0	1	0	0	Kab. Karang	APBD	OPD	0	370.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan							anyar				
5.01.01.207.03	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit		1	1							
5.01.01.207.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	4	28	1	15.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	10	150.000.000
5.01.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0		-	0	Kab. Karang anyar	APBD	OPD		
5.01.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	207.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	185.000.000
5.01.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1							
5.01.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	120.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	125.000.000
5.01.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	87.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	60.000.000
5.01.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang OPD yang dipenuhi dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	124.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	100	362.000.000
5.01.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeli haraan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	22	22	22	22	91.500.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	22	204.000.000
5.01.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	50	50	13.000.000,	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	50	55.000.000
5.01.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	20.000.000	Kab. Karang anyar	APBD	OPD	1	103.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.02	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase keselarasan program renja PD dengan program RKPD**	**%**	100	**100**	**100**							
		Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD					**90,75**	**510.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**APBD**	**OPD**		**1.085.000.000**
		Persentase Keselarasan RPJMD dan RENSTRA PD					**100**		**Kab. Karanganyar**	**APBD**	**OPD**		
5.01.02.201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan dan pendanaan yang dapat disusun dalam 1 tahun	**%**	100	100	100	100	378.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	950.000.000
5.01.02.201.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	3	3	3	4	378.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	950.000.000
5.01.02.202	Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase masukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	20.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	20.000.000
5.01.02.202.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	1	1	20.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	20.000.000
5.01.02.203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendelian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah yang dapat disusun dalam 1 tahun	%	100	100	100	100	112.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	115.000.000
5.01.02.203.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4	4	4	4	20.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	20.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.02.203.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	2	2	2	2	92.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	2	95.000.000
5.01.03	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan antara RKPD dan APBD**	**%**	95	98,97	98	**100**	**670.000.000**	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	**100**	
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang PPM	**%**				**40**		Kab. Karanganyar	APBD	OPD	**40,5**	**2.628.250.000**
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Ekonomi SDA	**%**				**40**		Kab. Karanganyar	APBD	OPD	**40,5**	
		Kesesuaian antara Isu Strategis - Target - Program/Kegiatan/sub kegiatan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan					**40**		Kab. Karanganyar	APBD	OPD	**40,5**	
5.01.03.201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	100	100	300.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	100	847.000.000
5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	3	3	3	3	80.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	3	209.000.000
5.01.03.201.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	7	5	4	84.225.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	184.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	RKPD)												
5.01.03.201.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	4	4	4	1	36.475.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	121.000.000
5.01.03.201.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	2	2	2	1	99.300.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	333.000.000
5.01.03.202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Capaian kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	175.260.800	Kab. Karanganyar	APBD	OPD		815.000.000
5.01.03.202.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	7	5	4	59.500.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	240.000.000
5.01.03.202.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	4	4	1	17.500.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	125.000.000

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.01.03.202.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	2	1	98.260.8000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	450.000.000
5.01.03.203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Capaian jumlah program yang memenuhi target bidang prasarana wilayah	%	100	100	100	100	194.739.200	Kab. Karanganyar	APBD	OPD		966.250.000
5.01.03.203.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	7	4	4	95.363.700	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	4	330.000.000
5.01.03.203.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	4	4	1	23.000.00	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	180.000.000
5.01.03.203.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Kab. Karanganyar Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	2	2	2	1	76.375.500	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	456.250.000
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**300.000.000**					**800.000.000**
5.05.02	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil kajian yang diimplementasikan menjadi kebijakan daerah**	**%**	56	57	54							
		Persentase inovasi yang diimplementasikan	%	52	53	51							

Kode Rek	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA Tahun 2025	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber dana	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.05.02.201	Penelitian dan Pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan	Prosentase jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola	%	62	62	60							
5.05.02.201.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	9	9	8							
5.05.02.204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Capaian pengembangan inovasi dan teknologi	%	80	80	79							
5.05.02.204.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	60	90	59							
5.05.03	**Program Riset dan Inovasi Daerah**	**Persentase hasil riset yang menjadi kebijakan dan atau inovasi**	%				34	300.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	35	600.000.000
5.05.03.2.01	Penelitian Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase rencana riset yang dilaksanakan (didanai)	%				10	50.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	15	100.000.000
5.05.03.2.01.0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan				4	50.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	6	100.000.000
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase invensi dan inovasi yang difasilitasi pengembangannya	%				60	250.000.000	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	62	500.000.000
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan				1	202.684.750	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	400.000.000
5.05.03.2.02.0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan				1	47.315.250	Kab. Karanganyar	APBD	OPD	1	100.000.000

Sumber : BAPPERIDA, 2025

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPERIDA tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Taget 2026
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	85,11
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,25
3	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP	Nilai	24,25
4	Nilai SKM	Nilai	88,5

Tabel 4.3
Program/Kegiatan BAPPERIDA yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Kabupaen Karanganyar Tahun 2026	Program/Kegiatan BAPPERIDA yang mendukung	Pagu Anggaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik	➢ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan	29.100.000
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	➢ Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pembangunan Daerah	510.000.000
		➢ Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	670.000.000
		➢ Program Riset dan Inovasi Daerah	300.000.000
	Jumlah		**1.509.100.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Menjadi bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diimplementasikan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Renja dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan pembangunan di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan, yang tertuang dalam Rencana Kerja BAPPERIDA Kabupaten Karanganyar Tahun 20265.

Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA harus ada keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan (RKPD), maupun dokumen perencanaan jangka menengah (RENSTRA dan RPD).

Capaian kinerja sub kegiatan dan kegiatan akan mempengaruhi capaian satu program di atasnya *(cascading)* dan juga dapat mempengaruhi *(cross cutting)* capaian kinerja program lain dan satu perangkat daerah ataupun pada perangkat daerah lainnya. Untuk itulah penyusunan renja harus memperhatikan tugas dan fungsi BAPPERIDA sebagai *leading* / koordinator dalam penyusunan dokumen Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Karanganyar.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Renja BAPPERIDA Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan / mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
2) Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026, dalam mencapai target indikator yang telah ditetapkan (direncanakan) disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran Tahun 2026;
3) Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026, merupakan rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja BAPPERIDA Tahun 2026, diperlukan rencana tahapan selanjutnya yaitu :

1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai alokasi anggaran dalam RAPBD 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026, sesuai alokasi anggaran dalam APBD 2026;

2) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu:
   a. penguatan kelembagaan dan stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan ;
   b. sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya, penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan;
   c. monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rutin ataupun berkala, pelaksanaan Rencana Kerja OPD;
   d. meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Dengan dilaksanakankannya Rencana Kerja BAPPERIDA Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi BAPPERIDA secara efektif dan efisien, dengan sumber daya manusia, sarana prasarana yang terbatas, dan teknologi yang semakin maju sehingga Kabupaten Karanganyar semakin maju, kompetitif dan harmoni.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian kinerja organiasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terencana.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dimaklumi bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya. Selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Karanganyar, September 2025
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar

Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19700510 199003 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....I-i
Daftar Isi.....I-ii
Daftar Tabel.....I-iii

BAB I PENDAHULUAN.....I-1
1.1. Latar Belakang.....I-1
1.2. Landasan Hukum.....I-1
1.3. Maksud dan Tujuan.....I-3
1.4. Sistematika Penulisan.....I-4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025 .....II-2
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....II-22
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-26
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....II-29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....III-1
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran.....III-3
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....III-8
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD.....III-8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..IV-1
4.1.Perumusan Program dan Kegiatan diserta Target dan Pendanaan.....IV-16

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....II-2

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Triwulan II.....II-8Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....II-19Tabel 2.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....II-19

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024.....II-19

Tabel 2.6 Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024.....II-20

Tabel 2.7 Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD).....II-21

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....II-21

Tabel 2.9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....II-22

Tabel 2.10 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD OPD TAHUN 2026 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.....II-26

Tabel 3. 1 Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026.....III-7

Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD.....III-9

Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....III-9

Tabel 4.1 RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. KARANGANYAR TAHUN 2026.....IV-2

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030.....IV-16

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030.....IV-16

Tabel 4.4 Program/ Kegiatan / Subkegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....IV-17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan dimasa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencaaan diperlukan oleh semua pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan–tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Badan Kauangan Daerah sebagai sebuah unit kerja memegang peranan penting dan utama dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi yang mempunyai fungsi sangat penting dan fundamental.Renja OPD adalah rencana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi /unit organisasi terendah dan terkecil dari Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat atasnya.Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja OPD) berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan OPD kepada masyarakat.Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan OPD dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, kinerja OPD dapat dilihat landasan hukum yang digunakan, terlaksananya maksud dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari disusunnya rencana kerja ini adalah:
   Sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2026. Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah setiap tahunnya guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah beserta indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah sebagai bentuk tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Bupati Karanganyar sebagai pemberi amanah.
b. Tujuan Penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar bertujuan untuk:
   1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan satu tahun Badan Keuangan Daerah untuk mendukung terwujudnya tujuan organisasi, program pembangunan dan sasaran daerah dari Bupati/Wakil Bupati Karanganyar terpilih yang telah ditetapkan dan bersinergi dengan indikator kinerja dari rencana kerja Badan Keuangan Daerah;
   2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan berserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
   3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah terhadap pencapaian target indikator kinerja setiap tahunnya;
   4. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1. Latar Belakang

Memuat Latar Belakang dari disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja BKD Kabupaten Karanganyar 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyajian laporan penyusunan Rencana Kerja BKD Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2024) pada BKD Kabupaten Karanganyar.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dalam satu tahun kedepan BKD Kabupaten Karanganyar.

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan, Sasaran dan program Renja Perangkat Daerah

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di BKD Kabupaten Karanganyar.

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksana Rencana Kerja BKD Kabupaten Karanganyar.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Sistem perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; Tahap 2: Merumuskan keadaan sekarang/saat ini, Tahap 3: Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, Tahap 4: Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimilik serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.Demikian juga rencana kerja perangkat Daerah di Badan Keuangan Daerah perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan.

Dalam sistem perencanaan dengan digantinya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diberlakukan mulai tahun 2021, cukup banyak perubahan yang harus dilakukan di Badan Keuangan Daerah. Semula sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ada 9 program dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ada 3 program sehingga untuk perencanaan yang berkelanjutan dilakukan pemetaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan agar tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di Renstra Tahun 2018 -2023 bisa tetap berkesinambungan. Pemetaan dilakukan agar setiap kegiatan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bisa dilanjutkan sesuai dengan sub kegiatan di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 bahwa *"Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah",* sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 245.820.209.492,00 atau mencapai 112,92 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 217.700.930.000,00

Realisasi Pendapatan Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 174.381.216.034,00 atau mencapai 92,30 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 188.926.096.068,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 21.556.721.990,00 atau mencapai 102,47% dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp21.037.753.463,00

Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 12.114.378.899,00 atau mencapai 130,81 % dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 9.261.075.300,00

Evaluasi pencapaian terget selama 1 (satu) tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa "*Berdasarkan rincian diatas secara signifikan,*

relisasi dari Pos Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan". Dari kondisi belanja bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional.Belanja daerah dimaksud pola pengaturannya terbagi dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk diljadikan bahan / acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara offline, walaupun tetap ada yang dilakukan secara daring tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang dulunya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Rp504.861.343.164**	**Rp481.420.577.670**	95%	**Rp527.584.010.742**	**Rp468.821.906.242**	89%
	KEUANGAN	**Rp504.861.343.164**	**Rp481.420.577.670**	95%	**Rp527.584.010.742**	**Rp468.821.906.242**	89%
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp88.577.560.043**	**Rp76.364.117.355**	86%	**Rp88.242.004.317**	**Rp90.286.688.621**	102%
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp301.196.600**	**Rp349.844.400**	116%	**Rp292.532.125**	**Rp362.765.975**	124%
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp148.676.600	Rp173.321.100	117%	Rp185.544.125	Rp204.744.125	110%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp152.520.000	Rp176.523.300	116%	Rp106.988.000	Rp158.021.850	148%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp43.602.524.105**	**Rp31.307.475.817**	72%	**Rp41.936.891.554**	**Rp43.576.379.408**	104%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp43.572.524.105	Rp31.277.475.817	72%	Rp41.906.891.554	Rp43.546.379.408	104%
2)	Koordinasi dan	Rp30.000.000	Rp30.000.000	100%	Rp30.000.000	Rp30.000.000	100%

	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD						
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp165.975.750**	**Rp37.893.750**	23%	**Rp80.000.000**	**Rp80.000.000**	100%
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp165.975.750	Rp37.893.750	23%	Rp80.000.000	Rp80.000.000	100%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp2.979.017.700**	**Rp2.976.767.700**	100%	**Rp2.372.626.500**	**Rp2.795.926.500**	118%
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp700.276.000	Rp773.746.000	110%	Rp557.724.800	Rp778.024.800	139%
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp449.900.000	Rp424.900.000	94%	Rp300.000.000	Rp300.000.000	100%
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.280.390.000	Rp1.224.820.000	96%	Rp1.038.750.000	Rp1.243.250.000	120%
4)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp142.761.700	Rp137.761.700	96%	Rp95.761.700	Rp95.761.700	100%
5)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp405.690.000	Rp415.540.000	102%	Rp380.390.000	Rp378.890.000	100%
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp680.000.000**	**Rp680.000.000**	100%	**Rp841.000.000**	**Rp841.000.000**	100%
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp680.000.000	Rp680.000.000	100%	Rp841.000.000	Rp841.000.000	100%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp39.483.276.138**	**Rp39.587.427.588**	100%	**Rp41.409.331.288**	**Rp41.391.227.738**	100%
1)	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp219.414.700	Rp259.462.000	118%	Rp221.554.850	Rp235.271.300	106%
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp37.532.120.000	Rp37.508.277.500	100%	Rp39.934.786.300	Rp39.844.786.300	100%
3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp100.111.953	Rp100.111.953	100%	Rp100.111.953	Rp100.111.953	100%
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.631.629.485	Rp1.719.576.135	105%	Rp1.152.878.185	Rp1.211.058.185	105%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp1.365.569.750**	**Rp1.424.708.100**	104%	**Rp1.309.622.850**	**Rp1.239.389.000**	95%
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp439.704.000	Rp427.224.000	97%	Rp341.330.500	Rp341.330.500	100%
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp587.865.750	Rp659.484.100	112%	Rp630.292.350	Rp560.058.500	89%
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp198.000.000	Rp198.000.000	100%	Rp198.000.000	Rp198.000.000	100%
4)	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp100.000.000	Rp100.000.000	100%	Rp100.000.000	Rp100.000.000	100%
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp40.000.000	Rp40.000.000	100%	Rp40.000.000	Rp40.000.000	100%
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Rp408.911.431.494**	**Rp397.665.145.188**	97%	**Rp431.013.034.898**	**Rp370.401.546.094**	86%
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Rp1.345.566.775**	**Rp1.370.518.775**	102%	**Rp1.463.046.775**	**Rp1.873.944.775**	128%
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp170.608.500	Rp147.442.500	86%	Rp232.954.850	Rp232.954.850	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Rp135.511.000	Rp102.959.000	76%	Rp138.975.950	Rp138.975.950	100%
3)	Koordinasi, Penyusunan	Rp18.917.600	Rp18.917.600	100%	Rp24.300.000	Rp24.300.000	100%

	dan Verifikasi RKA-SKPD						
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp19.811.450	Rp19.811.450	100%	Rp25.345.000	Rp25.345.000	100%
5)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
6)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp211.456.900	Rp233.597.900	110%	Rp196.880.350	Rp196.880.350	100%
8)	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Rp201.412.600	Rp253.953.600	126%	Rp243.635.200	Rp243.635.200	100%
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp79.364.600	Rp78.864.600	99%	Rp182.915.000	Rp182.915.000	100%
10)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp508.484.125	Rp514.972.125	101%	Rp418.040.425	Rp828.938.425	198%
2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Rp1.301.423.800**	**Rp1.301.423.800**	100%	**Rp1.209.663.800**	**Rp1.259.663.800**	104%
1)	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Rp95.205.800	Rp95.205.800	100%	Rp92.100.500	Rp92.100.500	100%
2)	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Rp6.584.000	Rp6.584.000	100%	Rp13.468.700	Rp13.468.700	100%
3)	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Rp7.118.000	Rp7.118.000	100%	Rp51.004.500	Rp51.004.500	100%
4)	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Rp724.112.000	Rp724.112.000	100%	Rp673.058.600	Rp673.058.600	100%
5)	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Rp5.068.000	Rp5.068.000	100%	Rp27.019.500	Rp27.019.500	100%
6)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Rp160.000.000	Rp160.000.000	100%	Rp160.000.000	Rp160.000.000	100%
7)	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Rp19.589.000	Rp19.589.000	100%	Rp11.518.000	Rp11.518.000	100%
8)	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp283.747.000	Rp283.747.000	100%	Rp181.494.000	Rp231.494.000	128%
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi**	**Rp1.323.899.119**	**Rp1.323.899.119**	100%	**Rp1.403.839.119**	**Rp1.403.839.119**	100%

	dan Pelaporan Keuangan Daerah						
1)	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp56.055.400	Rp66.284.400	118%	Rp56.055.400	Rp56.055.400	100%
2)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Rp8.669.000	Rp8.669.000	100%	Rp9.918.600	Rp9.918.600	100%
3)	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp664.022.250	Rp679.519.250	102%	Rp657.135.619	Rp652.959.619	99%
4)	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp6.433.500	Rp6.433.500	100%	Rp5.183.500	Rp5.183.500	100%
5)	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp5.125.069	Rp5.125.069	100%	Rp5.274.200	Rp5.274.200	100%
6)	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Rp3.850.000	Rp3.850.000	100%	Rp4.350.000	Rp4.350.000	100%
7)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp579.743.900	Rp554.017.900	96%	Rp665.921.800	Rp670.097.800	101%
4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Rp404.940.541.800**	**Rp393.669.303.494**	97%	**Rp426.936.485.204**	**Rp365.864.098.400**	86%
1)	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Rp375.689.012.700	Rp357.395.000.700	95%	Rp385.403.251.904	Rp329.070.921.400	85%
2)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp6.462.352.200	Rp13.488.475.894	209%	Rp10.000.000.000	Rp15.000.000.000	150%
3)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp22.789.176.900	Rp22.785.826.900	100%	Rp31.533.233.300	Rp21.793.177.000	69%
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Rp1.855.366.120**	**Rp1.855.366.120**	100%	**Rp2.036.126.120**	**Rp1.846.126.120**	91%
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Rp1.855.366.120**	**Rp1.855.366.120**	100%	**Rp2.036.126.120**	**Rp1.846.126.120**	91%
1)	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
2)	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Rp153.944.530	Rp153.944.530	100%	Rp371.488.530	Rp396.388.530	107%
3)	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp312.439.050	Rp306.189.050	98%	Rp292.409.404	Rp292.409.404	100%
4)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp489.959.456	Rp490.959.456	100%	Rp347.572.506	Rp347.572.506	100%
5)	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Rp389.590.950	Rp398.840.950	102%	Rp594.346.400	Rp594.346.400	100%
6)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp129.881.530	Rp129.881.530	100%	Rp141.781.530	Rp116.881.530	82%
7)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp379.550.604	Rp375.550.604	99%	Rp288.527.750	Rp98.527.750	34%
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rp5.516.985.507**	**Rp5.535.949.007**	100%	**Rp6.292.845.407**	**Rp6.287.545.407**	100%

1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rp3.528.202.830**	**Rp3.517.307.830**	100%	**Rp3.779.537.830**	**Rp3.779.537.830**	100%
1)	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rp244.949.830	Rp244.949.830	100%	Rp219.707.550	Rp219.707.550	100%
2)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
3)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Rp0	Rp0	0%	Rp580.555.000	Rp580.555.000	100%
4)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp1.777.183.300	Rp1.777.183.300	100%	Rp1.585.746.250	Rp1.585.746.250	100%
5)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp1.506.069.700	Rp1.495.174.700	99%	Rp1.393.529.030	Rp1.393.529.030	100%
2	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rp1.988.782.677**	**Rp2.018.641.177**	102%	**Rp2.513.307.577**	**Rp2.508.007.577**	100%
1)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Rp83.667.875	Rp83.667.875	100%	Rp83.667.881	Rp83.667.881	100%
2)	Penagihan Pajak daerah	Rp1.480.715.552	Rp1.600.221.552	108%	Rp1.571.350.546	Rp1.571.350.546	100%
3)	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Rp10.734.150	Rp10.734.150	100%	Rp10.734.150	Rp10.734.150	100%
4)	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Rp413.665.100	Rp324.017.600	78%	Rp847.555.000	Rp842.255.000	99%

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 95%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 89 %. Selama 2 (dua) tahun ini alokasi anggaran rencana kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar terpenuhi kurang dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 468.821.906.242,00 harus berkurang sebesar Rp. 4.405.790.652,00 sehingga pagu anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025 adalah Rp. 464.416.115.590,00.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Realisasi APBD di Badan Keuangan Daerah Daerah Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025		
		APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**Rp481.578.105.670**	**Rp431.576.132.325**	90%	**Rp464.194.528.090**	**Rp92.367.724.357**	20%
	KEUANGAN	**Rp481.578.105.670**	**Rp431.576.132.325**	90%	**Rp464.194.528.090**	**Rp92.367.724.357**	20%
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp76.414.117.355**	**Rp63.988.912.371**	84%	**Rp89.494.252.371**	**Rp26.264.554.772**	29%
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Rp349.844.400**	**Rp316.118.050**	90%	**Rp329.587.725**	**Rp128.230.175**	39%
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp173.321.100	Rp140.441.100	81%	Rp188.196.350	Rp66.495.600	35%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp176.523.300	Rp175.676.950	100%	Rp141.391.375	Rp61.734.575	44%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Rp31.307.475.817**	**Rp19.845.868.672**	63%	**Rp43.570.341.508**	**Rp6.206.713.485**	14%
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp31.277.475.817	Rp19.815.868.672	63%	43.546.379.408,00	6.202.498.685	14%
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Rp30.000.000	Rp30.000.000	100%	23.962.100,00	4.214.800	18%
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rp37.893.750**	**Rp19.800.750**	52%	**Rp39.855.000**	**Rp0**	0%
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.893.750,00	19.800.750	52%	Rp39.855.000	Rp0	0%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Rp2.976.767.700**	**Rp2.863.849.941**	96%	**Rp2.149.380.400**	**Rp216.568.600**	10%
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp773.746.000	Rp729.525.500	94%	Rp778.024.800	Rp30.000.000	4%
2)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp424.900.000	Rp418.634.000	99%	Rp249.930.000	Rp115.509.000	46%
3)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp1.224.820.000	Rp1.185.389.741	97%	Rp651.700.000	Rp17.559.600	3%
4)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp137.761.700	Rp137.759.500	100%	Rp90.835.600	Rp38.400.000	42%
5)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp415.540.000	Rp392.541.200	94%	Rp378.890.000	Rp15.100.000	4%
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rp730.000.000**	**Rp628.700.000**	86%	**Rp841.000.000**	**Rp179.670.000**	21%
1)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp730.000.000	Rp628.700.000	86%	Rp841.000.000	Rp179.670.000	21%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp39.587.427.588**	**Rp38.923.997.920**	98%	**Rp41.324.698.738**	**Rp19.159.998.294**	46%
1)	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp259.462.000	Rp259.461.650	100%	Rp195.730.350	Rp112.141.410	57%
2)	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp37.508.277.500	Rp37.034.301.780	99%	Rp39.844.786.300	Rp18.491.178.405	46%

3)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp100.111.953	Rp99.638.540	100%	Rp88.194.753	Rp77.678.669	88%
4)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.719.576.135	Rp1.530.595.950	89%	Rp1.195.987.335	Rp478.999.810	40%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Rp1.424.708.100**	**Rp1.390.577.038**	98%	**Rp1.239.389.000**	**Rp373.374.218**	30%
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.224.000,00	422.403.000	99%	341.330.500,00	168.489.245	49%
2)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	659.484.100,00	633.838.038	96%	560.058.500,00	180.884.973	32%
3)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.000.000,00	196.211.000	99%	198.000.000,00	-	0%
4)	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	98.125.000	98%	100.000.000,00	-	0%
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000	100%	40.000.000,00	24.000.000	60%
II.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Rp397.665.145.188**	**Rp360.473.824.069**	91%	**Rp367.447.695.943**	**Rp64.202.091.074**	17%
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Rp1.370.518.775**	**Rp1.348.475.530**	98%	**Rp1.466.871.886**	**Rp393.850.040**	27%
1)	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp147.442.500	Rp143.723.500	97%	Rp190.616.600	Rp10.877.700	6%
2)	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Rp102.959.000	Rp101.759.100	99%	Rp136.422.600	Rp38.571.800	28%
3)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp18.917.600	Rp18.841.600	100%	Rp22.820.000	Rp0	0%
4)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp19.811.450	Rp18.181.850	92%	Rp23.865.000	Rp0	0%
5)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
6)	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
7)	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp233.597.900	Rp229.557.250	98%	Rp177.383.600	Rp7.258.800	4%
8)	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Rp253.953.600	Rp250.019.200	98%	Rp156.913.450	Rp84.300.100	54%
9)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp78.864.600	Rp78.534.600	100%	Rp180.835.000	Rp85.533.300	47%
10)	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp514.972.125	Rp507.858.430	99%	Rp578.015.636	Rp167.308.340	29%
2	**Koordinasi dan**	**Rp1.301.423.800**	**Rp1.169.380.150**	90%	**Rp1.259.663.800**	**Rp567.453.700**	45%

	Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						
1)	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Rp95.205.800	Rp77.046.250	81%	Rp92.100.500	Rp36.851.500	40%
2)	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Rp6.584.000	Rp5.258.000	80%	Rp13.468.700	Rp12.060.400	90%
3)	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Rp7.118.000	Rp5.985.000	84%	Rp51.004.500	Rp0	0%
4)	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Rp724.112.000	Rp662.996.000	92%	Rp673.058.600	Rp441.656.800	66%
5)	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Rp5.068.000	Rp4.250.000	84%	Rp27.019.500	Rp0	0%
6)	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Rp160.000.000	Rp147.736.000	92%	Rp160.000.000	Rp70.725.000	44%
7)	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Rp19.589.000	Rp18.206.000	93%	Rp11.518.000	Rp6.160.000	53%
8)	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp283.747.000	Rp247.902.900	87%	Rp231.494.000	Rp0	0%
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Rp1.323.899.119**	**Rp1.317.710.397**	100%	**Rp1.104.528.857**	**Rp378.471.334**	34%
1)	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp66.284.400	Rp66.238.400	100%	Rp52.875.400	Rp26.905.400	51%
2)	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Rp8.669.000	Rp8.669.000	100%	Rp8.390.700	Rp1.576.000	19%
3)	Koordinasi dan	Rp679.519.250	Rp676.511.597	100%	Rp598.084.807	Rp228.609.934	38%

	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
4)	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp6.433.500	Rp6.443.500	100%	Rp5.183.500	Rp0	0%
5)	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp5.125.069	Rp5.125.000	100%	Rp5.054.150	Rp0	0%
6)	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Rp3.850.000	Rp3.850.000	100%	Rp4.350.000	Rp0	0%
7)	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp554.017.900	Rp550.872.900	99%	Rp430.590.300	Rp121.380.000	28%
4	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Rp393.669.303.494**	**Rp356.638.257.992**	91%	**Rp363.616.631.400**	**Rp62.862.316.000**	17%
1)	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Rp357.395.000.700	Rp331.665.265.000	93%	Rp329.070.921.400	Rp62.100.166.000	19%
2)	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp13.488.475.894	Rp2.187.166.092	16%	Rp12.752.533.000	Rp762.150.000	6%
3)	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp22.785.826.900	Rp22.785.826.900	100%	Rp21.793.177.000	Rp0	0%
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Rp1.855.366.120**	**Rp1.750.059.086**	94%	**Rp1.442.022.396**	**Rp467.631.515**	32%
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Rp1.855.366.120**	**Rp1.750.059.086**	94%	**Rp1.442.022.396**	**Rp467.631.515**	32%
1)	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
2)	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Rp153.944.530	Rp151.214.400	98%	Rp350.794.580	Rp75.882.750	22%
3)	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp306.189.050	Rp290.736.650	95%	Rp258.892.654	Rp89.844.000	35%
4)	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Rp490.959.456	Rp454.523.139	93%	Rp252.637.506	Rp110.458.615	44%
5)	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Rp398.840.950	Rp385.048.247	97%	Rp362.937.300	Rp136.581.150	38%
6)	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp129.881.530	Rp100.066.150	77%	Rp94.016.315	Rp54.865.000	58%
7)	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp375.550.604	Rp368.470.500	98%	Rp122.744.041	Rp0	0%
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Rp5.643.477.007**	**Rp5.363.336.799**	95%	**Rp5.810.557.380**	**Rp1.433.446.996**	25%

1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rp3.517.307.830**	**Rp3.443.330.430**	98%	**Rp3.706.876.130**	**Rp716.753.600**	19%
1)	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Rp244.949.830	Rp238.872.650	98%	Rp544.457.500	Rp45.125.000	8%
2)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp0	Rp0	0%	Rp0	Rp0	0%
3)	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Rp0	Rp0	0%	Rp544.457.500	Rp45.125.000	8%
4)	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp1.777.183.300	Rp1.751.240.380	99%	Rp1.585.746.250	Rp448.603.600	28%
5)	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp1.495.174.700	Rp1.453.217.400	97%	Rp1.032.214.880	Rp177.900.000	17%
2	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Rp2.126.169.177**	**Rp1.920.006.369**	90%	**Rp2.103.681.250**	**Rp716.693.396**	34%
1)	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Rp83.667.875	Rp82.926.875	99%	Rp83.667.881	Rp79.226.881	95%
2)	Penagihan Pajak daerah	Rp1.707.749.552	Rp1.553.062.644	91%	Rp1.367.125.719	Rp444.585.605	33%
3)	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Rp10.734.150	Rp7.635.450	71%	Rp4.335.650	Rp2.254.950	52%
4)	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Rp324.017.600	Rp276.381.400	85%	Rp648.552.000	Rp190.625.960	29%

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Triwulan II)

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI TARGET KINERJA s/d TAHUN 2023 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 (n-2)			TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 (n-1)		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (n-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)	TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (n-1)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2025 BERJALAN (n-1)	TINGKAT REALISASI Resntra TAHUN 2025 SMT I (%)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5,02	**KEUANGAN**									
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Nilai SAKIP OPD	**Nilai**	72,15	73	74,9	103	75	NA	-
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tercapainya Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	%	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	100	8	8
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100	11	8	72,73
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	9	75

5.02.01.2.0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	%		100	100	100	100	80	80
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	1 Orang/Bulan	68 Orang	68 Orang	100	68	68	100
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1	1	100
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	%	100	100	100	100	100	100	100
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	75 Orang	68 Orang	68 Orang	100	136	30	22,06
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah**	%	100	100	100	100	100	25	25
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	1 Paket	10 Paket	10 Paket	100	10	5	50
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	24 Paket	24 Paket	100	24	12	50
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100	120	60	50
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	21796 Dokumen	21796 Dokumen	100	21796	0	0
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	12	6	50

5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	%	100	100	100	100	100	0	0
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan	5 Unit Kendaraan	100	100	100	8	8	100
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	%	100	100	100	100	100	25	25
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2	2	100
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	6	50
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	12	1	8,33
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	9	75
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan daerah**	%	1 Tahun	100	100	100	100	80	80
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Dinas	13 Unit	78 Unit	78 Unit	100	78	30	38,46
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100 unit	383 unit	383 unit	100	383	293	76,50

5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1	1	100
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1	1	100
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10	5	50
			Opini	WTP	WTP	WTP	100	**WTP**	-	-
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	%	100%	100%	100%	100	100	0	0
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Jumlah dokumen rencana anggaran yang disusun tepat waktu	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	100	0	0
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5	5	100
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	4	100
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	100	42	42	100
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	57 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	100	42	42	100

5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	-	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100	-	-	-
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikas	-	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100	-	-	-
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3	1	33,33
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	125 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3	0	0
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	OPD	11 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2	2	100
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	OPD	57 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	2	50
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	%	100%	100%	100%	100	100		0
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1 Dokumen	64 Dokumen	64 Dokumen	100	84	84	100
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	9	75

5.02.02.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	6	50
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	9	75
5.02.02.2.02.0008	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4	2	50
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	9	75

5.02.02.2.02.0 010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	100
5.02.02.2.02.0 011	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	70 Orang	100 Orang	100 Orang	100	100	0	0
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	0	0
5.02.02.2.03.0 002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	1 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	100	22	18	81,82
5.02.02.2.03.0 003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	18	14	77,78
5.02.02.2.03.0 005	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6	6	100

5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	1	100
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	0	0
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1	0	0
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	210 Orang	90 Orang	90 Orang	100	90	90	100
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Akuntabel	Tahun	100%	100%	100%	100	1	0	0
5.02.02.2.04.0004	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	9	75
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	4	2	50
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	2	0	0
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	%	100%	100%	100%	100	100	25	25
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	%	100%	100%	100%	100	100	25	25

5.02.03.2.01.0 004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen			100	1	1	100
5.02.03.2.01.0 005	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	42	0	0
5.02.03.2.01.0 007	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Orang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12	7	58,33
5.02.03.2.01.0 009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	8	5	62,5
5.02.03.2.01.0 010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12	9	75,00
5.02.03.2.01.0 011	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	168 Laporan	336 Laporan	336 Laporan	100	336	252	75,00
5.02.03.2.01.0 013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	100	42	0	0
		Rasio pajak daerah terhadap PAD	**%**				100	**51**		0
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib	%	50%	48%	48%	100	100	80	80
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Tertib	%	2,38%	2,08%	2%	100	100	80	80

5.02.04.2.01.0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3	3	100
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	7500 lembar	7500 lembar	7500 lembar	100	-	-	-
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	410000 Obyek Pajak	450000 Obyek Pajak	450000 Obyek Pajak	100	500000	80000	16
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	504000 Dokumen	504000 Dokumen	100	504000	0	0
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	1 Dokumen	108 Dokumen	108 Dokumen	100	3	3	100
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	504000 Dokumen	504000 Dokumen	100	12	9	75
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100	4	3	75
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	504000 Dokumen	504000 Dokumen	100	4	3	75

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025 diolah

Tabel 2.4
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.820.514.590	66.030.525.146	87,09	76.364.117.355	63.988.912.371	83,79
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	377.420.443.980	376.835.513.681	99,85	397.665.145.188	360.473.824.069	90,65
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.660.280.000	1.443.101.925	86,92	1.855.366.120	1.750.059.086	94,32
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.061.588.000	5.626.944.538	92,83	5.535.949.007	5.363.336.799	96,88
	Presentase Realiasasi	460.962.826.570	449.936.085.290	97,61	481.420.577.670	431.576.132.325	89,65

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025 diolah

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 dan Tahun 2025

Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
				Tahun 2024 (thn-2)	Tahun 2025 (thn-1)	Tahun 2024 (thn-2)	Tahun 2025 (thn-1)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	79,68	80,9	79,68	NA
	Rasio PAD terhadap Pendapatan	(PAD / Pendapatan) x 100%	%	17,41	23,45	17,41	NA
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	NA
	Nilai IKM	(Jumlah Nilai Persepi Unsur/Jumlah Unsur) x Nilai Konversi	Nilai	92,65	92,65	92,75	NA

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel 2.5 kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024 masuk kriteria **Sangat tinggi (100%)** dari 3 indikator sasaran semua tercapai 100%.

Sedangkan untuk capaian program di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.7
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	100	100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	%	100	100	100
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	%	48	48	100

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, diolah

Keterangan :

*) Realisasi dari 3 indikator capaian 100 %.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan persentase mencapai **100 %** dari target yang ditetapkan masuk kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan target tahun terkahir (tahun 2026) Renstra BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR atau RPD tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra sehingga hasil Evaluasi tahun 2024 juga merupakan pijakan awal tercapai tidaknya hasil akhir Renstra. Gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.8
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Status
			2024	2026	
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan	Rasio PAD terhadap Pendapatan	17,41	24,04	Tercapai
2.	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dengan indikator Rasio PAD terhadap Pendapatan	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	Tercapai
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai IKM	Nilai IKM	92,65	93	Tercapai

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, 2025

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		2024	2024	2025	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,68	79,68	80,9	NA
2.	Rasio PAD terhadap Pendapatan	17,41	18,01	23,45	NA
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	NA
4.	Nilai IKM	92,65	92,65	92,75	NA

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, diolah

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Karanganyar, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal;
2. Ketidaksesuaian rekening objek belanja pada DPA dengan kebutuhan riil OPD;
3. Adanya regulasi kebijakan pusat terkait dengan pendapatan transfer dan belanja yang terlambat dimana KUA PPAS / RAPBD / APBD telah terlaksana;
4. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan kas daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar;
5. Pengajuan SPM dari seluruh OPD masih ada yang belum sesuai dengan anggaran kas yang mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat;
6. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi;
7. Asset daerah belum terinventarisir dan terdokumentasi dengan baik dan benar;
8. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat (termasuk pelaku usaha) sebagai WP;
9. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM;
10. Belum optimalnya pemasukan dari penerimaan pendapatan asli daerah;
11. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal;
12. Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dikarenakan belum tertulis/tersurat didalam uraian tugas dan fungsi.

Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. SDM yang kompeten;
2. Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
3. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan asset/ barang milik daerah;
4. Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sekertariat	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk	Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki yang	Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal,

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		menunjang pengelolaan keuangan daerah	berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal	sehingga kinerja mengalami hambatan
2.	Bidang Anggaran	Masih terjadinya pergeseran kode rekening rincian belanja pasca APBD	1. Ketidaksesuaian rekening objek belanja pada DPA dengan kebutuhan riil OPD; 2. Adanya regulasi kebijakan pusat terkait dengan pendapatan transfer dan belanja yang terlambat dimana KUA PPAS / RAPBD / APBD telah terlaksana.	1. Masih kurangnya kualitas perencana OPD dalam penyusunan RKA terkait dengan belanja; 2. Adanya regulasi yang terbit setelah KUA PPAS/RAPBD/ APBD ditetapkan
3.	Bidang Perbendahaaraan dan Kas Daerah	1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur 2. Penyusunan anggaran kas OPD belum optimal 3. Aplikasi SIPD masih kurang sempurna dan OPD yang belum memahami Aplikasi SIPD	1. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan kas daerah dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar 2. Pengajuan SPM dari seluruh OPD masih ada yang belum sesuai dengan anggaran kas yang mengakibatkan volume pengajuan SPM pada akhir tahun meningkat	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kas daerah 2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf. 3. Pengelolaan keuangan di OPD tidak memiliki basis keuangan
4.	Bidang Akuntansi	Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola Akuntansi keuangan	Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi	Pengawasan terhadap pelaporan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya menuntut SDM

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				yang kompeten dibidangnya.
5.	Bidang Aset	Belum optimalnya kualitas pengeolaan aset daerah	Asset daerah belum terinventarisir dan terdokumentasi dengan baik dan benar	1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan asset daerah 2. Kurangnya kualitas SDM dalam menunjang bidang aset 3. Kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam penyusunan pelaporan asset yang dimiliki
6.	Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan	Belum optimalnya Penerimaan pajak daerah	1. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat (termasuk pelaku usaha) sebagai WP 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM	1. Belum optimalnya kualitas sistem informasi pendapatan daerah 2. Kurangnya dukungan sarpras 3. Kurangnya SDM yang berkualifikasi 4. Masih kurangnya sanksi pada WP yang tidak patuh
7.	Bidang Penagihan Keberatan dan Pemeriksaan Pajak	Belum optimalnya kesadaran WP dalam membayar pajak tepat waktu	1. Belum optimalnya pemasukan dari penerimaan pendapatan asli daerah 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal 3. Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dikarenakan belum tertulis/tersurat didalam uraian tugas dan fungsi	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah; 2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk

No	Bidang	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
				melaksanakan kegiatan operasional yang telah direncanakan sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah 3. Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dikarenakan belum tertulis/tersurat didalam uraian tugas dan fungsi

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, diolah

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD adalah acuan penyusunan Rencana Kerja Perangankat daerah . Terkait dengan visi dan misi RPJMD 2025-2029 serta urusan pemerintah yang diselenggarakan BKD. Dari seluruh misi yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih, maka fungsi dan tugas BKD terkait erat dengan penacapain misi ke 5 yakni : “Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik”.

Rancangan awal RKPD sudah mengalami perubahan seiring dengan berubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan paandemi Nasional Covid 19 yang merubah kemampuan pendanaan.

Selain itu di tahun 2023 dengan adanya Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan Jabatan administrasi ke dalam jabatan Fungsional yang ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan , susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja di Badan Keuangan Daerah ikut andil dalam perubahan.

Dengan adanya penyetaraan jabatan maka menimbulkan sub kegiatan baru di dalam Perencanaan. Hal ini terjadi karena sebelumnya belum ada jabatan fungsional asesor di BKD sebelumnya dan dengan adanya pemisahan antara fungsi perencanaan dan keuangan juga menimbulkan sub kegiatan yang baru.

Untuk besaran anggaran di masing masing sub kegiatan juga terjadi perbedaan dengan rancangan awal, hal ini di sebabkan adanya perbedaan di standart harga yang tiap tahun berubah , turunnya kemampuan pendanaan akibat adanya bencana covid 19 sementara semua sub kegiatan harus bisa terdanai dan juga berubahnya kebijakan tentang kepegawaian.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.10 pada halaman berikutnya.

Tabel 2.11.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD OPD TAHUN 2026
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
No	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**SATUAN**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator**	**SATUAN**	**TARGET CAPAIAN KINERJA**	**Pagu Indikatif (Rp)**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					**486.521.906.242**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**435.793.593.863**
	KEUANGAN					**486.521.906.242**	**KEUANGAN**					**435.793.593.863**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Nilai SAKIP OPD**	Nilai	76	**90.286.688.621**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Nilai SAKIP OPD**	Nilai	76	**59.120.243.392**
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Tercapaianya perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	362.765.975	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Tercapaianya perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	142.838.017
1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	204.744.125	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	60.937.867

1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	158.021.850	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	81.900.150
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	43.576.379.408	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	52.826.636.650
2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	68	43.546.379.408	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai	68	52.796.526.550
2,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	30.110.100
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	80.000.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	36.031.250
3,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karanganyar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	136	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Karanganyar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pegawai	136	36.031.250
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Tertib Administrasi Umum Pernagkat	%	100	2.795.926.500	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Tertib Administrasi Umum Pernagkat	%	100	1.138.290.600

			Daerah						Daerah			
4,1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	778.024.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	0
4,2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	302.250.000
4,3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	1.243.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	475.405.000
4,4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	21796	95.761.700	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	21796	14.035.600
4,5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	378.890.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	346.600.000
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	841.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	**0**
5,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8	841.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit Kendaraan	0	0
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Karanganyar	Cakupan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	41.391.227.738	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Karanganyar	Cakupan tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	3.895.623.375
6,1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2	235.271.300	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2	175.122.050

			Surat Menyurat						Surat Menyurat			
6,2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	39.844.786.300	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.640.200.000
6,3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100.111.953	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000
6,4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.211.058.185	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	980.301.325
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.239.389.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	1.080.823.500
7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	78	341.330.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	78	296.765.000
7,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	383	560.058.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	383	560.058.500
7,3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	198.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	100.000.000

			Dipelihara/Direhabilitasi						Dipelihara/Direhabilitasi			
7,4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	1	100.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Tempat Parkir, Taman	1	100.000.000
7,5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	10	40.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit	10	24.000.000
II	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	%	**100**	**388.101.546.094**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku**	%	**100**	**371.775.514.369**
1	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen rencana anggaran yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	1.873.944.775	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kab. Karanganyar	Jumlah dokumen rencana anggaran yang disusun tepat waktu	Dokumen	4	974.366.865
1,1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	5	232.954.850	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	5	119.047.700
1,2	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	138.975.950	Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	4	93.670.300

1,3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42	24.300.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42	12.824.550
1,4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42	25.345.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Karanganyar	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	42	11.914.050
1,5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Karanganyar	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3	196.880.350	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Karanganyar	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	3	166.753.050
1,6	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Kab. Karanganyar	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	243.635.200	Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Kab. Karanganyar	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	3	156.837.615
1,7	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	182.915.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	140.974.050
1,8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	4	828.938.425	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	4	272.345.550
2	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kab. Karanganyar	Persentase ketepatan kelengkapan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	1.259.663.800	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Kab. Karanganyar	presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	855.575.100
2,1	Penyiapan	Kab.	Jumlah Dokumen	Dokumen	84	92.100.500	Penyiapan	Kab.	Jumlah Dokumen	Dokumen	84	2.400.000

	pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Karanganyar	Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Karanganyar	Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			
2,2	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	13.468.700	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	0
2,3	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	51.004.500	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	12	0
2,4	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Laporan	12	673.058.600	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan	Laporan	12	749.885.100

			Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
2,5	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	4	27.019.500	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	4	3.290.000
2,6	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	160.000.000	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12	100.000.000
2,7	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	Kab. Karanganyar	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Dokumen	1	11.518.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta	Kab. Karanganyar	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Dokumen	1	0

	penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan		Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			
2,8	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	231.494.000	Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	0
3	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Kab. Karanganyar	Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Jumlah laporan yang sesuai SAP / Total laporan keuangan) × 100%	%	100	1.403.839.119	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Kab. Karanganyar	Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Jumlah laporan yang sesuai SAP / Total laporan keuangan) × 100%	%	100	842.303.471
3,1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	36	75.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	36	54.476.000
3,2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	10.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	18	6.135.850
3,3	Koordinasi dan penyusunan rancangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	6	603.839.119	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan	Kab. Karanganyar	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	6	468.725.321

	peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
3,4	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	10.000.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	5.053.500
3,5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	15.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	4.174.200
3,6	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Kab. Karanganyar	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	15.000.000	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda	Kab. Karanganyar	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	2.400.000
3,7	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	100	675.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	90	301.338.600
4	**Penunjang**	Kab.	Persentase	%	100	383.564.098.400	**Penunjang Urusan**	Kab.	Persentase	%	100	369.103.268.933

	Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Karanganyar	realisasi bantuan keuangan (realisasi bankeu / target X 100%)				**Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Karanganyar	realisasi bantuan keuangan (realisasi bankeu / target X 100%)			
4,1	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	Laporan	12	346.770.921.400	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuang	Laporan	12	341.749.038.333
4,2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4	15.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4	5.000.000.000
4,3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	2	21.793.177.000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	2	22.354.230.600
III	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel**	%	100	**1.846.126.120**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Akuntabel**	%	100	**1.107.675.672**
1	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kab. Karanganyar	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	%	100	1.846.126.120	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kab. Karanganyar	**Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu**	%	100	1.107.675.672
1,1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	150.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	0
1,2	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	Laporan	2	146.388.000	Pentausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertiba dan Akuntabel	Laporan	2	280.002.800
1,3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	292.409.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	232.314.950

1,4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	347.572.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	12	236.068.500
1,5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	694.346.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	12	261.721.400
1,6	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	336	116.881.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	336	97.568.022
1,7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	130	98.530.120	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	130	0
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Optimalisasi Pendapatan Daerah**	**%**	**100**	**6.287.545.407**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Kab. Karanganyar	**Optimalisasi Pendapatan Daerah**	**%**	**100**	**3.790.160.430**
1	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pertumbuhan WP baru**	**%**	**5**	3.783.237.830	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase pertumbuhan WP baru**	**%**	**5**	2.132.442.650
1,1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	223.407.550	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	3	97.790.050
1,2	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil Pendataan	Laporan	3	580.555.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek	Kab. Karanganyar	Jumlah Laporan hasil Pendataan	Laporan	3	500.000.000

	Pajak		dan Pendaftaran Objek Pajak				Pajak		dan Pendaftaran Objek Pajak			
1,3	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Karanganyar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	61459	1.585.746.250	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Karanganyar	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	61459	938.962.600
1,4	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	495289	1.393.529.030	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	495289	595.690.000
2	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase tindakan penagihan lanjutan ((Jumlah tindakan penagihan lanjutan / Total tindakan yang ditargetkan) × 100%)**	**%**	**100**	**2.504.307.577**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Kab. Karanganyar	**Persentase tindakan penagihan lanjutan ((Jumlah tindakan penagihan lanjutan / Total tindakan yang ditargetkan) × 100%)**	**%**	**100**	**1.657.717.780**
2,1	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	3	91.707.212	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	3	0
2,2	Penagihan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.696.385.600	Penagihan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.024.484.665
2,3	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	11.807.565	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	4	1.938.900
2,4	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	Dokumen	4	704.407.200	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah	Kab. Karanganyar	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan	Dokumen	4	631.294.215

			Pajak Daerah						Pajak Daerah			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, diolah

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi yang menangani urusan kepegawaian sebelum menyusun anggaran untuk tahun yang akan datang, akan menampung usulan dari Perangkat Daerah dan masyarakat yang akan kita sesuaikan dan tindaklanjuti dalam sub kegiatan yang ada dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.

Sedangkan untuk perbaikan pelayanan secara menyeluruh kita akan menggunakan hasil Survei Kepuasan dengan responden ASN yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dari hasil survei bisa di analisa pelayanan apa yang kurang dari Badan Keuangan Daerah. Dan akan kita tindak lanjuti pada Rencana Kerja yang akan datang.

Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.12.
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025, diolah

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sinkron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan Ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang

berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan

sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:
1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, adalah **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah.**

Penjelasan rumusan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 tersebut diatas adalah dengan adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang melayani, melalui :
1) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah difokuskan pada penguatan transparasni, akuntabilitas pengelolaan keuangan, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, penguatan pencapaian indek pengelolaan asset daerah;
2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah difokuskan pada penguatan pendapatan asli daerah, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi.

Dalam mencapai tujuan strategis OPD, maka ditetapkan sasaran – sasaran yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan juga gambaran umum OPD (potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan isu strategis yang harus diatasi). Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah;
2) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah;
3) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Penjelasan rumusan sasaran :

Strategi dalam mencapai sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, strategi dalam pencapaian sasaran diatas melalui:

1. Peningkatan kualitas penyusunan KUA PPAS. Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen KUA PPAD. Dokumen KUA PPAS di selesaikan tepat waktu. Meningkatnya kesesuaian KUA PPAS dengan RAPBD dengan APBD
2. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan RAPBD dan APBD
3. Peningkatan ketepatan dan kepatuhan pelaporan keuangan
4. Peningkatan kualitas perbendaharaan dan akuntansi keuangan perangkat daerah dan pemerintah daerah
5. Peningkatan kualitas pengelolaan asset daerah
6. Peningkatan kontribusi retribusi pengelolaan asset pada pendapatan asli daerah

Sasaran 2 meningkatnya kapasitas fiskal daerah, strategi dalam pencapaian sasaran diatas melalui

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   a. Pendataan ulang wajib pajak melalui digitalisasi data (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB, dll).
   b. Perluasan objek pajak baru.
   c. Intensifikasi Pemungutan PAD melalui Penguatan kapasitas SDM BKD dengan pelatihan dan sertifikasi, insentif bagi petugas pemungut berprestasi, pemanfaatan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi berbasis elektronik, peningkatan penagihan piutang pajak.
   d. Optimalisasi Pengelolaan BUMD dan Aset Daerah. Revitalisasi BUMD agar fokus pada sektor produktif (air bersih, pangan, pariwisata).
   e. Inventarisasi aset tidak produktif untuk disewakan atau dimanfaatkan dengan skema kerjasama pemanfaatan.
2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah
   a. Penataan Program Prioritas Belanja diarahkan untuk mendukung program yang memberi multiplier effect tinggi (infrastruktur ekonomi, pendidikan vokasi, pariwisata).
   b. Penguatan perencanaan berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*).
   c. Reformasi Belanja Pegawai dan Barang Jasa. Rasionalisasi belanja rutin yang tidak strategis. Digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa untuk efisiensi waktu dan biaya.

Tabel 3.1. Indikator Tujuan – Sasaran – Program Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian	
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	79,68	79,68	80,9	82,12
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Indeks	92,65	92,65	92,75	93
		1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,25	74,9	75	75,5
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase ketepatan APBD	%	100	100	100	100
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran	%	100	100	100	100
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100
		Program Pengelolaan Aset Daerah	Manajemen Aset	%	100	100	100	100
	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah		Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	20	18	23,45	24,04
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap PAD	%	50	48	50	51
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase piutang pajak yang tertagih	%	90	91	91,1	91,2

Sumber : Renstra Badan Keuangan Daerah 2025-2029

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan Keuangan seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga keuangan seperti Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah
2) Masih terjadinya pergeseran kode rekening rincian belanja pasca APBD
3) Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur
4) Penyusunan anggaran kas OPD belum optimal
5) Aplikasi SIPD masih kurang sempurna dan OPD yang belum memahami Aplikasi SIPD
6) Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola Akuntansi keuangan
7) Belum optimalnya kualitas pengeolaan aset daerah
8) Belum optimalnya Penerimaan pajak daerah
9) Belum optimalnya kesadaran WP dalam membayar pajak tepat waktu

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar juga memiliki peluang antara lain adalah :

1) SDM yang kompeten;
2) Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
3) Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan asset/ barang milik daerah;
4) Sarana dan Prasarana yang Memadai.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

No	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran
1	**Sasaran 1:** Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM

Sumber **:** *BKD Tahun 2025*

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan

			Logistik Kantor
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
			Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah

			tentang penjabaran perubahan APBD
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
			Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan transfer lainnya
			Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non-tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank
			Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kasda laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)
			Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
			Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub kegiatan
			Pembinaan penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan

			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
			Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
			Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemda
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pentausahaan Barang Milik Daerah
			Inventarisasi Barang Milik Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang Milik Daerah pada SKPD
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah

3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
			Penetapan Wajib Pajak Daerah
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah
			Penagihan Pajak daerah
			Penyelesaian Keberatan Pajak daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak daerah

Sumber **:** *BKD Tahun 2025*

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dimana Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada rencana Strategis yang sudah ditetapkan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah urusan penunjang Badan Keuangan Daerah mensuport program pemerintah Daerah melalui bidang kepegawaian khususnya di peningkatan Indek Profesionalitas Pegawai (IPP). Peningkatan Indeks Profesionalitas Pegawai dijadikan isu strategis bagi Badan Keuangan Daerah.

Langkah-langkah yang ditetapkan Badan Keuangan Daerah dalam menghadapi isu strategis meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Prioritas Pengelolaan keuangan daerah dan pendapatan difokuskan pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kualitas dokumen penyusunan rencana prioritas dan kebijakan keuangan serta rencana APBD;
2. Penguatan kualitas bendahara perangkat daerah dalam pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan dan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku;
3. Peningkatan kapasitas petugas pengelola pendapatan daerah, penguatan pembayaran pajak, dengan digitalisasi dalam rangka mengurangi kebocoran, peningkatan pemantauan dan evaluasi retribusi dalam eelektronifikasi surat setoran retribusi daerah melalui id biling pada 11 (sebelas) OPD.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Badan Keuangan Daerah tahun 2026 untuk pendanaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEUANGAN DAERAH KAB. KARANGANYAR TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
					TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		BADAN KEUANGAN DAERAH				449,118,748,763		469,921,906.242
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				449,908,477,964		469,921,906.242
	-	-				449,908,477,964		469,921,906.242
1,	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase ketepatan APBD, presentase pelaporan keuangan pemerintah daerah dan presentase ketepatan kelengkapan proses pencaian sesuai ketentuan yang berlaku	100	100	385,740,,398,470	100	371.501.546.094,00
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	4	4	974,366,865	4	1.873.944.775,00
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	5	5	119,047,700	5	232.954.850

	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4	4	93,670,300	4	138.975.950
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42	42	12,824,550	42	24.300.000
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	2	2	11,914,050	42	25.345.000
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3	3	166,753,050	3	196.880.350
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3	3	156,837,615	3	243.635.200
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	2	2	140,974,050	2	182.915.000

			Anggaran Pendapatan					
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	4	4	272,345,550	4	828.938.425
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	100	100	755,730,000	100	231.494.000,00
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	84	84	2,400,000	84	92.100.500
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18	18	0	18	10.000.000,00
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	1	1	0	1	51.004.500

			Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	12	750,040,000	12	673.058.600
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4	4	3,290,000	4	27.019.500
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12	0	12	160.000.000
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban						

		Sub Kegiatan						
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	1	0	1	11.518.000
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		100 Orang	0		
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	100	100	842,303,471	100	231.494.000
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	36	36	54,476,000	36	75.000.000
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18	18	6,135,850	18	10.000.000
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	6	6	483,397,321	6	603.839.119

			Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1	1	5,053,500	1	10.000.000
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	4,174,200	1	15.000.000
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	2,400,000	1	15.000.000
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	150	150	286,666,600	150	675.000.000
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100	100	382,378,268,933	100	366.964.098.400
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						

			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12	12	355,024,038,333	12	330.170.921.400
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4	4	5,000,000,000	4	15.000.000.000
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2	2	22,354,230,600	2	21.793.177.000
2,	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	100	100	1,107,675,672	100	1.846.126.120
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase OPD yang rekonsiliasi tepat waktu	100	100	1,107,675,672	100	1.846.126.120
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	42	42	280.002.800	42	150.000.000
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	12	232,314,950	12	292.409.000
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						

			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12	12	236,068,500	12	347.572.000
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12	12	261,721,400	12	594.346.000
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	336	336	97,568,022	336	116.881.000
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130	130	0	130	98.530.120
3,	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Pajak Daerah terhadap PAD	53%	51%	3,790,160,430	52%	6.287.545.407
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak	2,1	2,1	2,132.442,650	2,1	3.783.237.830

	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	3	3	97,790,050	3	223.407.550
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						
			Jumlah Laporan hasil Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	3	3	500,000,000	3	580.555.000
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	54.092	61.459	938,962,600	63.574	1.585.746.250
							10	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	511.328	495.289	595,690,000	499.251	1.393.529.030
							5	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3	3	-	3	91.707.212
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	1,024,484,665	12	1.696.385.600
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						

			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4	4	1,938,900	4	11.807.565
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4	4	631,294,215	4	704.407.200
4,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	84	93%	59,270,243,392	93,1	90.286.688.621
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12	100%	270,838,017	100%	362.765.975
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	11 Dokumen	124,937,867	11	204.744.125
	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12 Laporan	145,900,150	12	158.021.850
	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1	100%	54,826,636,650	100%	43.576.379.408

	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1 Laporan	30,110,100	1	30.000.000
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 18	68 Orang/ bulan	54,796,526,550	68	43.546.379.408
	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	6	100%	36,031,250	100	80.000.000
	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	68 Orang	36,031,250	136	80.000.000
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1	100%	1,218,290,600	100	2.795.926.500
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	10 Paket	0	10	778.024.800
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	1 Paket	302,250,000	24	300.000.000
	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem	100	10 Dokumen	362,600,000	12	378.890.000

			Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	42	21796 Dokumen	78,035,600	21796	95.761.700
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	120 Laporan	475,405,000	120	1.243.250.000
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	12	100%	0	100	841.000.000
	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	336	2 Unit	0	8	841.000.000
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	130	100%	1,821,623,375	100	41.391.227.738
	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,1	2 Laporan	175,122,050	2	235.271.300
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	12 Laporan	790,200,000	12	39.844.786.300
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	507270	12 Laporan	756,301,325	12	1.211.058.185
	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1 Laporan	100,000,000	12	100.111.953
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3	100%	1,096,823,500	100	1.239.389.000
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	78 Unit	312,765,000	78	341.330.500
	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77,5	383 Unit	560,058,500	383	560.058.500
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	68	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000

			Dipelihara/Direhabilitasi					
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100	10 Unit	24,000,000	10	40.000.000
JUMLAH						**449,908,477.964**		**469,921,906.242**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2025

4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2030. Adapun IKU yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Database 2025	Target 2026
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
2	Rasio PAD terhadap pendapatan	%	23,45	24,04
3	Nilai IKM	Nilai	92,65	93

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2025, diolah

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja kunci Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk melihat kinerja keberhasilan pada urusan keuangan. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Database 2025	Target 2026
1	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	%	0,72	0,75
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	91,21	91,21
3	Revenue mobilization: Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	108,35	108,35
4	Assets Management	%	100	100
5	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,564	7,564
6	Rasio PAD	%	14,10	14,89

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2025, diolah

Tabel 4.4
Program/ Kegiatan / Subkegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Kabupaten	Program/Kegaiatan Kegiatan/ Sub Kegiatan BKD	Pagu Anggaran
1.	Bantuan keuangan desa 100 juta setiap desa per tahun sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp 17.700.000.000

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar.Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, maka penetapan proritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar baik Badan Keuangan Daerah maupun dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Tahun 2026 ini kami susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan umum penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2026 mendatang. Dengan selesainya dokumen ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas rutin semata namun lebih daripada itu dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan penganggaran pada Tahun 2026 serta menjadi pedoman BKD Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan program kegiatan beserta besaran anggarannya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terencana.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan urgensi kebutuhan untuk dilaksanakan. Hal ini untuk dimaklumi bersama, bahwa kunci utama keberhasilan Kinerja Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Aparaturnya. Selengkap dan sehebat apapun perangkat lainnya bila tidak diimbangi dengan kualitas aparatur yang melaksanakan, tidak akan bisa memberikan hasil yang optimal. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya pembangunan lainnya, apabila dilaksanakan oleh aparatur yang berkualitas akan memberikan manfaat yang optimal.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun sebagai perwujudan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua komponen unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar untuk senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Karanganyar, September 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BKPSDM

NUR AINI FARIDA, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19770915 199602 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU I-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran III-4
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah III-8
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD..... III-9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...IV-1
4.1 Perumusan Program dan Kegiatan BKPSDM IV-2
4.2 Dana Indikatif BKPSDM IV-4
4.3 Target keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Tahun 2026 ..... IV-16
4.4 Program dan Kegiatan BKPSDM dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ..... IV-17

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Pedoman Transisi V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja & APBD Perubahan 2024 dengan Renja dan APBD 2025 di BKPSDM II-2
Tabel 2.2 Realisasi APBD di BKPSDM Tahun 2024 dan 2025 (SMT I) II-6
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024 ..... II-9
Tabel 2.4 Skala Nilai Peringkat Kinerja II-10
Tabel 2.5 Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran 2024..... II-10
Tabel 2.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra BKPSDM II-11
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar II-18
Tabel 2.8 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra BKN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... II- 19
Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD OPD tahun 2026 BKPSDM Kabupaten Karanganyar II-22
Tabel 2.10 Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 ..... II-30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2026 BKPSDM III-7
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD III-9
Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan III-10
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM IV-4
Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Tahun 2026 .... IV-16
Tabel 4.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Tahun 2026 ..... IV-16
Tabel 4.4 Program / Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ..... IV-17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah RKPD ditetapkan. Oleh karena itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan Penunjang Kepegawaian Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini bertujuan untuk menjabarkan arah pembangunan di bidang kepegawaian untuk dilaksanakan pada tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Oleh sebab itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Renstra 2025-2029, BKPSDM juga harus memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas". Dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif yang mampu bekerja sama secara efektif antar OPD, dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama.

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud komitmen BKPSDM dalam menjabarkan dan mengimplementasikan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih periode 2025-2029 melalui Visi, Misi, dan Program-program unggulan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Sesuai dengan Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yaitu **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.**

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, BKPSDM Kabupaten Karanganyar berada dalam **misi ke empat** yaitu "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik". Peran BKPSDM sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat vital. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten, berkinerja tinggi, serta memiliki disiplin dan etos kerja yang kuat.

Untuk mewujudkan hal tersebut sangat diperlukan adanya Sumber Daya Aparatur yang mumpuni dan didukung oleh pengelola manajemen kepegawaian yang profesional. Oleh sebab itu, salah satu unsur manajemen pemerintah yang tidak bisa dihindari dalam hal pengelolaannya adalah manajemen kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.

Diharapkan apa yang telah tertuang dalan Renja tahun 2026 ini bisa ditindaklajuti dalam penyusunan RAPBD Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

a. Tersusunnya arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran secara terarah, terpadu dan terkendali sebagai perwujudan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
b. Tersusunnya alat analisa terhadap target kinerja yang telah ditetapkan secara logis berdasarkan kemampuan sumber daya yang dimiliki.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ini juga bertujuan sebagai upaya dalam mencapai tingkat capaian kinerja yang maksimal dari penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Memuat Latar Belakang dari disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum, Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penyajian laporan penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2025) pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dalam satu tahun kedepan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Karanganyar.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi bertujuan untuk membuat perbaikan agar kegiatan yang terselenggara sesuai dengan rencana yang dirancang dan hasil evaluasi dimaksudkan untuk melakukan perencanaan lanjutan guna memperbaiki kekurangan dan kendala baik dalam proses administrasi maupun manajemen.

Demikian juga Rencana Kerja Perangkat Daerah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu dievaluasi agar perencanaan di tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang lalu dan berkesinambungan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dokumen Rencana Strategis dan dokumen Rencana Kerja disusun dengan mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah yang mengurusi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terus berupaya memberi kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian.

Untuk menunjang kegiatan dan pencapaian tujuan, alokasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 9.545.343.980,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah) dangan Realisasi capaian sebesar Rp. 8.764.313.179,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 91,82 %. Untuk melaksanakan 3 Program dan 44 Sub Kegiatan. Realisasi 3 Program pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.344.946.680,- realisasi anggaran sebesar Rp. 5.910.247.066,- dengan prosentase capaian sebesar 93%
2. Program Kepegawaian Daerah dari alokasi anggaran Rp. 2.230.637.000,- realisasi sebesar Rp. 1.936.731.545,- dengan prosentase capaian sebesar 86%
3. Program Pengembangan SDM dari alokasi anggaran sebesar Rp. 969.760.300,- realisasi anggaran sebesar Rp. 917.334.568,- dengan prosentase capaian sebesar 94%

Dari indikator kinerja yang ada di Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Tahun 2024 :

1. Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi dari target 98 % realisasi sebesar 98%.
2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan dari target 25% realisasi sebesar 66,42%.

Indek Sistem Merit digunakan untuk menilai sejauh mana Instansi menerapkan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sekaligus menjadi isu strategis di BKPSDM Kabupaten Karanganyar

tahun 2024 dengan capaian Nilai Pengembangan Karir dalam Sistem Merit sebesar 42,5 dengan kategori rendah.

Pada Tahun 2024 banyak prestasi yang sudah diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik di Tingkat Kabupaten maupun secara regional yaitu :

1. Penghargaan Anugrah Meritokrasi 2023 Kategori Nilai sistem Merit 257 (B) dan Indeks Malitas pengisisan JPT 87,98 (B)
2. Penghargaan Kearsipan tahun 2024 dengan Nilai 85,69 (A)
3. Juara I Sayembara Penulisan Esai Kreatif-Restoratif ASN Jawa Tengah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2024) pada BKPSDM Kabupaten Karanganyar, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 BKPSDM yang dulunya BKPSDM telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di BKPSDM

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**7.511.811.680**	**7.511.811.680**	**100**	**6.874.314.031**	**6.332.314.031**	**92**
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**49.879.700**	**49.879.700**	**100**	**250.932.850**	**239.380.850**	95
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.875.000	9.875.000	100	44.052.300	40.420.300	92
2)	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
3)	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.004.700	5.004.700	100	5.004.700	5.004.700	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4)	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
5)	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100	171.875.850	163.955.850	95
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.697.630.680**	**6.697.630.680**	**100**	**5.897.231.081**	**5.395.231.081**	91
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.682.630.680	6.682.630.680	100	5.882.231.081	5.380.231.081	91
9)	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**198.766.300**	**198.766.300**	**100**	**278.440.100**	**270.292.100**	97
10)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000	5.999.000	100	5.999.000	5.999.000	100
11)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.000.000	26.000.000	100	26.000.000	26.000.000	100
12)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.800	19.999.800	100	25.963.100	25.963.100	100
13)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100	1.380.000	1.380.000	100
14)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	120.387.500	120.387.500	100	194.098.000	185.950.000	96
15)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	25.000.000	100	25.000.000	25.000.000	100
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100**	-	-	-
16)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	100	-	-	-
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**241.985.000**	**241.985.000**	**100**	**258.045.000**	**257.745.000**	100
18)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.600.000	6.600.000	100	6.600.000	6.600.000	100
19)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000	120.000.000	100	130.000.000	130.000.000	100
20)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.385.000	115.385.000	100	121.445.000	121.145.000	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**223.550.000**	**223.550.000**	**100**	**189.665.000**	**169.665.000**	89
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.850.000	202.850.000	100	132.655.000	132.655.000	100
22)	Pemeliharaan mebel	-	-	-	-	-	-
23)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.700.000	20.700.000	100	27.010.000	27.010.000	100
24)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	30.000.000	10.000.000	33
II	**KEPEGAWAIAN**						
3.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.545.000.000**	**1.545.000.000**	**100**	**1.464.940.000**	**1.464.940.000**	100
7.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**543.000.000**	**543.000.000**	**100**	**507.939.700**	**507.939.700**	100
25)	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	300.000.000	300.000.000	100	200.000.000	200.000.000	100
26)	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	15.000.000	15.000.000	100	15.000.000	15.000.000	100
27)	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	88.000.000	88.000.000	100	88.311.700	88.311.700	100
28)	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	80.000.000	80.000.000	100	125.438.000	125.438.000	100
29)	Pengelolaan Data Pegawai	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	10.000.000	100
30)	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	50.000.000	100	69.190.000	69.190.000	100
8.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**170.000.000**	**170.000.000**	**100**	**344.812.000**	**344.812.000**	100
31)	Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	30.000.000	100
32)	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	40.000.000	40.000.000	100	40.000.000	40.000.000	100
33)	Pengelolaan Promosi ASN	100.000.000	100.000.000	100	274.812.000	274.812.000	100
9.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**471.000.000**	**471.000.000**	**100**	**252.000.000**	**252.000.000**	100
34)	Pengelolaan *Assesment Center*	260.000.000	260.000.000	100	210.000.000	210.000.000	100
35)	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	181.000.000	181.000.000	100	12.000.000	12.000.000	100
36)	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30.000.000	30.000.000	100	30.000.000	30.000.000	100
10.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**361.000.000**	**361.000.000**	**100**	**360.188.300**	**360.188.300**	100
37)	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000	60.000.000	100	57.287.000	57.287.000	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
38)	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71.500.000	71.500.000	100	144.999.250	144.999.250	100
39)	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	104.000.000	104.000.000	100	12.573.050	12.573.050	100
40)	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	10.000.000	10.000.000	100	11.429.950	11.429.950	100
41)	Pembinaan Disiplin ASN	55.000.000	55.000.000	100	62.749.050	62.749.050	100
42)	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	60.500.000	60.500.000	100	71.150.000	71.150.000	100
III.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**969.760.300**	**969.760.300**	**100**	**1.831.918.350**	**1.791.918.350**	98
11.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**717.760.300**	**717.760.300**	**100**	**469.936.750**	**469.936.750**	100
43)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	717.760.300	717.760.300	100	469.936.750	469.936.750	100
12.	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**252.000.000**	**252.000.000**	**100**	**1.361.981.600**	**1.321.981.600**	97
44)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	252.000.000	252.000.000	100	1.361.981.600	1.321.981.600	97
	2 Urusan 3 Program, 12 Kegiatan, 44 Subkegiatan	**10.026.571.980**	**10.026.571.980**	**100**	**10.171.172.381**	**9.589.172.381**	**94**

Sumber : BKPSDM, 2025 diolah

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 94%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Realisasi APBD di BKPSDM Tahun 2024 dan 2025 (SMT I)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (SMT I)		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**6.344.946.680**	**5.910.247.066**	**93**	**6.648.127.081**	**2.849.723.659**	**43**
1.	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**249.029.700**	**239.452.300**	**96**	**193.007.250**	**170.453.746**	**88**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.825.000	4.824.800	99,9	15.447.500	980.700	6,3
2)	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	5.000.000	4.997.800	99,9	1.999.900	967.300	48,3
3)	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.004.700	5.004.700	100	2.666.200	-	-
4)	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100	2.180.000	916.400	42
5)	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100	3.082.600	-	-
6)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100	6.430.200	6.388.200	99,3
7)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.200.000	199.625.000	95,42	161.200.850	161.200.850	100
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.122.630.680**	**4.746.577.361**	**93**	**5.888.498.581**	**2.407.250.453**	**41**
8)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.107.630.680	4.731.577.561	92,6	5.882.231.081	2.401.151.503	40,8
9)	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	15.000.000	14.999.800	100	6.267.500	6.098.950	97,3
3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**407.300.847**	**389.103.254**	**96**	**148.911.250**	**101.763.230**	**68**
10)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000	5.999.000	100	5.999.000	5.999.000	100
11)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.801.150	43.801.150	100	16.088.000	12.029.850	74,7
12)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.800	19.999.700	100	11.324.800	5.325.000	47
13)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100	1.380.000	690.000	50
14)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	295.323.947	277.129.904	93,8	99.239.550	67.599.280	68,1

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (SMT I)		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.796.950	40.793.500	99,9	14.879.900	10.120.100	68
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**104.000.000**	**103.800.000**	-	-	-	-
16)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-		-		-
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.000.000	103.800.000	99,8	-		-
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**253.704.500**	**236.033.651**	**93**	**258.045.000**	**104.184.730**	**40**
18)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.582.000	8.582.000	100	6.600.000	2.691.000	40,7
19)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125.000.000	107.329.151	85,8	130.000.000	47.569.730	36,5
20)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.122.500	120.122.500	100	121.445.000	53.924.000	44,4
6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**208.280.953**	**195.280.500**	**94**	**159.665.000**	**66.071.500**	**41**
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	155.082.400	142.385.500	91,8	132.655.000	59.171.500	44,6
22)	Pemeliharaan mebel	-			-	-	
23)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.200.000	38.095.000	99,7	27.010.000	6.900.000	25,5
24)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.998.553	14.800.000	98,6	30.000.000	25.000.000	83,3
II	**KEPEGAWAIAN**						
2.	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**1.970.637.000**	**1.936.731.545**	**98**	**1.488.941.795**	**335.845.568**	**23**
7.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**1.261.772.000**	**1.100.893.298**	**87**	**667.796.050**	**146.533.200**	**22**
25)	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.018.772.000	866.981.500	85,1	447.424.450	80.715.800	18
26)	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	15.000.000	14.663.550	97,7	12.438.800	-	-
27)	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	88.000.000	79.887.500	90,7	73.146.300	51.305.200	70,1
28)	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	80.000.000	79.887.900	99,8	91.582.000	4.828.450	5,2
29)	Pengelolaan Data Pegawai	10.000.000	9.774.900	97,7	7.260.500	2.367.000	32,6
30)	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	49.697.948	99,3	35.944.000	7.316.750	20,3
8.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**136.865.000**	**101.480.160**	**74**	**301.894.195**	**20.001.800**	**6,6**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (SMT I)		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
31)	Pengelolaan Mutasi ASN	30.000.000	22.143.850	73,8	21.042.800	7.316.950	34,7
32)	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	40.000.000	37.766.750	94,4	31.063.500	6.988.100	22,4
33)	Pengelolaan Promosi ASN	66.865.000	41.569.560	73,8	249.787.895	5.696.750	2,28
9.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**211.000.000**	**397.515.537**	**188**	**220.259.200**	**7.578.750**	**3**
34)	Pengelolaan *Assesment Center*	260.000.000	233.694.550	73,8	195.240.600	-	-
35)	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	181.000.000	143.990.500	79,5	7.384.400	4.383.450	59,3
36)	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	30.000.000	19.830.487	66,1	17.634.200	3.195.300	18,1
10.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**361.000.000**	**336.842.550**	**93**	**298.992.350**	**161.731.818**	**54**
37)	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60.000.000	59.220.000	98,7	52.139.800	31.946.000	61,2
38)	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	71.500.000	68.950.000	96,4	133.970.000	93.999.100	70,1
39)	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	104.000.000	98.125.800	73,8	10.233.550	1.195.050	11,6
40)	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	10.000.000	8.589.700	73,8	7.169.950	788.450	10,9
41)	Pembinaan Disiplin ASN	55.000.000	50.466.550	91,7	38.739.050	5.787.500	14,9
42)	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	60.500.000	51.490.500	85,1	56.740.000	28.015.500	49,3
3.	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**969.760.300**	**917.334.568**	**95**	**1.627.436.505**	**186.408.475**	**11**
11.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**717.760.300**	**704.104.468**	**98**	**376.939.500**	**140.948.025**	**37**
43)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	717.760.300	704.104.468	98	376.939.500	140.948.025	37,3
12.	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**252.000.000**	**213.230.100**	**85**	**1.250.497.005**	**45.460.450**	**3,6**
44)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi	252.000.000	213.230.100	84,6		45.460.450	3,6

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (SMT I)		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1.250.497.005		
	2 Urusan 3 Program, 12 Kegiatan, 44 Subkegiatan	**9.545.343.980**	**8.764.313.179**	**91,8**	**9.794.505.381**	**3.396.977.188**	**34,6**

Sumber : BKPSDM, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 9.545.343.980 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 8.764.313.179 atau 91,8%. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 3.396.977.188 atau 34,6% dari pagu anggaran Rp. 9.794.505.381.

Tabel 2.3

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten / kota	5.713.333.008	5.430.805.172	95	6.344.946.680	5.910.247.066	93
2	Program Kepegawaian Daerah	2.681.907.250	2.444.424.775	91	2.230.637.000	1.936.731.545	86
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.399.000.000	1.269.336.986	90	969.760.300	917.334.568	94
	Persentase realisasi	9.794.240.258	9.144.566.933	93	9.545.343.980	8.764.313.179	91
	Rata-rata realisasi 3 program	3.264.746.753	3.048.188.978	92	3.181.781.327	2.921.437.726	91

Sumber : BKPSDM, 2025 diolah

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan target dengan realisasi tahun 2024

Pengukuran kinerja BKPSDM dengan menggunakan klasifikasi dalam PermendagriNo. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai	Kriteria
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017. hal 494

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Hasil Evaluasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2024			Target Capaian Renstra 2024
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas profesionalis dan kuantitas ASN berbasis sisrem merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	370	257	69,4	370
		Nilai pengembangan karir dalam sistem merit	Nilai	112,5	42,5	37,7	112,5
	Meningkatkan kinerja ASN yang berbasis kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	25	66,42	265,6	25
	Meningkatkan pengembangan dan penataan karier PNS sesuai dengan kompetensi	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	%	98	98	100	98
	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan mudah cepat dan tepat	Indek Kepuasan Masyarakat	%	85	85	100	85
	Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas BKPSDM	Nilai SAKIP	Nilai	76	69,55	91,5	69,9

Sumber : BKPSDM Tahun 2025, diolah

Tabel 2.6.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan)

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2026	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.03	**KEPEGAWAIAN**									
5.03	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**									
5.03.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**									
5.03.01.2.02	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**		**90 %**	**100**	**%**	**90 %**		
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	100 %	2 dok	100	%	2 dok	1 dok	50%
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	1 dok	1 dok	100%
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	1 dok	-	-
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	1 dok	1 dok	100%
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	100 %	1 dok	100	%	1 dok	-	-

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Laporan	100 %	8 jenis	100	%	4 Laporan	1 Lap	25,0%
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	40 Laporan	107,5 %	40 Laporan	100	%	2 Laporan	-	-
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**		**90 %**	**100**		**90 %**	**-**	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 Orang/ Bulan	100 %	42 Orang/ Bulan	100	%	45 orang/ bulan	38 orang/ bulan	84%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	100 %	12 laporan	100	%	12 laporan	3 lap	25%
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**90 %**		**90 %**	**100**	**%**	**90 %**	**-**	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 paket	100 %	10 paket	100	%	4 paket	1 paket	25%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	100 %	4 jenis keg	100	%	4 paket	1paket	25%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	100 %	2 paket	100	%	3 paket	-	-

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang Disediakan	12 dok	100 %	12 dok	100	%	12 dok	3 dok	25%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	2 laporan	100 %	2 laporan	100	%	12 lap	3 lap	25%
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	8 dokumen	100 %	8 dokumen	100	%	4 dok	1 dok	25%
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**90 %**		**90 %**	**100**		**-**	**-**	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	100 %	-	-	%	-	-	-
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	7 unit	100 %	7 unit	100	%	-	-	-
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**		**90 %**	**100**	**%**	**90 %**	**-**	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	248 surat	100 %	248 surat	100	%	12 lap	3 lap	25%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 laporan	100 %	5 laporan	100	%	12 lap	3 lap	25%
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 laporan	100 %	24 laporan	100	%	4 lap	1 lap	25%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**		**90 %**	**100**	**%**	**90 %**	**-**	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	100 %	17 unit	100	%	20 unit	5 unit	25%
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	-	-		-	-	-
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	100 %	6 unit	100	%	20 unit	3 unit	15%
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	100 %	1 unit	100	%	1 unit	1 unit	100%
5.03	**KEPEGAWAIAN**									
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**									
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**98 %**		**98 %**	**100**	**%**	**98 %**	**-**	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	600 orang	132,5 %	600 orang	100	%	3 dok	-	-
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	722 orang	120,1 %	722 orang	100	%	3 laporan	-	-
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	550 orang	114,6 %	550 orang	100	%	12 dok	3 dok	25%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	9.230 orang	100 %	9.230 orang	100	%	2 dok	-	-
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Pegawai	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2.500 orang	142 %	2.500 orang	100	%	2 dok	-	-
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	10.160 orang	100 %	10.160 orang	100	%	2 lap	-	-
5.03.02.2.02.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**		**98 %**	**100**	**%**	**98 %**	**-**	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi, JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	1.500 orang	101,3 %	1.500 orang	100	%	4 dok	1 dok	25%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2.100 orang	93,6 %	2.100 orang	100	%	6 dok	1 dok	16,7%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	600 jabatan	211,5 %	600 jabatan	100	%	4 dok	-	-
5.03.02.2.03.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**		**98 %**	**100**	**%**	**98 %**	**-**	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan *Assesment Center*	Jumlah dokumen Pengelolaan *Assesment Center*	25 dok	100 %	25 dok	100	%	4 dok	1	25%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	206 orang	123,3 %	224 orang	109	%	250 orang	850 orang	3,4%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	600 orang	100 %	561 orang	93,5	%	300 orang	36 orang	12,3%

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6
5.03.02.2.04.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah Penilai dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**		**95 %**	**100**	**%**	**95 %**	**-**	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang tersusun dalam satu tahun	1 dok	100 %	1 dok	100	%	1 dok	-	-
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	9.230 orang	100 %	9.230 orang	100	%	2 dok	-	-
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	42 orang	100 %	42 OPD	143,4	%	800 orang	396 orang	49,5%
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	146,3 %	150 orang	121,5	%	200 Orang	-	-
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	42 OPD	100 %	42 OPD	100	%	9.000 orang	-	-
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 Dok	100 %	10 Dok	100	%	10 Dok	2 Dok	20%
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**									
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**25 %**		**144,1 %**	144,1	**%**	**26 %**	**-**	

No.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (2025) TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2025 TW 1 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.700 orang	118,6 %	2.700 orang	144,1	%	3.000 orang	324 orang	10,8%
5.04.02.2.02.	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**25 %**		**53,8 %**	53,8	%	**26 %**	**-**	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional kepemipinan dan Prajabatan	14 laporan	88,9 %	14 laporan	53,8	%	14 laporan	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan kepada masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya.

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar

TUJUAN PD	SASARAN PD	PROGRAM	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn-n)	Tahun 2024 (thn-1)	Tahun 2025 (thn-n) SMT 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.	Meningkatkan tata Kelola dan akuntabilitas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	76	78	69,55	-	
	Meningka Meningkatkan kualitas, profesionalis, dan kuantitas ASN berbasis sistem merit	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Sistem Merit	370	280	257	-	
	Meningkatkan pengembangan dan penataan karier PNS sesuai dengan kompetensi		Prosentase penempatan aparatur yang sesuai kompetensi	98	91,5	98	97,71%	
	Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan mudah cepat dan tepat		Prosentase penyelesaian administrasi kepegawaian	98	98	21,99	19,89%	
	Meningkatkan kinerja ASN yang berbasis kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25	26	66,42	87,44%	

Sumber : BKPSDM, 20

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 120 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan, tidak melaksanakan urusan wajib jadi tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

Sebagai fungsi penunjang bidang Pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tiga Indeks Kinerja Kunci (IKK). Indeks Kinerja Kunci dan capaian IKK Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar yang dihitung dari jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi keatas di banding Jumlah Pendidikan SMA (jumlah seluruh ASN) ke bawah dikali 100%. Pada tahun 2025 hasil IKK sebesar 87,44.
2. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi yang dihitung dari jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi dibanding dengan seluruh jumlah pegawai fungsional dikali 100%. Hasil IKK untuk tahun 2025 adalah sebesar 97,71.
3. Rasio pegawai fungsional yang diukur dari jumlah pegawai PNS Fungsional dibanding jumlah seluruh pegawai. Hasil IKK untuk tahun 2025 adalah sebesar 19,89%.

Pada tabel dibawah kami sajikan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :

Tabel. 2.8.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra BKN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKN	Permasalahan Pelayanan BKPSDM Karanganyar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Strategis a. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN b. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN	1. Belum optimalnya implementasi sistem merit	Belum semua pegawai memiliki pemahaman tentang sistem merit	Peraturan menuju Sistem Merit telah tersedia
		2. Ketidaksesuaian kebutuhan dengan formasi ASN yang dibuka	Ketidaksesuaian usulan formasi	Koordinasi antara BKN dan daerah

	c. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas” d. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI–ASN) e. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima f. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN g. “Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel”	3. Kesenjangan kompetensi dan kebutuhan organisasi.	Belum optimalnya manajemen talenta	Pengelolaan data kompetensi, riwayat pelatihan, dan kinerja pegawai, sehingga kesenjangan kompetensi dapat terdeteksi secara *real-time* dan terukur.
		4. Sistem informasi manajemen kepegawaian belum terintegrasi dengan sistem lain	Koordinasi internal belum optimal	Kemampuan Tim IT yang kompeten

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Karanganyar, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah;

   Secara umum Program Penunjang Urusan Pemerintahan dimaksud tidak ada kendala semua berjalan sesuai dengan program. Tetapi satu kendala yaitu masih kurangnya kendaraan mobil dan motor sebagai sarana mobilitas karena banyaknya kendaraan yang sudah mulai rusak.
2. Program Kepegawaian Daerah;
   a. Kualitas disiplin aparatur yang masih perlu untuk ditingkatkan;
   b. Jumlah pengadaan ASN yang tidak sebanding dengan ASN yang pensiun mengakibatkan adanya kekurangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
   c. Distribusi ASN Daerah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/antar wilayah belum proporsional, dimana untuk daerah perkotaan cenderung terjadi kelebihan personil, sedangkan pada wilayah pedesaan cenderung terjadi kekurangan personil.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    a. Dengan adanya perubahan formasi jabatan sebagai akibat penerapan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga banyak promosi dan mutasi pejabat struktural. Hal tersebut juga berdampak pada bertambahnya jumlah pejabat struktural yang harus mengikuti Diklat Kepimimpinan (Diklat Struktural) sesuai eselonnya, tetapi tidak dibarengi dengan tersedianya dana yang cukup untuk pengembangan sumber daya manusia.
    b. Kurangnya minat ASN mengenai pentingnya pengembangan kompetensi. Banyak ASN yang belum menjadikan pengembangan kompetensi sebagai prioritas utama dan belum sepenuhnya menyadari atau memiliki minat yang rendah terhadap pentingnya pengembangan kompetensi.
    c. Belum semua sistem informasi kepegawaian terintegrasi dengan baik dengan sistem lain yang relevan. Sehingga ada sistem yang belum maksimal dalam menyajikan data kepegawaian.

Sedangkan isu penting yang harus ditindaklanjuti saat ini di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah meningkatkan Nilai Sistem Merit. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan bahwa “Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit” dengan pengertian kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan merata dengan tanpa diskriminasi. Jadi diupayakan semua program dan kegiatan bisa mendukung untuk peningkatan nilai sistem merit.

Tabel 2.9.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD OPD TAHUN 2026

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				**10.171.172.381**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**10.221.172.381**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			**90 %**	**6.874.314.031**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**			**90 %**	**6.874.314.031**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**BKPSDM**	**Jumlah perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**	**250.932.850**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**BKPSDM**	**Jumlah perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**90 %**	**250.932.850**	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	44.052.300	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	BKPSDM	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	44.052.300	
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
3.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.004.700	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.004.700	
4.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA – SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
5.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA - SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	5.000.000	
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	171.875.850	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	171.875.850	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**BKPSDM**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**5.897.231.081**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**BKPSDM**	**Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**5.897.231.081**	
8.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan	5.882.231.081	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	BKPSDM	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan	5.882.231.081	
9.	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan an / Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	Koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulana n / Semesteran SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	15.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**BKPSDM**	**Jumlah Administrasi umum perangkat daerah**	**90 %**	***278.440.100***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**BKPSDM**	**Jumlah Administrasi umum perangkat daerah**	**90 %**	***278.440.100***	
10.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKPSDM	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5.999.000	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BKPSDM	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	5.999.000	
11.	Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	26.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	BKPSDM	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	26.000.000	
12.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	25.963.100	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKPSDM	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	25.963.100	
13.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	BKPSDM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.380.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	BKPSDM	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	1.380.000	
14.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 laporan	194.098.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 laporan	194.098.000	
15.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	25.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	BKPSDM	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	25.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**BKPSDM**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**90 %**	0	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM**	**Jumlah pengadaan barang milik daerah**	**90 %**	0	
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau	15 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau	15 unit	0	

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
			lapangan yang disediakan					lapangan yang disediakan			
17.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 unit	0	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20 unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**BKPSDM**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**258.045.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM**	**Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**258.045.000**	
18.	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.600.000	Penyediaan jasa surat menyurat	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	6.600.000	
19.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	130.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	130.000.000	
20.	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	121.445.000	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	BKPSDM	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	121.445.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**BKPSDM**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**189.665.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**BKPSDM**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**189.665.000**	
21.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas	BKPSDM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	132.655.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	BKPSDM	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	132.655.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
	operasional atau lapangan										
22.	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit	0	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit	0	
23.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	27.010.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	BKPSDM	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	27.010.000	
24.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	30.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	BKPSDM	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	30.000.000	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			**85 %**	**1.464.940.000**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**92 %**	**1.514.940.000**	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	**BKPSDM**	**Jumlah data ASN yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian**	**85 %**	**507.939.700**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**BKPSDM**	**Jumlah data ASN yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian**	**92 %**	**507.939.700**	
25.	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	200.000.000	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	250.000.000	
26.	Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 laporan	15.000.000	Evaluasi pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 laporan	15.000.000	
27.	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dokumen	88.311.700	Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dokumen	88.311.700	
28.	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 dokumen	125.438.000	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 dokumen	125.438.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
29.	Pengelolaan data pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen	10.000.000	Pengelolaan data pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen	10.000.000	
30.	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 laporan	69.190.000	Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian	BKPSDM	Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 laporan	69.190.000	
	Mutasi dan Promosi ASN	**BKPSDM**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**344.812.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**BKPSDM**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**344.812.000**	
31.	Pengelolaan mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dokumen	30.000.000	Pengelolaan mutasi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dokumen	30.000.000	
32.	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	12 dokumen	40.000.000	Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKPSDM	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	12 dokumen	40.000.000	
33.	Pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	274.812.000	Pengelolaan promosi ASN	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	274.812.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN	**BKPSDM**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**98 %**	**252.000.000**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**BKPSDM**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**98 %**	**252.000.000**	
34.	Pengelolaan *Assesment Center*	BKPSDM	Jumlah dokumen Pengelolaan *Assesment Center*	4 dokumen	210.000.000	Pengelolaan *Assesment Center*	BKPSDM	Jumlah dokumen Pengelolaan *Assesment Center*	4 dokumen	210.000.000	
35.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	12.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 orang	12.000.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD / RENSTRA OPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Program / Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	
36.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100 orang	30.000.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 orang	30.000.000	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**BKPSDM**	**Jumlah evaluasi kinerja dan penegakkan disiplin yang terselesaikan**	**95 %**	**360.188.300**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**BKPSDM**	**Jumlah evaluasi kinerja dan penegakkan disiplin yang terselesaikan**	**95 %**	**360.188.300**	
37.	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	57.287.000	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	1 dokumen	57.287.000	
38.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen	144.999.250	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen	144.999.250	
39.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 orang	12.573.050	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 orang	12.573.050	
40.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	11.429.950	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	11.429.950	
41.	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8.800 orang	62.749.050	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8.800 orang	62.749.050	
42.	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	10 dokumen	71.150.000	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	10 dokumen	71.150.000	

	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			**27 %**	**1.831.918.350**				**27 %**	**1.831.918.350**	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	**BKPSDM**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**27 %**	**469.936.750**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**BKPSDM**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis**	**27 %**	**469.936.750**	
43.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.600 orang	469.936.750	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.600 orang	469.936.750	
	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**15 orang**	**1.361.981.600**	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**15 orang**	**1.361.981.600**	
44.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15 laporan	1.361.981.600	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKPSDM	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15 laporan	1.361.981.600	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD adalah acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengacu pada Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yaitu **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.** Dalam hal ini, BKPSDM Kabupaten Karanganyar berada dalam **misi ke empat** yaitu "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik".

Rancangan awal RKPD tidak berbeda dengan analisa kebutuhan saat ini. Hal ini karena pada penyusunan rancangan awal sudah disusun sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan arah kebijakan dan prioritas daerah untuk tahun 2026 yaitu meningkatkan manajemen talenta 8 aspek (Pengembangan Karir bertumpu pada ketersediaan kompetensi), maka sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka prioritas pada tahun 2026 adalah pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan relevan, memastikan ASN memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas dan peran, mendorong pelaksanaan pola karir untuk ASN.

Hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kepegawaian, bidang pendidikan dan pelatihan sebelum menyusun anggaran untuk tahun yang akan datang, akan menampung usulan dari Perangkat Daerah dan masyarakat yang akan kita sesuaikan dan tindaklanjuti dalam sub kegiatan yang ada dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk melalui musrenbang ataupun proposal.

Sedangkan untuk perbaikan pelayanan secara menyeluruh kita akan menggunakan hasil Survei Kepuasan dengan responden ASN yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dari hasil survei bisa dianalisa pelayanan apa yang kurang dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan akan kita tindak lanjuti pada Rencana Kerja yang akan datang.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah

kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.1.2. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Pembangunan Badan Kepegawaian Negara tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Meningkatnya kualitas ASN dan kapasitas manajemen ASN berbasis pendekatan *human capital management*. Tujuan ini dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis utama :

1. Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi. Ini berarti mendorong setiap instansi pemerintah untuk mampu mengelola ASN mereka secara lebih baik, berdasarkan sistem merit yang objektif dan adil.
2. Meningkatnya kapabilitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Fokus ini adalah untuk memperkuat BKN sebagai lembaga yang modern dan efisien, agar dapat memberikan layanan manajemen ASN yang optimal.

Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 empat perspektif, yakni *stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam menerapkan Manajemen ASN.
2. *Customer Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN.
3. *Internal Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas, Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI–ASN), Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima.
4. *Learning & Growth Perspective*
   Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah "SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya.*** Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan

dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama

Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;
6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;
12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2.Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel 3.1 yang terdapat pada halaman berikutnya.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Tahun 2026
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	Indikator	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Target
						2026
Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN			Indeks Sistem Merit	Hasil penilaian sistem merit	Nilai	1.
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Hasil penilaian IKM	Nilai	2.
	Meningkatnya Profesionalitas ASN		Nilai Pengembangan Karir dalam Sistem Merit	Hasil penilaian sistem merit	Nilai	3.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP	Nilai	4.
		Program Kepegawaian Daerah	Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	Hasil Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetens	%	5.

		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Hasil persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	27

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan Kepegawaian dan Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Pengembangan Sumber Daya Manusia) seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang akan dihadapi yaitu :

1) Kesenjangan jumlah pegawai dimana adanya fenomena kekurangan jumlah pegawai akibat pensiun sekaligus penumpukan pegawai di unit tertentu yang menyebabkan ketidakmerataan beban kerja.
2) Ketidaksesuaian Kompetensi dan Kebutuhan. Sulitnya menempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya karena kurangnya perencanaan kebutuhan PNS yang jelas dan rinci, atau ketidaksesuaian antara hasil rekrutmen dengan kebutuhan riil Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3) Perubahan Regulasi. Seringnya terjadi perubahan peraturan kepegawaian (misalnya terkait PPPK, Jabatan Fungsional, atau disiplin) yang menuntut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar untuk selalu beradaptasi dan mensosialisasikan secara cepat.
4) Belum optimalnya penerapan mutasi dan promosi berdasarkan prinsip sistem merit.
5) Digitalisasi yang Belum Optimal. Proses manajemen kepegawaian belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem digital sehingga menyebabkan proses administrasi masih rentan terhadap kesalahan dan belum *uptodate.*

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar juga memiliki peluang antara lain adalah :

1) Penerapan *Sistem Merit* yang Kuat. Adanya regulasi yang mendukung penguatan Sistem Merit (UU ASN) menjadi peluang bagi BKPSDM untuk menerapkan manajemen talenta (talent management) dan penilaian kinerja berbasis kompetensi secara konsisten.
2) Berkolaborasi dengan lembaga diklat atau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan menyesuaikan kurikulum Diklat dengan kebutuhan riil instansi.

3) Pemanfaatan teknologi melalui Sistem Informasi Terintegrasi (SIMPEG) dapat mengintegrasikan semua data kepegawaian (riwayat pangkat, jabatan, diklat, kinerja) secara digital dan *real-time.*
4) Posisi BKPSDM sebagai regulator dan fasilitator SDM untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mendorong OPD lain untuk aktif melaksanakan pengembangan kompetensi mandiri dan berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), sehingga tanggung jawab pengembangan SDM tidak hanya berada di BKPSDM.
5) Transparansi dan Akuntabilitas Proses. menjadikan setiap proses kepegawaian (rekrutmen hingga pensiun) dapat diakses dan dipertanggungjawabkan, mengurangi ruang intervensi politik, dan memperkuat integritas.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara BKPSDM mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran BKPSDM dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan BKPSDM.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja sebagai berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka BKPSDM masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Urusan Kepegawaian Daerah, dan Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia . Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	1. Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit
			Nilai Pengembangan Karir dalam

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
tata kelola pemerintahan daerah			Sistem Merit
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM
		3. Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas BKPSDM	Nilai SAKIP
		4. Meningkatkan kinerja ASN yang berbasis kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi

Sumber **:** *BKPSDM, 2025*

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iksthisar Realisasi Kinerka SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penerangan Bangunan Kantor
Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas BKPSDM			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Meningkatnya Profesionalitas ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Pengelolaan Data Pegawai
			Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
			Pengelolaan Promosi ASN

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assesment Center
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
			Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai
			Pembinaan Disiplin ASN
			Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai
Meningkatkan kinerja ASN yang berbasis kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum
		Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber **:** *BKPSDM, 2025*

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ini mengacu pada Rencana Strategis yang sudah ditetapkan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah urusan penunjang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung Program Pemerintah Daerah melalui Bidang Kepegawaian khususnya di peningkatan Nilai Sistem Merit. Sehingga capaian Nilai Sistem Merit dijadikan isu strategis bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Langkah-langkah yang ditetapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menghadapi isu strategis untuk meningkatkan Nilai Sistem Merit adalah :

a. Pengembangan Kompetensi yang berkelanjutan dan relevan.
b. Memastikan ASN memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas dan peran.
c. Mendorong pelaksanaan pola karir untuk ASN

Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yaitu **"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera.** Dalam rangka pencapaian visi tersebut ditetapkan misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar guna menunjang keberhasilan yaitu

1. Meningkatkan kualitas sumber daya insani, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga dan pemuda serta kesetaraan gender.
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian.
3. Membangun dari desa, membangun infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan dan pemerataan ekonomi.
4. Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik
5. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama

Maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang merupakan kewenangan daerah, berada dalam **misi ke-4**, yaitu "Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik" sedangkan arah kebijakan tahun 2026 yaitu meningkatkan manajemen talenta 8 aspek (pengembangan karir bertumpu pada ketersediaan kompetensi).

Maka sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka prioritas pada tahun 2026 adalah meningkatkan daya saing SDM ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan relevan, memastikan ASN memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung tugas dan peran, mendorong pelaksanaan pola karir untuk ASN.

4.1. Perumusan Program dan Kegiatan BKPSDM

Dalam rangka meningkatkan daya saing SDM ASN, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 Merencanakan 3 program, 12 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan rencana anggaran seluruhnya sebesar **Rp 7.600.925.883** (Tujuh Milyar Enam Ratus Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga). Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
   2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA – SKPD
   3. Koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen RKA – SKPD
   4. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA – SKPD
   5. Koordinasi dan penyusunan perubahan dokumen DPA – SKPD
   6. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   7. Evaluasi kinerja perangkat daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
   2. Penyediaan bahan logistik kantor
   3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   5. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
   6. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan kendaraan dinas opersional atau lapangan
   2. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan jasa surat menyurat
   2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   2. Pemeliharaan mebel
   3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
   4. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
   1. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
   2. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
   3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
   4. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
   5. Pengelolaan data pegawai
   6. Evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN
   1. Pengelolaan mutasi ASN
   2. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
   3. Pengelolaan promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN
   1. Pengelolaan Assesment Center
   2. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
   3. Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   1. Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
   2. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
   3. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
   4. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
   5. Pembinaan disiplin ASN
   6. Pelayanan proses ijin perceraian pegawai

3. Program Pendidikan dan Pelatihan

a. Pengembangan Kompetensi Teknis
   1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintah konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.

b. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
   1. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan.

4.2. Dana Indikatif BKPSDM

Di tahun 2026 ini semua program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, perubahan terjadi karena penyesuaian kemampuan anggaran yang ada. Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2026 untuk pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								**7.600.925.883**		**11.449.750.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**								**6.183.221.183**	**90 %**	**9.749.750.000**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja**	**90 %**	**Tersedianya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja**		**220.000.000**	**90 %**	**107.500.000**	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	0	2 dokumen	11.500.000	
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dokumen	6.500.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					penyusunan dokumen RKA-SKPD							
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dokumen	7.500.000	
5.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dokumen	7.500.000	
5.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	5.000.000	2 dokumen	7.500.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	0	4 laporan	18.500.000	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	200.000.000	2 laporan	48.500.000	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Prosentase tertib Administrasi keuangan**	**90 %**	**Jumlah penyediaan pelayanan keuangan**	**100 %**	**5.321.226.583**	**90 %**	5.768.500.000	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	45 orang/ bulan	Jumlah penyediaan pelayanan keuangan	100 %	5.321.226.583	45 orang/ bulan	5.750.000.000	
5.03.01.2.02.07	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/	4 laporan	Persentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	0	4 laporan	18.500.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Triwulanan/ Semesteran SKPD							
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Administrasi umum perangkat daerah**	**90 %**	**Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran**	**100 %**	**169.402.100**	**90 %**	229.750.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.734.000	4 paket	7.500.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0	4 paket	36.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	25.963.100	3 paket	25.500.000	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0	12 dokumen	2.750.000	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD	12 laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	139.705.000	12 laporan	125.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	0	4 dokumen	33.000.000	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**90 %**	**Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai**	**100 %**	**36.266.500**	**90 %**	**220.000.000**	
5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	0	1 unit	110.000.000	
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 unit	Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	36.266.500	5 unit	110.000.000	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang**	**90 %**	Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	**230.539.000**	**90 %**	248.000.000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	0	12 laporan	8.000.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyediaan jasa	12 laporan	Tersedianya pelayanan	100 %	109.800.000	12 laporan	120.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Sumber Daya Air dan Listrik				komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		sarana dan prasarana pegawai					
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan	Tersedianya pelayanan sarana dan prasarana pegawai	100 %	120.739.000	4 laporan	120.000.000	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**90 %**	**Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor**	**100 %**	**205.787.000**	**90 %**	432.500.000	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	176.593.000	15 unit	250.000.000	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah mebel yang dipelihara	25 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	0	25 unit	33.000.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	29.194.000	20 unit	24.500.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	0	1 unit	125.000.000	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**880.699.700**	**85 %**	**2.743.500.000**	
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**	**98 %**	**Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian**	**100 %**	**235.868.000**	**98 %**	**1.236.500.000**	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	25.000.000	3 dokumen	950.000.000	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan hasil Evaluasi pengadaan ASN	3 laporan	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	45.000.000	3 laporan	25.500.000	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	12 dokumen	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	64.112.000	12 dokumen	110.000.000	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi kepegawaian	2 dokumen	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian	100 %	50.000.000	2 dokumen	85.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							dan informasi kepegawaian					
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian	2 dokumen	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	8.999.000	2 dokumen	11.000.000	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah laporan hasil evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi kepegawaian	2 laporan	Terpenuhinya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	100 %	42.757.000	2 laporan	55.000.000	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Mutasi dan Promosi ASN**	**98 %**	**Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN**	**100 %**	**171.089.700**	**98 %**	303.000.000	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi , JPT, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	4 dokumen	Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN	100 %	30.000.000	4 dokumen	33.000.000	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	2 laporan	Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN	100 %	15.089.700	12 laporan	55.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	4 dokumen	Terwujudnya penataan ASN sesuai dengan analisis jabatan dan kompetensi ASN	100 %	126.000.000	4 dokumen	215.000.000	
5.03.02.2.03.	**Pengembangan Kompetensi ASN**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN**	**98 %**	**Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN**	**100 %**	**237.854.000**	**85 %**	528.000.000	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan *Assesment Center*	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Pengelolaan *Assesment Center*	4 dokumen	Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN	100 %	220.000.000	4 dokumen	265.000.000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen Hasil pendidikan lanjutan ASN yang dikelola	2 dokumen	Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN	100 %	7.854.000	200 orang	230.000.000	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan karir dalam jabatan fungsional	2 dokumen	Tersedianya pengembangan kompetensi bagi ASN	100 %	10.000.000	200 orang	33.000.000	
5.03.02.2.04.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**95 %**	**Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap**	**100 %**	**640.000.000**	**95 %**	**676.000.000**	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen hasil penyusunan kebijakan penilaian	1 dokumen	Tersedianya dokumen penyusunan kebijakan	100 %	30.000.000	1 dokumen	255.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Evaluasi Kinerja Aparatur				dan evaluasi kinerja aparatur		penilaian dan kinerja aparatur					
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	2 dokumen	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	24.150.000	2 dokumen	80.000.000	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	800 orang	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	100.000.000	800 orang	110.000.000	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	200 orang	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	10.376.000	200 orang	11.000.000	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	8800 orang	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	46.566.000	8800 orang	110.000.000	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah dokumen proses ijin perceraian pegawai yang dilayani	10 dokumen	Tersedianya pelayanan kinerja aparatur ASN yang lengkap	100 %	24.796.000	10 dokumen	110.000.000	
5.04.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								**537.005.000**			
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**			**26 %**		**537.005.000**	**26 %**	**1.700.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis**	**27 %**	**Terpenuhinya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN**	**100 %**	**356.960.000**	**26 %**	**1.700.000.000**	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintah Umum	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	2.600 orang	Terpenuhinya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	100 %	356.960.000	2.600 orang	1.200.000.000	
5.04.02.2.02.	**Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	BKPSDM	**Nilai SAKIP**	**70**	**Jumlah Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**27 %**	**Tersedianya sertifikasi kelembagan kompetensi manajerial dan fungsional**	**100 %**	**180.045.000**	**15 orang**	**500.000.000**	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan	BKPSDM	Nilai SAKIP		Jumlah ASN yang mengikuti kompetensi bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan	15 orang	Tersedianya sertifikasi kelembagan kompetensi	100 %	180.045.000	3 laporan	500.000.000	

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2026	Target Capaian Kinerja	Prakiraan Maju 2027	Ket.
			Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Prioritas Pembangunan Nasional
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				Tinggi, jabatan Fungsional kepemipinan dan Prajabatan		manajerial dan fungsional					

4.3. Target keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Tahun 2026

Bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci ini sangat penting karena menjadi cerminan dari visi dan misi. Yang memungkinkan kita untuk mengukur kemajuan secara obyektif dan memastikan bahwa setiap program serta sumber daya yang kita gunakan benar-benar berkontribusi pada pencapaian. Berikut adalah tabel target IKU dan IKK BKPSDM Tahun 2026 :

Tabel 4.2.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Tahun 2026

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus Indikato	Satuan	Target 2026
	Kepegawaian			
1.	Indeks sistem merit	Hasil penilaian sistem merit	Nilai	300
2.	Nilai pengembangan karir dalam sistem merit	Hasil penilaian sistem merit	Nilai	52,5
3.	Nilai IKM	Hasil penilaian IKM	Nilai	85

Tabel 4.3.
Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Tahun 2026

No	Urusan	Satuan	Target 2026
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)		
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	182,70
2.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,50
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80,30

4.4. Program dan Kegiatan BKPSDM dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Tabel 4.4.
Program / Kegiatan yang mendukung Prioritas
Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas	Program dan Kegiatan BKPSDM	Pagu 2026
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**6.183.221.183**
		a. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.321.226.583
		c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.402.100
		d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.266.500
		e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemenrintahan Daerah	230.539.000
		f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.787.000
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**880.699.700**
		a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	235.868.000
		b. Mutasi dan Promosi ASN:	171.089.700
		c. Pengembangan Kompetensi ASN	237.854.000
		d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	235.888.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**537.005.000**
		a. Pengembangan Kompetensi Teknis	*356.960.000*
		b. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*180.045.000*

BAB V
PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi

Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Karanganyar serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pedoman ini menjadi landasan kuat untuk memastikan transisi yang mulus dan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 berjalan secara terstruktur dan akuntabel.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun 2026 ini akan menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar dalam menyusun pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Renja ini akan dilakukan secara transparan, tanpa adanya benturan kepentingan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu, serta menghindari segala bentuk korupsi, dan penyalahgunaan anggaran. Sebagai rencana tindak lanjut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar berusaha meningkatkan Nilai Sistem Merit dengan bekerjasama dengan dinas terkait baik di tingkat yang lebih tinggi maupun yang sejajar dan tentunya memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan profesionalitas pegawai, melalui program dan kegiatan yang ada.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pedoman ini wajib dijadikan acuan utama dalam setiap tahapan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026. Monitoring dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan kesesuaian implementasi. Kepatuhan dan dedikasi semua pihak sangat diharapkan demi suksesnya program kerja yang telah ditetapkan. Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 ini kami susun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan umum penganggaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2026 mendatang.

Dengan selesainya dokumen ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas rutin semata namun dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan penganggaran pada Tahun 2026 serta menjadi pedoman BKPSDM Kabupaten Karanganyar dalam menetapkan program kegiatan beserta besaran anggarannya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2026 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Renstra yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun tersebut, renja ini dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan pengawasan internal sejak perencanaan sampai dengan pengawasan dan pelaporan yang nantinya berguna dalam proses responsibilitas dan akuntabilitas di Tahun 2026 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami berharap Renja ini dapat menjadi gambaran pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Darah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyadari bahwa Renja ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Karanganyar, September 2025
Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar,

Zulfikar Hadidh, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19750811 199903 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul .....
Salinan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2025.....
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB I I-1
PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.. II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025..... II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-34
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ..... II-34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... II-53
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah III-5
3.3 Tantangan dan Peluang III-12
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-15
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
4.1 Perumusan Program dan Kegiatan diserta Target dan Pendanaan IV-1
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Inspektorat Daerah II-2
Tabel 2.2
Realisasi APBD di Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan 2025 (Triwulan II) II-9
Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024 ..... II-15
Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja II-16
Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 ..... II-16
Tabel 2.6
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024 ..... II-17
Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 II-19
Tabel 2.8
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD) II-20
Tabel 2.9
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD) II-21
Tabel 2.10
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar s/d tahun 2024 ..... II-24
Tabel 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar II-33
Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar II-36
Tabel 2.13
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 ..... II-53
Tabel 3. 1
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026 ..... III-10
Tabel 3. 2
Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD III-15
Tabel 3. 3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan III-16
Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024..... IV-3
Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah IV-23
Tabel 4.3
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ..... IV-24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan dan sistematik dari Rencana Strategis (Renstra) untuk masa 5 (lima) tahun. Renja memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya termasuk kelompok sasaran, volume, satuan, lokasi dan pagu indikatif tahun 2026, serta prakiraan maju anggaran tahun 2027. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Renja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah lembaga pengawas internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada prinsip - prinsip perencanaan pembangunan daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk resiko - resiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah karena perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan beresiko bias dan tidak relevan, sehingga tujuan dan sasaran tersebut tetap dapat tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan rancangan awal Renja;
3. Penyusunan rancangan Renja;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah tahun 2026 yang telah disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. RKPD tahun 2026 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RPJMD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPJMD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Karanganyar. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Terakhir, Renja adalah sebagai wadah

sinkronisasi untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2026. Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja ini adalah:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat Daerah sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas
5. Inspektorat Daerah;
6. Agar Inspektorat Daerah mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja agar substansi pada bab selanjutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyusunan renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Derah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Struktur Organisai Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan capaian *output* kegiatan pada Tahun 2024 yang dilengkapi dengan visual hasilnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, dan penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan.

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat Daerah 2025-2029.

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjabarkan tentang perumusan program dan kegiatan diserta target kinerja dan pendanaan serta penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sistem perencanaan merupakan rangkaian/tahapan kegiatan yang bersifat menerus/berputar, pada dasarnya melalui empat tahap, yaitu: Tahap 1: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; Tahap 2: Merumuskan keadaan sekarang/saat ini, Tahap 3: Mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi, Tahap 4: Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 maka diperlukan informasi kondisi sebelumnya / saat ini (evaluasi) dan peluang dan tantangan di tahun depan (2027). Evaluasi menjadi salah satu tahapan dalam upaya merumuskan keadaan saat ini dan mengindentifikasi kemudahan dan hambatan dimilik serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan tahun berjalan (2025) bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian target, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan renja tersebut, untuk diljadikan bahan/acuan dalam perencanaan tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi program dan pelaksanan kegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

Pelaksanaan kegiatan maupun koordinasi dengan pihak lain telah dilaksanakan secara *offline*, walaupun tetap ada yang dilakukan secara *daring* tergantung pada situasi, kondisi penyelenggaraan, peserta dan urgensi kegiatan tersebut.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Inspektorat Daerah telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Inspektorat Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
						RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1					2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat Daerah	15.613.995.267,00	15.313.995.267,00	100	11.889.806.702,00	22.984.806.702,00	193,32
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.613.995.267,00	15.313.995.267,00	100	11.889.806.702,00	22.984.806.702,00	193,32
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	15.613.995.267,00	15.313.995.267,00	100	11.889.806.702,00	22.984.806.702,00	193,32
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.423.233.400,00	13.123.233.400,00	100	10.460.789.577,00	16.559.591.702,00	158,30
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.750.000,00	7.750.000,00	100	4.500.000,00	40.093.250,00	890,96
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100	2.000.000,00	28.000.000,00	1400,00
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.750.000,00	5.750.000,00	100	1.500.000,00	8.993.250,00	599,55
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	3.100.000,00	310,00
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.158.207.500,00	7.158.207.500,00	100	7.736.606.702,00	8.165.575.102,00	105,54
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	7.144.600.000,00	7.144.600.000,0	100	7.729.606.702,0	7.984.606.702,00	103,30

					ASN		0		0		
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.635.700,00	7.635.700,00	100	2.000.000,00	91.722.000,00	4586,10
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	100	1.000.000,00	6.500.000	650,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.115.000,00	4.115.000,00	100	2.000.000,00	31.244.100,00	1562,21
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	428.400,00	428.400,00	100	1.000.000,00	29.197.300,00	2919,73
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	428.400,00	428.400,00	100	1.000.000,00	22.305.000,00	2230,50
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.869.000,00	33.869.000,00	100	10.000.000,00	937.466.000,00	9374,66
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.869.000,00	33.869.000,00	100	10.000.000,00	937.466.000,00	9374,66
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.093.300,00	327.093.300,00	100	226.500.000,00	999.619.545,00	441,33
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.645.000,00	13.645.000,00	100	1.500.000,00	68.166.025,00	4544,40
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.492.000,00	28.492.000,00	100	15.000.000,00	38.136.600,00	254,24
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.336.000,00	30.336.000,00	100	35.000.000,00	62.571.530,00	178,78
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000,00	1.400.000,00	100	1.000.000,00	5.165.760,00	516,58

6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	60.007.000,00	60.007.000,00	100	40.000.000,00	107.001.230,00	267,50
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	55.000.000,00	100	58.600.000,00	151.600.000,00	258,70
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.103.300,00	115.103.300,00	100	75.000.000,00	418.865.000,00	558,49
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.110.000,00	23.110.000,00	100	400.000,00	148.113.400,00	37028,35
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.345.000.000,00	5.045.000.000,00	100	2.010.850.000,00	5.442.318.915,00	270,65
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	300.000.000,00	100	0	775.000.000	-
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0	0	100	5.000.000,00	925.200.000,00	18504,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100	5.850.000,00	642.118.915,00	10976,39
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	100	0	200.000.000,00	-
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	2.600.000.000,00	130,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	100	0	300.000.000	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.674.100,00	146.674.100,00	100	208.428.000,00	419.625.500,00	201,33

6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.024.100,00	36.024.100,00	100	7.400.000,00	12.320.500,00	166,49
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.650.000,00	110.650.000,00	100	130.000.000,00	165.936.000,00	127,64
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	100	71.028.000,00	241.369.000,00	339,82
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.639.500,00	404.639.500,00	100	263.904.875,00	554.893.390,00	210,26
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.637.500,00	315.637.500,00	100	200.000.000,00	460.116.515,00	230,06
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.100.000,00	28.100.000,00	100	9.150.000,00	42.390.000,00	463,28
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.902.000,00	49.902.000,00	100	24.757.500,00	25.203.500,00	101,80
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	100	29.997.375,00	27.183.375,00	90,62
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.747.459.767,00	1.747.459.767,00	100	1.123.730.000,00	4.299.926.750,00	382,65
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.606.609.767,00	1.606.609.767,00	100	998.730.000,00	3.908.580.000,00	391,36
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.471.900,00	81.471.900,00	100	50.000.000,00	614.090.000,00	1228,18
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	271.370.000,00	271.370.000,00	100	175.000.000,00	540.000.000,00	308,57
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	30.983.000,00	30.983.000,00	100	61.000.000,00	390.000.000,00	639,34

6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	109.629.000,00	109.629.000,00	100	98.000.000,00	230.000.000,00	234,69
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	230.091.300,00	230.091.300,00	100	175.000.000,00	507.600.000,00	290,06
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	187.521.567,00	187.521.567,00	100	150.000.000,00	298.987.500,00	199,33
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	695.543.000,00	695.543.000,00	100	289.730.000,00	1.327.902.500,00	458,32
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140.850.000,00	140.850.000,00	100	125.000.000,00	391.346.750,00	313,08
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	45.310.000,00	45.310.000,00	100	50.000.000,00	151.346.750,00	302,69
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.540.000,00	95.540.000,00	100	75.000.000,00	240.000.000,00	320,00
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	443.302.100,00	443.302.100,00	100	305.287.125,00	2.125.288.250,00	696,16
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	83.769.700,00	83.769.700,00	100	85.000.000,00	140.000.000,00	164,71
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	38.166.000,00	38.166.000,00	100	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	45.603.700,00	45.603.700,00	100	45.000.000,00	100.000.000,00	222,22
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	359.532.400,00	359.532.400,00	100	220.287.125,00	1.985.288.250,00	901,23
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	66.999.900,00	66.999.900,00	100	75.000.000,00	340.000.000,00	453,33
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	55.000.000,00	55.000.000,00	100	43.020.000	223.234.000	518,91

					Birokrasi						
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	186.612.500,00	186.612.500,00	100	61.770.000,00	1.229.852.500,00	1991,02
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50.920.000,00	50.920.000,00	100	40.497.125,00	192.201.750,00	474,61

Besar kecilnya input dana setiap sub kegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap sub kegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Inspektorat Daerah untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 193,32%.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang banyak, Inspektorat Daerah memerlukan dukungan anggaran agar dapat berjalan dengan baik dan target *output* tercapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di Pemerintah Daerah. Kabupaten Karanganyar dengan APBD sebesar Rp 2.369.939.114.100,00 maka sekurang-kurangnya 0,5 persen dari total belanja untuk pengawasan. Atas dasar hal tersebut, Inspektorat Daerah pada Penetapan 2025 telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 22.984.806.702,00 Jumlah anggaran tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Inspektorat Daerah yang semula terpenuhi sejumlah Rp 22.984.806.702,00 atau 193,32% harus berkurang sebesar Rp. 2.868.310.312,00 sehingga pagu anggaran Inspektorat Daerah tahun 2025 adalah Rp 20.116.496.952,00 atau 169,19% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi APBD di Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan 2025
(Triwulan II)

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	2024			2025 (TRIWULAN II)		
						APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1					2	3	4	5	6	7	8
					Inspektorat Daerah	15.613.995.267,00	14.779.109.065,00	94,65	22.984.806.702,00	3.328.607.230,00	14,48
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	15.613.995.267,00	14.779.109.065,00	94,65	22.984.806.702,00	3.328.607.230,00	14,48
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	15.613.995.267,00	14.779.109.065,00	94,65	22.984.806.702,00	3.328.607.230,00	14,48
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.423.233.400,00	12.775.841.232,00	95,18	16.559.591.702,00	2.951.676.980,00	17,82
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.750.000,00	7.750.000,00	100,00	40.093.250,00	14.520.400,00	36,22
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	28.000.000,00	13.552.000,00	48,40
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00	8.993.250,00	-	0,00
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	3.100.000,00	968.400,00	31,24
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	7.158.207.500,00	7.142.427.635,00	99,78	8.165.575.102,00	2.101.944.538,00	25,74

					Daerah						
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.144.600.000,00	7.128.870.235,00	99,78	7.984.606.702,00	2.091.122.538,00	26,19
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.635.700,00	7.585.700,00	99,35	91.722.000,00	750.000,00	0,82
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.000.000,00	999.900,00	99,99	6.500.000	0	0,00
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.115.000,00	4.115.000,00	100,00	31.244.100,00	7.872.000,00	25,20
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	428.400,00	428.400,00	100,00	29.197.300,00	2.200.000,00	7,53
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	428.400,00	428.400,00	100,00	22.305.000,00	-	0,00
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.869.000,00	33.869.000,00	100,00	937.466.000,00	550.000,00	0,06
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.869.000,00	33.869.000,00	100,00	937.466.000,00	550.000,00	0,06
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	327.093.300,00	316.152.977,00	96,66	999.619.545,00	68.552.892,00	6,86
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.645.000,00	13.610.878,00	99,75	68.166.025,00	-	0,00
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.492.000,00	27.767.000,00	97,46	38.136.600,00	5.162.500,00	13,54
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.336.000,00	30.335.800,00	100,00	62.571.530,00	18.160.800,00	29,02
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000,00	1.380.000,00	98,57	5.165.760,00	345.000,00	6,68

6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	60.007.000,00	59.967.950,00	99,93	107.001.230,00	12.680.800,00	11,85
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.000.000,00	54.975.000,00	99,95	151.600.000,00	-	0,00
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.103.300,00	105.006.349,00	91,23	418.865.000,00	31.328.692,00	7,48
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	23.110.000,00	23.110.000,00	100,00	148.113.400,00	875.100,00	0,59
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.345.000.000,00	4.765.504.620,00	89,16	5.442.318.915,00	591.200.000,00	10,86
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	290.190.000	96,73	775.000.000	591.200.000	76,28
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0	0	-	925.200.000,00	-	0,00
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	44.805.000,00	99,57	642.118.915,00	-	0,00
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0	0	-	200.000.000,00	-	0,00
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	4.430.509.620,00	88,61	2.600.000.000,00	-	0,00
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	-	300.000.000	0	0,00
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.674.100,00	114.437.093,00	78,02	419.625.500,00	62.904.650,00	14,99
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.024.100,00	31.818.155,00	88,32	12.320.500,00	2.614.800,00	21,22
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	110.650.000,00	82.618.938,00	74,67	165.936.000,00	23.229.850,00	14,00

					Daya Air dan Listrik						
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	-	241.369.000,00	37.060.000,00	15,35
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	404.639.500,00	395.699.907,00	97,79	554.893.390,00	112.004.500,00	20,18
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	315.637.500,00	306.779.907,00	97,19	460.116.515,00	103.025.500,00	22,39
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.100.000,00	28.100.000,00	100,00	42.390.000,00	7.720.000,00	18,21
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.902.000,00	49.820.000,00	99,84	25.203.500,00	-	0,00
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	27.183.375,00	1.259.000,00	4,63
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.747.459.767,00	1.593.411.660,00	91,18	4.299.926.750,00	339.983.750,00	7,91
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.606.609.767,00	1.452.926.660,00	90,43	3.908.580.000,00	316.459.250,00	8,10
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.471.900,00	77.951.900,00	95,68	614.090.000,00	-	0,00
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	271.370.000,00	205.175.000,00	75,61	540.000.000,00	216.890.000,00	40,16
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	30.983.000,00	30.983.000,00	100,00	390.000.000,00	-	0,00
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	109.629.000,00	104.925.250,00	95,71	230.000.000,00	21.279.250,00	9,25

6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	230.091.300,00	222.861.300,00	96,86	507.600.000,00	63.150.000,00	12,44
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	187.521.567,00	163.060.350,00	86,96	298.987.500,00	-	0,00
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	695.543.000,00	647.969.860,00	93,16	1.327.902.500,00	15.140.000,00	1,14
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	140.850.000,00	140.485.000,00	99,74	391.346.750,00	23.524.500,00	6,01
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	45.310.000,00	45.310.000,00	100,00	151.346.750,00	0,00	0,00
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	95.540.000,00	95.175.000,00	99,62	240.000.000,00	23.524.500,00	9,80
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	443.302.100,00	409.856.173,00	92,46	2.125.288.250,00	36.946.500,00	1,74
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	83.769.700,00	75.201.650,00	89,77	140.000.000,00	21.989.250,00	15,71
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	38.166.000,00	34.133.950,00	89,44	40.000.000,00	-	0,00
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	45.603.700,00	41.067.700,00	90,05	100.000.000,00	21.989.250,00	21,99
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	359.532.400,00	334.654.523,00	93,08	1.985.288.250,00	14.957.250,00	0,75
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	66.999.900,00	65.291.650,00	97,45	340.000.000,00	-	0,00

6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	223.234.000	4.100.000	1,84
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	186.612.500,00	179.674.750,00	96,28	1.229.852.500,00	6.857.250,00	0,56
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	50.920.000,00	34.688.123,00	68,12	192.201.750,00	4.000.000,00	2,08

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 15.613.995.267,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 14.779.109.065,00 atau 94,65 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar Rp 11.236.644.049,00 atau 90, 23%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 3.328.607.230,00 atau 14,48 % dari pagu anggaran Rp. 22.984.806.702,00 namun jika dihitung berdasarkan pagu efisiensi yang sebesar Rp. 20.116.496.952,00 maka persentase realisasi adalah 16,54%.

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program
Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.171.594.356	8.482.888.615	92	13.423.233.400	12.775.841.232	95,18
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.267.725.000	1.872.260.020	83	1.747.459.767	1.593.411.660	91,18
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.014.540.000	885.823.435	87	500.382.400	475.139.523	94,95

Serapan anggaran selama 2 tahun terakhir belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut Inspektorat Daerah perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.1.2. Evaluasi Kinerja (Indikator)

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah dengan menggunakan klasifikasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI	KRITERIA
1	2	3
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan baik sasaran dan program adalah seperti dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
11.2	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79	71,5	90,50
12.2	Meningkatkan maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	3	3,151	105,03
		Kapabilitas APIP	Level	3	3	100

Berdasarkan tabel 2.5 kinerja Inspektorat Daerah tahun 2024 masuk kriteria Sangat Tinggi (96,68%) dari 3 indikator sasaran terdapat 1 yang tidak tercapai 100% yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP) 71,5 dengan kinerja 90,50 dikarenakan :

1. Dokumen Perencanaan Kinerja yang hanya sebagian besar menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan *(cascading)*;
2. Belum adanya pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
3. Belum adanya pedoman pemantauan terkait perkembangan/kemajuan pencapaian kinerja SKPD.

Sedangkan untuk capaian program di Inspektorat Daerah tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Hasil Capaian Indikator Program Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	95	95	100
		Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	10	10	100
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	95	95	100
		Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
		Jumlah LHR LKPD	LHR LKPD	1	1	100
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	100	100
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	100	100	100
		Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	100

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 2.6 diketahui bahwa kinerja program yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah dengan persentase mencapai 100% dari target yang ditetapkan masuk kriteria Sangat Tinggi.

Peningkatan pengawasan adalah dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* di Kabupaten Karanganyar

dilaksanakan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Karanganyar antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan indikator dengan capaian kinerja yang pada umumnya baik, terutama Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN (yang dapat dilakukan secara daring); tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas; SP4N LAPOR!); Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi dan Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif.

b. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun 2023. Evaluasi dilakukan untuk melihat kinerja Inspektorat Daerah lebih baik (naik) atau lebih jelek (turun). Hasil ini kemudian dianalisa untuk diketahui penyebabnya sehingga dapat diantisipasi untuk rencana tahun berikutnya. Secara ringkas evaluasi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KINERJA 2023	KINERJA 2024	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3	-	
Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	-	71,5	
Meningkatkan maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	-	3,151	
	Kapabilitas APIP	Level	-	3	

Berdasarkan Tabel 2.7 tersebut kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah **Sangat Tinggi** dimana target indikator Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP dapat tercapai. Terdapat perbedaan sasaran dikarenakan dasar penyusunan Renstra dan Renja berbeda, tahun 2023 menggunakan dasar RPJMD Tahun 2018-2023, sedangkan tahun 2024 menggunakan RPD Tahun 2024-2026.

Inspektorat daerah sejak tahun 2023 telah mencapai level 3 untuk kapabilitas APIP. Level kapabiltas ini menggambarkan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang efektif, ditunjang oleh kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP. APIP mampu memberikan layanan *compliance auditing*, *performance auditing* dan *practice advisory*, namun meskipun telah mencapai level 3, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain :

1. Merencanakan dan menambah pelaksanaan pelatihan SDM APIP terutama berupa sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi terkait pengelolaan risiko serta menyusun road map pemenuhan SDM sesuai ketentuan Surat Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-662/K/JF/2023 tanggal 15 September 2023 hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 serta mengusulkan pemenuhannya ke Kepala Daerah dan pihak terkait;
2. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan resiko dan mendorong APIP meningkatkan dan mengimplementasikan kapabilitas APIP level 3 dalam rangka memberi kontribusi perbaikan tata Kelola, pengelolaan resiko dan pengendalian intern organisasi.

Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan telah berada pada level 3 sejak tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal, namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

1. terkait implementasi pengendalian intern pada seluruh unit kerja, belum sepenuhnya diimplentasikan secara konsisten serta belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan resiko;
2. dalam hal pencapaian tujuan, terdapat target yang belum dicapai secara optimum dan pengukuran kinerja belum didukung data yang handal;
3. kurangnya kompetensi pegawai khususnya dalam identifikasi resiko serta penyusunan rencana tindak pengendalian;
4. perlunya peningkatan terhadap kualitas pengelolaan resiko yang meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian resiko baik resiko strategis maupun operasional serta meningkatkan kualitas reviu majamen resiko.

c. Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan tahun terakhir (Renstra/ RPD)

Pada bagian ini adalah evaluasi yang dilakukan dengan cara membandingkan kinerja tahun 2024 dengan target tahun terkahir (tahun 2026) Renstra Inspektorat Daerah atau RPD tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun awal Renstra sehingga hasil Evaluasi tahun 2024 juga merupakan pijakan awal tercapai tidaknya hasil akhir Renstra. Gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Tabel 2.8
Perbandingan Kinerja Sasaran Strategis Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

NO	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026	STATUS
1	2	3	4	5	6
112	Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	71,5	80	Belum tercapai
122	Meningkatkan maturitas SPIP	Maturitas SPIP	3,151	3	Tercapai
		Kapabilitas APIP	3	3	Tercapai

Tabel 2.9
Perbandingan Kinerja Program Realisasi Tahun 2024 dan Target 2026 (Akhir RPD)

NO	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET 2026	STATUS
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	95	95	Tercapai
		Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	10	8	Belum Tercapai
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	95	95	Tercapai
		Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100	100	Tercapai
		Jumlah LHR LKPD	1	1	Tercapai
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	100	100	Tercapai
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	100	100	Tercapai
		Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100	100	Tercapai

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tabel 2.8 dan 2.9, diketahui bahwa kinerja Organisasi Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah sebagian besar sudah tercapai meskinpun tidak dapat dijadikan pedoman capaian akhir tahun 2026, karena indikator bersifat absolut (target tahunan berdiri sendiri) tidak tergantung nilai pada tahun sebelumnya atau tidak akan mempengaruhi nilai tahun berikutnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan. Selain itu, disebutkan bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdiri dari terdapat 7 jabatan struktural terdiri dari 1 (satu) jabatan eselon II.b, 6 (enam) jabatan eselon III.a, dan 2 (dua) jabatan eselon IV.a.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2023 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Merujuk pada norma dan standar pelayanan pada BPKP dan APIP lainnya.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar s/d tahun 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja / Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) (2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun (n-1 = 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1 = 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11=10/4
					Inspektorat Daerah									
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6	01				INSPEKTORAT DAERAH									
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD								
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

					Perangkat Daerah	Perangkat Daerah								
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	50
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	200
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	50 Orang	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	100	48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	96
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	80 PAK	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100

						Pelaksanaan Akuntansi SKPD								
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Dokumen	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	14 Laporan	100
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mengikuti bimtek/diklat/capacity building	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 orang	12 Bulan	48 orang	48 orang	100	144 orang	144 orang	100
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	0	2.0	000	Penyediaan	Jumlah Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100

		1	6	3	Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1500 Box	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen	12 Bulan	1200 Dokumen	1200 Dokumen	100	1200 Dokumen	1200 Dokumen	100
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kebutuhan barang penunjang pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

						urussan pemerintah								
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100	-	-	-
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	-
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	5 Unit	5 Unit	500
6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
6	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	-
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	20 Unit	20 Unit	100	-	-	-
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemda yang siap pakai	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	24 Unit	27 Unit	27 Unit	100	27 Unit	27 Unit	112,5
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	1 Paket	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Paket	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	20 Unit	1 Paket	20 Unit	20 Unit	100	20 Unit	20 Unit	100

						Dipelihara/Direhabilitasi								
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1								
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	16 laporan	16 LHP	16 laporan	16 laporan	100	4 laporan	4 laporan	25
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	56 Laporan	56 Obrik	56 Laporan	56 Laporan	100	32 Laporan	32 Laporan	5,63
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	42 Laporan	41 LHP	42 Laporan	42 Laporan	100	42 Laporan	42 Laporan	102,44
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	41 Laporan	41 LHP	41 Laporan	41 Laporan	100	41 Laporan	41 Laporan	100
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	32 Laporan	32 Obrik	32 Laporan	32 Laporan	100	44 Laporan	44 Laporan	137,5
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 kesepakatan	12 Laporan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak	Jumlah Dokumen Hasil	42 Dokumen	41 Obrik	42 Dokumen	42 Dokumen	100	42 Dokumen	42 Dokumen	102,44

					Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	20 Laporan	20 Kasus	20 Laporan	20 Laporan	100	25 Laporan	25 Laporan	125
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	10 LHP	12 Laporan	12 Laporan	100	20 Laporan	20 Laporan	200
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis 2. Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi 3. Persentase Asistensi/Pendampingan								

						Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa								
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase Terwujudnya Kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	level (3)	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1 PKPT	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam Urusan Desa	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41 Perangkat Daerah	Seluruh OPD	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	100	41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	100
6	01	0	2.0	000	Pendampingan,	Jumlah	5 Perangkat	12 OPD	5 Perangkat	5	100	5 Perangkat	5	41,67

		3	2	2	Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Daerah		Daerah	Perangkat Daerah		Daerah	Perangkat Daerah	
6	01	0 3	2.0 2	000 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	7 Laporan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	12 Kegiatan	12 Kegiatan	171,43
6	01	0 3	2.0 2	000 4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5 Perangkat Daerah	1 Kegiatan	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	100	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100

Table 2.11
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Indeks Kinerja Kunci (IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023 (thn-2)	2024 (thn-1)	2025 (thn-n)	2026 (thn+1)	2024 (thn-2)	2025 (thn-1)	2026 (thn-0)	2027 (thn+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Nilai SAKIP OPD	-	-	-	79							
2	Maturitas SPIP	-	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	-	-	3	-	3	3	
3	Kapabilitas APIP	-	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	-	3	3	
4	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	-	-	-	-	3	3	2,856	-	3	3	
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	-	-	-	-	82,75	83,20	82,375	-	83,20	83,60	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa risiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Inspketorat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi organisasi dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kepemerintahan yang bersih (*clean government*). Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga harus dapat berperan sebagai pemberi konsultan dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

Identifikasi isu - isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
3. Tuntutan peningkatan terhadap Kapabilitas APIP;
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dimana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan karena beberapa alasan diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan pada satuan kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganya.
2. Untuk memperoleh gambaran penyebab adanya perbedaan tersebut sesuai rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan yang cocok namun besarannya berbeda.

Dibandingkan dengan rancangan awal RKPD 2025, maka RENJA tahun 2026 tidak ada perbedaan dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian amat penting untuk menyusun RENJA PD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.12
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

RANCANGAN AWAL RKPD																HASIL ANALISIS KEBUTUHAN												Catatan Penting
Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Inspektorat Daerah								22.984.806.702,00			Inspektorat Daerah								22.984.806.702,00		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								22.984.806.702,00			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								22.984.806.702,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								22.984.806.702,00			INSPEKTORAT DAERAH								22.984.806.702,00		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14.907.500.000,00			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14.907.500.000,00		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80.000.000,00			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80.000.000,00		
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Dokumen	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Dokumen	100 %	50.000.000,00		
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Laporan	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penggganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Laporan	100 %	10.000.000,00		

							Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Laporan	100 %	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Laporan	100 %	20.000.000,00	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9.750.000.000,00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9.750.000.000,00	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	65 Orang/bulan	100 %	9.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	65 Orang/bulan	100 %	9.500.000.000,00	
6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Dokumen	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Dokumen	100 %	150.000.000,00	

6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Dokumen	100 %	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Dokumen	100 %	10.000.000,00	
6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD												Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Dokumen	100 %	35.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Dokumen	100 %	35.000.000,00	
6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Laporan	100 %	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Laporan	100 %	30.000.000,00	
6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwula	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	14 Laporan	100 %	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	14 Laporan	100 %	25.000.000,00	

							nan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.500.000.000,00			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.500.000.000,00	
6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	65 Orang	100 %	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	65 Orang	100 %	1.500.000.000,00	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.315.000.000,00			Administrasi Umum Perangkat Daerah							1.315.000.000,00	
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Paket	100 %	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Paket	100 %	70.000.000,00	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik	Terwujudnya pelayanan administra	Kab. Karanganyar, Semua	73 Nilai	1 Paket	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administr	Kab. Karanganyar, Semua	73 Nilai	1 Paket	100 %	100.000.000,00	

							Kantor yang Disediakan	si perkantoran	Kecamatan, Semua Kel/Desa					Alokasi Umum				asi perkantoran	Kecamatan, Semua Kel/Desa					
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Paket	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Paket	100 %	100.000.000,00	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	2 Dokumen	100 %	5.000.000,00	
6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										Penyediaan Bahan/Material									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Paket	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1 Paket	100 %	200.000.000,00	
6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	200.000.000,00	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan	Terwujudnya pelayanan	Kab. Karanganyar,	73 Nilai	12 Laporan	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa	Terwujudnya pelayanan	Kab. Karanganyar,	73 Nilai	12 Laporan	100 %	500.000.000,00	

							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	administrasi perkantoran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Dana Alokasi Umum			n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	administrasi perkantoran	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
						Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1200 Dokumen	100 %	140.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	1200 Dokumen	100 %	140.000.000,00	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.100.000.000,00		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.100.000.000,00	
6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	500.000.000,00	
6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										Pengadaan Mebel									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	100.000.000,00	
6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	200.000.000,00	

6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	100.000.000,00	
6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	-	-	200.000.000,00	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								412.500.000,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											412.500.000,00	
6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	12.500.000,00	
6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																									
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	200.000.000,00	

							kan																
6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Laporan	100 %	200.000.000,00	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								750.000.000,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								750.000.000,00	
6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	29 Unit	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	29 Unit	100 %	500.000.000,00	
6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Unit	100 %	100.000.000,00	
6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerinta	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	73 Nilai	1 Unit	100 %	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerinta	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua	73 Nilai	1 Unit	100 %	50.000.000,00	

							Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	h Daerah yang siap pakai	Kel/Desa								h Daerah yang siap pakai	Kel/Desa					
6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
						Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Unit	100 %	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Sakip OPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang siap pakai	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73 Nilai	12 Unit	100 %	100.000.000,00	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								4.737.306.702,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								4.737.306.702,00	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								4.347.306.702,00		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								4.347.306.702,00	
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah								
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	4 Laporan	100 %	600.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	4 Laporan	100 %	600.000.000,00	
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	32 Laporan	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	32 Laporan	100 %	500.000.000,00	

								Pemerintahan dan Pelayanan Publik										Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja										Reviu Laporan Kinerja								
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	42 Laporan	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	42 Laporan	100 %	500.000.000,00	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan										Reviu Laporan Keuangan								
						LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	42 Laporan	100 %	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		LHR LKPD Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	42 Laporan	100 %	300.000.000,00	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa										Pengawasan Desa								
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyeleng	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	44 Laporan	100 %	797.306.702,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyeleng	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	44 Laporan	100 %	797.306.702,00	

								garaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									garaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal										Kerja Sama Pengawasan Internal							
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	1 Kesepakatan	100 %	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	1 Kesepakatan	100 %	300.000.000,00	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	42 Dokumen	100 %	1.350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	42 Dokumen	100 %	1.350.000.000,00	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								390.000.000,00		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							390.000.000,00	
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah							
						Tindak lanjut	Jumlah Lapora	Terwujudnya	Kab. Karangan	95,30 %	25 Laporan	100 %	150.000.000,00	Dana Transfer		Tindak lanjut	Jumlah Laporan	Terwujudnya	Kab. Karangan	95,30%	25 Laporan	100 %	150.000.000,00	

						rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	n Penyelesaian Kerugian Negara /Daerah yang Ditangani	peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Umum-Dana Alokasi Umum		rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu										Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								
						Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30 %	16 Laporan	100 %	240.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95,30%	16 Laporan	100 %	240.000.000,00	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								3.340.000.000,00		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							3.340.000.000,00	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								450.000.000,00		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							450.000.000,00	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan								
						Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	1 Rekomendasi	100 %	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	1 Rekomendasi	100 %	200.000.000,00	

						Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa										Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa								
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan										Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan								
						Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	1 Rekomendasi	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	1 Rekomendasi	100 %	250.000.000,00	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							2.890.000.000,00			Pendampingan dan Asistensi							2.890.000.000,00	
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah										Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								
						Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakuk	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua	35 Perangkat Daerah 59 %	41 perangkat daerah	100 %	340.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaia	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua	35 Perangkat Daerah	41 perangkat daerah	100 %	340.000.000,00	

						n sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	an Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	bersih dan akuntable	Kel/Desa	7 %						n sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Urusan Pemerintahan Daerah	bersih dan akuntable	Kel/Desa	59 % 7 %			
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi										Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
						Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	5 perangkat daerah	100 %	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	5 perangkat daerah	100 %	250.000.000,00	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi										Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
						Perangkat daerah	Jumlah Kegiata	Terwujudnya	Kab. Karangan	35 Peran	12 Kegiatan	100 %	1.800.000.000,00	Dana Transfer		Perangkat daerah	Jumlah Kegiatan	Terwujudnya	Kab. Karangan	35 Pera	12 Kegiatan	100 %	1.800.000.000,00	

						memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	n Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	gkat Daerah 59 % 7 %				Umum-Dana Alokasi Umum		memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ngkat Daerah 59 % 7 %				
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas										Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
						Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	5 perangkat daerah	100 %	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/ Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	5 perangkat daerah	100 %	500.000.000,00	

TOTAL	**22.984.806.702,00**										**22.984.806.702,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi menjadi *leading sector* atau *coordinator* pada urusan pengawasan.

Usulan program dalam Renja Inspektorat Daerah dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dijadikan acuan kegiatan dalam rancangan Renja. Dari kelompok masyarakat atau desa dan kelurahan maupun kecamatan sampai saat ini belum ada yang masuk yang melalui musrenbang ataupun proposal.

Tabel 2.13
Usulan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 380 ayat (1) Bupati/walikota sebagai Kepala Daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengawasan yang terkait Keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD) sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementrian dan/atau lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Berdasarkan Pasal 385 ayat (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Ayat (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan masyarakat setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada ayat (4). Jika berdasar hasil pemeriksaan ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pasal 378 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, kelembagaan daerah kabupaten/kota, kepegawaian pada Perangkat Daerah kabupaten/kota, keuangan daerah kabupaten/kota, pembangunan daerah kabupaten/kota, pelayanan publik di Daerah kabupaten/kota, kerja sama daerah kabupaten/kota,

kebijakan Daerah kabupaten/kota, bupati/walikota dan DPRD kabupaten /kota, dan bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu. Pengawasan teknis adalah pengawasan terhadap teknis pelaksanaan substansi Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah kabupaten/kota.

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Sampai saat ini Inspektorat Daerah sudah melaksanakan pengawasan yang terkait langsung dengan kebijakan nasional diantaranya peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Saber Pungli.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, diperlukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggungjawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan

domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah **"**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan" yang akan dicapai dengan tiga sasaran pembangunan daerah, meliputi :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;

5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029, meskipun sampai saat Renja di susun masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

6. Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
7. Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
8. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
9. Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
10. Meningkatnya riset dan inovasi;
11. Meningkatnya kondusivitas wilayah;
12. Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
13. Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
14. Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
15. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
16. Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Internalisasi Nilai Integritas dalam Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Sosial, dan Pelestarian Budaya.*** Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur. Mewujudkan kondusivitas sosial dengan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, kewaspadaan dini, dan partisipasi pembangunan. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal dengan menjaga seni, budaya, cagar budaya, serta meningkatkan keterlibatan generasi muda.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan

dan anak dari kekerasan;

9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Rasio Gini: 0,342;
3. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,57;
6. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
7. Nilai SAKIP: 71,00;
8. Maturitas SPIP: 3,85;
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
10. Kontribusi Penurunan Emisi GRK: 5.589.731,15;
11. Kasus Konflik SARA: 0;
12. Angka Kriminalitas: 178;
13. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
14. Kapabilitas inovasi: 3;
15. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah.

Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat konkrit dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan maka arah yang akan dituju semakin jelas dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasikan indikator pencapaiannya yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian disertai dengan targetnya masing-masing.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mendukung Misi Bupati Karanganyar ke 4 yaitu **"Mengembangkan Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik** mendukung Tujuan Daerah ke-1 yakni **"Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik"** serta mendukung Sasaran daerah ke-1 yakni **"Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah"**, maka tujuan Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah **"Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel"** dengan indikator kinerja Indeks Integritas Nasional.

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta

mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu :

a. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
   1) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi; dan
   2) Kapabilitas APIP.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM).

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian (2026)
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel			Indeks Integritas Nasional	Indeks	78,00
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83,20
		a. Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Nilai	73
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3
			2. Kapabilitas APIP	Level	3
		a. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	%	95,3
		b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan	%	59

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian
			Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi		
		Dan Asistensi	Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa	%	7
			Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis	Jumlah	35

3.3 Tantangan dan Peluang Inspektorat Daerah

Dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan beban tugas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah Daerah (Inspektorat Daerah) semakin luas dan kompleks, disamping itu Kabupaten Karanganyar memiliki wilayah yang luas sehingga pelaksanaan pengawasan yang memadai dengan beban kerja yang dihadapi menjadi kurang optimal, disamping itu pula peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang dan berubah-rubah khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, berpengaruh terhadap pemahaman para *stakeholder* baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki tugas kontrol (pengawasan). Adapun secara rinci tantangan terhadap pengembangan pelayanan di bidang pengawasan dan pembinaan atas tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan yang tidak optimal mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, yang seharusnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

   Penyebab pengawasan yang tidak optimal antara lain :

   a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
      Rendahnya kapasitas dan kompetensi SDM dalam bidang pengawasan dapat menghambat efektivitas pengawasan, terutama di tingkat pemerintahan daerah.
   b. Lemahnya komunikasi dan koordinasi.
      Kurangnya komunikasi yang efektif antarpihak yang terlibat dalam pengawasan bisa menyebabkan kesalahpahaman dan kegagalan dalam mengidentifikasi masalah.
   c. Regulasi yang tumpang tindih.
      Adanya peraturan yang saling bertentangan atau tidak jelas dapat menyulitkan pelaksanaan pengawasan dan menciptakan celah bagi penyimpangan.
   d. Penggunaan teknologi yang tidak memadai.
      Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi dapat menghambat proses pengumpulan data dan analisis yang akurat dan tepat waktu.

   Dampak dari pengawasan yang tidak optimal antara lain :

   a. Ketidaktercapaian tujuan.
      Jika pengawasan tidak berjalan optimal, target dan tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai secara efisien.
   b. Penyalahgunaan anggaran dan inefisiensi.
      Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan praktik yang tidak efisien dalam pengelolaan keuangan.
   c. Peningkatan risiko korupsi**.**
      Celah pengawasan yang lemah sering dimanfaatkan untuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
   d. Rendahnya kualitas audit.
      Kualitas hasil audit dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kompetensi, independensi, dan pengalaman auditor.

2. Pengawasan yang dilakukan belum efektif menyentuh akar masalah sehingga solusi yang diberikan kurang tepat sasaran.

   Kurangnya efektivitas pengawasan dan solusi yang tidak tepat sasaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yang berakar pada masalah-masalah berikut :

   a. Standar tidak akurat.

      Standar atau tolok ukur kinerja yang ditetapkan mungkin terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak jelas. Akibatnya, pengawasan tidak dapat secara akurat mengidentifikasi penyimpangan atau masalah yang sebenarnya terjadi.

   b. Fokus yang salah.

      Pengawasan terlalu fokus pada aspek administratif atau prosedural, dan mengabaikan kinerja inti atau hasil dari suatu kegiatan. Hal ini membuat pengawasan menjadi tidak relevan dengan pencapaian tujuan utama.

   c. Keterlambatan laporan

      Laporan pengawasan disampaikan terlalu lama, sehingga tim manajemen tidak dapat melakukan perbaikan secara tepat waktu.

   d. Objektivitas yang kurang

      Pengawas mungkin tidak bersikap objektif dan tidak teliti, sehingga hasil laporan bias atau tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

   e. Kurangnya kemampuan dan fleksibilitas

      Pengawas tidak memiliki keterampilan yang memadai, atau sistem pengawasan terlalu kaku dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

   f. Tidak adanya tindakan korektif.

      Pengawasan hanya berhenti pada penemuan masalah dan tidak diikuti dengan tindakan perbaikan yang jelas dan terarah.

   g. Kurangnya koordinasi

      Ada kesenjangan antara pengawas dan pihak yang diawasi, atau antartim pengawas. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan pemahaman yang berbeda terhadap masalah dan solusi.

3. Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan *good governance*.

   Penyebab kurang optimalnya pengawasan birokrasi, antara lain :

   a. Lemahnya pengawasan internal, yang meliputi :
      1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kompetensi membuat APIP sulit mengimbangi kompleksitas masalah dan cepatnya perkembangan teknologi dalam birokrasi.
      2) Fungsi audit internal yang tidak strategis sehingga banyak kasus korupsi tidak terdeteksi secara optimal.
   b. Pola pikir dan budaya birokrasi, yang meliputi :
      1) Patologi birokrasi.
         Sikap kaku, lamban, eksklusif, dan tertutup masih mendominasi mentalitas birokrasi. Hal ini menyebabkan pengawasan menjadi sulit dilakukan dan terhambat.
      2) Budaya transaksional.

Kepemimpinan yang transaksional membuat pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik, yang berujung pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

3) Intervensi politik.
Elite politik sering kali mengintervensi birokrasi untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga birokrasi tidak bisa netral dan mandiri.

c. Regulasi dan sistem yang tidak memadai, yang meliputi :

1) Kurangnya pemahaman regulasi.
Banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak memahami secara menyeluruh peraturan yang terkait dengan pelayanan publik, termasuk standar layanan yang ditetapkan.

2) Sistem informasi yang belum terintegrasi.
Digitalisasi birokrasi belum sepenuhnya terintegrasi secara *real-time* di semua sektor. Ada ketimpangan dalam penerapan sistem, di mana beberapa sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan justru mengalami pemangkasan anggaran saat pengawasan digital difokuskan pada sektor nonprioritas.

3) Mekanisme pengaduan yang tidak efektif.
Masyarakat masih sulit untuk berpartisipasi dalam pengawasan karena mekanisme pengaduan yang ada tidak responsif atau tidak mudah diakses.

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Daerah.
   Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
   Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.
   Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.
3. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.
   Inspektorat Daerah telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Inspektorat Daerah mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Inspektorat Daerah masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, untuk Urusan Pengawasan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD dengan
Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR
1	2	3	4	5
1.	TJ 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1): Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel		Indeks Integritas Nasional
			Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
				Kapabilitas APIP
			Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Misi (4) : Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik T (1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. S (1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel.				Indeks Integritas Nasional.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan: 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; 3) Reviu Laporan Kinerja; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Pengawasan Desa; 6) Kerja Sama Pengawasan Internal; 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan : 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :	
			Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern dalam mencegah dan menangani korupsi.	Tingkat efektivitas pengendalian korupsi.	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.		
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan efektivitas pengawasan.	Penilaian atas tingkat kematangan dan efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.	Kapabilitas APIP.		

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Perumusan Program dan Kegiatan diserta Target dan Pendanaan

Dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam usulan renja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 diproyeksi bersumber dari dari Dana Alokasi Umum (DAU). Proyeksi pendanaan tersebut merupakan usulan SKPD yang bersumber dari dokumen perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 dapat dijelaskan melaui uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
   2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
   3) Evaluasi Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
   2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
   3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
   4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
   5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
   6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
   2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
   5) Penyediaan Bahan/Material;
   6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
   7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
   8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
   1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
   2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
   3) Reviu Laporan Kinerja;
   4) Reviu Laporan Keuangan;
   5) Pengawasan Desa;
   6) Kerjasama Pengawasan Internal;
   7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
   1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
   2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
   1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
   2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
b. Pendampingan dan Asistensi.
   1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
   2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
   3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan yang direncanakan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan dengan didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Hal ini dikarenakan seluruh target kegiatan yang akan dilaksanakan sudah diperhitungkan dengan matang dan sesuai dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra.

Adapun rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja program (*outcomes*)/kegiatan (*output*) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 adalah sebagaimana Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Inspektorat Daerah						22.984.806.702,00							22.984.806.702,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						22.984.806.702,00							22.984.806.702,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH						22.984.806.702,00							22.984.806.702,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	-			73 Nilai	14.907.500.000,00						73 Nilai	14.907.500.000,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan	-			100 %	80.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	100 %	80.000.000,00	
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	2 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	2 Laporan	20.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Cakupan	-			100 %	9.750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola	Inspektorat Daerah	100 %	9.750.000.000,00	

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan				
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	9.500.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	65 Orang/bulan	9.500.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	2 Dokumen	150.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Dokumen	10.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
							Jumlah Dokumen				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Karangany	DANA ALOKA	Memperkuat reformasi	Penguatan Landasan Tata	Inspektorat Daerah	1 Dokumen	35.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH

							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						ar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SI UMUM (DAU)	politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan				
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	25.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	14 Laporan	25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase ASN yang mengikuti bitek/diklat/capacity building	-			100 %	1.500.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	100 %	1.500.000.000,00	
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				65 Orang	1.500.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	65 Orang	1.500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.315.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	100 %	1.315.000.000,00	
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam	Inspektorat Daerah	1 Paket	70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan			
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	100.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1 Paket	100.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	100.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1 Paket	100.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material													
							Jumlah Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kab.	DANA	Memperkuat	Penguatan	Inspektorat	1 Paket	200.000.000,00	INSPEKTOR

							Bahan/Material yang Disediakan						Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	ALOKA SI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Daerah			AT DAERAH
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1200 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola	Inspektorat Daerah	1200 Dokumen	140.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH

														narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan				
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urussan pemerintah	-			100 %	1.100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	100 %	1.100.000.000,00	
	6	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	500.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	0 Unit	500.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	100.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	0 Unit	100.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	200.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	0 Unit	200.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	100.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	0 Unit	100.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	200.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	0 Unit	200.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	412.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan	Inspektorat Daerah	100 %	412.500.000,00	

															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	integritas dalam tata kelola pemerintahan				
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	12.500.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Prosentase jumlah Barang Penunjang	-			100 %	750.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum	Penguatan Landasan Tata Kelola	Inspektorat Daerah	100 %	750.000.000,00	

						Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemda yang siap pakai								dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan				
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	500.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	29 Unit	500.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	100.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Unit	100.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	1 Unit	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	100.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Inspektorat Daerah	12 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1	-			95,30 %	4.737.306.702,00						95,70%	4.737.306.702,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-			100 %	4.347.306.702,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	100 %	4.347.306.702,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja				4 Laporan	600.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamata	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	4 Laporan	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

							Pemerintah Daerah						n, Semua Kel/Desa	(DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan				
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				32 Laporan	500.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaa n (SKPD)	32 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja													
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				42 Laporan	500.000.000,00	Kab. Karangany ar, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaa n (SKPD)	42 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTOR AT DAERAH
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan													

							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				42 Laporan	300.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	42 Laporan	300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				44 Laporan	797.306.702,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	44 Laporan	797.306.702,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	300.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	1 Kesepakatan	300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				42 Dokumen	1.350.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	42 Dokumen	1.350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

							APIP								narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan			
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-			100 %	390.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	100 %	390.000.000,00	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				25 Laporan	150.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	25 Laporan	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				16 Laporan	240.000.000,00	Kab. Karangan yar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	16 Laporan	240.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran	-			35 Perangkat Daerah 59 % 7 %	3.340.000.000,00						36 Perangkat Daerah 59 % 8 %	3.340.000.000,00	

							strategis Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa												
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase Terwujudnya kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	-			100 %	450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	100 %	450.000.000,00	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	200.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	1 Rekomendasi	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan															
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	250.000.000,00	Kab. Karangangar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	1 Rekomendasi	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

															korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tata kelola pemerintahan				
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam Urusan Desa	-			100 %	2.890.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	100 %	2.890.000.000,00	
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				41 perangkat daerah	340.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	41 perangkat daerah	340.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				5 perangkat daerah	250.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	5 perangkat daerah	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	1.800.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	12 Kegiatan	1.800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				5 perangkat daerah	500.000.000,00	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Obyek Pemeriksaan (SKPD)	5 perangkat daerah	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
										J U M L A H	**22.984.806.702,00**							**22.984.806.702,00**	

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (2026)
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3
			Kapabilitas APIP	Level	3
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Indeks	83,20

Tabel 4.3

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

NO	PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN	KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS KABUPATEN	KET (PAGU) (Rp)
1.	(2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik; (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.347.306.702
		2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	390.000.000
		3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	450.000.000
		4. Pendampingan dan Asistensi	2.890.000.000

BAB V
PENUTUP

Rencana kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja karena melalui Renja ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pirnpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD, perhitungan kebutuhan sesuai standarisasi harga barang dan jasa yang baru, serta disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, dengan tersusunnya rencana kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (*outcome*) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
KATA PENGANTAR		iii
I.	BAB I PENDAHULUAN.....	
	1.1 Latar Belakang.....	I.1
	1.2 Landasan Hukum.....	I.1
	1.3 Maksud Dan Tujuan.....	I.3
	1.4 Sistematika Penyusunan.....	I.4
II.	BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN YANG LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro.....	II.1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II.14
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro.....	II.17
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II.20
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.24
III.	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	III.1
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatipuro.....	III.1
	3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	III.3
IV.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO....	
	4.1. Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Jatipuro.....	IV.1
	4.2. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro.....	IV.2
	4.3. Dana Indikatif Kecamatan Jatipuro.....	IV.3
	4.4. Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatipuro.....	IV.3
V.	PENUTUP.....	
	5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	V.1
	5.2.Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	V.1
	5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	II.2
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatipuro s.d Tahun 2024 Tribulan I	II.4
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	II.15
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro	II.16
Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jatipuro	II.18
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar	II.22
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	II.24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	III.2
Tabel 3.2	Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026	III.3
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III.5
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	IV.4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 dapat disusun. Renja PD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Renja ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja PD Kecamatan Jatipuro ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan PD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja PD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja PD Kecamatan Jatipuro, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jatipuro.

Karanganyar, September 2025

CAMAT JATIPURO

Krisbiyantoro, S.Sos., M.M.
Pembina, IV/a
NIP. 19760307 199903 1 004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program, kegiatan, dan Sub Kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jatipuro memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

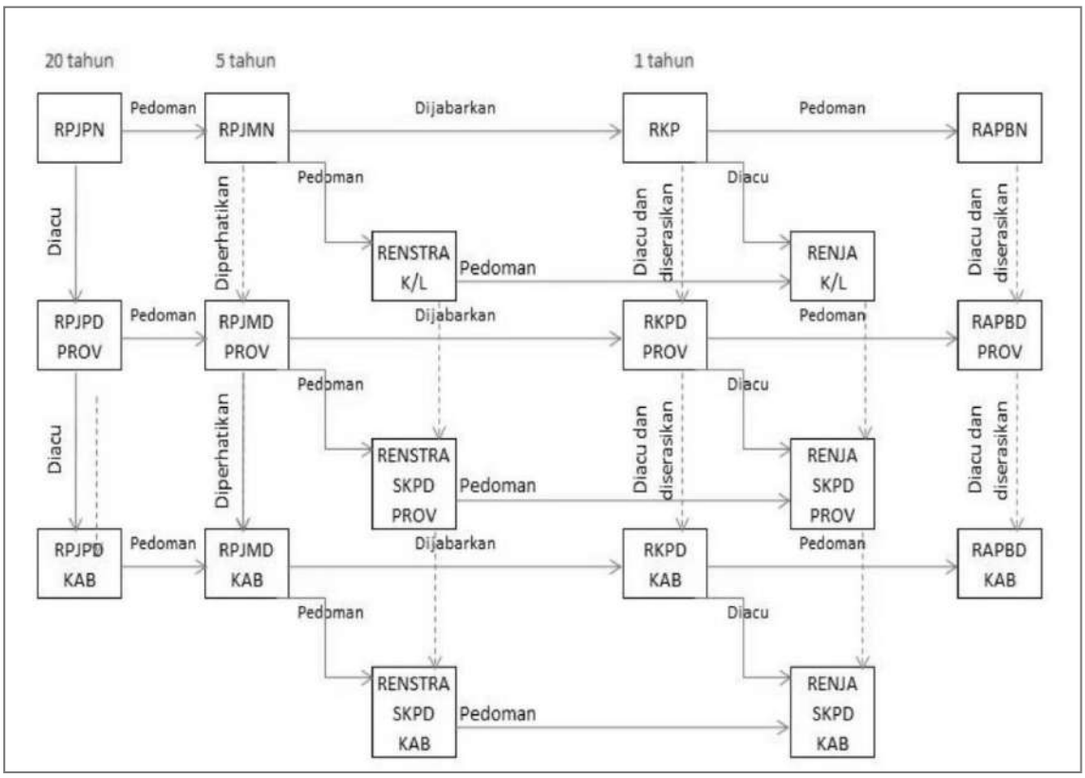

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;

Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jatipuro, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP
Memuat tentang catatan penting dalam penyusunan Renja PD, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Jatipuro berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024, 2025 dan realisasi APBD Kecamatan Jatipuro.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Jatipuro untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.578.049.222,- *(Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.705.241.222,- (*Satu milyar tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*), dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 872.808.000,- (*Delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.559.628.891,- (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 99,28%, sisa anggaran Rp. 18.420.331,- (Delapan belas juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 0,72%.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jatipuro telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jatipuro

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.428.046.672**	**2.428.046.672**	**100**	**2.497.658.837**	**2.634.747.437**	**105,5**
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***17.063.350***	***17.063.350***	***100***	***15.000.000***	***15.000.000***	***100***
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	10.000.000	100
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.063.350	7.063.350	100	5.000.000	5.000.000	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.705.241.222***	***1.705.241.222***	***100***	***1.881.980.157***	***1.939.980.157***	***100***
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.705.241.222	1.705.241.222	100	1.881.980.157	1.939.980.157	100
3.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***24.500.000***	***24.500.000***	***100***	**0**	***25.200.000***	
4)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.500.000	24.500.000	100	0	*25.200.000*	
4.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***160.914.700***	160.914.700	***100***	***125.386.680***	***127.594.280***	***101,8***
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.513.500	4.513.500	100	10.000.000	7.359.400	73,59
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.798.800	73.798.800	100	61.326.680	56.387.680	91,95
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.016.000	16.016.000	100	15.520.000	13.400.000	86,34
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.079.200	14.079.200	100	8.550.000	7.169.200	83,85
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	100	2.760.000	2.760.000	100
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.246.500	30.246.500	100	27.520.000	30.443.500	110,6
11)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.620.700	9.620.700	100	8.260.000	10.074.500	122
5.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***45.432.500***	***45.432.500***	***100***	***13.000.000***	***66.225.000***	***509,4***
12)	Pengadaan Mebel	3.500.000	3.500.000	100	3.000.000	27.500.000	916,7
13)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.932.500	41.932.500	100	10.000.000	38.725.000	387,3
6.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***377.360.000***	***377.360.000***	***100***	***389.160.000***	***385.560.000***	***99,07***
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	0	0	0
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.400.000	100	24.600.000	21.000.000	85,37
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.960.000	354.960.000	100	364.560.000	364.560.000	100
7.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***97.534.900***	***97.534.900***	***100***	***73.132.000***	***75.188.000***	***102,8***
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.310.000	27.310.000	100	20.882.000	23.468.000	112,4
18)	Pemeliharaan Mebel				5.250.000	3.500.000	66,67
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.190.000	6.190.000	100	3.500.000	1.540.000	44
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.034.900	64.034.900	100	45.000.000	41.680.000	92,62
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000	5.000.000	250
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.857.450**	**7.857.450**	**100**	**8.783.300**	**6.362.300**	**72,44**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***7.857.450***	***7.857.450***	***100***	***8.783.300***	***6.362.300***	***72,44***
22)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.857.450	7.857.450	100	8.783.300	6.362.300	72,44
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**28.470.100**	**28.470.100**	**100**	**24.346.400**	**18.846.400**	**77,41**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***28.470.100***	***28.470.100***	***100***	***24.346.400***	***18.846.400***	***77,41***
23)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.446.400	9.446.400	100	10.446.400	6.946.400	66,50
24)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.023.700	19.023.700	100	13.900.000	11.900.000	85,61
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**26.600.000**	**26.600.000**	**100**	**27.600.000**	**27.600.000**	**100**
1.	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***26.600.000***	***26.600.000***	***100***	***27.600.000***	***27.600.000***	***100***
25)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	27.600.000	100
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**66.128.400**	**66.128.400**	**100**	**59.207.000**	**59.207.000**	**100**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***66.128.400***	***66.128.400***	***100***	***59.207.000***	***59.207.000***	***100***
26)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	62.093.800	62.093.800	100	53.698.800	53.698.800	100
27)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.034.600	4.034.600	100	5.508.200	5.508.200	100
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**20.946.600**	**20.946.600**	**100**	**28.181.700**	**19.064,100**	**67,58**
1.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***20.946.600***	***20.946.600***	***100***	***28.181.700***	***19.064,100***	***67,58***
28)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.820.100	5.820.100	100	6.055.200	4.905.200	81,01
29)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.200	4.149.200	100	7.149.200	4.190.900	58,62
30)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.922.100	5.922.100	100	7.922.100	4.426.100	55,87
31)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.055.200	5.055.200	100	7.055.200	5.541.900	78,55

Sumber : Kecamatan Jatipuro

Pada awal tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentanf Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi APBD Tahun 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK Fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, Makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.428.046.672**	**2.409.703.341**	**99,25**	**2.634.747.437**	**1.339.234.424**	
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***17.063.350***	***17.063.350***	***100***	***15.000.000***	***7.703.600***	***51,36***
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100	10.000.000	4.930.250	49,2
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.063.350	7.063.350	100	5.000.000	2.773.350	55,47
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***1.705.241.222***	***1.691.960.055***	***99,22***	***1.939.980.157***	***1.013.577.925***	***52,25***
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.705.241.222	1.691.960.055		1.939.980.157	1.013.577.925	52,25
3.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***24.500.000***	***24.430.000***	***100***	***25.200.000***	***12.500.000***	**49,60**
4)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.500.000	24.430.000	100	*25.200.000*	12.500.000	49,50
4.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***160.914.700***	***160.892.250***	***99,99***	***127.594.280***	***65.643.275***	***51,45***
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.513.500	14.513.500	100	7.359.400	3.256.100	44,25
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.798.800	73.783.350	100	56.387.680	35.696.325	63,31
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.016.000	16.016.000	100	13.400.000	7.149.000	53,35
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.079.200	14.079.200	100	7.169.200	4.170.200	58,17
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.640.000	2.640.000	100	2.760.000	1.380.000	50
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.246.500	30.176.500	99,8	30.443.500	9.598.000	31,53
11)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.620.700	9.620.700	100	10.074.500	4.393.650	43,61
5.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***45.432.500***	***45.432.500***	***100***	***66.225.000***	***18.500.000***	***27,94***
12)	Pengadaan Mebel	3.500.000	3.500.000	100	27.500.000	3.000.000	10,91
13)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.932.500	41.932.500	100	38.725.000	15.500.000	40,03
6.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***377.360.000***	***372.846.286***	***98,8***	***385.560.000***	***184.510.374***	***47,86***
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100	0	0	0
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	19.666.286	99,4	21.000.000	9.790.374	46,62
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	354.960.000	351.180.000	98,9	364.560.000	174.720.000	47,93
7.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***97.534.900***	***97.139.900***	***99,6***	***75.188.000***	***36.799.250***	***48,94***
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	27.310.000	26.917.000	98,6	23.468.000	13.173.500	56,13

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
18)	Pemeliharaan Mebel	0	0	0	3.500.000	3.500.000	100
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.190.000	6.190.000	100	1.540.000	1.460.000	94,81
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.034.900	64.032.900	100	41.680.000	13.665.750	32,79
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.857.450**	**7.857.450**	**100**	**6.362.300**	**2.677.750**	**42,09**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	***7.857.450***	***7.857.450***	***100***	***6.362.300***	***2.677.750***	***42,09***
22)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	7.857.450	7.857.450	100	6.362.300	2.677.750	42,09
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**28.470.100**	**28.470.100**	**100**	**18.846.400**	**12.094.650**	**64,17**
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***28.470.100***	***28.470.100***	***100***	***18.846.400***	***12.094.650***	***64,17***
23)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.446.400	9.446.400	100	6.946.400	6.946.400	100
24)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.023.700	19.023.700	100	11.900.000	5.148.250	43,26
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**26.600.000**	**26.600.000**	**100**	**27.600.000**	**13.226.250**	**47,92**
1.	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***26.600.000***	***26.600.000***	***100***	***27.600.000***	***13.226.250***	***47,92***
25)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	26.600.000	26.600.000	100	27.600.000	13.226.250	47,92
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**66.128.400**	**66.053.400**	**99,9**	**59.207.000**	**2.374.450**	**4,01**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***66.128.400***	***66.053.400***	***99,9***	***59.207.000***	***2.374.450***	***4,01***
26)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	62.093.800	62.018.800	99,9	53.698.800	0	0
27)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4.034.600	4.034.600	100	5.508.200	2.374.450	43,10
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**20.946.600**	**20.946.600**	**100**	**19.064,100**	**11.200.000**	**58,75**
1.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	***20.946.600***	***20.946.600***	***100***	***19.064,100***	***11.200.000***	***58,75***
28)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.820.100	5.820.100	100	4.905.200	0	0
29)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.149.200	4.149.200	100	4.190.900	3.332.600	79,52

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
30)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.922.100	5.922.100	100	4.426.100	3.525.500	79,65
31)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.055.200	5.055.200	100	5.541.900	4.342.250	78,35

Sumber : Kecamatan Jatipuro 2025

Alokasi dana tahun 2024 sebesar Rp. 2.578.049.222,- *(Dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan empat puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) dengan realisasi capaian sebesar Rp. 2.559.628.891,- (*dua milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau sebesar 99,28% lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 97,44%. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.380.807.524,- (*satu milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah*) atau 49,92% dari pagu anggaran Rp. 2.765.827.237,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*).

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	**PROGRAM**	**Tahun 2023**			**2024**		
		ANGGARAN	**REALISASI**	**%**	**ANGGARAN**	**REALISASI**	**%**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.519.790.608	2.446.754.111	97,10	2.428.046.672	2.409.703.341	99,25
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.168.200	8.168.200	100	7.857.450	7.857.450	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	216.285.600	215.597.100	99,68	28.470.100	28.470.100	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.775.100	25.775.100	100	26.600.000	26.600.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.010.000	103.645.000	99,64	66.128.400	66.053.400	99,9
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	23.605.600	23.575.600	99,87	20.946.600	20.946.600	100

Sumber : Kecamatan Jatipuro

Serapan anggaran selama 2 tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut Kecamatan Jatipuro masih perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatipuro

Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025 Tribulan II), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. pada halaman berikut :

TABEL 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatipuro s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jatipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tribulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
7	**KEWILAYAHAN**									
7.01	**KECAMATAN**									
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**73,50**	**69,50**	**73,50**	**70,40**	**95,78**	**70,40**	**Na**	**Na**
7.01.01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah***		***18***	10	10	100	11	5	50
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		6	6	6	100	7	3	50

		Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12	4	4	100	4	2	50
7.01.01.2.02	***Administrasi Keuangan perangkat daerah***	***Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN***		*12 Bulan*	*14 O/B*	*14 O/B*	*95,74*	*14 O/B*	*14 O/B*	*100*
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		*14 O/B*	*14 O/B*	*14 O/B*	*95,74*	*14 O/B*	*14 O/B*	*100*
7.01.01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		*12 Bulan*	35	35	*99,89*	***20***	***20***	***57,14***
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		35	35	35	*99,89*	20	20	57,14
7.01.01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah***		*12 Bulan*	12	12	***100***	***12***	***6***	***50***
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	12	12	100	24	12	50
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0010	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia***		14	***18***	***18***	***99,39***	***43***	***6***	***42,85***
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	3	3	100	37	2	200
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14	14	14	100	6	4	30,76
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	1	1	98,89	0	0	0
7.01.01.2.08	***Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah***	***Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah***		***12***	***12***	***12***	***99,61***	***12***	***6***	***50***

7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	12	100	0	0	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12	93,01	12	6	50
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah pemeliharaan barang milik daerah***		***15***	***25***	***25***	***99,45***	***33***	***26***	***173,33***
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5	5	5	98,44	5	2	40
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara		0	0	0	0	20	20	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		19	19	19	100	3	2	22,23

7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	1	1	100	4	1	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara		0	0	0	0	1	1	-
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	**75**	**87,7**	**75**	**87,7**	**116,93**	**82**	**87,55**	**116,73**
7.01.02.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan***	***Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan***		2	2	2	100	*2*	*1*	*50*
7.01.02.2.01.0001	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2	2	2	100	2	1	50
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100**	**100**	**100**	**99,68**	**99,68**	**100**		

7.01.03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***		22	***22***	***22***	***100***	***22***	***16***	***72,73***
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembag Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10	10	10	100	10	10	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		
7.01.04.2.01	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	***Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum***		12	***12***	***12***	***100***	***12***	***6***	***50***
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50

7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERNTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**99**	**99,64**	**99**	**99,64**	**100,64**	**95**		
7.01.05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	***Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum***		***4***	***110***	***110***	***100***	***4***	***1***	***25***
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		80	80	80	99,61	130	0	0
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		30	30	30	100	30	20	57,14
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	**100**	**99,87**	**100**	**99,87**	**99,87**	**100**		
7.01.06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan***	***Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan***		***40***	***40***	***40***	***99,87***	***40***	***30***	***75***

	Pengawasan Pemerintahan Desa	***pengawasan pemerintahan desa***								
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		10	10	10	100	10	0	0
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10	10	10	100	10	10	100
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10	10	10	99,36	10	10	100
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		10	10	10	100	10	10	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatipuro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2. Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
5. Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
6. Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
9. Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jatipuro meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal, Kekuatan :

c. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
d. Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
e. Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
f. Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
g. Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
h. Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
i. Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah

Lingkungan Internal, Kelemahan :

1. Masih cukup banyak penduduk miskin
2. Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
3. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

Lingkungan Eksternal, Peluang :

1. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
2. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
3. Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
4. Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
5. Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
6. Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
7. Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
8. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM.

Lingkungan Eksternal, Ancaman:

1. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
2. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
3. Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
4. Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
5. Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
6. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro berdsarakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKU sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisi pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro dapat kami sajikan pada tabel 2.5. berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja (Tujuan, Sasaran, dan Program
(Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)
Kecamatan Jatipuro

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	Na	50
	Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	86,85	87,55
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Nilai	70,40	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	93	50
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	50
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	77,08
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50,18
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	99,87	26,62
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	75

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 Trib II	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	Na		Na	Indikator Tujuan 2024
2.	Angka Kemiskinan	%	8,52	Na	8,57	Na	Indikator Tujuan 2024
3.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	Na	0,67	Na	Indikator Sasaran 2024
4.	SAKIP	Nilai	73,50	70,40	70,40	Na	Indikator Sasaran 2024 dan Program 2025

5.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	93	Na	93	Na	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	75	86,85	87,55	
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	77,08	
8.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	50,18	
9.	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	%	Na	Na	99,87	26,62	
10.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	%	100	99	100	75	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025–2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di Kecamatan Jatipuro tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.

Permasalahan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten • Beban kerja antar pegawai belum seimbang
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarpras pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

2.3.1. Isu Strategis

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Jatipuro dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Jatipuro dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan peran Kecamatan Jatipuro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, isu-isu yang mendapatkan prioritas dan harus segera diselesaikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Isu Strategis Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Jatipuro	Permasalahan Kecamatan Jatipuro	Isu KLHS yang Relevan Dengan Kecamatan Jatipuro	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Jatipuro			Isu Strategis Kecamatan Jatipuro
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
• Pertanian pangan menjadi basis utama dengan lahan sawah produktif yang menghasilkan padi, jagung, dan palawija. • Perkebunan dan hortikultura memiliki potensi besar melalui komoditas tebu, kelapa, tanaman keras, serta pemanfaatan lahan kering. • Peternakan berkembang dengan dukungan kelompok ternak masyarakat, meliputi sapi,	• Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi • Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal • Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Peningkatan angka Kemiskinan • Rendahnya Daya Saing Ekonomi	• Geopolitik dan Geoekonomi	• Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia. • Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral. • Aging *population* negara maju.	• Tata Kelola Pemerintahan	• Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa

kambing, ayam, dan itik. • Industri rumah tangga dan usaha lokal tumbuh melalui produk olahan pangan, kerajinan, serta kegiatan ekonomi desa yang memanfaatkan tenaga kerja produktif. • Pariwisata dan budaya desa didukung oleh tradisi lokal, wisata religi, kelembagaan masyarakat, serta infrastruktur desa seperti jalan dan irigasi.						

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **"Belum optimalnya Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan desa"**. Hal ini disebabkan oleh :

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jatipuro dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jatipuro dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jatipuro.

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025–2029. Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jatipuro.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.9.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Targret Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Targret Capaian**	**Kebutuhan Dana**	
	Kecamatan				**2.765.827.237**					**2.765.827.237**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Jatipuro**	***Nilai SAKIP***	**70,45**	**2.639.747.437**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Jatipuro**	***Nilai SAKIP***	**70,45**	**2.627.274.337**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	12.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100	15.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	1.960.005.237	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100	1.975.904.337	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	62.400.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100	24.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan Administrasi umum perangkat daerah	12	108.254.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100	110.280.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjng Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedi	54	70.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjng Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase sarana prasarana sesuai standar	100	59.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36	374.520.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	379.060.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjng Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	17	52.068.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjng Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100	63.530.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	***Kec. Jatipuro***	***Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan***	**100**	**6.362.300,**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Jatipuro**	***Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan***	**100**	**9.762.300**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2	6.362.300,	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec. Jatipuro	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	9.762.300	
3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase lembaga kemasyarakatan aktif***	**100**	**18.846.400**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase lembaga kemasyarakatan aktif***	**100**	**22.896.400**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22	18.846.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	10	22.896.400	
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif***	**100**	**27.600.000**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif***	**100**	**6.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatipuro	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	12	27.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatipuro	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	10	6.000.000	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan***	**100**	**54.207.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan KeagamaaN***	**100**	**80.830.100**	

	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6	54.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	80.830.100	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan***	**100**	**19.064.100**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	***Kec. Jatipuro***	***Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan***	**100**	**19.064.100**	
	Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40	19.064.100	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatipuro	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100	19.064.100	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jatipuro. Namun dalam proses ini Kecamatan Jatipuro mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatipuro terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jatipuro.

Tabel 2.10.
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemangku Kepentingan
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Talut Jalan	Desa Ngepungsari	Volume talut yang terbangun	150x3,5x0,1	Bidang Fispra
2	Pembanunan Drainase	Desa Jatisobo	Volume drainase yang terbangun	800x0,30x0,5	Bidang Fispra
3	Rehabilitasi Pasar Jatipuro	Desa Jatipuro	Jumlah Pasar yang Direhabilitasi	1 Paket	Bidang Ekonomi
4	Penyediaan jaringan listrik untuk masyarakat	Desa Jatiwarno	Jumlah paket jaringan listrik yang disediakan	10 Paket	Bidang Sosial Budaya

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut:

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;

11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Jatipuro Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap

perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Program Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tahun 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	Nilai	70,45
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
			PROGRAM KOORDINASI	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tahun 2026
			KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3 Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatipuro

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatipuro.

Tabel 3.2
Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2025-2029

No.	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Tantangan	Peluang
1	**Tujuan** Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sumber Daya Manusia yang masih rendah	Motivasi serta metode kerja yang sistematik serta peningkatan SDM aparatur.
	Sasaran 1. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah			

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jatipuro mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Jatipuro dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatipuro.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1.Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Jatipuro masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.2.Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabu paten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : *Kecamatan Jatipuro, 2025*

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatipuro

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2025 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Tahun 2024 - 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrai Keuangan
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      5). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      8). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2). Pengadaan Mebel
      3.) Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      4). Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      5). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2). Pemeliharaan Mebel
3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
      1). Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Mimnimal di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
      1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Desa
      2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
      1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
      2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1). Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      3). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jatipuro.

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jatipuro

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatipuro

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7					**KEWILAYAHAN**						**2.277.202.090**		**DAU**					**2.901.694.657**	**Kec. Jatipuro**
	7	**01**				**KECAMATAN**						**2.277.202.090**		**DAU**					**2.901.694.657**	**Kec. Jatipuro**
	7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**71**	**70,40**	**70,40**	**70,45**	**2.207.360.190**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Kantor Kecamatan Jatipuro**		**2.820.722.357**	**Kec. Jatipuro**
	7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.100.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	**Kantor Kecamatan Jatipuro**	**100**	**12.000.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6	6	7	6	5.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	6	6.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	12	12	12	12	2.100.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	6.000.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.680.736.490**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**PNS Kecamatan Jatipuro**	**100**	**1.959.980.157**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 O/B	14 O/B	15 O/B	15 O/B	1.680.736.490	Kec. Jatipuro	**DAU**			PNS Kecamatan Jatipuro	15 O/B	1.959.980.157	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**17.500.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Pegawai Kecamatan Jatipuro**	**100**	**62.400.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan Pelatihan	35	35	25	35	17.500.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Pegawai Kecamatan Jatipuro	35	62.400.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**59.125.700**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Kantor Kecamatan Jatipuro**	**100**	**109.254.200**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	12	12	12	3.279.900,	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	5.359.400	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	12	12	12	20.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	52.387.600	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	12	12	12	6.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	12.400.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan penggandaan yang disediakan	12	12	12	12	4.169.200	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	5.169.200	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	24	24	24	2.760.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	1.380.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	17.806.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	26.483.500	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	12	12	12	5.110.600	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	5.074.500	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase sarana prasarana sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	**35.684.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Kantor Kecamatan Jatipuro**	**100**	**250.500.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	0	0	1	25.684.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	1	30.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	1	37	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	22	20.500.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin - lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2	13	8	1	10.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	2	20.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	1	180.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**376.200.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Kantor Kecamatan Jatipuro**	**100**	**374.520.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12	12	12	12	21.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Kantor Kecamatan Jatipuro	12	21.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	12	12	355.200.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			THL Kecamatan Jatipuro	12	353.520.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran**	**100**	**100**	**100**	**100**	**31.014.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**BMD Kecamatan Jatipuro**	**100**	**52.068.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	5	5	6	16.979.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			BMD Kecamatan Jatipuro	7	21.468.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	5	0	20	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			BMD Kecamatan Jatipuro	0	0	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5	9	3	3	2.190.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			BMD Kecamatan Jatipuro	4	2.920.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	4	4	2	11.845.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			BMD Kecamatan Jatipuro	4	22.680.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2	0	1	0	0	Kec. Jatipuro	**DAU**			BMD Kecamatan Jatipuro	1	5.000.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.221.900**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Masyarakat**	**100**	**5.000.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar**	**12**	**12**	**12**	**12**	**5.221.900**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Masyarakat**	**12**	**5.000.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	5.221.900	Kec. Jatipuro	**DAU**			Masyarakat	12	5.000.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7.440.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Wilayah**	**100**	**4.000.000**	**Kec. Jatipuro**

	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum**	**4**	**12**	**4**	**10**	**7.440.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Wilayah**	**10**	**4.000.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	12	4	4	7.440.000	Kec. Jatipuro	DAU			Wilayah	4	4.000.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaaan dan Keagamaan**	**100**	**99,87**	**100**	**100**	**34.180.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Masyarakat**	**100**	**36.108.200**	**Kec. Jatipuro**
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**34.180.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Masyarakat**	**4**	**36.108.200**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	05	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	825	825	825	825	7.900.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Masyarakat	258	5.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40	35	30	40	3.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Masyarakat	40	5.508.200	Kec. Jatipuro
	7	01	05	2.02	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Na	Na	12	23.280.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Forkopimcam	12	25.600.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.000.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Lembaga Kemasy**	**100**	**13.000.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina**	**10**	**10**	**10**	**10**	**9.000.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Lembaga Masyarakat**	**10**	**13.000.000**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	10	10	7	5.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa	7	6.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	12	15	12	4.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa	15	7.000.000	Kec. Jatipuro
	7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Pesentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketetntuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**14.000.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Desa**	**100**	**22.864.100**	**Kec. Jatipuro**

	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**14.000.000**	**Kec. Jatipuro**	**DAU**			**Desa**	**100**	**22.864.100**	**Kec. Jatipuro**
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa	10	4.905.200	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa	10	4.190.900	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa	10	4.426.100	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	10	10	10	3.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa	10	5.541.900	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	10	10	10	2.000.000	Kec. Jatipuro	**DAU**			Desa		3.800.000	Kec. Jatipuro
																			2.901.694.657	

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

No	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Nilai	83

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran 2026
1.	Meningkatkan tata kelola p emerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 5.221.900
2.	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Rp. 7.900.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Daerah Tahun 2025-2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan, dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatipuro harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIYOSO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Jatiyoso, September 2025
PLH CAMAT JATIYOSO

MAHMUD AZIS ARIFIN,S.K.M.,M.M
Penata Tingkat I
NIP. 197312101998031008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiyoso II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso II-5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiyoso II-13
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-15
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....II-22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja III-3
3.3 Program dan Kegiatan III-6
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan PD.....III-7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIYOSO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso.....IV-1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso IV-2
4.3 Data Indikatif Kecamatan Jatiyoso IV-2
4.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Jatiyoso.....IV-2

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut V-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Renja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Penjabaran Recana Kerja Pemerintah Daerah Jangka waktu 1 tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jatiyoso untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar da berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

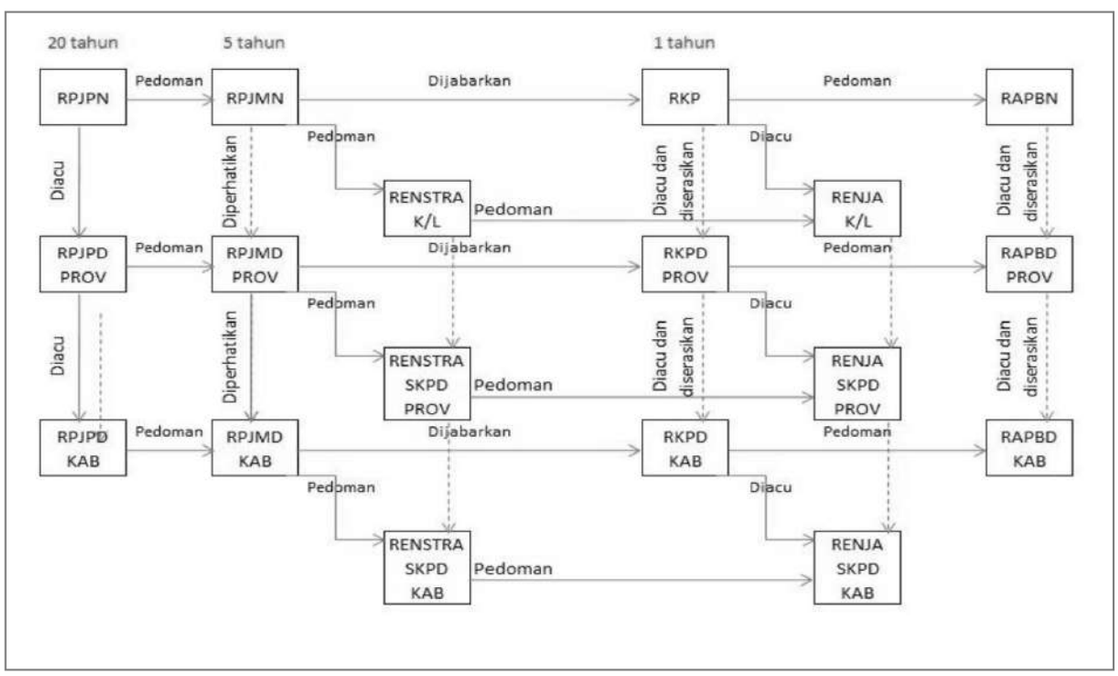

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar perlu menyusun Rencana kerja dengan maksud untuk memberikan arahan dan gambaran serta pedoman tentang perencanaan kegiatan di Kecamatan Jatiyoso tahun 2026. Adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyara adalah sebagaai berikut :

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Sebagai Bahan Acuan dan arahan bagi Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara professional sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar tahun 2026 yaitu:

1. Kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Pelaksanaan Kegiatan lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah di tetapkan baik kuantitas maupun kualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Jatiyoso, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksut dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang analisis Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026.

BAB V .PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatiyoso

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Kecamatan Jatiyoso dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Kecamatan Jatiyoso untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar 2.770.029.635,- *(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)* yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.558.353.806,-*(dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah)* sisa anggaran Rp. 211.675.829,-*(dua ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).*

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini:

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jatiyoso telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jatiyoso

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	**2.563.298.220**	**2.563.298.220**	**98,8**	**2.509.038.220**	**2.509.038.220**	**100%**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*9.785.200*	9.785.200	*9.785.200*	9.640.200	9.640.200	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6.760.200	6.760.200	6.760.200	6.910.200	6.910.200	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000	840.000	840.000	1.300.000	1.300.000	100%
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.276.990	1.695.276.990	98,52	1.691.490.434	1.691.490.434	100%
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.276.990	1.695.276.990	98,52	1.691.490.434	1.691.490.434	100%
6)	Administrasai Umum Perangkat Daerah	35.375.800	38.125.800	92,79	45.944.800	45.944.800	100%
7)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20.443.500	20.443.500	100%	13.726.300	13.726.300	100%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.074.680	46.074.680	100%	19.768.400	19.768.400	100%
9)	Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	1.450.000	1.450.000	100	3.000.000	3.000.000	100%
10)	Penyediaan bahan logistrik kantor	32.591.000	32.591.000	100	26.581.000	26.581.000	100%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.808.600	14.808.600	100	15.322.000	15.322.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	94,38	1.125.000	1.125.000	100%
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	137.238.000	137.238.000	100	106.825.000	106.825.000	100%
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.946.250.	5.946.250	100	7.284.250	7.284.250	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.537.500	134.537.500	100	0	0	100%
15)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.500.000	47.500.000	100	25.000.000	25.000.000	100%
16)	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan laiinya	30.000.000	30.000.000	100	0	0	100%
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.037.500	57.037.500	100%	14.012.500	14.012.500	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.475.000	335.475.000	100	334.750.000	334.750.000	100%
18)	Penyediaan jasa surat menyurat	1.875.000	1.875.000	100	1.800.000	1.800.000	100%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30.000.000	30.000.000	100	33.000.000	33.000.000	100%
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	303.600.000	303.600.000	100	80.640.000	80.640.000	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.920.860	128.920.860	112,6	48.844.000	48.844.000	100%
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.014.000	60.014.000	100	50.038.000	50.038.000	100%
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100	5.200.000	5.200.000	100%
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.406.860	64.406.860	200	0	30	0,00%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.333.450	7.333.450	100	64.708.900	64.708.900	100%
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.333.450	7.333.450	100	64.708.900	64.708.900	100%
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.833.450	4.833.450	100	40.599.750	40.599.750	100%
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.500.000	2.500.000	100	.24.109.150	.24.109.150	100%
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**56.943.100**	**56.943.100**	**100%**	**201.661.050**	**201.661.050**	**100%**
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	0,00%	150.000.000	150.000.000	100%
26)	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Furum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.190.500	10.190.500	100%	10.657.500	10.657.500	100%
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.007.800	17.007.800	100%	16.894.400	16.894.400	100%
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.744.800	29.744.800	100%	24.109.150	24.109.150	100%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	**39.000.000**	**39.000.000**	**100%**	**133.540.000**	**133.540.000**	**100%**
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keytertiban Umum	39.000.000	39.000.000	100%	133.540.000	133.540.000	100%
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.000.00 0	39.000.000	100%	133.540.000	133.540.000	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**86.229.865**	**86.229.865**	**101,19**	**57.780.000**	**57.780.000**	**100%**
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.229.865	86.229.865	101,19	115.267.300	115.267.300	100%
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	81.789.865	81.785.865	100	111.067.300	111.067.300	100%
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regeonal dan Nasional	4.440.000	4.440.000	116,67	4.200.000	4.200.000	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**16.010.000**	**16.010.000**	**100**	**65.065.000**	**65.065.000**	**100%**
17	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**16.010.000**	**16.010.000**	100	65.065.000	65.065.000	100%
31)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	3.965.000	100	3.965.000	3.965.000	100%
32)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.615.000	3.615.000	100%	2.400.000	2.400.000	100%
33)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.170.000	1.170.000	100%	2.400.000	2.4000.000	100%
34	Fasilitasi Administrasi Tata	4.860.000	4.860.000	100%	54.000.000	54.000.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemerintah desa						
35	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.400.000	2.400.000	100%	2.300.000	2.300.000	100%
	1 urusan 6 Program, 17 Kegiatan, 33 Subkegiatan	**2.770.029.635**	**2.770.029.635**	98,89	2.663.841.184	**2..663.841.184**	100%

Sumber : Kecamatan Jatiyoso, 2025 diolah

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi APBD di Kecamatan Jatiyoso Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.563.298.220	2.207.851.289	92,66%	2.105.208.084	951.167.591	42,31%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.785.200	9.785.200	100%	10.395.200	2.133.750	38,80%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	6.750.000	6.750.000	100%	4.647.700	1.883.750	37,68
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000	840.000	100%	800.000	500.000	62,50
3)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.430.000	1.430.000	100%	315.000	0	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.695.277.630	1.669.600.589	90,70%	1.741.490.434	935.499.309	82,45%
4)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.277.630	1.669.600.589	90,70%	1.741.490.434	935.499.309	82,45%
3.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	63.625.800	63.518.300	93,83%	160.183.000	16.217.500	35,30%
6)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	20.443.500	20.443.500	100%	13.726.300	1.834.400	13,00%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.349.000	13.349.000	100%	19.768.400	1.749.425	43,89%
10)	Penyediaan bahan logistrik kantor	32.591.000	32.591.000	99,89%	26.581.000	3.419.000	22,15%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.315.000	16.315.000	100%	15.322.000	1.672.900	65,66%
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	100%	1.125.000	0	0,00
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	124.878.000	124.878.000	100%	106.825.000	5.895.000	25,20%
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.946.250	5.946.250	100%	7.284.250	0	0,00%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	0	0	0,00%
15)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.500.000	45.320.122	99,89%	25.000.000	0	0,00
16)	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0,00
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.025.000	42.750.000	99,89%	14.012.500	0	0,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.475.000	331.111.616	99,01%	115.440.000	8.401.007	41,17%
18)	Penyediaan jasa surat menyurat	1.875.000	1.875.000	100%	1.800.000		0,00%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	30.000.000	25.636.616	83,24%	33.000.000	1.961.007	33,03
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	303.600.000	303.600.000	100,00%	80.640.000	6.440.000	41,67
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.597.000	80.358.500	99,55%	55.238.000	6.572.000	36,94
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per	43.580.000	43.341.500	99,45%	50.038.000	6.572.000	60,71

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100%	5.200.000	0	0,00
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.517.000	32.517.000	100%	0	0	0,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.333.450	7.333.450	100%	43.099.750	4.546.700	27.88
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.333.450	7.333.450	100%	43.099.750	4.546.700	31,12
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4.833.450	4.833.450	100%	40.599.750	4.546.700	31,12
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	2.500.000	2.500.000	100%	.2.500.000	0	0,00
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	61.443.100	61.443.100	100%	201.653.400	0	0,00
12.	Pembanguan Sarana dan Prasarana Desa	0	0	0,00%	150.000.000	0	0,00
26)	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Furum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	10.190.500	10.190.500	100%	10.657.500	0	0,00
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	17.007.800	17.007.800	100%	16.894.400	0	0,00
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.244.800	34.244.800	100%	24.109.150	0	0,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	36.810.000	36.810.000	100%	133.540.000	10.400.000	41,67
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keytertiban Umum	36.810.000	36.810.000	100%	133.540.00	10.400.000	41,67
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36.810.00	36.810.000	100%	133.540.000	10.400.000	3,34
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.049.865	86.049.865	99.05%	111.067.300	3.400.000	0,00
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	86.049.865	86.049.865	99.05%	111.067.300	0	0,00
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	81.649.865	81.649.865	99,98%	111.067.300	1.400.000	0,00
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regeonal dan Nasional	4.400.000	4.400.000	100%	4.200.000	2.000.000	48,00
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.315.000	19.315.000	100%	65.065.000	4.200.000	38,43
17	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.315.000	19.315.000	100%	65.065.000	0	0,00
31)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.965.000	3.965.000	100%	3.965.000	0	0,00
32)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.615.000	3.615.000	100%	2.400.000	0	0,00
33)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.615.000	3.615.000	100%	2.300.000	0	0,00
34)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.260.000	3.260.000	100%	2.400.000	0	0,00
35)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	4.860.000	4.860.000	100%	54.000.000	4.200.000	10,32
	1 urusan 6 Program, 17 Kegiatan, 33 Subkegiatan	**2.770.029.635**	**2.330.366.289**	**92,99%**	**2.686.797.184**	**970.314.291**	**41,04%**

Sumber : Kecamatan Jatiyoso, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.770.029.635,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.558.353.806,00 atau 92,99 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 89,23%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.126.071.738,00 atau 41.04% dari pagu anggaran Rp. 2.686.797.184,00

Tabel. 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.486.981.760	2.386.781.670	87,55	2.563.298.220	2.392.523.394	92,66
2	Program Penyelenggaraan Pdemerintahan dan Pelayanan Publik	7.101.900	7.101.900	100	9.785.200	9.785.200	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	27.452.600	27.452.600	100	56.943.100	56.943.100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.321.500	31.321.500	100	39.000.000	39.000.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.323.000	67.323.000	100	86.229.865	86.229.865	99,05
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.250.000	15.250.000	100	17.225.000	17.225.000	100
	Persentase realisasi	**2.635.430.760**	**2.535.230.670**	**89,23**	**2.770.029.635**	**2.601.706.559**	**92,99**
	Rata-rata realisasi 6 program			**89,23**			**92,99**

Sumber : Kecamatan Jatiyoso, 2025 diolah

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Jatiyoso perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatiyoso berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Indek kepuasan masyarakat.

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatiyoso meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan , baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi , Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal
   Kekuatan :
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetaapkan payung hukunya
   - Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama
   - Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama

- Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional
- Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daaerah

Kelemahan :

- Masih banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama
- Masih rendahnya kualitas SDM
- Kurangnya partisipasi aktip masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama
- Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan

Ancaman :

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa
- Munculnya faham agama yang radikal dan ekstrim
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Pada pembahasan sub bab ini kami disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatiyoso, dengan format Tabel 2.4. sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatiyoso dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatiyoso

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Tahun Akhir Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9.	10	11= (10/4)
7					Kewilayahan									
7	01				Kecamatan Jatiyoso									
7	01				Kecamatan									
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100	71,05	72	71,05	98,86	75	NA	
						Prosentase Inikator OPD (IKU dan IKK) yang mencapai targetnya	100	71,05	72	71.05	98,86	73	42,31	42,31
7	*01*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersediannya dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD*	*100*	98,88	*100*	100	100	*100*	*42,31*	*42,31*
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja OPD	2	2	2	2	100	2	1	32,68
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA OPD	2	2	2	2	100	2	2	100

5	02	02	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA OPD	2	2	2	2	100	0	0	0
7	01	01	2.01	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP OPD	2	2	2	2	100	0	0	0
7	*01*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Capaian realisasi anggaran OPD*	*100*	84,84	*100*	90.70	90.70	*100*	*82,45*	*82,45*
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15	15	15	15	90.70	15	8	82,45
7	*01*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan kebutuhan kantor*	100	98,37	*100*	99,83	99,83	*100*	*35,30*	*35,30*
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100	12	6	49,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	6	43,89
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	99,89	12	6	22,15
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak penggandaan	12	12	12	12	100	12	6	65,66
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi jamuan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	99,37	12	4	25,20
7	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tertatanya Arsip SKPD	12	12	12	12	100	12	12	98,91
7	*01*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100*	99,18	*100*	100	100	*100*	0	*0*
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya	1	1	2	2	100	2	2	0
7	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	98,76	*100*	99,01	99,01	*100*	*41,17*	*41,17*

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	99,40	2	2	50
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	83,24	12	6	*33,03*
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	100	12	6	41,67
7	*01*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100*	96,42	*100*	99,55	99,55	*100*	*36,94*	*36,94*
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	9	9	9	99,45	9	4	36,94
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor yang memadai	3	3	3	3	100	3	0	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index Kepuasan Masyarakat	75	83,15	82,05	83,40	110,09	84,50	27,88	27,88
7	*01*	*02*	*2.02*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan*	*Survey Kepuasan Masyarakat*	*100*	99,86	100	100	100	100	94,80	94,80
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Survey kepuasan masyarakat	1	1	12	12	100	12	12	94,80
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat	2	2	12	12	100	12	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	99,81	*100*	100	100	100	31,12	31,12

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	*01*	*03*	*2.01*		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif*	*100*	99,81	*100*	100	100	100	*31,12*	*31,12*
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Terselenggaranya kegiatan musrenbang	12	12	12	12	12	12	6	31,12
7	*01*	*03*	*2.03*		*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif*	*100*	100	100	100	100	100	*0*	*0*
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100	100	100	100	100	100	41,67	41,67
7	*01*	*04*	*2.01*		*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	*Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif*	*100*	100	100	100	100	100	*41,67*	*41,67*
7	01	04	2.01	01	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	16,67
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	100	99,23	*100*	99,05	99,05	*100*	0	0
7	*01*	*05*	*2.01*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan*	*100*	99.23	*4*	4	99,05	*4*	*0*	*0*
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tercapainya pelaksanaan kegiatan daerah	90	98.98	90	90	98,98	90	0	0
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Tercapainya kegiatan FKUB	90	100	90	90	100	90	0	0

					Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Perda	100	100	100	100	100	100	0	0
7	*01*	*06*	*2.01*		*Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Persentase Desa Tertib Perda*	*100*	100	*100*	100	100	*100*	*0*	*0*
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya APBDes dan Perdes lainnya	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tercapainya tertib administrasi desa	12	12	12	12	100,00	12	0	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Terselenggaranya pembinaan perangkat desa	12	12	12	12	100	12	0	0

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Jatiyoso

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	71,05	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83,40	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	71,05	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	42,31
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	27,88
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	31,12
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	41,67
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	0
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	0

Sumber : Renstra Kecamatan Jatiyoso 2025-2029

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt.I	Th 2024	Th 2025 Smt.I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	75	71,05	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak dipakai	0,762	Tidak dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	100	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	82,5	84,50	83,40	0	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	99,05	0	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jatiyoso sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiyoso dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
   e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa
6. Permasalahan Umum di luar tusi
   Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Jatiyoso
   Kedudukan Kantor Kecamatan Jatiyoso yang berada di tengah pusat kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiyoso, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jatiyoso yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jatiyoso

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan	**Seksi Tata Pemerintahan** a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** a. Kurangnya pemerataan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **Seksi Kesejahteraan Sosial** a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **Seksi Pelayanan Umum** a. Belum Optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan Prasarana c. Belum optimalnya Pengelolaan aset d. Belum Optimalnya sistem kearsipan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a. Rancangan Kerangka ekonomi daerah.
b. Program prioritas Pembangunan daerah.
c. Rencana Kerja , Pendanaan, dan Prakiraan Maju.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD yang di jelaskan dalam Lampirkan tabel berikut :

Tabel 2.8.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jatiyoso

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				2.515.603.820,00					2.515.603.820,00	
1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA*	Kec. Jatiyoso	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	98 %	2.284.509.320,00	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*	Kec. Jatiyoso	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	98 %	2.284.509.320,00	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	15.018.636,00	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	15.018.636,00	
	administrasi keuangan	Kec. Jatiyoso	Cakupan administrasi keuangan	90 %	1.666.928.800,00	administrasi keuangan	Kec. Jatiyoso	Cakupan administrasi keuangan	90 %	1.666.928.800,00	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	151.611.884,00	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	151.611.884,00	

	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45.000.000,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	45.000.000,00	
	penyediaan jasa penunjang urusan	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyediaan jasa	100 %	345.460.000,00	penyediaan jasa penunjang	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyediaan jasa	90 %	345.460.000,00	

	pemerintahan daerah		penunjang urusan pemerintahan daerah			urusan pemerintahan daerah		penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	60.490.000,00	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	60.490.000,00	
2	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	Kec. Jatiyoso	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	7.830.000,00	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	Kec. Jatiyoso	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	7.830.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Jatiyoso	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan		7.830.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan	Kec. Jatiyoso	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan		7.830.000,00	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatiyoso	Persentase Lembaga Kemasyarakata n aktif	100 %	88.712.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatiyoso	Persentase Lembaga Kemasyarakata n aktif	100 %	88.712.500,00	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa		71.712.500,00	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa		71.712.500,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Jatiyoso	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		17.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Jatiyoso	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat		17.000.000,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Kec. Jatiyoso	Persentase Wilayah dalam keadaan	100 %	18.191.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Kec. Jatiyoso	Persentase Wilayah dalam keadaan	100 %	18.191.000,00	
	DAN KETERTIBAN UMUM		kondusif			DAN KETERTIBAN UMUM		kondusif			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatiyoso	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	18.191.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatiyoso	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	18.191.000,00	
5	*PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	Kec. Jatiyoso	Persentase Desa /Kelurahan Tertib Perda		97.500.000,00	*PROGRM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	Kec. Jatiyoso	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagaman		97.500.000,00	

	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	97.500.000,00	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatiyoso	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	97.500.000,00	
6	*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA*	Kec. Jatiyoso	Persentase Desa memiliki APBDes dan RPKDes sesuai Ketentuan	100 %	18.861.000,00	*PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHA N DESA*	Kec. Jatiyoso	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	18.861.000,00	
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	18.861.000,00	fasilitasi,rekome ndasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan fasilitasi,rekome ndasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	18.861.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	4.310.000,00	Fasilitasi,dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Fasilitasi,dalam rangka penyusunan peraturan Desa dan Peratutan Kepala Desa	100%	4.310.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. jatiyoso	Jumlah Dokumen yang Di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	5.460.000,00	Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	5.460.000,00	

	Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	3.816.000,00	Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Fasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	100%	3.816.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	3.615.000,00	Fasilitasi dalam pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Fasilitasi dalam Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	3.615.000,00	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Jatiyoso	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100%	1.660.000,00	Fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Kec. Jatiyoso	Cakupan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100%	1.660.000,00	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Bidang : Sarana dan Prasarana							
NO	**KEGIATAN PRIORITAS**	**DESA**	**MASALAH**	**ALAMAT/ LOKASI**	**TARGET/ VOLUME**	**PAGU ANGGARAN (Rp)**	**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Perbaikan ruas jalan hotmixe desa wukirsawit-Tlobo Kabupaten	Desa Wukirsawit – Desa Tlobo	Jalan Rusak	Jl. PU Kabupaten ke Arah Desa wukirasawit-Desa tlobo	1 Paket	100.000.000	DPUPR
2.	Pembanguan Talud Jalan	Desa Wonokeling	Penanggulangan Jalan Putus	Dusun Ngesep Lor Rt 001/001	1 Paket	230.000.000	DPUPR
3.	Pembangunan dan pengembangan Destinasi wisata desa	Desa wonorejo		Desa wonorejo	1 Paket	150.000.000	Disparpora
4	Perbaikan ruas Beruk jalan s/d Tlobo	Desa Beruk-desa Tlobo	Jalan Rusak	Desa Beruk-Desa Tlobo	1 Paket	300.000.000.	DPUPR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;

13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatiyoso

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jatiyoso adalah.

Tabel 3.1.

Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun
					2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	84,25
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	69,20
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	96
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100

Sumber : Renstra Kecamatan Jatiyoso 2025-2029

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

Kecamatan Jatiyoso sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pad urusan Perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga perencanaan seperti Kecamatan Jatiyoso harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

1) Semakin kompleksnya isu pembangunan, Kecamatan Jatiyoso memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif dan inovatif.
2) Tantangan kemajuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, Kecamatan Jatiyoso dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
3) Adanya perubahan kebijakan yang konstan dan dinamis dapat memengaruhi kontinuitas dari rencana pembangunan nasional dan daerah. Kecamatan Jatiyoso harus tetap siap menghadapi perubahan politik untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah direncanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bappenas dan Bappeda menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.
4) Perubahan Iklim seringkali mempengaruhi pelaksanaan suatu rencana, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Misalnya untuk urusan pertanian : Perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam di daerah ini, yang dapat berdampak pada keberlangsungan Pembangunan;
5) Persaingan dengan daerah lain: Terdapat persaingan dengan daerah lain dalam hal investasi, sumber daya manusia, atau penarikan wisatawan, atau penarikan investor, perbedaan dalam penataaa ruang dll.
6) Perubahan Kebijakan Pemerintah yang sering berganti-ganti atau berubah-ubah, kurang mendukung konistensi rencana pembangunan: Pemerintah dapat mengubah kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di daerah ini, seperti pembatasan investasi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi sektor tertentu.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Kecamatan Jatiyoso juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, menjadi kesempatan yang baik untuk memulai perencanaan yang konsisten, sinkron dan berkelanjutan.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
3. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong muncul dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.

6. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.

7. Selain itu, Kecamatan Jatiyoso dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan PD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jatiyoso mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Jatiyoso dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jatiyoso.

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran PD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Jatiyoso masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator
Sasaran.1 Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran PD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
			Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumnber daya Air, dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gdedung Kantor dan Bangunan Lainya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik

			Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regeonal dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : Kecamatan Jatiyoso 2025

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN JATIYOSO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiyoso

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra PD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Administrai Keuangan
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      5) Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
      8) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada PD
   d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan
      2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya
      3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
      1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Mimnimal di Wilayah Kecamatan
      2) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a) Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      3) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a) Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
      1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
      2) Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan tabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatiyoso

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra PD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatiyoso , yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatiyoso merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jatiyoso. (lebih lengkap lihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jatiyoso

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatiyoso

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan Pusat.

Tabel 4.1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN JATIYOSO KAB. KARANGANYAR

TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kecamatan Jatiyoso						2.080.374.672,00					2.361.388.248,00			
7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.080.374.672,00							2.361.388.248,00	
7	01				KECAMATAN						2.080.374.672,00							2.361.388.248,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			100 %	1.726.806.972,00						-	2.201.004.848,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah penyusunan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) tercapai targetya	-			10 dokumen 100 %	4.551.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	10.395.200,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen				5 Dokumen	2.871.000,00	Kab.	DANA	Melanjutka	Penguata	-		6.910.200,0	KECAMA

						Perencanaan Perangkat Daerah						Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	n Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			0	TANJATIYOSO
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	560.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		1.300.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	560.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		1.430.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	560.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		755.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah penyediaan gaji dan tunjungan ASN	-			12 BULAN	1.444.331.252,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	1.671.609.648,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.444.331.252,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	-		1.671.609.648,00	KECAMATAN JATIYOSO

														serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-			12 bulan	116.044.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	89.000.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.516.200,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningka	-		12.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

														kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	tkan kualitas lingkungan hidup				
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.870.220,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	17.265.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-		18.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

														sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8.878.800,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		4.500.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen				12	3.000.000,00	Kab.	DANA	Memperkua	Penguata	-		2.000.000,0	KECAMA

						Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen		Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)	t pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	n Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			0	TAN JATIYOSO
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	750.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		2.500.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

														g disabilitas.					
7	0 1	0 1	2. 06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	53.152.500,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		30.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	0 1	0 1	2. 06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	4.612.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	-			43 unit	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	244.000.000,00	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		0,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegri	-		29.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

														pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	tas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		200.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerinta daerah	-			12 bulan	115.410.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkua	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	128.000.000,00	

														t pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.170.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		3.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	33.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		35.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				12 Laporan	80.640.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso,	DANA ALOKASI UMU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Penguatan Landasan Tata	-		90.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

						Disediakan						Semua Kel/Desa	M (DAU)	birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-			12 bulan	46.470.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	58.000.000,00	
7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	38.640.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		35.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	7.830.000,00	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik,	Penguatan Landasan	-		8.000.000,00	KECAMATAN JATIYOS

												Jatiyoso, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				O
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks kepuasan Masyarakat	-			81,5 nilai undefined undefined	38.257.900,00						-	6.512.300,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasaan Masyarakat Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan	-			81,5 nilai 12 laporan	38.257.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi, Birokrasi.	-	6.512.300,00	

														judi, dan penyeludupan.	kualitas lingkungan hidup			
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	37.137.900,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi, Birokrasi.		4.712.300,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1.120.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi, Birokrasi.		1.800.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	41.269.800,00						-	16.000.000,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa persentase lembaga kemasyarakatan	-			3 laporan 100 %	41.269.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	-	16.000.000,00	

						aktif								sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.687.500,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		7.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	33.582.300,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		9.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	109.060.000,00						-	27.600.000,00	

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	-			12 laporan 100 %	109.060.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	-	27.600.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	109.060.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif		27.600.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peningkatan kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang terkondisikan	-			100 %	99.548.000,00						-	91.207.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah umum	-			100 %	99.548.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	-	91.207.000,00	

															Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM				
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	59.748.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum		60.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				2 Orang	1.400.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkunga	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum		9.207.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

															n hidup				
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24 Dokumen	38.400.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan urusan pemerintah umum		22.000.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				65.432.000,00						-	19.064.100,00	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	65.432.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	-	19.064.100,00	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan				9 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai		4.310.000,00	KECAMATAN JATIYOSO

						Kepala Desa								an ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	han Berintegritas Dan Dinamisti f 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	ketentuan			
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	54.400.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisti f 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan		5.460.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisti f 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan		3.816.000,00	KECAMATAN JATIYOSO
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka				9 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	Membangun dari desa dan dari	Penguatan Landasan	Persentase desa memiliki		3.615.000,00	KECAMATAN JATIYOS

						Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						Jatiyoso, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan			O
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	4.032.000,00	Kab. Karanganyar, Jatiyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan		1.863.100,00	KECAMATAN JATIYOSO
JUMLAH											**2.080.374.672,00**							**2.361.388.248,00**	

Tabel. 4.2
Target IKU Kecamatan Tahun 2026

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1.	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Nilai	84,25

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**Program:** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan **SubKegiatan :** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.120.000
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program:** Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah **SubKegiatan :** 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	99.5 21.600.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatiyoso harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jatiyoso.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso
2. Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
3. Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jatiyosoyang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatiyoso secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi

yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025- 2029, Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Jumantono , September 2025
CAMAT JUMANTONO

GUNAWAN, S.E., M.M
Pembina Tk I
NIP. 19671223 199401 1 002

DAFTAR ISI

			HAL
HALAMAN JUDUL			**i**
KATA PENGANTAR			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I.1**
	1.1	Latar Belakang	I.1
	1.2	Landasan Hukum	I.2
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.3
	1.4	Sistematika Penulisan	I.3
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**		**II.1**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun Lalu dan Capaian Renstra	II.1
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono	II.6
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Jumantono	II.16
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.19
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.23
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**		**III.1**
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III.1
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja	III.3
	3.3.	Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	III.7
	3.4.	Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD	III.7
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO**		**IV.1**
	4.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Jumantono	IV.1
	4.2	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono	IV.2
	4.3	Data Indidkatif Kecamatan Jumantono	IV.3
	4.4	Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jumantono	IV.3
BAB V	**PENUTUP**		**V.1**
	5.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V.1
	5.2.	Kaidah Pelaksanaan	V.1
	5.3.	Rencana Tindak Lanjut	V.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan I.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 202..... II.2
Tabel 2.2. Realisasi APBD di Kecamatan Jumantono Tahun 2024 dan 2025 (TW II)..... II.4
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2024..... II.6
Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar..... II.7
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja IKU Kecamatan Jumantono Tahun 2024 – 2025 (semester I) Kabupaten Karanganyar..... II.15
Tabel 2.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumantono..... II.18
Tabel 2.7. Rumusan Isu Strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar..... II.19
Tabel 2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jumantono..... II.21
Tabel 2.9. Usulan program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jumantono.. II.24
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026)..... III.6
Tabel 3.2. Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD..... III.8
Tabel 3.3. Keselarasan Sasaran OPD dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan..... III.8
Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jumantono Tahun 2026..... IV.4
Tabel 4.2. Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumantono Tahun 2026..... IV.12
Tabel 4.3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026... IV.12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jumantono untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

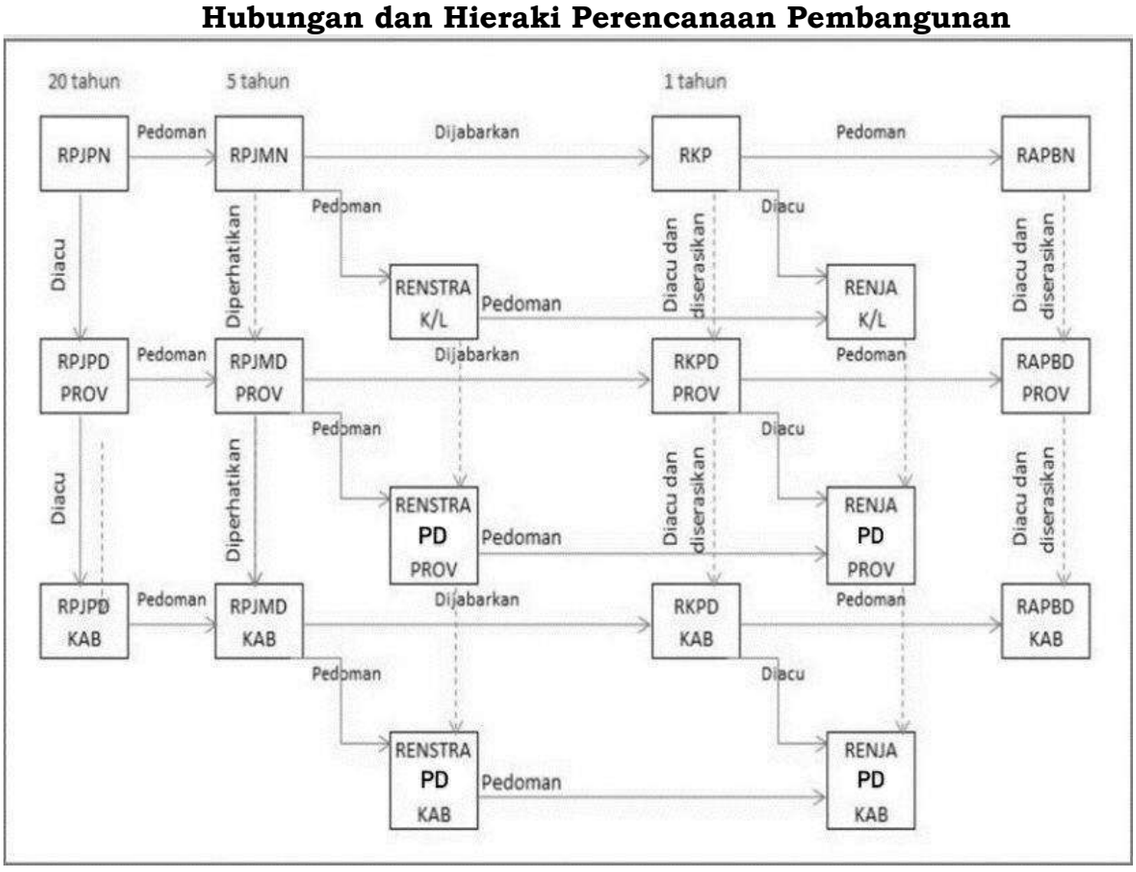

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalan penyusunan Rencana Kerja (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peratutan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaeanganyar Nomo 1 Tahun 2013 tentangRencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahu 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jumantono, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Jumantono.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Jumantono, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Jumantono tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jumantono

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jumantono

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jumantono berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Jumantono.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

A. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

Kecamatan Jumantono untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.522.647.505,- *(dua milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.557.025.025,- *(satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu dua puluh lima rupiah).* dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 965.622.480,-(*Sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupia*h) Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.495.431.943,- *(Dua Milyar Empat Ratus sembilan puluh lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)* atau sebesar 98,92 %, sisa anggaran Rp. 27.215.562,- *(Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus lima Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)* atau sebesar 1,08%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan capaian kinerja 90,78.%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.410.931.258,- dan terealisasi Rp. 2.188.660.103,- (90,78%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.013.500,- dan terealisasi Rp. 6.013.500,- (100%).

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 133.384.900,- terealisasi sebesar Rp. 133.375.400,- (100%).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 99%. Anggaran yang tersedia Rp. 75.969.750,- terealisasi sebesar Rp. 72.169.750,- (95%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 3 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 51.937.650,- terealisasi sebesar Rp. 51.836.800,- (100%).

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 14.361.400,- terealisasi sebesar Rp. 14.361.400,- (100%).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkana tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.071.583.368	2.094.415.543	99	2.600.000.000	2.600.000.000	100,00
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.648.700	7.648.700	0	13.421.000	13.421.000	100,00
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	3.725.900	3.725.900	0	4.629.000	4.629.000	100,00
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.922.800	3.922.800	100	8.792.000	8.792.000	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.862.415.400	1.862.415.400	100,00
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.862.415.400	1.862.415.400	100,00
3.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	239.853.780	242.253.780	99	238.977.000	238.977.000	100,00
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.173.930	7.173.930	100	10.580.000,00	10.580.000,00	100,00
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.737.500	18.000.000	121	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
6)	Penyediaan bahan logistrik kantor	6.000.000	6.450.000	108	7.935.000,00	7.935.000,00	100,00
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.600.000	7.600.000	100	11.030.000,00	11.030.000,00	100,00
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100	3.651.000,00	3.651.000,00	100,00
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	190.372.350	196.059.850	103	188.531.000,00	188.531.000,00	100,00
10)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.700.000	970.000	10	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.162.500	58.012.500	100	63.706.600,00	63.706.600,00	100,00
11)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.162.500	58.012.500	100	63.706.600	63.706.600	100,00
12)	Pengadaan mebel	0	0	0	0	0	100,00
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.964.500	279.964.500	100	357.842.000,00	357.842.000,00	100,00
13)	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100	1.270.000,00	1.270.000,00	100,00
14)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik	37.800.000	37.800.000	100	41.262.000,00	41.262.000,00	100,00
15)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	241.564.500	241.564.500	100	315.310.000,00	315.310.000,00	100,00
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.945.800	50.945.800	100	63.638.000,00	63.638.000,00	100,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.421.000	27.421.000	100	33.043.000,00	33.043.000,00	100,00
17)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.460.000	18.460.000	100	23.991.000,00	23.991.000,00	100,00
18)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.064.800	5.064.800				100,00
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	100	6.604.000,00	6.604.000,00	100,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.013.500	6.013.500	100	6.640.200	6.640.200	100,00
7.	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.640.200	6.640.200	100,00
20)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.640.200	6.640.200	100,00
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.361.400	14.361.400	100	31.500.000	31.500.000	100,00
8.	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	14.361.400	14.361.400	100	15.750.000	15.750.000	100,00
21)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.970.700	9.970.700	100	10.500.000	10.500.000	100,00
22)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	4.390.700	4.390.700	100	5.250.000	5.250.000	100,00
9.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	0	0	100	15.750.000	15.750.000	100,00
23)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	100	15.750.000	15.750.000	100,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	132.634.900	133.384.900	101	168.587.000	168.587.000	100,00
10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	132.634.900	133.384.900	101	168.587.000	168.587.000	100,00
24)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	132.634.900	133.384.900	101	168.587.000	168.587.000	100,00
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.969.750	75.969.750	100	80.896.200	80.896.200	100,00
11.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.969.750	75.969.750	100	80.896.200	80.896.200	100,00
25)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.000.000	49.000.000	100	57.960.000	57.960.000	100,00
26)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	26.969.750	26.969.750	100	22.936.200	22.936.200	100,00
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.067.650	47.067.650	94	66.276.000	66.276.000	100,00
12.	Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.067.650	47.067.650	94	66.276.000	66.276.000	100,00
27)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.815.750	15.375.750	91	21.126.000	21.126.000	100,00
28)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.470.850	17.910.850	92	23.474.850	23.474.850	100,00
29)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	7.185.150	7.185.150	100,00
30)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	13.781.050	13.781.050	100	14.490.000	14.490.000	100,00

Tabel 2.2
Realisasi APBD di Kecamatan Jumantono
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
		APBD	REALISASI	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.094.415.543	2.094.415.543	99	2.303.404.257	1.111.730.242	48
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.648.700	7.648.700	100	8.872.680	3.528.528	39
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	3.725.900	3.725.900	100	4.867.100	2.419.700	50
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.922.800	3.922.800	100	4.005.580	1.108.828	28
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.722.644.027	892.163.836	52
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.008.088	1.435.008.088	99	1.722.644.027	892.163.836	52
3.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	242.253.780	242.253.780	99	184.175.550	82.776.825	43,8
4)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7.173.930	7.173.930	100	5.054.050	3.425.475	68
5)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000	18.000.000	100	0	0	0
6)	Penyediaan bahan logistrik kantor	6.450.000	6.450.000	100	6.300.000	2.085.000	33
7)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.950.000	5.950.000	100	6.800.000	2.069.000	30
8)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100	6.000.000	2.500.000	42
9)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	193.889.850	192.437.850	99	158.197.500	72.697.350	46
10)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.020.000	2.020.000	100	1.824.000	0	0
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.862.500	88.965.470	99	42.825.000	-	0
11)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.862.500	77.265.470	100	42.825.000	-	0
12)	Pengadaan mebel	12.000.000	11.700.000	98	0	0	0
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.964.500	282.964.500	98	283.418.600	117.901.553	41,59
13)	Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100	600.000	0	0
14)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	40.800.000	38.495.032	94	40.800.000	16.637.653	41
15)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	241.564.500	241.564.500	100	242.018.600	101.263.900	42
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.945.800	50.945.800	100	61.468.400	15.359.500	27,5
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.471.000	36.569.500	98	37.630.000	11.259.500	30
17)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.460.000	18.460.000	100	16.680.000	4.100.000	25
18)	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0	0	0			0
19)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.064.800	5.064.800	100	7.158.400	0	0
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.013.500	6.013.500	100	6.245.750	0	0
7.	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.245.750	0	0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
		APBD	REALISASI	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
20)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.013.500	6.013.500	100	6.245.750	0	0
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.361.400	14.361.400	100	14.438.400	10.150.700	70,30
8.	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	14.361.400	14.361.400	100	14.438.400	10.150.700	70,30
21)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.970.700	9.970.700	100	10.150.700	10.150.700	100
22)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan)	4.390.700	4.390.700	100	4.287.700	0	0
9.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	0	0	100	0	0	0
23)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0	0	100	0	0	0
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	133.384.900	133.375.400	100	126.263.000	51.250.000	41
10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	133.384.900	133.375.400	100	126.263.000	51.250.000	41
24)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	133.384.900	133.375.400	100	126.263.000	51.250.000	41
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.969.750	72.219.750	92	48.000.000	0	0
11.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.969.750	72.219.750	92	48.000.000	0	0
25)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	49.000.000	45.250.000	84	48.000.000	0	0
26)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	26.969.750	26.969.750	100	24.010.950	0	0
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	51.937.650	51.836.800	100	43.124.150	4.750.000	14
12.	Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	51.937.650	51.836.800	100	43.124.150	4.750.000	14
27)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.375.750	15.363.750	100	13.782.700	0	0
28)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.910.850	17.822.000	100	15.985.050	0	0
29)	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	0	0
30)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	18.651.050	18.651.050	100	11.136.400	4.750.000	43

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.889.367.358	2.666.211.203	98	2.094.415.543	2.094.415.543	100
2	Program Penyelenggaraan Pdemerintahan dan Pelayanan Publik	2.867.400	2.867.400	100	6.013.500	6.013.500	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.008.000	16.008.000	100	14.361.400	14.361.400	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	275.576.100	275.376.100	100	133.384.900	133.375.400	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.713.100	86.570.600	100	75.969.750	72.219.750	92
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.462.400	17.462.400	100	51.937.650	51.836.800	100
	Persentase realisasi	**3.287.994.358**	**3.064.495.703**	**99,6**	**2.376.082.743**	**2.372.222.393**	**98,6**
	Rata-rata realisasi 6 program			**99,6**			**98,6**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

Kecamatan Jumantono merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumantono dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan OPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jumantono meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal,

serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:

   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:

   - Masih cukup banyak penduduk miskin
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
   - Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
   - Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang:

   - Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
   - Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
   - Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
   - Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
   - Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
   - Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
   - Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
   - Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

   Ancaman:

   - Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
   - Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
   - Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
   - Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
   - Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

TABEL 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jumantono s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4x100)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
KECAMATAN JUMANTONO										
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Nilai Sakip**	**70**	**67,15**	**75,3**	**68,65**	**92,16**	**68,70**		
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK yang tercapai targetnya			**100**	**100**	**100**	**100**		
07.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100%		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50
7.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Lapoaran capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	28

07.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**Persentase Kinerja Administasi dan Pelaporan Keuangan SKPD**	**100%**	87	**100%**	87	100	**100%**		
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	15 Orang	12 Orang /bulan	13 Orang /bulan	13 Orang /bulan	100	13 Orang /bulan	13 Orang / bulan	78
07.01.01.2.02.01	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**12 Bulan**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	
07.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	**63**
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	0	0	0	0	0	0	0	**0**
07.01.01.2.02.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	**56**
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetakan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	**46**
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	**67**
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum, Perjalanan Dinas yang di sediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	**75**
07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Jumantono)	Jumlah Arsip Dinamis yang dibeli	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	**40**

07.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100 %**	**0**	**0**
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor yang disediakan	8 buah	**8 buah**	2 unit	2 unit	100	0	0	0
07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	3 unit	**3 unit**	5 unit	5 unit	100	0	0	0
07.01.01.2.07.09	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	**0**	**0**	0	0	0	0
07.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100 %**	**0**	**0**
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang terlaksana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	0
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	12 Laporan	12 Laporan	12Laporan	12 Laporan	100	12Laporan	12Laporan	74
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	73
07.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	
	Urusan Pemerintahan Daerah	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	100	100%	100	100	100 %		
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	4 unit	4 unit	4 Unit	4 unit	100	4 Unit	4 Unit	59
07.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	100	100	100%	100	100	100 %	37	37
07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	2 Unit	2 unit	100	1 Unit	1 unit	**37**

07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**75**	**87,40**	**79**	**88,95**	127	89,00	**0**	**0**
07.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**100**	**87,40**	**79**	**88,95**	127	89,00	0	0
07.01.02.2.02.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	0	0
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100%**	**100 %**	**100**
07.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100%**	**100 %**	**100**
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	11 Lembaga	100	11 Lembaga	11 Lembaga	100
07.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	0	0
	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF**	**100 %**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**71**	
07.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	100%	**100%**	**71**	
07.01.04.2.01	Sinergritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tenatara Nasional Indonesia dan Instansi	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	71

	Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan"								
07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana**	**100 %**	**100**	**100**	**100**	100%	100%	**0**	
07.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**		**100**	**99,5%**	**100**	**100%**	**100%**	**0**	
07.01.05.2.01.03	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatua Bangsa	75 Orang	75 Orang	75 Orang	75 orang	100	75 Orang	75 orang	100
07.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan nasional	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang		0
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan**	**100 %**	**100**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**43%**	
07.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa**		**100**	**100%**	**100**	**99%**	**100%**	**43%**	
07.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	0	0

07.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	0	0
07.01.06.2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-	-	
07.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100	11 Dokumen	11 Dokumen	98

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Jumantono

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian		Catatan Analisis
						Th 2024	Th 2025 Smt. 1	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	112	Na	
		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	88.95	Na	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	68.65	Na	
				Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Nilai	100	67,57	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	Na	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	71	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	71	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	99.80	89	

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
		Th 2024	Th 2025	Th 2024	Th 2025	
Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	75	75	100	Na	
Nilai IKM	Nilai	79	79	88.95	Na	
Nilai SAKIP	Nilai	75.30	68.70	68.65	Na	
Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100	Na	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	71	
Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	71	
Persentase Desa / Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100	100	
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	99.80	89	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal.**
   Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Aparat kecamatan seringkali belum sepenuhnya menguasai tugas-tugas pelayanan publik, administrasi, maupun teknis lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Sistem kerja kecamatan belum terumuskan dengan jelas.**
   Kecamatan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal menjadi kurang efektif.
3. **Pengelolaan administrasi belum optimal.**
   Administrasi pemerintahan, pelaporan kegiatan, pengarsipan, dan manajemen data masih belum berjalan secara tertib dan efisien. Banyak kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual, dan belum terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai.
4. **Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana kerja yang belum memadai.**
   Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan medan geografis yang bervariasi membutuhkan mobilitas dan jangkauan layanan yang tinggi. Namun, fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan sarana komunikasi masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
5. **Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan.**

Masyarakat enggan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena merasa aspirasinya tidak didengar atau tidak diwujudkan dalam program nyata. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak antara pemerintah dan warga dalam proses pembangunan.

6. **Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.**
   Setelah pembangunan fisik seperti jalan, saluran air, atau fasilitas umum selesai dibangun, masyarakat kurang terlibat dalam upaya pemeliharaan. Akibatnya, sarana cepat rusak dan tidak berfungsi optimal.
7. **Potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.**
   Banyak potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan, seperti hasil pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut sering belum diolah dengan baik atau belum mendapat dukungan yang cukup agar bisa berkembang.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumantono yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumantono

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Sarana dan Prasarana pelayanan masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten • Beban kerja antar pegawai belum seimbang
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarana dan prasarana pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Jumantono dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Jumantono dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan dan desa**. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang terlah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jumantono dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jumantono dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jumantono

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Jumantono berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja OPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jumantono.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				**2.691.472.340**					**3.566.832.869**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA***	**Kec. Jumantono**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100**	**2.560.392.540**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Jumantono**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100**	**3.139.500.000**	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	8.872.680	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	17.750.250	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jumantono	Cakupan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.858.484.000	administrasi keuangan	Kec. Jumantono	Cakupan administrasi keuangan	100 %	2.137.256.600	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	191.243.860	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jumantono	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	316.049.900	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	111.032.500	

	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	384.607.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	473.248.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	67.185.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jumantono	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	84.162.750	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Jumantono**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**100%**	**6.362.300**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Jumantono**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**89,10**	**8.017.800**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Jumantono	Cakupan Jumlah Kegiatan pelayanan yang sesuai standar		6.362.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Jumantono	Cakupan Jumlah Kegiatan pelayanan yang sesuai standar		8.017.800	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Jumantono**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**18.846.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Jumantono**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**38.036.250**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	**18.846.400**	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	**38.036.250**	

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Jumantono**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**27.600.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Jumantono**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**203.568.400**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	27.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jumantono	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	**203.568.400**	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Jumantono**	**Persentase Desa /Kelurahan Tertib Perda**	**100 %**	**59.207.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Jumantono**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100 %**	**97.682.161**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	59.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jumantono	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	97.682.161	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Jumantono**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RPKDes sesuai Ketentuan**	**100 %**	**19.064.100**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec. Jumantono	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**80.028.258**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeirintahan Desa	**Kec. Jumantono**	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	**100 %**	19.064.100	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeirintahan Desa**	**Kec. Jumantono**	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	**100%**	**80.028.258**	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jumantono. Namun dalam proses ini Kecamatan Jumantono mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jumantono terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jumantono.

Tabel 2.9
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jumantono

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029,.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat

inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jumantono

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jumantono adalah :

TABEL 3. 1

Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program

(Target Tahun 2026)

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Oprasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Persen	89,10
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabuoaten/Kota	Nilai SAKIP	Persen	68.75
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persenatase Desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1. Tantangan

1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2. Peluang

1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Jumantono untuk meningkatkan kinerja.
3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jumantono mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Jumantono dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lelbih terinci dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumantono.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Jumantono masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jumantono

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jumantono di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
   b) Administrai Keuangan
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
      7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada OPD
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Pengadaan Mebel
      2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a).Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
3). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3). Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pembangunan Desa
4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumantono merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jumantono. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jumantono

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jumantono

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jumantono Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Jumantono
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 Kecamatan Jumantono

Unit Organisasi : Kecamatan Jumantono

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN								2.162.272.766					3.602.332.869
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2.026.901.816					3.139.500.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6.232.126					17.750.250

7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Tersusunnya Renja,RKA, DPA dan Rentra SKPD	6.122.600	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	2 dok		3.585.576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.122.600
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtiarRalisasi Kinerja SKPD	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	11.627.650	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	5 Laporan		2.646.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				11.627.650 0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1.510.179.166**					**2.137.256.600**
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.862.415.400	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.137.256.600	Kab. Karanganyar, Jumantono Semua Kelurahan	95	13 org/bulan		1.510.179.166	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			95	**2.137.256.600**
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**88.719.904**					**316.049.900**
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	jumlah paket Instansi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan	13.992.050	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100	12 paket		5.806.050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum				13.992.050
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15.208.750	Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	0		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15.208.750

7	01	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistic kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	12 paket		6.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10.494.900
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	95	12 paket		4.646.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				14.587.750
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang –undangan yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	0		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4.828.850
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan	95	12 laporan		71.005.354	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				249.332.650
7	01	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan	95	6 dokumen		962.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				7.604.950
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**0**					**111.032.500**
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah paket mebel yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono Semua Kelurahan	0	0		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30.417.500

7	01	01	2.07	00006	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah unit Peralatan Mesin dan lainnya yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80.615.000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**376.036.220**					**473.248.000**
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.680.150
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100	12 laporan		41.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				54.569.800
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100	12 Laporan		334.636.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				416.998.050
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**45.734.400**					**84.162.750**
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya		Kab. Karanganyar, Jumantono , Semua Kelurahan		5 unit		29.087.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				43.700.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK)	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		Kab. Karanganyar, Jumantono , Semua Kelurahan		25 unit		10.310.000	Dana Transfer Umum-				31.728.500

						yang tercapai targetnya								Dana Alokasi Umum				
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaa Aset Tetap Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Aset Tetap yang dipelihara		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan		-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Karanganyar Jumantono, Semua Kelurahan		2 unit		6.337.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.734.250
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**								**5.266.800**					**8.017.800**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**								5.266.800					8.017.800
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di wilayah Kecamatan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan		12 laporan		5.266.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.017.800
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**								**9.350.700**					**38.036.250**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**								9.350.700					**19.018.125**
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah kegiatan musrenbang kel dan musrenbangcam		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 lembaga Kemasyarakatan		9.350.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	12.678.750
7	01	003	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Persentase Lembaga	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatn Pemberdayaan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	Dana Transfer Umum-Dana			100 %	6.339.375

					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kemasyarakatan Aktif	Masyarakat di wilayah kecamatan							Alokasi Umum				
7	01	003	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													19.018.125
7	01	003	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													19.018.125
7	01	003	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	-		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	19.018.125
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**9.939.550**					**203.568.400**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**								**9.939.550**					**203.568.400**
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan		9.939.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	203.568.400
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**								**86.749.500**					**121.682.161**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**								**86.749.500**					**121.682.161**
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undan –	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	75 orang		50.965.000	Dana Transfer Umum-Dana			100 %	69.986.700

					Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Keatuan Republik Indonesia	Keagamaan yang terlaksana	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						Alokasi Umum				
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan intra suku, Umat Beragama, ras dan golongan Lainya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	120 orang		14.184.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	27.695.461
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen		21.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	24.000.000
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**								**24.064.400**					**91.528.258**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**								**24.064.400**					**91.528.258**
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusuna Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		2.872.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	4.500.000
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		4.017.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	25.509.645
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa memiliki APBDe	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		3.992.000	Dana Transfer Umum-Dana			100 %	28.345.878

						dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							Alokasi Umum				
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumem Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		1.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	3.500.000
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	12 dokumen		1.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100 %	3.500.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen yang dfasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	0	0		0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				8.676.060
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase desa memiliki APBDe dan RKPDes yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Kab. Karanganyar, Jumantono, Semua Kelurahan	100 %	11 dokumen		9.543.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17.496.675
												TOTAL	**2.162.272.766**					**3.602.332.869**

Tabel 4.2.
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jumantono Tahun 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2026
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,10

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiayang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	**Program Prioritas Kabupaten Karanganyar tahun 2026**	**Program/Kegiatan**	**Anggaran**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**Program :** Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 5.266.800
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;	**Program :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 86.749.500

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumantono harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumantono Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jumantono yang telah diusulkan dan ditetapkan

Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumantono secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 dapat disusun. Renja PD Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 disusun bedasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jumapolo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja PD Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja PD Kecamatan Jumapolo ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan PD di dalam kurun waktu mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja PD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja PD Kecamatan Jumapolo, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jumapolo.

Karanganyar, September 2025
Camat Jumapolo
Kabupaten Karanganyar

BAMBANG SRIYANTO, S.SOS., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19681020 199603 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv

BAB. I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I.1
1.2. Landasan Hukum I.2
1.3. Masud dan Tujuan I.3
1.4. Sistematika Penulisan I.4

BAB. II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
2.1. Evaluasi Pelaksaaan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun Sebelumnya dan Capaian RENSTRA Kecamatan Jumapolo II.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan II.5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD II.13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II.15
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II.22

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaah Kebijakan Nasional dan Provinsi III.1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD III.3
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Dearah III.6
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan PD III.7

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1. Program dan Kegiatan IV.1
4.2. Indikator Kinerja Pelayanan IV.2
4.3. Dana Indikatif IV.3
4.4. Sumber Dana Yang dibutuhkan IV.4

BAB VI PENUTUP
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja V.1
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V.1
5.3. Rencana Tindak Lanjut V.1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	TABEL	HALAMAN
1	Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025	II.1
2	Tabel 2.2. Realisasi APBD di Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 dan 2025	II.3
3	Tabel 2.3. Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II.5
4	Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumapolo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	II.7
5	Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan tahun 2024-2025	II.12
6	Tabel 2.6. Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024-2025	II.12
7	Tabel. 2.7. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	II.14
8	Tabel. 2.8. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	II.16
9	Tabel. 2.9. Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan	II.22
10	Tabel 3.1. Tujuan,Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2026	III.5
11	Tabel. 3.2. Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD	III.7
12	Tabel. 3.3. Keselarasan Sasaran PD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan	III.8
13	Tabel.4.1.Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jumapolo Tahun 2026	IV.3
14	Tabel. 4.2. Target IKU Tahun 2026	IV.24
15	Tabel 4.3. Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV.24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Renja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan Penjabaran Recana Kerja Pemerintah Daerah Jangka waktu 1 tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Jumapolo untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar da berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

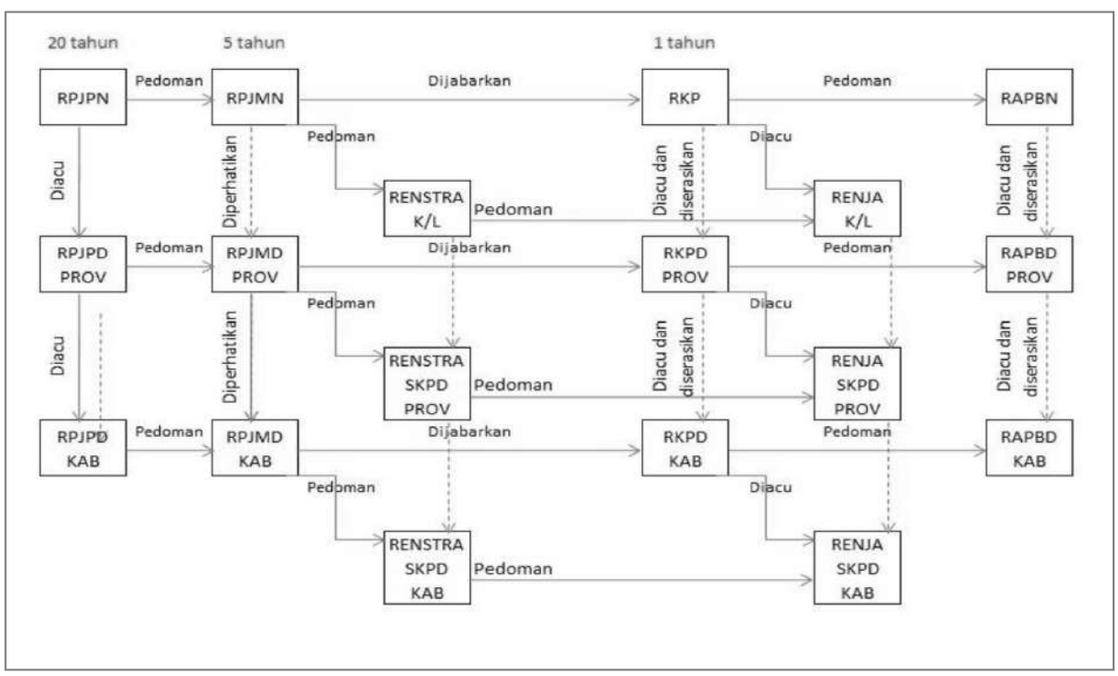

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar perlu menyusun Rencana kerja dengan maksud untuk memberikan arahan dan gambaran serta pedoman tentang perencanaan kegiatan di Kecamatan Jumapolo tahun 2026. Adapun maksud di susunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyara adalah sebagaai berikut :

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Sebagai Bahan Acuan dan arahan bagi Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara professional sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar tahun 2026 yaitu:

1. Kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Pelaksanaan Kegiatan lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah di tetapkan baik kuantitas maupun kualitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Jumapolo, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksut dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang analisis Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

BAB III.TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran Rencana Kerja OPD.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026.

BAB V .PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, Kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

BAB. II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jumapolo

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Kecamatan Jumapolo dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; Kecamatan Jumapolo untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar 2.505.921.788,- *(dua milyar lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)* yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar. Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.330.366.289,-*(dua milyar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah)* sisa anggaran Rp. 173.555.499,-*(seratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).*

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini:

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jumapolo telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jumapolo

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	**2.238.796.849**	**2.265.881.932**	**98,8**	**2.248.115.136**	**2.248.115.136**	**100%**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*3.000.000*	3.000.000	*3.000.000*	5.500.000	5.500.000	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	1.250.000	1.250.000	1.250.000	5.000.000	5.000.000	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	100%
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	100%
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	750.000	0	0	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.747.625.049	1.773.960.132	98,52	1.813.076.336	1.813.076.336	100%
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.747.625.049	1.773.960.132	98,52	1.813.076.336	1.813.076.336	100%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64.000.000	68.000.000	94,12	0	0	100%
6)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	64.000.000	68.000.000	94,12	0	0	100%
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	35.375.800	38.125.800	92,79	45.944.800	45.944.800	100%
7)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1.000.000	1.250.000	80	2.000.000	2.000.000	100%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.931.000	7.931.000	74,78	9.371.000	9.371.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
9)	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	1.400.000	1.400.000	100	800.000	800.000	100%
10)	Penyediaan bahan logistrik kantor	3.879.000	3.879.000	100	4.771.000	4.771.000	100%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.210.800	4.210.800	100	5.002.800	5.002.800	100%
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.400.000	8.900.000	94,38	450.000	450.000	100%
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10.000.000	10.000.000	100	22.400.000	22.400.000	100%
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	555.000	555.000	100	1.150.000	1.150.000	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	100%
15)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	100%
16)	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	100%
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	100%	0	0	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.196.000	335.196.000	100	334.750.000	334.750.000	100%
18)	Penyediaan jasa surat menyurat	996.000	996.000	100	550.000	550.000	100%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	19.800.000	19.800.000	100	19.800.000	19.800.000	100%
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	314.400.000	314.400.000	100	314.400.000	314.400.000	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.600.000	47.600.000	112,6	48.844.000	48.844.000	100%
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.600.000	38.600.000	100	42.924.000	42.924.000	100%
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100	2.920.000	2.920.000	100%
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	6.000.000	200	3.000.000	3.000.000	100%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.750.000	2.750.000	100	3.400.000	3.400.000	100%
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.750.000	2.750.000	100	3.400.000	3.400.000	100%
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100%
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.750.000	1.750.000	100	.2.400.000	.2.400.000	100%
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**15.995.000**	**15.995.000**	**100%**	**14.518.000**	**14.518.000**	**100%**
12.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.995.000	5.995.000	100%	4.815.000	4.815.000	100%
26)	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Furum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5.995.000	5.995.000	100%	4.815.000	4.815.000	100%
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	100%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	**27.600.000**	**27.600.000**	**100%**	**21.600.000**	**21.600.000**	**100%**
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keytertiban Umum	27.600.000	27.600.000	100%	21.600.000	21.600.000	100%
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.600.000	27.600.000	100%	50.000.000	50.000.000	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**63.810.000**	**63.060.000**	**101,19**	**57.780.000**	**57.780.000**	**100%**
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	63.810.000	63.060.000	101,19	57.780.000	57.780.000	100%
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	58.560.000	58.560.000	100	55.280.000	55.280.000	100%
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regeonal dan Nasional	5.250.000	4.500.000	116,67	2.500.000	2.500.000	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**13.710.000**	**13.710.000**	**100**	**7.700.000**	**7.700.000**	**100%**
17	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**13.710.000**	**13.710.000**	100	7.700.000	7.700.000	100%
31)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.100.000	2.100.000	100	0	0	100%
32)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.750.000	9.750.000	100%	7.700.000	7.700.000	100%
33)	Rekomendasi Pengangkatan	1.860.000	1.860.000	100%	0	0	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Pemberhentian Perangkat Desa						
	1 urusan 6 Program, 17 Kegiatan, 33 Subkegiatan	**2.362.661.849**	**2.388.996.932**	98,89	**2.353.113.136**	**2.353.113.136**	100%

Sumber : Kecamatan Jumapolo, 2025 diolah

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi APBD di Kecamatan Jumapolo Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.382.806.788	2.207.851.289	92,66%	2.248.115.136	951.167.591	42,31%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	100%	5.500.000	2.133.750	38,80%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	1.250.000	1.250.000	100%	5.000.000	1.883.750	37,68
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	100%	250.000	250.000	100
3)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000	500.000	100%	250.000	0	0
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000	750.000	100%	0	0	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.840.884.988	1.669.600.589	90,70%	1.813.076.336	776.960.940	82,45%
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.840.884.988	1.669.600.589	90,70%	1.813.076.336	776.960.940	82,45%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.520.000	77.520.000	100%	0	0	0
6)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	77.520.000	77.520.000	100%	0	0	0
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	63.625.800	63.518.300	93,83%	45.944.800	16.217.500	35,30%
7)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	4.057.000	4.057.000	100%	2.000.000	980.000	49,00%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.349.000	13.349.000	100%	9.371.000	4.113.200	43,89%
9)	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000	100%	800.000	0	0
10)	Penyediaan bahan logistrik kantor	7.004.000	6.996.500	99,89%	4.771.000	1.057.000	22,15%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.810.800	5.810.800	100%	5.002.800	3.284.800	65,66%
12)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.900.000	13.900.000	100%	450.000	0	0,00
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15.950.000	15.850.000	99,37%	22.400.000	5.645.000	25,20%
14)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	555.000	555.000	100%	1.150.000	1.137.500	98,91%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	0	0	0,00%
15)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	0,00
16)	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0,00
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100%	0	0	0,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	335.196.000	331.870.900	99,01%	334.750.000	137.814.401	41,17%
18)	Penyediaan jasa surat menyurat	996.000	990.000	99,40%	550.000	275.000	50,00%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	19.800.000	16.480.900	83,24%	19.800.000	6.539.401	33,03
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	314.400.000	314.400.000	100,00%	314.400.000	131.000.000	41,67
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	52.580.000	52.341.500	99,55%	48.844.000	18.041.000	36,94

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Daerah						
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.580.000	43.341.500	99,45%	42.924.000	18.041.000	60,71
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100%	2.920.000	0	0,00
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100%	3.000.000	0	0,00
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.750.000	2.750.000	100%	3.400.000	948.000	27.88
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2.750.000	2.750.000	100%	3.400.000	948.000	94.80
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	948.000	94,80
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	1.750.000	1.750.000	100%	.2.400.000	0	0,00
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.995.000	15.995.000	100%	14.518.000	4.518.000	31,12
12.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.995.000	5.995.000	100%	4.815.000	4.815.000	100
26)	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Furum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	5.995.000	5.995.000	100%	4.815.000	4.815.000	100
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0	0,00
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100%	10.000.000	0	0,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	27.600.000	27.600.000	100%	21.600.000	9.000.000	41,67
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keytertiban Umum	27.600.000	27.600.000	100%	21.600.000	9.000.000	41,67
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.600.000	27.600.000	100%	50.000.000	616.150	3,34
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.060.000	62.460.000	99.05%	57.780.000	0	0,00
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	63.060.000	62.460.000	99.05%	57.780.000	0	0,00
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	58.560.000	57.960.000	99,98%	55.280.000	0	0,00
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regeonal dan Nasional	4.500.000	4.500.000	100%	2.500.000	0	0,00
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.710.000	13.710.000	100%	7.700.000	0	0,00
17	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.710.000	13.710.000	100%	7.700.000	0	0,00
31)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.100.000	2.100.000	100%	0	0	0,00
32)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.750.000	9.750.000	100%	7.700.000	0	0,00
33)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.860.000	1.860.000	100%	0	0	0,00
	1 urusan 6 Program, 17 Kegiatan, 33 Subkegiatan	**2.505.921.788**	**2.330.366.289**	**92,99%**	**2.353.113.136**	**965.633.591**	**41,04%**

Sumber : Kecamatan Jumapolo, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.505.921.788,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.330.366.289,00 atau 92,99 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 89,23%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 965.633.591,00 atau 41.04% dari pagu anggaran Rp. 2.353.113.136,00

Tabel. 2.3

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.401.498.874	2.102.618.682	87,55	2.382.806.788	2.207.852.289	92,66
2	Program Penyelenggaraan Pdemerintahan dan Pelayanan Publik	5.000.000	4.993.200	99,86	2.750.000	2.750.000	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	232.000.000	231.552.900	99,81	15.995.000	15.995.000	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.962.500	31.962.500	100	27.600.000	27.600.000	100
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	93.100.000	92.380.000	99,23	63.060.000	62.460.000	99,05
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.500.000	21.500.000	100	13.710.000	13.710.000	100
	Persentase realisasi	**2.785.061.374**	**2.485.007.282**	**89,23**	**2.505.921.788**	**2.330.366.289**	**92,99**
	Rata-rata realisasi 6 program			**89,23**			**92,99**

Sumber : Kecamatan Jumapolo, 2025 diolah

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Jumapolo perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumapolo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Indek kepuasan masyarakat.

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumapolo meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan , baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi , Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal
   Kekuatan :
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetaapkan payung hukunya
   - Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama
   - Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama

- Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional
- Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daaerah

Kelemahan :

- Masih banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama
- Masih rendahnya kualitas SDM
- Kurangnya partisipasi aktip masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama
- Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan

Ancaman :

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa
- Munculnya faham agama yang radikal dan ekstrim
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Pada pembahasan sub bab ini kami disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumapolo, dengan format Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumapolo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jumapolo

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Tahun Akhir Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9.	10	11= (10/4)
7					Kewilayahan									
7	01				Kecamatan Jumapolo									
7	01				Kecamatan									
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100	71,05	72	71,05	98,86	75	NA	
						Prosentase Inikator OPD (IKU dan IKK) yang mencapai targetnya	100	71,05	72	71.05	98,86	73	42,31	42,31
7	*01*	*01*	*2.01*		*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*Tersediannya dokumen perencanan dan evaluasi kinerja OPD*	*100*	98,88	*100*	100	100	*100*	*42,31*	*42,31*
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja OPD	2	2	2	2	100	2	1	32,68
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA OPD	2	2	2	2	100	2	2	100

5	02	02	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA OPD	2	2	2	2	100	0	0	0
7	01	01	2.01	05	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LKJIP OPD	2	2	2	2	100	0	0	0
7	*01*	*01*	*2.02*		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Capaian realisasi anggaran OPD*	*100*	84,84	*100*	90.70	90.70	*100*	*82,45*	*82,45*
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan tunjangan ASN	15	15	15	15	90.70	15	8	82,45
7	*01*	*01*	*2.06*		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Persentase pemenuhan kebutuhan kantor*	100	98,37	*100*	99,83	99,83	*100*	*35,30*	*35,30*
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	12	12	12	100	12	6	49,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	6	43,89
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	12	12	12	12	99,89	12	6	22,15
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak penggandaan	12	12	12	12	100	12	6	65,66
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi jamuan makanan dan minuman	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	12	12	99,37	12	4	25,20
7	1	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Tertatanya Arsip SKPD	12	12	12	12	100	12	12	98,91
7	*01*	*01*	*2.07*		*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100*	99,18	*100*	100	100	*100*	0	*0*
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainya	1	1	2	2	100	2	2	0
7	*01*	*01*	*2.08*		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*100*	98,76	*100*	99,01	99,01	*100*	*41,17*	*41,17*

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2	2	2	2	99,40	2	2	50
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	12	12	12	83,24	12	6	*33,03*
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	12	12	12	100	12	6	41,67
7	*01*	*01*	*2.09*		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*100*	96,42	*100*	99,55	99,55	*100*	*36,94*	*36,94*
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	9	9	9	99,45	9	4	36,94
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin kantor yang memadai	3	3	3	3	100	3	0	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	1	1	1	1	100	1	1	100
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Index Kepuasan Masyarakat	75	83,15	82,05	83,40	110,09	84,50	27,88	27,88
7	*01*	*02*	*2.02*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan*	*Survey Kepuasan Masyarakat*	*100*	99,86	100	100	100	100	94,80	94,80
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan	Survey kepuasan masyarakat	1	1	12	12	100	12	12	94,80
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Tercapainya pelayanan prima kepada masyarakat	2	2	12	12	100	12	0	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	99,81	*100*	100	100	100	31,12	31,12

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	*01*	*03*	*2.01*		*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif*	*100*	99,81	*100*	100	100	100	*31,12*	*31,12*
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Terselenggaranya kegiatan musrenbang	12	12	12	12	12	12	6	31,12
7	*01*	*03*	*2.03*		*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif*	*100*	100	100	100	100	100	*0*	*0*
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan pembinaan PKK	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100	100	100	100	100	100	41,67	41,67
7	*01*	*04*	*2.01*		*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	*Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif*	*100*	100	100	100	100	100	*41,67*	*41,67*
7	01	04	2.01	01	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Tercapainya Sinergritas Deangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	16,67
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	100	99,23	*100*	99,05	99,05	*100*	0	0
7	*01*	*05*	*2.01*		*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	*Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan*	*100*	99.23	*4*	4	99,05	*4*	*0*	*0*
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Tercapainya pelaksanaan kegiatan daerah	90	98.98	90	90	98,98	90	0	0
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Tercapainya kegiatan FKUB	90	100	90	90	100	90	0	0

					Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Perda	100	100	100	100	100	100	0	0
7	*01*	*06*	*2.01*		*Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Persentase Desa Tertib Perda*	*100*	100	*100*	100	100	*100*	*0*	*0*
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Tersusunnya APBDes dan Perdes lainnya	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tercapainya tertib administrasi desa	12	12	12	12	100,00	12	0	0
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tercapainya pengelolaan keuangan dengan menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan aset desa	12	12	12	12	100	12	0	0
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Terselenggaranya pembinaan perangkat desa	12	12	12	12	100	12	0	0

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Jumapolo

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	71,05	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83,40	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	71,05	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	42,31
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	27,88
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	31,12
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	41,67
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	0
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	0

Sumber : Renstra Kecamatan Jumapolo 2025-2029

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt.I	Th 2024	Th 2025 Smt.I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	75	71,05	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak dipakai	0,762	Tidak dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	100	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	82,5	84,50	83,40	0	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	99,05	0	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jumapolo sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumapolo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
   e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa
6. Permasalahan Umum di luar tusi
   Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Jumapolo
   Kedudukan Kantor Kecamatan Jumapolo yang berada di tengah pusat kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumapolo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumapolo yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumapolo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan	**Seksi Tata Pemerintahan** a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** a. Kurangnya pemerataan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **Seksi Kesejahteraan Sosial** a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **Seksi Pelayanan Umum** a. Belum Optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan Prasarana c. Belum optimalnya Pengelolaan aset d. Belum Optimalnya sistem kearsipan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

a. Rancangan Kerangka ekonomi daerah.
b. Program prioritas Pembangunan daerah.
c. Rencana Kerja , Pendanaan, dan Prakiraan Maju.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD yang di jelaskan dalam Lampirkan tabel berikut :

Tabel 2.8.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jumapolo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN				2.297.334.919					2.958.842.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Jumapolo	*Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya*	*75%*	2.166.255.119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec Jumapolo	*Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya*	*75%*	2.789.700.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%	2.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	100%	12.170.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	1.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Restra, Renja Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen RKA OPD	2 dokumen	1.290.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	250.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen DPA OPD	2 dokumen	1.380.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*100%*	1.738.870.119	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*100%*	2.000.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	1.738.870.119	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang	2.000.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	70.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasaekan Tugas dan Fungsi	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	40 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	40 Orang	70.000.000	

			Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*100%*	44.345.000	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*100%*	131.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Paket	12.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Paket	1.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor	12 Paket	5.365.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan bahan logistic kantor	12 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan barangcetakan dan penggandaan	12 Paket	4.980.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan barangcetakan dan penggandaan	12 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec Jumapolo	Jumlah Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Jumapolo	Jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	450.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Jumapolo	Jumlah fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	19.900.000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	30.000.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Penatausahaan Arsip SKPD	2 Dokumen	1.150.000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec Jumapolo	Jumlah Penatausahaan Arsip SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	*100%*	4.500.000	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kec Jumapolo	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	*100%*	109.530.000	
	Pengadaan Mebel	Kec Jumapolo	Jumlah Mebaelair yang diadakan	6 Unit	0	Pengadaan Mebel	Kec Jumapolo	Jumlah Mebaelair yang diadakan	6 Unit	20.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	3 Unit	4.500.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	3 Unit	25.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	14.530.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Kec Jumapolo	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	1 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	2 Unit	50.000.000	

	Lainnya		Bangunan Lainnya					Bangunan Lainnya			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	*100%*	334.750.000	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Kec Jumapolo	Jumlah Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	*100%*	375.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Jumapolo	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 Laporan	550.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Jumapolo	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Jumapolo	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	12 Laporan	19.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Jumapolo	Jumlah Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Laporan	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	314.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Jumapolo	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	340.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec Jumapolo	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*100%*	41.290.000	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Kec Jumapolo	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*100%*	92.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Jumapolo	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8 unit	35.370.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Jumapolo	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraanperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	8 unit	45.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kec Jumapoloo	Jumlah Meubelair Kantor	12 unit	0	Pemeliharaan Mebel	Kec Jumapoloo	Jumlah Meubelair Kantor	12 unit	7.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 unit	2.920.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 unit	10.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah Gedung Kantor	1 unit	3.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Jumapolo	Jumlah Gedung Kantor	1 paket	30.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Jumapolo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5 Nilai	6.362.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Jumapolo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5 Nilai	1.102.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	*1 Laporan*	6.362.300	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan*	Kec Jumapolo	Jumlah PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	*2 Laporan*	1.102.500	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Kec Jumapolo	Jumlah Fasilitasi Percepatan	2 Laporan	1.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Kec Jumapolo	Jumlah Fasilitasi Percepatan	2 Laporan	602.500	

	Minimal Di Wilayah Kecamatan		Pencapaian StandarPelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan			Minimal Di Wilayah Kecamatan		Pencapaian StandarPelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecama	1 Laporan	5.362.300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecama	1 Laporan	500.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Jumapolo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	18.846.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Jumapolo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	19.514.250	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	*12 Bulan*	18.846.400	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	Kec Jumapolo	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa	*12 Bulan*	19.514.250	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Lembaga yang berartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 Lembaga	8.846.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Lembaga yang berartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	12 Lembaga	9.514.250	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.000.000	
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Jumapolo	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100%	27.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Jumapolo	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100%	40.241.250	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kec Jumapolo	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*12 Laporan*	27.600.000	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum*	Kec Jumapolo	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*12 Laporan*	40.241.250	
	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Sinergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27.600.000	Snergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Sinergritas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.241.250	
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Jumapolo	Persentase Wilayah TertibPerda	100%	59.207.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Jumapolo	Persentase Wilayah TertibPerda	100%	73.000.050	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Kec Jumapolo	Jumlah PenyelenggaraanUrus	*8 Kegiatan*	59.207.000	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai*	Kec Jumapolo	Jumlah PenyelenggaraanUrusa	*8 Kegiatan*	59.207.000	

	Penugasan Kepala Daerah		an Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			*Penugasan Kepala Daerah*		n Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec Jumapolo	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	90 Orang	54.207.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaann dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kec Jumapolo	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaann dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia	90 Orang	60.000.000	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Jumapolo	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama , Ras , dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regeonal dan Nasional	90 Orang	5.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Jumapolo	Jumlah Pembinaan Kerukunan Umat Beragama , Ras , dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regeonal dan Nasional	90 Orang	13.000.050	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec Jumapolo	Jumlah Lembaga Kemsayarakatan yang di Kembangkan dalam kehidupan Demokrasi	2 Lembaga	0	
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Jumapolo	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	100%	19.064.100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Jumapolo	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	100%	35.283.950	
	Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Fasilitasi dan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*14 Dokumen*	19.064.100	*Fasilitasi, Rekomendasi, Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Kec Jumapolo	Jumlah Fasilitasi dan Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*14 Dokumen*	35.283.950	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan APBDes dan Perdes lainnya	2 Dokumen	2.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi penyusunan APBDes dan Perdes lainnya	2 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Pembinaan administrasi desa	0 Dokumen	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Pembinaan administrasi desa	0 Dokumen	2.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan	6 Dokumen	11.064.100	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi pengelolaan keuangan dengan	12 Dokumen	21.283.950	

			menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan asset desa					menggunakan Siskeudes, fasilitasi pencairan : ADD, DD, Pajak Retribusi dan bantuan keuangan, fasilitasi pengelolaan asset desa			
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi pembinaan perangkat desa	2 Dokumen	4.200.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi pembinaan perangkat desa	2 Dokumen	5.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0		Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	1.800.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kec Jumapolo	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	5.000.000	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Jumapolo pada tahun 2026 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

Bidang : Sarana dan Prasarana							
NO	**KEGIATAN PRIORITAS**	**DESA**	**MASALAH**	**ALAMAT/ LOKASI**	**TARGET/ VOLUME**	**PAGU ANGGARAN (Rp)**	**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Pembangunan Jalan, Talud, Draenase dan Jembatan Kabupaten	Desa Karangbangun	Jalan Rusak	Jl. PU Kabupaten ke Arah Desa Jatimulyo	1 Paket	300.000.000	DPUPR
2.	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Desa Bakalan	Jalan Klu Malam Gelap Gulita	Jl. DPU dari Kecamatan Jumapolo Arah Kecamatan Jumantono	1 Paket	200.000.000	Dishub Kabupaten Karanganyar
3.	Pembangunan dan Rehap Kantor Desa	Desa Jatirejo	Kantor Desa Rusak	Desa Jatirejo	1 Paket	300.000.000	DPUPR
4	Rehap Balai Desa	Desa Lemahbang	Balai Desa perlu renopasi dan pembaharuan	Balai Desa Lemahbang	1 Paket	300.000.000	DPUPR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;

10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;

9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim

9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jumapolo

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jumapolo Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jumapolo adalah.

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator dan Target Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun
					2026
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	84,25
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	69,20
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	96
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100

Sumber : Renstra Kecamatan Jumapolo 2025-2029

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1. Tantangan Perangkat Daerah

Kecamatan Jumapolo sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pad urusan Perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan daerah seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Tantangan pembangunan di Indonesia terus berkembang, dan lembaga perencanaan seperti Kecamatan Jumapolo harus dapat melihat hal ini, beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

1) Semakin kompleksnya isu pembangunan, Kecamatan Jumapolo memiliki kesempatan untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih adaptif dan inovatif.
2) Tantangan kemajuan teknologi. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, Kecamatan Jumapolo dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
3) Adanya perubahan kebijakan yang konstan dan dinamis dapat memengaruhi kontinuitas dari rencana pembangunan nasional dan daerah. Kecamatan Jumapolo harus tetap siap menghadapi perubahan politik untuk memastikan keberlanjutan dari program-program yang sudah direncanakan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Bappenas dan Bappeda menjadi kunci sukses dalam menjalankan program pembangunan yang terintegrasi, menjadi tantangan tersendiri.
4) Perubahan Iklim seringkali mempengaruhi pelaksanaan suatu rencana, sehingga hasilnya tidak sesuai target. Misalnya untuk urusan pertanian : Perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil pertanian dan sumber daya alam di daerah ini, yang dapat berdampak pada keberlangsungan Pembangunan;
5) Persaingan dengan daerah lain: Terdapat persaingan dengan daerah lain dalam hal investasi, sumber daya manusia, atau penarikan wisatawan, atau penarikan investor, perbedaan dalam penataaa ruang dll.
6) Perubahan Kebijakan Pemerintah yang sering berganti-ganti atau berubah-ubah, kurang mendukung konistensi rencana pembangunan: Pemerintah dapat mengubah kebijakan yang tidak mendukung pembangunan di daerah ini, seperti pembatasan investasi atau perubahan regulasi yang mempengaruhi sektor tertentu.

3.3.2. Peluang Perangkat Daerah

Disamping adanya tantangan Kecamatan Jumapolo juga memiliki peluang antara lain adalah :

1. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari sistem perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, menjadi kesempatan yang baik untuk memulai perencanaan yang konsisten, sinkron dan berkelanjutan.
2. Stimulus Pemerintah untuk Pembangunan Daerah: Pemerintah memberikan berbagai insentif dan dukungan untuk pembangunan daerah, seperti program-program pengembangan wilayah dan investasi.
3. Potensi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kolaborasi antar pihak): Daerah ini memiliki potensi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perusahaan swasta atau NGO dalam membangun infrastruktur dan program-program pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil: Daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang bisa menjadi basis untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi baru dan diversifikasi ekonomi.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: disisi lain mendorong muncul dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Pemerintah mengubah kebijakan yang mendukung pembangunan daerah, seperti perubahan regulasi yang mempermudah investasi dan pengembangan wilayah.

6. Peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa sektor tertentu, seperti pariwisata, pertanian, atau industri yang dapat memberikan peluang bagi daerah ini untuk mengembangkan sektor tersebut.
7. Selain itu, Kecamatan Jumapolo dapat memainkan peran yang lebih proaktif dan inisiatif dalam mengembangkan strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Inisiatif seperti pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan promosi energi terbarukan dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan PD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jumapolo mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Jumapolo dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumapolo.

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran PD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Jumapolo masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator
Sasaran.1 Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

Sumber : Kecamatan Jumapolo 2025

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran PD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya
			Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumnber daya Air, dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gdedung Kantor dan Bangunan Lainya
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan

			pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regeonal dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : Kecamatan Jumapolo 2025

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN JUMAPOLO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jumapolo

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra PD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Administrai Keuangan
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      5) Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
      7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD
      8) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada PD
   d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan
      2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bagunan Lainnya
      3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
      1) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Mimnimal di Wilayah Kecamatan
      2) Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a) Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      3) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a) Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
      1) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
      2) Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan tabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumapolo

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra PD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jumapolo , yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumapolo merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jumapolo. (lebih lengkap lihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jumapolo

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jumapolo

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan Pusat.

Tabel 4.1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN JUMAPOLO KAB. KARANGANYAR

TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kecamatan Jumapolo						1.938.349.768,00							3.185.480.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.938.349.768,00							3.185.480.000,00	
	7 01	KECAMATAN						1.938.349.768,00							3.185.480.000,00	
1	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			75 %	1.871.969.768,00						-	3.037.330.000,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	1.489.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	10.000.000,00	
	7 01 01 2.01 00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.489.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		7.500.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		2.500.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	1.494.349.768,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	2.250.000.000,00	
	7	01	01	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

				02	01														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/ bul an	1.494.349.768,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		2.250.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	75.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas	Kecamatan Jumapolo		75.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

														disabilitas.	infrastruktur				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	31.333.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	142.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	800.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		15.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5.	Kecamatan Jumapolo		12.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

															(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		4.500.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.125.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		15.500.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan				12 Paket	4.908.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo,	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Penguatan Landasan Tata	Kecamatan Jumapolo		21.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

							Penggandaan yang Disediakan						Semua Kel/Desa	(DAU)	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		5.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	500.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas	Kecamatan Jumapolo		25.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

												disabilitas.	infrastruktur					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	11.700.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		32.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		12.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	82.330.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		27.330.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengemba	Kecamatan Jumapolo		55.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

														generasi Z), dan penyandang disabilitas.	ngkan kualitas infrastruktur				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	315.275.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	384.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	275.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		6.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.400.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		33.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	297.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		345.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Umum	-			100 %	29.523.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo	-	94.000.000,00	

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	28.143.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		47.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	1.380.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jumapolo		12.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Jumapolo		35.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

							habili tasi								olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			84,5 nilai	2.000.000,00						-	1.650.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	-			1 Laporan 84.5 Skor	2.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo	-	1.650.000,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo		650.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

												disabilitas.	infrastruktur					
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumapolo		1.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Presentase Lembaga Kemasyarakatan	-			100 %	14.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	-			12 Laporan	14.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	25.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		10.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		15.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	2.800.000,00						-	42.000.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	2.800.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo	-	42.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		42.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	-			100 %	41.900.000,00						-	44.000.000,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			100 %	41.900.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo	-	44.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan				50 Orang	20.300.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		25.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO

							Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				90 Orang	0,00	Kab. Karanganyar , Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		15.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar , Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		4.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
6	7	01	06			PROGRAM	Persentase desa	-			100 %	5.680.000,00						-	35.500.000,00	

						PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	memiliki APBDes dan RKPDes yang											
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DEsa	-			14 Dokumen	5.680.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo	-	35.500.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		2.500.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaa n Aset Desa				6 Dokume n	4.480.000,00	Kab. Karanganyar , Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta han Berintegrit as Dan Dinamistif 5. Mengemba ngkan kualitas infrastrukt ur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		23.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	06	2. 01	00 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokume n	0,00	Kab. Karanganyar , Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKAS I UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta han Berintegrit as Dan Dinamis 3. Meningka tkan integritas dalam tata kelola pemerinta han	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		5.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	7	01	06	2. 01	00 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Jumapolo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	12 Desa di Wilayah Kecamatan Jumapolo		5.000.000,00	KECAMATAN JUMAPOLO
	J U M L A H											1.938.349.768,00							3.185.480.000,00	

Tabel. 4.2
Target IKU Kecamatan Tahun 2026

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Tahun 2026
1.	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	Nilai	84,25

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kecamatan	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**Program:** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan **SubKegiatan :** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.000.000
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program:** Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah **SubKegiatan :** 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	20.300.000 21.600.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Daerah Tahun 2026

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumapolo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumapolo Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut adalah sebagai berikut:

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja oleh Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumapolo secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jumapolo Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN MATESIH
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Matesih, September 2026
CAMAT MATESIH

SUGIHARJO, S.IP, MM
Pembina Tk I
NIP. 197111081992031005

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL.....
KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih II-19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-21
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MATESIH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran III-3
3.3 Tantangan dan Peluang III-7
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MATESIH
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih IV-1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih IV-2
4.3 Data Indikatif Kecamatan Matesih IV-2
4.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Matesih IV-3
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut..... V-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 Dengan APBD 2024 dan Renja 2024 dengan APBD 2025	II-2
Tabel 2.2	Persandingan realisasi APBD (Program ,Kegiatan dan sub kegiatan) Tahun 2024dan Tahun 2025 Triwulan II	II-5
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Matesih dan Pencapaian Renstra Kecamatan Matesih s/d Tahun 2024	II-10
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program (Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)	II-17
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih……	II-17
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk penetuan Prioritas dan Sasaran kecamatan	II-20
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar	II-26
Tabel 2.9	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar	II-28
Tabel 3.1	Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran (Target Tahun 2024, 2025 dan 2026	III-6
Tabel 3.2	Keselarasan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran	III-8
Tabel 3.3	Keselarasan sasaran OPD dengan Program Kerja dan sub Kegaiatan	III-8
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Matesih Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar	IV-4
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-15
Tabel 4.3	Program yang mendukung Prioritas	IV-15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan oleh TAP MPR Nomor X/MPR/1998 dan Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka Kecamatan Matesih berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya Renja PD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra PD. Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra PD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Kecamatan Matesih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Matesih disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Matesih, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Matesih.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Matesih, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2023

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Matesih tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Matesih

Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MATESIH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MATESIH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Matesih

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Matesih berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Matesih.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

A. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

Kecamatan Matesih untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.815.402.574,- *(Dua Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.697.777.574 *(Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)* dan belanja Modal sebesar Rp. 117.625.000,- *(Seratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).* Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.750.694.410,- *(Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)* atau sebesar 98%, sisa anggaran Rp. 64.708.164,- *(Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat)* atau sebesar 2 %.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 15 kegiatan dengan capaian kinerja 96%, Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.444.957.574,- dan terealisasi Rp. 2.380.667.410,- (96%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp 111.600.000,- dan terealisasi Rp. 111.600.000,- (100%).
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 164.040.000,- terealisasi sebesar Rp. 164.040.000,- (100%).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 51.350.000,- terealisasi sebesar Rp. 51.350.000,- (100%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 4.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- (100%).

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 97.5%. Anggaran yang tersedia Rp. 39.455.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.455.000,- (97.5%).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2029 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Matesih

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	
I.	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.421.957.574**	**2.444.957.574**	**99,1**	**2.437.133.784**	**2.460.949.784**	**99,0**
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**6.000.000**	***6.000.000***	**100,0**	***3.214.900***	***1.553.175***	**207,0**
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	**100,0**	3.214.900	1.553.175	**207,0**
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.871.808.092	***1.934.158.424***	**96,8**	***1.925.038.009***	***1.925.038.009***	**100,0**
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.871.808.092	1.934.158.424	**96,8**	1.925.038.009	1.925.038.009	**100,0**
4.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	139.988.700	147.768.700	**94,7**	***216.290.875***		**94,6**
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	6.000.000	**83,3**	4.562.000	4.562.000	**100,0**
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.887.200	23.819.000	**91,9**	17.039.875	18.096.100	**94,2**
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	6.000.000	**83,3**	8.535.000	7.160.000	**119,2**
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.013.500	10.017.700	**100,0**	10.002.000	13.136.000	**76,1**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	**100,0**	1.380.000	1.380.000	**100,0**
10	Penyediaan Bahan/Material	5.300.000	6.300.000	**84,1**	1.865.000	1.865.000	**100,0**
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.408.000	94.255.000	**90,6**	172.692.000	182.092.000	**94,8**
11)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				215.000	397.500	**54,1**
5.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	102.765.450	105.065.450	**97,8**	***56.000.000***		
12)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.025.000	19.825.000	**90,9**	6.000.000	6.000.000	**100,0**
13)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.740.450	85.240.450	**99,4**	50.000.000	64.100.000	**78,0**
6.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	197.880.000	195.800.000	**101,1**	***192.030.000***		
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.400.000	38.400.000	**94,8**	32.550.000	39.000.000	**83,5**
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.480.000	157.400.000	**101,3**	159.450.000	159.450.000	**100,0**
7.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	56.165.000	56.165.000	**100,0**	***44.550.000***		**120,1**
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.550.000	32.550.000	**100,0**	36.340.000	36.340.000	**100,0**
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.615.000	23.615.000	**100,0**	7.470.000	750.000	**996,0**
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	111.600.000	111.600.000	**100,0**	**105.600.000**	**105.600.000**	**100,0**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	111.600.000	111.600.000	**100,0**	***105.600.000***	***105.600.000***	**100,0**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	
22)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	111.600.000	111.600.000	**100,0**	105.600.000	105.600.000	**100,0**
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	39.455.000	39.455.000	**100,0**	**15.985.000**	**19.785.000**	**80,8**
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	***9.000.000***	***9.000.000***	**100,0**	***6.385.000***	***6.385.000***	**100,0**
23)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	9.000.000	**100,0**	6.385.000	6.385.000	**100,0**
24)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	30.455.000	30.455.000	**100,0**	9.600.000	13.400.000	**71,6**
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	167.040.000	164.040.000	**101,8**	**160.800.000**	**162.000.000**	**99,3**
1.	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	167.040.000	164.040.000	**101,8**	***160.800.000***	***162.000.000***	**99,3**
25)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	167.040.000	164.040.000	**101,8**	160.800.000	162.000.000	**99,3**
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	51.350.000	51.350.000	**100,0**	**31.600.000**	53.750.000	**58,8**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	51.350.000	51.350.000	**100,0**	***31.600.000***	44.750.000	**70,6**
26)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Repeublik Indonesia	40.350.000	40.350.000	**100,0**	30.000.000	44.750.000	**67,0**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	
27)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.000.000	11.000.000	**100,0**	1.600.000	9.000.000	**17,8**
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	4.000.000	4.000.000	**100,0**	**4.800.000**	**6.000.000**	**80,0**
1.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	4.000.000	4.000.000	**100,0**	***4.800.000***	***6.000.000***	**80,0**
29)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000	4.000.000	**100,0**	4.800.000	6.000.000	**80,0**

Sumber: Kecamatan Matesih 2025

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Metesih	2.791.787.574	2.699.344.410	99	2.808.084.784	1.353.312.751	48
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.421.342.574**			**2.460.949.784**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000	100	1.553.175,00	1.134.350	73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.934.158.424,00	1.892.342.729	98	1.925.038.009,00	908.581.686	47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000	100	4.562.000,00	435.000	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.819.000,00	23.819.000	100	18.096.100,00	8.336.050	46
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	6.000.000	100	7.160.000,00	2.547.500	36
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.014.700,00	10.012.000	100	13.136.000,00	3.774.800	29
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.380.000,00	1.380.000	100	1.380.000,00	0	0
	Penyediaan Bahan/Material	6.300.000,00	6.300.000	100	1.865.000,00	1.460.000	78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.255.000,00	87.525.000	93	182.092.000,00	152.512.000	84
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	0	397.500,00	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.825.000,00	17.800.000	90	6.000.000,00	5.950.000	99

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.240.450,00	85.240.450	100	64.100.000,00	54.470.368	85
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000,00	29.830.231	78	39.000.000,00	11.077.997	28
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.400.000,00	157.400.000	100	159.480.000,00	66.450.000	42
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.550.000,00	30.443.000	94	36.340.000,00	14.448.000	40
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.615.000,00	20.575.000	87	750.000,00	750.000	100
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**111.600.000,00**		0	**105.600.000,00**		0
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	111.600.000,00	111.600.000	100	105.600.000,00	44.000.000	42
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA dan KELURAHAN**	**39.455.000,00**		0	**19.785.000,00**		0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000,00	8.582.000	95	6.385.000,00	6.160.000	96
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	30.455.000,00	30.455.000	100	13.400.000,00	3.000.000	22
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**164.040.000,00**		100	**162.000.000,00**		0
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	164.040.000,00	164.040.000	100	162.000.000,00	67.625.000	42
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**51.350.000,00**		100	**53.750.000,00**		0
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia	40.350.000,00	40.350.000	100	44.750.000,00	0	0
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	11.000.000,00	11.000.000	100	9.000.000,00	0	0
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**4.000.000,00**		100	**6.000.000,00**		0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.000.000,00	4.000.000	100	6.000.000,00	600.000	10

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.791.787.574,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.699.344.410,00 atau 99%. Alokasi dana Tahun 2025 Tw I sebesar 2.808.084.784,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 1.353.312.751 atau 48%.

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	Tahun 2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.759.462.566	2.534.951.700	96	2.444.957.574	2.380.667.410	96
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	5.000.000	100	111.600.000	111.600.000	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	237.800.000	235.633.000	93	39.455.000	39.037.000	97,5
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	228.650.000	227.680.000	99,9	164.040.000	164.040.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.500.000	90.275.000	99,9	51.350.000	51.350.000	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.220.000	6.480.000	79	4.000.000	4.000.000	100

Sumber: Kecamatan Matesih 2025

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

Kecamatan Matesih merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Matesih dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Matesih meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan:

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
- Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
- Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
- Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
- Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
- Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih cukup banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas

- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Matesih berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih dan Pencapaian Renstra Kecamatan Matesih s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Matesih

Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%) 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025 TW 1
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
	KECAMATAN MATESIH									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	70,30	70,30	100	96	96			
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK yang tercapai targetnya						100		0.25
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100					

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah		100	100	99	99	100	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		98	100	98	98	100	26	0.26
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		98	100	98	98	100	26	0.26
	Administrasi Umum	Tersedianya Administrasi Kantor						100	27	0.27
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		100	100	100	100	100	0	0
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	100	100	100	100	14	0.14
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		100	100	100	100	100	15	0.15
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		100	100	100	100	100		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		100	100	100	100	100		

	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan		100	100	100	100	100	58	0.58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya makan dan minuman rapat serta pembiayaan konsultasi SKPD		93	100	93	93	100	81	0.81
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				99	99	100		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		78	100	78	78	100	12	0.12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		100	100	100	100	100	17	0.17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100	100	100		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	100	100	100	100	100	1

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		94	100	94	94	100	6	0.06
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	89,225	83.84	89,225	100	100	100	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100	100	100	100	100	34	0.34
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat, Terlaksananya kegiatan legalisasi		100	100	100	100	100	34	0.34
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF	100	100	100	100	100	100	0	0
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Persentase kehadiran musrenbang		100	100	100	100	100	0	0

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100	100	100	100	100	0	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		100	100	100	100	-	0	0
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		100	100	100	100	100	0	0
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100	100	100	100	100	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF	100	100	100	100	100	100	24	24
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif		100	100	100	100	100	24	24
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di		100	100	100	100	100	24	24

	Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Wilayah Kecamatan Ngargoyoso								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PESENTASE DESA MEMILIKI APBDES DAN RKPDES SESUAI KETENTUAN	100	100	100	100	100	100	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Desa Memiliki APBdes dan RKPDes sesuai Ketentuan		100	100	100	100	100	0	0
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI		100	100	100	100	100	0	0
0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras,	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat		100	100	100	100	100	0	0

	Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Beragama, Ras, Golongan Lainnya								
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terpenuhinya Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				-		100	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE WILAYAH TERTIB DESA	100	100	100	100	100	100	0	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Wilayah Tertib Desa				100	100	100	0	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa		100	100	100	100	100	0	0

Tabel 2.5
Capaian Kinerja (Tujuan, Sasaran, dan Program
(Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)
Kecamatan Matesih

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	100	NA
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	89,225	NA
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	70.30	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	0	50
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	50
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	0
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	50

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt. 1	Th 2024	Th 2025 Smt.1	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	Na	70,30	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak Dipakai	0,70	Tidak Dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	50	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	100	87,83	89,225	Na	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	50	

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt. 1	Th 2024	Th 2025 Smt.1	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	50	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDesa dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	50	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Matesih

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Matesih tahun sebelumnnya, serta capaian kinerja Renstra kecamatan. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Sedangkan RPD Tahun 2024-2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2024-2026.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Karanganyar kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Karanganyar;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
   e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
   d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Matesih, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Matesih yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Matesih

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Beban kerja antar pegawai belum seimbang • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarpras pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

a) rancangan kerangka ekonomi daerah
b) program prioritas pembangunan daerah

c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,

yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Matesih berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Matesih.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai prodses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.dapat dijelaskan pada tabel 2.5

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat daerah Kecamatan Matesih

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Kecamatan Matesih				**2.452.205.929**					**2.452.205.929**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Matesih**	**Nilai SAKIP**	**70,35**	**2.196.970.229**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Matesih**	Nilai SAKIP	**70,35**	**2.196.970.229**	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Matesih	Persentase laporan/ dokumen Perencanaan, Penganganggaran, dan evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah	100	8.000.000	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Matesih	Persentase laporan/ dokumen Perencanaan, Penganganggaran, dan evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah	100	8.000.000	
	administrasi keuangan	Kec. Matesih	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	100	1.738.090.229	administrasi keuangan	Kec. Matesih	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	100	1.738.090.229	
	administrasi umum	Kec. Matesih	**Persentase Dukungan Administratif**	100	128.380.000	administrasi umum	Kec. Matesih	Persentase Dukungan Administratif	100	128.380.000	

	perangkat daerah		**Perangkat Daerah yang Dilaksanakan**			perangkat daerah		Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Matesih	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	70.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Matesih	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	70.000.000	
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	209.000.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	209.000.000	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	43.500.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Matesih	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	43.500.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Matesih**	**Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**6.362.300**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Matesih**	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	**100**	**6.362.300**	

	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan	Kec. Matesih	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	100	6.362.300	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan	Kec. Matesih	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	100	6.362.300	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Matesih**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100**	**18.846.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Matesih**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	**100**	**18.846.400**	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Matesih	Jumlah Lembaga masyarakat desa yang dibina	9	8.846.400	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Matesih	Jumlah Lembaga masyarakat desa yang dibina	9	8.846.400	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Matesih	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	10.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Matesih	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1	10.000.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Matesih**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**100**	**162.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Matesih**	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	**100**	**162.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa	Kec. Matesih	Jumlah wilayah yang mendapat	9	162.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggar	Kec. Matesih	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan	9	162.000.000	

	n Ketentraman dan Ketertiban Umum		pantauan ketentraman dan ketertiban umum			aan Ketentraman dan Ketertiban Umum		ketentraman dan ketertiban umum			
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Matesih**	**persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**59.207.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Matesih**	persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	**100**	**59.207.000**	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Matesih	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	2	59.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Matesih	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	100	59.207.000	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Matesih**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	**8.820.000**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Matesih**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	**100**	**8.820.000**	
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Matesih	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan	9	8.820.000	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Kec. Matesih	Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan	9	8.820.000	

						pemerintah desa					

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Forkompimca, UPT dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Matesih maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel 2.9
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Matesih

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME
1				
2				
3				

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);

8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;

8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;

7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Matesih

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Matesih Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Matesih adalah

Tabel 3. 1
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN /PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	100
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83
3			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	70,35
4			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
5			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100

6			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100
7			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100
8			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan Pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Matesih adalah sebagai berikut:

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan
3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian pertanahan di wilayah Kecamatan Matesih
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan data antara desa/kelurahan dan kecamatan
5. Masih adanya potensi kerawanan lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat
6. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan Masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah
7. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah
8. Belum optimalnya pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

3.4 Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Matesih masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Matesih

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik	Meningktanya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.1 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat di telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD dengan Program, Kegiatan dan SubKegiatan

SASARAN OPD	PROGRAAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
			3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
			4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
			5) Penyediaan Bahan/Material.
			6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
			7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Mebel.
			2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
			3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
			4) Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
			2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
			2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
			2) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.
			3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
			3) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MATESIH

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Matesih

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Matesih di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Penyediaan Bahan/Material
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
      - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
   a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Matesih

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Matesih, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Matesih merupakan pencapaian kinerja pelayanan Matesih. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Matesih

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Matesih

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MATESIH KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN MATESIH						**2.292.583.574,00**							**2.914.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.292.583.574,00**							**2.914.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.292.583.574,00**							**2.914.700.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.999.583.574,00**						**-**	**2.499.100.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	-			4 Dokumen	1.146.950,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	8.500.000,00	KECAMATAN MATESIH

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	1.146.950,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		8.500.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			16 orang/bulan	1.681.479.574,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	1.864.120.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.681.479.574,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		1.864.120.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	74.276.250,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan	Kecamatan Matesih	-	135.480.000,00	KECAMATAN MATESIH

												hidup				
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.607.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		9.500.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	18.790.250,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		24.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.900.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		9.500.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

	0005														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.645.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		13.500.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		1.980.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	2.404.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		8.500.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.420.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan	Kecamatan Matesih		67.000.000,00	KECAMATAN MATESIH

									Kel/Desa			Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.130.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Matesih		1.500.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*	-			4 unit	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	130.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		55.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		75.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	-			12 laporan	193.680.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	302.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	28.800.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		52.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	164.880.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan	Kecamatan Matesih		250.000.000,00	KECAMATAN MATESIH

											kemiskinan.	hidup				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			5 unit	49.000.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	59.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	38.850.800,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		40.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10.150.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Matesih		10.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		9.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**105.600.000,00**						**-**	**7.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan*	-			100 nilai	105.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	7.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	105.600.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		7.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**15.400.000,00**						**-**	**35.000.000,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa*	-			9 lembaga	6.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	14.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	6.400.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		14.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan*	-			1 lembaga	9.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	21.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan	Kecamatan Matesih		21.000.000,00	KECAMATAN MATESIH

											kemiskinan.	hidup				
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**137.400.000,00**						**-**	**285.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*persentase wilayah dalam keadaan kondusif*	-			100 %	137.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	285.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	137.400.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		285.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**31.600.000,00**						**-**	**79.600.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamanan*	-			100 %	31.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningk	Kecamatan Matesih	-	79.600.000,00	KECAMATAN MATESIH

											ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	atkan kualitas lingkungan hidup				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		49.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan				40 Orang	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih		9.000.000,00	KECAMATAN MATESIH

			Nasional													
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Matesih		21.600.000,00	KECAMATAN MATESIH
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**3.000.000,00**						**-**	**9.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	3.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Matesih	-	9.000.000,00	KECAMATAN MATESIH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Matesih, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas	Kecamatan Matesih		9.000.000,00	KECAMATAN MATESIH

												lingkungan hidup				
	J U M L A H							**2.292.583.574,00**							**2.914.700.000,00**	

Melalui penguatan kinerja berbasis indikator ini, Kecamatan Matesih berkomitmen untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar sesuai visi dan misi Kepala Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Matesih tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Target IKU Kecamatan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026
1	2	3	5	6
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Na	80

Tabel 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan Kecamatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan ● Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	**105.600.000**

No	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar	Program/Kegiatan Kecamatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;	**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah ● Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ● Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional ● Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**31.600.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Matesih Tahun 2025-2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Matesih harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Matesih.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Matesih Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Matesih Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Matesih yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Matesih secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Matesih Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN TAWANGMANGU
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Tawangmangu, September 2025
CAMAT TAWANGMANGU

EKO JOKO WIDODO,S.Sos,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 196908101991031013

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Landasan Hukum ..... I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan ..... I - 3
1.4 Sistematika Penulisan ..... I - 4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tawangmangu ..... II - 1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu ..... II - 11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu ..... II - 16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 18
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAWANGMANGU
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..... III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ..... III - 3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAWANGMANGU
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tawangmangu ..... IV - 1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu ..... IV - 2
4.3 Data Indikatif Kecamatan Tawangmangu ..... IV - 3
4.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Tawangmangu .... IV - 3
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ..... V - 1
5.2 Kaidah Pelaksanaan ..... V - 1
5.3 Rencana Tindak lanjut ..... V - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tawangmangu untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Ngargooso Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

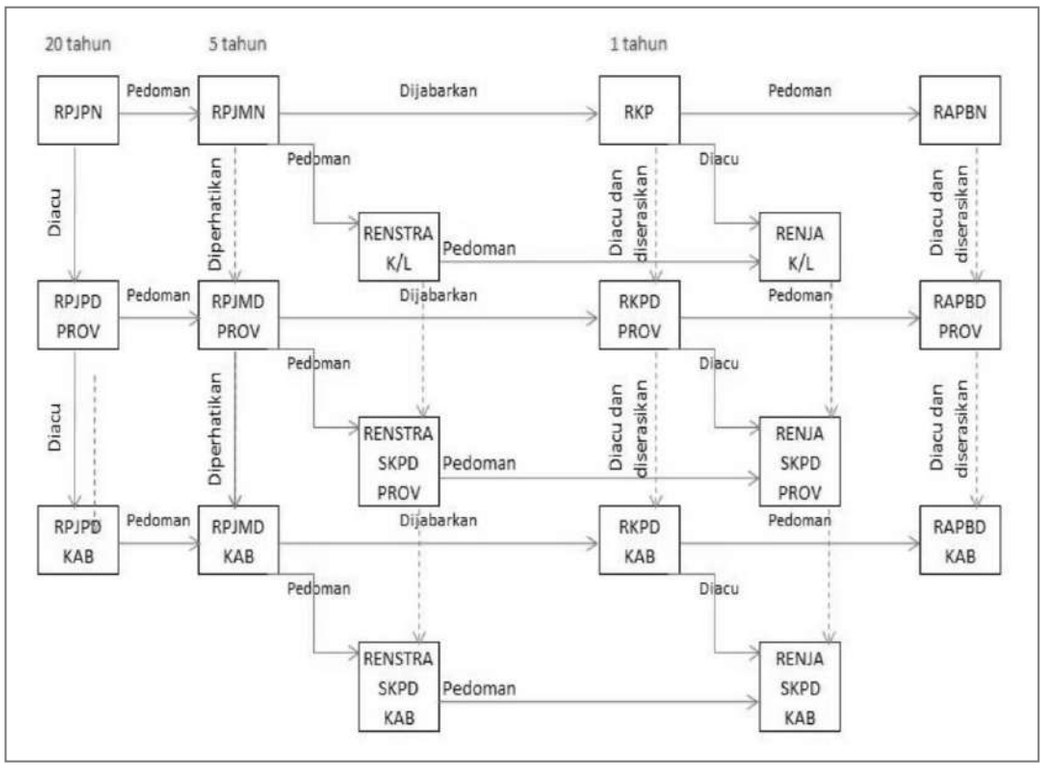

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
3. Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Tawangmangu, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tawangmangu.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Tawangmangu, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Tawangmangu tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tawangmangu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAWANGMANGU

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAWANGMANGU TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tawangmangu

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Tawangmangu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Tawangmangu.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024 - 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

A. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja Kecamatan Tawangmangu untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 10.102.928.502,- *(Sepuluh Milyar Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar *Rp4.317.473.902*,- (*Empat Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. *5.785.454.600*,- (*Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. Rp9.921.052.180,- *(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)* atau sebesar 98,20 %, sisa anggaran Rp. 181.876.322,- *(Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)* atau sebesar 2,80 %.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerja 96,93%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 5.271.810.402,- dan terealisasi Rp. 5118.860.820,- (95,18%)

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99,15%. Anggaran yang tersedia Rp. 72.456.850,- terealisasi sebesar Rp. 71.840.800,- (99,47%).

C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 63.381.600,- terealisasi sebesar Rp. 63.381.500,- (100%).

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100.00%. Anggaran yang tersedia Rp. 72.456.850,- terealisasi sebesar Rp. 71.840.000,- (99,47%).

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 430.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 430.000.000,- (100%).

F. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 5 kegiatan dengan capaian kinerja 99,99 %. Anggaran yang tersedia Rp. 3.257.209.650,- terealisasi sebesar Rp. 3.257.006.600,- (99,99 %).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024 - 2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025
di Kecamatan Tawangmangu

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	**5.597.600.000**	**5.424.596.248**	97%	**8.731.506.571**	**10.010.456.571**	**87,22 %**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*9.850.000*	11.719.100	84,05%	7.376.650	7.376.650	100%
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	3.000.000	5.175.500	57,97%	1.619.400	1.619.400	100%
2)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.350.000	0.00	0,00	2.509.750	2.509.750	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.519.106.600	3.816.953.39	80,00%	4.604.699.037	4.918.649.037	93,62 %
5)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.868.675.000	1.703.379.033	91,15%	4.604.699.037	4.918.649.037	93,62 %
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.500.000	57.500.000	80,87%	13.150.000	13.150.000	100%
6)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.000.000	38.500.000	48,12%	13.150.000	13.150.000	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	271.393.400	455.599.600	59,57%	0.00	0.00	0,00
5.	Administrasai Umum Perangkat Daerah	14.081.000	14.518.000	96,99%	343.360.004	343.360.004	100%
7)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	10.881.600	37.238.250	34,22%	9.289.000	9.289.000	100%
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.050.000	21.775.000	74,96%	6.410.500	6.410.500	100%
9)	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	1.000.000	5.940.000	59,40%	0.00	0.00	0,00
10)	Penyediaan bahan logistrik kantor	2.420.000	1.800.000	74,38%	95.622.204	95.622.204	100%
11)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.500.000	206.384.000	50,96%	13.472.800	13.472.800	100%
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	151.500.000	142.475.000	94,04%	9.100.000	9.100.000	100%
13)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30.000.000	75.700.000	39,63%	205.108.000	205.108.000	100%
	Penatahusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.00	0.00	0,00	4.357.500	4.357.500	100%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	856.900.000	858.377.250	99,83%	137.500.000	137.500.000	100%
16)	Pengadaan Mebel	2.500.000	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00	0,00	35.000.000	35.000.000	100%
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0,00	20.000.000	63.500.000	31,50 %
17)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.600.000	24.600.000	100%	0.00	0.000	0,00
7.	Penggandaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	384.100.000	383.191.250	99,76%	0.00	0.000	0,00
18)	Penyediaan jasa surat menyurat Menyurat	30.000.000	31.502.000	95,23%	1.800.000	1800.000	100%
19)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	20.000.000	18.141.500	90,71%	57.600.000	57.600.000	100%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
20)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	293.994.000	57.784.300	50,88%	782.292.530	797.292.530	98,12 %
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.944.000	0.00	0,00	75.706.400	75.706.400	100%
21)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.944.000	0.00	0,00	32.495.000	32.495.000	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	67.050.000	57.784.300	86,18%	4.500.0000	4.500.0000	100%
22)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.550.000	4.205.800	36,85%	22.480.000	22.480.000	100%
23)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.025.950.000	3.083.172.650	65,71%	16.231.400	16.231.400	100%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.500.000	9.656.450	88,02%	2.135.400	2.135.400	100%
9.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8.500.000	9.656.450	88,02%	2.135.400	2.135.400	100%
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	79.116.000	63.381.600	80,11%	2.135.400	2.135.400	100%
25)	Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	79.116.000	63.381.600	80,11%	. 2.135.400	2.135.400	100%
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**29.116.000**	**328.555.950**	88,6%	**1.988.647.000**	**2.943.647.000**	**67,56 %**
12.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	257.653.600	5.995.000	42,981 %	63.870.000	63.870.000	100%
26)	Peningkatan Partisifasi Masyarakat dalam Furum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	257.653.600	257.653.600	100%	7.163.000	7.163.000	100%
13	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
27)	Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0.00	0.00	0,00	46.707.000	46.707.000	100%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	**400.000.000**	**400.000.000**	100%	**51.269.550**	**51.269.550**	**100%**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keytertiban Umum	8.684.313.600	9.387.490.748	92,50%	51.269.550	51.269.550	100%
28)	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Intasi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.684.313.600	9.387.490.748	92,50%	31.269.550	31.269.550	100%
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0.00	0.00	0,00	20.000.000	20.000.000	100%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**5.597.600.000**	**5.424.598.248**	96,91%	**665.970.000**	**667.970.000**	**99,70 %**
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**5.597.600.000**	**5.424.598.248**	96,91%	665.970.000	667.970.000	99,70 %
29)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	9.850.000	11.719.100	84,05%	204.166.300	204.166.300	100%
30)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna mewujudkan Keamanan Lokal , Regeonal dan Nasional	2.500.000	2.540.600	98,40%	61.803.700	61.803.700	100%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**4.159.106.600**	**3.646.953.398**	87,69%	**0.00**	**0.00**	**0,00**
17	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**830.431.600**	**13.710.000**	60,57%	0.00	0.00	100%

Tabel 2.2.
Realisasi APBD di Kecamatan Tawangmangu
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.271.810.402	5.118.860.820	95,18	6.223.252.441	2.672.202.025	42,93
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.012.100	13.945.800	99,57	6.211.950	1.687.500	26,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.509.000	6.498.150	99,83	2.668.450	783.500	29,14
	Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	2.540.600	2.540.600	100,00	1.399.400	388.500	27,76
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.962.500	4.907.050	98,88	0.00	0.00	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00	0.00	0,00	2.144.100	515.500	24,04
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.317.473.902	4.220.014.161	97,74	4.918.649.037	2.210.249.791	44,94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.317.473.902	4.220.014.161	97,74	4.918.649.037	2.210.249.791	44,94
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.775.000	33.471.000	99,10	13.150.000	0.00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.775.000	33.471.000	99,10	13.150.000	0.00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.688.900	466.378.400	97,83	232.727.054	61.905.118	27,63
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.484.500	20.465.500	99,91	9.289.000	1.604.500	17,27
	Penyediaan Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor	85.249.800	84.375.800	98,97	6.410.500	2.420.000	37,75
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.455.600	113.318.100	97,31	79.912.054	25.983.918	32,52
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.140.000	19.140.000	100,00	10.778.000	3.730.200	34,61
	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.100.000	9.100.000	100,00	9.100.000	3.250.000	35,71
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242.259.000	219.979.000	90,80	113.754.000	24.425.000	21,47
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0.00	0.00	0,00	3.483.500	491.500	14,11
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.875.000	225.050.000	99,77	130.500.000	41.500.000	65,35
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00	0,00	35.000.000	0.00	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.050.000	182.225.000	99,55	32.000.000	0.00	0,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	42.825.000	42.825.000	100,00	63.500.000	41.500.000	65,35
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.100.000	83.747.359	85,15	846.308.000	337.909.116	57,52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100,00	1.800.000	1.800.000	100,00
	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.800.000	43.447.359	70,30	57.600.000	18.549.966	32,20
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.500.000	38.500.000	100,00	786.908.000	317.559.150	40,36
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.073.400	100.442.000	95,72	75.706.400	18.950.500	28,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.044.000	48.804.600	90,31	32.495.000	5.881.000	18.10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.500.000	3.967.500	88,17	4.500.000	1.680.000	37,33

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	5.870.000	97,83	22.480.000	5.795.000	25,78
	Pemeliharaan / Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.341.500	17.612.000	72,35	16.231.400	5.594.500	34,47
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	11.686.400	11.686.400	100,00	0.00	0.00	0,00
	Pemeliharaan / Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya	12.501.500	12.501.500	100,00	0.00	0.00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.456.850	71.840.800	99,47	8.941.250	7.740.000	66,29
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Dikecamatan	72.456.850	71.840.800	99,47	8.941.250	7.740.000	66,29
	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.080.050	6.072.300	99,87	1.778.250	580.000	32,62
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.376.800	65.768.500	99,08	7.163.000	7.160.000	99,96
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.257.209.650	3.257.006.600	99,94	2.852.625.200	1.668.590.500	30,81
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	38.426.450	38.409.000	99,90	25.095.000	8.250.000	32,88
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.626.450	8.609.000	99,80	0.00	0.00	0,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.800.000	29.800.000	100,00	25.095.000	8.250.000	32,88
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.218.783.200	3.218.597.600	99,98	2.813.128.200	1.657.340.500	48,70
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.715.000.000	2.715.000.000	100,00	2.465.000.000	1.535.000.000	62,27
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	503.783.200	503.597.600	99,96	348.120.200	122.340.500	35,14
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama Antar Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0.00	0.00	0,00	14.402.000	3.000.000	20,83
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.381.600	63.381.600	100,00	46.379.550	13.717.500	26,27
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	63.381.600	63.381.600	100,00	46.379.550	13.717.500	26,27

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ketentraman dan Ketertiban Umum						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	37.281.600	37.281.600	100.00	30.379.550	11.217.500	36,92
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	26.100.000	26.100.000	100,00	16.000.000	2.500.000	15,63
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	226.745.800	201.692.750	92,18	252.894.700	33.548.000	59,26
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	226.745.800	201.692.750	92,18	252.894.700	33.548.000	59,26
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republiki Indonesia	163.673.900	138.950.000	84,89	196.284.000	0.00	0,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	63.071.900	62.742.750	99,48	56.610.700	33.548.000	59,26
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	430.000.000	430.000.000	100,00	400.000.000	400.000.000	100,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	430.000.000	430.000.000	100,00	400.000.000	400.000.000	100.00
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0.00	0.00	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000	400.000.000	100.00	400.000.000	400.000.000	100,00

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut

Tabel 2. 3

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.576.263.096	5.096.546.997	91,39	14.012.100	13.945.800	99,53
2	Program Penyelenggaraan Pdemerintahan dan Pelayanan Publik	226.944.000	224.854.000	99,07	72.456.850	71.840.800	99,15
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.780.375.970	3.777.503.970	99,92	3.248.583.200	3.248.397.600	99,99
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.000	15.000.000	100	226.745.800	201.692.750	88,95
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	194.679.500	192.282.000	98,76	430.000.000	430.000.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	442.615.000	442.615.000	100	430.000.000	430.000.000	100

Serapan anggaran selama 2 tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Tawangmangu perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu

Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tawangmangu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tawangmangu meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:

   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya
   - rganisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:

   - Masih cukup banyak penduduk miskin
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
   - Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
   - Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang:

   - Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD

- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tawangmangu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

TABEL 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tawangmangu s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%) 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025 Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Semester 1
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4x 100)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN TAWANGMANGU										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP**	**71,11**	**69,95**	**71,11**	**71,15**	**100,06**			
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK yang tercapai targetnya			**96**	96	96	**97%**	**60 %**	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang /bulan	15 Orang /bulan	15 Orang /bulan	100	14 Orang /bulan	14 Orang / bulan	
	Administrasi Umum	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**12 Bulan**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disedkiakan		12 Paket	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		37 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Penatausahaan AArsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100 %**	**0**	0

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	-			-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan		2unit	2 unit	2unit	100	5 unit	0	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 unit	100	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Penyeiaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12Laporan	12 Laporan	100	12Laporan	6 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**91,97%**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	2 Unit	2 unit	100	1 Unit	1 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		4 unit	4 Unit	4 unit	100	5 Unit	5 Unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,1**	**87,075**	**85, 1**	**87,575**	**102,90**	**87, 83**	**0**	**-**

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	75	87,075	85,1	87,575	102,90	85,3	0	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF**	**100 %**	**85 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100%**	**100 %**	**100**
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**		**85 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100%**	**100%**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100	5 Lembaga	5 Lembaga	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**100**	-	-	-	-	-	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 lembaga	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10 lembaga kemasyarakatan	-	-	-	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF**	**100 %**	**85 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PESENTASE DESA MEMILIKI APBDES DAN RKPDES SESUAI KETENTUAN**		**85 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**-**	**-**	
		PERSENTASE KEGIARAN WAWASAN DAN KEAGAMAAN	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100**	**100**	**50 %**	50
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100**	**50 %**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila	Peningkatan Kegiatan Kepemudaan Paskibraka,Hari Jadi Karanganyar		2 Kegiatan	-	-	-	-	-	

	Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI									
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		-	75 Orang	75 orang	100	75 Orang	75 orang	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	-	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**PERSENTASE WILAYAH TERTIB Perda**	**100 %**	**85 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	**50**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan DEsa		9 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan		9 Dokumen	-	-	-	-	-	

		Pemberhentian Perangkat Desa								
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	-	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	-	-	1 Dokumen	-	

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Tawangmangu

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	4,43	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	99,65	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	73	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	42,93
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	66,29
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga	%	100	30,81

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
			Kemasyarakatan Aktif			
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	26,27
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	59,26
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt.I	Th 2024	Th 2025 Smt.I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	73	775	73	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,72	Tidak dipakai	0,77	Tidak dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	100	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	76	77	99,65	0	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tawangmangu

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tawangmangu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun Pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 - 2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal.**
   Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Aparat kecamatan seringkali belum sepenuhnya menguasai tugas-tugas pelayanan publik, administrasi, maupun teknis lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Sistem kerja kecamatan belum terumuskan dengan jelas.**
   Kecamatan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal menjadi kurang efektif.
3. **Pengelolaan administrasi belum optimal.**
   Administrasi pemerintahan, pelaporan kegiatan, pengarsipan, dan manajemen data masih belum berjalan secara tertib dan efisien. Banyak kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual, dan belum terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai.
4. **Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana kerja yang belum memadai.**
   Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan medan geografis yang bervariasi membutuhkan mobilitas dan jangkauan layanan yang tinggi. Namun, fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan sarana komunikasi masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
5. **Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan.**
   Masyarakat enggan terlibat dalam musyawarah

perencanaan pembangunan karena merasa aspirasinya tidak didengar atau tidak diwujudkan dalam program nyata. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak antara pemerintah dan warga dalam proses pembangunan.

6. **Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.**
   Setelah pembangunan fisik seperti jalan, saluran air, atau fasilitas umum selesai dibangun, masyarakat kurang terlibat dalam upaya pemeliharaan. Akibatnya, sarana cepat rusak dan tidak berfungsi optimal.
7. **Potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.**
   Banyak potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan, seperti hasil pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut sering belum diolah dengan baik atau belum mendapat dukungan yang cukup agar bisa berkembang.

Bertitik tolak dari pengertian isu penting diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tawangmangu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tawangmangu yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Tawangmangu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Beban kerja antar pegawai belum seimbang • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarana dan prasarana pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
		• Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang terlah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tawangmangu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Nagrgoyoso dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Tawangmangu

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 - 2029. Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Karanganyar yang

melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tawangmangu.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.5

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				**8.865.513.337,00**					**8.865.513.337,00**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA***	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97 %**	**5.682.268.387,00**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97 %**	**5.682.268.387,00**	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	6.450.000,00	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	6.450.000,00	
	administrasi keuangan	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan administrasi keuangan	90 %	4.836.465,00	administrasi keuangan	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan administrasi keuangan	90 %	4.836.465,00	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	160.598.000,00	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Tawangmangu	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	160.598.000,00	

	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30.000.000,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Tawang mangu	Persentase Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30.000.000,00	
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	613.472.000,00	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Tawang mangu	Persentase Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	613.472.000,00	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Tawangmangu	Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	35.283.362,00	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Tawang mangu	Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	35.283.362,00	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Tawangmangu**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**87,83**	**2.135.400,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Tawang mangu**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**87,83**	**2.135.400,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Kec. Tawangmangu	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	2.135.400,00	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan	Kec. Tawang mangu	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	2.135.400,00	

	oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					di tingkat kecamatan					
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**2.518.870.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**2.518.870.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Tawangmangu	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	77.163.000,00	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Tawangmangu	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan dan wawasan kebangsaan	100 %	77.163.000,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**31.269.550,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**31.269.550,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tawangmangu	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100 %	31.269.550,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tawangmangu	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan dan wawasan kebangsaan	100 %	31.269.550,000,00	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**615.970.000,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100 %**	**615.970.000,00**	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kec. Tawangmangu	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan	100 %	615.970.000,00	penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kec. Tawangmangu	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan	100 %	615.970.000,00	

	umum sesuai penugasan kepala daerah		dan wawasan kebangsaan			umum sesuai penugasan kepala daerah		dan wawasan kebangsaan			
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Tawangmangu**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RPKDes sesuai Ketentuan**	**100 %**	**15.000.000,00**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Tawang mangu**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**15.000.000,00**	
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Tawangmangu	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Terwujusnya tertib APBdes dab RKPDes	100 %	15.000.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Tawang mangu	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Terwujusnya tertib APBdes dab RKPDes	100 %	15.000.000,00	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Tawangmangu. Namun dalam proses ini Kecamatan Tawangmangu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tawangmangu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tawangmangu.

Tabel 2.9
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tawangmangu

NO	KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	APBN	APBD PROV	APBD KAB	PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan jembatan Nglurah	Kelancaran pengguna jalan bagi warga	RJ. Tawangmangu-Tegalsari Kel. Tawangmangu	15 m x 6 m	□		2.000.000.000	**2.000.000.000**	DPU
2	Peningkatan Jalan & Perbaikan saluran Ruas jalan Matesih-Tawangmangu	peningkatan Pebaikan Kontruksi jalan	RJ. Matesih Tawangmangu	9.40 km x 6 m	□		5.500.000.000	**5.500.000.000**	DPU
3	Penataan Lingkungan Kantor	Peningkatan sarana prasarana bagi Perangkat	Karanglo	1 Paket	□		300.000.000	**300.000.000**	DPU
4	Pembangunan Kantor Desa Sepanjang	Pelayanan Masyarakat	Kantor Desa Sepanjang	240 m^2	□		1.400.000.000	**1.400.000.000**	DPU
5	Pengaspalan jalan Bener RT 03 RW 05	Rehab	Bener RT 03 RW 05 Tawangmangu	3m x 250m	□			**200.000.000**	DPU

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;

3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam lima tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;

4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata

sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tawangmangu

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Tawangmangu adalah

TABEL 3. 1
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	4,54
2		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	76
3			Program Penunjang Urusan Demerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	77
4			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	78
5			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
6			Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100

7			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100
8			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kecamatan Tawangmangu

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDKATOR
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TAWANGMANGU

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tawangmangu

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Tawangmangu di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
      1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa

1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
3) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1). Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5). Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tawangmangu

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Tawangmangu, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tawangmangu merupakan pencapaian kinerja pelayanan Tawangmangu. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Tawangmangu

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Tawangmangu

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

						Kecamatan Tawangmangu			6.547.457.374,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			6.547.457.374,00						0,00	
	7	01				KECAMATAN			6.547.457.374,00						0,00	
231	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	70 undefined	4.301.836.674,00						0,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined undefined	7.598.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan Dokumen	3.606.400,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.305.750,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan Laporan	2.686.750,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome /	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Prioritas			

						Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.770.709.624,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	3.770.709.624,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	14.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Tahun Paket	14.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	205.999.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	5.928.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	19.739.600,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU

													hidup			
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	8.087.500,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	3.900.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	1.800.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	166.544.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Tahun Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.400.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Tahun Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	276.739.550,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun Laporan	23.400.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	253.339.550,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	24.389.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Tahun Unit	14.696.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU

	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun Unit	9.693.500,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
232	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5 nilai	3.220.600,00						0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	14 Kegiatan	3.220.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan	-	0,00	

													hidup			
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.220.600,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
233	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	1.711.020.100,00						0,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	61.020.100,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	8.955.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Tahun Laporan	52.065.100,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	1.650.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 kelurahan Unit	1.650.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Bulan Pokmas / Ormas	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Bulan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat										
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	12 Bulan Keluarga	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
234	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	32.347.600,00						0,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	32.347.600,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Tahun Laporan	32.347.600,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Tahun Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
235	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	499.032.400,00						0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	100 %	499.032.400,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12 Bulan Orang	90.175.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Tahun Orang	8.857.400,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal										
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	3 Kelurahan Dokumen	400.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Tawangmangu	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
236	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	0,00						0,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Tahun Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Kelurahan Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN TAWANGMANGU
						Kelurahan Tawangmangu			307.202.600,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			307.202.600,00						0,00	
	7	01				KECAMATAN			307.202.600,00						0,00	
237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	147.202.600,00						0,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	26.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun Paket	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	9.527.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	9.527.500,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	97.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										

		Urusan / Bidang Urusan /	Indikator Program /	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah

No	Kode					Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	10.800.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.400.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	14.475.100,00			-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	4.500.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	3.502.500,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.472.600,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
238	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	145.000.000,00						0,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	145.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	140.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
239	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	15.000.000,00						0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Tahun Orang	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Tawangmangu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	KELURAHAN TAWANGMANGU
						Kelurahan Blumbang			327.859.900,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			327.859.900,00						0,00	
	7	01				KECAMATAN			327.859.900,00						0,00	

240	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	164.320.700,00						0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	12.023.100,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12.023.100,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN BLUMBANG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	152.297.600,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN BLUMBANG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	143.897.600,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN BLUMBANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	120.139.200,00						0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	120.139.200,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	4.480.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN BLUMBANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	115.659.200,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN BLUMBANG
242	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	43.400.000,00						0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	43.400.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	330 Orang	43.400.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Blumbang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN BLUMBANG
						Kelurahan Kalisoro			341.031.350,00						0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			341.031.350,00						0,00	

	7	01				KECAMATAN			341.031.350,00						0,00	
243	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	242.051.350,00						0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	27.071.400,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Tahun Paket	21.271.400,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Tahun Dokumen	1.800.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 % Laporan	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berkelanjutan 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	15.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya										
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100 % Unit	15.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas	-	0,00	KELURAHAN KALISORO

													kualitas SDM			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	135.000.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 % Laporan	10.200.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 % Laporan	124.800.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	64.979.950,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 % Unit	3.796.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun Unit	4.300.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 % Unit	56.883.950,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	72.880.000,00						0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	72.880.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Tahun Lembaga Kemasyarakatan	4.480.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Tahun Pokmas / Ormas	68.400.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
245	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	12.600.000,00						0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	12.600.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										

							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Tahun Laporan	12.600.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 2. Meningkatkan integritas pembangunan ekonomi	-	0,00	KELURAHAN KALISORO
246	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	13.500.000,00						0,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	13.500.000,00			-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 % Orang	13.500.000,00	Kab. Karanganyar, Tawangmangu, Kalisoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter 1. Meningkatkan integritas kualitas SDM	-	0,00	KELURAHAN KALISORO

Tambah Tabel 4.2. Target IKU Kecamatan Tahun 2026.

Tambah Tabel 4.3. Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Program Prioritas Pembanguan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	**Program / Kegiatan**	**Anggaran (Program)**
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Mencegah Korupsi	**Program:** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan **SubKegiatan :** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.220.600
Menciptakan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara Cinta Tanah Air	**Program:** Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah **SubKegiatan :** 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta	51.153.600,00

	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargyoso Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tawangmangu harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Tawangmangu .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tawangmangu secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang

terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN NGARGOYOSO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025- 2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja PD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Ngargoyoso, September 2025
CAMAT NGARGOYOSO

SUWARDOYO, S.H
Pembina
NIP. 19690526 198803 1 001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL.....
KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngargoyoso II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso II-7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso II-19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II-21
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NGARGOYOSO
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran III-3
3.3 Tantangan dan Peluang III-7
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD..... III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Ngargoyoso IV-1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso IV-2
4.3 Data Indikatif Kecamatan Ngargoyoso IV-2
4.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Ngargoyoso..... IV-3
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut..... V-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 Dengan APBD 2024 dan Renja 2024 dengan APBD 2025	II-2
Tabel 2.2	Persandingan realisasi APBD (Program ,Kegiatan dan sub kegiatan) Tahun 2024dan Tahun 2025 Triwulan II	II-5
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Ngargoyoso dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ngargoyoso s/d Tahun 2024	II-10
Tabel 2.5	Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	II-17
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program	II-18
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk penetuan Prioritas dan Sasaran kecamatan	II-20
Tabel 2.8	Perumusan Isu Strategis Kecamatan Ngargoyoso	II-22
Tabel 2.9	Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar	II-26
Tabel 2.10	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar	II-28
Tabel 3.1	Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran (Target Tahun 2024, 2025 dan 2026	III-6
Tabel 3.2	Keselarasan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran	III-8
Tabel 3.3	Keselarasan sasaran OPD dengan Program Kerja dan sub Kegaiatan	III-8
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar	IV-4
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	IV-15
Tabel 4.3	Program yang mendukung Prioritas	IV-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan I-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang yang merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Ngargoyoso untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Ngargooso Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierari Perencanaan Pembangungan

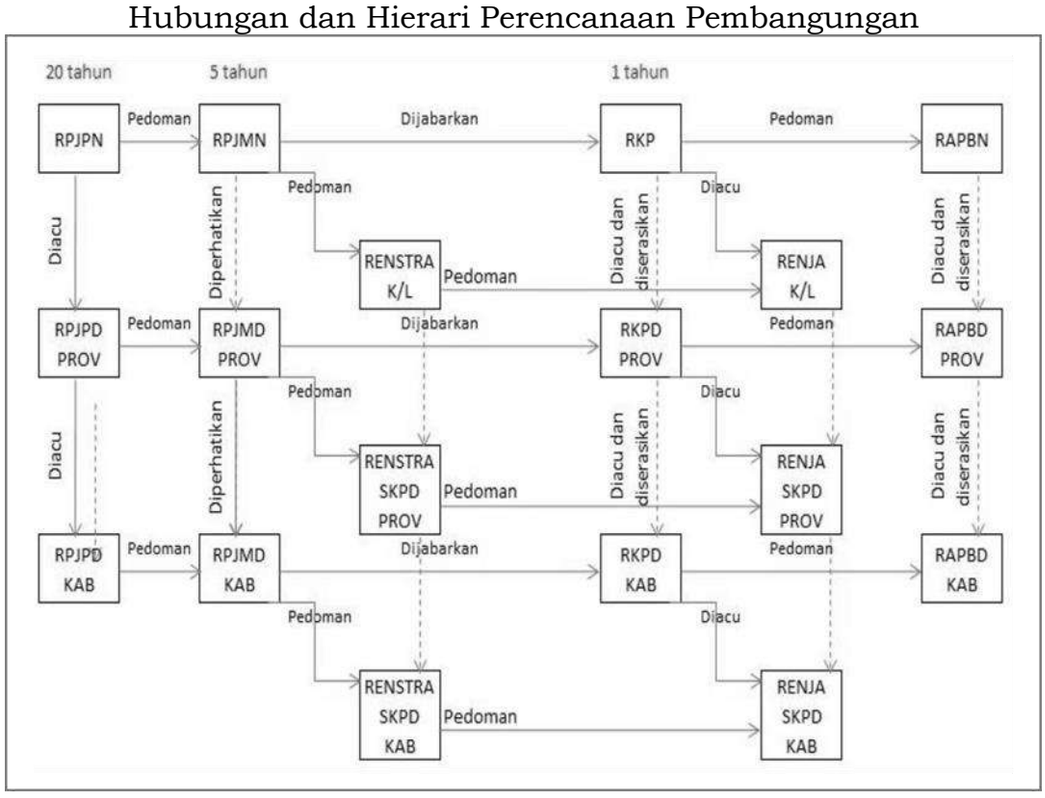

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
3. Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Ngargoyoso, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Ngargoyoso.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Ngargoyoso, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Ngargoyoso tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngargoyoso

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NGARGOYOSO TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Ngargoyoso

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Ngargoyoso.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024 - 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

A. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

Kecamatan Ngargoyoso untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.639.688.521,- *(Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)* yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.753.999.571,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 885.688.950,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*). Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.587.812.617,- *(Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah)* atau sebesar 98,03 %, sisa anggaran Rp. 51.875.904,- *(Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah)* atau sebesar 1,97 %.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari 6 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.210.310.071,- dan terealisasi Rp. 2.158.434.167,- (97,65%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 36.263.450,- dan terealisasi Rp. 36.263.450,- (100%).

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 143.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 143.700.000,- (100%).
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 110.660.000,- terealisasi sebesar Rp. 110.660.000,- (100%).
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 70.160.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.160.000,- (100%).
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 68.595.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.595.000,- (100%).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini:

2.1.1 Evaluasi Anggaran

a. Persandingan Usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

   Pada tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Ngargoyoso telah merencanakan program, kegiatan dan sub keiatan yang kemudian menerimaalokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)Rp.000			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	(%)	RENJA	APBD	(%)
	KECAMATAN	**2.639.688,52**	**2.481.996,2**	106,4	2.493.466,7	2.724.316,7	91,53
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.210.310,1	2.054.102,8	107,6	2.170.998,3	2.273.298,3	95,50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493,5	3.493,5	100	3.493,5	3.493,5	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.216,8	2.216,8	100	2.216,8	2.216,8	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.276.7	1.276.7	100	1.276,7	1.216,7	104,93
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.753.999,57	1.676.307,26	104,6	1.855.327,23	1.943.627,2	95,46
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.753.999,57	1.676.307,26	104,6	1.855.327,23	1.943.627,2	95,46
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.174,1	142.259,05	101,35	123.184,6	124.259,6	99,13
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.898,4	5.898,4	100	4.094,7	4.094,7	100

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.689,3	21.689,3	100	12.068,3	12.068,3	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000	15.000	100	7.739,2	7.739,2	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.234,4	6.234,4	100	3.200	3.200	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.320	1.320	100	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.915	90.000	102	92.550	93.625	98,85
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.117	2.117	100	3.532,4	3.532,4	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.700	42.000	218	12.925	12.925	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000	25.000	100	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.000		0	0	12.925	0
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	17.000	17.000	100	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.200	131.300	101	133.208,7	133.208,7	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.800	22.700	109	24.600	24.600	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.200	52.200	100	49.800	49.800	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.400	56.400	100	58.808,7	55.784,3	105,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.743	58.743	142,56	56.784,3	55.784,3	101,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.955,5	41.955,5	100	38.857,8	38.857,8	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	17.950	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.787,5	16.787,5	248,9	0	16.926,5	0
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	36.263,5	36.263,5	100	36.743,3	36.743,4	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.263,5	36.263,5	100	36.743,7	36.743,3	100
	Fasilitiasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	36.263,5	36.263.5	100	36.743,7	36.743,3	100
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	68.595	68.595	100	71.645	71.645	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.595	68.595	100	71.645	71.645	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.750	3.750	100	5.000	5.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.845	64.845	100	66.645	66.645	100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.700	143.700	100	144.750	144.750	100

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.700	143.700	100	144.750	144.750	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.700	143.700	100	144.750	144.750	100
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	110.660	112.535	98,33	83.215	119.215	69,80
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.660	112.535	98,33	83.215	119.215	69,80
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	68.560	70.435	0	46.115	82.115	56,16
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	42.100.	42.100	100	37.100	37.100	100
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	70.160	66.800	105,03	78.665	78.665	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.160	66.800	105,03	78.665	78.665	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	67.360	63.600	105,9	75.340	75.340	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.800 0	2.800 0	100 0	2.800 525	2.800 525	100 100

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) menggunakan anggaran yang efisiensi sesuai POK adalah sebagai berikut

Tabel 2.2

Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.210.310.071	2.158.434.167	97,65	2.223.961.287	980.617.860	44,09
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.493.450	3.493.450	100,00	3.493.450	395.050	11,31
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.216.750	2.216.750	100,00	2.216.750	395.050	17,82
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.276.700	1.276.700	100,00	1.276.700	0	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.753.999.571	1.710.072.991	97,50	1.943.627.237	896.607.081	46,13
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.753.999.571	1.710.072.991	97,50	1.943.627.237	896.607.081	46,13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.174.050	143.434.050	99,49	49.922.600	500	1,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.898.350	5.898.350	100,00	4.094.700	0	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.689.300	21.689.300	100,00	9.300.300	0	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	7.739.200	0	0,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.234.400	6.234.400	100,00	2.246.000	500	22,46
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.320.000	1.320.000	100,00	0	0	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.915.000	91.175.000	99,20	23.010.000	0	0,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.117.000	2.117.000	100,00	3.532.400	0	56,18
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.700.000	89.576.793	97,68	12.925.000	0	0,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	23.951.793	95,81	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.700.000	49.400.000	99,40	12.925.000	0	0,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	17.000.000	16.225.000	95,44	0	0	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.200.000	129.914.014	97,53	133.208.700	52.241.229	39,22
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.600.000	21.314.014	86,64	24.600.000	8.391.229	34,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.200.000	52.200.000	100,00	49.800.000	19.350.000	38,86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.400.000	56.400.000	100,00	58.808.700	24.500.000	41,66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.743.000	81.942.869	97,85	80.784.300	30.874.500	38,22
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.955.500	40.305.369	96,07	38.857.800	13.948.000	35,89
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.787.500	41.637.500	99,64	41.926.500	16.926.500	40,37

2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	36.263.450	36.263.450	100,00	35.198.400	14.000,000	39,77
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.263.450	36.263.450	100,00	35.198.400	14.000,000	39,77
	Fasilitiasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	36.263.450	36.263.450	100,00	35.198.400	14.000,000	39,77
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	68.595.000	68.595.000	100,00	68.895.000	22.800.000	33,09
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	68.595.000	68.595.000	100,00	68.895.000	22.800.000	33,09
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.750.000	3.750.000	100,00	5.000.000	1.250.000	25,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.845.000	64.845.000	100,00	63.895.000	21.550.000	33,73
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	143.700.000	143.700.000	100,00	142.125.000	59.000.000	41,51
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	143.700.000	143.700.000	100,00	142.125.000	59.000.000	41,51
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	143.700.000	143.700.000	100,00	142.125.000	59.000.000	41,51
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	110.660.000	110.660.000	100,00	116.590.000	14.000.000	12,01
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	110.660.000	110.660.000	100,00	116.590.000	14.000.000	12,01
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	68.560.000	68.560.000	100,00	82.115.000	0	0,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	42.100.000	42.100.000	100,00	34.475.000	14.000.000	40,61
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	70.160.000	70.160.000	100,00	73.485.000	27.600.000	37,56
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70.160.000	70.160.000	100,00	73.485.000	27.600.000	37,56
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	67.360.000	67.360.000	100,00	71.280.000	27.600.000	38,72
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	2.800.000	2.800.000	100,00	1.680.000	0	0,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	525.000	0	0,00

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.639.688.521,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.587.812.617,00 atau 98,03 % %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 93,77%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.118.017.860,00 atau 42.03% dari pagu anggaran Rp. 2.660.254.687,00

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Kecamatan Ngargoyoso
tahun 2023 – 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.180.283.682	2.010.274.370	92,20	2.210.310.071	2.158.434.167	97,65
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.496.000	1.496.000	100,00	36.263.450	36.263.450	100,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	166.707.000	166.017.000	99,59	68.595.000	68.595.000	100,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETRENTRAMAN DAN ETERTIBAN UMUM	105.720.000	105.720.000	100,00	143.700.000	143.700.000	100,00
5	PROGRAM PENYELEGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	198.062.700	197.972.700	99,95	110.660.000	110.660.000	100,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	87.200.000	87.200.000	100,00	70.160.000	70.160.000	100,00
	Persentase realisasi	2.739.469.382	2.568.680.070	93,76	2.639.688.521	2.587.812.617	98,03
	Rata rata realisasi 6 program			93,76			98,03

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso

Kecamatan Ngargoyoso merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Ngargoyoso dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Ngargoyoso meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan

eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:

   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya
   - rganisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:

   - Masih cukup banyak penduduk miskin
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
   - Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
   - Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang:

   - Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
   - Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
   - Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
   - Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
   - Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
   - Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
   - Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
   - Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

   Ancaman:

   - Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
   - Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
   - Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun

- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Pada pembahasan sub bab ini kami disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngargyoso,

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 pada halaman berikut

TABEL 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso dan Pencapaian Renstra Kecamatan Ngargoyoso s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%) 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025 Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Semester 1
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4x 100)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN NGARGOYOSO										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai SAKIP**	**71,11**	**69,95**	**71,11**	**71,15**	**100,06**			
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK yang tercapai targetnya	**96**		**96**	96	96	**97%**	**40 %**	-40
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50%**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**90 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang /bulan	15 Orang /bulan	15 Orang /bulan	100	14 Orang /bulan	14 Orang / bulan	
	Administrasi Umum	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**12 Bulan**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	12 Paket	6 Paket	
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disedkiakan		12 Paket	-	-	-	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		37 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Penatausahaan AArsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**0**	0

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 unit	-			-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainya yang disediakan		2unit	2 unit	2unit	100	5 unit	0	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 unit	100	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Penyeiaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12Laporan	12 Laporan	100	12Laporan	6 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**91,97%**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	2 Unit	2 unit	100	1 Unit	1 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		4 unit	4 Unit	4 unit	100	5 Unit	5 Unit	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,1**	**87,075**	**85, 1**	**87,575**	**102,90**	**87, 83**	**Na**	**-**

	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat**	85,1	87,075	85,1	87,575	102,90	85,3	50	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	0	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF**	**100 %**	**85 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100%**	**50 %**	**50**
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**100 %**	**85 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100%**	**50%**	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	100	5 Lembaga	5 Lembaga	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**100**	-	-	-	-	-	

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 lembaga	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10 lembaga kemasyarakatan	-	-	-	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF**	**100 %**	**85 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	**50**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	6 Laporan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PESENTASE DESA MEMILIKI APBDES DAN RKPDES SESUAI KETENTUAN**		**85 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**-**	**-**	
		PERSENTASE KEGIATAN WAWASAN DAN KEAGAMAAN	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100**	**100**	**0 %**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100**	**0 %**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila	Peningkatan Kegiatan Kepemudaan Paskibraka, Hari Jadi Karanganyar		2 Kegiatan	-	-	-	-	-	

	Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI									
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		-	75 Orang	75 orang	100	75 Orang	75 orang	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		25 Orang	25 Orang	25 Orang	100	25 Orang	-	
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1 Dokumen	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan**	**100**	**85 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	**50**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**50 %**	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan DEsa		9 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	6 Dokumen	
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan		9 Dokumen	-	-	-	-	-	

		Pemberhentian Perangkat Desa								
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		-	12 Dokumen	12 Dokumen	100	-	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		-	-	-	-	1 Dokumen	-	

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Ngargoyoso

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt. 1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	100	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	87,58	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	71,15	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	40
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	50
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	50
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	50
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	0
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	50

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngragoyoso Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt. 1	Th 2024	Th 2025 Smt.1	
1	Nilai SAKIP	Nilai	71,11	Na	71,15	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak Dipakai	0,70	Tidak Dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	96	97	96	40	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	85,1	87,83	87,58	Na	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	50	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	50	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	50	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDesa dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	50	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ngargoyoso

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngargoyoso tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun Pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 - 2029.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Kapasitas SDM aparat kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat belum optimal.**
   Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun keterampilan. Aparat kecamatan seringkali belum sepenuhnya menguasai tugas-tugas pelayanan publik, administrasi, maupun teknis lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
2. **Sistem kerja kecamatan belum terumuskan dengan jelas.**
   Kecamatan belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja yang terdokumentasi secara sistematis, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal menjadi kurang efektif.
3. **Pengelolaan administrasi belum optimal.**
   Administrasi pemerintahan, pelaporan kegiatan, pengarsipan, dan manajemen data masih belum berjalan secara tertib dan efisien. Banyak kegiatan administrasi masih dilakukan secara manual, dan belum terintegrasi dengan sistem informasi yang memadai.
4. **Wilayah yang harus dilayani cukup luas, dihadapkan dengan persoalan sarana kerja yang belum memadai.**
   Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan medan geografis yang bervariasi membutuhkan mobilitas dan jangkauan layanan yang tinggi. Namun, fasilitas kerja seperti kendaraan dinas, perangkat teknologi, dan sarana komunikasi masih terbatas dan kurang memadai untuk mendukung pelayanan yang optimal.
5. **Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan.**
   Masyarakat enggan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan karena merasa aspirasinya tidak didengar atau

tidak diwujudkan dalam program nyata. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak antara pemerintah dan warga dalam proses pembangunan.

6. **Kurang pedulinya masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana terbangun.**
   Setelah pembangunan fisik seperti jalan, saluran air, atau fasilitas umum selesai dibangun, masyarakat kurang terlibat dalam upaya pemeliharaan. Akibatnya, sarana cepat rusak dan tidak berfungsi optimal.
7. **Potensi lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.**
   Banyak potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan, seperti hasil pertanian, kerajinan, pariwisata, atau sumber daya alam, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut sering belum diolah dengan baik atau belum mendapat dukungan yang cukup agar bisa berkembang.

Bertitik tolak dari pengertian isu penting diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Ngargoyoso yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Ngargoyoso

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kinerja serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kinerja pendukung pelayanan kecamatan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	• Jumlah aparatur belum sebanding dengan kebutuhan • Kompetensi SDM belum merata • Beban kerja antar pegawai belum seimbang • Laporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan • Kapasitas administrasi perangkat desa masih bervariasi
Belum optimalnya mutu pelayanan publik kepada masyarakat desa	Penerapan standar pelayanan publik belum berjalan optimal	• Standar pelayanan kepada masyarakat desa belum optimal • Dukungan sarana dan prasarana pelayanan sebagian di luar kewenangan kecamatan • Wilayah kecamatan cukup luas dibanding SDM yang tersedia • Titik rawan sosial dan keamanan di desa belum tertangani • Pemahaman penegakan PERDA belum merata • SOP pelayanan belum dijalankan secara konsisten
Belum optimalnya dukungan pembangunan desa dan pelayanan sosial	Fasilitasi pembangunan dan pelayanan sosial desa belum berjalan optimal	• Data penerima bantuan sosial tidak terpadu antar sumber • Sebagian pengaduan masyarakat desa belum ditindaklanjuti • Dukungan kelembagaan desa terhadap program prioritas belum optimal

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang terlah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Ngargoyoso dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Nagrgoyoso dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Ngargoyoso

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025 - 2029. Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Ngargoyoso.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.8

Tabel 2.8

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				**2.929.644.887,00**					**3.336.916.000,00**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA***	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97 %**	**2.798.565.087,00**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97 %**	**2.832.166.000,00**	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	3.700.000,00	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	5.700.000,00	
	administrasi keuangan	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan administrasi keuangan	90 %	2.074.365.087,00	administrasi keuangan	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan administrasi keuangan	90 %	2.174.126.000,00	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	189.800.000,00	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Ngargoyoso	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	232.590.000,00	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50.000.000,00	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	115.000.000,00	

	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	423.600.000,00	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 %	159.200.000,00	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	57.100.000,00	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Ngargoyoso	Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	145.550.000,00	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Ngargoyoso**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**87,83**	**6.362.300,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Ngargoyoso**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**87,83**	**40.000.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Ngargoyoso	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	6.362.300,00	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan	Kec. Ngargoyoso	Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	100 %	40.000.000,00	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**18.846.400,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**75.000.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Ngargoyoso	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK kecamatan	100 %	18.846.400,00	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Ngargoyoso	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan dan wawasan kebangsaan	100 %	75.000.000,00	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Wilayah dalam**	**100 %**	**27.600.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN**	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Wilayah dalam**	**100 %**	**145.000.000,00**	

	DAN KETERTIBAN UMUM		**keadaan kondusif**			**DAN KETERTIBAN UMUM**		**keadaan kondusif**			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngargoyoso	Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Wilayah	100 %	27.600.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Ngargoyoso	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan dan wawasan kebangsaan	100 %	145.000.000,00	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**59.207.000,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100 %**	**124.750.000,00**	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Ngargoyoso	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan dan wawasan kebangsaan	100 %	59.207.000,00	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Ngargoyoso	Terlaksanya Kegiatan Keagamaan dan wawasan kebangsaan	100 %	124.750.000,00	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RPKDes sesuai Ketentuan**	**100 %**	**19.064.000,00**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Ngargoyoso**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**120.000.000,00**	
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Ngargoyoso	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Terwujusnya tertib APBdes dab RKPDes	100 %	19.064.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Ngargoyoso	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Terwujusnya tertib APBdes dab RKPDes	100 %	120.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Ngargoyoso. Namun dalam proses ini Kecamatan Ngargoyoso mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Ngargoyoso terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Ngargoyoso.

Tabel 2.10
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembangunan Aspal Jalan Sekebluk Desa Ngargoyoso Dusun Surodadi Desa Ngargoyoso	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	(1.100x3x0,02)m	DPU PR
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembangunan Jembatan Ngiyono Dusun Ngiyono Desa Nglegok	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	1 Paket3	DPU PR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rehabilitas jembatan Utara Dukuh Babadan Desa Berjo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	(40x6x0.2)m	DPU PR
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemeliharan Jalan Kemuning – Munggur Desa Segorogunung	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	3.000 m	DPU PR
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Perbaikan Jalan Depan Balaidesa Jatirejo - Ngiyono Desa Nglegok Desa Jatirejo	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	1 Paket	DPUPR
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembangunan Talud Dukuh Sejomblang Dusun Selogentungan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	(16,5x11x0,3)m	DPU PR
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pembangunan Jalan dan Rehabilitas Jembatan Karangrejo – Dukuh Karangrejo Rt 01 RW 08	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	(2000x4x0,1)m	DPUPR

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;

4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;

15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngargoyoso

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Ngargoyoso adalah

TABEL 3. 1

Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	100
2		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	88,08
3			Program Penunjang Urusan Demerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	71,55
4			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
5			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
6			Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100
7			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100
8			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100

3.3 Tantangan dan Peluang:

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1 Tantangan

1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2 Peluang

1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Ngargoyoso untuk meningkatkan kinerja.
3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Ngargoyoso mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Ngargoyoso dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Ngargoyoso.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Ngargoyoso masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait

langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Ngargoyoso

SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDKATOR
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NGARGOYOSO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Ngargoyoso

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
      1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa

1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
      1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
      3). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1). Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      3). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
      5). Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngargoyoso

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Ngargoyoso, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ngargoyoso merupakan pencapaian kinerja pelayanan Ngargoyoso. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Ngargoyoso

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang

sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Ngargoyoso

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN NGARGOYOSO KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN NGARGOYOSO						**2.089.966.722,00**							**2.809.069.887,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.089.966.722,00**							**2.809.069.887,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.089.966.722,00**							**2.809.069.887,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	***Nilai SAKIP***	**-**			**71,55 Nilai**	**1.726.977.922,00**						**-**	**2.652.865.087,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan / Dokumen Perencanaan, Penganggaraan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	4.223.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	3.700.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

												kualitas lingkungan hidup				
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.252.800,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		2.300.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.971.100,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		1.400.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersusunnya Laporan Keuangan*	-			100 %	1.531.932.962,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	2.074.365.087,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/ bulan	1.531.932.962,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		2.074.365.087,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Dukungan Administratif Perangkat Daerah*	-			100 %	36.421.060,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	183.800.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.261.950,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		19.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.252.210,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		21.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.125.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		18.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.404.400,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		4.800.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17.600.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		115.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	1.777.500,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		6.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	40.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		40.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			100 %	118.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	262.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	58.800.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		202.400.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		24.600.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	34.800.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		35.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	36.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	89.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	36.200.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		50.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		0,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		39.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan***	**-**			**100 %**	**36.140.000,00**						**-**	**6.362.300,00**	

	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Meningkatkan pelayanan yang sesuai standar*	-			12 kegiatan	36.140.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	6.362.300,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	36.140.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		6.362.300,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif***	**-**			**100 %**	**65.288.800,00**						**-**	**18.846.400,00**	

	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Meningkatnya pembinaan lembaga masyarakat desa*	-			9 lembaga masyarakat	65.288.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	18.846.400,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	6.196.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		5.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.03.2.01 .0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	59.092.800,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		13.846.400,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase wilayah dalam keadaan kondusif***	**-**			**100 %**	**122.400.000,00**						**-**	**27.600.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Meningkatnya wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum*	-			1 wilayah	122.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	27.600.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	122.400.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		27.600.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan***	**-**			**100 %**	**62.440.000,00**						**-**	**80.807.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Meningkatnya kegiatan dalam wawasankebangsaan dan keagamaan*	-			4 kegiatan	62.440.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	80.807.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	5.080.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		50.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				25 Orang	34.800.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		9.207.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	22.560.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		21.600.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan***	**-**			**100 %**	**76.720.000,00**						**-**	**22.589.100,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Meningkatnya pembinaan terhadap pemerintahan desa Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Terwujudnya Tertib APBDes dan RKPDes*	-			9 desa 100 % 100 %	76.720.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso	-	22.589.100,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		3.150.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	69.720.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		11.064.100,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		4.000.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO

	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		1.750.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Ngargoyoso, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kantor Kecamatan Ngargoyoso		2.625.000,00	KECAMATAN NGARGOYOSO
	J U M L A H							**2.089.966.722,00**							**2.809.069.887,00**	

4

Tabel 4.2
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Nilai IKM	Nilai	88,08

Tabel 4.3
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Kecamatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegahkorupsi	**Program:** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan **SubKegiatan :** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.140.000
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program:** Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah **SubKegiatan :** 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 3. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	62.440.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Ngargyoso Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Ngargoyoso harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Ngargoyoso .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ngargoyoso secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGPANDAN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan maspukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Karangpandan, September 2025
CAMAT KARANGPANDAN

SINUNG WARDHANA, A.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740926 199311 1 002

DAFTAR ISI

			HAL
HALAMAN JUDUL			**i**
KATA PENGANTAR			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I.1**
	1.1	Latar Belakang	I.1
	1.2	Landasan Hukum	I.2
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.3
	1.4	Sistematika Penulisan	I.3
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**		**II.1**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun Lalu dan Capaian Renstra	II.1
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangpandan	II.8
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangpandan	II.20
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.23
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.28
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**		**III.1**
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III.1
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja	III.3
	3.3.	Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	III.6
	3.4.	Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD	III.7
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPANDAN**		**IV.1**
	4.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Karangpandan	IV.1
	4.2	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangpandan	IV.3
	4.3	Data Indidkatif Kecamatan Karangpandan	IV.3
	4.4	Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Karangpandan	IV.3
BAB V	**PENUTUP**		**V.1**
	5.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V.1
	5.2.	Kaidah Pelaksanaan	V.1
	5.3.	Rencana Tindak Lanjut	V.1

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Karangpandan	II-2
Tabel 2.2	Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (TW II)..	II-5
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....	II-7
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangpandan s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar.....	II-10
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024 – 2025 Kecamatan Karangpandan.....	II-18
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2024 – 2025 (semester I) Kecamatan Karangpandan.....	II-19
Tabel 2.7	Tabel Permasalahan dan Akar Masalah Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.....	II-20
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Karangpandan Kabupaten.....	II.24
Tabel 2.9	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar.....	II-28
Tabel 3.1	Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026).....	III.6
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD.....	IV.7
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV.7
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV.4
Tabel 4.2	Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2026.....	IV.19
Tabel 4.3	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV.19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Karangpandan untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

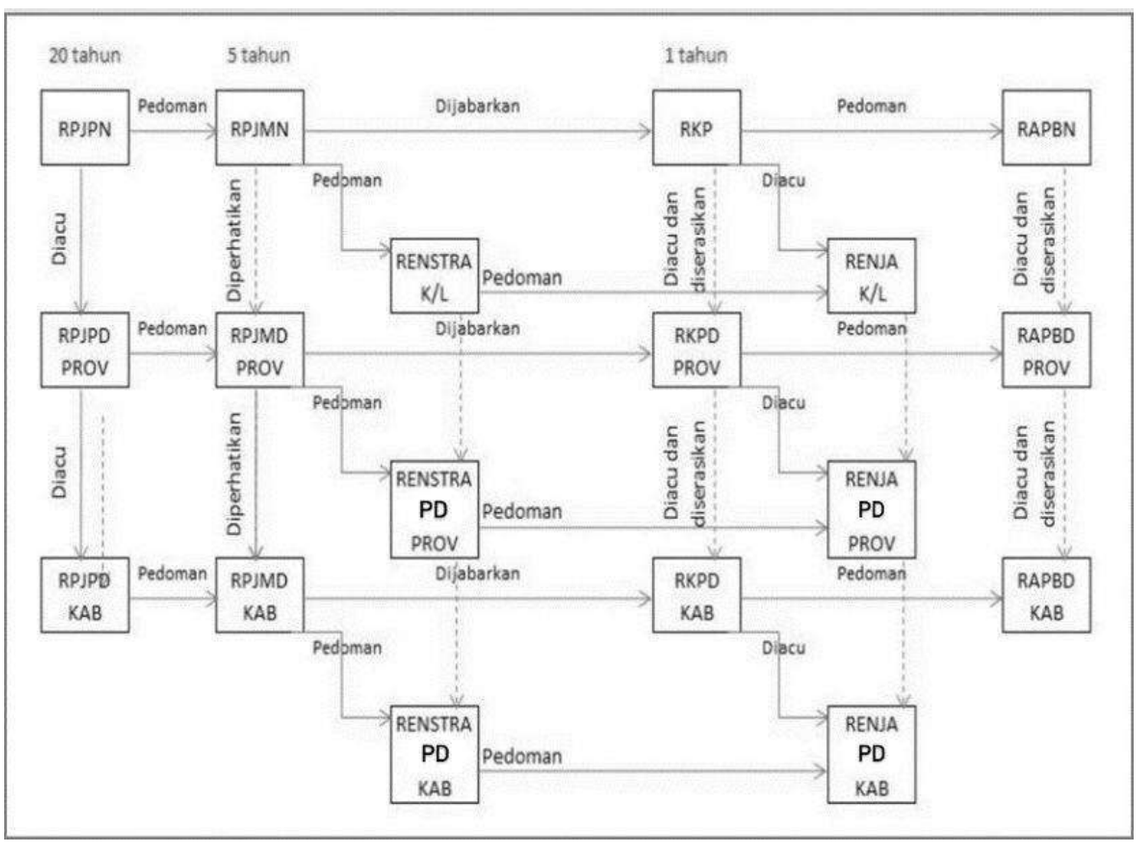

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun 2026 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Karangpandan, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Karangpandan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Karangpandan, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Karangpandan tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Karangpandan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangpandan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangpandan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPANDAN

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGPANDAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Karangpandan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Karangpandan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Karangpandan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja Kecamatan Karangpandan untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.729.127.590,00 (Dua milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar . 2.723.127.590,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta serratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), dan belanja modal sebesar 6.000.000,00 (Enam juta rupiah).

Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar 2.623.559.851,00 (Dua milyar enam ratus sua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau sebesar 97,48%%, sisa anggaran Rp. 67.845.763,00 (Enam puhluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 2,52%%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar 2.723.127.590,00 (Dua milyar tujuh ratus sua puluh tiga juta seratus sua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah) atau sebesar 93,36% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 150.444.827,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 6,64%., sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar 55.650.000,00 (Lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 93,67% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 3.762.500,00 (Tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 6,33%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk

melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.557.789.764,00 dan terealisasi Rp. 2.489.944.001,00 (93,02%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.928.850,00 dan terealisasi Rp. 6.928.850,00 (100,00%).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 17.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.795.000,00 (99,97%).

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 33.247.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.247.000,00 (100%).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 7.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.050.000,00 (100%).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp 8.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.800.000,00 (100%).

Dari hasil evaluasi diatas dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

2.1.1.Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Karangpandan telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Karangpandan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.557.789.764**	**2.557.789.764**	**100,00**	**2.521.838.440**	**2.521.838.440**	**135,02**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.999.200**	**2.999.200**	**100,00**	**4.249.200**	**4.249.200**	**262,07**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**2.999.200**	**2.999.200**	100,00	4.249.200	4.249.200	544,10

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.931.329.584**	**1.931.329.584**	**100,00**	**1.956.729.390**	**1.956.729.390**	**112,01**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**1.931.329.584**	**1.931.329.584**	100,00	**1.956.729.390**	**1.956.729.390**	112,01
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**82.918.480**	**82.918.48**	**121,70**	**34.739.850**	**34.739.850**	**90,39**
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	**7.479.000**	**7.479.000**	100,00	1.500.000	1.500.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.747.030	26.747.030	291,40	10.744.850	10.744.850	100,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	2.000.000	2.000.000	63,61
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	11.696.400	11.696.400	100,00	4.000.000	3.710.000	92,75
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan						
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30.496.050	30.496.050	100,00	13.260.000	13.260.000	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.500.000	100,00	1.063.350	1.063.350	100,00
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**29.592.500**	**29.592.500**	**78,84**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	**29.592.500**	**29.592.500**	100,00	-	-	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**473.720.000**	**473.720.000**	**100,00**	**58.800.000**	**486.240.000**	**826,94**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	131.280.000	131.280.000				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	21.000.000	21.000.000	100,00	22.800.000	26.400.000	115,79
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.440.000	321.440.000	100,00	36.000.000	459.840.000	######
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.230.000**	**37.230.000**	**100,00**	**27.875.000**	**27.875.000**	**100,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	32.500.000	32.500.000	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	2.900.000	2.900.000	100,00	1.875.000	1.875.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000	1.830.000		1.000.000	1.000.000	100,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.928.850**	**6.928.850**	**100,00**	**100.589.500**	**1.949.500**	1,94
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**6.928.850**	**6.928.850**	**100,00**	**100.589.500**	**1.949.500**	**1,94**
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	**6.928.850**	**6.928.850**	100,00	99.589.500	949.500	0,95
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**23.282.000**	**23.282.000**	**100,00**	**118.820.250**	**16.730.250**	14,08
9	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**21.590.700**	**21.590.700**	**100,00**	**110.570.250**	**8.480.250**	**7,67**
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**21.590.700**	**21.590.700**	100,00	7.000.000	7.000.000	100,00

	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	11.656.300	11.656.300				
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.656.300	11.656.300	100,00	103.570.250	1.480.250	1,43
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**. 77.590.000**	**. 77.590.000**	**100,00**	**58.800.000**	**25.200.000**	42,86
11	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**. 77.590.000**	**. 77.590.000**	**100,00**	**58.800.000**	**25.200.000**	**42,86**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**. 77.590.000**	**. 77.590.000**	100,00	58.800.000	25.200.000	42,86
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**7.050.000**	**7.050.000**	**100,00**	**131.771.500**	**39.371.500**	29,88
12	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**7.050.000**	**7.050.000**	**100,00**	**131.771.500**	**39.371.500**	**29,88**
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**7.050.000**	**7.050.000**	100,00	87.448.250	2.248.250	2,57
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	8.800.000	8.800.000	**100,00**	**115.631.650**	**12.431.650**	10,75
13	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	8.800.000	8.800.000	**100,00**	**115.631.650**	**12.431.650**	**10,75**
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	8.800.000	100,00	2.030.000	2.030.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0	0	0	0
	Fasilitai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkakt Desa	0	0	0	0	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0
	J U M L A H	2.723.127.590	2.723.127.590	100,00	2.260.291.452	2.437.791.452	107,85

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Kecamatan Karangpandan untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 107,85%. Selama 2 tahun ini alokasi anggaran rencana kerja Kecamatan Karangpandan terpenuhi lebih dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri

Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Kecamatan Karangpandan kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Kecamatan Karangpandan yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 2.437.791.452,00 atau 107,85% harus berkurang sebesar Rp. 2.406.595.452,00 sehingga pagu anggaran Kecamatan Karangpandan tahun 2025 adalah Rp. 31.196.000,00 atau 98,72% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang sudah menggunakan anggaran yang sudah dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.557.789.764**	**2.489.944.001**	**97,35%**	**2.527.838.440**	**1.305.216.733**	**51%**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.999.200**	2.999.200	100,00	**4.249.200**	**2.809.200**	**98%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.200	2.999.200	100,00	4.249.200	2.809.200	98%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.930.879.584**	**1.867.300.959**	**90,70**	**1.956.729.390**	**978.318.288**	**50%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.930.879.584	**1.867.300.959**	90,70	1.956.729.390	978.318.288	50%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**86.472.430**	**86.472.430**	100,00	**34.739.850**	**27.320.199**	**71%**
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	7.479.000	7.479.000	100,00	1.500.000	1.500.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.747.030	26.747.030	100,00	10.744.850	7.861.600	86%
	Penyediaan bahan logistik kantor	5.000.000	5.000.000	100,00	2.000.000	2.000.000	100%
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	11.696.400	11.696.400	100,00	4.000.000	3.998.600	70%
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100,00	14.995.000	0	50,00
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34.050.000	34.050.000	100,00	1.500.000	11.960.000	93%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.000.000	100,00	6.000.000	1.500.000	100%
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.488.550**	**26.488.550**	100,00	**6.000.000**	**6.000.000**	**100%**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	26.488.550	26.488.550	100,00	6.000.000	6.000.000	100%
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**473.720.000**	**476.628.020**	**98,33**	**486.240.000**	242.628.096	49%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	131.280.000	131.280.000	100,00	142.320.000	70.200.000	49%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	21.000.000	17.200.362	82%	20.400.000	8.028.096	39%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	321.440.000	321.440.000	100,00	328.800.000	164.400.000	50%
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.230.000**	**40.087.500**	**98,83**	**34.600.000**	19.340.950	56%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	32.500.000	32.500.000	100,00	30.500.000	16.230.950	53%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	2.900.000	2.900.000	100,00	2.880.000	2.590.000	90%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000	1.830.000	100,00	1.220.000	520.000	43%
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**6.928.850**	**6.928.850**	100,00	4.178.850	2.500.000	95%
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**6.928.850**	**6.928.850**	100,00	4.178.850	2.500.000	95%
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	6.928.850	6.928.850	100,00	4.178.850	2.500.000	95%
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**33.247.000**	**33.247.000**	100,00	**18.504.300**	**12.300.000**	69%
9	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**9.000.000**	**9.000.000**	100,00	**7.069.050**	**5.600.000**	**69%**
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.656.300	11.656.300	100,00	9.350.000	3.750.000	41%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.590.700	21.590.700	100,00	9.154.300	8.550.000	100%
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**77.590.000**	**77.590.000**	**100,00**	**57.850.000**	**9.000.000**	19%
11	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**77.590.000**	**77.590.000**	**100,00**	**57.850.000**	**9.000.000**	19%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	77.590.000	77.590.000	100,00	57.850.000	10800000	19%
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**7.050.000**	**7.050.000**	100,00	**4.500.000**	2.500.000	58%
12	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**7.050.000**	**7.050.000**	100,00	**4.500.000**	2.500.000	58%

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	7.050.000	7.050.000	100,00	4.500.000	2.500.000	58%
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.800.000**	**8.800.000**	100,00	**4.400.000**	2.500.000	89%
13	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.800.000**	**8.800.000**	100,00	**4.400.000**	2.500.000	89%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	8.800.000	100,00	4.400.000	2.500.000	89%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
	Fasilitai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkakt Desa						
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
	J U M L A H	2.691.405.614	2.623.559.851	93,36	2.617.271.590	1.334.016.733	51%

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.323.879.483,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.169.675.156,00 atau **93,36 %,** lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 95,34%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.179.033.228,00 atau 48,36% dari pagu anggaran Rp. 2.437.791.452,00 namun jika dihitung berdasarkan pagu efisiensi yang sebesar Rp. 8.2.406.595.452,00 maka persentase realisasi adalah 48,99%.

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2023			2024		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.426.889.214	2.298.306.085	94,70	2.557.789.764	2.489.944.001	51%
2	Program Penhyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.400.000	7.380.000	99,73	6.928.850	6.928.850	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	251.478.500	250.158.500	99,48	33.247.000	33.247.000	100,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.500.000	34.500.000	100,00	77.590.000	77.590.000	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.500.000	55.230.000	99,51	**7.050.000**	**7.050.000**	100,00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.900.000	19.760.000	99,30	8.800.000	8.800.000	100,00
	Rata-rata realisasi 6 program			98,79			98,47

Serapan anggaran selama 2 tahun belum semua program mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Karangpandan perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangpandan

Kecamatan Karangpandan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karangpandan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan PD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Karangpandan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal
   Kekuatan:
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah

- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih cukup banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karangpandan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karangpandan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karangpandan s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Karangpandan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	15	9	60

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	10	12	10	10	100	13	13	100
7.01.01.2.05	**Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3+	0	37	100	100	30	0	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	24	24	24	100	24	12	50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	8	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	2	2	2	100	3	0	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	1	1	100	1	1	**100**

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	48	48	100	48	24	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	50
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	5	5	100	5	4	80
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	4	4	100	6	3	50
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	1	0	0

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**84,00**	**86,58**	**84**	**86,625**	**103,125**	**84,5**	**0**	**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	100	2	1	50
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosetase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	7	7	100	7	7	100

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	**50**
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60	75	60	60	100	60	60	100
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	60	60	60	100	25	0	0
7.01.06	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Yang Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	13	13	13	100	13	13	100

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	3	3	3	100	5	5	100

Tabel 2.5.

Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024 – 2025

Kecamatan Karangpandan

TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					2024	2025	2024	2025 (smt I)
1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,00	tidak dipakai	85,74	tidak dipakai
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	72,00	tidak dipakai	72,30	tidak dipakai
2 Meningkatkan Pememrataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial			Angka Kemiskinan	Nlai	8,52	tidak dipakai	9,59	tidak dipakai
	2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78	tidak dipakai	0,763	tidak dipakai
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standart Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	tidak dipakai	97,50	tidak dipakai	100,00
	3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	tidak dipakai	84,84	tidak dipakai	86,65
		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	tidak dipakai	100	tidak dipakai
			Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan yang sudah ditetapkan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,00	tidak dipakai	86,63	tidak dipakai
			Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan yang sudah ditetapkan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100
		4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	100
		5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	%	100	tidak dipakai	100	tidak dipakai
			Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

Tabel 2.6.
Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2024 – 2025 (semester I)
Kecamatan Karangpandan

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
			2024	2025	2024	2025(smt I)
1	Nilai SAKIP	Nilai	72,00	tidak dipakai	72,30	tidak dipakai
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78	tidak dipakai	0,77	tidak dipakai
3	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	tidak dipakai	84,84	tidak dipakai	86,65

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karangpandan

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan**
   belum optimalnya Pemerataan beban kerja, ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan, kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan, ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
2. **Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik**
   Kecamatan belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sesuai dengan standarnya, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.
3. **Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**
   Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah. Belum optimalnya dukungan kelembagaan pada desa dalam mendukung program prioritas daerah
4. **Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat**
   Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan.

Tabel 2.7.
Tabel Permasalahan dan Akar Masalah
Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan
			b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan
			c. Sistem informasi pelayanan belum terintegrasi atau masih manual.
			d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			diterapkan dengan baik
			e. Belum ada standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan secara konsisten
		Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik	a. Belum adanya sistem tata kelola pelayanan publik yang berbasis standar secara menyeluruh, mencakup aspek regulasi, kapasitas SDM, sistem pengawasan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penerapan standar pelayanan belum menjadi budaya kerja yang konsisten di seluruh unit pelayanan.
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal
			b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM
			b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan
			c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Karangpandan dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Karangpandan dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran,

berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Karangpandan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Karangpandan dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Karangpandan

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program kegitan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Karangpandan.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.7

Tabel 2.8.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target / Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target / Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecamatan				**2.592.029.584**	**Kecamatan**				**2.701.724.325**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec.Karangpandan**	**Nilai SAKIP**	**72,35**	**2.100.040.521**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec.Karangpandan**	**Nilai SAKIP**	**72,35**	**2.469.756.444**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100	1.612.206.521	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100	1.867.636.444	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Darah	Kec. Karangpandan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	0	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Darah	Kec. Karangpandan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	100	25.200.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	`	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	32.604.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	48.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	0	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	34.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	438.720.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	457.920.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	16.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Karangpandan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	32.000.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec.Karangpandan**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**5.600.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec.Karangpandan**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**3.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Karangpandan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	**5.600.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Karangpandan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	3.000.000	

3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec.Karangpandan**	**Prosentase lemabaga Kemamsyarakatn Aktif**	**100**	**5.040.000**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec.Karangpandan**	**Prosentase lemabaga Kemamsyarakatn Aktif**	**100**	**16.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangpandan	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13	**5.040.000**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Karangpandan	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13	16.500.000	
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kec.Karangpandan**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**24.736.000**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kec.Karangpandan**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**2.500.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Karangpandan	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13	24.736.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Karangpandan	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13	2.500.000	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec.Karangpandan**	**persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**1.680.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec.Karangpandan**	**persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**62.600.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Karangpandan	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	1.680.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Karangpandan	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	62.600.000	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Karangpandan	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100	**1.680.000**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Karangpandan	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100	**15.000.000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Karangpandan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	1.680.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Karangpandan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	15.000.000	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Karangpandan.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Karangpandan. Namun dalam proses ini Kecamatan Karangpandan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Karangpandan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Karangpandan.

Tabel 2.9.

Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Karangpandan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;

5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah "SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR" Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;

6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta "Karanganyar Bebas Jeglongan";
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Karangpandan

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Karangpandan adalah

TABEL 3. 1

Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program
(Target Tahun 2026)

N0	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	100
2	Meningkatnya Kaalitas Prlayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Persen	70
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA"	Nilai Sakip	Nilai	73,95
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1. Tantangan

1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2. Peluang

1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Karangpandan untuk meningkatkan kinerja.
3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Karangpandan mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Karangpandan dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lelbih terinci dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Karangpandan.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Karangpandan masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGPANDAN

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Karangpandan

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 dan Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Karangpandan di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan
    a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakt di Wilayah Kecamatan

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi

dan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
    b) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
    a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    b) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    e) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    f) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada penyediaan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk tugas-tugas pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b) Evaluasi Kinerja Peerangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Pengadaan Mebel
   c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Pemeliharaan Mebel
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Karangpandan

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Karangpandan, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangpandan merupakan pencapaian kinerja pelayanan Karangpandan. (lebih lengkap dilihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Karangpandan

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Karangpandan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

TABEL 4.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN KARANGPANDAN						**2.138.776.521,00**							**2.964.949.473,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.138.776.521,00**							**2.964.949.473,00**	
	07.01	**KECAMATAN**						**2.138.776.521,00**							**2.964.949.473,00**	
01.00	**07.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.100.040.521,00**						**-**	**2.800.776.873,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terbayarnya Gaji ASN*	-			100 Persen	1.612.206.521,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	2.060.496.900,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.612.206.521,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		2.060.496.900,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	32.604.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	119.064.973,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.566.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		12.437.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	4.238.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		39.230.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		8.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	2.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		7.297.973,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		0	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	22.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		50.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	0	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		2.100.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	0			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	0	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		0	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 Persen	438.720.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	560.715.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		156.900.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		35.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	417.120.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		368.815.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 Persen	16.510.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	60.500.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	14.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		38.500.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	690.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		11.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		11.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.220.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		0	KECAMATAN KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02.00	**07.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**5.600.000,00**						**-**	**9.212.500,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	-			100 Persen	5.600.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	9.212.500,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karangpandan		9.212.500,00	KECAMATAN KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											.	6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup				
03.00	**07.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.040.000,00**						**-**	**31.501.100,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	-			100 Persen	5.040.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	31.501.100,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarak atan	2.240.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		13.850.100,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	2.800.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		17.651.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
04.00	**07.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**24.736.000,00**						**-**	**33.459.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteneraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	-			12 Laporan	24.736.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	33.459.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	24.736.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karangpandan		33.459.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											.	6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup				
05.00	**07.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**1.680.000,00**						**-**	**65.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	1.680.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	65.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				11 Orang	1.680.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		65.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
06.00	**07.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**1.680.000,00**						**-**	**25.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 Persen	1.680.000,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan	-	25.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				2 Dokumen	1.680.000,00	Kab. Karanganyar, Karangpandan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 6. Meningk atkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Karangpandan		25.000.000,00	KECAMATAN KARANGPANDAN
	J U M L A H							**2.138.776.521,00**							**2.964.949.473,00**	

Tabel 4.2.

Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangpandan Tahun 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian	Target
		2025	2026
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	67	70

Tabel 4.3.

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**Program :** Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 700.000,00
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 43.450.000,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karangpandan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Karangpandan .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Karangpandan Tahun 2026

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangpandan secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan

teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Karangpandan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN KARANGANYAR
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 dapat disusun. Renja OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja OPD Kecamatan Karanganyar ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Karanganyar, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Karanganyar.

Karanganyar, September 2025
CAMAT KARANGANYAR

SUTARMO, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19700622 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1. Latar Belakang I.1
1.2. landasan Hukum I.1
1.3. Maksud dan Tujuan I.3
1.4. Sistematika Penulisan I.3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2025 TRIWULAN III (Sampai bulan September)..... II.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025(Sampai dengan bulan september)..... II.2
Analisis Kinerja Kecamatan Karanganyar II.24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar..... II.24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... III.1
3.2. Tujuan dan Sasaran III.4
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....III.8
3.4. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah..... III.8

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2026 ..... IV.1
IV.1
IV.1

BAB V PENUTUP V.1
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja..... V.1
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan V.2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Program Kecamatan Karanganyar Tahun 2025	II-1
Tabel 2.2	Realisasi APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025 Triwulan III	II-4
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-6
Tabel 2.4	Hasil Capaian Indikator Program Keacamatan Karanganyar Tahun 2023 dan 2024	II-6
Tabel 2.5	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanganyar	II-7
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar dan Pencapaian Renstra Kecamatan Karanganyar s/d Tahun 2022	II-8
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karangayar	II-17
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Karanganyar	II-20
Tabel 2.9	Review Terhadap Rancangan awal RPD Tahun 2025 Kecamatan Karanganyar	II-23
Tabel 2.1-	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar	II-24
Tabel 3. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	III-9
Tabel 3. 2	Keselarasan Perangkat Daerah dengan program kegiatan dan Subkegiatan	III-10
Tabel 4. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2026	IV-3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karanganyar berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Karanganyar agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tauhun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tigas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Karanganyar. Renja Kecamatan Karanganyar memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar tahun 2026 dilandasi dengan landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2026;
2. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Karanganyar Tahun 2026;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
2. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2026;
3. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
4. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
5. Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Karanganyar, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Karanganyar

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Karanganyar berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan realisasi APBD Kecamatan Karanganyar.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Evaluasi RKPD tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kecamatan Karanganyar untuk Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp.34.242.496.889,- (Tiga Puluh empat milyar dua ratus empat puluh dua juta empa ratus sembilan puluh enam ribu delapn ratus delapan puluh sembilan rupiah) Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan ke III (bulan september) sebesar Rp.18.875.198.163- (Delapan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah), sisa anggaran yang belum terealisasikan sebesar Rp.17.092.945.247,- (Tujuh belas milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Tambah Tabel 2.1.

Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025
di Kecamatan Jumapolo

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	16.183.894.185	16.183.894.185	100	15.433.127.939	16.615.664.164	107,6
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.286.200	24.286.200	100	27.340.400	26.141.300	95,6
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.481.700	11.481.700	100	16.340.000	15.191.300	92,9
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.804.500	12.804.500	100	10.950.000	10.950.000	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.460.490.425	11.460.490.425	100	12.004.713.209	12.624.677.984	105,1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.460.490.425	11.460.490.425	100	12.004.713.209	12.624.677.984	105,1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.332.300	87.332.300	100	76.932.000	79.232.000	99,1
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.009.900	77.009.900	100	66.022.400	68.322.400	103,4
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.322.400	10.322.400	100	10.909.600	10.909.600	100
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.342.949	556.342.949	100	418.595.330	467.231.030	111,6
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.418.410	64.418.410	100	42.860.800	44.569.200	103.9
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.314.539	160.314.539	100	149.949.280	152.883.280	101,9
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.811.450	79.811.450	100	26.668.400	26.668.400	100

	Penyediaan bahan Logistik Kantor	28.872.000	28.872.000	100	9.960.000	19.235.000	193,1
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.766.500	87.766.500	100	63.670.000	89.493.900	149,5
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.920.000	16.920.000	100	9.960.000	12.540.000	140,5
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.200.000	21.200.000	100	3.750.000	3.750.000	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.725.050	4.725.050	100	7.011.250	7.011.250	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.315.000	92.315.000	100	104.765.000	111.080.000	106
4.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.135.408.550	1.135.408.550	100	668.407.600	896.173.300	134
	Pengadaan Mebel	172.350.000	172.350.000	100	73.450.000	80.050.000	108,9
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	571.281.000	571.281.000	100	374.042.000	330.192.000	88,2
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100	160.000.000	350.000.000	218,7
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	263.548.050	263.548.050	100	60.915.000	135.931.300	223,1
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya	28.229.500	28.229.500	100	-	-	-
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.255.940.543	2.255.940.543	100	1.922.310.000	2.097.516.500	109,1
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	757.330.000	757.330.000	100	674.373.000	764.853.000	113,4
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.300.000	295.300.000	100	269.520.000	318.400.000	118,1
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.626.500	12.626.500	100	8.694.000	10.940.800	125,8
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.684.043	1.190.684.043	100	969.723.000	1.003.322.700	103,4
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	664.093.218	664.093.218	100	314.829.400	424.692.050	134,8
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.964.100	133.964.100	100	69.925.000	145.951.650	208,7
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.818.000	111.818.000	100	67.240.500	88.612.500	131,7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100	126.378.800	167.494.800	132,5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.859.218	239.859.218	100	45.414.800	22.633.100	49,8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.335.600	2.335.600	100	5.870.200	0	0
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	127.481.100	127.481.100	100	9.189.850	8.283.125	90,1
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.600.000	108.600.000	100	0	0	0
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.600.000	108.600.000	100	0	0	0
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	18.881.100	18.881.100	100	9.189.850	8.283.125	90,1
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-		690.000	943.200	136,6
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.881.100	18.881.100	100	8.499.850	7.339.925	86,35
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	17.543.040.040	17.543.040.040	100	7.274.948.400	13.831.316.700	190,1
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	150.216.540	150.216.540	100	110.905.500	127.520.600	114,9
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan di desa	33.750.000	33.750.000	100	-	113.520.600	0

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	116.466.540	116.466.540	100	110.905.500	14.000.000	12,6
2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.248.211.500	17.248.211.500	100	7.048.282.300	13.588.035.500	192,7
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	127.204.000	127.204.000	100	193.837.100	188.590.300	97,2
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	16.000.000.000	16.000.000.000	100	6.000.000.000	12.545.000.000	209
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.118.787.500	1.118.787.500	100	852.445.200	852.445.200	100
	Evaluasi Kelurahan	2.220.000	2.220.000	100	2.000.000	2.000.000	100
3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan**	-	-	-	115.760.600	115.760.600	100
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	-	-	-	115.760.600	115.760.600	100
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	15.000.500	15.000.500	100	3.530.000	3.530.000	100
1.	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.500	15.000.500	100	3.530.000	3.530.000	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.500	15.000.500	100	3.530.000	3.530.000	100
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	3.171.388.200	3.171.388.200	100	2.800.976.700	3.145.978.900	112,3
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.171.388.200	3.171.388.200	100	2.800.976.700	3.145.978.900	112,3
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia	476.156.950	476.156.950	100	330.096.700	319.596.700	96,8
	Fasilitasi koordinasi dan Sosialisasi Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	197.297.000	197.297.000	100	0	343.783.000	0
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	220.804.704	220.804.704	100	23.200.000	23.200.000	100
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	53.462.250	53.462.250	100	225.471.600	228.190.800	101,2
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh pemeritah daerah	2.196.667.300	2.196.667.300	100	2.200.608.400	2.209.608.400	100,4
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	100	21.600.000	21.600.000	100
6.	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	31.661.200	31.661.200	100	-	-	-
1.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.661.200	31.661.200	100	-	-	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	31.661.200	31.661.200	100	-	-	-
JUMLAH		**37.312.940.225**	**37.312.940.225**		**25.521.772.889**	**33.604.772.889**	

Tabel 2.2

Realisasi APBD di Kecamatan Karanganyar Tahun 2024 dan 2025 (TW III)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW III		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	16.183.894.185	15.051.806.962	92,8	16.615.664.164	10.977.688.913	63,8
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.286.200	24.286.200	100	26.141.300	13.557.550	56,9
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.481.700	11.481.700	100	15.191.300	13.557.550	99,5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.804.500	12.804.500	100	10.950.000	0	0,0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.460.490.425	10.401.034.010	90,8	12.624.677.984	8.273.330.359	62,9
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.460.490.425	10.401.034.010	90,8	12.624.677.984	8.273.330.359	62,9

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW III		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87.332.300	87.332.300	100	79.232.000	62.629.750	75,7
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	77.009.900	77.009.900	100	68.322.400	62.629.750	85,8
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.322.400	10322400	100	10.909.600	0	0,0
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	556.342.949	540.696.675	96,7	467.231.030	246.632.875	59,2
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.418.410	62.295.944	99,0	44.569.200	28.636.200	59,7
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.314.539	158.790.431	95,6	152.883.280	86.700.775	62,6
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.811.450	76.335.700	100	26.668.400	17.835.300	70,3
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	28.872.000	18.767.500	98,9	19.235.000	7.943.000	41,3
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.766.500	96.827.050	100	89.493.900	38.587.600	53,6
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.920.000	16.920.000	100	12.540.000	8.260.000	65,9
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.200.000	2.000.000,0	100	3.750.000	3.000.000,0	100,0
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.725.050	4.625.050	97,9	7.011.250		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.315.000	104.135.000	93,4	111.080.000	55.670.000	61,2
4.	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.135.408.550	1.089.646.050	99,6	896.173.300	560.712.300	65,6
	Pengadaan Mebel	172.350.000	171.925.000	99,8	80.050.000	11.900.000	16,0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	571.281.000	570.171.000	99,8	330.192.000	116.070.000	36,3
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	98.069.000	98,1	350.000.000	347.836.200	99,4
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	263.548.050	249.481.050	99,9	135.931.300	84.906.100	76,5
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya	28.229.500	41.164.600	98,1	-		
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2.255.940.543	2.183.634.875	96,8	2.097.516.500	1.493.322.415	70,8
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	757.330.000	732.150.000	96,7	764.853.000	570.065.000	74,5
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.300.000	256.704.332	86,9	318.400.000	193.615.515	58,1
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.626.500	12.626.500	100	10.940.800	3.122.700	28,5
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.190.684.043	1.182.154.043	99,3	1.003.322.700	726.519.200	72,7
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	664.093.218	684.012.252	98,5	424.692.050	327.503.664	59,4
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.964.100	126.820.330	94,7	145.951.650	85.490.164	52,3
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.818.000	110.700.000	99	88.612.500	61.781.500	63,6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.077.100	116.077.100	100	167.494.800	126.928.400	69,6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.859.218	268.079.222	99,3	22.633.100	45.348.900	49,5
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.335.600	62.335.600	100	0	7.954.700	47,4
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	127.481.100	127.281.100	99,8	8.283.125	690.000	10,3
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.600.000	108.400.000	99,8	8.283.125		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.600.000	108.400.000	99,8			
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	18.881.100	18.881.100	100	8.283.125		
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-			943.200	690.000	77,3
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.881.100	18.881.100	100	7.339.925		
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	17.543.040.040	17.783.265.040	99,7	13.831.316.700	5.059.513.550	36,3
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	150.216.540	150.216.540	100	127.520.600	78.391.000	69,0
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.750.000	33.750.000	100	113.520.600	67.391.000	66,6
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	116.466.540	116.466.540	100	14.000.000	11.000.000	88,7
2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	17.248.211.500	17.488.436.500	99,7	13.588.035.500	4.917.107.750	35,8
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	127.204.000	127.114.000	99,9	188.590.300	169.860.700	89,3
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	16.000.000.000	16.242.000.000	99,7	12.545.000.000	4.087.000.000	32,5
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.118.787.500	1.117.102.500	99,8	852.445.200,00	660.247.050	67,9

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW III		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Kelurahan	2.220.000	2.220.000	100	2.000.000		
3	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan**	-	144.612.000	100	115.760.600	64.014.800	63,0
	Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan	-	139.150.000	100	115.760.600	64.014.800	63,0
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	15.000.500	15.000.500	100	3.530.000	1.680.000	63,8
1.	koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.000.500	15.000.500	100	3.530.000	1.680.000	63,8
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.000.500	15.000.500	100	3.530.000	1.680.000	63,8
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	3.171.388.200	*3.165.713.200*	99,8	3.145.978.900	2.835.625.700	92,1
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.171.388.200	3.165.713.200	99,8	3.145.978.900	2.835.625.700	92,1
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia	476.156.950	470.931.950	98,9	319.596.700	180.158.900	66,5
	Fasilitasi koordinasi dan Sosialisasi Konsultasi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	197.297.000	235.347.000	99,8	343.783.000	270.619.650	80,3
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	220.804.704	220.804.700	100	228.190.800	150.462.500	67,8
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	53.462.250	14.962.250	100	23.200.000	17.200.000	83,7
	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh pemeritah daerah	2.196.667.300	2.196.667.300	100	2.209.608.400	2.202.784.650	99,8
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.000.000	27.000.000	100	21.600.000	14.400.000	66,7
6.	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	22.136.200	22.136.200	100	-		
1.	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.136.200	22.136.200	100	-		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.136.200	22.136.200	100	-		
JUMLAH		**37.312.940.225**	**36.165.203.002**	**96,9**	**33.604.772.889**	**18.875.198.163**	**55,1**

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 37.312.940.225 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 36.165.203.002 atau 96,9%, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 96,15%. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 adalah Rp. 18.875.198.163 atau 55,1% dari pagu anggaran Rp. 33.604.772.889 namun jika dihitung berdasarkan pagu efisiensi yang sebesar Rp. 33.140.396.889 maka persentase realisasi adalah 56,9%.

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**16.429.466.244**	**15.821.575.993**	**96.3**	**16.183.894.185**	**15.051.806.962**	**92,8**
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan PelayananPublik	**6.706.825**	**6.706.825**	**100**	**127.481.100**	**127.281.100**	**99,8**
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**3.026.963.750**	**2.905.885.200**	**96**	**17.543.040.040**	**17.783.265.040**	**99,7**
4	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	**2.635.000**	**2.635.000**	**100**	**15.000.500**	**15.000.500**	**100**
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	**3.026.963.750**	**2.969.424.475**	**96**	**3.171.388.200**	***3.165.713.200***	**99,8**
6	Program, Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	**22.136.200**	**22.136.200**	**100**
	Realisasi	**22.492.735.569**	**21.706.227.493**	**96,5**	**37.312.940.225**	**36.165.203.002**	**96,9**

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Karanganyar perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebabelagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tigas dan fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Karanganyar Bagi Institusi Kecamatan Karanganyar Renja ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karanganyar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananyakegiatan Fasilitasi Pelayanan Umum di tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Karanganyar meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:

   a. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   b. Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan kelurahan
   c. Terdapatnya Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
   d. Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   e. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:

   a. Masihada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja

b. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
c. Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
d. Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

a. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
b. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
c. Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
d. Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
e. Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
f. Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
g. Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
h. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

a. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
b. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
c. Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
d. Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
e. Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
f. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanganyar berdasarakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

Tabel 2. 4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Karanganyar dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Karanganyar s/d Tahun 2025 Kabupaten Kranganyar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%) 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4x100)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
KECAMATAN KARANGANYAR										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	69.80	NA	72	72	72	70,95	70,65	
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40%
	Koordinasi dan penyusunan RKA -SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40%
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	88.6	97	97	97	95	95	75%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100	95	95	95	95	95	95	75%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian	100	100	100	100	100	100	100	75%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Pakaian batik kantor dan pakaian olahraga	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%
	Pendataan dan pengolahan Administrasi Pegawai	Pendataan dan pengolahan pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0%

	Administrasi Umum	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**75%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	75%
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	12 Paket	**75%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	12 Paket	75%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	12 Paket	**75%**
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	75%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	75%
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	12 dokumen	75%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**100**	**100%**	**100**	**100**	**100**	**100**	75%
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	75%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	6 Unit	75%
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan sarana dan	Tersedianya Sarana	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1 Unit	100%

	prasrana gedung kantor atau bangunan lainnya	dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Pengadaan sarana dan prasrana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**100**	**100**	**75%**
	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75%
	Penyeiaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**100**	**100**	**75%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	48 Unit	48 Unit	75%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	13 Unit	13 Unit	75%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	13 Unit	13 Unit	75%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	13 Unit	13 Unit	75%

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**75%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	53 Pokmas	53 Pokmas	53 Pokmas	53 Pokmas	53 Pokmas	53 Pokmas	53 Pokmas	100%
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	**7 Lembaga**	100%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	100%
	Koordinasi Upaya	Cakupan Koordinasi	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**75%**

	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan							75%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**12 Laporan**	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**PESENTASE DESA MEMILIKI APBDES DAN RKPDES SESUAI KETENTUAN**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang	250 Orang
0	Fasilitasi , Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang

	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional									
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Kordinasi Pimpinan dikecamatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	75%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	71,42	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83,2	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	70,65	70,65
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	84,05
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	74
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	96

Sumber : Renstra Kecamatan Karanganyar 2025-2029

Tabel 2. 6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt.I	Th 2024	Th 2025 Smt.I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	70.95	70.65	Na	
2	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	85	83.2	84,05	
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
5	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
6	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	100	

2. 3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karanganyar Permasalahan Pelayanan yang dihadapi di Kecamatan Karanganyar antara lain dalam melayani masyarakat tentang permohonan surat menyurat yang terkait dengan Administrasi Kependudukan yang serba instan dan bisa langsung selesai dan jadi pada saat itu juga, sementara proses dalam pelayanan hal tersebut harus diverifikasi dengan Instansi/Dinas Terkait untuk mendapatkan TTE (Tanda Tangan Elektronik) baru lah bisa diproses kelanjutannya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   f. pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
   e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masihkurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
   d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat di Kelurahan.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembangterhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Kecamatan Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimlanya pelayanan publiksehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	1. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah Pendudukyang harusdilayani. 2. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas 3. danfungsinya. 4. belum meratanya kompetensi danpendidikan sumber daya aparatur. 5. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja 6. Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; 7. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 8. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran 9. masih terbatasnya jumlah saranadan prasarana 10. yang ada di Kantor Kecamatan. 11. Masih 12. Kurangnya system pengendalian internal dalamproses pengelolaan keuangan di kecamatan 13. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; 14. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	1. Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur b. Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; c. masih rendahnya disiplin aparatur desa; d. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan; e. belum f. optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan; g. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur Kelurahan 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. belum optimalnya pembinaan c. Linmasdesa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. belum b. optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. Masih rendahnya

			kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB)kegiatan pembangunan. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin; c. masih d. tingginyatingkat pengangguran; e. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. 5. Seksi Pelayanan Umum a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat; b. Terbatasnya sarana dan prasarana; c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan

1. Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Karanganyar Kedudukan Kantor Kecamatan Karanganyar yang berada di tengah pusat kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
2. Kurangnya dukungan fasilitas umum
3. Perlu adanya penambahan fasilitas umum diluar lingkungan Kantor Kecamatan Karanganyar berupa kamar mandi / wc umum, hal ini untuk mengantisipasi keamanan dan kenyamanan limgkungan kantor di malam hari, dimana pengunjung pedagang di Taman Pancasila banyak yang menggunakan kamar mandi / wc di kantor kecamatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bagi kelurahan adalah hal yang baru dilaksanakan pada Tahun 2017, oleh karena itu diperlukan adanya pendelegasian kewenangan camat yang membawahi kelurahan, baik masalah personil maupun kebijakan lain, sehingga ada hubungan dan batas-batas yang jelas antara kedua OPD tersebut.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Karanganyar dan Kantor Kelurahan se-Kecamatan Karanganyar menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel T-C 31.

Tabel 2. 8
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				**28.816.778.789**					**28.816.778.789**	
1	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA*	Kec.Kra	Nila Sakip	70,95	13.592.100.964	*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH*	Kec. Kra	Nila Sakip	70,95	13.592.100.964	
2	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	Kec.Kra	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	8.283.125	*PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK*	Kec. Kra	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	8.283.125	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kra	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	12.593.273.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kra	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	95%	12.593.273.600	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kra	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100%	3.530.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kra	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100%	3.530.000	
5	*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	Kec. Kra	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	2.619.591.100	*PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM*	Kec. Kra	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	2.619.591.100	

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.9
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	OPD Tujuan	OPD Tujuan Akhir	Status	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Mitra	Rekomendasi TAPD	Vol	Satuan	Jenis Belanja	Sub Kegiatan
1	SETIAWAN DIBROTO, S.E.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Betonisasi Jalan	Jalan RW 13 Lingkungan Manggeh Anyar, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar , Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 50.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Pengaspalan Jalan Kadipiro RW 009, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Kadipiro RW 009, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 50.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Pengaspalan Jalan Kadipiro RW 010, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Kadipiro RW 010, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 100.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Renovasi Balai Dusun Ringin Asri RT 006 RW 012, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Dusun Ringin Asri RT 006 RW 012, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 25.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
5	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKA	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Pembangunan Drainase / Saluran Air Dusun Beji RT 001 RW 003,	Dusun Beji RT 001 RW 003, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 50.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan

	S, S.Sos, M.M.		Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar											Prasarana Kelurahan
6	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Pengaspalan Jalan Dusun Beji RT 002 RW 003, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Dusun Beji RT 002 RW 003, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 50.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Pembangunan Talud Dusun Pingit, Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Dusun Pingit, Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 50.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
8	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Peningkatan Lapangan Sepakbola Bolong Etan RW 007, Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Bolong Etan RW 007, Kelurahan Bolong, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 100.000.000	Diteruskan	null	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
9	BOBY ADITIA PUTRA PAMUNGKAS, S.Sos, M.M.	Peningkatan Infrastruktur Kelurahan di Kecamatan Karanganyar	Pembangunan Sumur Bor Dalam Lingkungan Banaran RW 013 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kab. Karanganyar	Lingkungan Banaran RW 013 Kelurahan Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar,, Kab. Karanganyar	Kec. Kra	Kec. Kra	Verifikasi TAPD	Diteruskan sebesar Rp. 200.000.000	Diteruskan	Usulan Diteruskan Ke Tahap Selanjutnya	1	paket	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran tersebut digunakan sebagai pijakan awal dalam pemilihan / penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan. Disamping itu tentunya juga mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pasti mempunyai peran dalam pembangunan daerah atau pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional dan provinsi, agar tujuan dan sasaran nasional dan provinsi juga dapat tercapai. Untuk mewujudkannya (sinkronisasi) perlu adanya telaah terhadap perencanaan nasional dan provinsi terkait tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program, dan indikator serta targetnya.

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun yang strategis karena menjadi tahun pijakan awal (dasar) perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah dan nasional harus sinergis, sikron dan konsisten sehingga tujuan pembangunan nasional dapat terwujud melalui perwujudan tujuan pembangunan daerah.

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;

2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;

3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;

3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :
1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga

rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Karanganyar

Peningkatan tata kelola Kecamatan dan daya saing SDM Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik kecamatan dan kelurahan
b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran
c. Peningkatan kompetensi SDM Kecamatan dan Kelurahan
d. Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan dan kelurahan

Prioritas pembangunan tahun 2027: Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat yang mendukung daya saing daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan. Peningkatan dan pemberdayaan peran PKK, LPMK dan Karangtaruna dalam mencapai program prioritas daerah.
b. Peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam mendorong daya saing daerah. Penguatan koperasi merah putih dan UMKM melalui koordinasi dengan dinas terkait
c. Peningkatan peran RW dan RT dalam mendorong kualitas lingkungan

Prioritas pembangunan tahun 2028: Peningkatan kualitas infrastruktur dan keamanan ketertiban masyarakat yang mendukung pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan kelurahan dan kecamatan .
b. Peningkatan kualitas linmas dalam mendorong keamanan dan ketertiban wilayahi
c. Peningkatan peran RW dan RT dalam mendorong kualitas keamanan dan ketertiban wilayah
d. Peningkatan koordinasi dengan kepolisian TNI dan satpol PP
e. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar uman beragama

Prioritas pembangunan tahun 2029: Perwujudan Kualitas Pelayanan Publik yang nyaman dan inklusif dalam mencapai Karanganyar Baru adalah sebagai berikut:

a. Penguatan pelayanan publik yang ramah dan nyaman
b. Penguatan pelayanan publik berbasis teknologi
c. Pemberdayaan masyarakat yang inklusif
d. Perwujudan kemanan dan ketertiban masyarakat
e. Penguatan peran RW dan RT dalam mendorong kualitas keamanan dan ketertiban wilayah

Prioritas pembangunan tahun 2030: Perwujudan tata kelola pemerintahan Kecamatan BERDAYA dan INKLUSIF dalam Karanganyar Baru adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan publik ramah, mudah dan inklusif berbasis teknologi
b. Perwujudan keamanan dan ketertiban wilayah dalam karanganyar baru
c. Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan yang berdaya

Arah Kebijakan Pembangunan Kecamatan Karangayar dengan memperhatikan arah kebijakan RPJMD yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat difokuskan pada :

1. Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan

Arah Kebijakan :

a. Penyesuaian SOP pelayanan umum da/n pemerintahan kelurahan
b. Pelatihan dasar aparatur.
c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana.
d. Pengembangan awal sistem administrasi berbasis IT.

3. Modernisasi Pelayanan Kecamatan dan Pemerintahan

Arah Kebijakan :

a. Implementasi layanan publik berbasis digital.
b. Pengadaan sarana prasarana berbasis TI.
c. Integrasi pelayanan kecamatan dan kelurahan.
d. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi

4. Akselerasi Peningkatan Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja Kecamatan

Arah Kebijakan :

a. Optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja.
b. Peningkatan kualitas evaluasi periodik kinerja pelayanan.
c. Penguatan pembinaan pemerintahan kelurahan.
d. Penyempurnaan laporan kinerja.

5. Peningkatan Konsolidasi dan Penyempurnaan Layanan Prima di Kecamatan

Arah Kebijakan :

a. Standarisasi layanan prima ramah kelompok rentan.
b. Integrasi data administrasi secara penuh.
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan.

6. Pemajuan Layanan dan Pemerintahan Secara Mandiri Berbasis Digital

Arah kebijakan:

a. Pelayanan publik dan administrasi 100% berbasis digital.
b. Peningkatan kemandirian pemerintahan desa berbasis teknologi.
c. Peningkatan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Karanganyar adalah:

Tujuan: Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar.

Sementara itu, untuk mengukur pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Terdapat 2 sasaran pembangunan Kecamatan Karanganyar, yaitu :

Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanganyar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran dan Program
(Target Tahun 2026)

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun		Program	Indikator Program	Target
						2024	2025	2026			2026
1	Misi 4: Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik Tj 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Sasaran 1: Meningkatnya Transparansi akuntabilisasi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	71,42	80,3	85,71	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%
			Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	83,2	85	85,75	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	96%
									Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100%
									Program Penyekenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	96%
									Progran Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	70,95

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

3.3.1 Tantangan Perangkat Daerah

Kecamatan Karanganyar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pada urusan Pelayanan Kepada Masyarakat seringkali dihadapkan pada beberapa tantangan. Beberapa tantangan akan dihadapi yaitu :

a. Dibidang pelayanan publik: Kualitas layanan belum merata dikarenakan Masih ada proses layanan yang belum sepenuhnya berbasis digital, ketergantungan pada prosedur manual, serta variasi kompetensi SDM.
b. Adaptasi teknologi oleh aparatur dan masyarakat Tidak semua pegawai dan warga terbiasa menggunakan layanan online, sehingga butuh pelatihan berkelanjutan
c. Partisipasi masyarakat masih rendah Program desa/kelurahan terkadang kurang diikuti masyarakat karena minim informasi atau kesadaran.
d. Ketergantungan pada sektor tertentu dikarenakan UMKM dan sektor pertanian/kerajinan perlu penguatan daya saing dan akses pasar.

3.3.2 Peluang Perangkat Daerah

Peluang yang kemungkinan akan diraih ditahun tahun kedepan Kecamatan

Karanganyar antara lain:

a. Program digitalisasi layanan publik (Sistem Informasi Desa, layanan online kecamatan, SIAK terintegrasi)yang bisa Mempercepat layanan, mengurangi antrian, meningkatkan transparansi.
b. Bantuan anggaran untuk infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pertanian yang bisa mempercepat pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan.
c. Pelatihan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat dapat untuk meningkatkan kompetensi SDM dan efektivitas pelayanan.
d. Penguatan promosi produk lokal melalui pameran, marketplace, dan media sosial sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Pengukuran kinerja pelayanan pada Kecamatan Karanganyar dilakukan untuk melihat sejauh mana pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi standar kualitas, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Pengukuran ini dilaksanakan secara berkala melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan kecamatan, target ≥ 85 (Kategori Baik) yan diambil dari survey kepuasan masyarakat di skesi pelayanan umum

3.4.1 Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan/Sasaran OPD

Cascading kinerja merupakan proses penurunan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target dari Pemerintah Daerah ke tingkat Perangkat Daerah, sehingga terdapat kesinambungan dan keterkaitan antar level kinerja. OPD Kecamatan Karanganyar berperan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator PD

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator
Sasaran.1 Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Presentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya
			Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repulik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkam Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
			Fasilitasi , Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Inrea Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KARANGANYAR

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   b) Administrai Keuangan
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Kepegawaian
      1).Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
      2).Pendataan dan pengolahan admionistrasi pegawai
   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      5). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      8). 8). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Pengadaan Mebel
      2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
      4). Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
      5). Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
   d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      5). Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak

dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan

1). Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

1). Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a) Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa

1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawar

Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b). Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4) Evaluasi Kelurahan

c). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkam Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional

3). Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

4). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2026
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Karanganyar						19.692.461.922,00							33.506.778.789,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						19.692.461.922,00							33.506.778.789,00	
	7	01				KECAMATAN						19.692.461.922,00							33.506.778.789,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP	-			70,95 Nilai	10.692.203.122,00						-	15.637.100.964,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-			100 %	15.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kec. Kra	-	27.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kec. Kra		15.000.000,00	KEC
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kec. Kra		12.000.000,00	KEC
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-			89 orang	10.099.638.992,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kec. Kra	-	11.071.500.964,00	
	7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	10.099.638.992,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kec. Kra		11.056.500.964,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.02	00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelasanaan Administrasi Kepegawaian sesuai ketentuan	-			100 %	10.547.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	108.000.000,00	
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	4.100.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		80.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR

	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	6.447.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		13.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	-			100 %	54.333.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	465.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.059.900,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		100.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10.000.050,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		40.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		50.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.217.450,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		100.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.304.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		30.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		20.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		100.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	2.552.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		10.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesrentaase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	464.400.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistifr	Kecamatan Karanganyar	-	1.630.600.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	123.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		190.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	85.200.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		170.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		25.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	255.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistifr	Kecamatan Karanganyar		1.245.600.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	48.282.730,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	205.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	37.602.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		80.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	6.688.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		50.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		30.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.992.230,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		20.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		25.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan Indeks Kepuasan Masyarakat	-			100 % 100 nilai	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	8.283.125,00	KECAMATAN KARANGANYAR

	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	-			13 Kegiatan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	2.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.01	00 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		2.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	-			12 Kegiatan	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	6.283.125,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		2.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	02	2.02	00 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		4.283.125,00	KECAMATAN KARANGANYAR
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	-			95 %	8.818.288.800,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif		-	15.238.273.600,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	-			13 Lembaga	6.015.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	12.532.000.000,00	ECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	13.180.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		20.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.02	00 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	6.000.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		12.500.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.02	00 04	Evaluasi Kelurahan													

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				13 Laporan	1.920.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		7.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	-			7 Lembaga Kemasyarakat	2.803.188.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	2.356.273.600,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga Kemasyarakatan	2.803.188.800,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		2.325.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		31.273.600,00	KECAMATAN KARANGANYAR
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	109.300.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	3.530.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	-			13 Kecamatan/Kelurahan	109.300.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, .	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	3.530.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	109.300.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		3.530.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	-			96 %	66.670.000,00						-	2.619.591.100,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	-			4 Kegiatan	66.670.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar	-	2.619.591.100,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,				250 Orang	12.960.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Karanganyar		52.991.100,00	KECAMATAN KARANGANYAR

	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		250.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				60 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Karangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		200.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	32.110.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Karanganyar		95.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal													
							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		2.000.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR

	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Kecamatan Karanganyar		21.600.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
						Kelurahan Karanganyar						224.150.000,00							237.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						224.150.000,00							237.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN						224.150.000,00							237.500.000,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sakip	-			72.95 Nilai	173.120.000,00						-	182.500.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Paket	4.550.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				13 Paket	4.550.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		6.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	18.393.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	20.500.000,00	

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.610.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		2.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.783.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		8.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.640.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		6.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	3.360.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		4.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	-			12 Bulan	5.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	125.958.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	138.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	39.900.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		43.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	73.458.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		80.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	19.218.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	18.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	6.748.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		6.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.840.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		3.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.730.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		8.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1.900.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3.	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN KARANGANYAR
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	45.440.000,00						-	48.000.000,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	45.440.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	48.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	12.810.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		13.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	32.630.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		35.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	5.590.000,00						-	7.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	5.590.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar	-	7.000.000,00	

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	5.590.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Karanganyar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, d	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar		7.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
						Kelurahan Jungke						218.390.000,00							234.300.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						218.390.000,00							234.300.000,00	
	7	01				KECAMATAN						218.390.000,00							234.300.000,00	
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip	-			100 % 72.75 Nilai	111.467.000,00						-	119.300.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Paket	1.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar	-	2.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.100.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		2.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	10.012.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar	-	11.800.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.900.000,00	Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		5.500.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		3.500.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.112.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		2.800.000,00	KELURAHAN JUNGKE

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	87.619.760,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar	-	91.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	24.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		26.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	63.619.760,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		65.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	12.735.240,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar	-	14.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	7.689.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		8.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.150.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		2.500.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2.896.240,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		4.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	101.723.000,00						-	108.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	101.723.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar	-	108.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	11.790.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		13.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	89.933.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jungke	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		95.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE
11	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	-			96 %	5.200.000,00						-	7.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			12 Bulan 12 Laporan	5.200.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar	-	7.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				1 Orang	5.200.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jungke Kecamatan Karanganyar		7.000.000,00	KELURAHAN JUNGKE

													Jungke		kerja yang berkualitas,				
						Kelurahan Delingan					272.630.000,00							277.550.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					272.630.000,00							277.550.000,00	
	7	01				KECAMATAN					272.630.000,00							277.550.000,00	
12	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			100 %	160.594.800,00						-	176.150.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Paket	6.500.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				18 Paket	6.500.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		6.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	22.300.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar	-	35.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		6.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	9.931.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		11.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.009.300,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		9.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	7.360.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		9.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	-			12 Bulan	3.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kew	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN DELINGAN

													Deling an		kerja yang berkualitas,				
	7	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	118.800.000,00			Melanjutkan pengembang an infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Delingan Kecamat an Karanga nyar	-	121.800.000,00	
	7	0 1	0 1	2. 08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	91.200.000,00	Kab. Karan ganya r, Karan ganya r, Deling an	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Melanjutkan pengembang an infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Delingan Kecamat an Karanga nyar		92.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	0 1	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Karan ganya r, Karan ganya r, Deling an	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Melanjutkan pengembang an infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Delingan Kecamat an Karanga nyar		11.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	0 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Karan ganya r, Karan ganya r, Deling an	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Melanjutkan pengembang an infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Delingan Kecamat an Karanga nyar		18.800.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	9.994.000,00			Melanjutkan pengembang an infrastruktur dan meningkatka n lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Delingan Kecamat an Karanga nyar	-	13.350.000,00	
	7	0 1	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	8.199.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		11.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	1.795.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		2.350.000,00	KELURAHAN DELINGAN
13	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan Masyarakat	-			100 %	112.035.200,00						-	72.400.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	112.035.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar	-	72.400.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10.850.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		11.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	101.185.200,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		61.400.000,00	KELURAHAN DELINGAN
14	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	-			100 %	0,00						-	29.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			12 Bulan 12 Laporan	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar	-	29.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945,				40 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Delingan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan	Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar		29.000.000,00	KELURAHAN DELINGAN
						Kelurahan Cangakan						273.350.000,00							275.400.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						273.350.000,00							275.400.000,00	
	7	01				KECAMATAN						273.350.000,00							275.400.000,00	
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-			-	221.071.000,00						-	221.900.000,00	

						KABUPATEN/ KOTA													
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	28.909.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan	-	-	36.700.000,00	
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2.849.850,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.200.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10.905.300,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		12.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	4.237.450,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		5.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.316.400,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		6.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6 Laporan	5.600.000,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas	-		10.500.000,00	KELURAHAN CANGAKAN

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	10.000.000,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	162.600.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	164.200.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	23.400.000,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		25.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	139.200.000,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		139.200.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	19.562.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	21.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	14.532.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		15.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	5.030.000,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		6.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	KELURAHAN CANGAKAN
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	40.441.500,00						-	42.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	40.441.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas	-	-	42.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	16.790.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamislola pemerintahan	-		17.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	23.651.500,00	Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		25.000.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
17	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	11.837.500,00						-	11.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	11.837.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	11.500.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	11.837.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Cangakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		11.500.000,00	KELURAHAN CANGAKAN
						Kelurahan Bolong						273.350.000,00							343.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						273.350.000,00							343.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						273.350.000,00							343.000.000,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip	-			100 % 72.75 Nilai	126.014.800,00						-	203.500.000,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	17.740.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamisn	Kelurahan Bolong	-	20.500.000,00	
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	9.477.400,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		12.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2.683.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		3.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.500.000,00	Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja y	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		1.500.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	4.080.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		4.000.000,00	KELURAHAN BOLONG

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	103.231.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong	-	177.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	50.400.000,00	Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		79.200.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12.800.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		15.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	1.631.900,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		30.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	38.400.000,00	Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		52.800.000,00	KELURAHAN BOLONG

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	5.042.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong	-	6.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	5.042.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		6.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	142.855.200,00						-	136.500.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Bulan	142.855.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong	-	136.500.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	13.331.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		16.500.000,00	KELURAHAN BOLONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	129.524.200,00	Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		120.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	4.480.000,00						-	3.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	4.480.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong	-	3.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.480.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bolong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bolong		3.000.000,00	KELURAHAN BOLONG
						Kelurahan Tegalgede						318.710.000,00							15.900.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						318.710.000,00							15.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN						318.710.000,00							15.900.000,00	
21	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	-			-	193.372.000,00						-	0,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	4.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede	-	0,00	

	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	4.500.000,00	Tegalgede	(DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	28.171.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.733.800,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.100,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.117.600,00	tan, Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	12.320.000,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik	-	-			-	5.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata	Kelurahan	-	0,00	

						Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Tegalgede			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	5.000.000,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	131.280.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede	-	0,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	84.480.000,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan	13.200.000,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			2 Laporan	33.600.000,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	24.420.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede	-	0,00	

	7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor													
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5.216.000,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	4.950.000,00	Teghgalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	14.254.500,00	Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
22	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	120.298.000,00						-	15.900.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	120.298.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede	-	15.900.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga Kemasyarakatan	11.790.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		15.900.000,00	KELURAHAN TEGALGEDE

	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	108.508.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
23	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	5.040.000,00						-	0,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.040.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede	-	0,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.040.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Tegalgede	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Tegalgede		0,00	KELURAHAN TEGALGEDE
						Kelurahan Gayamdompo						315.950.000,00							298.500.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						315.950.000,00							298.500.000,00	
	7	01				KECAMATAN						315.950.000,00							298.500.000,00	
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya Nilai Sakip	-			100 % 72.75 Nilai	168.175.000,00						-	172.500.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Paket	1.500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan Gayamdompo	-	2.000.000,00	

															dengan lingkungan, alam,	Berintegritas Dan Dinamis				
	7	0 1	0 1	2. 05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.500.000,00	Gaya mdom po	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Gayamd ompo		2.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	0 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	29.575.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Gayamd ompo	-	28.500.000,00	
	7	0 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.124.000,00	Gaya mdom po	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Gayamd ompo		3.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	0 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.271.800,00	Gaya mdom po	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Gayamd ompo		9.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	0 1	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.279.000,00	Gaya mdom po	DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Keluraha n Gayamd ompo		2.500.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	0 1	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.280.400,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		2.500.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.380.000,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kelurahan Gayamdompo		1.500.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.240.000,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		10.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	2.070.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2.070.000,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		0,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	127.200.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo	-	132.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	76.800.000,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		80.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.800.000,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		17.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33.600.000,00	Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		35.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	7.829.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo	-	10.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 Unit	4.989.800,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		6.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.840.000,00	yamdompo	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		4.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
26	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	142.135.000,00						-	120.000.000,00	

						DESA DAN KELURAHAN													
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	142.135.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo	-	120.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	12.160.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		10.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	129.975.000,00	yamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		110.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
27	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	5.640.000,00						-	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	5.640.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo	-	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5.640.000,00	Kab. Gayamdompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gayamdompo		6.000.000,00	KELURAHAN GAYAMDOMPO
						Kelurahan Gedong						300.230.000,00							369.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						300.230.000,00							369.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						300.230.000,00							369.000.000,00	
28	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	235.076.400,00						-	292.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	22.976.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong	-	28.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.338.500,00	Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		2.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.498.800,00	Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		10.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.939.100,00	Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		2.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.200.000,00	Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas	Kelurahan Gedong		2.500.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3.000.000,00	Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		3.500.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		8.500.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	205.800.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong	-	218.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		40.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	21.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		23.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	148.800.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas	Kelurahan Gedong		155.000.000,00	KELURAHAN GEDONG

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Bulan	6.300.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong	-	17.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4.950.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		6.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1.350.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		1.500.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausaha	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Gedong		10.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
29	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	45.153.600,00						-	42.000.000,00	

						DESA DAN KELURAHAN													
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	45.153.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Gedong	-	42.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	12.001.200,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Gedong		12.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	33.152.400,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Gedong		30.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
30	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	-			100 %	20.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	20.000.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Warga Kelurahan Gedong	-	25.000.000,00	

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Gedong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3.	Warga Kelurahan Gedong		25.000.000,00	KELURAHAN GEDONG
						Kelurahan Lalung						290.990.000,00							291.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						290.990.000,00							291.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						290.990.000,00							291.000.000,00	
32	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	140.846.300,00						-	140.000.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	22.686.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	25.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.002.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		4.500.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.116.050,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		5.500.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.098.250,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.500.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	2.640.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		3.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		2.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	6.450.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		7.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.440.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung	-	106.500.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				48 Laporan	65.640.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		66.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	29.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		23.500.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	16.800.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		17.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	6.720.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung	-	8.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	2.560.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		3.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	4.160.000,00	Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		5.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
33	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	104.579.900,00						-	106.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	104.579.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung	-	106.000.000,00	

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	15.779.900,00	Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		16.500.000,00	KELURAHAN LALUNG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	88.800.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		89.500.000,00	KELURAHAN LALUNG
34	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	45.563.800,00						-	45.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	45.563.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung	-	45.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,				1855 Orang	45.563.800,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Lalung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kel Lalung		45.000.000,00	KELURAHAN LALUNG
						Kelurahan Bejen						288.950.000,00							20.000.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						288.950.000,00							20.000.000,00	

	7	01				KECAMATAN						288.950.000,00							20.000.000,00	
35	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	-			72.75 Nilai	168.150.000,00						-	20.000.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			2 Paket	7.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	7.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	13.603.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.541.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3.929.600,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	3.130.500,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4.001.900,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	20.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		20.000.000,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	114.840.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar	-	0,00	

	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	50.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	14.040.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	50.400.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	22.707.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	7.208.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN

	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4.990.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10.509.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
36	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			100 nilai	8.260.000,00						-	0,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	8.260.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	8.260.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
37	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	112.540.000,00						-	0,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	112.540.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	16.020.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	96.520.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Bejen	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar		0,00	KELURAHAN BEJEN
						Kelurahan Jantiharjo						267.470.000,00							358.560.300,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						267.470.000,00							358.560.300,00	
	7	01				KECAMATAN						267.470.000,00							358.560.300,00	
38	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	210.365.000,00						-	256.613.300,00	

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	18.306.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar	-	23.057.300,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.994.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3.	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		3.521.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	8.264.900,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		8.923.300,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.132.300,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		3.358.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.914.800,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		7.255.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	168.660.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar	-	199.680.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	67.920.000,00	Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		77.920.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	16.740.000,00	Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		27.760.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	84.000.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		94.000.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	23.399.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar	-	33.876.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	10.859.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		11.336.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	12.540.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		22.540.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
39	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	48.111.000,00						-	93.073.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Bulan	48.111.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar	-	93.073.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	12.563.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		23.073.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				684 Pokmas / Ormas	35.548.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		70.000.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
40	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	8.994.000,00							-	8.874.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			12 Bulan	8.994.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar	-	8.874.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.994.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Jantiharjo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar		8.874.000,00	KELURAHAN JANTIHARJO
						Kelurahan Popongan						263.750.000,00		387.000.000,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						263.750.000,00								387.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						263.750.000,00								387.000.000,00	
42	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	168.910.000,00							-	272.000.000,00	
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian	-	-			-	1.500.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola	-	-		2.000.000,00	

						Perangkat Daerah										Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis				
	7	0 1	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1.500.000,00	Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		2.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	30.464.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar	-	55.000.000,00	
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.710.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		10.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.605.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.225.400,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		10.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.043.600,00	Poponggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		10.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.880.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Poponggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		10.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-	-	20.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Poponggan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamispemerintahan	-		20.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	112.800.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamiss	-	-	180.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	57.600.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		100.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN

													Poponган						
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	21.600.000,00	Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	-		30.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	33.600.000,00	Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas	-		50.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			12 Bulan	14.146.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Poponган Kecamatan Karanganyar	-	15.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	10.496.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Poponган Kecamatan Karanganyar		10.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.650.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Poponган	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Poponган Kecamatan Karanganyar		5.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN

43	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			100 %	94.840.000,00						-	115.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			12 Laporan	94.840.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar	-	115.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	13.100.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	81.740.000,00	Kab. Karanganyar, Karanganyar, Popongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis	Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar		100.000.000,00	KELURAHAN POPONGAN
											J U M L A H	**23.000.381.922,00**							**36.614.489.089,00**	

Indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karanganyar

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2025	Target 2026
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,05	85,75

Berikut ini program prioritas dan program unggulan daerah dalam lima tahun ke depan:

Tabel 4.3
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Rp. 14.260.000**
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;.	**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** ✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Rp. 149.271.300**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Karanganyar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Karanganyar Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karanganyar secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan

teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Karanganyar Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Tasikmadu, September 2025
CAMAT TASIKMADU

JOKO SETYONO, SP
Pembina
NIP. 197009091994031004

DAFTAR ISI

			HAL
HALAMAN JUDUL			**i**
KATA PENGANTAR			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I.1**
	1.1	Latar Belakang	I.1
	1.2	Landasan Hukum	I.2
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.3
	1.4	Sistematika Penulisan	I.3
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**		**II.1**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun Lalu dan Capaian Renstra	II.1
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu	II.13
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu	II.16
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.19
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.23
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**		**III.1**
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III.1
	3.1.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	III.1
	3.1.2	Telaah terhadap Kebijakan Propinsi	III.1
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja	III.3
	3.2.1	Tujuan dan Sasaran Daerah	III.3
	3.2.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tasikmadu	III.5
	3.3.	Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	III.6
	3.3.1	Tantangan	III.6
	3.3.2	Peluang	III.6
	3.4.	Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD	III.7
	3.4.1 .	Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD	III.7
	3.4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah	III.7
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TASIKMADU**		**IV.1**
	4.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Tasikmadu	IV.1
	4.2	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu	IV.3
	4.3	Data Indidkatif Kecamatan Tasikmadu	IV.3
	4.4	Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Tasikmadu	IV.3
BAB V	**PENUTUP**		**V.1**
	5.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V.1
	5.2.	Kaidah Pelaksanaan	V.1
	5.3.	Rencana Tindak Lanjut	V.1

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025	II.2
Tabel 2.2	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (TW II)	II.4
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II.6
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tasikmadu s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar.....	II.8
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.....	II.17
Tabel 2.6	Tabel Permasalahan dan Akar Masalah Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar...	II.18
Tabel 2.7	Rumusan Isu Strategis Kecamatan Tasikmadu.....	II.20
Tabel 2.8	Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten.....	II.22
Tabel 2.9	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar.....	II.25
Tabel 3.1	Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026).....	III.6
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD.....	IV.7
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV.7
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV.4
Tabel 4.2	Target Indek Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2026.....	IV.19
Tabel 4.3	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV.19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tasikmadu untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar da berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Taikmadu Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

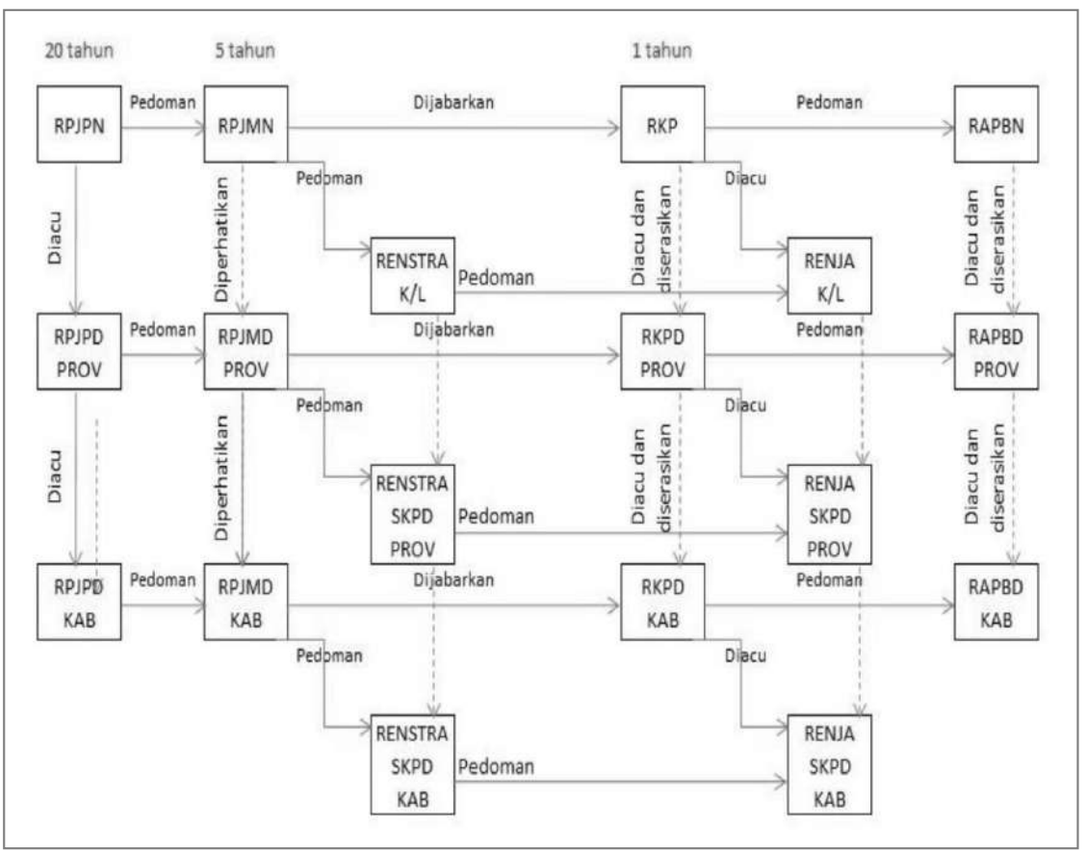

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA-OPD) Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Tasikmadu, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tasikmadu.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Tasikmadu, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Tasikmadu tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tasikmadu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TASIKMADU

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tasikmadu

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Tasikmadu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Tasikmadu.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2013-2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

A. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja

Kecamatan Tasikmadu untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.764.674.051,- *(Dua milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh satu rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.725.224.051,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu rupiah) dan belanja Modal sebesar Rp. 39.450.000,- (*Tiga puluh sembilan juta empat bratus lima puluh ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.737.898.439,- *(Dua milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)* atau sebesar 99,03 %, sisa anggaran Rp. 54.362.936,- *(Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)* atau sebesar 1,95 %.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerja 94,99% Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.234.145.070- dan terealisasi Rp. 2.348.721.602,- (94,99%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 6.851.400,- dan terealisasi Rp. 6.851.400,- (100%).
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 36.696.000,- terealisasi sebesar Rp. 36.696.000,- (100%).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99,81%. Anggaran yang tersedia Rp. 93.727.907.400,- terealisasi sebesar Rp. 93.727.400,- (99,81%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99,46 %. Anggaran yang tersedia Rp. 19.075.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.972.000,- (99,46%).

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 287.296.360,- terealisasi sebesar Rp. 36.696.000,- (100%).

2.1.1.. Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Tasikmadu telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Tasikmadu

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.664.552.251**	**2.664.552.251**	**100,00**	**2.684.346.052**	6.995.000	**100,00**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.448.609**	**5.448.609**	**100,00**	**6.915.400**	6.995.000	**100,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.455.200	3.455.200	100,00	5.093.700	6.995.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.993.400	1.993.400	100,00	1.821.700	6.995.000	100,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.884.342.709**	**1.884.342.709**	**100,00**	**2.061.154.392**	6.995.000	**100,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.884.342.709	1.884.342.709	100,00	2/061.154.392	6.995.000	100,00
3	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00**	**50.000.000**	6.995.000	**100,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	6.995.000	100,00
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**176.589.142**	**176.589.142**	**121,70**	**62.222.500**	6.995.000	**121,70**
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	18.229.000	18.229.000	100,00	6.234.000	6.995.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.437.750	30.437.750	291,40	7.006.300	6.995.000	291,40
	Penyediaan bahan logistik kantor	19.394.592	19.394.592	100,00	6.663.500	6.995.000	100,00
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	6.522.800	6.522.800	100,00	3.348.200	6.995.000	100,00
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100,00	1.380.000	6.995.000	100,00
	Fasilitasi Kunjungan tamu	44.000.000	44.000.000	100,00	3.000.000	6.995.000	100,00
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.725.000	56.725.000	100,00	34.500.000	6.995.000	100,00
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.450.000**	**39.450.000**	**78,84**	**0**	6.995.000	**78,84**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	39.450.000	39.450.000	100,00	-	6.995.000	100,00
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**441.580.000**	**441.580.000**	**100,00**	**467.880.000**	6.995.000	**100,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	36.700.000	36.700.000	100,00	46.200.000	6.995.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.880.000	404.880.000	100,00	421.680.000	6.995.000	100,00
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.441.800**	**66.441.800**	**100,00**	**36.174.300**	6.995.000	**100,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	47.337.500	47.337.500	100,00	21.430.000	6.995.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	8.500.000	8.500.000	100,00	4.140.000	6.995.000	100,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.604.300	10.604.300		10.604.300	6.995.000	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.21.800**	**4.21.800**	**100,00**	**2.980.000**	6.995.000	**100,00**
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,00**	**2.980.000**	6.995.000	**100,00**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	940.000	940.000	100,00	752.000	6.995.000	100,00
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3.331.800	3.331.800	100,00	2.228.000	6.995.000	100,00
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**17.800.000**	**17.800.000**	**100,00**	**13.800.000**	6.995.000	**100,00**
9	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**19.000.000**	**19.000.000**	**100,00**	**13.800.000**	6.995.000	**100,00**
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	6.995.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100,00	4.800.000	6.995.000	100,00
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	**100,00**	**21.600.000**	6.995.000	**100,00**
11	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**21.600.000**	**21.600.000**	**100,00**	**21.600.000**	6.995.000	**100,00**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000	21.600.000	100,00	21.600.000	6.995.000	100,00
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**48.250.000**	**48.250.000**	**100,00**	**44.20.000**	6.995.000	**100,00**
12	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**48.250.000**	**48.250.000**	**100,00**	**44.250.000**	6.995.000	**100,00**
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	44.250.000	44.250.000	100,00	44.250.000	6.995.000	100,00

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	2.000.000	2.000.000	100,00	0	6.995.000	100,00
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100,00**	**1.200.000**	6.995.000	**100,00**
13	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**7.000.000**	**7.000.000**	**100,00**	**1.200.000**	6.995.000	**100,00**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	7.000.000	100,00	1.200/000	6.995.000	100,00
	J U M L A H	**2.764.674.051**	**2.764.674.051**	**100,00**	**2.768.176.062**	6.995.000	**100,00**

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Kecamatan Tasikmadu untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 107,85%. Selama 2 tahun ini alokasi anggaran rencana kerja Kecamatan Tasikmadu terpenuhi lebih dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Kecamatan Tasikmadu kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Kecamatan Tasikmadu

b. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.664.552.251**	**2.637.781.639**	**99,00**	**2.684.346.052**	1.295.645.596	**48,27**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.448.600	5.448.600	100,00	**6.915.400**	751.750	10,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.455.200	3.455.200	100,00	5.093.700	751.750	14,76
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.993.400	1.993.400	100,00	1.821.700	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.884.542.700	1.870.287.960	99,22	**2.061.154.392**	**989.394.869**	**48,00**

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.884.542.700	1.870.287.960	99,22	2/061.154.392	989.394.869	48,00
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	**50.000.000**	**50.000.000**	**100,00**
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	50.000.0000	50.000.0000	100,00	50.000.000	50.000.000	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.689.142	170.467.350	96,48	**62.222.500**	51.098.0000	82,122
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	18.229.0000	18.157.700	100,00	6.234.000	3.709.000	59,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.437.750	27.877.650	97	7.006.300	4.814.200	68,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	19.394.592	19.392.000	99,99	6.663.500	4.116.100	61,77
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	6.522.800	5.810.000	89,07	3.348.200	1.229.200	36,71
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1.380.000	1.380.000	100,00	1.380.000	690.000	50,00
	Fasilitasi Kunjungan tamu	44.000.00000	42.200.0000	99,50	3.000.000	2.250.000	75,00
5	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	56.725.000	55.650.000	98,01	34.500.000	34.290.400	99,39
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.450.000	39.450.000	100,00	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	39.450.000	39.450.000	100,00	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**441.580.000**	**438.017.4290**	**99,20**	**467.880.000**	**192.936.077**	**41,24**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	36.700.000	33.157.429	90,35	46.200.000	17.236.077	37,31
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.880.0000	04.880.0000	100,00	421.680.000	175.700.000	41,67
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.441.800	64.095.300	96,47	**36.174.300**	11.464.000	31,60
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	47.337.500	44.991.000	95,04	21.430.000	10.064.000	46,96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	8.500.000	8.500.000	100,00	4.140.000	1.400.000	33,82
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.604.300	10.604.300	100,00	10.604.300	0	0
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**4.271.800**	**4.271.800**	**100,00**	**2.980.000**	**1.333.400**	**44,74**
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	4.271.800	4.271.800	100,00	2.980.000	1.333.400	44,74
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	940.000	940.000	100,00	752.000	0	0
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	3.331.8000	3.331.8000	100,00	2.228.000	1.333.400	44,74
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**19.000.000**	**19.000.000**	100,00	**13.800.000**	**11.000.000**	**80**
9	Koordinasi Pemberdayaan Desa	19.000.000	19.000.000	100,00	13.800.00**0**	11.000.000	80
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.000.000	9.000.000	100,00	9.000.000	9.000.000	100,00

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100,00	4.800.000	2.000.000	41,67
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**21.600.000**	**21.600.000**	**100,00**	**21.600.000**	**10.800.000**	**41,67**
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.600.000	21.600.000	100,00	21.600.000	9.000.000	41,67
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.0000	21.600.0000	100,00	**21.600.000**	9.000.000	41,67
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**48.250.000**	**48.250.000**	**100,00**	**44.250.000**	**0**	**0**
12	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.250.000	48.250.000	100,00	44.250.000	0	0
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	44.250.000	44.250.000	100,00	44.250.000	0	0
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	4.000.000	4.000.000	100,00	-	0	0
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**7.000.000**	**6.995.000**	**99,93**	**1.200.000**	**450.000**	**37,50**
13	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.000.000	6.995.000	99,93	1.200.000	450.000	37,50
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	6.995.000	99,93	1.200.000	450.000	37,50
	J U M L A H	2.764.051	2.737.898.439	99,03	2.768.176.092	1.317.478.996	47,59

Tabel 2.3.

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	Tahun 2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.234.145.070	2.348.721.602	94,99	2.664.552.251	2.637.761.639	99
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.851.400	6.851.400	100	4.271.800	4.271.800	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	287.296.360	287.296.360	100	19.000.000	19.000.000	100

NO	PROGRAM	Tahun 2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36.696.000	36.696.000	100	21.600.000	21.600.000	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	93.907.400	93.727.400	99,81	48.250.000	48.250.000	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.075.000	18.972.000	99,46	7.000.000	6.995.000	99,93

Sumber : Kecamatan Tasikmadu

Serapan anggaran selama 2 tahun belum semua program mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Tasikmadu perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Tasikmadu dan Pencapaian Renstra Kecamatan Tasikmadu s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tasikmadu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	15	9	60
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**

7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	12	12	10	10	100	13	13	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	24	24	24	100	24	12	50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0

7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2	2	2	2	100	3	0	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	48	48	100	48	24	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	50

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	5	5	100	5	4	80
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	4	4	100	6	3	50
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	1	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**74,00**	**86,58**	**84**	**86,625**	**103,125**	**84,5**	**0**	**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	2	2	2	2	100	2	1	50

		Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosetase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	7	7	100	7	7	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	**50**
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan**	**Jumlah Persentase Koordinasi Upaya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**								
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	75	75	60	60	100	60	60	100
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	60	60	60	60	100	25	0	0

		Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional								
7.01.06	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Yang Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	10	10	10	100	10	10	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Kecamatan Tasikmadu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tasikmadu dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tasikmadu meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal
   Kekuatan:
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:
   - Masih cukup banyak penduduk miskin
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat

- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tasikmadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.5

Capaian Kinerja (Tujuan, Sasaran, dan Program
(Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)
Kecamatan Tasikmadu

TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					2024	2025	2024	2025 (smt I)
1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,00	tidak dipakai	85,74	tidak dipakai
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	72,00	tidak dipakai	72,30	tidak dipakai
2 Meningkatkan Pememrataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial			Angka Kemiskinan	Nlai	8,52	tidak dipakai	9,59	tidak dipakai
	2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78	tidak dipakai	0,763	tidak dipakai
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standart Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	tidak dipakai	97,50	tidak dipakai	100,00
	3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	tidak dipakai	84,84	tidak dipakai	86,65
		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	tidak dipakai	100	tidak dipakai
			Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan yang sudah ditetapkan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,00	tidak dipakai	86,63	tidak dipakai
			Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan yang sudah ditetapkan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100
		4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	100
		5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	%	100	tidak dipakai	100	tidak dipakai
			Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

Tabel 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu
Kabupaten Karanganyar

No.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Th 2024	Th 2025	Th 2024	Th 2025 Semester I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	72,3	72,30	72,30	
2	Indek Desa Membangun	Skor	0,78	0,79	0,770	0,770	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	100	Na	100	Na	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	84,84	86,63	86,63	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	98	100	100	100	
6	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	98	100	100	100	
7	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	Na	Na	Na	Na	
8	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang Terlaksana	%	100	100	100	100	
9	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasikmadu

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan**
   belum optimalnya Pemerataan beban kerja, ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan, kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan, ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
2. **Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik**
   Kecamatan belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sesuai dengan standarnya, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.
3. **Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**
   Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah. Belum optimalnya dukungan kelembagaan pada desa dalam mendukung program prioritas daerah
4. **Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat**
   Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan.

Tabel 2.7
Tabel Permasalahan dan Akar Masalah
Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan c. Ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik e. Belum optimalnya Pemerataan beban kerja

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa	Belum optimalnya penerapan *service excellence*	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketentramanan dan ketertiban umum pada masyarakat	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, bencana dan keamanan yang masih belum diselesaikan c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata
		Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial	a. Banyaknya Sumber Data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan data berbeda b. Aduan masyarakat belum semua diselesaikan dengan baik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan	a. Pembangunan desa belum selaras dengan target pembangunan daerah b. Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan dalam mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja desa/kelurahan	a. Sistem pelaporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan b. Belum meratanya kapasitas Sumber daya administrasi perangkat desa

Sumber : Data Kecamatan Tasikmadu

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Tasikmadu dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Tasikmadu dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Tasikmadu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Tasikmadu dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Tasikmadu

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program kegitan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tasikmadu.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.7

Tabel 2.8.

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecamatan				**2.473.188.352,00**	**Kecamatan**				**2.790.486.092,00**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec.Tasikmadu**	**Nilai SAKIP**	**72,35**	**2.342.108.552,00**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec.Tasikmadu**	**Nilai SAKIP**	**72,35**	**2.615.556.292,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	5.428.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	3.455.200,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100	1.731.217.852,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100	1.955.754.392,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	47.038.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	114.732.400,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Laporan/Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusun	100	50.000.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Laporan/Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah tersusun	100	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	0	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	34.000.000	

			Daerah yang tersedia					Daerah yang tersedia			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	448.680.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	435.440.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	49.744.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Tasikmadu	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	56.174.300,00	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec.Tasikmadu**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**6.362.300,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec.Tasikmadu**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**4.271.800,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Tasikmadu	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	6.362.300,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Tasikmadu	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	4.271.800,00	
3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec.Tasikmadu**	**Prosentase lemabaga Kemamsyarakatn Aktif**	**100**	**18.846.400,00**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec.Tasikmadu**	**Prosentase lemabaga Kemamsyarakatn Aktif**	**100**	**25.000.000,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tasikmadu	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13	18.846.400,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tasikmadu	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13	25.000.000,00	
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kec.Tasikmadu**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**27.600.000,00**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kec.Tasikmadu**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**31.600.000,00**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Tasikmadu	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13	27.600.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Tasikmadu	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13	31.600.000,00	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec.Tasikmadu**	**persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**59.207.000,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec.Tasikmadu**	**persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**48.250.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tasikmadu	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	44.250.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Tasikmadu	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	48.250.000,00	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Tasikmadu	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100	**19.064.100,00**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Tasikmadu	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100	**12.000.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tasikmadu	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	19.064.100,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Tasikmadu	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	12.000.000,00	

2.4 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Tasikmadu. Namun dalam proses ini Kecamatan Tasikmadu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Tasikmadu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Tasikmadu.

Tabel 2.9.
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Tasikmadu

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;

4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan

kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tasikmadu

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Tasikmadu adalah

TABEL 3. 1
Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program
(Target Tahun 2026)

No.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	98,00
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai	85
3	Ptogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	100
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum	persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan	Persen	100
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1. Tantangan

1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2. Peluang

1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Tasikmadu untuk meningkatkan kinerja.
3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program

pembangunan. mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Tasikmadu mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Tasikmadu dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lelbih terinci dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Tasikmadu.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Tasikmadu masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TASIKMADU

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tasikmadu

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrai Keuangan
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
      1). Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Mimnimal di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
      1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
      1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
      2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      2). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasikmadu

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Tasikmadu, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tasikmadu merupakan pencapaian kinerja pelayanan Tasikmadu. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Tasikmadu

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Tasikmadu

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN TASIKMADU KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2026

						Kecamatan Tasikmadu						2.303.863.498,00							3.529.418.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.303.863.498,00							3.529.418.000,00	
	7	01				KECAMATAN						2.303.863.498,00							3.529.418.000,00	
302	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			100 %	2.248.163.498,00						-	3.252.418.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator OPD(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-			46 Unit	1.940.200,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	31.000.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	487.200,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		21.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	1.453.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU

	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.683.824.198,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	-	2.425.918.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.683.824.198,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan		2.425.918.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	50.000.000,00	
	7	01	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah													
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		50.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	30.582.800,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	96.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11.837.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.579.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		14.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.382.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		14.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	3.204.800,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.380.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		4.500.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	11.200.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		24.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		20.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	127.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		24.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		28.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		75.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	446.280.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	450.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.600.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		30.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	421.680.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	-		420.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	35.536.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	72.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	15.175.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		42.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7.300.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	13.061.300,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
303	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			86,48 nilai	400.000,00						-	64.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	50.000.000,00	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		50.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat	-			100 Persen 86,48 Persen	400.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	14.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	400.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		4.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
304	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	1.920.000,00						-	55.000.000,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1.920.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	35.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	960.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		20.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	960.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	20.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		20.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
305	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-			100 %	21.600.000,00						-	46.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan	-			12 Laporan	21.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	-	46.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 4. Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan		46.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
306	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	-			100 %	29.820.000,00						-	72.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Desa/Kelurahan tertib Perda	-			100 Persen	29.820.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	72.000.000,00	

	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				70 Orang	28.860.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		57.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				60 Orang	960.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
307	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-				1.960.000,00						-	40.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	1.960.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	40.000.000,00	

	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				60 Dokumen	1.960.000,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		20.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Tasikmadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		20.000.000,00	KECAMATAN TASIKMADU

Tabel 4.2.
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026

Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Tahun	
		2024	2025	2026
Nilai IKM	Angka	86,625	86,625	85,00

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Dukungan Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran 2026
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan • Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	400.000
2.	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	28.800.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Daerah Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tasikmadu harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Tasikmadu .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tasikmadu secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan

teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN JATEN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2026. Rencana Kerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Kecamatan Jaten selama satu tahun ke depan.

Dalam Rencana Kerja juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil atau kinerja. Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Kecamatan Jaten, maka disusunlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026 Kecamatan Jaten.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan kerja Kecamatan Jaten, maka disusunlah DokumenRencana Kerja Tahun 2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran tahun 2026 Kecamatan Jaten.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2026 ini, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Karanganyar, September 2025

CAMAT JATEN

JULI PADMI HANDAYANI, S.Sos., M.M
Pembina
NIP. 19740715 199503 2 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum` I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten dan Capaian Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah II-13
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD II-16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-19

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten III-3
3.3. Tantangan dan Peluang Kecamatan Jaten III-9
3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATEN IV-1
4.1. Program dan Kegiatan OPD IV-1
4.2. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan IV-1
4.3. Dana Indikator IV-1

BAB V P E N U T U P V-1
5.1. Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten V-1
5.2. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jaten V-1
5.3. Rencana Tindak Lanjut V-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jaten..... II-1
Tabel 2.2 Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten Tahun 2024 dan Tahun 2025 s.d Tribulan II..... II-4
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024..... II-7
Tabel 2.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar... II-9
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Indikator Tuaajuan, Sasaran dan Program Kecamatan Jaten..... II-11
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar..... II-11
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-15
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jaten..... II-17
Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar..... II-20
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jaten Tahun 2025 – 2029..... III-7
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD..... III-8
Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan..... III-8
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jaten Tahun 2026..... IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jaten Tahun 2026..... IV-22
Tabel 4.3 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026..... IV-22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jaten berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Jaten agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2026.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jaten memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Jaten Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.Dokumen Renja Kecamatan Jaten Tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten tahun 2026 dilandasi dengan landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);

15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2026 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jaten Tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Jaten pada Tahun 2026.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan Kecamatan Tahun 2026.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Jaten, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD. Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya. Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja dan sitematika.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTU

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024 – 2026. Sedangkan untuk tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Jaten tahun 2025 – 2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jaten berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Jaten serta perkiraan capaian tahun 2025.

2.1.1 Evaluasi Anggaran Perangkat Daerah

a. Perbandingan usulan Rencana Kerja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Berikut ini akan disajikan persandingan antara anggaran Kecamatan Jaten pada Rencana Kerja dan APBD Penetapan dan Perubahan untuk tahun 2024 dan 2025, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jaten

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	2024 (Perubahan)			2025 (Penetapan)		
		RENJA (Rp)	APBD (Rp)	%	RENJA (Rp)	APBD (Rp)	%
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.324.868.539**	**2.324.868.539**	**100**	**2.141.787.970**	**2.560.392.540**	**119.5**
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.105.800	59.105.800	100	75.522.900	68.977.900	91,33
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.851.100	2.851.100	100	3.668.900	2.918.900	79,56
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.254.700	56.254.700	100	71.854.000	66.059.000	91,94
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.897.273.739	1.897.273.739	100	1.799.099.320	1.963.913.890	109,2
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.897.273.739	1.897.273.739	100	1.799.099.320	1.963.913.890	109,2
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.242.000	112.242.000	100	124.892.750	187.887.750	150,4
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.017.000	8.017.000	100	3.000.000	2.860.000	95,33

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.110.000	1.110.000	100	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.790.000	5.790.000	100	6.500.000	5.430.000	83,53
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.980.000	4.980.000	100	4.980.000	4.980.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.055.000	88.055.000	100	114.525.000	169.230.000	147,8
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.290.000	1.290.000	100	2.387.750	2.387.750	100
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.648.000	50.648.000	100	0	200.000.000	0
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	200.000.000	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.648.000	50.648.000	100	0	0	0
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.550.000	93.550.000	100	86.681.000	83.371.000	96,18
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	900.000	100	900.000	900.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.400.000	54.400.000	100	49.800.0000	49.800.0000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.250.000	38.250.000	100	35.981.000	33.321.000	92,60
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	112.049.000	112.049.000	100	55.592.000	55.592.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.699.000	23.699.000	100	26.642.000	26.642.000	100
	Pemeliharaan Mebel	5.250.000	5.250.000	100	0	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.600.000	28.600.000	100	23.950.000	22.120.000	92,35
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.500.000	54.500.000	100	5.000.000	5.000.000	100
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**39.775.200**	**39.775.200**	**97,49**	**38.087.000**	**31.707.000**	**83,25**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.775.200	39.775.200	97,49	38.087.000	31.707.000	83,25
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	39.775.200	39.775.200	97,49	38.087.000	31.707.000	83,25
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**15.217.800**	**15.217.800**	**100**	**12.267.800**	11.517.800	**93,88**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.217.800	15.217.800	100	12.267.800	11.517.800	93,88
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	15.217.800	15.217.800	100	12.267.800	11.517.800	93,88
III	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**162.284.030**	**162.284.030**	**100**	**122.853.400**	**100.493.400**	**81,79**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	162.284.030	162.284.030	100	122.853.400	100.493.400	81,79

	Ketentraman dan Ketertiban						
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	162.284.030	162.284.030	100	122.853.400	100.493.400	81,79
IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**167.160.000**	**167.160.000**	**100**	**136.809.000**	**133.309.000**	**97,44**
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	167.160.000	167.160.000	100	136.809.000	133.309.000	97,44
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan&Ketahanan Nas. dlm Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Th 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan & Pemeliharaan Keutuhan NKRI	123.900.000	123.900.000	100	92.495.000	92.495.000	100
	Pemb. Kerukunan Antarsuku & Intrasuku,Umat Beragama, Ras & Gol.Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	43.260.000	43.260.000	100	44.314.000	40.814.000	92,10
V	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**139.446.600**	**139.446.600**	**100**	**165.508.950**	**152.998.950**	**92,44**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.446.600	139.446.600	100	165.508.950	152.998.950	92,44
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63.020.100	63.020.100	100	56.220.000	51.060.000	90,82
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.780.000	4.780.000	100	4.000.000	4.000.000	100
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.205.900	11.205.900	100	11.167.950	11.167.950	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60.440.600	60.440.600	100	94.121.000	86.771.000	92,19

Sumber data : Kecamatan Jaten (2025)

Pada tahun 2024, seluruh anggaran Kecamatan Jaten yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Jaten atau terpenuhi 100%, namun pada tahun 2025 tidak semua anggaran pada sub kegiatan terpenuhi sesuai dengan Renja Kecamatan Jaten 2025. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan operasional kegiatan pada tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten Tahun 2024 dan Tahun 2025 sampai dengan Tribulan II, akan disajikan dalam tabel 2.2, berikut ini.

Tabel 2.2
Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Jaten Tahun 2024 dan Tahun 2025 s.d Tribulan II.

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	2024			2025 (s.d Tribulan II)		
		APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%	APBD (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.375.516.539**	**2.198.411.805**	**84,80**	**2.511.682.890**	**1.404.181.690**	**55,90**
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.105.800	59.074.800	99,94	68.004.300	31.035.700	45.63
	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2.851.100	2.851.100	100	2.353.100	795.350	33,8
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.254.700	56.223.700	99,9	65.651.200	30.240.350	46,1
	2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.897.273.739	1.785.005.037	94,08	1.963.913.890	988.088.201	50,3
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.897.273.739	1.785.005.037	94,08	1.963.913.890	988.088.201	50,3
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.242.000	111.969.500	99,76	148.749.700	132.786.000	89,26
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.017.000	8.017.000	100	2.860.000	856.000	29,9
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.110.000	1.110.000	100	0	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.790.000	5.749.500	99,3	480.000	60.000	12,5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.980.000	4.980.000	100	3.592.600	1.155.000	32,1
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100	1.000.000	1.000.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.055.000	87.823.000	99,7	138.890.000	129.000.000	92,9
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.290.000	1.290.000	100	1.927.100	715.000	37,1
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.648.000	45.223.000	89,29	199.550.000	198.392.000	99,4
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	199.550.000	198.392.000	99,4
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.648.000	45.223.000	89,3	0	0	0
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.550.000	86.518.168	92,48	83.371.000	35.760.289	42,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000	888.000	98,7	250.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.400.000	48.561.668	89,3	49.800.0000	21.090.289	42,3
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.250.000	37.068.500	96,9	33.321.000	14.670.000	44
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	112.049.000	110.621.300	98,73	48.094.000	18.119.500	37,67

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.699.000	22.630.500	95,5	25.974.000	15.294.500	58,9
	Pemeliharaan Mebel	5.250.000	5.250.000	100	0	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.600.000	28.600.000	100	22.120.000	2.825.000	12,8
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.500.000	54.140.800	99,3	0	0	0
II	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**39.775.200**	**38.775.200**	**97,49**	**31.701.600**	**15.200.000**	**47,9**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	39.775.200	38.775.200	97,49	31.701.600	15.200.000	47,9
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan	39.775.200	38.775.200	97,49	31.701.600	15.200.000	47,9
III	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**15.217.800**	**15.137.800**	**99,47**	**6.755.600**	**4.065.000**	**60,2**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.217.800	15.137.800	99,47	6.755.600	4.065.000	60,2
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	15.217.800	15.137.800	99,47	6.755.600	4.065.000	60,2
III	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**162.284.030**	**160.324.030**	98,79	96.420.050	46.120.050	47,8
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	162.284.030	160.324.030	98,79	96.420.050	46.120.050	47,8
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	162.284.030	160.324.030	98,79	96.420.050	46.120.050	47,8
IV	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**167.160.000**	**166.665.000**	**99,70**	**104.049.800**	**17.932.000**	**17,23**
	Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	167.160.000	166.665.000	99,70	104.049.800	17.932.000	17,23
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan&Ketahanan Nas. dlm Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Th 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan & Pemeliharaan Keutuhan NKRI	123.900.000	123.410.000	99,6	70.345.000	0	0
	Pemb. Kerukunan Antarsuku & Intrasuku,Umat Beragama, Ras & Gol.Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional	43.260.000	43.255.000	99,98	33.704.800	17.932.000	53,2

V	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**139.446.600**	**137.931.600**	**98,91**	**142.434.750**	**70.602.950**	**49,56**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.446.600	137.931.600	98,91	142.434.750	70.602.950	49,56
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	63.020.100	62.765.100	99,6	45.810.000	20.660.000	45,1
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.780.000	4.780.000	100	2.250.000	2.025.000	90
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.205.900	11.205.900	100	11.167.950	11.167.950	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60.440.600	59.180.600	97,9	83.206.800	36.750.000	44,2

Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.848.752.169,- *(dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.798.104.169,- *(dua milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah),* belanja modal sebesar Rp. 50.648.000,- *(lima puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).* Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp.2.717.435.245,- *(dua milyar tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)* atau sebesar 95,38%, sisa anggaran Rp. 131.506.734,- *(seratus tiga puluh satu juta lima ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah)* atau **4,62%.**

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 yang tidak memenuhi target kinerja tidak ada, seluruh kegiatan bisa memenuhi target kinerja yang telah direncanakan baik target kinerja hasil dan keluaran, walaupun anggaran tidak terserap secara maksimal namun hal ini justru terjadi efisiensi anggaran.

a. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaranyang direncanakan

   Program dan kegiatan Kecamatan Jaten yang telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang telah direncanakan Tahun 2023adalah sebagai berikut :

   1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

      Program penunjang urusan pemerintah daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.375.516.539,- terealisasi sebesar Rp. 2.198.411.805,- (84,80%), realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

      a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 59.105.800,- terealisasi sebesar Rp. 59.074.800,- (99,94%).
      b) Administrasi Keuangan Perangkat daerah pagu anggaran sebesar Rp. 1.897.273.739,- realisasi sebesar Rp. 1.785.005.037,- (94,08%).

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 112.242.000,- realisasi sebesar Rp. 111.969.500,- (99,76%).
d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pagu anggaran Rp. 50.648.000,- realisasi sebesar Rp. 45.223.000,- (89,29%).
e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 93.550.000,- realisasi sebesar Rp. 86.518.168,- (92,48%).
f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 112.049.000,- realisasi sebesar Rp. 110.621.300,- (98,73%).

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ini sebesar Rp. 39.775.200,- realisasi sebesar Rp. 38.775.200,- (97,49%). Program ini terdiri dari satu kegiatan yaitu Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu anggaran Rp. 39.775.200,- realisasi sebesar Rp. 38.775.200,- (97,49%).

3. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu Koordinasi Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.217.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.137.800,- (99,47 %)

4. ProgramKoordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban terdiri dari satu kegiatan yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban dengan pagu anggaran sebesar Rp. 162.284.030,- realisasi sebesar Rp. 160.324.030,- (98,79%).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 167.160.000,- realisasi sebesar Rp. 166.665.000,- (99,70%).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari satu kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran Rp. 139.446.600,- realisasi sebesar Rp. 137.931.600,- (98,91%).

Tabel.2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

Program	2023			2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.592.499.700	2.083.637.017	80,37	2.274.220.539	2.198.411.805	84,80
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.520.000	32.500.000	96,96	39.775.200	38.775.200	97,49
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	334.900.000	334.760.000	99,96	162.284.030	160.324.030	98,79
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	180.240.000	180.065.000	99,90	167.160.000	166.665.000	99,70

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	147.186.000	145.576.000	98,91	15.217.800	15.137.800	99,47
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	124.754.600	122.912.600	98,52	139.446.600	137.931.600	98,91
Total	**3.413.100.300**	**2.717.245.435**	**91,68**	**2.848.752,169**	**2.717.245.435**	**95,38**

Sumber data : Kecamatan Jaten (2025)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jaten menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik. Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayananpublik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Jaten dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Jaten dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Jaten lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	01	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**SAKIP**	0	70,30	0	0	0	0	0	0
					Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	0	100%	100%	100%	100%	0%	0%
			2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 dok	25 dok	14 dok	14 dok	100%	14 dok	7 dok	50%
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 orang/bln	14 orang/ bln	14 orang/ bln	14 orang/ bln	100%	14 orang/bln	14 orang/ bln	100%
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	24 unit	3 jenis	2 unit	6 unit	300%	0 unit	0 unit	0
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%

7	01	02		Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Umum	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	75	83,20	81	84,15	103,89%	81	0	0
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%
7	01	03		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Persentase lembaga kemasyarakatan aktif**	90%	100%	90%	100%	111,11%	92%	100%	108,69%
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	2 lembaga	0	0	0	0	0	0
7	01	04		**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	90%	100%	90%	100%	111,11%	92%	100%	108,69%
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%
7	01	05		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	100%	0	100%	0	0	100%	50%	50%
					Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	0	100%	0	0	0	0	0	0
			2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%
7	01	06		**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan**	90%	0	90%	100%	111,11%	100%	100%	100%
					Persentase Desa/Kelurahan tertib Perda	0	100%	0	0	0	0	0	0
			2.01	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	12bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	6 bln	50%

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Jaten

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Tahun	
						2024	2025 Semester 1
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	NA	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	84,15	Na
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,4	Na
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	100	100

			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Jaten 2025-2029

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jaten
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 Trib II	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	73	85,74	Na	Indikator Tujuan 2024
2.	Angka Kemiskinan	%	8,52	8,45	9,59	Na	Indikator Tujuan 2024
3.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7933	0.7935	0,8322	Na	Indikator Sasaran 2024
4.	SAKIP	Nilai	75,33	75,35	71,40	Na	Indikator Sasaran 2024 dan Program 2025
5.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	100	100	100	50	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81,05	84,40	Na	
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	90	92	100	100	
8.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	90	92	100	100	
9.	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	%	100	100	100	50	
10.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	%	91	100	100	100	

Sumber data : Kecamatan Jaten Tahun 2025

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar tahun 2026 antara lain :

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa.

Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara aparat kecamatan dan perangkat desa. Banyak desa merasa belum mendapatkan pendampingan yang memadai dari kecamatan, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan desa harus menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri, yang sering kali di

luar kapasitas mereka, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik di tingkat desa yang belum merata dan maksimal.

Kondisi keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi rendahnya kualitas layanan. Masih diperlukan penguatan dan pengembangan fasilitas kecamatan dan desa, mulai dari kantor kecamatan dan desa termasuk di dalamnya ruang pelayanan yang layak dan nyaman, peralatan teknologi informasi, maupun jaringan komunikasi. Hal ini akan berdampak langsung pada kecepatan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya inovasi pelayanan, seperti layanan berbasis digital atau sistem satu pintu, juga memperlambat proses birokrasi yang pada akhirnya menurunkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tidak kalah penting, aspek kompetensi dan etika pelayanan aparatur juga masih menjadi kendala. Sebagian pegawai belum memiliki kemampuan komunikasi dan pemahaman yang baik terhadap standar pelayanan publik. Sikap kurang responsif, kurang ramah, serta rendahnya kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dan desa menunjukkan perlunya pembinaan dan pelatihan berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dibutuhkan komitmen bersama dalam reformasi pelayanan publik di tingkat kecamatan dan desa, melalui peningkatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b. Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**.**

Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jaten disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan fungsional. Salah satu penyebab utama adalah masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kompetensi teknis maupun manajerial. Banyak aparatur kecamatan belum memiliki pelatihan yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang kompleks dan dinamis. Selain itu, beban kerja yang tidak seimbang dan sistem pembagian tugas yang belum jelas juga turut menghambat efektivitas pelaksanaan tugas.

Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja turut mempengaruhi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi terhadap publik juga masih perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat memiliki akses yang cukup untuk mengetahui, menilai, atau memberikan masukan terhadap kinerja kecamatan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan.

Terdapat persoalan yang terkait keterbatasan anggaran dan dukungan infrastruktur menjadi tantangan besar dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas. Kecamatan sering kali hanya menerima alokasi dana yang terbatas dan tidak proporsional dengan beban tugas yang diemban. Fasilitas kerja yang tidak memadai dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi juga membuat pelayanan publik menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penguatan reformasi birokrasi di tingkat kecamatan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel masih menjadi permasalahan utama untuk diselesaikan.

c. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

Masih rendahnya kesadaran serta kepedulian terhadap manfaat program, diikuti dengan sosialisasi dan komunikasi yang belum efektif sehingga informasi tidak merata. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan juga masih minim sehingga menurunkan rasa memiliki, sementara sebagian program belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan lokal dan cenderung bersifat top–down. Selain itu, kapasitas kelembagaan masyarakat yang lemah membuat peran kelompok lokal belum optimal dalam menggerakkan partisipasi. Faktor sosial ekonomi turut memengaruhi, karena banyak warga lebih fokus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Partisipasi masyarakat juga kurang terdorong akibat belum adanya insentif maupun penghargaan yang jelas bagi warga yang aktif mendukung program.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum optimalnya kinerja penunjang pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada masing-masing unit kerja di kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan c. Ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik e. Belum optimalnya Pemerataan beban kerja
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa	Belum optimalnya penerapan *service excellence*	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada masyarakat	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, bencana dan keamanan yang masih belum diselesaikan c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		Belum optimalnya ketersediaan dukungan data penerima pelayanan kesejahteraan sosial	a. Banyaknya Sumber Data pelayanan kesejahteraan sosial yang menyebabkan data berbeda b. Aduan masyarakat belum semua diselesaikan dengan baik
		Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan	a. Pembangunan desa belum selaras dengan target pembangunan daerah b. Belum optimalnya dukungan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan dalam mendukung pemberdayaan dan pembangunan desa
		Belum optimalnya fasilitasi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja desa/kelurahan	a. Sistem pelaporan keuangan dan kinerja desa belum sesuai waktu yang ditentukan b. Belum meratanya kapasitas Sumber daya administrasi perangkat desa

Sumber : Kecamatan Jaten (2025)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, maka Kecamatan Jaten mempunyai kewajiban untuk membuat perencanaan anggaran setiap tahunnya. Salah satunya adalah membuat Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan komponen dalam penyusunan RKPD Kabupaten Karanganyar. Pada awal penyusunan Renja, perangkat daerah menggunakan dasar penyusunan anggaran yang di tetapkan pada awal tahun. Namun ternyata pada proses penghitungan kebutuhan anggaran seringkali terjadi ketidak sesuaian antara rencana awal dengan kebutuhan riil operasional perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat diprediksikan serta mempertimbangkan tersedianya anggaran di Kabupaten. Berikut ini disajikan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jaten. (tabel 2.9)

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jaten

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8
	Kecamatan Jaten				2.404.378.087		2.337.798.547	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Jaten	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.273.398.287	100%	1.951.049.947	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	4.500.000	100%	40.192.450	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	100%	1.889.398.287	100%	1.698.260.252	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Jaten	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80.900.000	100%	114.469.720	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Jaten	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	111.500.000	100%	22.292.025	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	140.000.000	100%	23.000.000	

			Daerah yang tersedia					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Jaten	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	67.000.000	100%	52,835.500	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Jaten	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	6.362.300	100%	40.956.100	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jaten	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	6.362.300	12 Kegiatan	40.956.100	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Jaten	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	18.846.400	100%	68.994.200	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Jaten	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	8 lembaga	13.846.400	8 lembaga	68.994.200	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Jaten	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 bulan	5.000.000	-	-	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jaten	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	27.600.000	100 %	89.600.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Jaten	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	8 wilayah	27.600.000	8 wilayah	89.600.000	
6	Program Penyelenggaraan Urusan	Kecamatan Jaten	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	59.207.000	100%	118.700.000	

	Pemerintahan Umum							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Jaten	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 Kegiatan	59.207.000	4 Kegiatan	118.700.000	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jaten	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100 %	19.064.100	100%	68.498.300	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Jaten	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100 %	19.064.100	100%	68.498.300	

Sumber : Kecamatan Jaten Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di Kecamatan Jaten usulan program atau kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan dan masyarakat terangkum dalam usulan hasil musrenbangcam tahun 2026.

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Karanganyar

KECAMATAN **: JATEN**

TAHUN **: 2026**

BIDANG FISIK PRASARANA

NO	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Utara Dsn. Sanggrahan, Suruhkalang	Pelebaran jembatan	Kegiatan pembangunan jalan kabupaten	Kelancaran arus lalu lintas	Suruhkalang	1 paket	300.000.000	DPU Kab.
2	Desa Jati	Peningkatan Jalan Usaha Tani timur dukuh Pundak Rt05 RW07 Desa Jati	Mobilitas masyarakt Lancar	memperlancar tranportasi	Jati		200.000.000	DPU Kab.
3	Dusun Songgorunggi	Rehabilitasi Jalan DPU Dusun Songgorunggi	Mengurangi banjir	Warga Masyarakat Sekitar	Dagen		500.000.000	APBD Kab DPU Kab.
4	Dalon sampai INDO ACIDATAMA	Pembangunan Jalan DPU dari Dalon sampai Acidatama	Memperlancar transportasi masyarakat	Masyarakat	Sroyo	3000	5.050.000.000	APBD KAB
5	Desa Brujul	Gorong -Gorong Jalan Kabupaten Duwet-Brujul	Mencegah Genangan Air	Tidak Adanya air yang Menngenang	Brujul	Bebas Banjir	40.000.000	APBD Kab DPU
6	Dusun Gempolrejo	Talud Jalan kabupaten yang berlokasi di dusun Gempolrejo-Sambirejo penghubung jalan antar dusun.	Memperlancar kegiatan ekonomi	Peningkatan ekonomi	Jetis		400.000.000	APBD Kab DPU

7	Desa Jaten	Pelebaran jembatan Dusun Bulu	Memperlancar transportasi	Masyarakat	Jaten		1.000.000.000	
8	Jalan Ngringo Indah dan Cempaka	Pembangunan Saluran Air	Pengendalian banjir	Sanitasi Lingkungan	Ngringo	-2000 m	2.000.000.000	APBD Kab Dinas PU
9	Tuwuhan RT 03/05	Pembangunan Gedung Olahraga (Lanjutan) Desa Suruhkalang	Kegiatan pembangunan Lanjutan Gedung Olahraga	Kelancaran arus lalu lintas	Suruhkalang	1 paket	500.000.000	DPU Kab.
10	Desa Dagen	Pelebaran Jalan di Palang Rel Kereta Api Desa Dagen	Mengurangi Kemacetan	Warga Masyarakat Sekitar	Dagen		500.000.000	APBD Kab DPU Kab.
11	Sepreh Rt.03/06	Perbaikan Jembatan Penghubung	Memperlancar aliran air	Masyarakat	Sroyo	1	200.000.000	APBD KAB
12	Desa Brujul	Gorong-Gorong Jalan Kabupaten Bonosari	Mencegah Genangan Air	Tidak Adanya air yang Menngenang	Brujul	Bebas Banjir	70.000.000	APBD Kab DPU
13	Dusun Jetis wetan	Pembangunan Gedung Pertemuan	Sebagai wadah pemersatu masyarakat	Meningkatkan kegiatan warga	Jetis		500.000.000	APBD Kab DPU
14	Desa Jaten	Pembangunan saluran drainase jalan Dusun Bulu Desa Jaten- Desa Jetis Kec. Jaten	Memperlancar arus air saat musim penghujan	Masyarakat	Jaten		500.000.000	
15	Dusun Gunung Wijil	Pembangunan Pintu Air	Pengendalian banjir	Sanitasi Lingkungan	Ngringo	4 pintu air	500.000.000	APBD Kab Dinas PU
16	Dari Ocak Acik – Jetak	Penerangan Jalan	Kegiatan pembangunan jalan kabupaten	Kelancaran arus lalu lintas	Suruhkalang	1 paket	200.000.000	DPU Kab.

17	Dusun Songgorunggi	Jembatan Jalan DPU Dusun Songgorunggi	Mengurangi banjir	Sanitasi Lingkungan	Dagen		500.000.000	APBD Kab DPU Kab.
18	Tor 17 & 18	Perbaikan Saluran Tor 17 & 18	Mencukupi kebutuhan air pertanian	Masyarakat	Sroyo	400	300.000.000	APBD KAB
19	Desa Brujul	Talud Jalan Kabupaten Dusun Duwet - Sobayan	Memperluas bahu Jalan	Kelancaran Jalan Penghubug Antar Desa	Brujul	Trasportasi Lancar	700.000.000	APBD Kab DPU
20	Dusun Grumbulsawit-Gerdu	Saluran air Dusun Grumbulsawit-Dusun Gerdu	Mengurangi kebanjiran	Sanitasi Lingkungan	Jetis		600.000.000	APBD Prov DPU

KECAMATAN : JATEN

TAHUN : 2026

BIDANG EKONOMI

	Sasaran Daerah	**Program**	**Kegiatan Prioritas**	**Sasaran Kegiatan**	**Lokasi (Desa/ Kel)**	**Volume**	**Pagu**	**Perangkat Daerah Penanggungjawab**
1	Desa Brujul	Kios Desa	Meningkatkan pendapatan asli Desa	Pengusaha Kecil	Brujul		200.000.000	APBD Kab Disperindag
2	Desa Dagen	Kios Desa	Menciptakan lapangan pekerjaan	Pengusaha Kecil	Dagen		200.000.000	APBD KAB Disperindag
3	Ngringo 29 RW	Permodalan BUMDesa	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Ngringo		100.000.000	APBD KAB Disperindag
4	Semua wilayah desa Jetis	Pelatihan ketrampilan usaha produktif	Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Ibu-ibu PKK dan Karang taruna	Jetis		200.000.000	APBD Kab Disperindag dan UKM

5	Desa Jati	Kios Desa	Meningkatkan pendapatan asli Desa	Pengusaha Kecil	Jati		200.000.000	Disperindag
6	Desa Jaten	Budidaya Perikanan dan ternak	Ternak	Warga	Jaten		200.000.000	
7	Tepi lap Sroyo	Pembuatan lapak kaki 5	Peningkatan Ekonomi	Pedagang	Sroyo	70 buah	148.000.000	APBD II Disperindag
8	Desa Suruhkalang	Pembangunan Selter Desa Lanjutan		Desa Suruhkalang	Suruhkalang	1 paket	100.000.000	Disdagnakerkop UKM
9	Desa Dagen	Pelatihan keterampilan usaha produkif	Pemberdayaan dan Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Ibu-ibu PKK dan Karangtaruna	Dagen		200.000.000	APBD Kab Disperindagkop dan UKM
10	Pelaku Usaha Kecil Menegah	Pelatihan keterampilan usaha UMKM	Menciptakan lapangan pekerjaan	Meningkatkan Penghasilan dan mengurangi jumlah pengangguran	Brujul		200.000.000	APBD Kab Disperindagkop dan UKM
11	Dusun Suruhtani RT. 02/01 (Barat Patung Semar)	Pembangunan Selter		Desa Suruhkalang	Suruhkalang	1 paket	500.000.000	Disdagnakerkop UKM
12	Selatan lap	Kios Desa	Peningkatan Ekonomi	Pedagang	Sroyo	49 buah	320.000.000	APBD II Disperindag
13	Desa Jaten	Apotik hidup PKK	Kebutuhan obat	Warga	Jaten		100.000.000	

14	Ibu-ibu PKK dan Karangtaruna	Pelatihan keterampilan usaha produkif	Menciptakan lapangan pekerjaan	Pemberdayaan dan Meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga	Jati		200.000.000	Disperindagkop dan UKM
15	Semua wilayah desa Jetis	Bantuan Usaha Kecil	Meningkatkan pendapatan usaha kecil	Sarana dan prasarana pendukung legiatan usaha Bantuan permodalan	Jetis		150.000.000	APBD Kab Disperindag dan UKM
16	Ngringo 29 RW	Pembangunan Pasar Desa	Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Ngringo		Ngringo		350.000.000	APBD KAB Disperindag

KECAMATAN : JATEN

TAHUN : 2026

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

NO	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Desa Suruhkalang	Pembangunan Aula Kantor Desa Suruhkalang	Kegiatan Pembangunan Aula Kantor Desa Suruhkalang	Memperlancar pelayanan pada masyarakat	Suruhkalang	1 paket	500.000.000	DPU Kab.
2	Kantor Desa Ngringo	Pemb/Rehab Kantor Desa	Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan	Memperlancar pelayanan pada masyarakat	Ngringo	1 Gedung	2.000.000.000	APBD Kab Dinas PU

3	Desa Jaten	Pembangunan gedung serba guna	Kelancaran kegiatan Masyarakat	Masyarakat	Jaten		400.000.000	
4	Lapangan Desa Jati	Pembangunan MCK Lingkungan Lapangan Olah Raga Desa Jati	Lingkungan Bersih	Masyarakat Sehat	Jati		150.000.000	DPU Kab.
5	Kantor Desa Sroyo	Pembangunan Kantor Desa Sroyo (Lanjutan)	Memperlancar Pelayanan Pada Masyarakat	Memperlancar Pelayanan Pada Masyarakat	Sroyo		1.500.000.000	APBD Kab DPU
6	Dukuh Gempolrejo Dusun Sambirejo	Pemb. Gedung Kantor Desa Jetis	Pembaharuan tata Ruang Kerja	Menambah Kenyamanan dalam Pelayanan	Jetis		900.000.000	APBD Prov DPU
7	Kantor Desa Dagen	Rehab Kantor Desa Dagen	Memperlancar Pelayanan Pada Masyarakat	Masyarakat	Dagen		500.000.000	DPU APBD Kab
8	Kantor Desa Ngringo	Pemb/Rehab Gedung Aula Balai Desa	Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan	Memperlancar pelayanan pada masyarakat	Ngringo	1 Gedung	2.000.000.000	APBD Kab Dinas PU
9	Dusun Sambirejo Dukuh Gempolrejo	Pemb. Gedung Serba Guna Desa Jetis	Peningkatan Kegiatan Warga Desa Jetis	Memperlancar kegiatan Masyarakat	Jetis		800.000.000	APBD Kab DPU
10	Balai Desa Jati	Pembangunan Plafon Gedung Olah Raga dan Penerangan Desa Jati	Sarana Oalahraga Masyarakat	Masyarakat Sehat	Jati		500.000.000	DPU Kab.

11	Se Desa Jetis	Perbaikan Jalan	Memperlancar arus transportasi	Memperlancar kegiatan Masyarakat	Jetis		500.000.000	APBD Kab DPU
12	Desa Suruhkalang	Pembangunan Gedung Pertemuan Kampung KB dan Rumah data	Kegiatan Pembangunan Gedung Pertemuan Kampung KB dan Rumah data	Memperlancar pelayanan pada masyarakat	Suruhkalang	1 paket	150.000.000	DPU Kab.
13	Desa Jaten	Rehab kantor Desa Jaten	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Masyarakat	Jaten		200.000.000	
14	Wilayah Desa Sroyo	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Memperlancar Pelayanan Pada Masyarakat	Memperlancar Pelayanan Pada Masyarakat	Sroyo		200.000.000	APDES

KECAMATAN **: JATEN**

TAHUN **: 2026**

BIDANG SOSIAL BUDAYA

NO	sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioroitas	Sasaran Kegiatan	lokasi(Desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	Desa Suruhkalang	Pengadaan Ambulance Desa	Kelancaran angkutan orang sakit	Desa Suruhkalang	Suruhkalang	1 Unit	300.000.000	Dinkes
2	Desa Jati	Peningkatan Fasilitas TK dan PAUD	Meningkatkan Kualitas anak didik	Anak-anak	Jati		200.000.000	Disdikbud

3	Desa Jaten	Pengadaan gamelan	Kesenian	Paguyupan Karawitan	Jaten		200.000.000	Disdikbud
4	Desa Dagen	Peningkatan Fasilitas TK dan PAUD	Meningkatkan Kualitas anak didik	Anak-anak	Dagen		200.000.000	Disdikbud
5	Desa Ngringo	Seni Budaya di Serut	Seni budaya	Seniman	Ngringo		100.000.000	Disparpora
6	Desa Jetis	Pengadaan Gamelan	Melestarikan seni karawitan	Pemuda	Jetis	1 paket	300.000.000	Disdikbud
7	Dalon	Alat Kesenian Rebana	Penyaluran bakat	Jamaah	Sroyo	1 set	200.000.000	Disdikbud
8	Desa Brujul	Pengadaan Alat Pertunjukan Wayang	Melestarikan Kebudayaan	Kelompok Kesenian	Brujul		250.000.000	Disdikbud
9	Desa Suruhkalang	Pengadaan Seperangkat Gamelan	Kegiatan karawitan	Desa Suruhkalang	Suruhkalang	1 paket	150.000.000	Disdikbud
10	Desa Jaten	Pengadaan alat rebana	Seni budaya	Masyarakat	Jaten		100.000.000	Bagian Kesra Sekda
11	Desa Dagen	Pengadaan Alat Rebana	Meningkatkan Keimanan	Jamaah Masjid	Dagen		250.000.000	APBD Kab. Bag. Sosbud Sekda
12	Desa Jetis TK PERTIWI 02	Peningkatan Fasilitas TK dan PAUD (Pembangunan Ruang Kelas)	Meningkatkan kwalitas pendidikan anak	Anak -Anak	Jetis	1 Paket	100.000.000	Disdikbud
13	Pulosari	Penanganan Limbah ternak	Pembuatan pupuk Organik Padat	Peternak	Sroyo	100 org	100.000.000	Dispertan
14	Desa Brujul	Peningkatan Fasilitas TK dan PAUD	Meningkatkan Kualitas anak didik	Anak-anak	Brujul		200.000.000	Disdikbud

Sumber Data : Kecamatan Jaten 2025

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;

13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jaten

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Jaten untuk periode 2025–2029, diperlukan perumusan tujuan yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Tujuan strategis ini disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta tantangan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Adapun dalam proses penyusunannya, perumusan tujuan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan. Berdasarkan gambaran tersebut, tujuan yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Jaten dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk pencapaian tujuan strategis Kecamatan Jaten Tahun 2025–2029, perlu disusun sasaran yang lebih spesifik, terukur, dan operasional. Sasaran ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui perumusan sasaran ini Kecamatan Jaten berupaya memastikan bahwa setiap program dan

kegiatan yang dilaksanakan memiliki fokus yang jelas, berorientasi pada hasil, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Sasaran yang dirumuskan juga menjadi pedoman dalam menetapkan indikator kinerja, target capaian, serta prioritas pembangunan lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Jaten yaitu : **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik,** dengan Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan Kecamatan Jaten sesuai dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2025 – 2029 adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**. Adapun indikator dari tujuan ini adalah Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran Kecamatan Jaten dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah**. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ini adalah nilai IKM.

Tabel 3.1
Tujuan – Sasaran – Program (Target Tahun 2026)

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal	Tahun	
						2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	NA	100	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	84,15	84,40	84,60
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,4	71,4	71,45
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	100	100	100

			Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	100	100
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100

Sumber : Renstra Kecamatan Jaten tahun 2025-2029 (2025)

3.3 Tantangan dan Peluang Kecamatan Jaten

3.3.1 Tantangan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada Goal 16, mengharuskan Kecamatan Jaten untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas pemerintahan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, kemajuan teknologi informasi mendorong digitalisasi layanan publik, yang membuka peluang bagi Kecamatan Jaten untuk mengembangkan pelayanan berbasis elektronik (*e-government*), mempercepat proses administrasi, dan meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat dan pemerintahan desa. Di sisi lain, tuntutan masyarakat global terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintahan menuntut adanya sistem pengawasan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang lebih terukur dan responsif.

Kecamatan Jaten perlu mampu mengadopsi nilai-nilai tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan programnya, sehingga mampu meningkatkan daya saing wilayah, membangun kepercayaan publik, dan berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Tantangan nasional dalam membangun budaya pemerintahan yang bersih dan melayani menuntut Kecamatan Jaten untuk memperbaiki sistem pengelolaan pelayanan, mempercepat digitalisasi layanan, memperkuat koordinasi dengan desa-desa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Di sisi lain, ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan akses publik. Hal ini menjadi tekanan sekaligus peluang bagi Kecamatan Jaten untuk memperkuat inovasi pelayanan, meningkatkan akuntabilitas pelaporan kinerja, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi layanan. Dengan demikian, respons terhadap isu nasional ini menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan di Kecamatan Jaten secara berkelanjutan.

Kecamatan Jaten dituntut untuk mampu mengadopsi model tata kelola pemerintahan yang lebih fleksibel, terbuka terhadap inovasi, serta responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat desa yang terus berkembang. Tata kelola yang dinamis tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga mendorong efektivitas koordinasi antar desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan budaya kerja berbasis hasil (*performance-based culture*). Seiring dengan arah pembangunan daerah yang mengutamakan kolaborasi dan pelayanan prima, Kecamatan Jaten perlu memperkuat komitmennya dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan inovatif untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3.2 Peluang

Potensi yang bisa digali pada Kecamatan Jaten sesuai kewenangannya adalah sebagai berikut :

a. Hubungan Sosial antara Kecamatan, Desa, dan Masyarakat

   Karakter sosial masyarakat Jaten yang cenderung partisipatif dan memiliki ikatan komunitas yang kuat merupakan potensi untuk memperkuat sinergi antara aparatur kecamatan dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Mulai Berkembang
Dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi di wilayah Jaten, kecamatan memiliki peluang untuk mendorong digitalisasi layanan publik melalui sistem informasi administrasi desa, aplikasi pelayanan online, atau media sosial resmi untuk mempercepat komunikasi pelayanan.
c. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Reformasi Birokrasi
Dukungan kebijakan reformasi birokrasi di tingkat Kabupaten Karanganyar menjadi potensi strategis bagi Kecamatan Jaten untuk mengakses program peningkatan kapasitas, digitalisasi pelayanan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
d. Sumber Daya Manusia yang Berpotensi untuk Dikembangkan
Dengan pelatihan dan pembinaan yang tepat, aparatur kecamatan dapat lebih berkompeten dalam menjalankan tugas pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas.
e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
Dukungan dari pemerintah kabupaten untuk reformasi birokrasi memberikan peluang untuk peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas di tingkat kecamatan.
f. Penerapan Sistem Pengelolaan Kinerja yang Lebih Efektif
Potensi untuk menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis teknologi yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang lebih transparan dan akuntabel.

3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jaten mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Jaten dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lelbih terinci dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jaten.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Jaten masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas dan Operasional atau lapangan

			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATEN

4.1. Program dan Kegiatan OPD

Pada tahun 2026, Kecamatan Jaten telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.2. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Jaten Tahun 2025–2029, telah dirumuskan sejumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang relevan dan terukur. Indikator tersebut dipilih untuk memastikan ketercapaian tujuan strategis, seperti meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan.

Melalui penguatan kinerja berbasis indikator ini, Kecamatan Jaten berkomitmen untuk mendorong pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berdaya saing dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Kabupaten Karanganyar sesuai visi dan misi Kepala Daerah.

4.3. Dana Indikatif

Program yang dilaksanakan kecamatan merupakan program yang mendukung penyelenggaraan pelayanan di tingkat kabupaten.

Rumusan program dan kegiatan dan dana indikatif tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 disajikan dalam tabel berikut ini. (tabel 4.1)

Tabel. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jaten
Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN JATEN						**2.337.798.547,00**							**4.418.300.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.337.798.547,00**							**4.418.300.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.337.798.547,00**							**4.418.300.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	100%	100%	100%	**1.951.049.947,00**						**100%**	**3.854.800.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	0%	100%	100%	40.192.450,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	100%	46.000.000,00	KECAMATAN JATEN

	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2.608.950,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	7 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	37.583.500,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	7 Laporan	42.000.000,00	KECAMATAN JATEN

	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Keuangan tersusun	100%	100%	100%	100%	1.698.260.252,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	100%	2.000.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	13 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.698.260.252,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	14 Orang/bulan	2.000.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	22.292.025,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas	Kecamatan Jaten	100%	187.800.000,00	KECAMATAN JATEN

											pembe rantasan kemiskina n.	infrastruk tur				
	7.01.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/Pe nerangan Banguna n Kantor yang Disediak an	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.251.625,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Kecamata n Jaten	12 Paket	4.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.01.2.06 .0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediak an	1 paket	1 paket			0,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Kecamata n Jaten	1 paket	8.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.650.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	12 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	4.690.400,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	12 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	24 dokumen			0,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	24 dokumen	2.800.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	12 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen	4 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	7 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	100%	100%	100%	23.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	100%	1.405.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit				0,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas	Kecamatan Jaten	2 unit	75.000.000,00	KECAMATAN JATEN

										pembe rantasan kemiskina n.	infrastruk tur				
	7.01.01.2.07 .0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediak an	5 paket	5 paket			0,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Kecamata n Jaten	5 paket	30.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediak an	5 unit	6 unit	0 unit	4 Unit	23.000.000,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Kecamata n Jaten	5 unit	50.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.01.2.07 .0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	1unit	1.000.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	1 unit	250.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	114.469.720,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas	Kecamatan Jaten	100%	91.000.000,00	KECAMATAN JATEN

											pembe rantasan kemiskina n.	infrastruk tur				
	7.01.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat		12 laporan	4 Laporan		0,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Kecamata n Jaten	12 Lapor an	1.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak an	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapora n	41.000.000,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Kecamata n Jaten	12 Lapor an	55.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Lapora n	73.469.720,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta	Kecamata n Jaten	12 Lapor an	35.000.000,00	KECAM ATAN JATEN

			n Umum Kantor yang Disediakan							untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	h an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100%	100%	100%	100%	52.835.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	100%	125.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	22.649.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	4 Unit	36.000.000,00	KECAMATAN JATEN

	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 unit	30 unit			0,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	30 unit	12.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	43 Unit	30 unit	40 Unit	20.300.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	35 unit	27.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit		1 Unit	9.886.500,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Jaten	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN JATEN
2,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	100%	100%	100%	**40.956.100,00**						100%	**40.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar*	-			12 Kegiatan	40.956.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	12 Kegiatan	40.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.02.2.01 .0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	40.956.100,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	2 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN JATEN
3,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	100%	100%	100%	**68.994.200,00**						100%	**50.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga masyarakat keluraha n yang dibina	8 wilayah	8 wilayah	8 wilayah	8 wilayah	68.994.200,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	8 wilayah	40.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.03.2.01 .0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8.194.200,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	60.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan		29.000.000,00	KECAMATAN JATEN
4,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	100%	100%	100%	**89.600.000,00**						- 100%	**208.000.000,00**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	8 wilayah	8 wilayah	8 wilayah	8 wilayah	89.600.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	-8 wilayah	208.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	89.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Kecamatan Jaten	12 Laporan	208.000.000,00	KECAMATAN JATEN
5,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100%	100%	100%	100%	**118.700.000,00**						**-** 100%	**127.500.000,00**	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan			4 keg	4 keg	118.700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	4 keg	127.500.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	75 orang	70 orang	65 orang	75 Orang	40.220.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	75 Orang	65.000.000,00	KECAMATAN JATEN

			Indonesia Tahun 1945, Pelestaria n Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertah anan dan Pemelihar aan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
	7.01.05.2.01 .0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaa n Kerukuna n Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragam a, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujud kan Stabilitas Keamana n Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	57.600.000,00	Kab. Karangan yar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membang u n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskina n.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamistif 5. Mengem bangkan kualitas infrastruk tur	Masyar akat	200 Orang	50.000.000,00	KECAM ATAN JATEN
	7.01.05.2.01 .0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	20.880.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat	8 Dokumen	12.500.000,00	KECAMATAN JATEN
6,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	**68.498.300,00**						100%	**138.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	68.498.300,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat	100%	138.000.000,00	KECAMATAN JATEN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				8 Dokumen	4.069.000,00	Kab. Karanganyar, Jaten, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Masyarakat	8 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN JATEN

Sumber Data : Kecamatan Jaten (2025)

TABEL 4.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jaten Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target	Ket
			Tahun 2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(10)*
1	Nilai IKM	Nilai	84,60	

Sumber : Renstra Kecamatan Jaten 2025-2029

TABEL 4.3
Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi • Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	40.956.100
	2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	68.998.200
	3. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	89.600.000
	4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	118.700.000

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional. c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa. c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa. e. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. f. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	68.498.300

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jaten

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jaten merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 dilingkup Kecamatan Jaten, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kecamatan JatenRenja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan yang diemban oleh Kecamatan Jaten sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

5.2 Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jaten

Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jaten agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jaten dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. Renja Kecamatan Jaten tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Jaten yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jaten.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Kecamatan Jaten, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Kecamatan Jaten sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2026, telah selesai disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jaten.
6. Kerja keras, semangat, komitmen, integritas, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Jaten sehingga masing-masing dapat mempunyai peran dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan kegiatan OPD.

2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggung-jawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jaten yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini. Semoga Renja Kecamatan Jaten Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN COLOMADU
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
KATA PENGANTAR iv
BAB I Pendahuluan ..... I - 1
1.1 Latar Belakang ..... I - 1
1.2 Landasan Hukum ..... I - 2
1.3 Maksud dan tujuan ..... I - 3
1.4 Sistemetika Penyusunan ..... I - 3
BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu..... II - 5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Colomadu ..... II - 5
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... II - 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ..... II - 18
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II - 20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... II - 24
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ..... III - 1
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ..... III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Colomadu ..... III - 5
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah ..... III - 7
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Colomadu ..... IV - 1
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Colomadu ..... IV - 1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu ..... IV - 3
4.3 Dana Indikatif Kecamatan Colomadu ..... IV - 3
4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Colomadu ..... IV - 3
BAB V Penutup ..... V - 1
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja ..... V - 1
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ..... V - 1
5.3 Rencana Tindak Lanjut ..... V - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2026 .... II - 6
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Colomadu s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar ... II - 11
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2025..... II - 17
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar..... II - 16
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Colomadu..... II - 19
Tabel 2. 6 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ..... II - 22
Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ..... II - 24

Tabel 3 1 Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran Target Tahun 2025..... III- 7
Tabel 3 2 Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah tahun 2025 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar ..... III - **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 1 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2025..... IV - 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026.

Rencana Kerja kecamatan Colomadu ini merupakan himpunan Rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Colomadu yang mempunyai fungsi untuk dapat mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan untuk satu tahun ke depan.

Kecamatan Colomadu sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaen Karanganyar mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja sebagai acuan kerja dan usaha perbaikan aparatur perangkat daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan transparasi dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun sampai selesainya Rencana kerja ini, kami menyadari adanya kekurangan yang sebesar-besarnya. Kami juga menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya

Karanganyar, September 2025
CAMAT COLOMADU,

DWI ADI SUSILO., S.E
Penata Tingkat I
NIP. 198002172010011014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Colomadu agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Colomadu untuk Tahun 2026.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja PD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tauhun yang berpedoman pada renstra PD. Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra PD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahaun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Rencana kerja (Renja) Kecamatan Colomadu memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu tahun 2026 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksnaan program dan kegiatan Tahun 2026, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Colomadu Tahun 2026.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Colomadu pada Tahun 2026.
2. Memberikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan pariwisata, pemuda dan olahraga Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Colomadu, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Colomadu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Colomadu

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

BAB V PENUTUP.

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Colomadu

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Colomadu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Colomadu.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2025 - 2029. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

   Tahun Anggaran 2024, Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 3.369.546.259,- *(tiga milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.305.477.559,- *(tiga milyar tiga ratus lima juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah)*, dan belanja modal sebesar Rp. 64.068.700,- *(enam puluh empat juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).* Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar Rp. 3.183.346.127,- *(tiga milyar enam ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah)* atau sebesar 94,47%, sisa anggaran Rp. 186.200.132,- *(seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah)* atau sebesar 5,66%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar Rp. 3.130.553.127,- *(tiga milyar seratus tiga puluh juta lima lima puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)* atau sebesar 94.47% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 186.200.132- *(seratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu seratus tiga puluh dua rupiah)* atau sebesar 5,53%., sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar Rp. 52.793.000,- *(lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)*atau sebesar 82,40 % dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 11.275.700,- *(sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* atau sebesar 17,60%.

   Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan capaian kinerja 93,56%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.879.951.159,- dan terealisasi Rp. 2.694.591.027,- (93,56%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.455.300,- dan terealisasi Rp. 2.455.000,- (100 %).
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 25.969.700,- terealisasi sebesar Rp. 25.969.700,- (100 %).
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99.80 %. Anggaran yang tersedia Rp. 416.6401000,- terealisasi sebesar Rp. 415.800.100,- (99.80 %).
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 29.410.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.410.000,- (100 %).
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 35.890.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.890.000,- (100 %).

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Colomadu telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1

Persandingan Realisasi Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
07.	KECAMATAN	**3.227.179.063**	**3.265.417.287**	94,47	1.350.200.000	**3.253.399.987**	45
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.722.183.963	2.760.422.187	93,56	862.500.000	2.684.468.487	45
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.281.200	2.281.300	99,92	2.200.000	2,479.100	9
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.261.200	2.281.300	100	2.200.000	2,479.100	9
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.020.000	1.261.200	99,92			
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	2.446.569.687	2.446.569.687	93,31	800.000.000	2.509.552.387	45
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.446.569.687	2.446.569.687	93,31	800.000.000	2.509.552.387	45
3.	**Administrasi Umum**	51.643.800	51.643.800	100	13.100.000	18.470.700	45

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.181.650	1.181.650	99,57	2.000.000	1.384.000	0
2)	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	10.820.650	10.820.650	98,33	2.000.000	3.086.700	41
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.940.000	21.940.000	99,91	2.000.000	6.000.000	38
4)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.376.000	6.376.000	100	1.000.000	1.790.000	48
5)	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.580.000	2.580.000	100	1.000.000	1.200.000	50
6)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.400.000	5.400.000	99,70	3.700.000	3.540.000	100
7)	Penatausahaan AArsip Dinamis Pada SKPD	3.345.500	3.345.500	99,57	1.400.000	1.470.000	13
4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	64.068.700	64.068.700	82,40			
2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.068.700	64.068.700	82,40			
5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	237.140.600	237.140.600	97,57	43.500.000	133.200.000	40
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.271.500	114.271.500	90,47	32.500.000	55.200.000	38
2)	Penyeiaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000	60.000.000	99,97	5.000.000	58.800.000	42
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.869.100	62.869.100	99,99	6.000.000	19.200.000	42
5.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	22.786.800	22.786.800	93,56	3.700.000	20.760.300	42
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.190.000	10.190.000	95,55	1.200.000	15.002.500	30
2)	Pemeliharaan / Rehabilitasi peralatan kantor	9.500.000	9.500.000	97,89	1.500.000	2.750.000	36
3)	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.096.800	3.096.800	99,97	1.000.000	3.013.800	27
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	2.455.300	2.455.300	100	4.200.000	74.236.200	41
1.	**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	2.455.300	2.455.300	100	4.200.000	74.236.200	41
1)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.141.700	1.141.700	100	2.200.000	56.320.100	41
2)	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	1.313.600	1.313.600	100	2.200.000	17.916.100	41
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	25.969.700	25.969.700	100	27.300.000	47.675.100	40
1.	**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	15.414.600	15.414.600	100	17.300.000	37.200.000	46
1)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.414.600	15.414.600	100	17.300.000	37.200.000	46
2.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	10.555.100	10.555.100	100	10.000.000	10.475.100	20
1)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10.555.100	10.555.100	100	10.000.000	10.475.100	20
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	432.040.100	432.040.100	98,80	410.000.000	338.413.500	41
1.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	432.040.100	432.040.100	98,80	410.000.000	338.413.500	41
1)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	432.040.100	432.040.100	98,80	410.000.000	338.413.500	41
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	29.410.000	29.410.000	100	30.450.000	48.296.700	20
1.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	29.410.000	29.410.000	100	25.450.000	48.296.700	20
1)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	25.750.000	25.750.000	100	25.450.000	43.750.000	20

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	3.660.000	3.660.000	100	5.000.000	4.546.700	0
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	15.120.000	15.120.000	100	15.750.000	60.310.000	42
1.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	15.120.000	15.120.000	100	15.750.000	60.310.000	42
1)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.480.000	6.480.000	100	7.750.000	40.450.000	42
2)	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan asset desa	8.640.000	8.640.000	100	8.000.000	19.860.000	42

Sumber: Kecamatan Colomadu

b. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.761.771.487**	**2.640.798.327**	**90.50**	**2.788.635.087**	**1.253.347.272**	**45**
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	2.381.300	*1.380.450*	*90*	2,479.100	*212.000*	*9*
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.261.200	1.261.200	100	2,479.100	212.000	9
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.120.100	1.119.250	99.92			
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**2.446.569.687**	***2.333.305.877***	***93.31***	2.570.552.387	***1.167.237.413***	***45***
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.446.569.687	2.333.305.877	93.31	2.570.552.387	1.167.237.413	45
4.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	51.643.100	*51.401.380*	*98*	23.561.800	*10.501.350*	*45*
5)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.181.650	1.181.650	100	1.384.000		0
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.820.650	10.818.180	98.33	7.870.850	3.193.000	41
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.940.000	21.920.000	99.91	6.780.000	2.590.000	38
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.176.000	6.176.000	100	1.803.600	864.800	48
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	2.580.000	100	1.200.000	600.000	50
10)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.400.000	5.390.000	99.81	3.070.000	3.070.000	100
11)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.345.500	3.335.550	99.70	1.453.350	183.750	13
5.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***						
12)	Pengadaan Mebel						
13)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.068.700	52.793.000	82,40			
6.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	237.140.600	*231.383.820*	*99*	169.200.000	*68.478.509*	*40*

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
14)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	114.271.500	114.234.000	99.97	55.200.000	23.000.000	42
15)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	54.284.720	90.47	58.800.000	22.478.509	38
16)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.869.100	62.865.100	99.99	55.200.000	23.000.000	42
7.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	24.036.800	23.326.800	*99.50*	22.841.800	*6.918.000*	*42*
17)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.440.000	10.930.000	95.55	17.078.000	6.168.000	36
19)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	9.300.000	97.89	2.750.000	750.000	27
20)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.096.800	3.096.800	100	3.013.800		0
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	2.455.300	2.455.300	100	74.236.200	30.338.000	41
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	2.455.300	2.455.300	*100*	74.236.200	*30.338.000*	*41*
22)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.141.700	1.141.700	100	56.320.100	23.000.000	41
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	1.313.600	1.313.600	100	17.916.100	7.338.000	41
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	25.969.700	25.969.700	100	44.275.100	17.600.000	40
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	25.969.700	*25.969.700*	*100*	33.800.000	*15.600.000*	*46*
23)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.414.600	15.414.600	100	33.800.000	15.600.000	46
24)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	10.555.100	10.555.100	100	10.475.100	2.000.000	19
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	416.640.100	415.800.100	99.80	287.533.500	119.000.000	41
1.	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	416.640.100	415.800.100	*99.80*	287.533.500	*119.000.000*	*41*
25)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	416.640.100	415.800.100	99.80	287.533.500	119.000.000	41
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	29.410.000	29.410.000	100	48.296.700	7.500.000	16
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	29.410.000	*29.410.000*	100	48.296.700	*7.500.000*	*16*
26)	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan RI	25.750.000	25.750.000	100	43.750.000	7.500.000	17
27)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan	3.660.000	3.660.000	100	4.546.700		0

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Tahun 2024			2025 (TRIBULAN II)		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	15.120.000	15.120.000	100	57.933.400	24.586.700	42
1.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	15.120.000	15.120.000	*100*	57.933.400	*24.586.700*	*42*
29)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.480.000	6.480.000	100	39.886.700	16.823.350	42
30)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8.640.000	8.640.000	100	18.046.700	7.763.350	43

Sumber : Kecamatan Colomadu 2025

Alokasi dana tahun 2024 sebesar Rp. 3.369.546.259; dengan realisasi capaian sebesar Rp.3.183.346.127; atau sebesar 94.47% lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 94,34 %. Sedangkan capaian sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 1.452.371.972; atau 44% dari pagu anggaran Rp.3.300.909.987;

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	Tahun 2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.804.315.952	2.804.315.952	100	2.761.771.487	2.640.798.327	95
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.000.000	5.000.000	100	2.455.300	2.455.300	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.427.500	23.427.500	100	25.969.700	25.969.700	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	375.680.000	338.112.000	90	416.640.100	415.800.100	90
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.915.000	27.915.000	100	29.410.000	29.410.000	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8.103.200	8.103.200	100	15.120.000	15.120.000	100

Sumber : Kecamatan Colomadu

Serapan anggaran selama tahun belum pernah mencapai 100% sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut kecamatan colomadu perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Colomadu s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Penerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kineja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4x100)
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
KECAMATAN COLOMADU										
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100%**	**100 %**	**100%**	**98,58**	**98,58 %**	**100 %**	**44 %**	**50 %**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	**12**	**100**	100%	100 %	100%	100 %	44,60 %	44,60 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kinerja Perangkat Daerah	**12**	**100**	100%	100	100%	100 %	44,60 %	**44,60 %**
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	**Cakupan keuangan Perangkat daerah**	**100%**		**100%**	**92 %**	**92,65%**	**100 %**	**45 %**	**45 %**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	**17**	100	100%	92,65	92,65%	100 %	45 %	45 %
	Administrasi Umum	**Cakupan Administrasi Umum**	**100**		**100%**	**100**	**98,58 %**	**100 %**	**45 %**	**45 %**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	**12**	100	100%	100	100%	100 %	56,96 %	56,96 %
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**12**	100	100%	99,98	99,98 %	100 %	20,81 %	20,81 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	**12**	100	100%	96,58	96,58 %	100 %	14,2 %	14,2 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	**12**	100	100%	100	100%	100 %	9,72 %	9,72 %

	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan	**12**	100	100%	100	100%	100 %	25 %	25 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Teroedianya makan dan minuman rapat serta pembiayaan konsultasi SKPD	**12**	100	**100%**	97,27	100%	100 %	0 %	0 %
	Penatausahaan AArsip Dinamis Pada SKPD	Tersedianya Arsip Dinamis	**12**	100	**100**	100		100 %	0 %	0 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**0**				**0**	**0 %**	**0 %**
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel Kantor		**0**	**100**			0	0	0 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		**0**	**100**			0	0	0 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100**	**100%**	**97**	**97%**	**100 %**	**25,19 %**	**25,19 %**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	100	100%	87,38%	86,02%	100 %	29,47 %	29,47 %
	Penyeiaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Kurir	12	100	100%	100	100%	100 %	24,66 %	24,66 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	100	100%	99,87	98,43%	100 %	22,06 %	22,06 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**100%**	**91,97**	**91,97%**	**100 %**	**5,51 %**	**5,51 %**
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantir dan Bangunan Lainnya	1	100	100 %	100		100 %	12,32 %	12,32 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7	100	100%	98,35	91,97	100 %	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**75**		**75**	**78,625**	**114,76%**	**75**	**0**	**0**
	Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	100		100%	100%	100%	100	0	0

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat, Terlaksananya kegiatan legalisasi	12	100	100%	100%	100%	100		0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN AKTIF**	**100**		**85**	**98,68**	**117,31**	**85**	**70,91 %%**	**70,91 %**
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	**Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	**100**		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**70,91 %**	**70,91%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terpenuhinya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	100	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	100		100	100%	100 %	28,42 %	28,42 %
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**		**97%**	**100**	**100%**	**100 %**	**28,42 %**	**28,42 %**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12	100	100%	100	100	100 %	28,42 %	28,42 %
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**PERSENTASE WILAYAH DALAM KEADAAN KONDUSIF**	**90**		**85**	**100%**	**117,65**	**85 %**	**23,59 %**	**23,59%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**12**		**100%**	**100**	**100%**	**100 %**	**23,59 %**	**23,59 %**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Sinergitas Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Colomadu	12	100	100%	100	100%	100%	23,59%	23,59 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**100**	**85**	**100**	**117,65**	**85 %**	**0**	**0**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**12**	**12**	**100%**	**99,70**	**99,70**	**100 %**	**0**	**0**

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI	Terpenuhinya Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI		100	100%	99,69	99,69%	100 %	0	0
0	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Terpenuhinya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, Golongan Lainnya	12	100	100%	99,68	100%	100 %	0	0
	Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terpenuhinya Pelaksanaan semua urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	12	12	100%	100	100%	100 %	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa memiliki APBDesa dan RKPDesa yang sesuai ketentuan**	**100**	**100**	**85%**	**100**	**100 %**	**85 %**	**50 %**	**50 %**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**12**	**12**	**100%**	**100**	**100%**	**100 %**	**50 %**	**50 %**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12	12	100%	100	100%	100 %	50 %	50 %
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12	100	100%	100	100%	0	0	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	100	100%	100	100%	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Colomadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Indek kepuasan masyarakat.

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Colomadu meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan , baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi , Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal
   Kekuatan :
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetaapkan payung hukunya
   - Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama
   - Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama
   - Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional
   - Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daaerah

   Kelemahan :
   - Masih banyak penduduk miskin
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama
   - Masih rendahnya kualitas SDM
   - Kurangnya partisipasi aktip masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
2. Lingkungan Eksternal
   Peluang :
   - Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
   - Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
   - Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
   - Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama
   - Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan
   -

Ancaman :

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa
- Munculnya faham agama yang radikal dan ekstrim
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Pada pembahasan sub bab ini kami disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Colomadu, dengan format Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2. 5.
Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Colomadu
Tahun 2024- 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja			Capaian Kinerja
						2024	2025	2024	2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	Na	80	Na	-
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat daerah		Nilai IKM	Nilai	78,62	80	78,94	-
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	%	72,90	71,80	71,50	-
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100	100	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	90	90	100	100
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan	%	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja			Capaian Kinerja
						2024	2025	2024	2025
				wawasan kebangsaan dan keagamaan					
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahaan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Colomadu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel 2. 6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu Kabupaten
Tahun 2024-2025

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025 Trib II	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	67	65	-	Indikator Tujuan 2024
2.	Angka Kemiskinan	%	8,52	8,45	8,52	-	Indikator Tujuan 2024
3.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	0,75	0,76	-	Indikator Sasaran 2024
4.	SAKIP	Nilai	72,90	73	71,50	-	Indikator Sasaran 2024 dan Program 2025
5.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	100	100	100	-	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	80	78,94	-	
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	

8.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	90	90	90	90	
9.	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	%	100	100	100	100	
10.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Colomadu

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Colomadu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Sedangkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Colomadu sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Permasalahan Sekretariat:**
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;

6. Seksi Peayanan Umum

a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana
c. Belum optimalnya pengelolan aset di kecamatan
d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Colomadu, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Colomadu yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Kecamatan Colomadu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Ngargoyoso sehingga pelayanan	**Seksi Tata Pemerintahan** a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		terhadap masyarakat terhambat c. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan e. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa f. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan. g. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan h. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial. i. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah	e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **Seksi Kesejahteraan Sosial** a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **Seksi Pelayanan Umum** a. belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. terbatasnya sarana dan prasarana c. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamtan d. belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang terlah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Colomadu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Colomadu

dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Colomadu

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Colomadu berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Colomadu.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.6

Tabel 2. 3
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kecamatan Colomadu				2.636.287.884					3.308.449.600	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	Kec.Colomadu	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	2.505.208.084	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	Kec.Colomadu	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100	2.796.749.600	
	perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah	Kec.Colomadu	terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah		6.100.000	perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah	Kec.Colomadu	terpenuhinya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah		2.200.000	
	Administrasi keuangan	Kec.Colomadu	Terpenuhinya administrasi keuangan		2.105.208.884	administrasi keuangan	Kec.Colomadu	Terpenuhinya administrasi keuangan		2.446.569.600	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		52.400.000	administrasi umum perangkat daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		63.480.000	
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		289.499.200	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		245.000.000	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah		**52.000.000**	pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah		39.500.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	Kec.Colomadu	Indek Kepuasan Masyarakat	75	**6.362.300**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	Kec.Colomadu	Indek Kepuasan Masyarakat	75	**3.000.000**	
	Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kec.Colomadu	Terpenuhinya Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan		6.362.300	Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kec.Colomadu	Terpenuhinya Fasilitasi pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan		3.000.000	
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Kec.Colomadu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98	**18.846.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	Kec.Colomadu	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	98	**27.500.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**					
	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec.Colomadu	Terpenuhinya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		18.846.400	koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec.Colomadu	Terpenuhinya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		27.500.000	
4	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	Kec.Colomadu	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100	**59.207.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	Kec.Colomadu	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100	**30.450.000**	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		59.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.Colomadu	Terpenuhinya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		30.450.000	
5	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Colomadu	Persentase Desa memiliki APBDesa dan RKPDesa yang sesuai ketentuan	100	**19.064.100**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***		Persentase Desa memiliki APBDesa dan RKPDesa yang sesuai ketentuan	100	**15.750.000**	
	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.Colomadu	Terpenuhinya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		19.064.100	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.Colomadu	Terpenuhinya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa		15.750.000	
6	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	**27.600.000**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	**435.000.000**	
	sinergitas dengan kepolisian negara kesatuan republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayaha kecamatan	Kec.Colomadu	Terpenuhinya sinergitas dengan kepolisian negara kesatuan republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayaha kecamatan		**27.600.000**	sinergitas dengan kepolisian negara kesatuan republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayaha kecamatan	Kec.Colomadu	Terpenuhinya sinergitas dengan kepolisian negara kesatuan republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayaha kecamatan		435.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Colomadu

Tabel 2. 4
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		N I H I L			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;

10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;

8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam lima tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;

4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi

dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Colomadu

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar berkontribusi pada misi 4. Merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD, disampaikan bahwa tujuan perangkat daerah disusun dengan memperhatikan NSPK kementerian dan tujuan serta sasaran daerah. Tujuan daerah yang diacu dalam penyusunan Renstra adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Sasaran Daerah Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.
Berdasarkan tujuan dan sasaran daerah maka tujuan renstra Kecamatan Colomadu adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan. Dalam rangka mencapai tujuan diatas sasaran yang dirumuskan adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.
a) Tujuan

Tujuan rencana kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Colomadu Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
2.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan ingin dicapai oleh Kecamatan Colomadu tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat daerah

Tabel 3. 1.
Tujuan Sasaran dan Program Target Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian
						2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standar Operasional Prosedur Yang Diimplementasikan	%	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	81
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip	%	71,80
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Sudah Ditetapkan	%	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	90
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelurahan Yang Mengikuti Kegiatan Wawasan Kebangsaan Dan Keagamaan	%	100
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Memiliki Apbdes Dan Rkpdes Sesuai Ketentuan	%	100

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil identifikasi tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Colomadu adalah sebagai berikut :

1. Kurang meratanya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Belum optimalnya penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kerja dalam mendukung kinerja pelayanan.
3. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelesaian pertanahan di Wilayah Kecamatan Colomadu.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyediaan data antara desa/kelurahan dan kecamatan.

5. Masih adanya potensi kerawanan lingkungan yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban dimasyarakat.
6. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
7. Masih belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan perangkat daerah.
8. Belum optimalnya pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

3.4 Pengukuran kinerja pelayanan PD

yang menjadi persolan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Colomadu mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran di atas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran kecamatan colomadu tercapai tidak nya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator program kegiatan dan sub kegiatan.keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kecamatan colomadu.

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian renja PD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat daerah	1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD
		Administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Penatausahaan AArsip Dinamis Pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyeiaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan / Rehabilitasi peralatan kantor
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Penyelenggaraan Urusan Penerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
	5) **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa**	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
	2. **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	3. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasioanal dalam rangka Memantabkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeloiharaan Keutuhan NKRI
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
	4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan asset desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN COLOMADU

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Colomadu

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

prioritas pembangunan setiap tahun yang disusun berdasarkan kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada di kecamatan. Penetapan prioritas pembangunan kecamatan secara terstruktur dan bertahap, diharapkan setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. Mengacu pada tahapan di atas, fokus prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

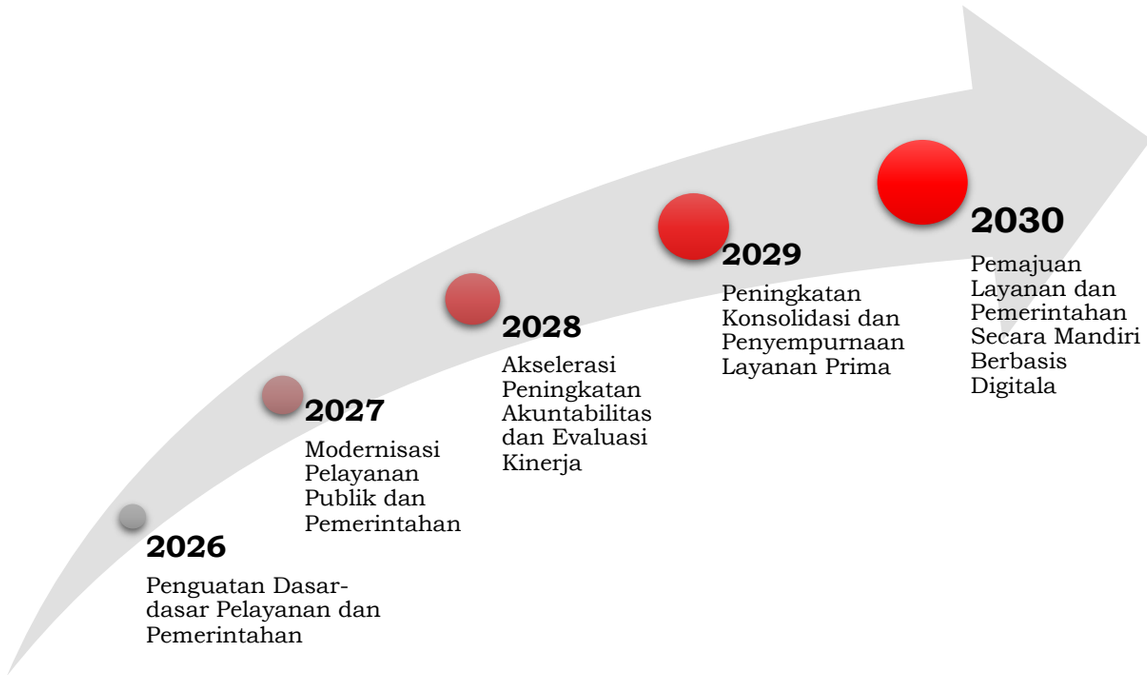

Sumber: Data Kecamatan Colomadu

1. Tahun 2026

Tahap I tahun 2026 diarahkan pada "Penguatan Dasar-Dasar Pelayanan dan Pemerintahan". Adapun program prioritas difokuskan pada:

a. Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan umum dan pemerintahan desa.
b. Penguatan kapasitas awal aparatur melalui pelatihan dasar.
c. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan.
d. Pengembangan sistem administrasi pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah

1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrai Keuangan
1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3). Pengadaan Aset Tetap Lainnya

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
1). Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Mimnimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
3). Pelaksanaan fungsi koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Colomadu

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Colomadu, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Colomadu merupakan pencapaian kinerja pelayanan Colomadu. (lebih lengkap dilhat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Colomadu

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Colomadu

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4. 1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DAN PENDANAAN
KECAMATAN COLOMADU KAB. KARANGANYAR TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	16	17
						Kecamatan Colomadu			2.645.161.800,00						3.496.000.001,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.645.161.800,00						3.496.000.001,00	
	7	01				KECAMATAN			2.645.161.800,00						3.496.000.001,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100 %	2.202.261.800,00						2.998.000.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah NILAI SAKIP	100 % 72,90 Dokumen	1.303.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	7.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 umen	660.500,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	5.500.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	0,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	0,00	KECAMATAN COLOMADU

	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	643.400,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	2.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	90 %	2.003.161.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	2.580.000.000,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.003.161.800,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	2.580.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	9.748.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	68.500.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	180.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	5.300.000,00	KECAMATAN COLOMADU

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.882.800,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	15.500.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.220.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	30.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	105.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	4.500.000,00	KECAMATAN COLOMADU

	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	1.200.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	260.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	8.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	100.500,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	4.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	0,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	165.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	280.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	60.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.500.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	60.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	160.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	22.147.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	62.000.000,00	

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	21.783.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	30.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	160.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	16.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	204.800,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	16.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5 nilai	74.400.000,00						22.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	74.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	22.000.000,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										

							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	55.200.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	5.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	17.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	90 %	46.750.000,00						40.000.000,00	

	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbangcam dan PKK Kecamatan	100 %	36.750.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	25.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11 Lembaga Kemasyarakatan	36.750.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	25.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya PKK se Kecamatan	12 Laporan	10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	15.000.000,00	

	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLAMADU	15.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	90 %	229.200.000,00						290.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	90 %	229.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	290.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	229.200.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	290.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	90 %	55.350.000,00						76.000.001,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan PKUB Kecamatan Terlaksananya kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	12 Bulan 100 %	55.350.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	76.000.001,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang	24.750.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	60.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	16.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan										
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	27.600.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	KECAMATAN COLOMADU	1,00	KECAMATAN COLOMADU
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	37.200.000,00						70.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah	100 %	37.200.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	70.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa										

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	0,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	19.200.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	40.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	30.000.000,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	0,00	KECAMATAN COLOMADU
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Colomadu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	KECAMATAN COLOMADU	0,00	KECAMATAN COLOMADU

	J U M L A H	**2.645.161.800,00**		**3.496.000.001,00**	

Tabel 4.2.
Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2026.

No	Indikator	Satuan	Tahun 2026
1	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Nilai	80
2	Nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81

Tabel 4.3.
Program /Kgiatan Kecamatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas kab. karanganyar tahun 2026	Program Kegiatan Kecamatan 2026	Pagu
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**74.400.000**
		✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	74.400.000
		• Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	55.200.000
		• Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.200.000
2.	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	48.350.000
		✓ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	48.350.000
		• Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	24.750.000

No	Program Prioritas kab. karanganyar tahun 2026	Program Kegiatan Kecamatan 2026	Pagu
(1)	(2)	(4)	(5)
		Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.000.000 21.800.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Colomadu Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025- 2029.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Colomadu harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Colomadu.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Colomadu Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Baperlitbang yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Colomadu secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber

daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Colomadu Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN GONDANGREJO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026.

Rencana Kerja kecamatan Gondangrejo ini merupakan himpunan Rencana Kerja yang disusun oleh Kecamatan Gondangrejo yang mempunyai fungsi untuk dapat mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan untuk satu tahun ke depan.

Kecamatan Gondangrejo sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyusun Rencana Kerja sebagai acuan kerja dan usaha perbaikan aparatur perangkat daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat akan transparasi dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun sampai selesainya Rencana kerja ini, kami menyadari adanya kekurangan yang sebesar-besarnya. Kami juga menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya.

Karanganyar, September 2025
CAMAT GONDANGREJO

SRIONO BUDI SANTOSO,S.Sos,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19700721 199003 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-1
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-4
1.4 Sistematika Penulisan..... I-4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gondangrejo..... II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondangrejo..... II-23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... II-26
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... II-33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran III-1
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029..... III-7
3.4 Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD..... III-7
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Gondangrejo..... IV-1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangrejo..... IV-2
4.3 Data Indikatif Kecamatan Gondangrejo..... IV-2
4.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Gondangrejo..... IV-3
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja..... V-1
5.2 Kaidah Pelaksanaan..... V-1
5.3 Rencana Tindak lanjut..... V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana di tingkat perangkat daerah mulai dari perencanaan jangka menengah lima tahunan yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan perencanaan jangka pendek periode satu tahun yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gondangrejo untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2024. Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Rencana kerja Kecamatan Gondangrejo, keterkaitan antara Rencana kerja PD dengan dokumen RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana kerja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Gondangrejo

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Gondangrejo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan Gondangrejo tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2025 Kecamatan Gondangrejo .

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan Gondangrejo tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024 – 2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
2. Kecamatan Gondangrejo untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp 2.658.186.068,- *(Dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah)* yang terdiri dari Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.817.866.068,- (*Satu milyar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh delapan rupiah*) dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 840.320.000,- (*Delapan ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja pegawai maupun barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 2.561.388.776,- *(Dua milyar lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)* atau sebesar 96,36% dengan sisa anggaran Rp. 96.797.292,- *(Sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)* atau sebesar 3.64%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerja 95,70 %. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. *2.237.986.068*,- dan terealisasi Rp. *2.141.703.776*,- (95,70%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %.

Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 8.600.000,- dan terealisasi Rp. 8.600.000,- (100%).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 28.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.200.000,- (100 %).

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 235.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 235.900.000,- (100 %).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99,60 %. Anggaran yang tersedia Rp. 130.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 129.485.000,- (99,60%).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 17.500.000,- terealisasi sebesar Rp 17.500.000,- (100 %).

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Persandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Gondangrejo telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.

Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Gondangrejo

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**2.237.986.068**	**2.237.986.068**	**100**	**2.270.126.129**	**2.321.126.129**	**102,24**
1.	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**5.000.000**	**5.000.000**	**100**	**5.000.000**	**5.000.000**	100
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100	5.000.000	5.000.000	100
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
2.	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**1.817.866.068**	**1.817.866.068**	100	**1.838.306.129**	**1.892.306.129**	**102,93**
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.866.068	1.817.866.068	100	1.838.306.129	1.892.306.129	102,93
3.	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**-**
4)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-
4.	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**116.547.000**	**121.312.000**	**104,08**	**74.450.000**	**61.660.000**	**82,82**
5)	Penyediaan Komponen	10.035.000	9.983.000	99,48	5.450.000	4.945.000	90,73

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.617.000	24.834.000	114,48	12.000.000	12.535.000	104,45
7)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.690.000	21.290.000	108,12	12.000.000	12.000.000	100
8)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.225.000	11.225.000	100	12.000.000	4.800.000	40
9)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.900.000	2.900.000	100	3.000.000	3.000.000	100
10)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.550.000	7.550.000	100	-	-	-
11)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.530.000	43.530.000	100	25.000.000	21.880.000	87,52
12)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	5.000.000,	2.500.000	50
5.	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**30.210.000**	**20.275.000**	**67,11**	-	-	-
13)	Pengadaan Mebel	-	-		-	-	-
14)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.210.000	20.275.000	67,11	-	-	-
6.	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**215.670.000**	**215.670.000**	100	**309.960.000**	**309.960.000**	100
15)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	100
16)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.800.000	22.800.000	100	22.800.000	22.800.000	100
17)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	189.870.000	189.870.000	100	284.160.000	284.160.000	100
7.	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	**52.693.000**	**57.863.000**	**109,80**	**42.410.000**	**52.200.000**	***123,08***
18)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.543.000	37.543.000	115,36	36.410.000	47.200.000	129.63
19)	Pemeliharaan Mebel	-	-	-	-	-	-
20)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.150.000	20.320.000	100,84	6.000.000	5.000.000	100
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-
22)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.600.000**	**8.600.000**	100	**4.300.000**	**4.300.000**	**100**
1.	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	**2.600.000**	**2.600.000**	100	**1.300.000**	**1.300.000**	***100***
23)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.600.000	2.600.000	100	1.300.000	1.300.000	100
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	**6.000.000**	**6.000.000**	**100**	**3.000.000**	**3.000.000**	**100**
24)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	100	1.500.000	1.500.000	100
25)	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	100	1.500.000	1.500.000	100
III.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN**	**28.200.000**	**28.200.000**	**100**	**22.600.000**	**22.600.000**	**100**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	KELURAHAN						
1.	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	**15.600.000**	**15.600.000**	**100**	**10.000.000**	**10.000.000**	***100***
26)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.600.000	10.600.000	100	8.000.000	8.000.000	100
27)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	100	2.000.000	2.000.000	**100**
2.	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan***	**12.600.000**	**12.600.000**	100	**12.600.000**	**12.600.000**	100
28)	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000	12.600.000	100	12.600.000	12.600.000	100
IV.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**203.880.000**	**235.900.000**	**100**	**141.600.000**	**141.600.000**	**100**
1.	***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum***	**203.880.000**	**235.900.000**	**100**	**141.600.000**	**141.600.000**	100
29)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	203.880.000	203.880.000	100	141.600.000	141.600.000	100
V.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**67.500.000**	**130.000.000**	**192,59**	**55.000.000**	**58.000.000**	**105,45**
1.	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah***	**67.500.000**	**130.000.000**	**192,59**	**55.000.000**	**58.000.000**	**105,45**
30)	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60.000.000	117.500.000	195,83	50.000.000	53.000.000	106
31)	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.500.000	12.500.000	166,66	5.000.000	5.000.000	100
VI.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**17.500.000**	**17.500.000**	**100**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**
1.	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	**17.500.000**	**17.500.000**	**100**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100**
28)	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100
32)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.500.000	2.500.000	100	2.000.000	2.000.000	100
33)	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	5.000.000	100	2.000.000	2.000.000	100
34)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	100	2.000.000	2.000.000	100
35)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	100	2.000.000	2.000.000	100

a. Persandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi Adalah sebagai berikut:

Tambah Tabel 2.2.

Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	**2.237.986.068**	**2.141.703.776**	**95,70**	**2.306.296.129**	**1.230.439.756**	**53,35**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**5.000.000**	**4.882.750**	**97,66**	**3.500.000**	**2.200.000**	**62,86**
1)	Penyusunan Dokumen perencanaan (Renja, Renja Perubahan, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	5.000.000	4.882.750	97,66	3.500.000	2.200.000	62,86
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.817.866.068**	**1.723.143.761**	**94,79**	**1.892.306.129**	**1.045.950.505**	**55,27**
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.817.866.068	1.723.143.761	94,79	1.892.306.129	1.045.950.505	55,27
3..	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0
4)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	0	0
4..	Administrasai Umum Perangkat Daerah	121.312.000	120.790.100	99,57	49.580.000	27.868.000	56,21
5)	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	9.983.000	9.983.000	100,00	4.945.000	2.875.000	58,14
6)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.834.000	24.833.100	100,00	10.345.000	5.925.000	57,27
)	Penyediaan bahan logistrik kantor	21.290.000	21.280.000	99,95	12.000.000	7.500.000	62,50
8)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.225.000	11.224.000	99,99	4.800.000	4.288.000	89,33
9)	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.900.000	2.900.000	100,00	2.900.000	0	0
10)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.550.000	7.550.000	100,00	0	0	0
11)	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43.530.000	43.020.000	98,83	12.590.000	7.280.000	57,82
12)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	2.000.000	0	0
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**20.275.000**	**20.275.000**	**100,00**	**0**	**0**	**0**
13)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0	0	0	0
14)	Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0
15)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.275.000	20.275.000	100,00	0	0	0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**215.670.000**	**215.100.165**	**99,74**	**308.710.000**	**129.251.751**	**41,87**
16)	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00	1.750.000	1.750.000	100,00
17)	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	22.800.000	22.230.165	97,50	22.800.000	9.101.751	39,92
18)	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	189.870.000	189.870.000	100,00	284.160.000	118.400.000	41,67
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**57.863.000**	**57.512.000**	**99,39**	**52.200.000**	**25.169.500**	**48,22**
19)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.543.000	37.192.000	99,07	47.200.000	22.789.500	48,28
20)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.320.000	20.320.000	100,00	5.000.000	2.380.000	47,60
21)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**8.600.000**	**8.600.000**	**100,00**	**3.400.000**	**2.200.000**	**64,71**
8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**2.600.000**	**2.600.000**	**100,00**	**1.000.000**	**0**	**0**
22)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.600.000	2.600.000	100,00	1.000.000	0	0
9.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**6.000.000**	**6.000.000**	**100,00**	**2.400.000**	**2.200.000**	**91,67**
23)	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.000.000	3.000.000	100,00	1.200.000	1.000.000	83,33
24)	Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Wil. Kecamatan	3.000.000	3.000.000	100,00	1.200.000	1.200.000	100,00
III. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	***28.2 00.000***	**28.200.000**	**100,00**	**18.000.000**	**14.000.000**	**77,78**
10.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**15.6 00.000**	**15.600.000**	**100,00**	**8.000.000**	**8.000.000**	**100,00**
25)	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.600.000	10.600.000	100,00	8.000.000	8.000.000	100,00
26)	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.000.000	5.000.000	100,00	0	0	0
11.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**12.600.000**	**12.600.000**	**100,00**	**10.000.000**	**6.000.000**	**60,00**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
27)	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	12.600.000	12.600.000	100,00	10.000.000	6.000.000	60,00
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	***235.900.000***	**235.900.000**	**100,00**	**141.600.000**	**59.000.000**	**41,67**
12.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**235.900.000**	**235.900.000**	**100,00**	**141.600.000**	**59.000.000**	**41,67**
28)	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	235.900.000	235.900.000	100,00	141.600.000	59.000.000	41,67
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***130.000.000***	**129.485.000**	**99,60**	**54.750.000**	**4.000.000**	**7,31**
13.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**130.000.000**	**129.485.000**	**99,60**	**54.750.000**	**4.000.000**	**7,31**
29)	Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa	117.500.000	116.985.000	99,56	50.750.000	0	0
30)	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	12.500.000	12.500.000	100,00	4.000.000	4.000.000	100,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0	0	0
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**17.500.000**	**17.500.000**	**100,00**	**8.000.000**	**4.800.000**	**60,00**
14.	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**17.500.000**	**17.500.000**	**100,00**	**8.000.000**	**4.800.000**	**60,00**
30)	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.000.000	5.000.000	100,00	1.600.000	1.600.000	100,00
31)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	100,00	1.600.000	0	0
32)	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000	5.000.000	100,00	1.600.000	1.600.000	100,00
33)	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.500.000	2.500.000	100,00	1.600.000	1.600.000	100,00
34)	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.500.000	2.500.000	100,00	1.600.000	0	0
	Jumlah	**2.658.186.068**	**2.658.186.068**	**96,36**	**2.532.046.129**	**1.314.439.756**	**51,91**

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gondangrejo s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.0.00.0-00.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	70	70,20	70	71,40	102	71,50	-	-
7-01.0-00.0-00.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50%**	**50**
7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Tersedianya dokumen Renja, RKA, DPA	8	6 dok	6 dok	6 dok	100	6 dok	3 Dok	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen LKJiP	5	5 buku	5 buku	5 buku	100%	5 buku	5 Buku	100
7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	**Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1 Thn**	**12 bln**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bln**	**3 Bln**	**25**
7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya gaji dan tunjangan PNS	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	3 Bln	25
7-01.0-00.0-00.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Thn**	**12 bln**	**12 bln**	**12 bln**	**100**	**12 bln**	**-**	**-**
7-01.0-00.0-00.09.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparat yang mengikuti bintek dan kursus	40 org	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	-	-
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12 Bln**	**12 bln**	**12 bln**	**12 bln**	**100%**	**12 bln**	**3 Bln**	**25**
7.01.7-01.0-00.0-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 Pkt	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 Bln	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
00.13.01.2.06.01	bangunan kantor	kantor								
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Pkt	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 Bln	25
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor dan bahan kebersihan kantor	1 Pkt	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 Bln	25
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Pkt	3 item	3 item	3 item	100%	12 Bulan	3 Bulan	25
7.01.7-01.0-00.0-00.13.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Pkt	2 item	2 item	2 item	100%	12 Bulan	3 Bulan	25
7.01.7-01.0-00.0-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	3 lap	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
00.13.01.2.06.09	SKPD	dalam/luar daerah								
7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**45 Unit**	**8 Item**	**8 Item**	**8 Item**	**100 %**	**-**	**-**	**-**
7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.04	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersdianya 2 spd mtr	-	2 item	2 item	2 item	100%	2 item	-	-
7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi dan Meja	40 unit	2 item	2 item	2 item	100%	2 item	-	-
7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Komputer dan Printer	3 Unit	2 item	2 item	2 item	100%	2 item	-	-
7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana	12 Unit	2 item	2 item	2 item	100%	2 item	-	-
7-01.0-00.0-	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**Cakupan Penyediaan Jasa**	**12 Bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**100%**	**12 bulan**	**3 Bln**	**25**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
00.09.01.2.08	**Urusan Pemerintahan Daerah**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								
7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya kurir surat	12 Bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 Bulan	3 Bln	25
7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 Bln	25
7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terselengaranya penyediaan jasa adminitrasi dan kebersihan kantor	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 Bulan	3 Bln	25
7-01.0-00.0-00.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12 Bln**	**12 Bln**	**12 Bln**	**12 Bln**	**100 %**	**12 Bulan**	**3 Bln**	**25**
7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 Bulan	3 Bln	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
	Jabatan									
7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	8 Unit	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	3 Bln	25
7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	2 Unit	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 Bln	25
7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 Unit	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bulan	3 Bln	25
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Fasilitasi pengembangan Budaya nasional (nusantara)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.02.02	**Pelestarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalm Daerah Kabupaten / kota**	**Cakupan Pelestarian Kesenian Tradisonal yang Masyarakat Pelakunya dalm Daerah Kabupaten / kota**	**-**	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
2.22.02.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Parana Tradisional	Terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Parana Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-
7-01.0-00.0-00.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	74	74	74	100%	74	-	
7-01.0-00.0-00.09.02.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	**3 Bln**	**25**
7-01.0-00.0-00.09.02.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya PATEN di Kecamatan	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-	Fasilitasi Percepatan	Terselenggaranya kegiatan Indeks	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
00.09.02.2.01.2	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	kepuasan masyarakat								
7-01.0-00.0-00.09.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Cakupan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.02.2.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terselenggaranya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	100	100	100	100%	100	25	25
7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Terselenggaranya musrenbang	13 Desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	13 Desa	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
	Pembangunan di Desa									
7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselnggaranya kegiatan perlombaan desa	13 desa	13 desa	13 desa	13 desa	100%	13 desa	-	-
7-01.0-00.0-00.09.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan PKK	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya pembinaan wilayah	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Cakupan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.04.2.02.02	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasea memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100%	100	100	100
7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
	sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penugasan Kepala Daerah**								
7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terselenggaranya kegiatan FKUB	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa/kelurahan tertib Perda	100	100	100	100	100%	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
7-01.0-00.0-00.09.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**13 Desa**	**13 desa**	**13 desa**	**13 desa**	**100**	**13 desa**	**13 Desa**	**100**
7-01.0-00.0-00.09.062.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terselenggaranya pembinaan admn pemerintah Desa	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terselenggaranya pembinaan perangkat desa	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25
7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terselenggaranya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target renstra (%)
7-01.0-00.0-00.09.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12 Bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	3 bln	25

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gondangrejo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Kecamatan Gondangrejo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Gondangrejo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan PD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gondangrejo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:
   - Masih cukup banyak penduduk miskin

- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional
-

Tabel 2.5

Capaian Kinerja (Tujuan, Sasaran, dan Program
(Tahun 2024 dan 2025 Triwulan II)
Kecamatan Gondangrejo

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	100	100
	Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	92,25	89,30
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	Nilai	71,40	Belum dinilai
			Persentase Indikator OPD	%	19,99	19,99

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
			(IKU dan IKK) yang tercapai targetnya			
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	100
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	50
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	60

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.6 pada halaman berikut :

Tabel. 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karangayar Tahun 2024 dan 2025 Smt 1

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisisis
			2024	2025	2024 Smt 1	2025 Smt 1	
1	2	4	6	7	9	10	11
1.	Nilai SAKIP	Nilai	71,11	72	71,4	0	
2.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,76	Tidak Dipakai	0,762	Tidak Dipakai	
3.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	96	96	19,99	19,99	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78	92,27	92,25	89,6	
5.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	
6.	Persentase wilayah dalam	%	100	100	99,6	100	

No.	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisisis
			2024	2025	2024 Smt 1	2025 Smt 1	
1	2	4	6	7	9	10	11
	keadaan kondusif						
7	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	
8	Persentase desa / kelurahan tertib Perda	%	100	100	100	100	

Sumber : Hasil Analisis Data pada Kecamatan Gondangrejo

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Gondangrejo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gondangrejo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Gondangrejo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Gondangrejo sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.

8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gondangrejo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Permasalahan Sekretariat:
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

b. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
   c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
   d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
   e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
   d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gondangrejo , maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Gondangrejo yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Kecamatan Gondangrejo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimlanya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur. d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan. g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	**a. Seksi Tata Pemerintahan** b. kurangnya kualitas SDM aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; c. masih rendahnya disiplin aparatur desa; d. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan; e. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan; f. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur Kelurahan **g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** h. belum optimalnya sosialisasi Perda; i. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; j. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); **k. Seksi Pemberdayaan Masyarakat** l. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; m. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			n. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **o. Seksi Kesejahteraan Sosial** p. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: q. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. r. masih tingginya tingkat pengangguran; s. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **t. Seksi Pelayanan Umum** u. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat v. Terbatasnya sarana dan prasarana. w. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. x. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang terlah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Gondangrejo dan tingkat kinerja yang dicapai dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau

target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Gondangrejo

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

a) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

b) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

c) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanaidengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Gondangrejo.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(!0)	-11	(!2)
	KECAMATAN GONDANGREJO				**2.434.484.057,00**					**3.293.566.500,00**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	Kec. Gondangrejo	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	**2.303.404.257,00**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	Kec. Gondangrejo	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	**2.982.000.000,00**	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	5.700.000,00	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.Gondangrejo	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan	8 Dokumen	5.700.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan administrasi keuangan	1 Tahun 16 Orang	1.716.454.257,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Gondangrejo	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun 16 Org	2.213.004.200,00	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun 6 Paket	52.000.000,00	Administrasi umum perangkat daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun 6 Paket	108.875.800,00	
	Administrasi	Kec.Gondang	Jumlah	1 tahun	35.000.000,00	Administrasi Kepegawaian	Kec.Gondangr	Jumlah	1 tahun	75.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(!0)	-11	(!2)
	Kepegawaian Perangkat Daerah	rejo	pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi pegawai	40 Org		Perangkat Daerah	ejo	pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi pegawai	40 Org		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	45 Unit	15.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Unit	93.000.000,00	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	426.050.000,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	415.030.000,00	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	53.200.000,00	Pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	71.390.000,00	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	Kec.Gondangrejo	Indek Kepuasan Masyarakat	92,28	**6.362.300,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	Kec.Gondangrejo	Indeks Kepuasan Masyarakat	92,28 Nilai	**25.000.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Gondangrejo	Cakupan jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	4.362.300,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Gondangrejo	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Laporan	6.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(!0)	-11	(!2)
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Gondangrejo	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 Bulan	2.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Gondangrejo	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan Kecamatan	12 Bulan	19.000.000,00	
3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	Kec.Gondangrejo	cakupan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	**18.846.400,00**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	Kec.Gondangrejo	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100%	**56.566.500,00**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Gondangrejo	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	8.846.400,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Gondangrejo	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	40.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Gondangrejo	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	10.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Gondangrejo	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Lembaga	16.566.500,00	
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	Kec.Gondangrejo	Cakupan program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	**27.600.000,00**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	Kec.Gondangrejo	Persentase desa dalam keadaan kondusif	100%	**55.000.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Gondangrejo	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	12 laporan	**27.600.000,00**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Gondangrejo	Cakupan Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman	12 laporan	**55.000.000,00**	

No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(!0)	-11	(!2)
			dan Ketertiban Umum					dan Ketertiban Umum			
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	Kec.Gondangrejo	cakupan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	**59.207.000,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	Kec.Gondangrejo	Persentase desa/kelurahan tertib perda	100%	**125.000.000,00**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.Gondangrejo	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	12 Bulan	**59.207.000,00**	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.Gondangrejo	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 Bulan	125.000.000,00	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Gondangrejo	cakupan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	**19.064.100,00**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Gondangrejo	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100%	**50.000.000,00**	
	Fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.Gondangrejo	Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	50 Dokumen	**19.064.100,00**	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.Gondangrejo	Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	10 Dokumen	50.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Gondangrejo. Namun dalam proses ini Kecamatan Gondangrejo mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Gondangrejo terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Gondangrejo.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondangrejo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata

sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:
1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gondangrejo

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Gondangrejo adalah :

TABEL 3. 1

Tujuan – Sasaran – Program Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Target Kinerja 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	80
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	92,28
3			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	71,60
4			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
8			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.3
Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

No.	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Gondangrejo	Tantangan	Peluang
1.	**Tujuan** Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik **Sasaran** Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	- Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan - Tingginya angka pelanggaran terhadap ketertiban umum	- Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi - Kurangnya pemahaman terhadap peraturan	- Motivasi serta metode kerja yang sistematik serta peningkatan SDM aparatur - Motivasi dan pemantauan trantibum

Permasalahan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025-2029, belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur, tingginya angka pelanggaran ketertiban umum, kurangnya pendataan usulan perencanaan pembangunan, kurangnya pemetaan wilayah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tantangan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025-2029, kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tupoksi, kurangnya pemahaman terhadap peraturan, SDM yang masih rendah, tingginya urbanisasi, kurangnya lapangan pekerjaan di desa dan tingginya keluarga miskin.

Selain tantangan tersebut terdapat peluang diantaranya motivasi serta metode kerja yang sistematik serta peningkatan SDM aparatur,motivasi dan pemantauan trantibum, potensi ekonomi lokal yang beragam, SDA yang melimpah dan optimalisasi potensi desa.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Gondangrejo dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan BAPPERIDA.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah

alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Gondangrejo masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM

Sumber **:** *Kecamatan Gondangrejo, 2025*

3.3.1 Cascading Kinerja Kecamatan Gondangrejo

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Administratif keuangan Perangkat Daerah (PD)	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			6. Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Pengadaan Mebel
			3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			2. Pemeliharaan Mebel
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	4) Program Koordinasi Ketentraman	1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
	Dan Ketertiban Umum	dan Ketertiban Umum	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			2. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
	6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			5. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber **:** *Kecamatan Gondangrejo, 2025*

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Gondangrejo

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Gondangrejo di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrai Keuangan
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
      6). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
      3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      1). Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan

b) Penyelenggaran Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a). Koordinasi Kegiatan Pemberdyaan Desa
1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
1) Peningkatan Kapasitasi Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
4) Rekomendasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Gondangrejo

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Gondangrejo, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gondangrejo merupakan pencapaian kinerja pelayanan Gondangrejo. (lebih lengkap dilihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Gondangrejo

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang

sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Gondangrejo

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gondangrejo pada Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN GONDANGREJO KAB. KARANGANYAR TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	14	15	16	17
						Kecamatan Gondangrejo				2.389.692.867,00						2.805.900.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.389.692.867,00						2.805.900.000,00	
	7	01				KECAMATAN				2.389.692.867,00						2.805.900.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-	100 %	2.035.492.867,00					-	2.378.300.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	8 Dokumen	2.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	6.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

													ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		1.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		1.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		1.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketersediaan anggaran gaji dan tunjangan ASN	-	12 Bulan	1.855.692.867,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	1.900.000.000,00	
	7	01	01	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

				2												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		16 Orang/bulan	1.855.692.867,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		1.900.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Tahun	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kecamatan Gondangrejo	-	75.000.000,00	
	7	01	01	2.0	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										

				5													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kecamatan Gondangrejo		75.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	-	12 Bulan	28.054.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	71.300.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	2.290.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		10.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

				6												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	4.960.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		25.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	5.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		12.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	5.004.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		5.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		3.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat		12 Laporan	5.800.000,00	Kab. Karanganyar,	DANA ALOKASI	-	Kecamatan Gondangrejo		12.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

							Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Gondangrejo, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)					
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		3.300.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	-	44 Unit	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	99.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		37.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		29.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan		3 Unit	0,00	Kab.	DANA	-	Kecamatan		32.500.000,00	KECAMATAN

							dan Mesin Lainnya yang Disediakan				Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM (DAU)		Gondangrejo			GONDANGREJO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-	12 Bulan	116.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kecamatan Gondangrejo	-	124.000.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Kecamatan Gondangrejo		20.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

													milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	20.400.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kecamatan Gondangrejo		29.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		12 Laporan	93.600.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo,	DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat pembangunan sumber daya	Kecamatan Gondangrejo		75.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

							Kantor yang Disediakan				Semua Kel/Desa	(DAU)	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	-	12 Bulan	33.746.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	102.500.000,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4 Unit	28.636.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		50.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel											
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		12 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo,	DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah	Kecamatan Gondangrejo		7.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

											Semua Kel/Desa	(DAU)	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Unit	5.110.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		12.500.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		33.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	87,5 nilai	40.400.000,00					-	45.000.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	12 Bulan	40.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	45.000.000,00	

	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	39.400.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		43.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	100 %	50.800.000,00					-	57.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	12 Bulan	40.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	42.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam		10 Lembaga Kemasyarakatan	39.800.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo,	DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah	Kecamatan Gondangrejo		40.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

							Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Semua Kel/Desa	(DAU)	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	15.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		15.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	-	100 %	120.000.000,00					-	141.600.000,00	

	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	12 Bulan	120.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	141.600.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		141.600.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan tertib perda	-	100 %	67.200.000,00					-	103.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	12 Bulan	67.200.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo	-	103.000.000,00	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan		100 Orang	43.600.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo,	DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari desa dan dari bawah	Kecamatan Gondangrejo		80.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

							Bangsa				Semua Kel/Desa	(DAU)	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		40 Orang	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		21.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	-	100 %	75.800.000,00					-	81.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	-	50 Dokumen	75.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Kecamatan Gondangrejo	-	81.000.000,00	

													pemberantasan kemiskinan.				
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		10 Dokumen	71.800.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kecamatan Gondangrejo		73.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											
							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Gondangrejo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Kecamatan Gondangrejo		2.000.000,00	KECAMATAN GONDANGREJO

	J U M L A H	**2.389.692.867,00**		**2.805.900.000,00**	

Tabel 4.2. Target IKU Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	CAPAIAN 2025	TARGET 2026
1	Nilai IKM	Nilai	92,25	92,26	92,28

4.5 Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Program yang dilaksanakan kecamatan merupakan program yang mendukung penyelenggaraan pelayanan di tingkat Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan Kecamatan Gondangrejo yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No	Program Prioritas Kabupaten	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.	1.000.000
2.	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air	Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub kegiatan : Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	43.600.000

No	Program Prioritas Kabupaten	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Gondangrejo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Gondangrejo .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Gondangrejo secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga

dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Karanganyar, September 2025

Plt. CAMAT MOJOGEDANG

JOKO SUTRISNO, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19680305 199003 1 010

DAFTAR ISI

			HAL
HALAMAN JUDUL			**i**
KATA PENGANTAR			**ii**
DAFTAR ISI			**iii**
DAFTAR TABEL			**iv**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I.1**
	1.1	Latar Belakang	I.1
	1.2	Landasan Hukum	I.2
	1.3	Maksud dan Tujuan	I.3
	1.4	Sistematika Penulisan	I.3
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**		**II.1**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun Lalu dan Capaian Renstra	II.1
	2.1.1	Evaluasi Anggaran	II.2
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang	II.17
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang	II.20
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II.24
	2.5	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II.29
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN**		**III.1**
	3.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	III.1
	3.1.1	Telaah terhadap Kebijakan Nasional	III.1
	3.1.2	Telaah terhadap Kebijakan Propinsi	III.1
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja	III.3
	3.2.1	Tujuan dan Sasaran Daerah	III.3
	3.2.2	Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mojogedang	III.5
	3.3.	Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	III.6
	3.3.1	Tantangan	III.6
	3.3.2	Peluang	III.6
	3.4.	Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD	III.7
	3.4.1 .	Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD	III.7
	3.4.2	Cascading Kinerja Perangkat Daerah	III.7
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOGEDANG**		**IV.1**
	4.1	Program dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang	IV.1
	4.2	Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang	IV.3
	4.3	Data Indidkatif Kecamatan Mojogedang	IV.3
	4.4	Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Mojogedang	IV.3
BAB V	**PENUTUP**		**V.1**
	5.1.	Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	V.1
	5.2.	Kaidah Pelaksanaan	V.1
	5.3.	Rencana Tindak Lanjut	V.1

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 2.1	Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Mojogedang	II-2
Tabel 2.2	Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (TW II)..	II-3
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024.....	II-8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mojogedang s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar.....	II-9
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024 – 2025 Kecamatan Mojogedang.....	II-18
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.....	II-19
Tabel 2.7	Tabel Permasalahan dan Akar Masalah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar...	II-20
Tabel 2.8	Rumusan Isu Strategis Kecamatan Mojogedang.....	II-23
Tabel 2.9	Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Mojogedang Kabupaten.....	II.25
Tabel 2.10	Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar.....	II-29
Tabel 3.1	Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026).....	III.6
Tabel 3.2	Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD.....	IV.7
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	IV.7
Tabel 4.1	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV.4
Tabel 4.2	Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tahun 2026.....	IV.19
Tabel 4.3	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.....	IV.19

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Mojogedang untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

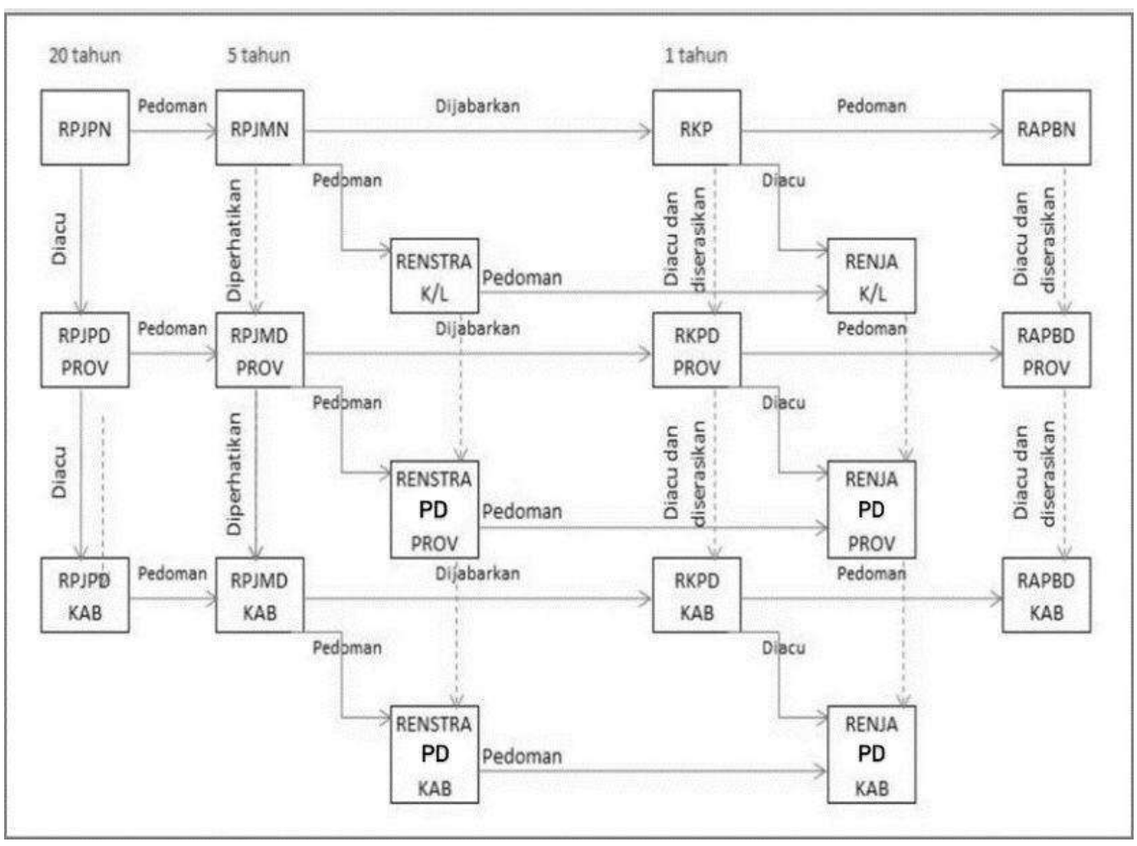

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun 2026 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Mojogedang, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Mojogedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Mojogedang, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Mojogedang tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mojogedang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOGEDANG

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MOJOGEDANG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mojogedang

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Mojogedang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Mojogedang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja Kecamatan Mojogedang untuk Tahun Anggaran 2024 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.323.879.483,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 2.264.466.983,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapn puluh tiga rupiah), dan belanja modal sebesar 59.412.500,00 (Lima puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Dari total anggaran baik belanja operasi maupun belanja modal terealisasi sebesar 2.169.672.156,00 (Dua milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 93,36%, sisa anggaran Rp. 154.207.327,00 (Seratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 6,63%, untuk belanja operasi terealisasi sebesar 2.114.022.156,00 (Dua milyar seratus empat belas juta dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 93,36% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 150.444.827,00 (Seratus lima puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 6,64%., sedangkan untuk belanja modal terealisasi sebesar 55.650.000,00 (Lima puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar 93,67% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar 3.762.500,00 (Tiga juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 6,33%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk

melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.196.629.483,00 dan terealisasi Rp. 2.043.330.456,00 (93,02%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.000.000,00 dan terealisasi Rp. 2.000.000,00 (100,00%).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp. 17.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.795.000,00 (99,97%).

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 34.625.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.625.000,00 (100%).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 54.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 53.250.000,00 (98,61%).

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp18.825.000,00 terealisasi sebesar Rp. 18.674.700,00 (99,20%).

Dari hasil evaluasi diatas dapat diketahui kegiatan yang melampaui, sesuai maupun yang kurang dari target. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk bahan perencanaan di tahun berikutnya agar lebih baik dari tahun lalu dan berkesinambungan.

2.1.1.Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Mojogedang telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Mojogedang

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.196.629.483**	**2.196.629.483**	**100,00**	**1.734.678.552**	**2.342.108.552**	**135,02**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.900.000**	**3.900.000**	**100,00**	**3.936.600**	**10.316.600**	**262,07**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	100,00	1.436.600	7.816.600	544,10

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	100,00
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.492.689.083**	**1.492.689.083**	**100,00**	**1.477.689.552**	**1.655.189.552**	**112,01**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.492.689.083	1.492.689.083	100,00	1.477.689.552	1.655.189.552	112,01
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.900.000**	**25.900.000**	**100,00**	**25.900.000**	**25.900.000**	**100,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000	25.900.000	100,00	25.900.000	25.900.000	100,00
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**73.494.000**	**89.444.000**	**121,70**	**40.477.400**	**36.587.400**	**90,39**
	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.500.000	100,00	1.998.000	1.998.000	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.333.400	24.283.400	291,40	8.343.550	8.343.550	100,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	9.900.000	9.900.000	100,00	9.892.500	6.292.500	63,61
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	5.070.600	5.070.600	100,00	4.000.000	3.710.000	92,75
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100,00	1.920.000	1.920.000	100,00
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.850.000	39.850.000	100,00	13.260.000	13.260.000	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00	1.063.350	1.063.350	100,00
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.362.500**	**59.412.500**	**78,84**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100,00**
	Pengadaan Mebel	6.250.000	6.250.000	100,00	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	53.162.500	53.162.500	100,00	-	-	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.950.000		-			
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	-		-	100.000.000	100.000.000	100,00
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**484.720.000**	**484.720.000**	**100,00**	**58.800.000**	**486.240.000**	**826,94**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	22.800.000	22.800.000	100,00	22.800.000	26.400.000	115,79
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.920.000	461.920.000	100,00	36.000.000	459.840.000	######
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.563.900**	**40.563.900**	**100,00**	**27.875.000**	**27.875.000**	**100,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	36.488.900	36.488.900	100,00	25.000.000	25.000.000	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	4.075.000	4.075.000	100,00	1.875.000	1.875.000	100,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000	1.000.000	100,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,00**	**100.589.500**	**1.949.500**	1,94
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,00**	**100.589.500**	**1.949.500**	**1,94**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	1.000.000	100,00
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00	99.589.500	949.500	0,95

III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**17.800.000**	**17.800.000**	**100,00**	**118.820.250**	**16.730.250**	14,08
9	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**9.000.000**	**9.000.000**	**100,00**	**110.570.250**	**8.480.250**	**7,67**
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000	7.000.000	100,00	7.000.000	7.000.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100,00	103.570.250	1.480.250	1,43
10	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**8.800.000**	**8.800.000**	**100,00**	**8.250.000**	**8.250.000**	**100,00**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	8.800.000	100,00	8.250.000	8.250.000	100,00
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**34.625.000**	**34.625.000**	**100,00**	**58.800.000**	**25.200.000**	42,86
11	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**34.625.000**	**34.625.000**	**100,00**	**58.800.000**	**25.200.000**	**42,86**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.625.000	34.625.000	100,00	58.800.000	25.200.000	42,86
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**54.000.000**	**54.000.000**	**100,00**	**131.771.500**	**39.371.500**	29,88
12	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**54.000.000**	**54.000.000**	**100,00**	**131.771.500**	**39.371.500**	**29,88**
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000	50.000.000	100,00	44.323.250	37.123.250	83,76
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	4.000.000	4.000.000	100,00	87.448.250	2.248.250	2,57
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**18.825.000**	**18.825.000**	**100,00**	**115.631.650**	**12.431.650**	10,75
13	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**18.825.000**	**18.825.000**	**100,00**	**115.631.650**	**12.431.650**	**10,75**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.950.000	4.950.000	100,00	2.030.000	2.030.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.950.000	4.950.000	100,00	105.270.100	2.270.000	2,16
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.600.000	5.600.000	100,00	1.925.000	1.925.000	100,00
	Fasilitai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkakt Desa	1.600.000	1.600.000	100,00	1.800.000	1.600.000	88,89
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.725.000	1.725.000	100,00	2.881.550	2.881.650	100,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-		1.725.000	1.725.000	100,00
	J U M L A H	2.323.879.483	2.323.879.483	100,00	2.260.291.452	2.437.791.452	107,85

Besar kecilnya input dana setiap subkegiatan, akan mempengaruhi keluaran dari setiap subkegiatan. Pemenuhan alokasi dana di Kecamatan Mojogedang untuk Tahun 2024 diketahui sebesar 100,00%, sedangkan untuk Tahun 2025 adalah sebesar 107,85%. Selama 2 tahun ini alokasi anggaran rencana kerja Kecamatan Mojogedang terpenuhi lebih dari 100%.

Pada awal Tahun 2025, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 dan SE Mendagri Nomor 900/833/Sj tentang Penyesuaian pendapatan dan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi APBD Tahun 2025 dan berkurangnya APBD karena pengurangan DAU dan pembatalan kegiatan DAK fisik. Kecamatan Mojogedang kemudian melaksanakan perintah tersebut dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas 50%, penyediaan ATK, makan minum, barang cetak, dll sebesar 20%.

Hal ini berdampak pada alokasi anggaran di Kecamatan Mojogedang yang semula terpenuhi sejumlah Rp. 2.437.791.452,00 atau 107,85% harus berkurang sebesar Rp. 2.406.595.452,00 sehingga pagu anggaran Kecamatan Mojogedang tahun 2025 adalah Rp. 31.196.000,00 atau 98,72% dari rencana kerja tahun 2025.

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang sudah menggunakan anggaran yang sudah dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi APBD di Kecamatan Mojogedang Tahun 2024 dan 2025
(TW II)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.196.629.483**	**2.043.330.456**	**93,02**	**2.322.571.052**	**1.161.938.228**	**50,03**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.900.000**	**3.865.000**	**99,10**	**6.574.150**	**575.000**	**8,75**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.400.000	1.400.000	100,00	5.080.900	300000	5,90
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	2.465.000	98,60	1.493.250	275000	18,42
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.492.689.083**	**1.353.921.136**	**90,70**	**1.655.189.552**	**837.210.799**	**50,58**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.492.689.083	1.353.921.136	90,70	1.655.189.552	837210799	50,58
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**25.900.000**	**25.530.000**	**98,57**	**12.600.000**	**-**	**-**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.900.000	25.530.000	98,57	12.600.000	0	-
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**89.444.000**	**87.648.800**	**97,99**	**34.092.350**	**8.700.000**	**25,52**

	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.500.000	100,00	1.998.000	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.283.400	22.688.400	93,43	7.532.650	0	-
	Penyediaan bahan logistik kantor	9.900.000	9.900.000	100,00	6.292.500	0	-
	Penyedian barang cetak dan penggandaan	5.070.600	5.070.400	100,00	3.113.200	0	-
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3.840.000	3.840.000	100,00	1.920.000	960000	50,00
	Penyeleggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	39.850.000	39.650.000	99,50	12.390.000	7740000	62,47
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.000.000	1.000.000	100,00	846.000	0	-
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.412.500**	**55.650.000**	**93,67**	**100.000.000**	**98.169.700**	**98,17**
	Pengadaan Mebel	6.250.000	6.250.000	100,00	-	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	53.162.500	49.400.000	92,92	-	0	
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya			-	100.000.000	98169700	98,17
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**484.720.000**	**476.628.020**	**98,33**	**486.240.000**	**204.083.729**	**41,97**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	22.800.000	20.308.020	89,07	26.400.000	12483729	47,29
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.920.000	456.320.000	98,79	459.840.000	191600000	41,67
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.563.900**	**40.087.500**	**98,83**	**27.875.000**	**13.199.000**	**47,35**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	36.488.900	36.012.500	98,69	25.000.000	12649000	50,60
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	4.075.000	4.075.000	100,00	1.875.000	0	-
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000	550000	55,00
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,00**	**1.304.100**	**-**	-
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**2.000.000**	**2.000.000**	**100,00**	**1.304.100**	**-**	**-**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00	804.600	0	-
	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	1.000.000	1.000.000	100,00	499.500	0	-
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**17.800.000**	**17.795.000**	**99,97**	**13.257.450**	**5.600.000**	42,24
9	**Koordinasi Pemberdayaan Desa**	**9.000.000**	**8.995.000**	**99,94**	**7.069.050**	**5.600.000**	**79,22**

	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.000.000	6.995.000	99,93	6.305.700	5600000	88,81
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100,00	763.350	0	-
10	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**8.800.000**	**8.800.000**	**100,00**	**6.188.400**	**-**	**-**
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	8.800.000	8.800.000	100,00	6.188.400	0	-
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**34.625.000**	**34.625.000**	**100,00**	**25.200.000**	**10.800.000**	42,86
11	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**34.625.000**	**34.625.000**	**100,00**	**25.200.000**	**10.800.000**	**42,86**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.625.000	34.625.000	100,00	25.200.000	10800000	42,86
V	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**54.000.000**	**53.250.000**	**98,61**	**37.796.500**	**-**	-
12	**Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**54.000.000**	**53.250.000**	**98,61**	**37.796.500**	**-**	**-**
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000	49.250.000	98,50	37.123.250	0	-
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,ras dan Golongan Lainya Guna Mewujudkan stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional	4.000.000	4.000.000	100,00	673.250	0	-
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**18.825.000**	**18.674.700**	**99,20**	**6.466.350**	**695.000**	10,75
13	**Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**18.825.000**	**18.674.700**	**99,20**	**6.466.350**	**695.000**	**10,75**
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.950.000	4.895.000	98,89	1.351.950	0	-
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.950.000	4.900.000	98,99	1.094.450	75000	6,85
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.600.000	5.600.000	100,00	975.000	0	-
	Fasilitai Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkakt Desa	1.600.000	1.574.700	98,42	698.850	0	-
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.725.000	1.705.000	98,84	621.100	0	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-		1.725.000	620000	35,94
	J U M L A H	2.323.879.483	2.169.675.156	93,36	2.406.595.452	1.179.033.228	48,99

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.323.879.483,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 2.169.675.156,00 atau **93,36 %,** lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 95,34%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025

adalah Rp. 1.179.033.228,00 atau 48,36% dari pagu anggaran Rp. 2.437.791.452,00 namun jika dihitung berdasarkan pagu efisiensi yang sebesar Rp. 8.2.406.595.452,00 maka persentase realisasi adalah 48,99%.

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2023			2024		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.426.889.214	2.298.306.085	94,70	2.196.629.483	2.043.330.456	93,02
2	Program Penhyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.400.000	7.380.000	99,73	2.000.000	2.000.000	100,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	251.478.500	250.158.500	99,48	17.800.000	17.795.000	99,97
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.500.000	34.500.000	100,00	34.625.000	34.625.000	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	55.500.000	55.230.000	99,51	54.000.000	53.250.000	98,61
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.900.000	19.760.000	99,30	18.825.000	18.674.700	99,20
	Rata-rata realisasi 6 program			98,79			98,47

Serapan anggaran selama 2 tahun belum semua program mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Mojogedang perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Kecamatan Mojogedang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mojogedang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama

- Meningkatnya tertib pelaporan PD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Mojogedang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:
   - Masih cukup banyak penduduk miskin
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
   - Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
   - Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang:
   - Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
   - Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
   - Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
   - Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
   - Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
   - Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
   - Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
   - Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut :

Tabel 2.4.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Mojogedang dan Pencapaian Renstra Kecamatan Mojogedang s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mojogedang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	5	100	5	5	100
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	15	9	60

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	10	12	10	10	100	13	13	100
7.01.01.2.05	**Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3+	0	37	100	100	30	0	0
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.03.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistic Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24	24	24	24	100	24	12	50
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	8	0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7	2	2	2	100	3	0	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	1	1	100	1	1	**100**

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	48	48	48	100	48	24	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	50
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	5	5	5	100	5	4	80
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	4	4	100	6	3	50
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	0	1	0	0

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**84,00**	**86,58**	**84**	**86,625**	**103,125**	**84,5**	**0**	**0**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	2	2	2	100	2	1	50
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosetase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7	7	7	7	100	7	7	100

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	**50**
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	12	12	100	12	6	50
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50**
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	60	75	60	60	100	60	60	100
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	60	60	60	100	25	0	0
7.01.06	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Yang Sesuai Ketentuan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13	13	13	13	100	13	13	100

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13	13	13	13	100	13	13	100
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3	3	3	3	100	5	5	100

Tabel 2.5.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 – 2025 (semester I)
Kecamatan Mojogedang

No.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Th 2024	Th 2025	Th 2024	Th 2025 Semester I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	72,3	72,30	72,30	
2	Indek Desa Membangun	Skor	0,78	0,79	0,770	0,770	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	%	100	Na	100	Na	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	84,84	86,63	86,63	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	98	100	100	100	
6	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	98	100	100	100	
7	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang Terlaksana	%	100	100	100	100	
8	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	

Tabel 2.6.

Pencapaian Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Tahun 2024 – 2025

Kecamatan Mojogedang

TUJUAN OPD	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET		REALISASI	
					2024	2025	2024	2025 (smt I)
1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,00	tidak dipakai	85,74	tidak dipakai
	1 Meningkatkan kualitas tata laksana Pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	72,00	tidak dipakai	72,30	tidak dipakai
2 Meningkatkan Pememrataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial			Angka Kemiskinan	Nlai	8,52	tidak dipakai	9,59	tidak dipakai
	2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,78	tidak dipakai	0,763	tidak dipakai
3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Persentase Standart Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	tidak dipakai	97,50	tidak dipakai	100,00
	3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	tidak dipakai	84,84	tidak dipakai	86,65
		1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	tidak dipakai	100	tidak dipakai
			Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan yang sudah ditetapkan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,00	tidak dipakai	86,63	tidak dipakai
			Persentase pelayanan sesuai standart pelayanan yang sudah ditetapkan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100
		4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	100
		5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan	%	100	tidak dipakai	100	tidak dipakai
			Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	tidak dipakai	100	tidak dipakai	100
		6 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/ kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan**
   belum optimalnya Pemerataan beban kerja, ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan, kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan, ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
2. **Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik**
   Kecamatan belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sesuai dengan standarnya, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.
3. **Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**
   Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah. Belum optimalnya dukungan kelembagaan pada desa dalam mendukung program prioritas daerah
4. **Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat**
   Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan.

Tabel 2.7.
Tabel Permasalahan dan Akar Masalah
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan
			b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan
			c. Sistem informasi pelayanan belum terintegrasi atau masih manual.

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
			d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
			e. Belum ada standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan secara konsisten
		Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik	a. Belum adanya sistem tata kelola pelayanan publik yang berbasis standar secara menyeluruh, mencakup aspek regulasi, kapasitas SDM, sistem pengawasan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penerapan standar pelayanan belum menjadi budaya kerja yang konsisten di seluruh unit pelayanan.
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal
			b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM
			b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan
			c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif, Kecamatan Mojogedang dihadapkan pada berbagai tantangan strategis yang perlu segera diidentifikasi dan dikelola. Isu-isu strategis ini mencerminkan kondisi aktual yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara keseluruhan. Dengan memahami isu-isu tersebut secara komprehensif, Kecamatan Mojogedang dapat

merumuskan langkah-langkah kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran, berorientasi pada perbaikan kualitas pelayanan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan desa.

Analisis terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam merancang program kerja dan inovasi ke depan, guna mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang transparan, dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Tabel 2.8.
Rumusan Isu Strategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
• Peningkatan Pelayanan Publik melalui pelayanan menyeluruh sektor kewilayahan • Keterhubungan antara masyarakat dan pemerintah yang merata terkait dengan proses administrasi	• Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan • Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik • Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa • Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat	Daya Saing Ekonomi dan Kemiskinan	Ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, degradasi ekosistem lintas batas, dan dampak perubahan iklim yang tidak merata telah menjadikan kewilayahan sebagai dimensi krusial dalam isu lingkungan global, menuntut tata ruang yang adaptif, kolaboratif, dan berkeadilan.	Peningkatan lingkungan yang dinamis dan relevan di tingkat kecamatan serta integrasi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya berbasis daya dukung lokal.	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan dan desa

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan adalah **Belum optimalnya kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat baik di tingkat kecamatan dan desa.** Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Jumlah dan kompetensi aparatur yang belum memadai serta belum merata di setiap unit kerja.
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang dalam mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan desa.
3. Penerapan standar pelayanan publik dan SOP yang belum berjalan konsisten.
4. Dukungan kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat belum optimal.
5. Sinkronisasi pembangunan desa dengan target pembangunan daerah belum optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Mojogedang dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mojogedang dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas prgram dan kegiatan, indikator kinerja prgram/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Mojogedang

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program kegitan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut obyek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Mojogedang.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.7

Tabel 2.9.
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecamatan				**2.592.029.584**	**Kecamatan**				**2.701.724.325**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec.Mojogedang**	**Nilai SAKIP**	**72,35**	**2.460.949.784**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec.Mojogedang**	**Nilai SAKIP**	**72,35**	**2.469.756.444**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	13.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100	1.185.130.009	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100	1.867.636.444	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Darah	Kec. Mojogedang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	0	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Darah	Kec. Mojogedang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sesuai Ketentuan	100	25.200.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	`	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	45.080.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100	48.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	0	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	34.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	457.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	457.920.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	30.090.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Mojogedang	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100	32.000.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec.Mojogedang**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**700.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec.Mojogedang**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100**	**3.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Mojogedang	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	700.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Mojogedang	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12	3.000.000	

3	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec.Mojogedang**	**Prosentase lemabaga Kemamsyarakatn Aktif**	**100**	**13.620.000**	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	**Kec.Mojogedang**	**Prosentase lemabaga Kemamsyarakatn Aktif**	**100**	**16.500.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mojogedang	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13	13.200.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Mojogedang	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13	16.500.000	
4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kec.Mojogedang**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**2.240.000**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**Kec.Mojogedang**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**2.500.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Mojogedang	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13	2.240.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Mojogedang	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13	2.500.000	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec.Mojogedang**	**persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**43.450.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec.Mojogedang**	**persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**62.600.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Mojogedang	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	43.450.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Mojogedang	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4	62.600.000	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Mojogedang	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100	**10.900.000**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	Kec.Mojogedang	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	100	**15.000.000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Mojogedang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	10.900.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Mojogedang	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	15.000.000	

2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Mojogedang. Namun dalam proses ini Kecamatan Mojogedang mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Mojogedang terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Mojogedang.

Tabel 2.10.
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mojogedang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;

4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam lima tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;

15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mojogedang

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Mojogedang adalah

TABEL 3. 1
Tujuan - Sasaran - Indikator Sasaran dan Program
(Target Tahun 2026)

No.	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	98,00
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai	85
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	100
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahn Umum	persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan	Persen	100
8	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1. Tantangan

1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2. Peluang

1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Mojogedang untuk meningkatkan kinerja.
3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan. mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Mojogedang mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Mojogedang dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lelbih terinci dalam indikator Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Mojogedang.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Mojogedang masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOJOGEDANG

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Mojogedang

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 dan Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan sub kegiatan
    a) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakt di Wilayah Kecamatan

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini difokuskan pada menjaga stabilitas sosial dan menciptakan ketenteraman serta ketertiban di masyarakat melalui koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    a) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum untuk mendukung kelancaran administrasi

dan pelayanan publik yang optimal. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
    a) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
    b) Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
    c) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
    a) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    b) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
    d) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    e) Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
    f) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada penyediaan fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk tugas-tugas pemerintah daerah. Dalam rangka mencapai Program diatas berikut ini kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b) Evaluasi Kinerja Peerangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Pengadaan Mebel
   c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Pemeliharaan Mebel
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang merupakan pencapaian kinerja pelayanan Mojogedang. (lebih lengkap dilihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Mojogedang

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Mojogedang

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

TABEL 4.1.
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Kecamatan Mojogedang						1.791.130.009,00							2.573.965.484,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.791.130.009,00							2.573.965.484,00	
	07:01	KECAMATAN						1.791.130.009,00							2.573.965.484,00	
1	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	72,55 Nilai	72,30 Nilai	72,30 Nilai	72,35 Nilai	1.720.220.009,00						72,40 Nilai	2.442.449.784,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100 %	2.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	100%	13.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	6 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	3 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	15 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan/Dokumen Keuangan tersusun	100%	100%	100%	100 %	1.185.130.009,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	100 %	1.502.649.784,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	10 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	1.185.130.009,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	14 Orang/Bulan	1.502.649.784,00	KECAMATAN MOJOGEDANG

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Admkinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	0%	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	100%	25.900.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37 Orang	37 Orang	30 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	37 Orang	25.900.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	45.080.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	100%	109.400.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.000.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas	Kecamatan Mojogedang	12 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG

												lingkungan hidup				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.809.500,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Paket	18.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	5.335.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Paket	16.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.574.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG

	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	24.450.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	991.500,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	0%	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam	Kecamatan Mojogedang	100 %	166.500.000,00	

												tata kelola pemerintahan				
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Mojogedang	0 Unit	0,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	8 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	3 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	4 Unit	51.500.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG

	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Mojogedang	1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	457.920.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	100%	530.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	32.400.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	48 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	425.520.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas	Kecamatan Mojogedang	12 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG

											pemberantasan kemiskinan.	lingkungan hidup				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	30.090.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	100 %	95.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	28.020.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	5 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	5 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10 Unit	6 Unit	6 Unit	2.070.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	6 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
2	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	Na	100%	100 %	700.000,00						100%	6.362.300,00	
	7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	Na	12 Kegiatan	12 Kegiatan	700.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Kegiatan	6.362.300,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	700.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Laporan	6.362.300,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
3	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	13.620.000,00						100 %	18.846.400,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga masyarakat kelurahan yang dibina	13 Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	13.620.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	13 Lembaga	18.846.400,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	6.120.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	7 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	12 Laporan	11.846.400,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
4	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	100 %	100 %	100 %	100 %	2.240.000,00						100 %	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	13 Wilayah	13 Wilayah	13 Wilayah	13 Wilayah	2.240.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	13 Wilayah	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2.240.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	2 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
5	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	100 %	100 %	100 %	100 %	43.450.000,00						100 %	80.807.000,00	

	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	43.450.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Mojogedang	4 Kegiatan	80.807.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	0 Orang	0 Orang	70 Orang	20.550.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Mojogedang	200 Orang	54.600.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	1.300.000,00	Kab. Karanganyar , Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	60 Orang	4.607.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar , Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Kecamatan Mojogedang	12 Dokumen	21.600.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
6	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang Sesuai Ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	10.900.000,00						100 %	19.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	10.900.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	100 %	19.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													

			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	13 Dokumen	13 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	13 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	13 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas	Kecamatan Mojogedang	13 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG

										pemberantasan kemiskinan.	lingkungan hidup				
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	9 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Karanganyar, Mojogedang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Mojogedang	2 Dokumen	23.000.000,00	KECAMATAN MOJOGEDANG
	JUMLAH							1.791.130.009,01							2.573.965.844,00	

Tabel 4.2.

Target Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mojogedang Tahun 2026

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian	Target
		2025	2026
Nilai IKM	Nilai	86,5	85,00

Tabel 4.3.

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**Program :** Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 700.000,00
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 43.450.000,00

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Daerah Tahun 2025 - 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Mojogedang harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mojogedang Tahun 2026

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi

yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Mojogedang Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
KATA PENGANTAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang..... I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan..... I-3
1.4 Sistematika Penulisan..... I-3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Perangkat Daerah..... II-1
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... .II-16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah..... III-4
3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan III-6
3.4 Tantangan dan Peluang..... III-7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN..... IV-1
BAB V PENUTUP..... V-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Kebakkramat tahun 2026	II-1
Tabel	2.2	Kesesuaian antara KPD dan Renja Kecamatan Kebakkramat tahun 2026	II-10
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026	II-15
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran 2025	II-18
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja(Capaian indicator) 2025	II-10
Tabel	3.1	Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Kebakkramat tahun 2026	III-1
Tabel	3.2	Program,Kegiatan, subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2026	III-3
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2026	III-7

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-OPD Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Kebakkramat, September 2025
CAMAT KEBAKKRAMAT

JOKO SUTRISNO, SH.,MM
Pembina Tkt I
NIP. 19680305199003 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Kebakkramat untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.
Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

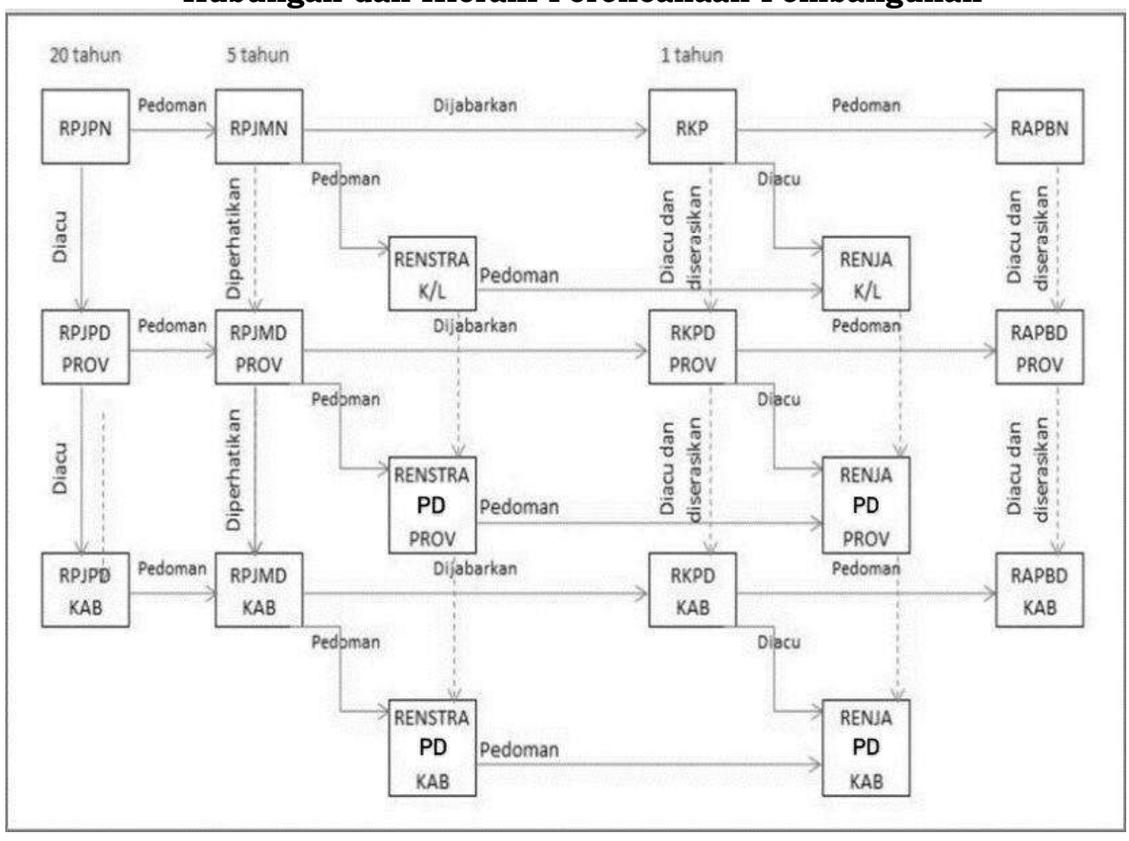

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang–undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah ;
2. Menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kebakkramat ;
2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Kebakkramat ;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPJMD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Kebakkramat, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Kebakkramat tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kebakkramat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024-2026

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kelima dari Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Perumusan Renja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2023.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2025 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Rincian pencapaian kinerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 120.247.010 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 119.962.200,00 atau 99% dan realisasi fisik 99% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor setiap bulannya dengan lancar dan tertib.
b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
g. Penata Usaahan Arsip Dinamis SKPD

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 21.300.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.300.000 atau 92% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan Mesin Lainya

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 146.400.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.700.000 atau 94,9% dan realisasi fisik 94,9% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Peyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor.

4. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 55.895.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.895.000 0 atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

5. Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 102,000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal diwilayah Kecamatan..

6. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.245.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.245.0atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamForum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

7. Koordinasi Upaya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran sebesar Rp. 116.730.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 116.630.000,00 atau 99% dan realisasi fisik 99% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Sinergritas Dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

8. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Alokasi anggaran sebesar Rp. 110.075.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109.000.000,00 atau 90% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2024 pada Tahun 2024-2025 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini

Tabel 2.1.
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025
di Kecamatan Kebakkramat

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN	**2.380.332.792**	**2.432,772.170**	80%	**2.446.923.519**	**2.666.923.519**	**97 %**
	KECAMATAN	**2.380.332.792**	**2.432.772.170**	80%	**2.446.923.519**	**2.666.923.519**	100 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.879.467.792**	**2.348.818.645**	80%	**2.009.191.519**	**2.166.255.119**	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.499.901.392**	**1.521.140.770**	80%	1.641.492.119	**1.691.492.119**	90 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.495.901.392	1,517.140.770	80%	1.637.492.119	1.687.492.119	100 %
	Pentyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.0000	4,000,000	100%	4.000.000	4.000.000	**85,3**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**231.071.400**	**120.247.010**	80%	**150.604.400**	**219.518.900**	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.935.700	37.869.000	100%	20.014.900	21.370.400,00	**100 %**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.482.000	19.982.000	100%	15.057.500	1.579.600	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.782.150	1.782.150	100%	1.279.600	15.437.500	**100 %**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.537.550	19.538.650	100%	15.478.800	15.482.800	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	6.920.000	100%	1.920.000	1.920.000	**100 %**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.415.000	143.013.000	100%	95.357.000	162.232.000	100 %
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	999.000	2.931.600	100%	1.496.600	1.496.600	**100%**

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN	**2.380.332.792**	**2.432,772.170**	80%	**2.446.923.519**	**2.666.923.519**	**97 %**
	KECAMATAN	**2.380.332.792**	**2.432.772.170**	80%	**2.446.923.519**	**2.666.923.519**	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**18.800.000**	**21.300.000**	80%	**18.500.000**	**40.700.000**	100 %
	Pengadaan Mebeler	0	0	0	10.500.000	40.700.000	**97 %**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.800.000	21.300.000	90%	8.000.000	0	100 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0		**156.360.000**	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**81.600.000**	**146.400.000**	90%	**145.560.000**	53.400.000	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	43.200.000	100%	42.600.000	102.960.000	90 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000	103.200.000	100%	102.960.000	**58.184.100**	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**48.095.000**	**55.895.000**	95%	53.035.000	35.695.000	**85,3**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.895.000	40.695.000	95%	30.515.000	13.000.000	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	12.200.000	100%	12.520.000	9.489.100	**100 %**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100%	10.000.000	**101.923.400**	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**118.440.000**	**102.120.000**	**100%**	**102.207.000**	**101.923.400**	**100 %**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	118.440.000	102.120.000	100%	102.207.000	101.923.400	100 %
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	118.440.000	102.120.000	100%	102.207.000	**50.555.000**	**100 %**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**32.070.000**	**22.245.000**		**24.745.000**	50.555.000	100 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**32.070.000**	**22.245.000**	90%	24.745.000	30.555.000	**100%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.070.000	12.245.000	90%	12.245.000	20.000.000	100 %
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	100 %	12.500.000	**109.320.000**	**97 %**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**148.910.000**	**116.730.000**	**100 %**	**110.680.000**	109.320.000	100 %
	Koordinasi Upaya	**148.910.000**	116.730.000	100	110.680.000	109.320.000	100 %

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN	**2.380.332.792**	**2.432,772.170**	80%	**2.446.923.519**	**2.666.923.519**	**97 %**
	KECAMATAN	**2.380.332.792**	**2.432.772.170**	80%	**2.446.923.519**	**2.666.923.519**	100 %
	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			%			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	148.910.000	116.730.000	**100%**	**110.680.000**	**133.440.000**	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**154.820.000**	**104.830.000**	100 %	**100.050.000**	133.440.000	90 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**154.820.000**	104.830.000	**97 %**	100.050.000	133.440.000	**97 %**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	154.820.000	104.830.000	100 %	100.050.000	**105.430.000**	100 %
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**46.625.000**	**110.075.000**	100 %	**100.050.000**	105.430.000	100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**46.625.000**	110.075.000	100 %	100.050.000	105.430.000	100 %
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.625.000	110.075.000	90 %	100.050.000	105.430.000	90 %

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Realisasi APBD di Kecamatan Kebakkramat Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.476.271.395**	**319.582.363**		**2.666.923.519**	506.048.182	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.521.140.770**		21%	**2.166.255.119**		20%
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.517.140.770	111.805.026	21%	**1.687.492.119**	178.877.705	20%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.000.000	75.000	33%	**4.000.000**	510.200	13%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**120.247.010**		16%	**219.518.900**	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.869.000	6.151.100	16%	21.370.400,00	2.870.900	18%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.982.000	3.237.900	26%	1.579.600	2.795.000	17%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.782.150	455.900	16%	15.437.500	0	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.538.650	2.168.600	16%	15.482.800	2.190.400	14 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.920.000	320.000	7%	1.920.000	480.000	10%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.013.000	6.163.000	7%	162.232.000	2.500.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.931.600	488.600	7%	1.496.600	0	0
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**21.300.000**	0	0	**40.700.000**		0
	Pengadaan Mebeler		0	0	40.700.000	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.300.000	0	0	0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0		0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**146.400.000**			**156.360.000**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	3.136.110	23%	53.400.000	5.450.310	10%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.200.000	8.560.000	23%	102.960.000	17.120.000	12%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**55.895.000**			**58.184.100**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.695.000	5.5264.000		35.695.000	3.610.000	10%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.200.000	2.400.000		13.000.000	1.420.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000	0		9.489.100	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**102.120.000**	8.649.250	10%	**101.923.400**	17.065.900	20%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	102.120.000	8.649.250	10%	**101.923.400**	17.065.900	20%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	102.120.000	8.649.250	10%	101.923.400	17.065.900	20%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**22.245.000**	0		**50.555.000**		33%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**22.245.000**	0		50.555.000		12%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	12.245.000	0		30.555.000	5.155.000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 TW II		
		APBD	REALISASI	%	APBD	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pembangunan di Desa						
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000	0		20.000.000	2.500.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**116.730.000**	9.000.000	23%	**109.320.000**	18.000.000	25%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	116.730.000	9.000.000	23%	109.320.000	18.000.000	25%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	116.730.000	9.000.000	23%	109.320.000	18.000.000	25%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**104.830.000**	8.500.000	13%	**133.440.000**	8.350.000	9%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	104.830.000	8.500.000	13%	133.440.000	8.350.000	9%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	104.830.000	8.500.000	13%	133.440.000	8.350.000	9%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**110.075.000**	12.416.000	18%	**105.430.000**	11.296.000	16%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	110.075.000	12.416.000	18%	105.430.000	11.296.000	16%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	110.075.000	12.416.000	18%	105.430.000	11.296.000	16%

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.476.271.395 dengan Realisasi capaian sebesar Rp. 319.582.363 atau 17,46 %, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 11,00%. Sedangkan capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 506.048.182 atau 19,01% dari pagu anggaran Rp. 2.666.923.519

Tabel. 2.3

Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.378.117.238	2.132.560.753	93%	2.267.817.228	2.246..790.022	97%
2	Program Penyelenggaraan Pdemerintahan dan Pelayanan Publik	3.000.000	3.000.000	100%	102.120.000	102.120.00	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	191.670.000.	190.997.500	100%	39.780.000	39.780.000	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	219.200.000	217.920.000	100%	116.730.000	113.900.000	98%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.805.000	89.575.000	100%	113.580.000	111.525.000	98%
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.285.000	14.669.000	98%	97.745.000	95.728.000	98%
	Persentase realisasi	**2.808.272.238**	**2.648.722.253**	**91,33%**	2.737.772.228	2.6263.687.822	98,33%
	Rata-rata realisasi 6 program						

TABEL 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat dan Pencapaian Renstra Kecamatan Kebakkramat s/d Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025 TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) TW 1
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11)
	KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN KEBAKKRAMAT									
	KECAMATAN	**NILAI SAKIP**	71	70	71	70				
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**70**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN		**70**	-	**100**	1Tahun	93	12 Laporan	3 Laporan	**21**
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		**70**	-	100	1Tahun	100	12 Laporan	3 Laporan	**33**
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		70	100	100	1Tahun	97	12 Laporan	3 Laporan	**16**
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga		**70**	100	100	1Tahun	100	12 Laporan	3 Laporan	**26**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		70	100	100	1Tahun	99	12 Laporan	3 Laporan	**16**
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		70	100	100	1Tahun	93	12 Laporan	3 Laporan	**16**
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		70	100	100	1Tahun	100	12 Laporan	3 Laporan	**7**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70	100	100	1Tahun	99	12 Laporan	3 Laporan	**7**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		70		100	1Tahun	100	5 Unit		-
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya		70		100	1Tahun	99	0		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		70		100	10 orang	100	12 Laporan		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik		70	94,90	100	1Tahiun	85	12 Laporan		23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		70	99,81	100	1Tahun	100	12 Laporan		26
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		70			3 Jenis	100	12 Laporan		28
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	75	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**81**
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		75	100	100	1 Tahun	100	12 Laporan	1 Tahun	25
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif**	90	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa		90	100	100	1 kegiatan	100	1 Lembaga Kemsyarakatan	1 kegiatan	66
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarkatan		90	100	100	1 Tahun	100	1 Lembaga Kemsyarakatan	1 Tahun	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	**Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif**	**90**	**100**	**100**	**96**	**96**	**100**	**100**	**100**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indoneasi, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		90	100	100	1Tahiun 10 Orang	96	100	1Tahun 10 Orang	23
5	**PROGRAM PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan**	**99,7**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatua Republik Indonesia		99,7	100	100	1Tahiun	100	60 Orang	1Tahiun	13
6	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan**	90	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		90	100	100	1Tahiun	100	12 Laporan	1Tahun	18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat

Kecamatan Kebakkramat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

a. Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya
b. Indeks Kepuasan Masyarakat
c. Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif
d. Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif
e. Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksanakan
f. Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internaal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi, Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan :

   a. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa;
   b. Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetaapkan payung hukumnya;
   c. Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006;
   d. Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama;
   e. Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama;
   f. Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional;
   g. Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daaerah.

   Kelemahan :

   a. Masih banyak penduduk miskin;
   b. Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja;
   c. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama;
   d. Masih rendahnya kualitas SDM;
   e. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang :

   a. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi; OPD;
   b. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
   c. Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat;

d. Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama;
e. Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan.

Ancaman :

a. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa;
b. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa;
c. Munculnya faham agama yang radikal dan ekstrim;
d. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain

Tabel 2.5.
Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program
Kecamatan Kebakkramat

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt.1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik			Presentasi Standar Opersional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	71,0	Na
	1. Meningkatnya kualitas Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	83,40	Na
		1) Program Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP	%	70,45	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	42,31
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Perlayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	27,88
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	31,12
		4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	41,67
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	0
		6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	0

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisa
			Th 2024	Th 2025 Smt.I	Th 2024	Th 2025 Smt.I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	71	Na	70,45	Na	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak dipakai	0,762	Tidak dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	100	
4	Indek Kepuasan Masyarakat	Skor	85	85	93,2	89,1	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	
6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	0	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat , dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun Kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2029.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kebakkramat sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Permasalahan Sekretariat:**
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
   c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. **Seksi Tata Pemerintahan**
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
   d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
e. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat
b. Terbatasnya sarana dan prasarana
c. Belum optimalnya pengelolan aset di kecamatan
d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebakkramat , maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kebakkramat yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Kebakkramat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur	**Seksi Tata Pemerintahan** a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **Seksi Kesejahteraan Sosial** a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **Seksi Pelayanan Umum** a. Belum Optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan Prasarana c. Belum optimalnya Pengelolaan aset di Kecamatan d. Belum Optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD merupakan dokumen Perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan Kerangka ekonomi daerah.
2. Program prioritas Pembangunan daerah.
3. Rencana Kerja , Pendanaan, dan Prakiraan Maju.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD yang di jelaskan dalam Lampirkan tabel berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	KECAMATAN				**2.116.678.476**					**2.116.678.476**	
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA***	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97 %**	**1.739.023.126**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH***	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya**	**97 %**	**1.739.023.126**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	1.494.190.226	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan ecaluasi kinerja perangkat Daerah	100 %	1.494.190.226	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	47.830.900	administrasi umum perangkat daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	47.830.900	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0	
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan	100 %	149.640.000	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	90 %	149.640.000	

			pemerintahan daerah					daerah			
	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	47.362.000	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	100 %	47.362.000	
2	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Kebakkramat**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	86.181.100	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	**Kec. Kebakkramat**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,3**	86.181.100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Kebakkramat	Cakupan PenyelenggaranUrusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	100 %	86.181.100	Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahaan di tingkat kecamatan	Kec. Kebakkramat	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh uni kerja Perangkat daerah yang ada dikecamatan	100 %	86.181.100	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**18.846.400**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100 %**	**18.846.400**	
	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Kebakkramat	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	100 %	18.846.400	Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Kebakkramat	Cakupan Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	100 %	18.846.400	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**89.560.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100 %**	**89.560.000**	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kebakkramat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	89.560.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kebakkramat	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	89.560.000	
5	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan**	**100 %**	**56.950.000**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM***	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagaman**	**100 %**	**56.950.000**	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	56.950.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Kebakkramat	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	56.950.000	
6	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Desa memiliki APBDes dan RPKDes sesuai Ketentuan**	**100 %**	**77.930.000**	***PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA***	**Kec. Kebakkramat**	**Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**77.930.000**	
	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Kebakkramat	Cakupan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	77.930.000	fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Kebakkramat	Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100 %	77.930.000	

1.3 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.9

Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kebakkramat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Desa Se Kecamatan Kebakkramat	Persentase Lembaga Kemasyuarakatan Aktif	70 Orang	Kegiatan Muserenbang

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026, pada saat penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026. Secara lengkap usulan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Kebakkramat diuraikan pada Bab III.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaaah terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;

3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;

4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;

15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Kebakkramat
Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jumantono adalah

Tabel 3.1.
Tujuan - Sasaran - dan Program
(Target Tahun 2026)

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Oprasional Prosedur yang Diimplementasikan	Persen	80
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Persen	94,75
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabuoaten/Kota	Nilai SAKIP	Persen	71
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	Persen	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Persen	100
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	Persen	100
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persenatase Desa/Kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	Persen	100
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	Persen	100

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan di rencanakan serat antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi ril saat perencanaan dibuat.

3.3.1. Tantangan

Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan yang dihadapi yakni :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Sarana dan Prasaran yang belum memadai
3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah.

3.3.2. Peluang

Dalam melaksanakan pelayanan kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki, Kantor Kecamatan KebakKramat diharapkan mampu untuk lebih meningkatan kinerja pelayanan public baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun peluang yang bisa di maanfaatkan antara lain :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

3.4.1. Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai Urusan yang ditangani maka Kecamatan Kebakkramat masuk dalam unsur kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
			Pemeliharaan Mebel

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

n

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Kebakkramat

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1)

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat

Kinerja pelayanan PD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh PD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra PD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Kebakkramat , yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebakkramat merupakan pencapaian kinerja pelayanan Kebakkramat. (lebih lengkap lihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Kebakkramat

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Kebakkramat

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan Pusat.

n

Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
						Kecamatan Kebakkramat						2.116.678.476,00							2.657.724.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.116.678.476,00							2.657.724.000,00	
	7	01				KECAMATAN						2.116.678.476,00							2.657.724.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	-				1.739.023.126,00						-	2.526.644.200,00	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	-				1.494.190.226,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	1.704.000.000,00	
	7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	1.491.630.476,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		1.700.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.02	00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

n

							0				12 0	2.559.750,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		4.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			undefined undefined	47.830.900,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	170.878.200,00	
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.738.300,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		25.975.250,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	1.579.600,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		2.782.150,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	7.975.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		18.250.800,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

n

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.025.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		19.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.920.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		1.920.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	20.283.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		100.950.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.06	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	310.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		2.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT

n

	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			undefined undefined	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	80.000.000,00	
	7	01	01	2.07	00 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		30.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.07	00 05	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		10.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		40.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT

n

	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			undefined undefined	149.640.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	504.204.000,00	
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		54.204.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	104.640.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		450.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-			undefined undefined	47.362.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	-	67.562.000,00	

n

	7	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	35.182.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		32.562.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12.180.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		15.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-		20.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	-			undefined undefined	86.181.100,00						-	6.362.300,00	

n

	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Sebagai hasil pelaksanakan survey kepuasan Masyarakat	-			1 undefined	86.181.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Kebakkramat	-	6.362.300,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	86.181.100,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kecamatan Kebakkramat		6.362.300,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-			undefined undefined	67.034.250,00						-	18.846.400,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif	-			undefined undefined	67.034.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa	-	18.846.400,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

n

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyarakatan	59.440.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa		8.846.400,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	7.594.250,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa		10.000.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	-			undefined undefined	89.560.000,00						-	27.600.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	89.560.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa	-	27.600.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													

n

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	89.560.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa		27.600.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana	-			undefined undefined	56.950.000,00						-	59.207.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan Yang Terlaksana	-			undefined undefined	56.950.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa	-	59.207.000,00	
	7	01	05	2.01	00 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan				70 Orang	56.950.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan/Desa		59.207.000,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT

n

							Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia												
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	-			undefined undefined	77.930.000,00						-	19.064.100,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	-			undefined undefined	77.930.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan /Desa	-	19.064.100,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	77.930.000,00	Kab. Karanganyar, Kebakkramat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Semua Kelurahan /Desa		19.064.100,00	KECAMATAN KEBAKKRAMAT
	J U M L A H											**2.116.678.476,00**							**2.657.724.000,00**	

n

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
		Tahun 2026
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	94,75

Tabel 4.3.
Program /Kegiatan/ Sub Kegiayang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten Karanganyar tahun 2026	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**Program :** Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 6.362.300
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;	**Program :** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 56.950.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Daerah Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kebakkramat harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebakkramat secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2026 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XL
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN KERJO
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Kerjo Tahun 2026 dapat disusun. Renja OPD Kecamatan Kerjo Tahun 2026 disusun bedasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kerjo Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kerjo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kerjo Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Kerjo ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan OPD di dalam kurun waktu mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja OPD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja OPD Kecamatan Kerjo, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Kerjo.

Kerjo, September 2025

CAMAT KERJO

SUWARDOYO, SH
Pembina
NIP. 19690526 198803 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
KATA PENGANTAR..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-3
1.4 Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun Sebelumnya dan Capaian RENSTRA Kecamatan Kerjo II-1
2.2 Analisis kinerja Pelayanan.....II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggraan Tugas dan Fungsi OPD II-17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....II-19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-22

BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD III-3
3.3 Tantangan dan Peluang OPD..... III-6
3.4 Analisis Kinerja Pelayanan OPD III-7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
4.1 Program dan Kegiatan IV-1
4.2 Indikator Kinerja Pelayanan IV-2
4.3 Dana Indikatif IV-3
4.4 Sumber Dana IV-3

BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja V-1
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut V-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO	TABEL	HALAMAN
1	Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Anggaran Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Kerjo	II-2
2	Tabel 2.2 Realisasi APBD di Kecamatan Kerjo Tahun 2024 dan 2025 (TW II)	II-4
3	Tabel 2.3 Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-6
4	Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar	II-9
5	Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Kerjo	II-14
6	Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo	II-14
7	Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Kerjo	II-16
8	Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar	II-19
9	Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar	II-22
10	Tabel 3.1 Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran dan Target Indikator Program Tahun 2026	III-6
11	Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD	III-7
12	Tabel 3.3 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program Kegiatan dan Sub kegiatan	III-8
13	Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Kerjo Tahun 2026	IV-4
14	Tabel 4.2 Target IKU Kecamatan Tahun 2026	IV-19
15	Tabel 4.3 Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-19

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kerjo berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Kerjo agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tauhun yang berpedoman pada renstra. Renja pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Kerjo memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1

Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

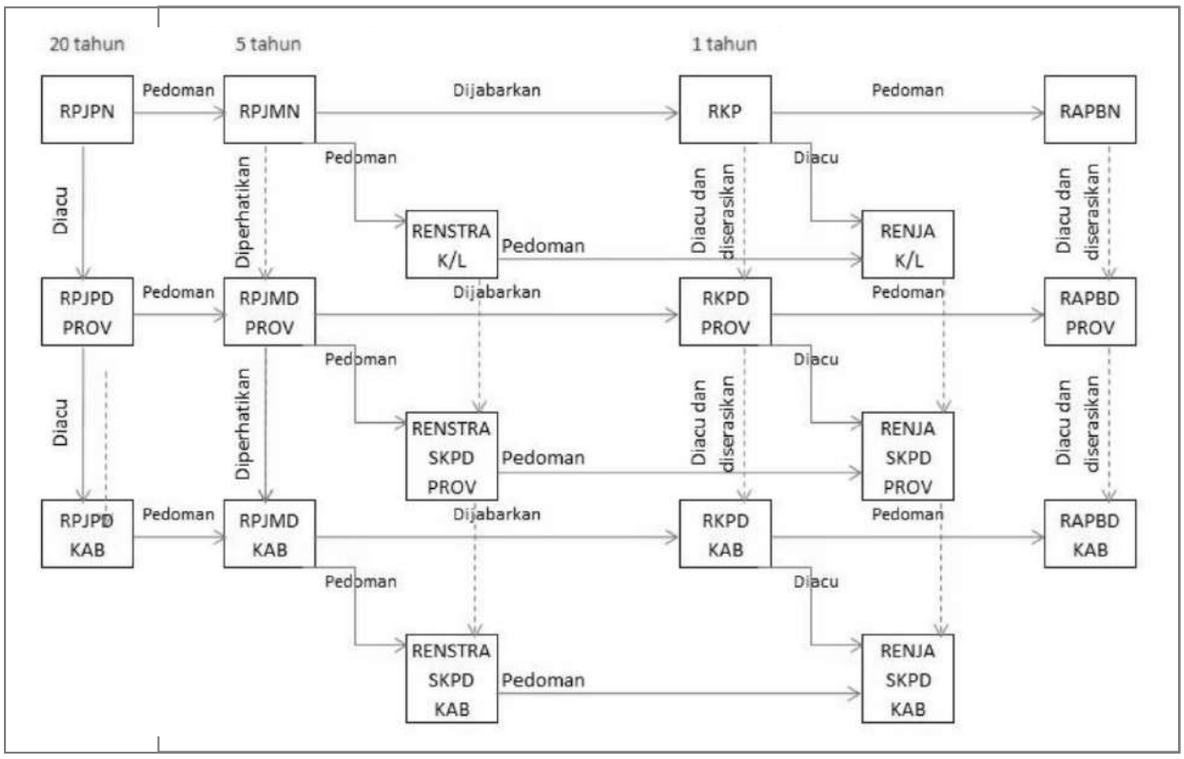

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

I.3 Maksud Dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

1. Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.
2. Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya.
3. Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

I.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Kerjo, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud Dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat tentanganalisis capaian kinerja perlayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, serta tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang tujuan dan sasaranRencana Kewrja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026.

BAB V PENUTUP
Memuat tentang harapan serta tindak lanjut pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2026

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Kerjo

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Kerjo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 dan realisasi APBD Kecamatan Kerjo.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari RPD tahun 2024–2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kerjo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 2.584.351.985,-. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 1.692.131.245,- dan Belanja Langsung Rp. 880.920.740,-

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   Program ini terdiri dari 6 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.394.905.935,- dan terealisasi Rp. 2.146.035.315,- (89,61%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 3.744.600,- dan terealisasi Rp. 3.670.200,- (98,01%).
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 32.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 32.100.000,- (100%).
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp.126.095.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.502.000,- (99,52%).
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100 %. Anggaran yang tersedia Rp.8.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.285.000,- (99,81%).
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 19.206.450,- terealisasi sebesar Rp. 19.081.950,- (99,35%).

2.1.1 Evaluasi Anggaran

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Kerjo telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 1
Persandingan Alokasi Anggaran Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Kerjo

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025 (PENETAPAN)		
	RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
KECAMATAN	2.584.351.985	2.584.351.985	100	2.184.070.980	2.438.389.980	89,6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	2.379.070.435	2.379.070.435	100	1.783.038.580	2.065.390.430	86,3
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*1.775.250*	1.775.250	100	56.690.100	54.581.850	103,9
Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	470.050	470.050	100	56.188.500	53.258.500	105,5
Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	571.700	571.700	100	0	821.750	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.500	733.500	100	501.600	501.600	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*1.692.130.385*	1.692.130.385	100	1.617.459.500	1.803.719.500	89,7
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.692.130.385	1.692.130.385	100	1.617.459.500	1.803.719.500	89,7
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*193.929.110*	199.073.750	97	28.655.980	50.914.080	56,3
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.449.000	2.449.000	100	455.000	2.322.000	19,6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.628.210	32.104.000	92	11.188.480	19.607.480	57,1
Penyediaan bahan logistik kantor	35.647.400	30.683.000	116	9.125.000	13.328.000	68,5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.126.750	4.250.000	50	350.000	4.786.600	7,3
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.875.000	2.875.000	100	1.380.000	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.475.000	123.075.000	95,45	5.725.000	7.900.000	72,5
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.637.750	3.637.750	100	1.812.500	2.970.000	61,0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*8.000.000*	11.300.000	70,80	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	-	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	11.300.000		0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*417.130.990*	417.930.990	99,81	63.959.000	122.111.000	52,4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100	51.180.000	51.180.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	24.000.000	100	22.000.000	28.400.000	77,5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.330.990	391.330.990	100	41.959.000	42.531.000	98,7
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*62.076.700*	72.694.700	85,4	16.274.000	34.064.000	47,8

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.094.000	48.534.000	76,4	14.124.000	31.914.000	44,3
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.450.000	2.450.000	100	2.150.000	2.150.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.710.700	21.710.700	100	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.636.100	3.744.600	97,1	68.952.400	71.549.100	96,4
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	3.636.100	3.744.600	97,1	68.952.400	71.549.100	96,4
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.636.100	3.744.600	97,1	68.952.400	71.549.100	96,4
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.425.450	19.206.450	241,7	60.480.000	64.395.450	93,9
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*4.925.000*	5.550.000	88,7	54.480.000	54.980.000	99,1
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*4.925.000*	5.550.000	88,7	54.480.000	54.980.000	99,1
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*41.500.450*	23.656.450	175,4	6.000.000	9.415.450	63,7
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	*41.500.450*	13.656.450	303,9	6.000.000	9.415.450	63,7
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.100.000	32.100.000	100	74.520.000	75.600.000	98,6
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.100.000	32.100.000	100	74.520.000	75.600.000	98,6
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.100.000	32.100.000	100	74.520.000	75.600.000	98,6
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	112.745.000	126.095.000	89,4	85.120.000	101.185.000	84,1
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	112.745.000	126.095.000	89,4	85.120.000	101.185.000	84,1
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	103.295.000	113.845.000	90,7	64.570.000	80.065.000	80,6
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.450.000	12.250.000	77,1	20.550.000	21.120.000	97,3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.375.000	8.300.000	125	59.400.000	60.270.000	98,6
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.375.000	8.300.000	125	59.400.000	60.270.000	98,6
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000	5.300.000	132	57.000.000	58.350.000	97,7
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.250.000	2.250.000	100	2.400.000	1.920.000	125
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.125.000	750.000	150	0	0	0

2.1.2 Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Triwulan II) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Realisasi APBD di Kecamatan Kerjo Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	2024			2025 (TW II)		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	KECAMATAN	**2.584.351.985**	**2.334.674.465**	**90,34%**	**2.438.389.980**	**1.478.673.107**	**60,64%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	***2.394.905.935***	***2.146.035.315***	**89,61%**	**2.065.390.430**	**1.269.984.107**	**61,49%**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***1.775.250***	***1.675.250***	**94,37%**	***54.581.850***	***38.561.850***	***70,65%***
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	470.050	420.050	89,36%	53.258.500	37.238.500	69,92%
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	571.700	521.700	91,25%	821.750	821.750	100%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	733.500	733.500	100%	501.600	501.600	100%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***1.692.131.245***	***1.449.305.349***	**85,65%**	***1.803.719.500***	***1.187.933.357***	***65,86%***
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.692.131.245	1.449.305.349	85,65%	1.803.719.500	1.187.933.357	65,86%
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***199.073.750***	***196.859.100***	**98,89%**	***50.914.080***	***21.550.150***	***42,33%***
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.449.000	2.413.600	98,55%	2.322.000	725.000	31,22%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.104.000	31.992.150	99,65%	19.607.480	6.901.950	35,20%
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.683.000	30.334.500	98,86%	13.328.000	9.257.500	69,46%
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.250.000	4.177.500	98,29%	4.786.600	1.540.700	32,19%
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.875.000	2.760.000	96%	0	0	0%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.075.000	121.695.000	98,88%	7.900.000	3.125.000	39,56%
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.637.750	3.486.350	95,84%	2.970.000	2.178.750	73,36%
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	**11.300.000**	**11.250.000**	**99,56%**	0	-	0%
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.300.000	11.250.000	99,56%	0	-	0%
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***417.930.990***	***415.649.616***	**99,45%**	***122.111.000***	***69.759.605***	***57,13%***
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.746.000	97%	51.180.000	19.760.000	38,61%
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.800.000	22.605.316	91,15%	28.400.000	14.624.705	51,50%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.330.990	391.298.300	99,99%	42.531.000	35.374.900	83,17%
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	***72.694.700***	***71.296.000***	**98,08%**	***34.064.000***	***18.679.000***	***54,84%***

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.534.000	*47.896.000*	98,69%	31.914.000	*16.529.000*	51,79%
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.450.000	*1.950.000*	79,59%	2.150.000	*2.150.000*	100%
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.710.700	*21.450.000*	98,80%			
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***3.744.600***	***3.670.200***	98,01%	**71.549.100**	**63.222.900**	**88,36%**
7	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	3.744.600	3.670.200	98,01%	***71.549.100***	***63.222.900***	***88,36%***
19	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.744.600	3.670.200	98,01%	71.549.100	63.222.900	88,36%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***19.206.450***	***19.081.950***	**99,35%**	**64.395.450**	**46.816.350**	**72,70%**
8	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	5.550.000	5.550.000	100%	***54.980.000***	***40.890.000***	***74,37%***
20	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.550.000	5.550.000	100%	54.980.000	40.890.000	74,37%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.656.450	13.531.950	99%	***9.415.450***	***5.926.350***	***62,94%***
21	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13.656.450	13.531.950	99,09%	9.415.450	5.926.350	62,94%
4	**PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN**	***32.100.000***	***32.100.000***	**100%**	**75.600.000**	54.150.000	**71,63%**
9	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**32.100.000**	**32.100.000**	100%	***75.600.000***	54.150.000	***71,63%***
22	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.100.000	32.100.000	100%	75.600.000	54.150.000	71,63%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***126.095.000***	***125.502.000***	**99,53%**	**101.185.000**	**94.970.000**	**93,86%**
10	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**126.095.000**	**125.502.000**	**99,53%**	***101.185.000***	***94.970.000***	***93,86%***
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	113.845.000	113.322.000	99,54%	80.065.000	79.820.000	99,69%
23	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.250.000	12.180.000	99,43%	21.120.000	15.150.000	71,73%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**8.300.000**	**8.285.000**	**99,82%**	**60.270.000**	**41.400.000**	**68,69%**

11	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**8.300.000**	**8.285.000**	**99,82%**	***60.270.000***	***41.400.000***	***68,69%***
24	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.300.000	5.285.000	99,72%	58.350.000	41.400.000	70,95%
25	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.250.000	2.250.000	100%	1.920.000	-	0%
26	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	750.000	750.000	100%	0	-	0%

Sumber : Kecamatan Kerjo, 2025 diolah

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.394.905.935,00 dengan Realisasi capaian sebesar Rp2.146.035.315,00 atau 89,61%, lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 84,32%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan II Tahun 2025 adalah Rp. 1.478.673.107,00 atau 60,64% dari pagu anggaran Rp. 2.353.113.136,00

Tabel. 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	**Program**	**2023**			**2024**		
		Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.636.009.288	2.222.768.346	84,32	2.394.905.935	2.146.035.315	89,61
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.521.500	5.512.800	99,84	3.744.600	3.670.200	98,01
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	186.975.000	186.622.814	99,81	19.206.450	19.081.950	99,35
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	36.300.000	36.125.000	99,52	32.100.000	32.100.000	100,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90.050.000	89.495.000	99,38	126.095.000	12.180.000	9,66
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.559.500	14.909.500	95,82	8.300.000	750.000	9,04
	Persentase realisasi	**2.970.415.288**	**2.555.433.460**	**86,03**	**2.584.351.985**	**2.213.817.465**	**85,66**
	Rata-rata realisasi 6 program			**86,03**			**85,66**

Sumber : Kecamatan Kerjo, 2025 diolah

Serapan anggaran selama 2 tahun belum pernah mencapai 100%, sehingga dengan memperhatikan 2 hasil evaluasi tersebut Kecamatan Kerjo perlu untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo

Kecamatan Kerjo merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kerjo dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
- Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
- Terlaksananya kegiatan PATEN tingkat kecamatan
- Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kerjo meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
   - Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
   - Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
   - Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
   - Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
   - Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
   - Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

   Kelemahan:
   - Masih cukup banyak penduduk miskin.
   - Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja.
   - Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat.
   - Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas.

2. Lingkungan Eksternal

   Peluang:

   - Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD.
   - Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat.
   - Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat.
   - Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan.
   - Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif.
   - Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat.
   - Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah.
   - Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM.

   Ancaman:

   - Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa.
   - Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
   - Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
   - Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama.
   - Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
   - Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kerjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

TABEL 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025 Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100**	**Na**	**100**	**100**	**100**	**100**	**64,81**	**64,81**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**70,65**	**70,65**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		5	5	5	100	6	2	33,33
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2	2	2	100	2	2	100
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	3	3	100	15	9	60
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**97,60**	**97,60**	**100**	**41,22**	**41,22**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN		15	13	13	100	13	13	100

7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen listrik dan instalasi kantor		12	12	12	100	12	5	33,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor, dan alat kebersihan kantor		12	12	12	100	12	5	33,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan		12	12	12	100	12	4	26,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas kantor		12	12	12	100	12	4	26,67
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0	12	12	100	12	5	26,67
7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan		3	2	2	100	4	4	100
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38,91**	**38,91**
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39,29**	**39,29**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayar pajaknya		3	7	7	100	7	7	100
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		0	0	0	100	0	0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara		8	5	5	100	2	0	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara		1	2	2	100	1	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**81**	**85,225**	**81**	**85,125**	**105,09**	**81,2**	**84,84**	**104,74**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Terselenggaranya urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**88,36**	**88,36**
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat		2	2	2	100	2	1	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**72,70**	**72,70**
7.01.03.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10	10	10	100	10	10	100
7.01.03.2.01. 03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	1	1	100	1	1	100
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**71,63**	**71,63**
7.01.04.2.01. 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**Na**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.05.2.01. 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12	12	12	100	12	6	50

7.01.05.2.01.04	Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional		90	120	120	100	90	0	0
7.01.06	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**68,69**	**68,69**
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10	10	10	100	10	10	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Desa dan Perangkat desa		10	10	10	100	10	10	100

Tabel 2.5

Pencapaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Kerjo

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Tahun	
					2024	2025 Smt I
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	68,8	Na
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	85,125	84,84
		1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	%	68,80	Na
			Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	100	61,49
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100	88,36
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	72,70
		4) Program Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	71,63
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100	93,86
		6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	68,69

Sumber : Renstra Kecamatan Kerjo 2025-2029

2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo

No	Indikator	Satuan	Target Capaian		Realisasi Capaian		Catatan Analisis
			Th 2024	Th 2025 Smt I	Th 2024	Th 2025 Smt I	
1	Nilai SAKIP	Nilai	72	72,25	68,80	0	
2	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,75	Tidak dipakai	0,762	Tidak dipakai	
3	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	100	100	100	100	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	81	82	85,125	84,84	
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100	

6	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	
7	Persentase wilayah tertib Perda	%	100	100	100	100	
8	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0	
9	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	

2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kerjo

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kerjo tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2026 merupakan tahun Kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Sedangkan RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025–2029.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
2. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
3. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kerjo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Permasalahan Sekretariat:**
   a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
   b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. **Seksi Tata Pemerintahan**
   a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
   b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
   c. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
   d. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
   b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;

c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
d. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
   a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
   c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
   d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
5. **Seksi Kesejahteraan Sosial**
   a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
   b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
   c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
   d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
6. **Seksi Peayanan Umum**
   a. Terbatasnya sarana dan prasarana di kecamatan;
   b. Belum optimalnya pengelolan aset di kecamatan;
   c. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kerjo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Kerjo yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Kerjo

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kerjo sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat c. Rendahnya kompeteni sumber daya apartaur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan e. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa f. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan. g. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan,	**Seksi Tata Pemerintahan** a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; d. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum** a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** a. Kurangnya pemerataan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
		penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan h. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial. i. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah	pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. **Seksi Kesejahteraan Sosial** a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemaham tentang kesehatan pada masyarakat desa. **Seksi Pelayanan Umum** a. terbatasnya sarana dan prasarana b. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamtan c. belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang terlah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Kerjo dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Kerjo dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Kerjo

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024-2026. Rencana Kerja Kecamatan Kerjo berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kerjo .

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
KECAMATAN KERJO					**2.214.958.330,-**					**2.814.958.330,-**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kec.kerjo	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100%**	**2.080.558.230,-**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Kec.kerjo	Persentase indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**100%**	**2.683.878.530,-**	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	36.469.750,-	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerjaperangkat daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	5.500.000,-	
	administrasi keuangan perangkat daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1.976.723.330,-	administrasi keuangan	Kec.kerjo	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	2.000.723.330,-	
	administrasi umum perangkat daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	13.500.000,-	administrasi umum perangkat daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	83.000.000,-	
	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec.kerjo	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	-	0,-	pengadaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintah daerah	Kec.kerjo	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	-	45.000.000,-	

	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	47.865.250,-	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	419.200.000,-	
	pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	6.000.000,-	pemeliharaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintahan daerah	Kec.kerjo	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	130.455.200,-	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec.kerjo	Indek Kepuasan Masyarakat	**81,2**	**25.200.000,-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec.kerjo	Indek Kepuasan Masyarakat	**81,2**	**6.362.300,-**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	12 Bulan	25.200.000,-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	12 Bulan	6.362.300,-	
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec.kerjo	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	**100%**	**13.600.000,-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec.kerjo	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	**100%**	**59.207.000,-**	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 Bulan	13.600.000,-	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	12 Bulan	59.207.000,-	

4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec.kerjo	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	**100%**	**29.600.000,-**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec.kerjo	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	**100%**	**19.064.100,-**	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	20 Dokumen	29.600.000,-	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	20 Dokumen	19.064.100,-	
5	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec.kerjo	Persentase desa dalam keadaan kondusif	**100%**	**34.200.000,-**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec.kerjo	Persentase desa dalam keadaan kondusif	**100%**	**27.600.000,-**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan	34.200.000,-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.kerjo	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Bulan	27.600.000,-	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.kerjo	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	**100%**	**26.800.000,-**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.kerjo	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	**100%**	**18.846.400,-**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.kerjo	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	26.800.000,-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.kerjo	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 Bulan	18.846.400,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana fungsi Kecamatan Kerjo yang utama yaitu memberikan Pelayanan kepada masyarakat, maka dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tentunya mengacu kepada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebutuhan tersebut dapat berupa penyediaan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat.

Usulan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai yaitu melalui proses Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota (Forum OPD) serta penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan saat perencanaan.

Adapun Kegiatan yang merupakan usulan dari Kecamatan sebagai hasil proses dari Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar

Bidang : Sarana dan Prasarana							
NO	**KEGIATAN PRIORITAS**	**DESA**	**MASALAH**	**ALAMAT/LOKASI**	**TARGET/ VOLUME**	**PAGU ANGGARAN (Rp)**	**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar	Kecamatan Kerjo	Pengadaan Gedung Serbaguna	Kantor Kecamatan Kerjo, Prayan	364m2	1.874.600.000	DPUPR
2.	Pengaspalan Jalan Plosorejo ke Seloromo, Desa Plosorejo, Kec Kerjo Kab. Karanganyar	Plosorejo	Jalan Rusak	Dusun Plosorejo, Desa Plosorejo, Kab. Karangnyar	4000m	1.200.000.000	DPUPR
3.	Pembangunan Jalan Sekadi (Boro - Boro) sampai dengan Pedaan Desa Sumberejo	Tawangsari	Jalan tembus Tawangsari - Sumberjo-Karangrejo sudah rusak,perlu perbaikan dan peningkatan jalan	Jalan tembus Tawangsari - Sumberjo	4500m	1.500.000.000	DPUPR
4.	Betonisasi sayap jalan Dusun Prayan s/d Dusun Sumberejo	Desa Sumberejo	Penting dan perlunya Betonisasi Sayap Jalan Dukuh Prayan memanjang hingga Dusun Sumberejo, Desa Sumberejo, Kec. Kerjo.	Jalan Dukuh Prayan memanjang hingga Dusun Sumberejo, Kab. Karanganyar	3000m	300.000.000	DPUPR

5.	Pembangunan Talud Srikandi (Barat Sumberejo)	Botok	Sempitnya jalan yang ada di Jl. Srikandi Dusun Botok, sehingga perlu pelebaran jalan guna menunjang kelancaran transportasi warga desa Botok.	Jalan di Jl. Srikandi Dusun Botok, Kab. Karanganyar , Kab. Karanganyar	400m	300.000.000	DPUPR
6.	Pembangunan Taludjalan DPU Dusun Plandaan	Sumberejo	Perbaikan Jalan DPU Plandaan ini karena taludnya sudah menggantung dan berpotensi rubuh	Dusun Plandaan Desa Sumberejo	200m	300.000.000	DPUPR
7.	Pembangunan Fasilitas Pendukung Bumi Perkemahan Desa Tamansari	Tamansari	Belum adanya fasilitas untuk tempat perkemahan di Kecamtan Kerjo	Desa Tamansari	1 paket	200.000.000	Dinas Pariwisata
8.	Pembangunan Rumah sakit tipe C di Kecamatan Kerjo	Kecamatan Kerjo	Perlunya tempat rujukan RS yang mudah diakses dan dekat	Kecamatan Kerjo	2000m2 (1 Paket)	100 Milyar	Dinas Kesehatan
9.	Pagar Gedung Poned dan Rawat Inap	Kecamatan Kerjo	Perlunya Keamanan Pelayanan Rawat Inap dan Poned	Puskesmas Kerjo	146m	349.622.300	APBD
10.	Pembangunan Fasilitas Pendukung Bumi Perkemahan Desa Tamansari	Tamansari	Belum adanya fasilitas untuk tempat perkemahan di Kecamtan Kerjo	Desa Tamansari	1 paket	250.000.000	Desa Tamansari

Dari usulan-usulan aspirasi masyarakat melalui proses musrenbang, maka aspirasi tersebut diserap kedalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang juga disesuaikan dengan kemampuan atau besaran pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran, sehingga pengusulan program dan kegiatan akan menyesuaikan dengan anggaran dan usulan serta kebutuhan program dan kegiatan pada Kecamatan Kerjo.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;

6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam lima tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;

15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kerjo

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Kerjo Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Kerjo adalah :

Tabel 3.1
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran dan
Target Indikator Program Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator	Satuan	Target Capaian
					2026
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	Indeks	85
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	82
		1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	%	68,5
		2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
		3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
		4) Program Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100
		5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan	%	100
		6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kerjo memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

1. Tantangan

a. Adanya tuntutan pengembangan teknologi;
b. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
c. Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
d. Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Peluang

a. Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* untuk meningkatkan kinerja;
b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
c. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
d. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
e. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4 Cascading Kinerja Daerah dan Tujuan Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani maka Kecamatan Jatipuro masuk dalam Unsur Kewilayahan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Sasaran 1 Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat ditelusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.3

Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program Kegiatan dan Sub kegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			PenyediaanBahan Logistik Kantor
			PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumSesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Sumber : *Kecamatan Kerjo, 2025*

Pelaksanaan akan diuraikan lebih rinci pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERJO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Kerjo

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di Tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada Renstra Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Kerjo di Tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
      1. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      6. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
      1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
      1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
      2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
      1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan.
      2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
      3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di Kecamatan :
      1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
      1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
      2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum :
      1. Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah :
      1. Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional.
      2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :
      1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
      2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
      3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.
      4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
      5. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      6. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Kerjo

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Kerjo, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kerjo merupakan pencapaian kinerja pelayanan Kerjo. (lebih lengkap dilihat pada tabel 4.1)

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Kerjo

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Kerjo

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Kerjo Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Kerjo			2.154.548.993,00							2.814.958.330,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.154.548.993,00							2.814.958.330,00	
	7	01				KECAMATAN			2.154.548.993,00							2.814.958.330,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	68,5	2.117.419.093,00						69	2.683.878.530,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.323.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	ASN	100 %	5.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	821.750,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	ASN	6 Dokumen	1.000.000,00	KEC. KERJO

												narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	ASN	2 Dokumen	1.500.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	501.600,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	ASN	3 Laporan	1.500.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100 %	1.679.468.993,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	100 %	2.000.723.330,00	

												dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.679.468.993,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	15 Orang/bulan	2.000.723.330,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	22.800.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	100%	83.000.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	526.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Paket	3.000.000,00	KEC. KERJO

												narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.967.250,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Paket	25.000.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	695.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Paket	25.000.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.085.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Paket	10.000.000,00	KEC. KERJO

												narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	3 Dokumen	0,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.325.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Laporan	10.000.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	202.500,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	6 Dokumen	10.000.000,00	KEC. KERJO

												narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100%	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	100%	45.000.000,00	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	-	0,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	-	45.000.000,00	KEC. KERJO

												dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	389.280.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	100%	419.200.000,00	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Laporan	5.000.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Laporan	27.000.000,00	KEC. KERJO

												dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	365.280.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	PNS	12 Laporan	387.200.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	100%	24.546.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	100%	130.455.200,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	21.096.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	6 Unit	55.000.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	3.450.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	30 Unit	5.455.200,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	2 Unit	70.000.000,00	KEC. KERJO
	7	01	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	0,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-	-	0,00	
	7	01	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD											
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	-		0,00	KEC. KERJO

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100%	3.368.650,00						100%	6.362.300,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	100%	3.368.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	ASN	100%	6.362.300,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3.368.650,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	ASN	2 Laporan	6.362.300,00	KEC. KERJO
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	7.146.250,00						100 %	18.846.400,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	2.800.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif	Masyarakat	100 %	8.846.400,00	

												pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Mengembangkan kualitas infrastruktur				
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	2.800.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	10 Lembaga Kemasyarakatan	8.846.400,00	KEC. KERJO
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat		0,00	KEC. KERJO
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	4.346.250,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	100 %	10.000.000,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan											
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	4.346.250,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5.	Masyarakat		10.000.000,00	KEC. KERJO

												ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengembangkan kualitas infrastruktur				
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	22.080.000,00						100 %	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	22.080.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	100 %	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	22.080.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	12 Laporan	6.000.000,00	KEC. KERJO

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100 %	3.680.000,00						100 %	80.807.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	3.680.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masayarakat	100 %	80.807.000,00	
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 Orang	3.200.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masayarakat	90 Orang	59.207.000,00	KEC. KERJO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan											
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	480.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan	Masayarakat	12 Dokumen	21.600.000,00	KEC. KERJO

												korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kualitas infrastruktur				
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPBDes yang sesuai ketentuan	100 %	855.000,00						100 %	19.064.100,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	855.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	100 %	19.064.100,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	30 Dokumen	3.800.000,00	KEC. KERJO
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30 Dokumen	240.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	30 Dokumen	4.000.000,00	KEC. KERJO

	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa											
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	30 Dokumen	3.064.100,00	KEC. KERJO
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa											
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	30 Dokumen	615.000,00	Kab. Karanganyar, Kerjo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 5. Mengembangkan kualitas infrastruktur	Masyarakat	30 Dokumen	8.200.000,00	KEC. KERJO
	J U M L A H								2.154.548.993,00							2.814.958.330,00	

Tabel 4.2. Target IKU Kecamatan Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82

Tabel 4.3. Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket
(1)	(2)	(4)		(5)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;	**Program:** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan **Sub Kegiatan:** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.368.650,00	
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program:** Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah **Sub Kegiatan:** • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	3.680.000,00	

No.	Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket
(1)	(2)	(4)		(5)
		serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan • Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional • Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Kerjo Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025- 2029

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kerjo harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Kerjo .

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kerjo Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan perencanaan dan kelitbangan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Kerjo yang telah diusulkan dan ditetapkan
5. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kerjo secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Kerjo Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029 serta mengacu pada program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja PD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENJA-PD Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Jenawi, September 2025
CAMAT JENAWI

ARDIANSYAH,S.S.T.P.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 197907091998101002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I.1
1.2 Landasan Hukum I.2
1.3 Maksud dan Tujuan I.3
1.4 Sistematika Penulisan I.4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi II.6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi II.16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD II.19
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II.23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja III.3
3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah III.6
3.4. Pengukuran Kinerja III.6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI
4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jenawi..... IV.1
4.2 Data Indikatif Kecamatan Jenawi IV.2
4.3 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Kecamatan Jenawi..... IV.3
4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenawi IV.15
4.4 Program Kecamatan Jenawi yang mendukung Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV.15
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja V.1
5.2 Kaidah Pelaksanaan..... V.1
5.3 Rencana Tindak lanjut..... V.1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Persandingan Alokasi Dana Renja dengan APBD Perubahan Tahun 2024 dan Renja 2025 dan APBD tahun 2025..... II.1
Tabel 2.2 Realisasi APBD Program,Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 Tribulan II II.4
Tabel 2.3 Persandingan Realisasi anggaran Program Tahun 2023 dan 2024 Kecamatan Jenawi II.5
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jenawi s/d Tahun 2025 ..... II.9
Tabel 2.5 Capaian Indikator Tujuan,Sasaran dan Program Kecamatan Jenawi Tahun 2024 dan Tahun 2024 Tribula II..... II.15
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sasaran strategis (IKU) Tahun 2024 ..... II.15
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jenawi II.16
Tabel 2.8 Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026 Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar II.21
Tabel 2.9 Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar II.25
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan dan Sasaran Target Kecamatan Jenawi Tahun tahun 2026 ..... III.5
Tabel 3.2 Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan III.7
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jenawi Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar IV.3
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jenawi IV.15
Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ..... IV.15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknoratik, partisipasif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah berupa Recana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adaLah dokumen perencanaan Kecamatan Jenawi untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Karanganyar dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun di Tahun 2026. Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pemangunan nasional, provinsi dan mendukung arah peremcanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Hubungan dan Hieraki Perencanaan Pembangunan

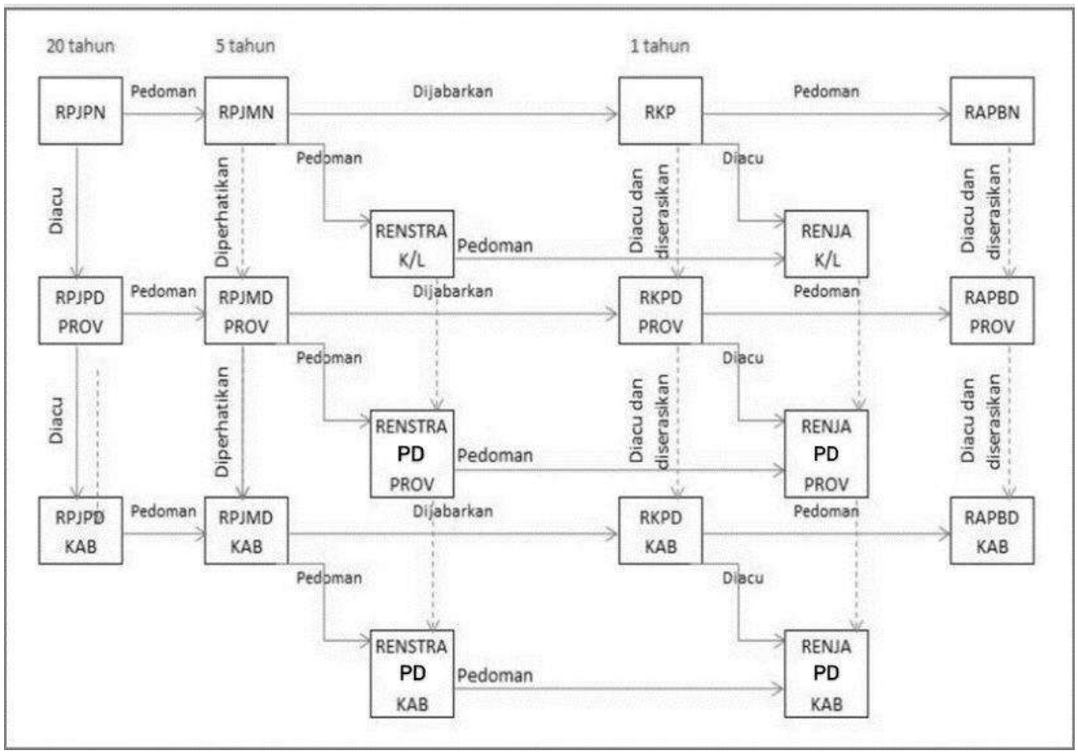

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181).
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28).
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenawi disajikan dalam 5 (lima) bab. Dalam setiap bab memiliki sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut. Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jenawi, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

1.3 Maksud dan Tujuan
Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Jenawi.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Jenawi, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI TAHUN 2024

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Jenawi tahun lalu (2024).

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI

Memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JENAWI TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jenawi

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target renstra Kecamatan Jenawi berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan realisasi APBD Kecamatan Jenawi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra tahun 2024-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada Tahun 2024 dan 2025 Kecamatan Jenawi telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana APBD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Persandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 di Kecamatan Jenawi

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	2024 (PERUBAHAN)			2025		
		RENJA	APBD	%	RENJA	APBD	%
	Kec.Jenawi	2.390.531.349	2.420.531.349	101,25	2.404.141.613	2.629.141.613	109,36
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.245.518.749	2.272.018.749	101,18	2.321.492.213	2.542.992.213	109,54
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.955.200	7.019.200	100,92	12.726.050	14.806.100	116,34
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.612.800	5.676.800	101,14	11.703.000	11.703.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.342.400	1.342.400	100,00	1.023.050	3.103.100	303,32
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.724.949	1.608.724.949	100,00	1.778.535.213	1.943.535.213	109,28
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.724.949	1.608.724.949	100,00	1.778.535.213	1.943.535.213	109,28
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.800.000	23.800.000	100,00	23.800.000	68.000.000	285,71
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.800.000	23.800.000	100,00	23.800.000	68.000.000	285,71
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.118.000	90.123.000	100,01	43.620.950	56.271.200	129,00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.511.600	2.511.600	100,00	2.369.900	2.369.900	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.242.100	18.247.100	100,03	12.153.850	13.942.000	114,71
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.034.800	19.034.800	100,00	7.570.700	9.427.200	124,52
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.845.000	5.845.000	100,00	2.784.000	3.089.600	110,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	460.000	460.000	100,00	0	0	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.635.000	40.635.000	100,00	17.500.000	26.200.000	149,71
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.389.500	3.389.500	100,00	1.242.500	1.242.500	100,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.152.500	35.152.500	100,00	12.500.000	2.500.000	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Mebel	1.552.500	1.552.500	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.600.000	100,00	12.500.000	2.500.000	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.600.000	415.560.000	99,27	421.420.000	421.420.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.400.000	100,00	20.400.000	20.400.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	398.200.000	395.160.000	99,24	401.020.000	401.020.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.168.100	91.639.100	147,41	28.890.000	36.459.700	126,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.864.000	32.864.000	100,00	25.320.000	25.920.000	102,37
	Pemeliharaan Mebel	2.625.000	2.625.000	100,00			0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.500.000	100,00	3570000	3570000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.179.100	49.650.100	246,05	0	6969700	0,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	5.230.100	5.230.100	100,00	3.126.650	3.126.650	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.230.100	5.230.100	100,00	3.126.650	3.126.650	100,00
	Fasilitiasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.764.400	2.764.400	100,00	1.714.400	1.714.400	100,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.465.700	2.465.700	100,00	1.412.250	1.412.250	100,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	44.317.300	47.817.300	107,90	12.004.750	12.004.750	100,00
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.317.300	47.817.300	107,90	12.004.750	12.004.750	100,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.684.000	6.684.000	100,00	4.514.000	4.514.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.633.300	41.133.300	109,30	7.490.750	7.490.750	100,00

4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	32.560.000	32.560.000	100,00	24.600.000	24.600.000	100,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.560.000	32.560.000	100,00	24.600.000	24.600.000	100,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.560.000	32.560.000	100,00	24.600.000	24.600.000	100,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	47.389.000	47.389.000	100,00	31.398.000	32.398.000	103,18
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.389.000	47.389.000	100,00	31.398.000	32.398.000	103,18
	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000	6.000.000	100,00	2500000	1500000	0,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.875.000	32.875.000	100,00	26.398.000	26.398.000	100,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.514.000	8.514.000	100,00	2.500.000	4.500.000	180,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	15.516.200	15.516.200	100,00	11.520.000	14.020.000	121,70
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.516.200	15.516.200	100,00	11.520.000	14.020.000	121,70
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.379.000	8.379.000	100,00	5.846.000	8.346.000	142,76
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.137.200	7.137.200	100,00	5.674.000	5.674.000	100,00

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Maret 2025 (Triwulan I) yang masih menggunakan anggaran yang belum dilakukan efisiensi adalah sebagai berikut

Tabel 2.2
Realisasi APBD (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan)
Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	2024			2025		
		APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)	APBD	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	2.272.018.749	2.230.045.219	98,15	2.506.571.763	1.054.417.444	42,07
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.019.200	7.019.200	100,00	9.745.650	1.437.650	14,75
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.676.800	5.676.800	100,00	7.244.900	971.950	13,42
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.342.400	1.342.400	100,00	2.500.750	465.700	18,62
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.724.949	1.570.151.492	97,60	1.943.535.213	801.180.136	41,22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.608.724.949	1.570.151.492	97,60	1.943.535.213	801.180.136	41,22

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.800.000	23.630.000	99,29	68.000.000	67.320.000	99,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.800.000	23.630.000	99,29	68.000.000	67.320.000	99,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.123.000	90.123.000	100,00	37.220.900	10.015.050	26,91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.511.600	2.511.600	100,00	2.369.900	904.600	38,17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.247.100	18.247.100	100,00	11.960.700	3.968.650	33,18
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.034.800	19.034.800	100,00	9.427.200	1.881.800	19,96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.845.000	5.845.000	100,00	2.471.600	703.000	28,44
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	460.000	460.000	100,00	0		0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.635.000	40.635.000	100,00	10.000.000	2.000.000	20,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.389.500	3.389.500	100,00	991.500	557.000	56,18
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.152.500	35.152.500	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.000.000	19.000.000	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Mebel	1.552.500	1.552.500	100,00	0	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	14.600.000	100,00	0	0	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.560.000	415.266.484	99,93	421.420.000	163.994.108	38,91
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	20.106.484	98,56	20.400.000	10.274.108	50,36
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.160.000	395.160.000	100,00	401.020.000	153.720.000	38,33
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.639.100	88.702.543	96,80	26.650.000	10.470.500	39,29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.864.000	29.927.443	91,06	25.920.000	10.470.500	40,40
	Pemeliharaan Mebel	2.625.000	2.625.000	100,00			0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.500.000	100,00	730000		0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.650.100	49.650.100	100,00			0,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	5.230.100	5.230.100	100,00	2.484.950	600.350	24,16
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.230.100	5.230.100	100,00	2.484.950	600.350	24,16
	Fasilitiasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.764.400	2.764.400	100,00	1.354.700	129.850	9,59
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.465.700	2.465.700	100,00	1.130.250	470.500	41,63
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	47.817.300	47.817.300	100,00	9.675.900	6.114.200	63,19

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.817.300	47.817.300	100,00	9.675.900	6.114.200	63,19
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.684.000	6.684.000	100,00	4.514.000	4.514.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.133.300	41.133.300	100,00	5.161.900	1.600.200	31,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	32.560.000	32.560.000	100,00	24.000.000	10.500.000	43,75
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.560.000	32.560.000	100,00	24.000.000	10.500.000	43,75
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.560.000	32.560.000	100,00	24.000.000	10.500.000	43,75
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	47.389.000	47.389.000	100,00	19.900.000	0	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.389.000	47.389.000	100,00	19.900.000	0	0,00
	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.000.000	6.000.000	100,00			0,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	32.875.000	32.875.000	100,00	16.300.000	0	0,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.514.000	8.514.000	100,00	3.600.000	0	0,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	15.516.200	15.516.200	100,00	9.172.000	1.540.000	16,79
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.516.200	15.516.200	100,00	9.172.000	1.540.000	16,79
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.379.000	8.379.000	100,00	4.672.000	1.540.000	32,96
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.137.200	7.137.200	100,00	4.500.000		0,00

Alokasi dana Tahun 2024 sebesar Rp. 2.420.531.349,00 (*dua milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah)* atau 98,27 **%,** lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 95,12%. Sedangkan capaian sampai dengan Twiwulan I Tahun 2025 adalah Rp. 1.073.171.994,00 atau 40,82% dari pagu anggaran Rp. 2.629.141.613,00.

Tabel 2.3
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

NO	PROGRAM	2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.261.177.624	2.136.748.807	94,50	2.272.018.749	2.230.045.219	98,15
2	Program Penyelenggaraan Pemerinatahan dan Pelayanan Publik	7.053.700	7.053.700	100,00	5.230.100	5.230.100	100

3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	128.655.600	128.127.600	99,59	47.817.300	47.817.300	100
4	Program Koordinasi Ketentaraman dan Ketertiban Umum	32.698.100	32.698.100	100,00	32.560.000	32.560.000	100
5	Program Penyelenggearaan Urusan Pemerintahan Umum	123.528.300	123.020.800	99,59	47.389.000	47.389.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.295.200	17.295.200	100,00	15.516.200	15.516.200	100
	Presentase Realisasi	2.570.408.524	2.444.944.207	95,12	2.420.531.349	2.378.557.819	98,27
	Rata -rata Realisasi 6 Program			98,946			99,69

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jenawi

Kecamatan Jenawi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jenawi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain:

- Meningkatnya Nilai Sakip
- Meningkatnya Indeks Desa Membangun
- Meningkatnya Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya
- Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat
- Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif
- Meningkatnya Persentase wilayah dalam keadaan kondusif
- Meningkatnya Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana
- Meningkatnya Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jenawi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

   Kekuatan:
   - Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
   - Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya

- Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
- Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
- Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
- Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
- Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah
- Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah

Kelemahan:

- Masih cukup banyak penduduk miskin
- Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
- Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
- Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan kamtibmas
- Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang:

- Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
- Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
- Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
- Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
- Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
- Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah
- Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM

Ancaman:

- Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- Munculnya faham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jenawi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

TABEL 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jenawi dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jenawi s/d Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jenawi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2024	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2025
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
	Bidang Kewilayahan									
07.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	**Na**	**Na**	**95**	**95**	**100**	**95**	**42,07**	**44,28**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**33,33**	**33,33**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD		5	5	5	100	6	2	33,33
7.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	3	3	100	15	9	60
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**97,60**	**97,60**	**100**	**41,22**	**41,22**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN		15	14	14	100	14	14	100

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		34	34	34	100	34	34	100
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	jumlah penyediaan komponen listrik dan instalasi kantor		12	12	12	100	12	5	33,33
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistic kantor	Tersedianya bahan logistic kantor, dan alat kebersihan kantor		12	12	12	100	12	5	33,33
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan		12	12	12	100	12	4	26,67
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan perjalanan dinas kantor		12	12	12	100	12	4	26,67
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0	12	12	100	12	5	26,67
7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	1	1	100	0	0	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	1	1	100	0	0	**0**

7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan		3	3	3	100	2	0	**0**
7.01.01.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38,91**	**38,91**
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan listrik		12	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor		12	12	12	100	12	5	41,66
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Cakupan Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**39,29**	**39,29**
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayar pajaknya		3	4	4	100	4	1	25
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		0	8	8	100	0	0	0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara		8	5	5	100	2	0	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainya yang dipelihara		1	2	2	100	1	0	0
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN dan PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat**	**85,25**	**85,225**	**85,25**	**86,25**	**101,17**	**85,25**	**50,95**	**50,95**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak**	**Terselenggaranya urusan Pemerintahan**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,95**	**50,95**

	dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**								
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat		2	2	2	100	2	1	50
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Msyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12	12	12	100	12	5	41,67
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Prosetase Lembaga Kemasyarakatan aktif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**50,48**	**50,48**
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7	7	7	100	7	7	**100**
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**12**	12	12	100	12	5	41,67
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**36,96**	**36,96**
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,tantara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia		12	12	12	100	12	5	41,67

	Vertikal di Wilayah Kecamatan	,tantara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa/kelurahan yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan dan keagamaan**	**100**	**Na**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultassi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang Mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,konsultassi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		120	90	90	100	0	0	0
7.01.05.2.01.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		270	200	200	100	180	0	0
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Antar suku dan intrasuku, umat Beragama, Ras dan Golongan lainya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan nasional		120	120	120	100	90	0	0

7.01.06	**PROGRAM, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Tertib Perda**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9	9	9	100	9	9	100
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok Kepala Desa dan Perangkat desa		9	9	9	100	9	0	0

Tabel 2.5
Capaian Indikator Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan
Jenawi Tahun 2024 dan Tahun 2025 Tribulan II

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET CAPAIAN		REALISASI CAPAIAN	
				2024	2025	2024	2025 TW II
1	**Tujuan 1** : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65	Tidak dipakai	85,74	Tidak dipakai
2	**Tujuan 2** : Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,52	Tidak dipakai	9,59	Tidak dipakai
3	**Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72	72,25	73,03	0
4	**Sasaran 2** : Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,712		0,7078	
5	**Tujuan :** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan	%	Na	96,5	Na	
6	**Sasaran :** Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai IKM	Nilai		86,4	86,25	83
7	Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai targetnya	%	96	Tidak dipakai	96	Tidak dipakai
		Nilai SAKIP	Nilai	72	72,25	73,03	0
8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,25	85,3	86,25	35,77
		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%		100		
9	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	100	100	100
10	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan Kondusif	%	100	100	100	100
11	Program Penyelenggaran Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100	100	100	0
12	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	100	100	100	100

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 dan 2025 (Smt 1)

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2024			2025		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	72	73,05	101,458	Tidak dipakai		
2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,712	0,7078	99,4101	Tidak dipakai		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM	Nilai	85,25	86,25	101,173	86,4	83	96

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jenawi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan program/kegiatan di atas antara lain adalah :

1. **Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan**
   belum optimalnya Pemerataan beban kerja, ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan, kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan, ketersediaan Sarpras masih kurang dalam menunjang kinerja pelayanan di Kecamatan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
2. **Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik**
   Kecamatan belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dan alur kerja sesuai dengan standarnya, sehingga pelaksanaan tugas sering bersifat tidak konsisten. Akibatnya, koordinasi internal maupun eksternal belum optimal.
3. **Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa**
   Pembangunan kelurahan belum selaras dengan target pembangunan daerah. Belum optimalnya dukungan kelembagaan pada desa dalam mendukung program prioritas daerah
4. **Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum pada lingkungan masyarakat**
   Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan.

Tabel 2.7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jenawi

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Belum Optimalnya penunjang kinerja pelayanan dalam dukungan pelaksanaan pelayanan pada kecamatan	a. Ketersediaan SDM aparatur belum sesuai kebutuhan
			b. Kompetensi SDM belum merata pada seluruh unit kerja dalam memberikan pelayanan
			c. Sistem informasi pelayanan belum terintegrasi atau masih manual.
			d. Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan pelayanan belum diterapkan dengan baik
			e. Belum ada standar pelayanan minimal (SPM) yang diterapkan secara konsisten
		Belum Optimalnya penerapan standar pelayanan publik	a. Belum adanya sistem tata kelola pelayanan publik yang berbasis standar secara menyeluruh, mencakup aspek regulasi, kapasitas SDM, sistem pengawasan, dan partisipasi masyarakat, sehingga penerapan standar pelayanan belum menjadi budaya kerja yang konsisten di seluruh unit pelayanan.
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan Terhadap masyarakat	Belum Optimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	a. Penerapan standar pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal
			b. dukungan sarpras pelayanan yang bersifat kemitraan berada diluar jangkauan kecamatan
		Belum Optimalnya penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan	a. Jangkauan wilayah belum seimbang dengan ketersediaan SDM

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		ketertiban umum pada lingkungan masyarakat	b. Terdapat titik wilayah rawan sosial, dan keamanan yang masih belum optimal diselesaikan
			c. Pemahaman terhadap implementasi Penegakan PERDA belum merata

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang te lah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Jenawi dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jenawi dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jenawi Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029. Rencana Kerja Kecamatan Jenawi berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jenawi.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.10

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026
Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	Kecamatan				***2.801.486.092***					***2.702.591.000***	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec.Jenawi**	**Nilai SAKIP**	**73,10 nilai**	**2.705.364.292**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec.Jenawi**	**Nilai SAKIP**	**73,10 nilai**	**2.559.391.000**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100%	12.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100%	12.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi Keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100%	1.965.500.292	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100%	1.950.291.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	36.600.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase administrasi Kepegawaian perangkat daerah yang diselesaikan	100%	36.600.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	103.864.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100%	83.120.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	100%	62.500.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	100%	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	434.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	406.480.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100%	90.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Jenawi	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100%	67.000.000	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Jenawi**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100%**	**4.271.800**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec.Jenawi**	**Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan**	**100%**	**4.500.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	4.271.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	4.500.000	

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Jenawi**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**15.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec.Jenawi**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif**	**100%**	**16.650.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina	7 lembaga	15.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina	7 lembaga	16.650.000	
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**6.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**Persentase wilayah dalam keadaan kondusif**	**100%**	**4.000.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jenawi	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	9 Wilayah	6.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Jenawi	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	9 Wilayah	4.000.000	
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Jenawi**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	**100%**	**63.850.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec.Jenawi**	**Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana**	**100%**	**91.000.000**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 kegiatan	63.850.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Jenawi	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 kegiatan	91.000.000	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Jenawi**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**7.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec.Jenawi**	**Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan**	**100%**	**27.050.000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Jenawi	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100%	7.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Jenawi	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100%	27.050.000	

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain dan bukan oleh Kecamatan Jenawi. Namun dalam proses ini Kecamatan Jenawi mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Jenawi terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Jenawi.

Tabel 2.9
Usulan program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
			NIHIL		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, untuk RKP Tahun 2026 mengusung tema ***"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif."*** Tema ini merefleksikan upaya untuk memperkuat ketahanan domestik, menjawab tantangan global, dan memastikan pembangunan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia. RKP 2026 memuat lima program prioritas sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah. Lima program prioritas ini didasarkan pada Trisula Pembangunan untuk mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan dengan target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, penurunan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kualitas SDM.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 menetapkan sasaran Pembangunan yang mencakup :

1. Indeks Reformasi Birokrasi, dengan target 86,50
2. Nilai SAKIP, dengan target 71,00
3. Maturitas SPIP, dengan target 3,25
4. Indeks Pelayanan Publik, dengan target 4,54
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, dengan target 72,45
6. Indeks Daya Saing Daerah dengan target 3,85
7. Indeks Pembangunan Manusia, dengan target 79,26
8. Pertumbuhan Ekonomi, dengan target 6,20
9. Indeks Ketahanan Pangan, dengan target 89,72
10. Tingkat Kemiskinan, dengan target 8,84 %

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;

7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam **16 prioritas daerah (PD)** dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standarrumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;

5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27 persen;

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;

2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional. Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :
1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;

14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;
15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;
16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.*(Ranwal RPJMD hal III-41).*

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran dan Program Renja Kecamatan Jenawi

Tujuan dan sasaran renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jenawi Tahun 2025 - 2029. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Jenawi adalah;

TABEL 3. 1
Tujuan – Sasaran –dan Program (Target Tahun 2026)

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Persentase Standar Operasional Prosedur yang Diimplementasikan	%	97,50
2		Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM	Nilai	86,40
3			Program Penunjang Urusan Demerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Nilai	73,10

4			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	%	100
5			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100
6			Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100
7			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	%	100
8			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	%	100

3.3. Tantangan dan Peluang

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

3.3.1 Tantangan

1) Tuntutan Reformasi di berbagai bidang dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
2) Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal.
3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

3.3.2 Peluang

1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Jenawi untuk meningkatkan kinerja.
3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara Kecamatan Jenawi mencapai atau mewujudkan tujuan dan sasaran diatas dan mengukur berhasil tidaknya. Terwujud tujuan dan sasaran Kecamatan Jenawi dan tercapai tidaknya kinerja pelayanan, ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program Kegiatan dan Subkegiatan. Keberhasilan pencapaian tujuan,

sasaran tergantung hasil pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jenawi.

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Agar menjadi jelas bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah dan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, digambarkan dalam bentuk sederhana pohon kinerja berikut :

3.4.1. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan pohon kinerja tersebut dapat telusuri cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Keselarasan Sasaran OPD, dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

SASARAN OPD	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
			Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JENAWI

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jenawi

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2026 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2026. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 - 2029, Renstra OPD. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan Kecamatan Jenawi di tahun 2026 adalah sebagaimana tertulis dalam berikut ini:

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
      1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrai Keuangan
      1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pendidikan dan Petlatihan pegawai Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi
   d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4). Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
      5). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
      7). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
   e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
      Daerah
      1). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
      2). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pengadaan Mebel
   f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
      Daerah
      1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      3). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangakat daerah yang ada di kecamatan
      1). Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a). Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
      1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
      2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   a). Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
      1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah
      1). Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
      2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama,Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional
      3). Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      1). Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
      2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      3). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      4). Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat desa
      5). Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
      6). Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

4.2 Dana Indikatif Kecamatan Jenawi

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu

4.3 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jenawi

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD

Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jenawi Tahun 2026 Kabupaten Karanganyar Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Kecamatan Jenawi						2.036.291.147,00							2.803.473.892,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						2.036.291.147,00							2.803.473.892,00	
	7	01				KECAMATAN						2.036.291.147,00							2.803.473.892,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	73,22 nilai	73,05	73,05	73,1 nilai	1.969.656.597,00						73,12 nilai	2.705.364.292,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai standar	100 %	100%	100%	100 %	3.399.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa	100 %	12.500.000,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	5 Dok	6 Dok	5 Dok	1.893.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa	6 Dok	6.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15Laporan	15 Laporan	1.506.600,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Desa	15 Laporan	6.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100 %	1.490.291.147,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Keuangan	100 %	1.965.500.292,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang /bulan	13 Orang /bulan	14 Orang /bulan	14 Orang /bulan	1.490.291.147,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Keuangan	14 Orang /bulan	1.965.500.292,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100%	100%	100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Kepegawaian	100 %	36.600.000,00	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 orang	34 orang	34 orang	38 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Kepegawaian	38 Orang	36.600.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin perkantoran	100 %	100 %	100%	100 %	39.235.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	100 %	103.864.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.368.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	3.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	8.938.650,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	24.729.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	7.165.200,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	21.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2.436.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Paket	6.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10 Laporan	16.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Laporan	43.635.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok	12 Dok	12 Dok	6 Dokumen	1.528.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Administrasi Umum Kantor	12 Dok	4.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana prasarana sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	62.500.000,00	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	30.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	7.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	25.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	406.480.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	434.400.000,00	

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Laporan	24.400.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	385.480.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	12 Laporan	410.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	30.250.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	90.000.000,00	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	4 Unit	8 Unit	9 Unit	27.450.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	40.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel													
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	8 Unit	0 Unit	12 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	3.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5 Unit	2 Unit	8 Unit	2.800.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	8 Unit	6.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	1 unit	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 unit	40.000.000,00	KEC. JENAWI
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pelayanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan	100 %	100 %	100 %	100 %	1.773.400,00						100 %	6.259.600,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan yang sesuai standar	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	1.773.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan kepada Masyarakat	12 Kegiatan	6.259.600,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	2 lap	2 lap	0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan kepada Masyarakat	0 Laporan	1.987.800,00	KEC. JENAWI
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.773.400,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pelayanan kepada Masyarakat	12 Laporan	4.271.800,00	KEC. JENAWI

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	9.248.850,00						100 %	15.000.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	9.248.850,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	7 Lembaga	15.000.000,00	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	4.454.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	5.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	4.794.850,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	-	12 Laporan	9.500.000,00	KEC. JENAWI
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100 %	100 %	100 %	100 %	1.680.000,00						100 %	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah wilayah yang mendapat pantauan ketentraman dan ketertiban umum	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	9 wilayah	1.680.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9 wilayah	6.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12 laporan	12 laporan	1 Laporan	1.680.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	6.000.000,00	KEC. JENAWI
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan wawasan kebangsaan dan Keagamaan yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	41.400.000,00						100 %	63.850.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam wawasan kebangsaan dan keagamaan	4 Kegiatan	3 Keg	3 keg	4 Kegiatan	41.400.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	4 Kegiatan	63.850.000,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 orang	0 orang	0 orang	160 Orang	17.130.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	250 orang	38.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	90 orang	120 orang	90 Orang	45 Orang	2.670.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	90 orang	5.250.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dok	0 dok	0 Dok	12 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	12 dok	20.600.000,00	KEC. JENAWI
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	12.532.300,00						100 %	7.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki fasilitas pemerintahan desa sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	12.532.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	100 %	7.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9 Dokumen	0 Dok	0 Dok	9 Dokumen	1.460.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.750.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	0 Dok	0 Dok	9 Dokumen	1.344.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	3.360.000,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.500.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	0 Dok	0 Dok	9 Dokumen	1.632.200,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamistif 6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Pemerintahan Desa	9 Dokumen	1.000.000,00	KEC. JENAWI
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen	0 Dok	0 Dok	3 Dokumen	536.100,00	Kab. Karanganyar, Jenawi, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 3. Meningkatkan integritas dalam tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Desa	3 Dokumen	750.000,00	KEC. JENAWI
	J U M L A H											**2.036.291.147,00**							**2.801.486.092,00**	

4.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk kedepannya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Nilai IKM	Nilai	86,4

4.5 Program Kecamatan Jenawi yang Mendukung Prioritas Progam Pembangunan Daerah Tahun 2026

Berikut ini program/kegiatan/subkegiatan Kecamatan Jenawi yang mendukung prioritas Pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan yang mendukung prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

No.	Program Prioritas Kabupaten	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi	**Program:** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan:** Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan **Sub Kegiatan:** Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.1773.400
2	Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air	**Program:** Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	

		Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah **Sub Kegiatan:** • Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp.17.130.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jenawi Tahun 2025 - 2029 dalam target dan Sasaran Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jenawi harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jenawi.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jenawi Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Kecamatan Jenawi yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jenawi secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/*mindset*.

Semoga Renja Kecamatan Jenawi Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

LAMPIRAN XLII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran yang cukup strategis dalam urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Isu penting yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah peningkatan pemahaman ideologi, pendidikan politik, dan kewaspadaan daerah di Kabupaten Karanganyar.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 merupakan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode satu tahun. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman bagi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, serta Kepala Bagian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026.

Karanganyar, September 2025
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **ii**
Daftar Isi **iii**
Daftar Tabel **iv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan I-3
1.4. Sistematika Penulisan I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **II-1**
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-38
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi II-39
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat II-52

BAB III TUJUAN DAN SASARAN **III-1**
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah III-5
3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-7
3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah III-9
3.5. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD III-10

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **IV-1**
4.1 Program dan Kegiatan Bakesbangpol IV-1
4.2 Dana Indikatif IV-1
4.3 Sumber Dana yang dibutuhkan IV-1

BAB V PENUTUP **V-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 Bakesbangpol	II-2
Tabel 2.2	Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (SMT I)	II-5
Tabel 2.3	Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024	II-9
Tabel 2.4	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2024	II-10
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Tugas-Sasaran-Program Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar 2024-2025	II-38
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar	II-40
Tabel 2.7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-42
Tabel 2.8	Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar	II-43
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Kaupaten Karanganyar	II-52
Tabel 3.1	Tujuan-Sasaran-Indikator Sasaran dan Program (Target Tahun 2026)	III-8
Tabel 3.2	Tantangan dan Peluang Bakesbangpol	III-9
Tabel 3.3	Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator OPD	III-10
Tabel 3.4	Keselarasan Sasaran OPD dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	III-10
Tabel 4.1	Pencapaian Tujuan Sesuai Renstra dan Renja Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar Tahun 2026	IV-2
Tabel 4.2	Target IKU/IKK Tahun 2026 Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar	IV-10
Tabel 4.3	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota 2025-2029	IV-10

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang menjadi acuan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Tahun 2026 ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang berkelanjutan dan sistematik dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Renja memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dalam rangka mencapai visi misi RPJMD 2025-2029. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyusun Renja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya tersebut, dokumen Renja yang disusun juga berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu yang mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu, penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat disesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun lalu, serta memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada rancangan awal RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RPJMD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RPJMD. Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Karanganyar akan menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Karanganyar. RPJMD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat

yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 181);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 35).

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 01 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Selain itu, Renja juga menggambarkan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Kemudian tujuan dari penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap, dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
6. Sebagai acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan;
7. Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 ini memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. Renja ini diuraikan secara singkat dalam masing-masing sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan renja, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Perangkat Derah dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur struktur organisai, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan terkait maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 dan perkiraan pencapaian Tahun 2026 yang mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai perkembangan

tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, parpol, ormas, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menjabarkan tentang rencana kerja dan pendanaan dalam satu tahun anggaran.

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja tahun 2025 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar yang meliputi :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan; dan
3. Capaian kinerja program dan kegiatan.

Pada tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar melaksanakan 6 Program dengan 12 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7 Kegiatan, 18 Sub Kegiatan);
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan);
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan);
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (1 Kegiatan, 2 Sub Kegiatan);
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan);
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan).

2.1.1. Evaluasi Anggaran

a. Perbandingan usulan Renja dengan alokasi anggaran dalam APBD

Pada tahun 2024 dan 2025 Bakesbangpol telah merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kemudian menerima alokasi dana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Perbandingan Alokasi Dana Renja Perubahan 2024 dengan APBD Perubahan 2024 dan Renja 2025 dengan APBD 2025 Bakesbangpol

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		Renja Perubahan	APBD Perubahan	Realisasi (%)	Renja Penetapan	APBD Penetapan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesatuan Bangsa dan Politik	**46.057.497**	**45.427.997**	**98,63**	**14.120.582**	**13.990.562**	99,08
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.291.697**	**4.291.697**	**100**	**4.081.463**	**4.221.513**	103,43
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**5.482**	**5.482**	**100**	**25.000**	**50.000**	200,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.482	5.482	100	25.000	50.000	200,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.534.512**	**3.534.512**	**100**	**2.853.646**	**2.993.646**	104,91
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.534.512	3.534.512	100	2.853.646	2.993.646	104,91
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**105.373**	**105.373**	**100**	**280.880**	**280.297**	99,79
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.500	13.500	100	0	0	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.873	91.873	100	280.880	280.297	99,79
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**214.814**	**214.814**	**100**	**291.358**	**288.323**	98,96
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.466	5.466	100	6.239	6.239	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.039	15.039	100	24.725	24.725	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.753	16.753	100	21.933	16.498	75,22
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760	2.760	100	2.760	2.760	100,00
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.200	21.200	100	21.200	21.200	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.240	143.240	100	201.540	201.540	100,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.755	3.755	100	6.360	6.360	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600	6.600	100	6.600	9.000	136,36
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**4.500**	**4.500**	**100**	**31.155**	**31.155**	100,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	-	-	0	0	
	Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	0	0	
	Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500	4.500	100	31.155	31.155	100,00

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		Renja Perubahan	APBD Perubahan	Realisasi (%)	Renja Penetapan	APBD Penetapan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**223.920**	**223.920**	**100**	**240.480**	**246.000**	102,30
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	3.480	0	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200	55.200	100	72.000	72.000	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.720	168.720	100	174.000	174.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**203.096**	**203.096**	**100**	**349.944**	**332.092**	94,90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	159.500	159.500	100	247.898	230.046	92,80
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.500	3.500	100	7.000	7.000	100,00
	Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.096	10.096	100	35.046	35.046	100,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000	5.000	100	10.000	10.000	100,00
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000	25.000	100	50.000	50.000	100,00
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**800.000**	**800.000**	**100**	**800.000**	**800.000**	100,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**800.000**	**800.000**	**100**	**800.000**	**800.000**	100,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	350.000	350.000	100	250.000	350.000	140,00
	Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	0	0	
	Pembentukan Paskibraka	450.000	450.000	100	550.000	450.000	81,82
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**33.753.000**	**30.800.609**	**91,25**	**1.869.119**	**1.810.319**	96,85
	Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	**33.753.000**	**30.800.609**	**91,25**	**1.869.119**	**1.810.319**	96,85

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		Renja Perubahan	APBD Perubahan	Realisasi (%)	Renja Penetapan	APBD Penetapan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33.728.000	30.775.609	91,24	1.804.119	1.745.319	96,74
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.000	25.000	100	65.000	65.000	100,00
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**6.162.800**	**5.537.800**	**89,85**	**6.250.000**	**6.308.750**	100,94
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**6.162.800**	**5.537.800**	**89,85**	**6.250.000**	**6.308.750**	100,94
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6.142.800	5.517.800	89,82	6.168.250	6.298.000	102,10
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000	20.000	100	63.750	10.000	15,69

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		Renja Perubahan	APBD Perubahan	Realisasi (%)	Renja Penetapan	APBD Penetapan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**250.000**	**250.000**	**100**	**700.000**	**150.000**	21,43
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**250.000**	**250.000**	**100**	**700.000**	**150.000**	21,43
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000	250.000	100	700.000	150.000	21,43
6.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**800.000**	**3.752.391**	**469,04**	**1.250.000**	**700.000**	56,00
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**800.000**	**3.752.391**	**469,04**	**1.250.000**	**700.000**	56,00
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	350.000	3.302.391	943,54	550.000	325.000	59,09
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250.000	250.000	100	550.000	250.000	45,45
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.000	200.000	100	150.000	125.000	83,33

b. Perbandingan alokasi anggaran dalam APBD dengan realisasi anggaran

Jika dilihat dari realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2025 (Semester I) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Persandingan Realisasi APBD (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan) Tahun 2024 dan 2025 (SMT I)

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT I	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kesatuan Bangsa dan Politik	**45.427.997**			**13.990.562**	**1.947.738**	**13,92**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	4.291.697	3.431.462	79,96	**4.221.513**	**1.503.877**	**35.62**
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.482	5.391	98,34	**50.000**	**1.125**	**2.25**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.482	5.391	98,34	50.000	1.125	2.25
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.534.512	2.689.208	76,08	**2.993.646**	**1.047.709**	**34.99**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.534.512	2.689.208	76,08	2.993.646	1.047.709	34.99
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.373	93.508	88,74	**280.297**	**277.382**	**98.96**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.500	9.990	74,00	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	91.873	83.518	90,91	280.297	277.382	98.96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.814	222.679	103,66	**288.323**	**43.455**	**15.07**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.466	7.805	142,79	6.239	6.157	98.68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.039	12.527	83,30	24.725	5.681	22.97
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.753	14.083	84,06	16.498	1.000	6.06
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.760	2.760	100,00	2.760	690	25.00
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.200	20.617	97,25	21.200	2.173	10.25
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.240	154.533	107,88	201.540	25.803	12.80
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.755	3.755	100,00	6.360	0	0
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.600	6.600	100,00	9.000	1.950	21.67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500	11.350	252,22	**31.155**	**0**	**0**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	-	-	0	0	0
	Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	0	0	0

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT I	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengadaan Mebel	-	-	-	0	0	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500	11.350	252,22	31.155	0	0
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.920	191.480	85,51	**246.000**	**78.993**	**32.11**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	55.200	56.370	102,12	72.000	21.193	29.43
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.720	135.120	80,09	174.000	57.800	33.21
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.096	217.846	107,26	**332.092**	**55.210**	**16.62**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	159.500	174.710	109,54	230.046	47.625	20.70
	Pemeliharaan Mebel	3.500	-	0,00	7.000	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.096	14.271	141,35	35.046	6.645	18.96
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000	5.000	100,00	10.000	0	0
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000	23.865	95,46	50.000	940	1.88
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	800.000	959.451	119,93	**800.000**	**207.586**	**25.94**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	800.000	959.451	119,93	**800.000**	**207.586**	**25.94**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi	350.000	342.731	97,92	350.000	147.310	42.08
	Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	0	0	0
	Pembentukan Paskibraka	450.000	616.720	137,05	450.000	60.275	13.39
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	30.800.609	30.862.299	100,20	**1.810.319**	**32.157**	**1.77**
	Perumusan Kebijakan Teknis danPemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi	30.800.609	30.862.299	100,20	**1.810.319**	**32.157**	**1.77**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT I	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik						
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30.775.609	30.837.650	100,20	1.745.319	6.165	0.35
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.000	24.649	98,60	65.000	25.991	39.98
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	5.537.800	9.973.414	180,10	**6.308.750**	**7.223**	**0.11**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.537.800	9.973.414	180,10	**6.308.750**	**7.223**	**0.11**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.517.800	9.955.458	180,42	6.298.000	5.763	0.09
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000	17.956	89,78	10.000	1.460	14.60
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA**	250.000	241.948	96,78	**150.000**	**39.957**	**26.63**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan	250.000	241.948	96,78	**150.000**	**39.957**	**26.63**

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2024 (.000)			2025 (.000)		
		APBD Perubahan	Realisasi APBD	%	APBD Penetapan	SMT I	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ekonomi. Sosial dan Budaya						
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.000	241.948	96,78	150.000	39.957	26.63
6.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	3.752.391	3.914.588	104,32	**700.000**	**156.937**	**22.41**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.752.391	3.914.588	104,32	**700.000**	**156.937**	**22.41**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	3.302.391	3.371.842	102,10	325.000	81.822	25.17
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	250.000	428.535	171,41	250.000	71.565	28.62
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	200.000	114.210	57,11	125.000	3.550	2.84

Tabel 2.3.
Persandingan Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 dan 2024

No	Program	2023 (.000)			2024 (.000)		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.123.420	3.716.599	90.13	4.136.804	3.431.461	82.94
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.045.259	1.979.401	96.77	972.150	959.450	98.69
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.840.654	1.810.569	98.36	30.863.609	30.862.298	99.99
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	23.699.051	23.578.442	99.49	10.171.265	9.973.413	98.05
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya	1.109.320	1.055.417	95.14	250.000	241.948	96.77
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.016.840	987.306	97.09	3.936.669	3.914.587	99.43

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2024) dan tahun berjalan (2025). maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program. kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 pada halaman berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar s/d Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
08.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
08.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	-	97%	-	-	-		-	-
		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	90%	-	90%	20%	22%		-	-
8.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	94%	-	-	-		-	-
		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	-	6 Dokumen	3 Dokumen	50%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perangkat Daerah yang dihasilkan								
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	-	6 jenis	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	-	6 Dokumen	3 Dokumen	50%		-	-
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	94%	-	-	-		-	-
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90%	-	90%	40%	44%		-	-
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250rg/bln	-	25 org/bln	22 org/bln	88%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	94%	-	-	-		-	-
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90%	-	90	30%	33%		-	-
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	0	-	-	-		-	-
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	-	22 paket	-	0%		-	-
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	38 pegawai	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 pegawai	-	40 pegawai	-	0%		-	-
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	92%	-	-	-		-	-
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	-	90%	40%	44%		-	-
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	13 jenis	-	-			-	-
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%		-	-
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%		-	-
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	2 macam	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		disediakan								
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	-	12 laporan	4 laporan	33%		-	-
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	-	12 laporan	4 laporan	33%		-	-
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kearsipan perangkat daerah	-	12 bulan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	1 dokumen	50%		-	-
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	-	0%		-	-
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	94%	-	-			-	-
		Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	90%	-	90%	-	0%		-	-
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	-	2 unit	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	-	6 unit	-	-	-		-	-
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	-	4 unit	-	0%		-	-
8.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	-	0%		-	-
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	94%	-	-	-		-	-
		Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	90%	-	90%	40%	44%		-	-
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%		-	-
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi. Air dan	-	12 bulan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Listrik Perangkat Daerah								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%		-	-
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pelayananan perkantoran perangkat daerah	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	12 laporan	4 laporan	33%		-	-
8.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	-	1 unit	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	12 bulan	-	-	-		-	-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%		-	-
08.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	-	63%	-	-	-		-	-
		Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	70	-	70	-	0%		-	-
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan sosialisasi pelaksanaan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	-	1 dokumen	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
		Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	9 kejadian	-	9 kejadian	-	0%		-	-
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	-	540 orang	-	-	-		-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran	2.400 orang	-	1800 orang	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dalam rangka harmonisasi kerukunan antar etnis dan akulturasi budaya	-	1700 orang	-	-	-		-	-
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	450 orang	-	450 orang	150 orang	33%		-	-
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	-	-	77 orang	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	76%	-	-	-		-	-
		Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	70	-	70	-	0%		-	-
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum / Pemilihan Umum	-	1 dokumen	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemantauan Situasi Politik	Kepala Derah. serta Pemantauan Situasi Politik								
		Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada	70%	-	70%	88.46%	126%		-	-
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta kegiatan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	300 orang	-	-	-		-	-
		Jumlah Orang yang	1700	-	300 orang	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang							
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan	Jumlah peserta kegiatan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	-	200 orang	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan	250 orang	-	50 orang	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								
08.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang difasilitasi	-	42%	-	-	-		-	-
		Indeks Kinerja Ormas (IKO)	50	-	50	-	0%		-	-
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1 dokumen	-	-	-		-	-
		Persentase Ormas Aktif	36%	-	36%	18%	50%		-	-
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran	Jumlah kebijakan yang diterbitkan di Bidang	-	1 kebijakan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi. Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas. dan Ormas Asing di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600 orang	-	600 orang	200 orang	33%		-	-
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan pengawasan Ormas	-	1 laporan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang	-	50 orang	25 orang	50%		-	-
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	-	64%	-	-	-		-	-
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	60	-	60	-	0%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. dan Budaya	-	1 dokumen	-	-	-		-	-
		Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku. Agama. Ras dan Antar Golongan (SARA)	5 kejadian	-	5 kejadian	-	0%		-	-
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	-	8 laporan	-	-	-		-	-
		Jumlah laporan Fasilitasi Kerukunan	-	16 laporan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.000 orang	-	1000 orang	300 orang	30%		-	-
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	Persentase konflik sosial yang ditangani	-	84%	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SOSIAL									
		Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	80%	-	80%	100%	125%		-	-
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	1 dokumen	-	-	-		-	-
		Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis	4 kejadian	-	4 kejadian	-	0%		-	-
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen.	Jumlah laporan pemetaan/mapping daerah rawan konflik	-	2 laporan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	300 orang	-	300 orang	150 orang	50%		-	-
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah laporan pemantauan kegiatan	-	50 laporan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	500 orang	-	150 orang	75 orang	50%		-	-
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	4 dokumen	-	4 dokumen	1 dokumen	25%		-	-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target 2025 s/d Tahun Berjalan 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Daerah Kabupaten/Kota								

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam hal ini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tidak mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Tugas – Sasaran – Program
Bakesbangpol 2024-2025

Program	Indikator Program	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan Wasbang	%	-	-	-	-	-
	Indeks Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Nilai Indeks	70	78.2	111.71	-	-
	Cakupan kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kecamatan	-	-	-	17	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	%	-	-	-	-	-
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai Indeks	60	76.4	127.33		-
	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi. sosial dan budaya	Kecamatan	-	-	-	17	-
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penaganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani	%	-	-	-	-	-
	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun	%	80	100	125.00	-	-
	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	Kecamatan	-	-	-	17	-
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	-	-	-	-	-
	Persentase pendidikan politik pada kader partai	Nilai Indeks	-	-	-	37.50	-

Program	Indikator Program	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	politik						
dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Kebebasan Sipil (IKS)	Nilai Indeks	70	52.9	75.57	-	-
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	-	-	-	-	-
	Indeks Kinerja Ormas (IKO)	Nilai Indeks	50	63.4	126.80	-	-
	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	-	-	-	54.00	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	-	-	-	-	-
	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	%	90	93	103.33	91	-

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar

Indikator	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja 2025
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	0	100	0	-
Nilai AKIP OPD	Nilai	73	73.35	100.48	74.50	-

Dari Tabel 2.6 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 semua indikator sasaran tercapai. Dalam tujuan peningkatan kondusivitas wilayah. jumlah kasus konflik SARA nihil. Nilai AKIP 2024 yang ditargetkan mendapatkan nilai 73. terealisasi di atas target sebesar 73.35 (hasil penilaian melampaui target sebesar 0.48%). Untuk pencapaian kinerja tahun 2025. sampai dengan penyusunan Renja ini masih nihil konflik SARA dan Nilai AKIP belum dilakukan penilaian.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat terjamin.

Ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian

visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Radikalisme masih menjadi salah satu isu penting dalam membangun moderasi beragolak belakang dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga tetap perlu perhatian khusus untuk mencegah disintegrasi bangsa dan negara.
2. Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu fokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Membangun generasi muda yang berwawasan kebangsaan sangat erat kaitannya. Sehingga dibutuhkan perhatian semua pihak dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya potensi konflik sosial.	Belum optimalnya penanganan terhadap potensi konflik sosial	• Nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai melemah • Kurangnya ormas yang berbartisipatif • Masih tingginya penyalahgunaan narkoba • Masih rendahnya peran forum dalam membantu stabilitas keamanan dan ketertiban • Belum optimalnya pendidikan politik kepada masyarakat

Sumber : Bakesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2025

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2025 seperti pada tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Bakesbangpol Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**12.990.872.971**	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**13.118.372.971**	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**12.990.872.971**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**13.118.372.971**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			**4.221.513.727**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.249.013.727**	
Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**6.000.000**	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**6 Dokumen**	**6.000.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**92%**	**3.079.053.727**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**92%**	**3.079.053.727**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.079.053.727	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.079.053.727	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**92%**	**166.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**92%**	**170.000.000**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	20 Paket	16.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	25 Paket	20.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Kelengkapan				Kelengkapan			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	150.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92%**	**257.960.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92%**	**259.460.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.760.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.760.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	170.000.000	
Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	6.900.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	6.900.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**92%**	**125.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**92%**	**125.000.000**	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	25.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**92%**	**313.600.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**92%**	**313.600.000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	241.600.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang**	**92%**	**273.900.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang**	**92%**	**295.900.000**	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Milik Daerah				**Milik Daerah**			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	213.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	213.900.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	3.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	45.000.000	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	7.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	7.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	27.000.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			**700.290.244**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**800.290.244**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**7 Kejadian**	**700.290.244**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**7 Kejadian**	**800.290.244**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran	450 Orang	250.290.244	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran	450 Orang	250.290.244	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	77 Orang	450.000.000	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	77 Orang	550.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			**800.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**800.000.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan P+A39emantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**800.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan P+A39emantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**800.000.000**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai	850 Orang	750.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai	850 Orang	750.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
di Daerah	Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			di Daerah	Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			**150.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**150.000.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase Ormas Aktif**	**40%**	**150.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**40%**	**150.000.000**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas.	75 Orang	125.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas.	75 Orang	125.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 Orang	25.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA			**5.308.750.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA**			**5.308.750.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku. Agama. Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**5 Kejadian**	**5.308.750.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya**	**Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang Suku. Agama. Ras dan Antar Golongan (SARA)**	**5 Kejadian**	**5.308.750.000**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	1.000 Orang	5.308.750.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	1.000 Orang	5.308.750.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	di Daerah				di Daerah			
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			**1.810.319.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**1.810.319.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**1.810.319.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah kejadian unjuk rasa yang bersifat kekerasan/anarkis**	**4 Kejadian**	**1.810.319.000**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	810.319.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	810.319.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan	301 Orang	800.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan	301 Orang	800.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah			antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah			
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200.000.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			**700.290.244**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**13.118.372.971**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**7 Kejadian**	**700.290.244**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah kejadian perkelahian pelajar dan warga yang terjadi di Kabupaten Karanganyar selama 1 (satu) tahun**	**7 Kejadian**	**13.118.372.971**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	450 Orang	250.290.244	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	450 Orang	4.249.013.727	
Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	77 Orang	450.000.000	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	6 Dokumen	6.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK			**800.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK**		**6 Dokumen**	**6.000.000**	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				**DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**				
Perumusan Kebijakan Teknis dan P+A39emantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**0%**	**800.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan P+A39emantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase partisipasi pemilih pada Pemilu/Pemilukada**	**92%**	**3.079.053.727**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	850 Orang	750.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Orang/bulan	3.079.053.727	
Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Orang yang	50 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Orang yang	92%	170.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			**150.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**25 Paket**	**20.000.000**	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Persentase Ormas Aktif**	**40%**	**150.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Ormas Aktif**	**38 Orang**	**150.000.000**	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75 Orang	125.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	92%	259.460.000	
Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Orang yang	25 Orang	25.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Orang yang	1 Paket	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini. proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara top down akan tetapi juga secara bottom up artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2026 tentunya juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para pemangku kepentingan seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik tentunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. hal ini menyebabkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tidak dapat mengakomodir seluruh usulan dari masyarakat untuk Tahun 2025.

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penyelarasan Renja Bakesbangpol dengan perencanaan nasional dan provinsi diperlukan untuk memastikan bahwa peran strategis Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas politik. memperkuat ideologi Pancasila. serta memelihara kerukunan masyarakat berjalan searah dengan prioritas pembangunan yang lebih luas. Dengan harmonisasi ini. setiap program Bakesbangpol—baik terkait pendidikan kebangsaan. pembinaan ormas. deteksi dini konflik. maupun penguatan toleransi—dapat memberikan kontribusi langsung terhadap sasaran nasional dan provinsi. seperti peningkatan kualitas demokrasi. penguatan kohesi sosial. dan pembangunan ketahanan daerah. Penyelarasan ini juga mendorong sinergi lintas pemerintahan. menghindarkan duplikasi kebijakan. serta membuka peluang dukungan dan fasilitasi dari pemerintah pusat dan provinsi. sehingga Renja Bakesbangpol menjadi lebih efektif. terarah. dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Persoalan kemiskinan menjadi salah satu target kebijakan Pembangunan Nasional agar kesenjangan pendapatan menjadi kecil. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulanginya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik.

Penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu Dispermades mempunyai peran yang penting dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan.

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Tema pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 adalah ***"Meneguhkan poisisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional"*** didukung dengan 22 strategi yang akan dilakukan, meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang,dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, danpenguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melaluipengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);

9. Penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian danketahanan pangan desa;
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. Penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. Penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. Penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. Peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. Reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras denganteknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanianberkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. Penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. Peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. Mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. Mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. Peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. Mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui programinkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam 16 prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
2. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
3. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri;
4. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
5. Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;

6. Menyiapkan Sistem Irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati);
7. Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM;
8. Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian;
9. Petani milenial gajian
10. Pengembangan Peternak Lokal berbasis Potensi melahirkan bibit Ternak Khas Jawa;
11. Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi
12. Revitalisasi embung
13. Pengembangan Urban Farming untuk pertanian kawasan perkotaan
14. Subsidi Pangan Murah
15. Penyediaan benih yang berkualitas
16. Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan: 8,70-8,53 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi: 92.
3. Indek Integritas Nasional: 80,97
4. Indeks Demokrasi Indonesia: 86,46-89,50
5. Otonomi Fiskla Daerah: 65,72 persen
6. Pertumbuhan ekonomi : 5-6 persen;
7. Indeks Modal Manusia: 0,62
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71-4,27

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan dan Sasaran Daerah

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sehingga untuk penyusunan RKPD Tahun 2026 harus mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah “SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR” Mewujudkan Karanganyar sebagai Bumi INTANPARI yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Visi ini diuraikan dalam tujuan pembangunan dalam 5 tahun sebagai berikut :

1) Meningkatkan daya saing Kabupaten Karanganyar;
2) Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat ;
3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah;
4) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dengan sasaran dalam 5 tahun adalah :

1) Meningkatnya potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja;
2) Meningkatnya kualitas SDM yang inklusif, berkarakter dan adil;
3) Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender;
4) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan yang mampu mendorong kemandirian pangan;
5) Meningkatnya riset dan inovasi;
6) Meningkatnya kondusivitas wilayah;
7) Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah;
8) Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim
9) Meningkatnya kualitas desa dalam mendorong pemerataan pembangunan
10) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah;
11) Meningkatnya akuntabilitas pembangunan dalam pengelolaan kebijakan publik;
12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan tahun kedua (2026) adalah ***Penguatan Integritas Tata Kelola Pemerintahan dan daya saing SDM dalam mendukung Pangan Nasional.***

Fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan daya saing SDM yang berintegritas melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur dalam mendukung Pangan Nasional.

Program Prioritas Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan ketahanan pangan, mendorong ketersediaan pangan dan cadangan pangan serta keamanan pangan. Meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga lahan berkelanjutan untuk pertanian;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Peningkatan maturitas SPIP dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mencegah korupsi;
4. Penanganan kemiskinan, pemberian bantuan sosial, program keluarga harapan, pemberian jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar;
5. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba;
6. KTP hebat untuk akses sandang, pangan, papan, kesehatan, sekolah dan pajak dengan sistem terpadu dan tepat sasaran;
7. Insentif untuk Guru Ngaji, Linmas, Penjaga tempat ibadah, kader posyandu, dan Guru swasta;
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas udara, kualitas air, keaneragaman hayati dan penanganan sampah. Mewujudkan ketahanan daerah terkait bencana, dan meningkatkan kesiap siagaan bencana;
10. Pupuk murah, mudah dan irigasi lancar;
11. Pembangunan infrastuktur jalan yang merata sehingga tercipta “Karanganyar Bebas Jeglongan”;
12. Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas;
13. Modal usaha 10 -30 juta setiap Karangtaruna yang berkelanjutan;
14. Pembangunan wisata yang berkelanjutan, penguatan desa wisata sebagai tujuan wisata;

15. Bantuan keuangan 100 Juta setiap desa per tahun. Sebagai pusat inovasi pertumbuhan daerah;

16. Peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian dengan hilirisasi dan moderinisasi pertanian. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kompetensi, dan penempatan tenaga kerja;
17. Menciptakan wawasan kebangsaan, bela negara cinta tanah air;
18. Pendampingan pesantren, pesantren ramah anak dan pesantren sehat;
19. Mendorong pemajuan kebudayaan, pengembangan ekonomi kreatif dan mengembangkan prestasi olahraga baik olahraga prestasi, olahraga rekreasi maupun paralimpiade.

Arah kebijakan, prioritas dan fokus pembangunan daerah merupakan upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 yaitu:

1. Angka kemiskinan: 8,84 persen;
2. Pertumbuhan ekonomi : 6,20 persen;
3. Indeks Pembangunan Manusia : 79,26;
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 72,45;
5. Indeks Reformasi Birokrasi: 86,50.
6. Nilai SAKIP: 71,00;
7. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,54;
8. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): 3,85;
9. Kapabilitas inovasi: 3;
10. Indeks Ketahanan Pangan: 89,70;

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Karanganyar. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Karanganyar ialah :

Tabel 3.1
Tujuan – Sasaran – dan Program (Target Tahun 2026)

Tujuan	Sasaran/Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Target Kinerja 2026
1	2	3	4	5
MENURUNNYA POTENSI DAN KEJADIAN KONFLIK SOSIAL		**Jumlah kasus konflik sosial**	**Kasus**	**0**
	Sasaran 1: Meningkatnya harmonisasi sosial. ekonomi. budaya. keberagaman dalam masyarakat	**Indeks Harmoni Indonesia (IhaI)**	**Kasus**	**6.52**
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan ideologi pancasila	Kecamatan	17

Tujuan	Sasaran/Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Target Kinerja 2026
1	2	3	4	5
		dan karakter kebangsaan		
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	37.50
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	54.00
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. dan budaya	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi. sosial dan budaya	Kecamatan	17
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	%	100
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas pelayanan Perangkat daerah	**Nilai IKM**	**Nilai**	**85.700**
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP	Nilai	73.50

Sumber: Renstra Bakesbangpol 2025-2029

3.3. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar menghadapi tantangan antara lain :

1. Ancaman peningkatan aksi intoleran terhadap kelompok tertentu;
2. Berkembangnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Kenakalan remaja yang kian mengarah pada aksi kriminalitas;
4. Peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilihan umum anggota legislatif;
5. Penyalahgunaan Narkoba yang terus terjadi; dan
6. Penurunan minat berpartisipasi pada Pemilihan Umum yang dikarenakan kurangnya pemahaman tentang politik.

Sedangkan peluang yang dimilik antara lain :

1. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
2. Kerjasama dan kemitraan yang dijalin dengan intansi vertikal di daerah dalam mendukung upaya menciptakan dan memelihara kondusivitas wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. Jalinan komunikasi dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat. tokoh agama. tokoh masyarakat. aparatur negara di tingkat kecamatan untuk menangani konflik sosial yang berkembang;
4. Media sosial yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai media sosialisasi. baik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai aksi kriminalitas di wilayah masing-masing. meng-counter informasi hoax yang beredar di masyarakat. maupun sosialisasi informasi yang berkaitan dengan kondusivitas wilayah;
5. Menyusun inovasi pelayanan dengan penggunaan media sosial untuk memperlancar pelaksanaan tugas maupun menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Tabel 3.2

Tantangan dan Peluang Bakesbangpol

Tantangan	Peluang
Peningkatan aksi intoleran	Dukungan dana dari anggaran Pemerintah Daerah
Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila	Kerjasama dengan mitra vertikal
Kenakalan remaja	Jalinan komunikasi dengan Ormas. LSM. tokoh agama. tokoh masyarakat. dan aparatur negara di Kecamatan/Kelurahan/Desa
Peningkatan partisipasi aktif kaum perempuan dalam pemilihan legislatif	Media Sosial yang dapat digunakan sebagai alat edukasi dan informasi kepada masyarakat
Penyalahgunaan narkoba	Inovasi pelayanan dengan media sosial atau media lain yang relevan.
Turunnya minat partisipasi dalam Pemilihan Umum	

3.4. Pengukuran Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan pencapaian tujuan. sasaran tergantung hasil pelaksanaan program. kegiatan dan subkegiatan Bakesbangpol. Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai. untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

3.4.1. Cascading Kinerja Program dan Tujuan - Sasaran OPD

Sesuai urusan yang ditangani. maka Bakesbangpol masuk dalam Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. untuk Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Sasaran daerah yang terkait langsung atau berdampak langsung adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Sasaran dan Indikator OPD

Misi / Tujuan / Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator
Misi 5: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama	Menurunnya potensi dan kejadian konflik sosial	Meningkatnya harmoni sosial, ekonomi, budaya, keberagaman dalam masyarakat	Indeks Harmoni Indonesia (IhaI)
Tujuan 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kondusivitas wilayah		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai SKM
Sasaran 3: Meningkatnya kondusivitas, kerukunan antar umat beragama, dan demokratisasi			

3.4.2. Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Cara pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Keselarasan Sasaran OPD dengan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Sasaran OPD /Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3
Sasaran OPD 1: Meningkatnya harmonisasi sosial. ekonomi. budaya. keberagaman dalam masyarakat		
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		Pembentukan Paskibraka
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Sasaran OPD /Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3
	Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Sasaran OPD 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Fasilitasi kunjungan tamu
		Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sasaran OPD /Program	Kegiatan	Subkegiatan
1	2	3
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
		Pengadaan aset tak berwujud
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan mebel
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan aset tak berwujud

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan Bakesbangpol

Pada tahun anggaran 2026 sebagai tahun kedua periode RPJMD 2025-2029. sebagai daya dukung dalam penyelenggaraan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol Kabupaten Karanganyar akan melaksanakan 6 Program, 12 Kegiatan, dan 32 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (7 Kegiatan. 22 Sub Kegiatan);
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (1 Kegiatan. 2 Sub Kegiatan);
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (1 Kegiatan. 2 Sub Kegiatan);
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (1 Kegiatan. 2 Sub Kegiatan);
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya (1 Kegiatan. 1 Sub Kegiatan);
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (1 Kegiatan. 3 Sub Kegiatan).

Program dan kegiatan di atas direncanakan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar. Program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1.

4.2. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya. masih bisa berubah). dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Pagu dana indikatif juga secara rinci dicantumkan dalam Tabel 4.1.

4.3. Sumber Dana yang Dibutuhkan

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana. yang dapat berasal dari APBD Kabupaten. APBD Provinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat

Tabel 4.1
Pencapaian Tujuan Sesuai Renstra Dan Renja Bakesbangpol Tahun 2026

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**7.649.499.476**							**9.275.960.000**	
	08.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**7.649.499.476**							**9.275.960.000**	
1	**08.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**		**74.25**	**73.35**	**73.45**	**73.50**	**3.506.769.476**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**73.75**	**4.380.960.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.01	**Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**10.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**100**	**7.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6	6	10.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				6	7.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**94**	**90**	**90**	**91**	**3.038.166.976**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**92**	**3.200.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	25	25	25	25	3.038.166.976	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				25	3.200.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**94**	**90**	**90**	**91**	**0**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**92**	**178.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	25	25	36	40	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				40	18.000.000	Badan Kesbangpol

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Paket	40	40	36	40	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				40	160.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**94**	**90**	**91**	**91**	**109.734.500**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**92**	**272.460.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	8.493.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	8.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	17.550.500	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	23.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	6.437.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	23.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	2.760.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	19.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				12	23.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	54.354.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				12	180.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	2	2	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				2	4.800.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.	Dukungan	Jumlah Dokumen	Dokume	1	1	1	1	3.900.000	Kab.	Dana				1	7.900.000	Badan

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2.06.0011	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n						Karanganyar	Alokasi Umum (DAU)						Kesbangpol
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**94**	**90**	**90**	**91**	**0**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**92**	**136.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5	5	-	5	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				5	0	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	40	40	-	40	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				40	26.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	5	5	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				5	80.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	1	-	1	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	30.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang**	**%**	**94**	**90**	**90**	**91**	**212.400.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**92**	**313.600.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	-	1	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	0	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	72.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	72.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	12	12	140.400.000	Kab. Karangan	Dana Alokasi				12	241.600.000	Badan Kesbangpol

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kantor yang Disediakan							yar	Umum (DAU)						
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**94**	**90**	**90**	**91**	**136.468.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**92**	**273.900.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	15	15	15	98.318.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				15	213.900.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	40	40	40	40	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				40	3.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	8	8	13.150.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				8	25.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	7.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	25.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				1	25.000.000	Badan Kesbangpol
2	**08.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Kecamatan**	**17**	**17**	**17**	**17**	**950.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**17**	**1.600.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah yang mengikuti koordinasi kebijakan bidang ideologi pancasaila dan karakter kebangsaan**	**Orang**	**326**	**1776**	**1776**	**326**	**950.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**326**	**1.600.000.000**	**Badan Kesbangpol**

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	200	1.700	1.700	200	400.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				200	1.100.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	-	-	50	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				50	0	Badan Kesbangpol
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	76	76	76	76	550.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				76	500.000.000	Badan Kesbangpol
3	**08.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pendidikan politik pada kader partai politik**	**%**	**38.25**	**37.27**	**37.50**	**37.50**	**1.642.730.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**37.75**	**600.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan**	**Jumlah yang mengikuti koordinasi kebijakan bidang pendidikan politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan**	**Orang**	**320**	**1420**	**1420**	**320**	**1.642.730.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**320**	**600.000.000**	**Badan Kesbangpol**

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	**Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**														
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	300	1.400	1.400	300	1.617.730.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				300	450.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	20	20	20	20	25.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				20	150.000.000	Badan Kesbangpol
4	**08.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas Aktif**	**%**	**55.50**	**54**	**54**	**54**	**500.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**55**	**295.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan**	**Jumlah yang mengikuti koordinasi kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi**	**Orang**	**540**	**620**	**620**	**420**	**500.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**540**	**295.000.000**	**Badan Kesbangpol**

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Organisasi Kemasyarakatan	**Kemasyarakatan**														
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	500	600	600	400	500.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				500	170.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas. Pemberdayaan Ormas. Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas. Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	40	20	20	20	0	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				40	125.000.000	Badan Kesbangpol
5	**08.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA**	**Cakupan Kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi. sosial. dan budaya**	**Kecamatan**	**17**	**17**	**17**	**17**	**200.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**17**	**850.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya**	**Jumlah yang mengikuti koordinasi kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. dan Budaya**	**Orang**	**200**	**300**	**300**	**200**	**200.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**200**	**850.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	200	300	300	200	200.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				200	850.000.000	Badan Kesbangpol

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	**08.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**800.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**100**	**1.550.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah orang yang mengikuti Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Orang**	**1.000**	**600**	**600**	**1.000**	**800.000.000**	**Kab. Karanganyar**	**Dana Alokasi Umum (DAU)**				**1.000**	**1.550.000.000**	**Badan Kesbangpol**
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	500	300	300	500	350.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				500	650.000.000	Badan Kesbangpol
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di	Orang	500	300	300	500	290.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				500	600.000.000	Badan Kesbangpol

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun	Prakiraan Capaian Target Renja OPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kel. Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Daerah														
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	4	4	160.000.000	Kab. Karanganyar	Dana Alokasi Umum (DAU)				4	300.000.000	Badan Kesbangpol

Tabel 4.2
Target IKU/IKK Tahun 2026 Bakesbangpol

No.	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Tahun 2026
(1)	(2)	(3)	(4)
Indikator Kinerja Utama			
1	Jumlah Kejadian Konflik Sosial	Kasus	0
2	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6.62
Indikator Kinerja Kunci			
1	Nilai SAKIP	Nilai	73.50
2	Cakupan Kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kecamatan	17
3	Persentase Pendidikan politik pada kader partai politik	%	37.50
4	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	54.00
5	Cakupan kecamatan yang mengikuti pembinaan ketahanan ekonomi. sosial dan budaya	Kecamatan	17
6	Persentase kecamatan yang dilakukan pemantauan wilayah	%	100

Tabel 4.3
Program, Kegiatan, dan Subkegitan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke Kabupaten/Kota 2025-2029

Program Delegasi	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
1. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi. pendidikan dan pelatihan	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan • Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan • Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	• Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) • Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara • Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
2. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya • Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	• Kemah kebangsaan • Fasilitasi kegiatan FKUB • Fasilitasi kegiatan FPBI / FPK

Sumber : Bakesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. tetapi juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja. Melalui Renja ini. target program yang direncanakan dan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat dievaluasi secara komprehensif. sehingga memberikan umpan balik berharga bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang.

Penyusunan kegiatan. indikator. target kinerja. dan pagu anggaran yang masih bersifat indikatif merupakan jabaran Renja yang mengacu pada Renstra sebagai penjabaran RPD Kabupaten Karanganyar. Dokumen ini juga telah diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029. kebutuhan anggaran berdasarkan standarisasi harga terbaru. serta kebijakan pemerintah pusat yang harus segera diimplementasikan di daerah.

Renja yang telah disusun ini tidak sekadar menjadi komitmen tertulis. melainkan harus menjadi pedoman kerja bagi seluruh unsur di lingkungan Bakesbangpol. Implementasinya penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas. memperkuat sinergi internal dalam menjalankan fungsi kesatuan bangsa dan politik. serta menjadi dasar bagi penyusunan Renja pada tahap berikutnya. Dengan optimalisasi seluruh sumber daya organisasi. Renja ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol secara lebih efektif dan terarah.

Akhirnya. melalui Renja ini diharapkan seluruh aparatur dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan berorientasi pada hasil. sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan output. outcome. dan dampak yang maksimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO